Meskipun kepemimpinan itu universal, tetapi kepemimpinan politik berbeda dengan jenis kepemimpinan lain, seperti kepemimpinan bisnis, birokrasi, atau militer. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam buku yang menarik untuk dibaca ini, pemimpin politik berjuang untuk mewujudkan cita-cita politik

– **AKBAR TANDJUNG**, Politisi Senior/Tokoh Nasional

Sebuah buku langka yang memadukan kekayaan khasanah teoritis dan panduan praktis tentang seni memimpin

— **YUDI LATIF**, Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)

Bung Alfan berhasil merajut berbagai pandangan dan pemikiran tentang kepemimpinan politik dalam bahasa yang lugas dan mudah dicerna, serta format kepenulisan yang sungguh menarik untuk dibaca

– **SYAMSUDDIN HARIS**, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

MALFAN ALFIAN

WAWASAN KEPEMIMPINAN POLITIK

PERBINCANGAN KEPEMIMPINAN DI RANAH KEKUASAAN

EDISI BARU

UNIVERSITAS NASIONAL

WAWASAN KEPEMIMPINAN POLITIK

Kutipan Pasal 72
UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

WAWASAN KEPEMIMPINAN POLITIK

Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan

M ALFAN ALFIAN

PENERBIT PENJURU ILMU

WAWASAN KEPEMIMPINAN POLITIK
PERBINCANGAN KEPEMIMPINAN
DI RANAH KEKUASAAN (EDISI BARU)

Oleh: M Alfan Alfian

Desain sampul dan Isi: Tim *design* Penjuru Ilmu
Sumber foto Sampul: rullyaguscandra.wordpress.com

Cetakan 1, 2018

Diterbitkan oleh PENERBIT PENJURU ILMU
Redaksi : Jl Matahari 76, Jatibening Permai,
Pondok Gede, Bekasi 17412
Email: penjuruilmu@yahoo.com dan penjuruilmu@gmail.com
Twitter: @penjuruilmu

ISBN : 978-602-0967-32-5

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

Pengantar Edisi Baru

YANG ANDA PEGANG ini Edisi Baru dari sebelumnya. Tidak ada perubahan substansi signifikan, kecuali tambahan satu Bab terakhir guna mengakomodasi perkembangan informasi dan ulasan isu-isu krusial tertentu, penambahan Epilog 2 dan beberapa kutipan. Kebaruannya ada di situ. Edisi sebelumnya telah memperolah sambutan antusias berbagai kalangan, banyak didiskusikan dan diulas di berbagai lembaga yang relevan (partai politik, ormas/LSM [asosiasi yang terkait dengan penentu kebijakan politik], sekolah [SMA], kampus, kursus [sekolah] kepemimpinan politik, hingga perusahaan swasta) terutama di Jakarta, bahkan juga di daerah-daerah. Kepada semua pihak saya mengucapkan terimakasih.

Buku ini bacaan wajib peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) *Akbar Tandjung Institute* dan diskusi-diskusi kepemimpinan politik di lingkungan Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Beberapa kalangan [praktisi] menyarankan agar buku ini dipertipis agar praktis. Maka, saya memenuhinya dengan memecah menjadi tiga (buku yang terbit tersendiri). Namun, sebagai induk atau babonnya, buku ini tetap tebal, justru untuk menunjukkan kesungguhan penulisnya. Saya berharap pembaca punya energi keseriusan yang besar dalam menyerap buku ini sebagai referensi. Semoga Edisi Baru kali ini mampu menambah wawasan, memicu inspirasi konstruktif dalam berdemokrasi.

Jakarta, 1 September 2017

M ALFAN ALFIAN

Kutipan Komentar

BUKU INI mencoba membuka cakrawala kepemimpinan politik yang didasari asumsi utama bahwa politik itu pengabdian, bukan profesi, dan itulah sejatinya seorang pemimpin politik — **AKBAR TANDJUNG**, *Politisi Senior Partai Golkar.*

BUKU KARYA Bung Alfan Alfian ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang tengah mengalami krisis kepemimpinan dewasa ini. Bung Alfan berhasil merajut berbagai pandangan dan pemikiran tentang kepemimpinan politik ke dalam bahasa yang lugas dan mudah dicerna, serta format penulisan yang sungguh menarik untuk dibaca — **SYAMSUDDIN HARIS**, *Peneliti Senior LIPI*.

BUKU INI "himpunan" kearifan dan keahlian para pemimpin mewujudkan visi dan semangat kepemimpinan mereka, diberi "arah" dan makna oleh penulisnya, intelektual muda yang gigih mengabdi dunia pemikiran — **MOHAMAD SOBARY**, *Budayawan*.

SEJARAH PERJUANGAN Nabi Muhammad SAW menegaskan, seorang pemimpin harus mampu memberikan *uswatun hasanah*. Istilah ini sering diartikan 'suri tauladan yang baik'. Sebenarnya makna *uswatun hasanah* lebih dalam dari itu, yakni membangkitkan inspirasi. Pemimpin harus mampu mendatangkan inspirasi bagi rakyatnya untuk melakukan sesuatu demi kemaslahatan dirinya, negara, dan bangsa. Persoalan kepemimpinan di Indonesia sangat terkait dengan Inspirasi. Untuk menyelesaikan persoalan berbangsa dan bernegara, diperlukan pemimpin yang mampu "menyihir" rakyatnya dengan inspirasi, sehingga mereka tergerak secara sinergis bersama pemimpinnya memerangi kebodohan dan kemiskinan, mengatasi dekadensi moral, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Poin penting dari kehadiran buku ini adalah mengingatkan kita semua bahwa memimpin berarti membangkitkan inspirasi — **LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN**, *Politisi PPP, Menteri Agama RI*.

BUKU INI kreatif karena mampu menyajikan sistematika penyajian alternatif. Hasilnya: persoalan pelik menjadi mudah dicerna — **FACHRY ALI**, *Peneliti Senior LSPEU Indonesia*.

RISALAH POLITIK yang serius, mendalam dan menawarkan perspektif, tetapi sekaligus ringan, renyah, serta gampang dicerna. Layak dibaca oleh para pemimpin dan calon-calon pemimpin dan para peminat isu kepemimpinan — **ANAS URBANINGRUM**, *Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI)*.

BUKU INI meretas kajian mulai dar sisi teoritis sampai sisi praktis. Kaya dengan ilus-trasi empiris sehingga kajian dalam buku ini dekat dengan realitas di Indonesia. Perlu dibaca oleh peminat, pengamat, dan pelaku politik di Indonesia — **ANIES BASWEDAN**, *Mantan Rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI*.

BUKU INI, bukan yang pertama bagi penulis yang produktif mengejawantahkan buah pikiran kritisnya mencermati realitas sosial, namun terasa tertatih kita membacanya, seolah kita turut menulisnya. Alfan berhasil membawa pembaca terlibat dalam wacana pikirannya — **YUDDY CHRISNANDI**, *Politisi Partai HANURA, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI*.

BUKU INI detil dan tidak menjanjikan secara berlebihan. Bentuk tanya jawab sangatlah tepat untuk topik yang sangat lentur ini, dan mudah untuk dicerna bagi para pembaca awam. Kutipan-kutipan pemimpin-pemimpin dunia sangat melengkapi wawasan pembaca dan memberi sudut pandang yang lebih lengkap. Penulis dengan tajam menggambarkan kharakteristik para pemimpin yang sudah "jadi" dan mencoba menarik benang merahnya. Hal mana sangat menarik untuk diketahui oleh mereka yang berminat memperluas pengetahuan mengenai kepemimpinan. Walau buku ini ditulis sangat komprehensif, namun membuka ruang untuk dibahas lebih lanjut seperti relasi pemimpin-pemimpin yang dikutip, terhadap waktu, ruang dan kondisi umum yang ada. Akan sangat menarik apabila penulis membahas proses menjadi pemimpin, dari pemimpin-pemimpin yang dikutip. Apakah menjadi pemimpin itu

mutlak dapat dipelajari ataukah bakat (*in-born*)? Apakah menjadi pemimpin adalah suatu "seni"? Apakah seorang pemimpin harus dibentuk dari bawah, tengah atau atas? Masih banyak lagi yang dapat dibahas akibat gelitikan-gelitikan yang terdapat dalam buku ini. BRAVO Bung Alfian! — **FRANCISCUS WELIRANG**, *Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk*.

Politik, kekuasaan, dan kepemimpinan adalah tiga tema utama yang memenuhi buku ini. Penuilisnya dengan enak meramunya sebagai sebuah pembicaraan akademik yang menawarkan dua hal sekaligus: sains dan seni memimpin — **NURUL ARIFIN**, *Politisi Partai Golkar.*

PEMIMPIN DARI kaum muda sedang menjadi semangat zaman kita. Jika Anda merasa dipanggil sejarah untuk menjadi pemimpin, maka Anda wajib membaca buku ini. Buku ini kian meyakinkan saya bahwa kualitas kepemimpinan bukan hanya tertanam pada *level* individu yan bersangkutan, namun juga dari kualitas persepsi orang banyak atas diri sang pemimpin. Sesungguhnyalah idealisme dan mimpi besar seorang pemimpin harus bisa didaratkan dalam realitas, karena rakyat tidak puas sekedar mengunyah ide, melainkan mengharap kebijakan (*policy*) dan kebajikan (*virtue*) dari sang pemimpin. Meskipun harapan pada kaum muda untuk memimpin banyak digantungkan, namun harus disadari bahwa entitas kaum muda, meskipun sanggp membangun imajinasi yang membutuhkan landasan intelektual, bukanlah merupakan entitas idelogis. Karenanya, apa yang kita butuhkan adalah semacam *intellectual leadership and determination*. Dan buku ini bisa memandu Anda untuk meraih kepemimpinan intelektual itu, sementara determinasi Anda hanya akan diperoleh dalam praksis kepemimpinan di dunia nyata. Selamat datang para calon pemimpin, dan selamat menikmati buku ini — **BUDIMAN SUDJATMIKO**, *Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).*

SEBUAH BUKU langka yang memadukan kekayaan khasanah teoritis dan panduan praktis tentang seni memimpin. Menjadi manual wajib bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin transformatif — **YUDI LATIF**, *Penulis buku Negara Paripurna dan Revolusi Pancasila dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-Pancasila).*

MEMBACA BUKU yang lengkap ini, kita seperti menemukan teori politik dan kepemimpinan bukan lagi sekedar gagasan tapi aksi politik itu sendiri. Sebuah buku yang perlu mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi, politisi, dan praktisi — **JALESWARI PRAMODHAWARDANI**, *Peneliti Masalah-masalah Pertahanan dan Militer*.

KAJIAN MENGENAI kepemimpinan politik selalu menarik minat serta mengundang perhatian banyak orang, karena terkait dengan imajinasi tentang kekuasaan. Kepemimpinan politik dan kekuasaan adalah tema berat dan serius, namun Alfan Alfian, kolumnis produktif, pengarang prolifik mampu mengulas kedua tema tersebut secara ringan dan santai. Buku ini memang tidak dimaksudkan untuk me-nyuguhkan pembahasan secara mendalam dan reflektif. Ulasannya dibuat populer dengan merujuk pada sumber-sumber populer pula, cukup membantu siapa saja yang ingin memperoleh pengetahuan awal dan elementer mengenai hubungan antara kepemimpinan dan dinamika politik kekuasaan — **AMICH ALHUMAMI**, *Doktor Antropologi lulusan University of Sussex, United Kingdom*

SUATU KETIKA sang ahli perang legendaris kharismatik Tiongkok, Sun Tzu berujar, "*Know the enemy and know yourself; in a hundred battles you will never peril*." Kristalisasi nilai-nilai itulah yang sepertinya diyakini oleh Alfan dan ditorehkan dalam buku ini. Melalui beragam tokoh sipil, politik dan bisnis yang digambarkan secara singkat, padat, jelas dan memikat membuat setiap orang terfokus pada sebuah entitas utama dan pertama dalam memberdayakan dan memberhasilkan sebuah tujuan: gaya kepemimpinan. Bacalah dengan hati dan kepala dingin, niscaya, untaian kata dalam buku ini akan memperkaya tangki kognitif sekaligus afektif dan psikomotorik kita untuk segera berbuat demi kejayaan bangsa — **PONIJAN LIAW**, *Penulis buku-buku bestsellers Komunikasi dan Zen*

BUKU INI memperlihatkan bahwa Alfan Alfian adalah penulis yang tekun, sekaligus jeli. Tanpa mengurangi kadar ilmiah, *toh* buku dengan rujukan yang lumayan melelahkan ini, tetap mudah dicerna. Tidak terjebak pada teori, buku ini seperti petuah untuk menjadi pemimpin. Cukup dialogis. Mengajak kita belajar dari pengalaman para pemimpin besar — **KARIM RASLAN**, *Kolumnis asal Malaysia.*

BUKU INI terobosan yang sangat bernilai bagi khasanah kepemimpinan politik di Indonesia. Ketika mayoritas politisi tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kokoh, saat sebagian besar pemimpin politik tidak memahami filosofi kepemimpinan, buku ini menemuan relevansinya. Melalui buku ini Bung Alfan menawarkan perspektif evaluatif mengenai perjalanan kepemimpinan bangsa. Bagi pemimpin masa kini, buku ini harus dijadikan rujukan utama untuk menjadi pemimpin panutan yang dicintai rakyat. Bagi pemimpin masa depan, buku ini adalah sumber inspirasi yang sangat memukau — **BIMA ARYA SUGIARTO**, *Politisi Partai Amanat Nasonal (PAN), Walikota Bogor.*

DARI SEBUAH kota metropolitan yang bising, ramai, hiruk-pikuk dan tidak membetahkan seperti Jakarta, Alfan mampu menulis buku bermutu tentang politik dan kekuasaan. Buku ini bagus sekali menjadi panduan politik, pengetahuan atau sekadar referensi bagi siapa saja yang mau jadi politikus atau sekadar pengamat politik dan pencermat perilaku politikus. Bagi wartawan politik pun, buku ini memberi manfaat besar. Karena, konsep, terminologi, peristiwa politik dan berbagai pemikiran politik dari banyak pakar dan skolar dari seluruh belahan dunia, tersaji "lengkap" di sini — **RAMADHAN POHAN**, *Politisi Partai Demokrat*.

BUKU INI berisi panduan dan referensi bagi siapa saja yang ingin menjadi pemimpin politik. Dengan metode dialogis, Alfan Alfian mencoba menjelaskan tentang kepemimpinan politik dengan bahasa yang ringan dan berbobot. Buku ini akan menjadi oase di tengah-tengah krisis kepemimpinan saat ini — **LILI ROMLI**, *Peneliti, Dosen Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional, Jakarta.*

SEBUAH KARYA yang menggambarkan keluasan dan kedalaman pengetahuan pe-nulisnya; sebuah rangkuman penjelajahan penulis terhadap filosofi dan praktek kepemimpinan (politik) yang dibaca dengan ringan dan dijamin tidak membuat pembaca berkerut kening. Mengapa disebut penjelajahan? Sebab penulis mampu menghidupkan ruh kepemimpinan dalam berbagai konteks; filsafat, sosiologi, sejarah, perilaku organisasi, *change management* dan berbagai praktek nyata dalam konteks internasional, nasional dan tokoh-tokoh yang demikian dekat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa sekaligus warga dunia. Buku ini disarankan untuk dibaca oleh para calon-calon anggota legislatif dan mereka yang

sedang mendaki kekuasan eksekutif serta semua peminat kepemimpinan agar mampu menjawab pertanyaan penting dalam kehidupan seseorang; "mengapa dan untuk apa saya berkuasa? Dan, bagaimana jalan menuju kekuasan untuk tujuan meninggalkan jejak kemuliaan hidup"? Karya ini akan menjadi sumbangan bernilai penulis bagi proses lahirnya para pemimpin di Republik ini yang masuk ke jalan menuju kekuasaan karena terpanggil memperbaiki bangsanya karena mereka ingin selalu memberi dan bermanfaat bagi orang-orang yang dipimpinnya, bukan untuk mendapat sesuatu dari kekuasaan yang diperolehnya — **AHMAD MUKHLIS YUSUF**, *mantan President Director/CEO Perum LKBN ANTARA*.

DI TENGAH kontestasi politik yang pragmatis, buku ini memperingatkan kita bahwa pokok masalah soal kepemimpinan politik tak hanya selesai dalam politik elektoral. Diskusi kepemimpinan politik di Indonesia adalah bagian dari pencarian dan pergulatan tentang bangsa (*nation*) Indonesia — **WAHYU SUSILO**, *Aktivis LSM Migrant Care, Jakarta.*

BUKU INI sangat penting untuk dijadikan referensi para politisi, calon politisi, para penggiat organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, para mahasiswa, serta para peminat masalah kepemimpinan politik. Buku ini sangat mudah dicerna, karena dituls dalam bentuk tanya jawab. Bahasa yang digunakan juga ringan, namun cakupannya sangat luas. Dengan demikian buku ini mengisi kekosongan literatur bidang kepemimpinan, khususnya kepemimpinan politik — **PUJI WAHONO**, Direktur Eksektif *The Akbar Tandjung Institute*, Jakarta

DI SAAT politik kembali mebjadi "panglima", kehadiran buku ini memberi pencerahan bahwa pemimpin politik bukan hanya perlu berbekal popularitas dan elektabilitas, tetapi juga karakter dan kemampuan memimpin. Pemimpin politik bukanlah pemimpi pamrih, melainkan sebuah kepemimpinan pengabdian. Maka apa yang ditulis dengan mengalir dan nikmat dibaca ini adalah lentera bagi masyarakat memilih pemimpin politiknya — **ELPRISDAT**, *Praktisi Media Massa.*

Dari segi ide pembuatan buku pemimpin politik ini, sangat cerdas dan orisonal. Dari segi isi yang menampilkan sejumlahkalimat penting dari tokoh dan pemimpin dunia sangat kreatif. Penyajian dalam bentuk tanya jawab juga menarik, merangsang dan memudahkan. Selamat dan sukses menjadi kolomnis dan penulis muda yang hebat — **EFFENDY CHOIRIE**, *Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem)*.

DALAM BUKU ini, penulis berhasil menjelajah cakrawala yang sangat luas. Sehingga menjadikan buku ini sangat kaya informasi dan ada perspektif: seharusnya bagaimana menjadi pemimpin politik dalam konteks Indonesia. Penulisnya sendiri adalah selain seorang akademisi juga penulis kolom. Kedua predikat yang melekat pada dirinya ini terpantul dalam buku ini, yaitu ia percaya kepada metodologi, tapi ia ketengahkan dalam gaya seorang kolomnis: ringan, renyah tapi ada rujukan. Buku ini cocok untuk semua kalangan, yaitu mulai mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan politik hingga sarjana politik. Saya sangat menganjurkan kepada mahasiswa dan wartawan untuk membaca buku ini. Lebih-lebih kepada mereka yang berminat atau sudah terlibat dalam dunia politik — **T. TAUFIQULHADI**, *Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem).*

BUKU INI merupakan himpunan cakrawala yang penting bagi siapa saja, khususnya yang berkecimpung dalam dunia politik. Dengan kalimat-kalimat yang mudah di-

pahami, penulisnya berupaya menunjukkan apa hakikat kepemimpinan politik, dan sejumah pertanyaan lain yang patut direnungkan, dipikirkan dan didiskusikan — **MUHLIS ALI**, *Aktivis Jaringan Indonesia (JARI), Jakarta.*

BUKU INI begitu mencerdaskan dan mencerahkan, sehingga pantas dan bahkan wajib dibaca oleh siapa pun, terlebih mereka yang terbiasa dan terlibat langsung di ranah politik praktis. Buku ini mengajarkan sesuatu "yang seharusnya" dilakukan oleh pimpinan politik (negarawan atau partisan partai politik)." Keterlaluan, apabila ada pimpinan politik yang sudah tuntas membaca buku ini, tapi perilakunya masih jauh dari harapan masyarakat. Keterlaluan, apabila ada aktifis partai politik yang sudah tuntas membaca buku ini, tapi masih mau diperbudak oleh kekuasaan — **MA'MUN MUROD AL-BARBASY**, *Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta*

PEMIMPIN ADALAH orang yang berani mengambil resiko terukur untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulianya. Tujuan-tujuan mulia seorang pemimpin politik adalah menciptakan hal-hal terbaik untuk masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Alfan Alfian meracik suguhan yang sangat "renyah dan nikmat" dibaca dalam buku ini. Sebuah buku yang tidak akan dilewatkan oleh seorang pemimpin, orang yang berminat untuk memimpin, bahkan orang awam dalam dunia politik. Karena buku ini adalah pencerahan yang menginspirasi tentang langkah perubahan menuju kebaikan. Minuman yang menyegarkan untuk menghilangkan kedahagaan bangsa Indonesia terhadap makna sebuah kepemimpinan — **CAHYANA PUTHUT WIJANARKA**, *Director of People Develop People Consulting*, Jakarta

BUKU INI menyumbangkan khasanah baru dalam referensi buku-buku politik. Tanpa bermaksud menyanjung, kelebihan buku ini, di antaranya: *pertama*, keluasan cakrawala pemikiran politik dari tokoh dan pakar politik penjuru dunia menjadi referensi yang menarik untuk dibaca. *Kedua*, Alfan sebenarnya menyajikan pergulatan ideologi politik dari para pemimpin politik yang tercetus dalam pemikiran dan tindakan politiknya. Khasanah intelektual ini tentunya ini akan menjadi pelajaran politik berharga bagi kehidupan demokrasi dan masa depan perpolitikan Indonesia. *Ketiga*, gaya penulisan buku ini cerminan dari sikapnya yang jujur, sederhana dan suka humor sehingga Alfan telah berhasil membebaskan pemberat satu kilogram di kelopak mata pembaca. Rasanya, berapapun tebal halaman buku ini tidak akan membuat pembaca jenuh bersama Alfan di buku ini. Selamat berkarya terus Cak, mewarnai khasanah intelektualitas di Indonesia! — **VIVA YOGA MAULADI**, *Politisi Partai Amanat Nasonal (PAN).*

INDONESIA MEMANG punya banyak daftar masalah. Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Dibutuhkan keberanian menentukan prioritas. Itulah fungsi pemimpin dan kepemimpinan yang imajinatif dalam masa konsolidasi demokrasi dan pemulihan ekonomi. Kawan saya, Alfan Alfian, menulis buku ini secara baik dan layak dibaca — **M. ICHSAN LOULEMBAH**, *Anggota DPD RI (2004-2009).*

SUMBANGAN PENTING dan berharga buku ini adalah dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dan acuan dalam mengatasi krisis kepemimpinan yang tengah dihadapi Indonesia. Masyarakat dapat menggunakan buku ini sebagai panduan pokok bagi beragam upaya dalam menyiapkan, membina, mendayagunakan, dan mengembangkan calon pemimpin dan para pemimpin yang amanah, disiplin, kreatif, visioner, dan berani dalam memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, kemaslahatan, dan kemajuan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan membaca buku ini, semua

pembaca dibawa "bertamasya" mengarungi luasnya wawasan, bersihnya hati nurani, beningnya jiwa, jernihnya pikiran, menginspirasi imajinasi, beragam ide segar, serta pemahaman yang komprehensif tentang salah satu kualitas kemanusiaan terpenting yang dimiliki manusia yaitu kepemimpinan yang telah dipraktekan para pemimpin. Karena itu, buku ini dapat menantang dan memotivasi para pembaca dalam proses penyadaran sekaligus pemberdayaan untuk menjadi pemimpin. Insya Allah buku ini akan menjadi salah satu sarana penting yang dapat membawa Indonesia keluar dari krisis kepemimpinan — **BERLIANA KARTAKUSUMAH**, *Politisi Partai HANURA.*

JIKA MENJADI pemimpin politik merupakan suatu ikhtiar untuk memandu kehidupan, maka buku ini memfasilitasi nyaris seluruh aspek demi tercapainya misi suci tersebut. Selebihnya, buku ini datang pada momentum yang tepat ketika "pemimpin politik" hampir punah di negeri ini — **AHMAD ERANI YUSTIKA**, *Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang*.

Saya sering berbisik ke diri sendiri: Kenapa "kebusukan politik" terasa lebih menarik ketimbang "keluhuran politik"? Kenapa pula "ilmu politik" tampak kerap tak berdaya di hadapan "gosip politik"? Saya bersyukur buku ini sepertinya telah "menguping" bisik-bisik saya itu dan berupaya menanggapinya bukan secara bisik-bisik — **BINHAD NURROHMAT**, *Penyair*.

INGIN MENJADI pemimpin politik? Baca Alfan Alfian. Ia meramu gagasan, praktik dan kultur dengan racikan bermutu seorang ilmuwan politik. Idenya, pemimpin adalah paduan cerdas komitmen, integritas, kompetensi dan keberpihakan. Anda bukan politisi dan aktivis politik berkualitas pemimpin bila belum membaca buku ini hingga halaman terakhir — **FADJROEL RACHMAN**, *Aktivis Pedoman Indonesia, "Capres Independen" Pilpres 2009*.

BUKU INI sangat berharga dan perlu dibaca bagi mereka yang ingin menjadi politisi yang baik, yaitu politisi yang memiliki sifat kenegarawanan — **SULASTOMO**, *Koordinator Gerakan Jalan Lurus (GJL), Jakarta*.

WUJUDKAN CITA-CITA Anda menjadi pemimpin politik. Kualitas dan kapasitas kepemimpinan politik Anda niscaya akan mengalami pengayaan luar biasa dengan membaca buku ini. Pembahasannya yang mencakup banyak bidang kepemimpinan politik yang mengalir dan mudah dicerna sejatinya akan memberikan inspirasi berharga bagi Anda selaku pemimpin politik. Walaupun dikemas dengan bahasa populer menyertakan contoh kasus, kisah tokoh, dan *local wisdom* buku ini tetap menyajikan uraian konsep secara proporsional. Membaca buku ini kita serasa sedang mengikuti mata kuliah kepemimpinan politik tingkat mahir memadukan antara teori dan praksis — **IBNU HAMAD**, *Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.*

SALAH SATU pesan penting buku ini: pemimpin yang sesungguhnya haruslah teruji, baik melalui pujian dan sanjungan maupun hinaan dan penistaan — **BAHARUDDIN ARITONANG**, *Anggota BPK (2004-2009)*.

BUKU INI harus menjadi referensi penting bagi mata kuliah kepemimpinan politik, bukan karea pendekatannya yang berbeda tetapi juga sangat komprehensif — **ENDANG SULASTRI**, *Anggota KPU (2007-2012), Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.*

STUDI TERHADAP kepemimpinan dengan segala aspek dan dimensinya tetaplah

penting dan aktual. Pasalnya, pemimpin, apalagi pemimpin yang *inspiring* dan *provoking*, selalu menentukan kecenderungan komunitas atau kelompoknya ke mana hendak menuju. Buku ini sangat membantu kita memahami penting dan strategisnya sebuah kepemimpinan —**HAJRIYANTO Y. THOHARI**, *Wakil Ketua MPR (2009-2014).*

BUKU INI sangat penting untuk dibaca oleh kalangan politisi, akademisi dan siapapun yang memiliki minat pada soal kepemimpinan karena isinya yang cukup kaya dan bisa dijadikan sebagai sebuah *handbook* (buku pegangan) kepemimpinan politik yang disampaikan dengan metode tanya jawab sehingga ide-idenya mengalir dan mudah dicerna, seakan-akan, kita berdialog dengan diri kita sendiri — **RULLY CHAIRUL AZWAR**, *Politisi Senior Partai Golkar, Ketua Lembaga Pengkajian MPR.*

BUKU INI sebuah karya inovatif. Ditulis oleh seorang akademisi, yang juga seorang kolumnis. Penulis mampu menjembatani pemahaman teori politik normatif ke dalam realitas politik kekuasaan. Karenanya, susbtansi buku ini perlu dimaknai secara mendalam. tidak saja relevan, tetapi sangat inspiratif, membuka mata kita tentang keterbatasan sumber daya pemimpin politik. Termasuk di dalamnya, soal krisis kepemimpinan politik di negeri ini — **TB MASSA DJAFAR**, *Ketua Program Doktoral Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional.*

INDONESIA SAAT ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mendorong pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter sekaligus mampu memberikan jaminan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, buku ini menjadi penting dan strategis untuk dibaca oleh mereka yang peduli dengan masa depan bangsa, khususnya generasi muda yang akan ikut menentukan arah masa depan bangsa — **VALINA SINGKA SUBEKTI**, *Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017.*

KETIKA RAKYAT, bangsa dan negeri ber-Pancasila ini bertahun-tahun mengalami krisis kemiskinan multidimensi, penyebabnya adalah kekuasaan berada di tangan bukan pemimpin, tetapi penguasa tunamakna kepemimpinan. Kuasa tanpa moral dan defisit keteladanan. Semoga buku ini mampu memberi orientasi profetik kepemimpinan yang membebaskan bangsa dari salah pilih pemimpin politik — **BUSYRO MUQODDAS**, *Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah.*

KEPEMIMPINAN POLITIK itu ibarat nakhoda kapal. Dia tak hanya mampu mengendalikan kapal, tetapi juga harus mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam menghadapi gempuran ombak, dan dalam saat-saat tertentu dia harus bisa men-carikan jalan keselamatan bagi semua awak kapal dan penumpangnya. Itu artinya bahwa kepemimpinan politik memerlukan kapasitas, integritas, kapabilitas dan kompetensi yang cukup tinggi. Syarat itu harus ada dan menyatu dalam kesatuan. Buku ini sangat menarik untuk dijadikan referensi bagi kalangan akademisi, politisi dan mereka yang peduli dengan masa depan bangsa dan negara — **AHMAD ROFIQ**, *Sekjen DPP Partai Perindo.*

DENGAN BUKU ini penulis menunjukkan ketelitian dan kedalaman wawasannya mengenai diskursus politik dan kepemimpinan. Bahasanya pun "renyah" gampang "dikunyah". Perlu dibaca oleh para akademisi dan praktisi politik — **RAJA JULI ANTONI**, *PhD dari School of Political Science and International Studies, the University of Queensland/Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).*

BUKU INI menantang untuk dibaca oleh siapa saja justru karena mengetengahkan tema yang mendasar sekaligus menarik sepanjang masa: kepemimpinan dan kekuasaan. Penyajiannya yang mengalir dengan gaya bahasa yang ringan dan penuh ilustrasi menjadikan kelebihannya — **MARGARITO KAMIS**, *Pakar Hukum Tatanegara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate.*

BUKU INI harus dibaca bukan hanya oleh politisi dan praktisi politik, pegiat kepemiluan dan demokrasi juga penting dan perlu membaca. Ulasan tentang kepemimpinan politik yang berbobot berat dibahas dalam bahasa populer dan ringan, membuat mudah dicerna dan dipahami oleh siapa saja. Bicara teori sekaligus mengulas praktik kepemimpinan politik empirik secara komprehensif. Sangat mencerahkan — **TITI ANGGRAINI**, *Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).*

BUKU DR. M ALFAN Alfian tentang kepemimpinan ini sangat penting sebagai acuan bagi kalangan akademisi dan politisi. Karena, buku ini menyajikan pemikiran-pemikiran tentang kepemimpinan, baik pendekatan umum maupun juga Keislaman. Selain itu, buku ini juga mengungkapkan konsep-konsep kepemimpinan berdasarkan pengamatan, pemahaman dan interaksi penulisnya dengan tokoh-tokoh dan kalangan intelektual Indonesia. Kepada penulisnya, saya sampaikan *parabens*, *congratulation* atau selamat atas terbitnya buku ini — **JULIO TOMAS PINTO**, *Menteri Muda Pertahanan Timor Leste (2007-2015).*

PUBLIK MULAI bosan dengan politik, karena perbicangan politik hanya berputar disekitar kekuasaan. Realitas politik juga hanya menampilkan perebutan kekuasaan. Terkadang sebuah buku politik menambah jenuh dan hanya menambah sesak display toko buku. Politik sejatinya cara untuk mencapai kebahagiaan, Konsep Filsuf Raja-nya Plato mengedepankan pertama kali adalah eksistensi Filsuf baru kemudian menjadi Raja. Harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu baru memegang kekuasaan. Karena, tanpa pengetahuan, maka kekuasaan hanya akan memporak-porandakan tatana dunia. Wawasan kepemimpinan politik yang dimiliki seorang filsuf tentunya akan memudahkan cara untuk membuat banyak orang bahagia. Buku politik tentunya juga harus mengedepankan instrumen. Buku sahabat saya Alfan Alfian ternyata mencoba untuk menjadi buku yang asyik dan mengalir. Kita diajak berdialog dengan Napoleon, Camus, Nixon termasuk juga tokoh lokal seperti Nurcholish Madjid dan banyak lagi lainnya. Uniknya, Alfan menampilkan banyak dialog dengan box percakapan yang menjadikan buku ini tidak semata-mata buku *text book*. Foto dan Gambar memberi kesempatan kepada pembaca untuk merenung sejenak. Publik diharapkan tidak bosan dengan membaca buku ini. Bagi politisi, dengan membaca dan mengamalkan buku ini diharapkan dapat menjadi Filsuf sebelum kemudian menjadi Raja. Maka, jangan menunggu dan baru membaca buku ini setelah menjadi Presiden, Walikota, Bupati atau jabatan politik lainnya — **RAMDANSYAH**, *Sekjen Partai IDAMAN*.

FILOSOFI KEPEMIMPINAN *amanah*, *shiddiq*, *fathonah*, *marhamah*, *Istiqomah* dan optimistik, beranjak dari kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemimpin politik, sebagai suatu konsep kepemimpinan politik yang visioner, realistis, cerdas, bijak, tegas, rendah hati dan berakar di tengah-tengah masyarakat bangsanya, dengan dilandasi oleh pengalaman nilai-nilai budaya yang religius dan patriotis. Pemimpin politik membutuhkan wawasan *leadership* dalam

menjalankan kepemimpinannya yang menurut ajaran Islam harus mendasarkan pada "kepemimpinan yang *amanat*, *shiddiq*, *fathonah*, *marhamah*, *istiqomah* dan optimistik dalam melayani rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan maju". Dalam buku ini dipaparkan dengan gaya bahasa yang populer, lugas, dinamis, dan mudah dipahami, dengan menampilkan visi dan wawasan tokoh-tokoh pemimpin politik dunia yang dinilai telah berhasil mengangkat harkat, martabat dan marwah masyarakat bangsanya pada era kepemimpinannya sebagai pemimpin politik — **MOHAMAD ALY YAHYA**, *Ketua Umum DPP Satkar Ulama (2012-2017), Politisi Senior Partai Golkar, Anggota DPR-RI (1997-2014)*.

TEMA BUKU ini berat namun disajikan dengan ringan. Isu kepemimpinan dan kekua-saan diulas secara komprehensif dengan referensi yang beragam. Selain itu, diselingi kutipan para tokoh politik dunia yang menggambarkan pembahasan. Saya senang sekali, buku semacam ini bisa hadir di tengah kita untuk memperkaya wacana de-mokrasi dan politik — **CHAMAD HOJIN**, *Redaktur Koran SINDO*.

ADA BANYAK cara jadi sebanyak cara untuk memimpin. pemimpin tak hadir dari satu pintu dan untuk satu gaya. Buku ini membantu kita untuk percaya diri menjadi pemimpin dengan menemukan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan karakter alamiah kita, menjelaskan bahkan kehebatan para pemimpin karena mereka tetap menjadi diri sendiri, lalu mengubah wajah dunia — **RAY RANGKUTI**, *Aktivis, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)*.

KETIKA DIMINTA oleh Mas Alfan untuk memberikan komentar mengenai bukunya, terus terang saya agak lama membuatnya, karena sesungguhnya politik bukanlah wilayah saya, tetapi ketika saya membaca secara detil isi bukunya, konsep kepemimpinan politik yang rumit dapat dijelaskan dengan cerdas dan mampu membuat awam seperti saya tak ingin beranjak untuk melewatkan kata demi kata dalam buku ini hingga selesai. Dalam salah satu bab, Mas Alfan menulis tentang konsep kesukarelaan dengan mengutip pendapat Cak Nur, bahwa dalam demokrasi, *setan gundul* pun bisa menjadi pemimpin jika dipilih rakyat, contoh *setan gundul* seperti Hitler yang dipilih menurut saya sangat ekstrim, mengapa tak memilih contoh kekinian yang sangat Indonesia bernama Jokowi si tukang kayu? Jokowi mampu meruntuhkan berbagai teori bahkan meta-teori mengenai kepemimpinan dengan konsep yang lahir dari kesederhanaan pola kepemimpinan biasa biasa saja yang dimilikinya, "*leadership by common sense*". Secara keseluruhan buku ini bagus sekali, ditulis dengan sangat cermat dan cerdas oleh Mas Alfan, sangat layak dibaca oleh siapapun yang ingin menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri — **DYAH KARTIKA RINI DJOEMADI**, *Enterpreneur*, *Relawan Politik*.

TAK JARANG tokoh yang dianggap hebat dan disanjung di kala melawan penguasa yang menindas, tapi justru terhempas setelah ia berhasil merengkuh kekuasaan. Kekuasaan bisa merontokkan orang-orang besar menjadi kerdil. Tapi tak sedikit orang yang awalnya biasa-biasa saja, tapi mampu menggoreskan sejarah besar dan dikenang, karena kesuksesannya saat berkuasa. Kekuasaan bagi banyak orang adalah labirin yang penuh misteri. Ia selalu menggoda untuk diperebutkan, tapi bisa juga sangat menyakitkan. Buku yang ditulis M Alfan Alfian ini merupakan salah satu karya terpenting dalam studi tentang kekuasaan dan kepemimpinan oleh penulis Indonesia saat ini. Melalui pengalaman panjangnya sebagai seorang

aktivis dan penulis yang produktif, Alfan berhasil menampilkan sisi-sisi kekuasaan yang holistik: suatu ramuan kompleks pengetahuan, pengalaman, visi, strategi, sikap mental, dan yang tak kalah pentingnya, etika. Di tengah kemarau panjang hadirnya pemimpin Negarawan di negeri ini, buku ini penting untuk dibaca. — **ZAKI MUBARAK**, *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Peneliti di Institute Paradaban, Jakarta.*

BUKU INI tidak saja memberi wawasan tetapi juga pencerahan kepada pembacanya. Karenya buku ini layak dibaca oleh mereka yang berminat bahkan aktif di dunia politik — **IDRUS MARHAM**, *Politisi Partai Golkar.*

Politik itu tangga kemuliaan, maka ketika seseorang menaiki tangga tersebut akan penuh godaan, rintangan dan cobaan. Tetapi apabila, ia mampu menaiki hingga batas akhir, bukan predikat politisi yang ia peroleh, tetapi predikat Negarawan — **AHMAD ZACKY SIRADJ**, Anggota DPR-RI dari Partai GOLKAR (2014-2019).

MENJADI PENGUASA boleh jadi tidak susah. Lebih susah adalah menjadi pemimpin, salah satu sumber utama perubahan sosial. memimpin adalah menggerakkan perubahan. Tentu menuju ikhwal yang lebih baik. Di tangan pemimpin, politik dan kekuasaan yang hakikatnya adalah hal baik dan mulia, akan menjadi sesuatu yang luhur dan agung. Buku Dr. M Alfan Alfian, sahabat saya yang penuh dedikasi dalam dunia riset dan menulis ini, menawarkan perspektif yang komplit tentang kepemimpinan, politik dan kekuasaan: praktis, teoritis, dan sekaligus reflektif. Bahwa pemimpin pada akhirnya adalah soal menjadi teladan, memberikan inspirasi, serta keberanian mengambil keputusan dengan seluruh risikonya. Buku ini sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih bermakna bagi banyak orang, bangsa dan negara — **M HANIF DHAKIRI**, *Sekjen Ikatan Alumni PMII (IKA-PMII), Menteri Ketenagakerjaan RI.*

BUKU INI mengingatkan kita pada sebuah jurang yang memisahkan konsep 'elite' dengan 'pemimpin'. Sistem sosial dan politik kita bisa terus-menerus memproduksi elite-baru, tapi tidak demikian halnya dengan pemimpin-baru. Bagaimanapun, sebuah masyarakat yang memiliki elite zonder pemimpin pastilah masyarakat yang berkubang dengan krisis. Dan buku ini mencoba memberikan panduan, terutama pada bagaimana menggali hakikat, watak, dan corak kepemimpinan, sehingga setiap orang bisa belajar menjadi pemimpin — **FADLI ZON**, *Wakil Ketua DPR-RI, Presiden Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).*

BUKU INI adalah hasil olah pikir yang tekun dari penulisnya, berdasarkan permenungan teoritik dan pergaulan dengan aktor-aktor politik yang ekstensif sang penulis. Karena itu, buku ini penting untuk dibaca tidak hanya oleh pengkaji ilmu politik di Indonesia, tetapi juga oleh pengkaji ilmu sosial lain dan masyarakat pada umumnya — **PHILIPS J. VERMONTE**, *Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Suidies (CSIS), Jakarta.*

Katakanlah, Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau anugerahkan kekuasaan bagi siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, di tangan-Mu segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Q.S. Ali Imran ayat 26

Kata Pengantar

Mengurai Sosok Pemimpin Politik Ideal

Slamet Effendy Yusuf

PEMIMPIN POLITIK tidaklah sama dengan pemimpin organisasi yang bersifat profit. Kekuasaan politik yang diraih tidak boleh di-dapuk sebagai tujuan. Ia hanyalah sarana untuk mewujudkan tujuan pokok politik sesungguhnya. Di negeri ini, pasca-1998, setiap menjelang pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilu presiden, masyarakat dihadapkan pada berbagai atraksi para elite politik. Keran demokrasi yang terbuka lebar membuat banyak orang aktif berkecimpung di dunia politik, mulai dari profesional, saudagar, swasta, aktivis pemuda dan mahasiswa, akademisi, mantan birokrat, hingga mantan tentara atau polisi.

Sayangnya, politisi-politisi tersebut terkadang tidak mempersoalkan kepatutan. Tidak sedikit di antara politisi kurang memahami bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian. Sejatinya, seorang pemimpin politik memiliki jiwa tersebut. Tampaknya, kegelisahan inilah yang mendorong penulis buku ini, yang *concern* pada pengamatan mengenai situasi politik nasional, mencoba menguraikan benang kusut tentang politik, kekuasaan, dan kepemimpinan ke dalam sebuah karya tulis.

Membaca buku ini akan digiring tanpa pernah merasa tergiring, akan mengerti tanpa pernah merasa digurui, kepada situasi politik di negeri ini. Setiap uraian yang dituliskan sungguh mencerminkan pengetahuan yang

luas dan dalam akan situasi politik nasional serta dinamika yang terjadi di dalamnya. Di antaranya terurai mengapa para pemimpin politik di negeri ini tak juga berhasil menyejahterakan rakyat? Mengapa politisi negeri ini sukar sekali merespons isu-isu yang peduli langsung kepada kepentingan rakyat?

Kepemimpinan politik

BUKU INI mengupas tema kepemimpinan politik, yang memiliki "sisi-sisi pembeda" dalam empat bagian. *Pertama*, bagian pendahuluan membahas motif penulisan buku ini hingga sistematikanya. Meskipun dikemas dalam gaya bahasa yang cenderung dinamis, pada bagian ini terasa kental kekhasan penulis, seorang praktisi-akademisi yang selalu berpijak pada metodologi penulisan.

Keringnya stok literatur tentang kepemimpinan politik secara khusus dibandingkan dengan buku-buku kepemimpinan nonpolitik yang *profit oriented* adalah salah satu hal yang membuat penulis tergerak untuk menulis. Apalagi, di tengah ingar-bingar euforia politik menjelang momentum pesta demokrasi, ada banyak pelaku politik yang alih-alih mampu membawa kekuasaan politik pada tujuan kesejahteraan masyarakat justru sama sekali tidak memahami benar hakikat, makna, dan fungsi politik, kekuasaan, dan juga kepemimpinan politik. Tidak sedikit para pelaku politik yang bermunculan — bak cendawan di musim hujan — saat ini lahir secara instan dan pragmatis. Sungguh situasi yang berbeda dengan beberapa tahun silam, di mana para politisi yang muncul dari suatu proses godokan "kawah candradimuka" yang penuh liku dan tantangan.

Bagian kedua dari buku ini banyak membahas kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai seperangkat tindakan (pemimpin) dan perilaku tertentu yang mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi. Pada bagian ini secara tegas dikatakan, terdapat perbedaan mendasar antara bentuk kepemimpinan dalam bidang bisnis dan bidang politik. Dalam bidang bisnis, kepemimpinan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan keuntungan. Pemimpin merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan pragmatis dan ekonomis, perhitungan untung dan rugi.

Berbeda dengan bidang politik, kepemimpinan diarahkan bukan untuk mencapai tujuan profit. Visi dan strategi dirancang seorang pemimpin politik didasarkan pada tujuan bidang politik itu sendiri. Para pemimpin politik harus terus-menerus berpikir jauh ke depan tentang kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Bukankah itu yang menjadi tujuan politik?

Pemimpin dan manajer

SECARA KHUSUS penulis memfokuskan pembedaan mencolok antara seorang pemimpin dan manajer. Tampaknya, penulis mencoba untuk mengkritik dengan tidak menyebut para pemimpin politik di Indonesia yang dianggapnya lebih dekat dengan tipe manajer politik daripada tipe pemimpin politik. Ia banyak membandingkan para pemimpin di dunia dengan harapan para politisi yang membaca buku ini dapat melakukan introspeksi.

Sebagai referensi, penulis banyak mengutip pendapat Nixon, mantan Presiden Amerika Serikat. Menurut Nixon, kepemimpinan lebih dari sekadar soal teknis. Kepemimpinan diibaratkan sebuah puisi yang sarat akan simbol, citra, dan visi jangka panjang yang bahkan dapat saja mengubah jalannya sejarah. Tidak hanya itu, seorang pemimpin juga harus berkemampuan mengajak orang lain mengikuti idealismenya.

Sebaliknya, seorang manajer hanya bertugas berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, mengaturnya agar perencanaan tersebut berjalan semestinya. Ia hanya sekadar pelaksana dan pengelola yang hanya berpikir tentang hari ini dan besok. Manajemen bersifat lebih teknis daripada kepemimpinan.

Dalam ulasannya, penulis mencontohkan fenomena naiknya Presiden AS Obama yang tak diduga-duga. Obama bukanlah orang kaya, tapi dia punya gagasan, visi, dan pandangan yang *beyond border* (melebihi batas). Dengan gagasannya inilah Obama mampu menarik simpati para pengusaha AS dan juga kerelaan masyarakat awam menyumbangkan dana untuk kampanyenya.

Pemahaman ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan John P Kotter dalam bukunya, *A For Change: How Leadership Differs from Management* (New York: Free Press, 1990). Menurut Kotter, kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan pengembangan visi masa depan dan perumusan strategi untuk merealisasikan visi itu. Ini berbeda dengan fungsi manajemen yang hanya bertujuan menghasilkan *predictability* dan *order*, mencapai konsistensi hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penulis juga menyoroti hubungan antara pemimpin dan elite, mengingat ada banyak kesalahpahaman pada masyarakat tentang dua terminologi itu. Elite lebih merujuk kepada indeks tertinggi dalam setiap cabang kegiatan. Ia dapat berupa individu atau kelompok sosial tertentu. Dalam politik, elite bukanlah pemimpin, melainkan para elite yang memiliki indeks tertentu

(intelektual, militer, aktivis, saudagar, dan lain-lain), dapat bersaing untuk menjadi pemimpin.

Di Indonesia, ada banyak sekali fase, meminjam istilah Anies Baswedan, *ruling elite*, yaitu suatu fase di mana elite dengan indeks tertentu yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara ini. Saat ini yang paling berpotensi menduduki ruling elite baru di Indonesia adalah kalangan pengusaha. Jika ditarik perhitungan, hampir sepertiga dari anggota DPR periode 1999-2004 berlatar belakang pengusaha/pebisnis (31,3 persen). Lantas, apa yang salah dengan *ruling elite* yang baru ini?

Pada buku ini diurai secara rinci bahwa kemunculan "saudagar politisi" tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hanya saja, kekhawatiran muncul apabila *mindset* saudagar yang *profit oriented* akan berkembang dalam politik karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang *nonprofit oriented*. Munculnya kekhawatiran ini tidak terlepas dari pengalaman pahit bangsa ini tatkala berada dalam fase *ruling elite* militer di zaman Orde Baru. Pada masa itu, *mindset* politik Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip militer yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Bagian ketiga buku ini membahas kekuasaan, yang wajib dimiliki seseorang untuk menjalankan kepemimpinannya. Sumber kekuasaan dapat berupa posisi, sifat personal, keahlian, atau peluang untuk mengontrol informasi. Bagian terakhir membahas bagaimana seorang pemimpin politik mengelola kekuasaan yang dimilikinya agar kekuasaan itu dapat dipertahankan, dimanfaatkan, dan kalaupun harus diakhiri, dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Menengarai para pemimpin politik dan politisi di Indonesia, menurut penulis, tampaknya hal inilah yang agak terlupakan. Sebagian besar para pemimpin negeri ini hanya memiliki sifat-sifat pemimpin yang bersifat umum, padahal pemimpin politik tidak cukup hanya dengan karisma dan wawasan, tetapi ia juga harus memiliki indera yang lebih peka untuk dapat merasakan apa yang menjadi keinginan masyarakat yang dipimpinnya.●

NASKAH AWAL kata pengantar ini merupakan tulisan resensi **Slamet Effendy Yusuf** (1948-2015) terhadap buku saya, *Menjadi Pemimpin Politik* (Gramedia, 2009) sebagaimana dimuat *Kompas*, Jumat, 11 September 2009. Semoga menjadi amal saleh Almarhum, *Al Fatihah*.

Daftar Isi

Kutipan Komentar — /5/

Kata Pengantar **Mengurai Sosok Pemimpi Politik Ideal** Slamet Effendy Yusuf — /15/

Daftar Isi — /21/

Bagian 1 **Pendahuluan:** Pemimpin Politik dan Labirinnya — /27/

Bab 1 **Kepemimpinan Politik:** Mengapa Menarik? — /29/

Bab 2 **Partai Politik, Politik yang Dinamis, dan Bajing Loncat:** Tentang Absurditas Politik — /47/

Bab 3 **Kesukarelaan, Kompetisi, dan *Setan Gundul*:** Tentang Tren Populisme Politik — /59/

Bab 4 **Buku Terbuka dan Kebebasan Berefleksi:** Tentang Buku Ini — /73/

Bagian 2 **Kepemimpinan:** Apa, Siapa, dan Bagaimana Pemimpin Itu? — /77/

Bab 5 **Apa Benar Semua Orang Pemimpin?** Dilema Krisis Kepemimpinan — /79/

Bab 6 **Mengapa Pemimpin, Bukan Manajer?** — /85/

- Pemimpin, Melampaui Puisi? — /86/

Bab 7 Mengapa Pemimpin, Bukan Elite? — /91/

- Elite Politik dan Kekuasaan — /93/
- Kajian Elite di Indonesia — /97/
- Tentang Saudagar, Politik, dan Konflik Kepentingan /101/

Bab 8 Kehadiran Pemimpin — /109/

- Hasrat, Ambisi Menjadi Pemimpin — /125/

Bab 9 Kepemimpinan dalam Aneka Pandangan — /129/

Bab 10 Kepemimpinan: Hal-hal yang Perlu Dibicarakan — /143/

- Apa Saja? — /143/
- Visi dan Proses — /144/
- Keterpanggilan dan Kemanusiaan — /154/
- Kepelayanan, Ketulusan, dan Kesantunan — /163/
- Perjuangan, Penderitaan, Pengorbanan, dan Kepahlawanan — /166/
- Tanggung Jawab — /175/
- Kepribadian, Keteladanan, dan Panutan — /180/
- Inisiatif, Inovasi, dan Risiko — /188/
- Kredibilitas, Integritas, Amanah, dan *Trust* — /197/
- Kemampuan, Kapasitas, dan Kompetensi — /202/
- Pengalaman, Wawasan, dan Sikap Terbuka — /207/
- Bahasa, Intelektualitas, Emosionalitas, dan Spiritualitas — /213/
- Totalitas *versus* Konflik Kepentingan — /224/
- Efektivitas, Percaya Diri, dan Skala Prioritas — /231/
- Kharisma, Mitos, Obyektivitas, dan Rasionalitas — /240/
- Popularitas, Otentisitas, dan Elektabilitas — /246/
- Pilihan, Level, dan Pengaruh — /253/
- Harapan, Motivasi, Pemberdayaan, dan Kerja Tim — /256/
- Empati, Solidaritas, Kebersamaan, dan Modal Sosial — /270/
- *Mindset*, Mental, dan Kultur — /282/
- Komunikasi, Propaganda, Lobi, dan Negosiasi — /286/
- Momentum, Upacara, dan Perubahan — /310/
- Daya Saing, Kerjasama, dan Stamina — /316/

- Dedikasi, Loyalitas, dan Konsistensi — /323/
- Disiplin, *Legacy* dan Regenerasi — /326/

Bab 11 Gaya-gaya Kepemimpinan — /337/
- Apa Saja? — /337/
- *Solidarity Maker* dan Administrator — /339/
- Otokratik dan Demokratis — /341/
- Paternalistik, Neo-patrimonalistik dan Egaliter-Demokratis — /343/
- Formal dan Informal — /349/
- Transformasional, Transaksional, dan Situasional — /352/
- Proaktif dan Reaktif — /356/
- Birokratik dan Diplomatis — /359/
- Lepas Kendali dan Otopilot — /360/

Bab 12 Jenis-jenis Kepemimpinan — /363/
- Apa Saja? — /363/
- Kepemimpinan Bisnis — /368/
- Kepemimpinan Militer — /370/
- Kepemimpinan Kultural — /374/

Bab 13 Kepemimpinan Politik — /377/
- Karakter Kepemimpinan Politik — /377/
- Mengapa Politik Perlu? — /381/
- Pemimpin Politik: Pandangan Nixon — /388/
- Pemimpin Politik: Pandangan Mandela — /393/
- Negarawan — /396/
- Refleksi Para Negarawan Bangsa — /400/

Bagian 3 Perbincangan tentang Kekuasaan — /409/

Bab 14 Mengapa Kekuasaan Penting? — /411/

Bab 15 Kekuasaan: Sumber, Karakteristik dan Konsepnya — /419/
- Kekuasaan: Sumber dan Basisnya — /419/
- Kekuasaan: Karakteristiknya — /421/
- Kekuasaan: Konsep dan Jenisnya — /427/

Bab 16 **Kekuasaan:** Apa saja Hukum-hukumnya? — /439/
Bab 17 **Kekuasaan:** Refleksi dan Dimensinya — /453/
- Apa Saja? — /453/
- Refleksi Gender dan Kekuasaan — /453/
- Kemuliaan, Asketisme, dan Etika Kekuasaan — /459/
- Kekuasaan dan Paksaan — /475/
- Kekuasaan, Uang, Godaan, dan Oligarki — /481/
- Kekuasaan dan Pencitraan — /497/
- Kekuasaan: Dimensi Intelektualitas — /503/
- Kekuasaan dan Pembenarannya — /510/
- Kekuasaan dan Sistem Nilai — /518/
- Dimensi Ideologi Kekuasaan — /529/
- Kekuasaan: Dimensi Konstitusinya — /539/
- Kekuasaan: Dimensi Simbolik dan Mitologisnya — /541/
- Kekuasaan dan Identitas — /551/

Bagian 4 **Manajemen Kepemimpinan Politik:** Bagaimana Mengelola Politik? — /555/

Bab 18 **Urgensi Mengelola Kekuasaan:** Perspektif Kelembagaan dan Kepengikutan — /557/
- Mengapa Politik Perlu Dikelola? — /557/
- Mengelola Lembaga Politik — /563/
- Mengelola Pengikut — /567/
- Pola Hubungan Pemimpin-Pengikut — /572/
- Efektivitas Pengikut — /575/
- Pemberdayaan Pengikut — /577/

Bab 19 **Strategi dan Pemasaran Politik** — /583/
Strategi — /583/
- Marketing Politik — /597/

Bab 20 **Pra, Saat, dan Pasca-Berkuasa:** Refleksi Pengelolaan Kekuasaan Politik — /611/
- Pra-Berkuasa — /611/

- Saat-Berkuasa — /622/
- Pasca-Berkuasa — /626/

Bagian 5 **Ragam Pertanyaan Tambahan: Hal-hal yang Tersisa** — /629/

Bab 21 ***Post-Truth*, Generasi Milenial, dan Masa Depan Pemimpin Politik** — /631/

- Mengalami Zaman *Post-Truth* — /631/
- Generasi Milenial dan Seterusnya — /633/

Epilog 1 **Pemimpin:** Penempuh Jalan Sunyi? — /635/

Epilog 2 **Kepemimpinan Politik dalam Konteks Keindonesiaan:** Pandangan Reflektif — /641/

Daftar Bacaan — /655/

Indeks — /673/

Tentang Penulis — /698/

Daftar Tabel

Tabel 6.1 Perbedaan Umum Pemimpin dan Manajer — /88/

Tabel 6.2 Perbandingan Manajemen dan Kepemimpinan — /89/

Tabel 7.1 Formasi dan Sirkulasi *Ruling Elite* Indonesia — /100/

Tabel 9.1 Ringkasan atas Berbagai Pengertian tentang Kepemimpinan — /129/

Tabel 9.2 Elaborasi Kepemimpinan sebagai Proses — /136/

Tabel 9.3 Pemimpin dan Bukan Pemimpin versi D'Souza — /141/

Tabel 10.1 Delapan Perspektif Kepribadian — /181/

Tabel 10.3 Etika Pemimpin Kharismatik — /246/

Tabel 10.4 Kata-Kata Berenergi Rendah versus Tinggi — /255/

Tabel 10.5 Kemenangan Kebajikan Para Pendekar Komik — /264/
Tabel 11.1 Pola Kepemimpinan Klientalistik vs Demokratis — /347/
Tabel 17.1 Isu-isu Ideologis Partai Demokrat vs Partai Republik di AS — /535/
Tabel 19.1 Jenis-jenis Strategi Politik versi Schröder11 — /592/
Tabel 19.2 Macam-macam Strategi Memenangkan Perang versi Greene — /594/
Tabel 19.3 MOP: Teori dan Cek Kelengkapannya — /600/
Tabel 19.4 Sembilan Prinsip Pemasaran versi Hermawan Kertajaya — /606/

Bagian 1

Pendahuluan

Pemimpin Politik dan Labirinnya

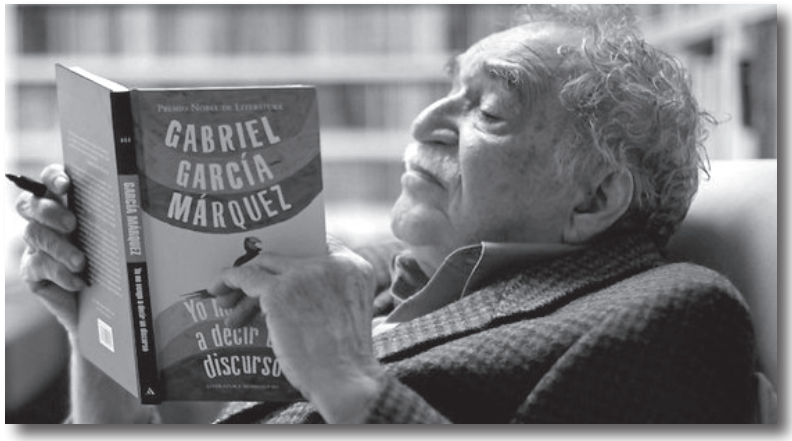

LOPEZDORIGA.COM

- Yang penting dalam hidup bukanlah apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kau ingat dan bagaimana kau mengingatnya

- Tidak benar bahwa orang berhenti mengejar mimpi karena mereka tumbuh tua, mereka menjadi tua karena mereka berhenti mengejar mimpi

- Gabriel Garcia Marquez

- What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.

- It is not true that people stop pursuing dreams because they grow old, they grow old because they stop pursuing dreams.

Bab 1

Kepemimpinan Politik

Mengapa Menarik?

KARENA BAB 1 ini bersifat pemanasan, silakan mulai dengan refleksi ...

Saya akan memulainya dengan mengajak Anda untuk menyimak novel Gabriel García Márquez, Sastrawan Kolombia penerima Hadiah Nobel pada 1982. Pada usianya yang ke-87 (2014) ia meninggal. Novel-novelnya ialah warisannya.

Kenapa harus Novel?

Ya, sesekali bolehlah kita membaca novel, apalagi Novelis Nobel. Mengambil hikmah dari sastrawan itu penting. Lagi pula hikmah kan bisa datang dari mana-mana. Mereka, para sastrawan itu pengikat makna yang seringkali tajam memberi cermin hidup dalam bingkai nilai-nilai yang universal. Ikhwal novel Márquez itu, apa sih yang mau disampaikan ke kita, itulah yang hendak saya perbincangkan.

Novel apa yang dimaksud?

El General en su Laberinto (1989) atau *Jenderal dan Labirinnya.* Melalui novel itu, Márquez seperti hendak berpesan ke khalayak bahwa setiap pemimpin itu selalu menciptakan labirinnya sendiri. Novel yang mengisahkan hari-hari terakhir Simón Bolívar ini melukiskan betapa sang jenderal hebat yang dijuluki sang pembebas itu, dihadapkan pada labirin permasalahan

BRIGHTESTYOUNGTHINGS.COM

Jangan bandingkan kekuatan materialmu dengan yang dimiliki musuh. Semangat tak bisa dibandingkan dengan materi

- Simon Bolivar

Do not compare your material forces with those of the enemy.
Spirit cannot be compared with matter.

pelik yang ia ciptakan sendiri. Márquez mengutip kalimat Bolívar: *Damn it, how will I ever get out of this labyrinth?* [1]

Apa yang dimaksud labirin?

Labyrinth (*labyrinthos*) itu salah satu istilah populer dalam mitologi Yunani. Ia mengacu pada struktur bangunan penuh lorong dan jebakan ciptaan Daidalos (Daedalus) yang dikenal sebagai pematung, dan arsitek ternama. *Labyrinth* dimaksudkan untuk menjebak Minotaur, makhluk jahat berbentuk manusia setengah kerbau, yang akhirnya tewas oleh pahlawan Athena, Theseus. Saking rumitnya *labyrinth* itu, sampai-sampai Daidalos sendiri hampir tak dapat keluar dari perangkap yang ia ciptakan sendiri, kecuali karena bantuan Ariadne yang memberikan gulungan benang yang berfungsi sebagai petunjuk jalan keluar.[2]

Kalau biografi para pemimpin ditulis sejujur mungkin, tak terelakkan sang tokoh akan berkisah tentang labirin yang ia ciptakan sendiri dan upayanya untuk keluar. Begitukah?

Persis. Pemimpin itu pengambil kebijakan, dan itu artinya ia berhadapan dengan besarnya risiko. Ini relevan dengan ungkapan Italia, *vivere*

1 Márquez (2005).

2 Hard (2004:346-347).

pericoloso, hidup secara berbahaya, atau hidup yang *nyerempet* bahaya. Di Indonesia, ungkapan ini dipopulerkan oleh Bung Karno pada 1964 sebagai judul pidato kenegaraan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Republik Indonesia: *Tahun Vivere Pericoloso* (TAVIP). Judul pidato Soekarno tersebut menginspirasi penulis Australia Christopher Koch untuk menulis novel yang terbit pada 1978, *The Year of Living Dangerously*, yang kemudian difilmkan dengan judul sama pada 1982, dengan dibintangi Mel Gibson, Sigourney Weaver, dan Linda Hunt.[3] Itulah film yang dilatari detik-detik menegangkan dalam politik Indonesia, ketika Bung Karno terperangkap, kalau bukan terjebak oleh labirinnya dan jatuh pada 1965/1966, yang diiringi oleh suasana politik yang mencekam dan konflik massif yang menyedihkan dalam perjalanan bangsa. Tapi, kelak Pak Harto pun terjebak pada labirin kekuasaannya pula pada 1998.

Terus bagaimana soal novel Márquez tadi?

Márquez memilih menggambarkan Bolívar, pahlawannya itu, tidak pada hari-hari kemenangannya yang mengagumkan, tetapi beberapa bulan-bulan terakhirnya dalam kepahitan dan frustrasi. Márquez menghindari narasi kronologis. Ia memulainya pada titik di mana jenderal 46 tahun itu dihadapkan kompleksnya masalah: selain menyusutnya kondisi tubuh oleh penyakit, ia mendapatkan berbagai penolakan. Disertai tanggapan dingin elite dan cemoohan rakyat jelata, Bolívar pun meninggalkan Bogota untuk sebuah perjalanan menyusuri Sungai Magdalena yang berkelok-kelok dengan tujuan, yang dinyatakannya hendak berlayar ke Eropa. Melalui Bolívar, Márquez menggambarkan kejam dan ironisnya politik. Bolívar mengubah sejarah, tapi tak sebanyak yang ia inginkan.[4]

Siapa sesungguhnya Bolívar?

Micheal H Hart menempatkan Simón Bolívar (1783–1830) ke ranking 48 orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah.[5] Bolívar merupakan tokoh besar yang dikenal sebagai sang pembebas Amerika Selatan (yang sekarang menjadi Kolombia, Venezuela, Ekuador, Peru, dan Bolivia) dari kekuasaan kolonial Spanyol, dan karenanya ia sering disebut sebagai "George Washington dari Amerika Selatan". Upayanya menyatukan Amerika Selatan di bawah satu pemerintah pusat yang hampir tercapai, segera disu-

3 Koch (2009).

4 Margaret Atwood, "*A Slave to His Own Liberation*", *New York Times*, 16 September 1990 .

5 Rangking satunya ditempati Nabi Muhammad SAW. Menurut Hart, Muhammad SAW merupakan "satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil, baik dalam hal keagamaan maupun sekuler", serta "pemimpin politik paling berpengaruh sepanjang sejarah". Tentang hal ini lihat, Hart (2009: 1-8; 262-266).

JAPANTIMES.CO.JP

Perubahan terantar karena orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa

- Barrack Obama

A change is brought about because ordinary people do extraordinary things

sul oleh masalah baru yang pelik: perang sipil muncul di sejumlah tempat. Bolívar kehilangan banyak pendukung dan jatuh sakit. Oposisi terhadap dirinya sebagai Presiden Kolombia Raya terus meningkat, dan pada 1830, setelah 11 tahun berkuasa, ia pun mengundurkan diri. Hart mencatat, dia kaya raya ketika terjun ke dunia politik, miskin ketika mengundurkan diri. Ia punya kepribadian yang kompleks dan menarik: dramatik, penuh keberanian dan romantik. Ia seorang idealis yang berpandangan jauh, tetapi kurang sukses dalam hal pemerintahan.

Apabila dikaitkan dengan pemimpin yang hadir dari me-

kanisme demokrasi, bagaimana refleksinya?

Masalahnya, dan ini bisa menjadi awal labirin, ketika pemimpin politik mengikatkan diri pada sejumlah janji kampanye. Tetapi itu lazim saja. Kalau René Descartes beradagium *cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku ada; pemimpin politik: aku berjanji, maka aku ada. Disadari atau tidak, janji-janji itu menyumbang saham bagi terbentuknya labirin kekuasaan pasca-pemilu. Politisi sering berdalih, janji kampanye itu satu hal, memerintah ialah hal lain. Ini mirip sindiran Perdana Menteri Uni Soviet 1958 -1964 Nikita Khrushchev: politisi itu semua sama: mereka janji membangun jembatan, meskipun tak ada sungai.[6] Selain janji, labirin kekuasaan juga terbentuk oleh sikap dan kebijakan pemimpin yang menerobos kebuntuan. Setiap terobosan menyisakan konsekuensi. Pengambil terobosan ialah pengambil sejumlah risiko yang bahkan bisa berujung pada kejatuhan dirinya dari kursi kekuasaan.

Novel politik Márquez lainnya apa?

Yang paling terkenal *One Hundred Years of Solitude* atau *Seratus Tahun Kesunyian*. Terutama melalui novel inilah Márquez memperoleh Hadiah Nobel Sastra pada 1982. Konon Presiden Clinton terbahak-bahak setelah membaca novel ini. Kisahnya jenaka. Ketika Márquez meninggal pada April 2014 (87 tahun), Clinton berkomentar,

> ... Sejak saya membaca *Seratus Tahun Kesunyian* lebih dari 40 tahun yang lalu, saya selalu kagum dengan hadiah unik imajinasi, kejernihan pikiran, dan kejujuran emosional. Dia tangkap rasa sakit dan sukacita kemanusiaan kita ... [secara] nyata maupun magis.[7]

Nah, ketika Barack Obama menang dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) yang pertama kalinya (2008) — ia terpilih kembali untuk periode kedua pada 2012 — saya ingat lagi novel Márquez itu. Sepertinya ada semacam frekuensi yang menyambungkan antara *Seratus Tahun Kesunyian* dengan kemenangan Obama: setelah sekian ratus tahun, warga kulit hitam benar-benar bisa menjadi presiden di negara yang sedemokratis Amerika. Obama telah memecah kesunyian.

Memecah kesunyian?

Demikianlah. Hadirnya Obama sebagai pemimpin AS membuat banyak orang berdecak kagum, bukan sekadar ia berkulit hitam, melainkan

---

6 Brainyquote.com. *Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers*.

7 "*Bill Clinton's Friendship With the Late Gabriel Garcia Marquez*," Usnews.com, 17 April 2014.

kegigihannya mengejar mimpi dan berupaya merealisasikannya. Ia menawarkan alternatif. Ia mampu mengalahkan Hillary Clinton dalam konvensi Partai Demokrat dan menang telak atas John McCain pada Pilpres 2008. Obama mengumpulkan lebih dari 52 persen *popular vote* dan 338 *Electoral Votes* (364 termasuk North Carolina dan Indiana). Sementara McCain, 46 persen *popular votes*, serta 163 *Electoral Votes* atau *Electoral College* (174 termasuk Missouri).[8] Obama usianya 47. Pria yang pernah menjalani masa kecil di Menteng, Jakarta, serta ayah asal Kenya itu, di mata adiknya, Maya Soetoro, "adalah sebuah mimpi yang mustahil di masa lampau".[9]

Kembali ke novel Márquez, siapa tokoh utamanya?

Jose Arcadio Buendia. Sebagaimana Obama, ia pemimpi. Tapi, konteksnya lain. Mimpi Buendia tak didasari pengetahuan tentang peta masa depan dan perkembangan teknologi. Buendia orang udik yang tinggal di desa terpencil Macondo. Setiap tahun, desa itu dikunjungi orang-orang Gipsi yang mendirikan tenda-tenda dan memperagakan benda-benda ajaib. Ketika mereka memamerkan dua batang benda ajaib yang bisa membuat besi-besi di sekitarnya bergerak, paku-paku lepas dari tempatnya, Buendia berpikir benda ajaib itu bisa dipakai pula untuk menyedot emas dari perut bumi. Di tengah kemiskinannya, ia nekat menjual bagal dan kambing untuk membeli dua batang magnet itu. Benaknya terbayang, sebentar lagi ia kaya dan bisa melapisi rumahnya dengan lantai. Beberapa bulan lamanya ia berupaya membuktikan kebenaran pikirannya: menyedot emas dari perut bumi. Sayang, hasilnya nihil.

Hingga kemudian orang-orang Gipsi datang lagi, dan memamerkan benda yang tak kalah ajaibnya: kaca pembesar raksasa, yang bisa membakar jerami cukup dengan sinar matahari saja. Buendia melupakan ide menyedot emas dan beralih ke pikiran lain: hendak memanfaatkan kaca pembesar itu sebagai senjata perang. Kali ini, dua batang magnet diserahkan kembali ke orang Gipsi itu, ditambah beberapa koin zaman kolonial yang merupakan peninggalan ayah dari istrinya untuk membeli kaca pembesar itu. Ursula, istrinya, tak paham dengan *kegilaan* suaminya. Pun ketika para Gipsi datang lagi dengan membawa bongkahan es, Buendia segera menganggapnya sebagai penemuan terbesar sepanjang sejarah manusia.[10]

Hahaha.. Lalu, apa yang dilakukannya?

Ia menganggap es sebagai benda ajaib. Lantas, ia pun rela merogoh

8 Majalah *Time*, edisi 17 November 2008.

9 "Maya Soetoro-Ng: Keberagaman Membentuk Wataknya," *Tempo*, edisi 16 November 2008.

10 Márquez (2003).

THEGUARDIAN.COM

Anda bisa memenjarakan seseorang, tapi tidak gagasannya

- Benazir Bhutto

You can imprison a man, but not an idea.

koceknya hanya untuk menempelkan tangannya ke permukaan es itu. Dan, hatinya dipenuhi rasa takut, tetapi sekaligus girang sekali ketika ia bersentuhan dengan sebuah misteri: dinginya es. Buendia dan mungkin kita juga bisa sering melakukan kekonyolan seperti itu: cepat terbius dalam keheranan, tanpa berupaya memahami hakikat atas apa sejatinya yang kita saksikan. Itu karena memang kita belum punya bekal ilmu pengetahuan yang cukup, kendatipun imajinasi segera terbentuk. Adapun Obama sejak awal sadar keterbatasan diri, namun hal tersebut tidak merintanginya untuk mewujudkan sebuah mimpi.[11] Untuk menjadi orang nomor satu jalannya panjang, berliku, dan ia telah tunjukkan mampu, tentu dengan bekal pengetahuan yang baik. Itulah beda Buendia dengan Obama.

Selain Obama, fenomena kepemimpinan kan juga dapat kita ambil dari banyak pengalaman pemimpin lain?

Pastilah. Beberapa peritiswa yang mengemuka sebelum terpilihnya Obama sebagai presiden, misalnya di Indonesia, Soeharto wafat dan di Pakistan Benazir Bhutto tewas terbunuh dalam serangan bom ketika ia tengah berkempanye.

Soeharto yang dikenal sebagai *the smiling general* dan *the strong man* tersebut[12] pernah menjadi presiden selama tiga dekade. Setelah tidak berkuasa pada 1998 hingga wafatnya (2008), banyak komentar pro-kontra terkait kepemimpinannya. Hal yang sama juga pernah dialami Soekarno

11 Tentang biografi Obama, lihat Obama (2007).

12 Istilah *smiling general* muncur sebagai judul buku O.G. Roeder, *The Smiling General, President Soeharto of Indonesia* (Roeder:1970). Sementara istilah *strong man* banyak disebut oleh media asing.

(1901-1970). Ini menunjukkan, mereka punya kelebihan dan kekurangan (kontroversi) masing-masing. Catatan Jakob Oetama berikut menarik disimak, bahwa,

> Ketika pengalaman itu mulai menjadi sejarah, bahkan sejarah yang berulang, masuk akal jika kita dalami dan selami pelajaran yang diberikan oleh jatuhnya presiden pertama dan kedua. Kita mengambil pelajaran dari kelebihan dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya. Dalam konteks itu, patut kiranya juga dalam sikap kritis kita berpegang pada kebajikan *mikul dhuwur, mendhem jero*, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami akhir yang tragis.[13]

Tentu, tak hanya pengalaman kedua tokoh itu yang seyogyanya dapat kita tarik sebagai pelajaran secara kritis-objektif, tetapi juga terhadap mantan-mantan presiden setelahnya: B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi)

Kalau Benazir Bhutto?

Kisahnya tragis. Ia tewas oleh serangan bom, 27 Desember 2007 dalam rangkaian pawai politiknya di Rawalpindi. Ia kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Desa Garhi Khuda Bakhsh, Propinsi Sindh.[14] Ia puteri tertua Zulfikar Ali Bhutto, Perdana Menteri Pakistan yang jatuh tragis pula: rezim Zia Ul Haq menetapkan hukuman gantung kepadanya pada 1977. Ia perempuan terdidik dengan spektrum pergaulan yang luas, dan ketika ia melihat peluang merebut kekuasaan melalui Partai Rakyat Pakistan (PPP), ia pulang ke negerinya. Hebatnya, pada 1988, ketika usianya masih 35 tahun, ia terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di negeri mayoritas Muslim Pakistan. Tapi kemudian ia jatuh (1990), bangkit (1993), jatuh lagi (1996) dan ke pengasingan. Pada 2007, ia terpanggil kembali ke panggung politik. Ia tahu, risikonya nyawa.

Keberanian dan fatalis itu tipis ya?

Kita tidak bisa serta merta menilai pemimpin yang meninggal karena mempertahankan prinsip atau sedang dalam perjuangan politik itu seorang fatalis. Itu sudah menjadi bagian dari risiko perjuangannya sebagai pemimpin politik.

---

13 Jakob Oetama, "Warisan Soeharto", *Kompas*, 28 Januari 2008.

14 Pemberitaannya, antara lain, "*Benazir Bhutto killed in attack*," news.bbc.co.uk, 27 Desember 2007; "*Benazir Bhutto Biography, Prime Minister (1953–2007)*" biography.com.

Lagi pula kelebihan dan kekurangan kan biasa?

Pasti. Kalau kita bicara pemimpin politik yang aktual, ia cenderung melihat ke depan dengan penuh semangat. Bukan berarti masa lalu tidak penting. Sejarah penting sekali. Tentu kita setuju dengan kata-kata Nelson Mandela, ketika ia meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Afrika Selatan, 15 Juni 1999: *forgiving where forgiveness is necessary — but not forgetting*.[15] Kalimat itu konteksnya rekonsiliasi nasional Afrika Selatan pascarezim Aparheid. Mandela mengajak untuk memaafkan, dengan tetap terus mengingat peristiwa kelam di masa lalu. Kekuatan memaafkan merupakan pondasi penting membangun masa depan. Dalam kepemimpinan, kesalahan-kesalahan pemimpin masa lalu, jangan terulang lagi.

Wajar kan kalau pemimpin bisa salah?

Soal salah tidaknya, tergantung pada sisi mana kita memandang. Inilah yang menimbulkan perbincangan panjang. Kalau yang dimaksud kontroversi, hal tersebut lazim saja ditemui pada hampir semua pemimpin kelas dunia. Marilah kita baca, misalnya apa yang ditulis Gergen tentang kelebihan sekaligus kelemahan (paradoks) beberapa Presiden AS.

> Pada awal 1970-an, setelah lepas dari sekolah hukum dan angkatan laut, saya bekerja untuk Richard Nixon dan bertahan di Gedung Putih selama tiga setengah tahun, sepenuhnya menangani penulisan pidato dan tim riset. Mentor saya, Ray Price, membantu saya untuk memahami, Nixon merupakan orang yang paling kompleks yang bisa mencapai kepresidenan. Ia memiliki sisi terang yang bersinar ... Ia bisa diumpamakan naik ke puncak gunung, melihat dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan dan memutuskan bagaimana sejarah harus disentuh ...
>
> Tragisnya, Nixon juga punya sisi lain yang gelap, pahit dan bengkok. Semakin lama orang bekerja bersamanya, semakin jelas terlihat ada setan dalam dirinya yang tidak bisa ia kalahkan atau mungkin tidak pahami ... Ia membentuk tim-tim dalam Gedung Putih untuk memburu musuh-musuhnya atas nama keamanan nasional, baik itu nyata maupun dugaan. Tim-tim itu lambat laun memfokuskan usaha mereka pada politik pemilihan presiden. Kejahatan yang dilakukan atas nama dirinya akhirnya bocor kepada publik dan selanjutnya seluruh kekuasaan itu runtuh. Ia menjadi arsitek bagi keruntuhannya sendiri.[16]

Nixon memang fenomenal: bangkit dan jatuh secara singkat. Pada 21 Januari 1969 Richard Milhous Nixon dilantik sebagai presiden, dan pada 8 Agustus 1974, ia mengundurkan diri menyusul skandal *Watergate*. Wakil Presiden Gerald R. Ford menggantikannya.

15 Africanhistory.about.com

16 Gergen (2008).

MINUTEMENNEWS.COM

Jalan menuju tirani, kita tidak boleh lupa, dimulai dengan kehancuran kebenaran

- Bill Clinton

The road to tyranny, we must never forget, begins with the destruction of the truth

Watergate? Bagaimana sekilas kisahnya?

Kata *Watergate* merujuk Hotel *Watergate* di Washington DC. Selain hotel, kompleks *Watergate* terdapat perkantoran, termasuk kantor Komite Nasional Demokrat. *Watergate* kemudian dipopulerkan sebagai skandal politik yang menjatuhkan Nixon. Skandal itu mencakup pencurian, penyuapan, pemerasan, penyadapan, konspirasi, obstruksi keadilan, penghancuran bukti, penggelapan pajak, penggunaan lembaga intelijen secara ilegal, sumbangan kampanye ilegal, dan penggunaan uang publik untuk kepentingan pribadi. Ia identik penyalahgunaan kekuasaan.[17]

Selain Nixon, siapa lagi yang fenomenal?

Salah satu yang menelan berlembar-lembar halaman media cetak dan menyita waktu media elektronik adalah kasus Presiden Clinton. Gergen pun punya catatan,

> Kebanyakan orang Amerika mengakui Clinton benar-benar cerdas: ia punya kapasitas mental dan verbal di atas hampir semua orang di panggung publik ... Yang lebih mengesankan, ia mengumpulkan informasi dan sudut pandang lintas kelompok — tidak hanya dari pendukungnya, melainkan kelompok-kelompok lain, terutama mereka yang biasanya tidak mendapat tempat di meja kekuasaan seperti orang kulit hitam, Hispanik dan perempuan. Ia memiliki ... *kepemimpinan 360 derajat* — sifat yang semakin penting dimiliki seorang pemimpin dalam dunia sekarang yang kompleks — dan kemampuan itu sangat memperkuat penilaiannya. Dan terakhir, ia membuat beberapa keputusan politik yang cemerlang ... Namun, seperti diketahui ... dengan rinci, Clinton

17 watergate.info

juga punya cacat dalam karakter yang terus menghantuinya. Dari apa yang saya lihat, dia sedang berjuang keras untuk memperbaiki cacat itu namun kurang berhasil.[18]

Kalau Nixon punya *Watergate*, Clinton punya *Monicagate*. Bahwa hubungan rahasia Clinton dengan Monica Lewinsky terungkap ke publik, bahkan menyeret Clinton ke proses *impeachment*. Tapi, tak seperti Nixon, karir politik Clinton masih bisa selamat.

Bagaimana proses *impeachment* Clinton itu?

Kita baca kronologisnya: pada Januari 1998, Presiden Bill Clinton diterpa isu dirinya menjalin hubugan terlarang, dengan seorang pekerja magang di Gedung Putih, Monica Lewinsky. Kabar ini berasal dari terungkapnya percakapan Clinton dan Lewinsky yang direkam pegawai Pentagon (Kementerian Pertahanan AS), Linda Tripp. Tripp menyerahkan rekaman itu ke Kenneth Starr, seorang jaksa independen.

Selama berhari-hari, Clinton diserang pemberitaan media soal kabar *affair* dengan bawahannya tersebut. Hingga akhirnya, Presiden ke-42 AS tersebut buka suara, "Saya tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan wanita itu (Monica Lewinsky)." Beberapa bulan kemudian, Clinton harus menghadapi pengadilan. Rekaman pengakuan Clinton kepada Dewan Juri atau Majelis Hakim diungkap di publik oleh sejumlah media.

Dalam percakapan yang terjadi pada 17 Agustus 1998 tersebut, Clinton dicecar jaksa soal hubungannya dengan Lewinsky. Termasuk, kemungkinan sang Presiden berbohong soal tidak pernah melakukan hubungan intim. Clinton mengelak. Namun dengan barang bukti berupa baju biru Lewinsky dan bekas tetesan sperma sekaligus kesaksian Lewinsky, Clinton akhirnya mengakui pernah memiliki hubungan tak patut dengan Lewinsky. Keduanya berhubungan antara November 1995-Maret 1997. Pada 9 Desember 1998, berdasarkan rekomendasi jaksa independen Star, Komisi Yuridis Kongres mengajukan 4 pasal untuk melengserkan Clinton. Sepuluh hari kemudian, setelah melalui sedikit perdebatan antara kubu Partai Republik dan Partai Demokrat, Kongres akhirnya sepakat dengan rekomendasi *impeachment* atau pemakzulan Clinton. Proses selanjutnya ada di tangan Senat.

Clinton menjadi Presiden kedua dalam sejarah AS yang terkena upaya pemakzulan. Yang pertama Andrew Johnson, presiden ke-17 AS pada 1868, lantaran memecat seorang menteri dengan cara tak benar. Tapi Johnson lolos. Clinton tak dapat dilengserkan lantaran hasil voting Senat sama kuat,

18 Gergen (2008)

Kalau bukan aku, siapa? Dan kalau tidak sekarang, kapan?

- Mikhail Gorbachev

If not me, who? And if not now, when?

50-50. Ia pun meneruskan periode kedua kepresidenannya sampai 2001.[19]

Tak hanya Nixon dan Clinton saja kan yang punya kelebih-an-kekurangan?

Pastilah itu. Tak hanya Tun abdul Razak, Mahathir Muhammad, Abdullah Ahmad Badawi, Najib Razak di Malaysia, tapi juga John F Kennedy, Lee Kuan Yew dan Lee Hsien Loong di Singapura, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Joseph Estrada dan Gloria Macapagal Aroyo di Filipina, Zhou Enlai, Deng Xiaoping atau Hu Jintao di China, Vladimir Putin dan Dmitry Medvedev di Rusia, Ayatollah Ali Khameini dan Mahmoud Ahmedinejad di Iran, Sadam Hussein, Jalal Talabani dan Nouri al Maliki di Irak, John Howard atau Kevin Ruud di Australia, Fidel Castro di Kuba, Thaksin Shinawatra di Thailand, Nicolas Sarkozy di Perancis, Abdullah Gül dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, pun Thabo Mbeki di Afrika Selatan.

Tak Hamid Karzai dari Afghanistan, Manmohan Singh di India, Aníbal António Cavaco Silva dari Portugal, Carlos Menem atau Cristina Fernández de Kirchner dari Argentina, Pervez Musharraf di Pakistan, Yasuo Fukuda di Jepang, Luíz Inácio da Silva dari Brazil, Lee Myungbak di Korea Selatan, Than Shwe dan Thein Sein di Myanmar (Burma), Angela Merkel di Jerman, Jan Peter Balkenende dari Belanda, Robert Mugabe dari Zimbabwe, Yuweri Museveni dan Apolo Nsibambi dari Uganda, Sultan Hasanal Bolkiah di Brunei Darussalam, Gordon Brown di Inggris, Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda dari Fiji atau Ronald Venetiaan dari Suriname, pun semuanya saja pemimpin dunia yang timbul tenggelam, kalau kita sebut satu per satu, tentu bakal menghabiskan halaman kita.

Intinya, semua pemimpin yang tercatat dalam sejarah, pasti punya kelebihan dan kekurangan. Para peneliti kepemimpinan biasanya menimbang dengan teliti kelebihan, keluasan pengaruh, konstruktivitas, dan segenap sisi-sisi baik lain di satu pihak, sisi-sisi lemah di pihak lain. Yang jelas efek kepemimpinan berdampak luas. Makanya, tanggung jawab pemimpin selalu dianggap lebih tinggi ketimbang yang dipimpin. Pemimpin dengan kebijakan-kebijakannya adalah sosok yang menentukan, sementara yang dipimpin lebih banyak ditentukan, walaupun terjadi interaksi timbal-balik.

19 http://news.liputan6.com/read/2322153/21-9-1998-pengakuan-presiden-bill-clinton-soal-perselingkuhannya (diakses 15 Desember 2015).

ZAID.MY

Jangan melompat ke kesimpulan tanpa berpikir

- Mahathir Mohamad

Don't jump to conclusions without thinking.

Tapi kan intinya, pemimpin punya pengaruh luas?

Mereka menggerakkan sejarah, terlepas sejarah itu sendiri bergeraknya ke mana: ke peradaban yang berkualitas atau sebaliknya. Sebagaimana dikatakan Thomas Carlyle, sejarah itu (hakikatnya) ialah biografi orang-orang besar. *The history of the world is but the biography of great men*.[20] Orang besar hadir dalam arena dan momentum yang berbeda-beda. Contoh-contoh di bawah ini sekedar menggambarkan betapa pemimpin memiliki pengaruh luas — saya sengaja tidak membandingkannya dengan kepemimpinan para nabi, termasuk apalagi Nabi Muhammad SAW, yang jelas-jelas merupakan pemimpin hebat dengan pengaruh luas, sehingga Micheal H. Hart menempatkannya ranking satu dalam 100 tokoh berpengaruh sepanjang sejarah.[21]

- **Harry S. Truman**. Ia Presiden AS yang memerintahkan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri Perang Dunia II.
- **Mikhael Gorbachev**. Ia akomodatif terhadap keterbukaan (*glasnost*), kebebasan (*perestroika*) dan demokrasi. Ia berperan besar dalam mengakhiri riwayat Komunisme yang telah eksis dan mencengkeram Uni Sovyet selama tujuh puluh tahunan.
- **Nelson Mandela**. Ia pesakitan yang meringkuk di rumah tahanan Rezim Apartheid Afrika Selatan, mampu tampil sebagai sosok pemimpin besar yang pemaaf dan berjiwa besar.
- **Mahatma Gandhi**. Dengan gerakan anti-kekerasannya, ia mampu mengubah wajah sejarah masa depan India dari cengkeraman Inggris.
- **Ayatollah Khomeini**. Ia sosok ulama sepuh Islam Syiah yang berada di pengasingan (Perancis), tetapi berhasil mengobarkan revolusi Iran 1979 dan mengu-

20 Wikiquote.com

21 Lihat kembali, Hart (2009).

Guru adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan bangsa

- Mustafa Kemal Ataturk

Teachers are the one and only people who save nations.

ubah peta kekuatan Timur Tengah.

- **Winston Churchill**. Ia merupakan tokoh yang dibesarkan oleh momentum Perang Dunia II. Ia membuat berbagai keputusan politik yang tepat dan mampu menggelorakan semangat rakyatnya dan mengak-tualisasikan strategi memenangkan perang.
- **Mao Zedong**. Ia berhasil meng-Komunis-kan China dan merebut China daratan. Kini China sebagai bangsa yang hampir saja menjadi *superpower*.
- **Mustafa Kemal Atatürk**. Ia berhasil membalikkan ideologi politik Turki setelah berabad-abad berdiri sebagai kesultanan Islam yang kuat dan berpengaruh menjadi neegara republik yang berideologi Sekulerisme-Kemalis.
- **Lee Kuan Yew**. Ia mengubah Singapura dari kondisi lazimnya negara dunia ketiga, menjadi negara maju.

Masih banyak lagi lainnya: apabila didaftar tentu hanya akan membuat buku ini super-tebal. Terlepas dari kontroversi, Anda bisa memperpanjangnya sendiri. Termasuk Soekarno di Indonesia, salah satu pemimpin dunia yang dibicarakan oleh Nixon dalam bukunya, *Leaders*.

Jangan lupa juga dengan para pemimpin dunia yang pernah datang ke Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955?

Itu penting terkait peran Indonesia sebagai pelopor pertemuan antarbangsa *paling bersejarah* — yang peringatannya ke-60 diselenggarakan di Bandung pada April 2015. Ide penyelenggaraan KAA 1955 datang ketika Perdana Menteri (PM) Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo menerima surat dari PM Sri Lanka Sir John Kotelawala pada awal 1954. Kotelawala mengajak Ali bersama dengan PM India Jawaharlal Nehru, PM Birma (kini Myanmar) U Nu, dan PM Pakistan Muhammad Ali Bogra bertemu untuk menurunkan ketegangan di kawasan Indochina (sekarang Vietnam). Ali Sastroamidjojo menyebut lima PM ini sebagai *Panca Lima*, yang kemudian mengerucutkan gagasan KAA.[22] Mereka (Panca Lima) hadir dalam KAA 1955 bersama dengan para tokoh dari 24 negara Asia-Afrika. Dari Indonesia, Bung Karno punya peran sentral. KAA 1955 juga dihadiri oleh PM Republik Rakyat China Chou Enlai, Presiden Mesir Gamal Abdul Naser dan yang lain.

Dapatkah dikatakan pemimpin itu drama manusia?

22 "Inilah Lima Tokoh Penggagas KAA 1955," *Tempo.co*, 21 April 2015.

JOHN DOMINIS/PINTEREST.COM

Antara dicintai dan ditakuti, aku selalu percaya Machiavelli benar. Jika tidak ada yang takut padaku, aku tidak berarti

- Lee Kuan Yew

Between being loved and being feared, I have always believed Machiavelli was right. If nobody is afraid of me, I'm meaningless.

Jawabnya pasti ya, karena yang dimaksud ialah kepemimpinan manusia yang lazim diagung-agungkan pada suatu masa, dicemooh dan dijauhi di masa lainnya. Adanya masa-masa keemasan, pun keruntuhan, atau sebaliknya. Itu tidak hanya terjadi pada Jenderal Bolívar di Amerika Latin, tetapi juga Bolívar-Bolívar lain di tempat lain dengan jalan cerita yang tak kalah ironis. Lazim saja sang tokoh sedih, gembira, menang, kalah, menerima dukungan, kesetiaan, pengkhianatan, caci maki, dan sebagainya. Cocok dengan komentar pengarang novel asal Chili Isabel Allende, di mana seluruh cerita yang menjadi minatnya memiliki tema yang pasti: keadilan, loyalitas, kematian, isu-isu sosial dan politik, dan kekebasan.[23] Kalaulah drama-drama itu menyusun suatu biografi, maka apa yang dikatakan Mark Twain berikut ini, menarik:

> *What a wee little part of a person's life are his acts and his words! His real life is led in his head, and is known to none but himself. All day long, the mill of his brain is grinding, and his thoughts, not those of other things, are his history. These are his life, and they are not written. Everyday would make a whole book of 80,000 words — 365 books a year. Biographies are but the clothes and buttons of the man — the biography of the man himself cannot be written.*[24]

Apa yang dibilang Mark Twain itu?

23 Brainyquote.com. *All stories interest me, and some haunt me until I end up writing them. Certain themes keep coming up: justice, loyalty, violence, death, political and social issues, freedom.*

24 Goodreads.com

Pada dasarnya, di bagian paling bawah dari kehidupan, yang menggoda kita semua, hanya ada absurditas, dan banyak lagi absurditas. Dan mungkin itulah yang memberi kita sukacita kita untuk hidup, karena satu-satunya yang bisa mengalahkan absurditas adalah kejernihan

- Albert Camus

Basically, at the very bottom of life, which seduces us all, there is only absurdity, and more absurdity. And maybe that's what gives us our joy for living, because the only thing that can defeat absurdity is lucidity.

Kalimat yang terakhir itu menarik: biografi manusia itu "tak dapat ditulis", kendatipun setiap hari, seseorang mampu menyusun satu buku dengan 80.000 kata yang jumlahnya 365 buku dalam setahun. Saya kira, Twain hendak menunjukkan bahwa manusia bergulat dengan biografinya sendiri (yang ia katakan seperti baju dan kancingnya) dari apa yang ia perbuat dan katakan. Pada akhirnya, mahkamah sejarahlah yang akan menilai. Mahkamah sejarah terkait ikhtiar menggali objektivitas sejarah. Peran sejarawan menjadi penting: bagaimana mendudukkan peristiwa sejarah secara proporsional, mengingat sejarah politik memang rawan manipulasi.

Manipulasi?

Iya. Manipulasi oleh yang kuat terhadap yang tidak disukai. Maka, sejarah pun mesti dibelokkan. Misalnya, mari baca karya novelis Milan Kundera, *The Book of Laughter and Forgetting* (1978),

> Bulan Februari 1948, Pemimpin Komunis Klement Gottwald melangkah keluar menuju balkon sebuah istana Barok di Praha guna menyampaikan pidato di hadapan ratusan ribu rekan-rekan senegaranya yang mamadati *Old Town Square*. Kejadian itu merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah Ceko — semacam momen yang menentukan yang terjadi sekali atau dua kali dalam masa seribu tahun. Gottwald diapit oleh kawan-kawannya; Clementis berdiri di dekatnya. Tiba-tiba salju turun, dingin, dan Gottwald tidak memakai topi. Sang Clementis yang cemas menanggalkan topi bulunya sendiri dan mengenakannya ke kepada Gottwald. Seksi propaganda partai mengeluarkan ribuan kopi foto-foto balkon yang bergambar Gottwald, dengan topi bulu di kepalanya dan kawan-kawan di sampingnya, sedang berbicara kepada bangsanya. Di balkon itulah sejarah Cekoslowakia Komunis lahir. Setiap anak tahu foto itu dari poster-poster, buku-buku sekolah dan museum-museum. Empat tahun kemudian Clementis dituduh melakukan pengkhianatan dan digantung. Seksi propaganda dengan segara menghapusnya dari sejarah dan, tentu saja, juga dari semua foto. Foto itu sejak saat itu, Gottwald berdiri di balkon sendirian. Tempat di mana Clementis pernah berdiri, hanyalah dinding istana yang kosong. Yang

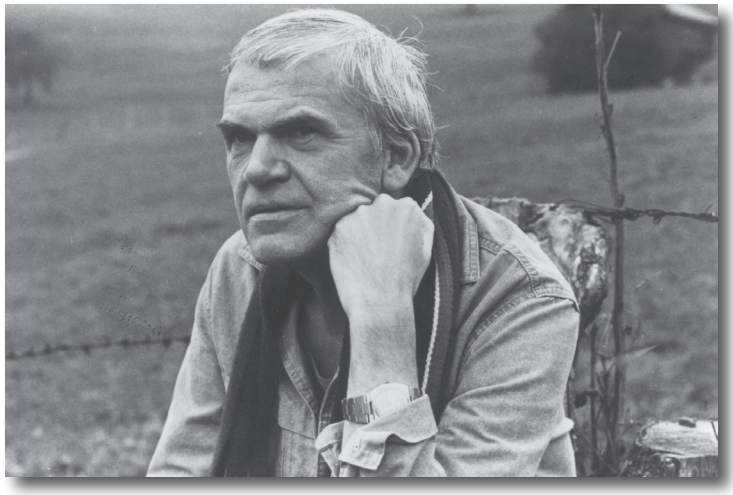

LAVOZ.COM.AR

- Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa

- Tidak ada gerakan besar yang dirancang untuk mengubah dunia agar bisa ditertawakan atau diremehkan. Mengolok adalah karat yang mengotori semua yang disentuhnya

- Milan Kundera

- The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting

- No great movement designed to change the world can bear to be laughed at or belittled. Mockery is a rust that corrodes all it touches

tersisa dari Clementis hanyalah topi di kepala Gottwald.[25]

Cerita novelis asal Ceko ini lucu, ironis, betapa anehnya politik: supaya kekuasaan yang menyimpang tidak diutak-atik yang lain, seksi propaganda diberi tugas memanipulasi sejarah dengan cara canggih agar khalayak lupa atau *amnesia*. Fakta sejarah disembunyikan, dihapus untuk citra dan kelangsungan kekuasaan yang telah dibangun penuh kebersamaan. Mirek, sang tokoh dalam novel mengatakan, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa. *The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting*.●

25 Kundera (2000)

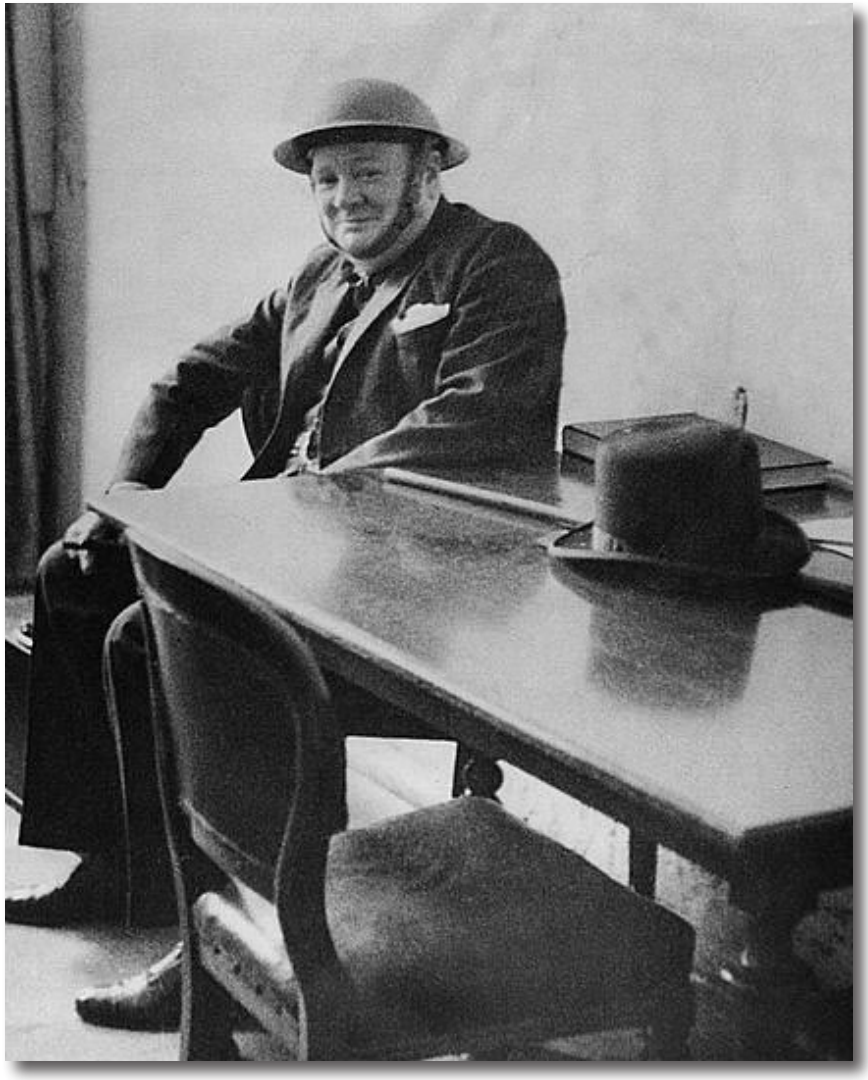

NCONVENIENTHISTORY.COM

Dalam perang Anda hanya bisa dibunuh sekali, tapi dalam politik, berkali-kali

- Winston Churchill

In war, you can only be killed once, but in politics, many times

Bab 2

Politik yang Dinamis, Candradimuka, dan Bajing Loncat

Tentang Absurditas Politik

POLITIK ITU kan bukan sekadar partai?

Partai politik berperan penting dalam demokrasi. Hal ini akan kita bahas tersendiri nanti. Pertanyaan Anda itu tampaknya terkait dengan lingkungan politik kita yang cenderung terus berubah dan bergerak dinamis, seiring dengan perubahan regulasi dan partisipasi publik yang terbuka. Pemimpin politik pun telah datang pergi silih berganti. Gairah perpolitikan hiruk-pikuk. Macam-macam orang dari berbagai latar belakang: profesional, saudagar, swasta, aktivis, akademisi, birokrat, tentara, semua bisa masuk ke ranah politik, menjadi politisi. Tak semuanya paham apa itu politik sebelum atau bahkan ketika sudah memasuki dunia politik. Politik kadang aneh dan susah dipahami. Politik itu candu: kalau sudah terlibat susah berhenti. Politisi merasa tak pernah mati, sehingga *zoon politicon* berlaku selamanya. Menurut Winston Churchill, tentara terbunuh sekali, tetapi politisi bisa berkali-kali. *In war, you can only be killed once, but in politics, many times*.[1]

Karena itulah, membahas tema kepemimpinan itu sama menariknya dengan politik. Kalau keduanya digabung, pasti semakin menarik. Tema

1 Nationalchurchillmuseum.org

kepemimpinan itu mendasar, tidak bosan-bosan untuk terus-menerus diperbincangkan. Demikian pun politik. Politik bisa sangat menyenangkan, tetapi juga sekaligus menyebalkan. Para politisi yang matang telah mengalami proses yang berliku-liku dan penuh tantangan di dunia politik. Mereka telah mengalami penggodogan di *kawah Candradimuka* politik.

Kawah Candradimuka?

Kawah Candradimuka hanya ada dalam pewayangan, di *kahyangan* atau alam maya para dewa, tempat jabang bayi *Tetuka* atau *Tutuka*, anak dari salah satu tokoh Pandawa yakni *Bima* atau *Werkudara* alias *Jagalabilawa*, *digembleng* oleh *Batara Empu Anggajali*, sehingga bayi itu menjadi ksatria perkasa *Gatotkaca*. Gatotkaca sanggup mengalahkan musuh para dewa. Selain Gatotkaca, anak Arjuna, Bambang Wisanggeni, sewaktu bayi juga pernah dimasukkan ke kawah itu oleh Dewasrani, namun Wisanggeni justru menjadi ksatria sakti.[2] Pakar pewayangan Solichin, menggarisbawahi,

> Istilah Kawah *Candradimuka* sampai dengan saat ini sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan tentang sistem pendidikan yang kuat dan berkualitas. Kawah Candradimuka dianggap sebagai simbolisasi dari sistem pendidikan ideal yang dibutuhkan untuk membentuk manusia yang unggul, terutama melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budi pekerti yang luhur, sama seperti apa yang dialamu Gatotkaca.[3]

Kalau ada politisi matang, ada juga yang tidak?

Bukan sekadar tidak matang, tapi politik juga membuka peluang bagi hadirnya sosok-sosok kerdil yang culas dan memainkan segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks tertentu fenomena demikian lazim diistilahkan Machiavellistik atau, kalau dikontekstualkan dengan pengalaman politik legenda kekuasaan politik Jawa, Ken Arokistik. Penjelasan lain yang perlu kita simak adalah apa yang pernah disitir oleh Kuntowijoyo, politik bisa membuat pelakunya berkacamata kuda atau miopik. Menurut Kuntowijoyo,

> Politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek. Kita sungguh takut bahwa dengan berpolitik ... jadi miopik, hanya mampu melihat realitas-realitas yang dekat. Orientasi bahwa kekuasaan akan menyelesaikan banyak hal, ternyata hanya benar dalam jangka pendek.[4]

---

2 Wayangindonesia.web.id.

3 Solichin (2014:191-192).

4 Kuntowijoyo, "Enam Alasan Untuk Tidak Mendirikan Parpol Islam", *Republika*, 18 Juni 1998.

GALLERYHIP.COM

Musuh besar kebenaran sangat sering bukanlah kebohongan, ... tapi mitos ...

- John F. Kennedy

The great enemy of the truth is very often not the lie ... but the myth ...

Kuntowijoyo memandang perlunya rasionalitas: politik harus dibebaskan dari mitos (demistifikasi) yang membuat pelakunya berkacamata kuda. Maka, diperlukanlah obyektivikasi yang merupakan perbuatan rasional nilai (*wertrational*) ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilia-nilai asal.

Apa yang disampaikan Kuntowijoyo itu mengingatkan kita pada Herbert Mercuse ..

Ya "kacamata kuda" itu selaras dengan konteks "manusia satu dimensi". Dalam *One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (1964), terlepas dari konteks buku ini ketika ditulis, Mercuse mencatat bahwa masyarakat industri maju menciptakan kebutuhan palsu yang terintegrasi dalam sistem produksi dan konsumsi yang dikemas melalui media massa, iklan, manajemen industri, dan mode pemikiran. Hal itu menghasilkan satu dimensi pemikiran dan perilaku tanpa daya kritis dan perlawanan.[5] Politik memang bisa mengarahkan para pelakunya, bahkan secara massif, untuk berpikir tunggal dan seragam. Karena itulah, novelis Goerge Orwell menyindir totalitarianisme politik, di mana, "Semua masalah adalah masalah politik, dan politik itu sendiri adalah kebohongan, penggelapan, kebodohan, kebencian dan *skizofrenia* [yang dilakukan secara] massif."[6]

5 Mercuse (1964).

6 Brainyquote.com. *All issues are political issues, and politics itself is a mass of lies, evasions, folly, hatred and schizophrenia*.

Keberhasilan peradaban diukur bukan hanya dari prestasi estetika, tetapi juga, ... dalam durasi dan kualitas hidup warganya

- Niall Ferguson

The success of a civilization is measured not just in its aesthetic achievements but also, ... in the duration and quality of life of its citizens.

Dengan berpikir tunggal, tertutuplah alternatif. Apa yang disampaikan Orwell ekstrim: politik itu negatif sekali kalau praktiknya ke arah totalitarian. Tetapi, kelak kita akan bahas ekstrim sebaliknya: politik itu mulia sekali. Nixon pun pernah berkata, "Saya menolak pandangan sinis, bahwa politik itu urusan kotor." [7]

Tapi, politik itu apanya kebudayaan?

Politik sering dikatakan salah satu dimensi kebudayaan. Dalam sebuah orasi kebudayaan, budayawan Radhar Panca Dahana pernah mengatakan, kebudayaan itu berpintu banyak, politik itu berpintu satu.[8] Karenanya, dikatakan, kebudayaan lebih lentur ketimbang politik. Kita lazim mendengar istilah pendekatan kebudayaan atau *culture approach* yang sering diyakini lebih mampu mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan politik (*political approach*). Gerakan kebudayaan lebih luas cakupannya ketimbang gerakan politik. Tapi, politik jelas mampu memengaruhi kebudayaan. Dengan politik, maka manusia akan mengambil keputusan-keputusan apapun, yang pada akhirnya turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam wacana kebudayaan ada bab strategi kebudayaan, dan itu perlu politik.

Kalau budaya politik, apa pengertiannya?

Budaya politik (*political culture*) lazim dibicarakan panjang lebar dalam kajian ilmu politik. Definisinya macam-macam, misalnya Lucian W. Pye mencatat budaya politik itu "terdiri dari sikap-sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan menjadi isu-isu politik".[9] Robert H. Dahl meringkasnya ke dalam beberapa pertanyaan pokok:

- Orientasi pemecahan masalah: apakah mereka pragmatis atau rasionalistik?
- Orientasi tindakan kolektif: apakah mereka kooperatif atau non-kooperatif?

7 Brainyquote.com. *I reject the cynical view that politics is a dirty business.*

8 Esai-esainya tentang kebudayaan dan politik, lihat Dahana (2015)

9 Pye (1965:7).

- Orientasi terhadap sistem politik: apakah mereka setia (*allegiant*) atau terasing?
- Orientasi terhadap liyan: apakah mereka saling percaya atau curiga?[10]

Budaya politik itu ranah subyektif yang melibatkan dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif. Pengetahuan, perasaan, dan penilaian itulah yang mempertegas subyektivitas budaya politik.[11]

Teoritik sekali ya ...

Ya, intinya sebenarnya sederhana: bagaimana seseorang punya sikap mental dan tindakan politik yang dipengaruhi faktor budaya dalam sistem politik. Ulasannya bisa panjang lebar, melibatkan banyak pendapat dan kajian. Kalau Anda ingin memperdalam perkembangan teoritik dan sebagainya, silakan perdalam di kampus yang membuka jurusan ilmu politik.

BTW bagaimana lanjutan penjelasan politik mempengaruhi peradaban?

Kalau kita baca Paul Kennedy, *The Rise and Fall of the Great Powers* yang mengeksplorasi ragam peradaban besar dunia 1500-1980 berikut jatuh bangunnya, tergambarlah dinamika peradaban yang ditentukan kekuatan-kekuatan (politik) besar. Atau ulasan Niall Ferguson dalam *Civilization* yang menggambarkan sejarah perjalanan peradaban yang tak lepas dari politik: bagaimana politik menentukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan dan praktik tentang kepemilikan (properti), penemuan obat-obatan dalam dunia kedokteran, dan sebagainya. Bangsa Barat dalam sejarahnya, tak selalu unggul dibandingkan Bangsa Timur. Persaingan mereka sedemikian rupa, yang tak luput dari fase kolonialisme Barat, telah membentuk peradaban dunia sebagaimana kita jumpai sekarang. Buku Ferguson menyisakan pertanyaan: apakah tatanan peradaban dunia kita mendatang akan menghadirkan kekuatan besar yang sanggup menyaingi Barat?[12]

Dalam perspektif institusional, politik berperan menciptakan kelembagaan ekonomi-politik, apakah inklusif atau ekstraktif, yang berpengaruh pada peradaban, gagal tidaknya negara. Perspektif demikian dikembangkan Acemoglu dan Robinson.[13] Negara yang institusi politik-ekonominya inklusif berpotensi menjadi negara kaya. Sementara negara yang institusi politik-ekonominya ekstraktif, cenderung tinggal menunggu waktu untuk terseret

10 Dahl (1966:352-353).

11 Almond dan Powell (1966:50).

12 Kennedy (1987); Ferguson (2011).

13 Acemoglu dan Robinson (2014).

Politik hanya memikirkan masalah-masalah jangka pendek. Kita sungguh takut bahwa dengan berpolitik ... jadi miopik, hanya mampu melihat realitas-realitas yang dekat. Orientasi bahwa kekuasaan akan menyelesaikan banyak hal, ternyata hanya benar dalam jangka pendek

- Kuntowijoyo

ke dalam jurang kemiskinan, instabilitas politik, dan menjadi negara gagal.

Apa yang dimaksud inklusif dan ekstraktif?

Institusi politik inklusif ditandai kekeluasaan masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses politik. Institusi inklusif terbuka dan plural, elite penguasa dibatasi mekanisme *checks and balances*, *rule of law* pun hadir melindungi segenap warga negara. Institusi politik inklusif diyakini menciptakan institusi ekonomi inklusif. Cirinya, ada jaminan hak milik dan *patent*, kemudahan berusaha, terbukanya akses terhadap pasar, pun dukungan kebijakan negara dalam kemudahan akses pendidikan dan kesempatan yang sama berpartisipasi dalam ekonomi.

Sementara institusi politik ekstraktif: tertutup, otoriter, membatasi partisipasi, dan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan segelintir orang, tanpa *checks and balances*, serta *rule of law* yang lemah. Institusi politik ekstraktif mendorong hadirnya institusi ekonomi ekstraktif. Intinya, segala sumber daya yang ada diarahkan untuk kepentingan elite penguasa. Institusi ekonomi ekstraktif ditandai lemahnya proteksi terhadap hak milik, adanya *entry barrier* terhadap aktor pasar yang menciptakan *level of playing field* berbeda bagi setiap aktor, pun adanya hambatan yang mencegah fungsi pasar berjalan dengan sempurna.

Adakah contoh-contohnya?

Inggris menggeser institusinya dari ekstraktif ke inklusif diawali keinginan masyarakat akan proteksi hak milik dan partisipasi politik. Adanya dokumen yang mengikat Raja untuk tidak sewenang-wenang terhadap para tuan tanah, yakni *Magna Charta*, pun *Glorious Revolution* yang memperkuat parlemen dan menggeser peran absolut raja menandai pergeseran institusi yang dimaksud. Institusi inklusif selalu menghasilkan *creative destruction*, kata lain dari *competition* yang memungkinkan terjadinya mekanisme distribusi kekayaan dan kekuasaan di masyarakat. Dalam konteks ini, Inggrislah yang memulai revolusi industri, pemicu peradaban modern.

Sebagai suatu perspektif, apa yang dipaparkan Acemoglu dan Robin-

son menarik, kendatipun segera menemukan keterbatasannya. Misalnya, keduanya cenderung tak mampu menjelaskan kehadiran institusi ekonomi inklusif dari ranah institusi politik ekstraktif. Munculnya institusi-institusi ekonomi inklusif di Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura terjadi pada saat negara-negara ini berada di bawah rezim otoriter. Pun China. Saat ini China berhasil menciptakan mesin pertumbuhan ekonomi dalam ranah politik ekstraktif. Tetapi, akankah pertumbuhan ekonominya terus berlanjut dan ia berhasil mengalahkan kedigdayaan Barat? Sebaliknya, apakah kejayaan AS memudar? Karya Acemoglu dan Robinson ini, sayangnya, tak memiliki kekuatan prediktif.[14]

Kalau politik sebagai ilmu, seni dan permainan?

Sebagai ilmu, *political science* merupakan cabang ilmu sosial, ia telah menjadi kajian tersendiri, di mana politik ditelaah perspektif keilmuan. Kajian ilmu politik dilakukan dengan metodologi kelimuan dan subtema-subtema yang bermacam-macam dari aspek teoritik hingga pemikiran.[15] Memang risikonya, ketika politik ditelaah secara metodologis, para pakar bisa jadi terjebak pada aspek-aspek yang seringkali terkesan mengawang-awang. Ilmu politik, justru dipandang kurang bisa membumi, dan sering gagal menjelaskan fenomena politik yang mencengangkan. Belum lagi, kritik soal monopoli istilah dan konsep yang Barat-sentris, dan sering dikeluhkan tidak mampu menjawab masalah-masalah dalam masyarakat.

Sementara, politik sebagai seni kemungkinan (*the art of possibilities*), meringkaskan pengertian bahwa apa yang tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Dalam berpolitik ada diplomasi, negosiasi, koalisi, kampanye. Di situ ada seni untuk meyakinkan. Melalui pencitraan, politik memberi peluang bagi seseorang dari *nothing* alias bukan siapa-siapa, menjadi *something* alias entitas yang kelas sosialnya naik, dan bukan itu saja, karena dia mendadak menjadi elite penentu perubahan. Politik adalah seni meraih atau mempertahankan kedudukannya dalam struktur kekuasaan. Politik juga bermakna sebagai seni untuk memutuskan kebijakan publik.

Tapi, ada pandangan sebaliknya yang menyebut politik bukanlah seni kemungkinan. John Kenneth Galbraith, misalnya berpendapat, *politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable*.[16] Bagaimana politik dapat disebut sebagai seni kemungkinan apabila pilihannya hanya antara *malapetaka* dan *hal-hal yang tidak*

14 Mochamad Faisal Karim, "Melacak Akar Kesejahteraan", Selasar.com, 9 Mei 2014.

15 Tentang berbagai wacana yang dibahas dalam ilmu politik, lihat White dan Moon (2004). Berbagai perkembangan wacana teori politik kontemporer, lihat Bronner (2006).

16 Brainyquotes.com

menyenangkan? Pandangan ini kerap ditemui pada orang yang merasa dilematis dalam menentukan pilihan politik, sehingga jauh-jauh hari sudah apatis karena merasa tidak ada pilihan. Kaum *non voters* alias populer di sini dengan sebutan *golongan putih* (golput) dalam pemilu lazim hadir dari kondisi yang menyebabkan mereka merasa tidak punya pilihan, sehingga memutuskan memilih untuk tidak memilih dalam pemilu.

Politik itu seni kemungkinan, apa tak sekadar pembenaran inkonsistensi?

Kita harus lihat prosesnya. Keputusan politik kan ditentukan banyak variabel. Kalau yang dilihat hasil akhir semata, sepertinya politik itu inkonsisten. Politik identik kepentingan: tak ada kawan dan lawan abadi. Koalisi politik bisa bergeser-geser sedemikian rupa selaras kepentingan. Fenomena semacam itu lazim memicu perdebatan: bagaimana memahami fenomena politik *kutu loncat* atau meminjam Djohan Effendi, *bajing loncat*. Tapi sebelum ke sana, ada pendapat penting dari Henry Willer, bahwa, "Seni tidak mengajarkan apa-apa, kecuali makna penting kehidupan".[17] Yang ditekankan di sini maknanya, pencerahannya, ikhtiarnya untuk menuju jati diri yang otentik.

Bajing loncat? Apa maksudnya?

Bajing (*squirrel*) adalah nama umum mamalia pengerat dari suku *Sciuridae*. Di Indonesia bajing lazim dikenal bajing kelapa (*Callosciurus notatus*), di mana si bajing suka memanjat dan makan buah kelapa. Dia lincah melompat dari pohon ke pohon, dan entah mengapa kemudian bajing menjadi kata dasar dari kata *bajingan* sebagai julukan pencuri dan penjahat. Bajing loncat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dicatat sebagai "pencoleng yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan."[18] Kata ini juga mengingatkan kita pada judul lagu Sunda, *Bajing Luncat*, yang dipopulerkan oleh penyanyi Upit Sarimanah pada akhir 1960-an. Kalau kemudian Pak Djohan Effendi memilih kata *bajing loncat*, bukan *kutu loncat*, maka *hmmm*, gimana *ya*? Anda bisa menduga-duga sendiri, tapi tampaknya bajing lebih gawat ketimbang sekadar kutu. Tapi tahukah Anda di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (dan sekitarnya) ada perkumpulan para *bajingan*?

Wah, bajingan macam apa itu?

Majalah *Intisari* pernah melaporkan, bajingan itu profesi mulia sekaligus langka. Bajingan yang dimaksud pengemudi gerobak sapi atau pedati,

17 Soedjatmoko (1995:60).

18 kbbi.web.id/bajing

Sangat tidak terpuji kalau pimpinan sebuah parpol membujuk-bujuk tokoh partai lain untuk meninggalkan partainya dan bergabung dengan partainya sendiri

- Djohan Effendy

untuk membedakan dengan sopir, pilot, masinis, atau nakhoda. Baru dengar ya? Maklum karena kata *bajingan* memang lebih banyak dikonotasikan negatif sebagai sosok jahat di komik-komik. Para bajingan sudah terlanjur menjadi musuhnya Jaka Sembung atau Si Buta dari Gua Hantu dan Gundala Putra Petir. Mengapa pengemudi pedati disebut *bajingan*? Berdasarkan kisah para tetua, ini orang Jawa ingin menghindari kata umpatan, karena ia sangat ditabukan dan diyakini rezekinya bisa *seret*, *mampet*. Bajingan jadi umpatan, karena konon para penunggu gerobak sapi kesal, karena kedatangannya telat, padahal sudah dinanti-nantikan untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke kota. Mereka mengolok-olok si Bajingan dengan niat humor semata. *Hmm* lama betul datangnya, *dasar bajingan*! [19]

Bagaimana kalau kita simak tulisan Pak Djohan itu?

Effendy menulis betapa kini orang mudah pindah-pindah partai. Integritas tak lagi jadi ukuran dan acuan. Catatnya,

> Sungguh sangat sukar untuk dinalar dari perspektif pembangunan kehidupan perpolitikan yang sehat dan bermartabat ketika kita menyaksikan seorang tokoh sebuah partai meloncat ke partai lain untuk menduduki jabatan kepengurusan atau seorang pejabat yang pencalonannya atas nama suatu partai lalu pindah ke partai, meninggalkan partai yang mencalonkannya.
>
> ... Tentulah juga sangat tidak terpuji kalau pimpinan sebuah parpol membujuk-bujuk tokoh partai lain untuk meninggalkan partainya dan bergabung dengan partainya sendiri. Hal-hal seperti ini memperlihatkan gejala demoralisasi dalam kehidupan perpolitikan di negeri kita dan betapa menjadi seorang politisi tidak lagi dianggap sebagai karier yang mulia.[20]

Tetapi, pandangan di atas kan biasanya dipatahkan oleh argumentasi yang kesannya tak kalah etis?

Elite yang pindah partai biasanya berdalih keluhan tak bisa optimal memperjuangkan hal-hal mulia di partainya terdahulu. Ia merasa terham-

19 "Bajingan Profesi yang jadi Umpatan" ditulis oleh Sulistyawan dan fotografer Kurniawan Adi Nugroho, Majalah *Intisari* Edisi Oktober 2014, hal. 16-22.

20 Djohan Effendi, "Politisi Idealis Vs Politisi Bajing Loncat," *Kompas*, 2 Juli 2010.

LIFE

Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, karena dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya

- Bung Karno

bat, maka pindah ke yang lain adalah hal yang wajar. Ia tetap merasa sebagai manusia politik yang konsisten memperjuangkan idealisme politik. Tapi, bagaimanapun juga, secara umum pindah partai tetap kurang etis, betapapun selalu ada konteksnya: mengapa pindah? Apakah sekedar mengejar jabatan atau ada sesuatu yang mendasar? Dalam konteks ini, kita bisa memahami Effendy dalam membandingkan fenomena politisi *bajing loncat* masa kini dengan kasus Pangeran Moehammad Noer di masa lalu.

O, bagaimana kisahnya?

Effendy mengisahkan pengalaman politik, ketika Bung Karno anti partai-partai dan pada 1957 membentuk Kabinet Kerja Darurat Ekstra-Parlementer. Catatnya,

> Masyumi yang mulai berseberangan dengan Bung Karno menganggap Kabinet Karya bentukan warga negara Soekarno itu sebagai inkonstitusional dan karena itu melarang setiap anggotanya untuk masuk dalam kabinet bentukan warga negara Soekarno. Namun, ternyata formatur berhasil meminta Pangeran Moehammad Noer, mantan gubernur pertama Kalimantan yang juga anggota Partai Masyumi, menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Bagi Pangeran Moehammad Noer, sikapnya didasarkan pada prinsip, loyalitas terhadap partai berakhir ke-

tika negara memanggilnya untuk mengabdi. Kesediaan Pangeran Moehammad Noer duduk dalam Kabinet Karya merupakan tamparan telak bagi Masyumi.

Beberapa kalangan pendukung pemerintah memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Tapi, ada yang menarik dalam kasus Pangeran Moehammad Noer ini, yakni pendapat Ali Sastroamidjojo, seorang tokoh PNI. Beliau justru mengkritik sikap teman-teman separtainya yang memuji-muji sikap Pangeran Moehammad Noer. Sikap tidak loyal seorang anggota parpol, apalagi kalau dia seorang tokoh, terhadap partainya, menurut Ali, mestinya tidak dipuji-puji oleh parpol lain. Hal ini tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat. Kritik Ali sejalan dengan kekecewaan Bung Hatta terhadap gejala krisis watak di kalangan politikus saat itu.[21]

Dalam hal kasus Moehammad Noer, Djohan berpendapat ia mengambil sikap berbeda dengan partainya karena merasa terpanggil mengabdi kepada negaranya, dan hal ini ia buktikan dengan berbagai tinggalannya, antara lain warisan monumental, Waduk Riam Kanan yang kini dikenal sebagai PLTA Pangeran Moehammad Noer.

Apa yang bisa digarisbawahi dari artikel tersebut?

Politisi kadang abai kepatutan. Dalam kepatutan budaya Timur, calon pemimpin memperlihatkan diri secara pasif, menunggu didesak dicalonkan yang lain, lalu secara teatrikal mengatakan dengan berat hati menerimanya sebagai amanah dan panggilan. Demokrasi menerobos hal-hal semacam itu: menampakkan ambisi tidak lagi dianggap tabu. Politik multipartai kini ingar bingar. Berpolitik butuh argumentasi dan konteks. Politik menyediakan ruang pindah perahu, kendatipun tetap kontroversi al secara etika.

Baiklah, kalau politik sebagai permainan?

Dalam politik ada kompetisi, pertarungan, di mana ada pihak-pihak yang harus *menang* atau *kalah*. Dari perspektif ini, panggung politik adalah arena kontestasi, di mana para kontestan saling berlaga. Layaknya pertandingan, politik memperhadapkan kekuatan-kekuatan politik dalam suatu kompetisi. Kalau pelaku politik berjumlah banyak, maka diniscayakan adanya koalisi politik untuk menghadapi yang lain. Di negara demokrasi, pemilu merupakan momentum bagi partai-partai politik mengukur tingkat dukungan politiknya. Demokrasi adalah *the only game in town*.[22] Memang seringkali ada yang tak jujur, menggunakan cara-cara tidak lazim semisal politik uang, intimidasi dan kekerasan. Inilah yang membuat sinisme berkembang: politik itu kejam, karena mereka yang terlibat semata-mata

21 Djohan Effendi, "Politisi Idealis."

22 Linz dan Stepan (1996:14-33).

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka

- Bung Karno

terfokus *political game*. Padahal, politik itu maknanya bisa lebih luas ketimbang sekadar kompetisi.

Benarkah politik itu *absurd*?

Setidaknya demikian apabila kita baca cerpen Kuntowijoyo "Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi" (*Kompas*, 18 Mei 2003). Cerpen ini menarik.Seting ceritanya, pilihan kepada desa pada zaman Orde Baru, persaingan Sutarjo (37), pengusaha konveksi, *versus* pensiunan Kapten TNI. Sutarjo, yang kendatipun konon "tidak bersih diri" karena alamarhum bapaknya pernah terlibat G30S (sesuatu yang ditabukan Orde Baru), tetap bisa lolos ujian seleksi pencalonan. Sutarjo punya tim sukses yang mengarahkan banyak hal. Semuanya dituruti, termasuk ketika ia harus melakukan hal-hal yang kurang masuk akal demi memperoleh dukungan. Singkat kata, dalam pemungutan suara pilkades, Sutarjo kalah telak. Tim suksesnya selalu menghibur dengan jawaban-jawaban *enteng*.

> "Ya, itulah politik. Sekali menang, sekali kalah. Sekali timbul, sekali tenggelam. Sekali datang, sekali pergi. Begitu ritmenya, tanpa henti. Hadapi ritme itu dengan humor tinggi. Jangan kalau menang senang, kalau kalah susah. Jangan ...," komentar sang penasihat enteng.
>
> Sutarjo tak kunjung mengerti. Kepalanya menggeleng-geleng. "Ck, ck," kata mulutnya, kemudian melongo.[23]

O sekarang aku paham mengapa dalam politik tim sukses selalu "sukses"?

He, he meskipun yang disukseskan tidak selalu sukses. Tampaknya begitulah salah satu pesan penting cerpen Kuntowijoyo di atas.●

23 Kuntowijoyo (2013:125).

Bab 3

Kesukarelaan, Kompetisi, dan *Setan Gundul*

Tentang Tren Populisme Politik

MENGAPA TEMA kepemimpinan bisnis lebih populer ketimbang kepemimpinan politik?

Para ahli manajemen lebih gencar mengarang buku-buku kepemimpinan bisnis secara populer. Karyanya memenuhi rak toko buku. Sementara, tema kepemimpinan politik jarang ditulis secara populer oleh para ahlinya. Saya kurang tahu mengapa hal ini terjadi. Tema politik sebenarnya juga variatif, tetapi saya tidak tahu persis, mengapa tema kepemimpinan politik seperti kurang diperhatikan, sehingga kita susah mencari buku-buku populer tentang kepemimpinan politik di rak-rak toko buku.

Hakikat kepemimpinan sesungguhnya kan sama?

Hakikat dan prinsip kepemimpinan memang universal. Ia multidimensi atau multidisiplin. Ada dalil sederhana, kepemimpinan merupakan bagian yang tak terhindarkan dalam hidup kita.[1] Pernyataan itu langsung kita amini, karena kepemimpinan memang merupakan fenomena. Dari sinilah kemudian timbul beragam perspektif dan analisis.

1 Paschen dan Dihsmaier (2014:1).

Lembaga non-profit ialah agen perubahan-manusia. Produk mereka ialah pasien yang sembuh, anak yang belajar ...

- Peter F. Drucker

The non-profit institutions are human-change agents. Their product is a cured patient, a child that learns ...

Kepemimpinan itu sesuatu yang *luwes*. Pembahasannya bisa ke sana kemari. Salah satu prinsipnya, sebagaimana dikatakan Kissinger ialah imajinasi. Menurutnya tugas para pemimpin menggerakkan orang lain dari tempat mereka sekarang ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi.[2] Apa yang dikatakan Kissinger ini senada dengan Robespierre, bahwa "Seorang pemimpin memiliki dua karakteristik penting; pertama, ia pergi ke suatu tempat; kedua, ia mampu membujuk orang lain untuk pergi bersamanya".[3]

Hal ini segera memicu imajinasi kita bahwa pemimpin itu seperti manusia ajaib, seperti kata orang Jawa, orang yang *weruh sak durunge winarah*, tahu sebelum yang lain tahu. Pemimpin tak harus pernah datang ke suatu tempat secara fisik, sebagaimana mereka yang suka jalan-jalan studi banding, dan kemudian membujuk orang-orang agar datang ke sana. Pemimpin punya visi dan mampu menggerakkan orang untuk mewujudkannya. Dalam hal yang terakhir inilah, kepemimpinan berarti pengaruh. Pemimpin yang otentik punya daya pikat atau kharisma untuk menggerakkan orang-orang mengunjungi tempat imajiner yang ia katakan.

Hal demikian tampak berlaku untuk semua jenis kepemimpinan, termasuk kepemimpinan politik dan bisnis. Yang membedakan, kalau kita merujuk Drucker, kepemimpinan politik itu masuk ke ranah organisasi non-profit. Kepemimpinan bisnis, sementara itu, urusannya dengan hal-ikhwal organisasi profit.[4]

Jadi, organisasi politik itu organisasi sukarela?

Organisasi non-profit, menurut Peter F. Drucker, memang merupakan istilah lain dari organisasi sukarela. Ia tidak bertujuan untuk mencari laba, tetapi terkait dengan *visi-misi kenon-profitan*. Tentu organisasi non-profit butuh modal untuk bergerak, dan ada kalanya para pengurusnya mencari dana dengan cara-cara yang hampir sama dengan organisasi profit. Tetapi,

2 Brainyquotes.com. *The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been*.

3 Brainyquotes.com. *A leader has two important characteristics; first, he is going somewhere; second, he is able to persuade other people to go with him.*

4 Tentang hal-ikhwal kenon-profitan ini, lihat Drucker (2005).

fokusnya tetap ke ranah organisasi sukarela, karena orang punya kepentingan yang sama, maka bekerjasamalah mereka. Kendatipun demikian, pemimpin politik tidak sekadar pemimpin organisasi sukarela. Kesukarelaan itu penting dalam politik, tetapi organisasi politik tidak sekedar bertumpu kepada kesukarelaan. Organisasi politik memiliki struktur dan tradisi insentif yang berbeda dengan organisasi swadaya masyarakat atau organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi politik bukan sebuah yayasan yang cakupan dan ruang lingkupnya terbatas dan fokus ke hal-hal yang menjadi minatnya. Karena tujuannya politis, maka organisasi politik berurusan dengan target-target politik. Seringkali, aspek sukarela saja tidak cukup dalam politik. Tetapi, wawasan tentang kepemimpinan organisasi non-profit tetaplah penting dan mendasar.

Selain itu, adanya realitas kompetisi dalam politik, terlepas hal ini ada juga dalam aktivitas ekonomi atau bisnis, tentu itulah yang menjadikan organisasi politik, sebagai organisasi sukarela yang berbeda dengan yang lain. Dalam politik ada kompetisi di mana satu sama lain dituntut untuk bisa menggerakkan relawan dalam meraup dukungan suara. Di sini ada pihak-pihak yang harus menang atau kalah. Kompetisi, karenanya, menjadi fokus organisasi-organisasi politik dalam pentas politik sebagai arena kontestasi. Para kontestan saling berlaga. Di negara demokrasi, dianutlah prinsip demokrasi sebagai *the only game in town*, ketika pemilu merupakan keniscayaan utama, momentum bagi kekuatan-kekuatan politik untuk mengukur tingkat dukungannya. Dalam berkompetisi, semua pihak harus paham aturan main.

Dalam demokrasi politik melalui pemilu, apa ada jaminan bagi kehadiran "pemimpin ideal"?

Demokrasi memang bekerja menurut logikanya sendiri, apalagi, ketika ia diderivasikan ke sistem politik elektoral yang bekerja berdasarkan prinsip *one person, one vote, one value* (OPOVOV). Dalam prinsip itu, suara tujuh orang profesor dinilai sama dengan tujuh orang lulusan sekolah dasar. Apabila dikaitkan dengan konteks kepemimpinan politik, maka hal ini segera mengingatkan kita pada komentar Nurcholish Madjid, bahwa,

> Karena kita telah mengalami demokrasi, siapa pun yang dipilih rakyat, itulah pilihan kita. Memang bisa saja ada kecelakaan. Bisa saja pilihan kita adalah orang yang lemah atau orang buta huruf. Tapi itu absah. Setan gundul pun, kalau jadi presiden pilihan rakyat, apa mau dikata.[5]

5 Wawancara Nurcholish Madjid dengan *Tempo Interaktif*, 28 April – 4 Mei 2003.

PANJI MASYARAKAT

Karena kita telah mengalami demokrasi ... Setan gundul pun, kalau jadi presiden pilihan rakyat, apa mau dikata

- Nurcholish Madjid

Setan Gundul jadi pemimpin?

Ya, tidak hanya Petruk saja dalam kisah inovasi pewayangan kita, bisa jadi Raja. Tapi, dari mana *ya* Cak Nur dapat istilah *setan gundul*? Rasanya tanpa kita lacak pun, kita bisa menebak, bahwa yang disebut *setan gundul* oleh Cak Nur itu ialah orang bertabiat buruk. Demokrasi memberi ruang bagi hadirnya tokoh yang, seringkali tak disangka-sangka kemunculannya (*satrio piningit*). Demokrasi elektoral itu, bisa dijelaskan dari konteks *benere wong akeh*, kebenaran (politik) orang banyak. Bahkan pun, biang kerok Perang Dunia II, Adolf Hitler pun pernah demikian populer dan memenangkan pemilu. Dalam konteks inilah, kita perlu mengkaji hal-ikhwal fenomena populisme politik.

Kalau orang jahat bisa jadi pemimpin karena demokrasi, maka itulah salah satu kelemahannya?

Ya, demokrasi mengandung kelemahan-kelemahan. Tetapi, ia juga diyakini mampu memperbaikinya, setidaknya memberi ruang bagi kerusakan-kerusakan akibat kesalahan-kesalahan. Itulah makna apa yang oleh Cak Nur sering sebut *trial and error* atau demokrasi coba gagal (dengan harapan kegagalan tak terus berulang). Ini merupakan konsekuensi logis pula dari apa yang pernah disinyalir Winston Churchill yang intinya, kendatipun demokrasi sering disebut sebagai bentuk pemerintahan yang terburuk,

Secara intelektual saya tidak yakin bahwa satu orang, satu suara adalah yang terbaik

- Lee Kuan Yew

tetapi belum ada sistem pemerintahan lainnya dari waktu ke waktu yang dipandang lebih baik ketimbang demokrasi.[6]

Prinsip OPOVOV dalam demokrasi langsung/pemilu pun tak lepas dari kritik mendasar, setidaknya apabila kita berpangkal dari Plato, yang lebih memposisikan kelas filosof nilainya lebih ketimbang orang awam. Prinsip OPOVOV merupakan derivasi logis dari demokrasi substansial, terutama dalam hal kesederajatan (egalitarianisme), bahwa dalam demokrasi langsung/pemilu nilai suara seorang profesor sama dengan kuli bangunan; nilai suara seorang bakul jamu gendong sama dengan direktur rumah sakit; nilai suara seorang presiden sama dengan ajudannya, dan seterusnya. Demokrasi menghargai suara rakyat, sedemikian rupa sehingga suara *ndoro*/tuan-majikan sama dengan pembantu atau pekerjanya.

Itulah yang menyebabkan mengapa, pada Pemilu 1955 di suatu daerah pemroduksi batik di Jawa Tengah, partai yang didukung para buruh berbeda dengan pilihan majikannya. Mungkin ini sebagai bentuk protes atau sekadar cara mereka mengekspresikan perbedaan pilihan politik semata, atau merupakan fenomena *jor-joran* ideologi politik aliran yang marak ketika itu. Memang demikianlah "revolusi demokrasi": ada hal-hal yang membuat ideal-ideal politik yang banyak diperbincangkan ruangan-ruangan kelas di kampus-kampus, tergusur oleh banyak hal yang sering kurang masuk akal.

Contoh ekstrimnya, dalam demokrasi politik yang demikian liberal dalam pemilihan pemimpin eksekutif terutama, bahkan "Petruk" pun bisa jadi "raja". "Raja" yang dimaksud bisa presiden, bisa kepala daerah, atau kepala desa. Petruk, yang simbol rakyat jelata atau katakan seorang mantan kuli bangunan punya peluang besar jadi pemimpin politik, kalau dia populer dan, dalam bahasa politik zaman sekarang, "elektabel". Profesor yang tidak populer, dan tidak mengesankan alias tidak mampu menciptakan efek dramatik pada massa pemilih, tentu akan sulit dipilih sebagai pemimpin. Itulah demokrasi, yang jelas beda dengan suksesi kepemimpinan feodalistik-otoritarian dalam sistem monarkhi absolut.

Hmm, bagaimana sih kisah "Petruk jadi raja" itu?

Itu ada dalam dunia pewayangan versi Jawa. Sebagaimana dicatat So-

6 Brainyquotes.com. *It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.*

lichin, dikisahkan pada suatu saat terjadilah perebutan pusaka sakti *Jimat Kalimasada* — konon bahkan ia merupakan pusaka paling sakti dalam jagat pewayangan, yang konon sengaja diciptakan oleh para Wali merujuk pada *dua kalimah syahadat* — antara Mustakaweni dari Hima Himantaka dan Bambang Priyambada, salah seorang putra Arjuna. Dalam perebutan itu Bambang Priyambada menang dan menitipkan jimat pusaka miliki Puntadewa itu kepada Petruk. Karena mengetahui tuah dari pusaka itu, Petruk melarikan diri, pergi ke kerajaan Loji Tengara untuk menaklukkan rajanya. Prabu Sasra Hadimurti, Raja Loji Tengara tak mampu menahan serangan Petruk yang bersenjatakan Jimat Kalimasada. Petruk pun menggantikan tahtanya, dengan mengangkat dirinya sebagai Prabu Durginadur Belgheduelbeh. Namun, Petruk tidak pernah melaksanakan tugas melaksanakan raja yakni duduk di singgasana dan menerima para hulubalang yang datang menghadap, menggantikannya dengan pesta pora menari *tayuban* bersama Limbuk, permaisurinya. Akhir lakon tersebut, Semar, Gareng, dan Bagong datang mengingatkan Petruk agar kembali mengemban tugas mulia sebagai abdi Pandawa.[7]

Dari segi tafsir, bagaimana ia berkembang?

Ada setidaknya dua hal menarik di sini. Tafsir yang lazim ialah, dan ini merupakan pesan pertama, ia menyimbolkan rakyat jelata menjadi pemimpin. Dan ini selaras saja dengan prinsip egalitarisnisme demokrasi. Tetapi, jangan lupa dalam cerita *carangan* itu, Petruk menyembunyikan Kalimasada dan memanfaatkannya untuk kepentingan diri-pribadi untuk merasakan "menjadi raja", dan setelah itu ia nyaris "tak terkendali", kalaulah tak dijatuhkan oleh adiknya sendiri: Bagong! Dari sini muncul pesan kedua, kekuasaan yang diraih secara tiba-tiba oleh orang yang tak punya kesiapan mental dan wawasan yang cukup untuk berkuasa, maka hal itu hanya akan menyusahkan orang banyak. Petruk bukan tidak boleh menjadi raja, tetapi setelah jadi raja, maka seyogyanya Petruk semakin adil-bijaksana. Tetapi, hal itu tak tercermin dalam watak Prabu Welgeduwelbeh, bukan? Ia malah mabuk-nikmat kekuasaan, sehingga para Panakawan lainnya turun tangan menyadarkannya. Maka, konon *Jimat Kalimasada* atau *Jamus Kalimasada* pun dikembalikan ke pemiliknya Prabu Puntadewa.

Kembali ke OPOVOV. Yang mengkritisi penerapan prinsip OPOVOV itu berarti Neo-Platonis?

Ya, setidaknya ketika Plato memberi posisi istimewa kaum filosof. Ini bisa dimaknai bahwa nilai suara kaum terdidik itu tidak sama dengan rakyat

7 Solichin (2010:268-269)

Adapun orang-orang yang berkuasa, mereka begitu ingin membangun mitos tidak pernah berbuat kesalahan ...

- Boris Pasternak

As for the men in power, they are so anxious to establish the myth of infallibility ...

biasa. Ada beda dalam nilai suara. Mungkin kita bisa segera memahami, maksud Plato adalah mengarahkan agar pemimpin yang muncul dari proses politik adalah mereka yang terjaga kualitas intelektual, emosianal dan spiritualnya. Artinya, pemimpin itu wilayah orang bijak, cerdik pandai, bukan orang biasa. Franz Magnis-Suseno menguraikan pandangan filsafat Plato/Platon, ringkasnya begini:

- Athena, pusat kebudayaan Yunani dan kota tempat tinggal Plato semakin merosot dalam semua bidang akibat kekalahannya dalam Perang Pelopones. Pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tak memenuhi syarat tapi berambisi.
- Dalam situasi seperti itu, Plato memberi orientasi: perlunya pola kehidupan kenegaraan yang baik, yakni apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan (dalam pengertian masyarakat yang selaras/seimbang atau masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, di mana masing-masing anggotanya memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka).
- Plato memahami *polis* (masyarakat yang tertata secara politis) sebagai yang diisi oleh manusia yang sehat dan utuh, di mana semua bagian jiwanya berada dalam hubungan selaras satu sama lain.
- Atas pemahaman demikian, Plato membagi tiga golongan dalam suatu negara: (1) para "penjamin makanan" (petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta, dan pelaut); (2) golongan "penjaga" (golongan ini sepenuhnya mengabdikan diri kepada kepentingan umum, menolak kepentingan-kepentingan pribadi, tidak boleh berkeluarga, tak memiliki hak milik pribadi, mereka dididik sedemikian rupa sejak dini dengan titik tekan tertib dan kebijakan [filsafat, gimnastik dan musik]); dan (3) golongan pemimpin.[8]

Bagaimana dengan golongan pemimpin?

Menurut Plato, para pemimpin diambil di antara para "penjaga", dari mereka yang mendalami filsafat. Itulah paham masyhur Plato tentang "raja-filosof". Filosof adalah orang yang sanggup untuk melihat *idea-idea* atau hakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang alam indrawi yang

8 Suseno (2003:186-187).

berubah-ubah. Hal itu mungkin karena ia telah mengatasi keterikatan pada nafsu dan indra dan dengan demikian bebas dari pamrih. Seorang filosof dapat memimpin masyarakat dengan berorientasi pada *idea* metafisik tertinggi, *idea* kebaikan.[9]

Dalam konteks tertentu, politisi senior Singapura Lee Kuan Yew pernah punya gagasan tentang prinsip *one man/people, two vote*. Dalam sebuah wawancaranya dengan Fareed Zakaria pada 1994, Yew mengatakan,

> Secara intelektual saya tidak yakin bahwa *satu orang, satu suara* adalah yang terbaik. ... Tapi saya yakin, secara pribadi, bahwa kami akan memiliki sistem yang lebih baik, jika kami memberi setiap orang yang berusia di atas 40 yang sudah berkeluarga, dua suara, karena dia cenderung lebih berhati-hati, suara juga mewakili anak-anaknya. Dia lebih cenderung untuk memilih dengan cara yang serius dari orang muda di bawah 30 yang [suka] berubah-ubah. Tapi, kami belum merasa perlu. Jika menjadi perlu, kami harus melakukannya. Pada saat yang sama, setelah seseorang melampaui usia 65, maka hal itu adalah masalah. Antara usia 40 dan 60 sangat ideal, dan pada 60 mereka harus kembali ke satu suara .... [10]

Gagasan Yew tersebut menarik, kendatipun kelihatannya mustahil diterapkan. Yew berpijak dari usia seseorang, di mana ada durasi usia yang pas untuk diberi nilai dua suara, yakni apabila seseorang telah mencapai usia antara 40 hingga 60 (dengan syarat, mereka telah berkeluarga). Mereka dipandang sudah lebih bijak atau berhati-hati, serta dimaksudkan untuk mewakili anak-anak mereka. Sementara yang masih di bawah usia 30 atau di atas 60 dikasih satu nilai suara (*one vote*) saja. Jadi, sekali lagi, pandangan Yew menarik sebagai wacana. Setidaknya, karena pandangannya itu tidak dikaitkan dengan hal-hal primordial, melainkan kategori usia. Tidak kok, misalnya memberi nilai berbeda misalnya antara majikan dan buruh, atau lelaki dan perempuan, tetapi usia dikaitkan dengan pertimbangan konteks *kebijakan*.

Kembali ke konteks *Setan Gundul*, Hitler dan populisme politik. Mengapa Hitler bisa terpilih?

Kendatipun merasa muak karena "pengaruhnya nyaris sepenuhnya jahat", Micheal H. Hart menempatkan Hitler ke ranking 35 dari 100 orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ia lahir di Braunau, Austria pada 1889, yang pada masa mudanya ialah "seorang nasionalis Jerman yang fanatik". Selama PD I, dia masuk angkatan bersenjata, terluka, dan menerima dua medali untuk keberanian. Kekalahan Jerman membuatnya terguncang dan

9 Suseno (2003:188).

10 "*A Conversation with Lee Kuan Yew*," *Foreign Affairs*, Maret/April 1994.

marah. Selanjutnya, kita simak lebih lanjut uraian Hart,

> Pada 1919, ketika berusia 30 tahun, dia bergabung dengan sebuah partai sayap kanan kecil di Muenchen, yang kemudian berubah namanya menjadi Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman (disingkat Partai Nazi). Dalam dua tahun dia menjadi pemimpin tanpa saingan di partai tersebut (dalam bahasa Jerman: Führer).
>
> Di bawah kepemimpinan Hitler, kekuatan Partai Nazi meningkat cepat, dan pada November 1923, partai ini mencoba melakukan kudeta yang dikenal sebagai *Munich Beer Hall Putsch*. Ketika percobaan kudeta ini gagal, Hitler ditangkap, diadili dengan tuduhan makar, dan divonis bersalah. Tapi, dia dilepaskan dari penjara setelah menjalani kurang dari satu tahun masa hukumannya.
>
> Pada 1928, Partai Nazi masih merupakan partai kecil. Namun, Depresi Besar membuat publik tidak puas terhadap partai-partai politik mapan di Jerman. Partai Nazi menambah kekuatan dengan cepat. Pada Januari 1933, di usia 44 tahun, Hitler menjadi kanselir Jerman. Begitu menjadi kanselir, Hitler segera mendirikan sebuah kediktaktoran dengan menggunakan aparatus pemerintahan untuk menghancurkan semua oposisi.[11]

Jadi ada momentum yang membuat Hitler diuntungkan: depresi besar. Dalam situasi semacam itu, rakyat mudah tergoda oleh retorika-retorika yang chauvinistik. Chauvinisme, istilah yang diambil dari nama Nicholas Chauvin tentara Perancis yang dikenal sangat fanatik kepada Napoleon, ialah sebuah keyakinan irasional tentang superioritas, menolak pandangan semua bangsa setara. Sang chauvinis melihat bangsanya sendiri sebagai "umat pilihan", di mana bangsa atau ras lain itu ancaman. Hitler mengeksploitasi isu keunggulan rasnya (bangsa Arya). Dalam *Mein Kampf*, Hitler mencatat bangsa Arya mewakili kekuatan cahaya, sedangkan bangsa Yahudi mewakili kegelapan dan kejahatan. Dengan dalih itulah, Hitler membantai warga Yahudi (peristiwa *Holocaust*). Selain mengembangkan nasionalisme-chauvinistik, Hitler juga merengkuh nasionalisme-ekspansionis, "Hitler memimpikan dominasi mutlak bangsa Arya di dunia".[12]

Apa yang dimaksud dengan populisme politik?

Raadt, Hollanders, dan Krouwel misalnya mencatat, populisme —

11 Hart (2009: 223-224).

12 Heywood (2014:208-209).

Kita punya publik besar yang demikian acuh tak acuh terhadap urusan publik dan rentan terhadap slogan sederhana kandidat yang muncul entah dari mana, tak punya rekam jejak, sekadar mulut memekik slogan

- Zbigniew Brzezinski

We have a large public that is very ignorant about public affairs and very susceptible to simplistic slogans by candidates who appear out of nowhere, have no track record, but mouth appealing slogans

setidaknya secara wacana ideologis — menolak kemapanan dan politik yang monoton, kendatipun tidak anti-demokrasi atau anti-politik.[13] Merujuk Laclau praktik populis muncul dari kegagalan lembaga-lembaga sosial dan politik, ketika meningkatnya tuntutan tidak disertai meningkatnya kemampuan sistem kelembagaan untuk menyerapnya.[14] Dalam kondisi ketika lembaga formal mengalami tekor kepercayaan, karena birokratis dan korup, politisi yang bergaya populis atau mengeksplorasi isu-isu populer sedemikian rupa sehingga memanjakan selera publik, segera menjadi pusat perhatian. Politisi populis juga menekankan gaya retorika yang membangkitkan emosi massa rakyat dan ragam jenis pendekatan politik yang "merakyat", sehingga ia terpersepsikan sebagai semacam *hero* dan juru selamat atas krisis yang tengah terjadi. Namun demikian, justru karena itulah, populisme mengandung sejumlah risiko.

Apa saja itu?

Pertama, populisme berpotensi ke arah kecelakaan politik. Bisa jadi yang dipilih rakyat yang sekadar politisi populer yang ternyata minim kompetensi dan tekor kapasitas. *Kedua*, ketika sistem kelembagaan tekor kepercayaan, sosok yang berimprovisasi di pentas politik dapat melampaui kesisteman politik. *Ketiga*, jangka pendek, orang terpuaskan dengan hadirnya sosok populis, tetapi tidak demikian untuk risiko jangka menengah dan panjangnya. *Keempat*, mungkin juga populisme sekadar memberikan penguatan *politik permukaan*, yang tidak berurusan dengan kedalaman makna dan pendidikan politik. Dalam banyak kasus, pemimpin populis justru sekadar bertahan dalam kekuasaannya dengan membatasi kebebasan publik dan kebijakan yang tidak populer dalam demokrasi. Karenanya, kehadiran pemimpin populis perlu disertai kekuatan penyeimbang yang sebanding.

13 Raadt, Hollanders, Krouwel (2004:2).

14 Laclau, (2005:32).

Oposisi adalah persahabatan sejati
- William Blake
Opposition is true friendship.

Kekuatan penyeimbang? Oposisi?

Kekuatan penyeimbang, tidak harus mewujud secara ketat dalam parlemen antara fraksi partai-partai politik yang mendukung pemerintah di satu sisi versus yang sebaliknya, tetapi secara substansial, yang penting ada kekuatan besar/signifikan yang dapat mengingatkan jalannya pemerintahan. Bisa saja hal itu datang dari parpol, ormas atau LSM, atau tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Dengan kata lain, harus ada tokoh atau lembaga yang dapat memainkan peran sebagai *juru ingat*. Di Indonesia, pernah ada pasangan dwitunggal Soekarno-Hatta yang dalam batas-batas tertentu saling melengkapi. Tak jarang Bung Hatta mengingatkan Bung Karno, pun Bung Karno memberi masukan ke Bung Hatta. Merujuk Feith, Soekarno bergaya *solidarity maker* dan Hatta *administrator*.[15] Ketika Bung Karno bereksperimen Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*), Bung Hatta melancarkan kritik terbuka melalui artikel panjang berjudul "Demokrasi Kita". Bung Hatta berpendapat Demokrasi Terpimpin bukan demokrasi yang sebenarnya.

Tadi Anda menyebut perspektif Herbeth Feith soal Soekarno-Hatta, bisa dielaborasi lagikah?

Nanti akan kita bicarakan di bab lain, yakni soal gaya-gaya kepemimpinan. Tapi, perlu kita simak bahwa kalau kita baca lagi perspektif tersebut, konteksnya ialah, terutama, masa revolusi. Dimensi vertikal politik Indonesia, terwakili oleh apa yang dikonsepsikan sebagai *administrator*, sedangkan dimensi horisontalnya direpresentasikan oleh tipe pemimpin *solidarity maker*. Dalam situasi revolusi (kemerdekaan) Feith mencatat adanya situasi yang menciptakan konflik antara administrator — pemimpin yang bercita rasa administratif, teknis, legal, dan "berkemampuan bahasa asing" untuk menunjukkan mereka itu aparat modern dalam sebuah negara modern — versus *solidarity maker*. Yang terakhir ini, merujuk Feith, terkait dengan kecanggihan atau keahlian pemimpin dalam melakukan fungsi mediasi dengan beragam kelompok di berbagai jenjang yang efektif secara politik, sebagai pengorganisasi massa, dan pandai memanfaatkan simbol-simbol.[16]

Bagaimana politik populis masa kini direfleksikan?

15 Feith (2007:113-114).

16 Feith (2007:113).

CHIANGRAITIMES.COM

**Jangan meremehkan rakyat.
Biarkan mereka memutuskan**

- Thaksin Shinawatra

Don't underestimate the people. Let them decide.

Harian *Kompas* pernah melakukan diskusi "*Populist Politics in Southeast Asia: Transforming or Impending Democracy?*", bahwa politik populis termasuk fenomena baru di Indonesia, tetapi tidak demikian di Amerika Latin, AS (melalui faksi/kelompok *Tea Party* di Partai Republik), dan Timur Tengah. Di Eropa, politik populis ditandai munculnya partai-partai politik anti-Uni Eropa, seperti Partai Front Nasional di bawah Marine Le Pen di Perancis, *United Kingdom Independence Party* di Inggris, selain hal yang sama di Spanyol, Finlandia, dan Belanda. Yang mencolok, kemenangan Partai Syriza di Yunani.[17]

Apa yang menyebabkan kemunculan politik populis?

Ia merupakan reaksi atas munculnya ketidakpercayaan sebagian besar masyarakat terhadap institusi sosial dan politik di negara bersangkutan. Ketimpangan keadilan dan kemakmuran melahirkan pemimpin yang menggunakan politik populis. Ia juga muncul karena kekecewaan pada janji-janji politik liberal, terutama di Barat, dan janji modernisme di negara berkembang. Politik populis berkaitan erat dengan efek globalisasi neoliberal dan seringkali berbarengan dengan dominasi oligarki yang melahirkan ketidakpercayaan pada kekuatan politik dan organisasinya. Apa pendorong dan basis sosial respons populis terhadap globalisasi neoliberal, hubungan antara populisme serta politik otoritarian dan demokrasi, serta bagaimana populisme menjawab bekerjanya ekonomi pasar dan agenda redistribusi kemakmuran? Jawabannya menggunakan pendekatan biner: populisme pada dasarnya melibatkan konsepsi politik sebagai konflik antara massa atau orang biasa pada satu sisi dan elite yang opresif pada sisi lain. Bisa juga

17 "Diskusi *Kompas*-Murdoch University: Era Politik Populis di Asia Tenggara dan Demokrasi", *Kompas*, 9 Juni 2015.

kontras antara "ekonomi tidak rasional" pada populisme dan "rasional" yang melekat pada pasar. Dalam organisasi, politik populis cenderung memotong kelembagaan dan memobilisasi massa untuk "demokrasi langsung", sementara politik liberal menekankan pada sistem keterwakilan.[18]

Jadi politik populis itu beragam?

Ya. Politik populis tidak tunggal dan bersifat kompleks. Justru karena keberagaman basis sosial politik populis, mungkin terjadi bentuk-bentuk populisme yang saling bersaing. Di Peru, Argentina, dan Thailand, misalnya, kebijakan ekonomi pro pasar mendukung politik populis. Karena politik ini merupakan reaksi atas dampak globalisasi neoliberal yang menyebabkan sebagian anggota masyarakat terpinggirkan, program redistribusi sosial menjadi bagian yang melekat. Dapat dikatakan, pendekatan politik populis pada ekonomi tergantung dari konteks sejarah dan basis dukungan sosial.[19]

Bagaimana hubungannya dengan demokrasi?

Dalam hubungan dengan demokrasi, politik populis dapat melahirkan kecenderungan politik eksklusif pada masyarakat demokrasi seperti di Barat. Namun, politik populis juga dapat menekan institusi demokrasi sehingga ruang politik dipaksa melebar untuk mengakomodasi kelompok sosial marjinal, jika perlu dengan mengorbankan politik keterwakilan. Kelompok populis dapat bersaing dengan kelompok nonpopulis, tetapi keduanya juga dapat beraliansi. Agenda tokoh atau partai yang dianggap populis dapat diadopsi partai atau kekuatan lain yang lebih mapan sebagai kompetisi politik, termasuk pada alam demokrasi. Dengan demikian, populisme di banyak negara mengalami "pengarus-utamaan" dalam berbagai bentuk.[20]

Bagaimana populisme politik di Asia Tenggara?

Di Asia Tenggara, contoh politik populis: Thaksin Shinawatra di Thailand dan Joseph Estrada di Filipina. Apabila Estrada mengandalkan popularitasnya sebagai eks-bintang film dan gagal menggalang kekuatan massa pendukung menjadi kekuatan politik, Thaksin mampu membangun kekuatan massa rakyat miskin kota dan desa, kendatipun ia gagal menghadapi elite politik dan ekonomi saat mencoba merealisasi janji redistribusi kemakmuran. Di Indonesia, dua kandidat Pilpres 2014, Prabowo Subianto dan Joko Widodo, sama-sama membawa agenda populisme, antara lain janji redistribusi kemakmuran pro-rakyat kecil. Meskipun pendekatannya berbeda, keduanya menggunakan jargon dari era Soekarno dan sedikit banyak

18 "Diskusi *Kompas*".

19 "Diskusi *Kompas*".

20 "Diskusi *Kompas*."

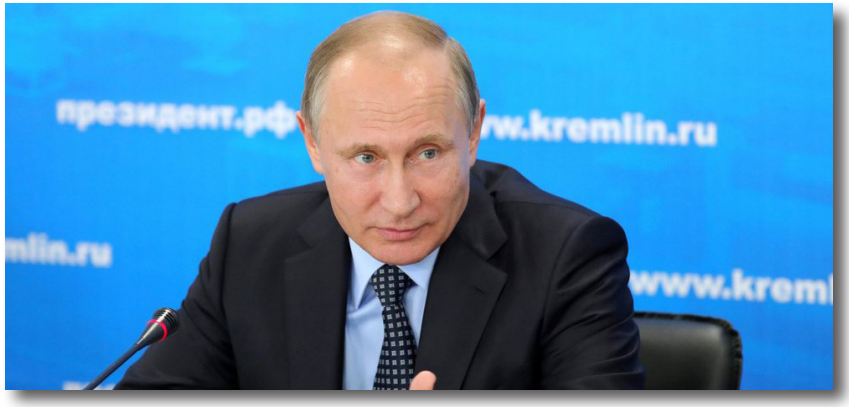

EN.PUTIN.KREMLIN.RU

Populisme politik selalu menimbulkan bahaya besar karena menyalahgunakan orang, menciptakan ekspektasi berlebihan atau, sebaliknya, memprioritaskan tujuan yang jelas bukan prioritas atau tidak mungkin dicapai

- Thaksin Shinawatra

Political populism always poses a great danger because it disorients people, creates excessive expectations or, on the contrary, prioritises objectives that are clearly not priorities or are simply impossible to achieve

membawa semangat nasionalisme.[21]

Anda kan menguraikan keterbatasan demokrasi elektoral. Terus, bagi publik, apa yang bisa dilakukan?

Menjadi pemilih cerdas. Ia merupakan bagian dari ikhtiar meningkatkan kualitas partisipasi dalam politik. Prinsipnya sederhana: teliti sebelum membeli. Selama ini lazim nasihat: jangan beli dalam karung. Tetapi bukan berarti, kucing di luar karung pun bisa dijamin "mutu dan keasliannya". Pemilih cerdas itu yang kritis, yang berikhtiar mengetahui rekam jejak mereka yang akan dipilih: mana yang layak dipercaya. Mungkin ada gunanya, nasihat Shakespeare ini: *Love all, trust a few, do wrong to none*. Kebalikan dari pemilih cerdas ialah pemilih yang tidak kritis, yang gradasinya membentang dari tipologi pemilih tradisional "*pejah-gesang*" alias kagum tokoh "sampai mati", hingga tipologi pemilih "masokis", sudah pernah merasa "disakiti secara politik", dikecewakan, tetapi begitu pemilu malah dipilih kembali: bak semakin disakiti semakin dinikmati.[22]●

21 "Diskusi *Kompas*".

22 M Alfan Alfian, "Menyoal Pemilih Cerdas", Majalah FIGUR Edisi XXXVI tahun 2009.

Bab 4

Buku Terbuka dan Kebebasan Berefleksi

Tentang Buku Ini

APA YANG mendasari Anda menulis kembali buku bertema kepemimpinan politik?

Ketika menulis *Menjadi Pemimpin Politik* dan *Kekuatan Pemimpin* pun kemudian saya sempurnakan ke dalam buku ini, pertimbangannya: buku semacam ini langka.[1] Perpustakaan-perpustakaan dan toko-toko buku jarang menyediakan buku-buku tentang kepemimpinan politik. Ini cukup ironis, mengingat politik sudah menjadi "makanan sehari-hari". Pasca-1998, adagium "politik sebagai panglima" nyaris berlaku kembali. Maka, logikanya, kebutuhan bacaan kepemimpinan politik mestinya juga meningkat. Tapi, di lapangan yang terjadi paradoks: miskinnya bacaan.

Jadi, buku ini hendak membahas soal pemimpin dan kekuasaan?

Ya. Dua tema itu sesungguhnya sudah sering didiskusikan, bahkan sejak awal hadirnya peradaban manusia, namun tetap menarik dan relevan. Kepemimpinan, terlepas dari itu, memang selalu terkait dengan kekuasaan. Menurut Yukl kepemimpinan itu,

> ... subyek yang yang menarik bagi para peneliti dan kalangan awam. Istilah

1 Alfian (2009); Alfian (2012).

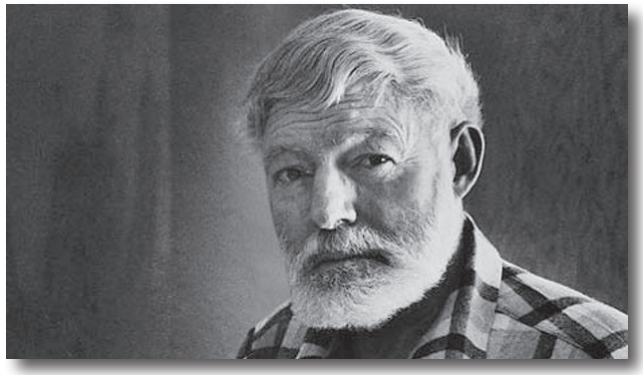

MOTIVETOWIN.COM

Tak ada teman seloyal buku

- Ernest Hemingway

There is no friend as loyal as a book.

tersebut menunjuk pada bagaimana sesorang memperoleh kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu ia mampu mengembangkan pengaruh. Ia juga menunjuk pada individu lincah yang memimpin sepasukan tentara yang menang dalam pertempuran, manajer perusahaan yang tangkas dan efektif dari tingkatan tertinggi hingga terendah, hingga orang-orang tangguh yang berjasa membentuk suatu bangsa.[2]

Mengapa buku ini ditulis secara tanya jawab?

Semata-mata mempermudah pembaca. Karena ditulis secara tanya jawab, buku ini bersifat ulang alik: bisa dibaca para pembesar politik maupun siapa saja. Dengan tanya jawab, sejauh mungkin saya bicara dengan bahasa saya untuk menjelaskan banyak hal secara sederhana dalam kemasan *enteng-entengan*, supaya buku ini bisa dibaca sambil *ongkang-ongkang*. Ini mengingatkan pada kolom Mbah Rono, panggilan akrab *wartawan tiga zaman* Surono Wirohardjono di Majalah *Adil*. Nama kolom itu *Ongkang-ongkang*. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *ongkang-ongkang* itu: (1) duduk dengan kaki berjuntai; (2) tidak berbuat apa-apa; berpangku tangan.[3] Dalam konteks ini, arti (1)-lah yang cocok: duduk dengan kaki berjuntai. Dengan posisi demikian, apalagi duduk di kursi goyang, sambil membaca suratkabar dan seruputan kopi panas, maka hidup selaras nyaman. Tapi orang yang *ongkang-ongkang* demikian, bukan dalam konteks berpangku tangan.

Ada tidak yang menginspirasi Anda, sehingga buku ini

2 Yukl (2001).

3 Kbbi.web.id/ongkang

Aku tak dapat hidup tanpa buku

- Thomas Jefferson

I cannot live without books.

Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas

- Mohammad Hatta

ditulis secara tanya jawab?

Saya terinspirasi pada teknik propaganda politik Tan Malaka, ketika ia menuliskan pandangan-pandangannya tentang *politik*, *rencana ekonomi berjuang*, dan *muslihat* yang melibatkan tokoh-tokoh ciptaannya, masing-masing: Mr. Apal (wakil kaum intelegensia), Si Pacul (wakil kaum tani) dan Denmas (wakil kaum ningrat), dan Si Godam (wakil buruh besi).[4] Hanya saja, tak seperti Tan Malaka, saya tidak menciptakan tokoh. Karenanya, metode tanya jawab ini lebih mirip dengan yang dilakukan Bung Karno, ketika ia membuka rubrik tanya jawab *Primbon Politik* di Majalah *Fikiran Ra'jat* pada masa pergerakan nasional.[5] Tapi, jelas, saya tidak punya kapasitas seperti Bung Karno, tokoh yang saya kagumi itu. Saya juga terinspirasi buku tanya jawab soal-soal Keislaman karangan tokoh legendaris Muhammadiyah K.H. A.R. Fachruddin.[6]

Tentu ada subyektifitas penulis dalam menterjemahkan ulang, melakukan pilihan-pilihan sudut pandang dan penyaringan kalimat atas bacaan-bacaan yang ada, hingga penarikan kesimpulan yang barangkali saja tidak logis dan kurang (w)ajar. Banyak penjelasan dalam buku ini yang diangkat kembali dari artikel-artikel opini saya yang berserakan di sejumlah media cetak yang direkontekstualisasikan. Dalam konteks inilah, saya menempuh risiko akan dianggap Mr. Tahu Segalanya. Padahal, tanya jawab hanya kelaziman metode saja, agar saya bisa serius dan juga bercanda secara *luwes*, tidak kaku.

Anda akan awali pembahasan buku ini dari konsep tentang kepemimpinan atau kekuasaan lebih dulu?

4 Malaka (2005).

5 Notosoetardjo (1963).

6 Misalnya, Mulkhan (2002); Adhy, Suwariyun, dan Krisnam (1990); Fachruddin (1990).

Ruangan yang tanpa buku itu bagai tubuh tanpa jiwa

- Marcus Tullius Cicero

A room without books is like a body without a soul.

Saya akan membahas secara umum hal-ikhwal kepemimpinan secara umum, setelah itu kekuasaan, dan kemudian strategi politik dan manajemen kekuasaan. Yang pertama dan kedua, katakan kita tengah mendiskusikan dasar-dasar kepemimpinan dan kekuasaan. Selanjutnya, yang saya kira tak kalah menarik ialah membahas tentang bagaimana pemimpin politik itu hadir dalam konteks pra, selama dan pasca-berkuasa. Akhirnya, semuanya saya akhiri dengan renungan. Jadi, buku ini buku renungan.

Terakhir, apa saja sumber penulisan buku ini?

Apa saja yang saya anggap perlu. Kepemimpinan itu kan tema yang multidisiplin/interdisiplin. Sebuah ensiklopedia mencatat:

> *Leadership is now a truly interdisciplinary field, with contributions from political science, psychology, education, history, agriculture, public administration, management, community studies, law, medicine, anthropology, biology, military sciences, philosophy, and sociology. In many of these disciplines, leadership is now an established subfield*.[7]

Karena interdisiplin, saya mengambil sumber dari mana-mana: buku-buku serius tentang sosiologi, politik, filsafat, psikologi, manajemen, bahkan pun komik. Tentu juga banyak buku bertajuk kepemimpinan yang tebal maupun tipis, yang serius ke sana kemari hingga yang sekadar "*how to*". Buku Elizabeth D. Samet, *Leadership, Essential Writing by Our Greatest Thinker*, misalnya, merupakan buku yang menunjukkan betapa isu kepemimpinan mengemuka tidak saja dari para pemimpin politik atau manajer perusahaan, tetapi para filosof dan penulis, bahkan pun penulis pusi dan naskah drama.[8] Tetapi buku tipis Alison Price dan David Price, *Leadership, A Practical Guide,* semata-mata buku pengantar yang sekadar "*how to*".[9]

Semua bahan, tentu dengan seleksi selazimnya, berguna. Jadi saya sekadar penjahit, tukang gado-gado, rujak! Saya berharap akan banyak penulis yang lebih serius, sistematis dan akademis, ketimbang ikhtiar yang saya lakukan ini. Saya hanya berharap buku ini enak "dibatjem" eh "dibatja" daripada "siapa sahadja" tanpa "daripada pandang boeloe".●

7 Goethals, Sorenson, dan Burns (2004:xxxiv)

8 Samet (2015).

9 Price dan Price (2013).

Bagian 2

Kepemimpinan

Apa, Siapa, dan Bagaimana Pemimpin Itu?

GRABPAGE.INFO

Saya tidak berpikir bahwa seorang pemimpin dapat mengendalikan, ke sebagian besar, takdirnya. Sangat jarang ia bisa masuk dan mengubah situasi jika kekuatan sejarah berjalan ke arah lain

- Richard Nixon

I don't think that a leader can control, to any great extent, his destiny. Very seldom can he step in and change the situation if the forces of history are running in another direction.

Bab 5

Apa Benar Semua Orang Pemimpin?

Dilema Krisis Kepemimpinan

> Kepemimpinan yang efektif bukan tentang membuat pidato atau [berupaya untuk] menjadi disukai; kepemimpinan didefinisikan oleh hasil bukan atribut.
>
> **- PETER F. DRUCKER**

APA MAKSUD kutipan di atas?

Seorang pemimpin hendaknya jangan dilihat tampak luarnya, tetapi apa yang dilakukannya. Menurut Drucker,

> Setiap orang adalah pemimpin, setiap orang punya tanggung jawab, setiap orang bisa bertindak. Setiap orang berfokus pada dirinya. Setiap orang menajamkan visi, kompetensi dan performa organisasinya ... Hal yang Anda bisa dan harus lakukan, mengkonversi niat baik dan pengetahuan ke dalam tindakan yang efektif, tidak tahun depan, tapi besok.[1]

Rumus baku menggenjot kesadaran tanggung jawab anak buah adalah dengan mengatakan: "Anda pemimpin!". Yang dikasih motivasi biasanya

1 Drucker (2005)

Dulu seorang pemimpin itu bos. Saat ini para pemimpin harus bekerjasama dengan para anak buahnya ... mereka tidak lagi dapat memimpin hanya berdasarkan kekuasaan posisional

- Ken Blanchard

In the past a leader was a boss. Today's leaders must be partners with their people... they no longer can lead solely based on positional power.

langsung *syur*, bahwa setelah dikatakan *Anda pemimpin*, langsung merasakan ada kehebatan dalam dirinya, dan dia akan bekerja sebaik-baiknya.

Ketika Cak Kartolo[2] manggung di pentas ludruk memainkan peran Pak Camat, ia bertindak seolah-olah pembesar kecamatan yang punya kuasa dan segala perangkat untuk melakukan hal-hal yang membuat penonton yakin bahwa ia memang camat. Tetapi, ketika Cak Kartolo balik lagi ke rumah, ke kondisi hidup sehari-hari, ia tidak bisa mengaku-aku sebagai camat, bukan? Ia kembali menjadi pemimpin yang sebenarnya: pemimpin rumah tangga!

Jadi pemimpin itu ada di mana-mana?

Tentulah kita pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya." Uraian lebih panjang akan dibahas di lain bab. Intinya, tiap diri pribadi adalah pemimpin: setidaknya bagi diri dan lingkungan terdekatnya. Kepemimpinan adalah fenomena individual sekaligus sosial. Kualifikasi kepemimpinan ada sejak dari diri pribadi. Siapa pemimpin kita, secara praktis, ialah yang terdekat dengan keperluan kita: Ketua Rukun Tetangga (RT) bahkan sering lebih bermanfaat dampak kepemimpinannya ketimbang Presiden, kendatipun semua punya tanggung jawab sesuai cakupan kepemimpinannya. Tapi, anehnya, banyak warga enggan diserahi tugas sebagai Ketua RT. Alasannya sibuk dan menyerahkan urusan kerukuntetanggaan ke yang lain. Ini berbeda dengan obsesi untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional, provinsi, atau kaupaten/kota. Tapi giliran ditunjuk warga jadi ketua RT, banyak alasan untuk ogah. Bahkan yang telanjur terpilih pun, memilih mundur.

Bagaimana fenomena ini bisa dipahami?

Mudah. Semua itu tergantung insentif yang didapat. Kalau kita merasa punya kesempatan lebih baik dari Ketua RT, maka *quasi*-jabatan kepemimpinan struktural negara terbawah itu jelas-jelas kita tolak!

2 Kartolo adalah pemain ludruk kondang kelahiran Pasuruan, 2 Juli 1945. Wikipedia.org

Ketidaktahuan satu pemilih dalam demokrasi mengganggu keamanan semua

- John F. Kennedy

The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all

Bukankah kepemimpinan itu fungsional saja?

Ya, tetapi orang tetap melihat konteks gengsi dan insentifnya. Soal pemimpin itu fungsional, saya setuju. Tetapi konsekuensinya menjadi sangat kontekstual.

Misalnya?

Saya pernah ikut senior yang berlatar belakang polisi yang kemudian menjadi direktur sebuah lembaga pelayanan umum swasta. Beliau terbiasa menerapkan disiplin *priyayi* yang ketat *unggah-ungguh* dan sopan santun keluarga Jawa yang neo-feodalistik. Temperamennya keras, mudah marah, dan sering menghardik sopirnya. Kepada yang terakhir ini, apabila dalam mengemudikan salah jalan sedikit saja, suara beliau meledak-ledak sedemikian rupa. Tetapi, yang membuat saya kaget, ketika Maghrib tiba, sembahyang hendak dimulai, beliau mencari-cari sopirnya. Kali ini bukan untuk menyopir, melainkan justru disuruhnya menjadi imam. Ternyata sang sopir punya suara merdu dengan bacaan Al Qur'an yang tartil, mengingat konon ia lulusan pesantren. Dari pengalaman ini, saya mencatat bahwa kepemimpinan itu nyaris semacam optimalisasi fungsi, bahwa sang sopir adalah pemimpin dalam dua hal sekaligus: (1) ketika menyopir dan (2) ketika menjadi imam sembahyang. Untungnya, orangnya baik, emosi dan spiritualitasnya terkendali, beda dengan karakter sopir Benyamin Sueb dalam filmnya tempo dulu: usil dan manipulatif. Anda mungkin masih ingat film "Benyamin Biang Kerok" dirilis pada 1972 dengan sutradara Nawi Ismail?[3]

Film Benyamin, pasti seru, kalau bukan konyol?

He he he. Dalam film itu, Pengki (Benyamin Sueb), sang sopir, selalu mengerjai majikannya. Dengan alasan macam-macam, kalau bukan akal bulusnya, Pengki sering menjual bensin mobil tuannya itu, dan lantas berlagak jadi tuan besar; lebih parah lagi, ia merayu gadis-gadis cantik. Aksinya selalu lolos, tetapi ketika dua gadis cantik yang dikencaninya sama-sama datang ke rumah majikannya yang diaku sebagai rumahnya sendiri, tamatlah riwayatnya sebagai sopir. Ia pun langsung dipecat.

3 Konfirmasi Wikipedia. org

Seorang pemimpin memiliki dua karakteristik penting; pertama, ia pergi ke suatu tempat; kedua, ia mampu membujuk orang lain untuk pergi bersamanya

- Robespierre

A leader has two important characteristics; first, he is going somewhere; second, he is able to persuade other people to go with him.

He he ... Apa sih bedanya pemimpin dan bos?

Jawabnya ada di pernyataan Theodore Roosevelt: *the leader leads and the boss drives* [4] Pemimpin itu memimpin, sedangkan kalau bos menyetir. Memimpin kelasnya lebih tinggi ketimbang menyetir, karena memimpin lebih kepada mengedepankan pengaruh [cara-cara tidak langsung dan bahkan hegemonik]. Kalau menyetir, kelasnya lebih rendah karena dominatif, selalu khawatir kalau tujuan tidak sampai-sampai, maka bos suka perintah-perintah; bos sering tak sabaran kalau anak buah mengambil inisiatif sendiri [kendatipun inisiatif itu perlu untuk mempercepat tujuan]. Bos selalu memposisikan diri sebagai pemerintah, yang suka perintah-perintah, sang petunjuk instruksional.

Pendekatan kepemimpinan memang lazim diikuti oleh kepengikutan (*followership*). Walaupun terdengar beda, tetapi dua konsep itu disatukan oleh tanggung jawab. Pemimpin itu juga pengikut, pengikut itu juga pemimpin: dalam skup dan lingkup masing-masing. Pemimpin yang aspiratif tentu akan mengikuti apa maunya para pengikut. Ia tidak membuta-tulikan sesuatu, dalam arti mengambil keputusan tanpa melihat realitas dan dampaknya bagi pengikut. Pengikut, dalam kasus sopir yang saya ceritakan, adalah pemimpin teknis di bidangnya. Juga tukang cuci di rumah Anda. Ia wajib marah, kalau Anda mencuci sendiri pakaian Anda. Ia akan angkat bicara, "Terus, kalau Bapak yang nyuci pakaian Bapak sendiri, lantas tugas saya sebagai pemimpin apa?"

Anda bilang begitu buku rujukannya apa?

Bacalah buku *360 Degree Leader* karangan Maxwell.[5] Ia menjelaskan: di manapun posisi kita, tetaplah kita bisa menjalankan fungsi kepemimpinan: ke atas, ke samping, ke bawah. Intinya tanggung jawab dan fungsi: di manapun posisi kita dalam suatu struktur organisasi, kita tetap bisa melakukan peran kepemimpinan. Maxwell mendekonstruksi pemimpin identik dengan atasan atau bos. Tidak. Menurut Maxwell, justru "99 persen dari seluruh

4 Brayniquotes.com

5 Maxwell (2012).

kepemimpinan bukan berasal dari puncak, melainkan dari bagian tengah organisasi." Ini memberi pesan bahwa anak buah yang berposisi di tengah-lah yang punya peluang untuk mengembangkan kepemimpinan 360 derajat, ke semua arah. Maka, dalam hal kemajuan organisasi, merujuk Maxwell jelaslah sudah, pemimpin tertinggi tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik tanpa kepemimpinan yang efektif di level tengah.

Sekarang agak serius: kita sering merasa ada krisis kepemimpinan, ketika tak ada pemimpin yang dirasa menonjol ...

Saya kira merupakan kelaziman, manakala publik tidak cepat puas dengan pemimpin dan lantas membanding-bandingkan dengan pemimpin sebelumnya atau pemimpin di tempat lain yang dipandang lebih mumpuni kepemimpinannya. Ketika mengawali uraiannya tentang kepemimpinan (politik) dalam sebuah bukunya yang terbit pada 1978, *Leadership*, James MacGregor Burns menyampaikan pengamatannya tentang betapa mudahnya kita merasakan adanya krisis kepemimpinan, akibat tidak adanya para pemimpin yang menonjol, kecuali sekadar biasa-biasa saja (*mediocrity*). Krisis kepemimpinan, menurut Burns terjadi ketika para pemimpin yang biasa-biasa saja itu, tidak menunjukkan kapasitas intelektual yang memadahi, sehingga kita sering menemukan banyak pemimpin tanpa kepemimpinan.[6]

Dari sini, kita bisa mencatat kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang bisa saja tidak hadir dari para elite pemimpin. Mereka memimpin, tapi tanpa kepemimpinan. Hal ini memang kontradiktif, dan menyangkut apakah pemimpin mampu menerapkan kepemimpinan secara berkualitas, atau sebaliknya tidak berkualitas. Burn menyebut kepemimpinan itu termasuk hal yang paling banyak diobservasi, tetapi tetap susah dipahami. Burn pun menelaah dua tipe kepemimpinan: transformasional dan transaksional. Keduanya akan kita perbincangkan nanti di pembahasan menyangkut gaya kepemimpinan. Dan yang juga penting ialah soal bahwa sesungguhnya soal krisis kepemimpinan ini merupakan isu abadi. Tidak hanya di zaman kita, tetapi soal bangkrutnya organisasi, negara, atau apapun yang pernah terjadi dalam sejarah, nyaris berimpitan dengan ketekoran kepemimpinan (*lack of leadership*) para elitenya.

Pemimpin tanpa kepemimpinan mengingatkan pada kekuasaan tanpa kuasa ...

Begitulah. Bayangkan saja, apabila Anda berjuang untuk mendapatkan posisi kekuasaan, tetapi ketika hal itu sudah Anda peroleh, Anda baru menyadari bahwa Anda tidak kuasa berbuat apa-apa dengan kekuasaan yang

6 Burns (2010:1).

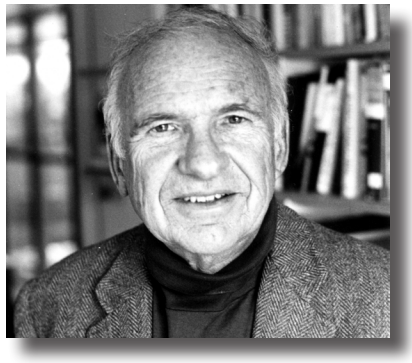

MOUNTVERNON.ORG

- Krisis kepemimpinan saat ini ditandai mengemukanya perilaku biasa-biasa saja atau tidak bertanggung jawab dari begitu banyak orang berkuasa, namun kepemimpinan jarang hadir memenuhinya

- Dalam kehidupan nyata, saran paling praktis bagi para pemimpin adalah tidak memperlakukan pion seperti pion, atau pangeran seperti pangeran, tapi semua orang seperti orang

- James McGregor Burns

- The crisis of leadership today is the mediocrity or irresponsibility of so many of the men and women in power, but leadership rarely rises to the full need for it

- In real life, the most practical advice for leaders is not to treat pawns like pawns, nor princes like princes, but all persons like persons

Anda miliki. Menurut Yasraf Amir Piliang, "Kekuasaan tanpa kuasa tentu sebuah ironi karena ia seperti kata tanpa makna, atau konsep tanpa realitas." Dengan kata lain,

> Otoritas kekuasaan memang ada, yang dipegang para pemangku kekuasaan di dalam aneka aparatus negara, tetapi ia tidak mampu menunjukkan kuasanya. Kekuasaan lantas menjadi "kekuasaan minimalis", yaitu ketika sistem kekuasaan hanya mampu menunjukkan efek kekuasaan sangat kecil, dengan efek perubahan sangat minim.[7]●

7 Yasraf Amir Piliang, "Kekuasaan Tanpa Kuasa", *Kompas*, 7 September 2015.

Bab 6

Mengapa Pemimpin, Bukan Manajer?

MENGAPA YANG dibahas buku ini pemimpin dan kepemimpinan, bukan manajer dan kemanajemenan?

Cakupan kepemimpinan lebih luas, kendatipun ada pendapat sebaliknya. Namun, keduanya tidak dapat dikonfrontasikan: pemimpin perlu paham apa itu manajemen dan bagaimana aplikasinya dalam organisasi yang sederhana hingga kompleks. Manajer perlu kepemimpinan: bagaimana ia menggerakkan anakbuah ke dalam efektivitas kinerja mereka.

Apa beda pemimpin dengan manajer?

Menurut Nixon kepemimpinan itu puisi, manajemen itu prosa. Pendapat ini ia tuangkan dalam bukunya, *Leaders*.[1] Buku tersebut salah satu dari sedikit bacaan tentang kepemimpinan politik. Menurutnya, kepemimpinan lebih dari sekadar urusan teknis. Kepemimpinan itu ibarat puisi, sebab ia bersentuhan dengan simbol, citra, dan ide-ide penting yang dapat merubah wajah sejarah. Nixon menguraikan, rakyat berpikir dengan nalarnya, tetapi bergerak berdasar emosinya, sementara pemimpin mampu melakukan sentuhan nalar dan emosi sekaligus. Manajer berpikir hari ini dan besok. Tetapi pemimpin berpikir lusa (*the day after tommorow*). Manajer mewakili suatu proses. Pemimpin mewakili suatu perintah sejarah (*a direction of history*). Manajer tak bisa lagi melakukan apa-apa kalau tak ada apa-apa lagi, sementara pemimpin masih punya pengikut yang bisa diperintah bahkan dengan

1 Nixon (1982).

Manajemen ialah efisiensi dalam memanjat tangga kesuksesan; kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar di dinding yang benar

- Stephen R. Covey

Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.

sedikit kekuasaan sekalipun, walaupun tentu tidak sehebat apabila ia *powerfull*. Tapi, saya kira, pandangan demikian tetap perlu dikritisi, sebab mengesankan pemimpin itu seabstrak puisi. Dan, bukankah puisi berbeda dengan prosa? Puisi lazim berisi bait-bait kata-kata yang multitafsir, ketika ia telah menjadi teks yang dibaca orang, belum tentu pembaca punya interpretasi yang mirip dengan apa yang dipikirkan atau dimaui oleh sang pengarang.

Pemimpin, Melampaui Puisi?

MENGKRITISI bagaimana?

Pemimpin lebih dari sekedar puisi, bahkan ada saatnya ia harus lebih prosa, mungkin semacam puisi esai. Ini selaras dengan pandangan bahwa pemimpin perlu disiplin kemanajemenan dan manajer perlu disiplin kepemimpinan. Pemimpin harus jelas dalam menyampaikan visinya. Pemimpin harus terus meyakinkan sebanyak mungkin orang, secara komunikatif dengan bahasa yang jelas. Pemimpin mengupayakan dirinya komunikator yang baik. Pemimpin perlu prosais, aktif bicara, tak harus berhemat kata, apalagi membiarkan pengikutnya bingung akibat tidak mengerti makna pandangan-pandangan visioner yang menjadi "puisinya". Puisi itu bisa sama sekali tak bisa dipahami apa maknanya, atau malah multitafsir. Karenanya, bagi saya, pemimpin harus *bunyi*, meyakinkan, dan jelas.

Bagaimana pandangan ahli manajemen?

Yukl berpendapat seseorang dapat menjadi pemimpin tanpa harus menjadi manajer. Seseorang dapat menjadi manajer tanpa harus memimpin. Tidak seorang pun yang menyatakan mengelola dan memimpin adalah tindakan yang ekuivalen, walaupun tingkat tumpang tindih keduanya menjadi perdebatan yang tajam.[2]

Seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa harus menjadi

2 Yukl (2001).

manajer. Bagaimana penjelasannya?

Yukl mencontohkan dalam struktur manajerial perusahaan ada manajer yang tanpa membawahi anak buah atau tak punya bawahan nyata: manajer keuangan. Ia bekerja nyaris menjalankan fungsi manajemen keuangan, tak terlampau menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan.

Apa ada pendapat ekstrim yang mempertentangkan kepemimpinan dan manajemen?

Meminjam Kotter, Yukl menyimpulkan kepemimpinan dan manajemen itu berbeda secara kualitatif dan saling meniadakan. Kepemimpinan dan manajemen tak mungkin terjadi pada satu orang yang sama. Pemimpin menghargai fleksibilitas, inovasi, dan adaptasi. Sementara manajer menghargai stabilitas, keteraturan, dan efisiensi; pun sangat memperhatikan penyelesaian sesuatu dan berusaha membuat orang melakukannya lebih baik. Seorang manajer menetapkan sasaran operasional, membuat rencana tindak berdasarkan jadwal, mengalokasikan sumberdaya; mengorganisasikan (menentukan struktur) dan menugaskan orang ke berbagai pekerjaan; serta memantau hasil dan menyelesaikan masalah. Sementara pemimpin menyusun visi dan strategi perubahan; mengkomunikasikan dan menjelaskan visi; serta memotivasi dan menginspirasi orang lain. Meskipun begitu, manajemen maupun kepemimpinan melibatkan keputusan: apa yang harus dilakukan, menciptakan jaringan dan berusaha memastikan hal tersebut terjadi. Namun, kedua proses tersebut mempunyai elemen yang bertentangan,

> ... kepemimpinan yang kuat dapat mengacaukan aturan dan efisiensi. Manajemen yang kuat dapat menghalangi pengambilan risiko dan inovasi. Manajemen yang kuat saja hanya akan menciptakan birokrasi tanpa tujuan, tetapi kepemimpinan yang kuat saja dapat membuat perubahan dengan cara yang tidak praktis. Yang relatif penting dari kedua proses tersebut dan cara terbaik untuk menyatukannya sangat tergantung pada situasi dan waktu yang tepat.[3]

Jadi, pemimpin lebih istimewa ketimbang manajer?

Tergantung cara pandangnya. Sebagaimana dikutip Yukl, Mintzberg menempatkan kepemimpinan sebagai salah satu dari sepuluh peran manajerial, bahwa kepemimpinan cuma syarat saja yang harus dimiliki manajer andal. Kepemimpinan meliputi hal-hal terkait memotivasi bawahan hinga menciptakan kondisi menyenangkan dalam bekerja. Manajer harus punya kualifikasi teknis kepemimpinan, karena manajer yang tanpa rasa kepemimpinan itu hambar.

3 Yukl (2001).

Namun, biasanya kepemimpinan dianggap lebih mendasar, stasiunnya lebih tinggi. Menurut Nixon, kepemimpinan melampaui aspek-aspek teknis. Tapi, konsekuensinya kepemimpinan menjadi lebih abstrak, puisi. Pemimpin itu puisi. Ketika pemimpin mengabarkan visi alias puisinya, manajer sibuk merencanakan perwujudannya, memprosakannya. Makanya, kaum manajer kerap dianggap lebih realistis: menjadi garda depan secara teknis (bagaimana mewujudkan). Pemimpin bergelayutan dengan visi, ide, kharisma dan yang lain. Tabel berikut meringkas perbedaan itu.

Tabel 6.1
Perbedaan Umum Pemimpin dan Manajer[4]

PEMIMPIN	MANAJER
Menjalin hubungan berdasar inspirasi dan pengaruh	Menjalin hubungan berdasar otoritas
Memberikan arah untuk bersikap dan bertindak	Menghasilkan sesuatu
Melibatkan visi dan nilai	Menyelesaikan dan melibatkan hal-hal yang lebih rutin
People who do the right things	*People who do the things right*
Berinovasi	Melaksanakan
Mengembangkan	Memelihara
Menginspirasi	Mengendalikan
Berpandangan jangka panjang	Berpandangan jangka pendek
Bertanya apa dan mengapa	Bertanya bagaimana dan kapan
Orisinal	Meniru
Menentang *status quo*	Menyetujui *status quo*
Efektivitas	Efisiensi
Pengambilan risiko	Perencanaan
Dinamis	Kertas kerja
Kreativitas	Peraturan
Perubahan	Regulasi
Inspirasi	Pengendalian
Visi	Konsistensi

4 Lombardi (2007:12).

Sekali lagi bahwa, dari tabel di atas tampak: manajemen itu cenderung lebih teknis.[5] Kita simak lagi perbandingannya pada tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Perbandingan Manajemen dan Kepemimpinan[6]

	MANAJEMEN	PEMIMPIN
Arah	Perencanaan, penganggaran, berfokus pada *bottom line*	Menciptakan visi dan strategi berfokus pada horison
Kewajiban	Pengorganisasian, penyusunan staf (*staffing*), pengarahan, pengawasan, menciptakan batasan/jarak	Menciptakan budaya dan nilai bersama, menolong orang lain berkembang, mengurangi jarak
Hubungan	Berfokus pada obyek-produk barang dan jasa berdasarkan kekuasaan jabatan. Berposisi sebagai bos	Berfokus pada orang, menginspirasi dan memotivasi yang dipimpin. Bersandarkan kekuasaan personal, berlaku seperti pelatih, fasilitator, akselerator, dan pelayan
Kualitas personal	Jarak emosional, berbicara, pikiran cerdas, kepatuhan, pehamanan ke dalam organisasi	Hubungan emosional (hati) pikiran terbuka, mendengarkan, memberikan kebebasan dan keberanian, pemahaman ke dalam diri
Orientasi	Mempertahankan stabilitas	Menciptakan perubahan yang terkadang radikal dan menolak *status quo*

Tampaknya, pemimpin itu seperti guru, orang yang patut *digugu* (dipatuhi) dan ditiru. Prof. Dr. Arief Rachman *Kick Andy* di Metro TV (ditayangkan 1 Mei 2015) menyitir guru hadir karena terpanggil, mereka pendidik, tidak sekadar pengajar. Guru menyandang predikat dan tanggung jawab moral yang tinggi, justru karena totalitasnya. Guru itu pemimpin. Sedangkan staf pengajar lebih teknis, lebih manajer. Kendatipun demikian, pemimpin harus paham konteks kemenajemenan, dan manajer harus paham soal-soal kepemimpinan.●

5 Baca misalnya, Templar (2007).

6 Safaria (2004:32).

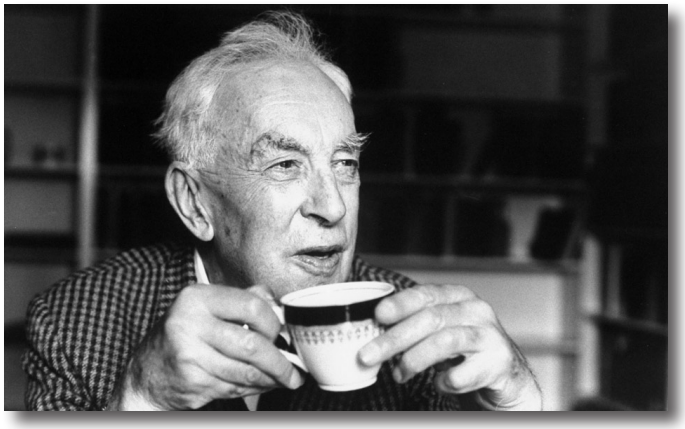

AEON.CO

- Satu-satunya perjuangan nyata dalam sejarah dunia ialah antara kepentingan pribadi dan keadilan sosial

- Cepat atau lambat, manusia selalu harus memutuskan apakah dia memuja kekuatan sendiri atau kekuatan Tuhan

- Arnold J. Toynbee

- The only real struggle in the history of the world is between the vested interest and social justice.

- Sooner or later, man has always had to decide whether he worships his own power or the power of God

Bab 7

Mengapa Pemimpin, Bukan Elite?

MENGAPA YANG dibahas buku ini pemimpin dan kepemimpinan, bukan elite dan keelitan?

Konteksnya lain. Sebagaimana kepemimpinan dan kemanajemenan, keelitan dan kepemimpinan meninggalkan sejumlah perbedaan, bahkan secara substansi. Nanti Anda akan sampai pada semacam kesimpulan bahwa elite itu sekadar *pimpinan*, yang belum tentu pemimpin. Pimpinan dan pemimpin itu berbeda. Perbedaannya apa, dapat dijawab dengan menjelaskan perspektif elite dan kepemimpinan.

Apa sesungguhnya elite itu?

Kata elite menurut Bottomore, telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan barang-barang berkualitas sempurna. Lantas diperluas untuk menunjuk kelompok-kelompok sosial unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau tingkatan bangsawan. *Oxford English Dictionary* (1823) telah memuat entri *elite* merujuk eksistensi kelompok-kelompok sosial. Ilmuwan sosial pertama kali yang menggunakan kata *elite* ialah Vilfredo Pareto pada akhir abad ke-19 di Eropa, kemudian Gaetano Mosca pada 1930-an.[1]

Bagaimana mereka menjelaskan makna elite?

Pareto menjelaskan apa itu elite itu secara sederhana, berikut ini:

Dalam setiap cabang kegiatan manusia setiap individu diberikan suatu indeks

1 Bottomore (2006).

Jika seseorang ingin menjadi pemimpin dan tidak kontroversial, itu berarti dia tidak pernah berdiri untuk apapun

- Richard Nixon

If an individual wants to be a leader and isn't controversial, that means he never stood for anything.

yang berfungsi sebagai penanda kapasitasnya ... Tipe pengacara yang tertinggi, misalnya, akan diberi nilai 10. Pengacara yang tidak memperoleh seorang klien pun akan diberi nilai 1 — sedangkan nilai nol untuk orang yang sama sekali idiot. Kepada orang yang telah memperoleh pendapatan jutaan ... kita akan memberikan nilai 10 ... kepada orang yang hanya mampu menghindarkan diri dari tinggal di rumah yang buruk nilai 1, sedangkan nilai nol untuk orang yang masuk dan tinggal di rumah buruk itu ... Demikian seterusnya untuk semua cabang kegiatan manusia ... Maka marilah kita membuat suatu kelas manusia yang memiliki indeks-indeks tertinggi dalam cabang kegiatan mereka, dan kepada kelas itu kita memberikan nama elite.[2]

Kalau diringkas, setiap cabang kegiatan manusia, setiap individu memiliki kapasitas yang berbeda. Yang indeksnya tertinggi dalam cabang kegiatan masing-masing, itulah elite. Jadi, setiap cabang kegiatan manusia terdapat elite masing-masing di puncak piramida.

Eksistensi para elite itu ditentukan oleh siapa?

Daya tahan elite tidak hanya sebatas kemampuannya beradaptasi, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan dan mengembangkan pengaruh yang makin meningkat, sebagaimana diungkapkan sejarawan Arnold Toynbee, dalam seluruh tindakan kreasi sosial, para pencipta adalah individu-individu yang kreatif.[3]

Karenanya, elite sangat menentukan sejarah peradaban?

Ya, perannya bisa positif atau negatif. Clive Bell dalam *Civilization* (1929), sebagaimana dikutip Bottomore mencatat, suatu masyarakat yang beradab, ditandai oleh kenalaran dan nilai-nilai, dan kualitas ini hanya dapat dihasilkan, ditanamkan dan dipelihara oleh suatu elite. Tetapi para elitelah yang paling mampu menghancurkan peradaban yang telah dibangunnya. Hal ini terkonfirmasi dalam sejarah jatuh-bangunnya peradaban-peradaban dunia sejak zaman kuno. Dalam *Collapse*, Diamond mencatat destruktifnya peradaban yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan

2 Bottomore (2006).

3 Lihat juga Toynbee (2006).

buruknya desain sosial, ekonomi, dan politik, yang melibatkan para elite. Soal jatuh bangunnya kekuasaan itu, terekam juga dalam buku *The Rise and Fall of the Great Powers* karangan Paul Kennedy: kekuasaan yang besar tidak ada siklusnya.[4] Ada *wolak-waliking jaman*, perubahan zaman, *cakra manggilingan*, tatkala yang di atas, yang "sangat berkuasa" jatuh ke bawah.

Elite Politik dan Kekuasaan

BAGAIMANA persinggungan elite dengan kekuasaan?

Eksistensi elite-elite politik selalu terkait persaingan kepentingan meraih dan mempertahankan kekuasaan. Niccolò Machiavelli menyindir para elite yang bersaing itu sebagai para *singa* (*lion*) dan *rubah* (*fox*). Benedanto meringkaskan,

> Penguasa yang baik, menurut *Il Principe* harus mampu menundukkan watak singa dan rubah. Ia harus sekuat singa sekaligus selicik rubah. Sebab, singa disegani karena kekuatannya namun sering tidak waspada bila menghadapi perangkap, sedangkan rubah sanggup menghadapi perangkap tapi tidak dapat membela diri bila diserang serigala.[5]

Bagaimana kalau keadaannya tidak memungkinkan dan harus memilih?

Machiavelli memilih rubah. Sebagaimana dicatat *Il Principe*, "Sejarah membuktikan penguasa yang semata mengandalkan kekuatan, akan mudah runtuh oleh tipu daya dan kelicikan. Sebaliknya bagi penguasa yang pandai bertipu daya, peluang untuk menang masih terbuka lebar. Penguasa yang bersifat rubah akan berlagak takluk pada penguasa yang punya kekuatan besar. Namun di saat yang tepat, ia akan berbalik menghancurkannya."[6]

Apakah dalam bersaing, elite politik selalu begitu?

Itu pendapat Machiavelli. Kita tak harus setuju. Kelak akan kita bahas secara lebih luas mengenai konteks etika dan kekuasaan, bahwa pandangan Machiavelli tersebut dianggap tidak etis/bermoral.

Bagaimana penjelasan Pareto tentang elite politik?

Pareto membagi (kelas) elite ke dalam elite yang memerintah (*govern-*

4 Lihat Diamond (2005); Kennedy (1987).

5 Benedanto (1999:33).

6 Benedanto (1999:33).

ing elite), yang terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan, dan elite yang tak memerintah (*non-governing elite*), sisanya. Jadi ada dua lapisan dalam masyarakat: lapisan rendah atau non-elite dan lapisan tinggi yang terbagi dua: elite yang memerintah dan elite yang tak memerintah.[7]

Bagaimana dengan Mosca?

Karya Mosca melengkapinya. Mosca membedakan secara sistematis elite dan massa. Dalam semua masyarakat, baik yang paling terbelakang hingga yang paling maju muncul dua kelas manusia: kelas yang berkuasa dan yang dikuasai. Kelas pertama jumlahnya selalu lebih sedikit, melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keistimewaan kekuasaan. Yang kedua, jumlahnya lebih banyak, diperintah dan dikendalikan oleh yang pertama, penguasaan minoritas terhadap mayoritas, menunjukkan kelompok yang pertama lebih terorganisasi, karenanya mampu menguasai mayoritas yang tak terrorganisasi. Minoritas berkuasa tak dapat dilawan oleh individu-individu yang ada dalam mayoritas. Minoritas yang terorganisasi itu lazim berdalih, mereka para individu unggul, memiliki atribut nyata yang sangat dihargai dan berpengaruh.[8]

Apa garis besar karya Pareto dan Mosca?

Bottomore meringkas skema konseptual Mosca dan Pareto berikut ini:

- Dalam setiap masyarakat ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat yang lain yang mayoritas.
- Minoritas ini disebut kelas politik atau elite yang memerintah yang terdiri dari mereka yang menduduki jabatan-jabatan komando politik dan, secara lebih tersamar, mereka yang dapat secara langsung mempengaruhi keputusan-keputusan politik.
- Minoritas memerintah ini mengalami perubahan-perubahan dalam keanggotaannya selama suatu jangka waktu tertentu.
- Perubahan keanggotaan itu terjadi akibat masuknya anggota-anggota baru dari lapisan-lapisan masyarakat yang lebih rendah, kadang-kadang dengan bergabungnya kelompok-kelompok sosial baru, dan sekali-sekali dengan penggantian menyeluruh elite mapan dengan elite tandingan, seperti yang muncul dalam revolusi.[9]

Selain Pareto dan Mosca?

7 Bottomore (2006).

8 Bottomore (2006).

9 Bottomore (2006).

THEGUARDIAN.COM

Manusia bangkit dari satu ambisi ke yang lain
- Niccolo Machiavelli

Men rise from one ambition to another.

Pada 1935, misalnya terbit buku Karl Mannheim, *Man and Society in an Age of Reconstruction*. Mannheim menguraikan tiga tipe/kelompok elite: elite organisasi dan politik, elite intelektual dan artistik, serta elite moral dan agama.[10] Sementara Mills dalam *The Power Elite* mencatat, sekelompok *power elite* merupakan kelompok kecil orang yang mengontrol sejumlah besar kesempatan dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh luas. Ia mendeskripsikan hubungan elite politik, militer dan bisnis dalam konteks AS pasca-Perang Dunia II.[11] Lantas, Suzanne Keller dalam *Beyond the Ruling Class* (1963) mempertajam konsep elite strategis, bahwa mereka ada di setiap bidang kehidupan dan secara kolektif, mereka tergolong ke dalam kelas berkuasa (*ruling elites*).[12] Selain itu kajian sosial berdasarkan pendekatan elite juga sudah banyak dilakukan para sosiolog dan para ilmuwan politik, dengan fokus kasus kajian yang beragam.[13]

Apa bedanya elite dengan pemimpin?

Elite banyak dipakai dalam perspektif sosiologi-politik. Sementara, pemimpin dan kepemimpinan multidisiplin, multiperspektif, dari psikologis hingga ilmu politik. Kendatipun kajian kepemimpinan bisa jauh lebih kaya ketimbang sekadar keelitan, tetapi manakala konteksnya ialah pemimpin politik, maka pembahasan tentang elite, tak terelakkan.

Bagaimana Anda sampai ke kesimpulan itu?

10 Hartmann (2007:23).

11 Mills (1956).

12 Hartmann (2007:31).

13 Misalnya Moyser dan Wagstaffe (1987).

Dalam *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*,[14] Profesor Alfian menyatakan kepemimpinan merupakan bagian dari masalah-masalah pembangunan politik. Dikutiplah Charles E. Merriam, "keadaan yang sesungguhnya dari kepemimpinan politik adalah salah satu permasalahan yang teramat rumit dan sulit di dalam bidang politik, atau perbuatan sosial. Tetapi, juga permasalahan yang teramat nyata di dalam tingkah laku sosial dan politik".[15] Pun dikutip Jasper B. Shannon,

> Sesungguhnya esensi pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tetapi anehnya, tidak ada aspek lain dari ilmu politik yang memperoleh perhatian atau penelitian objektif yang lebih miskin daripada masalah ini.[16]

Dari ragam komentar tersebut, studi kepemimpinan politik terkesan kurang mendapat tempat dalam ilmu politik kendatipun penelitian tentangnya melonjak tajam pasca-Perang Dunia II. Dari banyaknya penelitian, pendekatan elite telah mewarnai sedemikian rupa dan lazim dibahas dalam tema besar pembangunan politik. Ini wajar saja mengingat tipisnya perbedaan elite/pimpinan dan pemimpin.

Bagaimana hubungannya elite, konflik dan integrasi dalam sebuah entitas politik, katakan, bangsa misalnya ...

Elite adalah penentu integrasi, selama tidak terasing (*alienation of the elites*) dan pecah (*fragmentation of the elite*). Dalam perspektif kepemimpinan nasional, Pontjo Sutowo mengelaborasi bahwa,

> Keterasingan elite terjadi jika kepemimpinan nasional terasing dari rakyat, yang secara struktural dipimpin oleh kepemimpinan lokal, sehingga agenda kepemimpinan nasional bagaikan tidak ada kaitannya dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga kepemimpinan nasional terkesan bagaikan memperhatikan aspirasi dan kepentingan diri mereka sendiri saja.
>
> Perpecahan elite terjadi jika terdapat pertentangan antara atau sesama politisi, birokrat, dan negarawan, sehingga bangsa secara menyeluruh bagaikan tanpa adanya kesatuan orientasi, tanpa arah dan ranpa kendali, yang selain bisa menyebabkan kekacaubalauan nilai ('*anomie*') juga bisa membuka kesempatan bagi bergeraknya berbagai kekuatan destruktif, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.[17]

14 Alfian (1986:169).

15 Dikutip Alfian dari Charles E. Merriam, *Systematic Politics* (1945) (Alfian, 1986:169).

16 Dikutip Alfian dari artikel Jasper B. Shannon, "*The Study of Political Leadership*" (1940) (Alfian, 1986:169).

17 Sutowo, (2015:463).

Kajian Elite di Indonesia

KAJIAN ELITE politik di Indonesia sendiri bagaimana?[18]

Sartono Kartodirdjo menempatkan elite sebagai golongan sosial terkemuka yang menempati posisi dan memainkan peran penting dalam perubahan sosial di Indonesia.[19] Istilah *elite modern* membedakan dengan *elite tradisional* yang dipengaruhi tata-struktur tradisional, berkecenderungan mempertahankan *status quo* dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman. Sementara, golongan elite baru cenderung melancarkan perubahan. Konsepsi tersebut selaras dengan analisis Van Niel dalam *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* yang memotret struktur dan dinamika sosial atas modernitas Hindia-Belanda (1900-1927).[20]

Bagaimana elite modern Hindia-Belanda terbentuk?

Terbentuknya elite politik modern Hindia-Belanda tak lepas dari politik birokrasi kolonial. Dalam *The Making of a Bureaucratic Elite*, Sutherland menyoroti besarnya pengaruh politik birokrasi Kolonial Belanda terhadap elite birokrasi modern poskolonial.[21] Menurutnya, Hindia Belanda merupakan negara modern pertama yang mewariskan tak sedikit tradisi kelembagaan bagi Republik Indonesia pasca-kemerdekaan. Corak birokrasi Indonesia sangat dipengaruhi sistem pemerintahan Belanda yang mengedepankan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Belanda mempertahankan simbol-simbol penguasa tradisional, tetapi pada saat yang sama pihaknya memanfaatkan para pejabat pribumi di jabatan-jabatan birokrasi, karena dipandang lebih murah ketimbang mendatangkan pejabat asli Belanda.

Studi Emmerson (1976) juga menarik. Ia memberangkatkan corak dan tradisi elite tradisional yang kelak dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi. Secara institusional, *keraton* dan birokrasi pribumi sangat berpengaruh, selain dalam perkembangannya juga terkait dengan pengalaman berpolitik di era *volkskraad*, dan kemunculan kaum cerdik-cendekia. Seperti hendak meneruskan model antrolopog Clifford Geertz yang mengidentifikasi manusia Jawa/*Indonesiake* dalam trikothomi *santri*, *abangan*, dan *priyayi*, Emmerson memotret elite politik lokal dengan membandingkan Purwoko yang *birokrat-abangan* dan Usman seorang

18 Tentang hal ini, saya pernah mengulas dalam kata pengantar buku terjemahan tentang elite, lihat Alfian (2006:iii-xiv). Uraian di sub-bab ini merujuk pada tulisan saya itu.

19 Kartodirdjo (1981:vii).

20 Niel (1984).

21 Sutherland (1983).

politisi santri.[22]

Bagaimana pendekatan elite dipakai meneropong kepolitikan Orde Baru dan Pasca-Orde Baru?

Pada era Orde Baru, studi tentang elite politik lebih ke konteks kekuatan-kekuatan politik, seperti militer, mahasiswa, partai politik dan yang lain. Itu pun dilakukan hati-hati di tengah iklim politik yang penuh pengawasan. Pada 1980-an dan 1990-an, studi elite telah menjadi kecenderungan, terkhusus Indonesianis. Mereka memakai perspektif kelas/golongan menengah dan *civil society*. Pengembangan ilmu-ilmu sosial saat itu amat terbatas oleh pendekatan rezim yang mengagungkan stabilitas politik dan keamanan.[23]

Seiring perubahan politik pasca-21 Mei 1998, banyak peristiwa yang dapat dicermati dari perspektif elite. *Multiparty system* membuka peluang para peneliti mencermati perilaku dan peran para elite partai dalam dinamika demokrasi. Pun perilaku elite DPR, birokrasi, militer, pemuda/mahasiswa, intelektual independen dan/atau partisan, pers, hingga penguasa kapital/pengusaha. Seiring otonomi daerah dan dinamika politik lokal, peluang penelitiannya pun terbuka. Bahkan, karena pemilu nyaris berbasis tokoh, maka pesona pendekatan elite dalam penelitian politik semakin menanjak. Apakah benar sang tokoh mampu melipat semua faktor politik penentu kemenangan dalam pemilu? Apakah faktor kehebatan tokoh, seperti halnya ketika orang menyebut "tokoh menarik/membesarkan partai politik" merupakan fenomena sesaat/kontekstual ataukah tidak?

Untuk memetakan elite politik Indonesia, ada baiknya kita simak Anies Baswedan, "Siapakah "*Ruling Elite*" Indonesia?".[24] Kendati analisisnya sederhana, tetapi ia memicu diskusi lebih lanjut: seberapa jauh prediksinya bahwa kelak yang dominan sebagai "*ruling elite*" kita adalah dari golongan saudagar? Mengapa demikian?

Apa yang menarik dari tulisan tersebut?

Anies mencatat bahwa,

> *Ruling elite* adalah sekelompok elite — di antara kaum elite-elite yang lain — yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan negara. Tesis yang diajukan di sini adalah pembentukan *ruling elite* ditentukan oleh (1) perekrutan anak-anak muda dan (2) tren utama bangsa. Tren utama bangsa ini berubah dari satu masa ke masa berikutnya seiring dengan perjalanan sejarah ...

22 Emmerson (1976). Tentang studi Geertz, lihat Geertz (1981).

23 Hadiz dan Dhakidae (2006); Dhakidae (2003).

24 Anies Baswedan , "Siapakah "Ruling Elite" Indonesia?", *Kompas*, 31 Oktober 2006.

Elite Intelektual

Sampai dengan akhir abad 19, jalur utama formasi elite di Indonesia adalah aristokrasi. Pendirian sekolah modern (barat) di seluruh Nusantara sejak tahun 1901 membuat tren baru dan utama. Elite bukan saja berdasarkan keturunan dan kepangkatan sosial, tetapi juga berdasarkan tingkat pendidikannya

... Pada periode ini pendidikan menjadi tren utama bangsa ini dan kunci utama untuk meraih sukses. Dari pendidikan modern ini terbentuklah elite intelektual yang jadi motor pergerakan nasional, seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir. Ketika Indonesia meraih kemerdekaan, kaum intelektual ini menjadi *ruling elite* pertama di negeri ini.

Elite Militer

Penjajahan Jepang dan Perang Dunia II membentuk *setting* mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan militer ... Saat itu terjadi perekrutan besar-besaran di kalangan anak-anak muda dengan satu syarat: berani perang. Terlebih, relokasi ibu kota ke Yogyakarta membuat anak-anak muda di kawasan itu — seperti Soeharto dan generasinya — memainkan peran sentral.

Dalam perjalanannya, anak-anak muda ini kemudian menjadi aktor-aktor penting di tubuh Angkatan Darat. Dan, ketika konflik politik di tahun 1960-an berakhir dengan kemunculan TNI AD di arena kekuasaan, muncul pula *ruling elite* baru Indonesia ...

Elite Aktivis

Di dekade 1960-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa ... Bersamaan dengan itu dunia gerakan mahasiswa mulai tumbuh, menguat, dan mengait dengan dunia politik. Organisasi mahasiswa menjadi wahana perekrutan pemimpin muda. Kemudian menjamur organisasi kepemudaan menjadi saluran mantan aktivis mahasiswa untuk meneruskan aktivismenya.

Para mantan aktivis ini kemudian aktif melalui partai politik, dunia akademis, LSM, ornop, pers, ormas keagamaan di samping sebagian kecil masuk ke dunia bisnis. Keterampilan organisasional dan politik membuat mereka menjadi kelompok yang paling siap menyambut peluang demokratisasi dan liberalisasi politik ... sesudah tumbangnya Presiden Soeharto, para aktivis itu menjadi motor partai-partai politik dan aktor-aktor politik dominan di Indonesia.

... Kalangan aktivis dan organisatoris ini menjadi *ruling elite* baru menggantikan kalangan militer ...

Siapakah yang akan menjadi *ruling elite* baru?

Anies mengaitkan dengan menguatnya peran penting pasar. Bahwa,

... terlepas dari perdebatan tentang bentuk/jenis pasar atau tentang peran negara dalam pasar; faktanya pasar berkekuatan dominan. Dari mulai ritual budaya dan agama sampai dengan layanan kesehatan dan pendidikan diwarnai

oleh aspek dan karakter pasar (bisnis).

Tren ini akan berlanjut terus dan perekrutan terhadap generasi muda untuk memasuki pasar (dunia bisnis) berlangsung intensif. Meskipun mungkin tidak diiringi kesadaran (atau bahkan tanpa ambisi) bahwa mereka berpotensi menjadi pewaris ruling elite Indonesia di masa depan. Akan tetapi, bersamaan dengan konsolidasi demokrasi yang berbasis pasar, para pelaku pasar akan makin berkepentingan dengan dunia politik dan kebijakan (*policy making*).

Melihat tren ini, dalam satu-dua dekade ke depan, kalangan enterprener dan profesional bisnis akan makin banyak memasuki wilayah politik dan menjadi ruling elite baru di Indonesia. ...

Tabel 7.1
Formasi dan Sirkulasi *Ruling Elite* Indonesia[25]

FASE PEMBENTUKAN ELITE		FASE MATURITAS ELITE	
PERIODE	**TREN/ JALUR REKRUTMEN**	**PERIODE MATURITAS**	***RULING ELITE***
1900-an–1930-an	Pendidikan Modern	1940-an–1960-an	Intelektual
1940-an–1960-an	Perjuangan Fisik 1970-an–1990-an	1970-an–1990-an	Angkatan bersenjata
1960-an–1990-an	Organisasi Massa/ Politik	2000-an–2020	Aktivis
1990-an–sekarang	Pasar/Dunia Bisnis	2020-an–?	Entreprener/ Bisnis

Bagian yang menyebut tren *ruling elite* Indonesia saat ini *enterpreneur* atau pebisnis, menarik, tetapi kontroversial ...

Kenyataannya memang politisi berlatar-belakang pengusaha cukup besar. Coba kita teliti komposisi anggota DPR periode 1999-2004, misalnya, tercatat terdiri dari mereka yang berlatar belakang enterprenur (pengusaha) 31,3 persen; mantan anggota DPR 23,4 persen; guru/pengajar 14,4 persen; pegawai swasta 4,4 persen; mantan anggota DPRD 4,3 persen; pensiunan PNS 4,3 persen; pengacara 3,6 persen; PNS 3,2 persen; TNI/Polri 2,5 persen; wartawan 2,2 persen; konsultan 2,2 persen; pensiunan TNI/Polri 1,2 persen; peneliti 0,8 persen; lainnya 2,2 persen.[26]

Dari data tersebut prosentase politisi pengusaha paling besar. Tetapi, apakah ini suatu tren? Anda juga bisa mengecek tren kehadiran para elite saudagar ini dalam pilkada-pilkada: apakah mereka cenderung sekadar

25 Anies Baswedan , "Siapakah."

26 Suryadinata (2002); Ziegenhain (2008:116).

cukup berposisi sebagai pemodal, atau langsung mau tampil?

Tentang Saudagar, Politik dan Konflik Kepentingan

KALAU ditinjau dari sejarahnya kaum saudagar kan juga berperan penting dalam dinamika dan kepemimpinan politik?

Sejarah politik bangsa Indonesia, tentulah tak dapat dilepaskan dari golongan saudagar. Itu sudah pasti. Hanya saja memang pola peran mereka dalam kepemimpinan politik itulah yang berbeda-beda: apakah secara langsung menduduki pos-pos penting dalam dunia politik, ataukah cukup menjadi penyokongnya. Setidaknya itulah salah satu benang merah, buku Fahmi Idris, *Saudagar dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia*. Idris mencatat,

> Sesungguhnya, apabila tidak dalam bentuk keterlibatan fisik, kaum sudagar umumnya memberikan dukungan finansial pada berbagai aktivitas yang dilakukan kaum pergerakan, partai politik, dan kegiatan penyediaan dana bagi para pelajar. Pemberian beasiswa ini telah melahirkan kaum intelektual dan cerdik-pandai nasionalis, yang kelak menjadi pejuang bangsa yang patriotik.[27]

Idris mengulas mengapa kaum saudagar dipandang rendah kelasnya ketimbang bangsawan, tetapi di kala bangsawan (*ningrat*) semakin kesulitan mendapatkan biaya yang dipakai untuk mempertahankan gaya hidupnya yang glamor, mereka membutuhkan kaum saudagar. Dicatat, bahwa,

> Ketika kerajaan melemah dan kolonialisme menguat, kaum saudagar terbelah dalam dua aliran besar. Ada yang sekadar berbisnis, apolitis dan hanya mengikuti gerak perdagangan kolonial. Akan tetapi, di pihak lain, ada pula irisan kaum saudagar yang secara tertutup menyokong gerakan rakyat melawan kolonialisme. Entah berapa lama masa itu berlangsung. Tetapi, yang jelas, salah satu catatan awal yang tersedia mengenai kemunculan para saudagar di medan politik adalah pada tahun 1911, yang ditandai dengan langkah Haji Samanhoedi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta (Solo).[28]

Dicatat, terlepas dari keterlibatannya dalam perjuangan kemerdekaan, pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, "semangat patriotisme dan keterlibatan kaum saudagar di ranah politik praktis mulai menyurut", bahwa, "Sebagian besar keterlibatan kaum saudagar dalam percaturan politik dan kekuasaan mulai lebih didasari oleh kepentingan sempit pribadi demi kelancaran dagang, mendapatkan perlakuan-perlakuan

27 Idris (2015:vii-viii).

28 Idris (2015:7).

Segalanya mungkin, dari malaikat ke setan ke ekonom dan politisi

- Paulo Coelho

Everything is possible, from angels to demons to economists and politicians.

istimewa dalam bisnis atau demi kepentingan golongan". Selanjutnya, "kelesuan keterlibatan kaum saudagar dalam dunia politik mencapai puncaknya pada masa Orde Baru". Dan, "kalaupun ada saudagar yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik pada masa itu, dapat dikatakan bahwa keterlibatan iru bersifat semu karena umumnya atas restu penguasa dan sekadar menjadi kepanjangan tangan kekuasaan".[29] Dan, akhirnya di era Reformasi, ketika hak konstitusi ditegakkan, maka "kaum saudagar aktif berkecimpung di dunia politik telah menjadi suatu kelaziman". Bahkan pasangan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2014 yakni Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pasangan saudagar[30]

Ada yang mengatakan lebih baik kaya dulu baru jadi politisi, ketimbang sebaliknya. Apa kaitannya dengan tren politisi enterprener?

Ada seorang politisi berlatar belakang birokrat dan pengusaha yang pernah mengatakan hal demikian pada saya. Ia sinis dengan politisi yang berlatar belakang "aktivis gerakan", yang dibesarkan oleh tradisi "minta sumbangan". Tapi, saya kira sinisme itu berlebihan. Soalnya politisi enterprener atau saudagar, sesungguhnya punya sisi-sisi yang bisa mengundang rasa sinis. Misalnya ada yang mengatakan mereka "tidak paham politik" dan sangat pragmatis.

Makanya daripada saling sinis, mending, saling belajar pada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kaya dulu baru jadi poltisi, tidak ada masalah. Baik-baik saja. Diharapkan dengan sudah punya uang banyak, maka ketika menjadi politisi tidak terpancing untuk melakukan korupsi. Tidak *kemaruk*. Sebaliknya, bagi politisi yang bukan enterprener, yang tidak kaya, diharapkan jangan termotivasi untuk mengejar kekayaan diri. Jangan terjebak pada ungkapan kalau mau kaya, jadilah politisi!

Belakangan ini banyak kritik bahaya "dwifungsi pengusaha dan penguasa". Apa maksudnya?

Dwifungsi penguasa yang pengusaha atau sebaliknya, merupakan gam-

29 Idris (2015:592).

30 Idris (2015:593).

baran nyata *conflict of interest*. Sebagaimana dicatat Lucky Djani, setumpuk penelitian secara empiris dan komparatif menunjukkan bahwa para taipan di negara berkembang yang berpolitik adalah kroni kapitalis, bukan wirausaha sejati. Pengusaha ini menikmati rente dari penguasa dengan memberikan imbalan finansial serta dukungan politik. Catatnya lebih lanjut,

> Penelitian Mushtag Khan (1999) di India, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Korea Selatan mengurai hubungan mesra penguasa dan pengusaha dalam mengejar rente ekonomi untuk membangun kelompok *politico-business*. Yoshihara Kunio (1990) menyebut kapitalis yang berkembang di Asia Tenggara sebagai "kapitalis semu" (*ersatz capitalist*), yaitu pengusaha yang tumbuh karena bergandeng mesra dengan rezim. Pengusaha semu ini membangun bisnis dengan memperoleh kemudahan (*privilege*) dan proteksi politik.
>
> Di Thailand sendiri, Pasuk Phongphaichit dan Chris Baker (2004) membedah sejarah perkembangan bisnis Shin Corporation. Thaksin memulai bisnis sebagai mantan perwira polisi yang memasok peralatan komputer dan ATK bagi institusi polisi. Pada awal 1990-an, dia mendapat konsesi *cable* TV, telekomunikasi (*paging*, telepon seluler, *card-phone*), satelit, dan datanet sebesar 1,3 miliar baht.
>
> Di Negeri Abang Sam pun sama. Kevin Phillips membedah "Dinasti Bush" yang dibangun dari fondasi bisnis finansial, perminyakan, dan industri militer. Prescott Bush, kakek Presiden Bush, adalah pengusaha yang menjadi senator dari Connecticut dan teman main golf favorit Presiden Eisenhower. Dari relasi bisnis-politik ini, dinasti Bush berkembang (Phillips, 2004).
>
> Di Korea Selatan para *chaebol* membangun perusahaan multinasional mereka dengan sokongan penuh dari rezim yang berkuasa saat itu (Kang, 2002). Mereka menjalin hubungan mesra (*cozy relationship*) dengan penguasa untuk memperoleh konsesi dan lisensi (Jungsoo Park, 2004). Di Filipina, pengusaha menguasai ranah politik dan bisnis yang dibangun dengan cara yang sama. Istilahnya *booty capitalism* (Hunchcroft, 1998).
>
> Bagaimana di Indonesia? Riset yang dilakukan Yoshihara Kunio (1990), Richard Hefner (1998), serta Robison dan Hadiz (2004) mengkonfirmasikan pola di atas. Pengusaha adalah pemburu rente dari hasil selingkuh kepentingan dengan penguasa. Celakanya, kelompok bisnis inilah yang tertarik untuk berpolitik.[31]

Intinya kan perburuan rente dalam politik?

Tidak hanya rente, tetapi sebagaimana dicatat Djani, motivasi utama taipan berpolitik umumnya guna mempertahankan kepentingan bisnisnya, bukan untuk mengabdi. Pengalaman menunjukkan bahwa kelompok *politi-*

31 Lucky Djani, "Dwifungsi Penguasa dan Pengusaha", *Koran Tempo*, 19 November 2005

BLOGS.SPECTATOR.CO.UK

Jika aku, mengurus kepentingan semua orang, pun mengurus diri sendiri, Anda tak dapat bicara soal konflik kepentingan

- Silvio Berlusconi

If I, taking care of everyone's interests, also take care of my own, you can't talk about a conflict of interest.

co-business ini paling tidak loyal. Dan,

> Walaupun penguasa berganti, apa pun jenis rezimnya, *politico-business* berusaha menjadi sekutu penguasa ... Pengalaman di Thailand menunjukkan, walau rezim sipil diganti oleh rezim militer, pengusaha akan menyesuaikan diri. Begitu pula di Filipina, pengusaha kroni Marcos, setelah *People Power*, yang pertama kali berpindah "perahu" masuk ke institusi publik seperti kongres dan eksekutif serta "menyandera" institusi tersebut (*state captured*).
>
> *Kedua*, dengan kemampuan finansialnya, *politico-business* dengan mudah mendominasi proses politik. Thaksin dan Berlusconi, dengan dukungan jaringan media, membuat propaganda untuk kampanye pribadi. Thaksin bahkan berusaha mengontrol pemberitaan media — sesuatu yang fatal bagi demokrasi.
>
> Belum lagi selingkuh kepentingan. Sebagai pemburu rente, pengusaha berupaya memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, kebijakan publik, lisensi bisnis, kredit, bahkan monopoli. Sementara itu, sebagai pejabat publik, pengusaha memiliki wewenang atas kebijakan publik, lisensi, dan kontrak proyek pemerintah. Bahaya jika terjadi *split personality*: kebijakan dan sumber daya publik dinikmati oleh kelompok bisnisnya.
>
> Dalam kondisi ketika perilaku belum dapat memisahkan kepentingan privat dan publik, penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Ditambah lemahnya aturan main dan tidak konsistennya penegakan hukum di Indonesia, dampak negatif kepribadian ganda penguasa-pengusaha mudah dihindari. Lebih arif jika dwifungsi ditiadakan.[32]

32 Lucky Djani, "Dwifungsi".

Politik bukan permainan. Ia urusan yang serius

-Winston Churchill

Politics is not a game. It is an earnest business

Bagaimana cara meniadakan "dwifungsi pengusaha-penguasa"?

Tentu dengan aturan yang jelas: justru untuk memastikan bahwa pengusaha tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya ketika mereka berkuasa. Jadi tidak sekadar mengkampanyekan anti-rangkap jabatan dan hal-hal yang masuk ke ranah etika politik, tetapi memang harus dengan aturan yang jelas dan spesifik. Hanya dengan cara itulah konflik kepentingan dihindari.

Anda mengutip Berlusconi di atas, apa konteksnya?

Tampaknya kita harus berhati-hati dengan pandangan Berlusconi itu. Ia bisa menjebak. Kata-kata itu bernada dalih pembenaran atas apa yang dilakukannya sebagai pemimpin yang privasinya tidak mau diganggu. Pemimpin (politik) tentu boleh menikmati privasinya sedemikian rupa, tetapi tetap harus berhati-hati, manakala apa yang dilakukannya bisa jadi melanggar hukum, atau bisa menjadi masalah hukum. Di luar apa yang dikatakannya, Berlusconi sendiri pernah berurusan dengan hukum dalam kasus-kasus yang menghebohkan.

Siapa Berlusconi? Bagaimana karir politiknya? Apa yang bisa kita petik dari pengalamannya sebagai politisi?

Silvio Berlusconi pernah menjadi Perdana Menteri Italia, dan ia seorang "politisi sejati". Posisinya sebagai perdana menteri jatuh bangun, sebelum akhirnya mundur.[33] Ia lahir di Milan, Italia 29 September 1936. Sebelum masuk politik, ia dikenal sebagai pengusaha, termasuk pemilik sebuah perusahaan media raksasa di Italia. Pada 1994 ia mendirikan Partai Forza Italia. Melalui partainya itu, ia bisa memperoleh posisi Perdana Menteri pada 1995, 2001, 2005, 2008 sampai ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Mario Monti pada tanggal 16 November 2011. Berlusconi meninggalkan total utang negara sebesar 1,9 triliun Euro atau senilai 2,6 triliun dollar AS.

O, ia jenis politisi pengusaha ya?

Begitulah, dan itu sah-sah saja. Berlusconi punya piranti-piranti yang nyaris sempurna untuk menunjang karir politiknya: kapital, media, dan klub sepakbola. Kapital untuk membiayai aktivitas politiknya, media untuk

33 Tentang kisah Berlusconi ini, antara lain lihat wikipedia.org dan bbc.com. Analisis sebelum tahun 2008, lihat Shin dan Agnew (2008).

memupuk citra politiknya. Ia pemilik klub sepak bola AC Milan yang tersohor itu. Ia memang berlatar belakang keluarga menengah-atas. Setelah tamat Fakultas Hukum Università Statale, ia menempuh jalan bisnis. Pada 1962 ia memulai usaha konstruksi dan real estate. Pada 1974, ia memperluas kerajaan bisnisnya dengan mendirikan stasiun televisi kabel Telemilano.

Mengapa ia memutuskan masuk dunia politik?

Para pengritik menuding motivasi politiknya untuk memproteksi bisnisnya. Namun, para pendukung memposisikannya sebagai tokoh baru yang menjanjikan dalam politik. Apalagi ketika itu, dua partai raksasa Italia, Kristen Demokrat (*Democrazia Cristiana*) dan Partai Sosialis (*Partito Socialista Italiano*) sedang *anjlok* popularitasnya oleh berbagai skandal korupsi. Partai Forza Italia didirikan hanya dua bulan sebelum Pemilu 1994, dianggap sebagai alternatif.

O, jadi ada momentum yang demikian itu ya ..

Iya. Tampaknya publik politik Italia memang tengah butuh alternatif untuk mengganti kepemimpinan lama di negerinya. Melalui partai barunya itu, Berlusconi bergerak cepat, dan menariknya ia mampu memanfaatkan jejaring perusahannya sebagai modalitas awal partai politiknya. Berlusconi menjadikan para manajer perusahaannya untuk dicalonkan sebagai anggota parlemen. Tak hanya perusahaan, tetapi Partai Forza Italia segera punya basis massa yang jelas: massa fanatik klub sepakbolanya.

Dengan kampanye besar-besaran lewat iklan di jaringan TV-nya, popularitas *Forza Italia* melonjak luar biasa. Walhasil, pada Pemilu 1994, partai ini memenangkan pemilu dengan dukungan 21% suara dan mengantarkan Berlusconi sebagai perdana menteri. Tapi pemerintahannya hanya berjalan tujuh bulan (10 Mei 1994-17 Januari 1995), karena ketidakkompakan koalisi.

Pada 2001 Berlusconi bangkit memimpin koalisi kanan-tengah *Casa delle Libertà* (Wisma Kemerdekaan) dan tampil kembali sebagai perdana menteri. Tapi pada pemilu-pemilu berikutnya, *Casa delle Libertà* kurang berhasil. Pada pemilu lokal terakhir (April 2005), kelompok oposisi menang. Hal tersebut memicu dua partai politik meninggalkan pemerintahan. Berlusconi pun menyerahkan pemerintahan kepada Presiden pada 20 April 2005. Tapi, pada 23 April ia membentuk pemerintahan baru dengan sekutu-sekutu yang sama, dengan beberapa perubahan menteri dan program. Tapi, lagi-lagi pemerintahannya jatuh. Oposisi unggul tipis Pemilu 2006. Namun, Berlusconi belum tamat. Pada Mei 2008 ia kembali hadir kembali sebagai perdana menteri, sebelum akhirnya tamat pada November 2011. Tamat di sini bukan berarti ia sama sekali mundur dari politik.

Kaum saudagar yang masuk ke dalam percaturan politik dan perebutan kursi kekuasaan harus mengembangkan budaya politik bahwa kekuasaan adalah amanah

- J. Kristiadi

Maksudnya, ia masih berikhtiar rebut jabatan Perdana Menteri? Soal ia mundur pada 2011, apa penyebabnya?

Ya. Pada Desember 2012, Berlusconi mengumumkan di televisi bahwa ia akan mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri. Ia merasa dirinya telah teruji, betapapun ikhtiarnya itu tidak lagi kesampaian. Ia banyak menyimpan kontroversi, tetapi bukan sekadar itu yang menyebabkannya mundur pada 2011. Yang memicunya mundur lebih pada memburuknya kondisi ekonomi Italia seiring dengan Krisis Zona Euro. Krisis awalnya menyeret Yunani, Portugal, Spanyol, dan Irlandia. Italia jatuh ke krisis parah setelah menumpuk utang hingga 2,6 Triliun Euro, melebihi pendapatan Italia. Setelah didesak parlemen, Berlusconi memutuskan mundur dan diganti Mario Monti. Kejatuhannya dirayakan jutaan orang Italia yang merasa terbebas.

Soal kontroversi, apa saja misalnya?

Berlusconi pernah mengangkat model telanjang Mara Carfagna sebagai menteri. Ia juga harus minta maaf atas komentarnya tentang superioritas kebudayaan Barat atas Islam. Ia pernah berkelakar, kulit hitam Obama hasil berjemur yang sangat bagus. Ia berdalih sekadar bercanda dan menyebut pengecamnya "orang-orang bodoh tanpa selera humor." Yang paling kontroversial, skandal hubungan terlarang dengan Karima el-Mahroug yang ditengarai pekerja seks di bawah umur asal Maroko. Kasus ini berlanjut di pengadilan. Pada 2013 pengadilan memvonisnya hukuman tujuh tahun penjara dan larangan seumur hidup dari jabatan publik. Namun, pada Maret 2015, pengadilan tertinggi Italia membebaskannya. Maka, peluang Berlusconi di ranah politik, terbuka kembali.

Boleh tidak politisi ber-*mindset* saudagar?

Apabila kita simak Akbar Tandjung *The Golkar Way* (2007),[34] ia tidak mempersoalkan kehadiran politisi berlatar belakang saudagar dalam politik, kecuali yang ia mengingatkan pendekatan transaksional pemimpin politik ber-*mindset* pedagang. Menurut Akbar,

> Bukan berarti bahwa pedagang atau saudagar tidak boleh terlibat dalam politik

34 Tandjung (2007).

sebagaimana mereka yang berasal dari latar belakang lainnya seperti teknisi, dokter, akademisi, purnawirawan TNI, mantan birokrat, dan lain sebagainya, karena setiap orang yang merasa terpanggil, apapun latar belakangnya, mempunyai kesempatan yang sama dalam berpolitik. Yang menjadi masalah adalah apabila *mindset* pedagang atau saudagar digunakan dalam berpolitik, karena politik dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga mengabaikan tujuan utama berpolitik yaitu menyejahterakan rakyat.[35]

O, jadi yang dikhawatirkan *mindset* saudagar dalam berpolitik atau berpartai ya? Bukan saudagarnya sendiri...

Tepat. Tak ada soal dengan saudagar berpolitik. Tapi berpolitik tak identik dengan berusaha secara ekonomi. Partai politik membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatannya, tetapi partai politik bukan perusahaan. Politisi juga butuh dana, namun dana sebagai *modal politik* berbeda dengan sebagai *modal dagang*. Modal politik dipakai untuk mewujudkan visi dan obsesi politik, modal dagang dipakai untuk memperoleh laba-materi yang setinggi-tingginya atas posisinya sebagai pejabat politik.

Peneliti CSIS J. Kristiadi berpendapat perlunya beberapa persyaratan agar peran saudagar dalam mengelola kekuasaan tidak menimbulkan permasalahan: (1) kaum saudagar yang masuk ke dalam percaturan politik dan perebutan kursi kekuasaan harus mengembangkan budaya politik bahwa kekuasaan adalah amanah; (2) penegakan hukum harus benar-benar dapat diwujudkan; (3) partai politik dan lembaga perwakilan rakyat harus berfungsi sebagaimana mestinya; (4) birokrasi harus profesional dan imparsial, serta memelihara etik dan nilai-nilai yang dapat mendukung fungsinya sebagai lembaga pelayanan publik; (5) struktur kekuasaan politik harus dapat menjamin berfungsinya mekanisme saling kontrol di antara lembaga-lembaga politik, sehingga tidak terjadi penyelewengan mandat rakyat untuk kepentingan bisnis atau dagang; dan (6) berkembangnya etika berbisnis yang sehat, terutama saudagar yang menjadi pejabat publik harus bermental baja agar tidak tergoda menyalahgunakan kekuasaannya untuk membangun imperium bisnisnya.[36]●

35 Catatan kaki nomor 66 Bab 3 buku *The Golkar Way*, lihat Tandjung (2007:131). Akbar Tandjung merujuk pada A.J. DuBrin, R.D. Ireland dan J.C. Williams, *Management and Organization,* Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co, 1996; Yohanes Budiarto dan Koentjoro, "Studi terhadap Tiga jenis Komitmen Partai Politik Berdasarkan Dua Jenis Gaya kempemimpinan serta menurut Kohesivitas Kelompok", dalam Jurnal *Psikologi Sosial*, Vol. 10, No.3, Desember 2003, hal 29.

36 Idris (2015:597).

Bab 8

Kehadiran Pemimpin

Kepemimpinan itu tindakan, bukan posisi

- DONALD H. MCGANNON[1]

Para pemimpin itu tumbuh, mereka tidak dibuat

- PETER F. DRUCKER[2]

MENGAPA MASYARAKAT butuh pemimpin?

Saya menjawabnya dengan mengajak Anda membaca fabel Maulana Jalaluddin Rumi, berikut:[3]

Di suatu hutan, singa, sebagai rajanya, tiba-tiba pemarah dan otoriter sekali. Sikap bijaknya tenggelam oleh nafsu berkuasa, dan itu harus diekspresikannya dengan mengharuskan masyarakat hutan untuk menyetor binatang-binatang setiap hari untuk dijadikan mangsanya.

Masyarakat hutan pun, kecewa dengan kebijakan sang raja. Tetapi tidak ada pilihan lain. Setiap hari seekor binatang harus direlakan untuk disantap sang singa, entah itu kera, kijang, kuda, anjing, kucing, ayam, burung, dan apa saja. Sampailah saatnya, kelinci. Ia hadir untuk menaklukkan raja yang rakus, tetapi bodoh itu. Inilah kutipan percakapan singa dan kelinci:

"Kau terlambat".

---

1 Thinkexist.com. *Leadership is action, not position*.

2 Heartquotes.com. *Leaders grow, they are not made*.

3 Azzam (2002).

DOKUMENTASI PENULIS

"Aku nyaris tak sampai," jawab kelinci tenang dan pasti. "Kami diserang di perjalanan".

"Kami? Kami, siapa?"

"Yah, hewan-hewan yang mengirimku berpikir bahwa binatang seukuranku tak akan kenyang bila hanya memangsa satu kelinci yang kurus kering ini. Mereka mengirim dua supaya perutmu kenyang."

"Lantas di mana temanmu?"

"Kami sedang di perjalanan, ketika mendadak kami diserang oleh seekor..."

"Seekor apa?"

"Seekor singa."

Betapa kagetnya sang singa, raja hutan itu, mendengar adanya singa lain. Ia mengaum dalam kemurkaan dan kemarahan. Kemarahan memuncak ketika mendengar penjelasan bahwa singa lain itu, sangat besar dan garang.

"Aku akan membunuhnya, betapa kurang ajarnya dia," kata singa yang bermuka merah, karena marah. Sang singa meminta kelinci menunjukkan di manakah singa lain itu, dan kelinci pun membawanya, hingga ke tepi sebuah sumur.

"Di mana singa itu?"

"Di sana, di dalam sumur itu!"

"Apa? Di dalam sumur? Apa kau coba menjebakku? Kau mau coba mendorongku agar jatuh ke dalam sumur?" Singa menaruh curiga. Kelinci pun ge-

Kemarin aku pintar, aku pun ingin mengubah dunia.
Hari ini aku bijak, aku pun ingin
mengubah diriku sendiri

- Jalaluddin Rumi

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.
Today I am wise, so I am changing myself.

metar ketakutan, tetapi ia menahan diri, dengan mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh.

"Aku bersumpah padamu, ia benar-benar ada di dalam sumur itu. Coba lihat sendiri," tukas kelinci. Dan singa pun menyanggupi. Begitu ia mengintip ke dalam sumur, betapa kagetnya ia. Ada seekor singa yang garang di dalamnya.

"Lihat! Itu dia! Serang sebelum dia menerkan kita!"

Dan singa pun, dengan kemarahannya menerkam singa di dalam sumur, yang tak lain adalah bayangannya itu. Seketika semua binatang yang diam-diam mengikutinya, bersorak sorai.

Tapi, persoalan tak selesai sampai di sini. Para binatang pun bingung, setelah salah satu di antara mereka mengatakan, kalau sang singa itu dibiarkan mati di dalam sumur, maka siapa yang akan memimpin mereka? Mereka pun bermusyawarah, dan akhirnya tercapai kesimpulan, mereka akan menolong

sang singa, dan menaikkan lagi sebagai raja, dengan syarat, raja kali ini harus bijak dan tidak memakan binatang-binatang.

Singa pun berkata, "Maafkan aku atas segala perbuatanku pada kalian di masa lampau, aku dibutakan oleh kemarahan, dan aku menyalahkan semua hewan kecuali diriku sendiri. Begitu murkanya aku hingga aku bahkan tak mengenali diriku sendiri yang tercermin di air".

Apa hikmah kisah itu?

Kemarahan pada akhirnya dikalahkan oleh kelihaian. Kedamaian diciptakan dengan ketulusan. Dalam demokrasi, ada prinsip *cheks and balances*, justru untuk mencegah penguasa *dzalim*. Penguasa memang dilingkari konstitusi, tetapi bukan berarti kedzaliman tertutup. Dalam praktik demokrasi yang sehat, saya kira, tidak semata-mata disandarkan pada konteks jumlah. Demokrasi kuantitatif alias jumlah, akan mereduksi makna demokrasi yang luas dan substansial, semata-mata ke konteks adu kekuatan. Praktik demokrasi mestinya lebih deliberatif, kualitatif dan substansif.

Deliberasi mengedepankan prinsip imparsialitas yang menekankan kualitas argumentasi, yang rasional dan bertanggung jawab, inklusif, terbuka, imparsial, dan setara. Held mencatat deliberasi dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, dengan alasan: (1) melalui adanya pertukaran informasi dan wawasan, meningkatkan kemampuan pemahaman masalah; (2) memetakan kepentingan pribadi/kelompok sekaligus berorientasi kepentingan bersama; (3) mengganti "bahasa kepentingan" dengan "bahasa rasionalitas".[4] Tampaknya demikianlah yang relevan dalam sila keempat Pancasila: *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*.[5]

Jadi Mengapa masyarakat butuh pemimpin?

Ada penjelasan sederhana dan mudah dipahami di buku Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*.[6] Dalam bukunya itu, ia menjelaskan tentang pentingnya ketertiban.[7] Menurutnya, dalam kompleksitas masyarakat, manusia harus hidup bersama-sama dan bekerja sama dalam suasana yang tertib dan terbimbing oleh seorang pemimpin, dan tidak hidup menyendiri. Kartini menambahkan, demi efisiensi kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama, dan untuk mempertahankan hidup bersama, diperlukan kerja

4 Tentang demokrasi deliberatif, lihat Held (2007:279-280).

5 Latif (2011:459).

6 Kartono (2006).

7 Kalau kata kuncinya "ketertiban", mungkin perlu kita baca Samuel P Huntington, dalam bukunya berjudul *Political Order in Changing Societies,* buku yang mengupas tema pembangunan politik. Lihat Huntington(2004).

kooperatif yang perlu panduan pemimpin.

Ada semacam naluri dalam setiap komuni, bahkan komuni binatang-binatang sekalipun untuk menghadirkan pemimpin di tengah-tengah mereka. Jadi, selain ketertiban, kata kunci lain yang perlu kita perhatikan adalah panutan. Suatu komunitas memerlukan panutan, yakni sosok yang dianut, yang dianggap mampu mengayomi dan melindungi mereka, serta mampu diandalkan untuk berdiplomasi dengan kelompok dari komunitas lain.

Apa maksud naluri komuni?

Naluri komuni atau kelompok, muncul bersamaan dengan kesadaran identitas-primordial atau *tribal*. Manusia hidup bersuku-suku dan dalam setiap suku, guna mempertahankan eksistensinya, secara alamiah hadirlah pemimpin. Bahkan pada hewan pun naluri itu ada Dalam suatu komunitas hewan, mereka saling bekerja sama. Walaupun *absurd*, fabel Vince Poscente yang mengisahkan spirit kepemimpinan menarik untuk dibaca: bagaimana hubungan seekor semut bernama Adir dan seekor gajah bernama Elgo, yang bahu-membahu bekerja sama mewujudkan tujuan bersama, yang bukan sekedar dituntun naluri semata, tetapi juga pikiran.[8]

Apa bedanya dengan nurani kolektif?

Nurani kolektif diperkenalkan oleh Sosiolog Emile Durkheim, yang bermakna eksitensi tatanan sosial dan moral yang berada di luar individu dan bertindak terhadap mereka sebagai kekuatan independen. Nurani kolektif terdiri dari berbagai sentimen, kepercayaan, dan nilai bersama yang membentuk tatanan sosial. Ketika masyarakat menjadi lebih modern, nurani kolektif melemah, solidaritas mekanis digantikan oleh solidaritas organik.[9]

Bagaimana masyarakat tradisional-tribal menghadirkan pemimpinnya?

Nurani kolektif memicu terbentuknya suatu struktur tatanan sosial dalam masyarakat tradisional-tribal, di mana hadirnya pemimpin merupakan satu paket dengan terbentuknya tatanan tersebut. Pemimpin (kepala suku) adalah elite tertinggi yang menentukan. Kepala suku mengomando dan menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dalam tata-sosial yang masih sangat sederhana. Kepala suku juga bertindak sebagai juru bicara kelompoknya. Kepala suku memutuskan apakah komuninya bertahan di suatu tempat atau nomaden, hidup damai dengan pihak luar atau perang. Mari kita simak kisah Jenghis Khan, pemimpin tradisional-tribal dengan

8 Poscente (2007).

9 Burton (2008:4).

Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum, kecuali dengan adanya pemimpin

- Al Ghazali

daya jangkau penaklukan yang sangat luas dalam sejarah.

Jenghis Khan?

Ya. Jenghis Khan, Genghis Khan, Jinghis Khan, Chinghiz Khan, Chinggis Khan, atau Changaiz Khan yang nama aslinya Temüjin atau Temuchin, Tiemu Zhen (1162-1227) adalah khan Mongol dan ketua militer yang menyatukan bangsa Mongolia dan kemudian mendirikan Kekaisaran Mongolia, menaklukkan sebagian besar wilayah Asia. Penggantinya meluaskan wilayahnya, sehingga sejarah dunia mencatat Mongolia sebagai satu-satunya *negara* yang kekuasaannya mendekati dominasi seluruh dunia (*global domination*), meliputi China, Mongolia, Russia, Korea, Vietnam, Burma, Kamboja, Timur Tengah, Polandia, Hungaria, Arab Utara, dan India Utara.[10]

Ia pun menjatuhkan peradaban dominan saat itu, peradaban Islam. Tetapi, mengikuti teori siklus peradaban Ibnu Khaldun, peradaban yang dibangunnya akhirnya rubuh juga. Peradaban, menurut Khaldun, mengalami masa-masa partumbuhan, konsolidasi, puncak keemasan, pembusukan dan kemudian keruntuhan.[11] Sejak berabad-abad lampau, sejarah jatuh bangunnya peradaban penting sebagai bahan pelajaran berharga.

Penjelasan-penjelasan di atas, mengedepankan argumentasi bahwa pemimpin itu muncul secara alamiah?

Ya, karena pemimpin dan kepemimpinan, pengikut dan kepeng-ikutan ialah hal-hal yang alamiah saja sebenarnya. Setidaknya, demikianlah yang disampaikan Mark van Vught dan Anjana Ahuja dalam *Natural Leader*. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai perspektif yang menarik untuk kita simak: teori kepemimpinan evolusioner (*evolutionary leadership theory*, ELT). Dijelaskan bahwa kepemimpinan dan kepengikutan muncul di sepanjang jalannya evolusi manusia. Evolusi mengaitkan daya hidup makhluk ke dalam kata adaptif. Evolusi memilih perpaduan antara pemimpin dan pengikut dalam masyarakat manusia secara "terprogram" dalam otak manusia.

10 Wikipedia.org. Lihat juga, Man (2008).

11 Hal ikhwal pemikiran Ibnu Khaldun, lihat Zainuddin (1992).

> Teori ini menyatakan bahwa, karena manusia beradaptasi secara evolusioner untuk hidup berkelompok, dan karena kelompok berpemimpin jauh lebih baik sukses daripada kelompok tanpa pemimpin, ini berarti kepemimpinan dan kepengikutan menjadi prasyarat bagi kesuksesan reproduksi (yang menjadi satu-satunya jenis kesuksesan penting ketika menyangkut evolusi). Singkatnya, kelompok tanpa pemimpin efektif akan punah.[12]

Apa kelebihan masyarakat yang punya pemimpin dibandingkan dengan yang tidak?

Beda sekali tentunya. Ketiadaan pimpinan akan memuncukan konflik berlarut-larut dan *chaos*, kacau sekali! Situasi masyarakat yang *chaotic* itulah yang hendak diatasi oleh pemimpin. Bahkan ada yang berpendapat bahwa keberadaan pemimpin yang *dzalim*, masih lebih baik ketimbang masyarakat tanpa pimpinan. Memang, pendapat itu masih layak diperdebatkan, tetapi, yang punya pemimpin itu lebih baik ketimbang yang tidak. Yang punya pemimpin tetapi bertabiat jahat, masalahnya ialah bagaimana menghilangkan tabiatnya itu. Tetapi yang tidak punya pemimpin, ia akan terus mencarinya, padahal kekacauan terus-menerus menyubur. Eksistensi pemimpin karenanya penting sekali, sebagaimana disitir Al Ghazali: "Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang, dan tidaklah sempurna kekuasaan dan hukum, kecuali dengan adanya pemimpin."[13] Juga patut kita renungkan Euripides (406 SM), "Sepuluh serdadu baik yang dipimpin dengan bijak, dapat mengalahkan seratus serdadu musuh yang tanpa pemimpin."[14]

Maksudnya pemimpin itu ahli strategi juga?

Ya iyalah. Kalau ia pemimpin perang, ia *strategist* alias ahli strategi untuk memenangkannya. Filosof perang klasik Sun Tzu berpendapat, salah satu unsur penentu kemenangan perang adalah panglima alias pemimpin. Panglima menggambarkan keunggulan-keunggulan kebijakan, ketulusan, kebaikan, keberanian, dan kedisiplinan. James Clavell, menggaris-bawahi pandangan Sun Tzu bahwa,

> Jenderal yang memenangkan sebuah peperangan banyak melakukan perhitungan sebelum perang. Jenderal yang kalah perang hanya membuat sedikit perhitungan sebelum perang. Jadi, banyak perhitungan mengarahkan pada kemenangan, dan sedikit perhitungan mengarahkan pada kekalahan; apalagi bila

12 Vugt dan Ahuja (2015:21)

13 Dakwatuna.com. Dikutip dari Imam Al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, 1/17, *Mawqi' Al Warraq*.

14 Weingraber.com. *Ten soldiers wisely led will beat a hundred without a head*.

YOUTUBE.COM

Hidupku terlalu pendek untuk menaklukkan seluruh dunia

- Jenghis Khan

My life was too short to acheive the conquest of the whole world.

tanpa perhitungan sama sekali![15]

Katanya, pemimpin itu juga harus tegas?

Tegas artinya berdisiplin menjalankan prinsip dan kebijakan yang telah diambilnya, dan bukan berarti pemarah atau kejam. Pemimpin akan selalu menghadapi masalah yang berkembang dinamis. Pemimpin ideal itu penuntas masalah. Kalau masalah yang dihadapi ialah perang fisik, ia harus secepatnya menuntaskan perang itu. Nasihat Julius Caesar perlu kita kutip: seorang pemimpin harus *vini, vidi, vici*. Saya datang, melihat, dan menang![16] Perang yang berlarut-larut, kata Sun Tzu, harus dihindari.[17] Keputusan sang pemimpin harus didasari prinsip kehati-hatian, kalkulasi mendasar dan jeli, tak asal-asalan. Tapi pemimpin jangan terlalu lama memutuskan atau tidak boleh membiarkan ketidakpastian terjadi.

Kalau demikian, bisakah dijelaskan ringkas apa yang dimaksud pemimpin?

Pemimpin itu *leader*. *To lead* berarti memimpin. *Leading*, memimpin di depan (sebagai juara), meninggalkan yang lain dalam sebuah kompeti-

15 Clavell (2003).

16 *Veni, vidi, vici* adalah kalimat Bahasa Latin yang terkenal, berasal dari Julius Caesar, jenderal dan konsul Romawi pada tahun 47 SM. Julius Caesar menggunakan kalimat ini dalam pesannya kepada senat Romawi menggambarkan kemenangannya atas Pharnaces II dari Pontus dalam pertempuran Zela. Kalimat yang berarti saya datang, saya melihat, saya menang/menaklukkan mengandung arti kemenangan mudah dan mutlak. Kalimat ini sering salah kaprah ditulis sebagai *Vini, Vidi, Vici.* Lihat, Wikipedia.org.

17 Clavell (2003).

si. Pemimpin itu seseorang yang hadir dengan segenap kualifikasi kepemimpinan. Menurut Eisenhower, kepemimpinan itu kemampuan seseorang memutuskan apa yang seharusnya dilakukan, kemudian membuat orang-orang lain berkeinginan melakukan hal tersebut.[18] Soal kepemimpinan dan seluk-beluknya, akan kita bahas tersendiri nanti.

Apakah pemimpin selalu berposisi di depan?

Tidak selalu. Kalau kita merujuk paradigma Ki Hadjar Dewantoro, bahwa pemimpin itu bisa di depan, di tengah, dan di belakang. Menurutnya, prinsip kepemimpinan itu *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*.[19] Kalau posisinya di depan, pemimpin tampil sebagai teladan, di tengah membangun prakarsa, dan di belakang memberi dukungan atau dorongan. Pemimpin tidak boleh *njegideg*, diam saja, *plompang-plompong*, bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan, tidak kreatif-inovatif. Pemimpin itu manusia optimis, penggerak, motivator, dinamis, bukan statis, dan tahu konteks. Kalau ia memimpin orkestra, sebagai dirijen ia harus berposisi di depan. Tetapi kalau penggembala kambing atau bebek, maka bisakah yang digembalakan itu dipimpin dari depan? Lain lagi kapten kesebelasan sepak bola: sebagai pimpinan kesebelasan ia bisa berposisi di depan, tengah, atau belakang.

Ada pendapat pemimpin itu pelayan. Maksudnya?

Memimpin itu hakikatnya melayani, bukan dilayani. Seorang kepala negara atau pemerintahan yang dipilih secara langsung-demokratis, hakikatnya pelayan dari mereka yang memilih atau yang tidak memilih. Ia pelayan masyarakat semuanya saja, tanpa pandang bulu. Konsep *melayani* (*to servant*) *kan* tidak lebih mulia ketimbang *dilayani*. Karenanya, pemimpin itu tidak boleh sombong. Dalam konteks ini ada istilah *servant leadership*, kepemimpinan yang melayani. Nabi Muhamad SAW pernah bersabda, dalam suatu perjalanan, pemimpin sekelompok orang adalah pelayan mereka.[20] Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut.

Apa pemimpin itu perlu jabatan?

---

18 Heartquotes.net. *Leadership: the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it*.

19 Britannica.com/eb/topic-160427/Ki-Hadjar-Dewantoro

20 Kutipan ini diambil dari Adair (2007). Mungkin yang dimaksud adalah Hadits Riwayat (HR) Abu Dawud berikut ini: Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Juga HR Ahmad begini: Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di padang belantara, kecuali mereka harus mengangkat salah seorang di antaranya untuk menjadi pemimpin mereka. Lihat, al-Banjari (2008:19).

Bisa ya bisa tidak. Demikian jawaban Sanborn. Dalam *Semua Orang Bisa Jadi Pemimpin*, ia berpendapat, seorang pemimpin bisa memimpin dengan atau tanpa jabatan. "Kita semua tahu tentang para pemimpin yang memiliki jabatan besar," tulis Sanborn, "tetapi sebenarnya mereka bukan pemimpin".[21] Artinya, ada seseorang jabatan formalnya tinggi, tetapi ia bukan pemimpin. Ia berada dalam bayang-bayang sosok lain yang lebih berpengaruh dari dirinya, yang mendiktekan kebijakan-kebijakan strategis kepadanya. Adakalanya sosok yang tanpa jabatan lebih berpengaruh ketimbang pemimpin formal! Menurut Sanborn, pertama-tama, kepemimpinan adalah pengaruh. Untuk mengembangkan pengaruh, pemimpin tak harus punya jabatan (formal). Donald H. McGannon berujar, *leadership is action, not position*.[22] Pesannya bagus sekali: bukannya posisi tidak penting, tetapi kepemimpinan lebih banyak berurusan dengan tindakan. Nanti akan kita kupas khusus soal *pengaruh* ini.

Dalam film-film serial dan komik-komik, sisi baik dan jahat, masing-masing ada pemimpinnya ...

Ya, biasanya dalam film atau komik, diperhadapkanlah: sosok baik melawan yang jahat. Yang baik belum tentu tampil sebagai pemimpin efektif. Seringkali, tokoh yang jahat justru seorang pemimpin yang efektif. Kaum jahat bisa lebih efektif karena terorganisasisikan dengan baik, ketimbang kaum baik. Petuah yang konon berasal dari Sayidina Ali bin Abi Thalib RA berikut patut kita camkan: "Suatu perkara yang *haq* atau benar yang tidak diorganisasikan dengan baik, dapat dikalahkan dengan yang *batil* yang terorganisasi dengan baik."[23] Atau dengan kata lain, kejahatan yang terorganisasi bisa mengalahkan kebaikan yang tak terorganisasi. Jadi, pengorganisasian memang demikian penting. Tentang yang baik dan yang jahat itu, soal sudut pandang juga tak kalah penting. Noam Chomsky, misalnya, mengisahkan kaisar dan bajak laut. Konon, seorang bajak laut tertangkap oleh Alexander Agung.

> "Mengapa kamu berani mengacau lautan?"
>
> Si pembajak melontarkan pertanyaan balik, "Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia? Karena aku melakukannya hanya dengan sebuah perahu kecil, aku disebut maling; kalian, karena melakukannya dengan kapal besar, disebut kaisar!"
>
> Jawaban pembajak itu menegaskan bahwa *kaisar* adalah seorang *maling*

21 Sanborn (2007).

22 Brayniquotes.com

23 Jamaluddin (1998:35).

besar, lebih besar dari dirinya sebagai seorang perompak.[24]

Soal kepemimpinan di dunia hitam, novel Mario Puzo *The Godfather*, tampaknya relevan ...

The Godfather itu novel karya Mario Gianluigi Puzo (1920-1999). Puzo penulis AS keturunan Italia. Novel yang terbit pertama kali pada 1969 ini,[25] layak dibaca para politisi sebagai penambah wawasan. Dunia hitam mafioso memang berbalik dengan dunia terang. Apa saja dapat dihalalkan di dunia gelap itu. Tetapi, yang menarik, pada praktiknya seringkali terdapat prinsip-prinsip yang sama antara kepemimpinan dunia gelap dan terang: ada kesetiaan, pengkhianatan, kemunafikan, keserakahan, penghargaan, hukuman. Ada pengorbanan, cinta, ketulusan, kepalsuan dan sebagainya. Ada pula hal-hal yang ditabukan, dipendam-rahasiakan, ada pula yang layak diangkat ke permukaan. Ada yang *gentle*, ksatria, ada pula yang pengecut dan suka *nabok nyilih tangan* (memukul dengan tangan orang lain) pun lempar batu sembunyi tangan. Ada solidaritas dan kesetiakawanan, ada pula yang pembuat onar dan kegaduhan. Lengkap pokoknya. Dan soal ini bisa didiskusikan panjang lebar. Yang jelas kisah *The Godfather* lazim diangkat ke diskusi-diskusi kepemimpinan politik dunia terang.

Bisa tidak diuraikan analisis kepemimpinannya?

Beberapa pelajarannya: (1) bangunlah sebuah komunitas [jaringan] yang kuat, rekrutlah mereka dengan memenuhi keinginannya; (2) tanggung jawab semuanya [pemimpin dan anak buah] bisa dipegang, pastikan tim bekerja sempurna; (3) jangan cepat emosional, bekerjalah rasional; (4) jadilah penentu (*be decisive*), pastikan tim bekerja berdasarkan pilihan yang tepat; bikinlah tawaran yang tidak mungkin ditolak pesaing; (5) sisihkanlah waktu untuk keluarga, karena keluarga bisa memberi kekuatan.[26]

Ada kata-kata menarik dari Mario Puzo: *Even the strongest man needs friends*.[27] Sekuat apapun seseorang, tetap perlu teman. Tentu kita segera paham bukan? Seringkali kawan, lebih dekat dengan istri atau suami kita.

---

24 Chomsky (2001).

25 Wikipedia.org.

26 Lydia Dishman, "*An Offer You Can't Refuse: Leadership Lessons from "The Godfather"*", Fastcompany.com, 2 April 2012.

27 Brainyquotes.com

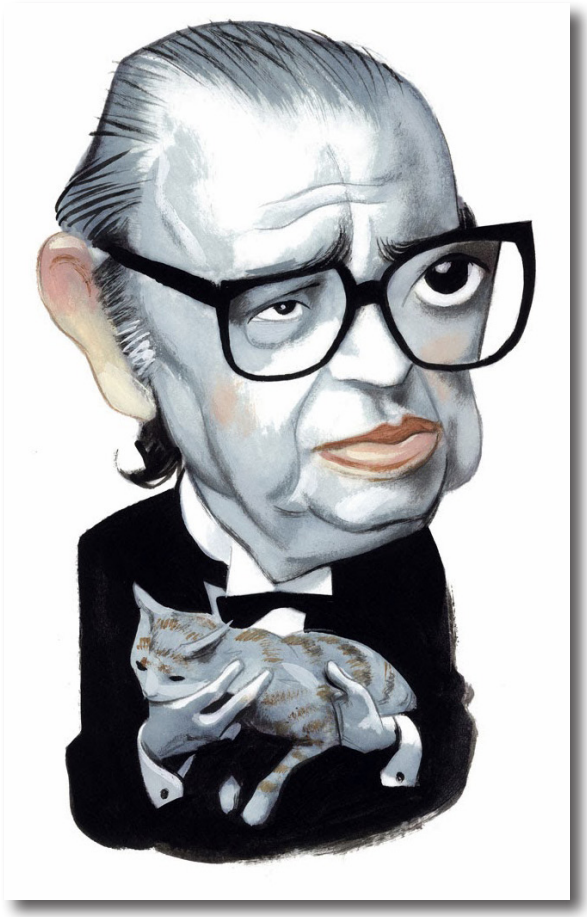

ALADAR.ES

Persahabatan dan uang: minyak dan air

- Mario Puzo

Friendship and money: oil and water.

Jadi, apakah pemimpin yang baik atau jahat, tergantung sudut pandang?

Jelas. Dalam politik ada *kawan* dan *lawan*, yang masing-masing punya subyektifitas-kepentingan dalam kondisi tertentu, satu sama lain saling menegasikan. Pemimpin dari pihak lawan, pastilah diklaim penjahat yang harus diperangi. Itulah mengapa tokoh legendaris Front Pembebasan Palestina (PLO) Yaser Arafat adalah *dewa penyelamat* bagi pengikutnya, tetapi di sisi lain dicap teroris. Demikian pula Ariel Sharon. Bagi pihak Zionis Israel ia pahlawan, tapi bagi pihak pro-Palestina, ia tak lebih dari pembantai kejam. Dan masih banyak lagi contoh sedemikian itu. Tak jarang pula, kendatipun

dalam situasi perang, pemimpin satu sama lain saling disegani. Namun, itu terkait konteksnya.

Misalnya?

Saladin atau Salahuddin Ayyubi (1138-1193). Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan Muslim dalam Perang Salib III. Saladin berasal dari suku Kurdi di Tikrit (Irak Utara) yang berhasil mendirikan Dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekkah Hejaz dan Diyarbakir [Turki]. Tokoh ini terkenal di dunia Muslim dan dunia Kristen karena sifatnya yang ksatria dan pengampun pada saat ia berperang melawan Tentara Salib.[28] Citra positif Saladin itu, dalam batas tertentu, mengemuka dalam film Holywood, *Kingdom of Heaven* (2005), yang disutradarai oleh Ridley Scott.[29] Ketika Saladin berhasil merebut Jerusalem, ia justru melindungi musuh-musuhnya. Tentang kepemimpinan Saladin, Man berpendapat bahwa ia memiliki kecermatan yang tinggi, juga dalam integritasnya. Di atas semua itu, kalau dikombinasikan ialah moral yang kuat. Man mengutip catatan Baha al-Din, Saladin meninggal tanpa punya apa-apa, apakah benda-benda berharga, rumah, atau kebun.[30] Ya, ia pergi dengan kebesaran namanya.

Yang paling menonjol, catat Man, bagaimana Saladin mengedepankan aspek *soft leadership*. Ia menyelidiki, mundur, berkonsultasi, bernegosiasi, menyetujui, tukar-menukar tawanan, bertukar pikiran, dan menghargai martabat perempuan Kristen. Itu semua terkait karakter, bukan semata-mata kerja. Lebih lanjut,

> Saladin tidak selalu besar dan baik; ia tidak selalu sukses; banyak keberhasilannya terbalik; tetapi luar biasa bahwa dalam dirinya melekat kepemimpinan yang baik, menolak kejahatan kepemimpinan yang buruk, dan mencapai sebanyak yang ia lakukan. Itulah mengapa ia adalah obyek kekaguman hingga saat ini.[31]

Mungkin kita telah mengenal tujuh kata bijak Salahuddin Al Ayyubi, dan tampaknya ujaran-ujaran inilah yang membuatnya kuat sebagai pemimpin sejati: (1) Aku meminta kekuatan, Allah memberiku kesulitan untuk membuatku kuat; (2) Aku bertanya tentang kebijaksanaan, Allah memberiku masalah untuk diselesaikan; (3) Aku meminta kemakmuran, Allah memberiku tenaga untuk bekerja; (4) Aku meminta keberanian, Allah memberiku bahaya untuk diatasi; (5) Aku meminta cinta, Allah memberiku

28 Reston (2007).

29 Wikipedia.org

30 Man (2015:224).

31 Man (2015:248).

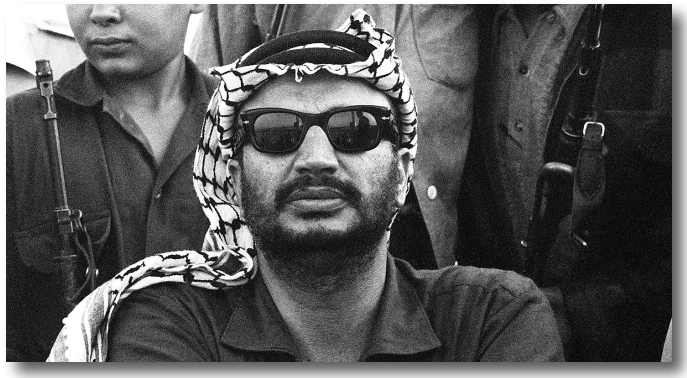

AMERICA.ALJAZEERA.COM

Aku datang membawa cabang zaitun di satu tanganku, dan pistol pejuang kemerdekaan tangan lainnya. Jangan biarkan cabang zaitun jatuh dari tanganku

- Yasser Arafat

I come bearing an olive branch in one hand, and the freedom fighter's gun in the other. Do not let the olive branch fall from my hand

orang-orang yang bermasalah untuk dibantu; (6) Aku meminta nikmat, Dia memberiku peluang; (7) Aku tidak meminta apa-apa untuk diriku, tetapi aku menerima semua apa yang kubutuhkan.[32]

Tema ksatria kan suka muncul dalam banyak cerita kepahlawanan?

Para kstaria itu unik, punya kenekatan yang khas dalam menjalankan apa yang diyakininya sebagai prinsip. Mereka biasanya *romantis*, bahwa keyakinan atau prinsip akan diperjuangkannya sampai *titik darah penghabisan*, walaupun belum tentu cita-citanya terkabul. Orhan Pamuk melukiskannya dalam sebuah novelnya, berikut ini:

> Pada zaman dahulu, tersebutlah seorang pahlawan gagah berani tiada tara yang tinggal di Iran. Semua orang yang mengenalnya akan menyukainya. Orang-orang memanggilnya Rustem, dan kita pun begitu. Suatu hari, ketika sedang berburu, dia tersesat. Lalu, ketika dia di tendanya malam itu, kudanya yang bernama Raksh menghilang. Rustem mencari Raksh hingga tiba di Turan, Negara yang sedang berseteru dengan Iran. Tetapi karena reputasinya yang baik telah tersiar ke mana-mana, penduduk Turan memperlakukannya dengan baik. Syah Turan menyambutnya layaknya tamu dan menyelenggarakan penghormatan untuknya. Seusai pesta, putri Syah mendatangi Rustem di kamarnya

32 http://www.kaskus.co.id/thread/50ac7e166312431d129000035/7-kata-bijak-salahuddin-al-ayubi (diakses, 15 Desember 2015).

Aku meminta kekuatan, Allah memberiku kesulitan untuk membuatku kuat; Aku bertanya tentang kebijaksanaan, Allah memberiku masalah untuk diselesaikan

- Salahuddin Al Ayyubi

untuk menyatakan cinta. Gadis itu mengatakan bahwa dia berharap memiliki anak, lalu menggoda Rustem dengan kecantikan dan katakata manisnya, dan tak lama kemudian mereka pun bercinta. Keesokan paginya, Rustem kembali ke negerinya sendiri, namun dia meninggalkan sebuah perhiasan — sebuah gelang — untuk calon anaknya.

Anak itu lahir dan dinamai Suhrab ... Bertahun-tahun kemudian, sang ibu mengatakan bahwa ayah Suhrab tak lain dan tak bukan adalah Rustem yang legendaris. Anak itu mengatakan, 'Aku aka pergi ke Iran untuk menggulingkan Syah Keykavus yang jahat dan mengangkat ayahku sebagai penggantinya. Setelah itu aku akan kembali ke Turan dan melakukan hal yang sama kepada Syah Efrasiyah yang jahat, dan mengangkat diriku sendiri sebagai penggantinya. Kemudian, aku dan ayahku akan memerintah Iran dan Turan, dan dengan kata lain, seluruh dunia!"

Begitulah impian Suhrab yang polos dan berhati mulia, tidak menyadari bahwa musuh-musuhnya jauh lebih licik dan lihai dariada dirinya. Meskipun setuju untuk meminjamkan pasukannya dalam perang melawan Iran, Efrasiyah, juga menempatkan mata-mata di dalam pasukan itu untuk memastikan supaya Suhrab tidak mengenali ayahnya. Setelah berulangkali berselisih jalan ditambah berbagai kelokan nasib dan kebetulan (yang diatur, setahu Suhrab, oleh Yang Mahakuasa), tibalah hari saat Rustem dan putranya Suhrab saling bertatap muka di medan peran, memimpin pasukan mereka masing-masing. Mereka tidak saling mengenal wajah, lagi pula baju besi membalut tubuh mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rustem memang memanfaatkan baju besinya untuk membuatnya tidak dikenali karena siapa pun lawan yang akan dihadapinya tentu akan menyerang dengan penuh keganasan jika mengetahui siapa dirinya. Sedangkan Suhrab, hatinya yang kekanak-kanakan hanya memungkinkannya membayangkan satu hal — dirinya dan ayahnya bersama-sama menduduki tahta Iran — sehingga dia tak pernah sejenak pun memikirkan lawan yang mungkin dihadapinya. Maka, dua orang pahlawan hebat dan berhati mulia itu, akhirnya berhadapan, memimpin pasukan mereka yang termasyhur, saling mendekat dan menghunus pedang ...

Kisah yang menarik dan mendebarkan, membuat jantung berdegub-degub ...

Mendebarkan. Menarik. Provokatif. Berdegub-degub, berdebar-debar hati ini, seperti nonton adegan film yang menegangkan. Pembaca dihadapkan pada satu klimaks yang menegangkan. Bagaimana jadinya apabila

GRUBSTREET.CA

Aku membaca sebuah buku suatu hari dan seluruh hidupku berubah

- Orhan Pamuk

I read a book one day and my whole life was changed.

bapak dan anak saling bertarung di medan laga, tapi satu sama lain saling tidak mengetahui? Dan jelas inilah yang disebut rahasia perjalanan nasib manusia, tanpa mereka tahu sebelum dan setelahnya, maka,

> ... kedua pejuang kita mulai bertempur. Dalam pertempuran yang berlangsung selama berjam-jam itu, tidak seorangpun meraih kemenangan. Basah kuyup dan didera oleh keletihan, mereka berdua menyarungkan pedang ...
>
> Pada hari kedua masing-masing pasukan kembali berhadapan, dan sekali lagi ayah dan anak itu saling bertatapan dari balik baju besi mereka dan terlibat dalam pertempuran dahsyat. Setelah pertempuran yang berlangsung sangat lama, keberuntungan menghinggapi Suhrab — tapi, apakah kita bisa menyebutnya keberuntungan? — sehingga dia mampu menjatuhkan Rustem dari punggung kudanya dan menguncinya di tanah. Suhrab mencabut belatinya. Tetapi, saat dia bersiap-siap menurunkan senjata itu ke leher ayahnya, ajudannya berkata: 'Di Iran, tidak ada tradisi bagi seorang pahlawan untuk memenggal kepala lawannya pada kesempatan pertama. Jangan bunuh dia — ini terlalu kejam.' Maka, Suhrab pun tidak membunuh ayahnya.

Aneh. Hampir saja sang anak membunuh ayahnya. Tapi, rupanya takdir berkehendak lain. Kalau saja nasihat ajudan itu tak dituruti, maka tentu Suhrab akan kecolongan sesuatu yang paling berharga, yang dia perjuangkan. Tapi, memang demikianlah ksatria. Ia pantang membunuh musuh yang sudah dalam posisi tertekuk. Bagaimana dengan hari ketiga? Ternyata pertempuran terjadi dengan begitu cepat, di mana,

> Rustem menjatuhkan Suhrab dari kudanya, dan melompat maju, menusukkan pedang dan langsung membunuh putranya. Sungguh mengerikan, mengagetkan, mengikuti betapa cepatnya peristiwa ini berlangsung. Lalu Rustem melihat gelang yang dikenakan Suhrab dan menyadari bahwa dia telah membunuh

putranya sendiri. Rustem berlutut, mengangkat mayat putranya yang bersimbah darah ke pangkuannya dan meratap.

Dari kisah tragis itu simpati orang bisa bergeser, yang sebelumnya tercurah pada Suhrab, "si pemberontak individualis", ke Rustem seorang ayah yang teguh dan bertanggungjawab, "yang selalu menjadi dirinya sendiri." Demikian kesimpulan Ka, tokoh dalam novel Sastrawan Nobel 2006 Orhan Pamuk, *Snow*, itu.[33]

Hasrat, Ambisi Menjadi Pemimpin

SEKARANG PERTANYAANNYA kita balik: mengapa orang berhasrat bahkan berebut untuk menjadi pemimpin?

D'Souza merangkum jawabannya ke tiga kategori: (1) untuk mendapatkan kekuasaan; (2) untuk mendapatkan kendali (menjadi yang berwenang); dan (3) untuk menjadi yang dilayani (mendapatkan pengakuan, rasa hormat, gengsi, kekayaan, dan sebagainya).[34]

O, kalau diringkas lagi: satu kata, *previlege*..

Bisa demikian, meskipun tak sepenuhnya. Pemimpin itu elite yang punya *power* dan pengaruh dalam komunitasnya. Para pemimpin akan memperoleh *previlage* baik materi maupun non-materi. Tidak semua pemimpin kaya dan punya dukungan materi yang berlimpah. Banyak pemimpin yang sangat miskin secara materi, tetapi punya pengaruh yang luas. Contoh yang paling nyata misalnya Nabi Muhammad SAW: seberapa banyak materi yang dipunyai? Rumahnya? Pakaiannya? Harta bendanya? Sangat tidak sepadan dengan pengaruh kepemimpiannya yang sangat luas. Demikian pula dengan Yesus, Budha, dan banyak tokoh besar lain dalam sejarah.

Tapi, bagaimana dengan para pemimpin masa kini?

Tergantung siapa pemimpin yang hendak kita sorot. Ada yang bercita-cita menjadi pemimpin atau pejabat politik, karena *previlege*-nya luar biasa. *Previlege* memang kerap otomatis didapatkan tanpa diminta, tetapi tanggung jawab seorang pemimpin mestinya jauh melebihi semua *previlege* itu, bukan? Kalau pemimpin *kok* tenggelam dalam lautan *previlege*, lantas lupa

33 Pamuk (2008). Menurut novel ini, kisah tersebut tercantum dalam kitab *Shahnamah* karya Firdevsi. Kisah semacam ini juga dijumpai ditempai lain, misalnya Oedipus yang membunuh ayahnya.

34 D'Souza (2007:20).

kesejatian seorang pemimpin, lupa tugas dan tanggung jawabnya, maka pemimpin macam apa ia? Bukankah ia hanya sekedar manusia *pemburu rente* (*rent seeking*) kekuasaan saja?

Tapi hasrat menjadi pemimpin itu tak salah kan?

Persoalannya bukan salah atau tidak salah. Orang punya hasrat itu wajar saja. Orang ingin jadi pemimpin, wajar. Tapi, ada baiknya kita dengarkan nasihat Ki Ageng Suryomentaram berikut:

> Yang menangis adalah yang berpunya
>
> Yang berpunya adalah yang kehilangan
>
> Yang kehilangan adalah mereka yang ingin[35]

Nasihat tersebut semacam silogisme yang masuk akal. "Yang menangis adalah yang berpunya". Maknanya, ia menangisi yang dipunyainya (dengan "p" kecil) atau yang merasa dimilikinya (dengan "m" kecil), justru ketika semua itu hilang. Persis petuah Al Ghazali: orang yang mabuk kekuasaan akan sangat menyesal, sangat kehilangan, ketika sadar dari mabuknya: ternyata kekuasaannya sudah hilang.[36]

Kalau ia tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak punya alasan untuk menangis, karena sampai kapan pun ia tidak pernah merasa kehilangan. Maka cocoklah dengan kalimat berikutnya: "Yang berpunya adalah yang kehilangan". Kalau Anda punya uang sekoper dan suatu saat koper Anda dicuri maling, maka yang merasa kehilangan bukan tetangga Anda bukan? Mungkin, Anda akan segera melaporkan kasus kehilangan itu ke kantor polisi.

Kemudian frasa "yang kehilangan adalah mereka yang ingin", terasa menonjok para politisi-ambisius yang punya hasrat terus-menerus mengejar dan berupaya menggengam erat kekuasaan dengan segala daya upaya. Hasrat berkuasa memang tak dilarang. Frasa itu bukan larangan, melainkan peringatan: karena Anda punya hasrat menjadi politisi, maka Anda punya peluang untuk kehilangan. Kalau Anda ingin "apa-apa", maka bersiap-siaplah untuk tidak mendapatkan "apa-apa".[37]

Kalau hasrat itu identik dengan ambisi, maka kan banyak kisah dalam sejarah yang bisa menjadi pelajaran: yang terlalu ambisius, rontoklah ia ....

Ya. Ketika menyetel televisi, tepatlah saya pada percakapan kaisar dan

35 Goenawan Mohamad, "Pleonoxia", Majalah *Tempo*, 19 Oktober 2008.

36 Ghazali (2001).

37 Hal ini saya ulas juga dalam, "Yang Berpunya, Yang Kehilangan", *Pelita*, 17 Oktober 2008.

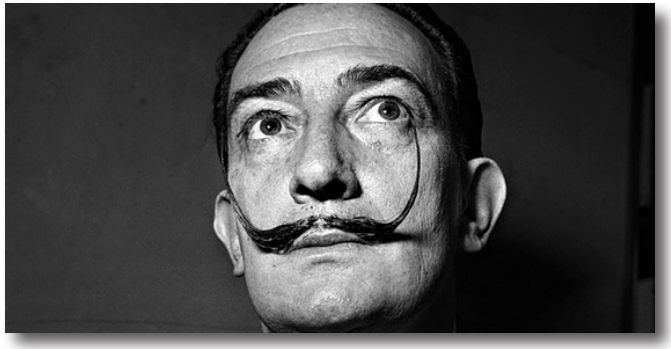

THEGUARDIAN.COM

Kecerdasan tanpa ambisi adalah burung tanpa sayap

- Salvador Dali

Intelligence without ambition is a bird without wings.

anaknya dalam film *Gladiator* (dirilis pada 2000) yang berlatar 180 M.[38] Kaisar Roma yang sudah uzur Marcus Aurelius, sedang bercakap-cakap dengan Commodus, sang anak kesayangan.[39] Marcus Aurelius mengatakan tahta kerajaan akan dianugerahkan kepada Maximus, jenderal gagah berani yang telah banyak berjasa memenangkan pasukan Roma dari musuh-musuhnya.

"Anakku, adapun kamu aku panggil, karena aku telah memutuskan sesuatu bahwa, aku akan mengangkat Maximus sebagai penggantiku, Kaisar Roma. Bagaimana pendapatmu?"

Mata Commodus berkaca-kaca, tersentak, kaget, tak dapat menyembunyikan kekecewaan yang luar biasa atas keputusan sang ayah.

"Ayah," katanya, "Selama ini, aku selalu menurut apa yang ayah ajarkan. Aku sudah berbuat terbaik sebagaimana ayah harapkan. Ayah mengajarkan empat hal: pengabdian, kearifan, keadilan, dan ketulusan. Aku merasa itu semua sudah aku lakukan. Aku tidak pernah menentang kehendak ayah. Ajaran-ajaran ayah penting bagiku, tetapi menurutku di atas semua itu, yang lebih penting bagiku adalah ambisi. Apa yang ayah ajarkan ternyata tidak membuat hidup menjadi dinamis, sedangkan ambisi telah membukakan diriku pada sesuatu yang dinamis. Dengan ambisi, aku bisa menggenggam kekuasaan dan mengubah dunia. Jangan pandang aku tidak punya ambisi!"

Tercenganglah kaisar. Singkat cerita: Commodus membunuh ayahnya. Ia memerintahkan pengawal mengeksekusi Maximus. Maximus lolos, tepi ia ditangkap penjual budak dan dibeli oleh pemilik dan pelatih *gladiator* bernama Proximo dan mempersiapkannya bertanding di Koloseum Roma.

38 Wikipedia.org.

39 Tentang rekonstruksi adegan ini, lihat M Alfan Alfian, "Ambisi", *Pelita*, 23 Oktober 2009.

RUSSELLCROWE.CLUB

Nilai seseorang tidak lebih dari ambisinya

- Marcus Aurelius

A man's worth is no greater than his ambitions.

Kemudian, Maximus kembali berhadapan dengan Commodus dan melawannya. Maximus pun menang.

Meskipun tragis, tapi kan ambisi tetap penting ...

Ya, kalau pemimpin tak punya ambisi dan gairah berkuasa, malah aneh. Ambisi perlu, tetapi sekadar ambisi saja tak cukup. Bayangkan, ada seseorang yang punya ambisi berlebih untuk berkuasa. Ia berikhtiar menggapai kekuasaan sedemikian rupa, bahkan tak sadar dengan *menghalalkan segala cara*. Asal bisa berkuasa, uang bertebaran mencari dukungan dan tidak cukup dengan itu. Walhasil kekuasaan pun diraihnya. Kini, kekuasaan telah ada dalam genggaman. Tapi, sayang setelah berkuasa, ia tak tahu harus berbuat apa. Bahasa Jawanya: *sakwise kowe uwis kelakon kuwoso, kok malah ora ngerti banjur arep ngopo?*

Pesan yang terakhir itu penting, kesiapan berkuasa ...

Secara sederhana urusan kekuasaan itu ada dua: sebelum dan setelah berkuasa. Soal setelah berkuasa inilah perlu kesiapan, perlu penyusunan agenda (*agenda setting*) politik/kebijakan yang jelas yang tak lain diturunkan dari visi sang pemimpin. Secara luas, sebagaimana dicatat Green-Pedersen dan Walgrave, penyusunan agenda yakni ketika para aktor politik melakukan kinerjanya secara distributif terhadap berbagai isu yang menjadi konsentrasi masing-masing merupakan hal yang mendasar. Tanpa penyusunan agenda, pembuatan kebijakan tak terpikirkan dan tak mungkin dilakukan.[40]●

40 Green-Pedersen dan Walgrave (2014:220).

Bab 9

Kepemimpinan dalam Aneka Pandangan

APAKAH KEPEMIMPINAN itu?

Banyak ahli yang mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Bahkan, secara ekstrim definisinya hampir sebanyak orang yang mencoba mendefinisikannya. Northouse mencatat 65 klasifikasi pengertian, yang ia ringkas berikut ini:

Tabel 9.1
Ringkasan atas Berbagai Pengertian tentang Kepemimpinan[1]

PERSPEKTIF	PENGERTIAN PEMIMPIN
Fokus proses kelompok	Pemimpin itu pusat segala aktivitas dan perubahan kelompok. Kepemimpinan ialah pusat kehendak yang menggerakkan aneka aktivitas, perubahan, dan perkembangan kelompok (organisasi).
Kepribadian	Pemimpin merupakan perpaduan antara bakat-bakat khusus (*special traits*), dan karakteristik-karakteristik individu, yang memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas pada orang lain secara sempurna.
Tindakan atau perilaku	Kepemimpinan merupakan seperangkat

1 Northouse (2005:2-3).

	tindakan dan perilaku tertentu yang mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi.
Hubungan kekuasaan	Kepemimpinan adalah relasi antara pemimpin (*leader*) dan yang dipimpin (*follower*).
Instrumen pencapai tujuan	Kepemimpinan adalah upaya membimbing anggota mencapai tujuan bersama.
Ketrampilan	Kepemimpinan adalah kapabilitas yang membuatnya bekerja secara efektif.

Northouse mencatat kepemimpinan itu: (1) proses (*leadership is a process*); (2) melibatkan pengaruh (*leadership involves influences*); (3) terjadi di dalam kelompok (*leadership occurs within a group context*); (4) melibatkan pencapaian tujuan yang sama (*leadership involves goal attainment*). Definisi kepemimpinan pun menjadi sederhana: kepemimpinan itu suatu proses di mana seseorang punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu-individu lain meraih tujuan bersama.

Apakah kepemimpinan itu sesuatu yang melekat sejak lahir, atau karena pengaruh lingkungan?

Tergantung cara pandangnya. Dalam teori pembawaan (*trait theory*), *leaders are born*, ia dilahirkan. Dalam perspektif proses, teori peristiwa besar, dan teori perubahan kepemimpinan, *leaders are made,* ia diciptakan.[2] Dari Northouse, kita rangkum dua tema besar yang bertentangan ini: *trait* versus *process leadhersip*; dan *assigned* versus *emergent leadership*.

Apa argumentasi teori pembawaan alias *trait theory*?

Simpel. Kehadiran pemimpin lebih dipengaruhi oleh faktor pembawaan alias *parennial*. Jika anda dilahirkan jadi pemimpin, maka dalam diri Anda sudah ada gen kepemimpinan. Melekat erat dalam diri seseorang, bahkan sejak lahirnya, bakat-bakat nyata kelak ia akan menjadi pemimpin besar. Pendukung pendapat ini percaya ciri-ciri pemimpin yang dilahirkan itu, dapat dicermati melalui tanda-tanda fisik seseorang, misalnya berperawakan tinggi, cerdas, ekstrover atau memiliki jiwa terbuka, punya pengaruh, dan bakat-bakat utama lainnya. Semua itu diyakini melekat sejak dari *sononya*. Karenanya, tak semua orang bisa jadi pemimpin.

Teori pembawaan dapat juga disebut teori darah biru?

Teori pembawaan tak lepas dari klaim darah biru, yang relevan dalam model kepemimpinan dinasti: bahwa pemimpin adalah urusan keturunan,

2 Soal ini, lihat antara lain Patric (2007); Siagian (2003).

TELEGRAPH.CO.UK

Selama empat puluh tahun terakhir aku tidak pernah melipat selimutku sendiri, merapikan tempat tidurku sendiri, atau menyediakan air mandi sendiri. Aku belum pernah membasuh kakiku sendiri atau mengikat tali sepatuku sendiri

-Pu-Yi

For the past forty years I had never folded my own quilt, made my own bed, or poured out my washing water. I had never even washed my own feet or tied my shoes

bukan hak sembarang orang. Darah biru artinya keturunan bangsawan-pemimpin. Dalam tradisi kepemimpinan tradisional, tradisi pemimpin diturunkan melekat erat. Suksesi raja-raja selalu dikaitkan dengan legitimasi keturunan.

Tapi, kepemimpinan dinasti, kan amat berisiko?

Iya. Yang kerap dijadikan contoh itu Pu-Yi (1906-1967), kaisar terakhir di antara deretan kaisar yang bertakhta di Tiongkok sejak 4.000 tahun silam. Pu-Yi kaisar kedua belas Dinasti Qing yang memerintah 1908-1924. Kakeknya Yihuan, anak ketujuh dari Kaisar Dao Guang, dan ayahnya Zaifeng adik dari Kaisar Guang Xu. Setelah Kaisar Guang Xu mangkat, saat Pu-Yi berumur 2 tahun, ia diangkat menjadi kaisar dengan nama kekaisaran Xuan Tong. Dapat dibayangkan, bagaimana kepemimpinan politik dinasti telah memaksa anak dua tahun menjadi kaisar. Kekaisaran langsung melemah. Tetapi, Pu-Yi yang meninggal pada 18 Oktober 1967 ini tercatat tiga kali menjadi Kaisar Tiongkok. Ia bertakhta pertama kali pada 1908. Pada 1912, ia disingkirkan Pemerintah Republik Tiongkok yang dipimpin Sun Yat-Sen. Pada 1917, ia diminta kembali bertakhta selama tujuh hari, lalu disingkirkan selama 15 tahun. Pu-Yi menduduki takhta kekaisaran untuk ketiga kali mulai tahun 1934 hingga 1945.[3]

3 Tentang dinasti terakhir China ini lihat Rowe (2009). Lihat juga, *Kompas*, 20 Oktober 2015.

Orang bijak tidak pernah kehilangan apa-apa, jika dia memiliki dirinya

- Michel de Montaigne

A wise man never loses anything, if he has himself.

Contoh yang menarik. Tapi, mengapa hingga saat ini pola "kepemimpinan politik dinasti" masih terjadi?

Wartawan-Kolomnis Budiarto Shambazy menjawab: suka atau tidak fenomena dinasti politik tak kenal batas kultur, sistem, maupun wilayah politik. Kepemimpinan kerap lebih merupakan hal yang bersifat emosional ketimbang intelektual dan teknikal. Fenomena politik dinasti terjadi tak hanya di India, Pakistan atau negara-negara kawasan Asia lainnya, tetapi juga bahkan di AS. Di AS dikenal adanya dinasti Bush, bahwa Presiden George W Bush Jr (2001-2008) merupakan putra George Herbert Walker Bush (Presiden AS 1989-1993).[4]

Di India Jawaharlal Nehru telah mengalirkan darah politik dinasti pada Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Baik Indira maupun Rajiv meninggal dalam prosesi pembunuhan politik. Dinasti ini pun masih menyimpan putra Rajiv hasil perkawinannya dengan Sonia Gandhi, Rahul Gandhi. Di Myanmar tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi adalah putri pejuang nasional Jenderal Aung San yang sampai kini berjuang melawan militerisme. Di Filipina Cory Aquino adalah istri Benigno Aquino. Gloria Macapagal Arroyo adalah putri Presiden Diosdago Macapagal. Di Singapura Lee Kuan Yew kokoh menancapkan Dinasti Lee, dimana kini ada Lee Hsien Loong. Di Korea Utara kepemimpinan Kim Jong Il diteruskan putra Kim Il Sung. Di Suriah Presiden Bashar al-Assad adalah putra Presiden Hafez al-Assad. Di Argentina ada Cristina Kirchner, istri mantan Presiden Nestor Kirchner. Di Indonesia? Anda bisa mencari sendiri contoh-contohnya.

Apakah itu salah?

Tentu tidak. Tidak semua pemimpin politik dinasti gagal karena tak punya kualitas. Yang banyak dikritik dari fenomena ini apabila nepotisme politik berdampak pada tidak melembaganya partai sebagai organisasi modern dan demokratis. Nepotisme bisa menutup peluang kader partai yang meniti karir politiknya dari bawah. Personalisasi kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai-partai memang sangat berpeluang menguat dalam ranah politik dinasti.

Menurut Syamsuddin Haris yang berlangsung di Indonesia acapkali

4 Budiarto Shambazy, "Dinasti Politik Clinton", *Kompas*, 3 Januari 2008

YOUTUBE.COM

Ayahku seorang negarawan, aku politisi perempuan. Ayahku orang suci. Aku tidak

- Indira Gandhi

My father was a statesman, I am a political woman. My father was a saint. I am not

kecenderungan *aji mumpung* para elitenya. Artinya, *mumpung* sang bapak berkuasa, diwariskanlah kekuasaan serupa untuk anak, istri, atau anggota keluarga yang lain. Akhirnya yang berkembang ialah format patrimonial dengan kutub ekstremnya: negara patrimonial. Sebagaimana berlaku pada monarki tradisional, di negara patrimonial kekuasaan baik politik maupun ekonomi, diwariskan secara turun-temurun di antara para keluarga ataupun kerabat.[5] Tentu fenomena ini ironis adanya. Maka, kalau kita kembalikan ke teori pembawaan, pendapat di atas menggambarkan kelemahannya.

Tetapi, betapapaun demikian, dalam demokrasi, siapapun berhak maju mencalonkan diri dalam kompetisi politik. Maka, dapat segera dipahami manakala pada 8 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) melegalkan pencalonan keluarga petahana (*incumbent*) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Majelis konstitusi membatalkan pasal dalam Undang-Undang tetang Pemilihan Kepala Daerah yang melarang pencalonan keluarga petahana. Alasannya, hal tersebut bertentangan dengan konstitusi, tepatnya melanggar hak konstitusi warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan.[6] Yang menjadi soal agar demokrasi tetap berkualitas, kalau demikian lebih terletak pada pengawasannya: bagaimana semua kontestan, terlepas dari mana asal-usul kepolitikan dan genealogis mereka, dapat diawasi secara ketat supaya tidak berlaku curang.

Di Indonesia, politik dinasti lazim merebak di ranah politik lokal, "dinasti Ratu Atut" misalnya?

5 Syamsuddin Haris, "Nepotisme Ancam Demokratisasi", *Kompas*, 20 Oktober 2008.

6 http://www.tempo.co/read/fokus/2015/07/09/3212/mahkamah-konstitusi-legalkan-dinasti-politik (diakses, 28 November 2015).

Ya, ia telah menjadi salah satu ilustrasi menarik. Kita simak ulasan *Kompas*, "*Dinasti Politik Ratu Atut Setelah Delapan Tahun Berkuasa*", *Kompas*, 18 Desember 2013, berikut:

- Gubernur Banten Djoko Munandar dinonaktifkan dengan keluarnya Keppres No 169/M/2005 tertanggal 10 Oktober 2005.[7] Pemberhentian sementara Djoko jadi titik awal kekuasaan Wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Banten. Atut langsung dilantik jadi Pelaksana Tugas Gubernur Banten.
- Saat Pilkada Banten 2006, Atut mencalonkan diri sebagai gubernur Banten. Atut yang berpasangan dengan M Masduki memenangi Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2007-2012.
- Sejak menjadi orang nomor satu di Banten, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik praktis, diawali kemunculan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Istri Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Atut) itu jadi calon wakil bupati mendam-pingi Jazuli Juwaini dari PKS. Namun, pasangan ini dikalahkan pasangan petahana, Ismet Iskandar-Rano Karno.
- Tahun yang sama, adik tiri Atut, Tubagus Haerul Jaman, maju sebagai calon wakil wali kota Serang berpasangan dengan Bunyamin (mantan Bupati Serang) dan menang. Kurang dari tiga tahun berkuasa, 1 Maret 2011, Bunyamin meninggal dunia. Jaman lalu diangkat menjadi Wali Kota Serang. Saat Pilkada Kota Serang 2013, ia kembali mencalonkan diri dan menang.
- Tahun 2010, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, mengikuti Pilkada Kabupaten Serang. Ia terpilih jadi Wakil Bupati Serang 2010-2015 mendampingi Taufik Nuriman.
- Airin yang gagal di Pilkada Kabupaten Tangerang coba peruntungan di Pilkada Kota Tangerang Selatan 2010. Airin yang berpasangan dengan Benyamin Davnie terpilih sebagai Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2015.
- Ibu tiri Atut, Heryani, juga tak ketinggalan. Ia terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang pada Pilkada 2011 mendampingi Erwan Kurtubi. Pada tahun yang sama, Atut kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Banten didampingi Rano Karno. Untuk kedua kalinya, Atut terpilih sebagai Gubernur Banten.
- Tak hanya jabatan di pemerintahan, sejumlah jabatan di lembaga legislatif juga dirambah. Pada Pemilu 2009, suami Atut, Hikmat Tomet, terpilih sebagai anggota DPR. Anak pertama mereka, Andika Hazrumy, jadi anggota DPD perwakilan Banten. Adde Rosi Khairunnisa, menantu Atut (istri Andika), jadi anggota DPRD Kota Serang.

7 Ia menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana perumahan DPRD Banten 2001-2004. Tetapi lantas upaya hukumnya hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung (MA) berhasil: Putusan MA No 2097K/PID/MA yang dikeluarkan 8 Mei 2008 MA menyatakan Djoko tak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman. Salinan putusan baru diterima PN Serang 11 Februari 2009, dua bulan setelah Djoko meninggal karena sakit pada 5 Desember 2008 (*Kompas*, 18 Desember 2013).

- Jabatan di sejumlah lembaga dan organisasi kemasyarakatan juga dikuasai. Hikmat (meninggal karena stroke pada 9 November 2013) jadi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Banten 2012-2017. Andika memimpin Karang Taruna Banten, Taruna Siaga Bencana, serta Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso Banten. Adde jadi Ketua PMI Kota Serang serta Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Banten.
- Sejak 2007, Atut jadi Ketua Umum PMI Banten. Sementara Wawan, adiknya, merupakan Ketua Kadin Provinsi Banten. Keluarga Atut juga menguasai Partai Golkar. Hampir semua kerabat dekatnya yang menjadi pimpinan daerah diusung Partai Golkar. Begitu pula kerabat yang menjadi anggota lembaga legislatif, diusung partai berlambang beringin warisan Orde Baru ini.
- Juru bicara keluarga Atut, Fitron Nur Ikhsan, menjelaskan, keluarga Atut merupakan keluarga besar. Banyak anggota keluarga yang tertarik terjun ke politik praktis sehingga sulit mengurai motivasi mereka menguasai jabatan publik. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki kemandirian sehingga punya pertimbangan sendiri ketika terjun ke politik praktis.
- Setelah delapan tahun berkuasa, keluarga Atut tersandung kasus hukum dan mulai goyah. Wawan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena disangka menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, 2 Oktober silam. Sehari kemudian, Atut dicegah ke luar negeri.
- Pada 11 Oktober 2013, tepat delapan tahun berkuasa di Banten, Atut diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Delapan tahun lalu, Atut penuh mendukung pemberantasan korupsi di Banten. KPK pun menetapkan Atut sebagai tersangka.

Bagaimanapun, "dinasti Atut" memang fenomenal. Pada Pilkada serentak 9 Desember 2015, dinasti ini tetap berjaya. Tercatat, dari empat daerah yang menggelar pilkada serentak di Provinsi Banten, keluarga mantan Gubernur Atut menang di tiga daerah, yakni di Kabupaten Serang (adik Atut, Tatu Chasanah, yang berpasangan dengan Pandji Tirtayasa), Kabupaten Pandeglang (pasangan Irna Narulita yang berpasangan dengan menantu Atut Chosiyah, Tanto Warsono Arban), dan Kota Tangerang Selatan (adik ipar Atut Chosiyah, Airin Rachmi Diany, yang berpasangan dengan Benyamin Devnie).[8]

Bagaimana dengan *process leadership*?

Pemimpin proses hadir dari proses interaksi, dan tumbuh dari proses belajar untuk menjadi pemimpin. Yukl meringkaskan konseptualisasi kepemimpinan sebagai proses intra-individual, *dyadic*, kelompok, dan or-

8 http://pilkada.tempo.co/read/news/2015/12/10/304726489/pilkada-serentak-dinasti-atut-masih-kuasai-banten (diakses, 12 Desember 2015).

ganisatoris, dalam tabel berikut.

Tabel 9.2.
Elaborasi Kepemimpinan sebagai Proses[9]

PROSES	KETERANGAN
Proses intra-individual	Menyorot proses di dalam individu. Tetapi hal ini sangat jarang, mengingat sebagian besar definisi kepemimpinan terkait proses antar-individu. Tetapi kajian intra-individu ini bukan tidak ada. Mungkin di era demokrasi langsung justru amat perlu kajian intra-individu ini, karena rekam jejak dan kondisi kejiwaan sang calon pemimpin patut dipertimbangkan publik.
Proses *dyadic*	Memfokuskan hubungan antara seorang pemimpin dengan individu lain (pengikut). Sebagian besar teori *dyadic* memandang kepemimpinan sebagai proses pengaruh timbal-balik antara pemimpin dengan orang lain. Efektivitas kepemimpinan tidak dapat dipahami tanpa menguji bagaimana pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi setiap waktu.
Proses kelompok	Pendekatan ini lebih baik ketimbang yang pertama dan kedua dari sudut efektivitas kepemimpinan. Tetapi pendakatan ini punya keterbatasan, karena unit analisisnya terbatas pada internal-kelompok.
Proses organisasi	Analisis di level organisatoris menjelaskan kepemimpinan sebagai proses yang terjadi di dalam sistem terbuka, yang lebih besar dimana kelompok merupakan subsistemnya.

Bagaimana dengan jenis kepemimpinan lainnya?

Assigned leadership alias pemimpin yang ditetapkan adalah personalia-personalia yang membawahi posisi-posisi tertentu dalam suatu organisasi. Mereka sosok-sosok yang ditempatkan dengan lingkup kerja dan tanggung-jawab tertentu dan terbatas. Sementara *emergent leadership* adalah mereka yang tidak melalui jalur penempatan, tetapi hadir dan tumbuh karena kecakapan-kecakapan yang dimilikinya, terutama kecakapan dalam berkomunikasi. Pemimpin model ini hadir *menerobos* rutinitas, melalui sejumlah kecakapan dan prestasi yang menonjol.[10]

Di atas disebut teori peristiwa besar, apa maksudnya?

Teori peristiwa besar lebih menjelaskan tentang adanya momentum

9 Diringkas dari Yukl (2001).

10 Northouse (2005).

HOLOONG.COM

Seorang pemimpin yang terbaik ialah ketika orang hampir tidak tahu dia ada, saat pekerjaannya dilakukan, tujuannya pun terpenuhi, ia akan mengatakan: kita melakukannya bersama-sama

- Lao Tzu

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves.

yang tepat bagi kehadiran seorang pemimpin. Jadi ia lebih terletak pada adanya faktor luar, walaupun tak mengabaikan faktor dalam/internal seorang pemimpin. Menurut Nixon, pemimpin besar terkait momentum besar. Adakalanya seorang pemimpin itu sempurna dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi ia tidak dikenal sebagai pemimpin besar. Ia termasuk ke kategori *great man but small events*. Singkatnya, orang besar perlu peristiwa-peristiwa besar.[11] Walaupun demikian, pemimpin yang hadir melalui momentum besar, tak berarti pemimpin instan, *tiban* alias *ujug-ujug*, tetapi tetap melalui sebuah proses.

Bisakah diberi satu contoh pemimpin yang cenderung hadir karena dibesarkan momentum?

Rudolph William Louis "Rudy" Giuliani (lahir 28 Mei 1944) misalnya

11 Nixon (1982).

besar karena ia mampu melewati fase paling krusial sepanjang riwayat kepemimpinannya sebagai seorang Walikota New York. Bukan karena ia berhasil memimpin New York, terutama karena pada 2001, tahun terakhir periode jabatannya, tercatat tingkat pembunuhan turun sebanyak 67 persen; tetapi karena adanya Peristiwa 9/11. Dalam hal ini, Giuliani dianggap sebagai pemimpin yang total dalam merespons berbagai hal pasca-Peristiwa 9/11. Giuliani ditetapkan sebagai *Person of the Year 2001* oleh majalah *Time* dan diberi gelar *Knight* oleh ratu Elizabeth II.[12] Jadi, ketenaran Giuliani tak lepas dari adanya peristiwa yang membuatnya terkenal dan dikenang, justru karena ia mampu memainkan peran kepemimpinannya secara baik.

Bagaimana dengan teori perubahan kepemimpinan?

Teori perubahan kepemimpinan memaparkan, kepemimpinan merupakan suatu hal yang dapat dipelajari. Kepemimpinan adalah pengetahuan yang dapat diterapkan pada orang-orang yang ingin jadi pemimpin. Oleh sebab itulah pada saat ini banyak ditemui pelatihan-pelatihan kepemimpinan baik formal maupun informal. Studi kepemimpinan dikembangkan di universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan lain. Pelatihan-pelatihan kepribadian yang tumbuh subur, walaupun terkesan *kenes*, pun tak lepas dari banyaknya minat publik belajar menjadi pemimpin, mengingat pemimpin harus punya kepribadian menarik. Tentu saja ini persoalan yang serius, dan bukan main-main. Soal kepribadian, diuraikan pada bagian lain buku ini.

Masih adakah teori lainnya?

Masih. Yukl meringkas tiga catatan:

(1) Teori berfokus pada pemimpin versus berfokus pada pengikut. Bahwa teori berfokus pada pengikut pun dapat dipakai untuk meneropong kepemimpinan.

(2) Teori deskriptif versus preskriptif. Teori deskriptif menjelaskan proses, aktivitas dan perilaku pemimpin. Teori preskriptif membahas apa yang harus dilakukan pemimpin agar efektif.

(3) Teori universal versus kontijensi. Teori universal menjelaskan berbagai aspek yang dapat diterapkan pada seluruh jenis situasi. Sedangkan teori kontijensi membahas berbagai aspek kepemimpinan yang diterapkan pada situasi tertentu, tetapi tidak untuk situasi yang lain. Teori kontijensi bisa bersifat deskriptif atau preskriptif. Teori kontijensi yang deskriptif membahas tentang mengapa pemimpin berperilaku berbeda antara satu situasi dengan situasi lainnya. Teori kontijensi yang preskriptif menjelaskan perilaku yang paling efektif dalam

12 Wikipedia.org

setiap jenis situasi.[13]

Wah, kaya juga ya kajian kepemimpinan itu ...

Banyak variasi, perdebatan, kata kunci dan pemaknaannya. Akhirnya, sudut pandanglah yang menentukan: dari sebelah mana kepemimpinan diperiksa dan dianalisis. Hasilnya mungkin berbeda, tetapi mungkin juga saling melengkapi. Tapi, mungkin Anda juga bisa menambahkan bahwa dari sisi mana kepemimpinan itu ditinjau, tak lepas dari kepentingan Anda.[14] Inilah yang mengemuka pada buku Ingo Winkler, *Contemporary Leadership Theories*. Saya ingin merangkumkan buku tersebut kepada Anda: apa saja teori-teori kepemimpinan kontemporer. Sebagiannya sudah terpapar di depan, tetapi, apabila ada yang kelewat, kita bisa cek lagi di buku ini:

- **Teori atribusi** (*Attribution Theory*): Teori atribusi terkait dengan pengamatan dan opini terhadap pengikut. Teori atribusi menuntut disiplin pemimpin memahami dan menganalisis perilakunya sendiri dan pengikut. Teori ini mengandalkan kualitas pribadi pemimpin, baik kualitas dalam mengelola kelompok maupun merespons situasi. Ada empat tahap kepemimpinan atribusi ini: (1) pengamatan perilaku; (2) pengambilan kesimpulan; (3) analisis alternatif perilaku; (4) perhatian diaktifkan untuk kepentingan pengikut. Secara umum teori ini mendasarkan pada ikhtiar memahami perilaku orang lain dengan menghubungkan perasaan, keyakinan, dan niat mereka.
- **Teori Kepemimpinan Psikodinamis**. Konsep dasarnya dapat ditelusuri ke ide psikoanalisis Sigmud Freud. Ia menyediakan kajian psikologi dasar (terutama aspek emosi) pemimpin. Pendekatan kepemimpinan psikodinamik menjelaskan perilaku eksklusif dengan mempertimbangkan struktur kepribadian. Maccoby mengembangkan empat jenis pemimpin: tipe otoriter; narsis (puas terhadap kebanggaan diri, agresif, selalu ingin tampil mengesankan); narsis-koersif (menggabungkan ketelitian dengan narsis-percaya diri); dan narsis-erotis (mencari cinta dan kasih sayang).
- **Teori kepemimpinan neo-kharismatik**. Ini berbeda dengan konteks pemimpin kharismatik klasik sebagaimana diperkenalkan oleh Max Weber. Neo-kharismatik terkait dengan konteks transformasional dalam mengelola pengikut.
- **Teori pertukaran pemimpin-anggota/pengikut** (*Leader-Member exchange*, LMX). Ia menjelaskan kepemimpinan sebagai proses interaksi timbal-balik (*dyadic*) pemimpin-pengikut. Oleh karena itu, pemimpin mungkin memiliki berbagai jenis transaksi dan berbagai jenis hubungan dengan pengikut yang karakternya berbeda-beda.

13 Yukl (2001).

14 Winkler (2010).

Kepemimpinan dapat dipahami sebagai sebuah perilaku atau sebuah kualitas personal

- Andrew Heywood

- **Teori model kehormatan kepemimpinan istimewa** (*the idiosyncrasy credit model of leadership*). Ia dibangun berdasarkan kesadaran bahwa kepemimpinan merupakan hasil dari persepsi interpersonal. Untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, ia terkait dengan proses interaksi dan perolehan kepercayaan/kehormatan dalam kelompok itu. Ia dituntut berinovasi dan menjaga norma kelompok, tetapi kalau gagal, kepercayaan yang diberikan bisa dicabut. Tetapi pemimpin yang dipilih (melalui pemilu) dan yang ditunjuk punya perbedaan dalam hal legitimasi.
- **Teori kepemimpinan simbolik**. Ia mengacu dan didasarkan pada, *kategori makna* sebagaimana terdapat dalam simbol-simbol. Ia berkonsentrasi pada pembelajaran nilai-nilai, makna, interpretasi, sejarah, konteks, serta unsur-unsur simbolik lainnya dalam proses kepemimpinan. Kepemimpinan simbolik berarti tidak langsung mempengaruhi pengikut. Pemimpin dan tindakan mereka sendiri itu sudah simbol dan, dengan demikian, tunduk pada interpretasi oleh pengikut. Dalam rangka menghasilkan perilaku yang tepat, tindakan pemimpin harus ditafsirkan secara benar oleh pengikut, apa yang dilakukan selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh pemimpin.
- **Pendekatan Kepemimpinan Mikro-Politik**. Diasumsikan perilaku politik menjadi pendorong utama bagi perubahan sosial dalam organisasi, dan mikro-politik organisasi penting dalam menentukan pengaruh kepemimpinan. Perilaku politik dalam organisasi dimaksudkan untuk mempromosikan atau melindungi kepentingan individu atau kelompok, dan dengan demikian bisa saja mengancam kepentingan orang lain.
- **Teori Peran Kepemimpinan** (*Role Theory of Leadership*). Dalam hal ini, pemimpin dipahami sebagai "bagian dari mesin pemecahan masalah dari kelompok". terdapat tiga pendekatan dasar dalam peran: (1) pendekatan strukturalistik; (2) pendekatan fungsionalis; (3) pendekatan interaksionalisme-simbolik.
- **Teori Kepemimpinan Pembelajaran Sosial** (*Social Learning Theory of Leadership*). Ini terkait dengan aspek pembelajaran dan motivasi. Kepemimpinan dikonseptualisasikan sebagai proses saling belajar secara timbal balik secara sosial.

Penting untuk dicatat dan didalami lagi, ya?

Ya, di atas itu kan sekadar pengetahuan ringkas. Yang ingin mendalami, silakan lacak kembali dan perkaya. Lagi-lagi, sesungguhnya ini semua mengingatkan pada apa yang sudah saya kemukakan di awal: kepemimpinan itu bahasan yang multi perspektif atau multidimensi. Yang jelas, yang

disebut pemimpin berbeda dengan yang bukan pemimpin, tentu karena terkait konteks kualifikasinya. Mungkin ini sekadar *common senses*, tetapi tak ada salahnya untuk menyegarkan kembali, melalui catatan D'Souza berikut:

Tabel 9.3.
Pemimpin dan Bukan Pemimpin versi D'Souza[15]

PEMIMPIN	BUKAN PEMIMPIN
Memimpin	Menuntut
Memimpin serangan di depan	Duduk digaris pinggir dan bertanya-tanya ke mana semua orang pergi
Mengajak orang melakukan sesuatu dengan benar	Bertanya-tanya mengapa para bawahan tidak melakukan sesuatu dengan benar
Menyadari bahwa orang perlu dilatih	Bertanya-tanya mengapa orang tidak punya keterampilan yang diperlukan
Menyukai dan menghormati orang	Menuntut dan memanfaatkan orang
Mengupayakan penghargaan bagi orang-orangnya	Menerima penghargaan untuk dirinya sendiri
Bekerja untuk apa yang tepat bagi orang-orang dan organisasinya	Bekerja untuk apa yang terbaik bagi dirinya sendiri
Menghadapi masalah dan memperbaikinya	Mengabaikan masalah yang ditemukan dan berharap masalah itu akan berlalu
Mengakui kesalahan	Menyangkal kesalahan
Membimbing/melatih dan mendukung orang lain	Memperhatikan dirinya sendiri dan tidak menginginkan kompetisi
Memberdayakan orang	Hanya percaya pada dirinya sendiri

Di atas sudah dipaparkan berbagai perspektif kepemimpinan, tapi kita kerap susah membedakan mana pandangan yang benar mana yang mitos ...

Sebagaimana halnya D'Souza, Bennis dan Nanus dalam *Leaders* (2003) menegaskan banyak mitos yang harus dirobohkan.[16]

(1) Mitos pertama: kepemimpinan merupakan ketrampilan yang langka, dan stoknya pasti sangat terbatas, karena tidak semua orang bisa terampil menjadi pemimpin. Itu salah. Yang benar peluang kepemimpinan cukup banyak dan bisa dijangkau oleh sebagian besar orang.

(2) Mitos kedua: pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Mitos ini suka menjebak.

15 D'Souza (2007:72-73).

16 Bennis dan Nanus (2006:233).

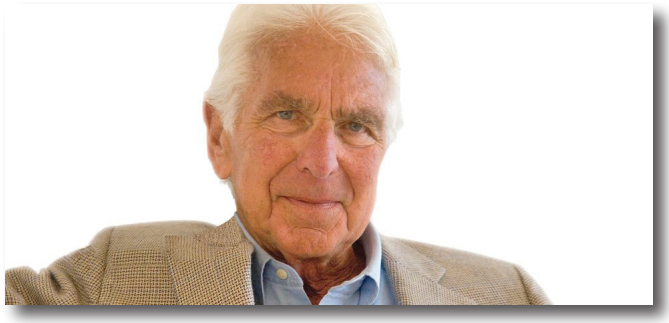

INC.COM

Mitos kepemimpinan yang paling berbahaya adalah bahwa pemimpin dilahirkan - bahwa ada faktor genetik terhadap kepemimpinan. Mitos ini menegaskan bahwa orang hanya memiliki kualitas karismatik tertentu atau tidak. Itu omong kosong; sebenarnya, sebaliknya adalah benar. Pemimpin diciptakan ketimbang lahir

- Warren Bennis

The most dangerous leadership myth is that leaders are born-that there is a genetic factor to leadership. This myth asserts that people simply either have certain charismatic qualities or not. That's nonsense; in fact, the opposite is true. Leaders are made rather than born.

Inilah yang mempersubur "politik keluarga" yang bercorak nepotis. Yang benar, kapasitas dan kompetensi utama dari kepemimpinan bisa dipelajari, dan kita semua bisa mempelajarinya, setidaknya kalau kita mau serius.

(3) Mitos ketiga: pemimpin adalah orang yang berkharisma. Ya, kharisma memang harus dimiliki pemimpin hebat, dan seolah itulah daya sihir yang menyirap pengikutnya. Tapi, dari mana datangnya kharisma? Genetika? Wahyu? Atau apa? Bennis dan Nanus berpendapat kharisma adalah hasil dari kepemimpinan efektif, bukan sebaliknya. Mereka yang bagus dalam memimpin akan diberi sejumlah penghargaan sekaligus dikagumi pengikutnya, sehingga memperbesar ikatan ketertarikan di antara mereka.

(4) Mitos keempat: kepemimpinan hanya ada di puncak organisasi. Yang benar, setiap *level* perlu kepemimpinan, perlu tanggung jawab, tak harus menunggu sampai di puncak.

(5) Mitos kelima: pemimpin mengendalikan, mengarahkan, melecut, memanipulasi. Yang benar pemimpin itu harus memimpin dengan menarik, dengan memberi inspirasi, bukan memberi perintah. Dengan menciptakan harapan, bukan memanipulasi, dengan memungkinkan orang menggunakan inisiatif dan pengalamannya sendiri, ketimbang menolak atau menghalangi pengalaman dan aksi mereka. Inilah arti penting otentisitas pemimpin.●

Bab 10

Kepemimpinan

Hal-hal yang Perlu Dibicarakan

Apa Saja?

APA SAJA yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin?

Ini pertanyaan normatif-preskriptif, karena arahnya membahas apa yang harus dilakukan pemimpin. Tatapi ia juga bisa dikaitkan dengan ranah karakter kepemimpinan. Tentu saja banyak yang dapat kita bicarakan. Misalnya ada yang memandang pentingnya sembilan unsur kepemimpinan yang *wajib diperbincangkan*: keingintahuan, kreativitas, komunikasi, karakteristik, keberanian, keyakinan, kharisma, kompetensi, dan kejernihan.[1]

Dalam khasanah Islam, misalnya ada empat unsur penting kepemimpinan: *shiddiq, amanah, tabligh*, dan *fathonah* (SATF). *Shiddiq* itu benar, berintegritas, bahwa apa yang diucapkan selaras dengan perbuatan. Sosok yang *shiddiq* ialah yang jujur. *Amanah* artinya bisa dipercaya, menjalankan urusan yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Pemimpin tidak akan khianat terhadap yang memberinya amanah. *Tabligh* artinya menyampaikan, komunikator dan sosialisator atas *risalah* (visi) penting yang diembannya sebagai pemimpin. *Fathonah* itu cerdas. Semua penting dipahami.

1 Iacocca dan Whitney (2008).

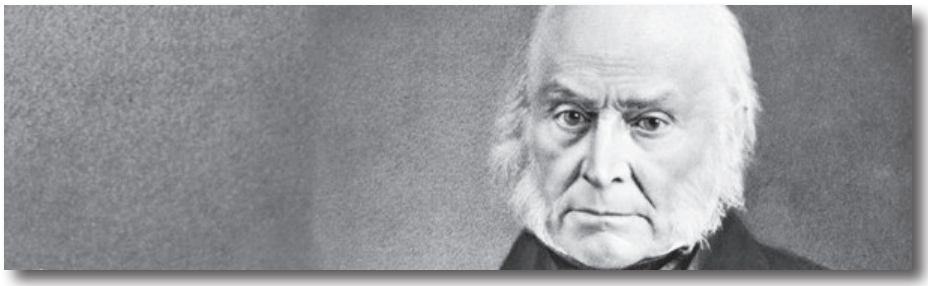

MILLERCENTER.ORG

Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, melakukan lebih dan menjadi lebih, berarti Anda pemimpin

- John Quincy Adams

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.

Dalam buku ini, apa saja yang akan diperbincangkan?

Rupa-rupa, termasuk dimensi-simensi SATF tersebut. Kita akan memperbincangkan visi, keterpanggilan, kemanusiaan, kepelayanan, ketulusan, kesantunan, perjuangan, penderitaan, pengorbanan, kepahlawanan, tanggung jawab, kepribadian, keteladanan, inisiatif, inovasi, risiko, kredibilitas, integritas, amanah, *trust*, kemampuan, kapasitas, kompetensi, pengalaman, wawasan, intelektualitas, emosionalitas, spiritualitas. Kemudian, totalitas, konflik kepentingan, kesungguh-sungguhan, efektivitas, skala prioritas, kharisma, mitos, obyektivitas, rasionalitas, popularitas, elektabilitas, pilihan, level, pengaruh, motivasi, pemberdayaan, empati, solidaritas, kebersamaan, modal sosial, *mindset*, mental, kultur, komunikasi, propaganda, lobi, negosiasi, momentum, upacara, perubahan, daya saing, dedikasi, dan loyalitas, hingga warisan kepemimpinan. Banyaknya hal yang harus diperbincangkan justru menunjukkan, kepemimpinan bukanlah persoalan sederhana. Yang akan kita bicarakan di sini prinsip-prinsip umum kepemimpinan yang berkonteks politik. Anda bisa membagi sendiri, mana-mana yang masuk ke ranah moralitas dan falsafah, mana-mana yang ketrampilan teknis.

Visi dan Proses

APA VISI itu? Apa bedanya dengan mimpi?

Visi atau *vision* kerap dimaknai sebagai suatu harapan besar atau harapan utama, ide-ide besar atau gagasan-gagasan melangit, bahkan kerap disebut mimpi. Seorang pemimpin harus punya mimpi. Tetapi, tentu tidak sekedar mimpi. Dan itulah visi. Kadang-kadang antara visi dan mimpi sama

absurd-nya. Tetapi ada perbedaan mendasar antara apa itu visi dan apa itu mimpi. Sebuah visi dapat diturunkan atau diderivasikan ke dalam misi, program, kegiatan.

Sebuah mimpi kerap sekadar imajinasi dan angan-angan yang tidak dapat diturunkan ke dalam misi, program, kegiatan. Mimpi itu kembang tidur, katanya. Kalau visi dipahami sebagai suatu ide-ide besar atau visioner, maka ia akan menjadi ilham yang produktif. Sedangkan mimpi, bisa memenjara dan kontraproduktif. Ada satu nasihat menarik dari Vaclav Havel, sastrawan yang pernah menjadi Presiden Republik Ceko itu, "Kita jangan pernah takut memimpikan yang mustahil, jika kita menginginkan yang mustahil itu jadi kenyataan".[2]

Bagaimana agar visi tidak berhenti menjadi mimpi?

Tirtamihardja mencatat ada lima hal yang menjadi pagarnya: (1) Visi harus *specific*, ada sasaran dan target yang jelas dimana visi dapat dioperasionalisasikan; (2) *Measurable* (terukur), yakni ada batas-batas yang jelas; (3) *Attainable*, bahwa visi harus disusun dengan memperhatikan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki; (4) *Realistic*, bahwa visi tidak dapat diwujudkan secara instan; dan (5) *Tangible*, bahwa visi harus nyata dan membutuhkan kesabaran mewujudkannya.[3]

Maka, seabstrak-abstraknya visi, ia harus masuk akal. Menurut Susanto visi itu mimpi seorang pemimpin berdasarkan kenyataan yang dilihatnya. Jadi, visi merupakan campuran kenyataan dan mimpi. Jika hanya kenyataan saja, itu bukan visi. Visi berisi pernyataan singkat dan jelas mengenai tujuan organisasi. Visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan atau cita-cita masa depan yang harus dimiliki organisasi, sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Dalam merumuskan visi, para pemimpin harus mempunyai cara pandang yang holistik.[4]

Mengapa para pemimpin harus memiliki visi yang jelas? Elemen apa saja yang menyusun visi?

Karena kepemimpinan itu proses, perjalanan. Jika Anda dan orang-orang Anda pimpin tidak tahu tujuan yang hendak dicapai, kepemimpinan Anda tidak mempunyai arti apapun.[5] Visi itu tujuan sekaligus kompas. Sebuah visi sama halnya dengan bintang di langit yang menuntun pelaut-pe-

2 Cooper (2007).

3 Tirtamihardja (2007).

4 Susanto (2007).

5 Stoner, Blanchard, dan Zigarmi (2007:23).

PHOTOBLOG.NBCNEWS.COM

Visi saja tidak cukup, ia harus dikombinasikan dengan usaha

- Vaclav Havel

Vision is not enough, it must be combined with venture.

laut pada zaman dahulu melayari samudera yang luas.[6]

Menurut Stoner, Blanchard, dan Zigarmi, ada tiga elemen kunci sebuah visi yang meyakinkan: (1) tujuan utama; (2) gambaran masa depan; (3) nilai-nilai yang jelas.[7] Pemimpin yang visioner paham dan mampu menjelaskan dengan mudah dan gamblang apa tujuan organisasinya. Ia juga memiliki nuansa futurolog, mampu mencandra masa depan. Ia mampu memprediksi banyak hal secara rasional-kalkulatif, sehingga ia punya peta atau kompas masa depan. Serta, tentunya ia punya *basic values* atau ideologi atau seperangkat keyakinan mendasar yang jelas, sehingga tidak pernah ragu-ragu dalam berupaya mencapai tujuan.

Jadi, visi harus merealitas? Dan tugas pimpinan itu mendorong agar visinya mewujud?

Persis. Kita simak Max DePree: *The first responsibility of a leader is to define reality*.[8] Tugas pertama kali pemimpin adalah men-*define* realitas. Bagaimana membuat "mimpi" itu masuk akal dan bisa diwujudkan dalam suatu tahapan perwujudan yang rasional-kalkulatif. Visi ada di alam nyata, bukan alam legenda atau khayal. Tak ada orang yang dapat membuat seribu candi dalam satu malam, bukan?

6 Patric (2007).

7 Stoner, Blanchard, dan Zigarmi (2007:23).

8 Brainyquotes.com

Mari kita simak sejenak legenda Rara Jonggrang dan candi Sewu. Guna memperistri Jonggrang, ksatria bernama Bandung Bondowoso diberi syarat agar membuat seribu candi dalam waktu semalam. Sebelum ayam jantan berkokok, alias sebelum fajar tiba, seribu candi (*sewu candi*) itu sudah harus mewujud. Sang ksatria sakti itu pun menyanggupi.

Bandung Bondowoso itu konon dari kerajaan apa?

Konon di daerah Jawa Tengah ada dua kerajaan: Pengging dan Baka. Kerajaan Pengging dipimpin Prabu Damar Maya, ayah Raden Bandung Bondowoso. Sedangkan kerajaan Baka dipimpin raksasa kanibal bernama Prabu Baka. Meskipun raksasa, ia memiliki putri cantik bernama Rara Jonggrang.

O, jadi begitu rupanya ...

Ya. Konon, Prabu Baka menyerukan perang melawan Pengging. Banyak korban jatuh di pihak rakyat Pengging. Guna mengakhiri pepeperangan, Prabu Damar Maya mengirim putranya menghadapi Prabu Baka, dan berkat kesaktiannya Bandung berhasil membunuh Baka. Mendengar kematian ayahnya, sontak Jonggrang sedih dan meratap. Pangeran Bandung Bondowoso pun merengsek ke kerajaan Baka. Di sana ia melihat Jonggrang dan terpikat oleh kecantikannya. Ia pun melamar sang putri, tetapi lamarannya ditolak. Karena terus didesak sang putri bersedia dipersunting, namun dengan syarat membangun seribu candi dalam waktu satu malam.

Bagaimana Bandung berupaya mewujudkan permintaan *absurd* tersebut?

Dengan ilmu *kasekten*-nya, Bandung Bondowoso berhasil memobilisasi kekuatan makhluk halus untuk membangun seribu candi. Kerja keras pun terjadi, dengan kecepatan pembangunan yang luar biasa. Bandung sendirilah yang menjadi *project officer*. Ia optimis, seribu candi pasti selesai sebelum fajar tiba.

Sementara itu, Jonggrang cemas. Sesungguhnya ia tidak berharap untuk bisa diperistri oleh ksatria yang telah membunuh ayahnya itu. Ksatria itu memang sakti sekali, bisa-bisa permintaan *absurd*-nya tercapai. Jonggrang pun mencari strategi, berupaya agar Bandung gagal. Strategi tandingan pun ketemu juga: ia memobilisasi para perempuan di sekitarnya untuk memukuli *lumpang* penumbuk beras. Suaranya pun bertalu-talu berirama. Ia juga memerintahkan agar tumpukan-tumpukan jerami dibakar. Semua itu dimaksudkan untuk memancing ayam jantan berkokok lebih awal dari waktunya di fajar hari. Dan, benar, ayam-ayam jantan mengira fajar sudah tiba, mereka pun berkokok bersahut-sahutan.

Mendengar kokok tersebut, para makhluk halus berlarian meninggal-

kan lokasi proyek. Tabu bagi mereka untuk tetap bertahan di pagi dan siang hari. Bandung panik, tetapi ia tidak bisa menghentikan mereka. Padahal pembangunan candi nyaris selesai.

Lantas, Jonggrang pun menemui Bandung Bondowoso.

"Bagaimana Jonggrang? Aku sudah membangun seribu candi!"

"Tunggu dulu, mari hitung dengan benar, apakah jumlahnya memang sudah seribu?"

Anak buah diperintahkan. Setelah dihitung, jumlah candi-candi itu hanya 999. Apa tak keliru? Mereka menghitung lagi. Lagi-lagi 999. Berkali-kali hasilnya tetap 999.

Wajah Jonggrang sontak ceria, karena Bandung Bondowoso telah gagal, walaupun candinya kurang satu buah saja. Tapi Bandung tetap berharap Jonggrang menerima lamarannya. Jonggrang bersikukuh menolak. Yang ia minta seribu, bukan 999. Negosiasi gagal, dan Bandung Bondowoso menjadi sangat marah, apalagi ia tahu semua itu merupakan bagian dari kecanggihan tipu muslihat Jonggrang belaka. Maka, dengan kesaktiannya ia jadikan Jonggrang patung menggenapi candi yang keseribu. Kira-kira begitu kisah yang melegenda atas Candi Sewu di Prambanan.[9]

Apa maksud Anda berkisah tentang legenda itu?

Maksud saya mimpi tidak dapat diwujudkan dalam sekejap. Hanya dalam legendalah, mimpi mewujud sekejap! Hal-hal yang tidak masuk akal, hanya ada dalam alam dongeng: karpet terbang dalam kisah 1001 malam, kuda bersayap dalam mitologi Yunani, dan sebagainya. Betapapun tinggi melambungnya sebuah visi, tetapi ia harus tetap *masuk akal*, kendatipun *masuk akal* yang dimaksud bersifat harapan. Visi boleh hebat, tapi jangan sampai hal itu malah membuat orang-orang bingung dengan apa yang hendak dilakukannya. Coba kita camkan catatan Emha berikut.

> Ada orang yang sangat khusyuk dengan prinsip dan idealismenya dan sangat sungguh-sungguh memikirkan strategi terapan prinsipnya. Ada orang yang total pegang prinsip sampai tak punya energi dan waktu untuk memikirkan bagaimana menerapkannya. Ada orang yang habis usianya untuk tata kelola dan tata terapan sampai tidak ada prinsip yang tersisa di dalam dirinya. Ada orang yang tak peduli pada prinsip dan tak sungguh-sungguh melaksanakan apapun.[10]

Kalau boleh digaris-bawahi, maksud cerita di atas ialah

9 Versi cerita yang hampir sama lihat wikipedia.org dan ceritarakyatnusantara.com

10 Nadjib (2008:1).

UN.ORG

Adalah pantang mengukur tinggi sebuah gunung sampai Anda mencapai puncaknya. Hingga kemudian Anda akan melihat betapa rendahnya ia

- Dag Hammarskjold

Never measure the height of a mountain until you have reached the top. Then you will see how low it was

visi butuh proses untuk pencapaiannya?

Ya, persis. Tak ada visi terwujud dalam sekejap. Bahkan kalau kita simak Bandung Bondowoso pun perlu proses untuk membangun seribu candi dalam semalam. Bagaimana kalau ia tak mampu memobilisasi para jin dan makhluk halus dalam legenda di atas?

Bagaimana visi diciptakan?

Pertanyaan singkat, mengena. Begini, karena ini buku tentang kepemimpinan politik, maka ilustrasinya adalah seandainya saja Anda hendak membentuk sebuah partai politik. Ada sebuah cara mudah untuk menyusun dan merumuskan sebuah visi. Para pendiri partai lebih baik duduk bersama-sama untuk mendiskusikan dan merumuskan visi yang hendak ditetapkan. Tentu saja permasalahannya tak jadi sederhana sekali. Proses perumusan visi terkait dengan perjalanan panjang para perumusnya. Tetapi ingat, visi tidak sama dan sebangun dengan ideologi dalam pengertian *basic values* organisasi. Soal pengertian ideologi secara panjang lebar akan kita bahas tersendiri di bagian yang memperbincangkan tentang kekuasaan.

Bagaimana mengkomunikasikan sebuah visi?

Banyak cara untuk mengkomunikasikan sebuah visi, dari mulai yang sederhana, yakni membingkai dan menaruh rumusan visi pada dinding kantor yang dilewati oleh banyak orang, hingga mewajibkan anggota untuk hapal di luar kepala rumusan visi itu. Yang penting, visi dapat dipahami dan dihayati oleh segenap kader organisasi dari tingkat pusat hingga lokal, tertinggi hingga terendah. Tetapi, visi sebuah proses yang berjalan, sehingga persoalannya bagaimana ia menjadi *roh* organisasi. Penting sekali untuk

selalu atau terus-menerus mendiskusikan hal-ikhwal visi organisasi dalam menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang.

Pengulangan itu perlu. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah misalnya, berulang-ulang mengajarkan pada para santrinya mengaji Al Qur'an surat Al-Maun.[11] Menurut Ketua PP Muhammadiyah terlama, KH A.R. Fachruddin dalam ceramahnya di Universitas Muhammadiyah Malang ketika saya masih kuliah di sana, pengulangan itu dimaksudkan agar para santri memahami pesan-pesan ayat-ayat sosial Al-Maun tersebut. Surat pendek itu harus diinternalisasikan secata sungguh-sungguh ke setiap pribadi Muslim, sehingga menjadi pribadi yang mandiri dan suka menolong.

Barangkali intinya agar visi terinternalisasi ...

Tepat. Pemimpin harus memberi contoh dan selalu mengingatkan tanpa kenal lelah pada yang dipimpin. Upaya mengingatkan bisa dengan bahasa verbal dan non-verbal. Yang verbal lewat ceramah-ceramah dan dialog-dialog, misalnya. Yang non-verbal ditulis dan ditempel di dinding di kantor. Kalau kita biasa menjumpai tulisan-tulisan visioner di rumah sakit-rumah sakit swasta, juga di kantor-kantor organisasi sosial kemasyarakatan, maka visi itu juga mestinya harus ditemui di dinding-dinding kantor partai-partai politik. Diharapkan orang yang membacanya akan terinspirasi dan tergerak, dan kemudian ia berbuat sesuatu untuk mematuhi dan menjalankan dengan sadar visi tertulis itu.

Apakah visi perlu dihapalkan?

Wah, ini pertanyaan penting dan relevan dengan para kandidat politik yang hendak maju ke pemilihan umum, khususnya pilpres dan pilkada. Orang yang paham akan visinya, ia akan bisa menjelaskannya secara alamiah. BTW, saya pernah melihat acara hiburan di televisi, banyak artis nyanyi di situ. Tetapi, lazimnya musim pilkada, acara semacam itu dimanfaatkan oleh salah satu kandidat yang ada. Kebetulan sang kandidat itu politisi berlatar belakang militer, yang kesan saya, gaya militernya masih cukup lekat.

Dia kemudian didaulat ke panggung, disandingkan dengan artis dangdut, supaya bisa duet. Naiklah sang kandidat ke panggung dalam acara yang disiarkan langsung itu. Sang pembawa acara memanfaatkan kehadirannya dengan mengajukan pertanyaan, yang tampaknya diproyeksikan mengun-

11 Ayat-ayat itu mudah dihapalkan, tetapi susah untuk dijalankan. Inilah terjemahan Al Qur'an Surat Al-Ma'un (107) Ayat 1-7: (1) Tahukah engkau yang mendustakan agama; (2) Itulah orang orang yang menghardik anak yatim; (3) Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin; (4) Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang; (5) yang lalai akan sholatnya; (6) Orang-orang yang berbuat *riya* dan enggan menolong; (7) dengan barang yang berguna.

Kepemimpinan ialah kapasitas untuk menterjemahkan visi ke dalam realitas

- Warren Bennis

Leadership is the capacity to translate vision into reality.

tungkan sang kandidat, "Sebelum bapak berduet malam ini, saya akan menanyakan satu dua pertanyaan Pak?"

"O silakan, apa pertanyaannya?"

"Bapak terlihat segar bugar, apa resepnya Pak?"

"Olahraga yang cukup, minum air putih yang banyak!"

"Terus, ini kan Bapak maju sebagai kandidat dalam pilkada, sebagai calon gubernur, apa visi Bapak untuk memajukan provinsi yang hendak Bapak pimpin?"

"Visi? Ya, jelas saya *ndak* hapal ... Sudah jangan jangan soal visi-visi, ini kan acara hiburan, *ndak* pas kalau ditanyakan di sini ..."

"Baiklah Pak ..."

He, he, lucu juga ...

Ya, mungkin Anda akan berkomentar: bagaimana mungkin seorang kandidat kok tak hapal visinya? Tapi, sang kandidat tak salah menolak ditanyai visi dalam acara hiburan di televisi itu, cuma barangkali kurang taktis.

Ini serius: kita kan hidup di era negara-bangsa modern, dan itu berawal dari suatu visi, bukan?

Ya, visi nasionalisme. Nasionalisme sendiri bagaimanapun hadir, tak lepas dari perkembangan sejarah politik modern. Pada 11 Maret 1882 filosof Ernest Renan misalnya, menyampaikan Pidato Dies Universitas Sorborne,

> Bangsa ialah suatu solidaritas besar yang terbentuk karena adanya kesadaran, bahwa orang telah berkorban banyak dan bersedia untuk memberi korban itu lagi. Ia mengandung suatu waktu yang lampau; tetapi ia terasa dalam waktu yang sekarang sebagai suatu kenyataan yang dapat dipegang: (yakni) persetujuan, keinginan yang dinyatakan secara tegas untuk melanjutkan hidup bersama ... manusia itu bukanlah budak dari keturunanya (ras) atau dari bahasanya, atau dari agamanya, atau dari jalan mengalirnya sungai-sungai; bukan pula dari arah ke mana rantai-rantai pegunungan menuju ... Suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa.[12]

12 Renan (1994:53-59)

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Pemberani yang pasti ialah mereka yang memiliki visi jelas ...

- Pericles

The bravest are surely those who have the clearest vision ...

Sunario menggarisbawahi beberapa kata kunci *nation*: keinginan untuk tetap hidup bersama yang timbul antara segolongan besar manusia yang nasibnya sama terutama dalam penderitaan-penderitaan bersama. Renan menolak sebuah bangsa lahir karena adanya persamaan keturunan, ras, bahasa, agama, atau kondisi geografis. Renan penganjur teori kebangsaan subyektif bahwa kehadiran bangsa didasari "perasaan" atau "kehendak" dan mencela "teori kebangsaan obyektif" yang menyatakan bahwa bangsa lahir karena persamaan budaya.[13]

Kajian lain tentang nasionalisme selain Renan, Anderson?

Ben Anderson terkenal dengan perspektif komunitas imajinernya. Ia memandang bangsa sebagai

> ... komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang imajiner karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka.[14]

Anderson juga menawarkan sesuatu yang subyektif tentang bangsa: kita disuruh membayangkannya. Bangsa itu komunitas imajiner di mana

13 Renan (1994:xviii).

14 Anderson (1999:7).

emosionalitas sebagai perekat. Misalnya Aceh tengah terlanda duka mendalam akibat tsunami, maka orang Jawa, Kalimantan atau yang lain-lain segera merasakan duka yang sama sebagai "bangsa". Kalau demikian, Anderson menyumbangkan perspektif lokalitas sebagai inti kekuatan nasionalitas. Oleh karena itulah para person di tingkat lokal harus mampu menumbuhkan imajinasi yang hebat akan nasionalitas.[15]

Kembali ke visi, Anda belum menjelaskan secara rinci apa bedanya dengan misi?

Sebuah buku petunjuk praktis kepemimpinan[16] menjawab: visi sesuatu yang ingin engkau gapai di masa depan, sedangkan misi ialah apa yang harus engkau lakukan dengan penuh kesungguhan, setiap hari. Maka, ketika engkau menjalankan misimu, maka sesungguhnya engkau tengah merengkuh menggapai visimu. Buku ini menjelaskan bahwa, secara simbolik, visi itu ialah tanda centang dalam peta harta karun, sedangkan misi ialah telapak kaki di pasir sebagai tanda jejak bahwa itu merupakan ikhtiar bahwa engkau telah melakukan perjalanan untuk mendekati visimu, tanda centang dalam peta harta karunmu.

Buku ini memberi contoh menarik, pada pengelaman kepemimpinan politik Mahatma Gandhi. Gandhi muda, pada 1893 pernah melakukan perjalanan karea suatu pekerjaan di suatu negara koloni Inggris, ia naik kereta api dari Natal ke Pretoria, Afrika Selatan. Ia punya tiket kelas satu di kereta itu, tetapi seorang penumpang kulit putih protes terhadap keberadaannya, bahwa seorang India seperti dia dipandang tak layak naik di kelas satu. Lantas, petugas memaksanya untuk pindah ke kelas tiga. Tetapi Gandhi menolak, maka ia pun dipaksa turun di stasiun dan menghabiskan waktunya bermalam di sana. Di malam yang dingin itu ia berpikir, apakah ia akan kembali ke India atau tetap tinggal di Afrika Selatan guna memperjuangkan haknya.

Gandhi telah menemukan visinya awalnya: ia harus berjuang melawan diskriminasi di Afrika Selatan, tetapi beberapa tahun kemudian ia mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar, kemerdekaan India dari Inggris. Ia ingin ada hukum sendiri di India, bukan hukum Inggris. Guna mewujudkan visinya, Gandhi mengedepankan misi perlawanan anti-kekerasan (*non-violence*, *ahimsa*). Gerakan anti-kekerasan itulah yang sehari-hari ia galang, hingga akhirnya visinya terwujud: kemerdekaan India. Apa yang dilakukan Gandhi memang fenomenal, bagaimanapun ia telah menampilkan diri se-

15 Hal ini pernah saya ulas dalam makalah "Bangsa Kita ke Depan", Makalah disampaikan dalam Diskusi Menggali Isu-isu Strategis Pemulihan Semangat Kebangsaan Indonesia, diselenggarakan oleh Sajogyo Inside, Bogor, 14 Januari 2006.

16 Price dan Price (2013:11-12).

Ya, dalam semua penelitian saya, pemimpin terhebat memandang ke dalam dan mampu menceritakan kisah yang bagus secara otentik dan penuh semangat

- Deepak Chopra

Yes, in all my research, the greatest leaders looked inward and were able to tell a good story with authenticity and passion

bagai pemimpin politik yang hadir tanpa mengedepankan gerakan bersenjata dalam melawan kolonial Inggris, kecuali gerakan massa anti-kekerasan.

Keterpanggilan dan Kemanusiaan

MENGAPA PEMIMPIN, terutama pemimpin politik lazim berdalih kehadiran mereka karena keterpanggilan?

Tentu mereka ingin dikategorikan sebagai politisi yang otentik. Bagi Kouzes dan Posner, kepemimpinan merupakan hubungan antara mereka yang terpanggil untuk memimpin dan mereka yang memilih untuk mengikuti.[17] Keterpanggilan selalu terkait kondisi obyektif yang melingkupi suatu organisasi, apakah itu partai politik atau negara sekalipun, dalam lingkup internal maupun eksternal. Lingkungan internal biasanya memberikan peluang besar bagi perubahan. Ada desakan kuat untuk berubah, suatu tuntutan reformasi. Lingkungan eksternal biasanya melengkapinya: ketidakpastian terus meningkat, kompetisi semakin ketat. Pemimpin terpanggil setelah melakukan kontemplasi panjang. Ada semacam *mission sacre* yang harus dijalankan untuk merubah keadaan. Dan itu bukan orang lain lagi, melainkan dirinya! Maka ia harus *cancut taliwandha*, turun ke gelanggang maju perang!

Anda bilang soal otentisitas, apa urgensinya?

Otentisitas itu keaslian. Pemimpin yang otentik itu alamiah, terpanggil, berproses, teruji, dan menjadi panutan karena kharismanya. Otentisitas hadir dari seorang pemimpin yang memang dia punya kualifikasi kepemimpinan dan dibutuhkan oleh organisasi atau masyarakatnya. Pemimpin yang otentik biasanya tidak menyodor-nyodorkan diri untuk diangkat komunitasnya sebagai pemimpin, tetapi ia berposisi defensif, dalam arti tampil sebagai pemimpin karena terus didesak oleh orang-orang yang memberinya

17 Kouzes dan Posner (2006a).

amanah. Ia apa adanya, sebagaimana aslinya. Lazim soal otentisitas kepemimpinan ini dikaitkan dengan lawannya, kepalsuan atau artifisialitas.

Jadi, maksud Anda ada dua jenis pemimpin di dunia ini: pemimpin otentik dan palsu, begitu?

Ya, begitulah. Bolehlah saya berpendapat, yang otentik ialah yang berpihak kepada kemanusiaan. Merujuk sejarawan Toynbee yang saya kutip di pembahasan sebelumnya, "Satu-satunya perjuangan nyata dalam sejarah dunia ialah antara kepentingan pribadi dan keadilan sosial." Keadilan sosial erat kaitannya dengan misi kemanusiaan, bagaimana menyejahterakan kehidupan umat manusia, bagaimana meningkatkan kualitas peradaban manusia. Sementara yang palsu, para penjahat, bukan pejuang kemanusiaan, tetapi dengan kadar masing-masing, para penindasnya. BTW soal otentisitas ini, nanti akan kita singgung panjang lebar pada pembahasan soal popularitas dan elektabilitas. Tetapi, sebelum itu bolehlah kita renungkan komentar Li Ke (Abad 5 SM) berikut:

> Sebelum seseorang dikenal, amatilah dengan siapa dia bergaul; ketika ia menjadi kaya, perhatikan kepada siapa ia memberikan uangnya; ketika ia mendapat kedudukan tinggi, lihatlah kepada siapa ia memberikan promosi; ketika ia dalam kesulitan, perhatikan hal apa yang ia tolak untuk dikerjakannya; ketika ia miskin, lihatlah apa yang tidak ia terima. Jika kau mengetahui lima hal di atas mengenai seseorang, kau tahu siapa yang seharusnya ditunjuk menjadi perdana menteri.[18]

Tadi Anda menyebut *mission sacre*, maksudnya?

Misi yang dianggap suci atau misi suci. Ada kalanya orang mengaitkan segala perbuatannya dengan konteks spiritualitas. Ia ingin menggapai derajat spiritualitas yang tinggi, apabila ia mengerjakan sesuatu yang ia percayai mampu untuk itu. Menjadi pemimpin adalah kesempatan untuk tampil, memperbaiki keadaan. Dengan begitu ia berharap punya nilai lebih. Tenaga, pikiran dan bahkan perasaannya pun terpakai. Ada kepuasan tersendiri dalam hal ini, karena yang diharapkan adalah pahala. Heroisme mengemuka, dan orang akan berjuang tanpa pamrih.

Soal panggilan, bukankah ia sekadar legitimasi rasional seseorang untuk tampil?

Secara rasional, mereka yang berani tampil, karena merasa ada peluang. Jadi dari sisi ini, konteksnya memang tidak sampai dibawa ke ranah spiritual segala macam. Yang penting ada orang yang dinilai mampu, dan

18 Tang (2015:226).

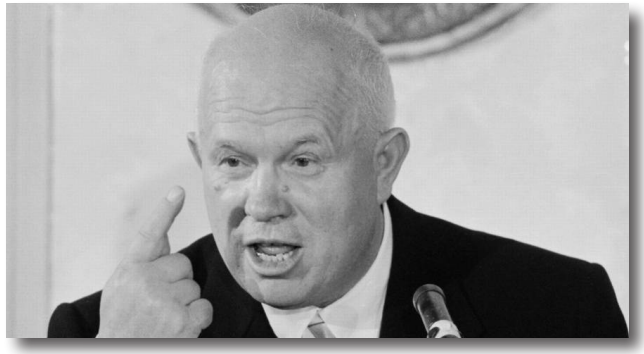

IMGKID.COM

Jika Anda hidup di antara serigala, Anda harus bertindak seperti serigala

- Nikita Khrushchev

If you live among wolves you have to act like a wolf

punya peluang untuk tampil. Tetapi, tetap saja ia perlu legitimasi moral. Dinilai mampu dan merasa mampu itu beda: dinilai mampu berarti memang ada pihak lain yang menilai secara objektif bahwa seseorang mampu untuk memimpin. Merasa mampu, biasanya, sekadar subyektivitas personal orang yang punya hasrat dan ambisi untuk memimpin, meraih kekuasaan kepemimpinan. Barangkali begitulah tafsir ujaran Jawa yang terkenal itu: *ojo rumongso biso, nanging bisoo ngrumangsani*. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa.

Soal panggilan, bukankah merupakan bagian dari fitrah manusia? Bukankah manusia adalah pemimpin di muka bumi?

Ya. Setidaknya demikian pandangan (agama) Islam yang ber-*positive thinking* pada asal-usul primordial manusia, yang ketika dilahirkan, ia adalah makhluk suci yang *hanif*, bersih dari segala noda dan dosa. Tidak ada konsep dosa turunan. Dengan begitu pada dasarnya manusia itu baik. Pandangan ini bebeda mereka yang berasumsi bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Adapun dalam perkembangannya manusia itu bisa jahat, karena ia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Musuh utama manusia itu hawa nafsunya sendiri, sehingga Rasulullah SAW mengatakan *jihad* yang terbesar adalah melawan hawa nafsunya sendiri. Islam berpandangan, setiap manusia berpotensi menjadi pemimpin. Manusia adalah "pemimpin di muka bumi" (*khalifatullah fil ardh*).[19]

Soal setiap manusia, kita, adalah pemimpin, ada baiknya kita simak teks Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar, Rasullullah SAW

19 Tentang hal ini, lihat Shihab (1992); Rahardjo (2002:346).

mengatakan,

> Kamu semua adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarga dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin yang akan memelihara harta majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya. Dan kamu semua adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban kepemimpinannya.[20]

Setiap manusia, kalau begitu, punya potensi menjadi pemimpin?

Setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin dirinya sendiri. Soal potensi ini, katanya, sebagian besar manusia baru memanfaatkannya paling banyak sepuluh persen. Masih ada 90 persen potensi yang tersebunyi. Menurut Cooper, kecerdasan dan semangat manusia adalah kreasi terhebat yang kita kenal, tetapi sebagian besar dari diri kita menggunakan kepandaian atau kekuatan kita itu baru dalam presentase yang sangat kecil. Ibaratnya, pada waktu lahir kita masing-masing diberi sebuah pesawat jet. Pesawat tersebut bisa terbang — pesawat ini dibuat untuk terbang — tetapi kita tidak bisa melihatnya; kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita punya. Jadi, yang kita semua lakukan adalah mengelap sayapnya atau memanaskan mesinnya setiap pagi hanya untuk efek suaranya, lalu menutup pintu hangar seharian.[21]

Sepertinya, ada *raksasa yang tidur* dalam diri kita. Kalau tidak pahami dan diasah potensi besar itu, maka selamanya ia akan tidur saja. Seperti dikatakan Orison Marden,

> Jauh di dalam diri manusia terdapat potensi yang masih tidur itu; potensi yang akan membuat mereka terheran-heran karena mereka tak pernah bermimpi memilikinya; potensi yang akan merombak hidup mereka jika dibangkitkan.[22]

Seberapa penting dimensi manusia dalam kepemimpinan?

Karena yang kita bicarakan kepemimpinan manusia, maka dimensi manusia tentu sangat penting.[23] Masing-masing individu punya kehendak. Tugas pemimpin mengelola berbagai kehendak manusia yang dipimpin-

---

20 Al-Banjari (2008).

21 Cooper (2007:32).

22 Cooper (2007:32).

23 Istilah "dimensi manusia", mengingatkan kembali pada buku karangan Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Lihat, Soedjatmoko (1995/1983).

nya. Karenanya, kepemimpinan berimpitan dengan kemanusiaan. Menurut Moeljono, para pemimpin sejati bukan hanya *a professional leader* namun juga *a compassionate leader*. Profesionalitas tidak dapat dipisahkan dari dimensi manusia seorang pemimpin sebagai penasihat, pelindung, teladan.[24] Pentingnya dimensi mausia dalam kepemimpinan, tampak jelas dari kata-kata bijak Konosuke Matsushita, berikut:

First we make people then we make product

Assets only make possibility, but people make it happen.[25]

Bagaimana dengan kepemimpinan yang ingkar terhadap kodrat kemanusiaan?

Akan menuai perlawanan dan kegagalan. Novelnya George Orwell *Animal Farm* bisa jadi gambaran.[26] Ringkasnya: alkisah terjadilah pemberontakan para binatang yang dipimpin oleh dua babi cerdas: Snowball dan Napoleon atas Tuan Jones di Pertanian Manor. Para binatang menginginkan bisa lepas dari belenggu otoriter manusia. Revolusi itu berhasl mengusir manusia, dan berdirilah "Republik Binatang" di tanah Inggris dan seluruh dunia. Tetapi, Republik itu dalam perkembangannya kacau dan ambruk, justru karena yang mengecambah adalah sifat-sifat kebinatangan yang tak tahu aturan, seenaknya, dan otoriter.

Tapi, walaupun manusia ibarat *zoon politicon*, bukankah ia jauh lebih sempurna ketimbang binatang?

Mestinya demikian, karena manusia sendiri bisa terjerembab ke sifat-sifat binatangisme, bahkan jauh lebih rendah dari itu (*asfala al-safilin*).[27] Yang membuat manusia sempurna, tidak hanya fisiknya, tapi juga kemampuan kulturalnya untuk mencipta peadaban.

Kita lihat perkembangan manusia. Menurut ahli evolusi molekuler Fakultas Biologi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Ferry Fredy Karwur, pasca-evolusi *Homo Sapiens*, manusia modern masih akan terus mengalami evolusi baik molekuler maupun genetik. Namun, berbeda dengan evolusi sebelum masa *Homo Sapiens* yang sangat dipengaruhi lingkungan, perkembangan manusia modern akan didominasi evolusi kultur. Evolusi genetik membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun, tapi evolusi kultural berlangsung relatif lebih cepat. Selama kurun waktu 200 tahun

24 Moeljono (2008).

25 Moeljono (2008).

26 Orwell (2006)..

27 Istilah yang mengemuka dalam Q.S. At-Tin (95:5).

BOBRITZEMA.WORDPRESS.COM

Betapa anehnya manusia!

- Soren Kierkegaard

How absurd men are!

terakhir, perilaku manusia sudah berubah secara fundamental.[28]

Tapi bukankah, manusia juga punya potensi berbuat kerusakan yang luar biasa?

Persis. Yang jelas, sejarah manusia hingga detik ini, masih diwarnai oleh perang, dimana satu sama lain saling menghancurkan. Menurut, Hedges, sepanjang lebih dari 3.400 tahun, tercatat hanya sekitar 268 tahun tidak ditemukan peperangan (keadaan damai). Itu berarti hanya 8 persennya saja. Tercatat sedikitnya 108 juta orang terbunuh sepanjang abad ke-20 akibat perang.[29] Data-data terbaru bisa kita lacak dan perkirakan, berapa yang terbunuh dalam aneka perang sepanjang awal abad ke-21 ini? Berapa warga Irak dan Afghanistan yang terbunuh akibat perang? Berapa jumlah prajurit Amerika Serikat yang tewas di Irak dan Afghanistan pasca-peristiwa 9/11? Berapa yang tewas akibat konflik politik di Timur Tengah dan belahan dunia lain dewasa ini?

Kembali ke keterpanggilan politik. Saya khawatir banyak yang sekadar dijadikan klaim semata?

Ya, mungkin saja politisi masuk ke dunia politik, tidak disebabkan oleh keterpanggilan, tetapi oleh hal-hal yang lebih bersifat pragmatis: untuk mengejar materi, kekuasaan untuk materi dan fasilitas hidup. Mungkin ini terlampau ekstrim. Tetapi, lagi-lagi soal [klaim] keterpanggilan lazim saja dalam dunia politik. Politisi selalu punya klaim dan janji. Soal janji, Nikita Khrushchev menyindir: *politicians are the same all over. They Promise to*

28 *Kompas*, 10 Oktober 2008.

29 Hedges (2003:1).

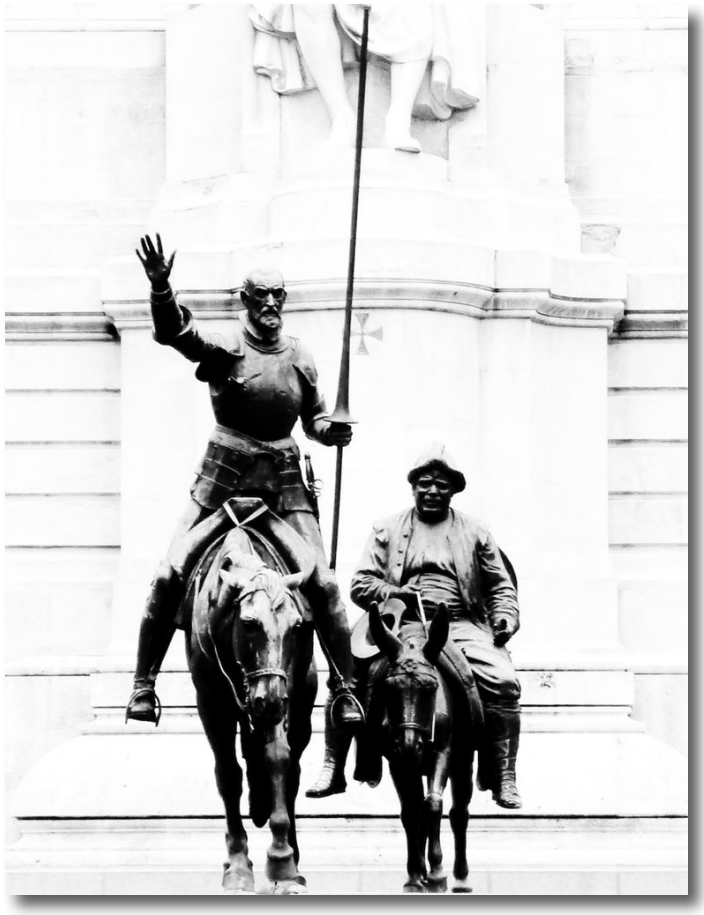

DHUNDERTWASSER.DEVIANTART.COM

Dia yang kehilangan kekayaan kehilangan banyak; dia yang kehilangan teman kehilangan lebih; tapi dia yang kehilangan keberaniannya kehilangan semua

- Miguel de Cervantes

He who loses wealth loses much; he who loses a friend loses more; but he that loses his courage loses all.

Kekuasaan negara di tangan orang-orang bodoh dan bebal akan mendatangkan musibah, baik rakyatnya bodoh maupun rakyatnya pintar

- Jakob Sumardjo

build a bridge even where there is no river.[30] Para politisi sibuk mengumbar janji mau bikin sungai, padahal sungainya saja tidak ada. Charles de Gaulle juga menyindir begini: *I have come to the conclusion that politics is too serious a matter to be left to the politicians*.[31]

Sindiran Gaulle ini, kendatipun tidak selalu kita artikan memojokkan kaum politisi, seperti sarjana pertanian yang berat untuk diamanahi menjadi petani. Bagaimana mungkin politik disebut terlampau serius diembankan ke para politisi? Sindiran-sindiran seperti itulah yang sempat saya lontarkan dalam sebuah seminar.[32] Saya juga melontarkan kisah: ada pula orang yang terpanggil untuk berbuat sesuatu dan itu bisa menjadi suatu tindakan politik, kendatipun salah kaprah.

Salah kaprah bagaimana?

Mari kita simak kisah Nasruddin Hoja yang pernah dikutip Presiden Lyndon Johnson berikut:

> Pada bulan purnama Nasruddin melihat ke sumur, dan betapa kagetnya ia melihat rembulan ada di dasar sumur itu. Seperti politisi, ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan keadaan. Ia harus angkat kembali rembulan dan tempatkan ke asalnya lagi. Tapi ketika timba ia kasih pemberat, maksudnya agar mampu ambil rembulan itu dengan tepat, Nasruddin malah terjungkal ke dasar sumur. Sambil megap-megap ia lihat ke langit dan, "*Alhamdulillah*, usahaku berhasil, rembulan telah tertengger kembali di tempatnya!"[33]

Bagi politisi, "mental untuk menyelamatkan dunia" itu penting. Setidaknya ia punya motivasi mulia. Politisi memang harus gelisah melihat keadaan sekitar, dan berupaya memperbaiki keadaan. Kendatipun demikian, tafsir lain dari kisah Nasruddin di atas, mungkin saja begini: betapa kita sering memahami sesuatu secara serampangan dan memandang masalah hanya dari satu perspektif, sehingga upaya keras kita sia-sia. Begitupun, kita anggap diri kita berhasil! Kita merasa bahwa kita pahlawan penyelamat

30 Brainyquotes.com

31 Brainyquotes.com

32 Seminar Bidang Politik Nasional Puslit Politik (P2P) LIPI "Kepemimpinan Politik dan Problematik Demokratisasi Pasca Soeharto", di Jakarta, 10 Oktober 2013.

33 M Alfan Alfian, "Pemimpin yang Pahlawan", *Koran SINDO*, 9 November 2013.

dunia, dan merasa memiliki kebesaran-kebesaran yang kita lekatkan pada baju-baju dan tampilan kita: seperti Don Quixote.

Don Quixote?

Don Quixote alias Don Kisot itu tokoh karangan sastrawan klasik Spanyol Miguel de Cervantes. Ia merasa dirinya ksatria hebat dari La Mancha dan melakukan petualangan-petualangan konyol. Misalnya ketika Don Kisot mengira kincir angin sebagai raksasa jahat lawannya! Dengan sekuat tenaga dan semangat mengalahkan lawan ia dekati kincir angin. Sang raksasa menantang-nantang dengan angkuhnya. Inilah kesempatan bagi Sang Kstaria dari La Mancha menunjukkan kesaktiannya. Ia terus mendekati sasaran, mengeluarkan jurus-jurusnya, sementara sang raksasa tenang-tenang saja.

Di lain kisah, Don Kisot merasa jadi ksatria yang siap berperang, ketika sekawanan domba, ia kira pasukan musuh yang berbaris, berderap sedemikian rupa. Don Kisot sangat was-was berhadapan dengan musuh sebanyak itu. Sikap politiknya sudah demikian jelas: mereka adalah musuh, dan musuh harus dilawan.

Tapi kan tak semua identik Nasruddin atau Don Kisot?

Hehehe, saya kan tidak mengatakan identik. Memang banyak peristiwa malang bagi si tokoh malang, tetapi kata Benjamin Disraeli: *in politics nothing is contemptible*.[34] Dalam politik tidak ada yang hina [tetapi mungkin ada, kalau bukan banyak yang keliru]. Kita bisa menafsirkan apa yang dikatakan Disraeli: politik selalu membutuhkan pembenaran, legitimasi. Ketika kekuasaan ada di genggaman, maka timbullah upaya-upaya untuk memperkuat pembenaran atas realitas itu. Sejarah politik, nyaris selalu ditentukan oleh orang-orang yang menang [perang dan kompetisi politik], dan mereka punya seribu dalih untuk membenarkan tindakan-tindakannya.

Di atas itu semua, ada baiknya kita simak Abraham Lincoln: *whatever you are, be a good one*.[35] Apapun Anda, jadilah orang yang baik. Pesan sederhana ini mungkin lazim sebagai dalih seseorang masuk dunia politik: ingin menjadi orang yang baik, memperjuangkan visi yang baik dengan berbagai tindakan yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Kendatipun, untuk berbuat baik [sesuai dengan visi politik kita] itu tidak mudah, bahkan suatu ketika kita dituding sebagai orang atau politisi yang tidak baik.

Nanti, di bagian lain buku ini Anda menemukan pesan yang melengkapi: jadi orang baik saja tak cukup, pemimpin harus cerdas dan tidak boleh bodoh. Ada baiknya kita renungkan ulasan Sumardjo berikut:

34 Brainyquotes.com

35 Brainyquotes.com

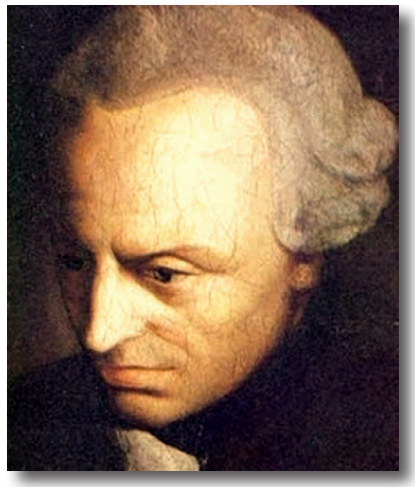

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Politik sejati tidak bisa melangkah tanpa terlebih dahulu menghormati moral, sementara politik itu sendiri adalah seni yang sulit, kombinasinya dengan moral bukan seni sama sekali

- Immanuel Kant

True politics cannot take a single step without first paying homage to morals, and while politics itself is a difficult art, its combination with morals is no art at all

Kekuasaan negara di tangan orang-orang bodoh dan bebal akan mendatangkan musibah, baik rakyatnya bodoh maupun rakyatnya pintar.

Kekuasaan apa pun di tangan orang-orang pintar dan bijaksana akan mendatangkan berkah, baik rakyatnya bodoh maupun rakyatnya pintar. Kuasa adalah wewenang untuk menentukan, baik pemerintahan maupun pengadilan. Yang punya kuasa selalu jauh lebih sedikit daripada mereka yang di bawah kekuasaan. Maka, mereka yang berkuasa memiliki hak-hak istimewa dan berbagai kewajiban yang juga istimewa.[36]

Kepelayanan, Ketulusan, dan Kesantunan

APA YANG kaitannya kepelayanan dengan kepemimpinan?

Model kepemimpinan pelayan (*servant leadership*), esensinya melayani yang dipimpin, apakah itu karyawan, konstituen, pelanggan atau masyarakat luas. Kepelayanan adalah sifat pemimpin yang selalu melayani.

36 Jakob Sumardjo, "Kekuasaan dan Kebodohan", *Kompas*, 11 Juli 2015.

Para pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi pelayan yang baik

- Robert K. Greenleaf

Good leaders must first become good servants.

Ada kesadaran mendasar baginya bahwa memimpin itu hakikatnya melayani secara tulus. Greenlaf menjelaskan kepemimpinan pelayan itu suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan tulus dari dalam hati yang berkehendak untuk melayani, yaitu untuk menjadi pihak pertama yang melayani. Perasaan tulus yang merupakan pilihan dari suara hati itulah yang menghadirkan hasrat untuk menjadi pemimpin yang berbasis kepemimpinan pelayan.[37]

Prinsip kepelayanan itu bagus sekali. Tapi, sayangnya kerap dilewatkan dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan di kalangan pemuda ...

Saya merasakan begitu. Saya pernah mendengarkan uraian khotbah Jum'at di sebuah masjid sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta beberapa tahun silam.[38] Yang menyampaikan masih muda, tapi menu khotbahnya menukik: ia melancarkan otokritik tentang lemahnya kepekaan kepelayanan kita di tengah-tengah maraknya slogan dan pelatihan kepemimpinan di kalangan pemuda. Khotip mengisahkan, suatu ketika serombongan orang berbondong-bondong menuju masjid hendak menunaikan sholat Jum'at, ketika persis di perempatan, seorang ibu-ibu yang *nyetir* sendirian tiba-tiba mobilnya mogok menghalangi kendaraan-kendaraan lain, lalulintas mendadak kacau sekali. Tetapi, rombongan yang mau sholat Jum'at tadi tidak peduli dengan kejadian itu. Mereka cuek, mungkin sedang terkonsentrasi mengejar pahala, mungkin pula ada yang berpikir menolong mobil mogok, bukanlah *fardhu 'ain*, tidak wajib bagi dirinya, toh diharapkan orang lain bakal datang menolongnya.

Kemudian, apa yang terjadi?

Bermenit-menit, tak ada seorang pun yang merasa terpanggil menolong. Sang ibu sangat kebingungan, panik sekali. Orang-orang yang mau ke masjid hanya memandangi dan berlalu. Di tengah situasi krisis itu, seorang tukang becak secara refleks terpanggil untuk mengatasi keadaan. Ia tinggalkan becaknya dan *ngos-ngosan* mendorong mobil mogok itu, meming-

37 Uraian mengenai hal ini lihat Lantu, Pesiwarissa, dan Rumahorbo (2007).

38 Kisah tentang yang dikisahkan khotip tersebut pernah saya tulis di *Pelita*, 15 April 2005, berjudul "Kepelayanan".

girkannya. Lalulintas pun lancar kembali.

Khotip mengatakan menyesalkan perilaku orang-orang yang mau ke masjid tetapi tak merasa terpanggil untuk menolong. Kebalikannya, khotip memuji Pak Becak. Ia mengatakan rombongan orang yang hendak ke masjid tadi, kelasnya ternyata belum pemimpin, karena mereka tidak merasa terpanggil. Kepekaan kepemimpinan mereka tumpul, justru karena enggan, kalau bukan tidak sigap menolong yang tengah tertimpa kesulitan secara tulus melalui tangan pertama.

Kata Khotip, Pak Becak dapat pahala lebih banyak, pahala sosial. Yang di masjid hanya pahala individual. Pahala sosial berlipat ketimbang pahala individual. Kepedulian sosial jauh lebih bernilai ketimbang kepentingan pribadi. Seorang pemimpin ialah yang peduli, bukan sekadar elite yang memerintah, yang menonjolkan perilaku ingin dilayani, bukan melayani.

Adakah tips menjadi pemimpin yang melayani?

Maxwell mengajurkan tiga saran agar Anda tergolong sebagai "pemimpin yang melayani": (1) Berhentilah memerintah orang, dan mulailah mendengarkan mereka; (2) Berhentilah bersandiwara demi kemajuan karir, dan mulailah mengambil risiko demi kepentingan orang lain; dan (3) Berhentilah bersikap suka-suka, dan mulailah melayani orang.[39]

Bagaimana dengan ketulusan?

Konsepnya berimpitan dengan empati, hal yang akan diuraikan tersendiri di buku ini. Tetapi, ketulusan juga terkait sekali dengan kecintaan. Pemimpin harus cinta dengan kepemimpinan, diri sendiri, dan cinta pada sesama. Sastrawan Jerman Goethe, mengatakan, kita dibentuk dan dituntun oleh apa yang kita cintai.[40] Pemimpin seharusnya memiliki niat yang tulus bagi kemajuan kemanusiaan. Ia harus mencintai pekerjaan dan yang dipimpinnya sepenuh hati, mencintai sesama, seorang humanis tulen. Cinta damai dan anti-kekerasan, dan mempunyai sifat-sifat ketulusan merpati yang lebih dominan ketimbang ular yang licik. Watak merpati membuat politisi, pejabat publik atau pejabat negara tidak cenderung menyelewengkan kekuasaan. Tidak menggunakan jabatan dan "kekuasaan" untuk kepen-

39 Maxwell (2001).

40 Cooper (2007).

tingan memperkaya diri.

Merpati dan ular diumpamakan oleh filosof Immanuel Kant sebagai dua binatang terselip di dada setiap insan politik.[41] Satu sisi politisi, memiliki watak merpati, yang tulus, lembut dan penuh kemuliaan (dalam memperjuangkan idealisme). Tetapi, di sisi lain ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Politisi ideal mampu mengendalikan ularnya.[42]

Kesantunan, perlukah dimiliki pemimpin?

Justru inilah yang langka: pemimpin yang santun, tidak sombong alias *ojo dumeh* (tidak sok) dan memiliki watak *andhap asor* (rendah hati). Kesantunan terkait erat dengan kepribadian, yang akan kita ulas tersendiri. Kesantunan memang memerlukan penampilan fisik yang seirama dengan ketulusan hati. Santu berarti anti-kekerasan, tidak bersikap kasar, menjaga diri dan kehormatannya. Ia menjaga tiap tutur katanya, untuk tidak menyakiti yang lain. Kalaupun ia berkata-kata, akan cenderung memilih kata-kata yang netral, bahkan cenderung eufimistik, dihaluskan — tetapi tidak mereduksi esensi makna.

Santun juga berarti punya prinsip dan kuat memegang prinsipnya itu, walaupun demikian tetap membangun silaturahmi dengan musuh-musuh politiknya. Ia adalah seorang pemaaf dan tidak meledak-ledak, dalam arti mampu menjaga emosinya dengan baik. Pemimpin yang santun ialah yang memiliki tingkat emosionalitas terkendali, EQ (*Emotional Quotient*) — bahkan ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*) — yang tinggi. Ia paham memposisikan diri dan bersikap secara tepat. Pandai menghormati "tamu". Ia menghormati mereka yang "dituakan", termasuk guru-guru mereka. Ia *gentle* mengakui kesalahan apabila keliru dan berupaya memperbaiki, tetapi apabila kebijakannya berhasil tidak cepat puas dan sombong diri.

Perjuangan, Penderitaan, Pengorbanan, dan Kepahlawanan

DIKATAKAN "MEMIMPIN itu menderita". Pernah dengar ungkapan tersebut? Apa maksudnya?

Pernah. Kalau kita telusuri, istilah itu akan kita temukan dalam karangan Mohammad Roem yang mengisahkan kepemimpinan Haji Agus Salim. Istilah tersebut terlontar oleh Kasman Singodimedjo "memimpin itu adalah

41 Thompson (2000).

42 M Alfan Alfian, "Dari Perbendaharaan Etika Politik", *Suara Karya*, 7 Juli 2008.

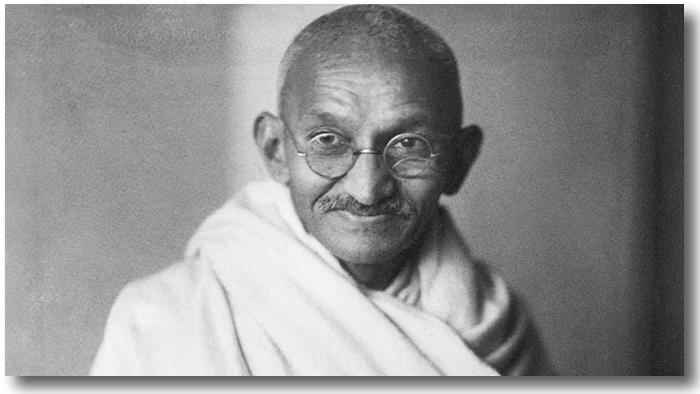

BIOGRAPHY.COM

Kebahagiaan ialah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan adalah dalam keharmonisan

- Mahatma Gandhi

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

jalan yang menderita". Bahasa Belandanya "*Een leidersweg is een lijdensweg. Leiden is lijden*". Ada dua kata yang berbunyi sama dalam Bahasa Belanda, namun ditulis secara berbeda: *leiden* (memimpin) dan *lijden* (menderita).[43]

Mohammad Roem mencatat Haji Agus Salim, sosok "yang dikenal pandai tenang agama Islam dan mahir menggunakan berbagai bahasa" ini, sebagai potret pemimpin yang mau menderita. Ia berani hidup serba kekurangan alias terbatas secara materi. Roem mencatat, "rumahnya, seperti rumah perkampungan, sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal seperti kita bayangkan". Agus Salim tidak punya tempat tinggal tetap, sehingga ia dan keluarganya hidup berpindah-pindah. Padahal, ia adalah sosok yang menentukan dalam *Sarekat Islam* (SI), sebuah organisasi politik dan pergerakan yang sangat berpengaruh pada masanya. Ia juga mentor para aktivis *Jong Islamieten Bond* (JIB).

Apa artinya itu?

Jalan penderitaan adalah jalan kesederhanaan, jalan kemanusiaan, jalan keteladanan. Tidak tentu pemimpin berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebab, tidak ada kamus untuk bersenang-senang kemudian. Biarlah yang bersenang-senang itu mereka yang dipimpinnya, anak buahnya, rakyatnya, umatnya.

Apakah Mahatma Gandhi termasuk salah satu pemimpin

43 Roem (1977).

yang memilih "jalan menderita" itu?

Ya. Keberhasilan Gandhi sebagai pemimpin kharismatik bagi kemerdekaan India justru terletak pada pilihannya mengambil jalan menderita. Ia pemimpin politik asketis yang mengedepankan keteladanan dan konsistensi atas prinsip yang yakininya. Pada masanya, Gandhi menelanjangi kesombongan kaum kolonialis-imperialis melalui gerakan *ahimsa*, anti-kekerasan. Ia menanggalkan simbol-simbol kemewahan, keserakahan dan kekerasan, sebaliknya menawarkan kemandirian (*swadesi*). Misinya berhasil. Gandhi sangat toleran dan cinta damai, tetapi pada 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh oleh seorang lelaki Hindu yang marah Gandhi dinilai terlalu memihak kepada Muslim.[44] Kematian tragis inspirator besar India itu segera ditangisi baik para pengikut maupun pengagumnya.

Kalau begitu para pemimpin yang baik, mestinya para pemimpin yang menderita atau siap menderita?

Persis. Penderitaan mestinya telah menjadi bagian dari kehidupan seorang pemimpin. Penderitaan merupakan bagian dari romatika perjuangan seorang pemimpin. Ada masanya para pemimpin tangguh menghadapi ujian yang hebat, dimana ia berada dalam posisi yang teraniaya atau tertindas. Simaklah kembali misalnya kisah Nelson Mandela.

Nelson Mandela?

Ya, Nelson Rolihlahla Mandela. Ia lahir di Mvezo, 18 Juli 1918 dan dikenal di seluruh dunia sebagai pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-*apartheid*, anti-diskriminasi rasial, dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan.[45] Masa kecilnya dihabiskan di Thembu, kemudian memulai karir di bidang hukum. Dalam kancah politik, ia ikut *African National Congress* (ANC) pada 1942. Karena kegiatannya yang anti-*apartheid*, ia menjalani berbagai hukuman. Pada 5 Agustus 1962, ia ditangkap di Johannesburg Fort. Pada 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan pada 12

44 Wikipedia.org

45 *Apartheid* (arti dari bahasa Afrikaans: *apart* memisah, *heid* sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Hukum *apartheid* dicanangkan pertama kali di Afrika Selatan, yang pada tahun 1930-an dikuasai oleh dua bangsa kulit putih, koloni Inggris di Cape Town dan Namibia dan para *Afrikaner*/*Boer* (Bangsa *Boer* atau *Afrikaner* ialah keturunan bangsa Belanda yang berdiam di Afrika Selatan) yang mencari emas dan keberuntungan di Afrika Selatan bagian timur atau disebut Transvaal (sekarang kota Pretoria dan Johannesburg). Perdana Menteri Hendrik Verwoerd pada tahun 1950-an mulai mencanangkan sistem pemisahan di antara bangsa berkulit hitam, dan bangsa berkulit putih. Frederik Willem de Klerk adalah orang yang mengakhiri masa suram itu, dimana kemudian Negara Republik Afrika Selatan yang demokratis hadir dengan hadirnya Nelson Mandela sebagai pemimpin. Lihat, Wikipedia.org.

JOEVOGEL.NET

Pemberani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan rasa takut itu

- Nelson Mandela

The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.

Juni 1964, ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah menolak pembebasan bersyarat dengan menghentikan perjuangan bersenjata pada 1985, ia tinggal di penjara sampai dibebaskan pada 11 Februari 1990 atas perintah Presiden F.W. de Klerk setelah menerima tekanan internasional. Mandela kemudian menjadi Presiden Republik Afrika Selatan. Mandela dan de Klerk sama-sama mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian 1993.[46]

Apa bisa menderita itu kita artikan sebagai proses yang harus dijalani oleh seorang pemimpin?

Pertanyaan ini filosofis sekali. Yang jelas kehadiran pemimpin butuh proses. Datangnya tidak ujug-ujug. Benar kata Giuliani, Walikota New York saat Peristiwa 9 September 2001, *leadership does not simply happen*. Banyak jalan untuk menjadi dapat muncul sebagai pemimpin, namun yang paling mendasar, catat Giuliani, *people followed him because they believed in him*. Pemimpin mesti punya pengikut yang merasa percaya padanya. Mereka yang butuh dipimpin merasa perlu adanya "orang hebat" memimpin mereka. "*They need to see someone who is stronger than they are, but human too*", catat Giuliani.[47]

Tak seperti masyarakat agraris-tradisional yang mesianistik, masyarakat modern memprakondisikan hadirnya pemimpin secara lebih terukur. Pemimpin tak dapat disikapi seperti menunggu *Ratu Adil*, sosok yang dianggap *mesias* alias juru selamat. Pemimpin harus diciptakan. Karenanya amat

46 Mandela (2008).

47 Giuliani (2002).

INFOKLASIKA.PRINT.KOMPAS.COM

Memimpin itu adalah jalan yang menderita
- Haji Agus Salim

dipahami mengapa organisasi politik memerlukan perkederan untuk memperkuat sumberdaya kepemimpinannya. Tahap menderita itu, tepat untuk dikatakan sebagai tahap paling krusial dan menantang bagi para pemimpin.

Ada banyak pemimpin yang kisah hidupnya tragis seperti yang dialami Benazir Bhutto. Perjuangan butuh keberanian walaupun risikonya kematian ...

Jelas. Pemimpin, terutama pemimpin politik, harus selalu siap dengan kemungkinan yang paling buruk sekalipun. Maksudnya ia harus siap bertaruh nyawa. Sudah banyak kisah tragis yang bisa dijadikan pelajaran bersama. Ada yang lolos dari pembunuhan, ada yang naas. Napoleon Bonaparte misalnya, pernah selamat dari upaya pembunuhan. Ia lolos dari bom yang diletakkan di kereta kudanya. Lenin juga pernah selamat dari usaha pembunuhan. Soekarno juga! Adolf Hitler berkali-kali lolos! Theodore Roosevelt dan Franklin D Roosevelt juga pernah mau dibunuh. Dan masih banyak lagi, termasuk Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Fidel Castro, Charles de Gaule, dan Paus Yohanes Paulus II.

Yang naas juga banyak. Abraham Lincoln dibunuh di gedung teater. John F Kennedy ditembak sniper. Anwar Sadat ditembak di depan parade

militer. Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, dan Rajiv Ghandi tewas terbunuh. Olof Palme dibunuh seusai nonton film. Anna Lindh ditikam secara brutal. Yitzak Rabin tertembak dan tewas. Ramos Horta tertembak dan terluka parah sekali. Anda sendiri telah akrab dengan nama-nama di atas bukan?[48]

Soal keberanian, pemimpin tak takut risiko, termasuk risiko kalah dalam perang?

Ya. Seorang pemimpin sejati tak takut kalah. Persoalannya bukan menang atau kalah secara fisik yang diperlukan. Tapi kemenangan yang lebih besar daripada sekedar keberanian dan keperkasaan fisik itu. Renungkan kata-kata George Eliot: "Keberanian adalah bersedia berjuang untuk satu tujuan, bahkan jika sudah yakin akan kalah. Perhatikan dengan seksama kehidupan, dan Anda akan temukan bahwa ada banyak kemenangan yang lebih buruk daripada kekalahan."[49]

Kita sering mendengar kisah-kisah para pemimpin yang kurang tidur dan merosot berat badannya..

Ambil contoh Abraham Lincoln. Lincoln berjuang untuk melakukan yang terbaik terhadap cobaan-cobaan yang menimpa bangsanya. Tercatat bahwa dia bekerja — seringkali sendirian — lembur setiap malam di Gedung Putih, mencari jalan untuk menyelamatkan hidup kedua belah pihak dalam perang yang berkecamuk dari hari ke hari. Tujuan Lincoln, agar negara itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri di akhir perang. Lincoln menahan derita empat tahun perang yang menyedihkan. Berat badannya yang bertinggi dua meter itu anjlok dari 84 kg menjadi 57 kg. dia bekerja berjam-jam menggarap rencana perang, terutama menyusul kekalahan pada tahun 1861 dan 1862, menemukan cara untuk berhadapan dengan orang yang sulit dan angkuh di sekitarnya, seperti Jenderal George McClellan. Masa-masa depresi menyiksanya.[50] Dari sini dapat kita catat: seorang pemimpin harus punya energi cadangan, energi yang lebih banyak ketimbang orang awam. Cocok pendapat Alexis de Tocqueville: dunia adalah milik mereka yang memiliki energi lebih.[51]

Kita bicara perjuangan, penderitaan, pengorbanan, bukankah itu kepahlawanan?

Ya. Itu semua dapat dirangkum ke dalam kata kepahlawanan. Dalam hal ini, tidak ada definisi tunggal mengenai pahlawan, tetapi secara umum

48 Ballack (2007).

49 Cooper (2007).

50 Cooper (2007).

51 Cooper (2007).

Pahlawanku ialah orang yang mempertaruhkan hidupnya setiap hari untuk melindungi dunia kita dan membuatnya menjadi tempat yang lebih baik

- Sidney Sheldon

My heroes are those who risk their lives every day to protect our world and make it a better place

ia diartikan sebagai orang yang dianggap berjasa bagi kepentingan orang banyak. Pahlawan adalah sosok yang berkorban untuk menyelamatkan nasib orang banyak, tanpa mempedulikan lagi nasibnya sendiri. Gerung berpendapat, kepahlawanan ialah kepemimpinan untuk membuka ruang sejarah seluas akal sehat manusia. Kepahlawanan adalah keberanian berorientasi di medan makna yang produktif bagi perluasan kemanusiaan.[52] Sastrawan Radhar Panca Dahana menyebutnya sebagai pahalawan, sebuah konsepsi personal ke sebuah tingkatan di mana *person* memiliki kemampuan *supra-human* dalam menyelamat humanitas dari ancaman kehancuran. Manusia seperti itu bagai kantong ajaib yang bila dibuka isinya hanya pahala.[53]

Setiap bangsa punya kisah kepahlawanan ...

Tidak hanya setiap bangsa, tetapi setiap komunitas apapun. Di Libya, misalnya ada kisah kepahlwanan Omar Mukhtar.[54] Ia sosok tua renta pengobar perlawanan anti-penjajah, dan sampai ditangkapnya, ia tetap tak mau mengakui kolonialisme Italia atas Libya. Akibatnya, ia harus menerima hukuman gantung. Dalam film karya Moustapha Akkad *Lion on The Desert* (1981), Anthony Quinn memerankan guru mengaji tersebut melawan tentara Mussolini, dengan amat mengesankan. Prinsip dan keberaniannya dikagumi kawan dan lawan.

Kisah seperti itu, kan banyak juga dijumpai di sini ...

Yang gugur di tiang penembakan oleh Belanda misalnya Robert Wolter Monginsidi. Peristiwa itu terjadi di Pacinang, Makassar, 5 September 1949. Pahlawan yang lahir di Malalayang, Manado, 14 Februari 1925 ini, jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Makassar. Di era kolonial kisah-kisah kepahlawanan kita se-*abreg*. Diponegoro misalnya.[55] Setelah dtangkap Diponegoro dan keluarganya diasingkan Belanda, dan wafat jauh dari tempat kelahirannya. Sang pengobar Perang Jawa (*Java Oorlog*) ini, angkat sen-

52 Rocky Gerung, "Ruang Sejarah", *Kompas*, 18 November 2008.

53 Radhar Panca Dahana, "Pahalawan", *Gatra*, Edisi 19 Nvember 2008.

54 Ash-Shallabi (2007).

55 Dalam versi novel, lihat Sylado (2008).

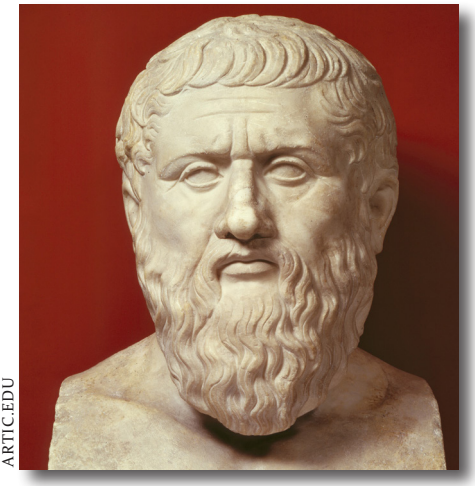

ARTIC.EDU

Seorang pahlawan dilahirkan di antara seratus, orang bijak ditemukan di antara seribu, tapi seorang yang mahir mungkin tidak ditemukan bahkan di antara seratus ribu orang

- Plato

A hero is born among a hundred, a wise man is found among a thousand, but an accomplished one might not be found even among a hundred thousand men.

jata melawan pihak asing yang menjajah tanah kelahirannya. Perang Jawa itu berkobar sepanjang 1825-1830. Menurut catatan Perang Jawa memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga setelah perang ini jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya.[56]

Kisah-kisah pahlawan anti-penjajahan selalu dijumpai di negara-negara yang pernah mengalami penjajahan, bahkan Amerika sekalipun. Banyak tokoh-tokoh anti-penjajah dalam sejarah, dari George Washington hingga Syeh Yusuf (yang diakui sebagai pahlawan dua negara sekaligus: Indonesia dan Afrika Selatan).

Biasanya melekat pada sosok pahlawan, mitos-mitos. Apakah memang pahlawan itu sosok mitologis?

Aspek mitologis itu bisa ditelusuri lewat asal-usul katanya. Pahlawan alias *hero*, berasal dari bahasa Yunani, yang dalam mitologi setempat terkait dengan "pasukan" atau "yang berkorban demi Tuhan atau kebenaran". Selalu ada unsur pengorbanan dan keberanian dalam kepahlawanan. Pahla-

56 Carey (2001:1).

wan adalah pelindung, pembela atau penjaga. Dalam mitologi Dewi Hera (yang menjadi cikal bakal *hero*), adalah "sang penjaga perkawinan" (*the guardian of marriage*).[57] Konsepsi tentang *hero* memang populer dikenal di duna cerita rakyat (*folklore*) dan sastra, yang biasanya dibumbui mitos-mitos. Kepahlawanan, jadinya kerap dibumbui mitologi. Tetapi, sejatinya, kita dapat mengupayakan demitologi atas sosok-sosok pahlawan yang telah kita kenal selama ini.

Demitologi?

Ya, demitologi penting, setidaknya untuk mengingatkan bahwa kepahlawanan itu dapat hadir pada siapa saja. Orang tidak perlu merasa menjadi sosok mitologis untuk jadi pahlawan. Pahlawan tak harus super. Apakah Nelson Mandela adalah sosok yang sakti mandraguna? Justru karena ia "orang biasa", tetapi dengan kesabaran yang luar biasalah, ia jadi pahlawan. Yang jelas ia mampu menunjukkan dan menyadarkan dimensi kemanusiaan yang terdalam yang membuat semua orang terenyuh akan kisah perjuangannya dalam melawan rezim Apartheid di Afrika Selatan.

Pada zaman serba-kompleks ini, dibutuhkan banyak pahlawan di segala medan. Tak perlu menunggu jadi "tokoh besar" baru merasa harus "berbuat". Pahlawan tak perlu pengakuan dan penghargaan formal, walaupun ia diakui dan dihargai. Banyak "pahlawan tanpa tanda jasa". Orang cukup berbuat baik dan mencegah hal-hal yang mencelakakan dan menyelamatkan kehidupan, untuk jadi pahlawan. Kepahlawanan ialah ketanpapamrihan.

Orang biasa bisa jadi pahlawan?

Jelas bisa. Tahukah Anda bahwa Thaib, Suripto, dan Prihatin adalah para pahlawan? Mereka adalah warga Ngangkruk RT 01 RW 02 Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar yang berhasil menggagalkan aksi para pencuri penambat rel (*pen roll*) di petak jalan rel sepanjang 60 meter di Km 101+9/0 antara Stasiun Kaliyoso-Solo Balapan.[58] Dan, tahukah Anda siapa Endang Aripin? Ia pekerja magang Indonesia yang tewas demi menyelamatkan dua remaja putri Jepang yang terseret arus laut pada Agustus 2007.[59]

Bagaimana dengan konteks superhero dalam komik, film, dan media budaya pop lainnya?

Tentu saja superhero yang dimaksud terkait dunia rekaan yang berkembang di ranah budaya populer. Betapapun imajinatif, di situ lazim diselip-

57 Wikipedia.org

58 *Suara Merdeka*, 24 Oktober 2007.

59 *Republika*, 31 Oktober 2008.

kan pesan-pesan kepahlawanan sang superhero. Ada kajian menarik oleh Paul Heru Wibowo dalam bukunya berjudul *Masa Depan Kemanusiaan, Superhero dalam Pop Culture*. Bahwa dalam budaya pop yang berkembang dewasa ini, catat Wibowo,

> ... di satu sisi figur superhero sangat dekat dengan dunia fantasi anak-anak yang penuh dengan imajinasi. Pasalnya, superhero selalu dideskripsikan sebagai manusia yang dapat terbang menembus awan, yang mampu mengangkat sebuah tank hanya dengan satu jari kelingkingnya. Ia selalu datang lebih dahulu daripada rombongan pemadam kebakaran atau satuan polisi untuk menolong seorang bocah dari kobaran api jahanam.[60]

Tapi, superhero dalam dunia pop itu, seringkali juga kontroversial?

Ya, superhero, bahkan ada yang menilai bahwa figur superhero yang digemari anak-anak itu telah mempromosikan kekerasan tanpa henti. Mereka adalah figur-figur yang agresif, sarkastik, dan tidak pernah mengedepankan kemanusiaan. Namun, superhero seringkali dianggap melambangkan sebuah spirit dan gambaran normatif atas manusia modern yang bersifat "*goal-oriented*", sehingga tubuh-tubuh superhero itu telah melampaui segala fungsi biologisnya. Tubuh-tubuh itu bahkan telah bergerak bagai mesin yang dapat dikonstruksi dan diprogram demi tujuan tertentu.[61] Kendatipun demikian, kita harus bisa mengambil sisi positifnya, mengingat bagaimanapun, menurut Wibowo, narasi superhero adalah narasi mengenai manusia. Di dalamnya tercermin sejumlah strategi yang dapat diterapkan untuk lebih memahami kemanusiannya. Strategi ini menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang secara implisit terdapat dalam sejumlah teks populer. Dalam maknanya yang positif, teks-teks populer itu, disadari atau tidak, telah membantu kita untuk merefleksikan diri dan menimbang-nimbang harkat martabat kita sebagai manusia.[62]

Tanggung Jawab

SEBERAPA PENTING tanggung jawab dalam kepemimpinan?

Amat penting, karena inti kepemimpinan itu sering disebut, tanggung jawab. Dalam *The Leadership Secrets of Colin Powell*, Harari mencatat perkataan Powell, "Kepemimpinnan bukanlah pangkat, hak istimewa, jabatan

60 Wibowo (2012:4).

61 Wibowo (2012:5).

62 Wibowo (2012:524).

atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab." Powell menyampaikan beberapa catatan: (1) Memimpin itu sepi, karena keputusan akhir terletak pada pemimpin; (2) Memimpinlah dengan teladan, karena rakyat akan selalu melihat pemimpin mereka, karenanya pemimpin hidup dengan nilai-nilai yang didukungnya; (3) Ketahuilah kapan harus mundur. Kadang-kadang perbuatan mengundurkan diri merupakan tugas terbesar pemimpin. Ketahuilah kapan saatnya hal itu tiba.[63]

Kalimat "memimpin itu sepi" terasa selaras dengan "memimpin itu menderita" ...

Selaras sekali. Keduanya mengedepankan prinsip yang sama: tanggung jawab. Setiap upaya untuk menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan, jalan penderitaan atau jalan kesederhanaan harus dilalui. Pemimpin harus sepi dari segala pamrih pribadi, demi kepentingan bersama yang lebih besar. Itulah pemimpin yang *negarawan*. Tetapi, seorang pemimpin pada praktiknya kerap dihadapkan pada hal-hal yang dilematis. Menurut Powell bertanggung jawab dapat berarti terpaksa mengecewakan orang lain, akibatnya boleh jadi ia harus *kesepian* dan *tidak populer*. Pemimpin yang bijak tidak boleh membuat kebijakan yang semata menyenangkan banyak orang (populis), padahal tidak realistis.

Apakah berarti pemimpin tak butuh popularitas?

Popularitas itu perlu. Itu *manusiawi* saja. Tapi, Powell mengingatkan kepemimpinan tidak dapat dijadikan *kontes kepopuleran*. Pemimpin tidak boleh terbawa pada *jalan mediokritas* yang membuatnya bersikap setengah-setengah. Pemimpin harus prinsipil, punya sikap yang jelas dan konsisten.[64]

Apa pengertian tanggung jawab itu?

Dalam kajiannya tentang etika, Bertens mengulas bahwa,

> Sama seperti banyak bahasa Barat, dalam bahasa Indonesia pun kata yang kita pakai untuk "tanggung jawab" ada kaitannya dengan "jawab". Bertanggung jawab berarti: dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang bertanggung jawab dapat diminta penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja ia bisa menjawab — kalai ia mau — melainkan juga ia harus menjawab. Tanggung jawab berarti bahwa orang tidak boleh mengelak, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Jawaban itu harus diberikan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat luas dan — kalau dia beragama — kepada Tuhan.[65]

63 Harari (2005).

64 Harari (2005).

65 Bertens (2011:135).

ABCNEWS.GO.COM

Catur membantu Anda berkonsentrasi, melatih logika. Ia mengajarkan Anda bermain dengan aturan dan tanggung jawab atas tindakan Anda, bagaimana memecahkan masalah dalam lingkungan yang tidak pasti

- Garry Kasparov

Chess helps you to concentrate, improve your logic. It teaches you to play by the rules and take responsibility for your actions, how to problem solve in an uncertain environment

Para ahli kepemimpinan, konsep tanggung jawab (*responsibility*) lazim dipahami ke dalam dua makna umum: (1) mengacu pada gagasan berperilaku secara moral atau etis. Bahwa untuk mengatakan seorang pemimpin atau pengikut bertanggung jawab, berarti ia melakukan tindakan moral atau etis yang benar. Konsep ini lazim juga digunakan konteks tanggung jawab sosial organisasi. Hal ini berbeda dengan makna berikutnya yakni (2) bahwa untuk mengatakan seorang pemimpin atau pengikut bertanggung jawab, maka yang dimaksud adalah ia bertanggung jawab atas perilakunya, terlepas dari apakah perilakunya itu benar atau salah. Terkait dengan makna yang kedua ini, tanggung jawab mencerminkan adanya: (1) perilaku yang terkontrol atau terkendali; (2) tindakannya bukan merupakan hasil dari keyakinan yang keliru.[66]

Masih terkait tanggung jawab, apa bedanya antara akuntabilitas, responsibilitas, dan komitmen?

Tanggung jawab itu kontekstual. Akuntabilitas, responsibilitas dan komitmen merupakan kontekstualisasi tanggung jawab. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan), *computare*

66 Lihat, kata kunci *Responsibility* dalam Price (2008:141-143).

Ada lima hal yang jika hakim melewatkan salah satu darinya, hal itu akan menjadi noda pada dirinya. Seorang hakim harus cerdas, penuh pertimbangan, bersih, tegas, berpengetahuan dan penyelidik

- Umar bin Abdul Aziz

There are five things which if a judge missed any of them, it will be a blemish on him. A judge should be discerning, deliberate, chaste, resolute, knowledgeable and inquisitive.

(memperhitungkan), *putare* (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas lazim dikaitkan dengan keterbukaan (*openness*), transparansi (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), dan berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*).[67] Akuntabilitas terkait dengan konteks administrasi publik pemerintahan maupun sektor publik non-pemerintahan. Ia terkait dengan tata kelola, di mana setiap aspek pengambilan kebijakan dan implementasinya wajib dijelaskan/dilaporkan kepada publik, bahwa memang tak ada penyalahgunaan wewenang dan yang lain.

Akuntabilitas juga berkonteks pelaporan keuangan: dari mana sumbernya, bagaimana penganggarannya, peruntukannya, mekanisme pelaporannya. Akuntabel berarti administrasinya tertib, wajar dan transparan, harta kekayaan organisasi dapat diaudit sewaktu-waktu. Sementara, responsibilitas, terkait sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan krusial di internal dan eksternal organisasi (tanggung jawab sosial). Komitmen ialah kesetiaan pada prinsip dan universalitas kemanusiaan.

Apakah tanggung jawab itu juga terkait dengan pemisahan harta pribadi dan negara?

Pemimpin yang bertanggung jawab pasti tahu mana urusan negara (publik), mana urusan pribadi (privat), tak dicampur-aduk. Urusan pribadi seyogyanya tidak mendompleng fasilitas negara (satu hal yang mungkin sekali susah pelaksanaannya. Tetapi, kita mungkin sudah lazim mendengar kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz berikut.

> Suatu malam, Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya. Tak dinyana, putranya masuk ruangan dan hendak membericarakan sesuatu.
>
> ”Untuk urusan apa putraku datang ke sini: urusan negarakah atau keluargakah?” tanya Umar.
>
> ”Urusan keluarga, Ayahanda,” jawab si anak.
>
> Tiba-tiba Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya, dan suasana

67 Wikipedia.org

menjadi gelap.

"Kenapa ayah memadamkan lampu itu?" tanya putranya merasa heran.

"Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga," jelas Umar.

Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam.

"Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silakan putraku memulai pembicaraan dengan ayah."

Begitulah perangai pejabat sejati. Ternyata, puncak kejayaan di berbagai bidang tak lantas membuat Umar bin Abdul Aziz terperdaya. Meski prestasinya banyak dipuji, pemimpin berjuluk "khalifah kelima" ini tetap bersahaja, amanah, dan sangat hati-hati mengelola aset negara.[68]

Apakah yang bisa kita petik dari kisah itu? Bukankah itu masuk ranah etika pribadi pemimpin saja?

Tidak semata-mata etika pribadi pemimpin, tetapi ini juga semacam etika publik. Pemimpin harus bisa membedakan mana urusan negara, mana urusan pribadi: tak bisa dicampur-campur. Pelajarannya ialah, pentingnya etika sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri atau diri pribadi, keluarga, masyarakat, negara, kemanusiaan, lingkungan hidup, dan Tuhan. tanggung jawablah yang menjadi pangkal kepemimpinan yang berwibawa.

Bagaimana elaborasi kepemimpinan yang berwibawa itu, refleksinya di zaman kita?

Ada baiknya kita simak pandangan Nurcholish Madjid berikut,

> Kepemimpinan yang berwibawa akan tampil menjadi lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (*sense of direction*) dan kesadaran tujuan (*sense of purpose*) dalam hidup bernegara, dan menjadi dorongan rakyat untuk dengan penuh kerelaan mendukung dan mengambil bagian dalam perjuangan nasional. Dukungan yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan keharusan-keharusan *good governance*, yaitu terbukanya partisipasi umum dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan serta penggunaan kekuasaan; transparansi dalam semua proses itu sehingga tidak terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi, khususnya yang bersangkutan dengan penanganan kekayaan umum milik bangsa dan negara, dan akuntabilitas (*accountability*), yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua proses dan tindakan itu kepada rakyat secara terbuka.[69]

68 Mahbib Khoiron, "Umar bin Abdul Aziz dan Lampu Istana", www.nu.or.id, 19/02/2013.

69 Madjid (2004:119)

Kepribadian, Keteladanan, dan Panutan

APA YANG dimaksud dengan kepribadian?

Kepribadian atau personalitas merupakan konsep yang komprehensif, walaupun apabila menilik asal-usul kata ini terkesan artifisial. Asal-usul kata ini menunjukkan bahwa *personality* didasarkan pada *person* (pribadi) yang semula dikaitkan dengan suatu babak yang dipentaskan di atas panggung. *Person* berasal dari bahasa Latin *persona* yang berarti topeng bagi para aktor. *Persona* itu sendiri dari *per* artinya melalui dan *sonus*, suara. Dengan demikian *personality*, secara etimologis, bermakna sebagai sebuah topeng yang dikenakan oleh seseorang untuk memainkan peran dalam sebuah drama.[70]

Apa bedanya kepribadian dan penampilan?

Kepribadian lebih luas ketimbang penampilan luar (artifisial). Kepribadian lebih otentik dan komprehensif. Penampilan luar bisa diperbaiki dengan pencitraan. Kepribadian tak bisa ditipu. Barangkali ia terkait dengan *inner beauty*. Banyak hal yang dapat kita uraikan tentang "kecantikan dari dalam" ini. Tetapi, secara umum, setidaknya me nenurut Schmalzried, secara konsepsional *inner beauty* dan moralitas berhubungan erat. Karakter dan tindakan moral yang terpuji itulah yang mengemuka dalam *inner beauty*. Dalam kasus tindakan moral, motivasi di belakang mereka adalah penting: sebuah hati yang indah, yang keluar dari cinta dan kasih sayang.[71]

Kepribadian itu konsep komprehensif, maksudnya?

Allport mencatat, *Personality is the dynamic organization within the individual of these psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment*. Sarwono merangkum pendapat Allport bahwa kepribadian: (1) merupakan organisasi yang dinamis, tidak statis, dan bisa berubah sewaktu-waktu; (2) organisasi itu terdapat dalam diri individu, bukan di luar individu; (3) organisasi itu terdiri dari sistem psikis (sifat, bakat dan sebagainya) serta fisik (anggota dan organ-organ tubuh) yang saling terkait; (4) organisasi itu menentukan corak penyesuaian terhadap lingkungannya.[72] Pandangan tersebut sekadar salah satu perspektif dari kajian kepribadian. Friedman dan Schustack mencatat delapan perspektif atau aspek dasar kepribadian.

70 Wikipedia.org

71 Schmalzried (2013).

72 Sarwono (2005:143).

Tabel 10.1.
Delapan Perspektif Kepribadian[73]

PERSPEKTIF	KEKUATAN PENTING
Psikoanalisis	Perhatian pada pengaruh-pengaruh tak sadar
Neo-analisis/Ego	Penekanan pada diri (*self*) yang berjuang untuk mengatasi emosi dan dorongan di dalam diri dan tuntutan orang lain di luar diri.
Biologis	Menitikberatkan pada kecenderungan dan keterbatasan yang berasal dari warisan genetis.
Behaviorisme	Dapat mendorong analisis yang lebih ilmiah mengenai pengalaman belajar yang membentuk kepribadian
Kognitif	Melihat sifat aktif dari pikiran manusia, menggunakan pengetahuan modern dari psikologi kognitif.
Trait	Teknik pemeriksaan sifat-sifat individual yang baik.
Humanisme	Menghargai hakikat spiritual seseorang; menekankan perjuangan untuk mencapai pemenuhan diri dan harga diri.
Interaksionisme	Memahami bahwa kita adalah diri yang berbeda dalam situasi yang berbeda.

Kepribadian itu psikologis banget ya?

Ya, dalam psikologi kan kita mengenal adanya psikologi kepribadian, dan itulah yang mendasari psikologi politik. Kalau dikaitkan dengan ilmu politik, ranahnya, perspektifnya perilaku politik.

Psikologi politik? Mambahas apa sajakah ia?

Sebagaimana dicatat Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston, psikologi politik menyelidiki mengapa orang-orang bertingkah laku dengan cara yang mereka lakukan dalam politik. Psikologi politik merupakan kajian penting dalam ilmu politik dan psikologi, yang memungkinkan kita menjelaskan perilaku politik. Dengan kata lain, psikologi politik menjelaskan manusia sebagai makhluk politik.[74]

Bagaimana konsep makhluk politik versi psikologi politik?

Masih menurut Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston, manusia sebagai makhluk politik direkonstruksikan bahwa dalam diri manusia atau dalam "pusat otak manusia politik" terdapat instrumen-instrumen penting: (1) kepribadian; (2) nilai-nilai, emosi dan identitas; (3) sikap; (4) proses kognitif. Di luar diri manusia ada dua hal yang butuh respons: (1) mereka (*out-*

73 Friedman dan Schustack (2008:8).

74 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:1-12).

TWITTER.COM

Kecantikan itu bukan di wajah; kecantikan adalah cahaya di dalam hati

- Kahlil Gibran

Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart

groups politik); dan (2) kita (*in groups* politik). Saya akan meringkaskannya sebagai berikut:[75]

- **Kepribadian**: Ia merupakan faktor psikologis pokok yang mempengaruhi perilaku politik. Kepribadian adalah unik bagi individu. Dalam kajian psikologi, kepribadian berdifinisi beragam. Dalam kajian psikologi politik, kepribadian difokuskan pada konteks prilaku politik. Ada tiga pendekatan dalam hal ini: (1) psikoanalisis; (2) teori-teori yang berbasis sifat; dan (3) teori-teori yang berbasis motivasi.
  - **Psikoanalisis** dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menyoroti peran ketidaksadaran perilaku manusia, demikian pun motif-motif dan dorongan-dorongan yang mendasari perilaku tersebut. Ada tiga elemen struktur kepribadian menurut Freud: *id, ego, superego*. *Id* ialah insting yang mengikuti prinsip kesenangan. *Ego* ialah menjembatani antara *id* dengan realitas sosial, *ego* mengikuti suatu prinsip realitas. *Superego* ialah kekuatan moral atau kata hati dari kepribadian.

    Jadi, jika Anda berinteraksi dengan seorang individu yang tak Anda sukai, *id* mungkin mengilhami Anda untuk marah dan menyerangnya, namun *ego* mencegah Anda, karena pertimbangan bahwa secara sosial tindakan demikian tidak tepat. Sementara *superego* mengatakan kepada Anda untuk bersikap baik kepada semua orang dan memaafkan mereka atas perilaku buruknya.

75 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:11, 21-35).

Tetapi ketika ego merasa terancam, maka orang akan merasakan kecemasan: apakah kecemasan realistik ataukah *neurotik*. Kecemasan *neurotik* ialah cemas akan mendapat hukuman ketika orang melakukan sesuatu yang diinginkan *id*. Jenis kecemasan lainnya ialah kecemasan moral, ketika terjadi konflik antara *id* dan *superego*.

Dalam psikoanalisis ada konsep mekanisme pertahanan yakni teknik-teknik tidak disadari yang digunakan untuk mendistorsi realitas dan mencegah kecemasan, yang mencakup: represi, proyeksi, rasionalisasi, dan penyangkalan.

Adopsi psikoanalisis ke dalam psikologi politik ialah dengan pendekatan **psikobiografi** yang mempersyaratkan pemeriksaan terhadap sejarah kehidupan individu.

- **Teori sifat**. Allport membagi sifat-sifat manusia dalam perspektif keprbadian ke dalam tiga kategori: (1) sifat utama (*cardinal traits*); (2) sifat tengah (*central traits*); dan (3) sifat sekunder (*secondary traits*). Sifat utama sangat penting, tetapi langka, dan kebanyakan orang sedikit saja yang punya sifat utama, bahkan tak memilikinya. Sifat tengah ialah yang mempengaruhi oramg secara rutin, namun tidak dalam setiap situasi. Sementara sifat sekunder yang kurang penting dan paling tidak teratur dalam mempengaruhi perilaku.

  Eysenck mengidentifikasi tiga dimensi sifat kepribadian: (1) introver-ekstrover menyangkut seberapa ramah dan percaya diri (*ongoing*) seseorang; (2) *neuroticism* mengacu pada seberapa stabil emosi seseorang; (3) *psychoticism* mengacu seberapa orang terisolasi dan sensitif terhadap orang lain.

  Pun perlu dikenali dimensi sifat kepribadian Lima Besar (*Big Five*) yang dikembangkan Costa dan Mc Crae: *neuroticism*, *extroversion*, *agreeableness* (keramahan), *openness* (keterbukaan), dan *consientiousness* (kehati-hatian)
- Teori motif. Ini terkait dengan motif-motif individu. Kajiannya banyak dan kaya. Tak jauh dari uraian yang saya ringkas dalam kata kunci motivasi di Bab buku saya ini.

Bagaimana dengan nilai-nilai, emosi dan identitas?

Nilai-nilai menyangkut panduan, apa yang benar apa yang salah, di mana ia memiliki makna mendalam tentang siapakah seseorang (identitas). Nilai-nilai seringkali mencakup suatu komponen emosi yang kuat, menjadi keyakinan dan prinsip politik.[76] Dalam konteks ini, emosi bebas bergerak dari tataran nilai-nilai dan identitas berinteraksi dengan kognisi.[77]

76 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:14).

77 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:15).

Tugas utama manusia dalam hidup ialah untuk melahirkan dirinya ... Hasil yang paling penting dari usahanya ialah kepribadiannya sendiri

- Erich Fromm

Man's main task in life is to give birth to himself ..
The most important product of his effort is his own personality.

Dalam hal identitas, kita juga mempertimbangkan respons individu terhadap kelompoknya: kita dan mereka. Identitas sosial berasal dari keanggotaan kelompok-kelompok sosial (kewarganegaraan/kebangsaan, ras, gender, etnisitas, pekerjaan dan sebagainya). Penciptaan identitas sosial demikian banyak menghasilkan predisposisi perilaku yang penting untuk dicermati, termasuk penempatan stereotip, diskriminasi dan etnosentrisme. Kelompok-kelompok identitas itu menuntut loyalitas, penyesuaian (*compliance*), serta ketaatan (*obedience*), di mana faktor-faktor psikologis tersebut seringkali lebih penting ketimbang nilai-nilai. Contohnya, tindakan genosida satu kelompok identitas terhadap yang lain, menjelaskan perilaku mereka dalam konteks ketaatan terhadap norma kelompoknya.[78]

Bagaimana dengan sikap?

Sikap, secara umum dimaknai sebagai unit-unit pemikiran yang terdiri dari komponen kognitif tertentu (pengetahuan) dan suatu respons emosi tentangnya (suka, tidak suka, dan lain-lain). Sikap (politik) menyangkut apa yang seseorang pikirkan dan rasakan terhadap suatu isu dan dapat mengartikulasikan suatu jawaban. Sikap mungkin bisa berubah setelah memperoleh informasi-informasi baru, perubahan-perubahan pada perasaan, atau persuasi.[79]

Lantas, bagaimana dengan proses kognitif?

Proses kognitif menyangkut penerimaan dan penginterpretasian informasi dari luar diri. Laiknya komputer, proses ini memfasilitasi kemampuan individu untuk memproses informasi sedemikian rupa, menginterpretasikan lingkungannya, dan memutuskan bagaimana cara bertindak terhadapnya. Dengan kata lain, proses kognitif membantu kita memahami suatu lingkungan yang terlalu kompleks untuk diinterpretasikan oleh individu manapun.[80]

Baik, sangat menarik. Dalam hal kepribadian ini, bisakah

78 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:16).

79 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:14).

80 Cottam, Dierz-Uhler, Mastors dan Preston (2012:14).

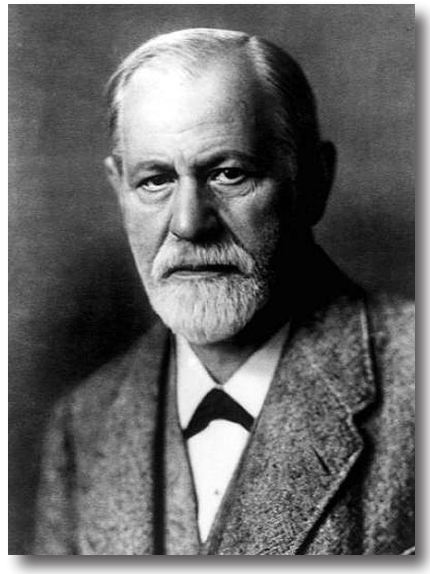

CHMC-DUBAI.COM

Manusia lebih bermoral daripada yang mereka pikirkan dan jauh lebih tak bermoral daripada yang dapat mereka bayangkan

- Sigmund Freud

Men are more moral than they think and far more immoral than they can imagine.

dicontohkan, kaitannya dengan karir politik seseorang?

Bila seorang politisi punya *kepribadian yang baik*, maka berarti ia punya legitimasi moral yang kuat. Pemimpin yang mengabaikan dimensi moral, cepat atau lambat akan jatuh. Sudah banyak contoh politisi yang ambruk karena isu moral, dimana masyarakat mempersepsikan kepribadian politisi tersebut buruk, sehingga tak pantas lagi menjadi pemimpin mereka. Gagalnya Senator Garry Hart dalam kandidasi presiden AS akhir 1980-an, merupakan contoh kecil. Untuk menyegarkan kisah itu simak kembali catatan kecil majalah *Time* berikut:

> *It was in April of 1987 that former Senator Gary Hart announced the beginning of his second presidential campaign. Less than a month later, the Miami Herald published a photo of a young woman leaving Hart's residence. The candidate expressed outrage at the paper, but within a week the Herald received tips that Hart had visited Bimini with a woman who was not his wife, then published photos showing a 29-year-old model, Donna Rice, sitting on Hart's lap. Less than a week later, Hart announced he was dropping out of the race (he would later reenter,*

CURVESALUSCIOUS.WORDPRESS.COM

Aku tak ingin jadi supermodel; Aku ingin jadi panutan

- Queen Latifah

I don't want to be a supermodel; I want to be a role model.

unsuccessfully).[81]

Gara-gara sebuah foto mesra dengan seorang model, yang pasti bukan istrinya, bernama Donna Rice, Senator Hart rontok karir politiknya, dan itu terjadi di negara sebebas AS. Skandal seks juga membuat Eliot Spitzer harus mundur dari jabatannya sebagai Gubernur New York pada Maret 2008. Spitzer diketahui mengeluarkan sejumlah uang yang digunakan untuk membawa seorang pelacur dari New York ke Washington dan berkencan empat jam di sebuah hotel pada 13 Februari 2008. Reputasinya segera jatuh.[82]

Kelihatannya, kepribadian yang paripurna, sebanding keteladanan yang sempurna pula: panutan. Nah, seberapa penting keteladanan bagi seorang pemimpin?

Keteladanan membuat para anak-buah mengambil dan menirukan hal-hal positif yang dilakukan pemimpinnya. Keteladanan identik dengan kepribadian yang utama. Dalam khasanah Islam, kita mengenal istilah *uswatun hasanah*, teladan yang baik yang dilekatkan pada sosok Nabi Muhammad SAW — sosok yang sangat dipercaya karena integritas moral dan kejujurannya. Ulama tafsir mengaitkan turunnya ayat *uswatun hasanah*,[83]

81 Time.com

82 Lacak judul-judul berita berikut: "Skandal Seks, Spitzer Lepas Kursi Gubernur"; "Kencan Lewat *Emperors* Sejam Rp 53 Juta", di Kompas.com

83 "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu *uswatun hasanah* (suri teladan yang

dengan peristiwa Perang *Khandaq* atau Perang Parit yang sangat berat dihadapi kaum Muslimin yang terjadi bulan Syawal 5 H/627. Merujuk Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah SAW, baik dalam hal kesabaran, keteguhan, *ribath* (terikat dengan tugas, komitmen), dan kesungguh-sungguhannya. Sementara HAMKA dalam *Tafsir Al Azhar* menjelaskan bahwa pada "saat-saat yang sangat mendebarkan hati itu, contoh teladan yang patut ditiru, tidak ada lain, melainkan Rasulullah SAW sendiri ... masih ada .. orang-orang yang mempunyai pendirian tetap, yang tidak putus harapan, tidak kehilangan akal. Sebab mereka melihat sikap dan tingkah laku pemimpin besar mereka sendiri, Rasulullah SAW."[84] Dari situ tampak bahwa konteksnya, pemimpin ialah motivator utama, pembangkit semangat bagi yang dipimpin, dengan memberikan contoh langsung dari dirinya sendiri.

Jadi keteladanan itu sikap yang konsisten atau sabar, dan ini masuk ke ranah etika seorang pemimpin?

Saya setuju. Keteladanan adalah dekatnya kata dan perbuatan, seperti hakikat perjuangan dalam puisi W.S. Rendra, "pelaksanaan kata-kata". Semakin jauh yang dikatakan dengan yang diperbuat, semakin rendah keteladanan. Tentu menjadi teladan itu tidak mudah, tetapi pemimpin tetap harus punya kesadaran dan disiplin kepemimpinan. Aspek keteladanan juga sangat berkaitan dengan aspek moralitas-asketik. Asketisme merupakan istilah spiritual yang mengajak mempertimbangkan dimensi pasca-duniawi. Pertimbangan itu penting mengingat, kepemimpinan memerlukan basis etika dan moral. Pemimpin tidak saja harus taat hukum semata-mata, tetapi juga seharusnya mengedepankan dimensi etis. Etika muncul karena keyakinan, kesadaran tanggung jawab. Secara operasional Kouzes dan Posner menawarkan lima tahap keteladanan pemimpin: (1) Mencontohkan cara; (2) Menginspirasikan visi bersama; (3) Menantang proses: (4) Memungkinkan orang lain bertindak; dan (5) Menyemangati jiwa.[85]

Bagaimana uraiannya?

Asumsinya orang lebih dulu mengikuti perilaku, baru rencananya. Maka diperlukan contoh dan pemahaman visi. Pemimpin ingin sesuatu terjadi dengan mengubah cara-cara lama untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pemimpin tak dapat memerintahkan komitmen, ia hanya dapat menginspi-

baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzaab: 21)

84 http://www.risalahislam.com/2014/01/teladan-rasulullah-saw-tafsir-qs-al.html (diakses, 15 Desember 2015).

85 Kouzes dan Posner (2006a); Kouzes dan Posner (2006b).

rasikannya. Pemimpin selalu menghadapi tantangan kompleks, tetapi tetap harus bisa melakukan perubahan. Tak seorang pun pemimpin dapat mengklaim capaian terbaik kalau keadaan tetap sama seperti sebelumnya.

Pemimpin yang menantang setiap proses adalah pioner yang bersedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui (tidak pasti), mencari peluang inovasi, dan melakukan perbaikan. Pemimpin memungkinkan orang lain bertindak, dan sadar akan pentingnya kerja tim. Keberhasilan terletak pada bagimana kemampuan mendayagunakan timnya untuk mencapai kesuksesan, sesuai visi bersama. Pemimpin mampu mengubah para pengikut menjadi pemimpin pula. Pemimpin harus pula menyemangati jiwa, menjadi motivator yang mengubah pesimisme menjadi optimisme. Kepribadian, keteladanan dan panutan inilah sesungguhnya hal-hal yang apabila diringkas menyembul dalam satu kata: integritas.

Inisiatif, Inovasi, dan Risiko

SEBARAPA PENTINGKAH inisiatif bagi pemimpin?

Penting dan mendasar. Tanpa inisiatif, kepemimpinan tak akan jalan. Menurut Maxwell, inisiatif memungkinkan pemimpin membuat *segalanya* menjadi kenyataan. Maxwell menjelaskan pemimpin sebagai inisiator berarti: (1) tahu apa yang mereka inginkan; (2) mampu mendorong diri sendiri untuk bertindak; (3) berani ambil risiko; (4) membuat lebih banyak kekeliruan.[86]

Apa yang dimaksud yang terakhir itu?

Kabar baik bagi para inisiator adalah mereka membuat segalanya menjadi kenyataan. Kabar buruknya, mereka membuat banyak kekeliruan. Sekalipun para pemimpin yang berinisiatif mengalami lebih banyak kegagalan, mereka tidak merasa terganggu karenanya. Semakin besar potensi keberhasilannya, semakin besar pula potensi gagalnya. Senator Robert Kennedy pernah bilang, hanya mereka yang berani gagal besarlah yang dapat mencapai sukses besar![87] Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, maka Anda harus bersedia mengambil inisiatif dan mengambil risiko (*take a risk*).

Apa bedanya inisiatif dengan tindakan spekulatif?

Inisiatif didasari pertimbangan matang, sistematis, ada skenario-skenario yang dikembangkan sebelum melangkah dan memutuskan kebijakan.

86 Maxwell (2001:103).

87 *Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly*. Branyquotes.com.

Menaruh hati, pikiran, dan jiwa ke dalam bahkan tindakan-tindakan terkecil Anda. Inilah rahasia kesuksesan

- Swami Sivananda

Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.

Kalau tindakan spekulatif, kurang matang dalam pertimbangan. Seperti orang membeli *lotre*. Tindakan spekulatif merupakan tindakan yang tingkat keberhasilan dan kegagalannya tidak dapat diperkirakan secara kalkulatif.

Kalau inovasi?

Inovasi lebih merujuk pada penciptaan sebuah produk, termasuk apakah produk itu sistem atau mekanisme. Di dalam inovasi ada kreatifitas yang mendorongnya. Kreatifitas itulah kata kuncinya. Orang yang inovatif pasti kreatif. Ia punya gagasan dan berani melakukan eksperimen-eksperimen untuk mewujudkannya.

Apabila ditanya tentang apa inovasi, maka sebagian dari kita mungkin akan menjawab "melakukan sesuatu yang baru", atau barangkali "menemukan sesuatu yang baru", atau "membawa sebuah gagasan baru". Jawaban-jawaban itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi menurut Sherwood, inovasi merupakan suatu proses empat tahap: (1) pengajuan gagasan; (2) memilih gagasan yang ingin ditindak-lanjuti (evaluasi gagasan); (3) memperbaiki (mengembangkan) gagasan tersebut; (4) mengupayakan gagasan tersebut sungguh-sungguh terjadi (implementasi).[88] Inovasi membutuhkan evaluasi yang terus-menerus, guna perbaikan-perbaikan.

Dalam bukunya *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Djamaluddin Ancok mengaitkan inovasi dengan ajaran agama sebagai cikal bakalnya. Bahwa dalam setiap agama, setiap manusia diminta berinovasi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ia mengutip hadits Nabi Muhammad SAW, "Kalau hari ini sama dengan kemarin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, kamu adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah kamu." Ancok meringkas adanya delapan jenis inovasi: (1) inovasi proses; (2) inovasi metode; (3) inovasi struktur organisasi; (4) inovasi dalam hubungan/interaksi; (5) inovasi strategi; (6) inovasi *mindset* (pola pikir); (7) inovasi produk; dan (8) inovasi pelayanan.[89]

88 Sherwood (2002).

89 Ancok (2012:34-41).

Kalau begitu, inovasi itu semacam proses kreatif?

Ya, seorang pemimpin itu seperti penulis. Setiap karya, bahkan karya *masterpiece*, membutuhkan proses kreatif yang bertumpu pada pengembangan gagasan. Tanpa gagasan, pemenang hadiah Nobel Sastra pun tidak bisa mengarang. Proses kreatif seseorang dalam menyusun gagasan-gagasan menjadi satu karya utuh, ibarat menata *puzzle*. Persis apa yang dinasihatkan John Adair, "Anda tidak harus melahirkan ide-ide baru dari udara." Tugas Anda sebagai pemikir kreatif adalah menggabungkan ide-ide atau unsur-unsur yang sudah ada. Jika hasilnya adalah sebuah kombinasi ide-ide yang tadinya terasa mustahil tetapi bernilai, maka Anda akan dipandang sebagai seorang pemikir kreatif.[90] Jadi kreativitas tidak dimulai dari nol, tetapi dari yang sudah ada. Ada referensinya. Pemimpin pembelajar selalu pandai mengambil pelajaran atas pengalaman para pendahulu.

Dalam proses berpikir atau proses kreatif, Gardner memetakan lima jenis pikiran yang layak dimiliki oleh pemimpin, masing-masing: (1) pikiran terdisiplin (*disciplined mind*); (2) pikiran mensitesis (*synthesizing mind*); (3) pikiran mencipta (*creating mind*); (4) pikiran merespek (*respectful mind*), dan (5) pikiran etis (*ethical mind*).[91]

Pikiran terdisiplin menegaskan penguasaan cara berpikir yang mencirikan disiplin ilmu atau ketrampilan tertentu. Pikiran mensintesis, mengambil informasi dari berbagai sumber, memahami dan mengevaluasinya secara obyektif, menyatukannya secara masuk akal. Pikiran mencipta, memanfaatkan disiplin dan sintesis untuk menghasilkan ide-ide dan hal-hal baru. Pikiran merespek, memperhatikan dan menyambut berbagai perbedaan di antara individu dan kelompok manusia, berupaya memahami dan berupaya bekerja secara efektif bersama mereka. Dan pikiran etis, mengajak bekerja tanpa mementingkan diri, guna meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kalau begitu, pemimpin tak boleh pendek pikir ...

Pendek pikir itu bahasa Jawanya *cupet pikire*. Selain berisiko menghadirkan keputusan yang salah, pendek pikir, hanya akan memunculkan masalah baru yang lebih rumit. Orang yang pendek pikir itu fatal. Pemimpin harus berpikir panjang, berpikir menyintesis, menyipta, dan etis, alias berpikir komprehensif. Pemimpin bukan, apa yang diistilahkan Herbert Mercuse *one dimension man*.[92]

Pemikir inovatif tidak pernah pendek pikir. Akan halnya Tembok Rak-

90 Adair (2008:7).

91 Gardner (2007).

92 Mercuse (1964).

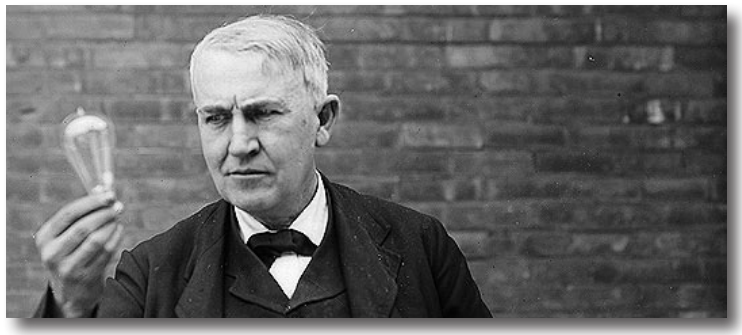

PREZI.COM

Aku tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa sengaja, demikian juga tidak ada penemuanku datang secara kebetulan; semua datang dengan kerja

- Thomas Alva Edison

I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident; they came by work.

sasa di China, dari mana gagasan itu muncul? Bagaimana gagasan Borobudur terbentuk dan mewujud? Bagaimana pula dengan piramid-piramid di Mesir? Mengapa Taj Mahal berdiri megah? Bagaimana sampai ada Terusan Suez dan Panama? Mengapa pula *United Nation* diciptakan? Semuanya tak lepas dari proses, termasuk proses berpikir. Dalam banyak kasus, seorang pemimpin berpikir menerobos, dengan menciptakan sesuatu yang berdampak positif bagi rakyatnya yang sedang terjepit dalam penderitaan dan rasa frustasi. Presiden Franklin Delano Roosevelt menciptakan program *New Deal*, sebagai inovasi mencengangkan, yang membuat ekonomi AS yang terpuruk akibat *malaise* bangkit kembali.

Dalam hal yang terakhir itu, inovasi sedemikian penting dalam strategi?

Pemikiran inovatif memang bagian dari berpikir strategis. Ada yang membaginya dua jenis : (1) inovasi radikal, dramatis dan cepat dalam proses perubahan atau *lompatan besar*; dan (2) bertahap, alias perlahan-lahan.[93] Tentu ini mengingatkan kita pada *revolusi* dan *evolusi*. Yang satu inginnya cepat, drastis, satunya pelan-pelan, bertahap.

Lantas, apa sesungguhnya tujuan inovasi bagi suatu organisasi, dalam hal ini organisasi politik?

Merujuk hal di atas, saya mengembangkan beberapa catatan: (1) inovasi dilakukan untuk menciptakan *produk baru*. Anda bisa membayangkan apa

93 Sun (2013:14).

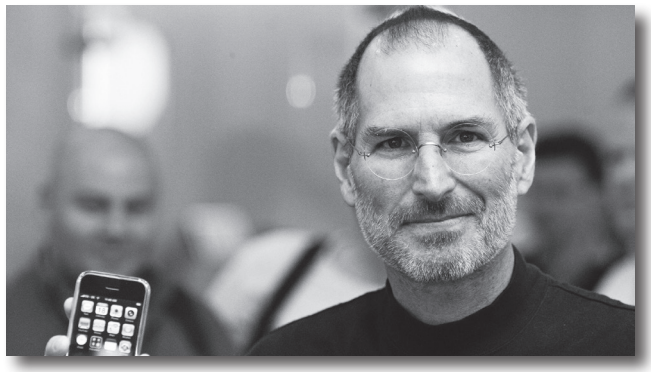

NEWSPAPERDESIGN.IN

Inovasi membedakan pemimpin dan pengikut

- Steve Jobs

Innovation distinguishes between a leader and a follower

produk baru dalam politik itu: apakah kebijakan mendasar ataukah sekadar artifisial, semacam logo, slogan, jargon, atau apapun yang membedakannya dengan *produk lama*. Saya sering menulis artikel mengulas tentang perkembangan partai politik tertentu dengan judul "Apa yang Menarik dari Partai A Sekarang?" Judul seperti itu setidaknya mencerminkan apakah ada inovasi baru dalam partai itu, ataukah justru semakin tekor inovasi dan kreativitas? Pertanyaan "apa yang menarik", dalam konteks ini lebih merujuk pada, apa yang baru?

Selanjutnya (2) inovasi untuk menyempurnakan *produk lama*. Inovasi, dalam konteks ini, tak menegasikan *produk lama*, tetapi mengemas ulang sedemikian rupa sehingga otentik kembali dengan menyuntikkan *ruh baru*. Lantas (3) inovasi untuk memenangkan persaingan. Tentu yang dimaksud, persaingan politik. Inovasi politik dalam konteks ini, terkait dengan ikhtiar-ikhtiar mengembangkan strategi-strategi baru, yang barangkali saja sekadar merupakan penajaman dari strategi-strategi lama. Tidak semua persaingan politik dapat dimenangkan secara instan, kendatipun kemenangan secara instan bisa diraih dengan teknik-teknik tertentu: misalnya membeli suara, namun karenanya jalan kecuranganlah yang ditempuh melalui praktik *money politics* yang canggih.

Ada lagi?

Masih, (4) inovasi untuk membuat kemajuan; (5) inovasi untuk mencapai tujuan khusus; dan (6) inovasi untuk mengatasi masalah.[94] Kalau kita dalami hal-hal sedemikian, inovasi identik dengan berpikir dan bertindak strategis, bukan? Itu orientasinya memang organisasi, dalam arti pemimpin

94 Sun (2013:21-25).

yang benar-benar memikirkan kemajuan organisasinya. Tetapi dalam konteks individu, inovasi diarahkan untuk kemajuan kepemimpinan: semakin inovatif semakin bermutu, terlepas dari semakin populer tidaknya.

Apa beda inovasi dengan invensi?

Inovasi terkait dengan proses kreatif. Invensi atau penemuan, konteksnya hasil atau *out put* sebuah inovasi. Dalam kamus para penemu, James Watt dikenal sebagai penemu mesin uap, Thomas Alva Edison memiliki hak paten atas penemuan lampu listrik, maka penemuan-penemuan itu tentu didahului proses inovasi.

Tapi, bagaimana dengan Columbus? Benarkah ia penemu Benua Amerika?

Klaim Christopher Columbus (1451–1506) sebagai penemu Benua Amerika agaknya kontroversial. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika 12 Oktober 1492 di bawah bendera Castilian Spanyol, tetapi ia bukanlah yang pertama tiba di sana. Menurut Menzies, pada 8 Maret 1421, armada laut sangat besar berlayar dari China di bawah komando laksamana Kaisar Zhu Di. Tugas mereka "berlayar hingga ke ujung dunia." Tapi, catatan perjalanan mereka dimusnahkan, sehingga musnah pula pengetahuan tentang China yang telah mengelilingi dunia seabad sebelum Magellan, sampai di Amerika tujuh puluh tahun sebelum Columbus, dan tiba ke Australia tiga ratus lima puluh tahun sebelum Cook.[95]

Bagaimana dengan risiko?

Risiko itu terkait dengan hal-hal yang mengkhawatirkan. Bahwa manusia dihadapkan pada hal-hal yang dianggapnya mengkhawatirkan, itu wajar. Tetapi, bagaimana hal-hal yang dianggap mengkhawatirkan itu disikapi? Saya menemukan buku menarik soal ini: dikarang Gerd Gigerenzer, berjudul *Risk Savvy*. Gigerenzer ialah seorang pakar psikologi. Dari buku ini, kita memperoleh perspektif (baru) yang menarik: orang yang cemas berlebihan atas suatu fenomena, entah itu fenomena alam atau hal-hal yang terkait dengan ketidakpastian ekonomi dan kebijakan pemerintah, atau apapun, ialah mereka yang mudah melakukan hal-hal yang fatalistik atau bertindak bodoh. Padahal, sesungguhnya mereka bukan orang-orang bodoh, melainkan sekadar, apa yang diistilahkan Gigerenzer, *risk illiterate society*, masyarakat buta huruf risiko.[96]

Nah apa pula itu masyarakat buta huruf risiko?

95 Menzies (2006).

96 Gigerenzer (2014:2).

Literate alias melek huruf, dalam pengertian kemampuan seseorang atau masyarakat membaca dan menulis, adalah darah hidup melek informasi warga negara dalam berdemokrasi. Jadi, kata kuncinya ialah informasi. Siapa yang tahu informasi, maka ia akan ambil ancang-ancang lebih awal untuk mengantisipasinya. Siapa yang buta informasi, akan terlindas keadaan. Yang penting dipahami ialah *risk literacy* alias kemelekan risiko. Ini berhubungan dengan kecanggihan teknologi pengumpulan dan pengolahan data, sehingga kita memperoleh informasi terkait dengan hal-hal yang kita anggap mengkhawatirkan. Namun, tidak semua risiko bisa diketahui dan diperkirakan, karena itulah *risk literacy* saja tidak cukup. Dalam konteks inilah, Gigerenzer mengajukan konsep *risk savvy*.

Apa pula itu *risk savvy*?

Sebelum menjelaskan konsepnya, Gigerenzer mengajukan hal-hal berikut: (1) semua orang bisa mempelajari risiko dan ketidakpastian; (2) para ahli (pembaca risiko) lebih sering merupakan bagian dari masalah, ketimbang memecahkan masalah, sehingga apa yang mereka sampaikan seringkali sekadar membingungkan orang banyak; (2) sedikit adalah banyak, masalah kompleks atau ruwet, tidak selalu memerlukan solusi yang kompleks pula; aturan yang sederhana seringkali jadi solusi cerdas terhadap masalah yang kompleks. Dalam konteks ini, *savvy* menyikapi kegawatan (*acute*) secara cerdik (*astute*) dan bijak (*wise*). Karenanya menjadi *risk savvy* tak sekadar melek informasi. Ia memerlukan keberanian menghadapi ketidakpastian masa depan dengan penuh kesiapan dan kekritisan. Ia pemegang kendali emosi di tangannya sendiri dan mampu bertindak sebagai pencerah.[97]

Bagaimana kalau dikaitkan konteks kepemimpinan?

Risiko telah menjadi bagian integral pemimpin. Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan pasti memunculkan sejumlah konsekuensi atau risiko. Pemimpin yang rasional-kalkulatif telah menghitung dampak risiko atas keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya: jangan sampai yang kecil (*sepele*) berkembang besar (*sepolo*) dan menjadi bumerang. Jangan biarkan *kriwikan* (tetesan) dadi *grojogan* (aliran air yang deras). Dampak negatif atas sebuah keputusan harus seminimal mungkin. Jangan justru menambah kesengsaraan rakyat.

Di atas sudah disinggung tanggung jawab, bahwa pemimpin tak perlu takut untuk tidak populer terkait kebijakan yang telah dipertimbangkan secara matang, demi kepentingan yang lebih luas dan berjangka panjang. Pemimpin yang takut risiko, pastilah selalu ragu-ragu dalam pengambilan

97 Gigerenzer (2014:15).

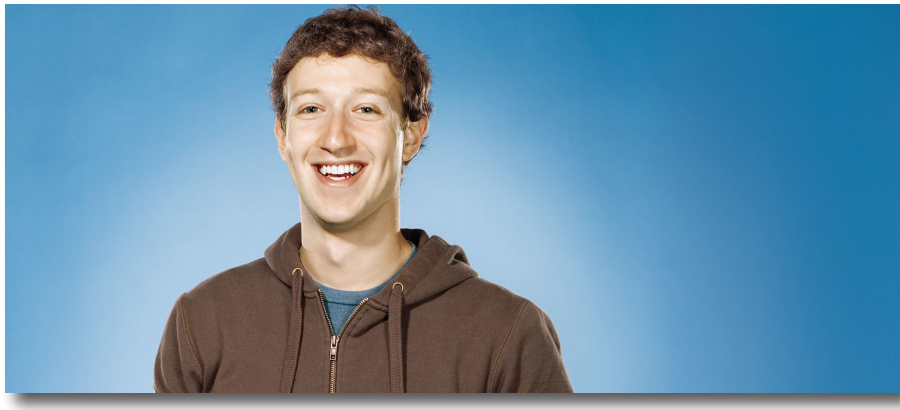

FINANCE.YAHOO.COM

Risiko terbesar ialah tidak ambil resiko apapun ... Dalam dunia yang berubah dengan sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal ialah tidak mengambil risiko

- Mark Zuckerberg

The biggest risk is not taking any risk... In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.

keputusan. Dalam konteks *risk savvy*, pandangan Nurcholish Madjid berikut perlu kita simak,

> Bangsa kita memerlukan suatu jenis kepemimpinan yang nemiliki visi tentang masa depan bangsa, seseorang dengan intuisi kepemimpinan, *savvy* atau *savoir-faire* (kearifan batin, *basirah*). ia juga harus aktif-agresif dalam usahanya melaksanakan visinya itu, meskipun ia harus bertindak cukup pragmatis berdasarkan realita dalam masyarakat dengan segala kemungkinan dan hambatannya.[98]

Jadi, seorang pemimpin itu pengambil risiko (*risk taker*). Apa bedanya dengan spekulator?

Spekulator bekerja berdasar spekulasi. Istilah ini lazim dalam dunia pasar modal dan uang. Berspekulasi itu mengambil risiko besar terhadap masa depan surat-surat berharga yang dimilikinya.[99] Para spekulan bermain bukan tanpa perhitungan. Mereka selalu membaca tren. Atas bacaannya itu, mereka segera memutuskan untuk bertindak: apakah menahan lebih lama atau segera menjual surat-surat berharganya. Tetapi, tindakan spekulasi mengandung unsur berjudi. Ia telah menaruh risiko besar: untuk menang

98 Madjid (2004:118).

99 Investopedia.com.

LONELYPHILOSOPHER.COM

Krishna kepada Arjuna: Moralitas bahkan sangat sulit dipahami

- Mahabharata

Morality is even so difficult of being understood - Krishna to Arjuna.

atau kalah secara telak. Pemimpin politik, seyogyanya tidak boleh berspekulasi yang bisa berakibat fatal bagi rakyat yang dipimpinnya.

Fatal seperti yang dialami Pandawa dalam kisah sekuel Mahabharata "dadu malapetaka"?

Hmm, sedih rasanya, betapa para kstaria Pandawa tengah terjebak perjudian, spekulasi yang berujung fatal, hingga membuat mereka terlunta-lunta. Ringkas ceritanya: sebelum perang Bharatayudha Kerajaan Kuru terbagi dua, Kurawa memerintah Kerajaan Kuru induk beribukota di Hastinapura, sementara Pandawa memerintah Kerajaan Kurujanggala beribukota di Indraprastha. Pihak Kurawa serakah ingin memiliki Kerajaan Kurujanggala. Untuk merebut kekayaan dan Kerajaan Kurujanggala dari tangan Prabu Yudhistira, Duryudana dari pihak Kurawa mengatur siasat jitu. Ia mengundang Yudhistira untuk main dadu dengan taruhan harta dan kerajaan. Duryudana tahu Yudistira sangat gemar bermain dadu.

Kurawa diwakili Sengkuni yang lihai dan curang. Yudhistira pun dikalahkannya, sehingga ia harus menyerahkan istrinya sendiri, Dewi Drupadi sebagai taruhan. Merasa menang, pakaian Drupadi pun ditarik oleh tokoh Kurawa, Dursasana. Namun usaha tersebut tidak berhasil berkat pertolongan gaib dari Sri Khrisna, dengan memanjangkan kain Drupadi. Karena merasa terhina, Bima (saudara Yudhistira) bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya kelak kalau perang besar terjadi.

Mendengar sumpah tersebut, Destarata (ayah Kurawa) merasa malapetaka akan menimpa keturunannya, maka ia pun mengembalikan segala harta Yudhistira yang dijadikan taruhan. Duryudana kecewa dan mengadakan

permainan dadu kedua kalinya. Kali ini, siapa yang kalah harus menyerahkan kerajaan dan mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun, setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun, dan lantas berhak kembali lagi ke kerajaannya. Untuk yang kedua kalinya, Yudhistira mengikuti permainan tersebut, dan kalah: Pandawa pun meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun dan hidup dalam masa penyamaran selama setahun.[100]

Kredibilitas, Integritas, Amanah, dan *Trust*

SEBERAPA PENTING kredibilitas?

Sangat penting dan mendasar. Tanpa kredibilitas, seseorang tak dapat memimpin. Kredibilitas diartikan sebagai kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Istilah kredibilitas terkait dengan kesaksian dalam persidangan. Kredibilitas membuat para juri percaya atas apa yang dikatakan oleh saksi.[101] Namun demikian, kredibilitas juga berlaku di semua bidang, termasuk dalam hal bisnis dan politik. Dalam bisnis, misalnya bagaimana pemasar mampu membangun kepercayaan yang mendalam dari para klien.[102] Sederhananya, menurut *Longman Dictionary of Contemporary English*, *Credibility: (1) the quality of deserving to be believed and trusted damage/undermine somebody's credibility (as something); (2) credibility gap: the difference between what someone says and what they do*.[103]

Bagaimana elaborasinya, kalau dikaitkan dengan konteks kredibilitas personal?

Kalau direfleksikan ke konteks kredibilitas personal (*personal credibility*), menurut Allgeier terdapat tiga rahasia sederhana: (1) penghormatan diperoleh dari apa yang kita lakukan, tidak dari posisi, status, atau kekuasaan; (2) kepercayaan hanya terjadi ketika orang-orang tahu bahwa kita tulus dan transparan; (3) kita berpeluang mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat, ketika kita memilih untuk menangguhkan penilaian (*suspend judgement*) terhadap orang lain, dan menjaga pikiran kita terbuka untuk mempertimbangkan perspektif lain. Jadi, ketika kita memberi dan menerima kepercayaan dan rasa hormat, kita berada di jalan kredibilitas pribadi.[104]

---

100 Santosa (2009:145-160).

101 Wikipedia.org

102 Chambers (2002).

103 http://www.ldoceonline.com/dictionary/credibility (diakses, 15 Desember 2015).

104 Allgeier (2009:39).

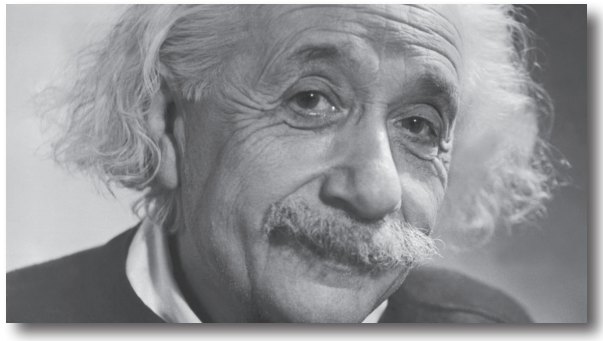

IMGCITY.NET

Siapa pun yang ceroboh dengan kebenaran dalam hal-hal kecil tidak dapat dipercaya dalam hal-hal penting

- Albert Einstein

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.

Kalau integritas?

Dalam bukunya yang berjudul *Integrity*, Stephen L Carter (1997), integritas atau *integrity* itu mirip cuaca: semua orang membicarakannya, tetapi mesti mereka paham dan bisa melakukannya. Carter memandang adanya tiga langkah, apabila kita membicarakan apa itu integritas: (1) memiliki ketajaman atau kecerdasan (*discerning*) dalam membedakan mana yang benar (*right*) dan mana yang salah (*wrong*); (2) melakukan aksi (*acting*) sebagai tindak lanjut dari ketajaman/kecerdasannya itu; (3) mengatakannya secara terbuka (*saying openly*) bahwa apa yang Anda lakukan adalah bersandar pada yang benar, bukan yang salah.[105] Integritas, sebagaimana dicatat Carter, berasal dari bahasa Latin *integer* yang secara sejarah (*historically*) dipahami dengan makna yang serupa, ada konteks atau nuansa keutuhan (*wholeness*), pribadi yang utuh (*a whole person*), pribadi yang tak terbagi (*a person somehow undevided*). Jadi seseorang yang berintegritas ialah, "seseorang yang kita yakini berbuat benar, bermain dalam aturan, dan berkomitmen".[106]

Apa yang dikemukakan Carter tersebut, tak jauh dari uraian yang dikemukakan dalam sebuah situs ensiklopedi, bahwa inetgritas itu, dari bahasa Latin *integra* yang berarti menyeluruh, lengkap (komplit), satu. Seseorang yang memiliki integritas mampu memparalelkan atau mengkonsistensikan antara nilai-nilai, kepercayaan, atau ideologi yang diyakininya dengan apa yang ia katakan dan kerjakan. Integritas terjadi tatkala "pemikiran = per-

105 Carter (1997:7).

106 Carter (1997:7).

Anda bisa menipu semua orang beberapa waktu, dan beberapa orang sepanjang waktu, tetapi Anda tidak bisa menipu semua orang sepanjang waktu

- Abraham Lincoln

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

kataan = perbuatan". Dan itu bisa digambarkan sebagai suatu siklus. Tatkala siklusnya terputus, karena ada satu komponen yang hilang, maka dapat dikatakan *the person is out of integrity*, orang itu tak berintegritas. Tetapi, apabila siklus tersebut berjalan ke dalam satu lingkaran yang dinamis dan konsisten, maka *the person is integral*.[107]

Kesatuan perilaku yang membingkai konsep integritas adalah: kejujuran (*honesty*), ketulusan (*sincerity*), apa adanya (*truthfulness*), satu kata dan alasan (*keeping one's word and agreements*), ketepatan waktu (*punctuality*), etika (*ethics*), kewajaran (*fairness*) dan keadilan (*justice*). Ada satu ungkapan yang khas terkait dengan konsep integritas ini, *It is better to have an enemy who keeps his word, than a friend who does not*.[108] Ada nasihat bijak dari Confucius: para ksatria sejati ialah mereka yang tidak berkhotbah mengenai apa yang mereka lakukan, sampai mereka melakukan apa yang mereka khotbahkan.[109] Jadi, integritas itu perlu bukti nyata, bukan sekadar omongan.

Sering dikatakan pemimpin itu baik atau tidak baik, berdasarkan reputasinya. Apa kaitan antara reputasi dengan kredibilitas dan integritas?

Reputasi yang baik berarti sang pemimpin kredibel dan berintegritas. Pemimpin yang kredibel dan berintegritas, memiliki *trust* yang tinggi. Sebaliknya, *trust* jatuh karena kredibilitas susut dan integritas pemimpin *anjlok* alias sirna. Pemimpin yang otentik mampu menjaga kredibilitas dan integritasnya.

Apakah itu juga bermakna sama dengan "pemimpin itu harus menjalankan amanat atau amanah"?

Substansinya sama. Pemimpin yang amanat adalah pemegang mandat yang dapat dipercaya (*al-amin*). Yang memberi mandat adalah rakyat. Kita camkan, Mahatma Gandhi, "Di antara sikap moral yang paling penting ada-

107 Wikipedia.org

108 Wikipedia.org

109 Brayniquote.com (*The superior man is modest in his speech, but exceeds in his actions.*)

PROSPECTMAGAZINE.CO.UK

Semua kredibilitas, semua hati nurani yang murni, semua bukti kebenaran hanya datang dari indera

- Friedrich Nietzsche

All credibility, all good conscience, all evidence of truth come only from the senses.

lah mempercayai diri sendiri dan membangun keepercayaan dengan orang lain".[110] Pemimpin yang amanah juga merupakan pemimpin yang obyektif dan adil, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kebaikan dan kemajuan bersama serta pantang menyelewengkan wewenang.[111]

Bagaimana dengan konsep *trust*?

Nyaris tanpa beda dengan konsep amanah. Dalam *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, Francis Fukuyama memaknai *trust* sebagai moralitas yang mandasari tingkat saling-kepercayaan dalam masyarakat. Tingkat kesaling-kepercayaan yang rendah disebut *low trust society*. Sementara yang tingkat-kepercayaannya tinggi, *high trust society*. Konsep ini tidak hanya berhenti pada interaksi ekonomi satu sama lain, tetapi juga hubungan sosial yang lebih kompleks. Fukuyama memperkenalkan juga konsep modal sosial alias *social capital* yang tentu saja erat sekali kaitannya dengan konsep *trust* tersebut.[112]

Apa saja catatan penting terkait *trust*?

Mari kita baca Covey dan Merrill dalam *The Speed of Trust*.[113] Buku ini memberi pesan bahwa *trust* itu penting dan mendasar sekali. Buku ini

110 Cooper (2007).

111 Tentang keadilan ini, Al-Qur'an menegaskan: Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa (Q.S. Al-Maidah ayat 8).

112 Fukuyama (1995).

113 Covey dan Merrill (2008).

mengedepankan formula yang disebut *the economic of trust*: *When trust goes down, speed will also down and costs will go up; When trust goes up, speed will also go up and cost will go down*. Tatkala kepercayaan alias *trust anjlok*, maka kecepatan alias respons positif dan konstruktif orang pada kita ikut *anjlok*, akibatnya biaya melambung. Sebaliknya, kalau kepercayaan publik naik, kecepatan respons positif publik melonjak pesat, biaya pun tertekan. Menurut Ralph Waldo Emerson, "*Our distrust is very expensive*".[114] Jadi ada perbandingan lurus antara *trust* dengan efisiensi. Pesan buku ini: tidak ada yang secepat kecepatan *trust*. Ia menyebutkan lima gelombang kepercayaan (*trust*): percaya pada diri sendiri (*self trust*); *relationship trust* (dipercaya orang lain atau relasi relasi kita); baru *stakeholder trust* yang terdiri dari *organizational trust*; *market trust*; dan *social trust*.[115]

Apa yang dimaksud dengan *self trust*?

Self trust itu percaya pada diri sendiri. Kata kuncinya kredibilitas, yang terdiri dari empat unsur, masing-masing integritas (punya komitmen, *stand for something*, terbuka); *intent* (terdiri dari tiga unsur: motif, agenda dan perilaku); kapabilitas dan hasil (*result*) yang berpadu menjadi kompetensi. Perpaduan unsur unsur tersebut, membentuk *track record*, rekam jejak.

Kalau *relationship trust*?

Ini sudah terkait dengan relasi (sosial), dan karenanya tersangkut dengan aspek perilaku. Bahwa perilakulah yang menentukan kepercayaan orang pada kita. Adanya 13 perilaku yang patut dipertimbangkan: (1) bicara secara langsung dan jelas; (2) menampakkan respek; (3) menciptakan transparansi; (4) membenahi kesalahan; (5) menunjukkan loyalitas; (6) mengupayakan hasil yang baik; (7) memberikan yang terbaik; (8) menghadapi kenyataan; (9) memperjelas harapan; (10) akuntabel; mendengarkan lebih dulu; (12) mengedepankan komitmen; (13) memperluas kepercayaan.[116]

Bagaimana dengan *stakeholder trust* yang terdiri *organizational trust*; *market trust*; dan *social trust* ...

Dalam *organizational trust* ada dua kondisi: *a low-trust organization* dan *a high-trust organization*. Organisasi yang *high-trust*, ditandai dengan: (1) adanya informasi tersaji secara terbuka; (2) bahwa kesalahan dipandang sebagai jalan bagi sebuah proses pembelajaran; (3) terdapat kulturnya inovatif dan kreatif; (4) loyalitas tinggi; (5) orang-orangnya saling berbicara secara langsung (*talk straight*), lurus dalam menghadapi isu; (6) terjalin

114 Brayniquotes.com

115 Covey dan Merrill (2008).

116 Covey dan Merrill (2008).

komunikasi dan kerjasama yang baik; (7) orang-orangnya saling berbagi pujian (secara obyektif); (8) Tidak ada "rapat setelah rapat", karena semuanya telah jelas dan semua sadar tugas dan tanggung jawab masing-masing; (9) transparan; (10) orang-orangnya jujur, tulus (*candid*) dan otentik; (11) akuntabilitas tinggi; (12) energi dan vitalitasnya tinggi, dimana orang-orangnya merasa selalu berada dalam momentum yang positif.[117]

Market trust terkait reputasi. Pasar akan percaya kalau reputasi para pelakunya baik. *Societal trust*, kata kuncinya kontribusi: apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat? Kontribusi yang bisa Anda lakukan akan berbalik ke Anda sendiri, seperti sebuah *quantum* ibadah.

Kemampuan, Kapasitas, dan Kompetensi

APA YANG dimaksud dengan kemampuan (*ability*)?

Seseorang dikatakan mampu melakukan sesuatu, apabila orang itu memiliki *basic* dalam memecahkan permasalahan. Katakan sopir. Disebut sopir karena ia mampu mengendarai mobil. Ia punya *basic*, punya lisensi untuk menyopir, dan tentulah ia bisa menyopir dengan baik. Dari logika tersebut dapat dikatakan, seseorang dikatakan mampu menjadi pemimpin, apabila memang memiliki berbagai kualifikasi kepemimpinan. Jadi, *ability* atau kemampuan ini, maknanya masih umum sekali.

Kalau kapasitas (*capacity*)?

Kapasitas juga bermakna kemampuan. Tetapi, ia lebih spesifik. Seseorang dikatakan berkapasitas apabila ia mumpuni dalam penguasaan atas masalah yang ia cermati dan pahami, dan karenanya ia punya kewenangan atau ororitas untuk memberikan keterangan. Misalnya, seorang dokter atau tenaga kesehatan yang sedang menjelaskan dampak butuk kebiasaan tertentu bagi kesehatan. Bahwa sang dokter atau petugas kesehatan itu pastilah punya kapasitas untuk menjelaskan hal-ikhwal dampak butuk kebiasaan tertentu tersebut, dan sekaligus punya otoritas untuk mengatakannya.

Kapasitas dalam birokrasi atau struktur organisasi politik, biasa pula diartikan sebagai kedudukan, kalau bukan kewenangan (otoritas). Dalam hal ini, barangkali semua pegawai birokrasi dan kader partai paham akan masalah tertentu, tetapi yang punya otoritas untuk mengatakannya adalah pemimpinnya, atau setidaknya, orang yang diberi tugas untuk itu. Dalam konteks birokrasi dan partai politik, seseorang bisa dipandang mampu, cer-

117 Covey dan Merrill (2008).

das, berwawasan, tetapi apabila ia tidak punya posisi yang membuatnya punya otoritas alias kewenangan, maka ia (katakan si A) tidak dapat dikatakan punya kapasitas. Kalau kemudian, pegawai birokrasi atau kader partai politik bicara mengatasnamakan institusinya, padahal dia masih punya atasan yang lebih berwenang lagi dalam menjelaskan suatu masalah, maka seseorang akan bertanya, dalam kapasitas apa si A bicara?

Hmmm, tampaknya memang tumpang tindih pemahaman soal kapasitas ini. Orang sering menyamakannya dengan orotitas?

Sebenarnya keduanya sangat berkaitan. Orang yang punya otoritas, mestinya orang yang punya kapasitas pengetahuan dan informasi yang cukup sebagai bagian integral dari kapasitas kepemimpinan secara menyeluruh. Seringkali orang tiba-tiba menjadi "pemimpin", tetapi tekor kapasitas, maka ia harus belajar cepat, perkuat kapasitas. Tumpang tindih juga sering mengemuka pada pejabat politik yang memang apada dirinya melekat hal-hal yang bersifat formal, tetapi juga semi-informal. Misalnya, si A tiba-tiba berkunjung ke tempat kita, dalam kapasitas apa dia? Apakah si A sebagai pejabat pemerintah, ketua partai politik, atau makelar tanah?

Seorang Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR atau pejabat publik yang lain mestinya harus tahu dalam kapasitas apa ia hadir dalam suatu acara: pribadi atau lembaga. Kalau ia menghadiri hajatan pernikahan, tentulah itu urusan pribadi. Seorang Ketua DPR, misalnya, apa ya pantas membawa-bawa sebutan Ketua DPR, ketika menawar barang di pasar. Bisa-bisa ia salah gunakan kapasitas Ketua DPR itu untuk menekan penjual agar harganya dimurahkan.

Jadi kapasitas itu harus berlaku secara proporsional?

Kalau dalam konteks keterangan di atas, jawabnya iya, sebab kalau tidak, malah jadi bahan tertawaan orang. Masyarakat juga seringkali salah kaprah dalam hal ini. Misalnya, tampak pada lelucon yang pernah berkembang di zaman Orde Baru. Saya mencatat kembali dari Emha Ainun Nadjib. Begini ringkasannya: Dalam sebuah bis yang penuh sesak, seseorang diinjak kakinya oleh orang di sebelahnya yang tidak tahu kalau telah menginjak kaki orang sebelahnya. Kemudian orang yang diinjak atau terinjak itu bertanya pada yang menginjak sebagai berikut, "Maaf, apa sampayen tentara?"

Sambil setengah melirik, si penginjak menjawab, "Bukan".

"Atau barangkali *sampeyan* polisi Pak?"

Sambil setengah melotot, si penginjak menjawab, "Bukan".

"Mungkin *sampeyan* punya saudara tentara Pak, barangkali kakaknya

atau adiknya?"

Si penginjak agak mulai jengkel dengan pertanyaan itu, "Tidak ada, kenapa sih?"

"Atau barangkali tetangga *sampeyan* ada yang jadi tentara atau polisi?"

"Tidak ada juga"

Kemudian si terinjak itu tidak sabar lagi, sambil melotot ia teriak dengan lantangnya, sehingga mengagetkan para penumpang lainnya, "Kalau begitu, kenapa *sampeyan* berani menginjak kaki saya? Dalam kapasitas apa *sampeyan* berani menginjak kaki saya?"

Hehe ... Kisah lucu, tapi di mana salah kaprahnya?

Dalam anekdot di atas, saking takutnya orang pada tentara, sebagai sosok yang lazim bertindak kekerasan (atau punya kapasitas untuk "menginjak orang"), maka si terinjak harus *muter-muter* menyelidik, apakah si penginjak tentara atau bukan, polisi atau bukan. Ketika diketahui si penginjak tak punya "kapasitas" untuk diterima injakannya, sang terinjak baru berani teriak sambil melotot. Salah kaprahnya terletak pada pemahaman: mengapa tentara digeneralisasi sebagai sosok yang perlu ditakuti? Bukankah tentara itu lahir dari dan sekaligus pelindung masyarakat? Tetapi mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat masyarakat trauma dengan tentara di masa lalu.

Tetapi kadang masih ada yang sangat melihat derajat seseorang dari pangkat dan jabatannya dalam pemerintahan, kelembagaan negara dan sebagainya ...

Benar. Makanya, kemudian muncullah efek "akibat anaknya bapak". Derajat Anda di muka bumi ini seolah-olah karena kapasitas jabatan bapaknya. Dalam acara-acara yang tidak resmi terkait dengan jabatan pun, pangkat dan jabatan tetap disebut, tak lupa gelar akademis atau gelar apa pun saja. Ini otokritik yang menarik, lagi-lagi dari Emha Ainun Nadjib, bahwa orang lupa bahwa presiden itu tidak punya anak. Jabatan kok punya anak, istri, atau kerabat.

Karenanya, mana yang tepat dari pernyataan-pernyataan ini: (1) Apakah (a) Mbak Tutut panggilan akrab dari Siti Hardijanti Indra Rukmana itu anak Presiden; ataukah (b) anak Haji Muhammad Soeharto?; (2) Apakah (a) Megawati Soekarnoputri adalah anak presiden; ataukah (b) anak Bung Karno? Mestinya kan, Mbak Tutut adalah anak Haji Mohammad Soeharto, karena beliaulah ayah Mbak Tutut dari perkawinannya dengan Ibu Tien (Siti Hartinah Soeharto). Demikian pula, Ibu Megawati Soekarnoputri itu anaknya Soekarno hasil perkawinannya dengan Ibu Fatmawati. Bahwa Pak

Seorang pemimpin yang berkompeten bisa memperoleh layanan yang efisien dari pasukan yang lemah, sementara sebaliknya pemimpin tidak kompeten dapat melemahkan pasukan terbaik

- John J. Pershing

A competent leader can get efficient service from poor troops, while on the contrary an incapable leader can demoralize the best of troops.

Harto atau Bung Karno pernah menjabat sebagai presiden, ya.

Pemahaman ini penting mengingat baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagainya merupakan nama-nama jabatan dan jabatan tidak punya istri, suami, atau anak. Jadi, jangan salah kaprah.

Selain pengertian kapasitas sedemikian, adakah pemahaman lain yang lebih tepat?

Kembali ke konteks kapasitas sebagai kemampuan. Kita kan sering mendengar istilah misalnya *capacity building* alias pengembangan kapasitas. Biasanya, *capacity building* itu tidak saja penting dan perlu untuk para karyawan di perusahaan, tetapi juga bagi para politisi yang kemudian menjadi anggota DPRD/DPR dan sebagainya. Dalam hal ini, pengembangan kapasitas yang dimaksud ialah pengembangan kemampuan seseorang untuk menguasai dan memahami masalah, lantas mampu memutuskan kebijakan yang tepat.

Kalau begitu, apa makna kapasitas kepemimpinan itu?

Tak jauh dari pengertian di atas. Jelas, sebagaimana judul buku ini, kapasitas itu terkait dengan (1) seberapa besar dan mampu, pemimpin menyerap pengetahuan dan/atau wawasan baru yang sebelumnya belum pernah ia tekuni, maka ia harus belajar cepat; (2) orang juga sering mengaitkannya dengan pengalaman: seberapa jauh seseorang memiliki pengalaman kepemimpinan, sekecil apapun pengalamannya itu. Lazim orang bertanya, apakah mantan walikota punya kapasitas untuk menjadi seorang presiden? Pertanyaan demikian, biasanya dikaitkan dengan sempit-luasnya cakupan masalah dan kebijakan di lingkup kotamadya dibandingkan dengan negara; (3) merujuk pada Harris dan Lambert, membangun kapasitas kepemimpinan berarti berbasis luas, terampil dalam *pekerjaan kepemimpinan*. Berbasis luas berarti dia punya dan paham akan basis-basis sumberdaya yang dimilikinya. Sedangkan terampil dalam *pekerjaan kepemimpinan* dikaitkan

Banyak orang meremehkan kemampuannya melakukan perubahan ... Tugas pemimpin ialah membantu menemukan visi potensial mereka

- John Porter

People underestimate their capacity for change ... A leader's job is to help people have vision of their potential.

dengan konteks keterlibatan ragam sumberdaya tersebut bagi kepentingan kepemimpinannya.[118]

Kalau kompetensi itu apa?

Di ranah birokrasi Weberian, kompetensi merupakan kualifikasi-kualifikasi individu dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi mengkombinasikan tingkat pengetahuan dan pengalaman. Orang yang berkompeten ialah yang ahli di bidangnya.[119] Karena itulah, kompetensi dalam politik misalnya, terkait dengan kemampuan pemimpin dalam menggalang dukungan koalisi politik dan pengelolaannya.[120] Tetapi, jauh melampaui hal-hal teknis semacam itu kompetensi kepemimpinan, juga bermakna kemampuan pemimpin merangkum dan menjelaskan masalah terhadap, bahkan, semua bidang yang ada, dan pemecahannya. Ini konsekuensi pemimpin sebagai generalis: ia berlatar belakang bidang tertentu, tetapi dituntut bisa menjelaskan masalah-masalah lintas bidang yang kompleks.

O, jadi orang yang berkompeten itu yang cerdas di bidangnya?

Iya. Cerdas dan mampu. Ada tiga unsur pembentuk senyawa kompeten: pengatahuan, keahlian, dan tindakan. Jenis-jenis kecerdasan yang seyogyanya dimiliki: cerdas intelektual (*intelectual quotient*), cerdas aplikasi, dan cerdas perilaku (*emotional qoutient).* Jadi kalau ada pernyataan: jangan pilih dia, soalnya dia tidak berkompeten, artinya dia tidak memiliki kapasitas pengatahuan yang cukup, pun kemampuan teknikalnya, caranya membawa diri, dan kontrol emosinya. Calon pemimpin harus punya kualifikasi pengetahuan, teknikal dan perilaku syukur-syukur di atas rata-rata.

Orang sering khawatir pada kehadiran pemimpin baru: jangan-jangan dia *incapacity* dan *incompetence*?

Kapasitas dan kompetensi pengertiannya beda-beda tipis. Keduanya

118 Harris dan Lambert (2003:13).

119 Goethals, Sorenson, dan Burns (2004:127)

120 Goethals, Sorenson, dan Burns (2004:207)

sama-sama terkait dengan penguasaan pengetahuan dan wawasan. Tetapi, setidaknya, dari uraian dan argumen saya di atas, kapasitas lebih mencakup pengetahuan dan otoritas, ketimbang kompetensi yang lebih mementingkan penguasaan pegetahuan. Tekor-kapasitas (*incapacity*) itu sudah mencakup hal-hal yang terkait dengan: (1) rendahnya penguasaan masalah, karena keterbatasan pengetahuan; (2) ketidakcakapan dalam memanfaatkan sumberdaya kepemimpinan yang ada, sehingga fungsi kepemimpinan sebagai pemecah masalah (*problem solver*) tidak jalan.

Pengalaman, Wawasan, dan Sikap Terbuka

MENGAPA PROSES kepemimpinan butuh pengalaman?

Karena pengalaman adalah guru yang baik. Waktu saya kecil, saya mencari-cari tahu siapa guru yang bernama Pak atau Bu Pengalaman itu. Saya penasaran seperti apa sosoknya. Ternyata, o tidak, ternyata pengalaman itu bukan nama seseorang! Seseorang telah menjelaskan kepada saya, pengalaman itu apa-apa yang pernah kita alami dalam hidup. Semakin orang banyak mengalami sesuatu, semakin berpengalamanlah ia. Makanya kita harus menghormati orangtua, karena mereka lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan. Tetapi, dalam konteks penguasaan materi tertentu, belum tentu semakin tua usia seseorang semakin berkualitas pengalamannya, terutama apabila ia tidak mengalami pengalaman pendidikan modern yang sistematis; atau tidak pernah pergi ke mana-mana atau bergaul dengan khalayak luas dalam dunia yang terbuka ini.

Mengapa demikian?

Contoh sederhananya, misalnya soal pendidikan. Orangtua kita mungkin pendidikannya jauh lebih minim ketimbang kita. Jadi, dalam pengalaman pendidikan (formal), maka kita jauh lebih berpengalaman bukan? Tetapi, dalam ilmu hidup, tetaplah yang tualah yang lebih banyak makan asam garam.

Kembali ke pemimpin. Bagaimanakah ia dapat dikatakan berpengalaman?

Bisa ditelusuri lewat rekam jejaknya. Istilah kerennya *track record*. Oleh sebab itulah dapat dipahami mengapa orang-orang kritis selalu mengajak pada yang lain agar mau melakukan upaya *tracking* alias penelusuran jejak atas pada calon dalam suatu pemilu. Tujuanya, supaya pemilih memilih pilihannya secara benar. Tidak hanya sekedar memilih kucing dalam karung,

BOOMSBEAT.COM

Sekarang aku lebih tua, aku mengerti kita harus menerima siapa

- Jackie Chan

Now I am older, I understand we have to accept who we are.

tetapi pemilih juga yakin bahwa pilihannya sudah benar atau mendekati apa yang diharapkan.

Bagaimana dengan soal usia dalam politik? Apakah yang tua selalu lebih berpengalaman?

Politik tidak mengenal usia. Yang tua atau yang muda semestinya tidak dipersoalkan. Yang penting yang mengemuka adalah obyektifitas. Kita baca misalnya Kolom Wimar Witoelar,

> Pada usia 69 tahun, Ronald Reagan menjadi presiden AS. Empat tahun kemudian terpilih kembali, dan kalau saja konstitusi mengizinkan orang untuk tiga kali jadi Presiden, dia bisa memegang jabatan empat tahun lagi. Tapi karena dibatasi, maka pemilihan presiden dimenangkan oleh Bill Clinton yang mengalahkan George H. W. Bush Sr. Clinton baru berumur 46 tahun waktu itu, terpilih menjadi Presiden nomor 3 termuda. Seperti Reagan, ia populer sekali dan terhindar dari jabatan ketiga hanya karena batasan tidak boleh lebih dari dua kali. Jadi kesimpulan apa yang bisa diambil mengenai Presiden dan usia orangnya? Tidak ada. Yang tua oke, yang muda oke, yang penting tugasnya dijalankan dengan oke.[121]

Bagi Wimar, pemimpin yang ada sekarang banyak yang sudah tua dan tidak bisa diharapkan, tapi belum tentu pemimpin muda akan lebih baik. Banyak orang muda yang *nggak bener*, tidak punya konsep dan lebih parah lagi tidak punya keberpihakan pada kepentingan umum. Maka, tak jadi soal muda atau tua, kecuali kegunaan seseorang atas fungsi yang akan dijalankannya. Einstein hebat di waktu muda sampai tua juga dia hebat. Pete

121 Wimar Witoelar, "Tua Muda Oke, Yang Penting Presiden Oke", *Seputar Indonesia*, 22 November 2007.

Satu-satunya abnormalitas adalah ketidakmampuan untuk mencintai

- Immanuel Kant

The only abnormality is the incapacity to love.

Sampras petenis hebat papan atas, tapi setelah usia 35 ia tidak bisa lagi memenangkan kejuaraan kelas dunia. Ia sudah terlalu tua untuk main tenis. Tapi bintang golf bisa berusia lebih dari 35, apalagi bintang catur. Setiap pekerjaan ada batas umurnya, tapi kepemimpinan politik tidak ada. Usia pasti berpengaruh, tapi tidak pasti apakah positif atau negatif.

Imam Khomeini di Iran menggerakkan revolusi juga di usia tak muda lagi ...

Ya, ketika Khomeini bertolak dari Perancis ke Iran pada 1979, ia berusia 77 tahun. Tokoh Revolusi Iran ini, lahir di Khomein, Provinsi Markazi, 1902 (meninggal di Tehran, Iran, 1989). Kisah Khomeini termasuk langka: bagaimana orangtua ini menggerakkan suatu revolusi yang banyak mendapat sorotan. Dicatat, revolusi Iran telah mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini Sering disebut pula "revolusi besar ketiga dalam sejarah," setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik.[122]

Ada istilah yang sering kita dengar, gerontokrasi..

Kita simak penjelasan Eep Saefulloh Fatah berikut:

> Kamus-kamus ilmu sosial standar memang memaknai *gerontocracy* ... sebagai masyarakat yang dikendalikan oleh orang-orang berumur. Dalam pengertiannya lebih sempit, *gerontocracy* juga bisa berarti "pemerintahan yang kekuasaannya berpusat pada dan dikendalikan oleh orang-orang tua". Pelaku sistem penguasaan semacam itu kita sebut sebagai *gerontocrac* ... Sementara karakteristik yang dibentuk dan menyipatinya kita sebut *gerontocratic* ...
>
> *Gerontocracy* adalah sebuah relasi sosial. Ia terbangun ketika pengendalian oleh orang-orang berumur bekerja dalam sebuah struktur yang menghadapkannya dengan orang-orang muda yang dikendalikan. Maka dalam *gerontocracy*, orang tua adalah subjek sementara orang muda adalah objek. Yang pertama adalah penikmat sementara yang terakhir adalah korban.[123]

Jadi, kalau boleh disederhanakan, gerontokrasi itu kuasa orangtua terhadap yang muda dalam segenap spektrum, termasuk spektrum politik.

122 Wikipedia.org

123 http://eepsfatah.blogspot.com/2007/10/melawan-gerontokrasi.html

CONTACT.PHOTOSHELTER.COM

Pengorbanan untuk revolusi besar merupakan tanda kemenangan dan kedekatan dengan tujuan

- Imam Khomeini

Sacrifice for a great Revolution is a sign of victory and nearness to the objectives.

Gerontokrasi menafikan obyektifitas dan menancapkan dominasi bahkan hegemoni kekuasaan kaum tua. Jangan harap ada regenerasi dalam sebuah rezim gerontokrat. Tetapi dalam perkembangannya sebagaimana ditulis Eep, dalam konteks Indonesia, *gerontocracy* memperoleh pemaknaan baru yang meluas meliputi (1) penguasaan oleh orang-orang tua, (2) penguasan oleh mereka yang berpikir dan berperilaku seperti orang-orang tua, dan (3) penguasaan oleh mereka yang bekerja di bawah perlindungan dan pengamanan politik dan ekonomi kalangan tua. *Gerontocracy* yang meluas ini yang berbahaya dan harus dilawan. Tetapi tentu sesuai dengan konteksnya, tidak gegabah, dan harus seobyektif mungkin. Para "pemuda yang melawan" harus siap, mampu dan berkualitas. Harus obyektif.

Yang paling berbahaya bukan tua dalam pengertian fisik, tetapi tua dalam "pemikiran dan perilaku", mengingat sebagaimana dicatat Cooper, kita dapat tetap berpikiran cemerlang atau lebih cemerlang pada usia 70, 80, dan bahkan 90 sebagaimana kita pada usia 20 tahun, karena kuatnya minat intelektual dan gaya hidup yang penuh semangat, sehingga tubuh, pikiran dan semangat dapat terus menguak potensi yang tersimpan.[124]

124 Cooper (2007).

Sekarang, kalau soal wawasan?

Wawasan itu mendasar, dan pengalaman adalah guru yang paling baik. Soal wawasan luas yang wajib dimiliki pemimpin, sudah sedikit banyak disinggung di muka. Yang jelas pemimpin harus mau membuka diri dan berikhtiar untuk terus-menerus belajar, menjadi manusia pembelajar, sehingga cakrawala pengetahuannya luas, dan mampu mengamalkan hasil belajarnya dengan baik. Belajar itu tak hanya membaca teks buku, tetapi juga soal jam terbang, sehingga luas wawasannya, berarti pemimpin harus berilmu. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Semakin berilmu semakin paham masalah seperti sedang dibukakan tabir rahasia, dengan ilmu pula "segala persoalan" dapat diselesaikan. Sebuah syair mengungkapkan:

> Berusahalah dan ambillah setiap ilmu
> Karena setiap disiplin ilmu akan mengangkat seseorang.
> Engkau memusuhi sesuatu yang tidak engkau kuasai
> Dan ilmu akan mengokohkan keselamatanmu[125]

Soal wawasan, manusia pembelajar, semua itu mengingatkan pada sosok guru ...

Pemimpin itu juga guru. Daoed JOESOEF berpendapat bahwa,

> Pemimpin sejati adalah seorang "guru". Kualitas ini berkaitan erat dengan pembinaan suatu "organisasi pembelajaran", *learning organization*, yang melalui gerakannya membantu rakyat memahami realitas sebagai medium penciptaan, bukan sebagai sumber pembatasan. Pemimpin selaku "guru" bukan berarti "mengajar" rakyat bagaimana mereka memiliki visi, tetapi mendorong setiap warga untuk belajar.
>
> Belajar demi menyadari bahwa hidup yang betul-betul human tidak terbatas pada pangan, sandang, papan, dan ketergolongan (*belonging*). Organisasi tradisional kita memang didesain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Pemimpin berkualitas guru harus bisa mengarahkan kepemimpinannya ke kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu *self-respect* dan *self-actualization*.[126]

Wawasan membutuhkan sikap terbuka, Anda setuju?

Pasti setuju. Kalau kita menutup diri dari apa-apa, maka kita tidak akan tau apa-apa, dan akhirnya, tidak bisa berbuat apa-apa pula. Logikanya *kan* begitu? Sudah banyak penjelasan dalam buku ini yang menegaskan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan. Syarat untuk menguasai ilmu pe-

125 Al Mawardi (2008:49).

126 JOESOEF (2011:43).

ngetahuan: belajar. Belajar berarti membuka diri. *Open minded*. Mentalitas "katak dalam tempurung" harus ditinggalkan. Pemimpin harus terus bergulat dalam ide-ide kemajuan (*the idea of progress*).

Idea of progress ini kan bagian integral dari wacana modernisasi 1960-an-1970-an, apa masih relevan?

Masih. Anda jangan terjebak pada generalisasi bahwa modernisasi telah gagal, modernisasi merupakan bagian integral dari pembangunanisme (*developmentalism*) yang justru menyingkirkan pembangunan harkat dan martabat manusia. Ya, memang modernisasi dalam praktiknya di negara-negara berkembang, tak lepas dari kritiknya. Yang paling keras terutama adalah kritik dari perspektif teori ketergantungan.

Apabila kita maksudnya, *the idea of progress* merujuk pada gagasan bahwa kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan organisasi sosial dapat menghasilkan perbaikan kondisi manusia. Artinya, orang bisa menjadi lebih baik dalam hal kualitas hidup (kemajuan sosial) melalui pengembangan ekonomi (modernisasi), dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (kemajuan ilmiah).[127] Merujuk pemahaman ini *the idea of progress* itu, tentu masih sangat penting. Kita memang harus belajar dari pengalaman, kita ambil konsep *idea of progress* itu tentu tidak dalam bingkai menafikan apa yang digagas oleh Soedjatmoko, misalnya, sebagai "dimensi manusia dalam pembangunan".[128] Nurcholish Madjid menambahkan bahwa,

> *Idea of progress* bertitik tolak dari konsepsi atau doktrin, bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, suci dan cinta kepada kebenaran dan kemajuan (manusia diciptakan Allah dalam *fitrah* dan berwatak *hanif*). Oleh sebab itu, salah satu manifestasi adanya *idea of progress* ialah kepercayaan akan masa depan manusia dalam perjalanan sejarahnya. Maka tidak perlu lagi khawatir akan perubahan-perubahan yang selalu terjadi pada tata-nilai duniawi manusia. Sebetulnya, sikap reaksioner dan tertutup terbit dari rasa pesimistis terhadap sejarah. Oleh karena itu, konsistensi *idea of progress* ialah sikap mental yang terbuka, berupa kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai (duniawi) dari mana saja, asalkan mengandung kebenaran.[129]

Dalam konteks kepemimpinan, bagaimana mungkin kita menolak *the idea of progress* itu? Bukankah tidak ada pemimpin yang menyetujui gagasan kemunduran, sebab ia pasti ingin organisasi yang dipimpinnya maju?

127 Wikipedia.org

128 Soedjatmoko (1983).

129 Madjid (2008:234)

WIKIPEDIA.ORG

Tidak ada yang begitu mengerikan seperti kegiatan tanpa wawasan

- Johann Wolfgang von Goethe

There is nothing so terrible as activity without insight.

Bahasa, Intelektualitas, Emosionalitas, dan Spiritualitas

APAKAH PEMIMPIN butuh intelektualitas?

Tidak hanya butuh, tetapi wajib. Kecerdasan intelektual sangat membantu para pemimpin di dalam proses pengambilan keputusan secara logis-rasional-kalkulatif. Adakalanya intelektualitas tercermin dari pilihan *bahasa politik* yang dipakai oleh para elite politik. Perkembangan teknologi, tingkat pendidikan, kesadaran politik masyarakat, serta tren budaya pop yang masuk ke ranah politik, turut membentuk tren bahasa politik kita sekarang. Itulah mengapa, apabila dibandingkan dengan *bahasa politik* era 1950-an, bahasa politik kita sekarang terkesan kurang intelek.[130]

Dulu, katakan pada dekade 1950-an, intelektualitas pemimpin antara lain tercermin dari cara mengkritik rezim berkuasa. Sjahrir misalnya pernah mengkritik keras kebijakan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno melalui risalah *Perjuangan Kita*.[131] Sementara Mohammad Hatta menulis artikel serius di majalah *Pandji Masjarakat* berjudul "Demokrasi Kita".[132] Dari situ publik menjadi tahu kritik-kritik dan argumentasi-argumentasi Sjahrir dan Hatta yang dikemas dalam "bahasa akademis". Sementara Bung Karno

130 M Alfan Alfian, "Perkembangan Bahasa Politik Kita", *Koran Tempo*, 8 Februari 2008.

131 Sjahrir (1999).

132 Swasono dan Ridjal (1997).

butuh waktu berjam-jam pidato yang di sana-sini sempat disertakan aneka laporan bacaan untuk menunjukkan keluasan wawasan intelektualnya. Walaupun kental nuansa ideologisnya, bahasa politik yang intelek juga tergambar melalui berbagai polemik antar-media massa.

Bagaimana perkembangan bahasa politik Orde Baru?

Seiring depolitisasi yang ditandai penyederhanaan sistem kepartaian (fusi partai-partai politik 1973) dan implementasi konsep massa mengambang (*floating mass*) guna membatasi ruang gerak partai-partai politik (PPP dan PDI) hingga ke desa-desa di saru sisi, dan gencarnya jargon pembangunan nasional yang direncanakan secara bertahap, maka bahasa politik para elite politik turut terpengaruh/bergeser. Ketika politik, sebagaimana ingarbingarnya dekade 1950-an disebut "sebagai panglima" kemudian tergeser oleh "pembangunan ekonomi sebagai panglima", maka konseluensinya, banyak perbendaharaan kata dalam ranah politik kita yang "tergusur". Kata "revolusioner" pun tergeser oleh "pembangunan", "Pancasila" menggantikan istilah-istilah yang mencerminkan ideologi politik aliran, "demokrasi" kalah populer dibanding "stabilitas".

Hadir pula istilah "murni dan konsekuen". Singkat kata, istilah-istilah yang terasa "ideologis" bergeser menjadi lebih "pragmatis". "Anti-neokolonialisme dan anti-neoimperialisme", tergeser oleh "cabe merah keriting dan bawang merah pipilan" yang selalu diinformasikan perkembangan harganya di berbagai pasar tradisional melalui radio. Rapat massa tergeser oleh istilah baru *Kelompencapir* yang merupakan akronim dari "Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan". Penghalusan kata (*eufimism*) juga mengemuka: "menangkap" dipersopan dengan "mengamankan", menindak secara represif diperhalus dengan "menggebuk". Tidak ada "penggusuran", tetapi sekadar "penertiban", dan sebagainya.

Kalau era reformasi, bagaimana kecenderungan bahasa politik yang berkembang?

Menu sajian bahasa politik era reformasi tak kalah variatif. "Pembangunan" tergeser oleh "reformasi". Kemudian, daftar kata berikut mendadak populer, seperti "verifikasi", "penyelesaian di tingkat lobi", "amandemen", "popularitas", "elektabilitas", "politik uang" ("gizi"), "*checks and balances*", "*trial and error*", hingga frase "diselesaikan secara adat". Partai-partai di era reformasi banyak jumlahnya, layaknya dekade 1950-an, hanya rasa-rasanya "minus ideologi". Media massa pun tak lagi menjadi wahana polemik ideologis, kendatipun banyak yang memainkan perannya sebagai "partisan politik" dengan bingkai penyajian informasi yang lembut (*soft*) hingga "terang-terangan". Pragmatisme terasa sekali.

Apakah para politisi tengah terdeintelektualisasi?

Anda bisa menganalisasnya sendiri. Yang jelas pemimpin politik tidak harus hadir dari latar belakang dunia intelektual, kendatipun seharusnya mereka punya kemampuan intelektual. Perdebatan antar-kandidat dalam kampanye pemilu, maupun interaksi politik antara "oposisi" dan yang memerintah/berkuasa, menuntut dikedepankannya dimensi intelektualitas. Tentang dimensi intelektualitas ini, nanti akan saya uraikan lagi di bagian tentang kekuasaan.

Soal budaya pop konteks dan pengertiannya?

Konteksnya, budaya pop itu penting sekali dalam proses pengembangan bahasa politik. Apalagi, belakangan ini media sosial marak sekali sebagai konsekuensi perkembangan media baru (*new media*), sehingga tren-tren kebahasaan yang berkembang di sana juga berpengaruh ke media konvensional. Pada pokoknya, sebagaimana di-utarakan oleh Burton, konsep-konsep budaya pop mencakup pemahaman tentang identitas/perbedaan; bagaimana merepresentasikan identitas; bagaimana budaya diproduksi; bagaimana hubungan sosial-budaya disamakan dengan barang-barang; bagaimana ideologi beroperasi dalam praktik sebagai "barang kebudayaan".[133] Penjelasannya bisa panjang lebar. Intinya, budaya pop merupakan suatu *produk budaya* yang dikemas secara massif, menyedot banyak perhatian, dan bisanya merupakan tren sesaat. Sebuah lagu pop, misalnya, jarang ada yang bertahan lama, dan cepat akan beralih menjadi lagu nostalgia. Mengemukanya aspek-aspek budaya pop di panggung politik, membuat peristiwa-peristiwa politik terangkai dalam serial sinetron. Popularitas tokoh perlu dibantu oleh efek khusus, sehingga tercitrakan sebagai sosok yang baik. Efek khusus itu boleh jadi berupa kesan tertindas alias terdzalimi atas sang aktor, sehingga memperoleh simpati dan dukungan "penonton".

Bagaimana dengan konsep-konsep yang menjadi tren belakangan, seperti kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial?

Konsep-konsep tersebut memang tengah populer. Kecerdasan intelektual biasanya diukur melalui tes IQ alias *Inteligence Quoient*. Diharapkan pemimpin punya IQ yang rata-rata, bukan yang rendah. Tapi kecerdasan intelektual bukan segalanya. Karenanya mengemuka konsep *Emotional Quotient* (EQ) atau *Emotional Intelligence* (EI), yang intinya cerdas emosional lebih menentukan kesuksesan seseorang, walaupun orang itu tidak terlampau cerdas intelektual. Di tengah-tengah itu, hadir pula konsep *Spiritual*

133 Burton (2008:53).

Quotient (SQ), yang menurut Zohar dan Marshall merupakan kecerdasan tertinggi, karena peraannya sebagai landasan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.[134] Karenanya, pemimpin yang cerdas, berarti cerdas intelektual, emosional maupun spiritual.

Kecerdasan intelektual itu bagaimana penjelasannya? Apakah pemimpin harus secerdas komputer?

Kecerdasan intelektual lebih dikaitkan dengan konteks kecerdasan berpikir atau kecerdasan otak kita. Hawkins dan Blakeslee dalam *On Intelligence*, mencatat bahwa kemampuan otak kita tetap melebihi suatu kecerdasan buatan (*artficial intelligence*/AI) yang diperankan oleh komputer. Mengapa demikian?

> Komputer dan otak dibuat dengan prinsip yang sama sekali berbeda. Yang satu diprogram, satu lagi belajar sendiri. Yang satu harus bekerja dengan benar-benar sempurna, satu lagi fleksibel dan toleran pada kegagalan. Yang satu memiliki prosesor sentral, satu lagi tdak memiliki kontrol yang terpusat ... AI bisa menuntun kita membuat produk yang bermanfaat, tetapi tidak membangun mesin yang benar-benar pintar.[135]

Yang menarik untuk digarisbawahi dari Hawkins dan Blakeslee, prediksi (kemampuan memperkirakan) merupakan kunci untuk memahami inteligensia. Dalam ilmu pengetahuan dan industri, catat mereka, tidak seorang pun menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Yang dilakukan orang adalah memasukkan gagasan yang ada ke dalam kerangka berpikir yang baru. Inteligensia, catat mereka, diukur dengan kemampuan untuk mengingat dan memprediksi pola di dunia, termasuk bahasa, matematika, sifat fisik benda, dan situasi sosial. Otak Anda menerima pola dari dunia luar, menyimpannya sebagai memori, dan membuat prediksi dengan menggabungkan apa yang pernah dilihat dengan apa yang kini terjadi.[136] Dalam konteks inilah, Hawkins dan Blakeslee menyebut bahwa apa yang dimaksud dengan kreativitas secara sederhana dimaknai sebagai pembuatan prediksi melalui analogi yang dilakukan secara terus-menerus. Kreativitas berada dalam garis kontinum, mulai dari tindakan persepsional sehari-hari hingga tindakan jenius/brilian yang sangat sulit.[137]

Apakah hubungannya inteligensia atau kecerdasan intelektual dengan pengalaman pendidikan seseorang?

134 Zohar dan Marshall (2001).

135 Hawkins dan Blakeslee (2009:4).

136 Hawkins dan Blakeslee (2009:89).

137 Hawkins dan Blakeslee (2009:177).

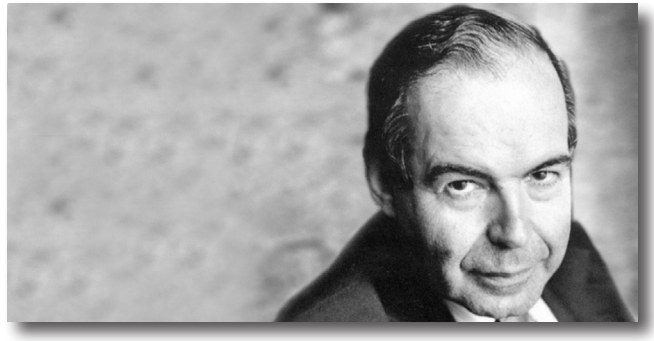

ABOUT.ME

Penelitian menunjukkan sembilan puluh persen kesalahan berpikir karena kesalahan persepsi. Jika Anda dapat mengubah persepsi, Anda pun mengubah emosi dan dapat memunculkan ide-ide baru

- Edward de Bono

Studies have shown that 90% of error in thinking is due to error in perception. If you can change your perception, you can change your emotion and this can lead to new ideas.

Erat. Setidaknya, di sekolah atau lembaga pendidikan formal/informal yang berjenjang dan sistematis, kecerdasan intelektual selalu diasah, sehingga meminjam konsep Hawkins dan Blakeslee di atas, para pembelajar/siswa atau mahasiswa memiliki kemampuan prediksional yang ditopang oleh disiplin metode ilmiah. Para pemimpin politik tidak selalu punya latar belakang pendidikan formal yang tinggi. Mungkin sekali, pengelaman pendidikan formalnya rata-rata. Tetapi, mereka dituntut untuk punya kemampuan intelektual yang mencukupi dalam memimpin: mereka harus terus meng-*up date* perkembangan baik melalui media massa maupun laporan-laporan yang obyektif dari para pembantu dan anak buahnya. Pemimpin itu jenderal, *general*, generalis, karenanya harus *tahu sedikit tentang banyak*. Ia perlu dipasok data-data dan analisis dari para ahli, sehingga kemudian ia punya wawasan dan *wise* atau bijak dalam memutuskan. Dalam peperangan, seorang Jenderal harus tahu banyak hal tentang kondisi lapangan, keadaan anak buah, kekuatan lawan dan sebagainya, sekecil-kecilnya. Ia harus tahu peta yang sebenarnya, sebelum memutuskan strategi apa yang hendak diputuskan. Kemampuan untuk menyerap informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber dan kemudian dijadikan dasar pertimbangan prediksional itu penting. Dalam konteks ini, Emha Ainun Nadjib pernah bicara tentang ilmu gelas, bagaimana seorang pemimpin memandang sebuah gelas.[138]

138 Pernah disampaikannya pada acara *Kenduri Cinta* di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, semasa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Gelas?

Gelas dipakai sebagai sarana untuk mengetahui model-model pemimpin, berdasarkan kesadaran kapasitasnya. Pemimpin model pertama ialah yang mengosongkan gelasnya, sebab hanya dengan gelas yang kosonglah, ia dapat diisi kembali penuh dengan ilmu dan pengetahuan baru. Pemimpin model demikian ialah pemimpin pembelajar. Pemimpin model kedua ialah yang tidak mau mengosongkan gelasnya. Akibatnya, apa-apa yang disampaikan kepadanya tumpah ke mana-mana. Tak sedikit pun ilmu dan pengetahuan baru diterimanya. Karena kesombongannyalah, sehingga ia menutup diri dari *up dating* pengetahuan. Pemimpin jenis ketiga, yang tingkat keparahannya paling tinggi, bahkan gelas saja tidak tahu.

Hehehe ... Tampaknya itu pesan penting bahwa pemimpin harus tahu bahwa ia punya perangkat untuk meningkatkan kecerdasannya ...

Kata kuncinya, sekali lagi, belajar dan belajar: menyerap informasi dan pengetahuan seluas mungkin mampu melakukan analisis secara tepat dengan paradigma pengambilan keputusannya. Seiring dengan pengalaman, pastilah seorang pemimpin terus belajar, sehingga ia benar-benar merupakan "manusia dewasa", bukan "manusia kecil" dalam puisi Schiller dan/atau "anak kecil" dalam istilah Daoyuan (abad kesebelas), berikut:

> Tanpa kepandaian, seseorang dapat hidup sampai seratus tahun, tetapi tetap seperti seorang anak kecil. Dengan kepandaian, seorang anak kecil dapat melakukan sesuatu lebih baik daripada orang dewasa yang hidup seratus tahun.[139]

Masih dalam hal ilmu gelas tadi, tampaknya pengendalian emosi sangat perlu, bahwa pemimpin seharusnya tidak terjebak pada gengsinya sendiri?

Pemimpin pembelajar itu ialah yang tetap memberikan ruang dalam gelasnya untuk ilmu dan hikmah yang datangnya dari mana saja. Kalau ia sombong dengan mengasumsikan dirinya tahu dan pandai, dan gengsi mendengar masukan dari yang lain, maka itu tidak baik. Ia bukan pemimpin yang bijak.

Kita perlu pemimpin dari kategori "manusia dewasa" tadi. Kedewasaan pemimpin lebih ditentukan oleh pengendalian emosinya. Emosi atau *emotion* adalah pola reaksi yang kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan elemen-elemen psikologi lain, yang menjadi dasar dari individu

139 Tang (2015:50).

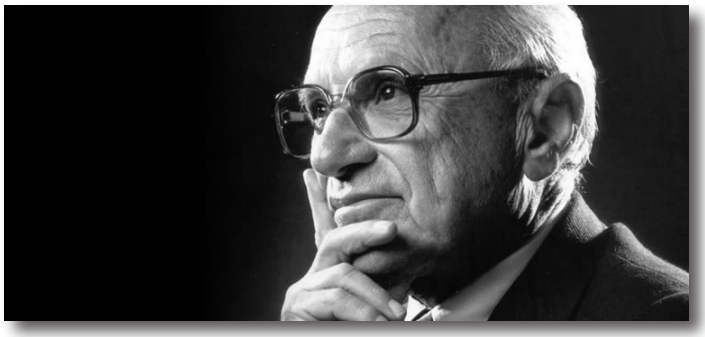

FORBES.COM

Satu-satunya hal yang relevan untuk menguji validitas hipotesis ialah dengan membandingkan prediksi dengan pengalaman

- Milton Friedman

The only relevant test of the validity of a hypothesis is comparison of prediction with experience.

untuk memutuskan sikap dan kebijakannya.[140] Pemimpin yang keseimbangan emosionalnya terjaga ialah pemimpin yang *empan papan*. Yang rendah hati.

Pemimpin adalah manusia jenis pertama dalam kategori Al Ghazali, *rajulun yadrii wa yadrii annahu yadrii* (orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu). Tentulah pemimpin demikian luas pengetahuan dan sumber rujukan. Minimal, pemimpin itu, *rajulun laa yadrii wa yadrii annahu laa yadrii* (orang yang tidak tahu, dan dia tahu secara sadar bahwa dia tidak tahu). Konsekuensinya ia harus menjadi pembelajar. Dalam perspektif ilmu gelas di atas, maka ia harus berani mengosongkan gelasnya, untuk menerima ilmu dari yang ahli.

Selain itu ada kategori, *rajulun yadrii wa laa yadrii annahu yadrii* (orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tahu). Orang ini seperti sedang tertidur, maka harus dibangunkan supaya mengamalkan potensi ilmu yang dimilikinya. Dan, yang terakhir adalah *rajulun laa yadrii wa laa yadrii annahu laa yadrii* (orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu).[141] Nah, bagaimana kalau kita dipimpin oleh orang semacam ini?

Soal spiritualitas?

Pemimpin seyogyanya peka secara spiritual dan religius. Ia sadar sepenuhnya bahwa ada dimensi kekuasaan yang lebih sejati dan abadi ketim-

140 Wikipedia.org

141 Kutipan dari Al Ghazali ini populer sekali, dalam beberapa buku tentang mahfudzat, kutipan ini sering tidak disebutkan sumbernya.

ARABIANBUSINESS.COM

Spiritualitas dimaksudkan untuk membawa kita melampaui identitas kesukuan kita menjadi domain kesadaran yang lebih universal

- Deepak Chopra

Spirituality is meant to take us beyond our tribal identity into a domain of awareness that is more universal.

bang kekuasaan manusia. Kesadaran keber-Tuhan-an (religiusitas) itu sangat penting dam mendasar, agar pemimpin tidak semena-mena terhadap sesama, dan tidak mengabaikan eksistensi manusia lain. Dimensi spiritual dapat menjadi kontrol efektif, agar pemimpin bersikap arif-bijak, meniru sifat-sifat baik Tuhan.

Apakah, kalau demikian, seorang pemimpin yang religius itu merupakan sosok yang asketis?

Harus didudukkan dulu *asketis* yang dimaksud seperti apa. Dalam beberapa tulisannya, sejarawan Sartono Kartodirdjo misalnya telah mempopulerkan kembali konsep *mesu budi* yang mengemuka di *Serat Wedatama* karya Mankunegara IV. *Mesu budi* dimaknainya sebagai etos yang mencerminkan asketisme intelektual, semacam disiplin mental yang mendasari segala usaha dan pekerjaan.[142]

Menurut Sartono, implementasi *mesu budi* justru terlihat tatkala dia menganalisa etos kerja masyarakat Jepang yang berkembang sejak Restorasi Meiji. *Mesu budi* diartikan sebagai asketisme yang bukan eskapisme atau sikap religiusitas yang diekspresikan dengan meninggalkan segala urusan keduniaan. Maka, asketisme justru berfungsi sebagai etos yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan bangsa.[143] *Mesu budi* di masyarakat Jepang

142 Sartono Kartodirdjo, "Etos Kerja dan Etos Bangsa", *Kompas*, 4 Maret 1989.

143 Sartono Kartodirdjo, "Mesu Budi" Berfungsi sebagai Etos yang Berpengaruh", *Kompas*, 2 Oktober 1983. Sartono sendiri dikenal sebagai intelektual asketis. Lihat, Nursam (2008).

SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling intens

- Danah Zohar

High SQ demands the most intense personal integrity.

itu, selaras dengan penelitian Robert N Bellah tentang *Religi Tokugawa*, atau Max Weber tentang Etika Protestan yang diklaim telah mampu menjadi dasar etos Kapitalisme Barat.

Yang menarik *mesu budi* dipandang sebagai asketisme yang bukan eskapisme atau sufisme yang tidak *uzlah* (meninggalkan aspek duniawi). Ia, karenanya, termasuk jenis sufisme produktif, suatu bentuk sufisme, semangat moral, yang dilandasi oleh keyakinan luhur (agama) tetapi tanpa menyingkir dari realitas hidup sehari-hari. Pemimpin pasti dihadapkan pada permasalahan-permasalahan duniawi, tetapi ia harus mengedepankan sisi asketismenya. Perspektif asketis semacam ini perlu, justru untuk menegaskan bahwa pemimpin tidak saja harus menginjakkan kakinya di bumi, tetapi wajib bekerja keras untuk kemajuan organisasi yang dipimpinnya.

Begini ya: kalau *mesu budi* itu sufisme produktif, "disejajarkan" dengan "etos Protestan"-nya Weber atau "Religi Tokogawa"-nya Bellah, mengapa tidak ada semacam Restorasi Meiji di Jawa?

Wah, pertanyaan yang kritis. Masalahnya, Jawa punya pengalaman lain. Saya cuma bisa berhipotesis, bahwa kultur feodal kerajaan-kerajaan di Jawa, pada praktiknya justru dipersubur oleh kolonialisme. Kaum penjajah punya politik yang memecah belah, sehingga dalam mengatasi perlawanan pun kaum penguasa pribumi saling diadu domba. Penjelasannya segera dapat dikaitkan dengan konteks munculnya mentalitas permisif akibat yang tak berdaya pada kaum kolonial. Tapi mungkin Anda punya hipotesis lain. Mungkin pula pendapat yang sebaliknya. Bagaimana dengan hal-ikhwal tradisi Samurai, apakah juga ada di Jawa? Kalau ada seberapa signifikan?

Bagaimana dengan modernisasi, apakah ia timbul secara "mandiri" atau banyak menggantungkan diri pada pihak kolonial? Pengalaman kita di Jawa, lain kiranya dengan yang terjadi di Barat dan Jepang (dalam hal ini, kita misalnya bisa membaca ulang Kishore Mahbubani, *Can't Asia Think?* di mana sudah saya kutipkan garis besarnya dalam sub-pembahasan tentang *mindset* kepemimpinan).

Baik. Tetapi, Anda rupanya belum jelaskan apa itu kecerdasan sosial?

Oh, baiklah. Kalau kita membaca Goleman, *Social Intelligence*, kecerdasan sosial dikaitkan dengan sekumpulan keterampilan yang membantu seseorang berinteraksi secara lebih baik dengan orang lain. Tampaknya ini merupakan kelaziman saja dari manusia sebagai makhluk sosial. Goleman menariknya ke konteks ilmu saraf yang menjelaskan bahwa otak manusia, pada hakikatnya merupakan otak yang *suka bergaul*. Bahwa, otak kita selalu terlibat dalam tango emosional, suatu tarian perasaan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial yang terus-menerus.

Kecerdasan sosial disusun oleh komponen kesadaran sosial dan fasilitas sosial. Kesadaran sosial menyangkut keterampilan seseorang memahami pikiran dan perasaan orang lain yang meliputi empati dasar, penyelarasan, ketepatan empatik dan kognisi sosial.

- Empati dasar ialah kemampuan membaca isyarat non-verbal yang diberikan orang lain. Walaupun seseorang dapat berhenti berbicara, namun dia tidak akan dapat menghentikan sinyal-sinyal mengenai apa yang dia rasakan melalui nada suara, ekspresi wajah dan sinyal-sinyal emosi lainnya.
- Penyelarasan ialah kemampuan mendengarkan dan memperhatikan secara penuh apa yang disampaikan oleh orang lain dan hanya fokus pada lawan bicara sehingga kita dapat berbicara satu sama lain dan memberikan respon yang sesuai bukan hanya pembicaraan sepihak saja.
- Ketepatan empatik ialah kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain melalui bahasa non-verbal yang diberikannya. Dengan memiliki kemampuan membaca bahasa non verbal seseorang, maka akan membuat kita semakin akurat dalam merasakan dan memahami pikiran serta perasaan orang lain.
- Kognisi sosial ialah kemampuan individu memahami dan memilih hal apa yang tepat untuk dilakukan dalam situasi yang berbeda-beda walaupun tidak ada aturan yang tertulis mengenai hal itu (*unspoken rules*). Kognisi sosial akan membantu individu dalam memecahkan dilema sosial seperti bagaimana mendapatkan teman baru dalam lingkungan baru.

Fasilitas sosial terkait bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain: sinkronisasi, presentasi diri, pengaruh dan kepedulian.

- Sinkronisasi ialah kemampuan individu berinteraksi menggunakan bahasa non-verbal. Individu yang mampu menggunakan bahasa non-verbal akan dapat berinteraksi dengan orang lain dengan lancar.
- Presentasi diri terkait dengan bagaimana individu menampilkan diri dengan efektif saat berinteraksi dengan orang lain. Salah satu aspek dari presentasi diri ini adalah kharisma.
- Pengaruh terkait dengan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu menggunakan perkataan dengan hati-hati dan mampu me-

EASYTIMEGALLERY.COM

Tugasku untuk partai berakhir, ketika tugasku untuk negara dimulai

- Manuel L. Quezon

My duty to my party ends when my duty to my country begins.

ngendalikan diri.

- Kepedulian yang dimaksud terkait dengan kepedulian kita terhadap orang lain. Semakin kita peduli terhadap orang lain, maka semakin besar pula keinginan kita untuk mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk membantu orang tersebut.[144]

Konsep kecerdasan sosial seperti itu, tampaknya lazim saja dalam masyarakat kita (Timur)?

Ya, dalam khasanah Jawa, dalam konteks kecerdasan sosial ini, tampaknya meringkaskannya ke dalam konsep *empan papan*. Unsur pentingnya ialah *tepo seliro*. Ia memesankan ke kita bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat harus mempertimbangkan kepenti-ngan dan perasaan orang lain. Artinya, kita tak boleh menonjolkan diri sedemikian rupa, sehingga hak-hak orang lain pun kita gasak. Juga konsep mengenai toleransi di tengah masyarakat yang majemuk (pluralistik). Ditarik lagi ke kualitas diri, maka kita harus *andhap asor,* rendah hati dan tidak sombong.

Seperti Dasa Dharma Pramuka ya?

Saya setuju kalau Dasa Dharma Pramuka itu ialah elaborasi dari kecerdasan sosial juga (selain juga ada unsur kecerdasan emosional dan spiritualnya). BTW masih hapalkah Anda? Kalau tidak begitu ingat, saya ingatkan lagi Dasa Dharma Pramuka kita : (1) Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa; (2) Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia; (3) Patriot yang sopan dan kesatria; (4) Patuh dan suka bermusyawarah; (5) Rela menolong dan

144 Diringkas dari Goleman (2007)

tabah; (6) Rajin, terampil dan gembira; (7) Hemat cermat dan bersahaja; (8) Disiplin, berani dan setia; (9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan (10) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.[145] Jadi jelas bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam dasa dharma itu merupakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Setidaknya jiwa kepemimpinan itu terdiri dari unsur-unsur dharma tersebut.

Totalitas *versus* Konflik Kepentingan

PEMIMPIN ITU harus total. Apa maksudnya?

Total, dalam arti mengabdi dan berjuang secara total, tidak setengah-setengah atau sekedar mementingkan ambisi-ambisi pribadi. Dalam kepemimpinan politik, totalitas merupakan konsekuensi logis dari niat bahwa berpolitik itu panggilan. Totalitas berarti bekerja secara utuh, sungguh-sungguh. Ia berkerja sepenuh pengabdian dan kedalaman.

Pemimpin yang total dan sungguh-sungguh, tidak boleh *iseng* dan *sembrono*. Sejak dari niat (mementapkan keyakinan) hingga implementasi kebijakan, pemimpin harus total dan komprehensif. Dalam buku *Kubik Leadership* keyakinan itu akar, aksi itu batang dan buahnya adalah pekerti. Pemimpin mampu mengarahkan ketiga-tiganya.[146] Tentu dalam hal ini, pemimpin tidak boleh main-main. Dalam memimpin bangsa apalagi.

Bila pemimpin berangkat dari niat, keyakinan, pemahaman dan kesadaran eksistensial memimpin adalah amanat, ia akan berusaha tidak menyia-nyiakannya. Ia akan menjadi pemimpin sebaik mungkin. Tidak *sembrono*, apalagi mementingkan kepentingan dan kesenangan sendiri di atas penderitaan mereka yang dipimpin.

Jadi makna total berbeda dengan totaliter ya?

Beda. Totaliter atau tepatnya totalitarianisme merupakan paham dimana negara mengatur semua urusan, baik secara publik maupun pribadi. Negara memobilisasi penduduknya, dengan segenap kekuatan pemaksa, untuk tunduk pada ideologi totalitarisnisme. Karenanya totalitarianisme identik dengan terorisme oleh negara pada rakyatnya. Istilah itu berasal dari *totalitarianismo*, yang mengemuka pada tulisan filosof Giovanni Gentile dalam menggambarkan rezim fasis Italia di bawah Benito Mussolini.[147]

145 Pramuka.or.id

146 Poniman, Nugroho, dan Azzaini (2008:7).

147 Wikipedia.org

Ketika aku berpikir tentang musik, aku berpikir musik dalam totalitas, lengkap

- Donny Hathaway

When I think of music, I think of music in totality, complete.

Jadi pemimpin harus bermental sungguh-sungguh?

Ya. Tidak boleh setengah-setengah. Mentalitas setengah-setengah ini oleh Emha Ainun Nadjib disebut "mentalitas abangan".[148] Abangan semula merupakan satu dari tiga ketegori masyarakat yang dipakai Sosiolog Clifford Geertz, atas "manusia Jawa". Selain abangan, dikenal pula istilah santri dan priyayi. Tapi, abangan yang dipakai Emha, adalah wacana tentang mentalitas. Ini mengingatkan kita pada keluhan krisis kepemimpinan Burns yang pernah kita singgung di depan, yakni *mediocrity* merujuk pada pengertian pemimpin yang tanpa kepemimpinan optimal, alias biasa-biasa saja.

Wah, kalau begitu, "mentalitas setengah-setengah" itu berbahaya?

Ilustrasinya dapat Anda peroleh dari novel Ahmad Tohari, *Orang-orang Proyek*. Tohari dalam novelnya itu memunculkan dilema yang dihadapi seorang aktivis yang setelah lulus, kemudian terlibat dalam proyek pembangunan jembatan desa. Masalahnya, ia segera dihadapkan pada orang-orang proyek yang "bermental setengah-setengah" atau bahkan "mental korup", sehingga pergulatan idealisme terjadi. Mampukah sang mantan aktivis menghadapi gejolak batinnya, dan di sisi lain, bagaimana dengan jembatan yang dibangun itu, apakah layak?[149] Silakan baca sendiri kelanjutannya, para pemborong pembangunan jembatan sangat mungkin tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya dalam arti mereka membuat jembatan yang layak dan berkualitas, mengingat sangat mungkin anggaran dana pembangunannya sudah terlalu banyak dipotong. Persoalan apabila kelak jembatan tersebut roboh dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, mereka barangkali tidak pernah membayangkan sampai jauh ke sana. "Mentalitas setengah-setengah" Sangat berpotensi menjauhkan kualitas hasil karya kebudayaan dan menjauhkan orang untuk berpikir bahwa zaman besar membutuhkan orang-orang besar.

Saya tertarik dengan novel Ahmad Tohari itu: bisa Anda kutipkan bagian-bagian kritiknya?

Baik, saya akan kutip bagian ironis, berupa otokritik dari pelaku utama

148 M Alfan Alfian, "Mentalitas Abangan", *Pelita*,15 Februari 2004.

149 Tohari (2015).

novel *Orang-orang Proyek* itu, Kabul.

"Sudah, Mas?" seru Wati dari mobil.

Kabul menjawab dengan langkah menuju mobilnya. wajahnya masih berat. Duduk di belakang kemudi, tapi kunci kontak tak kunjung disentuhnya. Malah memejamkan mata. Lama. Dengan mata terpejam, Kabul malah melihat ribuan proyek bangunan sipil yang digarap dengan ke-*sontoloyo*-an. Orang-orang proyek sudah dikenal masyarakat sebagai tukang suap, tukang kongkalingkong, apa saja dilakukan asal dapat untung. Dan korban kegilaan mereka adalah masyarakat umum, karena mutu bangunan yang mereka kerjakan tak mencapai mutu baku.

Dan ada cerita humor yang sangat populer tentang orang-orang proyek. Suatu saat di akhirat, penghuni neraka dan penghuni surga ingin saling kunjung. Maka penghuni kedua tempat itu sepakat membuat jembatan yang akan menghubungkan wilayah neraka dan wilayah surga. Bagian jembatan di wilayah neraka akan dibangun oleh orang neraka dan sebaliknya. Ternyata penghuni neraka lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya daripada penghuni surga. Dan ketika dicari sebabnya, ditemukan kenyataan di antara para penghuni neraka ba-nyak mantan orang proyek.

Masih duduk dan belum menghidupkan mesin mobilnya, kabul menyampaikan cerita konyol itu kepada Wati. Wati tertawa.

"Dari mana Mas mendapat cerita itu?"

"Mau Tahu? Dari orang proyek yang dulu jadi bos kota."

"Pak Dalkijo?"

"Ya."

"Edddaaaan. Jadi, orang-orang proyek sesungguhnya sadar akan kegilaan mereka?"

"Mereka, orang-orang proyek, baik dari pihak pemilik maupun pemborong, sama saja. Mereka tahu dan sadar akan kegilaan mereka. Dan tampaknya mereka tak peduli. Bagi mereka proyek apa saja dan di mana saja adalah ajang *bancakan*. Dan karena kebiasaan itu, kata "proyek" pun kini memiliki tekanan arti yang khas. Yakni semacam kegiatan resmi, tapi bisa direkayasa agar tercipta ruang untuk jalan pintas menjadi kaya. Maka, apa saja bisa diproyekkan."

"Apa saja?"

"Ya, apa saja bisa diproyekkan. Tidak hanya pembangunan jembatan dan infrastruktur lain, tapi juga pengadaan kotak pemilu, pembagian sembako untuk orang miskin, pengadaan bacaan untuk anak sekolah, program transmigrasi, program penanggulangan bencana alam. Bahkan Sidang Umum MPR dan penyusunan undang-undang bisa mereka jadikan proyek yang mendatangkan duit. Orang-orang proyek rakus dan licin, dan mereka ada di mana-mana."

"Kegilaaan besar-besaran ini akan berlangsung sampai kapan, Mas?"

Anda tak bisa menjadi diktator selama ada *checks and balances*

- Tommy Chong

You can't become a dictator through checks and balances.

Kabul tidak segera menjawab. Wajahnya beku. Pandangannya seakan buntu. Lalu tangannua bergerak untuk memutar kunci.

"Rayap baru brhenti makan bila kayu yang digerogotinya sudah habis. Atau bila mereka disiram racun antiserangga."

Mesin mobil mendesis. Keempat rodanya mulai bergulir.[150]

Apakah totalitas terkait dengan kalimat, "*My duty to my party ends when my duty to my country begins*" ...

Pemimpin/negarawan membutuhkan mentalitas dan pengabdian yang utuh, tidak setengah-setengah. Setidaknya demikian yang dapat dipetik dari perkataan yang kemudian menjadi terkenal diungkapkan oleh Manuel L Quezon: Tugasku untuk partai berakhir, ketika tugasku untuk negara dimulai.[151] Seorang pejabat negara, politisi paripurna, mestinya total berkonsentrasi pada tugas-tugas kenegaraannya, tanpa ditumpangi kepentingan-kepentingan sempit. Kalau pandangan ini dipahami, maka "rangkap jabatan" sungguh tidak etis. Betapa kemaruknya para perangkap jabatan itu. Di luar itu, *rangkap jabatan* dapat memunculkan konflik kepentingan alias *conflict of interest*. Saya katakan dapat, setidaknya untuk mengakomodasi pendapat, bahwa *rangkap jabatan* pun tidak selalu memunculkan konflik kepentingan — kendatipun sejumlah syarat ketat harus dipenuhi agar politisi tahu mana urusan pribadi, urusan partai dan urusan negara: tak dicampur-campur.

Sebelum dibahas apa itu *conflict of interest*, bukankah soal kepentingan ini sudah melekat pada siapa saja?

Sudah disinggung di awal buku ini, manusia itu adalah *makhluk politik*. Pericles pernah mengingatkan, Anda boleh tidak meminati politik atau Anda boleh merasa tak berkepentingan dengan makhluk yang bernama politik itu, tetapi, politik tetap meminati Anda.[152] Politik tetap berkepentingan dengan Anda. Politik mencari Anda. Karenanya, sesungguhnya tidak

150 Tohari (2015:251-252).

151 Lihat, Thinkexist.com. Banyak yang menganggap perkataan ini dari John F Kennedy atau Wisnton Churchill. Tetapi, ternyata dari Manuel L Quezon (1878-1944) menjabat sebagai presiden Persemakmuran Filipina dari 1935 hingga 1944. Lihat juga Wikipedia.org.

152 *Just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you*. Brayniquotes.com

THE-PHILOSOPHY.COM

Untuk menjadi benar-benar hebat, kita harus berdiri bersama rakyat, tidak di atas mereka

- Montesquieu

To become truly great, one has to stand with people, not above them.

ada manusia yang apolitis sama sekali. Karena, manusia punya kepentingan, dan untuk memenuhi hasrat kepentingannya itulah diperlukan siasat atau politik. Ia bukan barang yang kotor, ia sesuatu yang netral saja.

Pemahaman *enteng-entengan* mengenai makhluk manis yang bermana politik itu, adalah kisah sebuah keluarga yang kebetulan sedang makan di restoran. Di situ ada ayah dan ibu yang merepresentasikan orangtua, plus tiga orang anaknya: Mari, 15 tahun, Bobi, 10 tahun, dan Sofi, 5 tahun. Tak seperti kedua kakaknya, Sofi baru pertama kali itu diajak makan di restoran. Ternyata, Sofi punya ekspresi sendiri yang lain di restoran itu: ia berteriak-teriak, sebagai bentuk protes yang, bahkan orangtuanya sendiri merasa tidak jelas apa yang diproteskan. Ayah marah, mungkin ayah malu dilihat banyak orang atas adegan Sofi itu. Sementara ibu agak lebih sabar dan pengertian dalam mencoba memahami apa kemauan sang *bayi baru gede* itu.

Terus, di mana politiknya?

Politiknya terletak pada kemampuan Anda melanjutkan cerita ini. Bagaimana dengan ayah? Apakah ayah masih marah? Apa yang ada di benak ayah agar Sofi diam? Apakah ayah akan bergaya seperti Stalin atau Adolf Hitler dalam mengatasi keadaan, ataukah kalem dan penuh senyum seperti Pak Harto atau Ronald Reagan? Siasat apa yang akhirnya dilakukan ayah,

supaya anaknya tidak bikin keributan? Negosiasi macam apakah yang menyembul ke permukaan, di tengah-tengah situasi kritikal itu?

Bagaimana dengan ibu? Apakah ia akan menjaga citranya sebagai seorang ibu yang santun dan sejati, sehingga tak perlu merasa terlalu terpancing dengan keadaan? Tetapi apakah sikap dan kebijakan ibu, efektif untuk meredam tangis anaknya? Atau, malahan ibu sendiri ikut larut dalam ketidakter-kendalian diri dan lantas ikut menangis? Bagaimana dengan kedua kakaknya? Bagaimana pula dengan lingkungan eksternal mereka? Bagaimana kekuasaan dan pengaruh yang ada pada tiap-tiap mereka mampu mengatasi keadaan? Apakah mereka akan berkoalisi untuk menenangkan sang anak yang nangis itu? Tentang kekuasaan, aksioma umum yang mengemuka: *dalam politik kepentinganlah yang abadi*. Tapi, bagaimana kepenti-ngan abadi itu bisa efektif untuk mengatasi keadaan? Tentang hal ini, lebih lanjut akan saya uraikan dalam bagian tentang negosiasi.

Lantas apa *conflict of interest* itu?

Di Bab sebelumnya pernah disinggung soal ini dengan ilustrasi soal dwifungsi pengusaha dan penguasa. Konflik kepentingan merupakan persinggungan antara kepentingan profesional/umum *versus* kepentingan pribadi, sehingga menyulitkan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Selain tidak etis, suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.

Sebagaimana ditelaah Guzzetta, konflik kepentingan dan hubungan standar hukum dan etika telah menjadi fokus perhatian dan sejarah yang panjang bagi para teoritisi hukum dan praktisi positivis seperti kalangan pengacara, hakim, badan administratif, dan sebagainya. Baik dari sudut pandang umum dan perspektif hukum, konflik kepentingan diartikan sebagai situasi di mana terdapat adanya ikhtiar pemenuhan kebutuhan pribadi — karena posisi jabatan formalnya — dalam konfliknya (apakah aktual atau potensial) dengan kepentingan publik. Yang menjadi soal ialah bagaimana konflik kepentingan tersebut dipandang urgen dan kebijakan dalam rangka mengatasinya. Dan ini tak kalah sulitnya.[153]

Menurut Hine, mengapa kebijakan mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest regulation*) ini pelik, karena ia terkait dengan: (1) luasnya cakupan pembahasan dan ikhtiarnya untuk memproporsionalisasikan masalah; (2) para perancang kebijakan dihadapkan pada dilema hukum; (3) masalah yang menggabungkan "basis penghakiman" yang berbeda: mutlak (sebagai masalah hukum) dan politik. Hine juga mencatat adanya kesulitan mengkonsepsikan secara umum apa itu konflik kepentingan. Beberapa

153 Guzzetta (2008).

komentator memfokuskan pada aspek mekanik (larangan dan hukuman), beberapa yang lain menekankan efeknya, lainnya lagi pada aspek normatifnya. Hine berpendapat bahwa kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan, secara esensial bersifat preventif atau bersifat pencegahan, karenanya terkait dengan serangkaian prosedur.[154]

Pengertian sederhananya bagaimana?

Jadi begini: konflik kepentingan hadir dalam situasi seseorang terlibat dalam banyak kepentingan, yang salah satunya bisa merusak motivasinya untuk bertindak profesional. Konflik kepentingan terjadi apabila tindakan seseorang lebih dipengaruhi oleh kepentingan sekunder (mendapatkan finansial dan yang lain), abai pada kepentingan primer (utama) profesinya. Kepentingan primer mengacu pada tujuan utama profesi, seperti perlindungan klien, kesehatan pasien, integritas peneliti, hingga tugas-tugas jabatan publik.[155] Kepentingan primer bertabrakan dengan kepentingan lain. Kalau kepentingan primer dikalahkan: itulah konsekuensi konflik kepentingan.

Konflik kepentingan tergambar misalnya, apabila Anda wasit sekaligus pemain: Anda akan selalu juara, walaupun *lancung*. Dalam skala yang luas, konflik kepentingan sangat berbahaya karena sumber malapetaka. Mengapa demikian, karena konflik kepentingan itulah penyalahgunaan wewenang.

Apakah *conflict of interest* selalu melekat pada para elite dalam sistem monarkhi absolut?

Ya. Konflik kepentingan hanya "dibenarkan" dalam sistem monarki absolut. Kalimat *l'etat ces moi* (negara adalah saya) cukup diucapkan oleh Raja Louis XIV saja, jangan kita. Kita sudah banyak belajar betapa menyerahkan begitu saja kekasaan menumpuk pada seseorang, hanya akan berujung malapetaka. Berharap kearifan saja tidak cukup. Ada pepatah, raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Tapi, di dalam logika demokrasi, raja adil sekalipun, masih bisa dikritik. Pelajaran dari revolusi Perancis ialah bahwa kekuasaan mutlak raja, ternyata membuat rakyat berontak.

Karena itu Montesquieu mencetuskan Trias-politika?

Ya, cetusan Baron de Montesquieu itu berawal dari kegelisahan atas dampak-dampak konflik kepentingan dan pemusatan kekuasaan politik di tangan raja. Trias-politika merupakan pemisahan kekuasaan (*power separation*). Negara itu seperti pohon yang punya cabang-cabang kekuasaan:

154 Hine (2008).

155 Wikipedia.org

THEGUARDIAN.COM

Hidup itu jumlah dari semua pilihanmu

- Albert Camus

Life is the sum of all your choices.

eksekutif (pemerintahan), legislatif (parlemen) dan yudikatif (kehakiman). Ketiganya tidak dapat dicampur-aduk, kendatipun lazim dimodifikasi pemahaman dan praktiknya sebagai *pembagian kekuasaan*. Konsep ini selaras dengan demokrasi yang menghendaki berjalannya prinsip *checks and balances*, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa kekuasaan itu harus diawasi dan diimbangi. Hal semacam ini telah menjadi fondasi dalam negara demokrasi: tidak ada pemusatan kekuasaan.

Efektivitas, Percaya Diri, dan Skala Prioritas

APA YANG dimaksud efektivitas kepemimpinan?

Istilah-istilah seperti efektif maupun efisien sesungguhnya banyak dipakai dalam ilmu ekonomi dan bukan politik. Tetapi, belakangan muncul pendapat bahwa politik pun perlu efektif, dan kalau perlu efisien. Pendekatan ekonomi dan politik kerap digabungkan dan kemudian dikenal sebagai pendekatan ekonomi-politik.[156]

Dalam manajemen produksi, misalnya terdapat ilustrasi: sebuah perusahaan otomotif mampu bekerja secara efisien dengan menciptakan mobil-mobil ukuran besar secara cepat, dengan kualitas yang tidak diragukan. Tapi sayang, ternyata apa yang dilakukan itu tidak efektif, karena yang dibutuhkan pasar adalah mobil-mobil kecil.[157] Efektif adalah tepat sasaran, sedangkan efisien itu ringkas-hemat. Pemimpin politik, bisa jadi kurang efisien (berdaya guna/sangkil),[158] menghamburkan banyak ongkos politik —

156 Down (1957).

157 Handoko (2011)

158 kbbi.web.id/sangkil

antara lain dikondisikan oleh sistem yang boros. Tetapi ia bisa efektif (berhasil guna/mangkus),[159] apabila tujuan antaranya tercapai. Hasilnya dukungan politik signifikan dalam pemilu. BTW kita lihat ringkasan berikut:

Tabel: 10.2.
Kepemimpinan yang Efektif menurut Rupert Eales-White

APA YANG HARUS DILAKUKAN?	BAGAIMANA CARA MELAKUKANNYA?
Mengembangkan diri	- Menyadari peran kepemimpinan - Mengembangkan kesadaran diri - Memperhatikan kepentingan pengikut - Melaksanakan hal-hal ang telah direncanakan
Memberi contoh	- Bersikap jujur dan mendukung kejujuran - Mengakui kelemahan dan kesalahan - Menunjukkan rasa percaya diri dan komitmen - Memupuk semangat anggota tim
Memposisikan pekerjaan bawahan sesuai konteks	- Mengembangkan dan memberikan visi dan nilai-nilai - Membuat "gambar yang besar" - Menentukan sasaran - Melakukan pengawasan
Mengembangkan pengikut	- Memberikan bimbingan dan pengarahan - Melatih - Memberikan umpan balik - Memberikan lebih banyak pekerjaan yang bersifat menantang
Memberikan dukungan kepada para pengikut	- Menjadi "orang yang berguna" dan mudah ditemui - Mendukung dan menghargai prestasi - Mendengarkan dan mau menerima pendapat lain yang lebih baik - Memiliki jaringan yang aman

Sebelum mengupas lebih lanjut soal kepemimpinan efektif, apa yang relevansi percaya diri bagi seorang pemimpin?

Percaya diri atau *self confident* itu sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Hanya dengan rasa percaya dirilah, pemimpin menunjukkan kepada publiknya bahwa dia punya kapasitas, kapabilitas atau kecakapan yang alamiah. Maksudnya, dia menguasai hal-hal yang diperbincangkan dan dengan menguasai masalah itu, tidak ada kesan ragu-ragu yang muncul dari sosok pemimpin kita. Hibberd dan Usmar misalnya, membuat petunjuk praktis bagaimana membuat seseorang menjadi percaya diri. Tapi sebe-

159 kbbi.web.id/mangkus

Kunci pengambilan keputusan yang baik itu mengevaluasi informasi yang tersedia - data - dan menggabungkannya dengan perkiraan Anda sendiri kelebihan dan kekurangannya

- Emily Oster

The key to good decision making is evaluating the available information - the data - and combining it with your own estimates of pluses and minuses

lumnya dijelaskan konteks percaya diri ini, terkait dengan perasaan tidak nyaman, kalau-kalau ada orang yang menilai kemampaun dan kualitas diri kita pas-pasan atau rendah. Dari sini, lantas muncul suatu sikap positif, yakni *self esteem*, penghargaan diri: Anda harus menetapkan ukuran yang jelas atas apa-apa yang hendak Anda lakukan dalam bingkai nilai-nilai yang Anda yakini. Dengan menjaga wibawa diri, maka akan senantiasa berikhtiar untuk percaya diri. Percaya diri dan sekaligus wibawa diri dapat ditingkatkan, dengan strategi peningkatan kemampuan dan kualitas diri. Percaya diri juga dibaca sebagai harmonisasi antara pemikiran (*thoughts*), perilaku (*behaviour*), emosi, dan tindakan fisik (*phisicality*).[160]

Kembali ke kepemimpinan efektif: apakah ia identik dengan manusia efektif?

Saya kira beririsan. Menurut Covey terdapat delapan kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif : (1) Jadilah proaktif; (2) Mulai dengan tujuan akhir; (3) Dahulukan yang utama; (4) Berpikir menang-menang; (5) Berusaha memahami dahulu, kemudian berusaha dipahami; (6) Wujudkan sinergi; (7) Mengasah gergaji; dan (8) Temukan suara Anda dan ilhami orang lain untuk menemukan suara mereka.[161]

Saran Covey itu sungguh menarik. Tapi, apa yang dimaksud dengan "mengasah gergaji"?

O, itu kiasan. Covey menceritakan ada seseorang yang sudah lama menggergaji pohon di hutan. Lama dia melakukan itu. Oleh temannya disarankan agar istirahat sejenak dan mengasah gergajinya. Temannya yakin, dengan gergaji yang tajam setelah diasah, maka urusan menebang pohon jadi lebih lancar. Kisah itu memberi pesan, kadang orang tidak terlampau berpikir melakukan tindakan efektif. Covey mengistilahkan mengasah gergaji itu sebagai pembaruan. Maksudnya, memelihara dan meningkatkan aset terbesar yang Anda miliki: fisik, mental sosial/emosional, dan spiritual. Covey

160 Hibberd dan Usmar (2014).

161 Covey (2008:9).

Memang tidak mustahil akan ada tawar-menawar dalam kalangan politik ... Akan tetapi mu'amalah tawar-menawar itupun hanya dapat berlaku antara pihak yang bersamaan. Apabila di sana jantan, di sini laki-laki. Bukan apabila di sana kucing, di sini tikus

- Mohammad Natsir

merumuskan empat dimensi pembaruan yang bersifat motivatif: ekonom (fisik); bagaimana orang diperlakukan (sosial); bagaimana orang dimanfaatkan dan dikembangkan (mental); pelayanan, peerjaan, kontribusi yang diberikan oleh organisasi (spiritual).[162] Jadi "mengasah gergaji" itu melakukan pembaruan.

Bagaimana dengan proses pengambilan keputusan?

Efektifitas pemimpin sangat terkait dengan persoalan pengambilan keputusan. Karenanya prosesnya penting untuk dicermati, sehingga kita bisa menilai apakah seorang pemimpin itu efektif atau tidak. Pemimpin yang tidak efektif pasti lamban dalam memutuskan sesuatu — di tengah-tengah dinamika yang menuntut seorang pemimpin harus cepat dan tepat dalam memutuskan kebijakan strategis. Dan itu butuh skala prioritas. Pemimpin yang efektif tahu, mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, dan ia dapat membuat tekanan-tekanan tertentu pada prioritas yang diutamakan.

Skala prioritas itu juga akan menentukan sejauhmana pemimpin akan dinilai masyarakatnya. Seorang presiden yang memaksakan diri untuk tetap melawat ke luar negeri padahal situasi dalam negeri belum layak untuk ditinggalkan, akan memperoleh cemooh dan kritik, sebagai presiden yang kurang paham skala prioritas.

Apa hakikat pengambilan keputusan itu?

Setiap orang, apalagi pemimpin pasti memiliki banyak pilihan dalam hidup, dan mereka harus memutuskan sesuatu. Karenanya, menurut J. Salusu, kata putusan (*decision*) berarti pilihan (*choice*). Namun, ia bukan pilihan antara yang benar dan salah, tetapi, sebagaimana dikutip Salusu dari Drucker, antara yang "hampir benar" dan "hampir salah". Ini menarik karena dunia ini relatif, yang mutlak hanya Tuhan, bukan? Pengambilan keputusan itu, bisa dibilang seni, bisa juga teknis. Tapi, pandangan yang bijak selalu mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah serangkain proses atas

162 Covey (1997:288).

PHOTOBUCKET.COM

Kualitas keputusan itu seperti elang menukik tepat waktu ...

- Sun Tzu

The quality of decision is like the well-timed swoop of a falcon ...

satu seri aktivitas yang berkaitan. Keputusan adalah sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukannya pertimbangan-pertimbangan yang diambil setelah sejumlah kemungkinan dipilih menjadi satu pilihan, sementara yang lain dikesampingkan.[163]

Bagaimana teknis pengambilan keputusan?

Begini: setiap keputusan mempunyai konteksnya masing-masing — berdasarkan skala prioritasnya. Ada hal yang perlu diputuskan segera, karena bersifat mendesak tetapi kurang mendasar, ada pula keputusan yang bersifat sangat mendasar dan perlu kehati-hatian. Seorang pemimpin yang lama memutuskan sesuatu, *lelet*, barangkali memandang persoalan yang hendak diputuskannya itu sangat mendasar dan ia butuh waktu panjang untuk berpikir, menimbang-nimbang, sebelum memutuskan. Kalau sebuah persoalan itu mendesak dan kurang mendasar mestinya, keputusan (politik) bisa dilakukan secara ekstra-cepat — dan tepat. Menurut Brinckloe (1977) sebagaimana dikutip Salusu, terdapat empat tingkat keputusan:

163 Salusu (2006:51).

Siapapun yang memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya dalam politik tahu bahwa memperoleh uang bukanlah prioritas utama

- Angela Merkel

Whoever decides to dedicate their life to politics knows that earning money isn't the top priority.

1. Keputusan otomatis (*automatic decisions*). Ia dibuat sangat sederhana, tapi tetap memerlukan informasi. Hanya saja, informasi itu sekaligus melahirkan keputusan. Seorang pengemudi yang memperoleh informasi di Jalan A terjadi kemacetan parah, otomatis akan berupaya mencari alternatif.
2. Keputusan berdasar informasi yang diharapkan (*expected information decision*). Tingkat informasinya mulai sedikit kompleks. Informasi yang ada memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. Tetapi keputusan belum segera bisa dibuat, karena informasi itu masih butuh untuk dipelajari lagi. Setelah hasil studi dilakukan, maka keputusan pun segera dibuat.
3. Keputusan berdasar berbagai pertimbangan (*factor weighting decision*). Ia lebih kompleks mengingat lebih banyak informasi yang harus dikumpulkan dan dianalisis, dipertimbangkan, diperhitungkan dengan berbagai metode sebelum dijatuhkan putusan.
4. Keputusan berdasar ketidakpastian ganda (*dual-uncertainty decisions*). Keputusan tingkat empat ini merupakan tingkat keputusan paling kompleks. Jumlah informasi yang dibutuhkan sangat banyak — tentu saja dibutuhkan perjuangan keras untuk mengecek validitas informasi. Kadang-kadang satu informasi dengan yang lain bertentangan dan semakin mencatatkan ketidakpastian. Oleh karena itu keputusan semacam ini mengandung risiko jauh lebih besar ketimbang keputusan-keputusan tingkat di bawahnya.[164]

Sementara itu Hoy sebagaimana dikutip Salusu membagi jenis keputusan ke dalam: (1) keputusan umum (*generic decisions*) yang timbul dari berbagai macam kebijakan, peraturan dan prinsip yang sudah ditetapkan; dan (2) keputusan unik (*unique decisions*) atau keputusan khusus, yaitu keputusan kreatif yang memerlukan ketentuan tersendiri di luar batas aturan yang telah ditetapkan.[165]

Di sisi lainnya lagi, para ahli mencatat adanya tiga jenis keputusan yang lazim kita ketahui: (1) keputusan stratejik; (2) keputusan taktis; (3) keputusan operasional. Biasanya ia dihubungkan dengan tanggung jawab setiap level kepemimpinan: pemimpin puncak bertanggung jawab di level stratejik; pemimpin menengah bertanggung jawab di level taktis; pemimpin kelas

164 Salusu (2006:55).

165 Salusu (2006:55).

bawah bertanggung jawab di level operasional — yang merupakan hirarkhi terakhir dari keputusan taktis dan strategis. Kita juga perlu mengatahui kategori keputusan: (1) keputusan representatif; (2) keputusan empiris; dan keputusan informasi. Apabila kita terjemahkan secara luas, keputusan-keputusan politik banyak merupakan keputusan yang bersifat representatif. Misalnya, seorang presiden yang hadir dari sebuah koalisi pelangi alias dari banyak partai, maka dalam menyusun kabinet susah untuk mengabaikan faktor representasi. Akibatnya ia mengabaikan pertimbangan empiris-rasional, kabinet harus diisi oleh *the right man on the right place* atau *zaken kabinet*. Pemimpin organisasi politik yang *cacth-all*, alias dengan berbagai latar belakang, juga demikian — pertimbangan reoresentasi tidak boleh diabaikan.

Tampaknya para ahli pun mengembangkan model pengambilan keputusan, jelaskan garis besarnya ...

Baik. Kita masih merujuk catatan Salusu. Mengutip Brinckloe, pendekatan-pendekatan dalam pengambilan keputusan terdiri dari: (1) berorientasi fakta; (2) merujuk pengalaman; (3) menajamkan intuisi; (4) mengandalkan logika; (5) analisa sistem — yang dicari menggunakan alat-alat bantuan statistik, dan biasanya ini bersifat kuantitatif seperti dalam analisis berbagai *polling*. Pendekatan lain yang penting untuk dicatat adalah, sebagaimana dikutip dari McGrew: (1) pendekatan proses pengambilan keputusan rasional; (2) model proses organisasional; (3) tawar-menawar politik.[166]

Pengambilan keputusan rasional itu yang bagaimana?

Baik. Kita uraikan secara bebas. Begini: (1) pembuat keputusan mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai secara relevan; (2) pembuat keputusan mengetahui kriteria untuk menilai tujuan-tujuan itu, dan menyusun peringkat skala prioritasnya; (3) memeriksa semua alternatif; (4) memilih alternatif yang efisien dan efektif. Jadi, umum sekali. Langkahnya nyata dan rasional.

Berpikir rasional itu terkait dengan bagaimana akal/pikiran bekerja secara wajar, atau yang bagaimana?

Hal-Ikhwal pikiran manusia ini, Lehrer mengingatkan kembali pandangan, atau tepatnya metafora Plato. Sang filosof legendaris Yunani kuno ini mengumpamakan pikiran seperti kereta perang yang ditarik dua ekor kuda. Otak rasional, menurut Plato, adalah kusir/saisnya. Saislah pemegang tali-tali kendali dan pengambil keputusan ke mana arah lari kedua kuda-

166 Salusu (2006:67).

Ketika Anda melihat bagaimana Presiden memutuskan kebijakan dan politik, Anda melihat siapa dia. Esensi Kepresidenan adalah pengambilan keputusan

- Bob Woodward

When you see how the President makes political or policy decisions, you see who he is. The essence of the Presidency is decision-making.

nya. Andaikata kudanya membangkang, si sais tinggal memecutnya untuk meneguhkan kembali otoritasnya. Salah seekor kudanya berasal dari keturunan yang baik dan berperilaku baik pula. Tetapi, kuda lainnya sulit dikendalikan oleh sais terbaik sekalipun. Kuda ini, kata Plato, berasal dari keturunan yang jelek: lehernya mirip banteng, hidungnya pesek, kulitnya hitam, rambut di sekitar telinganya lebat, dungu bagai batu, dan harus dicambuk dan dipukul dengan tongkat. Dalam metafora Plato itu, sang kuda bandel ini merepresentasikan emosi-emosi negatif dan destruktif. Tugas saisnya adalah mencegah agar kuda hitam ini tak bergerak liar dan menjaga kedua kuda berlari lurus ke depan.[167]

Menarik sekali metafor itu: pemikir rasional itu sais yang andal?

Melalui metafor itu, Plato membagi pikiran ke dalam dua belahan yang terpisah. Ia dipandang sebagai ajang tarik-menarik antara akal dan emosi. tatkala sais dan kuda-kudanya mempunyai keinginan yang berlainan, menurut Plato, seharusnya saislah yang ditaati. "Jika unsur-unsur mulia, menuntun ke arah ketertiban dan filsafat, dari pikiran ini berkuasa," catatnya, kita dapat menciptakan kehidupan yang bahagia dan harmonis, dapat menguasai diri kita sendiri". Namun, Plato mengingatkan pendritaan dan percekcokan terjadi ketika kehidupan dikuasai oleh emosi-emosi yang impulsif. Apabila kita menurut saja pada kedua kuda ini, kita menyerupai, "orang bodoh yang dijerumuskan ke lembah nista".[168]

Kalau keputusan organisasional?

Jelas ia terkait mekanisme dan aturan main yang ditetapkan oleh organisasi. AD/ART organisasi merupakan rujukan utamanya.[169] Karena organisa-

167 Lehrer (2009:31).

168 Lehrer (2009:31).

169 AD adalah singkatan dari Anggaran Dasar, merupakan dokumen penting tertulis dari sebuah organisasi yang secara umum menegaskan tujuan dan asas organisasi. Sementara ART merupakan singkatan dari Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi, yeng berisi hal-hal yang bersifat strategis-teknis, termasuk tatacara mengatasi konflik.

Pada akhirnya, kebijakan rasional itu selalu baik
- Paul Keating
In the end, rational policy is always good.

si bukan individu, melainkan kumpulan individu, maka mereka diikat oleh aturan main yang ditetapkan bersama. Keputusan organisasi tentulah bersifat formal dan mengikat para anggota organisasi. Memang, seringkali ada konflik dalam hal dinamika untuk mencapai suatu keputusan organisasi. Ada pihak yang puas dan tidak puas. Kalau pihak yang tidak puas menggugat keputusan organisasi yang prosesnya dipandang tidak adil, maka biasanya itu bisa menjadi awal mula dari konflik internal.

Kalau keputusan tawar-menawar?

Model pengambilan keputusan ini kita kenal sebagai *dagang sapi*. Bahwa dinamika pengambilan keputusan yang mempertemukan berbagai kepentingan, selalu terkait dengan proses tawar-menawar. Menurut Gortner sebagaimana dikutip Salusu, metode tawar-menawar inkremental (*incremental-bargaining*), merupakan model mendasar dalam aktivitas politik, yakni penyelesaian konflik dengan bernegosiasi. Karakteristik dari inkrementalisme ialah kompromi.[170] Kompromi identik konsensus, kesepakatan bersama yang mengikat. Politik itu dinamis sebagai pergumulan fluktuatif konflik dan konsensus. Konflik itu wajar dalam politik. Ia tidak dapat sepenuhnya dihindari atau ditiadakan. Konflik harus dikelola, agar tercapai suatu konsensus yang disepakati bersama.

Kalau begitu, politik itu kumpulan konflik dan konsensus?

Begitulah. Anda akan menemui uraian konflik dan konsensus tersebar di buku ini. Pengelolaan politik itulah manajemen konflik. Kita camkan uraian Heywood, bahwa: secara spesifik, politik dilihat sebagai sebuah cara untuk memecahkan konflik, yaitu dengan kompromi, perdamaian dan negosiasi, daripada melalui kekuatan atau senjata terhunus.[171] Rumusan itu, tentu lazim dilontarkan banyak pihak, bukan? Maka, pahamlah kita bahwa yang dimaksud solusi politik itu berbeda dengan solusi militer. Dalam hal ini, terutama, kita segera ingat pandangan Clausewitz, *war is the continuation of politics by other means*.[172] Bahwa perang ialah kelanjutan belaka dari politik dengan cara lain. Kalau diplomasi politik (untuk damai alias mencapai konsensus) gagal, maka perang ialah kelanjutannya.

170 Salusu (2006:69).
171 Heywood (2014:12)
172 Clausewitz (1982).

Tadi sudah dibahas soal keputusan rasional, apakah itu identik dengan keputusan objektif?

Pemikiran rasional tentu berbeda dengan pemikiran irasional, karena rasional itu mengarah ke obyektivitas. Ada satu ilustrasi menarik tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Abraham Lincoln. Menurut sejarawan Doris Kearns Goodwin, yang menjadikan Lincoln hebat adalah kemampuannya menyikapi beragam pandangan. Lincoln sengaja memasukkan lawan-lawan politiknya yang memiliki ideologi yang berbeda dalam kabinet: yang satu para penentang perbudakan, satunya lagi yang pernah mempunyai budak. Saat membuat keputusan, Lincoln selalu membuka perdebatan dan diskusi yang dinamis. Meskipun beberapa anggota kabinetnya awalnya beranggapan bahwa Lincoln tak berkemauan kuat, peragu, dan tak layak menjadi presiden, mereka akhirnya mengerti bahwa kemampuan Lincoln untuk memegang pendapat-pendapat yang berseberangan merupakan aset yang berharga. Dari sini, Lehrer menggarisbawahi,

> Kelebihan Lincoln itu dapat diterapkan pada otak kita: ketika membuat keputusan, tekanlah secara aktif hasrat untuk meredam perdebatan. Sediakan waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh seluruh daerah otak. Keputusan-keputusan yang baik jarang sekali muncul dari kesepakatan semu.[173]

Kharisma, Mitos, Obyektivitas, dan Rasionalitas

APA KHARISMA itu?

Kharisma artinya karunia (*gift*) yang merujuk pada bahasa Yunani *karis* atau *kharis* atau rahmat karunia Ilahi yang dilekatkan pada seseorang, bahkan pada seseorang tersebut diberikan mukjizat yang dalam perspektif kenabian hadir sebagai penanda khusus bagi umatnya. Jadi, apabila merujuk pada hal sedemikian, kharisma dipandang sebagai konsep religius (keagamaan). Namun, Weber merevisi ulang konsep sedemikian, di mana kharisma,

> ... merujuk kepada kualitas tertentu dari personalitas individu di mana ia dianggap luar biasa dan diperlakukan selayaknya sosok yang diberkati secara supranatural, adidaya, atau setidak-tidaknya secara khusus memiliki kekuatan dan kualifikasi-kualifikasi istimewa. Kelebihan-kelebihan itu tidak dapat diakses oleh orang biasa, tetapi dianggap bersifat ilahiah atau sebagai teladan, dan atas dasar itu individu yang bersangkutan diperlakukan sebagai seorang

173 Lehrer (2009:282).

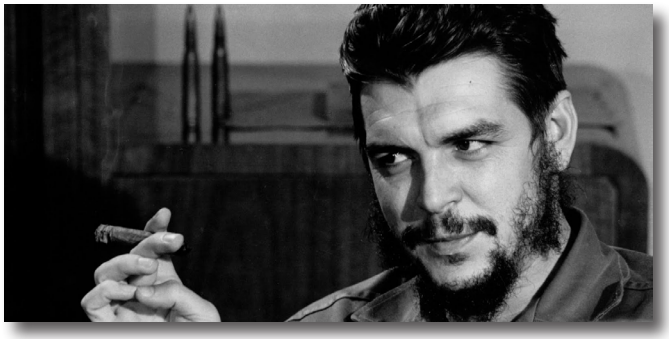

BAGNAS.TK

Aku bukan seorang pembebas. Pembebas tidak ada. Orang-orang lah yang membebaskan dirinya

- Che Guevara

I am not a liberator. Liberators do not exist.
The people liberate themselves.

"pemimpin".[174]

Menurut Weber, kharisma merupakan salah satu otoritas atau legitimasi kekuasaan,selain dua bentuk otoritas lain, yakni otoritas tradisional (*feudal*) dan otoritas legal atau rasional.

Ada yang mengatakan kharisma itu hadir sejak sang tokoh lahir, tetapi ada pula yang mengatakan itu semua dapat dipelajari. Adakah penjelasan mengenai hal ini?

Ada yang berpendapat kharisma itu melekat sejak lahir (bersifat genetis), tetapi ada pula yang menyangkalnya. Namun demikian dua pendapat itu ada kelebihan dan kelemahannya. Apabila kharisma itu melekat pada sosok tertentu sejak lahir, maka bagaimana mungkin ia akan berkharisma begitu saja tanpa adanya ujian-ujian kepemimpinan? Pasti ada faktor non-pembawaan, yakni faktor lingkungan yang mempertegas karakter kepemimpinannya. Bahkan, mungkin faktor pembawaan dianggap tidak signifikan dibanding dengan non-pembawaan. Yang jelas kharisma telah dipandang sebagai ciri yang melekat pada seseorang sehingga ia memiliki *daya pikat* yang kuat. Ia memiliki kualitas-kualitas daya pikat personal yang ditunjukkannya baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Setidaknya terdapat tiga ciri atas pemimpin yang kharismatik itu: (1) Memiliki kepekaan emosi yang tinggi; (2) Mampu mempengaruhi yang lain secara luar biasa; dan (3) Tidak mudah untuk terpengaruh yang lain.

Soal daya pikat, apakah kharisma dapat diciptakan?

174 Lihat, kata kunci "*Charisma*" dalam Marturano dan Gosling (2007:19).

Dalam perspektif teater alias sandiwara, Stanislavski berpendapat kharisma seorang tokoh dapat dibangun.[175] Stanislavski memandang pentingnya menubuhkan tokoh. Menubuhkan berarti membuat sang tokoh atraktif dengan tubuhnya. Bentuk lahiriah memang penting dalam proses penubuhan sang aktor. Tanpa bentuk lahiriah, penokohan batin atau ruh mustahil sampai ke "penonton". Karenanya penubuhan tokoh harus otentik, selaras antara ruh dan tampilan fisik.

Apakah perspektif teater relevan dengan konteks kepemimpinan politik?

Dalam hal ini pastilah relevan. Penjelasannya sederhana, ia aktor yang butuh panggung. Tak ada pemimpin yang tak butuh panggung, kecuali ia telah kehilangan panggung dan atau pensiun. *Nah*, teater menggambarkan korelasi antara aktor dan panggungnya. Dalam politik, jelas sekali panggung dan aktor (politik) berhubungan. Yang pertama kali dilakukan oleh politisi ialah mencari panggung. Setelah mendapat panggung, maka ia akan pakai panggungnya itu untuk mempertahankan dan mengembangkan pengaruh. Dalam perspektif politik sebagai arena kontestasi, maka Anda — sebagai politisi — pun bisa merebut dan atau justru kehilangan panggung.

Baiklah, saya paham. Apa sebaiknya yang dilakukan politisi sebagai aktor dalam panggungnya?

Stanislavski menyebut tiga hal penting: (1) menyampaikan pemikiran secara runtut dan logis; (2) hal yang serumit apapun bisa tersampaikan, dan (3) estetika yang tejaga. Artinya, tokoh harus logis, etis, dan estetis. Tokoh politik tentu diharapkan mampu menjelaskan segala hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya secara tidak hanya logis, tetapi juga etis, sekaligus estetis. Logis artinya tidak asal bicara saja, bukan *waton omong*, tetapi *omong waton*, bicara yang ada isinya atau ada alur nalarnya.

Etis terkait dengan perasaan simpati dan empati pada *audiens* alias mereka yang diajak bicara. Ada satu frekuensi yang *nyambung* antara si pembicara dengan yang diajak bicara. Estetis terkait dengan tampilan luar atau kualitas penubuhan, yang merefleksikan citra baik sang tokoh. Pepatah Jawa mengatakan *ajining diri soko lati*, *ajining rogo soko busono*. Harga diri (jiwa) terletak tutur-kata, harga tubuh (raga, tampilan) terletak pada estetika berbusana kita.

Tapi, kan kharisma pemimpin tidak selalu ditentukan oleh baju apa yang disandangnya ...

175 Stanislavski (2008).

Kekurangan kharisma itu fatal

-Jenny Holzer

Lack of charisma can be fatal.

Alasan kesuksesan kita, kekasih? Keseluruhan kharismaku, tentunya

- Freddie Mercury

The reason we're successful, darling? My overall charisma, of course.

Betul. Walaupun tampilan fisik sangat disarankan, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah kesan bahwa pemimpin memiliki kehebatan yang diyakini mampu membawa harapan rakyat. Demikian pula dengan kesan bahwa kehebatan seseorang karena keluasan ilmu dan kebijakan yang dimilikinya. Legenda Sunan Kalijaga berikut menarik disimak. Suatu ketika Ki Ageng Pandanaran mengusir Kalijaga yang menyamar sebagai pengemis dengan pakaian compang-camping, tapi ketika "sang pengemis" datang kembali dengan pakaian kebesaran, Ki Ageng girang menyambutnya. Pakaian itu kadang menipu, dan membuat orang lupa kesejatian. Kalijaga mengambil cangkul, mencangkul dan setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas, emas dan emas. Kalau yang dipandang sekadar materi yang kau pandang Ki Ageng, o ambillah emas-emas itu.[176]

Kisah itu mirip dengan anekdot sufi Nasruddin Hoja. Rekan saya wartawan senior *Jawa Pos* Rohman Budijanto telah mengingatkan kisah ini, ketika ia menuliskan reportasenya mengunjungi makam Nasruddin Hoja — sufi arif yang humoris itu. Kita baca laporannya dari Aksehir, Turki,

> Sekitar 300 meter dari masjid itu, di Taman Nasruddin Hoja, berdirilah patung Nasruddin Hoja. Sosoknya beturban sebesar waluh dan berjubah serta berjanggut panjang. Dia mengendarai keledai. Patung itu berdiri agak tinggi, sekitar enam meter. Didirikan di atas pedestal atau landasan setinggi sekitar 2,5 meter. Patung orang lucu itu menghadap ke arah kuburannya. Pada malam hari, kuburan tersebut tertutup bagi peziarah.
>
> Di pedestal patung Hoja itu ada relief. Nasruddin Hoja tampak di tengah acara jamuan makan di meja bundar bersama banyak orang.
>
> Boleh jadi, itu kisah ketika Nasruddin datang ke undangan makan, tapi

176 Tentang kisah dan ajaran Sunan Kalijaga yang lebih mendalam, lihat misalnya Chojim (2006); perlu dibaca juga Adjidarma (2007).

THEGUARDIAN.COM

Sejarah kaya dengan manusia petualang, penuh kharisma, melalui naluri yang sangat dikembangkan untuk kepentingannya sendiri, demi mengejar kekuasaan pribadi ...

- Umberto Eco

History is rich with adventurous men, long on charisma, with a highly developed instinct for their own interests, who have pursued personal power ...

tak diacuhkan. Nasruddin menyadari itu gara-gara dia berpakaian biasa. Lalu, dia pulang dan berganti jubah yang bagus. Kini banyak orang menyambutnya dengan ramah.

Dasar Nasruddin, dia lalu memasukkan banyak makanan ke saku jubahnya. "Ayo jubah, makanlah!" Orang-orang pun heran dan bertanya kepadanya.

"Tadi aku ke sini dengan pakaian biasa tak ada yang mempersilakan makan," katanya.

"Maka, kini yang berhak makan adalah jubahku .."[177]

Kadang orang awam perlu dipertunjukkan keajaiban-keajaiban, baru kemudian sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada dirinya. Mereka dikejutkan oleh semacam setrum listrik. Berandal Lokajaya "sebutan lapangan" Raden Mas Said juga begitu. Sosok berandal dari Tuban yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga itu, suatu ketika mencegat seorang tua yang tampaknya tak punya apa-apa. Tapi siapa tahu? Orang tua yang dirampok itu berujar, "Apa yang kau maui dari aku? Aku tak punya apa-apa? Kalau kau mau emas-emasan, lihatlah buah kolang-kaling itu!"

Sontak Lokajaya tercengang. Pohon kolang-kaling itu berbuah emas. Lokajaya lemas, o betapa menipunya materi. Sejak itulah ia memutuskan berguru pada Sunan Bonang, orangtua itu.

177 Rohman Budijanto, "Mengunjungi Situs yang Menjadi Legenda Islam di Turki (2): Festival Tahunan Kenang Penunggang Keledai yang Jenaka", *Jawa Pos*, 4 Oktober 2008.

Menang atau kalah, kita pergi belanja usai pemilu
- Imelda Marcos
Win or lose, we go shopping after the election.

Tapi, bukankah kharisma sering susah dirasionalisasi atau dimaterikan, karena lekat padanya mitos-mitos?

Orang tradisional memandang kepemimpian sebagai sesuatu yang sudah *taken for granted* alias melekat. Ini terkait dengan "teori pemimpin itu dilahirkan" atau *traits theory* sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Kharisma dari perspektif ini, lahir secara genetis. Tetapi walaupun seorang pemimpin bukan dari kalangan "darah biru", dalam legenda-legenda masa lalu, kharisma datang dari wahyu atau klaim legitmasi spiritual, yang bercampur aneka mitos.

Di pedalaman Jawa, sering kita dengar cerita: ketika Pak Suto terpilih jadi lurah mengalahkan pesaingnya, yakni Pak Noyo dalam pilkades langsung, analisis yang berkembang di warung-warung adalah Pak Suto secara legitimasi spiritual lebih tinggi. Dan, kemudian berkembang cerita bahwa malam sebelum Pak Suto terpilih, sebuah cahaya terang menyinari rumahnya. Datangnya sesaat, seperti ada komet mendarat. Itulah *pulung*, wahyu *keprabon* alias mandat *ilahiah* bagi Pak Suto untuk jadi pemimpin.

Adapun Pak Suto tertimpa pulung, itu karena ia lebih *afdol* dalam laku prihatin, menjalani langkah-langkah spiritual, sehingga *jagad gede* alias alam semesta pun mengizinkan, merestui. Begitu pula sebaliknya, jatuhnya seorang pemimpin pun karena wahyu *keprabon*-nya hilang. Mitos-mitos spiritual romantik seperti itu memang lazim jadi perbincangan dalam masyarakat agraris. Ketika lurah tercabut kekuasaannya, sebutan yang lazim pula ialah *lurah dongkol,* ia yang tak lagi *powerfull* melainkan *poweless*. Tetapi, kalau sang lurah dongkol itu kharismatik, ia masih disukai warganya, tempat mereka menimba kebijaksanaan, sebagai orang yang dituakan.

Bagaimana kalau kharisma diselewengkan?

Ia masuk ke kategori pemimpin kharismatik yang tidak etis.[178] Yang etis memanfaatkan kharisma dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, tetapi yang tidak etis memanipulasi kharismanya untuk kepentingan dirinya sendiri, serta menikmati betul kondisi demikian itu, sehingga selalu berupaya mempertahankan kharismanya itu dengan manipulasi simbol dan mitos. Pemimpin yang mengembangkan kharisma palsu, pasti ada pamrihnya, khususnya pamrih untuk memanfaatkan para pengikut yang telah

178 Safaria (2004).

tersihir untuk optimalisasi kepentingan dirinya.

Tabel 10.3.
Etika Pemimpin Kharismatik[179]

MIMPIN KHARISMATIK ETIS	PEMIMPIN KHARISMATIK TIDAK ETIS
Menggunakan kekuasaan untuk melayani orang lain.	Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya.
Mempertimbangkan dan belajar dari kritik.	Mementingkan visi pribadinya.
Meluruskan visinya dengan kebutuhan dan aspirasi pengikut.	Menolak dan menyensor kritik dan perbedaan.
Menstimulasi pengikut untuk berpikir mandiri dan memperta nyakan pandangan pemimpinnya.	Menuntut bawahan untuk patuh dan mengikuti keputusan pemimpin tanpa pertanyaan.
Komunikasi dua-arah dan terbuka.	Komunikasi satu arah.
Melatih, mengembangkan, dan mendorong pangikut, membagi penghormatan dengan orang lain.	Tidak peka terhadap kebutuhan pengikut.
Mendasarkan diri pada nilai moral internal untuk memuaskan kepentingan organisasi dan masyarakat.	Mendasarkan diri pada nilai moral eksternal untuk memuaskan kepentingan diri sendiri.

Pemimpin, adakalanya seperti penyihir yang membutakan rasionalitas atau akal sehat/kewarasan banyak orang. Tetapi, pemimpin kharismatik yang etis, tidak akan memanfaatkan *ilmu sihir*-nya untuk hal-hal yang tidak etis. Lagi pula, di alam keterbukaan dan demokrasi, setiap sikap, kebijakan dan langkah pemimpin akan selalu dicermati dan dinilai oleh masyarakat luas. Pemimpin kharismatik yang tidak etis berkecenderungan otoriter, sehingga tentu akan memicu perlawanan dari orang-orang yang didzaliminya. Demikianlah.

Popularitas, Otentisitas, dan Elektabilitas

SEBERAPA PENTING popularitas bagi pemimpin?

Pemimpin perlu popularitas, kendatipun popularitas bukan segalanya. Menurut Nixon pemimpin tidak bekerja untuk mengejar popularitas, tetapi

179 Safaria (2004:61).

popularitaslah yang bakal mengejar dirinya.[180] Pandangan tersebut, hampir sama dengan provokasi pemasar *multilevel marketing* (MLM), bahwa kalau anda bekerja dengan benar hingga mencapai level *gold*, maka uang akan mengejar anda, ke manapun. Demikianlah, popularitas akan mengejar pemimpin, siapapun yang mampu menunjukkan prestasinya dengan bekerja sungguh-sungguh *nothing to loose*.

Bagaimana dengan polling alias jajak pendapat?

Polling merupakan pendekatan modern yang sudah amat lazim dilakukan untuk mengukur tingkat popularitas tokoh dari waktu ke waktu dalam sebuah kompetisi politik demokratis yang dilakukan secara reguler. Hasil *polling* fluktuatif dari waktu ke waktu. Hasil *polling* dapat menunjukkan bahwa popularitas tokoh stabil, *anjlok*, atau meroket. Sejak era reformasi pasca-Pemilu 1999, *polling* menjadi indikator atau pengukur popularitas. Saat ini banyak lembaga polling yang, terkadang, satu sama lain hasilnya berlainan. Di sisi lain, meskipun aspek komersialnya terasa sekali, integritas lembaga *polling* sangat penting. Jajak pendapat merupakan industri yang sangat maju di negara demokrasi seperti AS, dimana hasil jajak pendapat kerap dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik Gedung Putih.[181] Di Indonesia, telah hadir beragam lembaga jajak pendapat, dan cenderung sudah menjadi "industri tersendiri".

Perlukah etika jajak pendapat?

Sangat perlu. Seiring dengan mengedepannya unsur komersial dalam proyek politik pemenangan kandidat, kita khawatir berbagai kepentingan publik terkesampingkan. Keberadaan semacam komisi etik antar-lembaga jajak pendapat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dari kemungkinan penyalahgunaannya.

Apa hubungan popularitas dan pencitraan politik?

Jawaban terhadap pertanyaan ini sudah tercakup di pengantar buku ini: hubungan keduanya erat mengingat pemimpin selalu ingin tampil populer dan cenderung memperkuat pencitraan pribadi/organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin politik punya naluri untuk tetap bisa bertahan dalam kekuasaan, dan apabila terpental dari kekuasaan, akan berupaya untuk tetap berpengaruh. Karenanya dapat dipahami mengapa menjelang pemilu biasanya frekuensi iklan politik melonjak. Tidak ada salahnya kandidat beriklan dengan tujuan agar publik mengenal. Bagi yang sudah cukup dikenal, tujuannya

180 Nixon (1982)

181 Saiful Mujani, "Jajak Pendapat Publik Membantu Demokrasi Bekerja", *Kompas*, 1 September 2004.

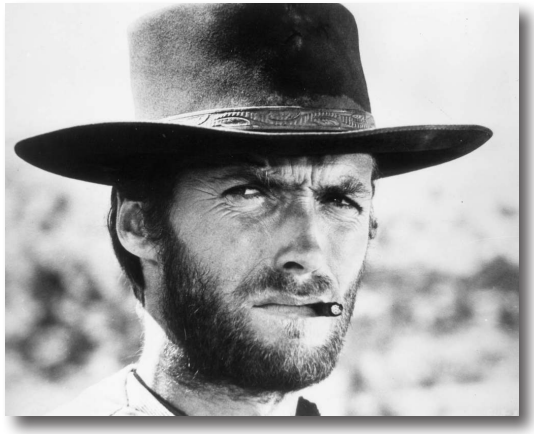

TIME.COM

Sekarang, secara politik, semua orang menjanjikan segalanya. Itulah satu-satunya cara Anda dapat terpilih

- Clint Eastwood

Nowadays, politically, everybody is promising everything. That's the only way you can get elected.

mengingatkan kembali eksistensinya sebagai politisi. Namun, belum tentu tokoh populer otomatis disukai dan dipilih. Karenanya popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas.

Elektabilitas?

Istilah popularitas sudah kita kenal lebih dulu ketimbang elektabilitas. Dalam kamus-kamus bahasa Indonesia hingga awal abad ke-21 ini, kata elektabel tidak kita temukan. Tetapi, saya kira dalam waktu dekat istilah ini diakui secara formal mengingat tingginya penggunaan kata *elektabilitas* di tengah hiruk-pikuk demokrasi langsung yang dihiasi ragam hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei politik yang sering membingungkan. Idealnya, dalam memilih pemimpin hendaknya yang berkualifikasi pemimpin, bukan sekadar karena terpikat popularitasnya.[182]

Soal elektabilitas, akan kita ulas lagi di pembahasan tentang *marketing* politik kelak. Tetapi, perlulah saya singgung di sini, pengetahuan lazim yang saat ini berkembang. Misalnya ulasan "*Seven Steps of Political Marketing*" dari sebuah majalah *marketing* berikut, menarik disimak: konon, strategi berikut digunakan pada pengukuran dan penyusunan strategi pemilu presiden di Korea Selatan pada Desember 2012, dan tujuh langkah *marketing* politik itu dibagi ke tiga kelompok: (1) Popularitas (*popularity*), meliputi

182 M Alfan Alfian, "Demokrasi Kok Elektabel?", *Seputar Indonesia*, 8 Februari 2014.

Iklan adalah kebohongan yang dilegalkan
- H.G. Wells
Advertising is legalized lying

exposure dan *awareness*; (2) kemampuan untuk disukai (*likeability*), meliputi *expectancy*, *engagement*, dan *preference*; dan barulah (3) elektabilitas (*electability*), berupa komitmen dan aksi memilih.[183] Jadi, itulah rupanya, salah satu paket yang lazim ditawarkan oleh lembaga-lembaga konsultan politik dalam berbagai pemilu: bagaimana memoles klien/kandidat sedemikian rupa, melejitkan popularitas, hingga elektabilitasnya. Biayanya bisa mahal, kalau kandidat belum populer sama sekali.

Adapun pemimpin yang dikenal otentik, dalam demokrasi langsung, bisa saja ia tak terpilih?

Para pemimpin yang dikenal otentik pun tetap harus berupaya meng-*up grade* dirinya dalam sebuah kompetisi politik langsung. Iklan hanya salah satu cara, sedangkan otentisitas kepemimpinan adalah proses. Pemimpin yang otentik terlihat dari proses panjang (*track record*) yang dialami sang calon. Publik yang "sadar" akan melihat pemimpin otentik secara keseluruhan, menghitung plus-minusnya. Menurut McGannon, *leadership is action, not position*.[184] Pemimpin tak bisa berbuat hanya dari mengandalkan posisi formalnya. Masalahnya, terkadang kita lemah dalam menimbang dan memilih pemimpin yang otentik dan terpaksa memilih pemimpin yang dianggap "paling baik di antara yang baik" atau "yang dianggap baik, di antara yang tidak baik". Namun, pemimpin yang "baik" belum tentu otentik.

Setidaknya lima level masyarakat dalam menilai calon pemimpin (politik) mereka. *Level satu* mereka yang mampu memilih pemimpin otentik. Katakan ini jenis pemilih yang paling cerdas. *Level kedua*, pemilih berbasis primordial, di mana kualifikasi kepemimpinan yang panjang dan kompleks dilewatkan begitu saja. Termasuk dalam kategori ini pemilih *pejah-gesang*, yang terjerat oleh politik kharisma. *Level ketiga*, pemilih yang suka kemasan-artifisial yang signifikan dipengaruhi iklan-iklan politik. *Level keempat*, pemilih yang tak berdaya dan terjebak pola masokis: publik jenis ini sebenarnya cukup kritis, mampu mengeluh atas keadaan dan kepemimpinan, tetapi tidak sanggup untuk tidak memilih selain partai atau sosok yang pernah "menyakitinya" itu. *Level kelima*, publik yang apatis, yang sudah tidak percaya lagi pada institusi atau sosok politik siapa pun dapat memperbaiki

183 Tim Redaksi *Marketeers* (2015:91-99).

184 Brayniquotes.com

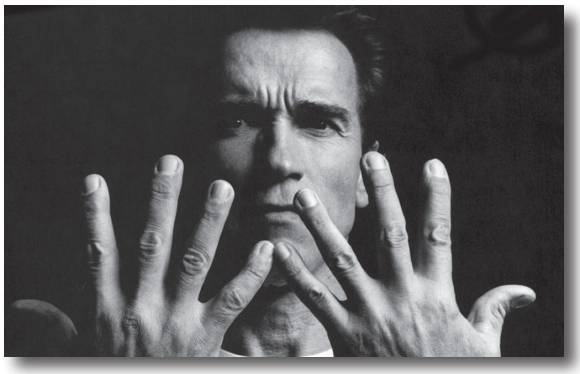

PIINTEREST.COM

Kekuatan tidak datang dari kemenangan. Perjuanganmulah yang membangun kekuatanmu

- Arnold Schwarzenegger

Strength does not come from winning. Your struggles develop your strengths.

keadaan. Mereka tidak sekadar golput (*non-voters*) teknis. [185]

BTW, demokrasi langsung mendesak orang/politisi mendadak populer, dan para artis mendadak politisi ...

Ya, konteksnya idolisasi. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan suatu perkembangan tersendiri dalam *pop culture*. Kontes *Indonesian Idol*, misalnya menjadi suatu model bagi munculnya artis yang hadir mendadak, yang dipilih melalui sms. Ini berbeda dengan artis alami yang kehadirannya butuh proses panjang dan tanpa dipilih *via* sms. Politisi yang ingin tenar dan populer, dituntut punya kesadaran dan aksi *pop culture*. Mereka lantas *ngartis*, memasang iklan, dan cara-cara lain untuk menambah laju popularitasnya. Sementara artis sudah populer, tetapi agar publik tidak sangsi, maka ia harus memperbaiki kompetensinya. Tatkala ia sudah memutuskan pindah atau hijrah ke dunia politik, maka ia adalah seorang politisi — dengan segala konsekuensinya. Tapi, popularitas pun kan belum cukup agar seorang politisi andal, bukan?

Semua kandidat dalam kompetisi politik berharap terpilih. Tetapi, kadang mereka mengeluh soal pragmatisme-transaksional di kalangan pemilih. Bagaimana ini?

Saya berpendapat dimensi pendidikan politiklah yang harus mengemuka. Kalaupun kalah karena memang tak mau berbuat curang dan karena punya prinsip menolak praktik pragmatisme-transaksional yang berlebihan alias tak masuk akal, maka itu lebih terhormat, ketimbang yang menang

185 M. Alfan Alfian, "Pemimpin Pilihan Iklan", *Kompas*, 24 Juli 2008.

Polling hanyalah alat untuk mengukur opini publik ... Interpretasi lainnya omong kosong

- George Gallup

Polling is merely an instrument for gauging public opinion ... Any other interpretation is nonsense.

tetapi curang, lancung, dan tidak mendidik masyarakat. Politisi Nurul Arifin pernah menganalogikan praktek pemilu legislatif 2014 sebagai perang saudara di Suriah yang ganas, tidak ada etikanya lagi, karena sesama saudara saling memakan.[186] Persaingan tajamlah yang membuat Nurul menghubungkan pemilu dengan perang Suriah. Sebab, yang diperebutkan adalah dukungan suara terbanyak dalam sistem pemilu proporsional terbuka murni berdasarkan suara terbanyak. Seorang caleg bersaing dengan rekan mereka dalam satu parpol dan dari parpol lain. Tidak ada saudara dalam kompetisi elektoral, yang ada sesama lawan. Melalui kalimat "sesama saudara saling memakan", aktris film *Naga Bonar* (1986) tersebut sesungguhnya tengah menegaskan bahwa konsekuensi kanibalisme-politik tak terelakkan dan nyata dalam pemilu sedemikian. Tuntutan ongkos para caleg keterlaluan. Salah satu penyebabnya, masyarakat memiliki keberanian yang tinggi untuk meminta uang atau rupa-rupa. Pola pragmatisme-transaksional dominan di lapangan. Para caleg yang uangnya banyak pun berpeluang besar menang. Yang pas-pasan, apalagi yang irit dan tekor, mudah (kalau bukan pasti) tersingkir — nyaris kecuali kejaiban terjadi.

Mengapa itu bisa terjadi, apakah ada kaitannya dengan sistem?

Sistem proporsional berdasarkan dukungan suara terbanyak memang berpeluang mempersubur praktik-praktik tersebut. Sistem ini merupakan ekstrem lain dari sistem proporsional dengan *stelsel* daftar tertutup. Kalau yang pertama parpol hanya menyorongkan orang sebagai caleg, yang kedua, parpol perannya lebih penting lagi, karena ia bisa mengatur nomor urut caleg yang menentukan kemenangan. Orang sering mengeluh kelemahan-kelemahan sistem proporsional terbuka murni ini dan bernostalgia dengan era sistem proporsional tertutup: dulu masyarakat tidak seagresif sekarang. Dulu, masyarakat tidak berani terang-terangan memeras para caleg.

Disebut juga, sistem proporsional tertutup lebih menjamin pembangunan kelembagaan partai. Sistem pengkaderan dapat dijaminkan ke sistem pemilu yang memprioritaskan kader-kader terbaik pilihan parpol. Dulu, pemilu kita simpel. Pemilih cukup mencoblos tanda gambar parpol.

186 M. Alfan Alfian, "Pemilu dan Kecelakaan Sistem," *Koran Tempo*, 6 Mei 2014.

Setiap sistem politik adalah kecelakaan. Jika sistem bekerja dengan baik secara keseluruhan, itu keberuntungan kecelakaan

- Edward Banfield

Any political system is an accident. If the system works well on the whole it is a lucky accident.

Dulu, orang parpol bekerja sebagai bagian integral dari mesin politik besar parpol. Tapi, semua itu tinggal kenangan ketika sistem proporsional tertutup digeser oleh yang terbuka.

Sistem perpolitikan kita berpeluang terus berubah kendatipun tidak ada satu pun sistem pemilu yang dianggap paling ideal. Para pakar dan, terutama, politisi terus berikhtiar mencari sistem pemilu yang cocok. Tentu saja hal ini tidak gampang. Dalam hal ini menarik apa yang disitir Edward Banfield: *Any political system is an accident. If the system works well on the whole it is a lucky accident*.[187]

Wah, jangan-jangan sistem politik kita buah kecelakaan?

Kalau merujuk Banfield, ya. Sayang tidak semua sistem membuahkan keberuntungan (*a lucky accident*). Ada yang diuntungkan dan tidak. Tetapi, sekadar mengharapkan sistem pemilu menguntungkan diri dan kelompok, berisiko senjata makan tuan. Tidak semua pembuat undang-undang pemilu otomatis diuntungkan pada praktik pemilihan. Karenanya bisa dipahami, mengapa sistem pemilu potensial untuk diubah-ubah. Hal ini sesungguhnya lazim saja, asal pertimbangannya rasional belaka.

Norris mencatat, minat rekayasa pemilu tumbuh tidak saja seiring dengan membesarnya tuntutan praktik demokrasi dalam politik, tetapi juga dalam hal menyempurnakannya. Yang terakhir ini terkait reformasi sistem pemilu. Misalnya, di Inggris, Pemerintahan Tony Blair (1997-2007) secara radikal merombak sistem pemilihan *first-past-the-post* ke sistem alternatif. Pada 1993 Selandia Baru setelah lebih dari satu abad menerapkan sistem pemilihan *first-past-the-post*, beralih ke sistem lainnya (*mixed-member proportional system*). Pada 1994, Jepang juga mengubah sistem pemilunya, dan seterusnya.[188] Di Indonesia, sistem pemilu sejak 1955 hingga kini telah berganti-ganti, bukan? Kalau kita merujuk Banfield, sistem apapun yang dipilih dan diimplementasikan, diharapkan *a lucky accident* belaka!

187 Banfield, (1982).

188 Norris (2004).

Pilihan, Level, dan Pengaruh

ADAKAH PENGETAHUAN sederhana mengenai pilihan-pilihan kepemimpinan, dan kemudian hal itu menunjukkan pula level alias *maqam* kepemimpinannya?

Kita baca saja catatan Pradiansyah.[189] Ia menjelaskan lima pilihan kepemimpinan. Juga apabila kita baca Collins.[190] Yang versi Collins kita simpan sebentar, untuk dimunculkan ketika saya membahas tentang warisan kepemimpinan di bab ini juga.

Sekarang kita simak versi Pradiansyah. Pilihan-pilihan ini sekaligus menunjukkan tingkat (*level*) kepemimpinan di antara dua kutub: demokratis dan otoriter.

- Pilihan pertama kepemimpinan *level* lima atau pemimpin dengan permintaan biasa. Pada situasi ini pemimpin meminta orang lain untuk melakukan apa saja yang diinginkan, di mana orang lain itu langsung mau melakukan tanpa banyak butuh penjelasan. Artinya tingkat kepercayaan pada pemimpin sangat optimal, dan orang yang melakukan pekerjaan untuk pemimpinnya itu mengetahui secara pasti manfaatnya.
- Pilihan kedua kepemimpinan *level* empat atau kepemimpinan rasional. Pilihan ini dilakukan kalau pilihan pertama gagal, sehingga pemimpin perlu upaya ekstra meyakinkan yang dipimpin agar tergerak melakukan perintahnya dengan berbagai argumen konsekuensi rasional. Ada proses dialogis di sini.
- Pilihan ketiga atau kepemimpinan *level* ketiga, disebut kepemimpinan dengan imbalan. Pilihan ini diambil kalau dua pilihan sebelumnya gagal. Dalam politik, kepemimpinan *level* ini melahirkan politik dagang sapi. Orang memilih kita bukan karena kompetensi, tetapi karena ada pertukaran-pertukaran politik di belakangnya.
- Pilihan keempat, kepemimpinan level *kedua*, kepemimpinan dengan ancaman. Perlu berbagai ancaman supaya anak-buah patuh; dan; pilihan kelima disebut kepemimpinan *level* pertama, alias kepemimpinan dengan paksaan atau represi.

Pilihan dan level pemimpin tersebut tampak merentang dari hegemoni ke dominasi ...

Benar. Semakin ke ekstrim hegemoni, maka semakin bergerak ke pilihan pertama, semakin ke ekstrim dominasi, makin mengarah ke pilihan

189 Pradiansyah (2006).

190 Collins (2001).

keempat. Intinya, semakin pihak tertentu mampu mengembangkan pengaruh dan pihak lain patuh tanpa represi fisik (*soft power*), arahnya ke hegemoni. Tetapi kalau pendekatan fisik (*hard power*) masih terjadi, arahnya ke dominasi. Berakhirnya Perang Dunia II setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima[191] dan Nagasaki; jatuhnya Uni Sovyet awal 1990-an, menunjukkan yang satu pendekatannya dominatif, perang fisik, satunya lagi hegemonik.

Tentang pengaruh, bagaimana penjelasannya?

Pengaruh (*influence*) merupakan konsep penting kepemimpinan. Ia terkait dengan kekuasaan yang hakikatnya pengaruh. Derajat kepemimpin seseorang terutama diukur dengan bagaimana ia mampu mempengaruhi yang dipimpin. Ini tidak main-main. Pemimpin yang gagal mengembangkan pengaruh, gagal dalam memimpin. Dalam *The Science of Influence*, Hogan memaparkan bagaimana mempengaruhi orang dalam waktu yang relatif singkat. Ilmu mempengaruhi menjelaskan bagaimana cara kerja persuasi, bahwa orang yang berpengaruh: (1) harus menciptakan keselarasan dengan yang dipengaruhinya; (2) memperlihatkan minatnya yang sejati dan sungguh-sungguh; (3) selalu memperhatikan hubungan baik dengan kolega-koleganya; (4) paham akan nilai-nilai yang diyakini oleh yang dipengaruhi; (5) paham akan kebutuhan mereka yang dipengaruhi.[192]

Kalau boleh diringkas dalam kalimat pendek, seorang pemimpin dituntut mampu menyamakan frekuensi dengan yang dipengaruhinya, baru mempengaruhi. Tanpa *kesamaan frekuensi*, apa-apa yang disampaikan ke audiens tidak akan mengena. Yang proaktif menyesuaikan diri atau adaptasi dengan keadaan adalah pemimpin, bukan yang dipimpin.

Salah satu cara ampuh mempengaruhi ialah melalui berkata-kata. Bagaimana kata-kata bisa mengubah sesuatu?

Urban dalam *Positive Words Powerful Result*, menjelaskan kekuatan kata-kata positif.[193] Pemimpin selayaknya mengedepankan kata-kata positif (komunikasi yang berkonteks tinggi, bukan yang berkonteks rendah). Kendatipun demikian, pemimpin dengan gaya kepemimpinan tertentu, biasanya yang informal, suka yang berkonteks rendah.

Dalam hal ini, Oswald membagi kata-kata dalam dua kategori: kata-kata berenergi rendah dan yang berenergi tinggi. Apa saja bedanya, berikut ringkasannya:

191 Diskripsi menarik soal ini, lihat Hersey (2008).

192 Hogan (2007).

193 Urban (2007).

THELEGACYPROJECT.CO.ZA

Pikir dua kali sebelum bicara, karena kata-kata dan pengaruh Anda akan menanam benih baik keberhasilan atau kegagalan dalam pikiran orang lain

- Napoleon Hill

Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.

Tabel 10.4.
Kata-Kata Berenergi Rendah versus Tinggi[194]

KATA-KATA BERENERGI RENDAH	KATA-KATA BERENERGI TINGGI
Menyertai pikiran dan emosi berenergi rendah, biasanya merupakan keyakinan-keyakinan dan model-model bawah sadar (berarti kita tidak menyadarinya) yang kita pegang untuk diri kita sendiri, yang bersifat kurang mendukung dan menghalangi kita terhadap kesuksesan yang kita inginkan.	Menyertai pikiran-pikiran berenergi tinggi, dan tidak seperti kata-kata berenergi rendah, kita dapat berlatih menggunakan kata-kata berenergi tinggi sampai pikiran dan emosi kita menyesuaikan diri, menuju pengalaman yang positif berenergi tinggi.

Apa yang dimaksud dengan kata-kata positif?

Identik dengan "kata-kata berenergi tinggi". Kata-kata positif adalah kata-kata yang tidak menyakitkan. Kata-kata yang tidak menebar kebencian dan kerusakan. Kata-kata positif adalah kata-kata yang manusiawi sekali. Manusia ingin dihargai dan tak mau dicemooh. Perkataan positif menguntungkan semua pihak. Perkataan positif menebarkan energi positif, persahabatan, bukan permusuhan. Ini ada kaitannya dengan soal empati yang juga disinggung di bagian lain buku ini.

Bagaimana kalau pemimpin tidak menggunakan kata-kata

194 Oswald (2008).

Apabila kata-kata gagal, musik bicara

- H.C. Andersen

Where words fail, music speaks.

positif, sebaliknya mengumbar yang negatif?

Fatal. Ia menebar energi negatif, energi yang memusuhi, bukan kedamaian. Lagi pula pemimpin harus tampil bijak. Dan itu tercermin dari pilihan-pilihan katanya. Kalau pilihan kata pemimpin sama saja dengan preman pasar atau sopir angkot yang emosional dan tak terkendali, maka pemimpin macam apa ia? Ada pepatah "Mulutmu harimaumu", maka para pemimpin harus hati-hati dan cermat dalam memilih kata-kata. Sebab, kata-kata tidak akan berhenti alias statis, ia akan terus bergerak dan dinamis.

Harapan, Motivasi, Pemberdayaan, dan Kerja Tim

PEMIMPIN ITU pembawa harapan?

Ini pasti terkait dengan ujaran Napoleon Bonaparte: *A leader is a dealer in hope*. Ya memang demikian, bahwa ketiadaan pemimpin yang kuat dalam arti yang mampu menyalurkan harapan publik, rakyat alias ada suatu kesimpulan *krisis kepemimpinan*, seringkali kondisi demikian membuat masyarakat frustasi. Kemudian, mereka berusaha membayangkan, hadirnya seorang mesiah atau mesias atau juru selamat alias ratu adil. Ratu adil itu merupakan bentuk ekstrem dari harapan — apakah harapan untuk lepas dari penderitaan, atau harapan-harapan lain atas sesuatu yang dipandang ideal.

Ratu adil?

Pada zaman pergerakan tempo dulu, misalnya, tokoh *Sarekat Islam* (SI) H.O.S. Tjokroaminoto sebagai pemimpin pergerakan kaum pribumi, dipersepsikan oleh banyak orang sebagai sang ratu adil. Dalam bukunya berjudul *Sarekat Islam, Gerakan Ratu Adil*, A.P.E. Korver menggambarkan betapa hebatnya kharisma tokoh legandaris Sarekat Islam ini. Persepsi masyarakat itu, antara lain terpicu oleh ramalan Prabu Jayabaya, yang menyebut Ratu Adil itu bernama Prabu Heru Tjokro, yang kebetulan mirip dengan Tjokroaminoto. Di puncak popularitasnya, Tjokroaminoto kerap dipanggil Heru-Tjokro. Sebelumnya, nama ini pernah disematkan kepada Pangeran Diponegoro — yang nama lengkap berikut gelarnya adalah Sultan Abdul Kamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Kalifatul Rasul Tanah Jawa. Selain kemiripan nama, keyakinan bahwa Tjokroaminoto

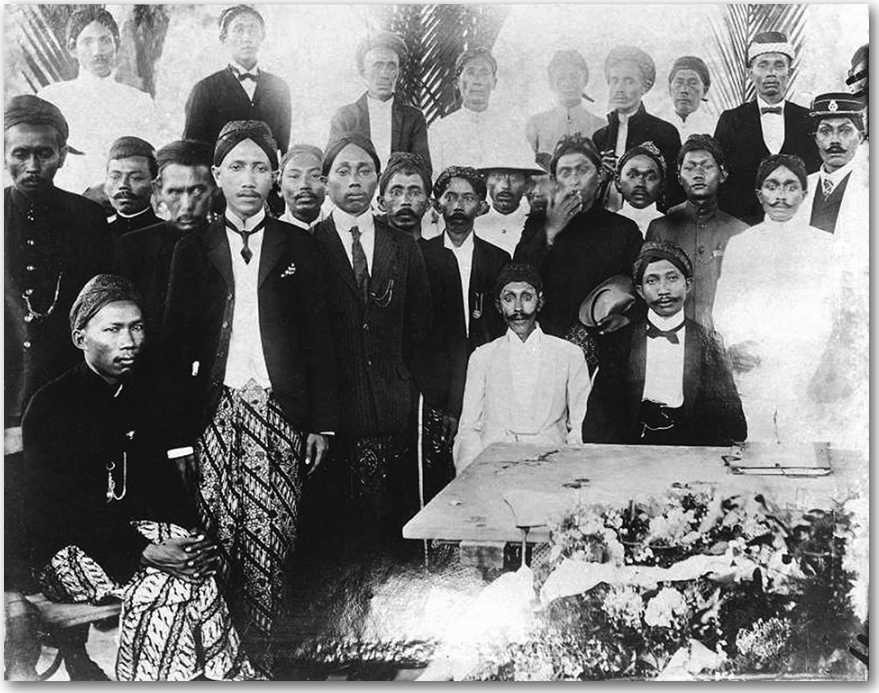

HISTORIA.ID/KITLV

HOS Tjokroaminoto (duduk, kedua dari kanan) dalam pertemuan Sarekat Islam di Blitar, 1914.

Kalau kamu mau menjadi pemimpin rakyat yang sungguh-sungguh, lebih dahulu kamu harus cinta betul-betul kepada rakyat

- H.O.S. Tjokroaminoto

sang *mesiah*, karena kebetulan ia lahir ketika Gunung Krakatau meletus, 1882. Namun, merasa dikultuskan pendukungnya, ia tak nyaman. Pada Kongres Sarekat Islam di Bandung 1916, Tjokro berpidato menolak dikultuskan ratu adil: "Walaupun hati kita penuh dengan harapan dan hasrat yang agung, kita tidak boleh bermimpi akan datangnya seorang ratu adil atau keadaan-keadaan lain yang mustahil."[195]

Mengapa pula pemimpin adalah motivator? Seberapa pentingkah aspek motivasi dalam kepemimpinan?

Kita pinjam penjelasan Goleman. Bersama beberapa koleganyaia memperkenalkan *primal leadership*. Tugas dasar seorang pemimpin dalam konsep *primal leadership* ialah memancing tumbuhnya perasaan positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya. Ini akan terjadi jika seorang pemimpin

195 "Tjokroaminoto Guru Para Pendiri Bangsa", Majalah *Tempo*, 15 Agustus 2011.

menciptakan *resonance*, sumber sifat-sifat positif yang mampu menggerakkan orang untuk mengeluarkan upaya terbaiknya. Oleh karena itu, tugas dasar kepemimpinan bersifat emosi.[196]

Bagaimana pemimpin memotivasi?

Kita simak apa yang dilakukan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt tatkala AS mengalami krisis ekonomi yang akut (*malaise*) pada 1930-an. Dengan program *New Deal*-nya, Roosevelt berhasil memulihkan kembali ekonomi negerinya. Berbagai proyek infrastruktur raksasa yang bersifat padat karya dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi, *New Deal* tak akan gayung bersambut, apabila Roosevelt bukan seorang motivator ulung. Pidato-pidatonya yang membangkitkan semangat dipancarluaskan radio-radio, rakyat pun bergerombol mendengarkan dan terbakar semangatnya. Banyak yang belakangan baru tahu kalau sang presiden *lumpuh layu*. Era radio menggelegarkan suaranya, dan bukan fisiknya yang harus dipapah di kursi roda. Atas upayanya membangkitkan semangat dan perekonomian AS itulah, Roosevelt terus didukung rakyat dan mencatatkan diri sebagai presiden terlama, 14 tahun, sebelum akhirnya digantikan oleh Presiden Truman.[197] Kenangan atas semua itu ditunjukkan di *The Franklin Delano Roosevelt Memorial* di Washington D.C. Di situ terdapat patung Roosevelt di atas kursi rodanya. Juga ada patung orang-orang antre mendengarkan radio .

Memotivasi berarti membangkitkan semangat dan harapan rakyat. Namun, harapan rakyat yang terlampau melambung tampaknya kurang baik ...

Dalam *The Revolution of Hope*, Erich Fromm mencatat, harapan itu paradoks.[198] Harapan bukanlah menunggu secara pasif, juga bukan pemaksaan yang tidak realistis. Ia bagaikan harimau yang diringkus, yang akan melompat hanya jika waktunya tiba. Dalam situasi masyarakat yang jenuh-politik, merasa putus asa atas stagnasi politik dan tidak-berkembangnya perekonomian nasional, wacana perubahan, sebagai ekspresi dari harapan-harapan baru, menyubur. Masyarakat membutuhkan pemimpin baru yang dianggap mampu, atau setidaknya menjanjikan harapan ke arah perubahan yang lebih baik. Pada momentum tertentu, harapan publik melambung tinggi pada pemimpin pilihannya. Tetapi harapan itu dinamis-fluktuatif, bisa mengembung dan kempes.

196 Goleman, Boyatzis, dan McKee (2006).

197 Tentang kisah FDR lihat Dickinson (1996); Houck dan Kiewe (2003); Janeway (2004).

198 Fromm (1968).

KULTURA.AZ

Bahaya masa lalu, manusia menjadi budak. Bahaya masa depan, manusia mungkin jadi robot

- Erich Fromm

The danger of the past was that men became slaves.
The danger of the future is that man may become robots.

Apa saja teori-teori motivasi yang lazim kita ketahui?

Saya kira yang catatan *wikipedia* berikut sudah cukup lengkap (peringkasnya perlu dikasih penghargaan). Kita simak:

- **Teori Kebutuhan**: dikembangkan berdasar asumsi: (1) semua orang sama; (2) semua situasi sama; dan (3) selalu ada "satu cara terbaik".
- **Teori Hierarkhi Kebutuhan Maslow** (Manusia Piramida): mencatat lima jenis kebutuhan manusia dari yang terendah hingga tertinggi: kebutuhan fisiologis; kebutuhan akan rasa aman; kebutuhan sosial; kebutuhan status; dan aktualisasi diri.
- **Teori ERG Clayton Alderfer** (Manusia Tiga Tingkat): membagi kebutuhan ke tiga tingkat: (1) kebutuhan *existence:* kebutuhan fisiologis dan rasa aman (dua tingkat pertama Maslow); (2) kebutuhan *relatedness:* kebutuhan sosial dan struktur sosial (tingkat 3 Maslow); (3) kebutuhan *growth:* kebutuhan pengembangan diri (tingkat 4 dan 5 Maslow).
- **Teori "Perilaku Manusia Tikus"**: mengamati perilaku orang dan diasumsikan: (1) jika seseorang memperoleh apa yang diinginkan, maka "penghargaan positif meningkatkan kinerja" (R+); (2) jika ia menghindari apa yang tidak diinginkan, maka "penghargaan negatif meningkatkan kinerja" (R-); (3) Jika ia memperoleh apa yang tidak diinginkan, maka "hukuman menurunkan kinerja" (P+); (4) jika ia tidak memperoleh apa yang diinginkan, maka "ancaman pemecatan menurunkan kinerja" (P-).
- **Teori Efek Thorndike** (Manusia Pencari Kesenangan): jika yang dilakukan seseorang menyenangkan, ia akan lebih sering melakukannya; jika perilakunya buruk, ia pasti tidak akan mengulanginya. Jadi perilaku akan semakin melekat pada diri seseorang apabila: (1) kesenangan atau kepedihan mun-

cul seketika akibat suatu perilaku; (2) kesenangan atau kepedihan tersebut terjadi berulang ulang; (3) kesenangan atau kepedihan tersebut benar-benar dirasakan oleh orang tersebut.

- **Teori Analisis Transaksional Eric Berne** (Manusia Bermental Transaksi): seseorang membutuhkan "rangsangan" orang lain agar merasa puas secara emosional dan psikologis. Jika rangsangan positif tidak diberikan, mereka yang haus akan rangsangan ini akan semakin sulit diatur dan mengganggu hanya untuk mencari perhatian.
- **Teori tujuan** (Manusia bermental sepakbola): setiap orang menyukai kepuasan kerja karena mencapai sebuah tujuan spesifik. Saat seseorang menentukan tujuan yang jelas, kinerja biasanya meningkat sebab: (1) Ia akan berorientasi pada hal hal yang diperlukan; (2) Ia akan berusaha keras mencapai tujuan tersebut; (3) Tugas-tugas sebisa mungkin akan diselesaikan; (4) Semua jalan untuk mencapai tujuan pasti ditempuh; (5) Bawahan harus menyetujui dan menerima tujuan itu, bila mereka berpikir sebuah tujuan terlalu sulit atau tidak penting, ia tidak akan termotivasi untuk mencapainya.
- **Teori Kelompok** (Manusia Sosial): suatu kelompok kerja cenderung menerapkan norma-norma produksi mereka sendiri, dan memastikan anggota baru mereka untuk mengikuti aturan yang dibuat kelompok tersebut. Untuk melakukan hal ini, kelompok biasanya memakai beragam mekanisme sosial agar anggota baru tidak berproduksi secara berlebihan atau kurang.
- **Teori Dua Faktor** (Manusia Berkembang): "kepuasan" dan "ketidakpuasan" adalah dua vektor yang berbeda. Seseorang dapat menghindari ketidakpuasan, tetapi hal ini belum tentu memberi kepuasan. Yang menjadi "pemuas" antara lain pekerjaan menarik, pekerjaan menantang, kesempatan berprestasi, penghargaan, promosi jabatan. Juga "faktor darurat" seperti gaji, pengawasan, kondisi kerja, keamanan kerja, dan status.
- **Teori Proses**, dengan asumsi: (1) perilaku ditentukan oleh pelbagai macam faktor; (2) setiap orang memutuskan sendiri perilaku mereka dalam organisasi; (3) setiap orang memiliki jenis kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda beda dengan orang lain; (4) setiap orang memilih rencana perilaku berdasarkan persepsi (harapan) seberapa jauh perilaku tersebut akan mencapai hasil yang diharapkan.
- **Teori Lawler** (Manusia Pengharap): bawahan harus diarahkan pada penghargaan di masa yang akan datang. Bila mereka melihat kemungkinan adanya penghargaan berdasarkan usaha mereka itu, mereka akan semakin bekerja keras, kinerja meningkat dan penghargaan pun diberikan.
- **Teori Kecenderungan**, dengan asumsi: (1) setiap orang berbeda; (2) kepribadian berdampak pada motivasi; dan (3) setiap orang memiliki kebutuhannya sendiri sendiri.
- **Teori Tiga Kebutuhan McClelland** (Manusia Prestasi): menyatakan *bawahan* menginginkan tiga hal dari pekerjaannya: (1) prestasi (*need of achieve-*

HUFFINGTONPOST.COM

Mustahil adalah kata yang hanya ditemukan dalam kamus orang bodoh

- Napoleon Bonaparte

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.

ment) atau n-Ach ; (2) kekuasaan (*need of power*) atau n-Power ; (3) perhatian (*need of affection*) atau n-Aff.

- **Teori Percaya Diri** (Manusia yang Membatasi Diri): bawahan hanya dapat berhasil mencapai target yang mereka yakini dapat mereka capai.
- **Teori Keadilan J. Stacy Adam** (Manusia Adil): ketika kita membandingkan dengan orang lain dan kita merasa lebih buruk. Kita melihat situasi kita sebagai kurang adil. Bukan hanya merasa frustrasi, motivasi pun terpengaruh. Ada dua kemungkinan tanggapan: (1) Mengurangi usaha sehingga penghargaan tampak adil (menurunkan motivasi); (2) Berusaha meningkatkan penghargaan dan pendapatan (meningkatkan motivasi).
- **Teori Valensi** (Manusia Penjudi): manusia cenderung membuat pilihan dan mengambil risiko yang tersedia. Ia akan memilih perilaku yang akan memberinya hasil terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan. Teori ini memungkinkan seseorang membuat keputusan secara sadar. Dalam hal ini, ada tiga elemen penting: (1) hasil akibat apa yang mungkin timbul dari suatu perilaku; (2) valensi seberapa baik atau menarikkan hasil tersebut; (3) harapan jika saya lakukan hal ini, akankah saya memperoleh hasil itu.
- **Teori X dan Y Donald McGregor** (Manusia baik dan jahat): cara pandang seorang pemimpin akan mempengaruhi caranya memotivasi bawahan.

  TEORI X mengasumsikan pemimpin menganggap bawahan membenci pekerjaannya; membenci tanggung jawab; tidak terlalu berambisi; tidak

GOCONQR.COM

Jika Anda hanya punya satu palu, Anda cenderung melihat setiap masalah sebagai sebuah paku

-Abraham Maslow

If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail.

mempunyai gagasan; tidak mampu menyelesaikan masalah; hanya memikirkan uang; perlu dikendalikan secara ketat; serta pemalas dan tidak dapat dipercaya. Sehingga pemimpin akan memotivasi dengan cara-cara berikut: mengatakan dengan jelas apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya; melakukan pengawasan secara ketat; membuat semua keputusan seorang diri; tidak menghendaki adanya partisipasi; penghargaan hanya dalam bentuk gaji; dan mengharapkan kontribusi minimum.

TEORI Y mengasumsikan pemimpin menganggap bawahan selalu menikmati pekerjaannya; bersedia memberi kontribusi dan menerima tanggung jawab; dapat membuat keputusan bagi diri sendiri; mampu menanggulangi masalah-masalah; dan membuat rencana rencana jangka panjang dan mencapainya. Pemimpin akan memotivasi dengan cara: memberi tanggung jawab; memberi kesempatan membuat keputusan terhadap pekerjaan; memberi kesempatan mereka memberikan saran-saran dan menjalankannya; dan memberi penghargaan dengan cara lain, bukan hanya dengan uang.[199]

Walaupun banyak perspektifnya, benang merahnya, memotivasi itu kemampuan mengajak orang agar bergerak dan berubah ...

Benar. Pemimpin memberikan motivasi dengan mengajak pengikutnya hijrah dari kegelapan (*dzulumat*) menuju cahaya (*nur*).[200] Dari keterbelakangan ke kemajuan. Kita bisa simak kisah nabi-nabi, betapa dalam menjalankan misinya, mereka dituntut untuk bisa tampil sebagai pemimpin yang mampu merubah masyarakatnya. Berbagai tantangan mereka alami, bahkan termasuk penolakan atau pengingkaran dari, bahkan, anggota ke-

199 Wikipedia.org

200 *Min al-dzulumati ila al-nur*. Lihat, QS. Al Baqarah:257.

luarganya, sebagaimana kisah Nabi Nuh. Kendatipun demikian para nabi tidak boleh berputus asa.

Kini saya ingat kisah pencuri yang bertobat gara-gara seekor burung.[201] Kesadaran, atau dalam bahasa agama, "orang yang dibukakan pintu hatinya", bisa terjadi pada siapa saja, kapan dan di mana saja, dengan sebab bahkan yang barangkali sangat sepele.

Bagaimana kisahnya?

Alkisah, zaman dahulu ada perampok kejam. Pada suatu hari, ketika ia menuju gua tempat harta rampokannya disimpan, ia kelelahan dan memutuskan bersandar pada sebatang pohon rindang. Pada saat itulah, seekor burung gagak datang mengagetkannya. Ia berhenti di dekat perampok itu sambil menggerak-gerakkan paruhnya. Rupanya sang gagak sedang mematuki bangkai seekor binatang. Ia mengambil dagingnya, tetapi tidak memakan daging itu, karena ia segera terbang ke atas pohon, dan kemudian balik lagi dengan aktivitas yang sama berkali-kali. Karena penasaran, sang perampok memanjat pohon itu pelan-pelan agar burung gagak tidak melihatnya. Ia ingin mengintip apa yang terjadi.

Lantas, apa yang dilihatnya?

Ternyata, gagak itu terbang dan hinggap di sebuah sarang. Ketika perampok mengintip, terlihat di sarang itu seekor ular dalam kondisi sangat lemah. Gagak itu berupaya keras memberinya makan dengan mencarikannya pada bangkai binatang yang masih segar. Melihat itu, sang perampok langsung lemas. Ia malu pada gagak dan dirinya sendiri. Betapa selama ini ia hanyalah makhluk yang keji dan hina: hanya bisa membuat orang lain susah. Mengapa burung saja bisa melakukan perbuatan baik bahkan kepada ular musuh bebuyutannya, sementara ia tak pernah berpikir berbuat baik sedikitpun pada sesama? Maka ia pun memutuskan berhenti merampok, menjadi orang baik yang selalu berupaya menolong yang lain.

Sepertinya pemimpin itu pendekar dalam kisah-kisah komik: selalu membela kebenaran ...

Kalau kita simak Marcel Boneff, kita akan sampai pada kesimpulan demikian.[202] Dalam kajiannya tentang komik Indonesia, pendekar selalu berupaya merubah sesuatu "dari keadaan terhina ke kemenangan kebajikan". Ada babak-babak menderita, tergembleng situasi, dan tampil sebagai pendekar bijak dan sakti. Ini semua menunjukkan untuk menjadi pendekar,

201 Basri (2007).

202 Boneff (2008:136-159).

perlu proses. Boneff mencatat pola-pola umumnya dalam tabel berikut:

Tabel 10.5.
Kemenangan Kebajikan Para Pendekar Komik

KEADAAN TERHINA	KEMENANGAN KEBAJIKAN
Orangtua pendekar, istrinya, anak-anaknya atau tunangannya dibunuh atau diculik.	Pemerolehan ilmu silat merupakan sarana baginya untuk menghapus rasa malu, dan rasa rendah diri.
Ia bertemu dengan lawan yang lebih sakti daripadanya; harga dirinya tertantang atau ia tidak dapat melanjutkan misinya.	Ia menantang orang yang memimpin kekuatan kebatilan.
Ia mengalami penghinaan dari seorang penindas.	Maka, terjadilah pertarungan seru. Prahara dahsyat terjadi pula bersamaan dengan kekerasan.
Ia tidak punya ikatan lagi dengan kampungnya; ia terkucil secara virtual.	Tidak jelas kapan pergulatan berakhir. Guru-guru para prota gonis turun tangan, demikian juga murid-murid mereka. Pelbagai pertengkaran lama meletus seperti bisul pecah.
Ia dikhianati oleh salah seorang kerabatnya.	Jarang ada lawan yang dimaafkan, jarang ada kesempatan untuk bertobat.
Secara fisik ia cacat atau menjadi takut pada bahaya.	Pendekar yang menang menguasai dunia persilatan, kembali ke dunia ramai untuk menetap atau meneruskan pengembaraan dan mengawasi perwujudan Kebatilan yang baru.

Bisakah dielaborasikan ke salah satu tokoh komik?

Tanpa mengurangi tokoh komik lainnya, mari kita baca *Panji Tengkorak*, tokoh yang menjadi objek kajian disertasi Seno Gumira Ajidarma. Panji Tengkorak ialah tokoh ciptaan komikus Hans Jaladra yang populer pada akhir 1960-an dan direka ulang pada 1985 dan 1996. *Panji Tengkorak* termasuk genre komik silat. Sebetulnya, ia bernama Panji saja, tetapi karena pengembaraannya di dunia persilatan ia selalu mengenakan topeng tengkorak, dijulukilah ia Panji Tengkorak. Selain topeng, atribut lainnya yang menonjol adalah pakaiannya yang compang-camping seperti pengemis. Ajidarma mencatat kehidupan sang tokoh, Panji Tengkorak ini, sebagai penuh dengan paradoks, bahkan tragis. Ajidarma mencatat,

> ... biografi Panji Tengkorak adalah sosok yang antihero. Keunggulannya dalam

HIBURAN.METROTVNEWS.COM

Posisi seorang pendekar silat mirip seorang ronin dalam tradisi kaum samurai di Jepang, yakni orang yang mengandalkan kemampuan bermain pedang, menempuh Jalan Pedang untuk memberi makna hidupnya ...

- Seno Gumira Ajidarma

persilatan tidak selalu diiringi dengan kemenangan gilang-gemilang, decak para pengagum, ataupun keuntungan tertentu bagi dirinya pribadi. Panji Tengkorak adalah seorang tokoh yang tragis.[203]

Apa maksud Panji Tengkorak sebagai tokoh antihero?

Menurut Ajidarma, istilah *hero* pada mulanya mewakili kebutuhan akan tokoh dalam cerita, tetapi pengertian *antihero* juga teracu pada tokoh tanpa atribut yang terhubungkan dengan *hero*. Berbagai faktor dalam biografi Panji Tengkorak, seperti menolak perebutan gelar, menggelandang, dan meskipun berbusana pengemis, tetapi ia tidak bergabung dengan Partai Pengemis, juga kegagalannya dalam percintaan, mengarahkannya pada *antihero*: karena menggugurkan persyaratan untuk dipandang sebagai *hero*.[204]

BTW, catatan Boneff dan tampaknya juga kisah Panji Tengkorak ini, segera mengingatkan kita pada soal harga diri ...

Harga diri adalah hal paling mendasar bagi pemimpin. Menurut Rubino, untuk menjalani kehidupan, Anda memerlukan harga diri tinggi. Harga diri yang sehat merupakan fondasi untuk mengembangkan rasa hormat dan empati terhadap orang lain. Dalam segala hal, harga diri yang sehat merupakan syarat utama untuk menjalani hidup yang diberdayakan, yang ditandai dengan penentuan arah kehidupan positif, rasa percaya, tanggung jawab,

203 Ajidarma (2011:12).

204 Ajidarma (2011:12).

HEALTHYDEBATES.COM

Jika aku harus memilih menjadi superhero, aku akan memilih Superman. Dia segalanya, aku tidak

- Stephen Hawking

If I had to choose a superhero to be,
I would pick Superman. He's everything that I'm not.

dan pencapaiannya.[205]

Soal harga diri ini mengingatkan kisah para samurai di Jepang tempo dulu ...

Ya. Menurut Ajidarma, posisi seorang pendekar silat mirip seorang ronin dalam tradisi kaum samurai di Jepang, yakni orang yang mengandalkan kemampuan bermain pedang, menempuh Jalan Pedang untuk memberi makna hidupnya — tetapi berbeda dengan samurai yang mengabdi kepada seorang pelindung, ronin adalah samurai tanpa majikan.[206]

Samurai, catat Mann, merupakan elite militer yang berjumlah dua juta orang, yang menopang keseluruhan sistem ini dengan sikap, perilaku, dan perlengkapan yang semua berakar ke masa lalu sejauh sejarah para tuan setempat mereka dan *shogun* yang mereka layani. Pada 1880, para tuan dan samurai tak ada lagi, dan bersama mereka lenyap pula seluruh struktur feodalisme: Jepang telah melompat dari zaman pertengahan ke era modern.[207]

Harga diri juga menyangkut eksistensi bangsa ...

Ya. Konsep harga diri ini penting mengingat sangat fatal apabila diabaikan, termasuk dalam hal kepemimpinan bangsa. Ketika pemimpin tengah *powerfull*, ia sangat berpengaruh, tetapi apabila kekuasaannya *drop*, *powerless*, maka pengaruhnya ikut *anjlok*. Sebagai renungan: Indonesia pernah punya pengaruh kuat di lingkungan ASEAN, tetapi setelah terjadi krisis

205 Rubino (2004:3-4).

206 Ajidarma (2011:12).

207 Mann (2013:xiii).

yang membuat Orde Baru jatuh, pengaruh Indonesia terasa menurun.[208] Mengapa demikian? Tentu terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang bisa kita cari dan ulas panjang lebar.

Bagaimana cara memperbaiki harga diri yang turun?

Ada tiga langkah yang dinasihatkan Rubino: selesaikan (urusan) masa lalu, nilai masa sekarang, dan rancang masa depan.[209] Sebuah saran sederhana tetapi mendasar. Kalau kita refleksikan, saran itu menegaskan perlunya referensi masa lalu, kita harus pandai mengambil hikmah atas pengalaman sejarah masa lalu. Setelah itu, kita lakukan *repositioning* dan menetapkan strategi dan langkah-langkah yang berguna bagi masa depan.

Sebagai motivator yang punya harga diri tinggi, apa lagi yang seharusnya dilakukan para pemimpin?

Pemimpin merombak tatanan lama yang lemah untuk membangun kembali yang lebih baik dan kokoh. Pemimpin memertahankan hal-hal yang masih baik, memperbaiki yang sudah rusak. Pemimpin sebagai motivator juga harus mampu mengatasi kemandekan/stagnasi, mengubah jalan buntu menjadi jalan baru/alternatif dengan memberdayakan para pengikutnya.[210] Itu semua membutuhkan daya pikir alias kreatif dan inovasi yang canggih, serta, nah ini yang paling penting, berani.

Pemimpin itu pemberdaya?

Persis. Sebagaimana dikutip D'Souza, Bennis dan Nanus, mencatat, kepemimpinan sama sekali bukanlah penggunaan kekuasaan itu sendiri, melainkan merupakan pemberdayaan orang lain.

> Pemimpin dapat mewujudkan niat mereka menjadi kenyataan dengan melempangkan seluruh energi organisasi dalam sebuah tujuan yang menarik ... Para pemimpin ini memimpin dengan menghela daripada menekan, mengilhami daripada memerintahkan, menciptakan ekspektasi yang dapat diraih (meskipun menantang) dan kemajuan yang bermanfaat bagi mereka daripada dengan memanipulasi, dengan membuat orang-orang mampu menggunakan inisiatif dan pengalaman mereka sendiri daripada dengan mengabaikannya atau memaksakan pengalaman, atau tindakan mereka.[211]

Apa saja yang perlu dilakukan pemimpin dalam member-

208 Meskipun tidak membahasnya secara khusus, baca antara lain Djafar (2008).

209 Rubino (2004)

210 Butler (2007).

211 D'Souza (2007:22).

ANDI WARHOL/ ONLINEONLY.CHRISTIES.COM

Agar berhasil hari ini, Anda harus menetapkan prioritas, memutuskan apa yang Anda perjuangkan

- Lee Iacocca

To succeed today, you have to set priorities, decide what you stand for.

dayakan pengikut?

D'Souza memberikan tips: (1) memberikan arah dan memperjelas target; (2) meyakinkan orang-orang untuk bekerja semaksimal mungkin; (3) memfasilitasi atau menciptakan sebuah lingkungan dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan oleh Tim agar menjadi lebih baik; (4) memastikan bahwa semua orang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang organisasi; mengetahui nilai dari kerja yang dilakukannya dan di mana ia merasa cocok; (5) mendelegasikan atau melimpahkan tanggung jawab dan otoritas sejauh mungkin hingga ke tingkat bawah dalam struktur organisasi; (6) hadir untuk mendukung,bukan untuk memerintah; (7) membuka kesempatan untuk belajar dan berlatih. Selanjutnya, (8) mendorong hubungan saling mendukung di dalam dan antar-tim untuk encapai kohesi organisasi dan kinerja yang terus meningkat; (9) fokus pada pengembangan staf; (10) memampukan pemecahan masalah; (11) mengembangkan manajemen konflik; (12) menjadi panutan; (13) memelihara seluruh jalur komunikasi yang jelas dan terbuka; (14) memberikan tantangan; (15) menemukan gagasan baru; (16) toleran terhadap kesalahan dalam proses; dan (17) menghargai prestasi.[212]

212 D'Souza (2007:239).

Kebahagiaan tak terletak pada kebahagiaan, namun pada pencapaiannya

- Fyodor Dostoyevsky

Happiness does not lie in happiness, but in the achievement of it.

Pemimpin bisa memotivasi dan memberdayakan pengikut, dengan begitu otomatis ia pemimpin tim yang hebat?

Ya, pemimpin idealnya harus bisa memimpin kerja tim. Seorang pemimpin harus mampu memberi petunjuk yang jelas atas para anak-buahnya yang telah terdiferensiasi ke dalam berbagai *job-description*. Pemimpin mengarahkan agar para anak-buah bekerja dengan baik dan benar, sesuatu dengan alurnya. Pemimpin yang efektif akan selalu memantau perkembangan kerja anak-buahnya, memahami dan memastikan semua berjalan dengan baik. Ia harus segera tahu dan mampu memberi jalan keluar atas apa-apa yang membuat tim tidak bergerak atau stagnan. Ia menekankan komitmen, mendesain struktur dan infrastruktur, menempatkan anak-buah sesuai prinsip *right man in the right place*, hingga memberi motivasi dan *support*.[213]

Baik, jangan lupa dijelaskan juga bahwa pemimpin pun perlu penasihat, pemotivasi, pemerluas wawasan?

Ya, pastilah pemimpin perlu diskusi dengan berbagai ahli, pakar. Umar bin Khatab pernah mengatakan: "Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat." Nasihat itu bisa datang dari mana saja, tetapi kalau sudah menyangkut hal-hal khusus, nasihat diperlukan dari ahlinya. Nasihat itu bisa berupa kritik, bisa berupa masukan. Tidak semua nasihat bersifat solutif, banyak nasihat yang mencerminkan kebutuhan motivasional dan inspirasional. Jadi pemimpin yang baik, tak perlu menuntut penasihatnya bertindak bak konsultan teknis pemecah masalah. Para penasihat ialah ahli hikmah yang memicu inspirasi pemimpin.

Soal kerja tim, apa yang Anda katakan kelihatannya simpel saja, padahal praktiknya mungkin saja susah?

Itu semua tergantung faktor kepemimpinan dan sumber daya yang ada dalam organisasi. Kepemimpinan yang baik mampu mengatasi masalah-masalah teknis organisasi, termasuk apabila harus bekerja secara tim dalam keadaan yanng penuh keterbatasan. Kata kuncinya ialah: (1) orientasi tugas dan kewenangan (fungsi dan hirarkhi) yang jelas, dengan kata lain ada *job description* yang jelas; (2) mengedepankan prinsip *the right man in the right*

213 Pembahasan lebih lanjut tentang *team leadership* lihat Northouse (2005:203).

Seni bukan kerajinan, ia merupakan transmisi perasaan seniman yang mengalaminya

- Leo Tolstoy

Art is not a handicraft, it is the transmission of feeling the artist has experienced.

place (keahlian dan kecakapan anggota tim harus diperhatikan betul); (3) koordinasi yang baik; (4) fungsional dan sinergis; (5) menyingkirkan egoisme sektoral, mengedepankan keberhasilan tim/kebersamaan.

Empati, Solidaritas, Kebersamaan, dan Modal Sosial

KALAU EMPATI, bagaimana?

Empati bermakna erat dengan kepedulian. Yang membedakan para pemimpin terbaik dari pemimpin yang biasa-biasa saja ialah kepedulian-nya terhadap orang lain. Untuk peduli dibutuhkan empati. "Intisari kepemimpinan," catat Kouzes dan Posner, "ialah perhatian pada kepedulian. Tanpa kepedulian kepemimpinan tidak punya tujuan. Tanpa meneguhkan kepedulian, serta apa yang membuat Anda peduli, orang tidak akan peduli pada apapun yang Anda katakan".[214]

Jadi?

Empati dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk mampu memahami, merasakan, dan merespons dengan melibatkan emosinya secara tulus pada yang lain, yang tengah tertimpa kesusahan. Seseorang yang empatik ialah yang bisa menerima resonansi emosi penderitaan orang lain. Ada keterlibatan emosi di sini. Si lawan bicara akan amat termotivasi, tatkala seseorang mampu menunjukkan sikap empatiknya. Jadi empati merupakan semacam daya pikat emosional komunikator ke pihak komunikan. Untuk berempati, tidak harus melalui janji-janji. Sebab, bila janji tak terpenuhi, akan berakibat lebih fatal lagi: anjloknya *trust*.

Menurut Sutikno dalam *The Power of Empathy in Leadership*, empati tak sama dengan simpati. Bersimpati berarti menghanyutkan perasaan untuk ikut merasakan. Emosi tergambar melalui bahasa tubuh tenggelam dalam kebersamaan. Dalam simpati, lebih banyak merespons dengan perasaan. Berempati tidak berarti anda sepakat, melainkan anda secara mendalam mencoba mengerti orang itu, baik dari segi emosional maupun intelektual. Anda mencamkan nada suara dan bahasa tubuh orang tersebut,

214 Kouzes dan Posner, *(*2008).

HUFFINGTONPOST.COM

Karunia besar dari manusia adalah bahwa kita memiliki kekuatan empati

- Meryl Streep

The great gift of human beings is that we have the power of empathy.

tidak hanya kata-katanya.

Dalam empati Anda mendengar dengan hati, mata dan pikiran secara obyektif; menggunakan semua pancaindra. Langkah-langkah menjaga serta membangun empati dalam interaksi: memberikan umpan-balik korektif, umpan-balik positif; menghindari umpan-balik negatif; memperhatikan situasi dan kondisi ketika berinteraksi; memperhatikan kepada siapa anda berinteraksi; memperhatikan *chemistry*, keterpaduan; dan memperhitungkan pesan yang disampaikan.[215]

Goleman telah memperkenalkan *primal leadership* yang tugas dasarnya memancing tumbuhnya perasaan positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya. Bukankah itu konsep empati?

Persis. Bagi Goleman, kecerdasan emosional lebih penting ketimbang kecerdasan intelektual dan ketrampilan teknik untuk menandai seorang pemimpin yang sukses. Menurutnya, empati dan keterampilan sosial itu kecerdasan sosial, bagian interpersonal dari kecerdasan emosional. Yang termasuk kecerdasan emosional adalah kepedulian terhadap diri sendiri, kemampuan untuk mengelola emosi dan desakan hati, kemampuan untuk memotivasi orang lain, kemampuan untuk memperlihatkan empati, dan kemampuan untuk menjaga hubungan.[216] *By the way*, belakangan ini saya menemukan buku yang secara khusus membahas soal empati: *Empathy, What It is and Why It Matters* (2013). Dikarang David Howe, buku ini pen-

215 Sutikno (2007).

216 Goleman (2005).

Kebalikan dari kemarahan itu bukan kekaleman, itu empati

- Mehmet Oz

The opposite of anger is not calmness, its empathy.

ting untuk kita baca.[217]

Bisakah diuraikan apa yang dicatat dalam buku itu?

Pengertian empati, tak jauh dengan dari uraian di atas, bahwa,

> Empati adalah salah satu ketrampilan yang, ketika muncul, dapat memanusiakan manusia dan hubungan-hubungan di antara mereka. Sebaliknya, ketika empati hilang, dunia akan terasa kasar, hambar, bahkan brutal. Seperti halnya sifat-sifat manusia yang lain, individu-individu memiliki kapasitas empati yang beragam. Bahkan seseorang dapat berempati pada satu kesempatan dan kurang berempati pada kesempatan lain. Tingkat empati seseorang dapat berubah bergantung pada perasaan (*mood*), orang yang terlibat, dan situasi lingkungan.[218]

Hmm, menarik, ada kata kunci "memanusiakan manusia"?

Ya, istilah bahasa Jawa-nya, *ngewongke* atau *nguwongke*. Dalam etika Jawa, hal yang demikian lazim semata. Ini menarik sebab betapapun terdapat tradisi feodalisme Jawa, pun terkuak dalam stratifikasi bahasanya (penggunaannya berbeda-beda untuk usia dan derajat keningratan), namun filosofi *nguwongke*, populer adanya. Bahwa empati itu bukan monopoli *wong cilik* (orang kecil, rakyat biasa) terhadap *wong cilik*, tetapi *wong cilik* ke *wong gede* ("orang besar", orang berpangkat tinggi, *ndoro* [yang status keningratannya tinggi], tuan), *wong gede* ke *wong gede*, *wong gede* ke *wong cilik*. Empati menembus ragam stratifikasi sosial yang lebih luas dalam masyarakat yang unik. Maka, kita memang segera ingat apa yang diutarakan Goleman: empati dan keterampilan sosial itu kecerdasan sosial, bagian interpersonal dari kecerdasan emosional. Karena menyangkut masalah kecerdasan, maka kita camkan pendapat Howe berikut,

> Kita dapat mengenali empati ketika ia muncul, tetapi sulit dipertahankan secara konstan. Tidak mengherankan, kemampuan yang tampak mengandung kesalehan tetapi sukar untuk dipahami ini telah menarik perhatian banyak kalangan dari beragam disiplin.[219]

217 Howe (2015).

218 Howe (2015:3).

219 Howe (2015:4).

Kalau empati dikaitkan dengan ragam disiplin keilmuan, ilmu apa yang paling dekat?

Howe berpendapat empati bersumber pada filsafat estetika. Filsuf Jerman akhir abad ke-19, menggunakan kata *einfühlung* yang kemudian diterjemahkan sebagai empati, ketika membahas estetika. Filsuf Robert Vischer menggunakan *einfühlung* untuk membahas tentang kesenangan yang muncul ketika kita merenungkan atau menikmati sebuah karya seni. Kata tersebut (*einfühlung*) merepresentasikan usaha untuk mendeskripsikan kita agar dapat 'masuk ke dalam' dalam sebuah karya keindahan dengan, misalnya, memproyeksikan diri kita dan perasaan kita 'ke dalam' sebuah lukisan, patung, musik, bahkan keindahan alam itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya, penting kita catat bahwa ia tidak sekadar ikhtiar untuk melihat 'ke dalam', tetapi juga kemudian 'dari dalam melihat keluar'. Merujuk Psikolog Edward Titchener, pada 1909, ia menggunakan istilah *empathy* sebagai terjemahan kata *einfühlung.* Etimologinya berasal dari Bahasa Yunani *empatheia*, artinya memasuki perasaan orang lain, atau ikut merasakan keinginan atau kesedihan seseorang. Jika kita ingin memahami orang-orang dan situasi mereka, kita perlu mulai melakukan penafsiran dan menemukan makna.[220]

Pertanyaan ini penting: apa beda empati simpati?

Howe mengajak kita memahami etimologinya. Dalam bahasa Yunani, *pathos* artinya perasaan. Ia lazim sebagai akhiran sejumlah kata, seperti *apati* berarti tanpa perasaan, *simpati* (dengan atau bersama perasaan), dan *antipati* (merasa memusuhi). Khusus tentang simpati, ia menggarisbawahi pendapat bahwa, kalau empati terjadi ketika kita beresonansi dengan perasaan-perasaan dari orang lain; maka sebaliknya simpati adalah sebuah respons emosional yang muncul dari keadaan atau kondisi emosional orang lain yang tidak identik dengan emosi dari orang lain tersebut, tetapi merupakan perasaan-perasaan kesedihan atau keprihatinan terhadap kesejahteraan orang lain tersebut. Lebih lanjut Howe mencatat,

> Pembedaan yang lebih sederhana adalah bahwa sementara empati menempatkan saya dalam sepatu-sepatu emosional Anda, simpati sebatas mengatakan kepada Anda bahwa saya juga berjalan searah de-ngan Anda. Simpati bersifat *me oriented*, empati bersifat *you oriented*. ... Simpati dapat berarti hilangnya objektivitas. Mengatakan 'saya mengerti bagaimana perasaan Anda' berbeda dengan 'Anda pasti mera-sa sedih dan menyesal'.[221]

220 Howe (2015:14).

221 Howe (2015:20-22).

Howe, lantas membagi dua jenis empati: empati afektif dan empati kognitif. Empati afektif atau empati emosional dekat dengan konteks respons empatik: saya merasakan kesusahan Anda, tetapi jelas bahwa Andalah yang mengalami kesusahan dan kesedihan, bukan saya, meskipun saya secara emosional terpengaruh oleh ketidakmampuan (hendaya/*disability*) Anda tersebut. Sementara empati kognitif didasarkan pada kemampuan melihat, membayangkan dan memikirkan sebuah situasi dari sudut pandang orang lain. Ia melibatkan sebuah proses reflektif yang lebih berbasis kognitif untuk memahami perspektif orang lain.[222]

Kalau solidaritas?

Pemimpin yang punya kepekaan empatik biasanya cukup mampu menggalang solidaritas secara efektif. Solidaritas ialah perasaan yang muncul dan mendorong manusia untuk bersatu dan berbuat sesuatu. Sosiolog Émile Durkheim menempatkan solidaritas sebagai suatu bagian dari realitas sosial. Solidaritas muncul dalam ranah sosial, hubungan antar-individu manusia. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas: solidaritas mekanis dan organis. Solidaritas mekanis datang dari masyarakat paling sederhana, di mana pada tahap ini kesadaran kolektif serupa dengan kesadaran individual. Solidaritas organis, sementara itu, terbentuk karena masyarakat sudah terspesialisasi ke dalam organ-organ yang berbeda-beda.[223]

Nasionalisme atau perasaan kebangsaan misalnya, telah menyebabkan efek solidaritas organik, karena orang tak lagi memandang latar-belakang yang lain, apakah agamanya, sukunya, rasnya, golongannya, untuk hidup bersama sebagai bangsa. Mereka telah dipersatukan oleh pengalaman dan perasaan yang sama. Demikianlah Ernest Renan menggariskan gagasannya tentang nasionalisme.[224] Tetapi, hakikatnya, apakah solidaritas itu mekanis atau organis ada benang merah yang menyamakannya: kesadaran untuk bersatu (kebersamaan) dan melakukan sesuatu.

Jadi, solidaritas tidak sekedar terkait "bencana"?

Ya. Memang setiap bencana memunculkan empati, dan empati membuahkan solidaritas, walaupun kadang perlu "imbauan khusus" agar orang tergerak untuk bersolidaritas. Tetapi solidaritas tidak harus terjadi sewaktu ada bencana saja. Pepatah "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh" merupakan pepatah yang substansinya terkait erat dengan konteks solidaritas. Dari kacamata agama, jelas. Ayat-ayat sosial dalam kitab suci demikian ba-

222 Howe (2015:20-24).

223 Rudyansjah (2015:33-39)

224 Tentang nasionalisme, lihat Renan (t.t.).

Suatu kerumunan selalu berpikir dengan simpatinya, tak pernah dengan akalnya

- William R. Alger

A crowd always thinks with its sympathy, never with its reason.

nyak, intinya antara lain suruhan agar kita menciptakan dan meningkatkan solidaritas antar-sesama. Sayangnya, ayat-ayat sosial (dalam Al Qur'an), terkesan terabaikan. Umat ribut di wilayah *khilafiyah*, tapi kemudian lupa mengurus soal-soal sosial.

Bagaimana dengan kebersamaan atau *togetherness*?

Kebersamaan atau *togetherness* tentu sangat penting dan terkait erat dengan empati dan solidaritas. Dengan kebersamaan maka jarak antara pemimpin dan yang dipimpin lebur. Emha Ainun Nadjib menjelaskan bahwa sebenarnya kriteria kepemimpinan itu sama persis dengan kriteria manusia biasa atau orang kebanyakan.

> Kalau omong tentang pemimpin, sebaiknya jangan muluk-muluk. Berpikir sederhana saja. Misalnya, syarat menjadi suami. *Pertama*, harus manusia. *Kedua*, harus laki-laki. Baru yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Syarat suami harus manusia itu banyak tak diperhatikan orang, padahal jelas banyak suami berperilaku seperti ia bukan manusia. Bertindak hewaniah kepada istrinya, juga kepada orang lain. Bukankah menjadi manusia itu sendiri saja sudah demikian sukarnya?[225]

Ilustrasi tersebut mengaitkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin ibarat hubungan suami dan istri. Suami itu pemimpin dan istri yang dipimpin. Suami itu presiden dan istrinya rakyat. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, hubungan suami-istri tentu harus yang baik-baik saja. Suami adil dan tidak berbuat kasar pada istrinya, menafkahi lahir-batin. Rumah tangga itu dibangun dengan kebersamaan antara suami dan istri. Tanpa kebersamaan, susah dibayangkan bagaimana biduk maghligai rumah tangga dapat bertahan. Syarat kebersamaan itu, kalau demikian:

- Yang memimpin dan yang dipimpin sama-sama memahami dan menyadari kedudukan dan tugas masing-masing, untuk bergerak dalam irama yang teratur, dalam mencapai tujuan.
- Harus dalam satu frekeuensi yang sama, dimana sang pemimpin tidak boleh egois, tetapi harus empatik dan senantiasa mampu memelihara solidaritas dan soliditas bersama.
- Pemimpin tidak boleh menindas yang dipimpin, melainkan menjalankan fung-

225 Nadjib (2007).

Modal keuangan - alat yang diperlukan untuk pemasaran massal - telah digantikan modal sosial - yaitu, jaringan akar rumput warga ...

- Robert D. Putnam

Financial capital - the wherewithal for mass marketing - has steadily replaced social capital - that is, grassroots citizen networks ...

si-fungsi kepemimpinannya secara adil dan bijak, serta memungkinkan yang dipimpin optimal dalam berpartisipasi, termasuk yang dipimpin.

- Pemimpin harus menyadari dan memahami, bahwa dirinya tidak kebal dari peluang berbuat salah, karenanya terbuka bagi kritik dan masukan dari yang dipimpin, dalam suasana kebersamaan dan semangat memperbaiki keadaan.

Pengibaratan yang menarik. Bagaimana kalau sang suami tidak berlaku adil ...

Istri bisa protes. Ujungnya rumah tangga bisa celaka. Sebaliknya apabila istri suka tidak taat pada suami, maka suami harus terus berupaya mendisiplinkan istrinya untuk berada dalam koridor hubungan suami-istri yang baik. Frekuensi kebersamaan harus senantiasa dijaga. Manajemen konflik yang baik diberlakukan agar rumah tangga tidak cepat kolaps. Contoh hubungan suami-istri yang harmonis di atas, bukan berarti menafikan peran kepemimpinan perempuan. Ini hanya contoh saja, toh di alam demokrasi, perempuan juga berpeluang jadi pemimpin di segala bidang.

Bagaimana penjelasan soal solidaritas dan kebersamaan dalam konteks kita dan kami?

Pertanyaan ini segera mengingatkan kita pada karya paling penting Fuad Hassan. Dengan menggali berbagai literatur relevan, Hassan bertolak dari perspektif psikologi eksistensialis. Pada intinya, terkait dengan kebersamaan (*Mit-sein*), terdapat dua modus dasar: ke-kita-an dan ke-kami-an. Saya akan meringkaskannya.[226]

> **Kita**: dalam modus mengada bersama, sebagai suatu kita, maka pribadi-pribadi yang bersangkutan seakan-akan bersetuju untuk saling memelihara keutuhan subjektivitas masing-masing. Dalam hubungan ini, dari masing-masing pihak tak ada daya dan upaya untuk objektivikasi atau saling memanipulasi. Di antara mereka tidak ada momen-momen sengketa (*conflictmomenten*), namun saling kehadiran (*mutual presence*) antara pribadi yang bersangkutan ini memberi kesempatan untuk saling membuka diri (*selfunfolding*) dengan subjektivitas sepenuhnya.

226 Hassan (2014:259-350).

> **Kami**: apabila dalam suasana *kita*, tak ada penghayatan pengasingan, maka *kami* justru ditandai oleh adanya pengucilan (*exclusion*). Dalam suasana kami, selalu ada instansi ketiga (ia, mereka, dan sebagainya) yang justru harus dikucilkan dalam kebersamaan saat kami itu muncul. Menjelmanya kebersamaan dalam modus kami itu selalu berdasarkan pada penghayatan kebersamaan sebagai objek (*us-object)* sebagai hasil objektivikasi dari instansi ketiga tadi. Dalam *kekamian* itu individu-individu yang bersangkutan melebur dalam suatu kebersamaan yang solider demi mengada terhadap instansi ketiga tadi.[227]

Merujuk hal itu, maka modus kebersamaan "kita" lebih afdol, ketimbang "kami"?

Tergantung konteks, kendatipun konsep tentang *kita* lebih cair, ketimbang *kami*. Soal kebersamaan ini, mengingatkan kita pada konteks *social capital* atau modal sosial.

Modal sosial?

Di atas sudah disinggung tentang pengertian *trust* versi Fukuyama: ada *low trust society* di mana modal sosial masyarakat rendah, ada pula *high trust society* yang modal sosialnya kuat. Menurut Roby Djohan, modal sosial melengkapi modal ekonomi dan modal manusia, yang ketiganya sangat penting bagi eksistensi dan keberlangsungan bangsa. Djohan mendefinisikan modal sosial sebagai suatu keadaan yang membuat masyarakat atau sekelompok orang bergerak untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam prosesnya, gerakan itu ditopang nilai dan norma yang khas, *trust*, saling memberi dan menerima, toleransi, penghargaan, partisipasi, kerjasama dan proaktif, serta nilai-nilai positif yang dapat membawa kemajuan bersama.[228]

Apakah pendapat itu selaras dengan konsepnya?

Istilah modal sosial dalam konsepsi ilmu sosial termasuk hal yang baru (kendatipun gagasannya dapat dilacak sejak masa kuno). Setidaknya, demikian itulah yang disinggung Field dalam *Social Capital*. Menurut Field, teori modal sosial itu tema sentralnya diringkas dalam hal-ikhwal hubungan (sosial). Bahwa dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat mereka lakukan sendirian, atau memang hal itu bisa dicapainya, tetapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan yang lain dalam jaringan tersebut; sejauh jejaring tersebut menjadi sumberdaya, maka ia dapat dipandang se-

227 Hassan (2014:282).

228 Djohan (2008:37).

bagai modal. Dikatakan bahwa: Semakin banyak Anda mengenal orang, dan semakin banyak Anda memiliki kesamaan cara pandang dengan mereka, maka semakin kaya modal sosial Anda.[229] Anda tadi bertanya, bagaimana modal sosial ini secara konsepsional berkembang dalam ilmu sosial, maka dapat dikatakan bahwa sebagai konsep ia terus berkembang dan menimbulkan sejumlah perdebatan.

Bisakah diuraikan secara ringkas?

Istilah modal sosial, tak lepas dari, kalau bukan yang mempopulerkannya, yang disampaikan Robert D. Putnam, ilmuwan politik AS. Menurut Putnam, modal sosial ialah bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi.[230] Dari sini kemudian muncul kritik, bahwa pandangan demikian masih terbatas, dan belum bisa dianggap sebagai konsep, kendatipun ia memperoleh penguatan dari pandangan-pandangan tentang norma dan jaringan dalam teori sosial klasik. Field mengingatkan kembali pandangan-pandangan mereka. Antara lain:

- Alexis de Tocqueville (1832) yang menggambarkan pesatnya perkembangan kehidupan asosiasional yang menopang demokrasi dan kekuatan ekonomi Amerika. Bagi de Tocqueville, interaksi dalam asosiasi (perkumpulan) sukarela memberikan perekat sosial yang membantu menyatukan individu-individu AS, yang bertolak belakang dengan ikatan formal status dan kewajiban yang menyatukan hubungan yang lebih tradisional dan hirarkhis yang lazim ditemukan di Eropa.
- Emile Durkheim (1933) yang menggambarkan transisi masyarakat dari "solidaritas mekanis" dunia feodal menuju "solidaritas organik" kapitalisme abad ke-19. Yang mekanis itu dilakukan dengan tanpa dipikirkan dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan karena adanya struktur feodal tradisional. Sementara yang organis terkait dengan konteks masyarakat urban industri yang telah mengenal pembagian kerja yang lebih spesifik. Sementara itu, Ferdinand Tönnies membedakan asosiasi sengaja (yang disebutnya dengan *Gemeinschaft* atau komunitas) dan asosiasi instrumental (yang disebutnya dengan *Gesellschaft* atau masyarakat).
- Selain dari perspektif Durkhemian, gagasan mengenai hubungan sosial juga bisa ditelaah dari Marxian, Weberian dan sebagainya. Di masa modern ia bisa dikaitkan dengan pandangan Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Putnam.[231]
- Bourdieu sebenarnya lebih ke konteks apa yang ia metaforakan sebagai

229 Field (2010:1).

230 Field (2010:1).

231 Field (2010:8-20).

"modal budaya". Dalam studinya menganai suku-suku di Aljazair selama 1960-an, Bourdieu menggambarkan perkembangan dinamis struktur nilai dan cara berpikir yang membentuk apa yang disebutnya sebagai suatu "habitus" yang menjadi jembatan antara agensi subjektif dengan posisi objektif. Ketika mengembangkan gagasannya tentang habitus, ia menegaskan bahwa suatu kelompok mampu menggunakan simbol-simbol budaya sebagai tanda pembeda, yang menandai dan membangun posisi mereka dalam struktur sosial. Modal sosial, dalam perspektif Bourdieu, merupakan "satu-satunya cara" untuk menjabatkan prinsip-prinsip aset sosial. erat tidaknya ikatan sosial dikaitkan dengan jaringan. Bahwa nilai ikatan yang dijalin individu tergantung pada jumlah koneksi yang dapat mereka mobilisasi dan volume modal (budaya, sosial, dan ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing koneksi.[232]

- Field mencatat, modal finansial, modal fisik dan bahkan modal manusia dapat diberi harga kontan, dan dapat dipertukarkan dengan komoditas lain di pasar. Pada sisi lain, jaringan sosial tidak dapat begitu mudah diterjemahkan ke dalam bahasa pasar. Juga tidak dapat dipertukarkan dengan komoditas lain. Menurut Coleman, jaringan sosial mendapatkan kekuatan dari konteksnya. Ia bernilai dalam memfasilitasi tindakan tertentu, tetapi ia bisa jadi malah tak berguna, bahkan berbahaya dalam konteks lainnya.[233]

Apa yang bisa direfleksikan dari uraian di atas?

Modal sosial mengingatkan kita pada kekuatan jaringan dan juga daya rekat sosial. Kalau dikaitkan dengan bangsa (*nation*), ia membutuhkan perekat, modal sosial itulah. Bangsa yang plural seperti Indonesia jelas membutuhkan suatu penguatan modal sosial, agar integrasi makin kokoh.

Bisakah modal sosial berkurang karena konflik?

Justru karena konflik, dalam arti konflik yang terbuka atau perang satu sama lain yang memperhadapkan sesama elemen bangsa itulah yang mengurangi modal sosial kita. Konflik sosial kerap disebabkan oleh politik sebagai pemicunya. Pada zaman multipartai ini, banyak yang merasakan imbasnya: modal sosial kita tergerus oleh *jor-joran* kepentingan politik sesaat. Masyarakat plural yang dulu rekat, potensi konflik yang terjaga, kini seolah mendadak terusik oleh politik. Keguyupan dan kegotong-royongan tergeser

232 Field (2010:26).

233 Field (2010:231).

kompetisi politik, di mana satu sama lain dituntut saling menggungguli.

Jadi, politik bisa merusak konstruksi masyarakat yang telah terbangun oleh kokohnya modal sosial?

Ya itu tadi. Politik menuntut kompetisi. Dan itu artinya harus ada pergesekan antar-satu elemen dengan elemen lain yang berbeda bendera politiknya. Luka-luka politik pasca-pemilu, baik di tingkat desa hingga pilpres, kerap lama sekali sembuhnya. Bahkan bisa jadi kesumat politiklah yang cenderung terpelihara. Modal sosial yang kokoh sebelumnya, bisa tergerogoti oleh semangat saling menjatuhkan dan kesumat politik demikian. Makanya diperlukan rekonsiliasi sosial yang serius, agar konflik tidak menjadi-jadi, dan berujung pada suatu konsensus bersama, memperbaiki kembali modal sosial yang terusik oleh imbas demokrasi langsung. Kesumat politik tidak boleh terpelihara. Jangan sampai, ketika Anda terpilih menjadi Kepala Desa, para mantan musuh Anda perlakukan secara tidak adil.

Soal modal sosial ini, juga lazim diartikan: politisi harus menabung kebaikan ke masyarakat, agar suatu saat dapat imbalan yang lebih besar dalam pemilu?

Sah-sah saja hal yang demikian itu. Asal caranya etis dan tak menampakkan pamrih politiknya secara berlebihan. Hal ini mengingatkan kita pada konteks "*give and take*", bahwa hubungan politisi de-ngan masyarakat itu memang tak lepas dari hal sedemikian: ada pola timbal-balik yang unik. Adam Grant dalam *Give and Take*, memfokuskan konsekuensi timbal-balik dari aktivitas memberi dan menerima. Ia misalnya, mengutip Mark Twain, "Prinsip memberi dan menerima itu adalah diplomasi, memberi satu dan menerima sepuluh." Atau perkataan Martin Luther King Jr, "Semua orang harus memutuskan, apakah ia akan menempuh jalan terang altruisme atau jalan gelap egoisme yang destruktif." Kendatipun lebih banyak menguraikan contoh-contoh di luar politik, tetapi buku ini menyembulkan hal-hal yang bisa direfleksikan dalam aktivitas politik politisi, hubungannya dengan proses "*give and take*" pencarian dukungan: harus berempati, tetapi empati saja tidak cukup, harus juga dengan cara-cara advokasi.[234]

Advokasi?

Advokasi itu pembelaan, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan atau menjaga keadilan. Seorang politisi yang lolos ke parlemen, suatu hari mengisahkan mengapa dirinya bisa lakukan itu, sedangkan secara keuangan pas-pasan saja, dan ia sendiri bukan warga asli di daerah pemilihannya. Ia

234 Grant (2014:320).

mengatakan, kunci kemenangannya ialah, karena ia berikhtiar masuk ke warga masyarakat yang selama ini merasa dimarjinalkan oleh sistem/kebijakan pembangunan di sana. Maka, ia pun masuk dengan empatik, mengorganisasikan diri sedemikian rupa dan menggerakkan advokasi (dengan memanfaatkan jaringan sosial dan politik yang ada). Dan masyarakat pun membalasnya dengan dukungan suara. Maka, ia pun berapi-api untuk menjadikan partainya sebagai partai advokasi. Dalam konteks ini, ada baiknya saran Grant kita perhatikan, bahwa sebelum Anda bertindak sebagai "advokat", praktikkan "komunikasi tanpa kekuatan". Maksudnya, Anda harus bisa mengubah kebiasaan dari bicara ke mendengar, dari promosi tentang diri ke meminta nasihat dan bertanya.[235] Dengan begitu, Anda rupanya akan dapat dua hal sekaligus: simpati publik dan informasi yang cukup.

BTW, kalau altruisme itu apa?

Istilahnya saja yang terasa gagah, padahal artinya adalah perhatian atau kepedulian seseorang untuk membantu yang lain terkait kondisi keterbatasan kesejahteraan mereka, tanpa seseorang itu memperhatikan kondisi dirinya sendiri. Gampangannya, ia terkait dengan perilaku mudah bersedekah, atau bahkan bersedekah secara lebih, kalau bukan ekstrim. Perilaku ini dipandang merupakan kebajikan yang diajarkan agama, kendatipun aliran filsafat objektivisme berpendapat bahwa altruisme adalah suatu keburukan.

Altruisme itu lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Lawan dari altruisme adalah egoisme. Altruisme dapat dibedakan dengan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran, sementara kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu tertentu (seperti Tuhan, raja), organisasi khusus (seperti pemerintah) atau konsep abstrak (semisal patriotisme). Beberapa orang dapat merasakan altruisme sekaligus kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan.[236] Sifat memberi, bagaimanapun telah menjadi bagian integral dari manusia. Hal itu biasanya dikaitkan dengan konteks makna, sebagaimana dikatakan Adam Grant, ketika dia menganjurkan agar kita "bergeser secara perlahan ke arah perilaku memberi", karena dengan begitu kita mungkin akan mengalami "kesuksesan yang lebih besar, makna yang lebih kaya, dan dampak yang lebih *langgeng*".[237]

---

235 Grant (2014:320).

236 Wikipedia.org

237 Grant (2013:314).

Agaknya, ia terkait dengan filantropi ya?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filantropis itu artinya bersifat filantropi; berdasarkan cinta kasih terhadap sesama sesama manusia. Filantropi berasal dari Bahasa Yunani, *Philein* berarti cinta, dan *Anthropos* berarti manusia. Ia lazim dimaknai sebagai tindakan seseorang mencintai sesama manusia lainnya, sehingga ia rela menyumbangkan waktu, tenaga dan keuangan untuk menolong orang lain. Orang yang berwatak filantropik ialah yang dermawan, suka menyumbang. Organisasi filantropis ialah organisasi sosial yang berangkat dari orientasi memberi amal bagi yang lain.[238]

Mindset, Mental, dan Kultur

APAKAH *MINDSET* itu? Mengapa pembicaraan mengenainya penting dalam hal ini?

Bahasa Indonesianya pola pikir. Tetapi Gunawan mengartikannya lebih jauh. *Mindset* diartikan sebagai *beliefs* yang mempengaruhi sikap seseorang. *Beliefs* itu sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang; atau, sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respons dan pemaknaan seseorang terhadap situasi. Ia kemudian menyebut filosofi *transformasional thinking* yang terdiri dari tiga sistem, yakni sistem perilaku (*behavior system*), sistem berpikir (*thinking system*) dan sistem kepercayaan (*belief system*). Ketiganya saling berhubungan dan ada kaitannya dengan *mindset*.[239]

John Naisbitt pun telah mengarang buku *Mindset* ...

Benar. Naisbitt tidak secara tegas mengartikan *mindset* atau pola pikir dalam definisi yang terang. Tapi kita akan segera menangkap apa kemauannya, bahwa *mindset* terbentuk karena ada yang berubah di sekitar kita: di lingkungan mikro dan makro atau global. Pola pikir itu bisa diciptakan. Naisbitt mencatat,

> Pola pikir bekerja bagaikan rasi bintang di kepala kita. Kala hanyut dalam samudera informasi, pikiran kita menemukan arah dengan berpegangan pada pola pikir. Pola pikir menjaga pikiran pada jalurnya dan memberi tuntunan hingga sampai ke tujuan dengan selamat.[240]

238 Wikipedia.org

239 Gunawan (2007).

240 Naisbitt (2007).

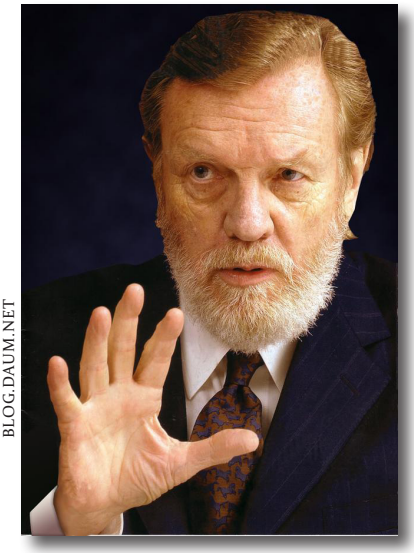

BLOG.DAUM.NET

Intuisi menjadi semakin berharga dalam masyarakat informasi baru, justru karena ada begitu banyak data

- John Naisbitt

Intuition becomes increasingly valuable in the new information society precisely because there is so much data.

Buku Naisbitt lebih ditujukan sebagai upayanya bukan hanya menyediakan bingkai dan perspektif mengenai paruh pertama abad ini, tetapi juga sikap-sikap fundamental yang diperlukan untuk mengantisipasi, bukan menerima masa depan. Jadi ada dimensi futurologinya. Ia mencandra masa depan dengan mencatat gambaran tentang masa depan itu, bukan spekulasi atau perjalanan ke daerah yang belum dikenal. "Gambaran saya tentang masa depan," catatnya, "didasarkan pada analisis mengenai masa sekarang".

Selain Naisbitt, buku tentang *mindset* dapat kita jumpai dalam karya Carol S. Dweck. Analisis Dweck lebih spesifik lagi, karena ia membagi *mindset* ke dalam jenis-jenis tertentu.[241]

Bisa dijelaskan lebih karya Dweck?

Baik. Supaya lebih urut, ada baiknya kita catat asumsi dan pertanyaan mendasar yang dikembangkan Dweck,

> Sejak semula, manusia berpikir secara berbeda, dan menjalani kehidupan secara berbeda satu sama lain. Tentu akan ada orang yang bertanya mengapa manusia berbeda-beda — mengapa sebagian orang lebih cerdas atau lebih

241 Dweck (2007).

ALLSINGAPORESTUFF.COM

Kita hidup di dunia yang amat sangat kecil, namun kemampuan salah paham satu sama lain sangat besar

- Khisore Mahbubani

We live in a smaller and smaller world, but the capacity to misunderstand each other is enormous

bermoral — dan apakah ada sesuatu yang menjadikan mereka berbeda secara permanen.

Dweck menjawab pertanyaan itu dengan menelusuri pendapat dua kubu berbeda. Kubu pertama menyatakan terdapat landasan fisik yang kuat bagi perbedaan-perbedaan ini, yang menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut tak terhindarkan dan tak bisa diubah. Seiring dengan perkembangan waktu, dugaan perbedaan-perbedaan fisik ini, meliputi tonjolan-tonjolan di tengkorak (frenologi), ukuran dan bentuk tengkorak (kraniologi), dan sekarang gen.

Pendapat kubu lain?

Kubu lain berpendapat sebaliknya. Perbedaan-perbedaan itu menunjuk pada latar belakang, pengalaman, pelatihan, atau cara-cara belajar manusia. Yang memelopori pandangan ini Alfred Binet, pencipta tes IQ.

Baik. Pandangan mana yang lebih benar?

Kalau disederhanakan, kubu pertama lebih tertarik pada sifat bawaan; kubu kedua ke faktor lingkungan. Siapa yang benar? Dweck mencatat,

> Saat ini sebagian besar pakar sepakat bahwa kecerdasan bukanlah ini atau itu. Ia bukanlah sifat bawaan (*nature*) atau hasil binaan (*nurture*), atau gen atau lingkungan. Dari konsepsi ini, ada proses memberi dan menerima yang terus berlangsung di antara keduanya. Sebagaimana dikatakan Gilbert Gottlieb, seorang ilmuwan ahli saraf terkemuka, sebenarnya gen dan lingkungan tidak sekedar bekerja sama seiring dengan perkembangan kita, tetapi gen juga membutuhkan masukan dari lingkungan untuk dapat bekerja secara tepat.

Jadi kedua pandangan itu saling melengkapi, satu sama lain komplementer. Manusia itu makhluk pembelajar. Dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan fisik misalnya, ia dapat merespons sesuatu secara maksimal.

Kembali ke jenis-jenis *mindset* ...

O, baik. Menurut Dweck ada dua jenis. Satu, jenis *mindset* tetap (*mixed mindset*). Asumsinya: kualitas-kualitas Anda sudah ditetapkan. Jenis kedua, *mindset* berkembang (*growth mindset*). Asumsinya: kualitas-kualitas dasar Anda adalah hal-hal yang dapat Anda olah melalui upaya-upaya tertentu, atau meskipun manusia mungkin berbeda dalam segala hal, dalam bakat dan kemampuan awal, minat, atau temparemen mereka, setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui perlakuan dan pengalaman.

Bagi Dweck dua-duanya penting, asal *mindset* dikembangkan secara sehat. Bahwa *mindset* bisa diubah dengan proses belajar-mengajar dan membuka pikiran. Kesuksesan adalah kemampuan untuk obyektif dan mampu merubah *mindset* untuk mengatasi berbagai permasalahan seberat apapun. Kalau Anda merasa tidak sukses, karena capaian-capaian yang Anda harapkan tidak memuaskan, barangkali ada yang salah dalam *mindset* Anda.

Bagaimana kaitan *mindset* dan peradaban?

Peradaban amat terkait dengan cara berpikir elite masyarakat pembentuk peradaban. Mahbubani dalam *Can Asians Think?* mencatat bangkitnya sebuah peradaban paralel dengan kemajuan cara berpikir.[242] Dicatat, di masa lalu peradaban Asia hebat. Sekitar seribu tahun yang lalu, orang China dan Arab (yaitu Peradaban Konfusian dan Islam) memimpin dalam ilmu dan teknologi, dunia pengobatan dan astronomi. Sebaliknya Bangsa Eropa masih berada dalam masa yang dinyatakan sebagai Zaman Kegelapan (*The Dark Age*). Tetapi kini, pada saat orang Asia memasuki abad ke-21, 500 tahun setelah kehadiran penjajah Portugis pertama kali di Asia, menurut Mahbubani, hanya satu Bangsa Asia yang telah mencapai tingkat perkembangan sejajar dengan Eropa dan Amerika Utara: Jepang. Pikiran orang Jepang lah yang pertama kali bangkit di Asia, dimulai dengan restorasi Meiji pada 1860-an. Dalam bukunya itu, Mahbubani memotivasi orang Asia agar "mampu berpikir", bahwa di tengah abad yang penuh ancaman ini, ancaman nyata yang sesungguhnya kenyataan bahwa kita tengah berlayar di abad ke-21, namun tetap menggunakan *mental maps* (peta-peta mental) abad ke-19. Solusinya "kita harus berani mengikis kebijaksanaan konvensional, menghempas pola pikir (*mindset*) lama, dan mulai berpikir dalam koridor-koridor *new mental*."

242 Mahbubani (2005).

Soal kultur bagaimana?

Pemimpin yang mampu menumbuhkan kultur baru dalam masyarakat (organisasi) ialah yang mampu mengubah *mindset* mereka. Dalam pendekatan organisasional, pemimpin berperan strategis dalam menciptakan dan mengembangkan budaya organisasi.[243] Merujuk istilah terakhir ini, ia lazim dalam studi manajemen. Budaya organisasi terkait sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota sehingga membedakan suatu organisasi dari lainnya. Sistem makna bersama ialah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi organisasi.[244] Ada konsep budaya organisasi, ada pula budaya politik: dua hal yang hampir sama, tetapi berbeda konteksnya. Soal budaya politik, nanti dibahas di bagian tentang kekuasaan.

Bagaimana ideal *mindset* politisi?

Penjelasan soal ini tersebar di buku ini. Intinya, berpolitik itu mulai dari niat: ada suatu keterpanggilan untuk memperjuangkan kemaslahatan bersama melalui jalan politik. Politisi sebagai pejuang harus paham tentang dunianya yang kompleks, tanpa harus melabrak etika/*fatsoen* politik. Singkat kata, *mindset* politisi identik dengan *mindset* kepemimpinan politik.

Komunikasi, Propaganda, Lobi, dan Negosiasi

KALAU KOMUNIKASI, bagaimana?

Komunikasi tak semata-mata urusan pandai bicara. Para politisi memang dituntut pandai bicara, bahkan pada masa lalu kemampuan berbicara secara memukau atau orator dipersyaratkan dalam menapaki tangga politik. Novel *Imperium*, karya Robert Harris misalnya mengisahkan perjalanan politik Cicero dari nol. Selain memperistri bangsawan kaya, supaya ia punya syarat sejumlah luas tanah dan kekayaan tertentu untuk berlaga menjadi anggota Senat, Cicero yang berprofesi sebagai pengacara itu, merasa masih harus mengasah kompetensinya berpidato, menjadi orator ulung. Gaya berkomunikasinya pun diperbaiki. Dan ia perlu sekolah khusus untuk itu.[245]

Ajidarma mencatat, kita boleh menyimpulkan kemampuan berbicara merupakan bagian tak terpisahkan dari politik. Tetapi, apakah hanya dengan berbicara itulah yang membuat politik menjadi penting? Catatnya,

243 Tentang pendekatan organisasi, lihat Winardi (2003). Tentang budaya organisasi, lihat Sobirin (2007).

244 Robbins dan Judge (2008:256).

245 Baca novel Harris (2008).

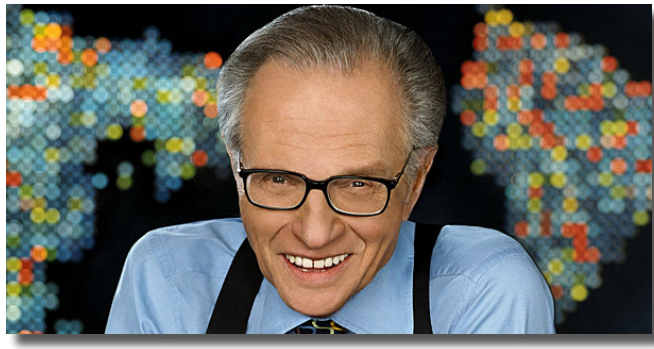

ACCESSATLANTA.COM

Jika aku mulai belajar, aku harus melakukannya dengan mendengarkan

- Larry King

If I'm going to learn, I must do it by listening.

> Kita setujui saja bahwa kepandaian berbicara itu bagian penting dari penyebaran ide-ide bagus, tapi adalah kenyataan juga bahwa banyak pejabat dan politisi pandai bicara dengan memukau meski ide-idenya *kosong melompong*, dan itu toh bisa mangantarkannya ke jenjang kekuasaan.[246]

Dalam membahas soal komunikasi, selain buku-buku lain, ada baiknya kita baca Larry King. Bukunya simpel dan praktis, *How to Talk to Anyone, Anytime, Anywere* (1994).[247]

Bukankah dia lebih dikenal sebagai presenter televisi, ketimbang pakar komunikasi?

Memang, dan tidak ada salahnya kan? Lagi pula King banyak menimba dari pengalamannya. Dia praktisi komunikasi. King yang lahir 19 November 1933 ini sepanjang karirnya telah memperoleh banyak penghargaan sebagai jurnalis dan penyiar. Program bincang-bincang di CNN *Larry King Live* merupakan *talk show* terpopuler. Ia telah mewawancarai banyak tokoh dari Sandra Bullock hingga Donald Trump, dari Bill dan Hillary Clinton hingga Vladimir Putin.[248]

Apa yang menarik dari pendapat Larry King?

Tentu ada prinsip-prinsip umum dalam berkomunikasi, terutama komunikasi verbal. Prinsip yang umum sekali dari King adalah kita semua harus bicara. Maksudnya, bicara yang benar dan efektif itu penting. Jangan

246 Ajidarma (2002).

247 King (2007).

248 Wikipedia.org

Jika Aristoteles hidup hari ini ia akan memiliki acara *talk show*

- Timothy Leary

If Aristotle were alive today he'd have a talk show.

dikira mudah. Apa yang dimaksud King tersebut mengingatkan nasihat Orang Jawa, *Ojo mung waton omong, nanging omongo sing waton, utowo omong waton*. Jangan kamu asal bicara alias *asal njeplak*, tapi bicaralah yang baik, substansial, dan efektif. Saking pentingnya orang *bisa bicara*, King meninggalkan pertanyaan: Apakah Anda lebih suka meloncat dari pesawat terbang tanpa parasut, atau duduk berdekatan dengan orang yang belum pernah Anda temui di sebuah acara makan malam? King menjawab, "Bila Anda memilih jawaban pertama (Anda lebih suka meloncat dari pesawat terbang tanpa parasut), jangan merasa tidak enak, banyak yang seperti Anda".[249] Kita pun tersenyum. Betapa tidak mudahnya *bicara*.

Bagaimana supaya seorang pemimpin bisa bicara?

Banyak teori yang bisa menjelaskannya. Tapi King mengatakan, tak seorang pun tidak dapat Anda ajak bicara, bila Anda memiliki sikap yang tepat. Jadi, kata kuncinya *sikap yang tepat*.

Apa maksudnya?

Menyesuaikan dengan situasi dan *audiens*-nya. Selain sikap yang benar, King menyarankan agar komunikator mampu mengembangkan kejujuran, minat terhadap orang lain, serta keterbukaan terhadap diri sendiri. Penting juga untuk dicatat adalah bahasa tubuh. Menurut King, bahasa tubuh sama halnya dengan bahasa lisan.

Bagaimana cara mengetahui dan mengukur *audiens*?

King memberi sederet pertanyaan: Apa organisasinya? Siapa saja anggotanya? Dari mana mereka berasal? Berapa lama Anda diminta bicara? Apakah *audiens* akan mengajukan pertanyaan setelah Anda selesai bicara?

Bagaimana penjelasan pentingnya bahasa tubuh?

Menurut King, bahasa tubuh itu bagian alami dari percakapan dan komunikasi. Jika terjadi secara alami, bahasa tubuh akan menjadi bentuk komunikasi yang sangat efektif. Jika dibuat-buat akan tampak seperti aslinya, padahal palsu. King menyarankan agar kita bersikap wajar. "Bahasa tubuh yang Anda gunakan saat bicara," catat King, "sama halnya seperti pembica-

249 King (2007).

raan itu sendiri. Bersikaplah wajar. Bicaralah dari hati."

Bersikap wajar itu apa kuncinya?

Sederhana. Biarkan semua terkesan alami. Tapi penting dicatat, uraian King merujuk bagaimana kewajaran paralel dengan menghargai lawan bicara. Ini bukan soal mudah. King mencontohkan, betapa pentingnya kontak mata, mendengarkan, dan membuat kalimat-kalimat yang cerdas dan tepat (tidak tabu, sopan, dan substansial). Kontak mata memberi kesan bahwa Anda fokus ke lawan bicara, sebagaimana halnya juga mendengarkan. Anda tidak terkesan meremehkan lawan bicara di sini. Seorang pemimpin yang bijak, mampu mengendalikan emosi, ialah yang tidak meremehkan setiap siapa saja lawan bicaranya.

Apakah semua itu memerlukan latihan?

Latihan itu perlu. Itu menunjukkan bahwa pemimpin itu manusia pembelajar. Mau belajar dan memperbaiki diri, sehingga ia siap untuk memimpin di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Ada satu lagi yang menarik dari King, soal ini. Kata kunci dari keberhasilan percakapan, apakah itu percakapan individual apalagi percakapan sosial, ialah relevansi. Maksudnya begini: apa yang disampaikan harus relevan: tematis, aktual, *up to date*, serta mampu *memberi jawaban* atas persoalan yang tengah berkembang. *Memberi jawaban* itu maknanya luas, bisa jadi ia dimaksudkan untuk membesarkan hati atau memberi insprasi *audiens* atau lawan bicaranya untuk memecahkan permasalahan dari yang praktis hingga rumit. Soal relevansi ini penting: bukankah kita sering mendengar sinisme seminar kemiskinan di hotel mewah? Bagaimana perasaan kaum papa apabila tahu nasibnya tengah dibicarakan di hotel mewah?

Adakah ciri-ciri pembicara terbaik menurut King?

King mencatat poin-poin berikut: pembicara punya sudut pandang baru; cakrawala yang luas; antusias; "tidak pernah" membicarakan dirinya sendiri; sangat ingin tahu, dan bertanya mengapa; mampu menunjukkan empati; memiliki selera humor; punya gaya bicara yang khas. Namun, semua itu kontekstual sifatnya. Misalnya dalam pidato sangat resmi, tentu tidak boleh membicarakan diri sendiri, memuji-muji diri sendiri. Tidak boleh mengeluarkan humor berlebihan, yang akan menjatuhkan wibawa forum.

Bisa diuraikan lagi secara singkat hal-hal di atas?

Kemampuan mencari sudut pandang baru amatlah penting. Paling tidak ia mampu mengambil titik pandang yang tak terduga pada hal-hal umum, sehingga uraiannya lebih mengena dan menarik. Soal keluasan wa-

BIOGRAPHY.COM

Hari yang tanpa tawa itu hari yang terbuang

- Charlie Chaplin

A day without laughter is a day wasted.

wasan, ia membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman di luar kehidupan sehari-hari. Artinya, ada sesuatu yang publik awam merasakan ada sesuatu pengetahuan baru atas yang disampaikan. Tentu publik amat amat merasa terobati, apabila memperoleh air penyejuk atas dahaganya. Pemimpin yang berkomuikasi secara baik dan berwawasan, akan berusaha menempatkan diri pada posisi lawan bicara dan audiens yang luas dan memahami apa yang mereka keluhkan dan rasakan.

Kemudian, pemimpin harus selalu antusias dalam banyak hal, artinya ia menunjukkan minat yang besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupannya maupun pada apa yang dikatakan pada kesempatan itu. Risikonya, ia siap menjadi *keranjang sampah* kompleksitas permasalahan yang dipimpinnya. Soal humor, disampaikan secara wajar saja. Jangan sampai tekesan dipaksakan. Nasihat King, jangan pernah megawali humor dengan kalimat-kalimat seperti:

- Saya akan menceritakan lelucon kecil (Tidak ada orang yang bilang akan menceritakan lelucon besar).
- Ada cerita lucu. Ada pasti suka. Benar-benar lucu.

Terakhir, yang perlu dicatat, setiap orang mempunyai gayanya sendiri, karena itu, catat King "carilah cara berbicara yang cocok dengan Anda dan kembangkanlah".

Terkait dengan *sense of humor*, apakah itu tidak menggannggu keseriusan tampilan seorang pemimpin?

Tidak. Keterangan King sudah cukup jelas, humor dilakukan secara kontekstual dan proporsional. Masalah humor ini (kaitannya dengan poli-

tik), tentu Anda segera ingat Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) bukan?

Hehe .. Apa pandangan Gus Dur tentang humor?

Jauh sebelum Gus Dur menjadi presiden, pada sebuah buku berjudul *Mati Ketawa Cara Rusia* yang terbit 1986 (berarti dua tahun setelah ia terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [PB NU] pada Muktamar NU di Situbondo pada 1984), Gus Dur berpendapat rasa humor itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari sebuah masyarakat. Bahwa,

> Rasa humor dari sebuah masyarakat mencerminkan daya tahannya yang tinggi di hadapan semua kepahitan dan kesengsaraan. Kemampuan untuk memtertawakan diri sendiri adalah petunjuk adanya keseimbangan antara tuntutan kebutuhan dan rasa hati di satu pihak dan kesadaran akan keterbatasan diri di pihak lain. Kepahitan akan kesengsaraan, diimbangi oleh pengetahuan nyata akan keharusan menerima kesengsaraan tanpa patahnya semengat untuk hidup. Dengan demikian humor adalah sublimasi dari kearifan sebuah masyarakat. ... Mengapa kemampuan menertawakan diri sendiri menjadi demikian menentukan? Karena orang harus mengenal diri sendiri, sebelum mampu melihat yang aneh-aneh dalam perilaku diri sendiri itu.[250]

Gus Dur mengaitkan humor dengan ikhtiar masyarakat yang tertekan untuk bertahan atau melawan. Ia juga terkait dengan konteks jujur pada diri sendiri?

Ya, saya setuju dengan itu. Memang demikian konteks pandangan humor Gus Dur. Konon pun ketika menjabat sebagai Presiden, Gus Dur tetap konsisten dengan lelucon-leluconnya. Sampai-sampai ada yang mengkritik bahwa karena seringnya Gus Dur melucu, ia disebut gagal dalam memimpin. Tentu perlu analisis lebih lanjut, apakah memang ada korelasinya. Tapi, saya kira sudah jelas bahwa Gus Dur jatuh, bukan karena lelucon-leluconnya. Banyak lelucon Gus Dur, ada yang berkaitan dengan politik, ada yang tidak. yang berkaitan dengan politik, misalnya (sebagaimana dicatatnya dalam pengantar buku *Mati Ketawa Cara Rusia*, berikut ini,

> Lenin meninggal pada 1924, dan Stalin menggantikannya sebagai penguasa Rusia. Mayat lenin, yang disemayamkan di *mausoleum* di Kremlin, pada suatu hari dicoba untuk dihidupkan lagi oleh para dokter. Mereka berhasil dengan percobaan itu, dan mayat Lenin dengan sempoyongan meninggalkan *mausoleum*, menuju ke Kantor Politbiro Partai Komunis. Dimintanya semua koran yang terbit sejak kematiannya, dikuncinya dirinya di kamar kerjanya, untuk menyimak ulang perkembangan Rusia sejak ditinggalkannya selama tiga tahun itu. Ia

250 Wahid (2011:56).

> tidak mau diganggu, hanya meminta makanan diletakkan di muka pintu ruang itu. Selama tiga hari makanan masih diambilnya, dan piring bekas masih dikeluarkannya dari dalam ruang. Setelah itu tidak ada piring kotor dikeluarkan dan makanan yang disediakan tidak diambil. Setelah beberapa hari hal itu berlangsung, diputuskan untuk mendobrak pintu ruangan itu, dan melihat apa yang terjadi, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu atas dirinya. Ternyata, Lenin tidak berada di sana. Harian-harian lama berceceran memenuhi lantai, dan di meja makan ditinggalkannya secarik kertas, berisikan pesan berikut: Revolusi Telah Gagal. Saya akan Kembali ke Jenewa untuk Mempersiapkan Revolusi Lagi.[251]

Wkwkwk ... Naluri politiknya masih sangat kuat rupanya. BTW, humor yang proporsional itu yang bagaimana?

Bagi pemimpin, humor memang harus proporsional, dan yang lebih penting ia harus tepat sasaran. Lelucon itu lucu manakala tepat sasaran. Orang paham akan humor kita, pun situasi kondisinya tepat. Sesuatu yang lucu, apabila penyampaiannya tidak tepat dengan situasi dan kondisinya, maka dijamin tak ada satu pun orang yang akan tertawa. Yang pasti ia terkait dengan bahasa, apakah bahasa tubuh, tetapi terutama bahasa tutur.

Dalam sebuah *talk show* di televisi Jhonny Iskandar, vokalis kelompok dangdut alternatif legendaris, *Orkes Moral Pengantar Minum Racun* (OM PMR) mengisahkan bahwa dulu ia sering diajak oleh kelompok lawak *Warkop Prambors* yakni Dono, Kasino dan Indro. Ketika ditanya, apa yang paling berkesan terhadap Warkop, Jhonny menceritakan pengalaman Warkop melawak di suatu tepat di Papua (Irian Jaya), ketika Dono, Kasino dan Indro melawak, tak satupun hadirin yang tertawa. Apa pasal? Ternyata orang-orang Papua yang jadi *audiens*, banyak yang tak mengerti bahasa Indonesia ... Wkwkwk ... Jadi ini seperti drama lucu di televisi, yang tidak dianggap lucu oleh penontonnya. Pasalnya jelas, yang nonton tak bisa bahasa Inggris. *So*, dalam hal ini, ada kesenjangan bahasa.

Yang kedua ialah konteks. Humor harus selaras dengan konteksnya. Belum tentu lho, kalau lelucon Gus Dur tentang Lenin di atas bisa membuat banyak orang tertawa. Mengapa? Bahkan mungkin di antara generasi zaman kita sudah tak tahu lagi siapa Lenin, Stalin, dan apa itu revolusi. Jadi lucunya di mana?

Humor itu tak sama juga ya dengan kesembronoan?

Ya. Humor itu perlu disiplin tersendiri, sedang sembrono tidak. Humor itu beda dengan tidak serius atau bahasa Jawanya *cengengesan* atau di atas itu *gemblelengan* (ada yang menulis *gelelengan*, *gemlelengan*, atau

251 Wahid (2011:56).

NAHIMUNKAR.COM

Yang pandai akalnya, jahat hatinya ... Yang berhasil menjadi manusia baik dan pandai, pengecut mentalnya ... Dasar *gemelelengan*! *Cengengesan*!

- Emha Ainun Nadjib

gemelelengan).[252] Marilah kita simak pelajaran filsafat yang ditarik dari syair lagu anak-anak di Jawa berjudul *Gundhul Pacul*. Orang Jawa pasti amat familiar dengan lagu *Gundhul Pacul*, yang konon, menurut Cak Nun, diciptakan oleh salah satu *Wali Songo*.[253] Liriknya amat sederhana.

Gundhul-gundhul pacul cul, gemblelengan
Nyunggi-nyunggi wakul kul, gemblelengan
Wakul Ngglimpang, segane dadhi sak ratan
Wakul Ngglimpang, segane dadhi sak ratan

Intisari syair itu, kisah seorang anak yang *pelontos* kepalanya, sembari me-*nyunggi* (meletakkan sesuatu di kepalanya itu) *bakul* (tempat nasi), dan karena *gemblelengan*, sombong-sombongan, *sok* atau berlagak, maka wakul *ngglimpang*, *segane dadi sak ratan*, jatuhlah bakul itu, dan ratalah nasinya di jalanan. Jadi inti lagu itu adalah, kalau kita tidak serius, kita sombong, maka akan ujungnya adalah malapetaka.

Bisa dinukilkan tidak uraian Cak Nun tentang hal-ikhwal

252 M Alfan Alfian, "Gemblelengan" *Pelita*, 13 Januari 2006.

253 Dalam hal ini, Harian Kompas (4 Agustus 2015) "Si Gundul yang Kehilangan Pacul" mencatat, bahwa penulis lirik "Gundul Pacul", ialah Hardja Soebrata, dalam buku *Ajo pada Nembang* terbitan Noordhoff-Kolff NV, Jakarta (1955). Tetapi, ia menyebut tembang tersebut sebagai *karya piridan* atau tembang yang disusun berdasarkan karya yang sudah ada. "*...ladjeng kula damelaken tetembungan ingkang gampil dipun ngertosi ing lare...* (lalu saya buatkan kata-kata yang mudah dimengerti anak-anak). Jadi, karenanya, ia memang hanya menghimpun.

gemlelengan ini?

Bisa. Memang ada baiknya, dalam hal ini kita baca ulasan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) yang saya ambil dari salah satu esainya berikut, tapi bagi politisi, pejabat, harus siap mental dan bersedia melakukan perenungan/ objektivikasi setelah membacanya.

> Gundul itu botak. *Pacul* itu cangkul. Tak ada kaitan literer antara gundul dengan *pacul* dalam idiom Jawa *gundul pacul*. Itu peng-enak-an bunyi belaka. Tak perlu ditafsirkan bahwa kepala kita menjadi botak sesudah dicangkuli oleh tetangga. Paralel dengan istilah "*uuwakehe suwidak jaran*", banyaknya sampai 60 kuda. ...
>
> *Gundul Pacul* mungkin menggambarkan karakterisasi anak, pemuda, atau manusia tertentu — melalui mata pandang dan rasa budaya Jawa. *Gundul pacul* adalah anak yang nakal *pol*, *mblunat*, *mbethik*, *mbeling*, susah diatur, berlaku seenaknya sendiri. Main sana main sini, teriak sana teriak sini, ambil makanan siapa saja di meja senafsu-nafsu dia, pergi ke sungai dan mandi *bluron* sampai kulitnya bersisik, lomba lari mengejar layang-layang putus sambil mengusap ingus. Intinya: punya bakat dan naluri anarkisme yang serius. ...
>
> ... "*Gundul gundul pacul cul, gemelelengan*....". Nakal tapi *sok* benar. Tak mau belajar tapi sok pandai. Kelakuannya seenaknya tapi *sok* suci. Tak punya apa-apa tapi *gemelelengan*, berlagak, *petentang-petenteng*. Tak becus menjadi pemerintah tapi tak punya rasa malu. Tak mampu berbuat apa-apa, bahkan menyusun kalimat sajapun tak lancar, tapi wajahnya tegak dan malah merasa bangga ... Sudah jelas bahwa pejabat itu buruhnya rakyat, malah berperilaku seakan-akan ia *boss*-nya rakyat ... Yang tak benar-benar mengerti Agama, sangat canggih memperdagangkan Agama. ... Yang baik moralnya, bodoh otaknya. Yang pandai akalnya, jahat hatinya. Yang intelektual, tak mampu bekerja. Yang sanggup bekerja, tidak pernah mau belajar. Yang berhasil menjadi manusia baik dan pandai, pengecut mentalnya. ... Dasar *gemelelengan*! *Cengengesan*!
>
> Anda mengerti kalimat berikutnya dari lagu kuno itu: "*Nyunggi nyunggi wakul kul, gemelelengan*....". *Nyunggi* adalah membawa sesuatu dengan meletakkannya di atas kepala. Yang di-*sunggi* adalah *wakul*. Bakul tempat nasi. Nasi adalah amanat kesejahteraan rakyat, kepercayaan sangat mahal untuk menciptakan masyarakat adil makmur. Bakul adalah otoritas, legalitas dan legitimasi kepemerintahan, yang ditempuh dan dipersembahkan oleh rakyat dengan biaya yang sangat mahal: uang raksasa jumlahnya, perpecahaan massa, nyawa-nyawa melayang, kebodohan berkepanjangan dan ketidak-sungguhan hidup bernegara dan berbangsa yang bertele-tele.
>
> Bakul tempat nasi itu tak sekedar ditenteng dengan tangan, apalagi ditaruh dalam rangsel di belakang punggung. Amanat itu sedemikian tinggi dan sakral maknanya sehingga diletakkan diatas kepala. Ditaruh di lapisan harkat yang lebih tinggi dari kepala individu kita sendiri. Diposisikan pada derajat yang lebih mulia dibanding kepentingan diri sendiri, golongan dan apapun saja

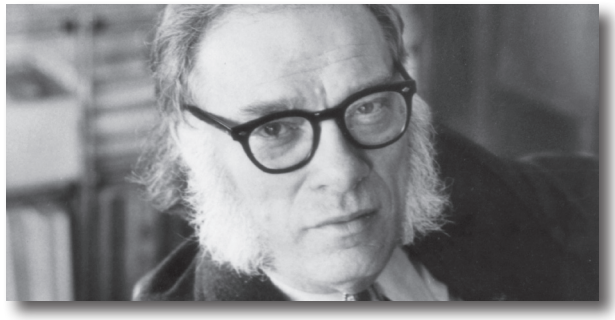

HUFFINGTONPOST.COM

**Aku bukan seorang pembaca cepat.
Aku seorang pemaham yang cepat**

- Isaac Asimov

I am not a speed reader. I am a speed understander.

dalam skala kehidupan berbangsa dan bernagara. *Nyunggi wakul* itu pekerjaan paling mulia. Dan dalam pekerjaan nyunggi wakul itu tetap saja kita bertindak *gemelelengan*. Tetap saja kita berlagak-lagak. Tidak sungguh-sungguh. Akting sana akting sini. Palsu luar, palsu dalam. *Fooling around*. Berbodoh-bodoh berdungu-dungu beriseng-iseng dulu, kemarin, hari ini dan besok. Politik kita permainkan. Kesakralan kata "rakyat" kita manipulasikan. Moral dan nurani kita remehkan. Agama kita akali. Tuhan kita tipu.

Akhirnya — "*Wakul ngglimpang, segane dadi sak latar ... ".* Bakul amanat kesejahteraan rakyat itu terjatuh dari kepala kita, tercampak di tanah, nasinya tumpah dan berceceran di halaman negeri indah ini. Seharusnya padi ditumbuh-kembangkan, nasi didistribusikan dalam keadilan. Tapi ini tumpah dan berceceran.[254]

Auw, sayang sekali ya berceceran ...

Lucu, tapi getir, seperti menertawakan pelawak Charlie Chaplin, yang *notabene* identik adegan-adegan musibah. Bukankah adegan bakul terjatuh, adegan musibah? Bukankah nasinya jadi tidak termakan oleh kita? Bukankah karena *gemblelengan*, kesia-siaanlah yang terjadi? Dari refleksi Cak Nun di atas, maka dapatlah kita catat: bila negara ini tidak terkelola dengan manajemen kenegaraan dan kebangsaan yang baik, dengan kualifikasi kepemimpinan yang andal, maka cepat atau lambat kondisi *wakul ngglimpang* terjadi. Dari sini dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas, pandai, mampu bertindak sebagai manajer negara-bangsa, tetapi juga harus dilengkapi dengan tidak gemblelengan, tidak sombong, tentu harus kaya-hati dan pandai berempati pada rakyatnya. Tentunya, pemimpin yang dimaksud bukan yang berkualitas *gundul pacul*.

254 Nadjib (2007).

Dalam membuat pidato kita harus belajar tiga hal: cara menghasilkan persuasi; bahasa; dan susunan yang tepat bagian-bagiannya

- Aristoteles

In making a speech one must study three points: first, the means of producing persuasion; second, the language; third the proper arrangement of the various parts of the speech.

Jadi ibaratnya nasib jutaan rakyat seolah berada dalam bakul nasi yang tengah di-*sunggi*, diletakkan di atas kepala para pemimpin kita?

Exactly. Dan sekali-kali mereka *gemblelengan*, tidak serius, tidak amanah, maka jatuhlah bakul nasi itu, dan *apes*-lah rakyat, *apes*-lah bangsa, *apes*-lah kita semua! Persoalannya siapa yang bisa menjadi pemimpin tetapi tidak *gemblelengan* alias menyalahgunaan wewenang untuk kepentingannya sendiri? Mudah-mudahan masih lebih banyak pemimpin yang amanat ketimbang yang tidak.

Kembali ke King. Bagaimana dengan pemilihan kata?

King menyarankan agar kita memakai kata-kata yang sederhana. Menurutnya, karena alasan tertentu, orang cenderung meggunakan kata yang rumit atau yang sedang populer untuk membua omonannya terdengar lebih *up-to-date*, lebih trendi, tidak ketinggalan zaman. Dengan kecepatan dan jangkauan komunikasi modern, kata-kata baru dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Sayangnya beberapa dari kata-kata ini tidak memberi arti apapun untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita.

Apa yang harus dihindari pemimpin saat berpidato?

Itu dapat diketahui, apabila ia mau melakukan evaluasi terus-menerus dan mau memperbaiki diri. King menyarankan mengikuti teknik: dengarkanlah saat Anda sendiri berbicara; pikirkan sebelumnya apa yang akan Anda katakan; dan carilah seseorang "pemantau pidato" untuk mendengarkan percakapan Anda dan mengingatkan Anda. Yang perlu dihindari banyak, antara lain: meluncurnya kata-kata yang tanpa makna, kata-kata yang tidak rasional, kata-kata yang menyinggung perasaan, kata-kata yang merendahkan dan tidak etis, hingga kata-kata yang mengagung-agungan diri sendiri. Dalam konteks ini King memberi panduan: *audiens* akan bosan kalau mereka tahu lebih banyak daripada Anda. Karenanya, menurut King, kalau Anda tidak merasa yakin dengan pokok bahasannya, Anda bisa idak yakin pula dalam sikap Anda.

Lebih bagus mana: pidato panjang atau ringkas?

Ringkas tapi jelas. King menyarankan, agar para singa podium sadar dan tahu kapan harus berhenti. Pembicara terbaik selalu tahu kapan harus berhenti. Pidato yang panjang adalah pidato yang tidak disarankan. Publik yang mendengarkan terancam bosan. Abraham Lincoln, yang kala itu menjabat sebagai Presiden AS paham betul akan hal ini.[255] Pidato Gettysburgnya berlangsung hanya kurang dari lima menit. Di suatu hari di bulan November 1863, ia harus bicara di depan publik. Sebelumnya bicaralah seorang orator paling terkenal, Edward Everett, dengan durasi waktu dua jam. Tapi, kita tahu pidato mana yang dikenang sepanjang masa.

John F. Kennedy yang juga pernah menjabat sebagai Presiden AS, punya pidato penyambutan yang amat pendek dan karenanya paling banyak dikenang dan dikutip. Pidato itu disampaikan pada 20 Januari 1961,

> Saudara-saudara rakyat Amerika, jangan bertanya apa yang dapat dilakukan oleh negara untuk kalian, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kalian lakukan untuk negara.

Lagi-lagi Churchill. Ia bicara lebih pendek lagi, ketika berpidato menasihati anak-anak sekolah Harrow School pada 29 Oktober 1941. Churchill berseru,

> Pantang menyerah kalah, pantang, pantang, pantang, pantang, entah besar atau kecil, pandai atau bodoh, pantang menyerah kalah, kecuali pada kehormatan dan akal sehat.

Sekarang soal propaganda, bisakah dijelaskan?

Propaganda merupakan bagian integral dari komunikasi politik. Sifatnya, hakikatnya monologis, walaupun propaganda dapat dikemas dalam dialog-dialog yang sudah diatur sedemikian rupa. Propaganda berasal dari bahasa Latin *propagare* yang berarti mengembangkan atau memekarkan. Propaganda merupakan rangkaian pesan yang bertujuan mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sejumlah orang yang banyak. Propaganda memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Karenanya, propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, dan seringkali menyesatkan — di mana

255 Amerika Serikat pada masa Presiden Lincoln terancam disintegrasi hebat dengan terjadinya perang sipil (*Civil War*). Tapi, sebagaimana direkam dalam sejarah, Lincoln mampu menggulirkan wacana pemersatu yang hebat bagi mereka, yakni pembebasan budak, pemerdekaan dan penghargaan pada kemanusiaan. Lincoln barangkali menjadi tumbal bagi bangsanya (karena ia sendiri akhirnya terbunuh oleh seorang pro-perbudakan), dan menandai terus melajunya sejarah Amerika, sebagai negara yang besar.

kepentingan subyektif bermain. Karena propaganda memang untuk tujuan politik, maka penuh dengan siasat dan trik untuk memanipulasi sesuatu guna mengelabui dan memobilisasi publik.

Apa saja teknik-teknik propaganda?

Banyak, antara lain :

- ***Ad hominem***. Frase Latin ini maksudnya menyerang lawan, dengan mematahkan argumen-argumen mereka.
- ***Ad nauseam***. Suatu ide yang disosialisasikan berulang-ulang (repetisi), biasanya melalui media, sehingga akan dianggap sebagai suatu "kebenaran".
- ***Appeal to authority***. Menciptakan sosok-sosok utama yang memiliki gagasan dan aksi (politik) yang jelas dan "memiliki otoritas" atau menjadi ikon di bidangnya.
- ***Appeal to fear***. Penyampaian pesan yang membuat kepanikan.
- ***Appeal to prejudice***. Penggunaan terminologi moral dan emosional untuk menyokong argumentasi.
- ***Bandwagon***. Produk gagasan dikesankan memperoleh dukungan yang luas, seolah semua orang mendukungnya.
- ***Inevitable victory***. Ajakan meyakinkan bahwa mereka yang ikut kelompoknya akan berada dalam jalan yang benar dan memperoleh kemenangan secara pasti.
- ***Join the crowd***. Teknik mengajak sebanyak mungkin orang (massa) bahwa mereka yang ikut telah secara alami berada di sisi kemenangan. Ini teknik untuk menggerakkan massa.
- ***Black-and-White fallacy***. Menyampaikan dua pilihan yang nyatanya ditujukan untuk menyokong pilihan propagator. Kalimat yang diajukan adalah "*You are either with us, or you are with the enemy*" [sebagaimana ajakan Presiden Bush pasca-Peristiwa 9/11, sehingga biasanya orang-orang tak punya pilihan untuk bergabung dengan musuh, karena akan dimusuhi].
- ***Beautiful people***. Mengajak serta orang-orang yang terkenal (*famous people*) yang senantiasa menjadi pusat perhatian, menjadi referensi dan memiliki magnet.
- ***Big Lie***. Menamankan persepsi yang salah, dalam kalimat-kalimat yang seolah-olah benar.
- ***Common man***. Pendekatan ***plain folks*** atau ***common man*** dimaksudkan untuk meyakinkan *audience* bahwa sang tokoh memiliki perhatian lebih terhadap apa-apa yang menjadi perhatian bersama atau ***common sense*** masyarakat — sehingga masyarakat merasa sang tokoh adalah bagian penting dari mereka. Pendekatan ini menempatkan tokoh sebagai orang biasa yang juga rendah hati dan mampu berempati.

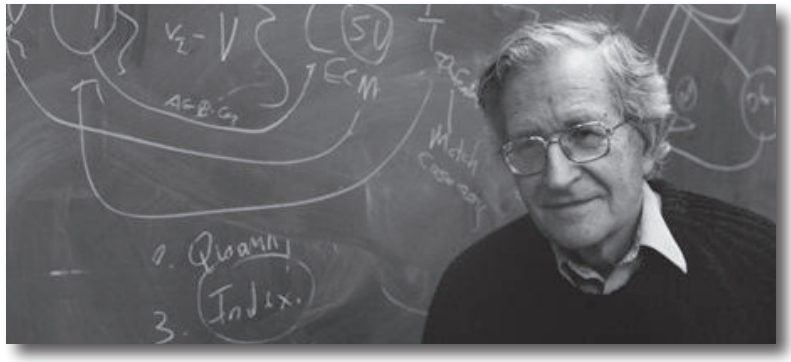

TELEGRAPH.CO.UK

Propaganda dalam demokrasi itu layaknya alat pemukul dalam negara totaliter

- Noam Chomsky

Propaganda is to a democracy what the bludgeon is to a totalitarian state.

- ***Demonizing the enemy***. Mempertegas identitas kelompok, membedakan dengan kelompok lain yang diposisikan sebagai musuh. Misalnya dengan menciptakan kelompok front anti-ini dan anti-itu.
- ***Direct order***. Teknik sederhana yang dilakukan dengan menciptakan citra dan kata-kata yang membuat sasaran melepaskan pilihan lain dan mendukung ajakan sang propagandis. Misalnya ketika Paman Sam berkata "*I want you*" — dan Anda tak bisa menolak lagi.
- ***Euphoria***. Menciptakan acara-acara yang mengeksploitasi kegembiraan, misalnya dengan mengumumkan hari libur, memberikan hadiah-hadiah menarik, serta harapan-harapan yang menggembirakan sasaran, sehingga mereka tetap berada dalam wilayah dukungan propaganda.
- ***Disinformation***. Teknik ini dilakukan dengan menyesatkan informasi, untuk tujuan politik sang propagandis.
- ***Flag-waving***. Mengeksploitasi sentimen nasionalisme dan penggunaan jargon-jargon patriotisme, seolah kelompoknya paling patriotik.
- ***Glittering generalities***. Generalisasi penilaian terhadap sesuatu yang dikatakan ideal, tetapi tanpa argumen dan analisis yang jelas. Di sini populer dengan "teori kecap" bahwa kecap A adalah yang nomor satu. Sementara "*ngecap*" adalah produk nyata dari ***glittering generalities***.
- ***Half-truth***. Suatu teknik pilihan pernyataan yang secara argumentatif benar, tetapi tak lengkap. Pernyataan yang dikemukakan hanya separoh benar (***partly true***), dikemas secara subyektif untuk kepentingan propagandis.
- ***Intentional vagueness***. Teknik menyampaikan sesuatu secara intensif di mana *audience* tergerak menyampaikan interpretasinya.
- ***Obtain disapproval or Reductio ad Hitlerum***. Teknik mereduksi perbedaan-perbedaan secara serampangan. Misalnya, ketika A dikatakan sama de-

ngan X, dan B disebut sama dengan X, maka a = b. Padahal sesungguhnya A dan B punya konteks masing-masing.

- ***Oversimplification***. Penggunaan generaslisasi yang sederhana untuk menjawab aneka permasalahan yang kompleks.
- ***Quotes out of Context***. Menyeleksi dan mengedit kutipan-kutipan tertentu dipakai untuk kepentingan propaganda dengan makna yang sudah jauh berbeda, bisanya dipakai untuk mendiskreditkan lawan.
- ***Stereotyping or name calling or labeling***. ***Name-calling*** itu pemberian julukan yang mengarah ke stigmatisasi atau cap/kesan yang sangat negatif. ***Labeling*** ialah pemberian label atau kategori atas sesuatu yang dilakukan secara canggih, tapi sesungguhnya suatu rekayasa memainkan opini. Semua itu dimaksudkan menciptakan cap negatif pada orang dan kelompok.[256]
- ***Rationalization***. Upaya untuk menalarkan sesuatu atas generalisasi-generalisasi dan keyakinan-keyakinan politik.
- ***Red herring***. Argumen yang dikedepankan tidak memiliki cukup data, tetapi seolah-olah argumen itu sudah merupakan analisis berdasarkan data-data yang valid.
- ***Scapegoating***. Teknik propaganda kambing hitam, menyalahkan orang atau kelompok lain dalam suatu urusan di mana sang propagandis dan kelompoknya turut terlibat — tetapi lantas cuci tangan.
- ***Slogans***. Suatu pesan yang disampaikan dalam kalimat-kalimat pendek, tapi mengena, sesuai dengan yang dimaksudkan propagandis.
- ***Testimonial***. Propaganda yang dilakukan dengan teknik pengakuan personal (kesaksian) yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dianggap memiliki kemampuan untuk meraup simpati.
- ***Transfer***. Merupakan teknik mengasosiasikan diri, mengklaim diri ke dalam citra positif. Hal ini juga diartikan sebagai pemaknaan atas simbol-simbol yang dikedepankan propagandis. Misalnya Partai A bersimbol gambar tertentu, yang kemudian dimaknai yang bagus-bagus.
- ***Unstated assumption***. Teknik menyampaikan sesuatu dengan mengeksplisitkan pernyataan.
- ***Virtue words***. Menggunakan kalimat yang dianggap sebagai "kebaikan utama" untuk memotivasi, tepatnya mempengaruhi *audience*.[257]

Wah, banyak strategi yang penuh kebohongan ya, untuk mengecoh dan mengarahkan ke tujuan politik ...

256 *Stereotype* adalah sekumpulan sifat-sifat tertentu yang kita atributkan kepada sekelompok orang tanpa pertimbangan rasional dan logis. Yang menjadi persoalan, apabila kita menganggap *stereotype* sebagai "kebenaran mutlak". Lihat, Boeree (2008:101).

257 Wikipedia.org

Namanya juga propaganda. Pakai saja pendekatan yang derajat komplikasi etiknya yang terkecil, *white propaganda* bukan *black propaganda*. Sebagai renungan, saya ingin mengutipkan kisah, bagaimana Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Anda bisa menganalisisnya sendiri, bagaimana Belanda menetapkan strategi penangkapan bagi pengobar Perang Jawa ini. Belanda secara licik memakai teknik-teknik *propaganda hitam* untuk menaklukkan Diponegoro. Berikut, artikel di Majalah *Historia*, "Perang Jawa Libur Selama Ramadan" ditulis oleh Aryono:[258]

> PADA 21 Februari 1830 atau empat hari menjelang bulan puasa tiba, Pangeran Diponegoro tiba di Menoreh, pegunungan perbatasan Bagelen dan Kedu. Kedatangannya itu berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya bersama Jan Baptist Cleerens, pada 16 Februari 1830, di daerah Remokamal tepi kali Cincinggoling. Cleerens adalah utusan De Kock untuk menemui Diponegoro.
>
> Kabar kedatangan Diponegoro tercium masyarakat. Meski mendapat predikat musuh Belanda nomor wahid, masyarakat masih mengelu-elukannya. Dia datang diiringi 700 prajurit. Di sana dia tinggal di sebuah rumah besar, berdinding bambu, dan beratapkan daun kelapa. Rumah singgahnya itu terletak di sebuah kawasan tanjung, di tepi Kali Progo, yang oleh masyarakat disebut daerah Metesih. "Pesanggrahan itu letaknya tepat di sebelah barat laut Wisma Keresidenan Kedu," tulis Peter Carey dalam surelnya kepada *Historia*.
>
> Di pesanggrahan ini, pengikut Diponegoro membengkak menjadi 800 orang. Sebagian besar dari mereka bersenjatakan tombak. Pasukannya sekarang tampil dalam balutan sorban dan jubah hitam, pemberian Cleerens dulu.
>
> Setiap pagi selama bulan puasa, Diponegoro beserta 800 orang prajuritnya tetap giat berlatih olah kanuragan dan menjalankan ibadah. "Dia mempunyai suatu batu yang lebar dan lurus dekat Kali (Kali Progo, red) untuk *ngibadah* (beribadah, red)," tulis Peter Carey.
>
> Awal Maret 1830, Diponegoro berpesan kepada de Kock melalui Cleerens, bahwa selama bulan puasa dia takkan melakukan pembicaraan apapun soal perang. Jikapun ada pertemuan, itu pun hanya ramah-tamah biasa. De Kock menerima hal itu.
>
> De Kock bahkan bermanis muka kepada Diponegoro dengan memberinya seekor kuda yang bagus warna abu-abu dan uang f 10.000 yang dicicil dua kali untuk biaya para pengikutnya selama bulan puasa. Dia juga mengizinkan anggota keluarga Diponegoro, yang sedang ditawan di Yogya dan Semarang, untuk bergabung dengan sang pangeran di Magelang.
>
> Bukan hanya de Kock yang menyambangi Diponegoro. Anggota staf senior de Kock, seperti ajudan sekaligus menantunya, Mayor F.V.H.A. de Stuers, dan Residen Kedu, Valck, sering berkunjung ke pesanggrahan Dipanegoro di Metesih sambil minta diberitahu apa saja keperluannya.

258 http://historia.id/modern/perang-jawa-libur-selama-ramadan

Jenderal De Kock mengakui kegigihannya. Dia bilang, orang ini seperti terbuat dari besi

- Peter Carey

Masyarakat Kedu pun banyak yang berkunjung di pesanggrahan pangeran. Mereka banyak yang membawakannya gula jawa, meski sebenarnya Diponegoro tak suka makanan yang manis. Ia tetap menerimanya sebagai tanda penghormatan mereka kepadanya sebagai 'pemimpin Jawa' (*lajering Jawa*).

De Kock tampaknya telah bertemu dengan Diponegoro dalam tiga kesempatan yang berbeda pada masa tersebut: dua kali saat jalan subuh di taman keresidenan dan sekali ketika ia datang sendiri ke pesanggrahan pangeran.

Perlakuan de Kock yang manis, ternyata bermuatan politis. Ia membiar-

S. Sudjojono, Pasukan Kita yang Dipimpin Pangeran Diponegoro (*Our Soldiers Led Under Prince Diponegoro*), 1979, *oil on canvas*, 100cm x 199.5cm/SARASVATI.CO.ID

kan Diponegoro menikmati jaminan keamanan semu, sembari berharap sang pangeran menyerah tanpa syarat.

"Motif dan cara tidak terhormat seperti ini tentu tidak dikatakan secara terbuka, namun dalam pandangan de Kock, apa boleh buat, tujuan menghalalkan segala cara," seperti ditulis Peter Carey dalam *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*.

Namun, sikap manis de Kock selama bulan puasa tak dapat meruntuhkan pendirian Diponegoro. Tumenggung Mangunkusumo, mata-mata yang ditanam residen Valck dalam di dalam kesatuan Diponegoro, melaporkan bahwa Diponegoro tetap kukuh dalam niatnya untuk mendapat pengakuan sebagai sultan Jawa bagian selatan. Tapi perwira senior Belanda lain, menyatakan bahwa sikap Diponegoro sebagai '*ratu paneteg panatagama wonten ing Tanah Jawa sedaya*' (ratu dan pengatur agama diseluruh Tanah Jawa).

Mendengar kabar tersebut de Kock mengambil langkah tegas. Pada 25 Maret 1830, dua hari sebelum bulan puasa berakhir, ia memberi perintah rahasia kepada dua komandannya, Louis du Perron dan A.V Michels, untuk mempersiapkan kelengkapan militer guna mengamankan penangkapan sang pangeran. Gencatan senjata yang berlansung selama bulan Ramadan berakhir tragis: Pangeran Diponegoro ditangkap pada hari kedua lebaran, 28 Maret 1830.

Sekarang soal negosiasi ...

Negosiasi adalah upaya untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi juga terkait dengan penyelesaian konflik.[259] Negosiasi merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan politik, atau untuk kepentingan yang lebih luas.[260] Sementara lobi-lobi politik adalah teknisnya. Dalam politik ada hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan, namun sesungguhnya lebih banyak hal yang dapat dinegosiasikan. Politik itu fleksibel dan dinamis, terutama di negara-negara demokrasi. Dalam berbagai studi tentang perpindahan rezim dari totori-tarian ke demokrasi, ternyata banyak hal yang perlu dinegosiasikan oleh para elite politik lama dan para elite pendatang baru.[261] Secara praktis negosiasi dilakukan untuk menyamakan kepentingan. Dalam bernegosiasi pusatkan perhatian pada kepentingan, bukan posisi. Teknisnya: utarakan kepentingan Anda; akuilah kepentingan mereka sebagai bagian dari permasalahan; tempatkan permasalahan secara benar; lihat ke depan, bukan ke belakang; konkrit tapi fleksibel; bersikaplah keras terhadap persoalan tetapi lembut terhadap lawan berunding.[262]

Politisi, kalau demikian, identik negosiator?

Tak hanya politisi, tapi, merujuk Cohen, hidup kita ialah kumpulan dari negosiasi-negosiasi, dan itu bisa terjadi di segala tempat. Dalam bukunya tentang negosiasi, Cohen mengilustrasikan bagaimana seorang ayah (saya), ibu (istri) dan tiga orang anaknya saling bernegosiasi ketika mereka tengah berada di rumah makan. Mereka tengah menikmati makan malam dan sepuluh menit pertama berlangsung dengan lancar, tapi lantas anaknya yang paling kecil memberontak dengan mengatakan keras-keras, "Ini restoran yang jelek sekali!"

Semuanya malu. Ayah segera membayar tagihan dan segara mening-

259 Prasetyono, Dwi Sunar (2007).

260 Misalnya, dalam konteks dakwah agama-agama di tengah masyarakat plural, perlu dibicarakan kesepahaman bersama, agar tidak saling berbenturan dan berakibat fatal. Yang diperlukan justru kerjasama satu sama lain. Lihat, misalnya Kirchberger dan Prior (2008).

261 Lihat, misalnya Casper dan Taylor (1996).

262 Lihat, Fisher, Ury, dan Patton (2003).

galkan restoran itu. Istrinya mengatakan agar kelak tak membawa "monster kecil" itu ke restoran lagi. Tetapi, sadarkah Anda bahwa sesungguhnya perilaku anak kecil itu telah berhasil mempengaruhi semuanya? Ya, nyatanya dia seorang negosiator, perunding yang "mengalahkan" orangtuanya.[263]

Adakah tips yang baik bagi negosiator?

Dawson dalam *Seni Negosiasi* memberi banyak tips bernegosiasi. Secara umum proses negosiasi dia bagi ke dalam: (1) gambit-gambit negosiasi awal; (2) gambit-gambit negosiasi tengah; dan (3) gambit-gambit negosiasi akhir. Jadi di awal, tengah dan akhir proses negosiasi, ada jurus-jurusnya. Misalnya, di awal ada tips antara lain: mintalah lebih dari yang Anda harapkan; jangan katakan ya pada tawaran pertama; hindari negosiasi yang konfrontatif. Di tengah dan akhir, banyak langkah yang perlu dipelajari, antara lain prinsipnya: (1) buat pihak lawan berkomitmen lebih dulu; (2) berpura-pura bodoh, itu pintar; (3) kuasailah kontrak; (4) berkonsentrasilah pada isu; (5) berilah ucapan selamat pada pihak lawan. Dalam masalah-masalah yang berat, diperlukan seni/perhitungan dalam mediasi, arbitrasi, dan resolusi konflik. Dalam konteks ini memang yang perlu diperhatikan ialah konteks kekuatan negosiator dalam menekan lawannya. Jenis-jenis penekan dalam negosiasi bermacam-macam, antara lain: penekan waktu, kekuatan informasi, *fait accompli*, *hot potato*, dan ultimatum.[264]

Bisa diuraikan nggak, *fait accompli* itu apa? *Hot potato* dan ultimatum itu apa pula?

Fait accompli itu dalam ungkapan bahasa Perancis artinya "sudah dilakukan". Dawson memberi ilustrasi soal adanya bengkel mobil yang suka melakukan tindakan reparasi mobil Anda, tanpa berusaha mendapatkan persetujuan dari Anda perkiraan biayanya. Ketika reparasi itu dilakukan, dan ternyata biayanya membengkak, Anda tak banyak pilihan lagi. Kalau Anda tak sanggup membayar, mobil Anda masih akan ditahan di bengkel itu. Jadi, *fait accompli* itu melakukan tindakan sepihak, dengan membuat lawan negosiasi Anda tak punya pilihan banyak. Tetapi ingat hal demikian merupakan cara yang tidak etis.[265]

Hot potato (kentang panas) terjadi manakala orang lain melemparkan masalahnya kepada Anda, dan lantas Anda merasa bahwa itu merupakan masalah Anda juga. Cara itu seperti melempar kentang panas dalam pesta *barbecue* (piknik dengan acara makan daging dan kentang panas). Dawson

263 Cohen (2011:20).

264 Dawson (2010).

265 Dawson (2010:286-288).

dalam hal ini memberi nasihat: berhati-hatilah Anda terhadap orang yang melemparkan masalah kepada Anda. Bukankah, Anda sendiri sudah banyak punya masalah?[266]

Sementara, ultimatum sebagai alat penekan, maksudnya ialah pernyataan yang berprofil sangat tinggi yang cenderung menimbulkan rasa takut pada negosiator yang berpengalaman.[267] Dalam hal ini, saya tentu segera bisa memberikan contoh kasus mrujuk pada pengalaman negosiasi antara kalangan militer dan pemerintahan sipil di Turki, terutama pada peristiwa kudeta posmodern 1997. Bahwa, militer yang mendominasi dewan keamanan nasional mengeluarkan ultimatum kepada pemerintahan berkuasa agar mengendurkan rencana-rencana kebijakannya yang dianggap melanggar prinsip sekulerisme Turki. Perdana Menteri Erbakan diberi banyak syarat/ultimatum, dan akhirnya ia mundur. Pola menekan pemerintahan sipil oleh militer, lazim terjadi di Turki termasuk model kudeta 1971.[268]

Baik. Seberapa besar urgensi komunikasi dalam aktivitas teknis lobi politik?

Jawabnya agak ekstrim: sangat besar. Karena pada hakikatnya proses lobi itu adalah proses komunikasi. Kecanggihan komunikasi akan menentukan keberhasilan lobi-lobi politik yang sangat menentukan masa depan organisasi politik. Apabila diurai dari awal, maka dapat dikatakan berpolitik khususnya dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan, diperlukan komunikasi, yang dimaksudkan menyampaikan dan menerima pesan-pesan politik, sehingga kepentingan-kepentingan politik dalam teraksentuasikan secara optimal.

Politik adalah seni mengambil keputusan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik atau kepentingan. Seorang pemimpin politik dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai sumberdaya politik dalam rangka optimalisasi kepentingan dan tujuan-tujuan politiknya. Oleh sebab itu, secara internal maupun eksternal, seorang pemimpin politik di tuntut untuk mampu berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepentingan dan tujuan politik tersebut secara tepat dan efektif.

Salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap aktivis politik adalah kemampuan untuk meyakinkan pihak lain, sebagai bagian dari komunikasi politik secara luas. Seni meyakinkan atau mempersuasi pihak lain, amat terkait dengan seberapa jauh metode dan teknik lobi politik dimiliki atau

266 Dawson (2010:289-294).

267 Dawson (2010:295).

268 Alfian (2015)

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Orang tak pernah berbohong begitu banyak dibandingkan setelah berburu, selama perang atau sebelum pemilu

- Otto von Bismarck

People never lie so much as after a hunt, during a war or before an election.

diimplementasikan secara tepat.[269] Tanpa adanya kemampuan lobi politik secara profesional dan berkualitas, maka sebuah organisasi politik dan *interest groups* atau aktivis-aktivis politik yang memiliki kepentingan politik tertentu, akan terjebak pada suatu kondisi stagnasi bahkan marjinalisasi politik.

Selain untuk mengoptimalkan kepentingan-kepentingan politik, apa lagi manfaat lobi politik?

Ia bermanfaat juga dalam proses-proses manajemen konflik, sehingga potensi konflik internal dan eksternal organisasi dapat terkelola dengan baik, antara lain karena kuatnya lobi politik yang dilakukan oleh para aktivis politik — yang memfungsikan diri sebagai mediator tangguh. Secara umum berikut fungsi-fungsi penting lobi politik antara lain:

- Mengkomunikasikan agenda/kepentingan politik

269 Zetter (2008)

Informasi itu senjata utama negosiator

- Victor Kiam

Information is a negotiator's greatest weapon.

- Mensosialisasikan keputusan-keputusan strategis organisasi
- Menyambungkan/mensinergikan kepentingan organisasi dengan pihak lain
- Memperluas jaringan/*network* dan pengaruh politik
- Mengupayakan *political deal* dengan pihak-pihak lain dalam menggolkan tujuan-tujuan politik yang strategis/taktis
- Mempertegas fungsi manajemen konflik sebuah organisasi politik.

Apa saja kualifikasi yang harus dimiliki pelobi politik?

Idealnya, pelobi politik memiliki sejumlah kualifikasi berikut:

- Memiliki kecakapan (kapasitas) dalam teknik berkomunikasi.
- Memiliki integritas (dapat dipercaya/*trust*), mampu menjaga citra dan mengembangkan pengaruh.
- Mampu memahami hakikat politik dan kepentingan politik organisasi.
- Mampu memahami, mencatat dan mengidentifikasi apa-apa kepentingan politik pihak lain.
- Mampu merumuskan titik-titik temu atas perbedaan kepentingan politik yang ada, dan menentukan alternatif-alternatif *poltical deal*.

Metodenya?

Langsung dan tidak langsung. Ini terkait cara berkomunikasinya. Yang langsung melibatkan elite-elite penentu dan mengandalkan teknik komunikasi verbal. Contoh-contoh:

- Ketua umum partai mendamaikan pihak-pihak yang berselisih di internal organisasinya dengan memanggil pihak-pihak yang berseteru untuk klarifikasi.
- Ketua umum partai bersilaturrahmi dengan pimpinan partai politik lain, di mana beberapa agenda pembicaraan khusus telah disepakati untuk dibahas.
- Sebuah partai politik memutuskan pembentukan tim khusus yang bertugas untuk melakukan perundingan-perundingan dengan pihak lain, mengenai isu politik strategis tertentu.

Kalau metode tak langsung?

Mengedepankan bahasa non-verbal: simbol-simbol dan sinyal-sinyal tertentu. Pelobi tak harus bertatap muka, namun memakai sarana dan momentum khusus penyampaian pesan, seperti:

- Ketua umum partai merespons pernyataan pihak lain, melalui media massa, sehingga timbul polemik sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya memaksa keduabelah pihak untuk bertemu membahas persoalan strategis tersebut secara khusus.
- Pesan politik tidak dilontarkan langsung, tetapi melalui individu/lembaga lain, sekaligus berfungsi sebagai pelobi politik tidak langsung kepada pihak lain.

Pilihan metode lobi itu, apakah langsung atau tidak langsung di tentukan oleh apa?

Ditentukan sejauhmana urgensinya. Para politisi yang bijak akan amat mempertimbangkan manfaat dan risiko atas pilihan metode lobi politik yang dipilihnya. Lobi langsung dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, apakah pertemuan langsung, melalui telepon ataukah dengan menulis pesan. Lobi yang tidak langsung bisa dilakukan dengan teknik media, jasa profesional; pun mamanfaatkan berbagai organisasi/komunitas, terutama partai politik; hingga memanfaatkan massa.

Sejauhmana sebuah lobi dikatakan efektif?

Hal tersebut amat tergantung pada seberapa besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan tercapai. Yang paling ideal adalah tercapainya sasaran utama (skenario A). Namun demikian dalam politik terkadang tidak ada yang sempurna sekali, sehingga harus ada skenario-skenario lain yang telah disiapkan, ketika skenario A gagal — skenario B, C, D dan seterusnya. Dalam konteks inilah hukum-hukum diplomasi politik berlaku:

- Dalam perundingan politik, maka dimungkinkan terdapat pandangan dan sikap politik yang berbeda, apalagi kalau kepentingan politiknya berbeda.
- Diplomasi politik dimaksudkan untuk menyamakan kepentingan, dan dengan demikian membutuhkan proses negosiasi yang sebanding, di mana satu sama lain berposisi setara di dalam forum.
- Masing-masing pihak berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingannya, dan mencatat kepentingan-kepentingan pihak lain, saling menganalisis, dan memberikan alternatif-alternatif tawaran atau solusi, agar tercapai titik temu.
- Dalam mencapai titik temu (*political deal*), masing-masing pihak harus siap dengan poin-poin kepentingan yang harus dikorbankan, demi tercapainya "kepentingan bersama yang lebih besar" — demikianlah target maksimal masing-masing terpenuhi dalam sebuah diplomasi politik.

Hakikat politik, dalam hal ini kalau demikian ialah tawar-menawar,

negosiasi, maka diperlukanlah keahlian.[270] Ini kelihatannya sangat teknis, tetapi perlu: bukankah pemimpin, sebagaimana saya ulas di bagian lain buku ini, tidak sekadar puisi?

Momentum, Upacara, dan Perubahan

DI ATAS sudah dijelaskan momentum sebagai penjelas teori peristiwa besar kepemimpinan. Apakah momentum dapat diciptakan?

Bisa. Dalam sebuah diskusi budayawan Taufik Rahzen pernah mengatakan, krisis multidimensi dapat diselesaikan dengan upacara atau festival.[271] Upacara yang dimaksudkan adalah ikhtiar untuk menciptakan momentum perubahan. Rahzen memandang upacara sebagai sesuatu yang rasional, bukan hal yang mistis dan irasional. Upacara mampu memunculkan semangat kebersamaan, energi positif yang mampu memicu motivasi yang kuat untuk bangkit. Kalau begitu, bukan upacaranya yang penting, tetapi bagaimana orang memaknai upacara itu dan terpacu untuk bangkit. Efek dari sebuah upacara itulah yang penting. Upacara hanya pemicu. Ia sekadar alat pencerahan, pembangkit makna-makna.

Tetapi, apakah betul upacara bisa memicu atau bahkan menyelesaikan kompleksnya permasalahan kita?

Bisa ya, tetapi juga bisa tidak. Ambil contoh, pengambilan sumpah jabatan para pejabat negara, kan dilakukan melalui upacara. Yang agamanya Islam, disumpah pakai Al Qur'an. Yang agamanya lain, disumpah dengan kitabnya masing-masing. Maksudnya kalau jadi pejabat tidak menyeleweng dan apalagi mengambil hak orang lain dengan memanfaatkan jabatannya. Tetapi, bisa jadi sumpah itu akan hanya sebatas upacara-ritual yang segera dilupakan. Maka, upacara tak berefek positif, karena yang segera mengemuka justru apa yang disebut jurnalis-budayawan Mochtar Lubis sebagai *kemunafikan*.[272] Tatkala upacara hanya dijadikan panggung pamer dan mo-

270 Tentang lobi politik ini, antara lain saya angkat dari pemaparan Akbar Tandjung.

271 M Alfan Alfian, "Upacara", *Pelita*, 25 Juni 2005.

272 Ciri-ciri manusia Indonesia menurut Mochtar Lubis: (1) hipokrisi atau munafik; (2) segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya; (3) berjiwa feodal; (4) masih percaya takhayul; (5) artistik; (6) tidak hemat, boros, serta senang berpakaian bagus dan berpesta, cenderung kurang sabar, tukang menggerutu, dan cepat dengki. Gampang senang dan bangga pada hal-hal yang hampa. Kita juga bisa kejam, mengamuk, membunuh, berkhianat, membakar, dan dengki. Sifat buruk lain adalah kita cenderung bermalas-malas akibat alam kita yang murah hati. Lihat, Lubis (2001).

Ketika Anda selesai melakukan perubahan, Anda selesai

- Benjamin Franklin

When you're finished changing, you're finished.

tivasi jangka pendek, ia tak sakral lagi. Manusia mudah lupa dan upacara mengingatkan: dalam upacara sumpah jabatan itu, Tuhan disebut-sebut dan dibawa-bawa; doa dibacakan secara khidmat panjang lebar sedemikian rupa. Tetapi, bisa saja setelah itu, sang pejabat cepat lupa dengan sumpahnya. Wajarlah kiranya, manakala para esais dan kritikus suka menulis refleksi kritis tentang paradoks demikian: setelah upacara selesai, Tuhan ditaruh di mana? Setelah upacara selesai, lantas Tuhan berfungsi sebagai apa? Anda bisa menjawab sendiri secara reflektif pertanyaan demikian: Apakah Tuhan dilupakan, atau menjadi sesuatu yang kita rasakan terus mengawasi tindak-tanduk kita?

Apa Anda punya refleksi soal paradoks perilaku demikian?

Mungkin yang ini, tulisan saya di Harian *Pelita*, 1 Juni 2012, "Dua Kamar". Ada baiknya kita baca lagi:

> SALAH SATU ciri negatif manusia Indonesia, menurut Budayawan Mochtar Lubis ialah kemunafikannya. Mungkin banyak yang menggerutu dan merasa pedas ketika ciri itu disebut, tetapi saya kira kita tempatkan saja secara lebih arif persoalan ini sebagai suatu otokritik. Lagi pula, di antara kita mungkin ada yang berpendapat begini, tidaklah elok membahas soal ciri kemunafikan itu dalam sebuah diskusi umum. Cirinya cukup kita rasakan saja, sebab semakin diurai, semakin membuat kita tersayat-sayat. Ini ibarat membicarakan kelemahan atau aib yang tidak perlu diumbar. Tetapi, saya sendiri tidak sampai ke sana, ke kekhawatiran itu. Saya merasa tidak ada soal apabila ciri itu kita perbincangkan, justru sebagai bahan permenungan atau refleksi kita tentang nasib bangsa ini ke depan sebagai bangsa yang ber-Pancasila.
>
> Seorang teman pernah bercerita tentang temannya eksekutif muda, kaya, sering memakai simbol-simbol agama, tetapi juga punya perilaku negatif yang kebablasan dalam berbisnis, berpolitik dan yang lain. Di rumahnya, ia punya kamar khusus untuk ibadah. Ruangannya nyaman, sejuk, penuh dengan simbol-simbol agama. Ketika berada di ruangan itu, ia sangat religius. Tetapi, begitu keluar dari ruangan itu, karakter negatifnya seringkali tak terbendung. Jarak berapa meter dari ruangan itu, yakni di ruang tamunya, ia membicarakan teknis-teknis pencaplokan proyek yang cara-caranya jauh dari etika atau kewajaran bisnis. Dalihnya ialah, toh orang lain juga melakukan hal yang sama. Ia menyebut, ruang tamunya sebagai ruang dunia. Raihlah duniamu seolaholah kamu hidup selamanya. Dan rumus untuk meraih dunia adalah, dengan segala

THEGUARDIAN.COM

Perubahan merupakan hasil dari upaya yang sungguh-sungguh

- Muhammad Yunus

Changes are products of intensive efforts.

cara, melebihi cara-cara preman atau mafia. Dan, ruang satunya lagi ialah ruang asketis, ruang di mana ia seolah-olah telah lepas dari urusan dunia, berserah dan menjadi sufi. Jadi, kontras sekali.

Ketika teman saya cerita, dan tentu saja saya kira ceritanya agak didramatisasi, saya ingat ciri manusia Indonesia Mochtar Lubis di atas. Pengontrasan antara dunia dan asketis itu juga diilustrasikan, misalnya, ketika seseorang atau rombongan orang kaya berasumsi bahwa harta kekayaannya yang diraih dengan segala cara itu bisa dibersihkan dengan umroh atau naik haji. Atau membantu dan membangun masjid, dan sebagainya. Jadi, ekstrim kebaikan dan kejahatan dan sebaliknya, ibarat bergerak dari satu kamar ke kamar lain: satu kamar menjarah, satunya kamar bertobat. Satu kamar penuh lumpur, satunya lagi kamar pencuciannya. Kontras dan dramatik, melebihi ceramah yang semula lucu berubah menjadi sedih: setelah tertawa-tawa senang, kemudian menangis-nangis. Kemudian berbalik tertawa lagi, nangis lagi, dan seterusnya.

Saya merasa terhenyak dengan cerita dua kamar teman saya itu. Saya sendiri memang tidak punya kamar-kamar khusus. Tetapi, soal ekstrimitas itu kadang sering mengemuka. Berbuat jahat dulu, baru bertobat. Toh, Tuhan Maha Pengampun. Dan alangkah dzalimnya saya, kepada diri saya sendiri, kepada Tuhan, maupun kepada orang lain kalau demikian. Dan itu sering tak tersadari. Mungkinkah Anda juga sering merasa demikian? Kapan hari saya baca kisah sufi, novel tipis karangan Ahmad Bahjat. Ibrahim Ibnu Adham meninggalkan ruang dunianya ketika ia justru adalah seorang pangeran penguasa tujuh kerajaan. Ia berjalan tanpa alas kaki mengikuti jejak seorang darwis, sufi berjalan, dan melakukan pengembaraan spiritualnya yang berliku. Tetapi, ia tetap ingat akan kerajaannya, dan beberapa kali berkirim surat kepada anaknya yang menggantikan posisinya. Tetapi, anaknya lama-lama tak bisa didikte lagi dan menganggap ayahnya, yang sudah menjadi darwis tidak jelas di mana ia itu, sudah gila. Tidak mungkin pendapat orang gila dilakukan, walaupun pen-

dapat itu demi kebaikan kerajaan.

Akhirnya, kisahnya seperti dua ekstrim: satu kamar kekuasaan, dan dengan kekuasaan seseorang bisa berbuat apa saja, satu lagi kamar gua, tempat sang darwis menyembunyikan diri dari dunia. Dan kamar kekuasaan tidak bisa lagi menampung kearifan dan kebijakan kamar asketik. Saya kira kita perlu lebih meningkatkan lagi kearifan atau kesalehan sosial ketimbang semata-mata individual. Karena, kesalehan sosial itu bermuara kepada keadilan sosial. Tidaklah bijak dan tidak ada ajarannya, untuk pergi ke surga sendirian. Artinya, tidaklah bijak ibadah individual kok tidak berdampak pada aspek atau perbaikan sosial. Kalau Anda sendiri yang masuk surga, betapa sepinya ia.

Soal pengertian momentum itu sendiri, bagaimana penjelasan akademisnya?

Soal itu, misalnya, mari kita baca Peter Adler, *Momentum a Theory of Social Action*.[273] Buku ini menarik, karena menjelaskan apa itu momentum. Bahwa momentum itu, sebagaimana evolusi, semula bukan istilah politik. Kalau evolusi lebih merujuk pada istilah biologi, maka momentum adalah istilah fisika. Untuk mendefinisikan momentum, perlu dibaca-baca kembali tulisan para *natural scientist*, di mana padanya istilah itu dihadirkan oleh fisikawan tempo dulu. Menurut Adler, para filosof awal mengartikan momentum sebagai kualitas pergerakan (*movement*) yang melibatkan kecepatan obyek, akselerasi (percepatan), dan tenaga (*power*). Fisikawan modern menggunakannya untuk menghitung atau mengukur tumbuhnya kekuatan (*force arising*) yang mengkombinasikan antara massa (*mass*) dan kecepatan (*velocity*). Kemudian Adler merefleksikannya dengan konteks kehidupan sosial (*social life*), di mana momentum juga melibatkan faktor kecepatan atau tepatnya perubahan kecepatan (*change of velocity*) dalam bertindak. Momentum menjelaskan seluruh proses melalui mana aksi terjadi, tingkatannya, intensitasnya, ikhtiar dan kesuksesannya. Momentum dapat diciptakan dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Dalam kompetisi politik misalnya, momentum bisa dipengaruhi oleh opini yang dikembangkan oleh media massa. Tujuannya untuk mempengaruhi persepsi publik dan mendatangkan sentimen massa terhadap kandidat politik.

Momentum selalu terkait dengan perubahan, adakah karakteristik perubahan itu?

Kita camkan catatan Rhenald Kasali soal karakteristik perubahan (*change*): (1) ia begitu misterius (bahkan yang digengam pun bisa lepas tanpa pamitan, dan memukul balik tak kenal budi); (2) *change* memerlukan *change maker*; (3) tak semua orang bisa diajak melihat perubahan;

273 Adler (1981).

(4) perubahan terjadi setiap saat, karena itu perubahan harus diciptakan setiap saat, bukan sekali-sekali; (5) terdapat sisi-sisi keras dan lembut dalam perubahan; (6) perubahan membutuhkan waktu, biaya dan kekuatan; (7) dibutuhkan upaya-upaya khusus untuk menyentuh nilai-nilai dasar organisasi; (8) perubahan banyak diwarnai mitos; (9) perubahan menimbulkan ekspektasi dan karenanya dapat menimbulkan getaran-getaran emosi dan harapan-harapan yang bisa menimbulkan kekecewaan; (10) perubahan selalu menakutkan dan menimbulkan kepanikan-kepanikan.[274]

Dikatakan "perubahan banyak diwarnai mitos", mitos-mitos apa yang dimaksud?

Menurut Rhenald Kasali ada beberapa: (1) perubahan selalu ditandai dengan kehidupan yang lebih baik; (2) perubahan selalu dilakukan oleh orang-orang muda; (3) perubahan hanya dilakukan kalau ada masalah serius; (4) Saya diangkat untuk melanjutkan hal-hal yang dirintis oleh pendahulu saya; (5) perubahan berarti pemutusan hubungan kerja (PHK).[275] Jadi, perubahan itu kontekstual.

Menarik. Apa saran Anda pada para politisi terkait dengan momentum dan perubahan?

Merujuk Adler, saran utamanya adalah: ciptakan momentum, rawat momentum itu dengan baik, supaya imbas atas perilaku dan kebijakan politik Anda berbuah baik. Pemimpin atau elite politik, dengan demikian tidak boleh tidur. Momentum itu tak gampang diciptakan. Dibutuhkan perjuangan keras untuk dapat mencipta suatu konsensus dan kesepakatan-kesepakatan politik. Komunikasi memang menjadi kunci utama. Dalam politik, momentum sangat terkait perkembangan yang, tentu saja bergerak dinamis — walaupun orang harus menunggu perubahan berpuluh bahkan beratus tahun lamanya.

Berbagai istilah yang hadir menyertai dan menjelaskan perubahan seperti reformasi, revolusi atau evolusi politik, itu semua terkait dengan momentum. Regenerasi politik juga membutuhkan momentumnya tersendiri: intinya, sirkulasi elite politik terjadi, tetapi tidak memunculkan resistensi yang berarti, yang menghambat munculnya tokoh-tokoh baru, walaupun di negara-negara otoritarian, perubahan atau regenerasi baru terjadi setelah sang pemimpin sebelumnya wafat atau pensiun tua.

Pergerakan dan komunikasi mampu menciptakan momentum. Seseorang terdaftar sebagai calon anggota legislatif nomor urut pertama dalam

274 Kasali (2007:xxxiii).

275 Kasali (2007:424).

THEGUARDIAN.COM

Setiap langkah menuju keadilan butuh pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan; pengerahan kekuatan yang tak kenal lelah dan perhatian seksama individu-individu yang berdedikasi

- Martin Luther King, Jr

Every step toward the goal of justice requires sacrifice, suffering, and struggle; the tireless exertions and passionate concern of dedicated individuals.

satu sistem pemilu proporsional terbuka dengan pertimbangan nomor urut, punya peluang besar untuk memperoleh dukungan pemilih dalam pemilu. Tetapi, upaya untuk itu tidak mudah. Ia harus bersaing dengan yang lain untuk memperoleh posisi nomor urut satu. Tanpa komunikasi yang baik dengan sang pemutus nomor, maka ia akan diabaikan. Dan kalau sudah demikian, ia akan kehilangan momentum.

Jadi, bagi pemimpin, tema perubahan itu perlu?

Ya. Pemimpin yang mumpuni adalah yang paham akan perubahan, tidak alergi dengan tema-tema perubahan serta regenerasi. Perubahan adalah *sunatullah* atau sesuatu yang berjalan terus-menerus. *Panta rei*, kata Heraklitus. Semuanya berjalan, mengalir. Perubahan tak bisa dibendung. Pemimpin yang tidak memahami arti perubahan, maka ia tidak akan pernah bisa arif. Bahkan, ia akan terlindas oleh perubahan itu. "*We change, whether we like it or not*", kata Ralph Waldo Emerson.[276] Suka atau tidak suka, waktu terus berjalan dan perubahan-perubahan akan terus terjadi.

Dalam banyak kasus pemilu politik, para pemenang adalah mereka yang diyakini publik mampu membawa perubahan. Ketika pihak *incumbent* sudah dinilai jumud, beku, statis, kehilangan inisiatif dan "gairah hidup", maka biasanya gampang dikalahkan oleh calon-calon yang dipercaya mampu membawa perubahan — yang lebih baik. Perubahan harus dikelola secara adaptif dan dengan demikian membawa berkah, bukan mendatangkan

276 Brayniquote.com

musibah. Perubahan yang tak terkelola berpotensi *chaos*, kekacauan, dan apabila itu berlarut-larut, maka itulah tandanya kemerosotan politik terjadi. Itu tidak boleh dalam perspektif pembangunan politik. Soal perubahan ini, kelak akan kita bahas lagi di bagian warisan kepemimpinan.

Daya Saing, Kerjasama, dan Stamina

APA URGENSI daya saing bagi seorang pemimpin?

Kedengarannya daya saing alias *competitiveness* sekedar menyangkut kepemimpinan ekonomi, tapi sesungguhnya juga berlaku bagi semua jenis kepemimpinan, termasuk kepemimpinan politik. Penjelasannya begini, suatu organisasi yang sehat dan kuat, tertib dan maju, tentu akan lebih baik ketimbang yang lemah dan kacau bukan? Dalam organisasi ekonomi atau perusahaan, jelas. Perusahaan yang punya *core* bisnis tertentu, tentu punya pesaing, yakni perusahaan-perusahaan sejenis lain. Dalam suatu persaingan sempurna, mereka akan berkompetisi satu sama lain secara seimbang. Tetapi dalam persaingan yang monopolistik, satu perusahaan mengontrol yang lain. Dalam persaingan oligopolistik, beberapa perusahaan melancarkan monopoli bersama.

Kalau dalam politik?

Partai politik, misalnya, kan perlu bersaing dengan yang lain. Bukan lembaga partainya saja, tetapi yang bersaing kan juga para elitenya. Persaingan merupakan hal yang alamiah dalam sistem demokrasi. Dalam satu pemilu, partai-partai berebut pengaruh untuk mendapatkan legitimasi. Kalau pemilu, entah itu pemilu legislatif ataukah kepala pemerintahan, dilakukan, maka satu sama lain kandidat merupakan pesaing.

Secara definitif, daya saing itu artinya apa?

The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, menjelaskan orang yang kompetitif adalah orang yang "memiliki keinginan kuat untuk bersaing". Kata bersaing menunjukkan arti "menjadi saingan" atau "berupaya menyamai (yang lain atau menyamai kualitas)", dan pada akhirnya "berupaya keras meraih keunggulan".[277] Garelli mencatat:

- Daya saing lebih dari sekedar produktivitas. Produktivitas merupakan aspek penting daya saing karena menjadi indikator efisiensi: memperlihatkan seberapa banyak hasil produksi perusahaan atau negara yang memiliki sum-

277 Garelli (2008:xiii).

berdaya terbatas.

- Daya saing itu lebih daripada sekedar apa yang dapat diukur. Karena, faktor penentu daya saing terutama adalah aspek non-fisik, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, ketrampilan, infrastruktur, merek, dan bahkan citra organisasi — yang agak sulit dikuantifikasi nilainya.
- Daya saing itu lebih dari sekedar kekayaan. Ingat, meskipun tujuan daya saing adalah kesejahteraan, kemakmuran, tetapi kekayaan itu sendiri tidak menentukan keberhasilan suatu negara, perusahaan (organisasi) atau individu. Negara bisa saja kaya tetapi tidak kompetitif. Catatnya, apa yang Anda miliki tidaklah sepenting apa yang Anda lakukan terhadap apa yang Anda miliki.
- Daya saing itu lebih dari sekedar kekuatan (variabelnya kekayaan dan ukuran). Jumlah penduduk yang besar atau negara yang luas, belum tentu sebanding dengan kekuatan daya saingnya. Kita bisa belajar dari kasus-kasus Jepang, Singapura, China dan sebagainya.

Kembali ke konteks urgensi daya saing dalam kepemimpinan, pesannya jelas: seorang pemimpin dituntut mampu membawakan organisasi memiliki keunggulan komparatif, sehingga ia mampu eksis dan berpengaruh.[278]

Adakah kaitannya dengan sumber daya dan dana ...

Justru itulah dua hal yang penting. Pemimpin harus dapat memanfaatkan segenap sumberdaya atau *resources* yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan. Sumberdaya itu bermacam-macam, tetapi biasanya kita mengenal *nature resources* (sumberdaya alam) — baik yang dapat diperbarui (*tangible*) maupun yang tidak dapat diperbarui (*intagible*) — dan *human resources* (sumberdaya manusia), serta *social resources* (sumberdaya sosial).

Penciptaan, pengolahan dan pemanfaatan aneka sumberdaya tersebut menghasilkan suatu keunggulan komparatif: dalam bersaing, organisasi memiliki kelebihan yang unik atau khas yang membuatnya bertahan dan berkembang. Kalau hal ini berjalan, maka sumber dana otomatis hadir menyertai. Dana bukan segala-galanya tetapi tidak dapat disepelekan, karena sangat penting bagi organisasi, mengingat tanpanya mesin organisasi tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Soal ini akan kita bicarakan tersendiri nanti dalam membahas tentang kekuasaan dan uang.

Bagaimana dengan kerjasama?

Kerjasama yang dimaksud merujuk pada komentar Franklin D Roosevelt dalam kutipan di atas. Ini sudah masuk ke ranah kerjasama dengan berbagai elemen kekuatan politik, jadi konteksnya bukan lagi kerjasama tim dalam internal organisasi. Bukankah tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam

278 Garelli (2008).

HISTORY.COM

Kompetisi telah terbukti berguna sampai titik tertentu dan tak lebih, tapi kerjasama merupakan hal yang harus kita perjuangkan ...

- Franklin D. Roosevelt

Competition has been shown to be useful up to a certain point and no further, but cooperation, which is the thing we must strive for today, begins where competition leaves off

politik? Nah, kalau begitu, politik adalah kumpulan dari persaingan dan kerjasama. Variasainya bisa persaingan dalam kerjasama atau kerjasama dalam persaingan. Dua hal terakhir itu, misalnya terjadi ketika partai-partai politik yang diametral secara ideologis melakukan kerjasama, tetapi di antara mereka sesungguhnya tengah bersaing. Eksperimentasi politik NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) di Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) merupakan contoh dari koalisi aneh yang bisa mewujud karena faktor Bung Karno — kendatipun dalam praktiknya tak bisa bertahan lama.

Memang harus ada faktor agar kerjasama bisa dicapai, dan itu lazim dalam pembentukan pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer. Persaingan lazim terhenti, ketika partai-partai harus membentuk pemerintahan, dan mereka terpaksa harus bekerjasama, karena secara persyaratan jumlah prosentase kursi sebuah partai politik di parlemen, tak cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri.

Bagaimana kerjasama koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial?

Pada prinsipnya sama, cuma tidak seketat bagaimana koalisi politik terbentuk pada sistem pemerintahan parlementer. Menurut Djayadi Hanan, koalisi presidensial ditandai antara lain oleh kecenderungan: (1) soal sifat koalisi (dan oposisi) dalam sistem presidensial yang memang memungkinkan berpindah-pindahnya dukungan politik dari kubu oposisi ke koalisi atau sebaliknya; (2) soal sempitnya jarak ideologis antar-partai dan, karena

itu, antara koalisi-oposisi sehingga partai-partai pun dapat lebih mudah memindahkan dukungannya dari satu isu/kebijakan ke isu/kebijakan lainnya. Kendatipun demikian, presiden punya posisi yang kuat dalam politik, mengingat, sebagaimana diulas Hanan,

> Dalam sistem presidensial, presiden memiliki *executive toolbox*. Ada banyak kewenangan/kekuasaan dan sumber daya politik yang dapat digunakan presiden untuk ditukar dengan dukungan retail tersebut. Misalnya, sejumlah bos partai besar sedang kesulitan keuangan dan mereka memiliki kewajiban untuk segera membayar utang kepada negara atau masyarakat. Presiden dapat saja membantu mereka dengan menggunakan kebijakan negara untuk menalanginya dan ditukar dengan dukungan politik pada kebijakan presiden. Perkakas dalam *executive toolbox* presiden juga dapat digunakan untuk "memukul". Untuk menghindari "pukulan" presiden itu, partai dapat menukarnya dengan dukungan politik pada kebijakan presiden.[279]

Kerjasama itu berarti tindak lanjut dari keberhasilan membangun konsensus, bukan?

Ya, soal pentingnya konsensus dalam politik, sudah beberapa kali disinggung. Tetapi, secara khusus memang demikian: politisi seharusnya mampu membangun konsensus (satu hal yang saya catat dari politisi senior Akbar Tandjung).[280] Konsensus itu terkait dengan konteks negosiasi politik untuk meneguhkan kesepahaman dan bahkan langkah bersama. Lagi-lagi ia terkait dengan komunikasi para elite dan ikhtiar sungguh-sungguh untuk mencari komitmen dan kerjasama. Istilah, dan kemudian menjadi konsep tentang konsensus, tidak saja terkait semata-mata urusan teknis membangun koalisi di ranah elite politik di parlemen atau lembaga lainnya. Tetapi, bahkan dalam konteks membangun bangsa pun membutuhkan konsensus dasar, sebagai pokok-pokok pikiran yang mendasar para Pendiri Bangsa, terkait dengan atas dasar apa bangsa itu didirikan dan visinya apa. Dalam konteks inilah, sejarah hadirnya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya, jelas terkait dengan konsensus Pendiri Bangsa tersebut. Karena itulah, tak berlebihan manakala Pancasila itu juga dipandang dan diletakkan sebagai sebuah konsensus nasional. Perubahan sistem politik (kenegaraan) melalui amandemen konstitusi, tentu juga mencerminkan adanya konsensus baru para politisi dalam kapasitasnya sebagai penentu kebijakan. Suatu konsensus baru, dalam konteks ini, tak lepas dari bagaimana mereka merespons perkembangan.

Sekarang kita akan diskusikan soal stamina kepemim-

279 Djayadi Hanan, "Koalisi Presidensial dan Ideologi", *Kompas*, 13 Februari 2015.

280 Ridwan dan Muhajirin (2003).

pinan. Apa yang Anda maksud?

Ada dua hal yang akan saya sampaikan di sini: filosofi lari dan gerilya Jenderal Sudirman. Keduanya terkait dengan perbincangan kita soal stamina kepemimpinan ini. Tentu, Anda juga bisa kaitkan dengan banyak hal dan contoh. Tetapi, saya memilih memulainya dengan menjelaskan filosofi lari, justru ketika saya usai membaca novel Haruki Murakami, *What I Talk About When I Talk About Running* (2008). Seperti pelari, pemimpin harus punya stamina yang tinggi. Kalau stamina kepemimpinan rendah, pemimpin mudah menyerah dan, akhirnya, kalah. Seperti pelari, dia selalu berada dalam lintasan pertandingan. Ada lari jarak pendek, menengah, dan jauh. Pemimpin yang kuat dan lincah mampu berlari stabil dan memicu percepatan. Pemimpin yang banyak masalah dan stamina rendah itu bak pelari yang cepat lemas, maka kepala cepat berkunang-kunang, tidak percaya diri, dan selalu tertinggal di belakang.

Dalam novelnya tersebut, Murakami tertarik pada pertanyaan apa mantra atau doa khusus bagi seorang pelari sehingga ia bisa jadi juara. Tidak ada! Yang ada bagi seorang pelari, *pain is inevitable*, *suffering is optional*. Bersakit-sakit tak terhindarkan, menderita itu biasa. Itulah disiplin yang ditunjukkan dengan tiada hari tanpa latihan, tanpa meremahkan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan. Saya menikmati novel itu sebagai sebuah motivasi hidup, dan itu segera bisa kita refleksikan ke banyak hal: dari diri kita sendiri, pemimpin, dan bangsa. Hidup kita seperti orang yang berlari. Kita mesti bergerak karena seorang pelari selalu bergerak. Pelari yang tak bergerak berarti mati. Bergerak itu berikhtiar. Tak seorang pelari pun juara secara kebetulan. Tak ada perwujudan obsesi secara instan. Tentu saja kita berasumsi bahwa perlombaan lari itu berjalan secara wajar. Permulaan lari harus sama. Perangkat yang dipakai sama. Para pelari tidak boleh memakai obat perangsang.

Bagaimana filosofi lari direfleksikan ke konteks bangsa?

Kalau kita refleksikan bahwa bangsa yang dimaksud Indonesia, maka ia adalah bangsa yang terus berproses. Indonesia merupakan bangsa yang hadir dari letupan sejarah nasionalisme anti-kolonial. Ketika lahir, ia mewarisi segudang masalah yang ditinggalkan bangsa penjajahnya. Di antara masalah yang kompleks itu, kalau mau ditarik ke yang agak inti terkait pola pikir, mentalitas, dan etos kedisiplinannya: kita memiliki warisan mentalitas bangsa terjajah di tengah kondisi alam relatif nyaman dan kurang direspons dengan etos kerja. Sesungguhnya banyak yang mengagumi nasionalisme Indonesia. Dari titik ini kehadiran Indonesia sangat otentik sebagai bangsa yang melahirkan dirinya sendiri, yang penuh semangat dan potensial.

CULTUREBOX.FRANCETVINFO.FR

Anak-anak muda hari ini tidak percaya apapun. Mereka butuh kebebasan

- Haruki Murakami

Young people these days don't trust anything at all. They want to be free.

Hanya saja, potensi-potensi itu masih banyak yang belum diolah secara aktif dan bermaslahat, justru antara lain oleh hal-hal yang menjebak dirinya. Banyak hal yang masih tersia-siakan. Bahkan, sebagaimana ditulis seorang pengamat ekonomi, kita masih sangat suka dengan "seni membuang kesempatan". Ironis memang, seperti pula yang dikatakan seorang budayawan, kita suka menjadi "gelandangan di rumah sendiri". Kalau ada orang yang mengecam keras bangsanya sendiri, maka janganlah segera dituduh anti-nasionalisme. Kita memang sedang butuh cambuk dari dalam.

Yang dimaksudkan ialah cambuk yang keras, agar kita semakin disiplin. Semangat keswadayaan dari masyarakat sipil perlu ditangkap positif oleh pemerintah dan elite-elite politik bukan dalam kerangka politisasi, tetapi keikhlasan membangun bangsa. Praktik pragmatisme-transaksional yang berkembang di dunia politik, ekonomi, hukum, bahkan sosial-budaya tentu tidak membuat kita semakin produktif. Kita terlena pada kemeriahan dan bertengkar demi simbol-simbol, tetapi lupa substansi dan orientasi perkuat daya saing bangsa. Politik kita seharusnya sudah melewati simbol, politik kebangsaan. Ekonomi kita harus didukung secara prima agar kaki dan tangan tak terikat sehingga bisa berjalan dan berlari kencang. Bukan mandek atau jalan di tempat. Penegakan hukum demikian pula: harus progresif.

Anda pakai istilah "mencambuk diri", maksudnya?

Mencambuk atau melecut diri itu terkait dengan memotivasi diri, tapi mungkin secara keras, tegas, disiplin. Tak ada bangsa yang bangkit tanpa motivasi yang kuat untuk bangkit. Motivasi itu terutama harus datang dari pemimpin. Rakyat tak cukup dapat memotivasi diri. Pemimpin itu membuat yang dipimpin bergairah dan bergerak. Memang tidak mudah menjadi

pemimpin bagi bangsa yang terlalu kompleks permasalahannya, yang bebannya perlu diurai. Pemimpin yang wajar tahu seberapa perlunya retorika. Untuk kepentingan yang lebih besar, pemimpin harus berani menentang arus. Itu sebabnya, pemimpin tak harus berorientasi pada popularitas.

Apakah dinamika yang menghadirkan pemimpin bangsa melalui jalur politik, kondusif untuk itu? Belum sepenuhnya demikian. Optimisme semestinya tak berhenti di retorika. Ia harus tampak dalam aksi nyata dan tak dibuat-buat alias otentik. Otentisitas inilah yang kian langka di tengah gemuruh praktik demokrasi elektoral. Akumulasi ketidak-otentikan atau kamuflase politik memperparah dan memperlemah jati diri serta kepercayaan diri. Supaya bangsa kita bisa berlari kencang, peran elite sangat penting dalam mengubah paradigma dan kerangka pikir politik kepentingan menjadi politik kebangsaan. Politik kita harus produktif: tak boleh defisit, membuang kesempatan, dan terjebak pada praktik sekadar *pemburu rente*.

Masih kaitannya dengan bangsa kita untuk maju dan berjaya, masihkah ada kesempatan?

Kesempatan selalu masih ada. Sesungguhnya kita telah punya kesempatan emas "turun mesin", menata sistem secara efektif, agar lebih siap tanding. Itu terjadi di awal era reformasi, bahkan hingga dewasa ini. Memang sistem telah berjalan dan itu pun masih bisa diperbaiki. Butuh proses yang tidak sepele, terutama apabila sudah menyangkut konsensus antarkekuatan politiknya. Konsensus yang ada masih belum sepenuhnya mampu membangun cetak biru sistem kebijakan yang berkualitas. Ibarat pelajar mengerjakan soal ujian, jawabannya masih banyak yang tidak tepat. Fase itu seharusnya dilewati dengan baik.

Namun, perlu dicatat, kenyataannya bahwa bangunan sistem kita masih rapuh dan kuyup konflik. Selama urusan politik dan persatuan masih membelenggu, kita seperti belum berkutat memperbaiki mesin kendaraan yang aus dan bermasalah. Kita masih berhenti kalau bukan jalan di tempat. Padahal, dunia sudah tantang kita berlari kencang. Penggambaran ini terasa agak ekstrem. Namun, kalaupun kita merasakan perkembangan, sepertinya kita masih berlari-lari kecil saja. Kita perlu berlari, terus berlari, semakin kencang dan melampaui jargon "Kita pasti bisa".

Kembali ke stamina kepemimpinan, apa yang bisa Anda refleksikan dari gerilya Jenderal Sudirman?

Pak Dirman punya stamina kepemimpinan luar biasa, jauh melampaui batas-batas kemampuan fisiknya yang rentan. Kita tahu, angkatan bersenjata memilih jalan gerilya dalam mempertahankan kemerdekaan, suatu pendekatan yang berbeda dengan yang ditempuh pemerintah. Gerilya tentara

tetap dilakukan, meskipun Sudirman menderita Tuberkulosis (TBC). Apa yang dilakukan oleh Sudirman, tentu bukan hal yang fatalistik. Ia melakukannya karena prinsip dan perjuangan yang dilakukan berdasarkan strategi yang diyakininya. Keterbatasan kesehatan fisik, tak menghalanginya untuk menunjukkan stamina kepemimpinannya tinggi.[281]

Dedikasi, Loyalitas, dan Konsistensi

DALAM POLITIK kita mengenal pula istilah dedikasi dan loyalitas. Apa maknanya?

Baik. Kita lacak asal-usul kata dedikasi terlebih dulu. Ternyata dedikasi berakar dari bahasa Latin *dedicatio*, menyatakan, mengumumkan. Tatkala seseorang menenggelamkan diri (*immerse one-self*) dalam suatu sikap yang tulus pada satu subyek yang dianggap baik dengan kondisi khidmat, itulah maksud awalnya. Merujuk bahasa aslinya, ia terkait dengan altar, candi, tempat pemujaan, dimana orang menundukkan diri pada yang sakral. Dalam perkembangannya ia juga bermakna, ketika seseorang mempatronkan diri dan mendukung penuh sosok tertentu, dengan penuh "kasih sayang" (*affection*) dan penghormatan. Dalam kamus bahasa Inggris, *dedicate* artinya mempersembahkan atau membaktikan. Dan dalam bahasa kita, pengertian umum tentang dedikasi, terkait dengan hal-ikhwal dharma-bhakti.[282]

Bila ada seseorang yang serius mengurus organisasi, dan semua orang tahu ia *nothing to loose*, orang itu telah menunjukkan dharma-bhaktinya yang luar biasa. Ia setia pada pekerjaan dan almamaternya. Dalam kasus para guru-bantu yang belakangan sering melakukan demonstrasi supaya diangkat derajatnya itu, mereka telah men-*dharma-bhakti*-kan tenaga dan pikirannya selama bertahun-tahun dengan imbalan sekedarnya. Kalau seseorang setia pada profesinya, maka ia adalah seorang yang berdedikasi. Misalnya sastrawan kita Taufiq Ismail yang konsisten dengan kepenyairannya. Atau seorang tukang sapu jalanan yang nyaris pekerjannya sejak muda cuma itu saja — walaupun barangkali memang tak ada peluang lain.

Kalau dedikasi dalam politik? Lebih-lebih dedikasi dalam partai politik?

Gini saja: bayangkan diri Anda saat ini adalah salah satu tim penilai para bakal caleg satu partai tertentu. Anda akan mendapatkan jawabannya:

281 Studi tentang Sudirman, misalnya lihat Said (1991).

282 Cek kembali Wikipedia.org.

Kejelasan dan konsistensi saja tak cukup: pencarian kebenaran itu butuh kerendah hatian dan ikhtiar

- Tariq Ramadan

Clarity and consistency are not enough: the quest for truth requires humility and effort.

kira-kira apa dedikasi itu. Soalnya, dedikasi merupakan salah satu kriteria, selain misalnya: prestasi, dan tidak tercela.

Lha, kalau loyalitas?

Kata dasarnya loyal. *Loyalty is faithfulness or a devotion to a person or cause*.[283] Makna umumnya di sini kesetiaan atau kepatuhan. Patuh pada sosok atau aturan? Organisasi modern mengkondisikan loyalitas pada aturan, bukan *person*. Tetapi pada praktiknya loyalitas selalu disimpangkan sebagai kesetiaan pada *person*. Dalam politik setia pada *person* yang berposisi sebagai patron itu wajar-wajar saja. Dalam suatu model persaingan politik yang *zero sum game*, faksi-faksi politik mengerucut pada loyalitas *person*. Konsekuensinya, tatkala person tertentu yang unggul, maka "rombongannya" ikut "selamat". Kalau kalah, "diberantas", kecuali apa yang kerap diistilahkan "berkaki dua" atau "main mata" sejak awal, atau seperti istilah yang dipopulerkan juga media massa "menjadi brutus".

Brutus?

Brutus adalah sosok yang mengkhianati Julius Caesar dalam sejarah Romawi. Markus Yunius Brutus (85–42 SM) atau Quintus Servilius Caepio Brutus adalah nama lengkapnya. Kronologi hidupnya di bawah ini menggambarkan bahwa ia sejatinya musuh Ceasar, diampuni, diberi jabatan, dan akhirnya, ia justru membunuh Caesar:

- 85 SM – Dilahirkan di Roma
- 58 SM – Asisten Cato, gubernur Siprus
- 53 SM – Menjabat quaestor di Cilicia
- 49 SM – Bersama Pompey ke Yunani berperang melawan Caesar
- 48 SM – Diampuni oleh Caesar
- 46 SM – Diangkat menjadi gubernur Gaul
- 45 SM – Diangkat menjadi Praetor
- 44 SM – Membunuh Caesar, lari ke Athena dan selanjutnya Kreta

283 Wikipedia.org

- 42 SM – Mencoba merebut Roma; gagal dan bunuh diri[284]

Apakah pemimpin butuh loyalitas anak-buah?

Pasti. Dalam soal loyalitas, pemimpin sekaliber Nelson Mandela pun mengaku mengharapkannya. Tetapi, ia tidak terlampau terobsesi dengannya. Katanya, *people act in their own interest*.[285] Benar. Itu alamiah. Ia tidak percaya bahwa daya pesona saja mampu membuat mereka patuh. Yang penting membuat mereka percaya atas kepemimpinan kita. Jadi loyalitas, terkait dengan kualitas kepengikutan (*follower*) dan pastinya kepemimpinan.

Jadi, loyalitas dalam politik kontekstual sekali ya?

Ya karena orang yang pindah-pindah partai merasa punya alasan untuk melakukannya, dan enggan dituduh tidak loyal. Alasan untuk loyal dan tidak loyal, juga dapat dikaitkan dengan misalnya "sentimen ideologis". Misalnya si A sering disebut "anak ideologisnya" tetapi bukan anak biologisnya B sebagai tokoh besar dalam sejarah, karena ajaran-ajaran B dipakai oleh A sebagai dasar kepolitikannya. Kalau tidak demikian, maka A sekadar "anak biologis" B saja. Tetapi, kendatipun "ideologi" berubah, mungkin A beralasan bahwa ideologi B perlu modifikasi.

Jadi bagaimana dengan konsistensi dalam politik?

Tampaknya diskusi kita soal loyalitas dalam politik mengerucut ke dalam tiga jenis konsistensi: (1) konsistensi politik yang didasarkan pada loyalitas personal (di mana anak-buah loyal secara personal ke yang mengajaknya masuk dunia politik, atau lebih dari itu sosok kharismatik yang membuatnya loyal secara personal: naik dan jatuhnya dalam politik, konsisten saja diikuti); (2) konsistensi politik yang didasarkan pada loyalitas pada lembaga atau loyalitas kelembagaan (ini sering ditinjukkan oleh sosok-sosok politisi yang tetap setia pada "merek" partainya, kendatipun ia kecewa dengan pemegang kekuasaan di partainya itu; atau bahkan ketika partai itu tengah terpuruk, jatuh, menjadi partai yang masa depannya semakin tak menentu, tetapi ia tetap setia).

Selanjutnya, (3) konsistensi perjuangan politik, yang diartikan lebih luwes ketimbang kedua jenis konsistensi di atas. Konsistensi perjuangan politik, paradoks dengan kedua jenis konsistensi di atas, mengingat ia bisa jadi menolak loyalitas personal dan lembaga (karena lembaga dinilainya sudah tidak konsisten dengan sistem yang dibangunnya): ia akan membuat dan/atau ikut lembaga politik baru/lain yang dipandang mampu mewadahi per-

284 Wikipedia.org

285 *Time*, Edisi 21 Juli 2008.

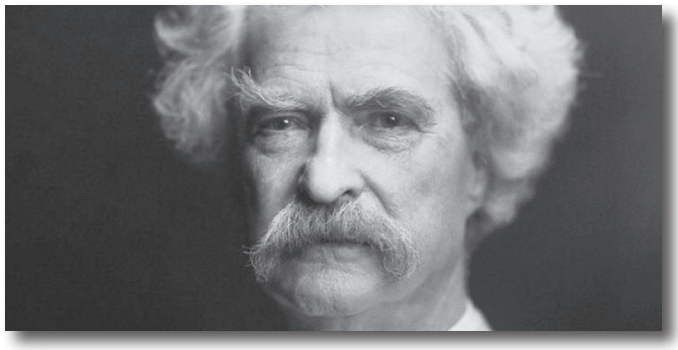

HUFFINGTONPOST.COM

Loyalitas kepada negara selalu. Loyalitas kepada pemerintah ketika layak untuknya

- Mark Twain

Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

juangan politiknya. Maka jelaslah sudah bahwa, jenis yang terakhir ini ialah konsisten untuk tidak konsisten (dalam keloyalitasannya secara personal dan lembaga).

Dalam konteks ini, termasuk jenis loyalitas apa samurai di Jepang?

Kalau para pendekar samurai ialah para penempuh jalan pedang yang setia, loyal dalam menjaga tuannya, maka urusannya lebih ke personal (terlepas dari tuan yang dilindunginya berdampak pada lembaga atau tidak). Inilah loyalitas tradisional dalam masyarakat Jepang pada masa itu. Samurai berbeda dengan ronin atau *rōshi* yakni samurai yang tidak bertuan. Ia tak punya loyalitas personal, tetapi lebih kepada nilai-nilai. Dalam sejarah Jepang dicatat bahwa para samurai kehilangan atau terpisah dari tuannya pada zaman feodal Jepang (1185-1868), sebagai akibat hak atas wilayah kekuasaan sang tuan dicabut oleh pemerintah. Di Jepang kuno, *ronin* berarti orang yang terdaftar (memiliki *koseki*) sebagai penduduk di suatu tempat, tapi hidup mengembara di wilayah lain sehingga dikenal juga dengan sebutan *furō* (pengembara).[286]

Disiplin, *Legacy* dan Regenerasi

PEMIMPIN YANG berhasil, biasanya dikaitkan dengan tinggi-

286 Wikipedia.org

nya tingkat kedisiplinannya ...

Ya, pemimpin harus paham bahwa dirinya pemimpin. Ini syarat paling mendasar: kesadaran diri sebagai pemimpin. Karenanya, disiplin kepemimpinan terkait dua konteks: disiplin diri (*self control, eling*/ingat dan waspada) dan lantas disiplin tindakan. Disiplin diri merujuk pada komitmen terhadap tujuan, penajaman intuisi dan analisis rasional. Sedangkan disiplin tindakan terkait pembelajaran: pemimpin sebagai pembelajar, dan ikhtiar berprestasi.

Dalam politik, tentu disiplin kepemimpinan terkait hakikat dan praktik politik. Pastilah semua pemimpin yang berhasil dalam karirnya terkait dengan disiplin yang ia lakukan. Paling tidak hal itu itu dilakukan dengan niat dan tekad membara. Dalam tradisi demokrasi, yang terpilih tentu yang berdisiplin. Katakan, asumsinya pemilu berjalan demokratis tanpa *money politics*, maka *sunatullah* politiknya: yang berdisiplin yang menang. Ia punya strategi dan teknik, sehingga orang-orang percaya dan memberikan dukungan. Ia punya kualitas komunikasi yang begitu bagus dengan calon-calon pemilihnya, bahkan jika perlu dilakukan dengan mengetuk pintu-pintu mereka dari rumah ke rumah. Yang berdisiplin, tahu apa yang hendak ia lakukan.

Apa hubungannya displin dengan *reward and punishment*?

Hukuman dan hadiah (*reward and punishment*) itu otomatis saja: dilakukan secara objektif, bukan *like and dislike* (suka atau tidak suka). Di bagian lain ulasan buku ini pernah saya singgung, meminjam istilah yang sering dipakai oleh Kuntowijoyo, obyektivikasi. Pemimpin itu, dalam memberi penghargaan atau hukuman, harus jeli betul, harua dipastikan bahwa semua itu dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif. Tetapi memang, seringkali subyektivitas mengemuka. Raja atau presiden memberi penghargaan kepada seseorang, bisa jadi bukan karena prestasi orang itu, tetapi semata-mata pertimbangan politik.

Dalam khasanah politik Jawa, misalnya ada kisah tentang Ki Ageng Mangir. Dalam perspektif *reward and punishment*, apa yang dialaminya unik, setidaknya membuat para pengunjung makamnya segera didera pertanyaan: mengapa sampai demikian? Dia diakui sebagai keluarga, tetapi juga sebagai pemberontak, sehingga makamnya separuh di dalam tembok makam raja-raja Mataram di Kota Gede, separuhnya lagi di luar tembok. Kisahnya telah dibikin naskah drama oleh Pramoedya Ananta Toer.[287] Setidaknya memang makam Mangir itu memberi kesan bahwa dia separuh mendapat hadiah,

287 Toer (2000).

separuhnya lagi hukuman.

Disiplin pemimpin, akan membuahkan prestasi, dan lantas warisan kepemimpinan yang baik. Begitukah?

Ya, semua pemimpin pasti ingin meninggalkan warisan yang baik kepada penerusnya. Sehingga, kebaikannya akan selalu dikenang. Kebaikan itu artinya hal-hal positif, capaian-capaian konstruktif yang dicatat dalam sejarah. Jadi, warisan pemimpin pada akhirnya berupa inspirasi-inspirasi bagi yang lain untuk maju. Ada fenomena menarik yang perlu dicatat menyusul wafatnya Lee Kuan Yew, pendiri dan pemimpin Singapura pada 23 Maret 2015. Di Indonesia, hampir semua media, baik suratkabar hingga televisi, memberitakannya dengan gegap gempita dalam *headline* mereka. Sebagian besar, kalau bukan semuanya, mengulas sisi-sisi baik tokoh ini sebagai tokoh yang mampu mengubah Singapura dari posisinya sebagai negara dunia ketiga menuju pertama. Wajah maju Singapura masa kini agaknya telah menutup kelemahan-kelemahan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin politik.

Bagaimanapun dia telah mewariskan kemajuan ekonomi bagi Singapura dan menjamin bahwa apa yang ia kerjakan sejak awal tetap berlanjut. Para pelanjut pun telah siap melanjutkan rintisan-rintisannya. Artinya, ia juga dianggap berhasil menyiapkan generasi pelanjut atau penerusnya. Ini mengingatkan suatu rumus kepemimpinan, bahwa keberhasilan seorang pemimpin ialah apabila ia mampu menciptakan pemimpin berikutnya.

Yang terakhir itu menarik, konteksnya regenerasi, bukan?

Regenerasi harus disiapkan dengan baik. Sayangnya, pemimpin sering melupakan hal tersebut, sehingga setelah sadar dan kekuasaan telah berpindah ke yang lain, maka ia menyesalinya. Saya kira ada tiga ranah utama yang bisa kita catat dalam hal warisan kepemimpinan ini: ranah nilai-nilai, ranah keberhasilan kebijakan atau sistem, dan ranah regenerasi. Ranah nilai-nilai itu luas, dan ini menyangkut apa yang saya katakan sebelumnya sebagai wilayah inspirasional. Pada akhirnya, pemimpin akan dikenang karena aspek-aspek inspirasionalnya. Orang akan menimba pengalaman kepemimpinannya sedemikian rupa dari apa yang dikatakannya, dan apa yang dilakukannya. Gagal atau berhasil, seringkali menjadi nomor dua, tetapi para pewaris yang proaktif, akan bisa memetik warisan sejati, warisan pentingnya, berupa intisari dari seluruh proses kepemimpinannya.

Bagaimana dengan ranah kebijakan dan regenerasi?

Warisan pemimpin paling mudah dilihat apabila ada kemajuan pembangunan fisik dan lebih luas lagi menyangkut sistemnya. Pemimpin partai, misalnya akan dikenang sepanjang masa, apabila ia mampu meninggalkan

NBCBAYAREA.COM

Pemimpin terhebat belum tentu orang yang melakukan hal-hal yang hebat. Dia hanya mendapatkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang hebat

- Ronald Reagan

The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things

bangunan-bangunan fisik untuk aktivitas partainya. Tetapi yang jauh lebih penting, apabila ia mampu meletakkan dasar-dasar kokoh dalam kelembagaan partainya, sehingga ia awet dan tak tergerus zaman. Pada akhirnya orang tetap akan menilai: apa yang telah pemimpin berikan bagi kemajuan organisasi?

Sementara, kalau soal regenerasi, uraiannya sudah disinggung di muka: pemimpin yang sukses ialah, yang mampu menghasilkan lebih banyak pemimpin. Dan itulah hakikat regenerasi. Pemimpin yang abai regenerasi, kemungkinan ada dua: ia memang tidak paham perlunya regenerasi, atau ia sengaja tak mau ada regenerasi: dianggapnya hari esok bukan milik dia dan generasinya, sehingga pemimpin masa depan tak perlu disiapkan. Ini bahaya. Pemimpin harus siapkan sistem yang mampu menjamin regenerasi berjalan dengan baik. Ia harus *legowo* manakala harus memberikan tongkat estafet ke generasi kepemimpinan berikutnya.

Soal warisan ini, kalau demikian, terkait dengan penilian: bagaimana pemimpin dinilai Mahkamah Sejarah?

Ya, mahkamah sejarah lagi pada akhirnya yang dipercaya sebagai lembaga penimbang kejujuran. Pemimpin tidak bisa menilai dirinya sendiri, harus orang lain atau mereka yang selama ini dipimpinnya yang bisa menilai. Pemimpin tak berhak menilai, tetapi barangkali sekadar membela diri, memberi klarifikasi-klarifikasi. Akhirnya kembali ke publik yang memberi nilai, apakah klarifikasi dan pembelaan diri itu bisa diterima atau tidak. Tapi, masalahnya pengadilan sejarah itu bukan untuk memvonis sang pemimpin yang telah tiada atau tak berkuasa lagi, melainkan utuk pembelajaran semuanya. Apa saja kontrobusinya? Apa pula kelemahannya? Sehingga

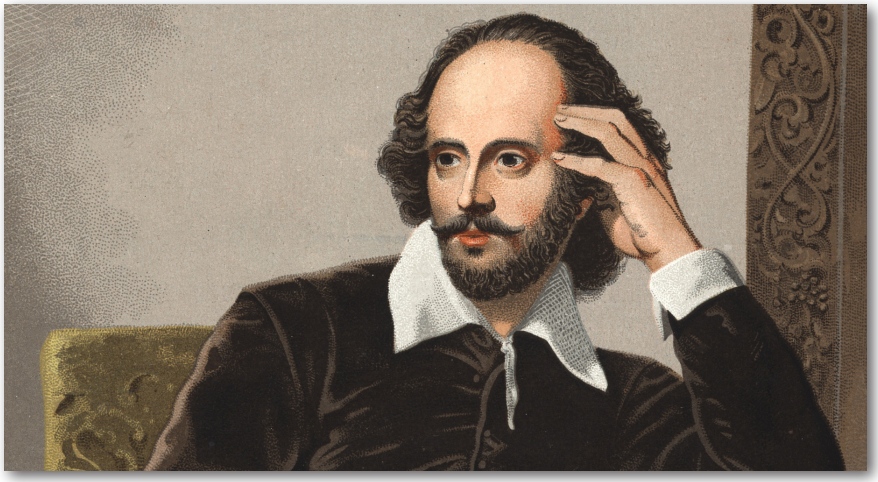

HUFINGTONPOST.COM

Tak ada warisan yang begitu kaya seperti kejujuran

- William Shakespeare

No legacy is so rich as honesty.

dapat disimpulkan, apakah ia meninggalkan warisan yang baik, manfaat, atau tidak? Generasi baru yang bijak tentu, yang tahu dan paham mana-mana poin-poin penting warisan pemimpim terdahulu yang perlu dilanjutkan, mana-mana yang perlu diubah.

Soal warisan, kerap kita mendengar: presiden baru mengeluhkan tinggalan-tinggalan masalah pemerintahan lama. Nah, bagaimana itu?

Pemimpin politik formal semacam presiden tentu dihadapkan dengan realitas objektif yang harus dihadapi, termasuk warisan masalah-masalah pemerintahan sebelumnya. Itu lazim saja. Maka, dengan kewenangan yang dimiliki, ia berpeluang mengeluarkan kebijakan yang mencerminkan kesinambungan dan perubahan (*continuity* atau *changes*). Saya berpendapat tidaklah etis kalau kebijakan-kebijakan lama yang berdampak kurang baik, terus-menerus dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam oleh para elite-elite pemerintahan yang baru. Tahu kalau ada kebijakan yang tidak efektif, pemerintahan baru bisa mengkoreksinya secara kreatif dan membuat langkah-langkah yang "lebih baik".

Kembali ke warisan: bagaimana idealnya pemimpin meninggalkan warisan?

Saya setuju dengan paparan pakar menejemen dan kepemimpinan, Ekuslie Goestiandi: ada dua pola pikir atau perspektif yang mendasari se-

orang pemimpin saat ingin meninggalkan warisan. Yang satu berpikir tentang *legacy from* (warisan dari), satunya lagi berpikir mengenai *legacy for* (warisan untuk).

> Mereka yang berpikir dalam kerangka *legacy from* akan mengutamakan keharuman nama dan prestasi pribadi, sementara yang berpikir menurut sudut pandang *legacy for* lebih mendahulukan kepentingan dan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya.
>
> Dalam konteks *legacy from*, sang pemimpin tak akan menggubris, apakah langkah perubahan yang dilakukannya akan berjalan sinambung dan membawa kemaslahatan kepada masyarakat secara jangka panjang. Yang penting namanya tercatat dalam sebuah prasasti publikasi.
>
> Sedang dalam konteks *legacy for*, sang pemimpin bahkan sudi bekerja dalam diam, karena ingin memastikan bahwa langkah perubahan yang dilakukannya memang akan berjalan lenggeng sesuai kepentingan dan kebutuhan lingkungan atau masyarakat luas.[288]

Menarik sekali: yang *legacy for* yang ideal ya?

Iya, warisan kepemimpinan tak lepas dari semangat atau *sunatullah* pemimpin sebagai kekuatan perubahan. Yang menjanjikan perubahan lebih baik, kondisi lebih nyaman bagi masyarakat, maka dialah yang akan dipilih dalam demokrasi. Bagi pemimpin, ikhtiar mengupayakan perubahan sesuai visinya merupakan bagian integral dari keterpanggilannya meninggalkan warisan (*to leave a legacy*). Menurut Steven Covey, secara asali manusia memiliki empat panggilan: panggilan hidup (*to live*); panggilan belajar (*to learn*); panggilan untuk mencintai (*to love*); dan meninggalkan warisan (*to leave a legacy*).[289] Kalau demikian, menjadi penting kiranya bagi pemimpin untuk *tidak berbuat kesalahan* dalam melakukan hal-hal tersebut — setidaknya dalam berpola pikir dan bertindak berdasar perspektif *legacy for*.

Penjelasan tambahan saya: kalau pemimpin sebatas memberi warisan yang dibingkai dari perspektif *legacy from*, ia hanya pemimpin dengan "p kecil": namanya akan terukir di prasasti-prasasti tertentu saja, tetapi bukan spirit dan gagasannya yang abadi, sehingga ia dikenang abadi pula. Tetapi,

288 Ekuslie Goestiandi, "Warisan ke atau dari?", Tabloid *Kontan*, 6-12 Juli 2015.

289 Covey (2004).

KINGSACADEMY.COM

Pikiran besar mendiskusikan ide-ide; pikiran rata-rata membahas kejadian; pikiran kecil mendiskusikan orang-orang

- Eleanor Roosevelt

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.

kalau kalau pemimpin memberi warisan yang dibingkai dari perspektif *legacy for*, maka itulah warisan sejati dari Pemimpin dengan "P besar". Tapi, sayangnya justru banyak elite pemimpin yang ambisius melakukan hal-hal yang mencerminkan perspektif *legacy from*. Maka dilakukanlah ikhtiar-ikhtiar pencitraan secara instan membesarkan nama. Padahal, dalam hal ini orang di masa depan pun tidak akan paham, apa kelebihan nama orang itu, karena memang tak ada warisan yang berkesan, selalu diingat karena kemanfaatannya.

Soal Pemimpin dengan "P besar" itu, mengingatkan kita pada buku Jim Collins, *Good to Great*?

Ya, pemimpin yang hebat (*great*) ialah Pemimpin dengan "P besar", ia yang tidak berpusat pada kepentingan dan prestasi dirinya, tetapi yang berorientasi pada kejayaan organisasinya. Ia bisa pergi meninggalkan organisasinya itu, tetapi setelah meletakkan dasar-dasar yang kokoh — dan inilah hakikat warisan kepeimpinan. Menurut Collins, pemimpin dalam derajatnya yang tertinggi atau level lima ialah yang berhasil memadukan kerendahan hati pribadi (*personal humility*) dengan tekad profesional yang kuat (*professional will*).[290]

Anda mungkin bertanya tentang pemimpin level lima. Sebelum menjelaskan itu, ada pesan penting dari penulisnya bahwa, bagus (*good*) tidak sama dengan hebat (*great*). Bagus belum tentu hebat. Lagi-lagi buku Collins ini sesunngguhnya buku manajemen (bisnis), tetapi penting dalam menjelaskan level-level kepemimpinan. Collins berangkat dari pertanyaan,

290 Collins (2001).

"Bagaimana perusahaan-perusahaan yang awalnya bagus-bagus saja (*good companies*) melakukan suatu lompatan menjadi perusahaan-perusahaan hebat dan berjaya (*great companies*)?", dan "Mengapa perusahaan-perusahaan itu berhasil melakukannya sedangkan perusahaan yang lain tidak?"

Dari sekian penjelasan temuan, Collins menguraikan fenomena Kepemimpinan Level 5 (*Level 5 Leadership*) sebagai penentu kehebatan. Apabila digambar piramida, maka Kepemimpinan Level 5 itu hirarkinya di puncak tertingginya.

- **Kepemimpinan Level 1:** pemimpin bekerja sebagai individu bagi dirinya sendiri. Ia berkemampuan tinggi dalam kontribusi-kontribusi produktif melalui bakat, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik.
- **Kepemimpinan Level 2**: pemimpin sudah terlibat sebagai anggota dalam sebuah tim. Dengan kapabilitas individualnya, ia memberi kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan dari timnya, dan mampu bekerja secara efektif dengan anggota tim lainnya.
- **Kepemimpinan Level 3**: Ia berkembang menjadi manajer. Ia mampu mengorganisasikan orang-orang lain dan juga sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan-tujuan organisasi.
- **Kepemimpinan Level 4**: Ia menjadi pemimpin yang efektif. Ia mampu membuat orang-orang yang dipimpinnya berkomitmen bekerja mencapai *standar kinerja* yang lebih tinggi. Sebelumnya ia mampu menetapkan visi yang jelas yang dapat dijiwai oleh orang-orang yang dipimpinnya.
- **Kepemimpinan Level 5**: Ia telah menjadi eksekutif. Ia memiliki kemampuan untuk membangun kejayaan organisasi yang bertahan lama melalui kombinasi *professional will* dan *personal humility*.[291]

Jadi *great* itu, justru ditunjukkan melalui prestasi hebat pemimpin untuk organisasi, tetapi tanpa menonjolkan diri?

Persis. Collins menyebut ciri-ciri Pemimpin Level 5: (1) mereka mampu menciptakan hasil yang memukau: dari bagus menjadi hebat (*good to great*), tetapi tetap rendah hati alias tidak *aku-sentris*. Mereka justru memberi kepercayaan ke orang-orang yang telah bekerja sama dan generasi penerusnya; (2) tanpa ragu ia melakukan apapun demi menghasilkan yang terbaik dan bertahan lama, sesusah apapun, sebagai cermin profesionalitas. Ia tidak menggantungkan kharisma untuk memotivasi orang lain. Selanjutnya, (3) mereka menetapkan standar untuk membangun organisasi dengan kejayaan yang bertahan lama, dan tidak berpuas dengan apapun di bawah standar itu. Mereka meletakkan ambisi organisasi, bukan ambisi

291 Collins (2001).

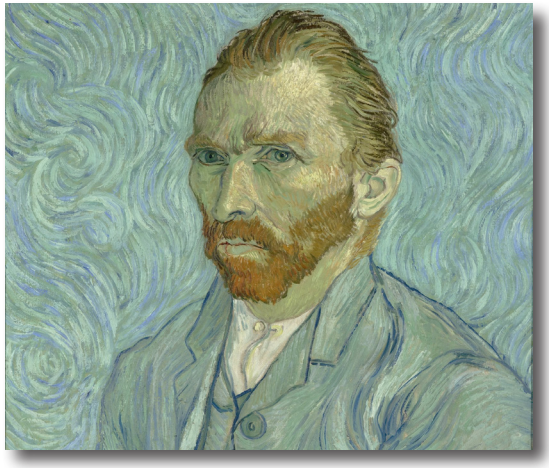

WIKIPWDIA.ORG

Hal-hal hebat itu dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang dilakukan secara bersama-sama

- Vincent Van Gogh

Great things are done by a series of small things brought together.

pribadi, dan ini butuh generasi penerus yang lebih cakap; (4) mengedepankan *filosofi kaca dan jendela*. Ketika mendapatkan hasil yang buruk, mereka berkaca dan bertanggung jawab. Namun, ketika mendapatkan hasil yang bagus, mereka *melihat ke jendela* dan memberikan kepercayaan atas keberhasilan itu yang lain dan mensyu-kurinya.[292]

Sekarang saya paham mengapa jenis pemimpin *legacy for*, yang justru awet dikenang ...

Kewajarannya memang demikian: yang meninggalkan warisan dengan manfaat yang terus dirasakan secara luas, itulah yang awet dikenang. Orang akan melihat kemajuan masa kini sebagai warisan pemimpin-pemimpin hebat di masa lalu. Yang hebat bukan nama individualnya, tetapi hasil karyanya sebagai seorang pemimpin. Dan jangan lupa, warisan yang abadi pula ialah tulisan-tulisan penting ditulis oleh sang tokoh. Benar kata Pramoedya Ananta Toer: "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah."[293]

Karena itulah, biografi tokoh menjadi penting?

Biografi tentu lebih dari sekadar *curriculum vitae* yang berisi data kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan yang lain. Tetapi ia mengeklorasi peng-

292 Collins (2001).

293 Goodread.com

Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah

- Pramoedya Ananta Toer

alaman seseorang dalam banyak peristiwa. Menurut Ralph Waldo Emerson, tak ada yang namanya sejarah, yang ada biografi. *There is properly no history, only biography*.[294] Biografi merekam pandangan-pandangan sang tokoh. Sebuah "catatan harian", dekat ke "biografi pemikiran", walupun terdapat peristiwa-peristiwa subyektif penulisnya. Ada dua "catatan harian" yang banyak dibaca kalangan aktivis di Indonesia, yakni yang ditulis Ahmad Wahib[295] dan Soe Hok Gie.[296]

Menurut Taufik Abdullah, biografi yang baik setidaknya membeberkan tiga hal sekaligus, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. *Pertama*, yang mudah sekali kelihatan, ialah perilaku dan sepak terjang tokoh yang dikisahkan. *Kedua*, biografi memberikan kepada kita struktur tempat dan waktu, yang merupakan wadah dari sang aktor untuk berbuat dan bertindak atau terkena akibat dari peristiwa yang mungkin tercipta dalam konteks struktur itu. *Ketiga*, biografi juga sejauh mungkin mencoba menangkap suasana hati dan pikiran dari aktor yang dikisahkan. [297]

Dengan membaca biografi, rekam jejak dan gagasan sang tokoh terpaparkan. Tokoh akan melewati apa yang diistilahkan Ahmad Syafii Maarif "titik-titik kisar" yang menentukan sejarah hidupnya.[298] Kata lainnya *epifani*, peristiwa istimewa dalam kehidupan seseorang yang menjadi titik balik dalam kehidupannya.[299] Perjalanan biografis sang tokoh berikut likulikunya, terpotret pada epifani-epifani yang dialaminya: mana titik bangkit, mana titik jatuh, bangkit lagi, dan seterusnya.●

294 Brayniquotes.com

295 Wahib (1981).

296 Gie (1983).

297 Abdullah (2001:xix-xx).

298 Maarif (2006).

299 Rakhmat (2005).

IPHOS/ SEJARAHKITA.BLOGSPOT.COM

Nasionalis yang sedjati, jang nasionalisme-nya itu bukan timbul semata-mata suatu copie atau tiruan dari nasionalisme barat akan tetapi timbul dari rasa tjinta akan manusia dan kemanusiaan

- Soekarno

Demokrasi bisa ditindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetap setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan

- Mohammad Hatta

Bab 11

Gaya-gaya Kepemimpinan

Apa Saja?

APA PENGERTIAN gaya kepemimpinan dalam pembahasan kita ini?

Gaya kepemimpinan terkait pendekatan yang dipakai pemimpin untuk memimpin. Terdapat berbagai kajian gaya kepemimpinan, dengan asumsi dan penjelasan masing-masing sebagaimana diringkas *changingminds.org* berikut:

- **Gaya kepemimpinan kharismatik**. Pemimpin mengumpulkan pengikut melalui pesona kepribadian, bukan dari bentuk kekuasaan atau otoritas eksternal.
- **Gaya kepemimpinan partisipatif**. Pemimpin tidak mengambil keputusan secara otokratis, tetapi melibatkan orang lain dalam prosesnya.
- **Gaya kepemimpinan situasional**. Pemimpin yang efektif tidak terpaku pada gaya kepemimpinan tunggal apakah dengan metode transaksional atau transformasional, tetapi situasional.
- **Gaya kepemimpinan transaksional**. Ia menciptakan struktur yang jelas: apa yang diperlukan bawahan berikut imbalan dan hukuman yang mereka dapatkan dalam mengikuti atau tidak mengikuti perintah.
- **Gaya kepemimpinan transformasional**. Ia memberi semangat dan energi ke dalam segala arah, peduli dan ingin Anda berhasil.
- **Gaya kepemimpinan yang tenang (*quiet leadership style*)**. Ia merupakan

antitesis kepemimpinan kharismatik serta mendasarkan keberhasilan pada pikiran dan tindakan.

- **Gaya kepemimpinan pelayan (*servant leadership style*)**. Kepemimpinan pelayan cenderung melayani orang lain, bukan orang lain yang melayaninya.
- **Gaya kisi-kisi manajerial (*managerial grid style leadership*)**. Pemimpin memberi perhatian pada anak buah sekaligus pekerjaan yang mereka dilakukan.
- Tiga gaya asli versi Kurt Lewin:
  (1) **Gaya otokratis.** Pemimpin mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang lain.
  (2) **Gaya demokrat**. Pemimpin melibatkan orang dalam proses pengambilan keputusan.
  (3) **Gaya *laissez-faire***. Peran pemimpin minimal dalam pengambilan keputusan, menyerahkan yang lain untuk membuat keputusan mereka sendiri.
- Empat gaya kepemimpinan versi Rensis Likert:
  (1) **Gaya otoritatif eksploitatif**. Pemimpin memiliki perhatian rendah dan menggunakan metode ancaman atau metode yang berbasis menakuti untuk mencapai kesesuaian.
  (2) **Gaya otoritatif baik hati (*Benevolent authoritative*)**. Gaya ini mengemuka ketika pemimpin menambahkan bentuk kekhawatiran ke yang lain, sehingga terbentuk suatu "kediktatoran baik hati".
  (3) **Gaya konsultatif**. Gaya ini terjadi ketika pemimpin menyerap informasi ke atas dan punya disiplin mendengarkan gagasan yang lain.
  (4) **Gaya partisipatif**. Pemimpin menggunakan metode partisipatif maksimal dalam pengambilan keputusan dalam organisasi.
- Dalam konsep *Primal Leadership*, Daniel Goleman dan kawan-kawannya menjelaskan enam gaya kepemimpinan:
  (1) **Gaya kepemimpinan visioner**. Ia menggerakkan anak buah menuju visi bersama, memotivasi mereka berjuang.
  (2) **Gaya kepemimpinan pembina.** Ia membantu anak buah menemukan kekuatan dan kelemahan.
  (3) **Gaya kepemimpinan afiliatif**. Ia menciptakan koneksi dan harmoni dalam organisasi.
  (4) **Gaya kepemimpinan demokrat**. Ia melibatkan partisipasi.
  (5) **Gaya pengatur langkah**. Ia menarik perhatian anak buah, mengharapkan keunggulan dari mereka dengan memberi contoh.
  (6) **Gaya kepemimpinan komandan.** Ia memerintah dan mengharapkan kepatuhan penuh anak buah.

Bagaimana dengan buku ini: gaya-gaya mana yang hendak dielaborasi?

Hal-hal di atas sudah cukup menjelaskan garis besar gaya-gaya kepemimpinan. Hal-hal yang akan saya angkat berikut ini, tak jauh dari hal-hal di atas. Saya ketengahkan beberapa kata kuncinya: *solidarity maker*, administrator, otoriter, demokratis, paternalistik, egaliter, formal, informal, transformasional, transaksional, proaktif, dan reaktif.

Solidarity Maker dan Administrator

DI DEPAN sudah sedikit disinggung soal gaya kepemimpinan versi Feith. Dikatakan kepemimpinan Soekarno bergaya *solidariy maker* dan Hatta administrator ...

Baiklah, kita telusuri konteksnya. Feith menjelaskan konteks kepemimpinan Indonesia 1949-1957, suatu era dalam sejarah Republik, yang kemudian dikenal sebagai era demokrasi liberal. Berdasarkan pengamatan Feith dicatat bahwa,

> Dalam membahas masa revolusi, kita melihat bagaimana situasi negara menciptakan konflik antara "administrator", dalam artian pemimpin dengan keterampilan administratif, teknis, hukum, dan bahasa asing yang diperlukan untuk menjalankan sifat khusus aparat dari sebuah negara modern, dan "pembuat solidaritas/*solidarity makers*", pemimpin terampil sebagai mediator antara kelompok pada tingkat yang berbeda dari modernitas dan efektivitas politik, sebagai pengerah massa, dan sebagai manipulator simbol-simbol integratif.[1]

Namun demikian perlu diberikan catatan atas penilaian Feith itu. Almarhum Ahmad Dahlan Ranuwihardjo yang pernah menjadi Ketua PB HMI dan dikenal dekat dengan Soekarno tidak setuju, kalau Soekarno dibilang sekedar *bertipe solidarity* maker. Soekarno juga bertipe administrator alias *problem solver*.[2] Saya kira keberatan itu bisa saja. Kalau dibaca teliti memang Feith sesungguhnya tidak mengatakan bahwa Soekarno adalah pemimpin yang sekedar bertipe *solidarity maker*, tetapi cenderung banyak ke situ. Mohamad Hatta juga tak sekedar bertipe administrator, tetapi cenderung banyak ke situ. Mereka dwitunggal ideal yang saling melengkapi, dan amat diperlukan di dalam mengelola Republik, di saat-saat genting. Namun,

---

1 *In discussing the revolutionary period, we saw how the country's situation created conflict between "administrators", in the sense of leaders with the adminisrative, technical, legal, and foreign-language skills required to run the distinction modern apparatus of a modern state, and "solidarity makers", leaders skilled as mediators between groups at different levels of modernity and political effectiveness, as mass organizers, and as manipulators of integrative symbols.* Lihat, Feith (2006:113).

2 Ranuwihardjo (2002)

sayang dwitunggal itu tak bertahan lama. Tapi itulah sejarah.

Apa gaya administrator cocok untuk pemimpin birokrasi?

Kalau konteksnya adalah profesionalisme dalam mengelola administrasi organisasi (negara) dan pemerintahan, maka gaya tersebut sangat cocok. Jenis kepemimpinan birokrasi memerlukan gaya administrator, yang teliti, rasional, teknis, dan menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Hal-hal semacam ini cocok bagi para teknokrat alias para pakar teknis di bidangnya masing-masing. Para teknokrat bisa datang dari ranah partai-partai politik, tetapi juga dari ranah non-partai politik. Tetapi, gaya seperti ini barangkali kurang efektif, apabila pemimpin berada pada fase bahwa partai politik yang dipimpinnya memerlukan dukungan nyata dari publik luas. Gaya *solidarity maker* cocok untuk urusan ini: pemimpin harus beranjak dari meja kerjanya, berkomunikasi dengan sebanyak mungkin kalangan.

Kapan pemimpin *solidarity maker* diperlukan?

Pemimpin politik senantiasa butuh dukungan, karenanya dibutuhkan gaya *solidarity maker*, yang mengedepankan kepekaan emosi dan memupuk kharisma melalui berbagai pencitraan. Tujuannya adalah untuk menggalang solidaritas dan dukungan, dengan memperkuat dukungan konstituen dan mempengaruhi sikap *swing voters* untuk memutuskan dukungannya. Tetapi gaya ini punya kelemahan-kelemahan, sebagaimana telah kita bahas dalam bagian yang menguraikan soal populisme politik. Pemimpin bergaya *solidarity maker*, biasanya tak luput dari banyak menjanjikan sesuatu, atau mengaduk-aduk semata emosi publik/massa, tetapi biasanya tanpa kelanjutan yang jelas. Dalam hal ini, lazim sang orator pandai sekali merangkai kata untuk mengajak melakukan hal-hal yang bertema perlawanan. Jadi, ada tema "musuh bersama" yang dipandang lebih konkrit. Kita segera ingat dua istilah yang pernah dikatakan Nurcholish Madjid (Cak Nur): *fight for* dan *fight against*.

Apa yang dimaksud Cak Nur, *fight for* dan *fight against*?

Tema *fight for* itu dikaitkannya dengan konteks "perjuangan proaktif" (*amar ma'ruf*) dan *fight against* itu perjuangan reaktif (*nahy munkar*). Pendekatan *fight against* itu lazim dalam era ketika konflik ideologi (aliran) mengemuka. Misalnya pada 1960-an, para mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat banyak memakai pendekatan *fight against* ini untuk melawan kekuatan yang berideologi Komunis di Indonesia. Sementara pendekatan *fight for* lebih ke partisipasi dalam pembangunan nasional, ketika konflik-konflik politik ideologis tak lagi tajam, dan konsentrasi semua pihak mengarah ke pembangunan nasional. Kendatipun demikian, menurut Cak Nur,

Jika secara analisa, kita lakukan identifikasi tema perjuangan *fight against* di satu pihak dan *fight for* di pihak lain, tidaklah berarti bahwa salah satu dari keduanya itu, misalnya *fight against* tidaklah penting. Identifikasi itu hanya untuk memberi tekanan yang lebih besar terhadap salah satu dari keduanya, sesuai dengan tantangan zaman. Sementara, kedua-duanya, mungkin dengan kadar tekanan yang berbeda, dapat berjalan bersama dan seiring.[3]

Otokratik dan Demokratis

MENGAPA ADA gaya otokratik dalam kepemimpinan?

Otokratik ataukah demokratik, dikaitkan dengan cara pengambilan keputusan di mana pemimpin memposisikan diri dan mengembangkan pengaruhnya. Soal gaya otokratik, hampir semua pakar kepemimpinan sepakat bahwa ia mengandung sejumlah karakter negatif. Gaya otoriter itu mempengaruhi pengikut secara memaksa, meniadakan inisiatif yang lain, dan memaksa "semua orang" bekerja tanpa kompromi. Menurut Siagian, seorang pemimpin otoriter akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya antara lain dalam bentuk:

- Kecenderungan memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka.
- Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan.
- Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara memberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah memngambil keputusan tertentu dan para bawahan itu diharapkan dan bahkan dituntut untuk melaksanakannya saja.[4]

Kalau yang demokratik?

Ia layaknya sang demokrat. Para teoritisi menganggap bahwa ideal kepemimpinan ya yang demokratis, karena di dalamnya mengandung banyak unsur positifnya. Gaya ini berkonsekuensi *people centered*, berorientasi manusia, bukan benda. Siagian mencatat beberapa ciri gaya kepemimpinan demokratik ini sebagai berikut:

- Memiliki pandangan, betapapun besarnya sumber daya dan dana yang tersedia bagi organisasi, kesemuanya itu pada dirinya tidak berarti apa-apa

3 Madjid (1997:99).

4 Siagian (2003)

kecuali digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia dalam organisasi demi kepentingan pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

- Dalam kehidupan organisasional tidak mungkin, tidak perlu bahkan tidak boleh semua kegiatan dilakukan sendiri oleh pemimpin dan oleh karena itu selalu mengusahakan adanya pendelegasian wewenang yang praktis dan realistik tanpa kehilangan kendali organisasional.
- Para bawahan dilibatkan secara aktif dalam menentukan nasib sendiri melalui peransertanya dalam proses pengambilan keputusan.
- Kesungguhan yang nyata dalam memperlakukan para bawahan sebagai makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individu dengan karakteristik dan jati diri yang khas yang mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, mulai dari yang bersifat kebendaan seperti sandang, pangan, papan, meningkat kepada kebutuhan yang bersifat keamanan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan pengakuan status hingga kepada kebutuhan yang bersifat spiritual.
- Usaha memperoleh pengakuan yang tulus dari para bawahan atas kepemimpinan orang yang bersangkutan didasarkan kepeda pembuktian kemampuan memimpin organisasi dengan efektif, bukan sekedar karena pemilikan wewenang formal berdasarkan pengangkatannya.[5]

Tampaknya ada ciri partisipatif dan konsultatif dalam gaya demokratik ...

Partisipasi jelas: gaya kepemimpinan demokratik itu identik dengan partisipatif-demokratik. Ia selalu mengajak yang lain terbuka dan menerima masukan-masukan. Karenanya ia juga masuk ke ranah pemimpin yang berkonsultasi (*consultative leader*): mau mendengarkan pendapat dan masukan dari segala lini. Semua itu penting sebagai bahan untuk memutuskan masalah atau membuat kebijakan. Kepemimpinan demokratis yang menekankan partisipasi ini, juga dikenal sebagai kepemimpinan inklusif. Menurut Hollander, kepemimpinan inklusif (*inclusive leadership*/IL) merujuk pada pola hubungan pemimpin dan pengikut yang "saling menguntungkan" (*mutual benefit*), melakukan sesuatu secara bersama-sama, "tanpa bergantung pada kemampuan satu orang saja". Kepemimpinan inklusif menghormati kerjasama dan kompetisi sebagai bagian dari proses partisipatif. Dalam dunia politik, proses partisipatif itu merupakan hal serius yang bermakna: persetujuan dari yang diperintah.[6] Jadi, kalau demikian, gaya kepemimpinan inklusif juga merupakan gaya kepemimpinan demokratis.

5 Siagian (2003)

6 Hollander (2009:3).

Gaya merupakan refleksi dari sikap dan kepribadian Anda

- Shawn Ashmore

Style is a reflection of your attitude and your personality.

Apa kelebihan dan keterbatasan gaya kepemimpinan demokratik?

Sebuah artikel di situs *online* mencatat beberapa kelebihannya: (1) mengundang diskusi, pendapat dan pandangan; (2) membangun konsensus; (3) mendorong ide-ide dan kreativitas orang lain; (4) mengakui bahwa yang selain pemimpin mungkin memiliki ide-ide tentang cara yang lebih baik ke depan; (5) menciptakan visi dan tujuan bersama; (6) membangun komitmen. Sementara keterbatasannya ialah: (1) dapat menyebabkan kesulitan ketika keputusan cepat diperlukan dalam krisis; (2) Kebingungan jika komunikasi tidak jelas; (3) bisa saja para pakar berpengalaman tak merasa yakin mereka bisa berjuang dan berpartisipasi; (4) membuka peluang orang-orang yang kecewa dan menganggap pemimpin tidak memimpin.[7] Kalaulah boleh digarisbawahi, sebagai kelemahannya pula, pemimpin bergaya demokratik berpeluang untuk menghindar dari tanggung jawab dengan mengulur-ulur waktu dan mengkamuflasekan masalah.

Jadi, pemimpin tak boleh terlalu demokratik?

Saya kira demikian: terlalu demokratis malah tidak baik. Demokratis yang proporsional saja. Mengapa? Di atas sudah disinggung bahwa kalau konteksnya ialah pengambilan keputusan, dan ia harus diambil dalam situasi yang mendesak, darurat, maka pendekatan demokrasi normal, dengan rapat-rapat yang bertele-tele dan melibatkan banyak orang dalam prosesnya, merupakan hal yang kurang tepat. Pemimpin bisa menentukan keputusan prerogatif dan cepat. Toh ia punya legitimasi untuk itu. Jadi, mekanisme demokrasi dalam proses pengambilan keputusan, keterbatasannya ialah prosesnya tak bisa dijamin singkat. Pemimpin harus mengambil siasat jalan tengah untuk mengakhiri proses yang lama, bertele-tele dan konfliktual.

Paternalistik, Neo-patrimonalistik dan Egaliter-Demokratis

BAGAIMANA DENGAN gaya paternalistik?

7 Defining-leadership.com

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, paternalistik ialah sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak.[8] Dengan kata lain, paternalistik mengandung pengertian suatu sifat yang mengemuka atas paham paternalisme, suatu paham yang mengagungkan hirarki keluarga. Asumsinya, orangtua harus dihormati oleh anak-anaknya, orangtua punya tanggung jawab untuk membesarkan dan melindungi anak-anaknya, sedemikian rupa sehingga anak-anak harus mentaati segala aturan yang ditetapkan orangtua. Di dalam masyarakat Jawa atau masyarakat Timur, paternalisme sangat lekat, antara lain atas penggunaan bahasa yang bertingkat-tingkat.

Bahasa Jawa, misalnya penggunaannya disesuaikan dengan usia, derajat dan "kepangkatan" seseorang atau kebangsawanan seseorang, ke dalam: *kromo inggil* (level tinggi), *kromo madyo* (level menengah), dan *ngoko* (level terendah). Kepada raja, para pejabat atau yang dituakan, maka orang awam tak boleh *ngoko*. Kalau *ngoko*, maka ia bukan saja tidak sopan alias *ora ngajeni*, tetapi telah malabrak tatanan budaya dan kebahasaan yang ada. Ia bisa dicap *ora tatanan*. *Ngoko* hanya boleh dipakai sesama kerabat yang sangat dekat atau teman yang seusia.

Apa bedanya paternalistik dengan feodalistik?

Kita pahami dengan pengertian feodalisme atau juga disebut sistem feodal, *féodalité*, menunjuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Eropa Barat pada awal Abad Pertengahan, bentangan waktu panjang antara abad ke-5 hingga ke-12. Ekspresi *féodalité* dan sistem feodal yang diciptakan pada awal abad ke-17. Ia berasal dari bahasa Latin kata *feudum* (*perdikan*) dan feodalitas (layanan yang terhubung dengan *perdikan*), yang kemudian merujuk ke bentuk kepemilikan properti atau lahan.[9] Ditambahkan pula bahwa, dari pengertian yang mengajak kita ke Eropa zaman pertengahan itu, feodalisme pula merujuk pada sistem politik yang terbangun oleh perpaduan antara para militer legal maupun tidak atau para *warlord*, tuan tanah, bangsawan, raja, yang lantas tersusunlah hirarki dalam masyarakat yang khas: ada raja, ada bangsawan, tetapi juga ada pelayan dan budak (*vassal*).[10]

Jadi, kata kuncinya hirarki. Feodalisme, dalam perkembangannya meluas sebagai sistem peternalistik kebangsawanan. Kelas bangsawan itu punya aset kapital berupa lahan atau lainnya. Atau, mereka juga seorang birokrat, *wong gede* alias *priyayi-ambtenaar*, untuk membedakan dengan *wong cilik* alias rakyat jelata yang notabene kelas pekerja. Dalam struktur *feudal*

8 http://kbbi.web.id/paternalisme

9 Britannica.com

10 Wikipedia.org

Partisipasi, aku pikir, satu dari metode pendidikan yang terbaik

- Tom Glazer

Participation, I think, or one of the best methods of educating.

karaton, pada *abdi dalem* mempasrahkan hidupnya untuk mengabdi para bangsawan, raja, serta kerabat keraton. Dalam logika kaum *feudal*, berlaku rumus *sopo siro, sopo ingsun: "*Siapa Anda, kok berani-beraninya menghina bangsawan". Atau, "Anda ini kan cuma *batur*, pembantu, kok berani-beraninya melawan tuan". Kalau Anda marah seperti itu kepada pembantu Anda di rumah, berarti mentalitas Anda *feudal*. Bahwa seolah-olah Anda punya *derajat kemanusiaan* lebih tinggi ketimbang yang lain, padahal kan Anda cuma sekadar punya uang untuk membayar pembantu Anda itu, bukan?

Jadi, orang feodal itu mereka yang merasa dirinya "berdarah biru", bangsawan, yang harus disopan santuni dan dikasih *previlege* lebih?

Kira-kira begitulah. Orang feodal tidak melihat orang dari kapabilitas dan kompetensi orang lain, tetapi dari segi asal-usul dan "derajat kebangsawananya". Untuk ukuran manusia modern yang rasional, aneh bukan? Nah, pemimpin yang *feudal* itu yang bermental *ndoro*, tuan. *Ndoro* secara ekstrim berkebalikan dengan *batur*, babu, *jongos*. Mentalitas *ndoro* selalu ingin dilayani. Pramoedya Ananta Toer pernah menggugat "Jawanisme", di mana, "Jawanisme adalah taat dan setia membabi buta pada atasan". Kesetiaan dan ketaatan ini membuat orang mudah bertekuk lutut kepada setiap rezim yang ada. "Fasisme Jawa", catat Pram, "membuat orang Indonesia hanya berdiam diri saat dijajah dan dijarah."[11] Generalisasi Pram ini tentu kontroversial, tetapi toh ada alasannya. Anggap saja sebagai suatu otoktirik yang cukup pedas, bukankah ia tengah membahas soal suatu kecenderungan mentalitas?

Paternalistik, ada kemiripannya dengan feodalistik?

Punya kemiripan, kendatipun berbeda. Legitimasi paternalistik dikaitkan konteks pola *hubungan keluarga*. Kalau Anda memimpin negara, maka paradigma paternalistik mengajarkan bahwa anggaplah Anda itu ayah yang menaungi seluruh komponen bangsa — sebagai anak-anaknya. Hal ini mengingatkan pada konsep negara integralistik yang pernah diajukan oleh Dr Soepomo,[12] atau kolektivisme menurut pandangan Hatta dan Soekarno.

11 Vltchek dan Indira (2006)

12 Suimanjuntak (1994)

Ulasannya panjang lebar kalau sudah menyangkut sistem politik ketatanegaraan. Negara sosialis atau komunis emang cenderung menekankan kolektivitas atau kolektivisme, bahkan sampai ke panafsiran dan praktik yang ekstrem. Di negara Komunis, misalnya di Uni Sovyet tempo dulu atau di China sekarang, "kepemilikan pribadi" tak diakui atau tidak diseyogyakan oleh negara. Artinya, semua diatur secara kolektif oleh negara — walaupun China sudah "liberal".

Bagaimana dengan patrimonialisme?

Intinya, patrimonial, dalam perspektif Sosiolog Max Weber merujuk pada sentralnya kekuasaan pemimpin tertinggi dalam sistem feodal (raja atau sultan). Aparat pemerintah dan militer hanya tunduk pada pemimpin tertinggi. Wakil penguasa punya kewenangan yang luas dan sering bertindak secara secara informal. Neo-patrimonialisme sebagai istilah kita jumpai misalnya dalam buku Eisenstadt, *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. Bahwa, merujuk pada Weber tersebut, neo-patrimonialisme merupakan bentuk modern dari bentuk patrimonialisme tradisional. Neo-patrimonialisme bersifat campuran: unsur peme-rintahan patrimonial dan birokrasi-rasional berdampingan dan kadang-kadang terjalin erat.[13] Neo-patrimonialisme menunjukkan adanya suatu pola yang sama: ada sosok sentral kekuasaan yang demikian kuat dalam mengkontrol banyak hal untuk dilakukan aparat di bawahnya atau *klien* mereka, mengingat hubungan pemimpin dan anak buah ialah hubungan antara patron dan klien. Atau, menunjukkan adanya pola hubungan yang klientalistik.[14]

Klientalistik?

Pola hubungan kepemimpinan klientalistik merujuk hubungan antaraktor yang derajat kekuasaannya yang tak setara, bersifat pertukaran timbal balik dan khusus. Karena tak setara, hubungan yang klientalistik merupakan hubungan yang bersifat *patron* (punya kekuasaan lebih besar atau bos/elite tertinggi/pemimpin) dan *klien* (yang punya kekuasaan lebih rendah/sedikit atau anak buah). Patron selalu merujuk pada sosok bukan sistem/organisasi. Patron selalu mendominasi, menguasai dan mengendalikan *klien*, sedemikian rupa sehingga pihaknya menerima ketundukan dan hasil kerja *klien* tanpa melibatkan partisipasi pendapatnya. Corak klientalistik, tentu berbeda dengan corak demokratik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.[15]

13 Eisenstadt (1973).

14 Brinkerhoff dan Goldsmith (2002).

15 Brinkerhoff dan Goldsmith (2002).

Tabel 11.1
Pola Kepemimpinan Klientalistik versus Demokratis

KLIENTALISTIK	DEMOKRATIS
Otoritas adalah pribadi, melekat dalam individu	Otoritas adalah kelembagaan, ada dalam peran resmi
Pengayaan dan pembesaran pribadi adalah nilai-nilai inti	Aturan hukum, pemilu yang adil dan aturan main adalah nilai-nilai inti
Pemimpin cenderung memonopoli kekuasaan dan tidak mempertanggungjawabkan tindakannya	Pemimpin berbagi kekuasaan dengan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakannya
Hubungan pemimpin dan pendukung buram (tidak transparan) dan mungkin tidak dapat diandalkan	Hubungan pemimpin dan pendukung transparan dan dapat diprediksi
Tidak ada prosedur biasa terkait penggantian pemimpin	Ada prosedur reguler dalam penggantian pemimpin
Pemimpin memegang kekuasaan dengan memberikan nikmat pribadi yang mengamankan loyalitas pengikut kunci	Pemimpin memegang kekuasaan dengan memberikan manfaat kolektif untuk mendapatkan dukungan dari segmen besar masyarakat
Keputusan atau kebijakan diambil secara rahasia, tanpa keterlibatan atau diskusi publik	Keputusan atau kebijakan yang diambil dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan pandangan publik
Parpol diorganisir secara pribadi	Parpol diorganisir secara programatis
Masyarakat sipil terfragmentasi dan ditandai pola hubungan vertikal	Masyarakat sipil secara mendalam dan ditandai pola hubungan horisontal
Pengambilan keputusan diam-diam dan prosedurnya tertutup untuk diikuti dari luar	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai prosedur yang transparan
Kepentingan pendukung memandu keputusan	Masyarakat memandu keputusan
Memperluas patronase	Membatasi patronase

Adakah kesamaan antara paternalisme, feodalisme dengan korporatisme negara?

Soal korporatisme ini penjelasannya panjang lebar. Tetapi, dalam konteks korporatisme negara, pengertiannya ialah adanya organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat yang relatif lemah, di mana negara berusaha untuk melegitimasi kekuasaannya dan

BIOGRAPHY.COM

Tetaplah kepala dingin dan *low profile*. Jangan pernah memimpin - kecuali bertujuan untuk sesuatu yang besar

- Deng Xiaoping

Keep a cool head and maintain a low profile. Never take the lead - but aim to do something big

mencapai tujuannya dengan memobilisasi populasi di dalam organisasi-organisasi bawahannya.[16] Korporatisme itu menempatkan organisasi (negara atau *state*) sebagai pusat atau induk dari banyak entitas yang beragam. Kata kuncinya adalah kendali yang ketat dari negara. Misalnya, Indonesia di masa Orde Baru dipahami sebagai negara korporatis, tatkala semua potensi masyarakat diwadah-tunggalkan dan di kontrol negara. Dalam konteks ini dilakukanlah kemudian depolitisasi. Organisasi-organisasi korporat itu tentu dikondisikan untuk menjadi kepanjangan tangan dari state, *vis a vis* masyarakat madani alias *civil society*. Kritisisme terhadap negara dibatasi.

Sekarang sebaliknya, bagaimana pemimpin yang egaliter itu tergambarkan?

Egaliter itu sederajat. Egalitarianisme atau kesederajatan merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Tentu kita ingat salah satu slogan Revolusi Perancis: *égalité*, selain dua yang lain, *liberté* (kebebasan), dan *fraternité* (persaudaraan). Maka, apabila kita refleksikan, pemimpin egaliter yang menerapkan prinsip egalitarianisme ialah yang tidak memandang dirinya lebih tinggi ketimbang yang dipimpin. Adalah sangat keliru kalau pemimpin menganggap dirinya berderajat lebih tinggi ketimbang yang di-

16 Outhwaite (2008:158).

Aku seorang bangsawan. Aku suka kebebasan; Aku benci kesetaraan

- John Randolph

I am an aristocrat. I love liberty; I hate equality.

pimpin, kalau dalam sistem demokrasi ia hanya memperoleh mandat/amanat dari rakyat. Pemimpin, kalau demikian, hakikatnya pesuruh rakyat. Ia harus hormat pada semua: baik pendukung maupun bukan pendukungnya dalam pemilu. Maka, ia tidak boleh bergaya *sok-sokan* alias "*pethéntang petenthéng*" di hadapan rakyat. Tak boleh diskriminatif pula.

Jadi, pemimpin bergaya egaliter-demokratis itu yang tidak bersikap diskriminatif?

Ya. Ia bukan pemimpin yang ber-*mindset* segmental alias tertutup, dan egaliter itu pula yang membuatnya dituntut bisa bersikap adil, rasional-objektif dan tak akal-akalan. Ia merangkul semua segmen atau faksi yang ada dalam organisasi. Dalam ranah permukaan, ia tidak boleh mengumbar kalimat-kalimat yang menebarkan kebencian primordial, sebab hal demikian hanya akan membuahkan hasil yang fatal.

Formal dan Informal

PEMIMPIN PERLU bergaya formal atau informal dalam kesempatan yang berbeda-beda. Bisa dijelaskan?

Kalau Bob Sadino, sang *enterpreuner* sukses itu ke mana-mana memakai celana pendek, tentu bukan dimaksudkan tidak menghargai orang. Ia ingin tampil ke mana-mana dengan gaya informal. Para seniman juga begitu. Orang akan maklum dengan tampilnya *enterprenuer* atau seniman yang *nyeni*, sebab mereka memang tidak ingin tampil dengan pakaian-pakaian formal.

Kita klirkan dulu yang dimaksud formal itu apa?

Resmi. Yang dimaksud resmi tentu berbeda dengan yang dianggap tidak resmi. Sebuah organisasi biasanya menciptakan simbol-simbol baik berupa seragam-seragam atau aksesoris lain yang kemudian dikelompokkan sebagai "yang resmi". Formalitas itu dimaksudkan bahwa yang membawakan tidak main-main, bukan gadungan, melainkan resmi mewakili suatu entitas yang terhormat. Karenanya formalitas, tampaknya merupakan suatu akumulasi dari apa-apa yang terkait dengan yang disepakati sebagai kehormatan.

Fungsi kebijaksanaan ialah untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat

- Cicero

The function of wisdom is to discriminate between good and evil.

Berpakaian formal, sesuai dengan yang diharapkan pada undangan, artinya berpakaian untuk menghormati si pengundang. Formalitas, juga terkait dengan kepengakuan. Anda bersekolah atau berpendidikan formal, berarti bersekolah atau berpendidikan di lembaga formal, yang diakui negara sebagai "yang formal" — untuk membedakan dengan non-formal atau informal. Kepengakuan itu, pada akhirnya hanya berupa selembar ijazah.

Mengapa formalitas perlu?

Karena organisasi membutuhkan simbol-simbol dan adat-kebiasaan yang dikaitkan dengan penghormatan atau, dalam konteks tertentu kesopan-santunan dalam etika pergaulan diplomatik. Formalitas, sekali lagi merupakan operasionalisasi dari simbol-simbol yang dianggap resmi — terkait dengan kebanggaan dan disiplin para *person* dalam organisasi yang sistemik. Karena itulah sebuah negara perlu bendera, lagu kebangsaan, serta simbol-simbol lain. Mengapa pula tentara atau polisi atau pegawai negeri sipil atau yang lain — bahkan kalangan swasta — butuh seragam? Sebab mereka butuh formalitas.

Mengapa pula Bung Karno selalu berpakaian kebesaran? Karena Bung karno pun butuh formalitas. Bagi pemimpin kharismatik sepertinya, formalitas sangat dibutuhkan. Tetapi, tentu itu semua ada tempatnya. Bung Karno pun di pagi hari, sebelum memakai pakaian kebesarannya itu, di istana *ya* hanya pakai *kaos oblong* dan celana pendek. Hanya Gus Dur saja satu-satunya presiden yang mencoba mendekonstruksi kesakralan istana negara dengan memakai kaos dan bercelana pendek di akhir masa kekuasaannya. Ketika Gus Dur memakai pakaian yang tidak formal di suatu tempat yang oleh sebagaian besar di antara kita dianggap sakral, karena istana adalah simbol negara, terlepas dari pro-kontra mengenainya, kita diajak untuk berdiksusi tentang seberapa mungkin batas-batas kesakralan formalitas itu?

Tapi, formalitas itu sangat dapat membelenggu ruang gerak pemimpin?

Bayangkan apabila suatu hari Anda menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Siapa pun Anda, maka akan memperoleh jasa protokoler, berupa pengawalan dan jadwal yang disusun oleh para protokol yang formal sekali itu. Ruang gerak Anda akan dibatasi oleh aturan-aturan yang bahkan, menurut

SEPUTARACEH.COM

Ketika saya mengunjungi Mohammad Natsir, ... dia memakai kemeja yang bertambal yang belum pernah saya lihat pada pegawai manapun

- George Mc Turnan Kahin

Anda kurang masuk akal. Tetapi, Anda harus taat: atas nama protokoler. Protokol Anda akan mengatakan, "Maaf Pak, Bapak harus taat pada protokoler. Bapak tidak bisa pergi ke mal jalan-jalan sendirian. Bapak tidak bisa pergi nonton bioskop tanpa pengawalan. Bapak tidak bisa pakai celana kolor sembarangan! Kewibawaan bapak harus dijaga, biar kami yang mengatur dan memilihkan baju-baju yang bapak pakai." Pokoknya, semua gerak-gerik dan langkah Anda harus selaras dengan maunya protokoler. Tetapi mungkin tidak juga sekaku itu: Anda bisa menawar banyak hal.

Formalitas kadang diartikan sebagai suatu kenecisan. Perlukah seorang pemimpin berpenampilan necis?

Pemimpin memang bukan peraga busana alias peragawan atau peragawati. Pemimpin itu butuh kepatutan, bukan lagi kenecisan. Necis boleh, bahkan perlu, tetapi tujuan necis itu adalah untuk memperkuat jatidiri, bukan malah menjauhkan dari otentisitas kepemimpinan. Kenecisan itu terkait sekali dengan citra dan pencitraan. Orang yang necis diasumsikan

atau dicitrakan lebih berbudaya ketimbang yang tidak necis. Soal ini, ada tulisan menarik dari Rudolf Mrazek. Dalam tulisannya tentang kenecisan di zaman kolonial Belanda, ia mengamati tentang sejarah mentalitas kolonial yang menekankan kebersihan dan kenecisan yang mereka anggap tidak dimiliki pribumi. Dalam catatan Mrazek tersirat bahwa rezim Belanda mengkondisikan bahwa pribumi itu bodoh dan kebodohan itu identik dengan ketidaknecisan. Makanya, para terpelajar kita saat itu, berupaya untuk senantiasa tampil necis, antara lain supaya terhindar dari stigma bangsa yang tak berbudaya.[17]

Ketika Anda bicara soal kenecisan, maka sesungguhnya eratkah hubungan politik dengan *fashion*?

Dalam perspektif tata pergaulatan politik formal, jelas pakaian itu, sadar atau tidak, menimbulkan persepsi kewibawaan. Pepatah Jawa mengatakan *ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono*. Harga diri (jiwa) terletak tutur-kata, harga tubuh (raga, tampilan) terletak pada estetika berbusana kita. Padu padan dalam berpakaian itu penting. Ini mengingatkan pada konsep *well groomed*, yakni "*well-dressed and scrupulously neat*",[18] berpakaian pantas (padu-padan) dan teliti-rapi. Tren mode atau *fesyen* (*fashion*) boleh diikuti, tetapi jangan yang aneh-aneh. Bagi seorang pemimpin ia harus mampu menempatkan pakaian sebagai identitas politiknya yang elegan, tanpa harus menjatuhkan wibawanya. Ketika Mahatma Gandhi memilih berpakaian sederhana sekali, maka itu bagian dari politik identitas simboliknya: kemandirian dan kemerdekaan India.

Transformasional, Transaksional, dan Situasional

BAGAIMANA PENJELASAN soal transformasional dan transaksional ini?

Dua gaya atau pendekatan ini, mengemuka pada buku tentang kepemimpinan politik yang legendaris karya James MacGregor Burns, *Leadership* (1978). Burns mengawali bukunya ini dengan mengingatkan fenomena krisis kepemimpinan. Ini ia kaitkan dengan banyaknya orang yang menggenggam kekuasaan, tetapi sekadar dijalankannya kekuasaannya itu secara biasa-biasa saja (*mediocrity*) atau bahkan mereka tak bertanggung jawab (*irresponsibility*). Pembahasan tentang pemimpin, bahkan selama

17 Mrazek (2005).

18 http://www.merriam-webster.com/dictionary/well-groomed (diakses, 15 Desember 2015).

Tidak penting apa pun agama atau sukumu ... Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu

- K.H. Abdurrahman Wahid

berabad-abad, sekadar dikaitkan dengan konteks yang memerintah (*the rulers*) dan yang diperintah (*the ruled*). Dalam hal ini yang memerintah atau penguasa seringkali bertindak sebagai seorang tiran. Padahal, pemimpin berbeda bahkan berseberangan dengan tiran (*a leader and a tyrant are polar opposites*). Burns lantas membagi dua jenis dasar kepemimpinan: transaksional dan transformasional.[19]

Nah, apa bedanya?

Menurut, Burns, pada intinya, hubungan antara pemimpin dan pengikut yang berjenis transasksional ialah manakala hubungan tersebut dilakukan dalam model pertukaran (*exchanging one thing to another*): pekerjaan/uang untuk suara, misalnya. Sementara, jenis hubungan pemimpin dan pengikut yang transformasional itu lebih kompleks dan potensial. Pemimpin transformasional, dalam hal ini, berikhtiar mengenali potensi atau motif utama kebutuhan atau permintaan dari pengikutnya, dan berupaya memenuhinya, sehingga dengan demikian pemimpin berharap memperoleh dukungan penuh para pengikutnya. Jadi, pemimpin transformasional itu menyelenggarakan hubungan dengan pengikutnya dalam hubungan yang saling mendorong (*mutual stimulation*) sehingga merngubah pengikut

19 Burns (2010:1-4).

menjadi pemimpin, dan pemimpin menjadi agen-agen moral.[20]

Apa yang disampaikan oleh Burns dan perkembangan wacana kepemimpinan transaksional dan transformasional ini, diringkas kembali oleh Yukl, bahwa kepemimpinan transformasional, mengubah dan memotivasi para pengikut dengan: (1) membuat mereka menyadari pentingnya hasil tugas; (2) membujuk mereka untuk mementingkan kepentingan Tim dan organisasi; (3) mengaktifkan kebutuhan mereka yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepemimpinan transaksional melibatkan proses pertukaran yang dapat menghasilkan kepatuhan pengikut akan permintaan pemimpin, tetapi tidak mungkin menghasilkan antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas. Kepemimpinan tranformasional lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional, tetapi pemimpin yang efektif menggunakan kombinasi kedua jenis kepemimpinan ini.[21]

Tadi Burns menyebut soal pemimpin transformasional sebagai agen moral, apa maksudnya?

Bahwa memang itulah pemimpin yang diharapkan oleh Burns: kepemimpinan bermoral (*moral leadership*). Ada tiga ciri utama *moral leadership* menurut Burns: (1) yang memimpin dan dipimpin tidak saja merupakan hubungan kekuasaan (*power*) tetapi juga hubungan yang saling membutuhkan (*mutual needs*), hubungan aspirasional, dan nilai-nilai; (2) bahwa dalam menanggapi pemimpin, pengikut memiliki pengetahuan yang memadai terkait pilihan-pilihan yang ada; (3) pemimpin mengambil tanggung jawab terkait komitmennnya sebagai pemimpin. Bagi Burns, moralitas kepemimpinan itu bukanlah kepemimpinan para pemuka agama yang saleh, tetapi ia lebih merupakan kepemimpinan yang berangkat dari, dan selalu kembali pada, kebutuhan-kebutuhan dasar, aspirasi, dan nilai-nilai pengikut (*follower's autentic needs*).[22]

Meskipun kepemimpinan transformasional sering dianggap lebih ideal, tetapi kombinasinya dengan pola transaksional dalam konteks tertentu diperlukan ...

Barangkali karena tidak selamanya pemimpin punya kharisma dan pengaruh yang optimal, sehingga mengandalkan gaya transformasional saja dianggap kurang efektif. Di tengah-tengah masyarakat atau pengikut yang bercorak pragmatis, barangkali gaya transformasional akan tidak efektif —

20 Burns (2010:4).

21 Yukl (2007:305)

22 Burns (2010:4).

Para pakar kepemimpinan dan masyarakat sama-sama memuji kebaikan pemimpin transformasional - mereka yang berangkat dengan tujuan yang jelas dan mengambil risiko untuk mengubah dunia. Kita cenderung mengecilkan pemimpin transaksional, yang tujuanya yang lebih sederhana, sebagai manajer belaka

- Joseph Nye

Leadership experts and the public alike extol the virtues of transformational leaders - those who set out bold objectives and take risks to change the world. We tend to downplay 'transactional' leaders, whose goals are more modest, as mere managers.

meskipun pemimpin harus mendidik para anak-buah alias para pengikut.

Terlepas dari sisi negatifnya, pola kepemimpinan transaksional, terkadang terkesan lebih realistis — terutama apabila gaya transformasional gagal menciptakan atau mendesain struktur insentif yang memadahi. Kepemimpinan transaksional, sedikit banyak juga mengingatkan pada pola *stick and carrot* — walaupun kesannya yang mengemuka lebih banyak *carrot*-nya, sehingga tampak memanjakan anak-buah atau pengikut. Pemimpin transaksional lebih banyak memberikan bensin lebih dulu, baru anak buah jalan. Kalau tak ada bensin, tak ada uang jalan, anak-buah ogah-ogahan. Kira-kira begitulah!

Selain dua istilah di atas (transformasional dan transaksional) ada juga yang, kesannya menengahi keduanya: kepemimpinan situasional.

Apa pula kepemimpinan situasional itu?

Dari para ahlinya Miftah Thoha meringkaskan kepemimpinan situasional, merupakan kepemimpinan yang didasarkan pada saling berhubungannya: jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan pimpinan; jumlah dukungan semi-emosional yang diberikan pimpinan; dan tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. Kematangan (*maturity*) dalam kepemimpinan situasional dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan orang-orang untuk bertanggungjawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri.[23]

Pemimpin situasional tahu situasi, kontekstual, adaptif, mampu mendeteksi apa-apa yang berkembang, mengetahui persis kekuatan sumberdaya yang dimilikinya, serta menciptakan kondisi di mana para pengikut tumbuh

23 Thoha (2007:63-68).

dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemimpin situasional bergerak cepat dan tidak ragu-ragu untuk menyesuaikan diri, beradaptasi, dengan dinamika perubahan yang hiruk-pikuk dan bergemuruh — didukung para pengikut yang tahu persis pula apa yang mereka hendak lakukan.

Proaktif dan Reaktif

BAGAIMANA KALAU pemimpin suka bersikap proaktif atau sebaliknya reaktif?

Itu terkait dengan bagaimana pemimpin menanggapi tantangan. Menurut D'Souza, pemimpin yang merespon tantangan secara proaktif berciri: (1) bertanggungjawab secara sadar, sengaja dan aktif; (2) melihat ke depan dan mengantisipasi masa depan yang dicita-citakan; (3) merencanakan apa yang akan dikerjakan; (4) mengatur strategi untuk mencegah permasalahan yang mungkin muncul sehingga tidak menghabiskan banyak waktu untuk memadamkan, melainkan untuk mencegah kebakaran.[24]

Kalau yang reaktif?

Kepemimpinan reaktif berarti: Hidup dengan cara "pasca-kejadian"; menghabiskan sebagian besar waktu untuk bereaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi; pasif menunggu segala hal yang terjadi dan dalam memecahkan masalah; waktu tersita untuk memadamkan kebakaran, sehingga tak cukup memikirkan apa penyebab kebakaran. D'Souza meringkaskan kedua sebagai berikut:

Kepemimpinan Reaktif

- Mengelak dari tanggung jawab
- Melihat alasan mengapa segalanya tak dapat dilakukan
- Merasa tidak dapat mengendalikan keadaan
- Berfokus pada masalah, hambatan, atau apa yang harus dihindari
- Dibatasi oleh apa yang berhasil di masa lalu
- Dibutakan oleh masalah dan hambatan dalam suatu situasi
- Berorientasi pada masalah — memusatkan perhatian untuk menemukan kelemahan dan masalah yang harus diperbaiki
- Merasa sulit untuk memilih dan memutuskan
- Takut mengambil risiko dan menghadapi tantangan
- Menolak perubahan

24 D'Souza (2007:74).

ROSETTABOOKS.COM

Orang reaktif ... sering dipengaruhi oleh lingkungan fisik mereka. Mereka mencari sumber eksternal untuk disalahkan atas perilaku mereka

- Stephen Covey

Reactive people... are often affected by their physical environment. They find external sources to blame for their behavior.

- Tdak bisa meninggalkan masa lalu
- Menderita tekanan batin yang berlebihan
- Dihancurkan oleh kegagalan
- Menguras energi dengan cepat
- Mempunyai citra diri negatif dan kepercayaan diri yang rendah

Kepemimpinan Proaktif

- Mengambil tanggungjawab untuk bertindak
- Mempunyai sikap "bisa melakukan"
- Merasa dapat mengendalikan keadaan
- Berfokus pada solusi atau hasil yang diinginkan
- Memikiran kemungkinan baru
- Mencari kemungkinan dan berfokus pada peluang dalam suatu situasi
- Berorientasi pada peluang — memusatkan perhatian untuk menemukan kekuatan dan sumberdaya
- Mengamil pilihan dan keputusan dengan mudah
- Tergerak untuk tidak takluk pada tantangan dan risiko
- Terbuka pada perubahan
- Berorientasi pada masa sekarang dan masa depan
- Menikmati kedamaian batin
- Belajar dan bertumbuh dari kesalahan
- Mempunyai persediaan energi yang tidak ada habisnya
- Mempunyai citra diri yang positif dan kepercayaan diri

Anda harus proaktif, tuliskan waktu dalam jadwal Anda, dan ambillah tanggung jawab untuk menjadi orang sehat sebisa yang Anda lakukan - tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk Anda

- Mehmet Oz

You need to be proactive, carve out time in your schedule, and take responsibility for being the healthiest person you can be - no one else is going to do it for you.

Jadi, terlihat sudah: bagaimana pemimpin yang proaktif lebih siap ketimbang yang reaktif. Pemimpin proaktif sedia payung sebelum hujan, sedangkan yang reaktif harus mencari-cari payung ke sana-kemari, sementara mendung makin gelap saja.

Yang proaktif kalem, yang reaktif gugup?

Mungkin *kalem* yang Anda maksud itu ialah pemimpin yang memang benar-benar punya konsep dan jurus-jurus jitu dalam merespons masalah-masalah krusial: sehingga ia lebih tenang dan siap. Tapi, jangan juga salah, barangkali yang *kalem* dan tenang itu memang "tidak tahu apa-apa", wkwkwkwk ...

Sementara yang reaktif itu, yang tak punya konsep, semua hal dijawab dengan improvisasi yang tidak matang, sehingga ibarat pertunjukan komedi atau lawak, lawakannya tak lucu. Dalam hal inilah, saya bisa paham, kalau yang reaktif itu yang gugup. Tetapi juga jangan salah juga, kalau reaktifnya pas atau tepat, maka bisa jadi ia cepat selesaikan masalah. Silakan saja Anda bikin perumpamaan-perumpamaan, tetapi kalau dikaitkan dengan kisah-kisah kstaria dalam komik-komik, seperti yang sudah kita bahas di depan: yang proaktif itu pendekar asli, yang reaktif itu yang palsu. Mungkin begitu.

Bagaimana kalau dikaitkan dengan kata *low profile*?

Low profile itu perilaku atau tindakan menahan diri, mengedepankan kesopanan atau tidak menarik perhatian.[25] Pemimpin aau seseorang yang *low profil* itu yang menunjukkan sikap-sikapnya yang tidak menonjolkan diri atau juga sering dimaknai sebagai rendah hati. Menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia*, *rendah hati* terkait dengan hal (sifat) tidak sombong atau tidak angkuh.[26] Dalam bagian lain buku ini, pernah saya singgung soal pepatah Jawa yang relevan dengan sikap *low profile* atau rendah hati ini: *ojo rumongso biso, nanging biso o ngrumangsani* (Jangan merasa bisa, tetapi bisalah merasa).

25 http://www.thefreedictionary.com/low+profile (diakses, 15 Desember 2015).

26 http://kbbi.web.id/rendah (diakses, 15 Desember 2015).

Birokratik dan Diplomatis

BAGAIMANA DENGAN gaya kepemimpinan birokratik?

Gaya ini dikaitkan dengan tradisi birokrasi. Pemimpin, layaknya dalam gaya kepemimpinan otokratik memberitahukan bawahan atau para anak buahnya tentang apa yang harus mereka kerjakan. Tapi, bedanya dengan otokratik, kepemimpinan birokratik mendasarkan perintahnya itu pada seprangkat aturan, prosedur, yang dirutunkan dari kebijakan utamanya. Ciri khas seorang yang bergaya birokratis ialah memandang bahwa semua aturan dan ketentuan organisasi ialah absolut, pemimpin mengelola sepenuhnya berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan dan tidak diperkenankan sedikitpun aturan itu dilanggar atau ada pengecualian, termasuk dalam hal aspek-aspek teknis sekalipun.[27]

Apa plus-minus gaya birokratik?

Pada prinsipnya, ia berorientasi agar terjaga konsistensi jalannya organisasi: ada parameter atau aturan main (konstitusi atau AD/ART) yang harus ditaati. Gaya ini ingin memastikan sistem organisasi berjalan baik, tidak ada alasan siapapun untuk melanggar aturan. Namun, gaya ini bisa kaku sekali alias tidak fleksibel, khususnya pada situasi yang menuntut pengecualian. Kekakuan itu cenderung tidak mengantisipasi konteks adaptasi dan respons cepat terhadap perubahan dan tuntutan, maka yang terjadi adalah kelumpuhan (*paralysis*). Pemimpin sering dihadapkan situasi ambigu, dan apabila ia tidak cepat memutuskan, maka suasana ambigu pun meluas ke mana-mana, dan membuat yang dipimpin jadi *anjlok* moralitasnya: muncul penentangan-penentangan yang semamin terang-terangan, dan konflik terbuka pun hadir dalam organisasi.

Bagaimana dengan gaya diplomatis?

Gaya ini menonjolkan kemampuan komunikasi-persuasif, karenanya pemimpin itu seniman komunikasi. Perspektifnya *salesmanship*, kemampuan menjual gagasan atau meyakinkan yang lain terhadap suatu kebijakan. Pemimpin bisa saja langsung otokratik, memerintahkan sesuatu tanpa diskusi dan pokoknya harus beres. Tetapi gaya diplomatik tidak demikian: ada pembicaraannya, ada hal-hal yang dimasukkan sebagai motivasi agar anak buah mampu menangkap dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemimpin yang bergaya diplomatis ini juga sering disebut sebagai *a sell-type leader*. Ia paham teknis persuasinya, ia mampu menjelaskan hal-hal apapun yang ditanyakan orang lain, tentang maksud dari suatu kebi-

27 Uraian dua gaya ini merujuk pada Trimo (1995:21).

TELEGRAPH.CO.UK

Kemampuan berkompromi bukanlah kesopanan diplomatik terhadap mitra, melainkan karena mempertimbangkan dan menghormati kepentingan sah mitra Anda

- Vladimir Putin

The ability to compromise is not a diplomatic politeness toward a partner but rather taking into account and respecting your partner's legitimate interests.

jakan atau kegiatan. Gaya ini tentu membuka ruang berdemokrasi dengan anak buah: membebaskan mereka untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengajukan keberatan, dan berargumentasi panjang lebar.

Lagi-lagi: apa plus-minusnya gaya diplomatis ini?

Karena ada nuansa demokrasinya, maka anak buah akan selalu merasa dilibatkan, dan dengan demikian akan merasa bahwa masalahnya sebagai masalah bersama, masalah bersama sebagai masalahnya, yang harus diselesaikan dengan bekerja lebih keras lagi. Mereka akan lebih bergairah lagi, karena merasa memahami masalah secara komplit, bukan terbatas, sehingga mereka tidak membuta dalam menerima tugas-tugas. Gaya diplomatis juga membuat bawahan menjadi eksis dan "dimanusiakan", karena memang mereka diajak bicara, diberikan motivasi dan dipersuasi secara argumentatif. Tetapi, justru dengan demikian, pemimpin berpotensi kehilangan respek (*lose respect*) dari para bawahan atau anak buah, manakala daya argumentasinya lemah, daya motivasinya tekor. Demikianlah kiranya.

Lepas Kendali dan Otopilot

APA PULA yang dimaksud dengan gaya lepas kendali?

Gaya *free rein leader* mengibaratkan pemimpin bak penunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendali kudanya. Kepemimpinan lepas kenda-

li (lepas tangan) ini juga lazim disebut gaya *laissez-faire* adalah jenis gaya kepemimpinan di mana para pemimpin lepas tangan dan memungkinkan anggota-anggotanya membuat keputusan. Pemimpin menetapkan tujuan dan anak buah bebas untuk melakukan apa pun yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Gaya *free-rein* ini dinilai tepat dalam kepemimpinan organisasi profesional (dokter, akuntan, insinyur, dan profesional lainnya), tetapi belum tentu cocok bagi yang lain.[28]

Jadi, gaya ini tak sepenuhnya berarti pemimpin benar-benar membiarkan anak buahnya berjalan tanpa kontrol sama sekali: ia telah menetapkan tujuan dan parameter, dan lantas menyerahkan anak buahnya bertindak bebas, tanpa pengarahan-pengarahan lagi, atau kontrol lebih lanjut, kecuali apabila anak buahnya memintanya. Karenanya, kita tidak bisa membayangkan bahwa gaya kepemimpinan ini seperti koboi menaklukkan kudanya yang liar dengan tali kekangnya, tetapi malah sebaliknya diasumsikan kudanya sudah jinak dan mengerti tugasnya masing-masing. Gaya seperti ini efektif tidaknya tak lepas dari tiga faktor: (1) jenis dan struktur tugas atau pekerjaan itu sendiri; (2) pada anggota kelompok yang bagaimana jenis kepemimpinan ini diterapkan; (3) kondisi lingkungan atau situasi yang bagaimana yang sedang dihadapi.[29]

Apa plus-minusnya?

Keuntungannya, gaya ini mengarah pada pendayagunaan waktu secara optimal, karena hakikatnya ada pendelegasian manajerial. Kelemahannya, justru terletak pada adanya kontrol kepemimpinan atau manajerial yang kecil, sehingga risiko kegagalannya tinggi, karena prosesnya tak terpantau. Gaya kepemimpinan lepas kendali akan menghadapi kehancuran, jika saja pemimpin kurang atau tidak mengenal tingkat arau derajat kompetensi dan integritas orang-orangnya, dan percaya begitu saja bahwa mereka semua mampu.[30] Yang terakhir ini penting direnungkan oleh seorang presiden apabila memilih gaya kepemimpinan demikian: ia harus mengangkat anggota kabinet yang memang punya derajat kompetensi dan integritas yang tinggi — terlepas apakah ia dari partai politik atau profesional. Kalau tidak, risikonya besar: kinerja kabinet akan berantakan, karena ketiadaan kompetensi dan integritas anggota kabinet. Kompetensi terkait kemampuan kepemimpinan, integritas terkait dengan kejujurannya pun fokusnya dalam bekerja: untuk negara atau untuk partai politik masing-masing.

28 Trimo (1995); juga http://acqnotes.com/acqnote/careerfields/free-rein-leadership-style-business (diakses, 15 Desember 2015).

29 Trimo (1995).

30 Trimo (1995).

Sangat sering, manusia hidup seperti otopilot, bereaksi secara otomatis terhadap apa yang terjadi

- Bertrand Piccard

Very often, human beings are living like on autopilot, reacting automatically with what happens.

Apa beda gaya tersebut dengan otopilot?

Gaya *free rein leader* ini mirip gaya otopilot. Tetapi, Anda bisa uraikan sendiri nanti apa kira-kira perbedaannya. Istilah otopilot dikenal dalam navigasi, sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidrolik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan manusia lagi. Umumnya otopilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.[31] Seorang pilot pesawat atau nakhoda kapal biasanya mengaktifkan mode otopilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot. Dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan otopilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah, dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem. Maka dapat disimpulkan, otopilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.

Kalau begitu konteks otopilot ini sekadar sebuah kritik?

Bisa kritik, bisa tidak. Sebagai kritik ia dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa pemimpin harus memimpin. Pemimpin harus berikhtiar lebih dalam mengelola perubahan untuk mendapatkan hasil maksimal, kendatipun semua sistem diasumsikan telah berjalan dengan baik. Itu pesan pentingnya: pemimpin pun tak boleh dikesankan *ongkang-ongkang* saja, ketika semua sudah dianggap baik. Gaya kepemimpinan otopilot mencerminkan tidak adanya kreativitas dan inovasi apapun dalam memimpin. Organisasi menjadi *quo vadis*: adanya seperti tidak adanya. Karenanya, saya berpendapat, gaya ini tak memberikan banyak manfaat, karena yang berjalan bukan fungsi-fungsi kepemimpinan. Sebagus-bagus apapun suatu sistem dalam organisasi, tidak boleh fungsi-fungsi kepemimpinan diremehkan. Sebaik apapun sistem, ia terus berhadapan dengan kemungkinan kegagalannya. Di situlah pemimpin dibutuhkan.●

31 "Indonesia Saat Ini Berjalan seperti "Negara Otopilot"", Kompas.com, 24 Oktober 2014.

Bab 12

Jenis-jenis Kepemimpinan

Apa Saja?

APA SAJA jenis-jenis kepemimpinan di Bab ini?

Ada beberapa. Masing-masing kita singgung seperlunya dengan uraian bebas. Yang akan diuraikan di sini: jenis kepemimpinan birokrasi, bisnis, militer, dan kultural. Dan selanjutnya, kita juga akan singgung konteks kepemimpinan politiknya di bab tersendiri. Bab ini menjelaskan masing-masing jenis kepemimpinan memiliki perbedaan yang khas: bagaimana tantangan dan peluang harus direspons.

Kepemimpinan Birokrasi

BAGAIMANA dengan kepemimpinan birokrasi?

Kita perlu pahami karakterisktik terlebih dulu tentang makna birokrasi. Sebagaimana diringkas Santoso, terdaoat tiga kategori birokrasi: (1) birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (*bureau-rationality*) seperti yang terkandung dalam *Hegelian-bureaucracy* dan *Weberian-bureaucracy*; (2) birokrasi dalam pengertiannya sebagai suatu penyakit (*bureau-pathology*), sebagaimana diungkapkan oleh Marx, Laski, Michels, Warwick, Crocier, Luthan dan sebagainya; (3) birokrasi dalam pengertian yang netral (*value-free*), tidak terkait dengan pengertian baik atau buruk. Dalam pengertian

netral, birokrasi mengandung pengertian sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif.[1]

Di antara sekian konsepsi mengenai birokrasi, yang paling terkenal adalah birokrasi Weberian — satu pandangan birokrasi *à la* Max Weber. Miftah Thoha meringkas tipe-tipe ideal birokrasi Weberian sebagai berikut:

(1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

(2) Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarkhi dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya, ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.

(3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarkhi itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.

(4) Setiap pejabat punya kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job discription*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan kontrak.

(5) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang komprehensif.

(6) Srtiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarkhi jabatan yang disandangnya.

(7) Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginannya, dan kontraknya dapat diakhiri dalam keadaan tertentu.

(8) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif.

(9) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resources* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya

(10) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.[2]

Dari tujuh prinsip itu, maka birokrasi Weberian mengedepankan rasionalitas dan pengalaman, profesional, pembagian tugas atau kewenangan, mengikuti prinsip hirarkhi atau berjenjang, adanya aturan dan koordinasi, bersifat formal, impersonal dan bukan personal dan terdapat kualifikasi-kualifikasi teknis yang disusun berdasarkan mekanisme yang profesional.

1 Santoso (1995:14).

2 Thoha (2014:18-19).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *birokrasi* didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarkhi dan jenjang jabatan; dan cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.[3] Pegawai pemerintah yang dimaksud biasanya merujuk pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Secara sederhana makna di atas menegaskan bahwa birokrat atau pegawai birokrasi itu erkait dengan pemerintahan dan hirarkhi jabatan. Selanjutnya birokrasi juga dapat didefinisikan sebagai: (1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat, dan; cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai; dan (2) Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi diperoleh dari penunjukan atau ditunjuk (*appointed*) dan bukan dipilih (*not elected*).[4]

Jadi birokrasi itu *division of labor* yang hirarkhis?

Gampangannya birokrasi atau *bureaucracy* (bahasa inggris *bureau* + *cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Pada rantai komando ini setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan jelas. Ciri lainnya biasanya terdapatnya banyak formulir yang harus dilengkapi, pun pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarkhi kekuasaan.

Birokrasi selalu terkait dengan negara?

Ya. Inilah yang membedakannya dengan kapital. berangkat dari pandangan Karl Mark dan Max Weber, Dhakidae mengulas bahwa,

> ... Ketika orang bicara tentang birokrasi, maka yang berada di sampingnya adalah negara; ketika seseorang bicara tentang kapital, maka yang berada di sampingnya adalah korporasi. Bisa dikatakan ada dua pasang institusi, yaitu negara dan birokrasi berhadapan dengan kapital dan korporasi. Bila korporasi adalah kekuasaan yang membadan, maka korporasi adalah modal yang membadan. Keduanya melayani keperluan yang sama; ketika birokrasi menjamin kelangsungan negara, atau sebaliknya, maka korporasi menjamin kelangsungan korporasi.[5]

Apa maksud dibentuknya birokrasi dalam dunia modern?

3 kbbi.web.id/birokrasi

4 Wikipedia.org

5 Dhakidae (2014:40).

Maksudnya baik, tak lain agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien. Birokrasi pada dasarnya selaras dengan manajemen modern — ia bukan . Pelembagaan pekerjaaan dalam birokrasi dimaksudkan agar tidak tumpang tindih, alur kerjanya jelas, seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan *job discription* yang jelas berdasarkan jenjang kepangkatan dan kompetensinya. Tanpa birokrasi, bagaimana bentuk pemerintahan modern? Mungkin akan seperti amuba. Makanya pelembagaan birokrasi di segala sektor diperlukan.

Tapi kenyataannya, banyak yang mengeluhkan kinerja birokrasi ...

Ya, birokrasi juga rentan terserang penyakit. Ada tiga jenis penyakit terkenal yang diidap birokrasi: Parkinsonian, Orwellian, dan Jacksonian. Tipe birokrasi Parkinsonian ditandai penggelembungan jumlah kelembagaan birokrasi tanpa diikuti sumber daya manusia yang kapabel dan pola rekrutmen yang asal-asalan dan tentu juga koruptif. Model Parkinsonian mencerminkan birokrasi yang gagap dan lamban, seperti orang yang mengidap obesitas. Istilah Parkinsonian berasal dari "penemunya", yakni Cyril Northcote Parkinson yang menulis esai humoris di majalah *The Economist* pada 1955.[6]

Kalau Orwellian dan Jakcsonian?

Tipe birokrasi Orwellian akan hinggap pada birokrasi yang tidak ramping, di mana negara menjadikan birokrasi sebagai perpanjangan tangan agar hegemoni dijalankan secara sempurna. Istilah ini berasal dari Goerge Orwell yang mengarang novel tenar "*1984*". Novel Orwell ini terbit pertama kali pada 1949. Ia adalah *satire* terhadap fenomena totalitarianisme yang dicirikan oleh pengawasan penuh negara terhadap individu masyarakatnya, melalui instrumen-instrumen "birokrasi" yang canggih. Totalitarianisme memang tengah menjadi gejala di Eropa pada Perang Dunia II.[7]

Kalau birokrasi Jacksonian bermakna bahwa birokrasi dijadikan mesin politik kekuasaan negara. Ia diambil dari nama Andrew Jackson, seorang jenderal militer yang tangguh dan seorang negarawan yang terkenal sebagai bekas Presiden Amerika Serikat yang ke-7 (1824-1932). Menjabat dua kali masa jabatan, ia presiden pertama yang dipilih langsung dan dianggap sebagai kemenangan demokrasi yang waktu itu dikenal *Jaksonian Democracy*. Tindakan Jackson yang mengundang celaan politik ialah ketika ia mengganti semua pejabat Federal lawannya dengan teman-teman pendukung-

6 Lihat, arsipnya, http://www.economist.com/node/14116121 (diakses, 12 Desember 2015).

7 Baca, Orwell (2003).

Birokrasi bukan halangan demokrasi, tapi pelengkap yang tak terelakkan

- Joseph Schumpeter

Bureaucracy is not an obstacle to democracy but an inevitable complement to it.

nya, atau dikenal dengan istilah *spoil system* atau *patronage system*. Itulah "Jacksonian" atau "Jackonism" birokrasi.[8]

Merujuk birokrasi Weberian, mestinya orientasi birokrasi itu *merit system*, sehingga birokrasi Jacksonian tidaklah etis dan berpotensi merusak. Ya kalau pejabat birokrasi baru yang diangkat penguasa pasca-pemilu ialah yang mampu, kalau tidak, bagaimana? Semakin rusak bukan? Dari sinilah pintu pembicaraan netralitas birokrasi bisa kita masuki.

Birokrasi kita kerap memperoleh sinisme masyarakat: kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah?

Persis diiklan itu ya. Hingga di era reformasi, birokrasi kita memang terasa masih *njlimet*, koruptif dan tidak berorientasi kenyamanan pada pelayanan publik. Tidak ada pelayanan gratis dinegeri ini, rasanya. Dari mulai ngurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga mengurus paspor, *njlimet* rasanya. Tidak hanya kewajiban pemerintah, terkhusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang proaktif mendisiplinkan pegawai negeri, tetapi juga perlu dukungan dari masyarakat dan internal birokrasi. Maka, dalam hal ini, kepemimpinan birokrasi menjadi relevan.

Praktik-praktik korup dalam perilaku birokrasi, merupakan salah satu kritik mendasar birokrasi Weberian. Para pakar yang mendalami administrasi pemerintahan telah mencoba untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan birokrasi — misalnya dengan mencetak kartu identitas tunggal yang multifungsi, profesioanlisme pelayanan satu atap, internetisasi dan sebagainya. Berbagai upaya *best practices* perlu dilakukan, agar birokrasi tak menjadi momok masyarakat.

Supaya birokrasi tak menjadi momok masyarakat, apa yang dapat dilakukan oleh kepemimpinan birokrasi?

Ya, soal birokrasi ini, Thomas Sowell, menyitir, "Anda tidak akan pernah memahami birokrasi, sampai Anda memahami bahwa bagi birokrat, prosedur adalah segalanya dan hasil tidak berati sama sekali."[9] Ini tentu

8 Koentjoro (2008).

9 *Quote of the Day*, *Seputar Indonesia*, 13 Oktober 2008.

Profesionalisme itu artinya konsisten pada kualitas
- Frank Tyger
Professionalism means consistency of quality.

merupakan semacam kritik yang serius yang sekaligus mengingatkan bahwa ekstrimitas prosedur itu tidak baik, kontras dengan tujuan birokrasi.

Apabila ditarik kembali ke ranah idealnya, kepemimpinan birokrasi berkaitan dengan tanggung jawab menegakkan kaidah-kaidah birokrasi yang rasional, berorientasi pelayanan publik secara profesional, efektif sekaligus efisien. Pemimpin birokrasi juga harus mengantisipasi patologi birokrasi Parkinsonian, Orwellian, atau Jacksonian, tidak larut kekangan politik-praktis, serta mencegah korupsi. Singkat kata, kepemimpinan birokrasi harus fungsional menjadikan birokrasi ujung tombak pelayanan masyarakat yang tidak menyeleweng. Paradigma kepemimpinan birokrasi yang cocok adalah kepemimpinan pelayan — sebagaimana telah kita singgung di bagian lain buku ini.

Kepemimpinan Bisnis

APA YANG membedakan kepemimpinan bisnis dengan kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan politik?

Pemimpin bisnis bekerja berdasarkan hukum dan prinsip ekonomi. Semua itu terkait dengan persaingan dan keuntungan. Prinsip ekonomi menegaskan bahwa, bagaimana seseorang dengan modal serendah-rendahnya atau sesedikit-dikitnya, tetapi berharap keuntungan yang sebesar-besarnya. Kata "berharap" di sini, tentu bukan "katak hendak jadi lembu", tetapi "berharap" dalam maknanya yang produktif. Orang yang bekerja dengan prinsip ekonomi akan berusaha untuk mewujudkan obsesi utamanya: mendapat keuntungan — dan karenanya penuh perhitungan. Berdagang adalah berhitung. Dan harus disiplin. Utang harus dibayar, piutang harus ditagih — walaupun ke saudara sendiri. Jadi, pemimpin ekonomi, harus paham atas prinsip ekonomi itu, karenanya kalkulasi ekonomi sangat ditekankan. Untuk mewujudkannya, sebagaimana jenis pemimpin lain, ia harus punya visi dan berupaya mewujudkannya dengan langkah-langkah *jitu*.

Itu saja?

Catatan Dhakidae yang dikutip di muka juga penting menegaskan beda antara ranah birokrasi dan korporasi: birokrasi itu kekuasaan yang membadan, sementara korpotasi itu kapital yang membadan. Kepemimpinan bisnis terkait dengan konteks korporasi. Jadi, pemimpin bisnis itu berhasil

manakala ia mampu mengembangkan kapital dalam organisasi. Sebagaimana di kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan politik bahkan kepemimpinan militer, dalam kepemimpinan bisnis juga ada hirarkhi. Dalam kepemimpinan manajemen perusahaan misalnya, ada manajer tingkat atas, madya (menengah), dan bawah. Masing-masing punya staf. Makin tinggi level manajerialnya, makin berkutat di wilayah penentuan kebijakan, makin ke bawah level manajerialnya, makin teknikal pelaksana kebijakan. Kelihatannya tertata bagus begitu, tapi memimpin bisnis tak sesederhana yang dibayangkan. Buka toko sendiri dan membesarkan toko itu di depan rumah kita yang longgar, tak gampang lho. Yang jelas harus ada jiwa enterprener alias kewirausahaan. Tanpa itu *prrttt*... susah.

Pemimpin bisnis bekerja atas hukum dan prinsip ekonomi. Yang lainnya, apa saja yang perlu dimiliki?

Sama dengan yang lain. Ada hal-hal umum yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin apa saja, sebagaimana yang dipaparkan di atas. Ia harus *gemi*, *setiti*, *ngati-ati*, mampu mengaktivasi modal, rasional-kalkulatif, dan berhati-hati untuk menggapai tujuan-tujuan ekonomi. Capaian-capaian kuantitatif penting untuk dilihat. Secara sederhana, progres capaian keuntungan perusahaan sangat penting. Pemimpin bisnis yang sukses, tidak saja hanya berhasil melipatgandakan keuntungan (*profit*), tetapi juga kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Dan yang jelas, pemimpin ekonomi mestinya tidak boleh *lancung*. Tidak boleh berbisnis secara ilegal dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius, seperti menggelapkan pajak, menyogok para pejabat untuk meloloskan tender, dan sebagainya. Risikonya besar apabila mereka melakukan kejahatan-kejahatan bisnis secara serius.

Yang juga penting untuk dicatat, pemimpin bisnis — juga pemimpin-pemimpin lainnya — dituntut untuk mampu menciptakan dan memperkokoh kualitas daya saing. Tentang soal ini, sudah diuraikan di atas. Daya saing, dalam konteks ekonomi, senaniasa terkait dengan pelipatgandaan keuntungan dengan menciptakan perusahaan yang efektif dan efisien dalam produktivitasnya di tengah-tengah keterbatasan sumberdaya yang ada. Ia harus bekerja keras dan cerdas, termasuk memotivasi dan menggerakkan para karyawan untuk bekerja secara optimal dan berprestasi.

Tapi, seorang pemimpin bisnis yang sukses ukurannya kan tidak itu saja. Bagaimana dengan tanggungjawab yang lain?

Benar. Dewasa ini, wacana tentang tanggung jawab pemimpin bisnis tidak hanya berlingkup internal. Tidak hanya melipatgandakan keuntungan perusahaan semata-mata. Tidak hanya menyejahterakan buruh atau bu-

Kejujuran bukanlah sikap. Ia merupakan keterampilan profesional yang harus dikembangkan dan dilakukan

- Brit Hume

Fairness is not an attitude. It's a professional skill that must be developed and exercised

ruh, atau memperbaiki suasana kerja serta produktivitas secara efektif dan efisien. Tetapi, ada tuntutan lain yang tak kalah penting dan berdimensi eksternal yakni tanggung jawab terhadap terjaganya kualitas lingkungan hidup dan tangung jawab sosial. Perusahaan tidak oleh egois dan harus punya persambungan yang jelas dengan lingkungan hidup dan permasalahan sosial. Perusahaan punya konsep CSR alias *Corporate Social Responsibility* yang dapat diwujudkan ke berbagai program. Ada yang berkonsentrasi di pendidikan, kesehatan, bantuan permodalan/kemitraan dan sebagainya.

Kepemimpinan Militer

APA YANG dimaksud militer?

Secara ensiklopedis militer bermakna *the soldiers; the army; the armed forces* (prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata).[10] Dewasa ini berkembang suatu studi tentang sosiologi militer yang melingkupi: (1) problem-problem organisasi internal, yang menganalisis proses-proses dalam kelompok kecil dan ritual militer dengan tujuan untuk mengidentifikasi problem-problem disiplin dan motivasi serta menguraikan cara-cara subkultur militer dibentuk; (2) problem-problem organisasional internal dalam pertempuran; dalam hal ini dianalisis termasuk seleksi para petinggi militer, kepangkatan, dan evaluasi motivasi pertempuran. Selanjutnya, (3) angkatan bersenjata dan masyarakat, yang mengkaji tentang citra profesi yang berkaitan dengan dampak perubahan sosial dan teknologi, profil rekrutmen angkatan bersenjata, problem-problem pelatihan dan pendidikan tentara, serta peran perempuan dalam militer; (4) militer dan politik.[11]

Bagaimana penjelasan tentang militer sebagai profesi?

Dalam hal ini, Huntington memandang militer sebagai sebuah profesi yang memiliki keahlian khusus. Menurutnya,

10 Yulianto (2002:27)

11 Maarif (2015:xi)

> Profesionalisme merupakan karakter dari perwira yang modern, sama halnya dengan karakter seorang dokter atau pengacara. Profesionalismelah yang membedakan perwira militer masa kini dengan para prajurit pejuang di masa lalu. Keberadaan korps perwira sebagai suatu badan yang profesional memberikan warna tambahan yang unik bagi masalah hubungan sipil-militer.[12]

Apakah yang dikemukakan Huntington itu menegaskan bahwa militer modern amat berbeda dengan militer tradisional pada masa lalu ...

Ya. Secara umum di masa lalu, golongan bersenjata biasanya yang paling besar kekuatannya dalam suatu masyarakat. Mereka menjadi *political class* atau *ruling class* (golongan yang memerintah). Sebagaimana disitir Voltaire, "raja pertama-tama merupakan seorang tentara". Golongan yang memerintah dalam elite tradisional itu *men of sword* (orang-orang berpedang). Golongan ini membagi kekuasaan atau berpasangan dengan kalangan *men of pen* (cerdik-pandai) yang dikenal dengan berbagai istilah: *klerk*, *literati*, cendekiawan dan kaum teknokrat.[13]

Bagaimana kaitan antara militer dan politik?

Nah, ini yang menarik. Karenanya hubungan antara militer dan politik telah menjadi kajian yang menarik perhatian banyak akademisi politik, seperti Samuel P. Huntington, Eric Nordlinger, Amos Perlmutter, Alfred Stepan, Micheal C Desch.[14] Yahya Muhamin telah meringkaskan catatan tentang beberapa sebab yang mendorong militer aktif dalam politik: (1) adanya ketidakstabilan sistem politik; (2) kemampuan golongan militer untuk mempengaruhi atmosfer kehidupan politik, bahkan untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan; (3) adanya *political perspectives* kaum militer.[15]

Selain militer profesional, adakah kategori lainnya?

Ada. Terkait intensitas keterlibatan militer dalam politik, Perlmutter membedakan jenis militer ke dalam tiga kategori: militer profesional, pretorian, dan revolusioner. Militer profesional memiliki kecenderungan campur tangan yang rendah dalam politik. Sementara militer pretorian permanen dan berkelanjutan, dan militer revolusioner tinggi sebelum dan selama

12 Huntington (2003:3)

13 Onghokham (1983:100-128)

14 Huntington (2003 [1957]); Nordlinger (1986); Perlmutter (1984); Stepan (1996); Desch (2002).

15 Muhaimin (1990:55).

revolusi, rendah sebelum revolusi.[16] Sementara Nordlinger berpendapat di manapun tentara memiliki pengaruh politik yang luas, antara lain karena mereka simbol kedaulatan sebuah negara dari ancaman pihak asing maupun dalam negeri. Tentara menjadi prajurit pretorian apabila mereka mengancam menggunakan kekuasaan untuk mendominasi arena politik.[17]

Apa yang bisa digarisbawahi dari militer profesional?

Militer profesional selalu berupaya punya jarak yang "aman" dengan politik. Tetapi, dalam banyak kasus, dan ini sering dijumpai di negara-negara berkembang adalah ketegangan antara kalangan militer dengan pemerintah sipil, dengan menampakkan adanya tarik-menarik pengaruh secara nyata dalam memperebutkan sumberdaya politik. Dalam tarik-menarik tersebut, militer bisa jadi mundur dari panggung politik. Maniruzzaman mencatat mundurnya militer dari dunia politik dalam jangka waktu yang cukup lama adalah fungsi dari transformasi struktural secara mendasar dalam masyarakat secara keseluruhan.[18]

Dalam perspektif Huntington, prajurit ideal ialah "seseorang yang konservatif dalam hal strategi, tetapi berpikiran terbuka dan maju mengenai persenjataan yang baru dan berbagai bentuk taktik yang baru". Apabila dikaitkan dengan politik, maka ia "berada di luar ruang lingkup kemampuan militer, dan partisipasi perwira militer di dalam politik merusak profesionalisme mereka", atau dengan kata lain, "perwira militer harus netral secara politis". Huntington menyimpulkan karakter utama pemikiran militer itu realisme-konservatif, dicirikan mengedepannya etika militer dalam:

- Menekankan stabilitas, irasionalitas, kelemahan, dan kejahatan di dalam sifat manusia.
- Memberikan tekanan pada supremasi masyarakat atas individu dan pentingnya perintah, hierarki, dan pembagian fungsi — tekanan diberikan pada kelangsungan dan nilai sejarah.
- Menerima negara sebagai bentuk tertinggi organisasi politik dan mengenal keadaan yang mirip dengan perang di antara bangsa-bangsa; menegaskan pentingnya kekuasaan di dalam hubungan internasional dan memperingatkan bahaya terhadap keamanan negara.
- Berpendirian keamanan negara bergantung pada ciptaan dan pengawalan kekuatan militer yang kuat.

16 Perlmutter (1984)

17 Nordlinger (1986).

18 Maniruzzaman (1998:1).

LAROUSSE.FR

Jangan pernah lupa bahwa tak ada pemimpin militer yang menjadi besar tanpa keberanian

- Carl von Clausewitz

Never forget that no military leader has ever become great without audacity.

- Berpendirian bahwa perang merupakan alat politik, bahwa kaum militer adalah pelayan para negarawan, dan bahwa kendali sipil penting bagi profesionalisme militer.
- Memuji ketaatan sebagai kebaikan tertinggi seorang militer.[19]

Apa yang dapat disimpulkan dari kepemimpinan militer?

Antara lain: kepemimpinan militer itu bersifat doktriner, "konstitusionalis" dan hirarkhis. Pemimpin militer bekerja berdasarkan doktrin yang disepakati, bersifat hirarkhis dan komando. Jenderal adalah generalis yang merupakan ahli strategi papan atas yang diasumsikan bijak-bestari, dan di *level* taktis dan operasionalnya para anak buah sudah menanti (menjalankan tugas). Anak buah tak boleh menyangkal pimpinan, kecuali tinggal melaksanakan. Kalau menyangkal atau melawan, insubordinasi. Jadi, yang menonjol di sini: soal disiplin pemimpin dan anak buah dalam organisasi demi mencapai tujuan yang ditetapkan. Karakter organisasi militer berbeda dengan non-militer, terutama dalam hal sistem komando dan ketertutupannya (aspek kerahasiaan) terutama pada masa perang. Pada masa damai, organisasi militer lazim dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar fungsi perang.

19 Huntington (2003 [1957]).

Kepemimpinan Kultural

APA KEPEMIMPINAN kultural itu? Bedanya dengan yang lain?

Kultural atau budaya maknanya lebih luas, menyangkut banyak aspek atau spektrum kehidupan. Pemimpin kultural adalah semacam yang dianggap sebagai kompas kehidupan. Pemimpin kultural itu "mengatasi" politik, ekonomi dan tetek bengek lainnya. Ia seorang generalis, moralis, teladan dan referensi umum masyarakat. Bisa jadi ia seorang agamawan, tokoh spiritual, "kepala suku", dan sederet tokoh menonjol dalam masyarakat yang tergolong sebagai pemimpin informal. Kehadiran mereka biasanya *bottom up*. Mereka dibutuhkan masyarakat, tanpa pangkat dan jabatan formal. Mereka dekat dengan komunitasnya. Mereka juga dikenal sebagai sosok-sosok yang *nothing to loose*.

Apa saja syarat pemimpin kultural?

Syarat utamanya jelas: dibutuhkan masyarakat. Masyarakat butuh panduan, butuh sosok yang bisa bersuara mewakili aspirasi mereka. Yang dianggap sebagai panutan dan referensi moral, motivator utama penggerak masyarakat. Para kiai di Pondok Pesantren misalnya adalah para pemimpin kultural. Demikian pula dengan para tokoh keagamaan gereja yang menyatu dengan masyarakat. Mereka punya komunitas, punya jamaah. Pemimpin-pemimpin ormas, juga sejatinya merupakan para pemimpin kultural.

Pemimpin kultural yang informal itu, apa bedanya dengan pemimpin politik?

O, beda. Pemimpin politik itu punya *power*, otoritas kekuasaan. Pemimpin kultural cuma punya pengaruh (*influence*). Pemimpin politik bisa memaksa, pemimpin kultural hanya mempengaruhi. Tetapi, sebagaimana kita catat dalam sejarah politik kita, pemimpin kultural selalu didekati oleh para pemimpin politik. Pada era demokrasi pasar saat ini, tak jarang para pemimpin kultural beralih sebagai pemimpin politik, mengurus partai politik dan *tetek bengek* konfliknya.

Pada era 1980-an dan sebelum 1998, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Amien Rais dikenal sebagai figur-figur pemimpin kultural, tetapi setelah masing-masing berpartai maka mereka bermetamorfosa menjadi para pemimpin politik. Itu pilihan mereka dalam merespons keadaan. Dengan banyaknya pemimpin kultural, termasuk para intelektual publik independen yang masuk ke dunia politik, semakin kurang lakulah paradigma pendekatan kultural dalam memperjuangkan idealisme. Ada yang mengatakan pendekatan politik itu selangkah lebih maju ketimbang pendekatan

Budaya membuat orang lebih saling memahami. Dan jika mereka mengerti satu sama lain lebih baik dalam jiwa mereka, lebih mudah untuk mengatasi hambatan ekonomi dan politik

- Paulo Coelho

Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers.

kultural, karena politik menjamin adanya kekuasaan. Tetapi, argumen itu bisa dibantah, bukankah pendekatan kultural lebih abadi, ketimbang pendekatan politik yang betapapun lamanya (Uni Sovyet, misalnya) bertahan, jatuh juga, sementara yang kultural masih bertahan?

Mengapa demikian?

Yang kultural itu terkait dengan tradisi ratusan bahkan ribuan tahun. Ia menyangkut suatu nilai dan keyakinan yang diyakini dan tak tergoyahkan oleh lindasan-lindasan politik. Seperti semak tatar dalam sebuah novel karangan Leo Tolstoy. Tatar adalah semacam semak duri liar yang berwarna merah darah, yang betapapun terlindas traktor, ia akan muncul kembali tegak kembali membuktikan bahwa betapapun ia tertindas secara politik, ia akan bangkit karena menyimpan energi kultural dan keyakinan yang luar biasa. Novel Tolstoy itu *Hadji Murat* (1912). Saya cuplikkan kalimat Tolstoy yang terkesan sekali pada semak liar tatar itu, sebagai berikut:

> Sebuah roda telah melindas seluruh semak itu, yang kemudian tegak kembali dengan sendirinya, dan karenanya semak itu menjadi miring, tetapi tetap berdiri juga. Seakan-akan sebagian tubuhnya dicabik, jerohannya terburai keluar, lengan-lengannya terpotong biji-biji matanya tercabut. Tetapi pohon itu tetap berdiri dan tidak menyerah kepada manusia yang menghancurkan semua saudaranya di sekelilingnya.[20]

Para pemimpin kultural itu merupakan sosok-sosok pemimpin yang transformatif, bukan transaktif. Mereka punya keyakinan dan visi, punya militansi untuk mentransformasikannya ke para pengikut, di tengah-tengah kondisi politik apapun. Mereka pantang menyerah, dan dari sudut ini mereka tergolong ke dalam para pemimpin heroik atau *heroic leaderships* — yang bergerak berdasarkan keyakinan dan mengalahkan banyak kendala.

Maksudnya?

Bolehlah kita baca Chris Lowney, *Heroic Leadership*. Ia mengisahkan

20 M Alfan Alfian, "Tatar", *Pelita*, 20 Februari 2004

Semua pengetahuan tentang realitas budaya, seperti yang dapat dilihat, selalu merupakan pengetahuan dari titik pandang tertentu

- Max Weber

All knowledge of cultural reality, as may be seen, is always knowledge from particular points of view.

para pemimpin Serikat Yesuit membangun salah satu "perusahaan" paling berhasil dalam sejarah. Lowney yang seorang mantan Yesuit dan eksekutif di J.P. Morgan, mengungkapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah dikatakannya telah menuntun para pemimpin Yesuit dalam beragam aktivitas mereka selama lebih dari 450 tahun (didirikan pada 1540 oleh sepuluh pria dengan tanpa modal dan tanpa rencana bisnis). Yesuit telah membangun sebuah organisasi yang mengoperasikan jaringan internasional perdagangan, pendidikan, dan yang lain selama hampir lima abad. Lowney mencatat keberhasilan Yesuit bersandar pada empat pilar inti:

- Kesadaran Diri: memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan pandangan hidup Anda.
- Ingenuitas: kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan penuh keeyakinan terhadap dunia yang terus berubah.
- Cinta: kesediaan untuk terlibat dengan, dan melibatkan, orang lain dengan sikap positif yang memungkinkan perkembangan potensi dan bakat terpendam mereka
- Heroisme: menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi-ambisi dan hasrat-hasrat heroik untuk melakukan segala sesuatu secara tuntas dan prima.[21]

Tapi kan, betapapun sebuah pendekatan disebut pendekatan kultural, ada kalanya butuh pendekatan politik juga, dan bisa juga sebaliknya?

Persis. Betapapun demikian kita harus cermati konteksnya. Anda pernah menyaksikan *Sekatenan* di Keraton Solo dan Yogya? Itu kreasi para Wali penyebar agama Islam di tanah Jawa. Begitu para Wali punya akses ke kekuasaan, maka mereka memanfaatkan untuk menciptakan kultur baru, yang dimanifestasikan ke dalam upacara-upacara yang massif dan simbolik. Dengan menggabungkan pendekatan kultural dan politik, para Wali sangat efektif dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tanpa pendekatan politik, tampaknya tidak akan ada *sekaten*.●

21 Lowney (2005).

Bab 13

Kepemimpinan Politik

Studi tentang kepemimpinan terus berkembang, bagaikan air sungai yang mengalir tanpa henti-hentinya. Sungguhpun begitu, misteri dari permasalahan ini rupanya belum sepenuhnya terungkapkan.

- ALFIAN[1]

Karakter Kepemimpinan Politik

APA KEPEMIMPINAN politik itu?

Kita baca catatan Andrew Heywood dalam *Key Concepts in Politics* berikut ini:

Leadership

Leadership can be understood as a pattern of behaviour, as a personal quality and as a political value. As a pattern of behaviour, leadership is the influence exerted by an individual or group over a larger body to organize or direct its efforts towards the achievement or desired goals. As a personal attribute, leadership refers to the character traits with enable the leader to exert influence over others. Leadership in this sense is effectively equated with charisma, charm or personal power. As a political value, leadership refers to guidance and inspiration, the capacity to mobilize others through moral authority or ideological insight.[2]

1 Alfian (1986:170)

2 Heywood (2000)

Politik itu perang tanpa pertumpahan darah, sementara perang ialah politik dengan pertumpahan darah

- Mao Tse Tung

Politics is war without bloodshed while war is politics with bloodshed.

Bahwa kepemimpinan (politik) dapat dipahami dalam tiga perspektif: (1) kepemimpinan sebagai pola perilaku; (2) kepemimpinan sebagai kualitas personal; (3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi yang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan. Kata kuncinya *influence* atau mempengaruhi.

Kalau sebagai kualitas personal?

Kualitas berhubungan dengan pengaruh. Kekuatan personal akan efektif apabila pengaruhnya terhadap yang lain efektif. Itulah kharisma pemimpin. Sejarah, kerap menghadirkan pemimpin kharismatik, yang kerap dikaitkan dengan dimensi mitologis. Pendeta Petrus Octavianus dari Batu, Malang, membagi dimensi mitos itu ke dalam *mitos personal* dan *mitos ilahiah*. Orang-orang yang memiliki kharisma di panggung sejarah, lebih memliki *mitos ilahiah*. Tuhan telah sengaja mendesain orang itu berkemampuan lebih. Ia mengatasi mitos personal, mitos yang diciptakan dengan rekayasa pencitraan. Soal kharisma, akan kita bahas tersendiri. Nanti akan ada penjelasan sedemikian rupa dari Sosiolog Max Weber.

Sebagai nilai politik?

Kalau ini, tampaknya ada hubungannya dengan sebuah puisi menarik Wallace Stevens berikut:

Sketch of the Ultimate Politician

He is the final builder of the total building
The final dreamer of the total dream
Or will be. Building and dream are one

There is a total building and there is
A total dream. There are words of this
Words, in a storm, that beat around the shapes

There is a storm much like the crying of the wind
Words that come out of us like words within
That have rankled so many lives and made no sound

He can hear them, like people in the walls
Running in the rises of common speech
Crying as that speech falls as if to fail

There is a building stands in a ruinous storm
A dream interupted out of the past
From beside us, from where we have yet to live[3]

Bahwa politisi *ngetop* atau politisi pamungkas itu sang pembangun yang memiliki andil-aktif dalam menyelesaikan keseluruhan bangunan. Pemimpin dapat memungkasi sebuah mimpi besar, mimpi seorang pemimpin. Membangun dan mimpi itu berkaitan. Pemimpin itu pembangun. Bentuk bangunan yang akan dibangun semula hanya dibayangkan, dimimpikan. Proses pembangunan, mulai dari mendesain bangunan hingga finalisasinya, didahului oleh mimpi. Mimpi yang dimaksud adalah visi. Pemimpin itu tidak boleh mengeluh *melulu*, justru karena ia harus mampu menyembunyikan penderitaannya. Tidak *talking too much* alias omong terlalu banyak melainkan yang efektif saja, mau mendengarkan, dan tentu penuh kesantunan. Itulah politisi *andhap asor* alias rendah hati.[4]

Siapa sih Wallace Stevens?

Ia pemenang puisi Pulitzer Prize, lahir di Reading, Pennsylvania, AS pada 1879. Ia dijuluki Puisiwan Modernis Amerika. Ia meninggal pada 1955.[5]

3 wallacestevens.tumblr.com

4 Istilah ini antara lain kita temukan di bait tembang *Macapat* Jawa, *Mijil* berikut: *Dedalane guno lawan sekti, kudu andhap asor // Wani ngalah duwur wekasane // Tumung kula yen dipun dukani // Bapang den simpangi, ono catur mungkur.*

5 Wikipedia.org

Adakah catatan lain tentang arti *leadership* dan *political leadership*?

Tentu ada. Misalnya mari kita baca David Robertson, *The Routledge Disctionary of Politics*, kita buka halaman yang memuat *leadership*:

> *Leadership is a quality which in theory signifies the ability of a person or a group of people to persuade others to act by inspiring them and making them believe that a proposed course of action is the correct one.*
>
> *Political leadership is generally thought to be a desirable property, except when a leader becomes too conscious of his or her position and refuses to acknowledge their accountability to the rank and file of their party or to the electorate. Leadership may, in certain romantic or fascist philosophies, take on a special role, but in normal democratic politics it is seen as aroutine feature of the political process.*
>
> *Sometimes the ruling elite of a party may be known as its lesdership. In Sovyet Union, for example, the Communist Party stressed its 'collective leadership' as a basic principle of government in contrast to the Stalinist period when oneman leadership was the order of the day. In many countries — especially newly independent countries with a recent history of nationalist struggle — the leader is seen as the embodiment of the people and the nation, as with Dr Hastings Banda of Malawi. However, leadership in Third World countries is often difficult to sustain over a long period of time in the absence of durable political institutions and economic progress.*[6]

Panjang banget. Bisa diulas singkat?

Pengertian kepemimpinan sama saja dengan yang lain: ia merujuk pada kualitas dan kemampuan signifikan seseorang atau kelompok untuk membujuk yang lain (*persuade others*) untuk melakukan apa yang ia atau mereka inspirasikan. Kepemimpinan politik juga demikian. Dalam filosofi *fascist*, pamimpin memegang pengaruh khusus (*special role*), tetapi dalam kondisi demokrasi politik yang normal, politik terlihat sebagai sebuah rutinitas dari sebuah proses politik semata.

Hastings Banda kenapa disebut-sebut? Siapa dia?

Hastings Kamuzu Banda (1896–25 November 1997) adalah pemimpin Malawi (1961-1994). Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, Banda kembali ke negerinya menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme dan terlibat dalam pergerakan mencapai kemerdekaan. Pada 1963, ia terpilih sebagai Perdana Menteri Nyasaland (nama sebelum Malawi). Setelah Nyasaland memperoleh kemerdekaan dan menjadi Malawi pada 1964, Banda

6 Robertson (2002).

THEHINDU.COM

Ada dua kekuatan di dunia; satu pedang yang lainnya pena

- Muhammad Ali Jinnah

There are two powers in the world; one is the sword and the other is the pen.

mengubah sebuah konstitusi baru bersamaan dengan pelantikannya sebagai presiden. Kemudian ia melakukan konsolidasi politik secara cepat dan mendeklarasikan Malawi sebagai negara yang bersistem satu partai (*one party state*) di bawah *Malawi Congress Party* (MCP), yang pada 1970, MCP menyokongnya sebagai presiden partai seumur hidup. Setahun kemudian Banda mendeklarasikan diri sebagai Presiden Malawi seumur hidup.

Kepemimpinannya kontroversial. Ia menerima dukungan Barat selama Perang Dingin, tetapi negara-negara tetangganya meremehkan kebijakan Banda yang menyokong penuh rezim *apartheid* Afrika Selatan. Selama masa jabatannya ia menerapkan pemerintahan totalitarian yang menjadikan Malawi sebagai negara polisi (*police state*). Pada 1993, tekanan internasional dan protes-protes mengemuka, dan akhirnya referendum mengakhiri sistem satu partai dan dewan khusus melucuti segala jabatannya. Banda ikut berkompetisi dalam pemilu presiden yang demokratis setelah itu, tetapi kalah. Ia meninggal di Afrika Selatan pada 1997. Sebagian rakyatnya menyebutnya pahlawan, yang lainnya mencelanya sebagai tiran.[7]

Mengapa Politik Perlu?

MENGAPA POLITIK diperlukan?

Jawaban panjang lebarnya dapat Anda baca nanti di bagian yang membahas tentang kekuasaan. Di sini akan kita bahas seperlunya saja. Tapi begini, mungkin jawaban atas pertanyaan itu dapat kita telusuri dari kisah Mu-

7 Wikipedia.org

hammad Yunus, seorang Aktivis Bank Grameen Bangladesh peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2006.[8]

Intinya: pada suatu hari Yunus menentukan pilihan untuk terjun ke dunia politik. Ia merasa terpanggil ke sana. Pria kelahiran 1940 ini, pasti paham bahwa dunia politik penuh risiko. Bahwa rumus baku dunia politik amat berbeda dengan yang di luar politik. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan — demikian aksioma yang sudah umum sekali di dunia politik. Idealisme kerap terbentur pragmatisme.

Dalam wajahnya yang buruk, politik ditandai oleh banyak hal yang menyakitkan. Dunia politik kerap digambarkan bak dunia mafioso dalam novel Mario Puzo, *The God Father*, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur diametral berupa kesetiaan, pengkhianatan, hadiah, hukuman, pujian, cercaan, harapan sekaligus penyesalan. Butuh mentalitas khusus untuk masuk ke dunia abu-abu ini.

Tetapi, Yunus terobsesi ke sana. Tetapi, bukan ke dunia politik dalam wajahnya yang negatif, melainkan politik yang, tingkat tinggi (*high politics*). Yunus prihatin terhadap kondisi bangsanya yang tengah carut-marut, yang ditandai adanya instabilitas politik, kemiskinan dan korupsi. Partai politik yang dideklarasikannya *Nagorik Shakti* alias Kekuatan Rakyat diimpikannya sebagai partai ideal yang melibatkan banyak orang jujur.

Tapi, seperti kita catat, politik Bangladesh amat dinamis. Sistem demokrasi parlementer yang diterapkan membuka peluang timbul-tenggelamnya kepemimpinan politik secara cepat. Selain itu, tentara juga masih menjadi faktor yang menentukan. Apakah kelak ia akan memeroleh sokongan politik yang riil dari berbagai pihak, dan mampu membentuk kepemimpinan yang kuat dan pemerintahan yang baik? Mutlak Yunus harus bekerja ekstrakeras, sekaligus mampu merubah dengan cepat pola pikir aktivis sosial, ke pola pikir politik kekuasaan yang sarat dengan perebutan dukungan. Dan politik, tidak sesederhana yang dibayangkan Yunus. Dan nyatanya demikian. Partainya, nyaris tak terdengar. Dan kita tahu, eksperimen politik Yunus pun bagai gayung tak bersambut, kalau bukan ia menemui kegagalan.

Apakah politisi itu sejenis profesi?

Bukan. Politisi bukan profesi. Tetapi, ia adalah orang yang terpanggil untuk berpolitik, dan politiknya adalah untuk kesejahteraan. Idealnya begitu. Tapi sayang, orang sering keliru melihat politik sebagai sesautu yang amat pragmatis, di mana politisi, sekedar dimaknai sebagai semata pekerja-pekerja di bidang politik!

8 Soal ini lihat artikel saya "mengapa Politik Perlu", di *Kompas*, 1 Maret 2007.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan secara cepat bahwa politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat

- Deliar Noer

Makanya begitu keran keterbukaan politik terbuka, berlomba-lombalah orang "mencari pekerjaan" sebagai politisi. Ironisnya, bukan panggilan mulia yang menjadi motif penggerak, tetapi lebih ke motif pragmatis, sampai-sampai pernah ada politisi yang berujar, "kalau mau kaya, jadilah politisi!" Betapa berpolitik telah direduksi semata-mata untuk mengejar kekayaan dan perlindungan diri.

Menjadi politisi seharusnya didasari keterpanggilan. Itulah yang menyebabkan seorang dokter, seperti Mahatir Muhammad berkiprah di dunia politik. Juga Corazon Aquino atau Megawati Soekarnoputri yang ibu rumah tangga, Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono atau Prabowo Subianto yang tentara, Abdurrahman Wahid yang aktivis ormas dan LSM, Hidayat Nurwahid yang juru dakwah, Akbar Tandjung yang aktivis ormas, hingga Jusuf Kalla yang saudagar. Kalau para politisi berlatar-belakang berbeda-beda itu berada dalam puncak kekuasaan, perilaku dan kebijakannya lah yang akan dinilai masyarakat.

Kalau tidak dapat disebut sebagai profesi, terus politisi itu apa?

Politisi itu pengabdi. Dan, karena politisi lebih ditempatkan sebagai bukan profesi, maka kualifikasi teknis kepemimpinan politik berbeda dengan kepemimpinan bisnis, profesional dan birokrasi. Otentifikasi kepemimpinan politik tak harus paralel dengan stratifikasi pendidikan formal. Tidak semua pemimpin dunia yang berprestasi dan diakui kehebatannya, lulusan strata satu (S-1). Proses seleksi elite politik di berbagai negara pun tak harus mempersyaratkan calon-calon presidennya minimal lulusan S-1. Harus diakui, secara umum ada keunggulan sarjana dibanding dengan yang bukan, tetapi bukan berarti menghadapkan kepintaran *versus* kebodohan.

Berpolitik merupakan hak setiap orang (warga negara). Ia adalah hak asasi manusia. Lihatlah kembali Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), dan terkhusus lagi Konvenan Hak-hak Politik dan Sipil (1966), yang telah diratifikasi Indonesia (2005). Salah satu pasal dalam konvenan itu menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik (hak dipilih

dan hak memilih) dalam pemilu. Merujuk pada konvenan itu, maka jelas: pembatasan calon presiden harus S-1, langsung bertentangan dengan HAM. Justru tatkala egalitarianisasi dan kesetaraan berubah menjadi feodalisasi.

Jadi, sekali lagi, dunia politik ialah dunia yang terbuka bagi berbagai macam profesi, mengingat politik adalah panggilan. Politisi itu bukan profesi yang orientasinya menumpuk uang dan kekuasaan *an sich*. Menjadi politisi yang "berkuasa" adalah tujuan antara untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi kalau politisi yang sedang tidak berkuasa, maka ia harus mampu memainkan peran yang baik dalam fungsi demokrasi *checks and balances*. Memang tujuan politik adalah kekuasaan, tetapi ingat, kekuasaan adalah "tujuan-antara" saja. Kita khawatir kalau kemudian kecenderungan yang berkembang adalah menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama. Partai lantas menjadi sarang para oligarkhis, yang secara korporatis menjadi mesin pelindung para penyamun dan pengembangbiak para nepotis.

Tadi dikatakan politisi bukan profesi, tetapi pengabdi. Niatnya harus diluruskan ke sana. *Mindset*-nya harus disesuaikan juga ...

Persis. Seorang pedagang alias saudagar misalnya, ketika ia terpanggil terjun ke dunia politik ia harus dapat membedakan mana politik demi kesejahteraan, dan mana dagang demi keuntungan (pribadi dan kelompok). Demikian pula dengan artis, pengacara, dan profesi-profesi lain: ketika masuk politik, maka jadilah politisi yang betul-betul ber-*mindset* politisi.

Jadi mestinya politisi tak boleh berpola pikir bisnis?

Dalam proses politik tak dilepaskan konteks negosiasi untuk mengoptimalkan tujuan, tetapi politik dan bisnis, tetaplah merupakan dua wilayah berbeda. Pemimpin politik tentu tidak cocok untuk berubah dalam sekejap menjadi pemimpin bisnis, demikian pula sebaliknya. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Mantan politisi, mungkin di hari tuanya justru sukses berbisnis. Tak masalah. Mantan pemimpin bisnis, mungkin justru tengah menikmati posisinya secara *enjoy* sebagai pemimpin politik. Tidak soal.

Menurut Fachry Ali munculnya tren politik saudagar pasca-Orde Baru, "adalah hasil perubahan struktural dalam sistem kekuasaan Indonesia".[9] Ini terjadi karena sistem kontestasi memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti "sistem pasar", ketika wewenang negara sebagai pengalokasi kekuasaan terhenti secara mendadak sebagai akibat gerakan reformasi pada 1998. Itu gejala biasa. Kelak, kalau perubahan-perubahan terus terjadi, mungkin para sudagar enggan berpolitik, dan panggung politik pun dido-

9 Fachry Ali, "Saudagar penguasa" *Gatra*, September 2007.

DAWN.COM

Saya masuk ke politik karena konflik antara yang baik dan yang jahat, dan saya percaya bahwa pada akhirnya yang baik akan menang

- Margaret Thatcher

I am in politics because of the conflict between good and evil, and I believe that in the end good will triumph.

minasi yang lain. Yang jelas, di era kedaulatan rakyat ini, rakyatlah yang "menentukan".

Apakah partai politik perlu politisi?

Sebuah pertanyaan yang aneh. Tapi, baiklah, konsisten dengan alur pikir di atas maka jawabnya jelas sekali, *ya* partai butuh politisi! Ini analog dengan pandangan Daniel Dhakidae, tatkala menyindir bahwa perguruan tinggi semakin jauh meninggalkan cita-cita jadi pusat semua keunggulan; media elektronik hanya melahirkan kaum pendengar dan penonton. Lembaga wakil rakyat pun telah demikian berwajah *capitalo-parliamentarism*.[10]

Apa alasan kita mencemaskan partai kok tanpa politisi?

Pertama, partai akan kehilangan "aktor yang sesungguhnya" atau politisi-substansial alias pemain intinya. Politisi adalah sebutan bagi orang yang bergerak di bidang politik, terkhusus para aktivis partai politik, tetapi ia bukanlah sebuah profesi, karena terkait dengan "panggilan untuk mengabdi", bukan panggilan "memperkaya diri". *Kedua*, dominannya aktor-aktor figuran alias politisi-artifisial, yang memandang partai adalah suatu "bisnis politik besar" yang tidak saja bersifat protektif atas aktivitas-aktivitas bisnis para pengurusnya, tetapi juga bak "kapal keruk kapital" yang efektif. Tatkala

10 *Kompas*, 13 Juni 2007.

IN.RBTH.COM

Iklan adalah esensi utama demokrasi

- Anton Chekhov

Advertising is the very essence of democracy.

logika untung-rugi a la bisnis ekonomi telah merambah ke wilayah politik, maka partai menjadi identik dengan perusahaan yang berorientasi profit. Negosiasi politik direduksi secara substansial bahwa yang ada "membeli" atau "dibeli".

Ketiga, partai dimanfaatkan sekedar sebagai tempat numpang lewat, dan menjadi sarang kaum oportunis. Ketika magnit politik partai adalah pragmatisme, tidak ada idealisme sama sekali, maka seberapa kuat daya integrasinya? Ketika pembangunan kelembagaan partai ditopang oleh para aktor yang tidak otentik, lalu, di mana lagi letak kemenarikannya? Dan, sebagaimana saya tulis di *Kompas*,

> Partai politik tanpa politisi, bak kolam ikan tanpa ikan, karena ikan telah terdesak oleh kecebong, kodok, belut dan ular, yang ramai-ramai hendak "bancakan kekuasaan". Ketika politisi terdesak dari habitatnya, maka keseimbangan ekosistem politik secara makro tentu akan "terganggu". Kualitas politik akan minus, karena sering dilangkahinya fatsun politik.[11]

Hmmm, pengibaratan yang tajam ...

Betapa tidak indahnya kalau proses politik kita monoton ditandai pola interaksi transaksional semata-mata, jauh dari corak transformasional. Intinya semuanya harus dikembalikan ke niat. Menjadi politisi niatnya harus betul. Tanggung jawabnya berat, maka harus amanat! Pemimpin tidak boleh rakus. Dengarkan petuah Mark Twain: Kau tidak bisa memiliki semuanya. Di mana kau akan menaruhnya?[12] Petuah Twain ini mengingatkan kita pada psikologi kematian: bukankah hartamu, apa-apa yang kamu

11 M Alfan Alfian, "Bila partai Tanpa politisi", *Kompas*, 20 Juli 2007.

12 Cooper (2007).

punyai selama di dunia tak bisa kau angkut ke alam kubur, bukan?

Oke, yang Anda uraikan di atas lebih ke konteks orang dan partai. Kalau dalam konteks yang lebih luas, apa urgensinya politik dengan negara?

Jelas bahwa tak ada negara tanpa politik. Politiklah yang menggerakkan negara. Inilah yang mengemuka dalam buku David Runciman, *Politics* (2014). Profesor Ilmu Politik *Cambridge University* ini mengulas kekontrasan kondisi dua negara: Denmark dan Suriah:

- Bila Anda hidup di Suriah sekarang (setidaknya pada 2014/2015 kondisinya masih sangat runyam), Anda terjebak pada kondisi yang seperti "neraka" (*hell*): hidup penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekerasan, ketidakpastian, kelaparan, dan keputusasaan. Perang saudara telah meluluhlantakkan Suriah. Puluhan hingga ratusan ribu orang tewas dalam tragedi kemanusiaan yang memilukan di abad ke-21 ini. Banyak yang mengungsi ke berbagai negara. Sebaliknya, Anda merupakan orang yang beruntung manakala hidup di Denmark. Negara ini ialah versi lain dari "surga" (*heaven*): hidup nyaman, sejahtera, damai, tertib, dan beradab.
- Yang membedakan Suriah dan Denmark, bukan kenyamanannya, bukan pula sumber daya alam dan kekayaan khasanah sejarahnya. Perbedaan mereka ialah politiknya. Politik telah menolong Denmark, politik pula yang menjadikan Suriah seperti sekarang.[13]

Mengapa politik menentukan?

Runciman menjelaskan politiklah yang bertanggung jawab apakah suatu negara menjadi negara yang nyaman dan damai, atau sebaliknya berantakan dan penuh konflik. Politik yang dimaksud tentu tak lepas dari para politisi yang berada di balik kebijakan-kebijakan politik. Mereka yang membuat Denmark atau Suriah menjadi yang sekarang. Ada beberapa catatan yang perlu kita camkan:

- Pertama soal kekerasan: kontrol kekerasan ialah jantung dari politik. Politik ialah ikhtiar mencapai tujuan kebaikan, tanpa kekerasan. Artinya, dalam politik ada argumen, dialog, persetujuan, penolakan, titik temu atau konsensus dan sebagainya. Politik ialah jalan damai. Perang ialah jalan kekerasan. Yang terakhir ini terjadi, manakala politik gagal. Hakikat politik ialah mengendalikan kekerasan, dan negara merupakan kekuatan absah untuk itu. Khasanah politik Barat memperkenalkan pandangan Hobbes yang mengkritik negara itu bak *Leviathan* yang suka menindas rakyatnya. Menurut Runciman, secara umum "politik (dunia) kita dewasa ini sudah jauh dari gambaran Hobbes",

13 Runciman (2014:3-4).

Orang kuat itu paling kuat ketika sendirian

- Friedrich Schiller

The strong man is strongest when alone.

namun demikian di sisi lain, "dunia Hobbes itu masih ada". Ia mengingatkan adanya politisi bertangan kotor (*dirty hands*), merekalah yang suka memakai kekerasan sebagai jalan pintas. Cara-cara kotor, tentu saja menodai politik.

- Kedua soal perkembangan teknologi. Ia mempengaruhi perilaku politik dan pemanfaatannya oleh para politisi. Ketiga soal keadilan. Bagaimana konstitusi menjamin keadilan bisa ditegakkan oleh semua. Juga bagaimana demokrasi diaktualisasikan oleh para politisi.[14]

Yang diuraikan Runciman jelas: politik itu kebijakan, seperangkat aturan. Ia melibatkan orang-orang dan lembaga. Kebijakan politik akan menggerakkan yang lain: kepastian hukum, ekonomi yang berkembang, dan sebagainya. Ujungnya ialah kesejahteraan bagi rakyat secara luas. Inilah politik sebagai berkah. Adapun politik bisa menjadi musibah, rentetannya sebaliknya: para politisi gagal mengendalikan kekerasan, gagal membuat kebijakan yang baik dan efektif, gagal menciptakan stabilitas, gagal mengelola konflik: ujung-ujungnya ialah kekacauan.

Pemimpin Politik: Pandangan Nixon

SALAH SATU literatur tentang kepemimpinan politik yang menonjol dalam buku ini, *Leaders* karya Richard Nixon. Apa yang menarik?

Buku ini terbit 1982, sebagai salah satu karya terbaik Nixon dan tetap menarik untuk dibaca.[15] Tentu saja Nixon sudah banyak waktu untuk menulis. Dalam catatan penulisnya, buku ini merupakan gabungan studi dan pengalamannya sebagai Wakil Presiden dan Presiden AS. Richard Milhous Nixon (1913–1994) ialah Wakil Presiden AS ke-36 (1953-1961) dan Presiden AS ke-37 (1969-1974). Nixon merupakan presiden AS pertama yang mengundurkan diri dari jabatannya, terkait Skandal *Watergate*. Nixon mengumumkan berakhirnya Perang Vietnam pada 23 Januari 1973. Pengumuman itu secara tidak langsung menjadi pengakuan AS bahwa mereka kalah perang di kancah Asia Tenggara.

14 Diringkas dari Runciman (2014).

15 Uraian berikut diangkat dari Nixon (1982).

Atas dasar apa Nixon menulis buku itu?

"Apa yang saya pelajari dari pemimpin dan kepemimpinan", catatnya, "merupakan gabungan dari membaca, mengamati (*observation*), mencatat nasihat-nasihat bijak para ahli, dan hikmah atas pengalaman-pengalamannya". Pengalaman menjadi presiden telah membuat Nixon mencatat banyak hal, temasuk bagaimana para pemmpin menciptakan kesepakatan-kesepakatan besar, yang merubah jalannya sejarah. Nixon juga gemar membaca buku biografi para pemimpin besar dunia, dari Winston Churchill hingga Zhou Enlai bahkan di sela-sela kesibukannya di Gedung Putih kantornya. Pemimpin menurut Nixon, mereka yang mampu tampil berbeda. Mereka mampu membikin drama, menjadi legendaris, tetapi yang lebih penting dampaknya. Pemimpin itu mereka yang mampu membuat *audiens* berubah dan mengubah jalannya sejarah.

Apa pemimpin besar yang dimaksud Nixon?

Tidak ada jawaban tunggal. Setiap pemimpin terikat pada kombinasi-kombinasi istimewa antara waktu, tempat dan keadaan tertentu (*particular circumstances*). Pemimpin dan negara tidak dapat dipertukarkan. Maksudnya, Churchill itu besar di Inggris, sementara Konrad Adenauer di Jerman pada waktu, tempat dan keadaan ketika mereka memimpin. Churchill tidak dapat dipertukarkan posisinya Konrad Adenauer. Kebesaran seorang pemimpin, catat Nixon, terkait dengan tiga hal bahwa sosoknya mumpuni (*a great man*), berada dalam "negara besar" (*a great country*), di tengah isu-isu besar (*a great issue*). Churchill misalnya, amat diuntungkan oleh momentum, ketimbang Perdana Menteri Lord Rosebery yang "*great man and small events*". Orang besar perlu peristiwa-peristiwa besar. Sosok "manusia kerdil" (*the small man*) jelas gagal menjadi pemimpin besar, tatkala bangsa besar yang dipimpinnya terlanda krisis hebat. Sementara sosok "manusia besar" (*the large man*) yang memimpin negara kecil, mungkin sudah berupaya mendemonstrasikan segenap kehebatannya, betapapun tak pernah memperoleh pengakuan. Tetapi, ada juga "manusia besar" dalam sebuah negara besar, yang sekadar berada di bawah bayang-bayang "raksasa". Zhou Enlai, misalnya adalah sosok bercahaya di bawah Mao.

Soal "manusia kecil" itu, kita jadi ingat kalimat yang sering dilontarkan Bung Hatta: kita berada di abad yang besar, tetapi masih menjumpai manusia-manusia kerdil. Mungkin, kaitannya adalah soal mentalitas ya?

Mentalitas, juga kapasitas, kapabilitas, dan totalitas kepemimpinan. Komentar Bung Hatta itu dikutipnya dari Schiller, yang menyebut suatu fenomena kontradiktif bahwa "suatu masa besar dilahirkan abad. Tetapi

masa besar itu menemui manusia kecil" (*Rine grosse Epoche hat das Jahrhumdert geboren. Aber der grosse Moment findet ein kleines Geschlect)*.[16] Friedrich von Schiller (10 November 1759–9 Mei 1805) adalah filsuf, penyair dan dramawan Jerman.

Ini juga pertanyaan sela. Bagaimana menjelaskan kehadiran orang-orang besar? Bukankah kata Thomas Carlyle, sejarah adalah biografinya orang-orang besar?

Dalam metodologi sejarah ada pendekatan orang besar. *The Great man theory*. Salah satu peletak dasar teori ini, Thomas Carlyle. Teori orang besar menjelaskan dampak dari kiprah orang-orang besar atau pahlawan (*hero*) dalam sejarah. Orang besar yang dimaksud ialah yang memiliki pengaruh yang besar (*highly influential individuals*), yang memiliki kharisma personal, kejeniusan intelektual, dan secara politis meninggalkan jejak besar (*great political impact*). Para peneliti banyak memakai pendekatan ini untuk memotret *orang-orang besar* pada Perang Dunia II seperti Winston Churchill, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franklin Delano Roosevelt, Joseph Stalin, Hideki Tojo, dan sebagainya, dan menerawang pula segenap peristiwa sejarah yang secara langsung terkait dengan dampak kepemimpinan mereka.

Bagaimana penjelasan selanjutnya mengenai "pemimpin besar" tadi?

Pemimpin besar, catat Nixon, tidak selalu dikenal sebagai semata-mata "orang baik" (*good men*). Peter yang Agung dari Rusia adalah seorang despotis. Julius Caesar, Alexander Agung, dan Napoleon Bonaparte, misalnya dikenal sebagai negarawan (*statesmenship*) untuk penaklukan-penaklukan mereka. Pemimpin besar dalam sejarah, adakalanya dilihat dari keahliannya berpolitik, dengan penilaian moralitas tersendiri, memiliki kekuatan yang signifikan untuk merubah wajah sejarah bangsa dan peradaan. Jalan untuk menjadi pemimpin besar berbeda-beda. Churchill dan Stalin, dengan jalannya sendiri-sendiri, sama-sama pemimpin besar. Tanpa Churchill mungkin Eropa Barat menjadi bangsa-bangsa yang terkungkung, tanpa Stalin mungkin Eropa Timur menjadi bangsa-bangsa yang bebas. Nixon membahas konteks pemimpin, bukan pada bagaimana upaya memperoleh kekuasaan semata, tetepi juga tanggung jawabnya. Setiap person pemimpin memiliki tujuan, visi, dan menjadi pendorong bagi perubahan-perubahan penting, yang gemanya meluas melintasi batas-batas negara dan abadi pada abad dimana ia hidup dan menjadi pemimpin.

Bagaimana dengan faktor sejarah?

16 Hatta (2015:287).

Tak ada orang besar hidup sia-sia.
Sejarah dunia tak lain biografi orang-orang besar

- Thomas Carlyle

No great man lives in vain. The history of the world is but the biography of great men.

Menurut Nixon, banyak kisah sejarah yang hanya berisi cuplikan-cuplikan peristiwa insidental tentang orang yang memainkan pengaruh. Para pemimpin tidak sebatas itu. Mereka mencipta peristiwa-peristiwa. Mereka membuat segala sesuatunya menjadi berbeda. Mereka merubah wajah sejarah. Pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang besar memiliki kemampuan yang unik di dalam menciptakan perubahan yang luar biasa dengan menggabungkan kekuatan (*power*) dan visi. Pemimpin besar memiliki visi besar yang menjadikannya inspirasi untuk memajukan bangsanya. Namun, catatnya, seorang pemimpin besar berada di tengah-tengah kecintaan dan kebencian rakyatnya. Rakyat, bahkan terkadang acuh-tidak acuh padanya. Pemimpin besar berjalan di atas visinya.

Sepenangkapan saya dari penjelasan di atas, pemimpin besar itu dilihat bukan jalan atau caranya menjadi pemimpin, tetapi apa yang diperbuatnya setelah *de facto/de jure* ia jadi pemimpin. Begitukah?

Benar. Dalam buku ini Churchill, Charles de Gaulle, Douglas Mc Arthur, Konrad Adenauer, dianggap sebagai pemimpin besar, sama dengan Nikita Khrushcev dan Zhou Enlai. Padahal jalan atau cara mereka menjadi pemimpin berbeda-beda. Dan apalagi kemudian, satu sisi mereka memiliki pandangan dunia yang demokratis, sisi lain sebaliknya. Khrushcev dan Enlai, adalah pemimpin-pemimpin negara Komunis bukan? Tapi Nixon tetap menempatkan mereka sebagai pemimpin besar. Tentu ada pertimbangannya tersendiri. Tetapi, jangan lupa, buku ini juga membahas pemimpin-pemimpin besar dan berpengaruh dari dunia ketiga, seperti Soekarno dari Indonesia, Nkrumah dari Ghana, dan Nehru dari India.

Soekarno? Dicatat sebagai pemimpin besar?

Ya. Coba simak halaman 259 buku itu. Ketiga yang disebut di atas, oleh Nixon dicatat sebagai model pemimpin dan kepemimpinan revolusi antikolonial. Soekarno sendiri dicatat sebagai sebagai "*charismatic leader who led a succesful struggle for independence*". Nixon menulis:

> *Soekarno was the best example I know of a revolutionary leader who could tear down a system expertly but could not focus his attention on rebuilding it. The*

THEGUARDIAN.COM

Kekuasaan adalah retorika paling persuasif
- Friedrich Schiller
Power is the most persuasive rhetoric.

raw materials were there: Indonesia, next India and the United States the most populous nation in the non-Communist world, had more natural resources than any other Southeast Asian nation, but not the proper leadership. Soekarno temporary distracted his people from their problems, but he never even began to solve them.[17]

Jadi, Bung Karno dibilang sebagai contoh sempurna seorang pemimpin revolusioner. Apa kesan Nixon tatkala Bung Karno berkunjung ke Amerika?

Berikut kutipan lanjutannya,

Soekarno's charisma worked on Americans as well as Indonesians. In 1956 I escorted him when he arrived in United States for a state visit. As part of the welcoming ceremonies, we went to the District Building, the capital's city hall, where Soekarno was to receive the key to the city. He was gracious and good-humored, and struck a dashing figure with his khaki uniform, Muslim pitji cap, and ivory-inlaid swagger stick. Suddenly, to the horror of our security detail but the delight of the crowd, he plunged across the police lines, shaking hands with the men, striking up animated conversations with the children, and kissing the women, most of whom squealed with delight when he did so.[18]

Bung Karno itu ramah dan suka humor, suka pakaian kebesaran, konsisten memakai peci dan tongkat. Tak disangka ia menerjang garis polisi saat arak-arakan saat penyambutan, bercakap-cakap, bersalaman dan bahkan mencium anak-anak dan perempuan yang menyambutnya. Satu tindakan yang membahayakan dari segi pengamanan. Tapi Bung Karno tak mau tahu. Ya begitulah Bung Karno: ia suka dielu-elukan, dan membalas

17 Nixon (1982:266).

18 Nixon (1982:268).

Hanya apabila Anda berada di lembah terdalamlah, Anda bisa tahu bagaimana megahnya berada di gunung tertinggi

- Richard Nixon

Only if you have been in the deepest valley, can you ever know how magnificent it is to be on the highest mountain.

yang mengelu-elukan itu dengan setimpal. Ini merupakan bagian dari gaya kepemimpinannya yang, meminjam Feith, *solidarity maker*, sebagaimana diuraikan di depan. Singkat kata Bung Karno memang mempesona.

Pemimpin Politik: Pandangan Mandela

SELAIN NIXON, kita bisa menengok kepemimpinan *a la* Nelson Mandela ...

Baik. Dalam rangka memperingati sembilan puluh tahun Nelson Mandela Majalah *Time* memuat laporan utama tentang delapan pelajaran kepemimpinan dari sang maestro. Laporan itu dipersiapkan oleh Richard Stengel yang pada 1990-an bekerja penuh mempersiapkan otobiografi Nelson Mandela, *Long Walk to Freedom*.[19] Angka delapan mengingatkan pada astabrata, dalam khasanah kepemimpinan Jawa. Tapi, saya kira hanya kebetulan saja. Tak ada salahnya bila delapan pelajaran kepemimpinan Mandela itu, kita sebut *astabrata a la Mandela*.

Apa pelajaran pertamanya?

Pelajaran pertama, *courage is not the absence of fear — it's inspiring others to move beyond it*. Orang yang punya keberanian bukan berarti sudah mati rasa, tetapi ia telah mampu melewati batas-batas rasa takut itu sendiri. Mandela itu manusia juga: saat pesawat kecil yang ditumpanginya waktu kampanye oling, kelihatannya ia santai. Semua yang ada heran. Tetapi tatkala pesawat berhasil mendarat, ia mengatakan, "Saya takut juga". Tatkala ia disidang dan dipenjarakan di Pulau Robben, ia mengatakan, "*Of course I was afraid!*". Tetapi, ketakutan itu bukan pasif, tetapi justru menginspirasi keberanian.

Selanjutnya?

Pelajaran *kedua* dan *ketiga lead from the front — but don't leave your*

19 *Time*, Edisi 21 Juli 2008.

FLAVORWIRE.COM

Nelson Mandela, bagi saya, ialah negarawan wahid di dunia ... dalam arti harfiah, yang tidak memecahkan semua masalah dengan senjata. Ini benar-benar luar biasa

- Toni Morrison

Nelson Mandela is, for me, the single statesman in the world. The single statesman, in that literal sense, who is not solving all his problems with guns. It's truly unbelievable.

base behind; dan lead from the back — and let others believe they are in front. Petuah ini mengingatkan ujaran Ki Hadjar Dewantoro, *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya mangun Karsa, Tut Wuri Handayani*. Pemimpin yang tampil di depan, jangan lupa basis, akar. Pemimpin bisa berposisi di belakang, tak harus selalu di depan. Pemimpin harus punya jangkauan panjang. Pemimpin adalah manusia sejarah, yang jangkauan pemikirannya bukan harian atau mingguan, tapi dekade. *He always played for the long run*. Adalah bijak, kata Mandela, membujuk orang-orang agar melakukan sesuatu dan membuat mereka berpikir sesuai dengan gagasan mereka sendiri. Pemimpin tinggal mengarahkan.

Selanjutnya lagi?

Pelajaran *keempat* dan *kelima*, *know your enemy — and learn about his favorite sport; dan keep your friends close — and your rivals even closer*. Ini pelajaran penting bahwa lawan harus dikenali dengan baik, sebab dengan demikian bisa diketahui kelebihan, kekuatan, sekaligus kekurangan dan kelemahannya. Mandela percaya bahwa kalau ia bisa merangkul lawan-lawannya, maka itulah jalan untuk mempengaruhi dan mengendalikannya. Para rival akan lebih berbahaya bila bertindak atas kemauan mereka sendiri, ketimbang apabila telah berada dalam lingkaran pengaruh. Petuah Mandela ini, mirip dengan filosofi politik pangku di khasanah kekuasaan Jawa: ketika musuh berhasil kita pangku, "matilah" ia. Bagi Mandela, ia mengharapkan loyalitas. Tetapi, ia tidak terlampau terobsesi dengannya. Katanya, "*people*

Aku bukan juru selamat, tetapi aku orang biasa yang menjadi pemimpin karena keadaan yang luar biasa

- Nelson Mandela

I was not a messiah, but an ordinary man who had become a leader because of extraordinary circumstances.

act in their own interest." Itu alamiah. Ia tidak percaya bahwa daya pesona saja mampu membuat mereka patuh. Yang penting membuat mereka percaya atas kepemimpinan kita.

Pelajaran keenam?

Pelajaran *keenam, appearances matter — and remember to smile*. Ini soal citra diri. Pemimpin harus menjaga penampilan, tepatnya kepribadian. Pemimpin yang murah senyum, itu lebih baik, ketimbang yang cemberut dan berwajah pesimis. Tatkala Mandela menjadi kandidat Presiden pada 1994, ia tahu bahwa simbol masih dianggap penting, ketimbang substansi. Ia bukan seorang yang jago pidato, dan orang cepat bosan pada menit-menit pertama. Tapi ia sendiri adalah ikonografi yang semua orang sudah tahu. Ia pun ber-*toyi-toyi*, menari tarian khas warga sebagai simbol perjuangan, secara mempesona, bahagia, dan sepenuh senyum. Orang-orang takjub, walaupun Mandela baru lepas dari penjara, ia tidak merasa terlunta-lunta, pahit dan menunjukkan sikap benci. Ia selalu mengatakan, "*Forget the past*", walaupun sejatinya ia tidak bisa melupakannya juga.

Selanjutnya?

Palajaran *ketujuh, nothing is black or white*. Ini menunjukkan sikap anti-diskriminasi. Mandela merasa nyaman dalam kontradiksi: sebagai politisi ia pragmatis, melihat dunia dengan nuansa tak terbatas. Tapi, sebagai negarawan (*statesman*), Mandela bijak. Ia harus melihat segala permasalahan secara obyektif. *Every problem has many causes.* Penyelesaiannya pun harus secara bijak.

Terakhir?

Pelajaran *kedelapan, quitting is leading too*. Petuah ini mengingatkan agar kita tidak kemaruk kekuasaan. Pemimpin selalu instrospektif dan tahu kapan waktunya berhenti, dan dalam demokrasi regenerasi dan sirkulasi kepemimpinan harus berjalan sesuai mekanisme. Pemimpin akan tetap pemimpin walaupun ia telah berhenti dari posisinya sebagai pejabat publik dan hidup tanpa jabatan. Kita semua belajar dari Mandela, sosok kepala batu penghuni penjara Pulau Robben Afrika Selatan. Tapi kemudian menjelma menjadi sosok yang seimbang, bijak dan disiplin. Ia telah menemukan

kedewasaanya sebagai seorang pemimpin dan guru bangsa kaliber dunia.

Apa benang merah dari Astabrata Mandela ini?

Apa yang diajarkan oleh Mandela di atas, universal sekali. Tabiat yang konsisten pada prinsip dan etos rekonsiliasi, merupakan hal yang sangat mengesankan dari sosok yang selalu tampil dengan senyum dan pakaian batik ini. Nelson Mandela, orangtua itu, telah meninggalkan banyak pelajaran yang justru tidak banyak keluar dari kata-katanya, tetapi tindakan dan perbuatannya. Ia mengingatkan pada sosok pemimpin humanis lain seperti Mahatma Gandhi di India. Kelapang-dadaannya, bahkan mengingatkan sosok para Nabi dalam sejarah agama-agama. Stengel sendiri menyebut Mandela sebagai *Saint Secular*, seorang Santo Sekuler.

Negarawan

TERKAIT DENGAN uaraian di atas, bahwa berpolitik itu panggilan, hal itu tampaknya terkait pada istilah negarawan. Apa yang dimaksud dengan negarawan itu?

Negarawan (*statesman*) merupakan istilah yang cukup populer dalam perbendaharaan bahasa politik. Ia kerap dikonotasikan politisi paripurna. Seorang negarawan merujuk pada seorang politisi atau tokoh yang berprestasi (berjasa) satu negara yang telah cukup lama berkiprah dan berkarir di kancah politik nasional dan internasional. *A statesman is usually a politician or other notable figure of state who has had a long and respected career in politics at national and international level*.[20] Tokoh yang berjasa (*worthy*) pada bangsa dan negara tentu merupakan tokoh yang mengabdikan pikiran dan tenaganya bagi kemajuan dan kemakmuran bangsanya.

Kepemimpinan politik yang negarawan terkait komitmen kebangsaan dan kenegaraan. Sikap tersebut menuntut para politisi meminimalisasi kepentingan pribadi dan kelompok dan memaksimalisasi kepentingan bangsa (negara) yang lebih luas.[21] Kiki Syahnakri mencatat negarawan adalah karakter, sikap, visi dan orientasi yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan kerakyatan melampaui ego seorang pemimpin. Menurutnya,

> Seseorang dapat disebut sebagai negarawan (meski secara formal tidak mengembang posisi kenegaraan), jika senantiasa memikirkan yang terbaik ntuk bangsa-negara dan memegang komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi kebangsaan, kerakyatan, bahkan kemanusiaan universal melalui ladang peng-

20 Wikipedia.org

21 Tandjung (2007b).

Perbedaan besar negarawan dan pengejar kedudukan ialah yang satu melihat ke depan, sementara yang lain hanya saat ini

- Edmund Burke

The great difference between the real statesman and the pretender is, that the one sees into the future, while the other regards only the present.

abdian atau profesinya.[22]

Jadi, negarawan itu orang yang selalu berpikir dan berkorban demi bangsa dan negaranya, tanpa pamrih?

Begitulah. Negara-bangsa adalah "segalanya". Maka, idealnya, ketika kader partai, kemudian terpilih menjadi pejabat negara, maka berlakulah adagium "ketika tugas negara dimulai, maka kepentingan politik berakhir". Artinya, seorang pejabat negara harus berkonsentrasi untuk "mengurus negara" dengan benar, walaupun tanpa harus menghapuskan identitas latarbelakang politiknya sama sekali. Karena, identitas politik seorang politisi (negarawan) senantiasa melekat padanya. Yang penting, seorang pemimpin politik yang negarawan adalah yang paham betul skala prioritas: mana yang lebih didahulukan (kepentingan bangsa dan negara lebih luas) dan yang tidak. Filosof Aristoteles mengatakan,

> *What the statesman is most anxious to produce is a certain moral character in his fellow citizens, namely a disposition to virtue and the performance of virtuous actions.*[23]

Seorang negarawan memiliki karakter moral yang pasti, di mana para pengikutnya dapat meneladani sepenuh hati. Seorang negarawan memiliki watak yang baik dan senantiasa menjaga citra dirinya dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kita renungkan lagi sebuah pandangan James Freeman Clarke: "Seorang politikus memikirkan soal pemilu yang akan datang, seorang negarawan memikirkan generasi yang akan datang".[24] Pernyataan ini menyiratkan pesan negarawan itu melebihi, atau tak sekadar politisi biasa.

Untuk bisa menjadi negarawan, kalau demikian suatu pencapaian yang sulit kiranya ...

22 Syahnakri (2008).

23 Brainyquote.com

24 Brainyquote.com. *A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.*

Seorang politisi ... ialah orang yang berpikir untuk pemilu berikutnya; sedangkan negarawan memikirkan generasi berikutnya

- James Freeman Clarke

A politician ... is a man who thinks of the next election; while the statesman thinks of the next generation.

Perlu laku moral yang jelas. Kita renungkan catatan Syahnakri,

> Salah satu kendala bagi terbentuknya karakter kenegarawanan adalah *power-oriented* yang obsesif. Tendensi mengoleksi dan mengakumulasi segala sumberdaya untuk merebut/mempertahankan kekuasaan tampak begitu telanjang.[25]

Keterangan demikian, menegaskan, setidaknya sebagaimana dicatat Indra Tranggono, antara *negarawan* dan "penyelenggara negara" berbeda arti. Negarawan tidak sebatas "ahli negara", tetapi juga memiliki dimensi etik-ideologis, yakni ahli/pakar tata-kelola negara — eksekutif, legislatif, dan yudikatif — yang memiliki kapasitas patriotik, watak membela Tanah Air. Adapun "penyelenggara negara" lebih bermakna teknis, yakni tenaga yang berfungsi menyelenggarakan aktivitas negara baik secara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berdasarkan maknanya, catat Tranggono,

> ... negarawan lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggara negara. Menjadi negarawan otomatis menjadi penyelenggara negara yang baik. Namun, menjadi penyelenggara negara tidak otomatis menjadi negarawan. Degradasi makna? Ya.
>
> ... Dalam pemaknaan ideal, negarawan adalah sosok yang berpikir, bekerja, dan berkarya (memproduksi nilai-nilai) dengan penuh etik dan etos hingga melampaui dirinya. Ia mampu menenggelamkan kepentingan pribadi, kelompok, dan keprimordialannya demi kepentingan bangsa yang lebih besar, penting, bermakna, dan mendesak. Negarawan melakukan transendensi kognisi, afeksi, dan praksis/perilaku dalam mengemban tugas-tugas politik berbasis kemanusiaan dan kebangsaan. Lahirlah tindakan profetik yang membebaskan manusia dari berbagai penindasan sekaligus meninggikan eksistensinya. Karena itu, negarawan juga menunaikan tugas berdimensi kenabian.
>
> Jagat politik nasional yang serba liberal, pragmatik, dan penuh aroma transaksi perniagaan semakin jauh dari cita-cita konstitusi. Dalam jagat politik yang keruh penuh tuba sangat sulit muncul sosok negarawan. Yang justru berkecambah adalah para pekerja politik yang memiliki uang dan kekuasaan. Mereka pun memiliki predikat "netral", yakni penyelenggara negara yang se-

25 Syahnakri (2008:206).

USHMM.ORG

Politik itu seni dan bukan ilmu, dan apa yang diperlukan bagi penguasaannya bukan rasionalitas insinyur tapi hikmat dan kekuatan moral negarawan

- Hans J. Morgenthau

Politics is an art and not a science, and what is required for its mastery is not the rationality of the engineer but the wisdom and the moral strength of the statesman.

jatinya tidak beda dengan tenaga teknis biasa dan jauh dari nilai-nilai ideologis, patriotik, dan bahkan profetik. Sudah lama bangsa kita merasakan peran hampa penyelenggara negara dan merindukan kehadiran banyak negarawan.[26]

Adakah sosok yang kerap dibicarakan orang karena didudukkan sebagai negarawan?

Sir Winston Leonard Spencer Churchill, dipanggil Churchill misalnya, dikenal sebagai negarawan Inggris. Ia tersohor karena ia pernah menjadi Perdana Menteri Inggris periode 10 Mei 1940 hingga 27 Juli 1945, saat-saat yang menentukan dalam sejarah, karena adanya Perang Dunia II. Churchill meninggal 24 Januari 1965 dalam usia 91 tahun. Pada usia yang ke-81 tahun, ia mengundurkan diri dari dunia politik.[27]

Kita ambil sosok lain, bagaimana dengan Ahmedinejad?

Jelas, bagi rakyat Iran Mahmoud Ahmedinejad tidak saja seorang presiden, tapi juga negarawan, sebagaimana para pendahulunya, termasuk tentu saja Ayatollah Khomeini. Ahmedinejad cukup *nyentrik*. Penampilannya jauh beda dibanding para Mullah. Ia tak berjubah da terkesan sederhana sekali. Pria yang berwajah ramah ini telah menjadi ikon perlawanan terhadap hegemoni adidaya. Sejak Rezim Shah Reza Pahlevi ditumbangkan oleh sebuah revolusi yang menegangkan ditandai dengan kepulangan Khomeini dari Perancis 1979, Republik Islam Iran kian berhadapan dengan Barat (AS).

26 Indra Tranggono, "Negarawan dan Penyelenggara Negara", *Kompas*, 10 Oktober 2015.

27 Wikipedia.org

Negeri Mullah ini, terus menjadi "sasaran bidik" mereka yang berkepentingan menjaga konstelasi politik regional Timur Tengah.

Selain nama-nama di atas, para pemimpin negara harusnya negarawan bagi negaranya masing-masing?

Sesuai dengan konteksnya, mestinya begitu. Kecuali, para penguasa tiran atau despotik, yang justru dibenci oleh rakyatnya, karena, sang pemimpin tidak amanah. Para sejarawan yang kritis biasanya berupaya untuk memberikan catatan-catatan kritisnya dalam menakar seorang tokoh: apakah ia masuk kategori negarawan (pahlawan) atau tidak. Atau setidaknya dalam menimbang kadar kenegarawanan sang tokoh. Namun, tidak seperti gelar pahlawan, kenegarawanan seseorang tampaknya tak perlu pengakuan formal. Dalam banyak kasus, terdapat negarawan yang tidak kunjung memperoleh gelar pahlawan secara formal.

Refleksi Para Negarawan Bangsa

PERLUKAH KITA meneladani para pemimpin bangsa alias para negarawan kita?

Jawabnya jelas bukan hanya perlu tapi wajib. Dan ini uraiannya akan bisa luas. Tetapi begini, ini hanya refleksi sekadarnya: saya hendak memulainya dengan ulasan Emha Ainun Nadjib saat mengkritisi kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid: bahwa kalau hendak menuntaskan problematika multikrisis Indonesia, maka dalam diri Gus Dur, seharusnya ada tiga sosok yang perlu dimiliki: Soekarno, Sudirman, dan Hasyim Asy'ari. Maksudnya, Cak Nun hendak mengingatkan waktu itu bahwa Gus Dur punya potensi untuk menggabungkan nilai-nilai atas tiga sosok itu

Bagaimana dengan nilai Soekarno?

Nilai Soekarno mengajarkan antara lain kecanggihan nasionalismenya. Sikap kenegarawanannya yang begitu kental dikaitkan dengan visi persatuan dan kesatuan (integrasi) bangsa Indonesia. Ambil hikmahnya saja. Diperlukan nilai Soekarno untuk mempertajam komitmen nasionalisme Keindonesiaan.

Nilai Sudirman?

Nilai Sudirman, mengajarkan penghargaan mendalam terhadap hubungan sipil-militer, sebab Sudirman merupakan sosok militer yang dekat dengan kalangan sipil. Sudirman adalah sosok tentara yang arif dan bijak-

INDEPENDENT.CO.UK

Tempat tergelap di neraka disediakan bagi mereka yang menjaga netralitas di saat krisis moral

- Dante Alighieri

The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis.

sana, ia memiliki garis strateginya sendiri yang tegas dan cerdas. Kita masih ingat, tatkala Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain tokoh sipil melakukan pendekatan moderat terhadap Belanda, Sudirman memilih tetap bergerilya. Singkat kata ia ahli strategi, sekaligus sosok negarawan yang rendah hati, ulet, dan pantang menyerah.

Nilai Hasyim Asy'ari?

Hasyim Asy'ari adalah sosok kiai alias ulama nasionalis yang kontribusinya terhadap kemerdekaan bangsa tak diragukan. Hasyim Asy'ari yang tak lain kakek Gus Dur sendiri adalah penyuplai spirit keagamaan sekaligus keindonesiaan yang teguh dan kharismatik di tengah massanya. Kiai Hasyim Asy'ari adalah simbol penyuplai motivasi spiritual, yang tidak perlu menyombongkan diri, dan menonjolkan diri. Ia lebih dari sekedar bapak dari banyak santrinya. Menurut Dhofier terdapat empat faktor penting yang melatarbelakangi watak kepemimpinan Hasyim Asy'ari: (1) Ia lahir di tengah-tengah meningkatnya kebangkitan Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia; (2) Orangtua dan kakeknya adalah pemimpin pesantren yang berpengaruh di Jombang, Jawa Timur; (3) Ia sendiri dilahirkan sebagai seorang yang cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan; dan (4) Berkembangnya perasaan anti-kolonial.[28]

Gabungan dari tiga nilai itu, apa jadinya?

28 Zamakhsyari Dhofier, "KH Hayim Asy'ari Penggalang Islam Tradisional", *Prisma* No. 1/1984.

Singkat kata: komitmen nasionalisme, ahli strategi, dan penyuplai spiritual merupakan refleksi dari ketiga sosok tersebut. Waktu itu muncul serentetan pertanyaan dari Cak Nun, misalnya apakah Gus Dur sebagai presiden telah memiliki ketiga sifat itu? Apakah komitmen nasionalisme Gus Dur mampu mewujud ke dalam perkembangan Indonesia yang semakin lebih baik dari keterkoyakan potensi disintegrasi bangsa? Apakah Gus Dur seorang ahli silat yang baik, yang tahu strategi-strategi "bertempur" dalam perjuangan menjaga Indonesia yang kita cintai ini? Apakah Gus Dur juga merupakan seorang penyuplai spiritual yang canggih di tengah krisis mental di Indonesia ini? Bukankah bila Gus Dur memiliki tiga sosok itu dalam dirinya, ia akan menjadi pendekar sakti dalam mengatasi problematika bangsa?

Tapi, sayang dinamika politik berkehendak lain: Gus Dur jatuh dari kekuasaannya ...

Semua ada hikmahnya. Bagaimanapun Gus Dur tetap "manusia besar" dalam sejarah politik Indonesia, terutama karena dikenal sebagai sosok pemimpin yang visi pluralis dan demokrasinya menonjol, kendatipun seringkali dipandang kontroversial. Saya pernah menulis di *Kompas*, "Orang Besar, dari Mana Datangnya?" sebagai semacam obituari K.H. Abdurrahman Wahid:

> K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat. Sebuah pertanyaan terlintas, dari mana datangnya orang besar? Tidak dapat dimungkiri, terlepas dari ragam kontroversi, Gus Dur itu orang besar milik bangsa. Gus Dur sudah jadi milik semua, termasuk kalangan minoritas, yang mengusungnya sebagai tokoh pluralisme.
>
> Gus Dur, oleh berbagai kalangan dengan sudut pandang masing-masing, merupakan sosok multiperspektif. Menurut Jaya Suprana, Gus Dur yang humoris itu hanya permukaannya saja, hatinya humanis. Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) Gus Dur kerap dianggap sebagai seorang wali. Bagi yang berseberangan pandangan, Gus Dur hanyalah sosok yang menyebalkan.
>
> Bagi yang dekat dan rasional, Gus Dur itu manusia biasa yang mempunya sisi makro dan mikro. Gus Dur makro hadir dengan ikon dan tema-tema besar, seperti humanisme, pluralisme, demokrasi, dan universalisme. Sementara itu, Gus Dur mikro kontradiktif dengan tematema besar tersebut sehingga memunculkan penilaian bahwa Gus Dur itu "otoriter" dan tidak konsisten alias *semau gue*.
>
> Akan tetapi, Gus Dur tetaplah orang besar. Gus Dur pernah menjadi presiden. Gus Dur telah memperoleh momentum politik yang tepat pasca-Pemilu 1999 ketika proses politik di MPR bermuara pada munculnya sosok "juru penengah" yang diyakini mampu merangkul semua pihak.

GOGOPIXLIBRARY.COM

Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara

- Jenderal Sudirman

Salah tempat

GUS DUR adalah sebuah resultan politik. Akan tetapi, tanpa menjadi presiden pun, Gus Dur sesungguhnya tetap orang besar. Ia intelektual yang mempunyai integritas, punya komunitas kultural NU dan partai politik. Ia pemikir yang punya massa dan jaringan pertemanan yang luas.

Justru politik kekuasaan membuat kebesaran Gus Dur teruji. Banyak kebijakannya yang "revolusioner" dan wacananya yang "terlampau berani". Gus Dur meresmikan tahun baru Imlek, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, membubarkan Departemen Sosial, Departemen Penerangan, dan Kementerian Pemuda dan Olahgara, menjajaki kemungkinan kerja sama politik dengan Israel, hingga meminta maaf kepada kalangan eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban politik. Ada yang disambut baik, ada yang menyisakan kontroversi dan penolakan.

Banyak yang mengkritik Gus Dur sewaktu menjadi presiden, yang sengaja atau tidak ternyata kebijakan-kebijakannya telah menjadi *blunder* bagi stabilitas kekuasaannya. Gus Dur akhirnya dilengserkan "di tengah jalan" melalui Sidang Istimewa MPR. Tukang kritik, Butet Kartaredjasa, menilai Gus Dur itu tokoh besar yang ketika menjadi presiden salah tempat karena sejatinya tempatnya adalah punakawan. Gus Dur itu kiai Semar yang bijak. Ketika menjadi

presiden, maka tak heran apabila banyak memunculkan "kegegeran".

Betapapun demikian, di tengah wacana dan upaya mendekonstruksi banyak hal, Gus Dur tetap dikagumi kawan dan lawan. Sepeninggalnya tidak ada sosok yang mampu menandinginya sebagai orang besar yang khas di tengah-tengah realitas keindonesiaan yang penuh anomali.

Melampaui darah biru

GUS DUR bukan saja sosok pemimpin (kultural dan politik) yang hanya dapat dijelaskan dalam perspektif trait theory. Dalam perspektif tersebut, orang besar itu dilahirkan. Aspek genetis alias "darah biru"-lah yang paling banyak memengaruhi. Darah kepemimpinan Gus Dur mengalir dari kakeknya, KH Hasyim Asy'ari dan ayahnya, KH Wahid Hasyim. Dalam tradisi NU, Gus Dur memiliki legitimasi "darah biru" yang sangat kuat.

Akan tetapi, Gus Dur memproses kehadiran dirinya tanpa sekadar mengandalkan legitimasi "darah biru". Ia sosok yang sangat disiplin di dunianya, keintelektualan. Dalam konteks inilah, ia menjadi manusia penjelajah di dunia wacana, berdiskusi, dan beraktivitas sosial. Ia kritis terhadap metodologi pembelajaran perkuliahannya sewaktu di Mesir. Ia tumbuhkan metodologi ilmu di dalam dirinya. Akan tetapi, ia pun mempunyai kepekaan budaya yang tinggi, humanis, dan sederhana. Visinya jauh menjangkau di luar komunitas NU.

Gus Dur, karenanya, tidak hanya sebatas elite, yang terseleksi secara "genetis", tetapi leader yang memiliki visi tajam, wawasan budaya yang baik, dan teruji. Gus Dur adalah sosok pemimpin yang jauh melampaui modal genetik yang dimilikinya, dan sesuai dengan nama aslinya, Abdurrahman Addhakil, ia kualitatif, "mendobrak" dan "menaklukkan". Ia unik dan indonesiawi.[29]

Tak hanya ketiga tokoh di atas, kita punya banyak negarawan, terlepas dari kontroversi yang mengikutinya, pun apakah mereka telah diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional atau tidak ...

Benar. Sesungguhnya telah banyak negarawan kita. Sebaiknya kita ambil sisi-sisi positif atas apa yang pernah mereka lakukan, suatu ketika, dan memang ini terkait dengan hal-hal seperti nasionalisme, pengorbanan, sikap sederhana, mengayomi rakyat, perjuangan untuk merdeka, dan sebagainya. Berikut ini sekedar catatan yang saya cuplik dari berbagai sumber, tanpa mengurangi posisi dan peran penting para tokoh (negarawan) lain, yang tak sempat tertuliskan satu per satu di sini. Yang mengemuka di sini adalah siap kenegarawanan mereka dalam suatu masa dan tantangannya. Saya berharap Anda bisa menambahkan banyak lagi kisah dari para tokoh bangsa.

29 *Kompas*, 5 Januari 2010.

Di dalam negeri, Anda selalu menjadi politisi. Ketika Anda di luar negeri, Anda hampir merasakan diri Anda sebagai negarawan

- Stockton

At home, you always have to be a politician. When you are abroad, you almost feel yourself to be a statesman.

Soekarno: Peranan paling besar Soekarno dalam sejarah Indonesia terlihat terutama saat terjadinya kemacetan. Pada tahun 1927 Soekarno tampil ke depan menolong pergeraan nasional dan memberikan arah dan arti baru. Baik situasi maupun pribadinya memang paling cocok dalam keadaan-keadaan tersebut. Pada saat pembentukan Negara Indonesia, sekali lagi pidato Pancasilanya memecahkan pertentangan antara berbagai golongan. Pada saat (1959) kehidupan politik macet karena perpecahan partai-partai dan ancaman kup di daerah-daerah, peranan Soekarno dengan konsepsi presiden berdasarkan UUD 1945 sekali lagi terlihat. Pada saat itu "aksi dengan perbuatannya" terlihat. Penyatuan Irian Barat dengan Indonesia dapat dikatakan merupakan jasa dan hasil keuletan pendapatnya. Selain itu, tuntutan-tuntutan dan daya upayanya mengenai Irian Barat memberikan semangat bagi sebuah keadaan yang diancam dengan kepuasan diri sendiri, kemacetan, dan sisnisme. Bahaya-bahaya kemacetan dalam tahun 50-an memang besar, namun visi Soekarno mengenai Irian Barat seakan-akan memberikan semangat baru pada revolusi. Di sinilah letak peranan terbesar Soekarno, yakni pada masa-masa adanya kekhawatiran dan kemacetan.[30]

Soeharto: Kecuali orang-orang yang berada dalam gedung itu tidak ada seorang lain pun di Yogya ataupun di Jakarta yang mengetahui bahwa dalam gedung itu sedang ada seorang "tamu" penting . Orangnya agak gemuk, rambutnya berombak, dan selalu tersenyum.

Tamu penting itu baru saja tiba sore hari dari Jakarta. Dahulu ia anak angkat mantri tani dan dibesarkan di Desa Wuryantoro, Wonogiri. Kemudian jadi tentara. Dari pangkat rendah akhirnya jadi jenderal. Dan kemudian presiden. Itulah dia, Soeharto, tamu penting yang berada di kota Gudeg ... Kehadirannya di situ tidak saja tidak diketahui oleh masyarakat, tetapi juga tidak diketahui oleh Sri Paku Alam, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pak Harto melakukan kunjungan *incognito* ke daerah-daerah. Kunjungan ini memang dirahasiakan ... Pejabat daerah sengaja tidak diberitahu, supaya ia dapat menemukan dan melihat keadaan sebenarnya.[31]

Mohammad Hatta: Tangal 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia prihatin terhadap perkembangan keadaan yang semakin mengarah ke Demokrasi Terpimpin dengan mengikis lembaga par-

30 Ong Hok Ham (1977).

31 Parengkuan (2008:91).

lementer oleh persekutuan antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan elite-elite perkotaan. Hatta tidak mau mengambil bagian dala penggusuran Demokrasi Parlementer yang diperjuangkannya sejak 1920-an.[32]

Sjahrir: Di suatu Gedung di jalan Malioboro, Yogyakarta ... berlangsung sidang antara Sjahrir dan beberapa pemimpin rakyat serta pemuda untuk menghadapi persoalan rakyat, yakni pertempuran Surabaya. Tiba-tiba terdengar letusan-letusan senjata di luar ruangan. Listrik mati. Semua orang dalam ruangan terkejut, merangkak mencari perlindungan. Memang tidak terjadi apa-apa, listrik kembali menyala, dan semua menjadi tenang. Anehnya, Sjahrir tetap sendiri dan duduk tenang di atas kursinya, seolah-olah tidak merasa khawatir sedikitpun.[33]

Jenderal Sudirman: Mengapa Sudirman menjadi tokoh sentral selama gerilya? ... waktu itu Sudirman memperoleh respek dari segenap pejuang karena ia menepati janjinya untuk memegang kembali tampuk pimpinan Angkatan Perang apabila musuh menyerang lagi. Pada waktu itu Sudirman selama berbulan-bulan non-aktif karena harus beristirahat untuk menyembuhkan penyakit paru-paru yang dideritanya. Ia mengetahui konsekuensinya apabila ia harus berangkat ke medan gerilya: ia akan dipaksa untuk berpindah-pindah dalam segala macam cuaca tanpa istirahat. Akan tetapi, ia menepati janjinya ...[34]

H. Agus Salim: Berikut kutipan dari Mohammad Roem tentang sosok Agus Salim, "Berpindah-pindah rumah dalam keadaan yang semakin memburuk ternyata sudah diperhitungkan oleh Agus Salim. Saya pun teringat perkataan Kasman, *Leiden is Lijden*, memimpin adalah menderita. Penderitaan tidak hanya berupa penjara, tetapi juga kepahitan hidup. Penderitaannya ditunjukkan dalam kehidupan sederhana yang kadang-kadang mendekati hidup serba-kekurangan dan kemiskinan. Agus Salim tidak pernah mendapat satu *persdelict* karena karangan-karangannya aau pidato-pidatonya. Padahal ia terkenal sebagai pemimpin yang berani, banyak bicara dan menulis, mengkritik yang berkuasa (Belanda). Barangkali itulah keunggulan Agus Salim."[35]

M. Natsir: Ia negarawan yang sederhana, sebagaimana dikesankan George Mc Turnan Kahin berikut: "... ketika keesokan harinya saya mengunjungi Kementerian Penerangan untuk bertemu dengan Mohammad Natsir, saya menemukan seorang sederhana dan rendah hati yang pakaiannya sungguh tidak menunjukkannya sebagai seorang menteri dari suatu pemerintahan. Malah dia memakai kemeja yang bertambal yang belum pernah saya lihat pada pegawai manapun dalam suatu pemerintahan dimana kesederhanaan berpakaian berlaku sebagai

32 Ingleson (1982).

33 Mangunwijaya (1977).

34 Notosusanto (1977).

35 Roem (1977).

suatu norma".[36]

Penyair Taufiq Ismail mencatat, "...bagi kita sulit memahami sikap terbukanya. Bersama kawan segenerasinya, walau betapa besar beda pendapat dengan lawan politik, itu tidak menghalangi persahabatan sebagai manusia. Sehabis pidato politik panas tentang dasar negara di Majelis Konstituante, Natsir dan Aidit duduk makan siang bersama menikmati sate ayam. Begitu pula Isa Anshary dengan Aidit, Muhammad Rum dengan I.J. Kasimo."[37]

Sri Sultan Hamengkubuwono IX: Ia adalah raja Yogyakarta yang tak diragukan lagi pengorbanannya bagi Republik Indonesia. Ia raja yang humanis. S.K. Trimurti pernah bercerita, bahwa ia sedang berada di tengah-tengah pasar Kranggan, ketika seorang wanita penjual beras pingsan. Apa pasal? Wanita itu malu dan sangat menyesal atas perbuatannya yang mengomeli sang sopir yang telah mengantarkannya yang menolak menerima uang. Sang sopir telah berbaik hati membantu wanita itu mengangkut berasnya ke pasar Kranggan dari daerah Kaliurang. Sang sopir itu tak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah tahu kalau sang sopir raja Yogyakarta, sang wanita itu langsung jatuh pingsan.[38]

A.R. Baswedan: Pada 10 Juni 1947, perjanjian persahabatan RI-Mesir ditandatangani H Agus Salim dan Menteri Luar Negeri/Perdana Menteri Mesir Nokrashi Pasha. Tapi, Gubernur Van Mook mengultimatum agar Indonesia menerima pemerintahan peralihan menuju RIS ... Baswedan kehabisan bekal dan tertahan sebulan di Singapura. Kabinet Syahrir demisioner. Untung dua Arab warga Singapura, Ibrahim Assegaf dan Thalib Yamani, membantu membelikan tiket KLM kembali ke Jakarta pada 13 Juli 1947. Dengan segala cara Baswedan menyelamatkan dokumen, menyembunyikan naskah Perjanjian Persahabatan RI-Mesir di balik kaus kakinya. Presiden Soekarno menyambut kagum, Baswedan membawa pengakuan pertama kepada RI di Gedung Agung Yogyakarta. Sedangkan rombongan H Agus Salim baru kembali pada November, membawa perjanjian persahabatan dengan tujuh negara Arab dan Afganistan. Suatu perjalanan diplomatik yang berhasil.[39]

AR Baswedan bersama para diplomat Indonesia dan mahasiswa Indonesia di Kairo berhasil mendorong lahirnya pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan *de jure* Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diikuti pengakuan negara-negara Arab lainnya, jelas mematahkan blokade politik Belanda.[40]

---

36 Azmi (2008:118).

37 Ismail (2008).

38 Swantoro (2007:383).

39 Utomo Dananjaya, "AR Baswedan 1908-1976", *Kompas*, 11 September 2008. Tampaknya judul di atas keliru. AR Baswedan wafat pada 1986.

40 Aa Sudirman, "Mengenang A.R. Baswedan: Indonesia. Titik.", *Suara Pembaruan*, 8 September 2008.

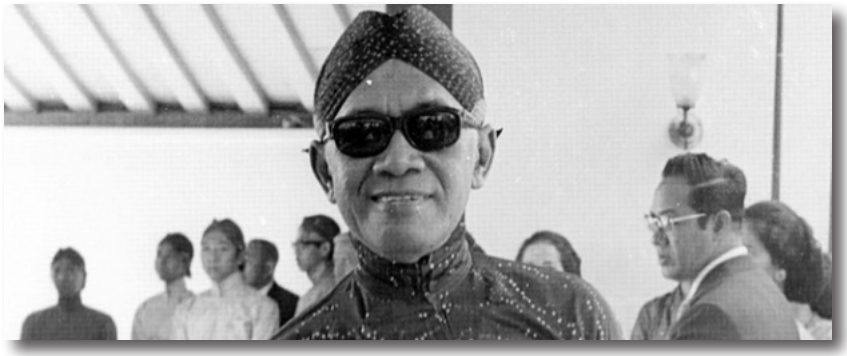

STUDENTS.ID

Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur kehilangan kepribadiannya. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan Barat yang sebenarnya namun pertama tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa

- Sultan Hamengkubuwono IX

I.J. Kasimo: Pada Juli 1931, Kasimo terpilih untuk duduk di *Volksraad*. Di sana terdapat tokoh-tokoh seperti M.H. Thamrin, Sam Ratulangi, Soetardjo Kertohadikoesoemo, Soesanto Tirtoprodjo, Soekardjo Wirjopranoto dan yang lain yang dikenal kritis. Kasimo pernah menyampaikan tuntutan bagi perbaikan kehidupan rakyat pribumi. Dalam pidatonya pada sidang *Volksraad* 19 Juli 1932, Kasimo memaparkan: "Tuan Ketua! Dengan ini saya menyatakan bahwa suku-suku bangsa Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Negeri Belanda, menurut kodratnya mempunyai hak serta kewajiban untuk membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa, dan karenanya berhak memperjuangkan pengaturan negara sendiri sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan abngsa sesuai dengan kebutuhan nasional, yaitu sesempurna mungkin Ini berarti bahwa Negeri Belanda sebagai negara berbudaya terpanggil untuk ikut mengembangkan seluruh rakyat, dan khususnya sebagai negara penjajah, mempunyai kewajiban untuk membimbing dan merampungkan pendidikan rakyat, sehingga dengan demikian dapat dicapai kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kemudian dapat diberikan hak untuk mengatur dan akhirnya memerintah sendiri."[41]●

41 Petrik Matanasi, "I.J. Kasimo: Orang Katolik dalam Pergerakan Nasional," *Kompasiana.com*, September 2010.

Bagian 3

Perbincangan tentang Kekuasaan

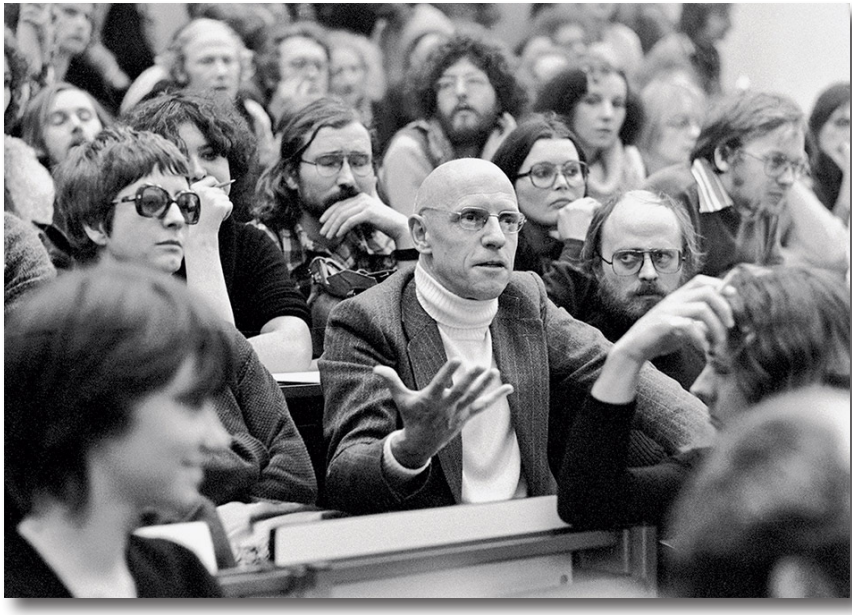

TELERAMA.FR

Kekuasaan bukanlah lembaga, dan bukan suatu struktur; pun bukan kekuatan tertentu yang dengannya kita terberkahi; ia merupakan nama suatu atribut bagi situasi strategis kompleks dalam masyarakat tertentu

- Michel Foucault

Power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength we are endowed with; it is the name that one attributes to a complex strategical situation in a particular society.

Bab 14

Mengapa Kekuasaan Penting?

APA YANG hendak Anda sampaikan sebagai refleksi tentang kekuasaan?

Saya ingat, dalam bincang-bincang santai dengan Koordinator Gerakan Jalan Lurus (GJL) Sulastomo, tokoh senior *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Hary Tjan Silalahi mengatakan ada tiga hal yang selalu asyik untuk diperbincangkan: makanan, seks, dan kekuasaan. Tentu saja kita bisa langsung mengamini. Benar berbincang makanan, sungguh mengasyikkan, terutama yang tidak banyak pantangan. Saking asyiknya, bahkan ulasan-ulasan tentang kuliner di suratkabar yang hanya berupa tulisan pun, punya pembaca fanatik. Apalagi ketika kuliner telah menjadi acara di televisi, bahkan ada stasiun khusus kuliner, massa penggemarnya tak kalah banyak. Mereka penasaran untuk bisa mencicip makanan enak-enak yang direkomendasikan.

Kalau seks?

Biarpun *saru*, tabu alias kurang sopan, bicara seks dianggap juga demikian menariknya. Dalam *Why is Sex Fun?*, Jared Diamond misalnya mencatat "sebagian besar di antara kita, tidak menyadari betapa ganjilnya perilaku seksual manusia dibandingkan dengan perilaku seksual semua hewan lain yang masih hidup sekarang."[1] Walaupun ganjil, urusan seks telah begitu

1 Diamond (2007: ix).

banyak menyita perhatian. Acapkali seks merupakan sumber "kenikmatan tertinggi", tapi juga dapat menyebabkan "kesengsaraan tak terkira". Seks juga berkaitan dengan kekuasaan. Kendatipun, dalam banyak kasus, banyak politisi jatuh karena skandal seks. Ya memang ada yang mengatakan banyak yang lebih menarik ketimbang seks. Misalnya, Aldous Huxley, "Seorang intelektual merupakan sosok yang menemukan sesuatu yang lebih menarik ketimbang seks."[2] Tetapi, perbandingan demikian konteksnya pengibaratan.

Kalau kekuasaan sendiri bagaimana?

Bagi yang punya kepentingan, kekuasaan tidak sekedar harus diperbincangkan tapi diusahakan. Bagi orang awam memperbincangkan kekuasaan itu, kadang seperti mengulas pertunjukan sinetron. Nakae Chomin (nama aslinya asli Nakae Tokusuke) misalnya mengarang *Perbincangan Tiga Pemabuk tentang Pemerintahan* (*Sansuijin Keirin Mondo*) yang ditulis 1887. Chomin mencoba merekam bagaimana kekuasaan diperbincangkan oleh orang-orang yang sedang mabuk. Kita baca ulasan Ajidarma berikut:

> Guru Nakai kedatangan tamu yang tidak ingin ia ketahui namanya, sehingga berdasarkan pemikiran kedua orang itu, ia beri mereka nama Priyayi Pengetahuan Barat (*Yogaka Kyaku*) dan Pahlawan dari Timur (*Goketsu no Kyaku*). Lewat tokoh *Priyayi*, Chomim membeberkan filsafat dan idealisme politik di Eropa pada abad XIX. Sedangkan tokoh Pahlawan selalu bersikap kontras terhadap Priyayi, dengan memberikan kondisi-kondisi *real politic* di Jepang pada masa itu. Kedua sudut pandang ini sebetulnya mewakili arus Nakai, mewakili Chomim, hanya *ngomong cemplang-cemplung* dalam perdebatan mereka dan membiarkan kesimpulan tetap terbuka.[3]

Dari situ saya hendak mengatakan, orang cenderung bicara tentang kekuasaan dalam situasi apapun, bahkan di tengah rezim otoriter sekalipun. Bahkan, orang-orang biasa kalau bukan orang-orang kecil alias *wong cilik*, di warung-warung memang kalau bicara kekuasaan, banyak yang merasa paling mengerti. Dengan informasi seadanya, mereka seringkali mengulas kekuasaan dengan mencampur-adukkan antara mitos, gosip, dan isu-isu yang susah dibuktikan kebenarannya.

Sah-sah saja memperbincangkan kekuasaan sebagai sesuatu yang tak mereka miliki, bukan?

Ya, ibaratnya *klangenan*, menghibur diri. Para sopir di tempat parkiran, lazim *ngobrol-ngobrol* soal mobil-mobil keluaran baru: segala jenis mobil

2 Brainyquote.com. *An intellectual is a person who's found one thing that's more interesting than sex*.

3 Ajidarma (2002).

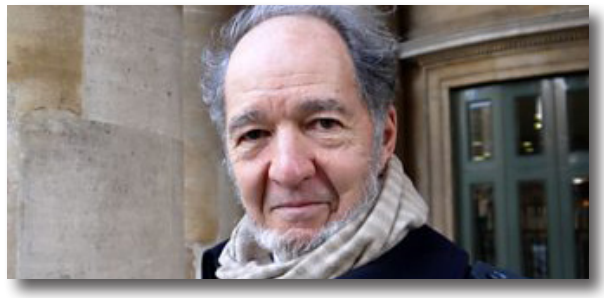

BBC.CO.UK

Barangkali perbedaan terbesar kita sebagai spesies ialah kapasitas kita, unik di antara binatang, untuk membuat pilihan yang melawan evolusi

- Jared Diamond

Perhaps our greatest distinction as a species is our capacity, unique among animals, to make counter-evolutionary choices.

hapal. Padahal sudah jelas bukan, bahwa mereka tidak mungkin bisa memiliki mobil-mobil itu? Demikian jugalah obrolan-obrolan di warung-warung tentang kekuasaan: bagaimana kekuasaan dibicarakan oleh mereka yang tidak punya kekuasaan. Tapi jangan salah, secara filosofis, dalam demokrasi penguasa yang sejati itu ialah rakyat. Pemerintah cuma pembantu. Anggota DPR cuma wakil, bukan?

Dalam dunia pewayangan kita juga sering disuguhi adegan perbincangan orang-orang kecil tentang kekuasaan. Dari pihak raksasa yang merepresentasikan tokoh jahat ada tokoh-tokoh dekonstruktif yakni *Togog*, *Limbuk*, dan *mBilung*. Dari pihak para ksatria Pandawa ada panakawan atau punakawan, tak lain Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mereka adalah ruang dan alat untuk mengkritik kemapanan, bahkan keserakahan kekuasaan. Mereka adalah ventilasi dari dominasi formalitas kehidupan politik yang kaku dan monoton para *nDoro*-nya. Para dalang biasa lincah memainkan jeda pada bagian adegan non-formal ini. Percakapan-percakapannya, tak kalah dengan para pemabuk bicara kekuasaan di atas.

Dari mana asal muasal Togog dan Semar?

Dalam kisah *pewayangan*, keduanya sesungguhnya dewa. *Sanghyang Wenang* (yang menurunkan dewa-dewa) memiliki empat anak yang lahir dari sebutir telur: *Batara Antaga* (Togog), *Batara Sarawita* (mBilung), *Batara Ismaya* (Semar), dan *Batara Manikmaya* (Batara Guru). Kecuali yang terakhir, ketiga anaknya diutus turun ke *Marcapada* (dunia manusia) un-

Kekusaan menyeleweng, tapi kekuasaan mutlak benar-benar rapi

- John Lehman

Power corrupts, but absolute power is really neat.

tuk menjadi penasihat, dan pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebajikan pada manusia. Semar dipilih sebagai pamong untuk para ksatria berwatak baik (Pandawa). Togog dan mBilung diutus sebagai pamong untuk para ksatria dengan watak buruk.[4]

BTW alias omong-omong, Punakawan itu apa?

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *punakawan* atau *panakawan* diartikan sebagai "pelayan atau pengawal raja atau bangsawan pada zaman dahulu", atau "abdi pengiring".[5] Barangkali, kalau diterjemahkan secara modern, mereka itu para loyalis, bahkan mungkin para abdi super-loyalis. Kendatipun demikian, justru karena itulah mereka dikenal mampu memanfaatkan posisinya sebagai juru ingat para bangsawan alias bos yang diikutinya. Cara mereka mengingatkan, tampaknya tidak konfrontatif, dan yang khas adalah kejenakaannya. Mereka para dekonstruktor. Dalam pementasan wayang, baik itu gaya Yogyakarta, Solo, Sunda dan Jawa Timuran, tokoh Semar dapat dipastikan selalu ada, meskipun dengan pasangan yang berbeda-beda.

O Punakawan itu banyak versinya ya?

Pewayangan Jawa Tengah menampilkan empat tokoh: Semar dengan ketiga anaknya (Gareng, Petruk, dan Bagong) sebagai pengiring golongan ksatria. Panakawan yang ikut golongan raksasa: Togog dan mBilung. Pada zaman Amangkurat I (Mataram 1645-1677), seni pewayangan terpecah menjadi dua, golongan pro dan anti-Belanda. Golongan pertama menghapus tokoh Bagong karena tidak disukai. Dalam pementasan wayang golek Sunda, Panakawan terdiri Semar, Cepot, Dawala, Gareng. Sementara pewayangan Jawa Timuran, hanya Bagong serta anaknya, Besut. Dalam pewayangan Bali, tokoh panakawan untuk golongan ksatria, Tualen dan Merdah, sedang pengikut golongan jahat Delem dan Sangut. Dalam pementasan ketoprak juga dikenal panakawan, namun nama-namanya tidak pasti. Misalnya, Bancak dan Doyok dalam kisah-kisah Panji, serta Sabdopalon dan Noyogenggong dalam kisah Damarwulan dan Brawijaya. Sementara Bawor adalah pu-

4 Wikipedia.org

5 Kbbi.web.id

ECUADORTIMES.NET

Kritik hanya membuat Anda lebih kuat. Anda harus melihat apa yang mereka katakan sebagai umpan balik. Kadang-kadang umpan balik membantu, dan lain kali, itu hanya suara yang bisa menjadi pengalih perhatian

- Robert Kiyosaki

Critics only make you stronger. You have to look at what they are saying as feedback. Sometimes the feedback helps, and other times, it's just noise that can be a distraction.

nakawan Banyumasan.[6]

Panakawan itu pendamping atau juru kritik?

Mereka adalah pendamping yang kritis.Dalam pewayangan, kita dengan mudah mengidentifikasi yang jahat itu barisan Kurawa, yang baik itu Pandawa. Kalau Anda orang *saleh*, pilihannya jatuh ke Pandawa sebagai pihak protagonis. Tetapi *kan*, kalau panggung politik kita itu jagat pewayangan, susah pula kita cari mana yang benar-benar Pandawa mana musuhnya. Partai mana yang pandawa dan yang kurawa kan tidak jelas. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, dibutuhkan lebih banyak panakawan sebagai *juru ingat*. Panakawan itu sesungguhnya seperti politisi, cair juga: tidaklah panakawan itu hanya ada di blok sebelah sini (Semar), tetapi kan juga ada yang di blok sebelah sana (Togog, demikian pun mBilung).

Jadi, Punakawan posisinya unik. Mereka bisa di kubu manapun, tetapi kewajiban mereka justru bukan dalam soal merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi dalam soal-soal memberi nasihat, baik diminta atau tidak, terlepas yang dinasihati mendengarkan atau malah tidur. Para punakawan itu, uniknya, juga berupaya seoptimal mungkin mengkritik para bosnya melalui simbol dan tindakan alias *bil hal*. Tentang karakter masing-masing,

6 Wikipedia.org

nanti akan saya ulas di bagian ikonografi kekuasaan.

Tetapi, biasanya hanya yang peka saja yang bisa merasakan adanya kritik dari Punakawan itu. Emha Ainun Nadjib misalnya pernah membuat refleksi punakawan, di awali dengan menghilangnya Semar. Tampaknya Emha tengah menyajikan paradoks: orang tak sadar ketika Semar hilang, sesungguhnya mereka telah kehilangan sumber kebijaksanaan (*wisdom*). Tapi orang-orang tak peduli, kecuali dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan hilang, mereka menangisinya.[7]

Bagaimana kalau disadari Semar hilang?

Sadar Semar hilang, para Punakawan lainnya — Gareng, Petruk, dan Gareng ramai berdebat. Di antara menghilangnya Semar dan tertindasnya warga Karang Kedempel (tempat Punakawan berada), berlangsung berlapis-lapis pemikiran dan pergulatan. Di tengah ketertindasan, represi politik, pembungkaman suara, dan penjajahan oleh asing, bergema pertanyaan mengapa Semar pergi sementara rakyat Karang Kedempel tak berdaya. Hakikat politik, kedaulatan rakyat, sejatinya kekuasaan, semuanya dipertanyakan kembali. Dan, sampailah mereka pada kesimpulan perlunya *carangan*:

> *Carangan* ialah mengubah *pakem*. Menggesernya, merombaknya, atau bahkan menggantikannya sama sekali. Suatu sistem *pakem* yang menyejahterakan sebagian orang dengan cara menyengsarakan sebagian besar lainnya, tak bisa diteruskan. Kaum Punakawan, sebagai agen dari Budaya Carangan — yang mencoba menyelusupkan paham-paham baru yang membebaskan — dalam kisah keniscayaan tragis Mahabharata, menunjukkan bahwa masyarakat Karang Kedempel sebenarnya melontarkan kehendak pembebasan secara otentik.[8]

Hmmm Agak rumit, tapi saya bisa menangkap...

Bak Muhammad Ali atau Bruce Lee, saya meliuk-liuk. Tetapi, maksudnya sederhana: kekuasaan itu lazim diperbincangkan di mana pun, di warung-warung, pasar-pasar, oleh siapa pun, termasuk para *wong cilik* alias kaum *mustadzafin* yang lebih jujur kalau bicara kekuasaan, juga dalam melancarkan kritik-kritik.

Kembali ke mengapa kekuasaan penting?

Karena hampir semua orang membutuhkan kekuasaan. Sekecil apapun, sadar atau tidak, kekuasaan selalu dicari, diperebutkan. Dengan kekua-

7 Nadjib (2015)

8 Nadjib (2015: 203).

ELECTRIC-SHADOWS.COM

Aku tak takut pada orang yang mahir 10.000 tendangan sekali, tapi aku takut orang yang mahir satu tendangan 10.000 kali

- Bruce Lee

I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once,
but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.

saan orang dapat memerintahkan kemauannya dan mengontrol kepatuhan orang lain. Dengan kekuasaan perubahan dapat diciptakan, dimana seorang pemimpin berkesempatan mewujudkan visi dan obsesinya. Tapi, kekuasaan seperti pedang bermata dua. Ia dibutuhkan untuk membangun, tetapi dengan kekuasaan pula orang bisa merusak.

Jadi, kekuasaan itu mengandung paradoks: tergantung dengan kekuasaan yang ada seseorang akan melakukan apa. Ya, kekuasaan bisa merusak, tapi kan mestinya kekuasaan dipakai penggunanya untuk membangun. Prinsip utama kekuasaan, menurut Blaine Lee, adalah kehormatan. "Kekuasaan berdasarkan kehormatan didasarkan pada sikap menghargai dan menghormati yang melampaui transaksi atau pertukarannya".[9]●

9 Lee (2002)

THEGUARDIAN.COM

Politik itu masalah yang terlalu serius untuk diserahkan kepada politisi

- Charles de Gaulle

Politics is too serious a matter to be left to the politicians.

Politisi sama di seluruh penjuru. Mereka berjanji untuk membangun jembatan meski tidak ada sungai

- Nikita Khrushchev

Politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers.

Bab 15

Kekuasaan

Sumber, Karakteristik dan Konsepnya

Kekuasaan: Sumber dan Basisnya

DARI MANA kekuasaan bersumber?

Pertanyaannya bisa diperjelas: dari mana saya memperoleh kekuasaan? Itulah sumber kekuasaan. Menurut Wirawan sumber-sumber kekuasaan itu berupa (1) posisi; (2) sifat-sifat personal; (3) keahlian; (4) peluang untuk mengontrol informasi. Ahli lain membagi sumber kekuasaan pada lima hal, yakni (1) legitimasi: otoritas, peraturan, undangundang; (2) kontrol atas sumber-sumber: keuangan, informasi; (3) keahalian: kritikalitas; (4) hubungan sosial: kontak, pertemanan, kekuasaan dalam angka; (5) karakteristik personal: kharisma, menarik.[1]

Sumber kekuasaan berbeda dengan basis kekuasaan (*basis of power).* Yang dimaksud dengan basis kekuasaan, sumber hubungan kekuasaan antara pihak yang memengaruhi (agen) dengan yang dipengaruhi (target). Basis kekuasan itu berupa (1) paksaan; (2) imbalan; (3) persuasi; (4) pengetahuan. Dari sumber dan basis kekuasaan itu, muncul istilah-istilah: kekuasaan posisional, kekuasaan personal, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan peluang.

1 Wirawan (2003).

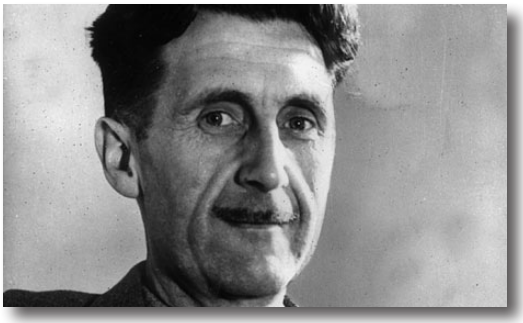

THEGUARDIAN.COM

Objek kekuasaan ialah kekuasaan

- George Orwell

The object of power is power.

Juga, di sisi lain ada kekuasaan paksa, kekuasaan imbalan, kekuasaan persuasi, dan kekuasaan ilmu pengetahuan.[2]

Banyak juga ya variannya. Kekuasaan posisional itu apa?

Kekuasaan posisional terkait dengan posisi alias jabatan kekuasaan formal seseorang. Otoritasnya formal. Kekuasaan posisional, terkait pula dengan kontrol atas sumber dan imbalan; kontrol atas hukuman; kontrol atas informasi; kontrol ekologikal. Itu menurut Yukl.[3] Uraiannya bisa panjang lebar. Tapi, intinya begini: apabila Anda berkenalan dengan seseorang, dan kemudian Anda menanyakan kerja di mana, dan jabatannya apa — nah berarti Anda tengah menanyakan konteks kekuasaan posisional orang itu.

Kalau kekuasaan personal?

Kekuasaan personal, menurut Yukl, terkait dengan keahlian, loyalitas pertemanan, dan kharisma. Kalau basisnya keahlian, maka jelas konteksnya *expert power*. Kalau loyalitas, maka konteksnya tanpa pamrih, kecuali melakukan sesuatu yang terbaik bagi sosok yang kita kagumi dan kita abdi. Kekuasan yang berbasis loyalitas ialah kekuasaan yang ditopang oleh ketanpa-pamrihan para pendukung atau pengikut. Mereka setia dalam suka dan duka, di kala menang atau kalah. Mirip dengan kekuasaan kharismatik, di mana kharisma pemimpin mampu terpancar dan menggerakkan para pengikut tidak saja untuk sekedar loyal, tapi lebih dari itu.

Bagaimana caranya melindungi sumber-sumber kekuasaan kita?

Ini sudah masuk ke politik, tepatnya proses politik. Karena upaya per-

2 Wirawan (2003).

3 Yukl (2007).

lindungan atas sumber-sumber kakuasaan yang kita miliki memerlukan strategi politik. Agar sumber kekuasaan kita terjaga, maka basis kekuasaan harus kita perkuat. Caranya, misalnya: (1) upayakan agar kita tetap mampu melakukan kontrol atas proses pengambilan keputusan; (2) berkoalisilah — agar kekuasaan kita menjadi lebih kuat lagi, maka kita harus beraliansi atau berkoalisi dengan kekuatan yang lebih kuat — sehingga memunculkan *deterrence effect* alias efek daya tangkal; (3) perkuat institusi Anda, sebab dengan organisasi kuat dan sehat, maka ia tidak rapuh dan akan punya pengaruh nyata baik secara internal dan eksternal; (4) tetaplah etis dalam berpolitik.

Hmm ... Rupanya kita sudah sedikit menyinggung hal-ikhwal manajemen kekuasaan, padahal secara panjang lebar baru akan kita bahas nanti.

Kekuasaan: Karakteristiknya

APAKAH karakteristik atau bahkan watak kekuasaan itu?

Menurut Wirawan, kekuasaan memiliki beberapa karakteristik: (1) kekuasaan merupakan sesuatu yang abstrak; (2) kekuasaan merupakan milik interaksi sosial, bukan milik individu; dan (3) pemegang kekuasaan yang egois cenderung menyalahgunakannya.[4] Maka, lazim saja kalau ada pendapat kekuasaan itu pedang bermata dua, artinya kekuasaan yang sesungguhnya netral itu, bisa dipakai untuk kebaikan dan kesejahteraan di satu matanya, tetapi di mata yang lain, bisa disalahgunakan alias diselewengkan untuk kepentingan si penggengam kekuasaan itu sendiri. Ini kaitannya dengan konteks makna otoritas di atas. Bahwa kekuasaan dapat dipakai untuk misi kebaikan, tetapi juga dapat dijuruskan pada otoritarianisme.

Mengapa kekuasaan itu abstrak?

Karena kekuasaan bukan benda yang bisa diraba, dicium, tetapi ia hanya bisa dirasakan pengaruh dan efek sampingnya. Kekuasaan itu kalau tidak ditegaskan, maka bersifat *illegible*, tidak kelihatan. Makanya instansi-instansi tertentu butuh seragam yang mencantumkan tanda pangkat dalam pundaknya. Polisi dan tentara, kalau pakai seragam, maka jelas pangkatnya. Nah, beda pangkat, beda pula kewenangannya. Wajar apabila jenderal berbintang empat lebih "ditakuti" ketimbang yang bintangnya tiga atau dua. Dalam sistem komando memang demikianlah adanya.

Adapun dampak atas kekuasaan itu dapat dirasakan itu jelas. Keputus-

4 Wirawan (2003).

an hakim misalnya berdampak langsung atau tidak langsung bagi tervonis dan yang terkait dengannya. Kebijakan pemerintah juga demikian, dampaknya terasa sampai ke bawah. Rakyat bawah banyak yang tidak paham proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan politik yang berdampak luas itu, tetapi mereka bisa merasakan apakah kebijakan tersebut menyejahterakan atau tidak. Sebagaimana Kyai Semar (Badranaya) sosok utama Punakawan dalam dunia pewayangan (Jawa) bilang, kekuasaan itu seperti kentut, walaupun tak ada rupanya tapi baunya terasa! Walaupun wujudnya tidak tampak atau terdefinisikan dengan jelas, tetapi pengaruhnya bisa terasakan.

Kentut? Perumpamaan yang aneh ...

Namanya juga perumpamaan. BTW, saya punya refleksi, sebuah kolom yang dimuat *Antaranews.com*, 25 Januari 2011. Saya menciptakan tokoh, Dul. Mungkin perlu Anda baca sambil *ongkang-ongkang*:

> ... Suatu hari Dul (sang tokoh kita) tiba-tiba ingin jadi ilmuwan yang bisa menciptakan sesuatu. Dan dengan sesuatu itu, ia ingin mengentaskan kemiskinan. Karena kalau ia kaya, maka ia berkesempatan emas untuk jadi filantropis. Ia melamunkan dirinya bisa menyaingi Bill Gates atau Mark Zuckerberg dan melejit sebagai orang terkaya tingkat dunia.
>
> Ia tidak memilih melamun untuk bisa menciptakan alias menyulap air jadi bensin. Ia juga tak memilih melamun bisa menciptakan bibit padi superunggul. Tapi lamunannya, bisa jadi lebih gila lagi.
>
> Dul membayangkan dirinya mampu membuat ramuan jamu dari khasanah herbalistik Indonesia yang melimpah ini. Ramuan macam apakah gerangan yang dibayangkan Dul? Benar tebakan Anda. Ramuan yang membuat peminumnya kalau kentut baunya berubah wangi.
>
> Ketika ia menyampaikan hasil lamunannya itu padaku, aku bilang jangan ganggu aku dengan mendengarkan lamunan anehmu itu: buang-buang waktu percuma. Tapi ia terus *nerocos* saja — sehingga aku pun larut pula dalam lamunannya.
>
> Bagaimana saudara, kalau saja aku menemukan ramuan ajaib itu, yang bisa membuat bau kentut jadi wangi? Revolusi macam apakah yang akan terjadi? Orang-orang akan melupakan bercita-cita punya komputer seluler tablet mereka, untuk mendapatkan ramuan itu. Industri minyak wangi akan sedikit terganggu — lama-kelamaan bisa bangkrut.
>
> Tata-pergaulan masyarakat juga akan berubah. Bisa jadi Anda akan menyarankan kepada yang lain begini, "Manakala kamu menghadiri sebuah pesta dengan tetamu kehormatan, kentut lah sebanyak-banyaknya, sebab kentutmu itu wangi".
>
> Dan, bayangkan, kapitalisme pendistribusian ramuan kentut itu akan berkembang. Para pedagang ayam goreng dan sayur-sayuran di gang-gang kecil

Apabila kekuasaan mengarahkan manusia pada kesombongan, puisi mengingatkan pada keterbatasannya.

- John F Kennedy

When power leads man to arrogance, poetry reminds him of his limitations.

kita segera meninggalkan profesi mereka, berlomba-lomba dengan lulusan perguruan tinggi, berebut menjadi distributor alias penyalur, tepatnya pengecer resmi ramuan itu.

Dul sendiri, biar orang menjuluki Si Raja Kentut, mendadak kaya karena telah mempatenkan penemuannya. Tersohor bukan main. Tapi ke mana-mana perlu pengawalan ketat: takut diculik orang-orang jahat, termasuk teroris. Ia lebih populer ketimbang presiden. Para politisi berebut sowan minta restu — alias, konkritnya sumbangan untuk kessuksesan karir politik masing-masing.

Berbagai buku terbit mengulas fenomena ini. Ramuan bajakan muncul di mana-mana — walaupun bau kentut hasil ramuan ini tak sewangi ramuan bikinan pabriknya Dul. Bisnis ini berkembang ke dalam rupa-rupa diversifikasi produk.

Karena kentut itu wangi, maka ia bisa diwadahi plastik, dan dijual lagi sebagai pengharum ruangan — baik pewangi rumah, gedung, maupun mobil pribadi Anda. Di wilayah selebriti juga berkembang bisnis baru: mereka jualan kentut masing-masing, dengan kemasan plastik dengan dibubuhkan nama sang artis.

Lamunan soal kentut wangi ini, semakin jauh tak tentu arah. Hingga akhirnya, bau wangi itu sendiri menjadi biasa alias tidak eksklusif lagi. Orang-orang yang mengklaim bermadzab naturalis, mulai mengkampanyekan gerakan cinta bau sampah. Bau sampah kian dirindukan, dicintai setengah mati.

Mereka membeberkan kisah yang sangat disukainya. Kisah gelandangan yang pingsan di depan toko minyak wangi. Ketika masyarakat gempar, teman gelandangan itu datang, memindahkannya ke tempat sampah: seketika yang pingsan itu sadar lagi.

Pada titiknya, bau sampah menjadi lebih disukai oleh para elite — seperti sang gelandangan yang pingsan itu. Ramuan Dul lama-lama tak lagi popular, kalah dengan produk-produk bebauan sampah. Perusahaan Dul bangkrut, Dul pun jatuh miskin kembali.

Imajinasi yang aneh ...

Tidak terlalu aneh juga. Sebab, kekuasaan lazim dikaitkan dengan udara, angin. Kita simak pengibaratan Dhakidae berikut,

Semua hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan

- A. Tourine

All social relations are relations of power.

Kekuasaan itu ... mirip-mirip angin yang tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak bisa dilihat mata; kita hanya tahu ada angin karena akibat yang dibawanya seperti daun berguguran. Kekuasaan adalah angin, kekuasaan itu membelai ketika bertiup sepoi-sepoi basa. Menghancurkan ketika bergerak dengan kecepatan tinggi sambil menerpa apapun objek di depannya. Pada saat itu dia sudah berubah menjadi angin rebut, badai atau puting-beliung. *People power* selalu berlangsung dalam badai politik ketika kesenjangan meningkat dan perlawanan menjadi senjata terakhir dan terampuh untuk mengatasinya.

Kekuasaan juga seperti angin yang hanya bisa bertiup karena ada perbedaan tekanan; semakin tinggi perbedaan, semakin kencang badai. Semakin tinggi tempat didiami seseorang semakin terpapar terhadap badai; dan semakin rendah semakin nanar menjadi mangsa yang diangkat, diterbangkan, dan dibanting badai.[5]

Kembali ke semula: soal karakter kedua, yang mengaitkan kekuasaan sebagai interaksi sosial, bagaimana penjelasannya?

Kekuasaan itu sangat terkait dengan interaksi sosial antar-anggota dalam sebuah sistem sosial. Secara istilah kekuasaan itu kan *social power*, jadi ia harus berada dalam suatu sistem sosial. Harus ada komunitas sosial. Kekuasaan, karenanya ada di manamana, baik di sekolah, di rumah, di kantor, di pasar, di pemerintahan, di mana saja. Karena harus ada sistem sosial dan itu artinya melibatkan banyak orang, maka Robinson Crouso, tokoh utama dalam novel Daniel Defoe, tidak bisa bersentuhan dengan kekuasaan. Bukankah Robinson hanya seorang diri, saat terdampar di sebuah pulau?[6]

Interaksi sosial telah menjadi kata kunci tersendiri. Dalam teori komunikasi sosial, ada komunikator dan komunikan, ada subyek komunikasi, ada sasarannya. Kemudian terjadi proses timbal-balik alias interaksi: ada dialog, ada tawar-menawar secara otomatis. Ada konsep resistensi atas tawaran-tawaran yang terkait dengan implementasi kekuasaan. Daya resistensi itu selalu ada, sepotensial apapun. Kerap pula diilustrasikan, kekuasaan sebagai sebuah proses interaksi (sosial) tercermin dalam fluktuasi nilai tukar mata uang, atau naik-turunnya indeks harga saham dalam pasar uang dan modal.

5 Dhakidae (2015:46)

6 Defoe (2007).

Karena kekuasaan merupakan buah dari interaksi sosial, maka ia bisa hadir, membesar, mengecil, bahkan kemudian hilang, hadir lagi, hilang lagi dan seterusnya. Kekuasaan itu fluktuatif..

Good point.[7] Kekuasaan itu dipergulirkan. Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Allah memberikan dan mencabut kekuasaan pada mereka yang dikehendaki.[8] Kalau dalam khazanah Jawa kekuasaan itu bak *cakra manggilingan*, sangat dinamis, ia bisa menguat suatu saat (posisi di atas) dan melemah (posisi di bawah) di saat yang lain. Seperti halnya kehidupan yang bak roda berputar (*cakra manggilingan*). Sebagaimana ada *sunatullah* atas gravitasi dan kesemestaan, *sunatullah* juga berlaku bagi kekuasaan. Karena kekuasaan terkait dengan derajat pengaruh, dan itu ditentukan oleh banyak faktor yang terkait dengan dukungan dan kepatuhan. Makin tinggi *trust*, makin tinggi derajat pengaruh sang pemimpin. Pun sebaliknya. Menarik untuk kita renungi kata-kata Boris Yeltsin, "Anda dapat membangun tahta dari bayonet, tapi Anda tidak bisa duduk di atasnya untuk waktu lama". Kekuasaan itu abadi, tetapi tidak demikian dengan yang berkuasa. Yang berkuasa ada batasnya. Apa yang dikatakan Yeltsin itu membawa kita pada perumpamaan, bahwa kekuasaan itu seperti api: siapa yang bisa berlama-lama duduk di atasnya?

Terhadap Yeltsin sendiri, apa yang bisa kita catat dari kepemimpinannya?

Boris Nikolayevich Yeltsin (1931-2007),[9] Presiden Federasi Rusia pertama (1991-1999) ialah pembawa nasib bekas negara adidaya Uni Sovyet. Meskipun ia tokoh pemilih jalan demokrasi, tidak semua komentar tentangnya bagus. Era Yeltsin era sulit, bahkan tragis. Pendahulunya, Mikhail Gorbachev berkomentar: "Saya berbelasungkawa kepada keluarga seorang laki-laki di mana di bahunya bertumpu banyak karya luar biasa sekaligus kesalahan besar, nasib tragis!"

Era Yeltsin pelajaran bagi mereka yang menelan mentah-mentah demokrasi. Ini era transisi dari rezim otoritarian komunis ke rezim pasca-Uni Soviet yang menerima demokrasi, tetapi yang mencuat justru persis yang dicatat Lee Kuan Yew, defisiensi. Era Yeltsin ditandai perubahan politik revolusioner, tetapi kemudian yang hadir justru merajalelanya korupsi dan

7 Kata "*good point*" ini segera mengingatkan pada gaya almarhum Soegeng Sarjadi ketika memandu *talk show* di televisi. Kalau narasumbernya dianggap mampu memberi penjelasan yang mantap, Mas Soegeng langsung bilang, "*good point*".

8 QS Ali Imran ayat 26.

9 Dikembangkan dari M Alfan Alfian, "Yeltsin", *Pelita*, 27 April 2007.

HISTORY.COM

Anda dapat membangun tahta dari bayonet, tapi Anda tidak bisa duduk di atasnya untuk waktu lama

- Boris Yeltsin

You can build a throne with bayonets, but you can't sit on it for long

kriminalitas yang vulgar, menguatnya oligarki para bandit, anjloknya harapan, dan menumpuknya kekecewaan justru setelah komunis tumbang.

Benar, pada 12 Juni 1991 Yeltsin terpilih (57 persen suara) dalam pemilu dan menempatkannya sebagai Presiden Republik Sosialis Soviet Rusia. Ia terpilih seiring membuncahnya harapan demi reformasi politik dan kekecewaan terhadap kekuasaan komunis. Bulan-bulan berikutnya Yeltsin memperoleh pujian internasional sebagai pemberani dan demokrat yang mampu melawan usaha kudeta kaum komunis garis keras.

Yeltsin orang terkuat di Kremlin. Tetapi justru karena itulah, demokrasi dirancukannya. Jalan kekerasan Yeltsin di tengah ketidakpastian hidup di Rusia, menambah runyam keadaan. Ia berkonfrontasi sengit dengan parlemen. Awal Oktober 1993, Yeltsin dengan dukungan tentara mengerahkan tank-tanknya ke kantor parlemen, menghadapi para penentangnya. Yeltsin

juga mengobarkan perang dengan Chechnya.

Ketika Yeltsin tambah otoriter, Rusia tambah memburuk. Ia gagal menjadi panutan sekaligus tak memiliki langkah strategis mengatasi runyamnya Rusia. Reformasi radikal yang ia canangkan dengan memanggil IMF, Bank Dunia dan Departemen Keuangan AS, tak banyak membantu. Kendali negara atas harga-harga dilepas menuruti kehendak pasar. Privatisasi BUMN-BUMN Rusia, justru menyuburkan oligarki para bandit, di mana muncul preman-preman oligarki dengan kekuatan penuh, yang menguasai perbankan, media massa, dan sektor-sektor strategis lainnya.

Di tengah situasi demikian, rakyat rindu era kejayaan komunis. Memang, Yeltsin sempat terpilih kedua kalinya sebagai presiden pada Pemilu 1996. Tapi Yeltsin limbung dan pada 31 Desember 1999 ia mundur dan menyerahkan jabatan ke Vladimir Putin. Di depan televisi Rusia ia meminta maaf atas banyak kebijakannya yang salah. Yeltsin berujar, "Saya minta maaf karena telah membuat mimpi anda semua yang tak pernah kesampaian, saya juga minta maaf telah menelantarkan banyak harapan anda."

Jadi, apa yang dapat kita petik dari Yeltsin? Tak jauh dari apa yang ia katakan: Anda dapat membangun tahta dari bayonet, tapi Anda tidak bisa duduk di atasnya untuk waktu lama. Memegang kekuasaan itu berat, setiap saat bisa berbuat salah pula.

Kekuasaan: Konsep dan Jenisnya

> Sekalipun ada banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai kekuasaan, akan tetapi, agaknya ada satu inti yang nampak dalam semua perumusan itu, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari yang mempunyai kekuasaan
>
> **– MIRIAM BUDIARDJO[10]**

MUNGKIN ANDA bisa jelaskan dulu dari sisi kebahasaan, apa itu kekuasaan?

Dari aspek kebahasaan, *kekuasaan* merupakan terjemahan dari *power* dalam Bahasa Inggris (kendatipun tentu bukan dari khasanah Bahasa Inggris saja kita memperoleh pengertian soal apa itu kekuasaan). Istilah *power* itu sendiri memiliki pengertian luas ketimbang sekedar diartikan *kekuasaan*. Ia

10 Budiardjo (1984).

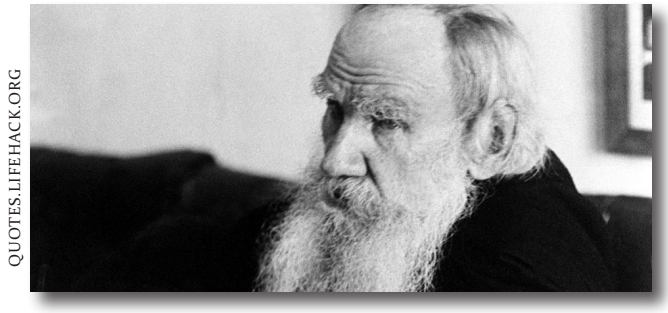

QUOTES.LIFEHACK.ORG

Kekuasaan ialah kata yang maknanya tidak kita mengerti

- Leo Tolstoy

Power is a word the meaning of which we do not understand.

bisa diartikan tenaga atau energi. *Horse power* berarti *tenaga kuda*, bukan *kekuasaan kuda*. Demikian pula *hydro power*, *wind power*, yang berarti tenaga air dan angin. Menurut Wirawan, padanan kata kekuasaan, tepatnya adalah *social power*. Memang ada istilah-istilah lain, tetapi yang paling tepat, tetap *power*, dalam pengertian *social power*. Dalam hal ini, kekuasaan selalu dikaitkan dengan dinamika kehidupan sosial. Karenanya, kekuasaan merupakan sesuatu yang senantiasa terkait dengan rangkaian fakta-fakta sosial.[11]

Istilah-istilah lain yang dimaksud di atas, yang pengertiannya hampir sama atau mendekati kekuasaan atau *power*, antara lain berikut ini: (1) *Force*, lebih dimaknai sebagai kontrol atas benda (*body*) ketimbang orang (*person*); (2) *Persuasion*, mengandung makna sebagai ketrampilan membujuk, bahkan bujukan si *powerless* pada si *powerfull*; (3) *Authority* atau otoritas, lebih merujuk pada kekuasaan yang terlegitimasi; (4) *Coercion*, artinya kemampuan untuk mengkontrol melalui ancaman, secara terang-terangan (*overt*) atau tersembunyi (*tacit*); (5) *Manipulation*, upaya mengontrol kekuasaan dengan memanfaatkan sumberdaya informasi dan gagasan (*ideas*), ketimbang dengan ancaman (fisik).[12]

Dalam ilmu sosial, bagaimana kekuasaan dipahami?

Pendapat Robert H Dahl tentang kekuasaan [sosial atau politik], biasanya paling banyak dikutip. Terkait dengan kekuasaan, Dahl menjelaskan, *suppose there are only two people in a system, A and B. A influrences B to the extent that he changes B's actions or predispositons in some way*. Bahwa A memiliki kekuasaan atas B, apabila A dapat memengaruhi B untuk mela-

11 Wirawan (2003:1); Heywood (1999:122).

12 Mc Lean dan Mc Millan (2003:433).

kukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B. Hal ini dapat ditafsirkan, apabila A memengaruhi B untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak B, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan. Jadi, tampaknya harus ada syarat keterpaksaan, yakni dari pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran dan tingkah laku pihak yang memengaruhi. Dalam konteks ini, kamus *Concise Dictionary of Politics* meringkaskan penjelasan atas definisi *power* versi Dahl tersebut. Bahwa *A berkuasa atas B* apabila: (1) A memiliki pengaruh (*effect*) atas pilihan dan tindakan B; (2) A memiliki kapasitas untuk menggerakkan pilihan dan langkah B sesuai dengan kehendak A; (3) A memiliki kapasitas untuk mengesampingkan perlawanan B; (4) Hubungan A dan B sebagaimana disebut dalam (1), (2), dan (3) adalah bagian dari suatu struktur sosial dan cenderung terus berlangsung.[13]

Jadi ada yang tidak puas dengan definisi Dahl ya?

Definisi Dahl memang cukup populer dan mampu menjelaskan tentang apa itu kekuasaan, ketika pengaruh yang dikembangkan oleh pimpinan memiliki suatu efek paksaan. Pernah ada yang memberi kritik, bahwa definisi seperti itu terlampau mengabaikan aspek normatif dan kerap mengabaikan aspek kontekstual.

Bagaimana Anda menjelaskan kritik itu?

Dalam kisah *Mahabharata*, misalnya, Patih Haryo Sengkuni atau Sangkuni atau Shakuni misalnya merupakan pembisik sejati. Ia selalu membisikkan rencana-rencana politik (jahatnya) kepada Prabu Destarata yang buta, tak lain ayah dari seratus anak-anak Kurawa dari Dewi Gandari — tak lain adik Haryo Sengkuni. Bisikannya selalu manjur. Destarata nyaris selalu takluk dengan bisikan-bisikan Haryo Sengkuni yang jahat ke pihak Pandawa, yang tak lain sesungguhnya juga masih kerabat dan saudara pihak Kurawa.

Jadi kalau demikian, yang punya kuasa itu siapa? Destaratakah yang seorang raja, atau Haryo Sengkuni yang ada di belakang layar? Secara formal tetap Destarata, karena ia eksekutor atas berbagai masukan dari segenap pihak, untuk mengeluarkan kebijakan. Mengapa, kemudian, ia percaya pada patih Haryo Sengkuni, itu persoalan lain. Kita bisa telusuri, bagaimana Sengkuni *bersekongkol* dengan Gandari, agar tahta kerajaan dipegang oleh anak-anaknya kelak, dan Destarata diposisikan sebagai pemimpin yang terkendali. Apabila direfleksikan ke dalam dunia politik modern, maka para "pembisik" itu dilembagakan ke dalam dewan penasihat, penasehat khusus, bahkan di Amerika ada satu sayap penasihat alias pemberi masukan ke Pre-

13 Mc Lean dan Mc Millan (2003:431).

siden yang dikenal sebagai *West Wing*, sayap barat Gedung Putih yang berisi para pakar yang tugasnya menggarap *apa-apa* yang dibutuhkan presiden. Mereka punya pengaruh. Tetapi eksekusi kebijakan tetap pada sang presiden. Para penguasa kadang terpangaruh oleh seseorang yang kadang kehadirannya kita remehkan: seorang tukang pijat, makelar, atau pengusaha.

Bahkan, di ujung kekuasaan Orde Baru, saya pernah diskusi dengan mantan anggota parlemen dari kekuatan politik di luar pemerintah, di mana ia bercita-cita untuk menjadi tukang sapu presiden.

Tukang Sapu?

Iya. Ia punya analisis presiden yang sudah sepuh ketika itu, yakni Pak Harto, harus diingatkan dari dekat dengan cara membisikinya, agar beliau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden lagi. Tukang sapu kalau dekat presiden alias tukang sapu rumah kepresidenan, maka ia punya peluang untuk *ngomong* dengan presiden, kendatipun belum tentu juga omongannya didengarkan, apalagi disetujui. Politisi yang sudah mantan itu berujar, *ya* mungkin *aku* cuma pemimpi. Aku bermimpi menjadi tukang sapu presiden dan aku akan terus mencari peluang untuk bisa membisikkan sesuatu kepada presidenku: "Pak cukup, cukup sampai di sini, seyogyanya Bapak menyudahi kepresidenan Bapak, karena itu lebih baik bagi bangsa dan regenerasi kepemimpinan. Bapak akan di-*subya-subya*, disanjung-sanjung sebagai orang besar, pahlawan hebat yang pernah memimpin dan memajukan negara ini. Kini Bapak sudah sepuh, dan biarkan yang muda-muda, kader terbaik Bapak diberikan kesempatan."

***Absurd*, cocok jadi inspirasi menulis cerpen ya?**

Ya, politisi atau siapapun yang menghendaki kekuasaan bebas berimajinasi, bukan? Kendatipun Anda mungkin merasa geli, karena mungkin saja sang politisi malah tidak bisa bicara apa-apa di depan Pak Harto. Imajinasi boleh saja, malah yang aneh itu, kalau imajinasi pun tak punya, maka sebagaimana Muhammad Ali katakan, ia seperti burung yang tak punya sayap. *The man who has no imagination has no wings*.[14] Dengan sayap, sang burung bisa terbang ke mana-mana, bisa cerita dan cerita itu bisa ditambah-tambah. Karena itulah dalam fabel, lazim seekor burung punya banyak kisah ketimbang tikus. Karena tikus tak punya sayap. Paulo Coelho dalam novelnya, *The Winner Stands Alone* mengutip kisah anak-anak, yang oleh Mohammad Sobary dicatat kembali sebagai adanya,

> ... dialog *absurd* antara seekor tikus dan burung camar, yang tak saling memahami, karena rupanya tiap hewan memang hanya bicara dalam bahasa masing-

14 Brainyquotes.com

Kekuasaan adalah angin, kekuasaan itu membelai ketika bertiup sepoi-sepoi basa. Menghancurkan ketika bergerak dengan kecepatan tinggi sambil menerpa apapun objek di depannya. Pada saat itu dia sudah berubah menjadi angin rebut, badai atau puting-beliung

- Daniel Dhakidae

masing. Selain itu, si burung mengira setiap hewan pasti memiliki sayap seperti dirinya. Maka, ketika melihat si tikus tak bersayap, dia pun bertanya, "Mana sayapmu?" Dan si Tikus hanya *plonga-plongo*, sambil memandang dengan heran sayap si burung. Karena tak mendapat jawaban, camar pun berkesimpulan bahwa si tikus pasti sakit. Dia menduga binatang itu baru saja dihajar monster kejam yang merampas sayapnya, sekaligus membuatnya bisu.

Dia iba pada si tikus, dan dengan murah hati 'membawa' binatang malang itu dengan paruhnya, melanglang buana di angkasa. Beberapa lama kemudian, dia mendarat lagi dengan profesional, dan aman. Si tikus kemudian ditinggalkannya seperti semula.

Lama si tikus stres membayangkan kembali pengalaman dahsyat yang begitu musykil dalam nalar dan kesadarannya. Baginya, mikraj nabi mungkin lebih sederhana daripada pengalamannya sendiri. Maka, lama-lama, dia percaya, apa yang dialaminya itu hanya sebuah mimpi.[15]

Kembali ke yang tadi: Adakah kritik teoritik yang lebih konkrit dari definisi Dahl?

Soal kritik yang lebih tertata, misalnya mari kita lihat Kamus *Concise Dictionary of Politics* dicatat tiga kritik utama atas definisi tersebut. *Pertama*, terkait dengan persoalan intensionalitas. Jika kita mengabaikan konteks intensionalitas, keniatan atau kesengajaan, kita akan menjumpai situasi yang paradoks. Misalnya, si Korban (*Victim*) punya kekuasaan lebih besar ketimbang si Penyiksa (*Bully*) justru karena si Korban terprovokasi oleh si Penyiksa. Tanpa adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam satu struktur kekuasaan yang timbal balik dan fungsional, maka B akan melawan A, karena merasa terprovokasi dan terhinakan. B akan menjadi *banteng ketathon* berubah beringas melawan A. Tanpa suatu hubungan yang mempertalikan A dan B secara konsesual, maka konsep kekuasaan menjadi *tanpa makna*.

Kedua, terkait dengan keterbandingan (*comparability*) dan besaran jumlah (*quantifiability*). Maksudnya begini: kekuasaan harus dilihat dari

15 Mohammad Sobary, "*Suara Rakyat, Suara Angin Lalu*", *Media Indonesia*, 30 Oktober 2009. Lihat juga Coelho (2009:79).

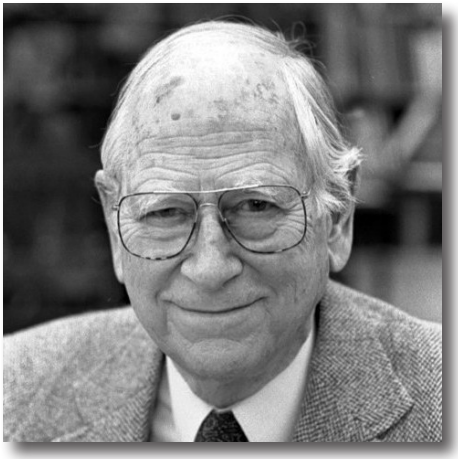

SOCIALSCIENCESPACE.COM

Demokrasi, tampaknya, ialah sedikit untung-untungan. Tapi ia kemungkinan juga tergantung pada apa yang kita sendiri lakukan

- Robert Dahl

Democracy, it appears, is a bit chancy. But its chances also depend on what we do ourselves

konteksnya. Bila si A punya kekuasaan atas B, maka dalam hal apakah itu? Maka, harus ada perbandingan. Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konteks geografi dan demografi, serta banyak variabel lain, sesuai dengan skup *yang dikuasainya*. Maka, sangatlah sulit untuk memperbandingkan kekuasaan antara dua individu ataupun kelompok. Logika sederhananya begini: kalau si A punya lima buah apel dan si B punya lima buah jeruk, maka lebih *berkuasa* mana: A atau B? Soal besaran jumlah, lebih berkuasa mana negara berpenduduk *banyak atau sedikit*? Tentu kita akan cepat-cepat mencari konteksnya *bukan*? Belum tentu negara A berpenduduk sedikit berarti lebih sedikit kekuasaannya atas negara B yang lebih besar jumlah penduduknya.[16]

Masih ada lagi?

Masih. *Ketiga*, dikaitkan dengan waktu (*time*) dan sebab-akibat (*causation*). Definisi di atas (A memiliki kekuasaan atas B, apabila A dapat memengaruhi B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki B), dianggap merupakan suatu definisi statis saja apabila mengabaikan *waktu* dan *sebab-akibat*. Ada contoh begini: misalnya negara kita tengah *gonjang-ganjing* dan militer melakukan kudeta (*coup d'etat*). Militer pun berhasil menguasai lapangan, maka otomatis kalangan militer memiliki *kekuasaan*

16 Mc Lean dan Mc Millan (2003:431).

atas negara yang baru saja dikudetanya. Tetapi persoalannya tidak berhenti sampai di situ, karena militer harus mempertahankan stabilitas politik dan memulihkan kondisi ekonomi secepatnya.[17] Kudeta, dalam banyak kasus, hanyalah solusi sementara: militer biasanya mempercepat pemilu dan menyerahkan pemerintahan ke pihak sipil. Kalau sipil gagal, huru-hara terjadi, militer biasanya mudah terpancing untuk ambil alih kekuasaan lagi. Dalam masyarakat atau negara yang kompleks, kekuasaan tidak mudah didefinisikan: kekuasaan itu kompleks dan kait-mengait.

Terlepas dari kritik-kritik itu, tampaknya kata "pengaruh" atau *effect* atau *influence*, merupakan kata kunci terpokok...

Kata "memengaruhi" atau "pengaruh" memang menjadi cukup penting, sehingga orang yang sesungguhnya enggan atau segan melaksanakan sesuatu, pada akhirnya rela melakukannya. Itu terjadi, antara lain karena adanya pengaruh yang luar biasa dari pimimpinan pada yang dipimpin. Menurut Dahl, ada dua jenis pengaruh dalam konteks kekuasaan: pengaruh koersif, yakni pengaruh yang efektifitasnya dilakukan dengan ancaman dan hukuman; serta pengaruh terandal, pengaruh yang kemungkinannya dipatuhi tinggi sekali.[18] Dahl sendiri cenderung tidak mempersoalkan hadirnya sejumlah istilah yang kedengarannya berbeda-beda tetapi tetap merujuk pada makna kekuasaan. *Power*, menurut Dahl identik dengan *influence, authority and rule*. Soal *influence* pada pembahsan tentang kepemimpinan telah kita singgung panjang lebar. Di atas semua itu, dalam kajian yang lebih rumit lagi, apa yang dikemukakan Dahl di atas, dikelompokkan ke dalam pandangan pluralis atau *one-dimensional view of power*.

Gitu ya? Peta konsepnya gimana sih?

Begini: Dalam peta perdebatan konsep masih ada tiga kelompok lagi: kubu pengkritik pluralis (*two-dimensional view of power*); kubu radikal (*three-dimensional view of power*); dan kubu realis (*four-dimensional view of power*).[19]

- Kelompok *pertama*, *one-dimensional view of power* menyandarkan fokus pengamatannya pada tingkah laku [*behaviour*] para aktor politik dalam proses pengambilan keputusan (*decision making)* terhadap berbagai isu-isu kunci atau isu-isu penting (*key issues)*, yang memunculkan konflik aktual antar-kepentingan subyektif yang sifatnya bisa diamati (*observable [overt] subjective conflict)*. Kepentingan dilihat sebagai pilihan-pilihan kebijakan

17 Mc Lean dan Mc Millan (2003:431).

18 Dahl (1961).

19 Diringkas dari Agussalim (1998:11-27).

PROPERTY.MPFINANCE.COM

Ketika kita berpikir kekuasaan di abad ke-21, kita menjauh dari gagasan kekuasaan yang selalu *zero sum* - keuntungan bagi saya kehilangan buat Anda dan sebaliknya. Kekuasaan juga dapat *positive sum*, di mana keuntungan Anda bisa jadi keuntungan saya juga

-Joseph Nye

As we think of power in the 21st century, we want to get away from the idea that power's always zero sum - my gain is your loss and vice versa. Power can also be positive sum, where your gain can be my gain.

(*policy preferences)* yang diungkapkan melalui partisipasi politik, sehingga konflik kepentingan identik dengan konflik preferensi kebijakan (*political participation)*.

- Kubu kedua [*two-dimensional view of power*] berangkat dari kritik atas pandangan di atas. Kritik tersebut terutama disampaikan oleh Bachrach dan Baratz. Fokus pengamatan atas kekuasaan tidak sekadar melibatkan para pengambil keputusan [*decision-making*], tetapi juga yang bukan pengambil keputusan [*non-decision-making*]. Lukes mencatatnya sebagai *qualified critique*, karena yang bukan pengambil keputusan pun dipandang merupakan bentuk dari pengambil keputusan.
- Kubu ketiga disampaikan oleh Steven Lukes [*three-dimensional view of power*] atau yang dikenal sebagai pandangan radikal. Lukes mencoba melengkapi dua dimensi sebelumnya, bahwa kekuasaan mungkin saja digunakan dalam situasi konflik potensial atau laten, di mana konflik laten tersebut mungkin tidak akan menjadi konflik aktual. Lukes juga berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan adalah suatu fungsi dari kekuatan kolektif dan *social arrangement*, dan penggunaan kekuasaan semacam itu mungkin dapat berbentuk suatu aksi maupun bukan.
- Kubu selanjutnya ialah kubu yang mengungkapkan pandangan tentang dimensi keempat kekuasaan [*four-dimensional view of power*]. Pandangan itu disampaikan oleh Isaac dan Benton. Dimensi ini melihat bahwa fokus perha-

> tian kekuasaan bukan pada individu yang terpisah dengan lingkungannya, tetapi pada individu sebagai bagian dari produk lingkungan sosialnya. Karenanya, analisis kekuasaan dan interest tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial di mana aktor-aktor tersebut terlibat dan berpartisipasi. Manusia, bagaimanapun, memiliki kekuasaan dalam dunia sosial. Kekuasaan dimiliki dan digunakan oleh masing-masing sebagai individu, tetapi oleh orang dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang memiliki posisi dan peranan tertentu salam masyarakatnya.

Agak rumit ya?

Ya, begitulah. Kekuasaan pun dipandang tidak hanya dalam konteks nyata tetapi juga *laten*, pun dalam konteks keterhubungannya dengan lingkungan sosial lebih luas. Tentang kekuasaan nyata dan potensial ini mengingatkan pada judul buku Ricklefs, *The Seen and Unseen Worlds in Java*.[20] Soal "kekuasaan Jawa", nanti akan kita bahas di bagian lain buku ini. Tetapi, bukankah, sebelum ini saya sudah sangkut-pautkan kekuasaan dan kentut yang *notabene* udara? Dalam hal ini, uraian Dhakidae berikut mempertegas kembali ulasan reflektif kita, bahwa,

> Kekuasaan begitu nyata, dan sekaligus juga begitu misterius. Nyata ketika darah tumpah, dan perlawanan ditumpas sampai hancur, manusia dipenjarakan baik karena melakukan kejahatan, karena persaingan politik; bahkan dalam negara otoriter orang dipenjarakan karena melakukan kebaikan. Namun, kekuasaan juga bisa "manis" bagi seorang yang miskin turun-temurun karena dengan mendapat lisensi ekspor-impor, misalnya seorang bisa menjadi bilioner dalam tempo singkat. Kekuasaan bisa menghilangkan orang dan menemukannya kembali. Kekuasaan juga bisa misterius ketika seorang bersahaja dan tidak memiliki apapun tiba-tiba menjadi penguasa tanpa restu kekuasaan yang sedang memerintah, menjadi penguasa suatu bangsa dan mengalahkan orang berpunya, dan berduit. Kekuasaan juga bisa menjadi sesuatu yang sama sekali tidak nyata dalam kurikulum anak sekolah dasar, dalam pelajaran agama, pelajaran etika, dan lain-lain yang akan diingat dan dipraktikkan seumur hidup nanti yang dalam distingsi halus disebut sebagai hegemoni. Karena berada di antara "nyata" dan "tidak nyata" itulah kekuasaan selalu menarik perhatian dan tidak akan kering bagi studi dan analisis di mana pun dan kapan pun.[21]

Selain konteks di atas, adakah jenis-jenis kekuasaan?

Dari Jawabannya antara lain ada di buku Sallie Westwood *Power and the Social*. Buku ini mencoba menelusuri genealogi gagasan tentang kekuasaan dari Hobbes hingga Giddens, yang membahas beberapa subtema yang lebih

20 Ricklefs (1998).

21 Dhakidae (2015:1).

Semua kekuasaan politik ialah kepercayaan

- Charles James Fox

All political power is a trust.

seksama.[22] Intinya, kekuasaan itu tergantung bagaimana ia dipandang dan sispa yang memandang.

Bisa dinukilkan secara ringkas?

Profesor Sosiologi Universitas Manchester ini mengingatkan, kekuasaan ialah tema populer yang telah diperbincangkan banyak filosof sejak masa lampau. Di luar Yunani, di India misalnya kekuasaan diperbincangkan dalam epos *Mahabharata*, *Bharata Yudha*, dan *Ramayana*. Dalam tradisi Islam ada Ibnu Khaldun. Di era modern muncul para pemikir Barat seperti Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704), dan Machiavelli (1469-1527). Ketiga pemikir ini memposisikan manusia sebagai *rational actors*. Konsepsi kekuasaan yang rasionallah yang akhirnya mengemuka. Karena kekuasaan selalu terkait dengan konteks sosial, maka interaksi dan konfigurasi sosial dan politik yang menyertainya sangat penting. Karenanya relavan pernyataan bahwa: semua relasi sosial adalah relasi kekuasaan itu sendiri.

Dalam perkembangannya, wacana tersebut berkembang tak hanya menyangkut kaitan individu dan masyarakat, tetapi lebih pada relasi antara yang alami (*natural*), yang tampak (*virtual*), dan masyarakat (*the social*). Di sela-sela itu diketengahkan kontribusi pemikiran Karl Marx (1818-1883) dan Neo-Marxis, antara lain paling menonjol Antonio Gramsci (1891-1937) yang mempopulerkan konsep *hegemoni*. Selain itu pemikir lainnya, Max Weber (1864-1920) yang memperkuat konsepsi eksistensi aktor-aktor sosial yang rasional dan menjelaskan hubungan moralitas dan *reason* (akal). Dicatat pula kontribusi Habermas, Giddens, Nietzsche dan tentu saja Foucault.

Apa yang disimpulkannya dari banyak bacaan itu?

Westwood mencatat hal-hal penting: (1) Terdapat pandangan tentang konsep kekuasaan *zero sum* (tumpas kelor) yang sangat menekankan dua kata kunci yakni *repression* (represi) dan *coercion* (paksaan). Konsep kekuasaan *zero sum game* ini mempertentangkan antara yang *powerfull* dengan yang *powerless*. Selanjutnya, (2) Kekuasaan dipandang sebagai konsekuensi dari gagasan hegemoni dan kontra-hegemoni; (3) Sebagai konsekuensi atas pandangan *zero sum*, kekuasaan dipandang sebagai manipulasi dan strategi; (4) kekuasaan terkait pengetahuan (*knowledge*), disiplin dan *go-*

22 Westwood (2002).

vernance; (5) Kekuasaan *performative* merupakan produk dari pelanggaran (*transgressions*) dan gangguan (*disruptions*).

Terkait dengan tema-tema sosial, Sallie membaginye ke dalam macam-macam kekuasaan: (1) kekuasaan rasialis (*racialised power*); (2) kekuasaan kelas (*class and power*); (3) kekuasaan gender (*engendered power*); (4) kekuasaan seksualitas (*power and sexuality*); serta (5) kekuasaan visual dan spasial (*visual and spatial power*). Elaborasi ringkasnya:

- **Kekuasaan rasialis**. Masalah ras yang terkait sekali dengan konteks politik identitas, merupakan masalah yang senantiasa hadir, bahkan di dunia modern ini sekalipun. Isu rasial memang isu primitif dan kuno di era modern, tetapi tidak dapat dijamin bahwa konflik rasial atau paham rasialisme musnah sama sekali di era modern.
- **Kekuasaan kelas**. Terkait dengan pandangan dan kritik pandangan atas Karl Marx. Walaupun konsepsi kelas ala Marx sudah banyak memperoleh kritik dan revisi, tetapi wacana ini tetap menjadi salah satu sentral pembahasan dalam sosiologi. Konsep kelas pun tidak lagi seketat yang digambarkan Marx, bahwa mesti ada pertarungan atau perjuangan kelas, dan dihantui oleh upaya mewujudkan masyarakat tanpa kelas yang utopis itu.
- **Kekuasaan gender**. Intinya terletak pada keadilan, terkait kesempatan yang sama dalam mengakses sumber-sumber kekuasaan tanpa memandang jenis kelamin. Kalangan feminis mengkritik keras kekuasaan patriarkhal (*patriarchy power*), kekuasaan yang didominasi sedemikian ketatnya oleh laki-laki. Diskriminasi gender, itulah yang dipersoalkan.
- **Kekuasaan seksualitas**. Kekuasaan kaitannya dengan seksualitas, merujuk pada Foucault yang menggarisbawahi adanya hubungan antara kekuasaan dengan cara pandang atas seksualitas. Foucault mempertanyakan perkembangan sikap dan wacana masyarakat Eropa tentang seksualitas selama tiga abad belakangan. Kajiannya sangat rumit dan tampaknya tak habis-habis untuk dibahas.
- **Kekuasaan spasial**. Itu terkait dengan ruang atau wilayah. Dalam pandangan negara modern, lansekap kekuasaan itu terdiri dari konsep mengani sebuah bangsa yang dilingkari oleh teritorial (*territories*) dan perbatasan (*borders*). Bahwa, walaupun globalisasi terbayangkan sebagai dunia tanpa batas, tetapi bagaimanapun kekuasaan spasial masih sangat relevan.
- **Kekuasaan visual**. Inilah kekuasaan pencitraan. *Televisual power* berkait dengan siapa yang menguasai alat-alat pencitraan (media massa), sejatinya dialah yang berkuasa. Kekuasaan visual dapat mengatasi kekuasaan spasial, karena *televisual power* tak mengenal batas wilayah, apalagi di era internet ini.●

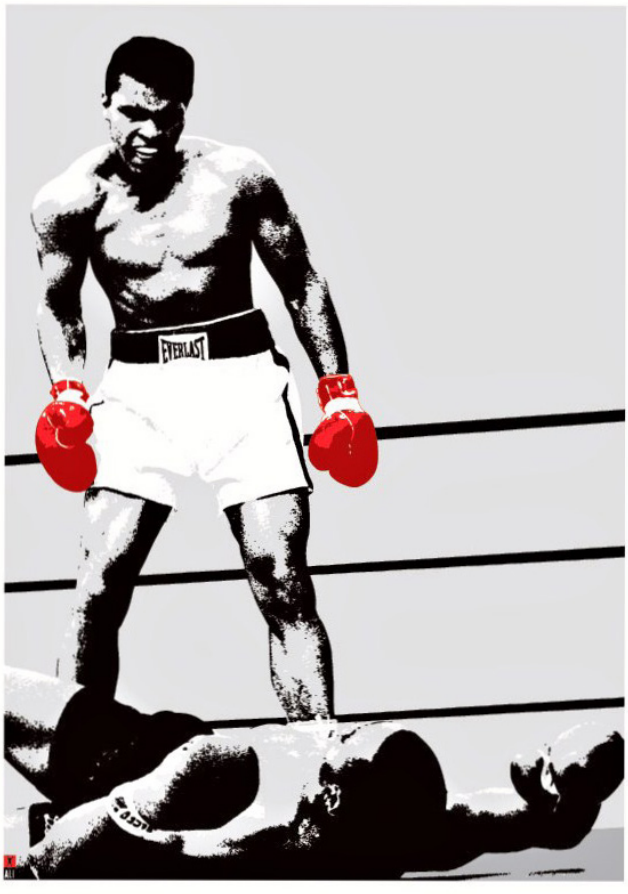

DAILYMAIL.CO.UK

Juara tak dibuat di tempat latihan. Juara terbentuk dari sesuatu yang jauh di dalam diri: keinginan, mimpi, visi

- Muhammad Ali

Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them - a desire, a dream, a vision.

Bab 16

Kekuasaan

Apa Saja Hukum-hukumnya?

APA hakikat hukum kekuasaan itu?

Hukum kekuasaan mengingatkan kita pada hukum alam atau *sunatullah*. Hukum kekusaaan itulah *sunatullah* kekuasaan. Ada konteks sebab-akibat dan sejumlah persyaratan bagaimana kekuasaan itu dipergulirkan. Di halaman depan buku ini, saya mengutip satu ayat dalam Al Qur'an bahwa Allah Maha Menghendaki. Ia menghendaki seseorang memperoleh kekuasaan, dan menghendaki pula mencabut kekuasaan atas orang itu (Q.S. Ali Imron: 26). Maka berlakulah *sunatullah* kekuasaan. Dalam firman-Nya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu (Q.S. Al-Mujadilah: 11). Dalam konteks ini ada variabel ilmu, maka kita segera bisa paham mengapa kekuasaan orang-orang bodoh tidak sekuat orang-orang berilmu. Secara fisik orang-orang barbar bisa menaklukkan peradaban tingkat tinggi sekelas Baghdad pada zamannya, tetapi secara visi, bagaimana?

Selanjutnya, strategi sangat diperlukan. Sepanjang sejarah, kita mencatat banyak kisah, misalnya David (Daud) mampu mengalahkan Goliath — sebagai simbol yang kecil pun ternyata bisa mengalahkan yang besar. Kekuatannya terletak pada strategi. Kalau kita baca beberapa kisah peperangan Rasulullah SAW, maka strategi sangat menentukan kemenangan — di samping faktor-faktor penting lain, seperti semangat *jihad* atau "kesungguh-sungguhan". Jumlah pasukan Nabi selalu lebih sedikit ketimbang lawan, tetapi dengan kecanggihan strategi peperangan pun dimenangkan.

Tapi, harap dicatat juga bahwa pasukan Nabi pernah kalah karena terlena — karena semangat *jihad* tergeser semangat memungut pampasan perang. Itu menjadi pelajaran berharga. *Jihad* yang akbar ialah mengalahkan hawa nafsu, demikian ajaran Nabi. Uraian di atas setidaknya menjelaskan, bahwa intervensi Allah itu sebanding dengan daya upaya manusia dalam mengatur siasat kemenangannya.[1]

Para pakar modern belakangan juga rajin merumuskan hukum-hukum kekuasaan..

Ya. Misalnya Robert Greene dalam *48 Hukum Kekuasaan*.[2] Buku ini lumayan tebal — kaya dengan kisah-kisah, analisis dan nasihat sang penulis. Apa saja 48 itu? Panjang. Tapi akan saya ringkaskan.

Apa yag dimaksud kekuasaan menurut Greene?

Sederhana saja: tidak terlampau beda jauh dengan definisi kekuasaan secara umum, ia terkait dengan pengaruh. Yang dipentingkan oleh Greene bukan definisi lagi, tatapi lebih pada bagaimana memainkan "kekuasaan", bagaimana agar kekuasaan awet dengan mematuhi dan tidak *sembrono* atas apa yang disebutnya sebagai hukum-hukum kekuasaan. Tulisnya,

> Dewa-dewa kekuasaan tidak menyukai kesembronoan; mereka memberikan kepuasan pokok hanya kepada orang-orang yang belajar dan merenung, dan menghukum orang-orang yang hanya membaca manusia sepintas lalu untuk bersenang-senang saja.[3]

Artinya, hukum kekuasaan itu sangat rasional, bisa dikalkulasikan. Kadang penguasa, diambang kejatuhannya baru menyadari, dirinya telah banyak menyeleweng, telah *sembrono* dengan kekuasaan sehingga membuatnya jatuh. Serelah jatuh baru menyesalnya setengah mati. Dalam hal ini, Greene menasihati agar kekuasaan disikapi hati-hati. Catatnya,

> Tidak ada seorang pun menginginkan lebih sedikit kekuasaan; semua orang menginginkan lebih banyak kekuasaan. Namun demikian, di dunia masa kini amatlah berbahaya jika kita tampak terlalu haus akan kekuasaan dan bersikap mencolok saat melakukan berbagai tindakan yang diambil akibat kekuasaan itu.[4]

Sebelum Anda saya minta meringkas hukum-hukum

1 Lihat misalnya Tresna (2006).

2 Greene (2007).

3 Greene (2007:25).

4 Greene (2007:16).

ISLAMLIB.COM

Sejak semula, kekuasaan selalu berwajah dua: sekaligus mempesona dan menakutkan

- Franz Magnis-Suseno

kekuasaan versi Greene, bisa dijelaskan, bagaimana sejatinya kekuasaan itu? Sarat nilai atau netral?

Bagi kaum moralis, kekuasaan itu tentu sarat nilai. Artinya, kekuasaan, sebagaimana diuraikan oleh Lord Acton dan Al-Ghazali di atas, harus diarahkan ke hal-hal yang positif, bukan sebagai alat untuk menyeleweng. Tetapi, kita harus paham juga bahwa sejatinya kekuasaan itu netral: tergantung penggunanya. Menurut Romo Magnis-Suseno, "Sejak semula, kekuasaan selalu berwajah dua: sekaligus mempesona dan menakutkan".[5] Apa yang dikemukakan Romo itu benar semata, apabila kita kaitkan dengan rujukannya baik apakah sejarah kekuasaan di Barat (Eropa dan Amerika Serikat) atau non-Barat. Apa yang dikemukakan tersebut, selaras dengan pendapat futurolog Alvin Toffler, bahwa,

> Sekalipun ada bau busuk yang melekat pada pengertian dasar mengenai kekuasaan karena kesalahan penggunaan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan itu sendiri tidak bersifat baik atau buruk. Ia merupakan aspek yang tak terhindarkan dari setiap hubungan manusia, dan ia mempengaruhi segala sesuatunya, mulai dari hubungan seksual kita hingga pekerjaan yang kita sandang, mobil yang kita kendarai, televisi yang kita tonton, harapan-harapan yang kita kejar. Dalam derajat yang lebih tinggi ketimbang yang dibayangkan sebagian besar orang, kita adalah produk kekuasaan.[6]

Bau busuk?

Tentu bau busuk kekuasaan yang dimaksud tak jauh dari imbas negatif penyalahgunaan kekuasaan, atau ketika orang berebut dan berupaya mempertahankan kekuasaan. Bagi Toffler, "Dari seluruh aspek kehidupan kita,

5 Suseno (2000).

6 Toffler (1991:3).

COTIDIANUL.RO

Sekalipun ada bau busuk yang melekat pada pengertian dasar mengenai kekuasaan karena kesalahan penggunaan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan itu sendiri tidak bersifat baik atau buruk ... Dalam derajat yang lebih tinggi ketimbang yang dibayangkan sebagian besar orang, kita adalah produk kekuasaan

- Alvin Toffler

kekuasaan tetap merupakan salah satu yang paling seddikit dipahami dan paling penting — terutama bagi generasi kita".[7]

Baiklah. Sekarang silakan mulai dengan ringkasan hukum kekuasaan yang pertama versi Greene ...

Hukum kekuasaan pertama versi Greene: *Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan Anda*. Aneh bukan? Setidaknya pernyataan itu menyiratkan pesan kepada kita, bahwa bawahan pun punya kekuasaan. Saya jadi ingat pesan Eggi Sudjana tentang bagaimana Islam dipandang dalam konteks fungsional.[8] Sepenangkapan saya, kalau pendekatannya fungsional, maka sebagaimana Eggi katakan, semua akan berjalan secara egaliter: pembantu adalah pemimpin dalam tugasnya, sopir adalah pemimpin, semua adalah pemimpin, selaras dengan fungsinya. Makanya jangan suka meremehkan. Penjelasan hukum ke-1 ini jelas. Kita sudah sering mendengar selentingan populer bahwa bos tidak pernah salah, bukan? Bahkan di kita sudah lumrah

7 Toffler (1991:3).

8 Sudjana (2008).

dikenal dua hukum bawahan terhadap atasan:

1. Bos tidak pernah salah;
2. Apabila bos salah, kembali ke no1.

Bagaimana dengan hukum kedua dan seterusnya?

Kita ringkas yang ke-2 sampai 15 karena lebih banyak saran.

- Jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh
- Sembunyikan niat Anda
- Senantiasalah bicara lebih sedikit ketimbang yang diperlukan
- Begitu banyak hal tergantung dari reputasi – jagalah reputasi dengan nyawa Anda
- Carilah perhatian barapa pun harga yang harus dibayar
- Mintalah orang lain bekerja keras bagi Anda, tetapi senantiasalah terima pujian atas kerja keras mereka
- Usahakan agar orang lain mendatangi Anda — pergunakan umpan bila perlu
- Raihlah kemenangan lewat tindakan Anda, jangan pernah memang lewat perdebatan
- Infeksi: hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial
- Usahakan agar orang lain tetap tergantung pada Anda
- Pergunakan kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korban Anda
- Saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain, jangan pernah pancing belas kasihan atau rasa syukur mereka
- Berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah seagai seorang matamata
- Hancurkan musuh Anda secara total.

Hmmm.. Itu hukum atau nasihat? Kalau nasihat kok ada yang "kejam banget". Misalnya, nasihat "hancurkan musuh Anda secara total"?

Iya. Saya juga *ngeri* mendengar nasihat-nasihatnya. *Kok kayak*-nya mengajari kita licik dalam politik? Tetapi, maksud saya mengutip nasihat-nasihat itu buat wacana kita saja. Saya yakin Anda paham mana-mana nasihat yang mengajak kita untuk ber-*high politics*, ber-*low politics* atau yang netral-obyektif. Nasihat seperti, "hancurkan musuh Anda secara total", saya sendiri tidak cocok. Mengapa harus dihancurkan secara total? Menapa harus *zero sum game*? Mengapa tidak cukup dilemahkan saja? Saya kira, inilah beda antara pakar strategi asal Prusia penulis buku klasik *On War*,

yakni Clausewitz dengan *The Art of War* karya jenderal-filosof Tiongkok kuno Sun Tzu. Clausewitz menasihati agar perang dilakukan secara total, untuk mengalahkan musuh secara total sampai ke akar-akarnya. Tapi tidak demikian halnya Sun Tzu, yang terkesan lebih humanis.

Baik. Hukum atau, tepatnya nasihat lainnya lagi apa?

Kita catat nasihat nomor 16 sampai 35 berikut:

- Pergunakan ketidakhadiran Anda untuk meningkatkan respek dan penghormatan
- Usahakan orang lain agar selalu merasakan teror: kembangkan aura tak bisa ditebak
- Jangan bangun benteng untuk melindungi diri sendiri — isolasi adalah sesuatu yang berbahaya
- Ketahuilah siapa yang Anda hadapi — jangan singgung perasaan orang yang salah
- Jangan berkomitmen pada siapapun
- Berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap seseorang yang tolol — berikan kesan bahwa Anda lebih bodoh ketimbang sasaran Anda
- Manfaatkan taktik menyerah: ubah kelemahan menjadi kekuasaan
- Himpun kekuatan Anda
- Berperanlah sebagai seorang penghuni istana yang sempurna
- Ciptakan kembali diri Anda sendiri
- Jagalah agar kedua tangan Anda tetap bersih
- Permainkan kebutuhan orang lain untuk mempercayai sesuatu untuk menciptakan pengikut setia
- Bertindaklah dengan berani
- Buatlah rencana hingga tuntas
- Berilah kesan bahwa prestasi Anda tampak mudah dicapai
- Kendalikan pilihan-pilihan Anda: suruhlah orang lain bermain dengan kartu yang Anda bagikan
- Bermainlah sesuai fantasi orang lain
- Ketahuilah kelemahan setiap orang
- Jadilah seorang bangsawan dengan cara Anda sendiri: bersikaplah bak seorang Raja agar diperlakukan seperti seorang Raja
- Kuasailah seni memilih waktu yang tepat

Coba perhatikan, nasihat-nasihat tersebut mengajari pembacanya untuk mengedepankan muslihat. Jangan terperangkap oleh irama gendang

THEGUARDIAN.COM

Ketika seluruh dunia diam, bahkan satu suara pun menjadi sangat kuat

- Malala Yousafzai

When the whole world is silent, even one voice becomes powerful.

lawan. Artinya jangan dipengaruhi lawan secara berlebihan, sebaliknya pengaruhilah lawan Anda sehingga mereka yang menari di atas irama gendang yang kita tabuh. Jangan remehkan lawan, apalagi apabila Anda tidak tahu kelemahannya. Mengenali lawan dan meneliti kelemahannya diperlukan, agar Anda bisa bermanuver dengan canggih dan "mematikan". Hmmm...

Selanjutnya?

Ke-36 sampai 48, yakni:

- Sepelekan hal-hal yang tak bisa Anda miliki: mengabaikan mereka adalah pembalasan dendam terbaik.
- Ciptakan tontotan yang memikat
- Berpikirlah sesuka Anda, tetapi bersikaplah seperti orang lain
- Aduk-aduk air untuk menangkap ikan
- Bencilah segala hal yang diperoleh dengan cumacuma
- Hindarilah mengambil-alih posisi seseorang yang hebat
- Serang si gembala, maka dombadombanya pasti berhamburan
- Kenalilah hati dan pikiran orang lain
- Perdaya dan pancing amarah orang lain dengan efek cermin
- Sampaikan ceramah tentang kebutuhan untuk berubah, tetapi jangan pernah lakukan reformasi dalam terlalu banyak bidang kehidupan dalam waktu singkat
- Jangan pernah terlihat terlalu sempurna

Lebih baik seorang bodoh yang cerdas ketimbang kecerdasan yang bodoh

- William Shakespeare

Better a witty fool than a foolish wit

- Jangan melebihi sasaran yang telah Anda tentukan: dalam hal kemenangan, belajarlah untuk tahu kapan Anda harus berhenti.
- Jadilah seperti uap yang tak berbentuk.

Janganlah tampak terlalu menonjol. Jangan tampakkan kelebihan-kelebihan Anda. Bersahajalah. Ini nasihat baik bagi suatu entitas yang tengah bertumbuh di tengahtengah rezim yang semi-otoriter atau otoriter. Seorang pemimpin media massa cetak kenamaan, pernah menjelaskan pada peserta pertemuan penulis yang disponsori olehnya, bahwa strategi yang ditempuh tatkala berada pada rezim yang semi-otoriter atau otoriter adalah strategi *mlipir-milipir* alias berkelok-kelok. Bahasa tajuk rencana suratkabar itu, kalau diteliti pun berkelok-kelok. Maksudnya membingkai kritik dan pendapat sedemikian rupa menghindari kalimat-kalimat yang sarkastik. Dengan strategi *mlipir-milipir*, suratkabar itu tetap hidup dan berpengaruh, walaupun sempat terkena pembredelan.

Nasihat bagus lainnya: belajarlah untuk tahu kapan waktunya berhenti. Kalau hal ini dicamkan, maka tidak ada penguasa yang jatuh secara tragis. Penguasa yang tak tahu kapan waktunya berhenti, ibarat pasrah dengan kehadiran revolusi. Ada banyak cara untuk jatuh secara menyakitkan: dikudeta, diprotes jutaan rakyat (*people power*), atau disidangkan oleh lembaga perwakilan tertinggi melalui proses *impeachment* alias permakzulan. Tapi, tidak terpilih lagi sebagai pejabat, alias tatkala *incumbent* kalah, juga mengecewakan — ternyata rakyat tidak mendukungnya lagi. Cukup adalah cukup — *enough is enough*.

Nasihat yang terakhir jadilah seperti uap yang tak berbentuk, mengingatkan lagi bahwa kekuasaan itu seperti kentut. Kekuasaan itu idealnya harus disebarkan dengan pengaruh yang tak perlu tampak. Hegemoni lebih baik ketimbang dominasi. Apabila hegemoni telah tertanam kuat dalam suatu komunitas yang dikuasai, penguasa tak usah repot-repot menghadirkan alat pemaksa. Apabila levelnya masih dominasi, maka alat-alat pemaksa akan memaksa yang tak taat aturan dipaksa taat.

Tapi, menjadi uap, dimaknai juga sebagai kemauan sang penguasa untuk beradaptasi. Kekuasaan perlu diraih dan dipelihara secara adaptatif — tanpa itu kekuasaan cepat berpindah ke yang lain. Sebagaimana dinyatakan Sun Tzu, "Kemampuan untuk meraih kemenangan dengan berubah-ubah

dan beradaptasi sesuai dengan lawan disebut sebagai kejeniusan."[9]

Kalau kejeniusan itu penting, bagaimana kebodohan?

Kebodohan hanya akan menimbulkan kefatalan. Kita simak misalnya, kisah-kisah berikut ini:

Elang, Ular Hitam dan Musang

Seekor elang mengeluh kepada ketam, bahwa anak-anaknya yang belum bisa terbang selalu dimakan ular hitam.

"Bagaimana caranya aku membunuh ular hitam itu?"

Ketam pun berpikir "Elang adalah musuh alami bangsaku, apa yang akan kulakukan adalah penipuan. Aku akan memberitahukan dia tentang kebenaran dan kebohongan, yang dengan itu musnahlah semua elang."

Maka, dianjurkannya elang menaburkan serpihan-serpihan ikan dan daging dari sarang musang sampai ke sarang ular. Anjuran ini diikuti. Sehingga, terjadilah: musang membunuh semua ular — tapi juga semua elang yang masih hidup di pohon itu.[10]

Si Singa yang Bodoh dan Si Rubah yang Cerdik

Suatu hari, si rubah mau mati kelaparan. Dia melihat si Singa sedang menyantap daging rusa. Rubah yang melihat itu, berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan makanan Singa. Akhirnya, dia menemukan ide.

Rubah mendekati Singa lalu langsung mengambil makanan Singa tanpa meminta. Singa mengaum dengan keras. Dan berkata, "Berani-beraninya engkau mengganggu makan siangku, sang raja hutan. Kamu mengambil makananku tanpa meminta ijin! Sekarang, aku akan memakanmu!"

"Apa yang kamu katakan?! Akulah raja hutan yang sesungguhnya!" kata Rubah.

"Mana buktinya? Aku mau melihatnya!" kata Singa dengan suara keras.

"Baiklah, ikutilah aku!" kata Rubah dengan suara yang tak kalah keras.

Lalu mereka sampai dimana banyak terdapat banyak rusa yang sedang makan rumput. Lalu Rubah dan Singa mendekati mereka. Mereka yang melihatnya langsung lari terbirit-birit.

Lalu rubah berkata, "Apakah kamu sudah melihat buktinya?"

"Ya yang mulia. Maafkan aku telah menganggu engkau. Aku sudah melihat dengan kepala dan mataku sendiri." Kata Singa.

"Ya sudah. Sana pergi! Dan jangan pernah menganggu aku lagi!" kata Ru-

9 Greene (2007:655).

10 Ajidarma (2002:11).

bah.

"Baiklah yang mulia" kata Singa.

Akhirnya, si Singa pergi. Rubah tertawa senang karena Singa bisa ditipu olehnya. Sebenarnya, Singa tidak sadar, bahwa yang ditakuti oleh rusa itu adalah dirinya. Si Rubah pun selamat dari terkaman Singa.[11]

Apa maksud kisah di atas?

Kebodohan mengundang penipunya. Orang bodoh mudah tertipu. Kekuasaan yang dipegang orang bodoh sangat mudah dimanfaatkan oleh para penunggang lainnya. Kebijakan penguasa bodoh menjadi bumerang bagi kehancuran dirinya dan yang lain. Kisah-kisah di atas hanya fabel, fiksi. Adu kecerdikan lazim saja dalam fabel, misalnya dalam fabel "Kancil Pilek" yang disampaikan M. Amien Rais berikut:

Syahdan pada zaman dahulu kala, ada kerajaan hutan yang dikuasai seekor singa yang amat buas. Meskipun demikian, tetap saja sang raja ingin mengetahui pendapat pihak lain mengenai kebersihan istananya yang bau pesing. Karenanya sang raja memanggil lembu, kijang, dan seekor kancil.

Setelah mencium ke sana ke mari, si lembu tadi mengatakan bahwa istana sang raja amat bersih dan baunya harum. Raja hutan ini marah karena menilai lembu tak jujur. Lembu diterkam menjadi mangsanya. Kemudian giliran kijang. Tak ingin bernasib seperti lembu, sang kijang menjawab seadanya. Tapi apes, dia tetap dimangsa karena dianggap tak punya sopan santun. Menurut singa, si kijang mestinya mengkritik keadaan yang sebenarnya.

Akhirnya, sang kancil pun dipanggil. Sang kancil pintar. Supaya tidak memancing kemarahan sang raja, dia mengaku sedang pilek. "Maaf baginda, saya sedang pilek. Jadi, saya nggak bisa membau," tukas sang kancil. Jawaban itu dinilai singa paling bisa dimaklumi.

Bisa ditebak, si kancil pun selamat.[12]

Cerita di atas gambaran, ketika peta politik otoriter, politikus seperti kancil pileklah yang terus eksis. Sang kancil tak punya pendirian: tidak berani bersikap tegas melawan penguasa zalim, kecuali hanya menghindar hukuman saja.

Masih ada cerita lain?

Masih. Kisah ini saya ambil dari Yusin Hendri W, *88 Cerita Rakyat Terindah dari Negeri China*. Syahdan, di Tiongkok kuno, ada seorang biksu yang

11 Cerpen Karangan: Kelly Venusa B. http://cerpenmu.com/cerpen-anak/si-singa-yang-bodoh-dan-si-rubah-yang-cerdik.html

12 "Amien Rais Tak Ingin Menjadi "Kancil Pilek", seputarindonesia.com, 14/4/2004, http://news.liputan6.com/read/76037/amien-rais-tak-ingin-menjadi-quotkancil-pilek

PANJI MASYARAKAT

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua

- Buya HAMKA

terhukum dan diputuskan untuk dibuang ke pengasingan. Untuk menuju ke sana ia diantar kepala desa. Kepala desa itu punya kebiasaan aneh: ia suka meneliti, memastikan semua beres secara fisik. Misalnya, ketika hendak berangkat, ia memastikan tiga hal: (1) perbekalan yang dibungkus kain (*baufu*); (2) surat jalan; dan (3) sang biksu, dengan cara merabainya masing-masing. Ia meraba *baufu*, dan dia pun bicara kepada dirinya, "baufu ada!"

Demikian pula dengan surat jalan, "Surat jalan, ada!"

Untuk meyakinkan sang biksu ada, ia meraba kepalanya yang gundul, kemudian bergumam, "Biksu ada!"

Terakhir, ia pun memeriksa kepalanya sendiri, "Aku ada!"

Setelah memastikan semua ada, berangkatlah mereka. Perjalan membutuhkan waktu beberapa hari. Tidak lupa setiap harinya, kepala desa melakukan ritual pemeriksaan. Setelah memastikan semua ada, barulah kepala desa lega dan melanjutkan perjalanan kembali. Melihat kebiasaan demiki-

an, muncullah akal sang biksu untuk melarikan diri. Suatu malam, mereka menginap di rumah penginapan. Ketika makan malam bersama, biksu membujuk kepala desa minum arak sebagai tanda kepala desa telah sukses menjalankan tugasnya, toh beberapa hari lagi mereka sampai ke tempat pengasingan. Biksu mengatakan, "Pastilah kesuksesan itu membuat Tuan mendapat promosi tinggi dari atasan!"

Kepala desa pun terbujuk. Ia meminum arak banyak-banyak dan mabuk. Dalam keadaan mabuk itu, biksu mencukur rambut kepala desa hingga gundul dan melarikan diri.

Esoknya kepala desa terbangun. Dalam kondisi setengah sadar ia mulai melakukan pekerjaan rutin. *Pertama*, meraba-raba bungkusan kain *baufu*. Ada! *Kedua*, meraba-raba surat jalan. Ada! *Ketiga*, biksu, di manakah ia? Kepala desa melihat bayangan di cermin, seseorang dengan kepala gundul. Lalu ia meraba kepalanya sendiri. Biksu, ada!

Tak lama kemudian ia bingung: kalau biksu ada, maka di manakah gerangan dirinya?

Ia pun berteriak, "Aku hilang!"[13]

Apa makna cerita di atas?

Kita pasti tertawa terbahak. Anda bisa refleksikan sendiri kisah tersebut. Setidaknya yang penting dicatat ialah pentingnya "kesadaran keakuan". Bukan dalam arti egoisme, tetapi sadar jatidiri dan tanggung jawab. Kepala desa sadar tanggung jawab tugasnya melalui pemeriksaan rutin yang dilakukannya. Tetapi, ia kehilangan jatidiri ketika mabuk: tidak tahu siapa sejatinya dirinya, ketika tidak bisa membedakan lagi dengan yang lain. Ibarat tidak tahu lagi beda kuda luping dengan kuda yang asli. Tidak bisa membedakan tidur di sofa empuk dengan di got.

Kalimat "aku hilang" atau "aku telah hilang", sebaliknya juga memberi pesan filosofis yang bisa diulas panjang lebar. Apalagi, apabila "aku" ditulis dengan "A" besar atau "a" kecil. Aku ada tapi tiada, yang ada hanya Dia! Begitulah lazimnya para sufi. Tetapi walaupun kira-kira hampir ketemu kalimat yang sama "aku telah hilang", tentu saja kisah kepala desa itu berbeda dengan kisah sufi Ibrahim Ibnu Adham. Sufi legendaris itu dikenal tak terlampau memperhatikan kondisi fisiknya, semangat kesufiannya mengatasi wadag jasmaniahnya. Tetapi, bukan berarti sang sufi melenyapkan kesadarannya. Justru karena kecintaan pada-Nya itulah yang secara sadar membimbing jalan kesufiannya. Cinta yang sejati! Bukan cinta yang superartifisial!

13 Hendri W (2013).

Keunggulan merupakan proses yang berkesinambungan dan bukan kecelakaan

- A.P.J. Abdul Kalam

Excellence is a continuous process and not an accident.

Adakah hukum-hukum kekuasaan selain versi Greene?

Banyak versi, kendatipun ada poin-poin yang tumpang tindih. Misalnya, hukum kepemimpinan versi Maxwell. Dalam *The 21 Irrefutable Laws of Leadership,* ia memaparkan 21 hukum kepemimpinan (tampaknya juga identik dengan hukum kekuasaan), sebagaimana saya ringkaskan berikut:

1. **Hukum katup**. Kemampuan memimpin adalah katup yang menentukan tingkat keefektifan seseorang. Semakin rendah tingkat kemampuan seseorang untuk memimpin, semakin sedikit katup yang terbuka untuk potensinya. Semakin tinggi kepemimpinannya, semakin besar keefektifannya.
2. **Hukum pengaruh**. Ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh, tak lebih, tak kurang.
3. **Hukum proses**. Kepemimpinan berkembang setiap hari, bukan dalam satu hari.
4. **Hukum navigasi.** Siapapun dapat mengemudikan kapalnya, namun hanya pemimpin yang dapat menentukan arahnya.
5. **Hukum E.F. Hutton**. Jika pemimpin sejati berbicara, maka orang akan mendengarkan. E.F. Hutton adalah perusahaan jasa keuangan yang mottonya "Jika E.F. Hutton berbicara, orang akan mendengarkan". Dalam konteks ini Maxwell menggarisbawahi: pemimpin sejati bukan hanya sekadar memegang posisi, tetapi juga kekuasaannya.
6. **Hukum landasan yang mantap**. Kepercayaan merupakan landasan kepemimpinan.
7. **Hukum kehormatan**. Orang dengan sendirinya mengikuti pemimpin yang lebih kuat dari dirinya. Bahwa, jika orang menghormati seseorang sebagai individu, mereka mengaguminya; jika mereka menghormatinya sebagai sahabat, mereka mengasihinya; dan jika mereka menghormatinya sebagai pemimpin, merek mengikutinya.
8. **Hukum intuisi**. Para pemimpin mengevaluasi segalanya dengan intuisi seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus membaca situasi dan secara naluriah mengetahui harus menggunakan "taktik bermain" yang mana.
9. **Hukum daya tarik**. Siapa Anda sesungguhnya menentukan siapa yang akan tertarik kepada Anda.
10. **Hukum hubungan yang baik**. Seorang pemimpin akan lebih dulu menyentuh hati, baru meminta tolong. Anda tidak akan dapat menggerakkan orang kecuali terlebih dahulu menggugah emosi mereka. Perasaan lebih penting

daripada rasio. Untuk memimpin diri Anda sendiri, gunakan rasio; untuk memimpin yang lain gunakan hati.

11. **Hukum lingkungan sepergaulan**. Potensi seorang pemimpin ditentukan oleh mereka yang paling dekat dengannya. Pemimpin yang *lone rangers* itu tidak ada; jika Anda sendirian, Anda tidak memimpin siapapun. Rekrutlah staf terbaik, kembangkan dan delegasikan.
12. **Hukum pemberdayaan**. Hanya pemimpin mapanlah yang memberikan kekuatan pada orang lain. Bahwa kapasitas orang untuk berprestasi ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya untuk memberdayakannya.
13. **Hukum reproduksi**. Diperlukan seorang pemimpin untuk mengangkat seorang pemimpin.
14. **Hukum kepercayaan**. Orang percaya dulu pada pemimpinnya, baru kepada visinya. Bahwa pemimpin menemukan impiannya, baru pengikutnya. Pengikut menemukan pemimpinnya, baru impiannya.
15. **Hukum kemenangan**. Para pemimpin mencari jalan agar timnya menang. Para pemimpin yang menerapkan hukum ini, tidak punya Rencana B. Itulah yang membuatnya terus berjuang.
16. **Hukum momentum besar**. Momentum adalah sahabat terbaik seorang pemimpin. Dengan momentum yang cukup, hampir segala perubahan menjadi mungkin.
17. **Hukum prioritas**. Para pemimpin memahami bahwa kegiatan belum tentu berarti prestasi. Pemimpin tetap perlu skala prioritas.
18. **Hukum pengorbanan**. Seorang pemimpin harus rela berkorban demi peningkatan. Pengorbanan adalah proses yang berkelanjutan, bukan suatu pengorbanan sekali bayar.
19. **Hukum waktu yang tepat**: (1) tindakan keliru di saat yang keliru: bencana; (2) tindakan tepat di saat yang keliru: penolakan; (3) tindakan tepat di saat yang tepat adalah sukses; (4) tindakan keliru di saat yang tepat adalah kekeliruan.
20. **Hukum pertumbuhan yang eksplosif**. Untuk meningkatkan pertumbuhan, pimpinlah para pengikut; untuk melipatgandakan, pimpinlah para pemimpin.
21. **Hukum warisan**. Nilai abadi pemimpin diukur dari suksesinya.[14]

Apa ulasan Anda?

Menarik, karena selain lebih ringkas ia membentang dari soal kapasitas hingga warisan.●

14 Maxwell (2001).

Bab 17

Kekuasaan

Refleksi dan Dimensinya

Apa Saja?

APA saja yang hendak Anda refleksikan di Bab ini?

Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan konteks kekuasaan, karena memang demikian adanya, bahkan mungkin yang dibahas di sini cuma sekadarnya. Misalnya, soal gender, asketisme/etika, paksaan, godaan/uang, pencitraan, intelektualitas, pembenaran/legitimasi, sistem nilai, ideologi, konstitusi, simbol dan mitologi, hingga perkara identitas. Hal-hal ini, saya kira, melengkapi yang saya uraikan di bagian kepemimpinan: apa saja yang dapat diperbincangkan.

Kekuasaan dan Gender

BISAKAH direfleksikan misalnya konteks kekuasaan *gender*?

Misalnya kita baca Anne Phillips, *Engendering Democracy*.[1] Bahwa, demokrasi yang hadir dan berkembang pada masa kini merupakan buah pemikiran politik yang panjang. Isu feminisme muncul lebih belakangan, pada abad ke-17 di Eropa. Saat itu demokrasi dipraktikkan secara diskriminatif

1 Phillips (1991). Uraian di bab ini dikembangkan dari M Alfan Alfian, "Genderisasi Demokrasi" *Kompas*, 14 Januari 2002.

sebagai imbas praktik diskriminasi Yunani kuno yang tidak menghendaki perempuan dan budak ikut dalam proses pengambilan keputusan politik dalam bentuk apapun. Perjumpaan demokrasi dengan prinsip kesetaraan (*equality*), karenanya menjadi pintu masuk bagi pembicaraan feminisme dan demokrasi.

Pada abad ke-19, para perempuan aktif memperjuangkan hak berdemokrasi. Wacana feminisme/kesetaraan gender terus diupayakan dalam berdemokrasi. Bahwa harus ada penegakan keadilan dalam memutuskan segala sesuatu dengan tidak mengabaikan persoalan perbedaan jenis kelamin. Salah satu jargon terkenalnya: demokrasi tanpa perempuan, bukan demokrasi (*democracy without women is not democracy*).[2] Pada praktiknya, dari segi kuantitas jumlah politisi perempuan pada masa kini lebih sedikit dibanding politisi pria. Tapi secara kualitatif, gerakan perempuan di mana saja telah dipandang sebagai bagian penting dalam isu keadilan/demokrasi.

Bagaimana demokrasi dan keadilan dielaborasi?

Menurut Phillips terdapat tiga jenis demokrasi: (1) demokrasi liberal; (2) demokrasi partisipatoris; dan (3) republikanisme sipil. Demokrasi liberal mengedepankan kebebasan. Sementara dalam demokrasi partisipatoris lebih menjurus pada persoalan partisipasi. Republikanisme sipil menekankan bagaimana hak-hak sipil diperhatikan. Dalam ketiga jenis demokrasi itu, gerakan perempuan mengalami persoalannya masing-masing.[3]

Dalam demokrasi macam apa gerakan perempuan mengalami situasi paling pelik?

Jawabnya, menurut Phillips dalam demokrasi liberal: ketika kompetisi terjadi secara bebas, gerakan perempuan belum tentu memperoleh jaminan memadai untuk menentukan keberhasilan perjuangannya. Apalagi, kalau budaya patriarkhi masih kental, gerakan perempuan tak bisa terlampau berharap untuk dapat sukses secara optimal. Kendatipun demikian dalam demokrasi partisipatoris dan republikanisme sipil, gerakan perempuan pun memiliki persoalannya sendiri. Jadi, dalam model demokrasi apapun, gerakan perempuan selalu dihadapkan pada peluang dan tantangannya masing-masing.

Demokrasi memang tidak menjamin isu-isu gender tertampung secara memadai. Kondisinya akan bertambah parah apabila kesadaran gender lemah, ditambah lagi dengan tak adanya isu-isu penting menyangkut tema gender. Untuk menjamin terwujudnya paradigma gender dalam politik dan

2 Nelson dan Chowdury (1994).

3 Phillips (1991).

Seorang perempuan itu seperti kantong teh - Anda tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia sampai Anda memasukkannya ke dalam air panas

- Eleanor Roosevelt

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.

demokrasi, diperlukan upaya konkret genderisasi demokrasi atau upaya menanamkan kesadaran gender dalam setiap bidang kehidupan. Terkait keterlibatan perempuan dalam politik, perlu direnungkan ungkapan Bella Azbug (1920-1998),

> Perbedaan yang akan terjadi apabila perempuan mempunyai ruang politik yang sama luasnya dengan laki-laki adalah bahwa mereka akan mengubah hakikat kekuasaan, bukan kekuasaan yang akan mengubah hakikat perempuan.

Mengapa perempuan perlu terlibat politik?

Menurut Nur Iman Subono, terdapat empat hal sebagai berikut:

- *Pertama*, alasan keadilan dan keseteraan (*the justice and equality argument*). Alasan ini sifatnya sangat normatif dan prinsipil. Mengingat perempuan berjumlah sekitar lima puluh persen dari penduduk dunia, maka mereka secara prinsipil juga harus terwakili secara sama di ranah politik.
- *Kedua*, alasan kepentingan perempuan (*women's interest argument*). Dalam kenyataannya, banyak "kepentingan" perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Masalah tubuh dan ketubuhan, nalar, emosi, pikiran dan pengalaman pribadi perempuan tidak selalu bisa, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin, dipahami oleh laki-laki.
- *Ketiga*, alasan emansipasi dan perubahan (*emancipation and change argument*). Emansipasi perempuan merupakan keniscayaan sejarah yang sangat sukar dibendung gerakannya.
- *Keempat*, alasan perempuan membuat perbedaan (*women make difference argument*). Perempuan dalam politik tidak sekadar hadir, tetapi membawa perubahan dan mewarnainya. [4]

Bagaimana dengan representasi perempuan dalam politik untuk kasus Indonesia?

Sudah banyak kajian tentang pentingnya peran perempuan dalam politik, dan perlunya keterwakilan perempuan yang proporsional dalam parlemen. Alasannya, menurut Valina Singka Subekti: (1) hal itu terkait hak-hak

4 Subono (2012:vii-xi).

Politik bagi perempuan itu tidak tabu. Bahkan, negeri ini sebenarnya tidak pernah kering dari perempuan revolusioner

- Megawati Soekarnoputri

politik perempuan yang merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia; (2) dalam sistem demokrasi pandangan dari kelompok-kelomok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan strategis; (3) terkait dengan masalah kuantitas, perempuan merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia (lebih dari 50 persen); dan (4) hal itu terkait dengan persoalan kompleks yang dihadapi Indonesia, yang membutuhkan partisipasi aktif perempuan di segenap bidang.[5]

Soal keterwakilan perempuan di Parlemen?

Menurut data prosentase keterwakilan perempuan di parlemen memang masih relatif minim. Pada 1950-1955 (DPR Sementara) jumlah wakil perempuan ada 9 (3,8%), lelakinya 236 (96,2%). Pada 1955-1956 perempuannya 17 (6,83%), lelakinya 272 (93,7%). Periode 1956-1959 (Konstituante) prempuan 25 (5,1%), lelaki 488 (94,9%). Selanjutnya di masa Orde Baru, pada periode 1971-1977 perempuan 36 (7,8%), lelaki 460 (92,2%). Pada 1977-1982, 29 (6,3%) banding 460 (93,7%). Pada 1982-1987, 39 (8,5%) banding 460 (91,5%). Pada 1987-1992, 65 (13%) banding 500 (87%). Periode 1992-1997, 62 (12,5%) banding 500 (87,5%). Terakhir pada 1997-1999, 54 (10,8%) banding 500 (89,2%). Pada era reformasi 1999-2004, perempuan 46 (9%), lelaki 500 (91%). Selanjutnya pada 2004-2009,61 (11,09%) banding 489 (88,9%).[6] Pada periode 2009-2014 dicatat terdapat 102 (18%) banding 457 (82%).[7]

Menurut Subekti terdapat kendala struktural dan kultural untuk mewujudkan perwakilan perempuan di parlemen secara lebih proporsional. Karenanya diperlukan kebijakan afirmatif (*affirmative actions*) dengan sistem kuota secara konsekuen.[8]

Menyambung hal itu, dalam perkembangannya, sebagai catatan tambahan untuk Pemilu 2014: UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (UU tentang Pemilu) memerintahkan partai politik untuk: memasukkan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan partai di

5 Subekti (2008).

6 Data dari CETRO yang diolah kembali oleh Sihite (2007).

7 Soetjipto dan Adelina (2012:4).

8 Subekti (2008).

Aku tahu keterbatasanku, dan aku tak suka politik. Aku terlibat (politik) hanya karena suamiku

- Corazon Aquino

I know my limitations, and I don't like politics. I was only involved because of my husband.

tingkat pusat dan daftar calon anggota legislatif. Hal ini diatur pada Pasal 8 Ayat (2): Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluhpersen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pun Pasal 55: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Bagaimana penerapannya, apakah berjalan efektif menaikkan prosentase perwakilan perempuan di DPR?

Pada periode 2009-2014 jumlah anggota DPR-RI perempuan 117 orang, tapi pada 2014-2019 hanya 97 orang.[9] Di ranah eksekutif jumlah menteri perempuan juga tidak seimbang dibandingkan dengan menteri laki-laki. Terdapat delapan menteri perempuan dari 34 pos kementerian kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Kabinet Kerja). Sebagai perbandingan, setidaknya selepas reformasi, jumlah perempuan di kabinet paling banyak empat orang. Dalam dua kali kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan empat jabatan menteri perempuan dari 34 pos kementerian.[10]

Soal pemimpin perempuan di tingkat dunia, bagaimana kondisinya?

Secara representasi, jumlah politisi laki-laki masih mendominasi, Tetapi, kita mencatat bahwa terdapat beberapa pemimpin politik perempuan yang sukses. Misalnya, kalau kita baca Majalah *Forbes* pada 2008, Angela Merkel dicatat sebagai perempuan paling berpengaruh sedunia. Ia mengungguli Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Christina Kirchner, dan Sonia Gandhi. Angela Dorothea Merkel ialah kanselir (semacam perdana menteri) perempuan pertama Jerman sepanjang sejarah Jerman modern sejak 1871, sekaligus kanselir termuda sejak PD II. Ia punya latar belakang pendidikan

9 "Legislator: Keterwakilan Perempuan Di DPR Berkurang," Beritasatu.com, 31 Mei 2015.

10 "8 Kursi Menteri Perempuan di Kabinet Kerja, Terbanyak dalam Sejarah", Kompas.com, 27 Oktober 2014.

THEAUSTRALIAN.COM.AU

Itulah sebabnya semua orang dalam politik, dan kami melakukannya, harus memastikan bahwa mereka tidak bergantung pada satu kelompok kepentingan. Kompromi yang baik ialah ... semua orang membuat kontribusi

- Angela Merkel

That is why everyone in politics, and we do it, must make sure that they do not depend on one single interest group. A good compromise is one where everybody makes a contribution.

dan profesinya yang sesungguhnya jauh dari dunia politik. Ia seorang fisikawan. Setelah meraih doktor (1986) dengan disertasi tentang akselerasi partikel dengan hidrokarbon sederhana. Ia bekerja di bidang kimia kuantum dan tinggal di Jerman Timur yang komunis, sebelum menjadi politisi papan atas di Jerman pasca-robohnya Tembok Berlin.

Perubahan politik di negaranya, membuatnya menemukan momentum politik?

Ya, karir politiknya menanjak pasca-penyatuan (reunifikasi) Jerman. Kita perlu catat bahwa, hubungan Merkel dan politik dimungkinkan karena para siswa Jerman Timur wajib menjadi anggota gerakan pemuda. Merkel aktif dan pernah menjadi anggota dewan distrik dan sekretaris untuk agitasi dan propaganda gerakan pemuda. Setelah runtuhnya Tembok Berlin (1989), ia segera bergabung dengan partai baru *Demokratischer Aufbruch*. Setelah pemilu demokratis pertama kali di Jerman Timur, ia tampil menjadi juru bicara pemerintahan sementara. Pasca-reunifikasi Jerman Barat dan Timur, Merkel terpilih dalam pemilu (Desember 1990) sebagai anggota *Bundestag* (Parlemen). Partainya berkoalisi dengan Partai *Christian Democratic Union* (CDU). Ia pun diangkat sebagai Menteri Urusan Perempuan dan Pemuda, Menteri Lingkungan Hidup dan Keamanan Reaktor Nuklir.

Pada Pemilu 1998 CDU kalah. Restrukturisasi dilakukan dengan mengangkat Merkel sebagai sekjen. Pada April 2000 Merkel menjadi orang pertama CDU. Ia pun otomatis menjadi ikon pemimpin oposisi penantang Kanselir Gerhard Schröder. Pada Mei 2005, Partai Demokratik Sosial (SPD) pimpinan Schröder kalah pada pemilu lokal yang menyebabkan Presiden Horst Kohler membubarkan kabinet dan menggelar pemilu pada 18 September 2005. Pada pemilu tersebut, CDU menang (226 kursi) sedikit di atas SPD (222 kursi). Namun kedua partai papan atas ini sepakat membangun koalisi besar (*Große Koalition*). Realitas politik itulah yang menyebabkan Merkel terpilih sebagai Kanselir, setelah memenangi pemungutan suara di Bundestag (22 November 2005) dengan dukungan 397 suara (202 menolak, 12 abstain). Ia menggantikan Schröder yang tujuh tahun berkuasa bersama SPD dan Partai Hijau.[11]

Apa yang dapat kita pelajari dari riwayat sedemikian?

Merkel tidak sekadar dihadirkan oleh peluang. Tetapi, ia dibesarkan oleh kemampuan, kegigihan, konsistensi dan momentum. Politisi hadir dan menanjak karirnya tak lepas dari momentum, bagaimana pengalaman kepolitikannya bertemu dengan lingkungan eksternal yang kondusif, sehingga ia *leading* dalam berkompetisi. Sebagaimana pemimpin perempuan legendaris Inggris pada masanya, Margaret Thatcher, ia akan terus diuji, apakah efektif dalam pengambilan kepurusan-keputusan politiknya: tak hanya untuk Jerman, tetapi juga untuk Uni Eropa, mengingat Jerman ialah salah satu pentolan utama organisasi regional Eropa tersebut.

Kemuliaan, Asketisme, dan Etika Kekuasaan

MENGAPA kekuasaan diperebutkan?

Jawabnya jelas: karena hampir setiap orang membutuhkannya. Maka sekecil apapun, sadar atau tidak, kekuasaan selalu dicari, diperebutkan. Dengan kekuasaan orang dapat memerintahkan kemauannya, serta mengontrol kepatuhan orang lain. Dengan kekuasaan perubahan diciptakan, di mana seorang pemimpin berkesempatan mewujudkan visi dan obsesinya. Tapi, kekuasaan bersifat *oxymoron*, berwajah ganda, seperti pedang bermata dua. Ia dibutuhkan untuk membangun, tetapi dengan kekuasaan pula orang bisa merusak. Tetapi, prinsip utama kekuasaan, betapapun terasa normatif, menurut Blaine Lee adalah kehormatan [atau kemuliaan]. "Kekuasaan ber-

11 Wikipedia.org

dasarkan kehormatan didasarkan pada sikap menghargai dan menghormati yang melampaui transaksi atau pertukarannya".[12]

Wah yang itu filosofis: kekuasan, kehormatan...

Ya, begitulah. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Bertrand Rusell bahwa,

> Dari keinginan tak terbatas manusia, kepalanya adalah keinginan terhadap kekuasaan dan kemuliaan. [Keduanya] tidak identik, meskipun serumpun: Perdana Menteri lebih memiliki kekuasaan ketimbang kemuliaan, Raja lebih memiliki kemuliaan daripada kekuasaan. Sebagai aturan, kendatipun demikian, cara termudah untuk mendapatkan kemuliaan adalah dengan mendapatkan kekuasaan; ini terutama terjadi berkaitan dengan aktifnya orang-orang dalam acara-acara publik. Keinginan untuk [memperoleh] kemuliaan, oleh karena itu, mempersyaratkan, terutama, tindakan yang sama seperti yang diminta terhadap keinginan untuk kekuasaan.

Dari paparan Russell itu, yang menarik adalah ketika kekuasaan disandingkan, bahkan nyaris diidentikan dengan kemuliaan. Kuasa dan mulia dipandang sebagai hasrat manusia yang paling penting. Tetapi sayangnya, dalam banyak kasus sepanjang sejarah kekuasaan manusia, tidak semua penguasa dikenal sebagai penguasa yang mulia, atau tidak memperoleh kemuliaan yang diharapkan. Bahkan, adakalanya penggenggam kekuasaan tidak mengenal apa itu hakikat kemuliaan.

Di masa lalu, kemuliaan ditunjukkan dengan kemasyuran raja. Raja yang memerintah daerah yang luas dan sangat berpengaruh, kebesarannya hadir dari mulut ke mulut. Apabila raja adil, maka rakyat akan menambah-nambah karangan kebesarannya. Tetapi, kalau raja kejam, cerita kekejiannya juga cepat menyebar. Sikap-sikap rakyat terhadap raja yang adil dan memberikan kemakmuran, berbeda dengan yang lalim. Misalnya, di Melayu ada pepatah [yang sering dikaitkan dengan konteks demokrasi substansial, yang konon katanya datangnya dari Hang Jebat]:

Raja adil raja disembah,
Raja lalim raja disanggah

Menurut Chaidir, ungkapan itu populer di rantau semenanjung dan di wilayah Sumatera pada umumnya. Maknanya tak sulit diselami. Seorang raja atau penguasa yang berilmu, cerdik pandai, bijak bestari, dan pemeluk agama yang taat, akan dihormati dan disayang oleh pengikutnya. Penguasa

12 Lee (2002)

Apa makna kekuasaan bagi kita? Mengapa banyak orang berkeinginan dengan segala cara untuk mendapatkannya? ... Kita percaya kekuasaan akan memberi apa yang kita maui: kebebasan dan kebahagiaan

- Thich Nhat Hanh

yang zalim, kejam dan sewenang-wenang, boleh ditentang atau dilawan.[13]

Raja kan identik dengan kekuasaan yang nyaris mutlak...

Begitulah. Jarak kemurkaan dan penghargaan, begitu tipis. Kalau kita simak kisah-kisah/dongeng Nasruddin Hoja — tokoh ini mengingatkan kita pada Abu Nawas — maka ia selalu selamat dari hukuman kejam Timur Lenk, karena kelucuannya. Salah satu kisahnya, begini:

> Tak lama setelah menduduki Anatolia, Timur Lenk mengundangi para ulama. Setiap ulama beroleh pertanyaan yang sama: "Jawablah, apakah aku adil atau lalim. Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan kugantung. Sedang kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan kupenggal."
>
> Beberapa ulama telah menjadi korban kejahatan Timur Lenk ini.
>
> Akhirnya, tibalah waktunya Nasrudin diundang. Ini adalah perjumpaan resmi Nasrudin yang pertama dengan Timur Lenk. Timur Lenk kembali bertanya dengan angkuh: "Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim. Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan kugantung. Sedang kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan kupenggal."
>
> Dan dengan menenangkan diri, Nasrudin menjawab, "Sesungguhnya, kamilah, para penduduk di sini, yang merupakan orang-orang lalim dan abai. Sedangkan Anda adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami."
>
> Setelah berpikir sejenak, Timur Lenk mengakui kecerdikan jawaban itu. Maka untuk sementara para ulama terbebas dari kejahatan Timur Lenk lebih lanjut.[14]

Ngeri *kan* kalau Nasruddin dijatuhi hukuman mati, hanya karena keliru menjawab? Hehe...

Di masa kini, tentu tidaklah usah sampai kita menyembah-nyembah pemimpin, bukan?

13 Chaidir, "Raja Alim Raja Disembah," *Riau Pos*, 21 Juli 2014.

14 "Keadilan dan Kelaliman", media.isnet.org.

Pengaruh moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dengan penguasa sehingga mereka sungguh-sungguh sepakat dan selaras satu sama lain

- Sun Tzu

Pemimpin kita hormati sedemikian rupa dalam batas-batas kewajaran [kecuali tradisi menghormati pemimpin di negeri Komunis atau tradisi feodal keraton]. Bahkan, pemimpin harus siap memperoleh kritik-kritik dari kita. Pada era demokrasi, pemimpin adalah representasi dari rakyat, karena ia dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pemimpin yang adil dalam konteks ini, ialah yang mampu menjalankan fungsinya sebagai pemutus kebijakan publik. Kalau kebijakan publik itu "merugikan rakyat", maka dalam sistem demokrasi masih menyisakan ruang publik untuk mengkritiknya. Parlemen juga bisa memfungsikan diri sebagai lembaga pengawas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sebagaimana perumpamaan perdana menteri dan raja yang disebut Bertrand Russell di atas, sepertinya kisah tentang kekuasaan dan kemuliaan ini kadang-kadang absurd dan paradoks..

Ya. Ada orang yang sudah dikenal sebagai orang mulia tetapi ingin berkuasa. Katakan orang mulia itu pedagang kaya yang dikenal dermawan. Rasanya sudah cukup semuanya ada dalam hidupnya: kekayaan, ketenaran, dan rasa hormat yang lain atas kedermawanannya. Tetapi, ternyata suatu saat ia merasa masih ada yang kurang. Tak lain: kekuasaan!

Beberapa orang membujuknya untuk maju sebagai calon kepala desa. Tergodalah ia. Perumus strateginya mengatakan bahwa ia harus keluar uang untuk mobilisasi dukungan. Para tokoh kunci di desa itu dibelikannya sepeda motor. Para pendukungnya bergelimang pemberian: mulai dari sembilan bahan pokok (sembako) hingga amplop berisi uang. Calon lain juga mencoba melakukan hal yang sama, tetapi jumlah uangnya lebih kecil saja. Walhasil, kemenangan seperti tampak di depan mata. Tetapi, ketika pilihan dilakukan, hasilnya mengagetkan: ia kalah!

Ia stres dan malu, hingga kemudian datanglah orangtua yang mengatakan, cukuplah itu semua jadi pengalaman. Dan entah pernah membaca Russell atau tidak ia mengatakan, "*Maqam*-mu, kelasmu adalah kemuliaan, bukan kekuasaan!"

Hmm... Seperti kisah sufi?

Memang kisah saya itu seperti kisah sufi. Agaknya sulit menghindarkan uraian soal kekuasaan ini jauh dari dimensi kesufian. Karena kekuasaan itu variabel yang bisa memperkuat kemuliaan, tetapi bisa pula sebaliknya: menghancurkan kemuliaan. Dan, marilah kita simak kisah sufi populer terkemuka Ibrahim bin Adham.

> Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkh yang memiliki daerah kekuasannya sangat luas. Ia hidup dalam kebesarannya sebagai seorang raja, hingga suatu ketika ia dikejutkan oleh seseorang mengendap-endap di atap istananya: "Siapakah itu?" Sesosok itu menjawab, "Aku sahabatmu, aku hendak mencari untaku yang hilang!"
>
> Terperangahlah Ibrahim dan berkata, "O, betapa bodohnya engkau yang mencari unta di atas atap!"
>
> Sesosok itu menjawab balik, "Wahai manusia yang lalai, apakah engkau hendak mencari Tuhan dengan berpakaian sutera dan tidur di atas tempat tidur emas?"
>
> Sesosok itu konon Nabi Khidir dan dalam percakapan pada babak pertemuan selanjutnya, semakin merasa tertohoklah Ibrahim, hingga kemudian ia melepas kekuasaan dan mencari kemuliaan. Ibrahim meninggalkan istananya yang megah. Ia pergi jauh dan mencari tempat terpencil. Ia menemukan gua dan menyendiri selama sembilan tahun. Setiap hari tertentu, Ibrahim keluar dari gua mencari kayu bakar dan menjualnya ke kota. Uangnya dibelikan roti yang separuhnya dikasihkan ke pengemis. Kisah masih terus berlanjut, hingga kemudian ia dikenal sebagai sosok asketik bijak yang memiliki pengikut.
>
> Ibrahim bin Adham meraih kemuliaan itu, betapapun ia juga meraih pengaruh yang notabene juga meraih kekuasaan. Tetapi kekuasaannya kali ini sungguh sangat berbeda dengan kekuasaan yang dimilikinya saat ia menjadi raja.[15]

Kekuasaan, juga sering dilihat dalam ruang lingkup yang lebih pribadi ...

Ya, misalnya kalau kita baca Thich Nhat Hanh, *The Art of Power*, maka kekuasaan (*power*) yang dimaksud terkait dengan bagaimana kita sebagai pribadi mampu mengendalikan situasi dan meraih kebebasan dan kebahagiaan. Jadi, dalam perspektif Hanh, kekuasaan ialah prasyarat untuk mewujudkan kebebasan dan kebahagiaan. Kekuasaan terbesar catatnya, ialah kekuasaan untuk bahagia dalam momen kekinian, dan bebas dari ketakutan, keputusasaan, diskriminasi, marah, dan abai. Kekuasaan, dalam konteks ini, selaras dengan kesuksesan. Jadi, kekuasaan itu tangga untuk meraih kesuksesan. Bahwa kekuasaan yang kita miliki, ialah juga untuk membahagiakan

15 Bahjat (2012).

Sisi buruk demokrasi muncul jika pemilihan mengantar para tokoh yang tidak beretika, tetapi punya banyak uang untuk duduk di kursi parlemen. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat

- Syekh Muhammad Hisyam Kabbani

orang lain, dan kata Hanh, "Guna memberi kebahagiaan bagi yang lain, kita harus menjadi bahagia". Itu semua terkait pula dengan kondisi pikiran dan kehendak kita dalam mewujudkan kinerja yang berkualitas.[16]

Ketika kekuasaan disandingkan dengan kemuliaan, maka kita tidak dapat menghindar dari konsep asketisme. Tetapi adakah asketisme kekuasaan itu?

Ada. Kalau kita kaitkan dengan pandangan Plato, bahwa semestinya para penguasa adalah filsuf, maka filsuf yang dimaksud tentulah orang-orang yang dianggap sudah matang dari sisi asketik, dan ia pun dipandang sebagai orang bijak. Dari sisi ini asketisme kekuasaan dikaitkan dengan kebijaksanaan politisi. Dan bukankah, politik itu sendiri ialah, merujuk Aristoteles, ikhtiar menggapai kebaikan?

Kembali ke soal asketisme kekuasaan. Sekilas gabungan dua kata itu terasa dipaksakan, bagaimana mungkin asketisme yang lebih mengedepankan atau setidaknya memberikan proporsi nyata pada dimensi nonduniawi dilekatkan dengan politik yang notabene lengket dengan hal-ikhwal kekuasaan duniawi? Kalau seseorang tidak bisa menjadi politikus asketis, mengapa ada Mahatma Gandhi atau sebut saja Haji Agus Salim?[17]

Bagaimana gambaran politisi asketis itu menurut Anda?

Politisi asketis tidak berarti mereka yang selalu berpenampilan melarat, tetapi barangkali ialah mereka yang oleh Agus Salim (sebagaimana telah diulas di bagian lain buku ini) dikatakan sebagai yang menderita. Pemimpin itu menderita. Bukan berarti mereka punya kelainan masokisme yang suka menikmati kesakitan dan menyakiti diri sendiri. Namun, mereka senantiasa optimistis dalam berjuang di tengah keterbatasan, yang sederhana apa adanya.

Kita sering mendengar kisah pemimpin kita tempo dulu yang jasnya tambalan. Agus Salim sendiri rumahnya berupa kontrakan sangat seder-

16 Hanh (2008).

17 M Alfan Alfian, "Sekali Lagi, Berpolitik Asketis," *Seputar Indonesia*, 30 Juli 2011.

Dia yang mengendalikan orang lain mungkin berkuasa, tapi dia yang telah menguasai dirinya lebih berkuasa

- Lao Tzu

hana dan pindahpindah. Mahatma Gandhi rela menanggalkan pakaiannya dan menggantinya dengan kain tenunan sendiri. Pemimpin rela menderita dalam perjuangan mereka. Namun, Anda mungkin menilainya lain. Anda boleh mengatakan pemimpin tidak harus menderita. Pemimpin harus senang, kaya, dan yang penting berpengaruh. Miskin atau kaya tidak ada artinya manakala ia tak mampu mengembangkan pengaruh.

Gandhi rela bergaya sederhana karena punya maksud untuk mengembangkan pengaruh. Para pemimpin kita tempo dulu sederhana karena memang kondisinya masih serbaterbatas. Bahkan, Anda juga bisa berargumentasi bahwa zaman sekarang menjadi pemimpin harus banyak uang dan kaya, sebab dengan demikian akan mempermudah mengembangkan pengaruh.

Seorang pemimpin sufi yang berpusat di Amerika Serikat, memang mengkritik bahwa demokrasi dapat dibelokkan menjadi *money-crazy*. Sang sufi, Syekh Muhammad Hisyam Kabbani dalam wawancaranya dengan *Kompas* ("Pengelanaan Seorang Sufi", *Kompas*, 24 Juli 2011), mengatakan,

> Demokrasi akan baik jika bisa mengantarkan orang yang tepat ke kursi kekuasaan yang tepat. Sisi buruk demokrasi muncul jika pemilihan mengantar para tokoh yang tidak beretika, tetapi punya banyak uang untuk duduk di kursi parlemen. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat.
>
> Jika punya uang, politisi bisa beli suara pemilih. Sebagian praktik demokrasi saat ini diwarnai politik uang. Siapa yang punya uang, ia akan menang. Uang beli suara. Ini bukan demokrasi, melainkan *money-crazy*.

Uang itu sendiri memang sangat penting dalam politik. Tapi, sebagaimana seorang politikus katakan, uang saja tanpa kecerdasan tidak akan menang. Kecerdasan saja tanpa uang akan sulit.

Zaman kan sudah berubah, model-model asketisme pun mungkin sudah lain dengan zaman Agus Salim atau Gandhi ...

Saya setuju. Zaman sudah lain dan Anda juga bisa mengatakan bahwa penampilan politisi tak harus berjas tambalan — sebagaimana pernah dilakukan oleh Muhammad Natsir. Politisi yang lusuh penampilannya akan menuai risiko dicap purapura miskin, tidak solider, dan suka menghindar dari peminta-minta sumbangan. Politisi harus *necis* dan royal (bahasa

Jawanya *nyah-nyoh*) agar menjadi ikon pengatas masalah rakyat. Di tengah-tengah tradisi pragmatis, yang berpenampilan kuno justru dapat dianggap tak bertanggung jawab. Maka, politisi harus taat pada kelasnya sebagai kelas di atas kebanyakan rata-rata orang.

Jadi, mengkampanyekan berpolitik secara asketis sesungguhnya mendorong agar para politisi kembali ke *khitah*-nya sebagai politisi. Ialah mereka yang terpanggil untuk berjuang demi sesuatu yang mereka pandang mulia. Bahwa kekuasaan yang direbut dan dipertahankan adalah sekadar sarana untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Politik yang asketis memandang bahwa cara itu penting. Cara yang menghalalkan segala cara tentu ditolak.

Politik yang asketis itu politik yang etis. Cuma masalahnya, praktisi politik itu sendiri gemar menetapkan ukuran-ukuran mereka sendiri. Karenanya, misalnya, batas antara *money politics* dan *financial politics* menjadi lentur sekali. Logika yang terbentuk di kalangan komunitas politik memang, rasa-rasanya, banyak berbeda dengan logika kaum awam. Karenanya, politisi cenderung mengimbau bahwa sikap dan kebijakan politik mereka agar tidak dinilai secara hitam putih. Sebab, adil versi politisi berbeda dengan adil versi orang awam. Bohong versi politisi berbeda dengan bohong versi orang awam. Bohong versi politisi diklaim untuk "kebaikan". Hmmm ...

Bagaimana kekuasaan dipandang dari perspektif etika?

Etika dan moral memang terkait dengan norma dan sistem nilai: mana-mana yang dipandang etis (mengandung dimensi moral) atau tidak etis tentu dikonstruksi oleh persepsi yang berkembang dalam masyarakat, yang akhirnya bisa juga ditarik benang merahnya sebagai suatu etika yang bersifat universal. Tetapi, yang jelas, etika lebih longgar ketimbang hukum positif. Etika atau pendekatan *akhlak* dalam agama (Islam) lebih mengedepankan kesadaran perilaku sang individu bersangkutan.

Walaupun longgar, dalam arti tidak ada sanksi hukum positif apabila etika dilanggar, tetapi, ada sanksi sosial bahkan sanksi yang melebihi sanksi sosial, misalnya rusaknya sendisendi peradaban *adiluhung* manusia, apabila etika diabaikan. Nabi-nabi, terkhusus Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan *akhlak* manusia, tetapi bukan dengan metode yang memaksa, melainkan menumbuhkan kesadaran.

Prinsip-prinsip etis yang universal biasanya dituangkan ke dalam kode-kode etik dalam berbagai profesi, yang semstinya tidak boleh dilanggar. Dalam profesi kedokteran misalnya ada kode etiknya, demikian pula profesi yang ain seperti akuntan, pengacara, pengajar dan sebagainya. Demikian pula dengan etika politik: suatu etika yang melandasi para politisi bekerja secara wajar dan seharusnya.

Adakah kaitannya etika dan empati?

Tentu ada. Pejabat politik yang peka terhadap permasalahan masyarakat pasti memiliki sikap empati yang tinggi. Ia akan cepat merasakan penderitaan masyarakat, dan dengan gerak cepat dengan sumberdaya yang dimilikinya akan berbuat sesuatu untuk memberikan pertolongan. Empati demikian, progresif dan aktif, bukan pasif dan berhenti pada kata-kata yang menghibur. Sikap empati adalah perilaku etis — merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral yang diekspresikan di tengah kehidupan nyata. Tetapi kadang-kadang sikap empati tak berkaitan atau paralel dengan dukungan suara — walaupun sikap empati dan heroik, serta karitatif mampu mendongkrak popularitas seseorang. Tapi, dengan sikap empati yang menonjol dari figur-figur politik, tentu saja publik akan lebih mengapresiasinya. Figur yang tidak mampu menunjukkan sikap empatinya, akan *dirasani*, diperbincangkan sebagai figur politik yang tidak pantas.

Seberapa penting wawasan dan kesadaran akan hukum positif ini bagi kaum politisi?

Sangat penting, karena dalam berperkara, hukum positiflah yang pada akhirnya menjadi penyelesai — apabila memang perkara itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian konflik melalui pilihan atau mekanisme arbitrase (perwasitan) menempatkan lembaga peradilan sebagai penentu. Karena interaksi politik demikian dinamis dan pertarungan kepentingannya juga heboh, terkadang politisi dihadapkan pada sejumlah dilema yang mengharuskannya melanggar etika, dan terperangkap pada hukum positif.

Hukum positif sesungguhnya merupakan produk politik juga, tetapi ia dapat dipakai untuk mengadili para politisi yang bermasalah atau terkena kasus, baik pidana maupun perdata. Politisi tentu tidak kebal hukum. Ia akan menjalani proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadang, publik meragukan proses peradilan suatu negara yang akan bertindak secara tidak obyektif dalam mengadili politisi. Tetapi, bagaimanapun hukum positif harus diterapkan mekanismenya, dan apapun vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hingga pada titik keputusan hukum tetap, harus dihormati. Tentu saja dalam negara hukum, "kebenaran hukum positif" ditempatkan sebagai kebenaran utama. Adakalanya dalam politik berkembang budaya malu, seperti yang terjadi di Jepang, berikut:

Beras Tercemar, Menteri Mundur

Menteri Pertanian Jepang Seiichi Ota, Jumat (19/9), mengundurkan diri akibat permasalahan beras yang tercemar pestisida dan jamur. Beras itu dijual dalam

bentuk makanan kepada ribuan orang, termasuk murid sekolah dan pasien yang dirawat di rumah.

Mundurnya Seiichi Ota terjadi hanya tujuh minggu setelah dia menjabat. Kasus ini semakin mempermalukan pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda yang belum lama ini mengumumkan pengunduran dirinya setelah berselisih dengan parlemen. "Saya bertemu PM Fukuda dan mengatakan keputusan saya untuk mundur mengingat seriusnya masalah beras yang tercemar bagi masyarakat," kata Ota ...

Para konsumen Jepang beberapa minggu terakhir dicekam ketakutan atas penemuan bahwa beras tercemar yang diperuntukkan bagi penggunaan industri, seperti pembuatan lem, telah didistribusikan sebagai bahan makanan ribuan orang.

Beras itu diimpor dari China, Vietnam, dan AS. Menurut pemerintah, beras dikirimkan ke perusahaan makanan, sekolah, tempat perawatan, dan rumah penitipan anak. "Kami sangat menyesal membuat kekhawatiran atas keamanan pangan. Kami menyadari situasi yang sangat serius ini," ungkap Machimura.

Beras tersebut tercemar pestisida methamidophos dalam kadar yang melebihi ketentuan pemerintah, tetapi masih terbilang rendah untuk mengganggu kesehatan. Sejauh ini, tidak ada laporan mengenai orang yang menjadi sakit karena memakan beras itu.[18]

Soal mundur dari jabatan politik, tampaknya tak sekadar terkait urusan moral atau etika, tetapi seharusnya memang sudah menjadi konsekuensi logis bagi pemimpin yang gagal?

Mestinya demikian. Ketika seorang ketua partai politik mundur begitu dalam pemilu partainya kalah, itu bisa terjadi otomatis saja, seperti yang dilakukan Ketua Partai Buruh Inggris Ed Miliband:

Partai Buruh Kalah dalam Pemilu Inggris, Ed Miliband Mundur

Menyusul kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilihan umum parlemen Inggris Raya yang diadakan pada Kamis (7/5), pemimpin Partai Buruh, Ed Miliband mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat (8/5).

"Inggris membutuhkan Partai Buruh yang dapat bangkit kembali dari kekalahan ini sehingga kita dapat kembali memiliki pemerintahan yang berpihak kepada kaum pekerja," kata Miliband di markas Partai Buruh di London, dikutip dari Reuters, Jumat (8/5).

"Dan sekarang saatnya orang lain untuk mengambil alih kepemimpinan partai ini. Dengan ini saya mengumumkan pengunduran diri," kata Miliband, yang akan tetap menjadi anggota parlemen Partai Buruh. Wakil Ketua Partai Buruh Harriet Harman, akan mengambil alih kepemimpinan hingga ketua

18 *Kompas*, 25 September 2008.

Senjata terbaik kediktatoran adalah kerahasiaan, namun senjata terbaik demokrasi harus menjadi senjata keterbukaan

- Niels Bohr

The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness.

baru terpilih. Setelah itu, Harman juga akan mengajukan pengunduran diri.

Pengamat kerap mengkiritisi gaya kepemimpinan Miliband. Selain itu, popularitasnya dinilai jauh di bawah rivalnya, Ketua Partai Konservatif David Cameron yang memenangi suara telak. Namun, beberapa tokoh partai menilai bahwa masalah Partai Buruh bukan hanya soal kepemimpinan Miliband.

"Tidak ada gunanya mengubah kapten jika sang kapal tengah menuju ke arah yang salah," kata John Reid, pejabat senior yang pernah menduduki beberapa jabatan penting, termasuk mantan menteri pertahanan dan dalam negeri di era mantan perdana menteri Tony Blair.[19]

Politik memang tak hitam putih, tapi terlampau utopiskah apabila kita berharap adanya politik yang bermoral?

Dalam hal ini barangkali kita perlu menyimak catatan guru politik kita A. Rahman Zainuddin, bahwa dalam konteks ini,

> ... perlu diadakan upaya pembersihan dalam politik. Pembersihan dunia politik itu harus dimulai dengan pembentukan pemikiran yang benar tentang politik, kemudian menyeleksi manusiamanusia bermoral untuk berkiprah ... Manusia-manusia yang telah terbukti hanya berjuang dalam bidang politik untuk tujuan-tujuan yang rendah saja sebaiknya jangan berkiprah di bidang itu. Hal itu sama keadannya dengan memisahkan buah-buah yang busuk dari keranjang buah kita, agar tidak menjalarkan kebusukannya kepada buah yang lain. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia karena hak asasi itu sangat rapat hubungannya dengan ketinggian moral manusia.[20]

Anda boleh jadi mengatakan, ah, apa yang dikatakan di atas utopis, justru tatkala Anda menyaksikan ingar-bingar politik kita dewasa ini — ketika para *pemburu rente* kekuasaan demikian atraktif, betapa tokoh-tokoh yang mestinya pantas memperoleh dukungan politik tertutup pintu masuknya, dan betapa tokoh-tokoh yang tidak berkualitas begitu atraktif di panggung politik. Tapi, ini risiko atau ekses dari praktik demokrasi kita dewasa ini, yang belum sepenuhnya menjamin kehadiran mereka yang berkualitas.

19 *Cnnindonesia.com*, 09/05/2015.

20 Sulistyo (2004).

Sudah lazimlah kiranya apabila, di mana-mana ada dua jenis orang: baik dan jahat. Dalam politik juga begitu, Amien Rais membedakan dua konteks politik: tingkat rendah (*low politics*) dan tinggi (*high politics*).

Bagaimana penjelasan *high politics* dan *low politics*?

M Amien Rais — jauh sebelum menjadi politisi — menguraikan:

Dua Jenis Politik

Telah disebut bahwa politik selalu berkaitan dengan kekuasan (*power*), dan sebagaimana dikatakan V.O. Key Jr., politik terutama terdiri atas hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dan diperintah. Sedangkan George Cathin memberi *takrif* politik sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam menontrol masyarakat (*the act of human social control*). Harold Laswell memberikan pengertian yang lebih jelas. Menurutnya politik menyangkut *who gets what, when and how*. *What* terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan, dan bagaimana, adalah masalahmasalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat.

... ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (*high politics*) dan politik kualitas rendah (*low politics*) ... ada tiga ciri yang harus dimiliki politik kualitas tinggi atau mereka yang menginginkan terselenggaranya *high politics*: *pertama*, setiap jabatan politik hakikatnya merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya... *Kedua*, erat dengan yang pertama, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (*mas'uliyyah*, *accountability*)... *Ketiga*, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip *ukhuwah* (*brotherhood*) yakni persamaan di antara umat manusia.[21]

Yang politik kualitas rendah atau *low politics* didekati dalam perspektif Machiavellian: politik disikapi dengan kekerasan; penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan puncak (*summum bonum*). Terus, dalam menjalankan kehidupan politik, penguasa haus dapat menjadi binatang buas. Machiavelli memang dikonotasikan sebagai pemikir yang membenarkan tindakan "segala cara" untuk mencapai tujuan politik. Memang, banyak pemikirannya yang lain, tapi bagi seorang moralis, pandangan Machiavelli tentang politik kualitas rendah, termasuk yang "tak bisa dimaafkan". Dalam konteks ini A. Rahman Zainuddin berkomentar,

Romo Mangun heran dan menilai bahwa sekarang ada usaha untuk merehabilitasi Machiavelli, padahal, ... Machiavelli adalah seorang pemikir yang mengha-

21 M Amien Rais, "Hubungan antara Politik dan Dakwah", *Panji Masyarakat*, 1 Februari 1987. Lihat juga Rais (1987).

WIKIPEDIA.ORG

Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak sudah pasti korup. Orang-orang besar hampir selalu orang-orang buruk, bahkan ketika mereka mempunyai pengaruh dan bukan otoritas ...

- Lord Acton

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority ...

lalkan segala cara, yang memisahkan kekuasaan dari moralitas.[22]

Adakah pandangan lain terkait dengan tafsir terhadap pendapat Machiavelli?

Mungkin bukan tafsir lain, melainkan mencoba mendudukkan masalahnya. Sesungguhnya ada dua buku yang dikarang oleh Machiavelli: *Il Principe* (*the Prince*) dan *Discorsi*. Yang sering dikutip sebagai ajaran "menghalalkan segala cara" itu yang buku *Il Principe*. Menurut Machiavelli, "Seorang yang berjuang untuk menjadi baik atas cara apapun akan mendapat kehancurannya di tengah sejumlah besar mereka yang tidak baik. Ka-

22 Sulistyo (2004:121).

Jika seseorang mabuk karena meneguk *khamr*, ia tak akan menanggung malu setelah ia kembali sehat, sedang-kan orang yang mabuk tahta, ia menjadi waras jika kekuasaan telah melayang darinya

- Al Ghazali

rena itu penting bagi seorang penguasa, bila ingin tetap berkuasa, belajar untuk tidak menjadi baik, dan memakai atau tidak memakai pengetahuannya menurut keperluan". Inilah nasihat yang kontroversial itu.[23]

Namun demikian, secara umum, Dhakidae mencatat bahwa, seluruh pandangan politik Machiavelli berpusat pada dan bertolak dari pahamnya tentang *fortuna*, *necessità*, dan *virtù*. Ketiganya bisa dianggap sebagai asumsi, bisa juga strategi, malah bisa juga dianggap sebagai *axioma* dasar dari mana bisa disusun seluruh tubuh teori Machiavellian. Dalam hal ini, terdapat tiga paham mengenai fortuna. *Pertama*, *fortuna* yang diberikan arti berbeda-beda oleh Machiavelli dan terpencar di sana-sini dalam seluruh buku *the Prince*. Tergantung dari konteksnya, *fortuna* berarti suatu hadiah, pemberian, dalam hal seorang menjadi penguasa karena uang dan/atau *favor*, kebaikan hati orang lain. *Kedua*, *fortuna* dipertentangkan dengan kemampuan, *ability*, meskipun yang dimaksudkan kemampuan memerintah. Dikemukakan contoh Agathocles orang Sisilia yang menjadi penguasa Syracuse, berasal dari lingkungan rendah, anak seorang tukar bakar tanah liat untuk membuat pot, periuk belanga, yang dari satu fase ke fase lain dalam hidupnya penuh kejahatan. *Ketiga*, fortuna diartikan sebagai sesuatu yang mirip-mirip pekerjaan dewata; sebegitu rupa sehingga tidak bisa diubah oleh kebijaksanaan, *prudence*, apapun manusia; usaha apapun tidak mengubah sesuatu yang sudah menjadi suratan takdir.

Machiavelli melihat *fortuna* sebagai suatu kesewenang-wenangan yang harus dilawan karena fortuna tidak lain dari suatu "kekuasaan sewenang-wenang dari suatu kebetulan yang irasional". Dalam hal ini sang penguasa harus melawan *fortuna* dengan *virtù* atau daya guna yang diambil dari sesuatu yang disebut sebagai keutamaan. *Virtù* lebih dimaksudkan kualitas seperti pengetahuan, keberanian, siasat, kebanggaan, dan kekuatan yang diperlukan dalam arena kekuasaan.[24]

Jadi bagaimana menempatkan Machiavelli dalam konteks moral?

23 Dhakidae (2015:38)

24 Dhakidae (2015:37-38)

Dhakidae mencatat, ketika seorang menempatkan Machiavelli dalam posisi moral, maka yang tampak adalah dirinya sebagai penjahat gabungan antara *the lion and the fox*. Namun, apakah Machiavelli mengajarkan moral? Jawabannya "sama sekali tidak". Karena itu,

> ... "*the badness*" dari Machiavelli adalah *political* dan sama sekali bukan moral, apalagi teologis. Dia tidak menganjurkan bahwa dalam kehidupan biasa seorang boleh membunuh satu sama lain. Namun pembunuhan menjadi sahih kalau sekiranya semuanya dilakukan demi *raisons d'etat*, seorang penguasa dipaksa untuk mengerjakan kejahatan demi eksistensi Negara, yang tidak lain daripada suatu *necessità*, keniscayaan.[25]

Bolehkah saya bertanya begini: ya memang ada politik tingkat tinggi, ada pula tingkat rendah, tapi bagi politisi, kan biasanya yang penting ikhtiar membenarkan tindakan ...

Politik memang memerlukan "pembenaran" atau dalih, yang dalam konteks yang luas lagi, "legitimasi". Soal legitimasi kekuasaan ini akan dibahas di bagian lain buku ini. Tetapi, bisa jadi Anda benar, bukankah lazim orang mengatakan bahwa dalam politik itu "pembenaran" lebih penting ketimbang ikhtiar mencari "kebenaran". Kalau yang kedua ini, sering dibilang wilayahnya para akademisi. Lazim orang mengatakan: politisi tidak selalu benar, sebab urusannya terletak pada kompetisi menang-kalah, tetapi akademisi di kampus-kampus kan tidak demikian? Hal itu seolah membenarkan pandangan bahwa politisi boleh bohong, sedangkan akademisi tidak. Makanya, kita harus kritis terhadap pandangan "salah kaprah" seperti itu, karena, pencarian kebenaran itu seharusnya dilakukan oleh siapa saja, apakah politisi, akademisi atau yang lain.

Tentu saja Anda, publik luas boleh prihatin sedalam-dalamnya, manakala ada politisi yang cepat berubah sikap dalam meninggalkan prinsip dan keyakinan politik semula, dengan dalih pembenaran yang seolah-olah hendak menegakkan "politik tingkat tinggi". Mungkin Anda akan terbagi ke dalam beberapa model penerimaan: (1) bisa menerima alasan perubahan sikap politik tanpa harus memahami dalih pembenarannya; (2) tidak bisa memahaminya sama sekali apapun alasannya; (3) menilai seberapa bermutunya alasan atau dalih pembenaran yang disampaikannya.

Kini tiba saatnya kita bahas soal mengapa kekuasaan cenderung disalahgunakan ...

Kalau soal itu, mari kita telusuri pendapat Lord Acton sebutan dari

25 Dhakidae (2015:40)

John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902). Dalam suratnya 5 April 1887, yang ditujukan kepada uskup Mandell Creighton, Acton menulis kalimat yang terkenal itu, "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*."[26] Kekuasaan cenderung korup/menyeleweng, tidak berarti semua pemegang kekuasaan korup atau menyelewengkan kekuasaannya itu. Sudah banyak contoh ketika para penguasa gagal menjalankan amanat, karena tak kuat oleh godaan kekuasaan. Pendapat Acton selaras dengan Al Ghazali. "Kekuasaan itu," kata Al Ghazali, "memabukkan!" Menurut Al Ghazali, jika seseorang mabuk karena meneguk *khamr*, ia tak akan menanggung malu setelah ia kembali sehat, sedangkan orang yang mabuk tahta, ia menjadi waras jika kekuasaan telah melayang darinya.

Siapa Al Ghazali itu?

Al Ghazali adalah seorang cendekiawan Muslim yang pada 1104, menulis *Al Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Muluk* (Bentangan Logam Mulia Nasihat-nasihat untuk Para Raja). Ia menulisnya di Thus, tempat pengasinganya, atas permintaan Muhammad ibn Maliksyah, yang baru saja memenangkan pertikaian politik, dan menjadi raja Saljuk. Pandangan Ghazali tentang kukuasaan tergolong radikal. Ia sempat "mengharamkan" ulama masuk istana dan melarangnya terlibat dalam pertikaian-pertikaian keagamaan. Al Ghazali meninggal pada 1111, dalam usia 53 tahun.

Pada prinsipnya, Ghazali memandang kekuasaan secara positif. Hakikatnya kekuasaan hanya milik Allah (Mahakuasa). Sedangkan kekuasaan yang ada pada manusia, terbatas, sesuai dengan sifat fatamorgana dunia. Apa yang diperbuat manusia di dunia, akan ada perhitunganya di akhirat, termasuk yang mengemban kekuasaan. Maka, kekuasaan duniawi tidak terpisah atau berdiri sendiri atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat. Ghazali tidak anti-dunia. Tetapi dunia harus dipandang secara benar agar kekuasaan mampu menumbuhkan keadilan. Penguasa menurut Ghazali, bertanggung jawab terhadap terwujudnya keadilan itu. Ada empat nasihat Al Ghazali, ditujukan kepada para penguasa agar: (1) Menjauhkan orang-orang bodoh dari pemerintahannya; (2) Membangun negeri, merekrut orang cerdas dan potensial ; (3) Menghargai orang tua dan bijak; dan (4) Meningkatkan kemajuan negara dengan melakukan penertiban dan pembersihan terhadap segala kejahatan.[27]

Penguasa harus menjauhkan diri dari "orang bodoh"?

Definisi "orang bodoh" itu yang tidak ahlinya. Kalau ia ditempatkan

26 Wikipedia.org

27 Al-Ghazali (2001).

THEGUARDIAN.COM

Setiap kali saya bertanya tentang Pepsi-Cola atau Coca-Cola, orang segera mengatakan itu adalah minuman Amerika atau Eropa. Ini tidak benar. Kola adalah Afrika .... Mengapa Pepsi-Cola dan Coca-Cola mahal? Karena mereka telah mengambil kola kami, memproduksinya, dan menjualnya kembali kepada kami. Kita harus memproduksi sendiri dan menjualnya kepada mereka

- Muammar Gaddafi

Whenever I ask about Pepsi-Cola or Coca-Cola, people immediately say it is an American or European drink. This is not true. The kola is African. ... Why are Pepsi-Cola and Coca-Cola expensive? Because they have taken our kola, produced it, and sold it back to us. We should produce it ourselves and sell it to them.

pada posisi di mana ia tidak paham atau tidak ahli di bidangnya, maka "tunggulah kehancurannya". "Orang bodoh" itu yang salah niat, licik dan penggerogot kekuasaan. Sebaliknya, dalam membangun negeri, para pemimpin harus merekrut orang cerdas dan potensial. Bahasa modernnya, para teknokrat, yang betul-betul ahli dan berkomitmen.

Kekuasaan dan Paksaan

> Kekuasaan adalah kesempatan untuk memaksakan kehendak Anda dalam konteks sosial.
>
> **- MAX WEBER**

ANDA KUTIP Max Weber, bagaimana penjelasannya?

Di antara pendapat populer tentang negara adalah versi Max Weber:

Pada Selasa 11 September 1973, kami mengalami kudeta militer di Chili yang memaksa saya untuk pada akhirnya meninggalkan negara saya. Dan kemudian, pada Selasa, 11 September 2001, kita mengalami serangan teroris di Amerika Serikat

- Isabel Allende

On a Tuesday, September 11th, 1973, we had the military coup in Chile that forced me to leave my country eventually. And then, on a Tuesday, September 11th, 2001, we had the terrorist attack in the United States.

bahwa negaralah satu-satunya entitas yang memperoleh pembenaran dalam pemakaian kekerasan. Atau, kerap pandangan ini diringkas sebagai "monopoli kekerasan oleh negara." Hal itu dikemukakan dalam esainya, *Politics as as Vocation* (1919). Weber berpendapat,

> Negara dianggap satu-satunya sumber yang "benar" untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, "politik" bagi kita berarti usaha untuk berbagi kekuasaan atau berusaha untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan, baik antar-negara atau antar-kelompok dalam negara.[28]

Dalam kasus-kasus peristiwa politik, banyak contoh tiba-tiba ada sosok yang seolah menemukan kekuasaan begitu saja, ada pula kekuasaan yang diambil paksa. Memang demikianlah adanya. Soal kekuasaan yang diambil paksa, biasanya terkait sekali dengan kudeta atau *coup d'etat*.

Kudeta?

Ya. Sejarah perebutan kekuasaan akrab diwarnai oleh praktik kudeta dengan segala variannya. Ada yang berdarah ada yang tidak (kudeta damai). Tetapi kudeta selalu berkonsekuensi: pascakudeta, pemerintahan baru dihadapkan dengan persoalan yang tidak mudah. Ada juga rezim yang hadir dari sebuah kudeta politik berhasil menstabilkan dinamika politik dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, dengan pendekatan yang represif dan mengabaikan demokrasi. Tetapi banyak juga yang gagal dan terjebak pada lingkaran kudeta demi kudeta.

Yang jelas, kudeta terkait dengan militer. Biasanya ia diartikan sebagai perebutan tampuk kekuasaan yang melibatkan kekuatan militer di dalamnya. Lebih jelasnya mari kita baca Edward Luttwak, *Coup d'Etat, a Practical Handbook*. Menurut Luttwak, "*A coup consists of the infiltration of a small,*

28 http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/ethos/Weber-vocation.pdf (diakses, 15 Desember 2015).

but critical, segment of the state apparatus, which is then used to displace the government from its control of the remainder."[29] Sederhana sekali, dikatakan bahwa sebuah kup terjadi apabila ada sekelompok kecil tapi kritis, yang menyusup ke organ-organ pemerintahan, yang kemudian mengambil-alih pemerintahan dan mengontrolnya. Militer yang terlibat kudeta pun biasanya hanya sekelompok kecil (elite) saja. Tapi kemudian mereka bisa mengambil-alih dan mengendalikan pemerintahan pasca-kudeta, karena pospos strategis sudah dikuasai.

Dari bahasa apa kudeta itu asalnya?

Kudeta itu perebutan kekuasaan secara ilegal. Secara linguistik, *coup d'état* berasal dari bahasa Perancis, "sebuah serangan atau pukulan pada negara" (*coup* [pukulan], *d'* [kepada] *état*, [negara]). Selain *coup d'état*, dikenal juga *putsch*. Kata *coup d'état* masuk *the Oxford Dictionary* pada 1646. Populer juga *pronunciamiento* atau *pronouncement*. Luttwak menjelaskan perbedaan *pronunciamiento* dan *coup d'état*. Kalau *coup d'état* melibatkan faksi dalam tubuh militer dalam penggulingan (*overthrow*) pemerintahan sipil yang berkuasa, *pronunciamiento* merupakan proses penggulingan kekuasaan atas perintah struktural pemimpin tertinggi angkatan bersenjata.[30]

Selain, pronunciamiento, jenis-jenis kudeta lainnya?

Huntington mengidentifikasi tiga jenis kudeta: *pertama*, *breakthrough coup d'état*. Intinya militer melancarkan revolusi dalam menggulingkan pemerintahan tradisional dan menciptakan elite birokrasi baru. *Kedua*, *guardian coup d'état*. Intinya, militer merebut kursi kekuasaan melalui kudeta, dengan dalih menegakkan tatanan publik, dan sejumlah alasan lain yang telah melekat pada alam pikir militer — di mana selalu dikaitkan dengan patriotisme. Kasus kontemporernya, misalnya ketika Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto ditumbangkan oleh Panglima Militer Genderal Muhammad Zia-ul-Haq pada 1977, dengan tuduhan bahwa Bhutto berada di belakang kerusuhan sipil. Hal yang senada dilakukan Genderal Pervez Musharraf ketika menggulingkan Perdana Menteri Nawaz Sharif pada 1999. Pemerintahan sipil pun segera berganti menjadi pemerintahan militer. Beberapa kasus kudeta tak berdarah alias *bloodless coup* di Pakistan, Turki, dan Thailand, biasanya muncul dari dari jenis *Guardian coup d'état*.[31]

Ada lagi?

Ya ini yang terakhir: *veto coup d'état*. Terjadi ketika militer memveto

29 Luttwak (1979).

30 Luttwak (1979).

31 Hungtington (1968:192-264).

atau menolak eksistensi kelompokkelompok tertentu dalam politik. Misalnya, ketika militer harus berkonfrontasi dengan kekuatan politik oposisi sipil. Terkadang ada kekuatan politik luar negeri yang kuat, untuk menghasut (*instigated*) militer untuk menumbangkan pemerintahan sipil yang berasal dari pihak yang dianggap "musuh membahayakan". Misalnya, ketika AS mempengaruhi militer Chili agar menumbangkan Presiden Salvador Allende Gossens yang berhaluan Sosialis, kendatipun terpilih melalui pemilu demokratis. Soal kudeta Chili cukup menarik, dan telah menjadi objek penelitian Arief Budiman dalam disertasinya yang kemudian dibukukan, *Jalan Demokratis ke Sosialisme: Pengalaman Chili di Bawah Allende*. Dalam kasus Chili awal 1970-an itu, Budiman memotret bagaimana Genderal Auguste Pinochet menggulingkan Presiden Allende yang terpilih secara demokratis. Allende meninggal menyusul kudeta militer 11 September 1973. Versi resmi yang dikeluarkan pemerintah junta militer pimpinan Pinochet, ia bunuh diri dengan senjata api. Namun ada pula yang menyebut bahwa ia dibunuh pasukan Pinochet.[32]

Jadi, kalau jenis v*eto coup d'état* atau *guardian coup d'état* dipimpin oleh panglima militer. *Breakthrough coup d'état* melibatkan para perwira menengah (dengan pangkat Kolonel ke bawah). Setelah kudeta dilakukan, biasanya pihak militer menginginkan kestabilan politik. Menurut Huntington, kebanyakan pemimpin *coup d'état* menggunakan dalih penegakan tatanan/stabilitas. Dan itu dilakukan dengan represi. Beberapa contoh pemimpin yang hadir *via* kudeta antara lain Shah Iran (1921-1941), Muammar Gaddafi, Libya (1969-2011), Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia (sejak 1987), Than Shwe, Myanmar (Burma) (sejak 1988), Omar Hassan Ahmad al Bashir, Sudan (sejak 1989), Yahya Jammeh, Gambia (sejak 1994), Hamad bin Khalifa, Qatar (sejak 1995), Pervez Musharraf, Pakistan (sejak 1999), Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, Fiji (sejak 2006), Mesir (2013) dan yang lain.[33]

Termasuk kudeta di negara tentangga kita Thailand?

Ya. Kudeta militer dilancarkan Panglima Angkatan Darat Genderal Sonthi Boonyaratglin atas pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra, 19 September 2006. Setelah mengembalikan ke kehidupan politik yang normal dalam demokrasi-sipil, banyak pihak berspekulasi tidak akan ada lagi kudeta di Thailand. Tetapi, nyatanya tidak: pada Kamis, 22 Mei 2014, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Genderal Prayut Chan-O-Cha, berpidato di televisi mengumumkan bahwa militer mengambil alih pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra setelah kisruh politik selama tujuh

32 Budiman (1987).

33 Hungtington (1968:192-264).

bulan. Sang panglima militer kemudian terpilih sebagai perdana menteri. Kudeta demikian, sebagaimana pola yang sudah-sudah, dilakukan setelah mendapatkan "restu" Raja. Sejak 1932 hingga 2014, tercatat sudah 24 kali kudeta terjadi di Thailand dengan pola yang hampir sama. Theeravit (1979) demokrasi di Thailand "lahir dari ujung laras senapan", dan "semua konstitusi mendapat restu dari Tuhan, seperti yang dibaca dalam pembukaannya, tetapi konstitusi-konstitusi itu tidak pernah selamat dari bedil".[34]

Kalau kudeta dilakukan oleh militer, bagaimana dengan pengambilalihan kekuasaan politik oleh sipil?

Terbagi dua: pengambilalihan kekuasaan secara wajar atau lazim, dan sebaliknya pengambilalihan secara tidak normal atau tidak lazim, karena bergolaknya dinamika politik. Dalam konteks Indonesia, Sidang Istimewa (SI) MPR, misalnya merupakan sarana untuk mengambil kekuasaan Presiden yang dinilai melanggar hukum, dan secara politik perlu dilengserkan. Melalui sidang itu, seorang Presiden mengalami proses *impeachment* atau permakzulan. Di Indonesia, kita ingat atas apa yang dialami Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tempo dulu. Dinamika politik saat itu demikian cepat dan menegangkan, tetapi berlangsung damai: Gus Dur terkena tiga kali memorandum oleh DPR yang membawanya ke SI MPR. Manuver Gus Dur yang mengeluarkan Maklumat Presiden, semacam dekrit, yang antara lain isinya membubarkan DPR dan Partai Golkar, justru memicu reaksi para politisi Senayan (di mana Ketua DPR saat itu Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais) untuk mempercepat SI MPR. Gus Dur memang akhirnya jatuh dari kekuasaannya yang dipegang relatif singkat itu. dari sini kita memperoleh pelajaran politik yang penting.

Bagaimana dengan kasus Turki, bukankah di sana sempat beredar istilah "kudeta sipil"?

Soal ini kebetulan saya ulas dalam disertasi saya yang telah dibukukan, *Militer dan Politik di Turki* (2015). Garis besar studi saya itu begini: Turki, setidaknya sejak 1960 kudeta militer seolah sudah langganan (1960, 1971, 1980, dan 1997). Kendatipun demikian, hubungan militer dan politik di negeri ini, dapat dilacak sejak dinasti Turki Usmani, bahkan dinasti Seljuk di masa lalu, di mana militer telah memainkan peran penting. Militer juga punya peran penting dalam perang kemerdekaan, dan penopang penting Republik Turki yang didirikan pada 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk.

Mustafa Kemal membawa Turki ke model Barat. Tradisi masa lalu diberangus secara radikal, ia mempraktikkan sistem partai tunggal, hingga

34 M Alfan Alfian, "Mengapa Militer Thailand Kudeta?", *Kompas*, 25 September 2006.

pasca-Perang Dunia II, tepatnya pada 1946, Turki menerapkan sistem multipartai di bawah Ismet Inonu. Pada 1950, partai oposisi, Partai Demokrat menang pemilu dan berkuasa. Tetapi, pada 1960, militer melancarkan kudeta. Lantas, konstitusi demokratis diubah dengan memberi kedudukan istimewa kepada militer di lembaga dewan keamanan nasional. Lembaga ini punya peran penting, karena selain membuat dokumen haluan negara, juga bertindak layaknya "pemerintah bayangan". Lembaga itu masih tetap kokoh pasca-kudeta 1980 dan bahkan berperan penting dalam penjatuhan pemerintahan Necmetin Erbakan (kudeta posmodern 1997). Sampai di sini militer merupakan entitas politik yang penting, menjalankan pengaruhnya dengan pola mengatur tetapi tidak memerintah (*ruling but not governing*).[35]

Terus, "kudeta sipil"-nya?

Sabar dulu, karena hal itu terjadi menyusul adanya perubahan politik penting pasca-Pemilu 2002. Tiba-tiba, partai baru, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menang telak dan memerintah. AKP benar-benar merupakan fenomena baru dalam politik Turki , mengingat kemenangannya sangat mengejutkan, lagi pula karena ia merupakan partai *quasi*-Islamis yang *notabene* secara tradisional merupakan lawan penting kubu sekuler dan militer. Dengan memenfaatkan Uni Eropa sebagai kekuatan besar, AKP melancarkan reformasi politik yang pada praktiknya dapat dilakukan secara efektif. Dampak kebijakan itu ialah peminggiran militer dari politik, terutama dengan merevisi kedudukan dan peran dewan keamanan nasional. Militer tak lagi punya peran signifikan di lembaga ini.

Di sisi lain, pemerintah AKP di bawah Recep Tayyip Erdoğan mampu memukul balik "konspirasi sipil dan militer" yang hendak menjatuhkannya, melalui kasus *Ergenekon* dan *Balyoz*. Lantas, banyak genderal dan prajurit aktif dan pensiunan diadili. Pada akhir 2011, seluruh petinggi militer mundur sebagai bentuk protes atas langkah eksesif pemerintah yang mengadili ratusan "prajurit militer". Tidak ada perlawanan yang signifikan dari mereka yang diadili, hingga jatuhnya vonis. Erdoğan juga mendorong pengadilan para pelaku kudeta di masa lalu, dan puncaknya adalah perubahan pasal-pasal penting dalam undang-undang yang membatasi ruang gerak militer dalam politik. Itulah yang disebut sebagai fenomena "kudeta sipil". Erdoğan telah mampu menundukkan militer sedemikian rupa, sebagai pemandangan terbalik dari tradisi kudeta militer selama ini. Kendatipun, dalam perkembangannya Erdoğan menyetujui peninjauan kembali pengadilan kontroversial kalangan militer tersebut, setidaknya pengalaman Turki dalam "menundukkan militer" tersebut, cukup unik, kontras dengan apa yang ter-

35 Alfian (2015).

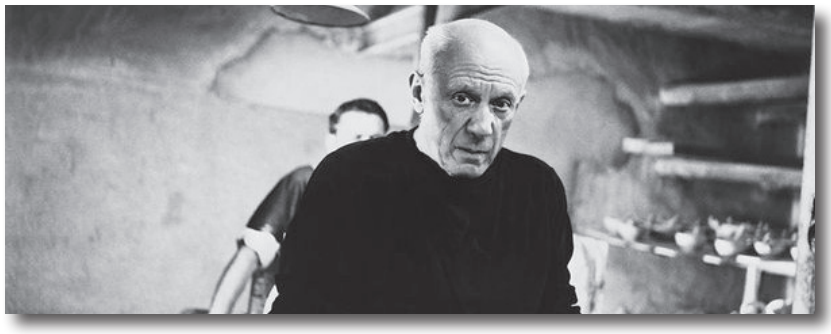

MIRROR.CO.UK

Aku ingin hidup sebagai orang miskin yang beruang banyak

- Pablo Picasso

I'd like to live as a poor man with lots of money.

jadi di Mesir (yang gagal mencegah militer tidak ikut campur dalam politik, dan titik-balik terjadi ketika militer melancarkan kudeta lagi).[36]

Kekuasaan, Uang, Godaan, dan Oligarki

> Ketika pemerintah tergantung pada para bankir dalam hal keuangan, mereka bukan pemimpin yang mengendalikan situasi, karena tangan yang memberi berada di atas tangan yang membutuhkan. Uang tidak memiliki tanah air, pemodal tanpa patriotisme dan tanpa kesusilaan, obyek tunggal mereka adalah keuntungan.
>
> **- NAPOLEON BONAPARTE**

DI ZAMAN partai-partai dewasa ini, rasanya sudah menjadi wacana betapa tidak ada yang gratis politik. Kekuasaan itu perlu ongkos. Benarkah politik itu mahal?

Politik itu mahal atau tidak, tergantung dari mana memandangnya. Mahal, apabila dilihat dari besarnya ongkos politik yang dikuantifikasi dalam nilai uang. Praktik politik di Indonesia mahal, karena ongkos politiknya tinggi, justru karena komponen tak resminya yang bengkak. Maksudnya, ongkos pendekatan dan ijab-kabul seorang calon dengan partai pasti tinggi. Jumlahnya tidak mau ada yang menyebut. Partai-partai kita masih banyak yang memposisikan diri sebagai kendaraan yang mengantarkan calon bermodal *gede*. Yang bermodal cekak, silakan minggir. Belum yang lain, misal-

36 Alfian (2015).

Uang adalah mekanisme pengendali
- David Korten

Money is a mechanism for control

nya ongkos sosialisasi politik dan kampanye, dan apabila sang kandidat tega menghambur-hamburkan *money politics* alias politik uang. Tapi, pemberian uang atau fasilitas pada calon pemilih, tampaknya telah seusia sejarah penyelenggaraan demokrasi langsung itu sendiri.

Bagaimana kisahnya?

Coba kita lihat sejarah politik di AS, negara yang sejarah demokrasinya banyak dibaca orang. Kutipan dari George Thayer (1973) berikut menjelaskan apa yang dilakukan oleh George Washington,

> Ketika berjuang untuk memperebutkan kedudukan di *Virginia House of Burgesses* dari *Fairfax Country*, George Washington memberikan kepada teman-temannya 'alat yang lazim ditempuh untuk memenangkan suara': yakni 28 galon rum, 50 galon rum puch, 34 galon minuman anggur, 46 galon bir, dan 2 galon *cidel royal*. Bahkan untuk masa-masa itu, hal ini dianggap sebagai sebuah pengeluaran kampanye yang besar, karena hanya terdapat 391 suara di distriknya, untuk sebuah ratarata biaya yang lebih dari seperempat atau setengah untuk setiap orangnya.[37]

Istilah "alat yang lazim ditempuh untuk memenangkan suara" dalam perkembangannya mengalami penafsiran yang berbeda-beda. Yang lazim itu yang seperti apa? Yang tak lazim yang bagaimana? Maka perdebatan tajam pun terjadi. Tapi, setidaknya, orang membagi antara yang legal dan yang tidak legal. Yang legal ialah biaya atau ongkos yang tercatat dan dapat diaudit, atau yang termasuk ke dalam kategori *financial politics*. Yang "haram" alias yang tidak legal, yang tersembunyi dari audit atau yang melanggar ketentuan, termasuk ke dalam *money politics*.

Istilah *financial politics* itu apa tidak terlampau eufimistik, dihalus-haluskan? Apa bedanya dengan *money politics*?

Pengertiannya memang berbeda. *Financial politics* lebih netral ketimbang *money politics*. *Financial politics* merujuk pada pengertian ongkos wajar, terhitung, resmi dan transparan dari sebuah aktivitas politik. *Finansial politics* bisa membengkak seiring kebutuhan. Di sisi lain, ongkos politik pasti menjadi sangat mahal apabila *money politics* menggelembung, yang

37 Alexander (1992)

di Indonesia lazim dilakukan dengan membagibagi sejumlah uang tertentu pada calon pemilih beberapa jam sebelum pemungutan suara, yang dikenal sebagai *serangan fajar* — padahal *Serangan Fajar* pernah jadi judul film heroik dengan seting Yogyakarta pasca-1945, disutradarai oleh Arifin C Noer (1981).[38]

Di AS, bagaimana mekanisme aturan soal *financial politics* itu dewasa ini?

Soal *financial politics* ini, dalam proses pemilu presiden di AS, pengumpulan dana politik bersifat legal dan dilakukan secara sangat transparan. Di AS terdapat banyak aturan yang terkait dengan hal tersebut, yang menurut menjangkau hal-hal sebagai berikut: (1) Keterbukaan publik (*public disclosure*): untuk memberikan informasi kepada publik, baik selama maupun setelah kampanye, tentang pengaruh uang terhadap pejabat-pejabat terpilih dan untuk membantu mengurangi ekses-ekses dan tindakan penyalah gunaan, dengan cara meningkatkan risiko-risiko politik yang harus ditanggung oleh mereka yang melakukan praktik-praktik seperti itu. Kemudian, (2) Pembatasan-pembatasan pengeluaran (*expenditure limits*): untuk mengatasi ragam masalah yang ditimbulkan oleh pembengkakan biaya, dan oleh adanya beberapa kandidat yang mempunyai lebih banyak uang dari yang lainnya; dan (3) pembatasan-pembatasan pemberian sumbangan (*contributions restrictions*): untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya kandidat yang mengikatkan diri pada kepentingan-kepentingan tertentu.[39]

Kalau di Indonesia?

Peraturannya belum seketat dan secanggih di AS. Di Indonesia, yang terkait soal ini, soal keuangan parpol diatur dalam Pasal 34-39 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

- Pasal 34 (1) keuangan parpol bersumber dari: iuran anggota; sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari APBN/APBD; (2) Sumbangan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa; (3) Bantuan keuangan dari APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- Pasal 34A (1) parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan

38 Wikipedia.org

39 Alexander (1992)

APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala satu tahun sekali untuk diaudit. Pasal 35 (1) Sumbangan yang sah menurut hukum diterima parpol berasal dari: perseorangan anggota parpol yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; perseorangan bukan anggota parpol, paling banyak senilai satu miliar rupiah per orang dalam waktu satu tahun anggaran; perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai tujuh miliar lima ratus juta rupiah per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

- Pasal 39 (1) pengelolaan keuangan parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel; (2) Pengelolaan keuangan parpol diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun dan diumumkan secara periodik; (3) Parpol wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran parpol; laporan neraca; dan laporan arus kas.

Apakah aturan itu akan membuat prinsip transparansi terjamin?

Tidak tentu juga. Masih banyak celah kelihatannya. Tentu partai dan masyarakat, juga pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran dan kontribusi masing-masing. Menjelang Pemilu 2004 misalnya, sekelompok LSM menyerukan *anti-money politics*, dengan melancarkan kampanye *anti-politisi busuk*, justru dengan jargon "ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya". Pembuat jargon tersebut tentu punya alasan untuk bisa dimaklumi. Tetapi, hal itu tidak menunjukkan sikap tegas *anti-money politics*. Mestinya, tolak uangnya, laporkan ke pihak yang berwajib, karena melanggar UU. Masyarakat harus tanpa kompromi dengan praktik-praktik *money politics*. Imbauan ini memang susah penerapannya di lapangan, di mana masyarakat kondisi hidupnya semakin susah. Kesusahan hidup membuat masyarakat menjadi kian pragmatis dan permisif.

Harus diakui bahwa ongkos politik di Indonesia era demokrasi langsung ini memang mahal. Peluang "pihak yang berpunya" atau yang berlebih finansial tentu lebih besar ketimbang yang tidak. Tentu saja, apabila dengan finansialnya mampu membangun persepsi publik yang baik. Membengkaknya biaya kampanye, antara lain pada pos biaya iklan. Hal ini dapat dipahami karena pemenang pemilu adalah yang dapat memenangkan persepsi publik. Tetapi, *jor-joran* pasang iklan politik bisa membuat publik jenuh.

Bagaimana ongkos politik bisa diminalisasi?

Ongkos politik bisa diminalisasi dengan mengefektifkan sistemnya, misalnya dengan menyelenggarakan beberapa jenis pemilu secara bersamaan. Tidak hanya itu, sistem perlu diperbaiki dengan adanya aturan-aturan yang bersifat antisipatif, agar kandidat tidak boros uang, hingga menutup

Uang itu barometer keutamaan masyarakat
- Ayn Rand
Money is the barometer of a society's virtue.

celah *money politics*. Bagi yang melanggar aturan halihwal dana kampanye, harus ada punishment yang tegas tanpa pandang bulu. Terlepas dari itu, kita akan terus belajar dari pengalaman. Ongkos politik yang masih sangat mahal ini, harapannya kelak bisa diefisienkan. Tapi, ada satu catatan penting bahwa logika politik dan legitimasi politik itu tetap berbeda dengan logika hitung dagang, dan boros tidaknya *financial politics*, tidak bisa disamakan dengan modal dagang yang sudah dikeluarkan berikut laba yang didapatkan secara materi.

Antara kapital dan politik itu saling berkaitan, dalam suatu pemilu, terutama pemilu presiden atau kepala daerah, pemenangnya seringkali justru: pemilik modal. Begitukah?

Memang, kerap demokrasi langsung kita telah memunculkan aneka anekdot getir, antara lain, dikatakan pemenang pilkada provinsi A yang sebenarnya bukanlah pasangan si Z-Y, melainkan bandarnya. Istilah bandar mengalami penghalusan menjadi pemodal atau investor. Bandar ternyata lihai bermain di segala lini untuk memodali semua kandidat. Fenomena itu terasa sekali tatkala, misalnya, mengapa hampir seluruh kandidat pilkada provinsi A tidak mempersoalkan kasus tertentu yang sangat populer karena kontroversial di mana dampaknya adalah peminggiran para korban yang bernama rakyat. Mengapa pula para kandidat berlomba membagi "'fasilitas" ke simpul-simpul strategis masyarakat bak sinterklas?

Yang jelas, sebagian besar mereka tampil mendadak sebagai bos-bos politik. Tapi, kerap mereka dan juga hampir seluruh aktor yang berlaga dalam segala jenis pemilu justru hanyalah agen sebuah "'kepentingan yang lebih besar" yang bersifat *invisible hands* alias hantu blau. Si bos yang sebenarnya sang investor politik. Fenomena ini segera mengingatkan kita pada wacana tentang bosisme politik (*political bossism*).

Bosisme?

Menurut Fred J. Cook dalam bukunya *American Political Bosses and Machines* (1973), istilah bosisme itu tak lepas dari sejarah panjang demokrasi politik di AS, bahkan sisa-sisa pengaruhnya masih terasa hingga kini. Bosisme diartikan sebagai sebuah sistem politik yang menempatkan sosok tunggal dengan kekuatan penuh mengontrol jalannya politik. Si bos membawahkan sebuah organisasi yang kompleks, yang memadukan kepenting-

PROJECTAVALON.NET

Uang harus melayani, bukan untuk memerintah
- Paus Fransiskus

Money has to serve, not to rule

an ekonomi dan politik sekaligus. Di AS, bosisme menjadi isu politik penting pada sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[40]

Di ranah ekonomi, si bos memiliki banyak usaha, lincah mengembangkan modal dan menyiasati sistem secara legal-etis maupun nakal/ilegal. Sang kapitalis selalu eksis di tengah cuaca politik apapun karena punya saham di kekuasaan. Dengan kekuatan modal dan jejaring yang kuat di segala lini serta dengan teknik kecanggihan tertentu, si bos bisa mendiktekan kemauan politiknya kepada kandidat, bahkan mengatur perilaku pemilih. Di Indonesia, barangkali, istilah populernya *bos preman*, dan tentu bukan preman *kelas teri* alias *kacangan* atau *kecengan*.

Kalau *political machine*?

Sebelum wacana *political machine* (mesin politik) banyak dikaitkan dengan partai-partai politik, istilah itu sesungguhnya sangat dekat dengan bosisme. *Political machine* lebih merujuk pada pergerakan organisasi (politik) yang tidak resmi dikendalikan dengan sangat kuat oleh patron secara *behind the scenes*, yang selalu berupaya menguasai struktur, aktor-aktor, dan mengendalikan permainan demokrasi politik.[41] Konteks istilah ini selaras dengan wacana politik klientalisme yang populer di Amerika Latin, Afrika, serta Eropa Timur pasca-Komunis.

Dalam konteks bosisme dan mesin politik, kata kunci utamanya adalah patronase yang tentu saja terkait erat dengan ranah korupsi politik. Novel semacam *The Godfather* karya agung Mario Puzo (1969) — yang sudah kita

40 Cook (1973).

41 Cook (1973).

singgung juga di depan — tampaknya, cukup memberikan gambaran tentang bosisme dan *political machine*, di mana pertarungan bisnis dan politik berlangsung sangat seru bahkan tak luput dari aneka kekerasan. Biasanya hal tersebut sering mengemuka dalam praktik kompetisi politik lokal. Misalnya, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Sidel, tentang bosisme di Asia Tenggara.[42]

Apa yang menarik dari studi Sidel itu?

Sidel mencatat masalah pelik dalam demokrasi lokal di Indonesia, Filipina dan Thailand. Kecenderungan umumnya, mengemukanya masalah-masalah *money politics* (politik uang) dan *gangsterism* (premanisme). Pemilu lokal lazim diwarnai *jor-joran* politik uang dan ancaman kekerasan yang melibatkan para pemain, terutama para pebisnis lokal sebagai bandar. Para anggota dewan yang terpilih pun, seringkali justru disominasi para pebisnis, preman, dan sejenisnya. Mereka saling terkait dalam klik kriminal atau setidaknya bekerjasama dalam kepentingan bisnis. Dalam pemilu lokal, mereka mengerahkan massa dengan menundukkan dan memanfaatkan para elite lokal, apakah elite agama atau etnis. Mereka adalah, sebagaimana disebut Joel Migdal, orang kuat lokal (*local strongmen*). Sidel mencatat kecenderungan yang terjadi di Filipina, Thailand dan Indonesia sebagaimana saya ringkaskan (dengan beberapa tambahan), berikut ini:

> **Filipina**: Filipina menawarkan kasus paling jelas ketika hubungan patron-klien dan kegigihan elite pemilik tanah dalam politik, lazim mengemuka. Berbagai macam pemilu (lokal dan nasional) di Filipina melibatkan para politisi lokal dan 'klan politik' yang berkepentingan dalam mempertahankan dan memperluas kepentingan ekonomi mereka. Fenomena ini tak lepas dari sejarah politik Filipina sebagai negara yang pernah dijajah Amerika Serikat dan Spanyol. Pada era kolonial Amerika (1900-1941) birokratisasi dan dikombinasikan dengan 'akumulasi primitif' untuk memfasilitasi munculnya bossisme. Sebagai Republik independen yang diresmikan 1946 pada dasarnya Filipina memperoleh warisan kelembagaan pemerintahan kolonial Amerika, di mana bosisme terus berkembang. Di Filipina, lazim ditemukan daerah di mana seorang politisi — atau satu keluarga — membangun posisi monopoli dalam ekonomi lokal selama bertahun-tahun.[43]
>
> Sebagai catatan tambahan, di Filipina fenomena bosisme dan mesin politik di sana telah menimbulkan banyak korban. Kekerasan politik telah menjadi pola yang, bahkan, ekstrem. Pada Pemilu 2007, misalnya, tercatat sedikitnya ratusan orang tewas akibat kekerasan politik, demikian pula pada Pilpres 2004. Pemilu-pemilu di Filipina sering ditandai oleh aksi kekerasan karena kelom-

42 Sidel (2004).

43 Sidel (2004).

pok-kelompok yang bersaing menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi pemilih atau lawan-lawan politik.

Berbeda dengan Indonesia, lansekap politik (lokal) di Filipina masih ditandai dengan kuatnya tuan tanah yang kemudian mengerucut menjadi bos-bos bisnis dan politik. Mereka, seperti juga para gangster dalam *The Godfather*, punya *political machine*, dan bahkan senjata yang bisa dipakai untuk saling meneror. Sebagaimana dicatat *New York Times*, "*There are at least 250 political dynasties scattered throughout the Philippines, according to the Center for People Empowerment in Governance, a nonprofit group. For many of them and particularly those in the south, politics is literally a blood sport, with the clans' power and income riding on the outcome of elections. As a consequence, violence has become a fixture of elections here; at least 126 died in the 2007 elections and 189 in 2004*."[44]

Menurut Sidel, kasus bosisme Filipina mencerminkan konjungtur yang cukup umum dalam pembentukan negara dan pembangunan kapitalis: subordinasi aparatur negara oleh pejabat terpilih yang berlatar belakang longgarnya "akumulasi primitif" yang mengacu pada fase perkembangan kapitalis yang bercorak klientelistik.[45]

Bagaimana dengan Thailand dan Indonesia?

Baik kita lanjutkan ringkasan uraian Sidel tentang fenomena bosisme di Thailand dan Indonesia berikut ini:

Thailand: bosisme di Thailand juga tak lepas dari sejarah politiknya yang khas, yang seringkali negara jatuh di tangan militer. Pada pertengahan 1980-an misalnya, di Thailand muncul fenomena bosisme lokal, yang paling menonjol adalah hadirnya mafioso *chao pho* (atau *jao poh*) atau '*The Thai Godfather*', merujuk pada mereka yang mengakumulasikan kekayaan milik (lahan pertanian, properti *real estate*, pabrik, pusat pengolahan, pabrik hingga saham di bank-bank dan perusahaan-perusahaan industri), waralaba (pertambangan, pekerjaan umum, transportasi dan yang lain), hingga keterlibatan mereka dalam bisnis ilegal (perdagangan narkoba, perjudian, penyelundupan dan yang lain). *Chao pho* juga telah terkenal untuk urusan kontrol politik lokal, menjadi broker suara (*hua khanaen*) dalam pemilu dan manipulasi politik lainnya melalui kombinasi paksaan, pembelian suara, dan penipuan.[46]

Indonesia: Selama tiga dekade era Soeharto (1966-1998), politik lokal di Indonesia tak lepas dari kebijakan politik nasional yang terpusat Jakarta. Meskipun hadir *pseudo*-parlemen di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional yang secara teratur terpilih pada siklus pemilu lima tahun, kekuatan efektif dan hak

44 "*Toll Rises to 46 in Philippine Election Unrest*," *New York Times*, 24 November 2009.

45 Sidel (2004).

46 Sidel (2004).

Di mana terdapat beberapa orang yang sangat kaya ketimbang lainnya, ia akan menghasilkan baik demokrasi ekstrim alias oligarki mutlak, ataupun despotisme yang datang dari salah satu eksesnya

- Aristoteles

Where some people are very wealthy and others have nothing, the result will be either extreme democracy or absolute oligarchy, or despotism will come from either of those excesses

istimewa mereka yang sangat terbatas. Dalam hal politik lokal, praktik pemerintahan otoriter terpusat Orde Baru dimediasi oleh kepentingan elite lokal yang menguasai anak tangga terendah dari hirarki pemerintahan. Singkatnya, sifat yang sangat terpusat dan otoriter dari negara justru membuat 'bos-bos lokal' (apakah dari aristokrasi lokal di Jawa dan luar Jawa, cendekiawan Muslim dalam operasi jaringan yang luas dari sekolah-sekolah Islam di Nusantara, dan pemimpin lembaga adar di sejumlah provinsi) mustahil muncul, bertahan hidup, dan berkembang. Dengan kata lain, belum ada 'orang kuat lokal' yang muncul di antara kelompok-kelompok tersebut sebagai kekuatan sosial. Sebaliknya, jaringan longgar 'mafia' dan klan tumbuh dari dalam negara (daripada muncul secara organik dari masyarakat).

Namun, dengan transisi ke pemilihan kompetitif pada 1999, kondisi yang mendekati apa yang terjadi di Filipina dan Thailand, mulai tampak di Indonesia. Kebijakan desentralisasi membuat kekuasaan bergeser 'ke bawah' dan 'keluar' dari birokrasi yang terpusat di Jakarta.Dengan demokratisasi dan desentralisasi, calo kekuasaan lokal seperti memperoleh kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya: dalam banyak kasus elite bisnis lokal berpengaruh di badan legislatif lokal untuk memastikan bahwa pemerintah lokal membuat keputusan resmi mengenai pengelolaan sumber daya lokal yang mendukung kepentingan mereka dan mitra bisnis mereka dari luar daerah. Munculnya 'mafia lokal' juga muncul di bawah kepemimpinan aristokrasi lokal dan komunitas (apakah agama atau etnis) yang telah memainkan peran penting dalam mobilisasi konflik komunal.[47]

Baik. Kalau bicara soal uang dan kekuasaan, kita jadi ingatkan aksioma Lord Acton: kekuasaan cenderung diselewengkan alias korup ...

Soal apa yang dikatakan Lord Acton sudah dibahas di bagian lain buku ini. Intinya, godaan memang selalu terbuka bagi siapa saja yang punya kesempatan dan *power*. Para politisi yang punya jabatan formal di legislatif merasakan betul betapa godaan itu datang bertubi-tubi setiap saat. Godaan tak mengenal atau pilih-pilih orang apakah ia lugu atau tidak. Kita sering

47 Sidel (2004).

Pemerintah ... tidak bisa menjadi apa pun selain organisasi minoritas

- Robert Michels

The government ... cannot be anything other than the organization of a minority.

merasa heran dengan kejadian-kejadian menyedihkan: tatkala ada politisi berpenampilan kalem, baik, masih muda, enerjik, berpenampilan modis, kalau bicara didengarkan orang, serta masih memiliki potensi sebagai pemimpin masa depan, tertimpa "musibah" yang "memalukan".

Dari perspektif ini muncul dua jenis politisi: politisi tahan dan/atau *penikmat* godaan. Yang menjadi keprihatinan ialah kalau politisi jenis kedua itu yang lebih terasakan keberadaannya. Tapi, ingatkah kita pada syair lagu *qasidah* Grup Musik Bimbo yang berkisah tentang bujukan orang-orang kafir Quraish agar Rasulullah Muhammad SAW untuk tidak melanjutkan misinya dengan menawarkan harta, tahta dan wanita. Tetapi, walaupun,

Matahari di tangan kanan
Rembulan di tangan kiri
Tidak mampu menggoyah Rasul yang tabah.[48]

Godaan memang tidak sesederhana "menumpuk kekayaan" dan meraih jabatan dengan menghalalkan segala cara, tetapi juga wanita ...

Sejarah mencatat, misalnya Presiden Bill Clinton pernah terlibat skandal *Monicagate* yang membawanya ke proses *impeachment* — soal ini sudah dibahas di bagian lain buku ini. Clinton memang selamat dari permakzulan, tetapi publik tidak akan melupakan begitu saja *affair*-nya dengan perempuan yang bukan istrinya bernama Monica Lewinski itu. Dalam sejarah kepresidenan AS, sesungguhnya kasus perselingkuhan bukan hanya sekali itu. Dalam buku Jon Feda dan Nico Ermann, *America Undercover*, ditulis kisah-kisah perselingkuhan beberapa presiden, antara lain Thomas Jeffereson, James Buchanan, Warren Gamaliel Harding, Franklin Delano Roosevelt, Dwight Eisenhower, John F Kennedy, Lyndon B Johnson, hingga George Walker Bush.[49]

Mungkin saking banyaknya kisah jatuhnya para pemimpin akibat skandal moral, salah satu novel Sidney Sheldon melukiskannya dalam novel berjudul *The Best Laid Plans*. Kisahnya mengungkapkan liku-liku dua lembaga

48 Qasidah Bimbo, *Matahari dan Rebulan* (Produksi 1974).

49 Feda dan Ermann (2008).

yang paling berkuasa dan keji di AS: (1) dunia politik, yang penuh dengan skandal, korupsi, dan kejahatan terselubung; dan (2) dunia suratkabar, tempat kekuatan pers biasanya dipakai untuk menghancurkan para tokoh atau lawan politik yang tak disukai. Dalam novel ini sang presiden jauh akibat skandal seks, obat terlarang dan pembunuhan.[50]

Bagaimana dengan oligarki? Apa yang dimaksud dengannya? Apakah ia terkait dengan uang/harta? Bagaimana pula perkembangan konsepnya?

Rujukan saya dalam menjawab pertanyaan ini, terutama adalah buku Jeffrey Winters, *Oligarchy*. Winters mengingatkan kembali, oligarki secara konseptual telah lama dikenal dalam studi politik. Istilah ini eksis sejak era Yunani Kuno. Merujuk *International Encyclopedia of Social Sciences*, oligarki adalah "bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil". Ia diambil dari bahasa Yunani, "*oligarchia*", artinya pemerintahan oleh *yang sedikit*. *Oligoi* (sedikit), *arkhein* (memerintah).[51]

Menurut Winters, oligarki termasuk konsep yang banyak digunakan, meskipun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Konsep ini sebelumnya memang telah dipopulerkan oleh Robert Michels (1911) melalui perspektif "hukum besi oligarki", tetapi ternyata hal itu menurut Winters, bukan teori oligarki, melainkan sekadar analisis mengenai kaum elite yang akhirnya mendominasi semua organisasi yang kompleks. Sementara, jauh sebelum itu, Aristoteles (350 SM) sekadar mendefinisikan oligarki sebagai kekuasaan berdasarkan jumlah pemegangnya. Dalam konteks inilah, oligarki sebagai "kekuasaan sekelompok kecil" (*rule of few*) saja oleh Winters dipandang tidak cukup.[52]

Winters tidak puas. Pengertian singkat tersebut dipandangnya "sangat problematis dan tidak memadai", apalagi apabila yang disematkan hanya konsep "minoritas yang menguasai mayoritas". Kalau konsepnya seperti itu, maka hampir setiap kekuasaan, pengaruh, atau pemerintahan, yang menempatkan adanya minoritas dalam memimpin, disebut sebagai oligarki. Winters berpendapat, oligarki semestinya tidak sesederhana itu, karenanya ia berikhtiar merekonstruksi konsepnya.

Lantas apa yang dimaksud oligarki oleh Winters?

Winters menempatkan oligarki pada dua dimensi: (1) oligarki memiliki dasar kekuasaan — kekayaan material — yang sangat susah untuk dipecah

50 Sheldon (2006).

51 Winters (2011:1).

52 Winters (2011:3).

dan diseimbangkan; dan (2) oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.[53] Menurutnya, teori oligarki dimulai dari adanya ketidaksetaraan material yang ekstrem, sehingga menghasilkan ketidaksetaraan politik yang juga ekstrem. Kendatipun dalam demokrasi, kedudukan dan akses terhadap proses politik diasumsikan setara, tetapi adanya kekayaan yang sangat besar di tangan minoritas kecil berkonsekuensi menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan. Distribusi sumber daya material, karenanya, memiliki pengaruh besar pada kekuasaan.

Winters mengajukan klaim teoritik eratnya hubungan uang (kekayaan) dan kekuasaan sebagai sesuatu menyejarah dalam sistem politik manusia. Studi mengenai *oligark* dan oligarki oleh Winters dipusatkan pada *kuasa kekayaan* dan dampak politiknya. Baginya, teori oligarki harus menjelaskan bagaimana kekayaan yang terkonsentrasi menciptakan kapasitas, motivasi, dan masalah politik tertentu bagi mereka yang memilikinya, selain harus peka terhadap bagaimana dan mengapa politik seputar kekayaan sebagai kekuasaan telah berubah seiring perkembangan waktu. Winters mendefinisikan *oligark* sebagai "pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya".[54]

Dari definisi tersebut, terdapat tiga hal yang bersangkut paut: (1) kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain, yang berpusat pada minoritas; (2) penguasaan dan pengendalian sumber daya tersebut ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan (3) definisi *oligark* tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus. Winters lantas memperkenalkan konsep "pertahanan kekayaan" (*wealth defense*).

Apa pula yang dimaksud dengan *wealth defense* itu?

Winters mengasumsikan, sepanjang sejarah, kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusikan-ulang. Ancaman pengambil-alihan sumber daya material *oligark* tersebut memunculkan konsep *wealth defense*. Dinamika politik *oligark* berhubungan dengan ancaman, sehingga memunculkan ikhtiar mempertahankan kekeyaannya. Pertahanan kekayaan yang dimaksud Winters, mencangkup dua komponen: (1) pertahanan harta; dan (2) pertahanan pendapatan. Pertahanan harta (*property defense)* mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik. Sementara, pertahanan pendapatan (*income defense)* menjaga sebanyak mungkin pendapatan dan

53 Winters (2011:5-6).

54 Winters (2011:8).

laba dari kekayaan dalam kondisi hak milik aman.[55]

Maka, Winters mendefinisikan oligarki sebagai sistem yang merujuk pada "politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (*oligark*)".[56] Jadi jelas, bagi Winters aspek penting oligarki ialah kekayaan yang menjadi sumber daya material bagi kekuasaan para *oligark* yang dinamika pertahanannya dikelola secara politis. Aspek pertahanan kekayaan sebagai sumber daya kekuasaan inilah yang menentukan bagaimana oligarki berdiferensiasi ke dalam berbagai bentuk, mengacu pada beragam konteks politik dan periode sejarah. Karenanya, definisi oligarki bisa tetap, tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. Semakin besar kebutuhan mempertahankan kekayaan, semakin banyak *oligark* yang terlibat dalam politik. Tetapi, apabila dalam sistem politik hak milik dan kekayaan dilindungi secara ketat, *oligark* tidak merasa perlu terlibat aktif dalam perebutan kekuasaan.

Bagaimana dengan konteks kekuasaan?

Menurut Winters, sumber daya kekuasaan mencakup hak politik formal, jabatan resmi (baik di dalam maupun di luar pemerintahan), kuasa pemaksaan (*coercive power*), kekuatan mobilisasi dan kekuasaan material (kekayaan). Empat sumber daya yang pertama, ketika didistribusikan dengan cara sangat eksklusif atau terkonsentrasi, adalah dasar yang umumnya dikenal sebagai politik elite. Sumber daya yang terakhir, kekuasaan material adalah basis oligarki. *Oligark* adalah aktor yang diberdayakan oleh kekayaan sumber daya paling menonjol di antara bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Dalam suatu sistem politik, *oligark* selalu menjadi elite, tetapi seorang elite belum tentu *oligark*. Bagi Winters, persamaan *oligark* sepanjang sejarah, karena kekayaan telah mendefinisikan mereka, selain memberi kekuasaan dan mendatangkan ancaman kepada mereka. Keragaman cara *oligark* mempertahankan kekayaan, memunculkan tipe-tipe oligarki.

Apa saja tipe-tipe oligarki menurut Winters?

Winters menjelaskan semua oligarki dapat digolongkan menurut empat ciri: (1) kadar keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan yang menyokong hak milik atas harta dan kekayaan; (2) keterlibatan *oligark* dalam kekuasaan atau pemerintahan; (3) sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasan itu, apakah terpecah atau kolektif; dan (4) *oligark* bersifat liar atau jinak.[57] Kemudian ia membagi tipe oligarki: (1) oligarki panglima; (2) oligarki penguasa kolektif; (3) oligarki sultanistik; dan (4) oligarki sipil.

55 Winters (2011:9-10).

56 Winters (2011:10).

57 Winters (2011:48).

Bagaimana penjelasan ringkasnya?

Baiklah, berikut ringkasannya:[58]

- **Oligarki Panglima.** Oligarki jenis ini muncul melalui kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung ada pada dirinya. Setiap *oligark* memiliki senjata untuk mendapatan kekayaan. Ia memiliki tentara dan berebut secara langsung sumber daya material dengan *oligark* lain. Pada dunia seperti itu, perpecahan antar *oligark* berada di tingkat tertinggi, sehingga persekutuan tidak stabil. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar *oligark* panglima. Dapat dikatakan, pengumpulan kekayaan dilakukan dengan cara penaklukan satu panglima ke panglima lainnya, sehingga ancaman paling dominan terdapat pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima terjadi dari masa pra-sejarah, Eropa zaman pertengahan, dan berakhir dengan keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia.
- **Oligarki penguasa kolektif**. *Oligark* jenis ini memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma/aturan main. Perbedaan mendasar Oligarki panglima dan oligarki penguasa kolektif terletak pada kadar kerjasamanya. Dalam Oligarki penguasa kolektif ini, para *oligark* bekerjasama untuk mempertahankan kekayaannya dan memerintah suatu komunitas. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah kolektif dilembagakan dalam suatu badan pemerintah yang isinya *oligark* semuanya. Secara historis, contoh dari bentuk oligarki penguasa kolektif bisa ditemui dari komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma, juga menurut Winters adalah praktik politik di Indonesia pasca-Soeharto.
- **Oligarki Sultanistik**. Bentuk oligarki dapat terjadi ketika monopoli sarana pemaksaannya terletak pada satu tangan *oligark*. Hubungan antara *oligark* bersifat patron-klien terhadap *oligark* yang berkuasa tersebut. Inilah jenis oligarki sultanistik. Wewenang dan kekerasan hanya dikuasai oleh penguasa utama, sedangkan para *oligark* lainnya menggantungkan pertahanan kekayaan dan hartanya pada *oligark* tunggal tersebut. Para penguasa *oligark* mengalahkan kapasitas *oligark* di bawahnya, biasanya dengan mekanisme alat kekerasan negara atau mencampurkan dengan sarana pemaksa individu. Para *oligark* bawahan yang tidak bersenjata kemudian mempertahankan kekayaan dengan menginvestasikan sebagian sumber daya yang dimilikinya kepada *oligark* sultanistik. Dengan itu, *oligark* penguasa berkewajiban melindungi para *oligark* di bawahnya. Salah satu contoh oligarki sultanistik ialah rezim Soeharto di Indonesia.
- **Oligarki Sipil**. Oligarki jenis ini sepenuhnya tak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. *Oligark* menyerahkan kekuasaannya pada lembaga non-pribadi dan terlembaga di mana hukum lebih kuat. Oligarki jenis ini disebut dengan oligarki sipil. Karena hak milik dan pertahanan harta telah disedia-

58 Ringkasan ini diambil dari Ananta (2014). http://indoprogress.com/2014/11/oligarki-tatanan-ekonomi-politik-indonesia-kontemporer/#_ftn10

kan oleh negara, maka fokus *oligark* hanya pada pertahanan pendapatan, yaitu upaya untuk mengelak dari jangkauan negara untuk meredistribusi kekayaan, misal melalui pajak progresif. Oligarki sipil tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. Misalnya, Amerika dan India memang bersifat demokratis secara prosedural, tetapi di Singapura dan Malaysia bersifat otoriter. Dari beragam contoh itu, semuanya bersifat oligarki sipil.

Tipe-tipe tersebut statis atau dinamis? Bagaimana dengan kasus Indonesia?

Dinamis. Menurut Winters dalam suatu wilayah yang memiliki satu tipe oligarki tertentu, ia mungkin bisa berubah menjadi tipe oligarki lainnya, mengikuti perkembangan situasi yang spesifik. Dalam kasus Indonesia, *oligark* merupakan aktor yang sangat berpengaruh dalam ranah ekonomi politik. Mereka hadir dan memperoleh kekuasaan semasa Orde Baru, tetapi pada pasca-Orde Baru, proses transisi menuju demokrasi bukan merupakan gangguan signifikan atau menyusutkan kekuasaan mereka, kecuali berubah bentuk/tipe. Terjadilah perubahan dramatis dari oligarki sultanistik ke oligarki penguasa kolektif.[59]

Kaitannya kasus Indonesia, kita juga bisa baca Richard Robison dan Vedi R Hadiz dalam *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*.[60] Sebagaimana Winters, Robison dan Hadiz berpendapat oligarki di Indonesia tidak tumbang pasca-jatuhnya Soeharto, melainkan terus bertransformasi menyesuaikan konteks politik Indonesia. Mereka berpandangan struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup berdampingan dengan kekuasan oligarki, terutama apabila demokrasinya sekadar prosedural. Perilaku dan strategi *oligark* mungkin saja berubah sesuai proses demokrasi elektoral — dan desentralisasi — tetapi tidak ada "obat mujarab" mengatasi problem oligarki, apakah melalui jalur institusional, elektoral, atau gerakan massa. Mereka juga berpendapat tingkat perubahan politik yang diperlukan untuk menghancurkan oligarki terletak pada problem redistribusi kekayaan yang berhubungan dengan upaya menghancurkan hubungan kekayaan dan kekuasaan politik di Indonesia (atau di negara lain) yang pada kenyataannya hanya bisa dicapai melalui revolusi.[61]

Terlepas dari persamaan, adakah yang membedakan pandangan mereka?

Konsep oligarki mereka dapat dibedakan, terutama sebagaimana diulas

59 Winters (2014).

60 Robison dan Hadiz (2004).

61 Ananta (2014).

Ford dan Pepinsky, dari sudut definisi, fokus perhatian, unit analisis, perlakuan terhadap orang luar, dan skala oligarki.[62] Berikut ringkasannya:

- Perbedaan definisi: menurut Winters oligarki ialah "politik pertahanan kekayaan antar aktor yang memiliki sumber daya material berlimpah". Sedang Robison dan Hadiz menggambarkan oligarki sebagai "sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan".
- Fokus definisi: Winters mengarah pada aktor, Robison dan Hadiz pada relasi kekuasaan.
- Pendekatan teoritis: Robison dan Hadiz termasuk kubu neo-Marxisme yang melihat oligarki sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme global, sedangkan Winters mewakili kubu Weberian tentang peran dan lokus pemaksaan dalam politik berorientasi pertahanan kekayaan.
- Operasionalisasi konsep pertahanan kekayaan: bagi Robison dan Hadiz, sifat kolektif oligarki sangat penting, juga kaitan antara konflik atas kekayaan dan otoritas politik. Sedangkan Winters mengabaikan peran kolektif ini, karena asumsi oligarki yang dibangun selalu bertumpu pada *oligark* sebagai individu. Bisa saja *oligark* itu bertindak kolektif, tetapi tidak dianggap sebagai sebuah kepastian.
- Fokus perhatian/pendekatan: Winters memakai pendekatan komparatif dari beragam wilayah dan masa. Robison dan Hadiz mengajukan pembahasan oligarki yang mendalam dan lebih spesifik di Indonesia, serta mengemukakan bahwa oligarki Indonesia adalah hasil kondisi kapitalisme lanjutan di wilayah pinggiran. Hal tersebut dimulai dari adanya "kebangkitan kapital" sejak Orde Baru berdiri. Hubungan kekayaan dan kekuasaan *a la* Soeharto, menunjukkan bahwa kapitalisme tidak selalu menghasilkan kekuasaan oligarkis. Ia mengasumsikan adanya kapitalisme yang sejati, terlepas dari kekuasaan yang oligarkis.
- Karena berangkat dari aktor, analisis Winters tertuju pada sejumlah individu yang terkadang bertindak kolektif, tetapi seringkali juga bertindak individual. Pilihan-pilihan tindakan yang diambil aktor-aktor ini berhubungan dengan ancaman atau tantangan yang dihadapi, juga strategi yang digunakan. Sedangkan bagi Robison dan Hadiz, oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan kolektif di Indonesia terkait dengan menguatnya hubungan negara dan kaum borjuis yang — kembali pada definisi oligarki mereka — ditandai oleh perpaduan akumulasi kekayaan dan kekuasaan politik pada periode kekuasaan Orde Baru. Dengan demikian, kedua pendekatan tersebut tidak secara mutlak mengutamakan struktur di atas agensi, namun analisis Winters relatif lebih menekankan agensi.
- Identitas dan pentingnya "orang luar" sebagai tantangan bagi oligarki: ke-

62 Ford dan Pepinsky (2014), lihat juga Ananta (2014).

dua pendekatan ini memiliki persamaan pandangan bahwa "orang luar" itu terkait dengan mereka yang memiliki kemampuan mobilisasi. Dalam melihat itu, mereka memiliki posisi yang sama mengenai disorganisasi dan fragmentasi kelas pekerja dan oposisi lainnya. Namun, Robison dan Hadiz lebih menekankan itu dalam relasi kelas, bahwa kelas pekerja telah dilumpuhkan selama masa Orde Baru sehingga tidak mampu mengambil peran penting dalam berhadap-hadapan dengan oligarki. Hal tersebut berhubungan dengan hasil logis dari penghisapan berbasis kelas. Bagi Winters, kelas pekerja bukan satu-satunya alat mobilisasi di Indonesia. Ia tidak menekankan relasi kelas tetapi melihat sebagai kekuatan mobilisasi — yang pada waktu tertentu mungkin berbentuk formasi kelas — sebagai jenis sumber daya kekuasaan yang hanya menawarkan kemungkinan perubahan secara radikal.

- Perbedaan skala analisis: Winters menawarkan skala analisis yang lebih luas, baik dalam segi wilayah maupun waktu. Ia melihat Indonesia ia memposisikan oligarki dalam tingkat nasional, sehingga hal itu menimbulkan kekhawatiran tentang posisi *oligark* di tingkat lokal, yang mungkin saja berbeda dengan yang ada di tingkat nasional. Sementara itu, Robison dan Hadiz lebih peka terhadap peran oligarki lokal ini. Dengan mengamati bahwa desentralisasi telah menciptakan arena baru perseteruan politik, mereka menyatakan bahwa elite politik-birokrasi lokal warisan Orde Baru bertransformasi memanfaatkan arena tersebut untuk terus mengakumulasi kekayaaan.

Sebagaimana digarisbawahi Ananta, kedua pendekatan itu berguna dalam menjelaskan bagaimana konsep oligarki dipergunakan sebagai upaya memahami pentingnya kekayaan material yang terkonsentrasi dalam ekonomi politik di Indonesia.[63]

Kekuasaan dan Pencitraan

Semua pemikiran politik selama bertahun-tahun terakhir telah dirusak dengan cara yang sama. Orang dapat meramalkan masa depan, hanya jika bertepatan dengan keinginan mereka sendiri, dan yang paling jelas, fakta dapat diabaikan ketika tidak mereka inginkan.

- GEORGE ORWELL

Untuk menjadi modern, kebanyakan orang berpikir ... dari cara berpakaian ..., tapi itu tidak benar-benar menjadi modern. Ini adalah bagian yang sangat dangkal dari modernitas.

- INDIRA GHANDI

63 Ananta (2014).

SEBERAPA PENTING dimensi pencitraan dalam kekuasaan?

Para pemimpin/elite politik senantiasa berupaya untuk memperkuat citra yang baik. Secara teknikal, citra atau *image* merupakan rekonstruksi atas simbol-simbol dan penampilan luar suatu produk. Individu atau perorangan juga bisa mencitrakan diri, dengan berdandan sedemikian rupa untuk meraih dukungan. Pengertian sedemikian memang lebih sempit, ketimbang pencitraan secara alamiah. Tetapi, apakah dalam politik modern ada yang alamiah? Semua perlu disiapkan, sekecil-kecilnya, termasuk dalam memoles diri, memperbaiki penampilan. Mohamad Sobary mencatat,

> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi membuat... orang bisa bicara lebih meyakinkan tentang politik pencitraan: sebuah politik salon kecantikan yang mengurus *make up*, bedak dan gincu, untuk merebut posisi kepemimpinan.
>
> Di sini kita terjebak ke dalam anggapan dan kesadaran palsu bahwa "ilmu kulit" (polesan bedak dan gincu) itu "penting". Namun, jangan salah, para tokoh itu sengaja memalsukan kesadaran umum dan membiarkan kepalsuan berkembang demi keuntungan politik mereka.
>
> Maka, suatu citra "dibuat". Ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi bisa "membuat" seseorang tampak lebih unggul dari yang lain. Karena itu, dalam "pilkada" atau "pemilu" si unggul buatan dan palsu inilah yang menang.
>
> Ilmu manipulatif itu bisa membuat seorang tokoh otoriter dan rasis menjadi seolah begitu demokratis dan peduli pada kemanusiaan. Tokoh yang tak tahu apa-apa tentang dunia anak seolah begitu protektif terhadap anakanak dan tokoh yang berwatak sektarian, fanatik, dan memuja kekerasan, bisa "dicitrakan" sebagai orang toleran, inklusif, dan akomodatif terhadap pluralitas kebudayaan.
>
> Pendek kata, selain operasi plastik di dunia kedokteran yang bisa mengubah wajah manusia, ilmu komunikasi juga mampu memanipulasi jiwa dan perilaku manusia sesuai kehendak pemesan. Di sana-sini lalu tampil watak hipokrit yang difasilitasi media yang kelihatannya melek tetapi tertidur.[64]

Sepertinya pencitraan "bedak dan gincu" seperti itu kok negatif banget ya? Padahal, dalam demokrasi kan biasa figur memoles diri untuk maksud meraih dukungan?

Anda tidak salah, Sobary juga tidak salah, bahkan ia wajib mengatakan demikian dalam kapasitasnya sebagai budayawan alias juru ingat yang selalu mengidam-idamkan kesejatian, bukan kepalsuan. Demokrasi langsung dan bebas memang berpotensi menggeser budaya dan pandangan hidup masyarakat yang dianggap luhur, *adiluhung*. Dalam budaya Timur, berebut

64 Mohamad Sobary, "Pemimpin Kelas Salon", *Kompas*, 6 September 2008.

GOHITZZ.COM

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi membuat ... orang bisa bicara lebih meyakinkan tentang politik pencitraan: sebuah politik salon kecantikan yang mengurus *make up*, bedak dan gincu, untuk merebut posisi kepemimpinan

- Mohamad Sobary

menjadi pimpinan itu tabu, tetapi tidak demikian dalam demokrasi. Logika demokrasi mendekonstruksi hal-hal yang dianggap mulia dan baik itu, ke dalam caracara yang penuh dengan kompetisi. Kalau sudah kompetisi yang bicara, maka masing-masing politisi bahkan dalam sesama partai pun berlomba untuk memperoleh dukungan *voters*.

Ada nasihat Orang Jawa, misalnya yang mengajak supaya *ojo dumeh*, jangan sok, dan supaya tampil rendah hati saja. Apakah nasihat itu relevan disampaikan ke politisi di tengah fakta kompetisi ekstra ketat ini?

Nasihat itu bisa jadi hanya akan ditertawakan. Politisi, entah yang sudah berkiprah lama ataupun dadakan, akan mendekonstruksinya secara ekstrem. Nasihat itu diubah menjadi sebaliknya. Bahwa dalam rangka mencitrakan diri, maka politisi atau sang kandidat harus tampil wah, gebyar, mentereng, untuk mengesankan kewibawaan sebagai sosok yang "tak terjangkau" alias sosok berkelas yang pantas untuk dilihat. Mereka rela pergi ke *salon* untuk berdandan, dan tampil bagus di panggung perebutan idola.

Tentu, nasihat semacam *ojo dumeh, ojo kagetan, ojo adigang-adigung-adiguna*, segera dilhat sebagai nasihat kuno yang tak relevan. Kaum pragmatis antara lain ditunjukkan oleh generasi baru di kota dan kalangan bisnis telah berupaya untuk mendekonstruksi *ojo dumeh* dengan memberinya makna "tidak boleh maju" dan "tidak boleh menonjolkan diri". Jadi nasihat *ojo dumeh* justru dianggap sebagai anti-kemajuan.Karenanya, berpolitik itu

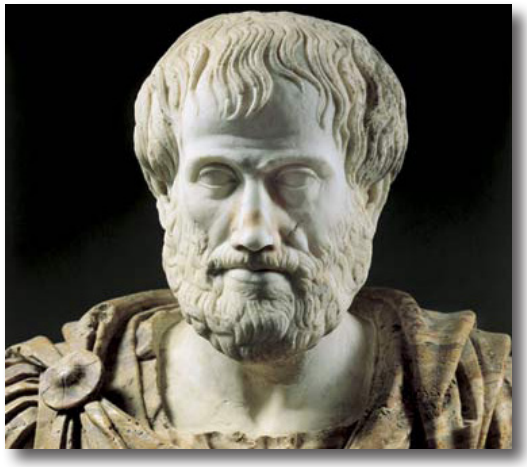

BRITANNICA.COM

Manusia itu secara alamiah binatang sosial; seorang individu secara alamiah anti-sosial

- Aristoteles

Man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally.

tak boleh *nrimo* yang berkonotasi pasif-pasrah, tetapi harus ekstra-aktif lobi sana lobi sini, tampil sana tampil sini, tak boleh kehabisan atau kehilangan panggung, karenanya politisi itu harus *ngoyo*, harus lincah, cerdik, dan bahkan boleh rakus dan tak tahu malu — untuk ukuran orang biasa. Dalam konteks inilah Sobary mengingatkan: supaya kita menjadi manusia terce-rahkan, maka bersikaplah *nrimo* tetapi tidak fatalis. Berpolitiklah secara wajar, selaras dengan hakikat kita sebagai manusia.

Yang wajar itu yang bagaimana? Apakah seorang intelektual kritis, tidak wajar apabila tiba-tiba masuk partai politik?

Pada hakikatnya profesi apapun boleh berkiprah di politik. Kalau intelektual masuk ke wilayah politik praktis, kritisismenya berkonsekuensi terbingkai dan terbatas. Wajar saja kalau masyarakat bertanya: apa ya dia masih bisa kritis? Tidak ada definisi baku soal yang wajar dan tidak wajar dalam politik, tetapi masyarakat bisa merasakan mana yang pantas mana yang keterlaluan. Mestinya yang keterlaluan itulah yang tidak dipilih. Tapi, sayangnya, masyarakat berada dalam — apa yang diistilahkan Kang Sobary sebagai "kedunguan massal". Kalau saya boleh istilahkan masyarakat kita masih ada yang suka menjadi pemilih masokis, yakni yang suka menyakiti diri, semakin tersakiti semakin merasakan kenikmatan. Sudah tahu bahwa yang akan dia pilih kelak akan menyengsarakan hidupnya, tetapi kok masih dicoblos juga, dipilih juga.

Dalam pencitraan, peran media penting sekali, bukan?

Jelas. Media massa adalah entitas yang tidak dapat diabaikan alias disepelekan dalam politik. Media sering disebut sebagai pilar keempat dalam sebuah negara demokrasi modern, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam kacamata pandang ilmu komunikasi modern, media tidak saja berfungsi sebagai mediator penyampai berita, tetapi juga sarana yang paling menentkan dalam pencitraan politik. Media massa mampu menyulap figur yang sebelumnya tidak dikenal menjadi idola dalam waktu "sekejap". Media mampu menciptakan figur-figur instan, sebagaimana tatkala televisi mampu mencipta idola-idola baru yang dihadirkan lewat sms pemirsa.

Idealnya media bersikap independen dan tak terjebak pertarungan politik praktis — kendatipun pendapat ini hanya satu versi, mengingat ada pendapat yang menyetujui media berpihak dalam pemilu dan/atau pilpres. Tetapi, semua pasti setuju kalau media harus menerapkan prinsip utama jurnalistik: *cover both sides* atau seimbang dalam memberitakan sesuatu, tidak berat sebelah, harus akurat. Media dituntut konsisten sebagai kekuatan kontrol dan korektif, tetapi bukan semacam "alat pemerasan". Kalau tidak, maka kualitas demokrasi akan merosot. Integritas media sangat dibutuhkan dalam konteks penciptaan demokrasi yang sehat.

Bagaimana kaitan modal, media, dan pencitraan politik?

Modal/uang sangat dibutuhkan dalam pembangunan media, kendatipun ia bukan segalanya. Kalau logika Marx dikedepankan, maka yang bermodal itulah yang menguasai alat-alat produksi dan dengannya ia berkuasa/mengembangkan pengaruh. Media massa bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari paradigma industrial. Media telah menjadi industri yang subur bagi pelipatgandaan kapital. Pemilik kapital berkesempatan besar untuk menjadikan media yang dikontrolnya sebagai alat untuk berpolitik sesuai dengan kepentingannya. Apa yang dicatat Iswandi Syahputra berikut cukup menggambarkan paradoks media, bahwa,

> Media di satu sisi hadir sebagai sumber informasi alternatif bagi publik, namun pada sisi lain media merekayasa atau memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pragmatisnya sendiri. Pragmatisme di balik bisnis media tersebut didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Selain itu terdapat dorongan pemilik media yang terjun ke dalam politik praktis sebagai pengurus partai untuk memanfaatkan media miliknya sebagai mesin pembentuk opini.[65]

Makanya, media massa pun perlu dikontrol oleh *civil society* melalui *media*

65 Syahputra (2013:14).

watch. Selain, tentu saja harus ada kebijakan yang *fair* dan adil: bahwa media harus konsisten dengan fungsi-fungsi utamanya, sehingga tidak merugikan publik.

Bagaimana pakar komunikasi menjelaskan fenomena pencitraan politik?

Apa yang dicatat Idi Subandy Ibrahim berikut, gambaran jawabannya:

> Kini semakin disadari bahwa banyak peristiwa politik internasional, nasional, bahkan lokal telah menjadi apa yang disebut oleh Daniel Boorstin (1962) sebagai *pseudo-events* yang semata-mata ada untuk liputan media. ... Dia berargumen bahwa citra menjadi lebih penting ketimbang substansi. Citra telah menggantikan pengalaman dan wacana sebagai cara untuk memahami dunia sosial. Kini kita hidup dalam sebuah dunia citra yang spektakuler dan menakjubkan. Dan, kata "citra" (imaji) kini juga merujuk ke suatu kesan publik yang dibentuk dan difabrikasi (dibuat-buat), yang diciptakan dengan bantuan teknik visual. Menurut Gillian Dyer (1982), sebuah citra dapat menjual sabun, kertas toilet, *whisky*, perusahaan, selebriti, politisi atau partai politik. "Para politisi dan kampanye dipasarkan layaknya sabun mandi," demikian tulis Dyer.[66]

Senada dengan itu Anwar Arifin ikut mengingatkan, "pada dasarnya pencitraan senantiasa berusaha membentuk gambaran di benak publik "seindah warna aslinya" dan bahkan kalau bisa "lebih indah dari warna aslinya" tentang seseorang atau suatu lembaga." Karena itulah, lanjutnya, "dalam pencitraan selalu terdapat kecenderungan terjadinya kebohongan dan manipulasi informasi ... Publlik dapat menjadi korban kebohongan dan manipulasi informasi yang dikemas dalam pencitraan sebagai konsekuensi dari berkembangnya mentalitas instan dan orientasi pasar dalam berbagai segi kehidupan".[67]

Jadi, pencitraan itu penting atau tidak?

Anda bisa menganggap penting atau tidak, tetapi pencitraan dalam politik tak terelakkan. Politik membutuhkan persepsi publik. "Citra politik," catat Anwar Arifin, "tersusun melalui persepsi yang bermakna tentang fenomena politik dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi opini publik atau pendapat umum".[68] Yang menjadi soal, bagaimana pencitraan dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Ada ranah etika, ada ranah hukum. Idealnya, etika maupun hukum,

66 Ibrahim (2011:211).

67 Arifin (2013:15).

68 Arifin (2013:17).

ANDREWHEYWOOD.CO.UK

Semua orang itu pemikir politik. Apakah mereka tahu atau tidak, orang-orang menggunakan ide-ide dan konsep politik setiap kali mereka mengungkapkan pendapat mereka atau berbicara pikiran mereka

- Andrew Heywood

tak dilanggar.

Kekuasaan: Dimensi Intelektualitas

> Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman merupakan permainan intelektual belaka.
>
> **- IMMANUEL KANT**

SEBERAPA PENTING dimensi intelektualitas dalam kekuasaan?

Sangat penting.[69] Politisi semestinya selalu berupaya untuk merengkuh wawasan seluas-luasnya. Ketika kita mengatakan adanya krisis intelektualitas dalam dunia politik, maka ia terkait dengan penilaian bahwa proses, dinamika, hingga produk-produk politik banyak yang jauh dari semangat dan tradisi intelektualitas. Intelektualitas politik tidak identik dengan kekuasaan yang didominasi golongan intelektual. Elite yang berkuasa (*the ruling elites*) bisa tetap golongan politisi, dan mereka bisa tetap mengembangkan tradisi intelektualitas. Tapi sayangnya, kondisinya tidak selalu demikian, padahal kualitas politik memerlukan ikhtiar nyata intelektualisasi.

69 Dikembangkan dari artikel M Alfan Alfian, "Intelektualisasi Politisi", *Kompas*, 29 Juni 2013.

Intelektualisasi?

Iya. Soal ini, saya ajak berefleksi sejenak: Indonesia pernah mengalami masa di mana dunia politik nasional didominasi politisi-intelektual. Pada masa itu perdebatan intelektual ingar-bingar. Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, adalah tipe politisi intelektual. Sebelum kemerdekaan, Bung Karno banyak menulis gagasan tentang bangsa, kemanusiaan, dan anti-penjajahan. Politisi zaman itu genealoginya intelektual terdidik. Generasi kita di zaman sekarang dengan mudah menelusuri rekam jejak pemikiran politik mereka. Bung Karno, misalnya, menulis *Di Bawah Bendera Revolusi*, Bung Hatta *Demokrasi Kita*, Bung Sjahrir *Perjuangan Kita*, Tan Malaka *Madilog*, Mohammad Natsir *Capita Selecta*, Abdul Haris Nasution *Memenuhi Panggilan Tugas*, dan Tahi Bonar Simatupang *Laporan dari Banaran*. Hampir semua menulis secara otentik: apa yang ditulis mencerminkan pandangan-pandangan argumentatif. Pandangan dan sikap politiknya jelas. Itulah cermin generasi politisi intelektual terdidik.

Di zaman kita, hal demikian nyaris tak terjadi lagi ya?

Fragmentasi ideologis tidak setajam masa lalu. Karena itu, kebutuhan untuk berdebat ideologi dan berpolemik di media massa dipandang kurang relevan. Yang semarak adalah *talk show* di televisi yang durasinya singkat dan para politisi dituntut bisa atraktif. Bahkan, tidak ada tuntutan intelektualitas penyusunan visi-misi ketika hendak maju sebagai pejabat politik. Tradisi menulis buku juga langka, kecuali buku-buku semi-biografi untuk kepentingan politik-pragmatis.

Kita sudah melalui fase perdebatan bertele-tele di Dewan Konstituante, Dekrit Presiden pada 1959, dan kemudian masuk ke era Orde Baru, di mana tradisi perdebatan intelektual bergeser drastis: dari perdebatan ideologis ke teknokratis. Para politisi di masa Orde Baru dihadapkan pada pola pikir baku pembangunanisme. Mereka yang berpikir di luar kerangka itu, misalnya perspektif dependensia, letaknya di luar arus utama kekuasaan.

Intelektualisasi politik Orde Baru hasil akhirnya terlihat dari produk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN adalah produk intelektual *sakral* yang harus dijalankan oleh Presiden. Pola pikir teknokratis juga merengsek ke DPR dan mewarnai produk-produk legislatif. Pemerintah proaktif mengajukan rancangan undang-undang dan mengoptimalkan pengaruhnya, sementara DPR jadi semacam "tukang stempel". Nuansa "penyeragaman politik" terasa sekali. Dalam logika Orde Baru, itu semua untuk kebaikan bersama: menopang stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Logika intelektualitas membuat kue besar dan kemudian terbagi rata mengemuka. Teori menetes ke bawah (*trickle*

Damai, jika pernah ada, tidak akan didasarkan pada ketakutan terhadap perang, tetapi pada cinta damai

- Julien Benda

Peace, if it ever exists, will not be based on the fear of war, but on the love of peace.

down effect) populer. Baik intelektual zaman ideologis maupun teknokratis membentuk pengalaman masing-masing.

Bagaimana dengan Era Reformasi?

Pada era reformasi, ketika situasi kepolitikannya lain, kaum intelektual banyak yang terakomodasi di dunia politik. Pada mulanya mereka pelopor dan dinamisator reformasi. Mereka begitu mewarnai panggung politik di era transisi meski harus berbaur dengan politisi lama sebagai konsekuensi pola politik, meminjam Samuel P. Huntington, transplasi. Reformasi diterjemahkan dan kemudian mewujud pada konstitusi, sistem kepolitikan, lembaga, dan otonomi daerah yang serba baru, hingga sosialisasi gagasan empat pilar kebangsaan oleh MPR. Semua itu hadir di tengah iklim kebebasan politik dan pers mutakhir. Tidak ada lagi yang terlampau disakralkan, termasuk Pancasila yang dipandang secara rasional, bukan mitologis dan indoktrinatif. Jadi intelektualisasi berarti rasionalisasi, rasional dalam berargumen.

Apa maksudnya?

Semua produk politik bisa direvisi dengan pertimbangan ada aspek rasional yang lebih penting. Bahkan, pada praktiknya, banyak produk legislasi, terutama bidang politik selalu berubah-ubah. Terasa sekali politisi kita gagal mendesain produk legislasi yang basis akademisnya kuat dan bisa langgeng. Faktor penting lain adalah adanya Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas yang bisa ”merevisi” produk-produk legislasi itu. Masyarakat dan para intelektual di luar arus kekuasaan berpeluang ”berpolitik” melalui mekanisme uji materi (*judicial review*). Banyaknya produk politik yang tidak optimal, karena prosesnya terlampau berorientasi kepentingan pragmatis, membuat nuansa intelektualitas di panggung politik nyaris tak terasa. Argumen-argumen teoretis kurang mendapat tempat.

Meminjam Immanuel Kant, tampaknya kita lebih banyak merasakan “pengalaman tanpa teori”. Kant mengatakan, “Pengalaman tanpa teori itu buta, tapi teori tanpa pengalaman merupakan permainan intelektual belaka.”[70] Sementara kaum intelektual tidak begitu berminat masuk politik. Mereka cenderung apatis karena politik bebas dirasa kurang mengun-

70 Brayniquotes.com. *Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play.*

IMAMARBA97.BLOGSPOT.COM

Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet

- W.S. Rendra

Sajak Sebatang Lisong (1977)

tungkan bagi yang punya gagasan. Gagasan sebagai ciri kaum intelektual terbentur batas-batas kepentingan. Karena itu, produk politik bukan lagi muara gagasan, tetapi konsensus kepentingan. Kita perlu peran lebih besar kaum intelektual dalam politik walaupun mereka tidak harus terlibat dalam politik sehari-hari. Kaum politisi pun harus membuka diri dan bekerja sama lebih erat dengan para intelektual agar terbentuk pola intelektualisasi politik yang mandiri dan kreatif.

Bagaimana kalangan intelektual sendiri? Apakah mereka lazim masuk ke "kekuasaan"?

Pembicaraan tentang intelektual dan kekuasaan, terkesan kontradiktif, bahwa intelektual itu sebaiknya berada di seberang kekuasaan.Mungkin sekali hal demikian terpengaruh pandangan Julien Benda. Pada 1927, Benda mengarang *La Trahison des Clercs*, sebuah karya yang sampai saat ini memperoleh perhatian serius. Julien benda (1867-1956) adalah seorang filsuf dan novelis Perancis yang kritis. Dia melakukan otokritik atas kaumnya sendiri,

kaum intelektual. Orang sering mengatakan mengutip Benda bahwa intelektual berada di seberang kekuasaan, memberikan kritik-kritik tajam atas praktik kekuasaan yang tidak lazim atau menyimpang. Kalau intelektual bercampur dengan kekuasaan atau menjadi bagian dari kekuasaan, maka ia telah berkhianat.

Tapi, apakah memang demikian yang dimaksud Benda?

Ada baiknya saya kutipkan pendapat Daniel Dhakidae ketika memberikan catatan atas buku Benda itu,

> Bukunya, yang termasuk paling berhasil di antara segala bukunya, adalah *La Trahison des Clercs* yang merumuskan arti intelektual secara sangat ketat dan terikat pada parktik Eropa pada saat tertentu dan karena itu hampir tidak dapat diambil alih oleh suatu kebudayaan lain selain Eropa, bahkan AS pun tidak. Kata itu, *le Clerc*, sengaja dikembalikan benda pada akar Latin abad tengah, *clerus*, yang juga mengandung beberapa arti, namun arti aslinya adalah golongan rohaniawan yang berawal dari yang paling rendah yaitu mereka yang sudah ditahbiskan dengan menerima tonsura yaitu di kepalanya dengan ditandai oleh cukuran rambut yang seolah-olah dibuat botak ...
>
> Pada dasarnya Benda menganut suatu jenis pandangan atau titik-titik binarium dalam melihat masyarakat khusus ini. Dia membaginya ke dalam dua bagian yang hampir-hampir boleh dikatakan tidak sentuh-menyentuh satu sama lain, laksana air dengan minyak. *Pertama*, adalah masyarakat yang disebutnya sebagai *laique*, *the lay man*, kaum awam, yaitu mereka yang seluruh urusan hidupnya terikat dengan fungsi "mengejar kepentingan material dan yang dari hari ke hari menjadi sepenuhnya dan secara sistematik realis ...
>
> *Kedua*, yang berdiri berhadap-hadapan dengan mereka adalah sejenis makhluk manusia lain yang sama sekali lain dan berbeda secara hampirhampir diametral yang disebutnya sebagai *le clerc* ... mereka sama sekali tidak peduli dan tidak melibatkan dirinya dengan nafsu-nafsu material ... mereka yang sedikit banyak terlibat yang artinya masuk ke dalam hal material akan tetapi di sana mengangkat dirinya ke atas dan menjadi moralis dalam memandang soal, misalnya soal egoisme manusia ...
>
> Pada abad kesembilan belas terjadi perubahan yang menyangkut apa yang disebut sebagai *passions politique*, yaitu kegairahan/nafsu politik, yang memungkinkan orang bangun dan memusuhi orang lain. Nafsu paling utama adalah nafsu rasial, nafsu kelas, dan nafsu nasional ... Menurut Benda ... kaum cendekiawan itu mengkhianati fungsinya untuk membela apa yang disebut sebagai *les valeurs eternelles et desinteressees*, nilai-nilai abadi dan yang tidak terikat pada suatu kepentingan tertentu ... [71]

71 Dhakidae (2003:34-37).

Jadi jelas kiranya. Intelektual harus setia pada nilai-nilai abadi yang nonkepentingan. Sementara politik adalah sesuatu yang sangat terkait atau sarat dengan kepentingan. Paling tidak demikian tafsir intelektual dari Benda. Tetapi, ada yang menafsirkan tidak terlalu ketat soal itu. Intinya, intelektual atau cendekiawan boleh saja masuk ke arena politik. Kelas mereka mestinya *high politics*. Tentu saja apabila intelektual atau cendekiawan berpolitik maka diyakini bahwa mereka akan memperjuangkan keadaan menjadi semakin baik. Mereka ingin menjadi, istilah Bung Karno dulu, "penyambung lidah rakyat". Begitulah harapannya.

Tapi politik itu tidak statis, kecuali sangat dinamis bahkan dilematis. Bagaimana intelektual menjamin dirinya untuk tidak larut dalam politik yang rendahan dan penuh intrik?

Kita akui, politik memang banyak lubang. Kalau tidak hatihati bisa *kejeblos*. Jangan sampai anekdot ini terbukti: kalau dulu para aktivis masuk penjara baru jadi pejabat, sekarang menjadi pejabat dulu baru masuk penjara. Tapi, karena berpolitik itu penuh tantangan dan sesungguhnya merupakan pekerjaan yang mulia, maka intelektual atau cendekiawan yang mau masuk di dalamnya harus dikasih apresiasi secara mendalam. Mereka orangorang yang berani. Karena, asumsinya mereka tak bisa larut dalam kekuasaan begitu rupa. Tujuan mereka memperbaiki keadaan dan bukan motivasi materi, bukan? Tapi, lagi-lagi, sebagaimana yang lain mereka harus berkompetisi ketat. Untuk menang perlu modal. Seharusnya mereka pun tak ikut-ikutan ber-*money politics*. Kalaupun menang dalam berkompetisi, kemenangannya harus yang wajar dan terhormat. Kalau kalah juga demikian. Yang kurang setuju dengan masuknya intelektual masuk partai lazim bertanya: bagaimana nanti, apakah mereka masih bisa kritis? Bukankah masuk partai berarti mengkerangkengkan diri dan kebebasannya ke dalam sebuah sangkar? Bukankah sangkar itu emas sekalipun, mereka tidak bisa bebas?

Intelektual di panggung politik akan memberi warna lain, kendatipun tidak menjamin bahwa keberadaan mereka membuat politik bersih dari penyelewengan atau korupsi. Mungkin saja para intelektual-politik itu tak sanggup menahan risiko sistem yang masih membuka celah lebar untuk korup. Mungkin mereka tidak terlibat korupsi. Tapi mereka terkesan tak berdaya. Mungkin mereka oase kecil saja. Tapi walaupun demikian diperlukan.

Jadi?

Mungkin lebih baik *positive thinking* saja dengan keberadaan mereka. Walaupun, sikap positif saya harus dibarengi dengan sikap kritis pula: bahwa mereka yang menyandang intelektual dan cendekiawan tak selamanya tahan godaan materi. Mestinya intelektual itu simbol moral juga. Mereka

Kontrol informasi merupakan hal yang selalu dilakukan para elite, terutama dalam suatu pemerintahan yang despotik. Informasi, pengetahuan, adalah kekuasaan. Jika Anda dapat mengontrol informasi, Anda dapat mengontrol orang

- Tom Clancy

The control of information is something the elite always does, particularly in a despotic form of government. Information, knowledge, is power. If you can control information, you can control people.

menanggung beban moral itu. Mau menumpuk kekayaan? Kebangetan tentunya. Konon ada yang pernah mengatakan, "kalau mau kaya jadilah politisi", tetapi saya tidak yakin kalau para intelektual masuk politik tujuannya untuk kaya. Lagi pula mereka kan harus menjaga integritas dan amanat.

Mereka harus mencerahkan?

Persis. Dalam hubungannya dengan politik, Arief Budiman mengibaratkan cendekiawan pemikir itu seperti mata, mengambil jarak dari persoalan praktis. Sementara para politisi bergumul di dunia nyata sebagai kaki. Apa yang dilihat mata, belum tentu lebih tinggi nilainya dari apa yang dihadapi kaki. Juga tidak berarti bahwa apa yang dilhat mata lebih tinggi derajat kebenaranya ketimbang kaki. Keduanya memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Keduanya memiliki logika yang lain: mata teoritis dan normatif, kaki praktis dan pragmatis. Tanpa cendekiawan, masyarakat bisa menjadi buta. Tanpa aktivis (politik), masyarakat bisa lumpuh.[72] Saya kira itu timbangan yang imbang. Yang penting, intelektual itu, di manapun tempatnya wajib berikihtiar untuk memberi pencerahan. Menurut Edward W. Said cendekia mestinya memiliki sikap yang didukung oleh lingkup jelajah yang tak terbatas. Ia senantiasa siap masuk ke wilayah di mana dehumanisasi serta penekukan akal sehat berlangsung.[73] Nah, dalam politik, penekukan akal sehat, biasa terjadi bukan? Dan berarti, politik bukan sesuatu yang harus ditolak atau tak boleh dimasuki para cendekia.

Wajibkah intelektual memberikan solusi?

Ada yang berpendapat pengamat (intelektual publik) itu tidak wajib memberikan solusi — sebab mereka bukan semacam konsultan. Tapi, mereka wajib menunjukkan berbagai permasalahan yang menggejala — dan

72 Majalah *Tempo*, 2 November 1998.

73 Alfian (2001:45).

kalau murah hati, memberi alternatif-alternatif pemecahan masalah. Para pengamat berupaya realistis dan objektif dalam memandang permasalahan, dan mungkin hanya sedikit memberikan uraian tentang apa yang *seharusnya* dilakukan. Intelektual publik tidak berposisi *wajib 'ain* (keharusan dengan melibatkan dirinya) dalam memberi solusi, tapi wajib *khifayah* (kalau penasihat resmi otoritas penguasa tak mampu memberi solusi, maka ia wajib memberikannya), atau bahkan *sunnah* (memberi solusi lebih baik), bisa jadi malah *makruh* (*kok* enak kasih solusi segala, lalu apa kerjanya begitu banyak tenaga ahli dan staf khusus pemerintah?) — tergantung konteksnya. Kadang pengamat hanyalah tukang potret atau tukang gambar (kartunis) yang hendak menunjukkan sebentuk realitas yang membuat muka kecut, tetapi harus disikapi para pemimpin.

Ketika praktisi "menyerang" pengamat sebagai orang yang *waton omong* alias *asal jeplak*, *sok tahu* dan sebagainya, boleh jadi serangannya itu didasarkan penilaian yang kurang tepat — karena mungkin kepentingannya merasa terganggu. Pengamat memang "tidak selalu benar". Tetapi, praktisi politik, biasanya tidak selalu adil dan objektif untuk mengatakan bahwa pihaknya sesungguhnya telah memperoleh inspirasi dan akhirnya melakukan langkah-langkah memperbaiki diri. Upaya pemenangan pemilu dan perbaikan citra pemerintah, misalnya, tentu bukan tugas para pengamat — yang suka mengkritik itu. Dalam demokrasi "tukang kritik" tidak boleh mati. Kontrol sosial harus terus jalan. Hambar kalau khasanah pewayangan tidak diiringi para *punakawan*. Politik silakan jalan terus dan membentuk padang pasir yang luas dan biarkan para juru ingat "berteriak-teriak", karena memang mereka wajib "menggugurkan kewajibannya". Tak usah diresahkan dan dimatikan. Kritik harus ditanggapi secara arif dengan polemik yang santun dan mencerdaskan. Yang mengkritik juga harus "obyektif dalam data" dan santun dalam mengemukakan. Jadi biar enak sama enak.[74]

Kekuasaan dan Pembenarannya

KEKUASAAN, kewenangan, dan legitimasi memang saling terkait. Bagaimana penjelasannya?

Dalam hal ini, Andrew Heywood menjelaskan, *Whereas power can be defined as the ability to influence the behaviour of another, authority can be understood as the right to do so*.[75] *Kekuasaan* itu kemampuan mempenga-

74 M Alfan Alfian, "Krugman, Kolumis Peraih Nobel", *Jawa Pos,* 15 Oktober 2008.

75 Heywood (1999:130).

ruhi; *otoritas* adalah *pembenaran* untuk melakukannya. Kewenangan pada hakikatnya merupakan kekuasaan. Tetapi, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Di antara keduanya dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan adalah suatu *formal power*. Sementara legitimasi menyangkut keyakinan moral yang membenarkan hak untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Bedanya dengan wewenang jelas: wewenang adalah hak yang dibenarkan untuk berkuasa, legitimasi menunjuk pada penerimaan pihak yang dipimpin. Legitimasi adalah pengakuan atas pihak-pihak yang dipimpin. Kemerosotan legitimasi pemimpin, pada akhirnya terletak dari sejauhmana daya tolak publik atas kepemimpinannya.[76]

Bagaimana dengan otoritas atau kewenangan?

Soal otoritas sosiolog Max Weber membaginya ke dalam tiga jenis: *pertama*, otoritas kharismatik. Ini adalah bentuk legitimasi berdasarkan kharisma yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yang sedikit banyak ditentukan oleh berkembangnya persepsi bahwa sang pemimpin memiliki simbol-simbol kekuatan *ekstra-supernatural*. Misalnya, para kepala suku dan pembesar agama. *Kedua*, otoritas tradisional. Maksudnya, legitimasi yang berbasis pada tradisi. Karena ada tradisi yang kuat sekali, maka hadirnya pemimpin diperkuat olehnya. Misalnya, para pemimpin yang hadir di tengah-tengah sistem monarki. *Ketiga*, otoritas rasional-legal. Legitimasi ini didasarkan pada suatu persepsi utama bahwa kekuasaan pemerintah merupakan turunan alias derivasi dari segenap prinsip, prosedur dan hukum, sebagai bagian integral dari konstitusi. Misalnya, pemimpin-pemimpin yang hadir dari proses demokrasi.[77]

Soal otoritas tradisional itu, dalam masyarakat tradisional Jawa, misalnya, seorang pemimpin atau raja, harus punya legitimasi supranatural ...

Indikator kehadiran raja seolah ditentukan oleh penerimaan supranatural. Apabila seseorang dinobatkan menjadi raja, maka ia dipercaya telah memperoleh tiga macam wahyu sebagai sumber legitimasi. Masing-masing: (1) wahyu *nubuah* yakni wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan; (2) wahyu *hukumah* yang menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbamisesa* yakni menguasai dan bertindak dengan kekerasan; dan (3) wahyu *wilayah* yang menempatkan raja sebagai pemberi

76 Haryanto (2005).

77 Turner (1992: 192-193).

Mencari kebenaran adalah pekerjaan yang paling penting di seluruh dunia, dan yang paling berbahaya

- James Clavell

The search for the truth is the most important work in the whole world, and the most dangerous.

pandam pangauban, memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya. Di samping itu ada juga *wahyu kraton* (*wahyu kedathon* atau *wahyu cakraningrat*), yang artinya apabila seseorang memperoleh wahyu itu, maka ia akan menjadi raja — konsep ini menjadi amat penting tatkala keraton tidak memiliki putera mahkota.[78]

Rakyat kebanyakan percaya saja dengan dimensi mitologis yang berkembang. Rakyat kebanyakan juga percaya kalau pemimpin hendak jatuh atau *lengser*, hal itu akan ditandai dengan hilangnya *wahyu kedathon*! Konsep kekuasaan Jawa memang tak lepas dari simbol dan mitos. Menurut M.T. Arifin kajian tentang kekuasaan dan kepemimpinan dalam masyarakat Jawa,

> ... sangat dipengaruhi kultur agraris yang cenderung untuk memberikan transformasi simbolik terhadap gejala-gejala sosial yang memiliki arti penting bagi kehidupan mereka. Semula, konsep kekuasaan dalam masyarakat adalah praktis, yakni bagaimana kelompok orang membuka daerah baru sebagai desa-inti (*the nuclear village*) yang memiliki otonomi administrasi dimana kekuasaan didasarkan atas ikatan komunal keluarga terhadap tanah mukim beserta tanah persawahannya, yang secara organisasi merupakan dasar bagi pembentukan federasi mencapai mancalima dan kemudian membentuk federasi komunitas regional. Kepemimpinan berkembang pada ikatan keluarga, di mana bentuk hubungan warga dengan pemimpin (*rama*) melahirkan model kepemimpinan kharismatik, yang mana kekuasaan bukan terletak pada komunitas melainkan pada figur pemimpin.[79]

Masih soal otoritas, bukannya "pembenaran" berbeda dengan "kebenaran"?

Jawabnya jelas memang demikian. "*The concept of authority*," catat Heywood, "*is not only highly complex, but also deeply controversial*". Kalau otoritas terkait dengan upaya pembenaran atas suatu tindakan kekuasaan, maka tentulah ia berkait dengan debat filsafat dan moralitas atau etika. Max Weber telah menyebut sumber-sumber otoritas sebagaimana dicatat di atas. Jelas, terkadang upaya "pembenaran" itu tidak masuk akal dan secara etis

78 Soeratman (2000); Mulder (2001). Lihat juga . Lihat pula M Alfan Alfian, "Legitimasi dan Momentum", *Pelita*, 4 Februari 2005.

79 Arifin (2008).

sangat *debatable*. Karena itulah "politik" menjadi *debatable* pula. Merujuk Heywood, otoritas di satu sisi diperlukan dalam maknanya yang positif (untuk kesejahteraan masyarakat), tetapi juga bisa berubah menjadi kekuasaan yang otoriter (*authority tends to lead to authoritarianism*).[80]

Legitimasi itu keabsahan. Ia berada dalam titik krusial di antara *power* dan *authority*. Legitimasi merupakan kualitas otoritas yang dianggap benar atau absah (*rightful authority*). Ada kode-kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan kekuasaan dianggap absah atau menyimpang. Heywood mencatat,

> Legitimasi mengacu pada '*rightfulness*' (kebenaran/keabsahan)dari sistem politik. Hal ini penting untuk stabilitas dan kelangsungan hidup jangka panjang sistem pemerintahan karena dianggap sebagai dibenarkan atau diterima. Legitimasi memerlukan kesesuaian aturan konstitusional dan dukungan masyarakat luas; tetapi juga dapat 'diproduksi' melalui proses manipulasi ideologi dan kontrol untuk kepentingan elite politik atau sosial.[81]

***Desa mawa tata, negara mawa cara*. Budaya itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lain. Maka mestinya legitimasi kebudayaan bisa lain-lain ...**

Sistem kebudayaan satu tempat dan tempat lain berbeda-beda. Misalnya di Jepang kita melihat bagaimana para samurai dulu eksis dan benar-benar mendapat tempat. Samurai adalah istilah untuk perwira militer kelas elite sebelum zaman industrialisasi di Jepang. Kata samurai berasal dari kata kerja samorau asal bahasa Jepang kuno, berubah menjadi saburau yang berarti melayani, dan akhirnya menjadi samurai yang bekerja sebagai pelayan bagi sang majikan/tuan.[82]

Istilah yang lebih tepat adalah *bushi* (orang bersenjata) yang digunakan semasa zaman Edo. Sifat samurai yang ketat yang dikenal sebagai *bushido* masih tetap ada dalam masyarakat Jepang masa kini, sebagaimana aspek cara hidup mereka yang lain. Istilah samurai digunakan untuk prajurit elite dari kalangan bangsawan. Samurai yang tidak terikat dengan klan atau bekerja untuk majikan/tuan (*daimyo*) disebut *ronin*. Soal ini sudah disinggung di bagian lain buku ini. Maka, ia sifatnya melengkapi: bahwa semasa Keshogunan Tokugawa, mereka berangsur-angsur kehilangan fungsi ketentaraan. Pada akhir era Tokugawa, samurai secara umumnya adalah kaki-tangan umum bagi *daimyo* dengan pedang mereka hanya untuk tujuan istiadat.

80 Heywood (1999:130).

81 Heywood (1999:130).

82 Varley, Ivan dan Morris (2008); Bryant (2008).

HUFFINGTONPOST.COM

Legitimasi adalah obat mujarab kekuasaan politik. ... Hanya demokrasi yang memiliki legitimasi di dunia saat ini

- Fareed Zakaria

Legitimacy is the elixir of political power. ...
Only democracy has that authority in the world today."

Adanya restorasi Meiji pada akhir abad ke-19, membuat samurai (sebagaimana tentara tradisional Turki Usmani, *yeniçeri*) terhapus, digantikan oleh tentara modern yang menyerupai tentara di Barat.

Ada novel-novel yang barangkali perlu kita baca: *Musashi* karya Eiji Yoshikawa (1981) dan *Shogun* karya James Clavell (1975). Atau lihatlah beberapa film Akira Kurosawa, seperti *Seven Samurai* (1954), *Yojimbo* (1961), *Sanjuro* (1962), dan *Ran* (1985). Ada bagian-bagian tertentu novel-novel dan film-film itu yang membuat kita berdecak karena keteguhan prinsip para samurai. Kadang-kadang kita menganggap "segala sesuatunya" sepele saja, tetapi tidak bagi masyarakat Jepang dan para samurai itu. Dalam serial televisi yang diturunkan dari novel *Shogun* misalnya dikisahkan ada seorang tua yang tugasnya merawat seekor burung, dan ketika burung itu mati, maka ia merasa gagal menjalankan tugasnya, dan ia pun bunuh diri. Satu tindakan yang di luar perkiraan si tokoh kisah ini, yang orang Barat.

Masyarakat Jepang menciptakan sistem budayanya sendiri. Samurai bekerja atas legitimasi yang diciptakan dalam masyarakatnya. Dalam hal-hal tertentu mereka keras dalam memegang prinsip. Bill Diffenderffer dalam bukunya *The Samurai Leader* mengeksplorasi prinsip-prinsip pokok yang dijunjung tinggi para samurai sejati (kepemimpinan samurai): (1) kehormatan; (2) keberanian; (3) moral; (4) kesetiaan; (5) kasih; (6) kejujuran; (7) kesopanan; dan (8) pengendalian diri.[83]

Selain semangat *bushido*, kita juga sering mendengar isti-

83 Diffenderffer (2008).

lah *harakiri* bukan?

Harakiri yang juga diistilahkan sebagai *seppuku* merupakan salah satu adat para samurai, terutama genderal perang pada zaman Bakufu yang bunuh diri dengan cara merobek perut mereka dan mengeluarkan usus mereka agar dapat memulihkan nama mereka atas kegagalan saat melaksanakan tugas. Para genderal Jepang di Perang Dunia II yang gagal melawan musuh, banyak yang melakukan tindakan ini. Pada Perang Pasifik, banyak tentara Jepang yang menjadi pasukan *kamikaze*, pasukan berani mati yang menabrakkan pesawat-pesawat mereka ke sasaran penting lawan.[84]

Kendatipun ada legitimasi yang bersifat tradisional, apakah legitimasi itu bersifat universal?

Ada hal-hal yang membuat keabsahan itu bersifat universal. Di sinilah nilai-nilai berperan. Ada nilai-nilai yang menjadi semacam kesepakatan universal. Nilai-nilai universal itu, merupakan semacam akumulasi atau benang merah yang mempersatukan keberagaman "budaya" atau "sistem keyakinan". Semua pihak sepakat bahwa ada kebenaran di balik nilainilai universal itu. Soal sistem nilai dan ideologi, akan kita bahas tersendiri nanti. Yang jelas kekuasaan membutuhkan legitimasi, semacam pengabsahan. Menurut Frans Magnis-Suseno terdapat tiga bentuk legitimasi politik: (1) legitimasi religius; (2) legitimasi eliter; dan (3) legitimasi demokratis.[85]

Bagaimana uraiannya?

Legitimasi religius yang mengokohkan model negara teokrasi, biasanya cepat kehilangan pengakuannya. Realitas empirik banyak menunjukkan bahwa, sistem penyelenggaraan negara, lebih banyak terkait dengan "urusan dunia", yang susah dikaitkan dengan "konteks langit". Religiusitas, biasanya hanya bisa diterima sebagai basis normatif, yang mendasari praktik-praktik politik secara longgar. Argumentasi misalnya, raja adalah kelanjutan Tuhan di bumi, dalam perkembangannya ditolak karena tidak rasional. Klaim atas nama Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, kadangkala justru dipakai untuk memperkokoh kekuasaan rezim yang berkuasa, bahkan tak jarang dilakukan lewat berbagai jalan kekerasan.[86]

Kalau legitimasi eliter?

Sementara yang dimaksud legitimasi eliter terbagi ke dalam dua model: legitimasi aristokratis dan legitimasi pragmatis. Legitimasi aristokratis,

84 Wikipedia.org

85 Suseno (2003).

86 Suseno (2003).

kini jelas tidak sesuai lagi. Tidak mungkin kaum bangsawan lantas diberi tempat yang demikian istimewa dalam menentukan hitam-putihnya politik. Para bangsawan kini hanya menjadi semacam simbol kejayaan masa lalu, tak memiliki pengaruh politik yang bermakna. Legitimasi pragmatis, pada hakikatnya, secara hakiki bersifat sementara, bahwa untuk mengatasi kondisi darurat, suatu kelompok yang mampu mengatasinya, mengambil oper kekuasaan. Kalau lantas kelompok tersebut bisa mengatasi keadaan dan mundur, maka tidak ada masalah, apalagi kalau lantas proses demokrasi berjalan. Tetapi, bila kelompok tersebut terus memegang kekuasaan alias tidak mau meninggalkannya, maka ada dua alternatif legitimasi yang muncul: legitimasi ideologis dan legitimasi teknokratis. Baik legitimasi ideologis maupun teknokratis, sama-sama tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan dengan demikian memiliki kelemahan mendasar.[87]

Terakhir, legitimasi demokratis?

Ia tidak seperti legitimasi-legitimasi sebelumnya, karena mendasarkan pada: kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, serta berdasarkan keyakinan bahwa tidak ada orang atau kelompok yang berhak memerintah orang lain, kecuali wewenang itu berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat sendiri (prinsip kedaulatan rakyat). Legitimasi demokrasi bukan tanpa batas. Artinya, legitimasi ini tidak bisa dipakai semaumaunya oleh rezim kekuasaan yang ada. Ada dua catatan pokok dalam hal ini, yang menunjukkan adanya batas-batas kedaulatan rakyat: kekuasaan harus dikontrol, serta demokrasi bisa menjadi totaliter, apabila rakyat atau tepatnya mayoritas rakyat memutlakkan kehendaknya (tirani mayoritas). Terkait dengan yang pertama, yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa realisme demokrasi bukan demokrasi total, melainkan bahwa kekuasaan harus ada kontrol demokrasi yang efektif. Menyangkut yang kedua, dalam bidang kenegaraan, kehendak mayoritas dibatasi oleh hakhak asasi semua anggota masyarakat dan hakhak yang dimiliki oleh para warga negara.[88]

Belakangan ini berkembang wacana kosmokrasi ...

Memang kedengarannya kurang lazim. Tetapi, bolehlah ia kita simak. Kosmokrasi merupakan satu wacana yang melebihi demokrasi. Kalau demokrasi dikritik antroposentris, maka kosmokrasi mengakomodasi aspek ekologi dan bahkan kosmologi. Kehadiran pemimpin politik yang ideal dalam perspektif kosmokrasi tidak sekadar berlegitimasi demokrasi alias opti-

87 Suseno (2003).

88 Suseno (2003).

TIME.COM

Sudah seharusnyalah terdapat persaingan dan pertukaran antar-negara yang berbeda, tetapi ada kepastian nilai-nilai universal tertentu: kebebasan dan demokrasi

- Mikhail Gorbachev

There should be competition and exchanges between different countries, but there are certainly certain universal values, and that is freedom and democracy.

mal didukung publik atau rakyat, tetapi juga berlegitimasi *kosmos*. Rakyat mendukung dan merestui, alam juga. Namun kosmokrasi bukan persoalan mistik, karena justru menekankan aspekaspek empatik dan rasional. Dalam kosmokrasi diingatkan pentingnya kesadaran akan arti penting lingkungan hidup dan eksistensi makhluk selain manusia, atau alam miskrokosmos dan makrokosmos. Juga mengingatkan aksiaksi nyata dalam rangka mencegah berbagai kerusakan fatal — di antaranya efek atas perubahan iklim yang menimbulkan efek pemanasan global makin terasakan.

Jadi, kosmokrasi tak lepas dari isu lingkungan hidup?

Ya, ia terkait dengan isu pro-lingkungan hidup. Kemenangan Kevin Rudd merebut kursi Perdana Menteri Australia pada 2007, misalnya, tak lepas dari isu lingkungan hidup. Kevin menjanjikan ratifikasi Protokol Kyoto — isu yang bertolak belakang dengan pendahulu sekaligus pesaingnya, John Howard. Dan benar, di Konferensi Perubahan Iklim di Bali (Desember 2007) beberapa saat setelah kemenangan Rudd, Pemerintah Australia mengumumkan meratifikasi Protokol Kyoto. Perubahan sikap Australia ini selangkah lebih maju ketimbang AS yang sampai kini praktis menjadi satusatunya negara maju yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto. Di AS, politisi Al Gore dikenal gencar berbicara masalah perubahan iklim. Itu pula yang

membuatnya pada Oktober 2007 menyabet Nobel Perdamaian. Penghargaan itu tentu ironis dengan sikap pemerintah AS yang belum terlihat sungguh-sungguh merespons isu lingkungan. Keengganan AS meratifikasi Protokol Kyoto disayangkan. Publik bertanya, kapan AS mengikuti jejak Australia? Sebuah film fiksi ilmiah apokaliptik *The Day After Tomorrow* (2004) ialah kritik keras terhadap AS. Dikisahkan, pemanasan global memorakporandakan AS secara sangat mengerikan. Pada saat itulah, AS melalui presidennya "bertobat" mengakui kesalahan yang telah berkontribusi besar terhadap pemanasan global yang antara lain mengakibatkan es di kutub mencair.[89]

Kekuasaan dan Sistem Nilai

KEKUASAAN PERLU basis pembenar, dan itu terkait dengan sistem nilai dan ideologi yang diyakini atau dipakai. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai?

Pengertian bahwa nilai-nilai atau *values* merupakan pandangan dasar yang terkait dengan aspek moralitas, membedakan dengan konsep nilai atau *values* yang konteksnya nilai tukar dan nilai guna dalam pandangan ekonomi. Jelas, yang kita maksud dengan nilai di sini adalah nilai yang terkait dengan aspek moralitas. Sosiolog Emile Durkheim mengaitkan nilai sebagai suatu fakta moral, bahwa dalam masyarakat ada semacam kesadaran kolektif (*conscience colletive*), yang menunjukkan bahwa ada satu sistem nilai yang menjadi faktor utama integrasi sosial. Sosiolog lain seperti Talcott Parsons dan Malinowski juga mengisyaratkan tentang perlunya *charter* sosial, bahwa intergrasi sosial dapat terjaga melalui sistem nilai bersama.[90]

Ada juga istilah *kebaikan bersama* (*public good*). Istilah *value*, juga berdekatan artinya dengan *norm*, *ethics*, dan *morality*. Ada juga istilah *virtue* yang artinya keutamaan atau nilai-nilai utama. Pemahaman umum kita tentang istilah-istilah itu menegaskan bahwa etika dan moralitas terkesan mengarah ke dalam sisi individu. Artinya etis atau bermoral-tidaknya individu, terkesan merupakan urusan individu bersangkutan. Maka, yang dicecar adalah individu — agar etis dan bermoral. Sementara norma, lebih sering dimaknai sebagai kesepahaman atas nilai-nilai utama dalam masyarakat. Ini selaras dengan makna *virtue*. *Virtue* merupakan sesuatu yang dianggap utama dan bersifat universal. Karenanya, norma dan *virtue* termasuk kategori sosial yang tidak sebatas menekankan dimensi individu, melainkan lebih bersifat kolektif.

89 M Alfan Alfian, "Kosmokrasi", *Suara Karya*, 5 Desember 2007.

90 Outhwaite (2008:918).

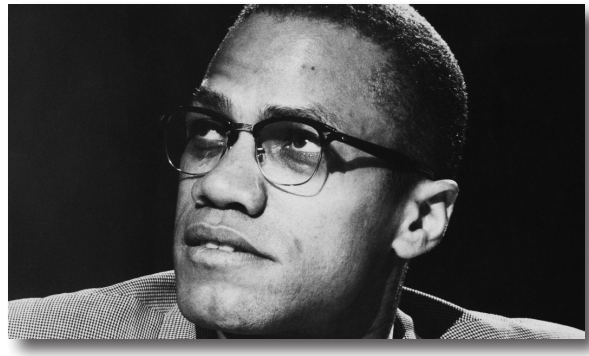

CNN.COM

Saya yakin pada agama yang percaya kebebasan
- Malcolm X

I believe in a religion that believes in freedom.

Bagaimana masyarakat mempersepsikan sesuatu yang normatif itu, sehingga terbentuk suatu sistem nilai yang disepakati?

Karena peradaban-peradaban tertentu memiliki sistem nilainya sendiri, maka persepsi atau konsep kekuasaan Jepang, misalnya berbeda dengan konsep kekuasaan Jawa. Walaupun, kita tahu ada hal-hal yang bersifat universal, dimana semua peradaban menekankan pengutamaan atas nilai-nilai tertentu, yang dikespresikan ke dalam sikap dan tindakan yang bisa berbeda-beda — tapi substansinya sama.

Soal sisi wawasan beladiri Jepang, terkait dengan soal nilai, barangkali kita perlu baca nasihat samurai legendaris Miyamoto Musashi. Dalam *The Book of Five Rings*, Musashi menegaskan, bagi mereka yang akan mempelajari seni beladirinya, aturan penerapannya adalah: (1) Berpikirlah tanpa ketidakjujuran; (2) Tempa dirimu dalam Jalan; (3) Sentuh semua seni; (4) Pahami Jalan semua pekerjaan; (5) Pahami keuntungan dan kerugian segala hal; (6) Kembangkan mata yang tajam akan segala hal; (7) Pahami apa yang tidak dapat dilihat oleh mata; (8) Perhatikan bahkan hal-hal yang kecil; (9) Jangan libatkan diri dalam hal-hal yang tidak berguna.[91] Nilai-nilai itu mengajarkan kedisiplinan dan kepatuhan akan hukum kemenangan. Sekali satu hal saja di atas dilanggar, maka pembela diri akan kalah. Pandangan (nilai) yang dikembangkan Musashi tampak dipengaruhi kuat oleh ajaran Budha Zen.

Selain hal di atas, Musashi juga menuliskan satu puisi yang berjudul *Jalan Berjalan Sendiri* atau *Jalan Mengandalkan Diri Sendiri*. Intinya:

91 Musashi (2007).

- Jangan memunggungi beragam Jalan yang ada di dunia ini.
- Jangan menginginkan kenikmatan fisik
- Jangan berniat mengandalkan apa pun
- Pikirkan diri sendiri secara ringan; pikirkan dunia secara mendalam
- Jangan pernah berpikiran tamak
- Jangan menyesali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan pribadimu
- Jangan iri akan kebaikan dan kejahatan orang lain
- Jangan meratapi perpisahan di jalan mana pun untuk alasan apapun
- Jangan mengeluh dan merasa getir akan diri sendiri atau orang lain
- Jauhi perasaan saat memasuki jalan cinta
- Jangan pilih kasih
- Jangan memiliki kesukaan akan makanan lezat bagi diri sendiri
- Jangan menyimpan barang antik warisan dari generasi ke generasi
- Jangan berpuasa hingga merusak fisikmu
- Kecuali perlengkapan militer, jangan menyukai bendabenda duniawi
- Saat berada di jalan, jangan menyesali kematian
- Jangan berniat memiliki barang berharga di masa tua ...
- Meski kau menyerahkan nyawa, jangan serahkan kehormatanmu
- Jangan pernah memisahkan diri dari Jalan Seni Bela Diri.[92]

Tampaknya itulah yang dipakai sebagai *basics values* jalan Samurai Musashi. Dalam buku *The Five of Rings*, Musashi membahas lima hal penting: bumi, air, api, angin, dan kekosongan. Semua itu sarat perlambang dan ada maksud nilainya — yang oleh para ksatria samurai wajib ditaati.

Kalau Sun Tzu?

Sun Tzu juga mengutamakan basis moral dalam menyusun strateginya sebagai seorang genderal perang. Moral adalah faktor pertama dari empat faktor lainnya penentu kemenangan perang. Baik, kita baca saja pendapat Sun Tzu tentang lima faktor penting penentu kemenangan perang tersebut:

> Kelima faktor itu adalah pengaruh moral, cuaca, dataran, sifat genderal, dan doktrin serta hukum
>
> Pengaruh moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dengan penguasa sehingga mereka sungguhsungguh sepakat dan selaras satu sama lain.
>
> Dengan demikian, rakyat akan siap untuk hidup bersama dan mati bagi sang penguasa tanpa perasaan takut terhadap bahaya.

92 Musashi (2007).

Cuaca mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang hari, dinginnya musim dingin dan panasnya musim panas, dan perubahan musiman.

Dataran mengacu pada apakah rute yang akan diambil panjang atau pendek, lebar atau sempit dalam hubungannya dengan kelancaran pergerakan, dan apakah tanahnya akan menentukan kematian atau kelangsungan hidup (dari suatu pasukan).

Kualitas genderal dari seorang panglima mengacu pada kualitas kebijaksanaan, sifat dapat dipercaya, kemurahan hati, keberanian dan disiplin.

Doktrin dan hukum mengacu pada organisasi dan kontrol, berbagai sistem dan prosedur manajemen, serta struktur perintah dan kontrol bagi penempatan sumberdaya.[93]

Bagaimana kalau yang dianggap sebagai "kebaikan bersama" satu kelompok, ternyata berseberangan atau berbenturan dengan kepentingan yang lain?

Nah, ini menarik. Memang, dalam suatu masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang membangun suatu pandangan "kebaikan bersama", dan kemudian berubah menjadi "kepentingan bersama". Sekte-sekte keagamaan, biasanya punya pandangan yang bermacam-macam, sesuai "keyakinan" mereka melakukan ritual-ritual yang aneh, bahkan fatal menurut pihak lain. Misalnya di AS ada *Klu Klux Klan*:

Ku Klux Klan berdiri pada 24 Desember 1865, yang merupakan sebuah kelompok rasialis ekstrim di AS. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Mereka mendirikan organisasi tersebut dengan maksud untuk berjuang memberantas kaum kulit hitam dan minoritas di AS seperti Yahudi, Asia dan Katolik Roma. Meskipun kelompok *Ku Klux Klan* empat tahun setelah berdirinya diumumkan pemerintah AS sebagai organisasi ilegal, namun masih tetap menjalankan aksi pembunuhannya terhadap warga kulit hitam. Bahkan, kelompok ini juga menyerang warga kulit putih yang dianggap sebagai pelindung kulit hitam. Aksi *Ku Klux Klan* memuncak pada dasawarsa 1950-1960-an yang akhirnya memunculkan kelompok perlawanan dari kalangan kulit hitam AS dan tokoh tokoh yang menyerukan persamaan hak dan anti rasisme seperti Malcolm X dan Martin Luther King. Namun demikian, hingga kini pemerintah AS dianggap belum pernah melakukan usaha serius untuk memberantas kelompok yang dikatagorikan berbahaya ini.[94]

Selain contoh di atas, terkait dengan "kebaikan bersama" yang dimaknai secara subyektif oleh kelompokkelompok dalam masyarakat untuk kepen-

93 Wee (2006).

94 Wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

tingan mereka, dapat kita simak dalam catatan Ramlan Surbakti berikut:

> Di AS, Asosiasi Nasional Peminat Senapan (*National Rifle Association*) menentang setiap upaya pembuatan undang-undang tentang pengendalian senjata api. Usaha ini dilaksanakan dengan alasan ... mengurangi kebebasan (*freedom*) dan merupakan ancaman terhadap kemampuan individu untuk mempertahankan dirinya ... Sementara itu di Republik Rakyat China dan negara-negara Komunis ... dengan mengunakan ... kebaikan bersama, yakni perencanaan terpusat di bawah kepemimpinan diktaktor proletariat untuk menuju masyarakat komunis, pemerintahnya melakukan tindakan-tindakan seperti membatasi kontak dan komunikasi warganya dengan budaya asing ... [95]

Memang dilematis: cara pandang dan keyakinan subyektif kerap menghasilkan perbedaan dan benturan di tingkat praksis. Karenanya butuh suatu pandangan "kebaikan bersama" yang diikat dalam sebuah kontrak sosial berbentuk konstitusi. Dengan adanya konstitusi, semua pihak terikat padanya. Konstitusi memberi kewenangan negara untuk melakukan upaya-upaya penegakan ketertiban dalam masyarakat.

Kembali ke soal nilai. Bagaimana pula dengan konsep "kekuasaan Jawa" yang sarat nilai itu?

Boleh saja kita diskusikan. Mungkin kita harus sepakat dulu dengan pengertian apa itu *kekuasaan Jawa*. Saya kira "kekuasaan Jawa" itu harus kita batasi dengan membahas tentang konsepsi-konsepsinya berdasarkan literatur-literatur yang dikeluarkan oleh para pujangga Jawa. Ada beberapa literatur menarik yang perlu kita simak, yakni *Astabhrata*, *Wulang Reh*, *Tripama*, dan *Dasa Darma Raja*.[96] Bagaimana kalau nanti diuraikan barang sedikit tentang *Astabhrata* dan *Wulangreh*?

Setuju saja. Tapi mungkin kita kaitkan dulu dengan konsepsi kekuasaan Jawa Ben Anderson ...

Oh, oke. Ben Anderson menjelaskan empat aspek penting dalam gagasan Jawa tentang kekuasaan — membandingkannya dengan konsepsi kekuasaan menurut pandangan Eropa modern. Konsepsi kekuasaan menurut pandangan Eropa modern menegaskan, bahwa:

1. **Kekuasaan adalah abstrak.** Dalam arti terbatas, ia tidak "ada". Kekuasaan adalah kata yang jamak dipergunakan untuk memaparkan hubungan-(hubungan). Sebagaimana kata kewenangan atau keabsahan, kata ini adalah suatu abstraksi, rumusan untuk pola interaksi sosial tertentu yang teramati. Dengan demikian, kita lazimnya memahami keberadaan kekuasaan pada

95 Surbakti (2007:23).

96 Suratno (2006).

kisaran luas keragaman situasi yang di dalamnya tampak sejumlah orang patuh, rela atau tidak rela, pada kehendak orang lain. Kita biasanya tidak menganggap seseorang atau sekelompok orang memiliki kekuasaan kecuali dengan menunjukkan hubungan sebabakibat antara perintah, baik implisit maupun eksplisit, dan pelaksanaan.

2. **Sumber-sumber kekuasaan adalah heterogen**. Kekuasaan dapat dianggap menjadi akibat dari, atau diturunkan dari, pola-pola perilaku tertentu dan hubungan-hubungan sosial tertentu. Karenanya, porsi besar pemikiran politik Barat telah diperuntukkan bagi klasifikasi dan analisis polapola tersebut, yang dengannya berbagai sumber kekuasaan dapat dibedakan. Dengan demikian kita dapat menerima beragam sumber kekuasaan seperti kekayaan, status sosial, jabatan formal, organisasi, senjata, populasi dan sebagainya. Meskipun dalam praktiknya berbagai sumber ini mungkin, atau biasanya memang, berkait satu sama lain, dalam analisis politik sumber-sumber tersebut diperlakukan sebagai variabel-variabel terpisah yang mempengaruhi perilaku.
3. **Penumpukan kekuasaan tak memiliki batasan inheren**. Karena semata merupakan suatu abstraksi yang memaparkan hubungan tertentu antarmanusia, kekuasaan pada dasarnya tak terbatas. Lebih lanjut, sepanjang kita menganggap senjata, kekayaan, organisasi dan teknologi termasuk sebagai sumber-sumber kekuasaan, maka dalam teori paling tidak, tidak ada batas dalam akumulasi kekuasaan. Dengan kata lain, orang dapat beranggapan bahwa jumlah keseluruhan kekuasaan di dunia pada saat ini lebih besar daripada tigapuluh tahun yang lalu (sebagai akibat, misalnya, penemuan bom hidrogen), dan jumlah kekuasaan ini barangkali akan terus meningkat tiga puluh tahun lagi. Dalam hal ini konsep kita tentang kekuasaan dikondisikan secara langsung oleh percepatan perkembangan teknologi modern.
4. **Kekuasaan secara moral ambigu**. Prinsip secara logis mengikuti konsep sekuler kekuasaan politis sebagai hukum antar-manusia bahwa kekuasaan tidak dengan sendirinya absah. Ambiguitas moral ini, tentu saja, diperkuat dengan pandangan kita bahwa kekuasaan diturunkan dari sumber-sumber heterogen. Heterogenitas ini telah mempertegas perihal penting dan kompleksnya pertanyaan yang senantiasa membayangi para ahli teori politik: kekuasaan macam apakah yang absah? Atau secara lebih tajam, apakah hubungan antara konsep positivik tentang tentang kekuasaan dan konsep etik tentang hak?[97]

Bagaimana refleksi kekuasaan Jawa Anderson?

Mengacu pada empat catatan tersebut, Anderson merefleksikan empat catatan konsep kekuasaan Jawa di bawah ini — yang ternyata berlawanan atau berseberangan dengan konsep kekuasaan Eropa modern:

97 Anderson (2000:444-446).

1. **Kekuasaan adalah konkret**. Ini rumusan pertama dan terutama dalam pemikiran politik Jawa. Kekuasaan adalah sesuatu yang nyata ada, tidak bergantung pada pihak-pihak yang mungkin menggunakannya. Kekuasaan bukanlah suatu *postulat* teoritis melainkan suatu kenyataan eksistensial. Kekuasaan adalah tenaga yang tak tampak, misterius dan bersifat ilahiah yang menghidupi semesta. Kekuasaan terejawantahkan pada tiap aspek alam, pada bebatuan, pepohonan, awan dan api, namun terekspresikan paling asali pada pusaran misteri kehidupan, proses generasi dan regenerasi. Dalam pemikiran tradisonal Jawa tidak ada pemisahan yang tegas antara benda-benda hidup dan tak hidup, karena semuanya ditopang oleh kekuasaan tak tampak yang sama. Konsep bahwa seluruh jagat raya diselubungi oleh energi yang tak berbentuk, yang senantiasa berkekuatan mencipta, telah membentuk penghubung antara "animisme" pedesaan jawa dan *panteisme metafisis* tinggi di pusat-pusat kota.
2. **Kekuasaan adalah homogen**. Hal ini mengikuti konsepsi bahwa seluruh kekuasaan sama jenisnya dan berasal dari sumber yang sama. Kekuasaan di tangan satu individu maupun kelompok adalah sama dengan yang berada di tangan individu atau kelompok yang lain.
3. **Besarnya kekuasaan di dalam semesta adalah konstan**. Dalam pandangan Jawa, jagat raya tidaklah berkembang ataupun menyusut. Jumlah total kekuasaan di dalamnya pun selalu tetap. Karena kekuasaan semata ada, bukan merupakan produk dari organisasi, kekayaan, persenjataan atau apapun yang lain — memang, mendahului dan bahkan membentuk hal-hal tersebut sehingga menjadi seperti adanya sekarang — kuantitas keseluruhannya tidaklah berubah, meskipun pendistribusian kekuasaan di dalam semesta mungkin beragam. Dalam teori politik konsepsi ini sangat penting karena konsentrasi kekuasaan pada satu tempat memerlukan penyusutan yang sepadan dari tempat lain.
4. **Kekuasaan tidaklah mempertanyakan keabsahan**. Karena seluruh kekuasaan diturunkan dari sumber tunggal yang homogen, kekuasaan itu sendiri mengatasi pertanyaan baik-buruk. Bagi pemikiran Jawa tidak ada artinya mempertanyakan klaim untuk memerintah berdasarkan pembedaan sumber kekuasaan — sebagai contoh, untuk mengatakan bahwa kekuasaan berdasarkan kekayaan adalah absah, sedangkan kekuasaan yang berdasarkan bedil adalah tidak. Kekuasaan tidaklah absah atau tidak absah. Kekuasaan itu ada.[98]

Ringkasnya, orang Jawa memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang nyata, homogen, jumlah keseluruhannya tetap, dan tanpa implikasi moral yang inheren.

Mungkin bisa dijelaskan mengapa konsep-konsep ke-Jawa-

98 Anderson (2000:474-479).

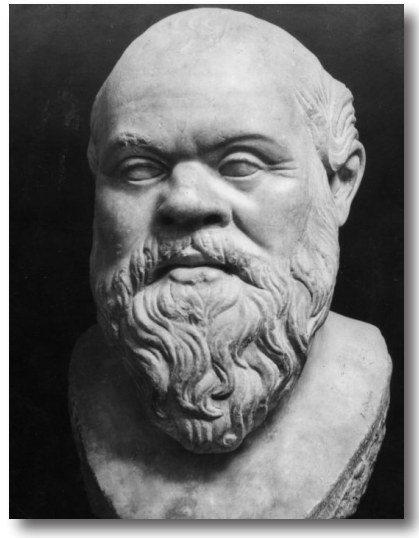

CALIDADENGESTIONDEPROYECTOS.WORDPRESS.COM

Aku tahu bahwa aku pintar, sebab aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa

- Socrates

I know that I am intelligent, because I know that I know nothing.

an penuh dengan simbol-simbol?

Sejarah kultural masyarakat Jawa memang penuh dengan simbol-simbol dan itu artinya, komunikasi tidak langsung amat dominan. Bahasa Jawa sendiri strukturnya kan bertingkat-tingkat, dari bahasa *ngoko* alias yang paling kasar, *kromo madyo* (menengah) hingga *kromo inggil* alias yang paling halus. Strukturasi bahasa yang bertingkat itu menyuburkan hadirnya simbol-simbol dan mitologi-mitologi. Di sisi lain, perkembangan sosio-religius di Jawa juga demikian dinamis, dari mulai zaman animisme-dinamisme, Hindu-Budha atau dikenal sebagai pra-Islam, dan zaman setelah masuknya pengaruh agama Islam. Para wali penyebar agama Islam di tanah Jawa memakai pendekatan yang akulturatif. Tidak menghilangkan pengaruh-pengaruh sebelumnya, tetapi memanfaatkan yang sudah ada sebagai media dakwah. Di antara *Walisongo* alias para wali penyebar Islam di Jawa, beberapa di antaranya kreatif menciptakan tembang-tembang, *gamelan* dan wayang! Soal simbol-simbol pewayangan ini, nanti akan kita bahas secara khusus tentang ikonografi — yang mengaitkan antara simbol dan kekuasaan.

Baik. Apa substansi kepemimpinan Astabhrata?

Astabhrata berkembang dalam sastra tulis dan lisan — pewayangan. Ia

merupakan wejanan Prabu Ramawijaya kepada Arya Wibisana. Sebuah nasihat raja kepada calon raja. *Astabhrata* berisi delapan teladan, delapan *watak dewa*. *Pertama*, watak bumi yang menyimbolkan penampungan kehidupan makhluk yang ada, kekuatan dan kesentosaan, serta kesucian. *Kedua*, watak matahari yang menerangi dunia, memberikan kehidupan seluruh makhluk, memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas, serta ikhlas memberikan miliknya kepada orang lain.

Ketiga, watak rembulan, yang menerangi dunia dari kegelapan malam, memencarkan cahaya yang halus dan menyejukkan tanpa pilih-kasih, kemurahan senyumnya membuat semua menyayanginya. *Keempat*, watak angin yang mampu berlaku adil dan merata, yang tidak pernah berhenti berpikir da bekerja untuk kepentingan negaranya, yang mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangannya dalam memimpin, serta mengetahui pula aspirasi rakyatnya.

Kelima, watak samudera yang sabar dan lapang dada. *Keenam*, watak api yang tegas pada musuh negara dan mampu mengelola militer dengan baik. *Ketujuh*, watak kartika yang merupakan simbol keindahan (kebudayaan) dan panutan bagi rakyanya. *Kedelapan*, watak mendung, yang berwibawa di depan rakyatnya.

Prof. Dr. Marsono, Dosen Fakultas Budaya Jurusan Sastra UGM mencatat bahwa *amanat Asthabrata* yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dapat memberikan kesejukan dan ketentraman kepada warganya: (1) membasmi kejahatan dengan tegas tanpa pandang; (2) bersifat bijaksana, sabar, ramah dan lembut; (3) melihat, mengerti dan menghayati seluruh warganya; (4) memberikan kesejahteraan dan bantuan dana bagi warganya yang memerlukan; (5) mampu menampung segala sesuatu yang datang kepadanya, naik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan; (6) gigih dalam mengalahkan musuh dan dapat memberikan pelita bagi warganya. Ajaran ini tetap relevan bagi para pemimpin kita hingga kini sampai ke masa depan.[99]

Kalau Wulangreh?

Wulangreh itu karya istimewa karena digubah oleh Susuhunan Pakubuwono IV dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Disebut *wulangreh*, karena dimaksudkan sebagai kitab pembelajaran bagi para pemimpin atau penguasa. *Wulang* artinya pelajaran. *Reh* artinya penguasa atau pemimpin. Dalam dunia birokrasi Jawa kita mengenal istilah *pangreh praja* dan *pamong praja*. Kalau diartikan secara bebas, *pangreh praja* lebih merujuk pada pejabat politik, yang memiliki derajat kekuasaan politik tertentu; semen-

99 Heritageofjava.com/art/sastra_jawa/Asthabrata.htm. Lihat juga Susetya (2007).

Agama tidak membuat orang fanatik. Yang fanatik itu mereka menggunakan agama untuk membenarkan ideologinya

- Reza Aslan

Religion doesn't make people bigots. People are bigots and they use religion to justify their ideology.

tara birokrasi semestinya menjadi *pamong praja*, alias pejabat yang tugasnya *ngemong* atau *momong* alias melayani masyarakat (*civil service*). Tapi, ada sementara kalangan mentafsirkan *wulangreh* itu pelajaran pengendalian hawa nafsu, agar kekuasaan tidak dibebaskan sesaui kenginan hawa nafsunya sendiri. Apa intisarinya, berikut ini ulasan yang diringkas ulang Suratno tentang Serat *Wulangreh* tersebut:

1. **Pemimpin harus memahami halal dan haram**. Pengaruh norma Islam kental sekali di sini. Pemimpin harus taat pada hukum syara' atau sarak atau syariat alias hukum agama (Islam). Simak terjemahan bait berikut:

   Semua lakukanlah juga, semua *perintah sarak*, lakukan lahir dan batin, tidak boleh ditinggal, siapa meinggalkan jadi kosong ...

2. **Pemimpin harus bersikap sederhana dan tidak boleh sombong**. Salah satunya adalah perlunya seseorang menghindarkan diri dari kenikmatan hidup duniawi. Ditegaskan juga pemmpin tidak boleh kumawasa alias sok kuasa atau sombong. Simak bait terjemahan ini:

   Ingatlah pesan saya, anak cucu jangan terlena, jangan terjebak hidupnya, dan jangan memiliki kesenangan, terhadap hiasan dunia, siang malam diingat, bahwa idup akan menemui ajal ...

   Ada ucapan, *adigang-adigung-adiguna*, *adiguna* seperti kijang, *adigung* seperti gajah, *adigung* seperti ular, ketiganya mati bersama.

   Kesombongan si kijang, memperlhatkan kecepatannya berlari, kalau si gajah mengandalkan, tubuhnya yang tinggi besar, ular memperlihatkan bisanya, dengan cara menggigit.

   Itu semua adalah contoh, agar kau idak sombong walau kau anak raja lalu seakan, semua orang takut kepadamu, itu tadi contoh tentang *adigung*, yang membuat kau akhirnya rendah.

   Adiguna yaitu menyombongkan kepandaian, semuanya seakan dia sendiri yang, dapat mengerjakan, dan orang lain dianggap bodoh, walaupun akhirnya ia tak dapat berbuat apa-apa.

   Adigang itu, kesombongan dengan mengandalkan keberanian, menantang orang di mana-mana, tetapi akhirnya tidak punya, kemampuan apapun, dan akan menjadi bahan tertawaan.

3. **Pemimpin harus loyal pada negara**. Intinya adalah terletak pada kesung-

guhan pengabdian atau mengabdi pada negara. Oleh sebab itu pemimpin dan pejabat dituntut untuk bersikap seperti *zarah* di lautan luas (*lir sarah menggweng jaladri*). *Zarah* maksudnya abdi negara, sedangkan gelombang lautan itu adalah simbol dari negara dan pemimpinnya.

4. **Pemimpin tidak berwatak pedagang**. Artinya, kalau jadi pemimpin atau pejaat, maka jangan mengedepankan kalkulasi untung-rugi, kecuali pengabdian yang tulus-ikhlas (*rila*) bagi bangsa dan negara. Simak syair terjemahan berikut:

   > Terserah kehendak raja (pemimpin), begitulah perilaku pejabat yang setia, tidak seperti zaman sekarang, jika telah mendapat kedudukan, tingkah lakunya seperti orang berdagang, menghitung untung dan ruginya, dalam hatinya tidak rumangsa (menyadari) ...
   >
   > Mulanya menjadi priyayi, siapa yang menjadikan dirimu, tidak tahu asal mulanya, ketahuilah asal mulanya, berhasil dengan sogokan, mula dari itu di dalam hatinya, perhitungannya seperti orang berdagang.
   >
   > Pikirannya cepatlah kembali, sogokannya ketika dulu, siang-malam pikirannya, bagaimana mungkin dapat, membalas kebaikan atasan, kedudukannya diperoleh dengan dibeli, akhirnya merusak desa ...
   >
   > Pamrihnya cepatlah mendapat laba, walau besok dipecat sekalipun, miliknya yang penting bisa kembali, bagaimana jika terjadi, tindakannya kacau balau, seperti orang yang merampok, tidak memiliki pertimbangan baik-buruk lagi.

5. **Pemimpin harus rendah hati dan adil**. Dalam menjalankan roda pemerintahan pemimpin harus merepresentasikan sifat-sifat Tuhan. Pemimpin yang rendah hati bukanlah pemimpin yang hanya bisa mencela kekurangan bawahan; melainkan tidak memandang diri sendiri sebagai pihak yang selalu benar dan yang lain salah. Jia rendah hati harus terlindung dari tindakan kasar dan kejam (*angkuh wengis*). Sementara pemimpin yang adil itu tidak pilih kasih. Terhadap orang yang kau senangi, kalau ia teledor dalam menjalankan pekerjaan sesuai amanat, maka berilah sanksi hukuman (*yen leleda patrapana*).[100]

Kembali ke sistem nilai. Bagaimana dengan sistem nilai dalam demokrasi?

Kita mengenal apa yang disebut sebagai demokrasi substansial. Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos*/*cratein* yang berarti pemerintahan. Secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, seiring dengan perkembangan wacana yang menyertainya, istilah

100 Suratno (2006).

Ideologi adalah cara munafik untuk berhubungan dengan dunia. Ia menawarkan manusia ilusi identitas, martabat, dan moralitas ...

- Vaclav Havel

Ideology is a specious way of relating to the world. It offers human beings the illusion of an identity, of dignity, and of morality ...

tersebut telah berubah sejalan dengan waktu, di mana berkembang berbagai definisi demokrasi yang menyertakan nilai-nilainya.

Demokrasi substansial ialah nilai-nilai (normatif) yang terkandung dalam demokrasi itu sendiri, misalnya kesetaraan (egalitarianisme), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), keadilan, kemanusiaan atau penghargaan atas hak asasi manusia, kebebasan, tanggung jawab, kebersamaan, kesejahteraan, dan sebagainya. Secara substansial, demokrasi melampaui maknanya secara politis. Nilai-nilai demokrasi itu universal. Nah, dalam hal ini idealnya demokrasi politik (prosedural) merupakan pencerminan dari nilai-nilai demokrasi substansial tersebut. Yang menjadi soal, biasanya memang adanya jarak, apakah jarak itu sedang atau jauh, antara demokrasi substansial dan praktiknya di ranah demokrasi prosedural.

Dimensi Ideologi Kekuasaan

IDEOLOGI ITU penting, kita semua paham. Tapi, bagaimana menjelaskan secara sederhana apa ideologi itu?

Ya barangkali kata "ideologi" banyak disebut apabila kita bicara soal politik. Bahkan ada anggapan tidak mungkin suatu aktivitas politik tidak didasari oleh suatu ideologi tertentu. Ketika orang mengatakan tindakanku a-ideologis, maka tetap saja ia tengah menjalankan agenda ideologi tertentu. Mungkin ideologinya pragmatisme, yang menegaskan bahwa apa yang penting dan dianggap baik bagi dirinya maka itulah yang dilakukan, dengan mengharap adanya suatu imbalan atau insentif yang memadai. Boleh jadi orang melakukan sesuatu karena "*semau gue*", dan itulah ideologinya.

Tapi, marilah kita telusuri etimologi ideologi itu. John B Thompson dalam *International Grandbook of the Studies in the Theory of Ideology*, mencatat bahwa istilah ideologi, merupakan derivasi dari *ideologues*, yang muncul pasca-Revolusi Perancis. Tetapi ia memiliki kontasi yang negatif, juga positif. Berdarkan wacana-wacana yang berkembang sekian lama di Eropa Thompson mencatat,

> Ideologi adalah berpikir tentang yang lain, berpikir tentang orang lain selain dirinya. Untuk menilai suatu pandangan yang bersifat "ideologis" berarti seseorang harus bersiap mengkritisinya, karena "ideologi" bukan istilah yang netral. Sejak saat itu studi ideologi merupakan sesuatu yang kontroversial, aktivitas yang bermuatan konflik.[101]

Sebagai perbandingan, Heywood mencatat ideologi sebagai,

> ... rangkaian ide yang menyediakan sebuah landasan bagi aksi politik yang terorganisasi, baik itu bertujuan untuk melestarikan, memodifikasi atau menyingkirkan sistem hubungan kekuasaan yang ada. Semua ideologi karenanya: (1) menyediakan sebuah pembahasan tentang tatanan yang berlaku saat itu, biasanya dalam bentuk sebuah 'pandangan dunia'; (2) menyediakan sebuah model dari masa depan yang diinginkan, sebuah pandangan tentang Masyarakat yang Baik; dan (3) menggambarkan bagaimana perubahan politik dapat dan harus dilakukan. Ideologi-ideologi, akan tetapi, bukan merupakan sistem-sistem pemikiran yang tertutup rapat; tetapi mereka adalah rangkaian ide yang cair yang tumpang tindih satu sama lain pada sejumlah titik.[102]

Sebagai sebuah studi, kesannya wacana ideologi itu *njlimet* ...

Mungkin demikian, kendatipun dari catatan yang diajukan Heywood di atas cukup jelas. Sementara itu, Thompson menggunakan pendekatan analisis wacana, dan mencoba untuk mengelompokkan teori-teori ideologi ke dalam tiga kelompok: (1) ideologi sebagai sistem kepercayaan — sebagaimana dielaborasi oleh Martin Seligner; (2) ideologi sebagai proyeksi rasional — sebagaimana dielaborasi oleh Alvin Gouldner; (3) ideologi sebagai relasi sosial — sebagaimana dielaborasi oleh Paul Hirst. Mungkin tiga "teori" atau perspektif itulah yang penting untuk kita ketahui, meskipun Thompson juga menguraikan metode-metode analisis wacana yang terkesan *njlimet*. Barang sedikit, ada baiknya kita kupas ketiga perspektif itu:

IDEOLOGI SEBAGAI SISTEM KEPERCAYAN

- Ideologi adalah orientasi tindakan (*actionoriented*) yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren.
- Ideologi adalah kumpulan kepercayaan dan ketidakpercayaan (penolakan) yang diekspresikan dalam kalimat-kalimat yang bernilai, kalimat-kalimat permohonan dan pernyataan eksplanatoris.
- Ideologi dibuat untuk memberikan basis permanen yang relatif bagi suatu

101 Thompson (2007).

102 Heywood (2014:46).

kelompok masyarakat untuk membenarkan kepercayaan pada norma moral dan sedikit bukti faktual serta rasionalisasi berbasis kesadaran diri yang bertalian dengan legitimasi implementasi dan preskripsi teknis yang dimaksudkan untuk menjamin tindakan yang ditampilkan demi perlindungan, reformasi, destruksi atau rekonstruksi dan tatanan yang ada.

- Sebagai sistem kepercayaan, ideologi terbagi ke dalam ideologi fundamental dan ideologi operatif.
- Ideologi fundamental ialah prinsip fundamantal yang meyakini tujuan akhir dan pandangan besar yang akan dicapai.
- Ideologi operatif adalah prinsip-prinsip yang secara aktual mendasari kebijakan yang dimaksudkan sebagai pembenaran.

IDEOLOGI SEBAGAI PROYEKSI SOSIAL

- Ideologi membutuhkan kemunculan wacana politk yang baru, wacana yang menuntut tindaan tetapi tidak sekedar menuntut melalui penggunaan otoritas atau tadisi, atau melalui retorika emotif.
- Ideologi adalah wacana yang didasarkan pada ide yang mendasari tindakan politik dalam teori sekuler dan rasional.
- Ideologi terpisah dari kesadaran mitis dan agama; ia menjustifikasi tindakan yang diinginkan melalui logika dan bukti.
- Ideologi adalah sistem simbol, varian bahasa, dan kode yang dielaborasi, yang kesemuanya itu dapat melakanakan tugasnya memobilisasi proyek publik hanya ketika diekspresikan melalui bahasa tulis, yang kritis, rasional dan dapat dimengerti secara empirik.

IDEOLOGI SEBAGAI RELASI SOSIAL

- Ideologi adalah sistem ide-ide politik yang dapat diterapkan dengan kalkulasi politik.
- Ideologi terkait dengan kompleksitas praktik sosial yang tidak menyatu dan sistem representasi yang memiliki signifikansi dan konsekuensi politik.

Apa sajakah ideologi-ideologi politik yang pernah berkembang dan patut kita ketahui?

Sebelum ke situ, Heywood mencatat, ideologi politik merupakan konsep yang paling kontroversial dalam kajian politik. Meskipun kini ia cenderung netral, tetapi pada suatu masa ideologi memiliki konotasi buruk mengingat konsep ideologi digunakan sebagai senjata politik untuk mengecam atau mengkritik kredo-kredo atau doktrin-doktrin (ideologi) lain.[103] Heywood mencatat tiga ideologi klasik yang muncul dari transisi feodal-

103 Heywood (2014:46).

isme ke kapitalisme industri: (1) liberalisme; (2) konservatisme; dan (3) sosialisme. Selanjutnya, dibahas juga tentang ajaran-ajaran ideologis lainnya:

- **Liberalisme**: ide-ide pentingnya adalah individualisme, kebebasan, pertimbangan akal, kesetaraan, toleransi, kesepakatan, dan konstitusionalisme. Ada dua jenis liberalisme: klasik dan modern. Liberalisme klasik ditandai oleh: (1) komitmen terhadap sebuah bentuk individualisme ekstrem; (2) sangat tidak simpati pada intervensi pemerintah; dan (3) menekankan liberalisme ekonomi *laissez-faire*. Liberalisme modern, (1) lebih simpati pada keterlibatan negara (kendatipun sifatnya kondisional); (2) akomodatif terhadap wacana kesejahteraan sosial, politik kesejahteraan dan redistribusi.
- **Konservatisme**: ide-ide pentingnya adalah: (1) mempertahankan tradisi; (2) pragmatisme; (3) ketidaksempurnaan manusia; (4) organikisme; (5) hirarkhi; (6) otoritas; (7) kepemilikan. Derivasi dari ideologi ini ialah: konservatisme paternalistik, Kanan baru, neoliberalisme, dan neokonservatisme.
- **Sosialisme**: ide-ide pentingnya adalah (1) komunitas; (2) persaudaraan; (3) kesetaraan sosial; (4) kebutuhan; (5) kelas sosial; (6) kepemilikan bersama. Derivasi dari ideologi politik ini adalah Marxisme (Marxisme Klasik, Komunisme ortodoks, Neo-Marxisme), demokrasi-sosial, dan demokrasi-sosial baru.
- **Ajaran-ajaran ideologis lainnya**: (1) fasisme; (2) anarkisme; (3) feminisme; (4) politik hijau; (5) kosmopolitanisme. Tren-tren ideologi non-Barat: (1) pasca-kolonialisme; (2) fundamentalisme keagamaan; (3) nilai-nilai Asia

Hmm cukup rumit juga ya ...

Ya, Anda bisa menelusurinya sendiri di ensiklopedia politik atau sumber lainnya. Tetapi, sebagaimana diulas Heywood dan saya kira ini penting ialah, justru sifat tumpang tindihnya gagasan atau ide-ide yang menyusun suatu ideologi politik itu sendiri. Ada titik-titik temunya, sehingga dari sisi inilah konsensus gagasan menjadi penting sebagai modal dasar dari konsensus politik secara luas.

Tentang ideologi politik, bagaimana pengalaman kita?

Di Indonesia, kita pernah mengalami era ideologi politik yang petanya cukup jelas. Merujuk pengalaman politik 1945-1965, sebagaimana ditelaah oleh Feith dan Castles, terdapat lima ideologi atau alir-an utama pemikiran politik: (1) Komunisme; (2) Nasionalisme Radikal; (3) Sosialisme-Demokratis; (4) Islam; dan (5) Tradisionalisme Jawa.[104] Merujuk pada lima besar pemenang Pemilu 1955, maka ideologi aliran yang menonjol ialah Nasionalisme (PNI), Islam (Masyumi dan NU), dan Komunisme (PKI). Mereka telah memainkan peran politik pada era demokrasi parlementer dan juga setelah

104 Feith dan Castles (1995).

Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 1959, era demokrasi terpimpin.

Dalam perkembangannya, rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian melalui fusi pada 1973. Maksudnya ialah dealiranisasi, kalau bukan depolitisasi. Golkar sebagai kekuatan politik yang didukung pemerintah, diberikan keistimewaan dalam politik. Dalam situasi seperti inilah, Bouchier dan Hadiz menelaah pemikiran sosial dan politik 1965-1999 ke dalam empat pemikiran politik utama: (1) organisisme; (2) pluralisme; (3) Islam; dan (4) radikalisme. Berikut ringkasannya:

> **Organisisme** adalah istilah yang kami gunakan untuk menjelaskan ideologi resmi Orde Baru. Konsepkonsepnya yang selalu berulang adalah ketertiban, harmoni, dan hirarki. Kaum organisis, yang di antaranya kami masukkan Soeharto dan banyak sekutu politiknya yang terdekat, mendukung gagasan bahwa otoritas di negara Indonesia harus mencerminkan pola-pola yang ditemukan dalam keluarga tradisional dan masyarakat pedesaan yang tertib ...
>
> **Pluralisme** menjelaskan perspektif ideologis dari banyak kelompok sipil di perkotaan yang berkumpul di sekitar Orde Baru pada masamasa kelahirannya. Berbeda dengan kaum organisis, kaum pluralis mencita-citakan suatu sistem yang lebih demokratis, yang dapat mengungkapkan keragaman sosial dan budaya Indonesia ...
>
> **Islam** merupakan kategori yang agak problematik karena besarnya keragaman aliran di dalam pemikiran politik Islam dan adanya tumpang tindih yang berarti antara perspektif Islam dan perspektif lain ...
>
> **Radikalisme** boleh jadi merupakan kategori yang paling kontroversial ... Dalil utama radikalisme ialah bahwa tatanan yang ada secara mendasar eksploitatif dan bahwa pembebasan seharusnya terjadi melalui redistribusi secara radikal dalam kekuasaan ekonomi dan politik.[105]

Studi tentang ideologi politik di Indonesia biasanya bermula dari zaman pergerakan nasional?

Menurut Taufik Abdullah, *a decade of ideology* di Hindia Belanda hadir tatkala corak hubungan kolonial yang subordinatif tidak hanya semakin dirasakan tetapi mulai dirumuskan dalam sistem wacana, bahwa,

> Awal 1920-an sampai awal 1930-an adalah saat ketika berbagai corak pemikiran sosial politik, dengan tingkat intensitas komitmen yang beragam-ragam — mulai dari yang sangat radikal sampai yang paling moderat — bermunculan di berbagai kota kolonial yang bersifat pluralistik ...
>
> Di saat suhu perbenturan pemikiran sedang menaik, sebuah tulisan yang

105 Borchier dan Hadiz (2006:10-15).

> boleh dianggap sebagai salah satu karya "klasik" dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, diterbitkan. Karya itu adalah tulisan Bung Karno yang menyerukan persatuan para pendukung ideologi "Islam, Nasionalisme, dan Marxisme" (1926) ...
>
> Perkembangan selanjutnya menunjukkan betapa semakin kompleksnya "peta bumi" ideologi dan pemikiran sosial-politik"... Dua kali Pemilihan Umum 1955 boleh dikatakan paling demokratis (perseorangan boleh mencalonkan diri, asal ada dukungan) dan relatif juga paling bersih, tetapi hasilnya hanya mempertahankan keseimbangan relatif dari partai-partai yang bersaingan. Dengan perolehan suara yang hampir-hampir seimbang ini kestabilan politik pun semakin sulit terlaksana. Maka pergolakan politik semakin menjadi-jadi, apalagi pertentangan pusat-daerah tentang pembagian dan keseimbangan pendapatan dan keuangan telah pula ikut berperan. Maka, harapan untuk menjadikan Majelis Konstituante sebagai terminal pemberhentian dari pergumulan ideologis ternyata tidak terwujud.[106]

Kalau wacana-wacana ideologi pasca-Orde Baru?

Menurut banyak pakar, yang mengemuka bukan persaingan ideologi sebagaimana 1950-an, karena yang menonjol pragmatisme. Namun, kita dapat melihat asas partai-partai politik peserta Pemilu 1999. Kita catat yang berasas: (1) Pancasila 34 parpol; (2) Islam 9 parpol; (3) Islam dan Pancasila 4 parpol; (4) Sosialisme Demokrat 2 parpol; dan (5) Demokrasi Religius 1 parpol. Pada era pasca-Orde Baru varian-varian ideologis tahun 1950-an masih terasa, tetapi mereka terbelah ke dalam banyak varian. Ideologi politik Islam (varian Masyumi dan NU) misalnya, diklaim oleh banyak partai. Ideologi nasionalis juga variatif. Tetapi juga ada partai yang hadir merasa tak perlu mengaitkan diri dengan ideologi aliran atau pemikiran politik lama. Ada yang membikin doktrin dan tradisi sendiri. Jadi, ada *changes and continuity* — meskipun pola ideologi aliran pasca-Pemilu 1955 tetap penting sebagai rujukan. Pada pemilu 2004 jumlah partai susut dari 48 menjadi 24 buah.[107] Pada pemilu-pemilu era teformasi, tampaknya "peta ideologis"-nya tidak banyak berubah. Secara umum, kita bisa membagi partai-partai ke dalam dua segmentasi ideologis: partai terbuka (*catch-all parties*) dan partai keagamaan (terutama partai-partai Islam) dengan segmentasinya terfokus. Tentang kecenderungan masing-masing Anda bisa mencari berbagai data terbaru, dan analisisnya lebih lanjut.

Soal ideologi Kiri atau Kanan, bagaimana penjelasannya?

Dalam ilmu politik, kita mengenal istilah spektrum ideologi — ada

106 Abdullah (2006:xxxi).

107 Litbang Kompas (2004).

macam-macam ideologi yang dipetakan secara sederhana berdasarkan isu-isu yang mengemuka. Kalau digambarkan: ambil garis lurus, di mana titik sebelah kiri LEFT dan ujung titik sebelah kanan RIGHT. Semakin ke kiri semakin ke arah perubahan progresif (*progressive change*), dan semakin ke kanan semakin ke arah perubahan retrogresif (*retrogressive change*). Gradasi ideologis dari LEFT ke RIGHT, masing-masing: radikal, liberal, moderat, konservatif, dan reaksioner.[108]

Apa yang disebut LEFT atau sayap Kiri yang dikenal dalam konteks spektrum ideologi politik mutakhir?

Istilah *kiri* semula berasal dari pengaturan tempat duduk legislatif pada masa Revolusi Perancis. Kaum republik penentang *ancien régime* disebut sebagai Kelompok Kiri, karena mereka duduk di sisi kiri dewan legislatif. Tetapi, acuan ini kini sudah tak berlaku, maknanya pun telah berubah sesuai spektrum gagasan dan sikap yang diperbandingkan, dan sudut pandang si pembicara. Belakangan ini, istilah ini hampir selalu mencakup suatu bentuk dari sosialisme, sosial-demokrasi, atau di Amerika Serikat terkait dengan liberalisme. Kelompok kiri juga seringkali mencakup sekularisme, khususnya di AS, India, Timur Tengah, dan di banyak negara Katolik, meskipun agama dan politik sayap kiri kadang-kadang juga bersekutu seperti halnya dalam gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, atau dalam kasus teologi pembebasan dan sosialisme Kristen.[109]

Kalau sayap Kanan?

Sayap kanan adalah sayap kiri. Sayap kanan dikenal berwatak konservatif. Untuk memperoleh gambaran, di AS, spektrum ideologisnya tak lepas dari keberadaan dua partai politik utama: Partai Demokrat dan Partai Republik, yang satu lebih kiri, satunya lagi kanan. Secara garis besar akan kita lihat, apa beda ideologi politik kedua parpol di AS itu sebagai berikut:

Tabel 17.1.
Isu-isu Ideologis Partai Demokrat vs Partai Republik di AS[110]

ISU UTAMA	LIBERAL (KIRI)	KONSERVATIF (KANAN)
Representasi parpol	Demokrat	Republik
Bisnis	Pengetatan regulasi dan perlindungan pekerja	Kemudahan regulasi dan menjaga pemerintah keluar dari bisnis

108 Baradat (1994:13).

109 Wikipedia.org

110 Dimodifikasi dari www.balancedpolitics.org/ideology (diakses, 15 Desember 2015).

Pajak	Menaikkan pajak	Memangkas pajak
Aborsi	Pro-kebebasan (*Prochoice*)	Pro-kehidupan (*Prolife*)
Anggaran pengeluaran Sosial	Meningkatkan	Menurunkan atau mempertahankan
Anggaran pengeluaran Pertahanan	Menurunkan atau mempertahankan	Meningkatkan
Imigrasi	Memberikan amnesti kepada imigran ilegal; tidak membangun pagar di sepanjang perbatasan Meksiko; memungkinkan imigran ilegal mendapatkan SIM; mencegah penciptaan kartu ID nasional dan *database* untuk melacak mereka	Mencegah amnesti imigran ilegal dan pemberian SIM kepada mereka; membangun pagar perbatasan Meksiko; membuat kartu ID nasional dan database untuk melacak mereka.
Hukuman mati	Melarang	Mempertahankan
Cakupan pemerintah	Peningkatan peran pemerintah dan cenderung pada kebijakan sosialistik	Pengurangan peran pemerintah dan cenderung pada kebijakan kapitalistik
Perkawinan sesama jenis	Melegalkan	Melarang
Kyoto Treaty	Menerima	Menolak
Perlindungan kesehatan	Tanggung jawab negara	Cenderung ke pasar bebas
Agama	Mencegah pemerintahan bekerja dari inisiatif iman keagamaan	Mengizinkan pemerintahan bekerja dengan inisiatif iman keagamaan

Dari tabel di atas terkonfirmasi adanya perbedaan Partai Demokrat dan Partai Republik dalam merespons isu-isu krusial. Dengan demikian, masyarakat secara detil tahu apa-apa yang menjadi sikap dan orientasi kebijakan kedua belah partai tersebut.

Perbedaan ideologis kedua parpol tersebut, menjadi penting untuk memahami fenomena *shutdown* pemerintahan ...

Ya, di bawah Presiden Barrack Obama pemerintah AS pernah pernah *tutup* atau *shutdown*. Itu terjadi pada periode kedua pemerintahannya. Sebelum mengulas fenomena *shutdown*, saya akan mengulas lebih dahulu fenomena Obama itu sendiri. Kita tahu Obama yang diajukan Partai

Demokrat terpilih kembali sebagai presiden pada November 2012 dan dilantik pada tanggal 20 Januari 2013. Ia mengalahkan Mitt Romney dari Partai Republik. Menurut komentator politik Fareed Zakaria, "Barrack Obama telah memenangkan lebih dari kemenangan Presiden. Ia memperoleh kesempatan untuk menyetel kembali lansekap nasional dan menciptakan ideologi baru bagi Barat."[111]

Sebagaimana pengamat manganalisis bahwa terpilihnya Obama pertama kali sebagai presiden, karena keberhasilannya dalam memposisikan diri sebagai antitesis presiden George W Bush Jr. Obama menyuarakan aspirasi anti-perang dan pendekatan yang lebih lembut, ketimbang pendulunya, betapapun musuh Amerika masih tetap sama, yakni, terutama para teroris. Sembilan bulan kemudian setelah menjabat sebagai presiden, Obama memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian (2009). Kontroversi terjadi, karena betapapun hadiah bergengsi itu dilekatkan, tetapi ia tidak dapat menjamin peperang an tidak terjadi semasa pemerintahannya.

Obama juga dihadapkan pada situasi ekonomi AS yang sulit, ketika negara harus menalangi kebangkrutan para ekonomi serakah. Di sisi lain, reformasi kesehatan (*Obamacare*) yang ia gelontorkan juga memicu kontroversi, karena mendorong AS ke tradisi sosialis. Obama juga dicatat sebagai presiden yang bersikukuh untuk tidak menerima tekanan pihak-pihak yang tidak setuju adanya masjid di sekitar reruntuhan menara kembar WTC di New York. Pada awal Oktober 2013, pemerintahan Obama (Partai Demokrat) tutup atau *shutdown* setelah terjadinya penolakan atas pengajuan anggaran pendapatan dan belanja negara 2013-2014 (yang di dalamnya berisi pengajuan utang) oleh Kongres yang didominasi kubu Partai Republik.

Ya, bagaimana fenomena *shutdown* itu sendiri?

Kongres menolak menyetujui peningkatan pagu utang, dan jika Obama masih tetap memaksa melaksanakan kebijakan anggaran kesehatan untuk asuransi semua warga atau yang disebut *Obamacare* (*Affordable Care Act* atau Undang-undang Layanan Kesehatan). Kongres minta *Obamacare* ditunda setahun, namun Senat yang didominasi kubu Partai Demokrat menolaknya. Karena penolakan itulah, pihak Kongres membalasnya dengan menolak menyetujui penambahan pagu utang pemerintah. Konsekuensinya, tanpa persetujuan ini, berarti pemerintah AS tak memiliki uang untuk menggaji para pegawainya, mengingat batas uang negara hanya sampai September 2013. Tanpa persetujuan kongres, konstitusi AS tidak membenarkan Presiden Barrack Obama memutuskan sepihak. Karena jalan buntu, pemerintah tutup/*shutdwon*, akibatnya 800 ribu pegawai negeri menganggur ka-

111 Fareed Zakaria, "*Obama's Third Way*", Majalah *Newsweek*, edisi 17 November 2008.

rena bekerja tanpa dibayar.[112]

Bagaimana analisis persaingan ideologisnya?

Dalam perspektif ideologis penjelasannya sederhana: kedua belah pihak punya agenda yang secara ideologis berbeda, terutama dalam isu reformasi kesehatan. Partai Republik menyalahkan Demokrat yang tidak mau bernegosiasi, sementara Demokrat menuding Republik menyandera pemerintah dengan cara tidak bersedia meloloskan anggaran. Tekad "gila" Republik dengan senjata *shutdown* itu ditengarai bersumber dan dimainkan oleh kelompok radikal *Tea Party* dalam Partai Republik.[113]

Gerakan *Tea Party*? Bagaimana latar belakangnya?

Gerakan *Tea Party* merupakan gerakan politik konservatif yang muncul pada 2009. Pemicunya ialah kemarahan kalangan ekonomi konservatif pada awal 2009 saat Kongres dihadapkan pada kebijakan Presiden Obama mengenai stimulus ekonomi besar-besaran yang ia keluarkan selama krisis ekonomi yang dimaksudkan untuk mencegah depresi ekonomi. Sebagai babak lanjutan dari kekalahan Pemilu 2008 di mana reputasi Partai Republik merosot, muncullah gerakan *Tea Party* yang dimotori para aktivis konservatif. Gerakan yang didanai oleh elite bisnis Republikan serta diperkuat oleh jaringan media konservatif ini, segera menjadi identitas baru dalam politk AS. Kaum konservatif menjuluki kaum Republikan yang moderat sebagai RINO (*Republican in Name Only*) atau *Republikan* sekadar namanya saja. Akar rumput pendukung *Tea Party* marah dengan program-program sosial pemerintah, yang dianggap bukan merupakan hak pemerintah untuk mengeluarkan (karena berasal dari pajak yang mereka bayarkan). Kendatipun pengaruh politiknya kuat di Kongres dan manuver politiknya manjur, *Tea Party* sendiri tidak populer di mata masyarakat. Dalam banyak jajak pendapat, lebih banyak orang tidak yakin dengan *Tea Party*. Setidaknya, *Tea Party* telah merevitalisasi *brand* konservatisme Partai Republik.[114]

Lantas bagaimana kelanjutan kisah *shutdown*?

Setelah enam belas hari *shutdown* pemerintah AS, pemimpin mayoritas Senat AS yang dikuasai Partai Demokrat Harry Reid (16/10/2013) menyatakan telah tercapainya kesepakatan pihaknya dengan para pemimpin kubu Partai Republik di Senat, untuk mengakhiri kebuntuan fiskal yang mengan-

112 http://bisnis.liputan6.com/read/709902/kronologi-detik-detik-tutupnya-pemerintah-amerika-serikat (diakses, 15 Desember 2015).

113 "Tajuk Rencana: Borok Demokrasi Amerika," *Suara Merdeka*, 3 Oktober 2013.

114 http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=79580&obyek_id=4 (diakses, 15 Desember 2015).

cam AS dengan gagal bayar (*default*).[115]

Apa yang bisa kita petik dari fenomena tersebut?

Fenomena *shutdown* pemerintahan merupakan peristiwa kepemimpinan politik: bagaimana proses politik gagal mencapai konsensus. Dimensi kontestasi politik yang sangat keras di senat dan kongres AS dan tarik-menarik kepentingan yang sangat tajam, telah berujung pada penutupan pemerintahan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kepemimpinan politik selalu terus-menerus dihadapkan pada berbagai negosiasi politik dengan berbagai spektrum politik yang ada. Pemimpin politik selalu dihadapkan pada manajemen konflik: menggalang konsensus politik secara luas untuk menjamin kebijakan-kebijakannya dapat berjalan baik. Kepemimpinan demokrasi, kalau demikian, juga kepemimpinan negosiatif: bagaimana bernegosiasi dengan spektrum politik yang beraneka untuk maksud bersama — dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik. Kalau melihat kasus *shutdown* di AS, pada akhirnya publik banyak menderita — dan bisa berujung frustasi massal. Inilah yang memicu para pemimpin politik untuk berunding kembali memecahkan persoalan.

Kekuasaan: Dimensi Konstitusinya

DI ATAS TELAH dijelaskan, mengapa "kebaikan bersama" perlu diikat dalam konstitusi. Apa sejatinya konstitusi itu?

Konstitusi merupakan dokumen tertulis yang memuat doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, maupun aturan-aturan dasar yang digunakan dalam mengoperasionalisasikan organisasi negara, dan harus ditaati oleh segenap warganya. Menurut salah satu kamus politik,

> *A constitution consist of a set of rights, powers and procedures that regulate the relationships between public authorities in any state, and between the public authorities and individual citizens*.[116]

Kalau begitu konstitusi itu sakral?

Ya, sakral. Karena konsitusi merupakan *common platform* yang diderivasikan dari dasar negara atau pandangan dasar yang ada dan dianut suatu negara. Dalam skala organisasi yang lebih kecil ketimbang negara, or-

115 http://www.solopos.com/2013/10/17/krisis-as-16-hari-shutdown-pemerintah-as-berakhir-457112 (diakses, 15 Desember 2015).

116 Robertson (2002:115).

ganisasi politik atau sosial, misalnya mereka juga punya konstitusi masing-masing, yang dikenal sebagai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Dalam konteks ini Asshidiqie mempertegasnya sebagai konstitusi sosial di mana ia,

> ... tidak hanya berisi seperangkat nilai-nilai (*social values*) dan kaidah-kaidah hukum (*legal norms*), tetapi juga kaidah-kaidah etika (*ethical norms*) dalam peri-kehidupan bersama. Konstitusi sosial itu berisi norma-norma hukum konstitusi (*constitutional laws*) dan norma-norma etika (*constitutional ethics*) sekaligus. Karena itu, konstitusi tidak hanya menjadi pegangan bagi para politisi dan pejabat negara, tetapi juga hendaknya menjadi pegangan semua warga masyarakat madani Indonesia dalam kehidupan bersama di mana saja berada. Prinsip-prinsip nilai dan ide-ide yang terkandung dalam UUD Negara sebagai konstitusi sosial harus tercermin dalam pelbagai naskah konstitusi atau anggaran dasar setiap organisasi masyarakat madani, dan semua jenis organisasi di luar struktur formal (i) organisasi pemerintahan negara, (ii) organisasi negara; dan (iii) unit-unit keluarga atau rumah tangga.[117]

Dalam konstitusi memang tercermin soal sistem nilai dan ideologi negara. Dalam sebuah konsitusi ada yang baku, abstrak, visioner, tetapi ada yang pula pasal-pasal yang bersifat operasional. Yang diamandemen biasanya yang bersifat operasional. Kecuali misalnya, ada suatu revolusi yang merubah rezim berkuasa. Misalnya revolusi Iran, ketika Imam Khomeini melakukan perobakan mendasar konstitusi negara itu. Juga misalnya lagi dalam kasus Turki, tatkala Mustafa Kemal Atatürk membalik ideologi negara (Turki Usmani sebelumnya) menjadi sekulerisme dengan penjagaan kaum militer yang ketat, kendatipun dewasa ini amandemen konstitusi telah dilakukan sejak Partai Keadilan dan pembangunan (AKP) berkuasa.[118]

Tapi, tak selamanya revolusi atau kudeta militer berkonsekuensi pada perubahan konstitusi secara mendasar. Di Thailand, misalnya, amandemen konstitusi memang sering terjadi menyusul kudeta militer, tetapi sangat teknis, dan tidak merubah sistem monarkhi di sana. Pengaruh simbolik Raja, tak bisa diutak-atik.

Bagaimana dengan amandemen konstitusi?

Dalam negara-negara demokrasi-konstitusional, konstitusi tentu bukan "harga mati". Terkait dinamika dan kebutuhan mendasar tertentu, ia dapat diubah atau diamandemen. Di AS misalnya, sejak berlakunya setidaknya hingga 2005, selama lebih dari 200-an tahun, materi konstitusinya sudah

117 Asshidiqie (2015:5)

118 Alfian (2015).

sering diusulkan untuk dilakukan per-ubahan. Sejak 1789, setahun setelah diberlakukan secara resmi, tercatat telah 10 ribuan amandemen yang diusulkan Kongres. Namun, yang berhasil disahkan atau disetujui kongres hanya 32 amandemen, dan di antaranya yang sungguh-sungguh berlaku, karena berhasil mendapat dukungan ratifikasi oleh negara-negara bagian hanya 27 naskah amandemen.[119]

Di Indonesia, pada pasca-Orde Baru, UUD 1945 juga telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali hingga 2002. Walaupun batang tubuh banyak berubah, tetapi para politisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat mempertahankan Pembukaan UUD 1945.

Dalam parpol juga biasa terjadi perubahan AD/ART?

Perubahan AD/ART dalam parpol sangat bisa dilakukan, biasanya melalui munas atau kongres mereka. Tetapi, jangan terlalu sering dilakukan, sebab hal itu hanya akan menujukkan kesan bahwa lembaga atau organisasi politik tesebut hanya didesain jangka pendek, dan posisi kelembagaannya yang rapuh. Jangan sampai parpol *bermental jangka pendek*. AD/ART bisa diubah tetapi dengan persyaratan yang cukup berat, dan tidak sematamata menuruti kaum oligarki yang *establish* dalam partai, yang biasanya cenderung berpikir jangka pendek dan kepentingan terbatas.

Kekuasaan: Dimensi Simbolik dan Mitologisnya

SEBERAPA PENTING simbol-simbol dalam politik?

Sangat penting. Yang jelas simbol diperlukan dalam politik. Bahkan simbol telah melekat erat dengan politik itu sendiri. Hidup manusia, persinggungannya dengan yang lain tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol.[120] Betapa sepinya kehidupan apabila tanpa simbol-simbol atau perlambang-perlambang. Perlambang itu, sesungguhnya dimaksudkan sebagai alat berkomunikasi. Anda tidak dapat menikmati sajian penting buku ini, apabila tak ditemukan sistem simbol yang memungkinkan kita bisa membaca dan menulis. Huruf demi huruf yang terpatrikan di sini adalah penemuan simbolik yang paling penting dalam sejarah peradaban umat manusia.

Dalam politik simbol-simbol dipakai untuk memperkuat *bergaining position* dengan cara berkomunikasi yang lihai. Simbol-simbol politik tentu saja banyak, ia bisa terdiri dari simbol abstrak maupun konkrit. Simbol yang

119 Asshiddiqie (2005:3).

120 Fashri (2008).

SOULOFJAKARTA.COM

Hidup itu seperti pergelaran wayang, di mana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhanmu

- Sujiwo Tejo

abstrak perlu pemaknaan lebih lanjut, bahkan bisa terjadi multitafsir. Karenanya maknanya harus dikonkretkan. Partai-partai politik baru, misalnya *sibuk* membikin lambang partai berikut pemaknaannya setiap detil gambar. Hal ini dilakukan agar tidak multitafsir. Otoritas partai memiliki kewenangan untuk menafsirkan simbol-simbol yang diciptakannya itu. Simbol yang multitafsir tentu berpotensi tabarakan satu sama lain yang berakibat fatal. Padahal cuma simbol saja, ia bisa jadi perkara. Konkretisasi simbol dalam politik menjadi penting.

Biasanya pula partai-partai juga membikin lagu-lagu, terutama *hymne*, sebagai lagu yang menunjukkan identitas — karena lambang partai juga menunjukkan identitas. Simbol mempertegas identitas sebuah partai politik. Partai menjadi punya posisi simbolik yang jelas. Merek partai dengan demikian mudah dilihat lewat lambang dan simbol-simbol lain yang khas melekat pada partai tersebut.

Aktor atau tokoh, juga bisa menjadi simbol?

Bisa. Tapi mungkin tepatnya, ia menjadi sebuah ikon. Setiap tokoh pada dasarnya unik. Ia menjadi simbolnya sendiri-sendiri, sesuai dengan karakter yang menonjol, atau klaim orang banyak atas sosok itu. Misalnya di era pergantian politik dari Orde Baru ke Reformasi, keluarlah tokoh-tokoh dari kotak sejarah, tampil ke panggung sejarah, bergerak, dan memperoleh predikat tokoh reformasi dari publik. Artinya apa? Mereka terkena stigma positif: tokoh reformasi, bukan tokoh *status quo*. Benak publik saat itu jelas menempatkan tokoh reformasi sebagai ikon perubahan, sebaliknya tokoh lama dicap sebagai anti-perubahan.

Baik. Tadi disinggung pula soal stigma. Mengapa tokoh yang distigmatisasi sebagai sosok jahat dan ciri atau cacat, susah untuk menetralisirnya?

Stigma itu berbahaya bagi seorang aktor politik. Stigma itu ibarat nila setitik yang menyebebkan rusaknya susu sebelanga. Persis pepatah: akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Stigma merupakan atribut yang ditimpakan seseorang karena reputasinya terdiskreditkan. Seorang yang terkena stigma berarti telah terstempel (terlabel) atau terkena *stereotipe* tertentu yang tidak lazim dalam kehidupan sehari-hari yang normal. Selain konsep mengenai stigma, yang biasanya melekat pada konteks propaganda, ada konsep yang lebih netral yakni ikonografi.

Apa yang dimaksud dengan ikonografi?

Ikonografi terkait dengan perwatakan tokoh-tokoh simbolik. Anda bisa lacak sendiri arti kamusnya apa. Yang jelas ada *ikon* dan *grafi*, kaitannya dengan penggambaran karakter. Ayu Utami dalam novelnya *Bilangan Fu* (2008) menyinggung penggambaran para tokoh dalam wayang. Mengapa misalnya satria digambarkan seperti Arjuna yang ramping dan raksasa jahat itu bermoncong seperti anjing, dan itulah ikhtiar ikonografi yang membuatnya. Kita simak, Ayu Utami,

> Sesungguhnya, beberapa dekade lalu ketika pewayangan masih merupakan falsafah, satria merupakan sikap hidup yang diutamakan. Orang Jawa sangat mengagungkan sifat satria. Setidaknya dalam ideal hidup, jika tidak bisa dalam praktik. Dulu, bahkan ketika aku sedang melakoni cerita ini, aku tidak begitu peduli dengan wayang kulit. Apatah ikonografinya. Aku tak peduli kenapa Arjuna digambarkan seperti itu, Bima seperti Anu, Semar begini dan Limbuk begitu. Semakin lama semakin menarik bagiku cara orang Jawa menatahkan idealisasi ke dalam ikonografi; cara orang Jawa "mendagingkan" sifat-sifat itu ke dalam bentuk wayang kulitnya.
>
> Tentu saja aku senang bahwa penggambaran tubuh satria sangat menyerupai stilisasi tubuh para pemanjat. Ramping liat, bukan kekar perkasa. Satria memiliki bahu nan lebar dan pinggang nan sempit, dan penghubung antara bahu dan pinggang itu adalah garis lengkung ke dalam, yang menciptakan dada tidak membusung. Agaknya, pada waktu itu dada cembung dianggap lambang congkak sehingga para seniman Jawa menggunakan bentuk cekung yang membersahajakan dada. Ini sangat berbeda dengan idealisasi tubuh jantan yang diciptakan dalam ikonikon budaya massa Amerika. Superman, Batman, Sylvester "Rambo" Stallone, Mr. Universe Arnold Schwarzenegger berbaris di satu garis yang membentang dari titik khayal ke titik nyata...
>
> Raksasa, dalam pewayangan, adalah lawan dari satria. Mereka digambarkan dengan tubuh besar, wajah tegak atau mendongak, mata melotot, hidung

besar, mulut seringai, juga kidal. Mulut seringai itu tentu mendapatkan modelnya dari jenis anjing-anjingan. Bukan karena dengan sendirinya anjing adalah makhluk jahat, melainkan karena anjing memiliki gerak motorik yang kasar. Begigas gergasi. Anjing tidak membungkus emosi dan nafsu-nafsunya. Selalu bisa dibaca dari gerak ekornya, posisi telinganya, mata, mulut, dan seluruh polah tubuhnya. Jika dibaca dengan cara lain, anjing lebih jujur. Kucing, meski hewan itu tidak berguna dan tidak setia, dan lebih suka mencuri dibanding anjing, memiliki gerak motorik yang sangat halus dan terkontrol. Mereka juga memiliki mulut yang mungil. Moncong anjing akan selalu mengingatkan kita pada gerakgerik kasar. Cocok dengan gerak-gerik raksasa. Di sini ikonografi tidak selalu bicara soal substansi atau moral, melainkan juga soal bentuk dan gerak...

Satria digambarkan dengan tubuh ramping, kepala sedikit merunduk dengan profil halus, gambaran sifat tahu batas, tidak gelojoh, dan rendah hati. *Toh* para pewayang tetap membuka diri pada pencitraan khusus. Ada juga beberapa satria yang ditatahkan dalam bentuk besar menyerupai rksrk bergigi karnivora. Pencitraan ini ada pada, misalnya, Kumbakarna, Bima, dan Gatotkaca. Mereka, yang berwujud kasar namun berhati murni. Kebajikan jenis lain, yaitu yang berada di luar kesatriaan, muncul juga melalui para punakawan, diwujudkan dalam mata bulat serta tubuh tidak ideal ... Mereka memelihara jenis kebajikannya sendiri. Kebajikan makhluk-makhluk tanpa keanggunan, bahkan buruk rupa. Kebajikan yang bersahaja. Kebajikan rakyat jelata.[121]

Kita jadi ingat Ben Anderson ...

O saya tahu, dan mari kita baca karya Pak Ben itu. Judul buku itu *Mytology and the Tolerance of the Javanese.* Pertama kali, buku itu diterbitkan oleh Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Departement of Asian Studies, Cornell University, Ithaca, New York, 1965. Anderson mencoba menguliti karakter-karakter sosok-sosok yang tampil dalam panggung pewayangan. Artinya buku ini membahas ikonografi tokoh-tokoh penting pewayangan. Yang menarik, justru yang menuliskannya adalah orang Barat.

Buku ini mengetengahkan 65 karakter tokoh wayang yang telah dipopulerkan di Jawa. Mari kita catat representasi karakter mereka yang satria, yang licik, yang raksasa-jahat, dan yang pengabdi. Orang Jawa yang kenal wayang, dengan demikian sesungguhnya memiliki referensi karakter manusia yang diturunkan dari perlambang-perlambang wayang itu. Semua orang bisa dilihat kesesuaian karakternya dengan tokoh-tokoh yang ada dalam dunia pewayangan. Baik kita mulai dari beberapa satria.[122]

121 Utami (2008:86-88 dan 90).

122 Anderson (2003).

Arjuna. Apa yang dapat dikatakan orang tentang Arjuna? Petarung tanpa tanding di medan laga, meski bertubuh ramping berparas rupawan sebagaimana seorang dara; berhati lebut meski berkemauan baja; satria dengan segudang istri dan kekasih meski mampu melakukan tapa yang paling ekstrem; seorang satria dengan kesetiaan terhadap keluarga yang mendalam tapi kemudian mampu memaksa dirinya sendiri untuk membunuh saudara tirinya. Bagi generasi tua Jawa, dia adalah perwujudan lelaki seutuhnya. Sangat berbeda dengan Yudhistira, dia sangat menikmati hidup di dunia ...

Kumbakarna. Serupa dengan Karna dalam pandangan hidup dan moralitasnya, Raden Kumbakarna, Pahlawan Ramayana, juga gugur mempertahankan seorang raja yang dia sendiri menyadari bermartabat rendah. Dia tahu bahwa dia akan tewas, tercabik-cabik anggota badannya. Meski demikian tak seperti adiknya raden Wibisana, yang "menyeberang" ke pihak Rama dan keadilan, Kumbakarna tak mau menelantarkan kakaknya, Prabu Dasamuka (Rahwana), pada saat dia membutuhkan bantuannya ... kelihatan, dia adalah raksasa dalam sosoknya yang ekstrem, dengan wajah merah brutal, hidung mencongak besar, mata membelalak, badan kasar berbulu, dan taring bagai srigala — ciri-ciri badaniyah yang menjijikkan orang Jawa. Kumbakarna, meskipun seperti itu, ada di antara sosok wayang yang paling dicintai, dan menjadi contoh utama bahwa kemuliaan dan kesucian batin tidak bergantung pada penampakan luar ...

Yang licik, antara lain tergambar dari karakter Dahyang Durna dan Patih Arya Sangkuni berikut:

Dahyang Durna. Durna adalah seorang brahmana, penyihir, dan guru. Selagi masih kecil, baik Kurawa maupun Pandawa berguru seni perang kepadanya, dan dia sangat mengasihi murid kesayangannya, Arjuna, hingga akhir hayatnya meskipun keduanya pada sisi yang berlawanan pada Perang Bharatayudha. Pertunjukan wayang sekarang cenderung menampilkannya sebagai sosok yang culas setengah konyol, tetapi ini bukanlah pandangan tradisional. Pada pergulatan panjang antara Pandawa dan Kurawa, dialah tandingan Kresna, muslihat bersambut muslihat dan strategi dibalas strategi ...

Patih Arya Sangkuni otak kejahatan di kalangan Kurawa; kesetiaan pada rajanya adalah satu hal yang menguntungkan baginya ... Tipu daya licik menyebabkan Pandawa mengalami begitu banyak kesengsaraan dan kemalangan semuanya direncanakan oleh orangtua yang culas ini.

Yang raksasa-jahat (raksasa=*buta*, *butha*, *butho*) antara lain tergambar dari karakter Buta Cakil dan Terong:

Buta Cakil adalah lawan kegemaran Arjuna dan banyak anaknya dalam lakon-lakon yang kurang serius. Tiap kali dia terbunuh, dia akan tampil kembali dalam cerita lain. Dia segera dapat dikenali dengan kepalanya yang datar, mata yang

Mitos yang mimpi publik, mimpi adalah mitos pribadi

- Joseph Campbell

Myths are public dreams, dreams are private myths.

juling, serta gigi yang mencuat seperti tanduk. Tidak seperti buta yang lain, dia cukup kecil. Bahkan tubuhnya seperti seorang satria dan hanya kepalanya yang luar biasa yang memperlihatkan asal-usul butanya.

Buta Terong, sang Raksasa Terong, dinamakan demikian karena hidungnya sangat mirip dengan buah terong. Dia *buta* yang jamak menjadi lawan satria-satria yang lebih besar, seperti Werkudara, sementara cakil lawan yang pantas untuk satria yang lebih kecil dan lebih anggun. Buta Terong tidak mempunyai peran yang tetap dalam lakon tetapi senantiasa muncul untuk menguji keberanian dan kecakapan militer Pandawa.

Yang pengabdi, yang selalu setia pada patronnya antara lain tergambar dari karakter Semar dan Togog sebagai berikut:

Kyai Lurah Semar ... Dia berasal dari kalangan punakawan, pelawak. Tak ada tempat di sini untuk membahas masalah penting dan rumit, yaitu signifikansi umum para punakawan dalam kisah-kisah Jawa. Cukuplah dikatakan bahwa dari semua tokoh wayang, Semar, punakawan yang paling dihormati, barangkali adalah sosok yang paling dicintai oleh tua maupun muda. Di antaranya karena Semar, meskipun hanya hamba sahaya jenaka, adalah sekaligus Dewa yang paling sakti, sehingga Dewa Shiwa dan Batara Guru sendiri kadang harus bertekuk lutut padanya ... Dia tambun luar biasa, dengan buah dada dan pantat yang besar. Dia berdandan seperti perempuan, tetapi pakaian lelaki, meski wajahnya bukan pria juga bukan wanita. Dialah gudang kebijaksanaan tertinggi...

Togog dikatakan sebagai kakak Semar, dan biasanya dia berperan sebagai punakawan dari golongan kiri. Sebagaimana Semar dia hidup abadi, dan bentuknya yang aneh menyembunyikan asal-usul adi-kodratinya. Dia tidaklah memiliki sifat kelembutan dan kebijaksanaan Semar. Kejenakaannya lebih kasar dan lebih sinis. Karena tuantuannya senantiasa dibunuh oleh Pandawa dan anak-anak mereka, Togog selalu tampil dalam rombongan raja yang berbeda-beda. Karenanya, dia telah dikenal sebagai *prototipe* pelayan mata duitan, tidak setia.

Bagaimana dengan ikonografi punakawan?

Dalam bukunya berjudul *Wayang Kebatinan Islam*, Dharmawan Budi Suseno, dari berbagai sumber relevan, menguraikan, bahwa,

... **Semar** berasal dari kata *mismaarun* yang berarti paku. Paku dalam kesehariannya adalah alat untuk mengokohkan sesuatu. Sedangkan Semar sebagai Paku adalah Semar itu ibarat ajaran agama Islam yang membuat kokoh du-

nia. ... Semar itu identik dengan warna hitam. Hal ini mempunyai kandungan filosofis barang siapa yang didampingi Semar, hidupnya tidak goncang, tetapi suci murni, wajar, dan tidak diliputi sifat kemunafikan. Hal ini sesuai sifat warna hitam, sebagai warna yang sulit untuk diubah-ubah. ... Dalam wayang kulit, tokoh Semar mempunyai tugas sebagai *pamomong* dan penasihat para ksatria untuk selalu menempuh jalan yang benar dalam hidupnya.

Gareng. Nala Gareng ialah anak sulung Semar. Kata Gareng sebenarnya berasal dari bahasa Arab *khoiran*, yang berarti kebaikan. *Nala khoiran* berarti mendapat kebaikan. Gerang merupakan gambaran watak manusia yang suka mempertimbangkan baik-buruk dalam melakukan tindakan, karena segala perbuatan ada balasannya.

Petruk. Petruk berasal dari kata *fataruk*, artinya tinggalkan, maksudnya meninggalkan nafsu angkara murka dan maksiat. Petruk adalah lambang budi pekerti luhur, lambang orang yang tidak silau oleh keindahan dunia. ... pikirannya, seluruh kepribadiannya hanya ditujukan kepada satu hal, yaitu *manembah* (berbakti) kepada Allah.

Bagong. Nama Bagong berasal dari kata *baghaa* yang berarti menentang, yang membawakan pertentangan, yaitu pertentangan antara yang baik dan buruk. Dalam diri Bagong terdapat jiwa menentang, melanggar kebaikan atau apa yang telah dianggap benar dan baik, sehingga mengurangi kesucian. tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Setelah melakukan introspeksi dan ekstrospeksi muncul kesadaran, bahwa apa yang dilakukan itu salah.[123]

Hmm ... Menarik, ternyata mama-nama Punakawan itu simbolik, mencerminkan waraknya ..

Ya, bukankah mereka juru ingat sekaligus dekonstruktor. Ujung-ujungnya ialah instrospeksi. Mereka, para punakawan itu pemicu semua pihak untuk instrospeksi, mawas diri.

Apa sih relevansi ikonografi dan politik?

Setiap aktor politik punya perwatakan masing-masing bukan? Coba kita cermati betul-betul, sehingga kita dapat menangkap tampak baik, tampang jahat, tampang jujur dan tampang culas. Tapi kita tak bisa menyamaratakan. Kita tak boleh menggeneralisasi. Boleh jadi si A bertampang culas, padahal ia jujur dan sebaliknya. Ikonografi dalam wayang itu diketahui setelah alur ceritanya jelas. Dalam alam nyata, kita hanya bisa merefleksikan.

Sekarang apa hubungan mitos dengan kekuasaan?

Di bagian lain buku ini, saya pernah menyinggung soal mitos dan

123 Suseno (2009:48-54).

Suatu mitos menjadi benar karena ia efektif, bukan karena ia memberi kita informasi yang faktual

- Karen Armstrong

A myth, therefore, is true because it is effective, not because it gives us factual information.

kepemimpinan/kekuasaan. Bagian ini sifatnya mengingatkan kembali dan memperkaya. Kalau kita baca kembali uraian soal simbol dan kekuasaan di atas, sedikit banyak kita akan segera dapat merumuskan jawaban atas pertanyaan ini. Mitos tak pernah lepas dari politik atau kekuasaan, demikian pula sebaliknya politik tak pernah lepas dari mitos. Bahkan sudah lazim di kalangan yang paham tentang dunia pencitraan, betapa mitos itu punya daya sihir luar biasa, *the power of myth*.[124]

Mitos berawal dari penciptaan simbol yang lantas mengalami sakralisasi. Sakralitas sebuah simbol yang dibumbui dengan doktrindoktrin merupakan penyederhanaan dari suatu ideologi. Simbol, mitos, doktrin, dan ideologi adalah pirantipiranti yang bahkan wajib ada dalam politik, baik politik personal maupun kelompok. Dalam proses pencitraan politik personal, tokoh harus diperkuat menjadi ikon, sesuatu yang khas dan unik, yang dipersyaratkan personal branding alias pemerekan personal, bahkan *I branding* (pemerekan saya).

Memerekkan diri berarti membangun *kekuatan mitologis*, dan dengan itu berarti memperkuat pengaruh. Media massa sangat berpeluang memunculkan *person* menjadi ikon yang instan. Walaupun instan, yang penting, tahap pengenalan diri sudah dalam genggaman. Tahap selanjutnya adalah menciptakan mitos-mitos baru dan memanipulasi sedemikian rupa agar popularitas awet. Itu berarti tinggal selangkah lagi dukungan besar diraih. Tentu saja ini adalah pandangan yang agak kritis, dan Anda boleh kurang

124 Campbell dan Moyers (1991).

sepakat.

Bagaimana dengan partai politik?

Partai politik sebagai suatu entitas politik pasti butuh simbol, mitos, doktrin, dan dalam kadar tertentu ideologi. Pergesekan antarpartai dalam pemilu, kalau demikian, juga merupakan pergesekan antar-simbol, mitos, doktrin, dan ideologi, sekalipun ideologi pragmatisme. Pemilu merupakan pertarungan persepsi, dan persepsi sangat dipengaruhi oleh rekayasa mitologis. Pemilu bukan hanya persaingan antar-calon legislator atau antar-kandidat kepala daerah atau kandidat presiden, tetapi juga persaingan antar-simbol dan mitos. Ada pohon beringin, kepala banteng, burung garuda, *ka'bah*, gambar matahari, gambar bulan dan bintang, dan seterusnya. Simbol-simbol itu akan tidak bermakna kalau tidak "dibunyikan" alias dimaknai dan ditafsirkan sedemikian rupa lalu disosialisasikan. Sebuah iklan partai politik yang menyertakan burung garuda sebagai burung ajaib pemberi berkah, misalnya, merupakan upaya pengurusnya untuk "membunyikan" simbol.

Dalam *marketing* politik, membunyikan atau menghidupkan simbol itu perlu. Karena itulah, beberapa rumah makan berupaya keras menghidupkan simbol-simbol yang dimiliki. Dengan adanya simbol yang hidup, orang akan merasa memperoleh sesuatu, entah kenyamanan, entah perlindungan. Simbol tak harus disakralkan sedemikian rupa sehingga membuat publik tak nyaman, tetapi simbol harus dihidupkan supaya publik tak lupa. Karena itulah Golkar pasca-Orde Baru tetap bertahan dengan simbol atau logo pohon beringin, dan menolak usulan dari salah satu kadernya agar menggantinya dengan simbol pohon kelapa.[125] Pohon beringin, dengan segala sinisme yang melingkupinya, sudah telanjur menjadi simbol yang hidup.

Adakah aspek negatifnya tatkala mitos lebih dipercaya ketimbang rasionalitas?

Kita sudah hidup di alam modern, ketika dimensi rasionalitas, tetapi kerap yang mengemuka adalah dominasi mitos. Gugurnya pertimbangan rasional dan mengemukanya pertimbangan mitos yang sangat spekulatif merupakan awal dari sesuatu yang selamanya tidak sehat. Bangsa yang terbelenggu mitos dan tidak mampu keluar dari jebakan itu tentu tidak akan maju-maju. Tatkala ilmu pengetahuan dan teknologi disepelekan, pun se-

125 Lihat misalnya pemberitaan "Prokontra ide Perubahan Logo Partai Golkar, Beringin Jadi Pohon Kelapa Tua", *Media Indonesia*, 9 Oktober 2000. Ketua DPP Partai Golkar saat itu Akbar Tandjung tidak setuju dengan perubahan logo partai, bukan simbolnya yang harus diubah, melainkan etika moral dan perilaku politiknya. Lihat, "Moralnya diubah, Bukan Gambarnya!", *Rakyat Merdeka*, 21 Oktober 2000.

mangat rasionalitas ditumpulkan, futurologi tergantikan ramalan-ramalan buta, bagaimana suatu bangsa bisa maju? Proses politik kita dapat menumpulkan rasionalitas dan etos kemajuan kalau yang dikedepankan adalah manipulasi simbol dan mitos belaka. Partai-partai politik mestinya tak mengabaikan fungsi pendidikan politik yang akumulasi proses kepolitikannya mengarah ke proses pencerahan, sehingga simbol, mitos, doktrin, dan ideologi tidak melampaui batas-batas logika, rasionalitas, dan kemanusiaan.

Dalam hal ini patut kita renungkan Karen Armstrong: *A myth, therefore, is true because it is effective, not because it gives us factual information*.[126] Mitos tak memberi kita informasi faktual, tetapi dapat menjadi alat manipulasi citra yang efektif. Arsmtrong mengupas soal sejarah hubungan manusia dan mitos secara menarik: mitos tak ada urusannya dengan obyektivitas atau kebenaran faktual. Mitos merupakan sesuatu yang dipercaya dan berdaya sihir, karenanya efektif dipakai untuk mempengaruhi.

Dan itu penting bagi pembenaran/legitimasi kekuasaan?

Begitulah. Misalnya, kita sudah sering mendengar mitos Nyi Roro Kidul dalam kisah-kisah raja Jawa bukan? Menurut sejarawan Ong Hok Ham,

> ... Mitos Nyi Roro Kidul justru memperkuat legitimasi raja. Hal ini berlainan dengan orang kaya yang berhubungan dengan Nyi Blorong. Yang disebut terakhir adalah negatif, sedangkan yang pertama, yakni hubungan Raja Mataram dengan Nyai Roro Kidul adalah positif. Demikian pula dengan roh halus lain yang melindungi Raja Mataram, yakni Sunan Lawu di Gunung Lawu. Menurut salah satu konsepsi, roh Sunan Lawu ini adalah roh raja-raja Majapahit.
>
> Seorang Susuhunan, Paku Buwono II (1740-an), yang lari dari keratonnya dan bertapa di Gunung Lawu, mengumumkan diri sebagai reinkarnasi Sunan Lawu atau Brawijaya VII, raja terakhir Majapahit, setelah turun dari gunung itu. Melalui legitimasi Susuhunan Lawu ini, dan dengan pertolongan tentara VOC, Paku Buwono II merebut kembali tahtanya. Wahyu *kedaton*, Nyai Roro Kidul, atau roh raja-raja besar adalah hubungan yang positif.[127]

Jadi penciptaan mitos dan pemanfaatannya bagi pelanggengan kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi, baik di masa lalu, maupun masa kini.

Yang masa kini bagaimana?

Mitos-mitos modern terbentuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan, serta melekat dalam dunia pencitraan. Legitimasi mitologis tercipta tatkala publik percaya pada manipulasi mitos dan simbol-simbol, percaya bahwa yang didukungnya adalah benar-benar "ratu adil"

126 Armstrong (2005:10).

127 Ong Hok Ham (2002:181).

dan "*satrio piningit*" yang didambakan. Legitimasi mitos di alam modern hadir dalam kemasan budaya pop (*pop culture*). Kesadaran akan *pop culture* dalam politik semakin menguat belakangan ini, tidak hanya dalam kemasan perlombaan iklan politik, tetapi juga dalam bentuknya yang lain. Tokoh-tokoh politik berlomba mempersonifikasi diri sebagai *hero* alias pahlawan di alam persepsi. Padahal, personifikasi tokoh cenderung mengabaikan penguatan pelembagaan, betapapun dalam logika demokrasi langsung, ia menjadi semacam keharusan. Tidak mengherankan apabila ada kesan kecenderungan iklan politik pada tokoh, bukan partai. Para tokoh dan partai berlomba mengatur *positioning*, mengeluarkan jurus diferensiasi, dan memperkuat merek masingmasing. Sadar atau tidak, persepsi yang mereka bangun tak lepas dari konteks mitos. Publik yang kritis akan selalu mempersoalkan aspek-aspek irasionalitas. Tetapi, publik lazim dikaburkan oleh jarak antara mitos dan realitas yang tipis sekali. Angan-angan seolah nyata. Emas atau loyang sulit dibedakan. Publik bisa tertipu oleh yang dikira emas ternyata imitasi.[128]

Kekuasaan dan Identitas

MENGAPA ORANG "rela mati" demi politik, apa kaitannya dengan simbol, tepatnya identitas?

Kolomnis Farid Zakaria pernah menulis *What People Will Die For*,[129] soal mengapa harus banyak yang tewas dalam perseteruan politik di Pakistan dan juga di Kenya, dan menyisakan pertanyaan: mengapa politik harus berlangsung secara keras dan mematikan/berdarah-darah justru ketika demokrasi diagung-agungkan? Mengapa demokrasi suka berakhir dengan semacam jalan buntu?

Dalam *From Voting to Violence, Democratization and Nationalist Conflict*, Jack Snyder menjelaskan betapa demokrasi kerap dihadapkan pada bahaya yang mengancamnya, yakni konflik nasionalis.[130] Ia memotret sejumlah kasus di banyak negara, mengapa konflik nasionalis muncul justru ketika kesempatan berdemokrasi hadir? Snyder membagi nasionalisme ke dalam empat jenis: (1) nasionalisme revolusioner; (2) nasionalisme kontrarevolusioner; (3) nasionalisme sipil; serta (4) *nationalism ethnicity* atau nasionalisme — dalam istilah kita, SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Yang paling fenomenal adalah konflik nasionalisme SARA, yang bisa terpicu

128 M Alfan Alfian, "Jarak Mitos dan Kekuasaan", *Koran Tempo*, 22 September 2008.

129 *Newsweek*, edisi 14 Januari 2008

130 Snyder (2003).

THEGUARDIAN.COM

Nilai Kemanusiaan kita ditantang secara kasar manakala keragaman di antara kita dipampatkan secara semena-mena ke dalam satu sistem kategorisasi tunggal yang semena-mena

- Amartya Sen

oleh konflik politik. Potret konflik tersebut pada akhir abad ke20, misalnya terjadi di pecahan Yugoslavia, Rwanda, Kenya, dan negaranegara Afrika lain, bahkan juga Indonesia.

Sebagai ilustrasi, apa yang terjadi di Kenya?

Kemelut politik dan antar-suku di Kenya pada akhir 2007, misalnya menggambarkan bentrokan antar-kelompok yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan memaksa sedikitnya 250 ribu warga mengungsi. Pemicunya konflik politik pasca-Pemilu 27 Desember 2007. Pemilu itu berlangsung kacau dan tak sesuai standar internasional. Namun, Komisi Pemilu Kenya menyatakan Mwai Kibaki menang atas pemimpin oposisi Raila Odinga. Kelompok Odinga tidak terima, menyampaikan protes meminta Kibaki mundur. Perseteruan politik elite pun segera berubah ke perseteruan sektarian antara suku Kikuyus (suku asal Kibaki) dan suku Luo (suku asal Odinga). Suku Kikuyus jumlahnya sekitar 23 persen dari total penduduk. Sementara itu, suku Luo (13 persen) didukung suku-suku lainnya, seperti Luhya (14 persen), Kalenjin (11 persen), Kamba (10 persen), Kisii (8 persen), dan Meru (8 persen).

Perang antar-suku yang terpicu konflik politik ini segera mengingatkan kita yang terjadi di Rwanda pada pertengahan 1990-an, ketika setengah juta lebih orang dari kelompok minoritas suku Tutsi diburu dan dibantai oleh sayap ekstremis bersenjata mayoritas suku Hutu. Konflik itu juga melebar ke negara tetangganya, Burundi. Ratusan ribu orang, baik dari suku Hutu

maupun Tutsi, tewas dalam lingkaran konflik politik itu.[131]

Dalam pola konflik demikian, elite jauh amat memainkan perannya sebagai pengobar konflik. Mereka juga berpotensi menghentikan konflik, tapi itu jauh lebih sulit ketimbang mengobarkannya. Sekali krisis kemanusiaan terjadi, susah untuk kembali normal ke sedia kala. Dalam banyak kasus, *human intervention* alias intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dan pasukan multinasional datang dengan amat terlambat, kalau bukan gagal, dalam memulihkan keadaan.[132]

Sementara di negara-negara Afrika konflik politik lazim berubah menjadi konflik SARA (identitas), bagaimana kita menjelaskan fenomena bom bunuh diri? Mengapa orang rela bunuh diri demi tujuan politik?

Pertanyaan ini hampir sama halnya dengan pertanyaan mengapa teroris berani mati untuk sebuah bom bunuh diri? Apakah itu semua dilandasi doktrin tertentu sehingga muncul keyakinan bahwa sang pelaku peledakan bom bunuh diri itu martir yang dijamin masuk surga? Perlu studi mendalam. Tapi, bagaimanapun politik adalah kompetisi. Padahal setiap kompetisi memunculkan gesekan. Ada pula rekayasa-rekayasa, dan tidak tertutup kemungkinan intimidasi dan teror-teror politik. Bisa saja sang pelaku peledakan bom bunuh diri politik itu tidak punya pilihan lain kecuali menjadi robot yang dikendalikan dengan amat lihai oleh para operatornya. Bisa jadi mereka tidak tahu-menahu soal surga atau neraka, tapi sudah terjebak pada suatu skenario besar perang politik dan politik dendam.

Dalam beberapa kasus pembunuhan politik di India, misalnya, usut punya usut kerap terkait dengan protes kebijakan politik yang diputuskan sang tokoh. Indira Gandhi tewas di tangan dua pengawalnya yang ternyata penganut setia agama Sikh. Indira sendiri sebagai perdana menteri, beberapa waktu sebelumnya telah memerintahkan tentara memakai pendekatan militer terhadap para pemberontak Sikh di Kuil Emas. Nasib yang diterima oleh Rajiv Gandhi juga sama. Ia dibunuh oleh ekstremis Tamil di India bagian selatan yang tidak suka pada kebijakan politiknya.[133]

Kasus-kasus pembunuhan politik memang sudah kerap terjadi sejak dulu, dengan aneka modus. Benazir Bhutto, setelah peristiwa pengeboman dirinya pertama kali yang gagal, jelas amat paham bahwa risiko politik bagi dirinya amat tinggi di Pakistan. Ia bisa saja tewas dalam bom berikutnya. Nyatanya benar. Ia tewas mengenaskan di Rawalpindi. Banyak yang ber-

131 Wikipedia.org

132 M. Alfan Alfian, "Rela Mati demi Politik", *Koran Tempo*, 22 Januari 2008.

133 Wikipedia.org

harap kejadian seperti itu yang terakhir kalinya. Tapi mana mungkin? Kekerasan politik telah berkali-kali membunuh demokrasi. Bagaimana bisa kultur demokrasi berjalan seiring dengan kekerasan?

Bagaimana dengan kharisma?

Kharisma tokoh juga bisa membuat orang rela mati demi politik. Kita kerap mendengar istilah politik *pejah-gesang*. Orang-orang yang fanatik pada kharisma akan membela mati-matian sang tokoh. Bahkan mereka siap berperang dengan kelompok lain yang dianggap menghina idola politiknya itu. Memang fatal kedengarannya, tapi kadang-kadang massa politik itu seperti para *hooligan* yang daya rusaknya luar biasa demi sang legenda. Kalau bukan karisma tokoh, ia mengemuka ke dalam konflik identitas. Ini mirip konflik nasionalisme SARA di atas. Amartya Sen pun sempat mengupas fenomena identitas ini.[134] Agaknya susah diterima akal, misalnya, apabila perseteruan massif dan mematikan terjadi hanya karena merasa simbol-simbol identitasnya tercampakkan oleh kelompok lain. Berbagai hal bisa menyebabkan orang "rela mati demi politik". Namun, apakah mereka benar secara prinsip, kalau mengorbankan yang lain?

Tapi, bagaimana menjelaskan fenomena pasukan berani mati, misalnya Tentara Kamikaze Jepang pada Perang Pasifik?

Kita bisa mengaitkannya dengan tradisi bunuh diri di Jepang, kaitannya dengan harga diri atau rela mati demi Kaisar. Memang tidak masuk akal, tetapi tentara-tentara Jepang dikenal tidak takut mati. Dalam hal ini Baskoro mencatat,

> Fenomena luar biasa ini terjadi karena adanya balutan banyak unsur. Kepercayaan Jepang menyebutkan bahwa itu dilakukan sebagai wujud kesetiaan kepada kaisar yang mereka percaya sebagai keturunan Dewa Matahari. Di sini aspek keagamaan ikut serta mendorong semangat *kamikaze* tersebut. Perjuangan demi membela negara pada akhirnya membuat para pejuang ini dipandang sebagai pahlawan yang pantas mendapatkan penghormatan nasional. Aspek nasionalisme perjuangan negara jelas masuk ke dalam tingkah laku *kamikaze* tersebut ... *Kamikaze* adalah bunuh diri yang didasari alasan keyakinan pada ideologi, agama, ataupun loyalitas berbasis kultus pada kaisar. Emile Durkheim (1897) menyebut hal semacam ini sebagai bunuh diri altruistik.[135]●

134 Sen (2007).

135 Baskara (2008:121).

Bagian 4

Manajemen Kepemimpinan Politik

Bagaimana Mengelola Politik?

SPAWNooooo.DEVIANTART.COM

Kepemimpinan itu gabungan unsur-unsur kecerdasan, sifat amanah, rasa kemanusiaan, keberanian, dan disiplin ... Hanya ketika seseorang memiliki kelima unsur itu menyatu dalam dirinya, masing-masing dalam porsi yang tepat, baru dia layak dan bisa menjadi seorang pemimpin sejati

- Sun Tzu

Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and discipline ... When one has all five virtues together, each appropriate to its function, then one can be a leader.

Bab 18

Urgensi Mengelola Kekuasaan

Perspektif Kelembagaan dan Kepengikutan

Mengapa Politik Perlu Dikelola?

Jelaskan dulu apa yang dimaksud mengelola...

Kata dasarnya kelola, *manage*. Bahwa agar kekuasaan itu bisa langgeng-bermanfaat, maka perlu pengelolaan semestinya. Kekuasaan itu bukan buat diri sang penguasa, tetapi untuk kebaikan bersama (*ultimate goal*). Sebenarnya dengan membaca bagian kepemimpinan dan kekuasaan buku ini, sudah banyak hal yang dapat digarisbawahi konteks mengelola kekuasaan ini. Bagian ini kita upayakan pertajamannya.

Tadi disebut soal langgeng alias abadi, tapi kan hakikatnya tak ada yang abadi di dunia ini?

Anda benar tidak ada yang langgeng alias abadi di dunia ini. Kekuasaan pun apalagi. Kekuasaan dipergulirkan. Di halaman depan buku ini saya kutipkan sebuah ayat dalam Al Qur'an yang menegaskannya hal sede-

Dia yang terlalu tinggi di atas singgasana tidak pernah melihat telapak kakinya. Dia tak pernah ingat, pada tubuhnya ada bagian yang bernama telapak kaki. Pendengarannya tidak untuk menangkap suara dewa, juga tidak suara segala yang di bawah telapak kaki. Ia hanya dengarkan diri sendiri

- Pramoedya Ananta Toer

mikian. Tapi, langgeng di sini cukup dimaknai sebagai awet alias kontinyu, dengan harapan kekuasaan yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam sistem pemerintahan monarkhi absolut, kekuasaan berjalan seiring seberapa kuat raja memimpin, sebelum akhirnya mempersiapkan penggantinya. Suksesi terjadi ketika raja mangkat. Sang pangeran, putra mahkota pun menggantikannya. Itu proses suksesi yang normal. Syaratnya, raja punya pengaruh kekuasaan yang super atau ekstra-kuat, sehingga tak ada kekuatan elemen pembangkang yang berarti. Syarat kedua adalah ia punya putra mahkota, yang biasanya anak laki-laki pertama dari istri pertama atau permaisuri, atau istri yang ditetapkan sebagai permaisuri. Tetapi, kalau situasinya tidak normal, maka lain cerita. Misalnya terjadi pembangkangan politik yang berujung pada pemberontakan. Maka, tentu bangunan dinasti yang ada, hancur. Digantikan oleh dinasti lain, yakni dari garis siapa yang berhasil mengkudeta singgasana raja. Di Jawa kita cukup kaya dengan kisah-kisah suksesi kerajaan yang berdarah-darah dan penuh intrik. Kita semua cukup mengenal suksesi *à la* Ken Arok bukan?[1]

Bagaimana ringkasannya?

Dalam legenda Ken Arok dikisahkan, bagaimana ia memesan senjata keris ke Empu Gandring. Keris itu rencananya mau dipakai Ken Arok untuk membunuh Adipati Tunggul Ametung, sekaligus merebut tahta kekuasaan Singasari dan memperistri Ken Dedes. Konon Arok tak sabar dan gelap mata ketika keris yang dikerjakan Empu Gandring belum sepenuhnya selesai: direbutnya keris itu, sang empu pun dibunuhnya. Dalam keadaan sekarat Empu Gandring mengutuknya: keris akan memakan banyak korban.

Dan kita tahu bagaimana Ken Arok melakukan strategi menfitnah Kebo Ijo. Diberikannya keris itu ke Kebo Ijo dan di tangannya, keris itu ia pamer-pamerkan ke yang lain. Tapi pada suatu malam, di kala lengah, Ken Arok mengambil keris itu, dan dipakainya untuk membunuh Tunggul Ametung.

1 Tentang legenda Ken Arok atau Ken Angrok lihat Kamandoko (2008). Tentang analisis akademisnya lihat, Suwardono. (2013).

Keris menancap di dada Ametung. Dan gegerlah segenap kadipaten. Siapa pembunuhnya? Arok berteriak lantang: Kebo Ijo. Tangkap Kebo Ijo. Singkat kata, Ken Arok pun tampil sebagai pahlawan yang cepat mengambil-alih kekuasaan. Inilah yang saya maksud dengan Ken Arokisme, menghalalkan cara demi kekuasaan — suatu kisah yang substansinya mirip dengan apa yang ditulis/anjurkan Machiavelli dalam *Il Principe*.

Banyak kejadian dimana suksesi berakhir sangat tragis, hadir suatu revolusi yang pada mengakhiri monarki-absolut...

Iya. Yang paling fenomenal, misalnya Revolusi Perancis dan Rusia. Kita tengok di Rusia pada 1917, ketika Revolusi Bolshevik terjadi. Bolshevik merujuk kelompok radikal Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia pimpinan Vladimir Lenin yang menghendaki perubahan revolusioner. Kelompok ini mendirikan Partai Komunis Rusia pada 1912. Pada 1917, kelompok Bolshevik bersama kaum buruh dan serdadu merah mengambil-alih kekuasaan di Rusia dari Tsar Nikolai II. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Bolshevik. Nikolai II juga dikenal dengan nama Nikolai Aleksandrovich (1868-1918) ialah tsar/kaisar terakhir Rusia. Menyusul Revolusi Bolshevik pada 1917 itu ia dipenjarakan beserta seluruh keluarganya, kemudian semuanya dieksekusi. Tragis bukan? Di Perancis, jauh sebelumnya Raja Louis XVI dan istrinya Maria Antoinette hidupnya berakhir di ujung pemenggal kepala *guillotine*. Louis XVI (1754– 1793) dipaksa mundur dan ditangkap menyusul revolusi Perancis 10 Agustus 1792.[2]

Mengapa kekuasaan perlu dikelola?

O iya, jadi mengelola di sini mengandung pengertian, bagaimana kekuasaan diraih, dipertahankan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan berakhir dengan baik pula — di mana pemimpin akan dikenang sebagai sosok yang berjasa. Bukankah demikian? Pemimpin politik selalu berupaya untuk dikenang orang, suatu saat, ketika ia sudah *powerless*. Ini manusiawi sekali. Ini bagian dari *sunatullah* kekuasaan. *Gajah mati tinggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama*. Di bagian tentang kepemimpinan pernah disinggung bahwa sejarah banyak mengajarkan pada kita jatuh bangunnya peradaban umat manusia, terkait dengan bagaimana manajemen kekuasaan terkelola. Sejarah, banyak dikaitkan dengan persoalan jatuh-bangunnya kekuasaan. Penguasa yang baik adalah penguasa yang mampu menyejahterakan rakyatnya, membuat rakyat aman, makmur sentosa, negara kuat dan dihargai martabatnya di mana-mana. Kita sering sedih tatkala membaca kisah, ketika penguasa yang baik

2 wikipedia.org

hati dan pemimpin yang benar, tiba-tiba terkalahkan oleh kekuatan jahat yang menggusur peradaban. Kita sedih, ketika misi perdamaian hancur oleh kekuatan yang rakus.

Kita bisa membaca ulang mengapa pasukan Islam menaklukkan sasaran yang sangat luas,[3] atau mengapa Baghdad jatuh oleh pasukan Mongol, atau mengapa muhibah pelayaran samudera Laksamana Cheng Ho, nyaris tenggelam dalam catatan sejarah, tergantikan oleh Colombus dan para penjelajah Barat yang rakus dan membuat koloni di mana-mana itu.[4] Tentang fenomena Cheng Ho, *National Geographic* mencatat,

> Enam abad dan sewindu silam, tepatnya 11 Juli 1405, armada kekaisaran Ming meninggalkan ibukota Nanjing, untuk pelayaran perdana dari tujuh ekspedisi pelayaran akbar ke berbagai daerah Asia sampai sampai ke Afrika. Armada itu dipimpin Laksamana Cheng Ho atau Zhèng Hé.
>
> Dengan tinggi badan dua meter dan suara besar senyaring lonceng, ia memimpin pelayaran perdana hampir satu abad sebelum Columbus menjejakkan kaki pertama kali di daratan Amerika, dan Vasco da Gama di India.
>
> Ekspedisi yang dilakukan orang-orang Eropa tidak ada apa-apanya dibandingkan Dinasti Ming. Bila seluruh armada kapal Columbus dan da Gama digabungkan, cukup ditempatkan di satu geladak kapal armada Cheng Ho. Besarnya satu kemudi pengendali (*rudder*) dari sebuah kapal *baochuan* (kapal harta karun) paling tidak 42 meter persegi.
>
> Cheng Ho secara sepintas ialah lelaki yang tampaknya tidak ditakdirkan menjadi orang besar di lingkaran dalam kekaisaran Cina. Sebab ia Muslim, lahir di daerah pegunungan Asia Tengah dan bukanlah orang Tiongkok.
>
> Meski demikian, Cheng Ho terlahir di keluarga pelaut. Sebagai pemeluk Muslim, Cheng Ho memiliki tujuan khusus yaitu Ka'bah di kota suci Mekah. Konon kakek dan ayahnya telah menunaikan rukun ibadah haji. Tahun 1432 misi khusus yang dikirimnya berhasil sampai di Ka'bah, titik pangkal kaum Muslim sedunia.
>
> Penjelajahan-penjelajahan Cheng Ho yang terbagi jadi tujuh misi pelayaran itu berlangsung antara 1405 - 1433 M. Sang laksamana yang dikenal sebagai sosok pemimpin arif ini mengunjungi berbagai wilayah bersama armadanya, antara lain Malaka, Sumatra, Pahang, Kelantan, Champa, Maladewa, Siam, Sri Lanka, India, Jawa, hingga Afrika Timur, dan Jazirah Arab.
>
> Kerendahan hatinya yang tertulis di berbagai sumber prasasti, toleransinya yang tinggi ke umat beragama lain, serta penghormatannya kepada setiap negeri yang dikunjungi, membuat kenangan akan Cheng Ho tetap abadi sam-

3 Kennedy (2008).

4 Tentang Ceng Ho, lihat tulisan-tulisan menarik dalam Suryadinata (2007).

THEFAMOUSPEOPLE.COM

Aku memimpin tanpa partai; Tanpa pemimpin aku mengikut

-Muhammad Iqbal

I lead no party; I follow no leader

pai hari ini, meretas segala batas agama, suku, dan bangsa.[5]

Bagaimana seni mengelola kekuasaan?

Sebelum menjawab lebih jauh, seni mengelola kekuasaan terkait dengan tahap-tahap atau fase-fase kekuasaan itu sendiri. Apabila kita sepakat dengan Ibnu Khaldun, siklus kekuasaan itu dimulai dari fase kelahiran, pendewasaan dan klimaks kekuasaan, penuaan dan mati. Sebagaimana diringkas Biyanto, menurut Ibnu Khaldun, perkembangan dan kondisi negara umumnya tidak lebih dari lima tahap, yaitu: (1) Tahap pendirian; (2) Tahap pemusatan kekuasaan atau tirani; (3) Tahap kekosongan dan kesantaian dalam menikmati buah kekuasaan dan menumpuk kekayaan; (4) Tahap ketundukan dan kemalasan (akibat merasa puas dengan yang ada); dan (5) Tahap pembubaran dan keruntuhan negara (akibat pola hidup berlebihan pada keluarga istana). Sementara, penyebab kehancuran negara menurut Ibn Khaldun: (1) negara menghendaki pemusatan kekuasaan; (2) negara menghendaki kemewahan; (3) watak kekuasaan negara itu menghendaki kestabilan dan ketenangan yang berakibat pada kemalasan. Yang menarik, negara dan manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki umur alami. Umur alami negara menurut Ibn Khaldun tidak lebih dari tiga generasi (120 tahun), yang masing-masing generasi memiliki karakterstik masing-masing (*primitive*, kota, krisis). Tanda-tanda negara yang mendekati

5 http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/06/cheng-ho-cina-muslim-yang-mengalahkan-penjelajahan-eropa (diakses, 12 Desember 2015)

Masalah utama politik ialah tertinggalnya pengembangan lembaga-lembaga politik di tengah perubahan sosial dan ekonomi

- Samuel P. Huntington

The primary problem of politics is the lag in the development of political institutions behind social and economic change.

masa kehancuran adalah kurangnya lapangan kerja dan krisis moral.[6]

Kalau direfleksikan dengan zaman kita, bagaimana?

Apabila direfleksikan secara modern, maka yang menarik ialah soal kerakusan dan kemalasan itu: ini bisa membuat kehancuran. Soal siklus negara yang selazimnya tiga generasi tadi, menarik juga untuk dibaca sebagai peringatan bagi bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita: kalau tak terkelola dengan baik, maka bangsa atau negara-bangsa (*nation-state*) modern dalam bentuknya sekarang bisa ambruk. Cukuplah di masa kita, kasus Uni Sovyet menjadi bahan pelajaran:[7]

- Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet ialah negara komunis yang pernah ada antara 1922-1991 (69 tahun) di kawasan Eurasia. Ia menganut sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis hingga 1990. Walaupun ia sebenarnya suatu kesatuan politik dari beberapa republik Soviet dengan ibu kota di Moskwa, nyatanya Uni Soviet menjelma menjadi negara yang pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana.
- Kehadirannya dimulai dari adanya Revolusi Oktober di Rusia pada 1917 yang meruntuhkan Kekaisaran Rusia. Penerusnya, Pemerintahan Sementara Rusia, hanya bertahan beberapa bulan. Setelah kaum Bolshevik menang dalam Perang Sipil Rusia pasca-revolusi, Uni Soviet didirikan pada 30 Desember 1922 dengan anggota RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Byelorusia. Pasca-kematian pemimpin Soviet yang pertama, Vladimir Lenin, pada 1924, Joseph Stalin menjadi penggantinya dan memimpin negara tersebut melewati proses industrialisasi besar-besaran dengan sistem ekonomi terencana dan penindasan politik.
- Dalam suasana Perang Dunia II, pada Juni 1941, Nazi Jerman dan sekutunya menyerang Uni Soviet melalui Operasi Barbarossa walaupun sebelumnya kedua negara telah menandatangani Pakta Molotov–Ribbentrop yang berisi perjanjian untuk tidak saling menyerang. Setelah empat tahun berperang secara besar-besaran, Uni Soviet muncul sebagai salah satu dari dua negara adidaya pemenang perang selain Amerika Serikat. Uni Soviet dan negara-ne-

6 Biyanto (2004).

7 Wikipedia.org

gara satelitnya di Eropa Timur terlibat dalam Perang Dingin, yaitu perebutan pengaruh ideologi dan politik global yang berkepanjangan melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Blok Barat. Pada akhirnya, Uni Soviet mengalami kekalahan dalam hal ekonomi serta politik dalam dan luar negeri.

- Pada akhir 1980-an, pemimpin Uni Soviet yang terakhir, Mikhail Gorbachev, mencoba merestrukturisasi negaranya melalui kebijakan *glasnost* dan *perestroika*, tetapi justru memicu perpecahan Uni Soviet yang akhirnya secara resmi bubar pada 26 Desember 1991 setelah gagalnya percobaan kudeta pada Agustus sebelumnya. Hak dan kewajiban negara ini kemudian dilanjutkan oleh Federasi Rusia. Pada masanya, Uni Soviet memiliki tiga perwakilan di PBB, yaitu Uni Soviet, Ukraina, dan Byelorusia.

Kembali ke fase-fase kekuasaan: bagaimana ia dikelola?

Bisa dimulai dengan fase persiapan untuk menggapai kekuasaan. Kekuasaan harus direbut. Setelah kekuasaan terebut, maka barulah pemimpin dihadapkan pada bagaimana mengelola kekuasaan dengan berbagai macam kebijakan yang ditelorkannya. Pemimpin yang langgeng ialah yang mampu mewariskan suatu sistem yang kokoh pada para pelanjut, artinya ada suatu proses regenerasi yang baik. Regenerasi itu *sunatullah*. Tanpa regenerasi, maka tidak akan ada kesinambungan kekuasaan.

Jadi, harus kita telaah dulu tahap-tahap kekuasaan, dan bagaimana cara mengelolanya. Sederhananya ada tiga tahap yang perlu memperoleh perhatian secara khusus: sebelum atau pra kekuasaan; tahap saat berkuasa; dan tahap pasca-berkuasa. Pra, maksudnya persiapan yang dilakukan tatkala seseorang atau sekelompok orang berikhtiar meraih kekuasaan dengan tingkat atau derajatnya yang bervariasi. Saat, maksudnya ketika kekuasaan itu telah diperoleh, atau ketika seseorang atau sekelompok orang tengah berkuasa di posisi-posisi puncak. Pasca, maksudnya, ketika kekuasaan itu sudah harus ditinggalkan, yakni bagaimana menyudahinya dengan baik, sementara visi dan misinya tetap terus berjalan.

Mengelola Lembaga Politik

BAGAIMANA IDEAL mengurus partai sebagai lembaga atau organisasi politik. Dalam jangka panjang katanya perlu penguatan kelembagaan atau institusionalisasi..

Ya. Bila lembaga kokoh, sehat, dinamis, maka kader-kader politik yang dihasilkannya tentu baik — setidaknya tidak miskin atau minus kader. Lembaga partai politik yang kuat, tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi jangka panjang dan kontinyu — mengingat konstituen partai sudah terben-

tuk, mengakar dan konsisten.

Apa sebenarnya yang dimaksud institusionalisasi?

Pelembagaan atau institusionalisasi yang dimaksud adalah proses menjadikan organisasi dan prosedur-prosedur organisasi memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington menyatakan pelembagaan politik dapat diukur dari tingkat (1) adaptabilitas; (2) kompleksitas, (3) otonomi, dan (4) koherensinya. Panebianco menekankan pentingnya otonomi dan kesisteman (*systemness*). Tingkat otonomi terkait sejauhmana organisasi tidak tergantung terhadap kekuatan lingkungannya. Tingkat kesisteman adalah sejauhmana kesalingtergantungan antar-subsektor organisasi. Randall dan Svasand menambahkan pendapat Kenneth H. Janda tentang pentingnya partai yang tertanam dalam benak publik (*reified*). Randall dan Svasand kemudian memperkenalkan konteks (1) kesisteman (*systemness*); (2) otonomi (*autonomy*); (3) nilai-nilai dan kultur (*value infusion*); dan (4) citra partai (*reification*).[8] Biasanya, ada satu hal lagi yang tak kalah mendasarnya: *leadership*.

Jadi, institusionalisasi itu juga bermakna depersonalisasi?

Menguatnya sosok sentral dalam organisasi atau partai politik, tentu saja, dalam batas tertentu mengonfirmasi lemahnya kelembagaan parpol, aalagi pada praktiknya yang terjadi ialah ketergantungan yang kuat pada sosok sentral itu. Parpol dengan begitu membentuk wajahnya yang tidak lagi sekadar oligarkis, tetapi personal terpusat pada sosok elite puncaknya. Fenomena ini diperkuat dengan pola hubungan neo-patrimonialistik, kalau bukan feodalistik dalam bentuk lain. Sindiran ekstremnya, parpol-parpol bak kerajaan-kerajaan feodal masa lalu dalam modifikasinya di masa kini.[9] Dalam pola oligarkhis semacam itu, demokrasi memang masih diberi tempat di parpol-parpol, tetapi kerap sempit dan marjinal belaka. Yang lazim dalam proses politik internal parpol ialah pola mobilisasi, bukan membiarkan partisipasi berkembang secara demokratis. Para kader non-elite sebagai kelompok yang bukan puncak penentu keputusan, sekadar dimobilisasi oleh elite-elite penentu, bukan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan secara otonom. Demokrasi terbatas, itulah yang dominan menyembul dalam tubuh parpol-parpol.

Soal demokrasi internal, tampaknya ia sering diabaikan. Tapi, bukankah "demokrasi yang berlebihan" membuat lembaga parpol malah dipenuhi dengan konflik?

Saya tidak memahami apa yang Anda maksud sebagai "demokrasi yang

8 Huntington (2003); Panebianco (1998); dan Randall dan Svasand (2002).

9 M Alfan Alfian, "Masalah Kepemimpinan Parpol", *Kompas*, 18 Mei 2015.

Keputusan yang setengah betul tetapi dengan gembira dikerjakan oleh seluruh barisan lebih baik daripada keputusan yang bagus sekali tetapi dikhianati oleh setengah anggotanya

- Tan Malaka

berlebihan". Tetapi, setidaknya menurut Hazan dan Rahat dalam *Democracy within Parties* mencatat demokrasi internal sesungguhnya merupakan isu yang lazim saja menyertai pergulatan internal parpol.[10] Pergulatan itu merupakan bagian dari dinamika dalam tata aturan yang demokratis. Elite-elite parpol yang bergulat itu pada akhirnya akan ada pemenang yang lantas memiliki legitimasi dalam penentuan seleksi kandidat di segala pemilu. Memang, demokrasi internal parpol berbeda konteksnya dengan demokrasi antarpartai. Namun, terdapat tuntutan partisipasi inklusif dalam parpol.

Partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan itu mencerminkan kemandirian parpol dalam proses pengambilan keputusan (*decisional autonomy*). Namun, faktor kepemimpinan tetaplah sangat menentukan, ke mana parpol hendak dibangun, ke arah kelembagaan yang, meminjam tesis Acemoglu dan Robinson, inklusif ataukah ekstraktif.[11] Yang inklusif ialah yang demokratis, tidak membatasi partisipasi, memberi kesempatan yang sama bagi setiap kader parpol untuk meraih karier organisasi. Yang ekstraktif, semua sumber daya diarahkan untuk menopang sosok sentral elite berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam lingkungan kelembagaan parpol yang ekstraktif, secara jangka pendek eksistensi parpol mungkin masih bisa terjaga, tetapi sangat berisiko jangka panjangnya. Parpol yang terlalu bergantung sekadar pada sosok, bukan sistem, rawan perpecahan di kemudian hari.

Jadi, sebaiknya konflik internal parpol tak mengkambinghitamkan demokrasi?

Ya. Karena konflik terjadi, ketika mekanisme demokrasi internal justru tidak dipatuhi alias dilanggar oleh satu atau banyak elemen yang ada di dalamnya.

Apa yang bisa Anda rekomendasikan agar parpol-parpol tak mengalami perpecahan?

Belajar dari berbagai peristiwa perpecahan internal parpol di Indonesia

10 Hazan dan Rahat (2010).

11 Acemoglu dan Robinson (2014).

dewasa ini,[12] perlu direkomendasikan dua hal. *Pertama*, parpol-parpol hendaknya membuat tradisi politik demokratis. Ini artinya aturan main tidak boleh dilabrak. Institusionalisasi politiklah anjuran idealnya: logikanya, organisasi apa pun, apalagi parpol, kalau tak terkelola baik dan terlembaga, cepat atau lambat akan lemah dan membusuk.

Kedua, kearifan demokratik para elite parpol. Mereka tidak saja dituntut sadar dalam ikhtiar membangun institusi parpol, tetapi juga dalam regenerasi. Merujuk Blondel dan Thiebault dalam *The Personalisation of Leadership*, depersonalisasi parpol sangat relevan.[13] Depersonalisasi meletakkan konteks kepemimpinan ke ranah kelembagaan. Pemimpin ialah bagian integral lembaga, dan bukan lembaga itu sendiri. Ia terikat aturan main dan etika organisasi. Sosok sentral tidak boleh kemaruk kekuasaan.

Kembali ke pelembagaan parpol. Intinya, organisasi (politik) yang terlembagakan lebih kuat ketimbang yang tidak ...

Jelas ya. Dalam konteks ini, pengertian organisasi berbeda dengan lembaga. Membuat organisasi politik atau parpol, kendatipun ada persyaratan ketat, ia akan mudah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, eksistensi dan survivalitas parpol itu, tergantung proses pelembagaannya.

Dalam konteks ini, elemen-elemen pelembagaan politik dikhtiarkan aktual di tiga wajah parpol, istilah yang dipopulerkan Katz dan Mair dalam *The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization.* Tiga wajah parpol yang dimaksud: (1) *party in public office*; (2) *party in the ground*, dan (3) *party in the central office*.[14]

Penjelasan bebasnya: yang satu terkait dengan wajah mereka di ranah parlemen dan pemerintahan. Selanjutnya, bagaimana wajah partai di level akar rumput, komunikasi dan keterhubungannya dengan rakyat. Yang terakhir, terkait pengelolaan internal parpol: bagaimana ia melakukan konsolidasi, strategi pemenangan pemilunya; termasuk yang tak kalah penting manajemen konflik internalnya: apakah demokrasi internal cukup dijamin dan mampu membuat dinamika organisasi ke arah soliditas dan bukan perpecahan yang akut? Karakter masing-masing wajah berbeda, tetapi hakikatnya ikhtiar mereka merupakan satu kesatuan (*unity*) yakni untuk meyakinkan rakyat dan pada akhirnya mampu memenangkan pemilu.

12 Perpecahan parpol seolah menjadi hal yang lazim di Indonesia pada era Reformasi pasca-1998. Bahkan pasca-Pilpres 2014, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun terlanda perpecahan.

13 Blondel dan Thiebault (2010).

14 Katz dan Mair (1993: : 593-617).

Faktor pengikut dalam mentaati keputusan bersama tentu sangat bermanfaat bagi kelangsungan partai politik..

Jelas. Soal pengikut dan kepengikutan nanti akan kita bahas panjang lebar dalam pembahasan mengelola pengikut. Tapi, bolehlah kita merenungkan apa yang dicatat Tan Malaka berikut,

> Jika saat keputusan sudah diterima... mestilah suara yang terkecil, meskipun bertentangan dengan keyakinannya, "tunduk" kepada putusan dan dengan jujur menjalankan putusan itu ... Keputusan yang "setengah betul" tetapi dengan gembira dikerjakan oleh seluruh barisan lebih baik daripada keputusan yang "bagus sekali" tetapi dikhianati oleh setengah anggotanya.[15]

Mengelola Pengikut

MENGAPA KITA membicarakan pengikut dan kepengikutan? Bukannya itu masalah kecil saja?

Ye, jangan salah. Sudut pandang pengikut (*follower*) itu tak kalah penting. Kita akan terlewatkan percuma bicara kepemimpinan, tapi lupa membahas soal kepengikutan (*follower*). Mengapa memakai istilah kepengikutan, sebab terkait dengan pengikut. Kata lain dari pengikut sesungguhnya ada beberapa, misalnya konstituen (*constituent*) tetapi ini lebih merujuk pada pemilih atau pendukung partai politik. Ada juga istilah *partisipant*, tapi pengertiannya luas. Ada juga *subordinate*, yang diterjemahkan sebagai anak-buah yang "mengabdi" pada bosnya. Karenanya istilah kepengikutan menjadi lebih luwes, dan lebih tepat mengatasi segala istilah itu, sebagai sebuah wilayah yang sepertinya berada di seberang kepemimpinan, tetapi sesungguhnya saling berkait erat. Tak ada pemimpin tanpa pengikut, bukan? Resistensi pengikut, "berbahaya" bukan?

Menurut Wirawan, kepemimpinan dan kepengikutan terkait dengan efektivitas. Kesuksesan seorang pemimpin tidak mungkin terjadi tanpa upaya dan efektivitas para pengikutnya. Kepatuhan para pengikut dalam melaksanakan tugasnya, merupakan kunci efektivitas kepemimpinan.[16]

Wah, kalau begitu eksistensi dan sikap pengikut, sangat menentukan?

Benar. Tidak menyangka ya? Ini karena kepemimpinan selalu terkait dengan kekuasaan, dan artinya ada suatu proses interaksi antara pemimpin, pengikut dan lingkungannya.

---

15 Malaka (2008:105).

16 Wirawan (2003).

Apakah pengikut harus selalu tunduk pada pemimpin?

Pengikut yang kritis dengan yang tidak kritis tentu punya derajat penyikapan dan ketertundukan yang berbeda-beda. Hal ini akan panjang lebar nanti kita bahas di bagian kekuasaan. Tapi, begini, kalau kita boleh bedakan, memang ada pandangan lama dan pandangan baru tentang hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pandangan lama cenderung memberi gambaran bahwa pola hubungan pemimpin dan pengikut itu seperti penggembala dengan ternaknya. Pemimpin ialah orang yang ditakdirkan untuk memimpin. Sebaliknya, pengikut merupakan orang yang ditakdirkan untuk taat tanpa membantah sang pemimpin. Jadi, pandangan lama cenderung percaya bahwa adanya pemimpin dan pengikut itu merupakan satu hal yang sudah *taken for granted* alias *dari sononya*.

Kalau pandangan baru?

Berbeda sekali. Pandangan baru tidak menyepelekan potensi pengikut. Pengikut adalah manusia atau kumpulan manusia yang punya kehendak dan keinginan yang berbeda-beda. Ada interaksi di antara pengikut dan juga ada interaksi antara pemimpin dan pengikut. Karena itulah, pandangan baru, mencatat bahwa kesuksesan kepemimpinan ditentukan bukan saja oleh kualitas-kualitas pemimpin, tetapi juga sikap dan sepak terjang para pengikutnya. Kualitas kepengikutan akan menentukan kualitas kepemimpinan.

Bisa lebih dijelaskan atau fokuskan lagi apa pengikut itu?

Sebagaimana dikutip Wirawan dari Joseph C. Rost dalam *Leaders and Followers are the People in This Relationship* (1995), ada lima indikator pengikut: (1) pengikut hanya orang yang aktif dalam proses kepemimpinan; (2) istilah aktif merupakan kontinum dari sangat aktif sampai kurang aktif; (3) pengikut dapat menjadi pemimpin dan pemimpin pun dapat menjadi pengikut dalam hubungan kepemimpinan; (4) dalam satu kelompok seorang dapat menjadi pemimpin tapi dalam kelompok lain ia dapat menjadi pengikut; dan (5) pemimpin dan pengikut membentuk satu hubungan kepemimpinan.[17]

Pada era digital saat ini, kepengikutan dalam perspektif dunia maya, apa ya sama hakikatnya dengan konteks di atas?

Hakikatnya sama, tetapi kita harus cermati karakter era digital itu seperti apa. Tetapi, kita harus pahami dulu apa itu era digital? Schmidt dan Cohen mencatat bahwa penanda utama era digital adalah internet.[18] Internet

17 Wirawan (2003:54).

18 Schmidt dan Cohen (2014).

pada awalnya sekadar alat transmisi informasi elektronik, deretan komputer seukuran ruangan, dan lantas menjelma jadi saluran energi dan ekspresi manusia tiada batas yang ada di mana-mana dan menyeluruh banyak sisi. Internet berkembang makin besar dan kompleks tiap detik. Inilah sumber kebaikan yang luar biasa sekaligus benih kejahatan mengerikan, dan kita baru menyaksikan dampak mula-mulanya di panggung dunia. Di seluruh lapisan masyarakat, konektivitas makin terjangkau. Kita akan mengakses jejaring internet nirkabel (*wireless*) yang semakin jauh lebih murah. Kita akan makin efisien, produktif dan kreatif. Masyarakat akan meloncati satu generasi teknologi. Mayoritas kita akan hidup, bekerja, dan bernegara di dua dunia (nyata dan maya) pada waktu yang sama, keserempakan.

Menurut Smchmidt dan Cohen: (1) teknologi bisa menjadi obat mujarab bagi "penyakit-penyakit dunia", tetapi jauh lebih penting adalah menggunakan teknologi secara cerdas untuk mengubah dunia, bahwa manusia fungsinya tidak akan pernah tergantikan oleh robot atau mesin komputer apapun, terkait dengan naluri dan pikiran yang mereka miliki; (2) dunia maya tidak akan menjungkirbalikkan tatanan dunia yang ada, tetapi akan memperumit hampir semua perilaku. Revolusi mungkin bisa dipicu melalui internet, tetapi negara bisa mereponsnya secara lebih kejam. Dalam konteks ini negara perlu menghadirkan dua kebijakan yang tampaknya saling bertentangan: terhadap dunia nyata dan dunia maya; Selanjutnya (3) kita juga dituntut untuk meredifinisi apa itu privasi, sebab perkembangan teknologi dan keberadaan internet selama ini telah membuat isu kebebasan pribadi, di mana negara harus merumuskan ulang batas-batas kebebasan pribadi itu sedemikian rupa.

Apa saja konsekuensi dari keberadaan internet?

Di atas telah dicatat bahwa "Internet berkembang makin besar dan makin kompleks tiap detik. Inilah sumber kebaikan yang luar biasa sekaligus benih kejahatan mengerikan, dan kita baru menyaksikan dampak mula-mulanya di panggung dunia." Ini manandakan bahwa kita berada dalam zaman yang berkelimpahan data, apa saja. Namun, Smchmidt dan Cohen yakin bahwa "manusia fungsinya tidak akan pernah tergantikan oleh robot atau mesin komputer apapun, terkait dengan naluri dan pikiran yang mereka miliki". Kita mungkin setuju dengan pandangan itu, tetapi, saya segera ingat adagium Millan Kundera yang teah dikutip di bagian awal buku ini, bahwa, "Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan melawan lupa". Maka, perjuangan kita di era digital ialah ikhtiar untuk merawat naluri dan pikiran yang kita miliki, sehingga laju cepat, kalau bukan supercepat informasi era digital, tak justru melinglungkan, membodohkan manusia dan menghilangkan kemanusiaan.

IMGVIRALER.COM

Internet tengah menjadi alun-alun desa global masa depan

- Bill Gates

The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.

Perjuangan kita di era digital, dengan kata lain ialah, perjuangan untuk menyeleksi, memfilter atas superbanyaknya informasi dan data, sedemikian rupa sehingga kita masih punya niat dan energi lebih untuk menyusuri kedalaman. Futurolog John Naisbitt mengatakan (dan ini telah saya kutipkan di depan): intuisi menjadi semakin berharga dalam masyarakat informasi baru justru karena ada begitu banyak data. Maka, dalam bahasa Naisbitt kita disambungkan dengan kata intuisi. Ia berfungsi sebagai penyaring agar kita tetap bijak dan cerdas, di tengah genangan informasi abad digital.

Tapi, apa intuisi yang dimaksud?

Sebenarnya pengertiannya sederhana saja. Ia dikaitkan dengan kontemplasi, suatu ikhtiar alamiah manusia untuk mencari yang otentik, yang asli, yang tepat dan objektif. Para pakar manajemen sering mengilustrasikan bahwa ketajaman intusi manusia bisa lebih mengalahkan kecanggihan teknologi apapun. Misalnya, dilukiskan pernah ada benda seni berupa patung yang diklaim berusia ribuan tahun. Teknologi canggih mengkonfirmasi kebenaran itu. Tetapi intuisi seorang kurator menolaknya. Dan setelah dicek lagi secara teknologis, patung itu memang palsu. Jadi, intusisi dalam hal ini, tetap merupakan hal yang rasional, masuk akal, sebab konteksnya ialah ketelitian.

Intuisi ialah filter yang paling akhir dari proses teknis cek dan ricek (*tabayun*) informasi dan data-data. Ada dimensi rasionalitas, pun kewajaran alias kepatutan pula kejujuran yang dikedepankan sebagai pertimbangan, tatkala intuisi bekerja. Manipulasi informasi dan data-data di era digital

yang supercanggih memang, kalau tidak hati-hati akan mengecoh semua orang. Yang palsu tampak asli. Yang salah tampak benar. Padahal cuma *hoax*. Maka, sekali lagi perjuangan kita di era digital menangkal *hoax*, sejatinya ialah perjuangan melawan kepalsuan.

Apa urgensinya pengelolaan pengikut di zaman digital dewasa ini?

Sesungguhnya semua itu dapat dirangkum dalam satu kata penjelasan: keterhubungan (*connected*). Perkembangan perangkat teknologi informasi di abad ke-21 ini telah diringkas oleh internet. Hampir "semua orang" telah menggenggam telepon cerdas sekarang. Gambaran sementaranya, disebut bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2014 telah mencapai angka 88,1 juta. Dengan demikian, jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 252,5 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna pada 2013.[19]

Tadi saya sebut tentang keterbuhungan, dan itu sesungguhnya menjelaskan konteks kekuatan jejaring sosial. Dalam bukunya yang berjudul *Connected*, Christakis dan Flower mencatat hakikat jejaring sosial itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi, yang lebih penting lagi ialah komunitas jejaring sosial.[20] Dikatakan bahwa, kominitas jejaring sosial itu merupakan sekelompok orang yang terhubung jauh lebih erat dengan sesama anggotanya ketimbang dengan kelompok orang-orang yang yang terhubung dalam bagian jejaring lainnya. Komunitas dibatasi oleh hubungan struktural, tak mesti oleh kesamaan sifat.

Apa yang dimaksud "hubungan struktural" ?

Christakis dan Flower menegaskan bahwa, suatu jejaring sosial ialah kumpulan orang terorganisasi yang memiliki dua unsur, yakni orang dan hubungan antar-orang. Memang, jejaring sosial alami biasanya tidak ditentukan dari atas. Dalam jejaring alami, orang berada di posisi yang berbeda-beda. Ada dua kata kunci dalam "aturan hidup" jejaring: hubungan dan penularan (*contagion*). kaidah-kaidahnya adalah: (1) kita membentuk jejering kita. Bahwa manusia sengaja membuat dan merombak jejering sosialnya sepanjang waktu. Kita sadar atau tidak cenderung mendekati halhal yang menyamai kita (apakah dalam hobi, pendapat, atau yang lain atau kalau dikaitkan dengan konteks jajak pendapat ialah preferensi sosiologis,

19 http://tekno.liputan6.com/read/2197413/jumlah-pengguna-internet-indonesia-capai-881-juta (diakses, 12 Desember 2015).

20 Christakis dan Flower (2010)

psikologis, dan ekonomis). Struktur jejaring akan terbentuk dalam hubungan dalam jejaring; (2) jejaring kita membentuk kita: orang yang tak punya banyak teman akan punya kehidupan yang amat berbeda dengan orang yang punya banyak teman; (3) teman mempengaruhi kita; (4) temannya teman mempengaruhi kita (penyebaran dari orang ke orang melampauai ikatan sosial langsung seseorang atau penyebaran hiperdyadik (*hiperdyadic spread*); (5) jejaring punya kehidupannya sendiri.

Bagaimana penjelasan yang terakhir itu?

Menurut Christakis dan Flower "jejaring punya kehidupannya sendiri" itu menunjukkan bahwa jejaring sosial memiliki sifat dan fungsi yang tak dikontrol maupun disadari oleh orang-orang di dalamnya. Sifat-sifat tersebut hanya dapat dipahami dengan mempelajari keseluruhan kelompok dan strukturnya, bukan dengan mempelajari individu-individu secara tersendiri. Jejaring sosial punya sifat emergen (*emergent properties*) yakni sifat-sifat baru suatu keseluruhan yang timbul dari interaksi dan saling terhubung antar-bagiannya. Gagasan emergensi (*emergence*) bisa dimengerti dengan kiasan: kue punya rasa yang tak ditemukan di satu pun bahannya. Rasa kue melampauai sekadar kumpulan bahannya. Begitu juga, dengan memahami jejaring sosial kita dapat memahami bagaimana keseluruhan benar-benar menjadi lebih besar daripada bagian-bagiannya. Masih menurut Menurut Christakis dan Flower, hal-hal berikut perlu kita camkan:

- Efek kuat jejaring sosial kepada perilaku individu dan akibatnya memberi kesan bahwa orang tidak punya kendali penuh atas pilihan mereka sendiri.
- Jika kita tak memahami jejaring sosial, maka kita tak dapat berharap memahami secara lengkap diri kita maupun dunia yang kita alami.
- Perilaku altruistik (sikap saling memberi) orang juga ditentukan oleh struktur jejaring sosial.[21]

Pola Hubungan Pemimpin-Pengikut

BAGAIMANA POLA-POLA hubungan pemimpin-pengikut?

Dalam teori kepemimpinan orang besar, jelas polanya, dipengaruhi oleh *mindset* bahwa pemimpin dan pengikut adalah takdir. Pemimpin adalah sosok yang *can do no wrong*. Ia "manusia setengah dewa". Polanya lebih banyak monologis, ketimbang dialogis. Pola yang nyaris sama terjadi pada

21 Christakis dan Flower (2010)

FASTCOMPANY.COM

Dalam era digital, privasi harus menjadi prioritas

- Al Gore

In digital era, privacy must be a priority.

konteks kepemimpinan birokrasi, tetapi, semua didasarkan pada aturan yang berjenjang dan rasional. Bawahan harus taat pada atasan dalam konteks struktural organisasi. Jadi ada kepatuhan struktural di sini. Cara pandang yang lebih baru alias modern, menggambarkan adanya pola sejajar antara pemimpin dan pengikut, yang memperhatikan kualitas interaksi di antara mereka. Pola sejajar ini, menurut catatan Wirawan, terbagi menjadi tiga: pola transaksi, pola transformasi, pola rotasi, dan pola demokratis. Dan masih ada satu lagi pola hubungan paternalistik.[22]

Baik. Mungkin itu yang penting. Kalau pola transaksi, bagaimana?

Antara pemimpin dan pengikut punya kedudukan yang sejajar fungsional. Proses interaksinya terjadi dengan melibatkan tawar-menawar antara pemimpin dan pengikut dalam "mendapatkan sesuatu" atau insentif. Artinya antara pemimpin dan pengikut bersama-sama bernegosiasi untuk memperoleh insentif yang layak untuk disepakati bersama. Siapa dapat apa. Tanpa kesepakatan insentif yang jelas, maka organisasi akan stagnan, dan

22 Wirawan (2003:58).

Anda dapat membeli jaringan; Anda tidak bisa membeli persahabatan

- Lindsay Fox

You can buy networking; you can't buy friendships.

tujuan organisasi akan semakin menjauh.

Kalau dalam pola transaksional struktur insentif penting, bagaimana dengan pola transformasional?

O, kalau itu sesungguhnya nyaris sama polanya dengan transaksional. Hanya saja struktur insentifnya adalah motivasi. Baik terutama pemimpin maupun pengikut, saling memotivasi untuk mencapai tujuan bersama, tujuan organisasi. Idealnya pemimpin transformatif ialah yang mampu mengarahkan motivasinya secara kuat pada para pengikut, sehingga mereka bergerak bersama-sama untuk kesuksesan organisasi. Ide-ide pemimpin mampu diterjemahkan dengan tepat oleh para pengikut, dan jalannya organisasi menjadi kian efektif.

Kalau pola rotasi?

Sebagaimana dicatat Wirawan dari Ira Chaleff dalam bukunya *The Courages Follower, Standing Up to and for Our Leaders* (1995), pola rotasi itu artinya, pemimpin dan pengikut sama-sama mengitari atau mengorbit pada tujuan. Mereka berorientasi tujuan. Para pengikut tidak mengorbit mengelilingi pemimpin. Bukan pemimpin yang "matahari", tetapi tujuanlah yang dikelilingi planet-planet dalam tata-surya.[23] Ini menarik, karena pengikut bukan subordinasi pemimpin, karena keduanya punya tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Karena itu, dalam hal ini, kalau bicara loyalitas pengikut dan pemimpin, konteksnya ialah loyalitas pada tujuan bersama organisasi.

Kalau pola demokratis?

Dalam pola demokratis, pengikut punya kedudukan yang sama dengan pemimpin, karena pada mulanya pemimpin adalah pengikut juga. Pemimpin adalah salah seorang atau beberapa orang yang dipilih oleh mereka (rakyat), untuk memimpin para anggota dalam sistem sosial. Tidak ada pemimpin seumur hidup dalam pola demokrasi, karena mereka diangkat atau dipilih untuk periode kepemimpinan formal yang terbatas. Pemilihan terjadi secara reguler. Regenerasi kepemimpinan dijamin dengan mekanisme yang demokratis, yang melibatkan partisipasi publik.

23 Wirawan (2003:59).

Kalau pola paternalistik itu yang seperti apa?

Pemimpin lah yang dominan, kalau bukan hegemonik! Para pengikut tidak bisa berkata tidak akalau diperintah sang pemimpin. Polanya, sang pemimpin dianggap sebagai sosok arif bijaksana, yang selalu wajib untuk dimintai petunjuk dan bimbingan pada para anak-buah atau pengikutnya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan (sang pemimpin). Anak-buah dikunci inisiatifnya, untuk terbiasa menunggu "petunjuk bapak" pimpinan.

Pola paternalistik ini, biasanya disosialisasikan sebagai hubungan bapak-anak, dimana bapak adalah sosok yang *can do no wrong*, dan tidak boleh dilawan! Hubungan demikian mirip dengan hubungan antara mentor dengan *protege*, antara guru-besar dengan para mahasiswanya, antara pendeta dengan para cantriknya, antara ustad dengan santrinya. *Protege* adalah orang yang dibimbing mentor. Bedanya, proses mentorisasi mendudukkan mentor sebagai pelatih, konselor dan panutan ke dalam suatu *role model*.

Kalau dikaitkan konteks era digital, di mana sosial media telah menjadi kelaziman, pola mana yang paling pas?

Pola demokrasi. Mengapa? Jelas internet merupakan benda yang mampu merevolusi perilaku politik, di mana publik punya kesempatan yang "sama" dalam berpendapat dan melontarkan pilihan. Internet telah menjelmakan dirinya sebagai wahana kekuatan opini masyarakat. Karenanya, siapapun pemimpin tidak kebal dari penilian warganya secara terbuka melalui media sosial. Lazim dewasa ini para pejabat politik, pun presiden mempunyai akun sosial media, terutama yang paling menjadi tren ialah *twitter*. Dunia maya perlu dikelola. Di sini tak ada tempat bagi otoritarianisme, karena sikap-sikap otoriter yang keluar dari pemimpin, berpeluang untuk langsung dikeroyok oleh para penghuni media sosial, baik yang non-anonim maupun yang anonim. Soal akun anomin dalam *twitter* atau yang lain memang seringkali merupakan satu hal yang tak terhindarkan. Karenanya, pemimpin harus punya kemampuan mengelola media-sosialnya dengan baik: tak mudah terpancing, tetap bijak, dan juga tidak justru memancing kemarahan publik. Biarkan perundang-undangan mengatur dunia maya sedemikian rupa, sehingga dimensi keadilan tetap terjaga: kebebasan publik terjamin dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan — apabila semua dilakukan pada koridornya.

Efektivitas Pengikut

BAGAIMANA KEPENGIKUTAN dapat dikatakan efektif?

Baik. Di atas sudah ditekankan bahwa kepengikutan yang efektif akan

menentukan efektifitas kepemimpinan. Menurut Robert E. Kelley dalam *In Praise of Followers* (1996), sebagaimana dikutip Wirawan, pengikut yang efektif adalah pengikut yang antusias, cerdas, percaya diri, tanpa menagih bintang jasa dalam mencapai tujuan organisasi. Para pengikut yang efektif mempunyai motivasi untuk mengikuti persepsi positif mengenai peran mereka. Indikator-indikatornya, nyaris sama dengan yang harus dimiliki oleh para pemimpin: (1) integritas, yang ditunjukkan dengan melekatnya identitas dan implementasi norma dan budaya organisasi; (2) kemandirian, mampu menterjemahkan visi kepemimpinan; (3) memiliki kompetensi yang tinggi; (4) adaptif; (5) kesiapan yang tinggi; dan (6) berani.[24]

Yang terakhir itu menarik: berani. Apa maksudnya?

Sebagaimana dicatat Chaleff, pengikut harus punya lima keberanian (*courage*): (1) berani memikul tanggung jawab; (2) berani melayani; (3) berani untuk menantang atau menghadapi tantangan; (4) berani berpartisipasi dalam perubahan/transformasi; dan (5) berani untuk melakukan aksi moral, bahkan untuk bersikap berbeda dengan pemimpin.[25] Yang terakhir ini menarik, pengikut boleh berseberangan dengan pemimpin dalam hal apabila pengikut punya keyakinan moral lebih tinggi ketimbang pilihan dan sikap pemimpin. Tetapi, hal ini memang berisiko: pemimpin yang tak bijak akan memberi tindakan yang lazim: mencopotnya dari posisi jabatannya, betapapun tundakan pengikut ialah untuk kebaikan organisasi.[26]

Mengapa perlu ada keberanian untuk menantang? Apa maksudnya? Kenapa pula ada syarat "berani meninggalkan pemimpin"?

Ada pepatah Melayu yang rasional-demokratis: "Raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah!" Berani menantang itu berani menyatakan kritik dan ketidaksetujuan atas ketidakadilan pemimpin. Pengikut yang baik adalah yang berani berkata "tidak" pada pimpinannya, apabila memang pimpinannya itu keliru, tidak benar dan tidak adil. Artinya pengikut berani untuk mengkritik. Dan pemimpin yang baik, mestinya tidak anti-kritik. Berani meninggalkan pemimpin dengan cara menarik diri atau menarik dukungan wajar dalam demokrasi, ketika aspirasi, visi dan misinya sudah tidak sejalan lagi. Pemimpin yang sudah melakukan kedzaliman dan kesalahan fatal dan berakibat pada ketidak-seimbangan dan kemerosotan sistem sosial, adalah pemimpin yang gagal, dan pantas ditinggalkan.

24 Wirawan (2003:64).

25 Chaleff (2009:6-9).

26 Chaleff (2009:8).

Pemberdayaan Pengikut

PEMIMPIN YANG baik ialah yang mampu memberdayakan pengikut. Bukankah begitu?

Memberdayakan? Satu istilah yang tepat. Pemimpin memang harus memberi kail, bukan ikan pada pengikutnya. Artinya, struktur insentif yang di bangun oleh pemimpin, mestinya tidak semata-mata jangka pendek dan pragmatis-materialistis. Dengan memberi kail, maka pengikut berkesempatan mengembangkan kualitas-kualitas kepengikutan dengan optimal, alami, genuine dan otentik. Memang dibutuhkan beberapa program untuk memperkuat upaya pemberdayaan pengikut itu: (1) melalui *training* atau pelatihan; (2) pemahaman, komitmen dan konsistensi atas tata tertib dan budaya organisasi; (3) mampu berdialog secara cerdas dengan pemimpin, dan berani untuk melancarkan kritik yang konstruktif; (4) mampu mengembangkan kerja tim alias mampu bekerja sesuai dengan koordinasi yang efektif dengan pemimpin dan jejaringnya.

Apa bedanya pemberdayaan pengikut dan kader?

Hakikatnya sama saja. Istilah perkaderan lebih familiar dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi politik. Kader atau *cadre* (dari bahasa Perancis adalah tulang punggung sebuah organisasi (politik).[27] Kelas seorang kader lebih tinggi ketimbang pengikut biasa. Kader lebih militan ketimbang pengikut apalagi simpatisan biasa. Kader bukanlah sosok-partisipan yang statis, tetapi dinamis alias amat aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Mereka siap untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam organisasi dan giat dalam menjalankan aktifitas-aktifitas fungsional organisasi. Dikader berarti dipersiapkan untuk siap secara regenerasional menerima tongkat estafet kepemimpinan.

O, jadi perkaderan itu sangat penting?

Jelas. Organisasi politik perlu orang-orang atau sumberdaya manusia yang punya kualitas tinggi. Organisasi politik perlu politisi. Dalam bagian buku ini tentang pemimpin politik, sudah dijelaskan bahwa politisi itu pengabdi, bukan pekerja profesional yang kehidupan materialnya bergantung padanya. Menjadi politisi karena memang ada panggilan mulia. Dalam partai politik, misalnya, karenanya dibutuhkan sosok-sosok politisi yang berkualitas. Politisi-politisi sejati. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila organisasi mampu melakukan proses perkaderan dengan baik.

27 Wikipedia.org

Tapi, sebagaimana dunia eksekutif-bisnis, sejauhmana partai boleh melakukan perekrutan non-kader?

Tetapi dalam alam politik yang demokratis, di mana peluang politik terbuka tidak hanya dalam satu partai politik saja, terkadang proses perkaderan terkesan sia-sia, kalau akhirnya posisi-posisi strategis partai diduduki oleh sosok-sosok "kos-kosan". Istilah *kos-kosan* mirip dengan *bolo dupakan* dalam pertunjukkan tradisional Jawa *Ketoprak*, merujuk pada pengertian mereka merupakan *pemain* bisa diambil sewaktu-waktu, dan sewaktu-waktu pula bisa dimohon untuk minggir. Istilah politisi *kos-kosan* menggambarkan sosok yang serta-merta melejit di struktural partai, padahal dia bukan kader sejak awal.

Bagaimanapun, parpol harus aktif dalam mencari orang-orang luar yang siap diambil sebagai kader, di samping pengembangan dan pemberdayaan kader-kader yang sudah ada/*antre*. Para artis, biasanya selalu laris untuk dipinang partai-partai sebagai *vote getter* alias penarik suara. Para cendekiawan juga demikian. Tetapi, partai-partai lazim memiliki mekanisme internal yang menghormati proses perkaderannya sendiri, sehingga mereka yang diambil tetap harus mengikuti jenjang karir di sana. Tentu saja adaptabilitas kepengikutan berfungsi di sini. Apakah pengikut dapat memahami orang luar yang menjadi kader istimewa partainya, ataukah menolak. Daya terima dan daya tolaknya besar mana? Pemimpin partai punya peran penting untuk meyakinkan para pengikutnya atas hal-hal demikian, sehingga soliditas dan harmoni partai tetap terjaga. Pengikut yang berdaya dan cerdas memang akan selalu kritis dengan fenomena-fenomena demikian.

Setelah era demokrasi langsung, partai politik sebagai lembaga tampak "terdesakralisasi", dan individu sering lebih penting. Pengikut dihadapkan pada dilema ...

Baik. Saya paham maksud Anda. Artinya, kalau mau diringkas pertanyaannya begini: mau loyal pada organisasi atau individu dalam sebuah proses demokrasi langsung? Begitu kan?

Persis. Itu yang dimaksud ...

Loyalitas mengalami keterbelahan dalam kasus-kasus pemilihan presiden dan juga kepala-kepala daerah. Misalnya, tokoh A sangat populer dan telah menjadi sosok panutan Partai P. Dalam pemilihan presiden, Partai P malah mencalonkan tokoh B. Maka, pengikut menjadi sangat dilematis: kalau tidak mendukung B, maka ia langsung dicap tidak loyal pada parpol. Tetapi sangat absurd apabila mereka menginggalkan A begitu saja. Sementara itu A telah menyatakan kesediannya dicalonkan Partai F. *Nah*, para pengikut dibikin pusing kan? Padahal kasusnya sederhana. Tetapi, kemu-

dian demokrasi langsung membagi dua jenis pengikut atas dasar keloyalannya: (1) yang loyal pada organisasi; dan (2) pada sosok.

Yang loyal pada organisasi, seperti Kumbakarna membela Negara Alengka, padahal Rahwana alias Dasamuka sang Raja, jelas salah karena telah menculik Dewi Shinta. Begitukah?

Mungkin ibaratnya begitu. Kumbakarna adalah jenis satria yang loyal pada organisasi. Karenanya dengan alasan membela negara, ia terpaksa berhadapan dengan pasukan kera yang menyerbu Alengka untuk membebaskan Shinta yang diculik Dasamuka. Itu terjadi dalam epos Ramayana. Kumbakarna sering memberikan nasihat kepada Rahwana menyadarkan bahwa tindakannya keliru. Ketika Rahwana kewalahan menghadapi Sri Rama, ia menyuruh Kumbakarna menghadapinya. Kumbakarna sebenarnya tahu kakaknya salah, tetapi demi membela Alengka tanah tumpah darahnya dia pun maju sebagai prajurit melawan serbuan Rama. Kumbakarna sering dilambangkan sebagai perwira pembela tanah tumpah darahnya, karena ia membela Alengka untuk segala kaumnya, bukan untuk Rahwana saja, dan ia berperang melawan Rama tanpa rasa permusuhan, hanya semata-mata menjalankan kewajiban.[28]

Dengan mengambil perumpamaan itu, maka mestinya Gunawan Wibisana, termasuk ksatria yang membela sosok yang dianggapnya benar. Wibisana adalah tokoh protagonis. Ia adalah adik kandung Rahwana yang masih saudara Kumbakarna dan Surpanaka. Di antara saudaranya, Wibisana yang paling baik. Sifatnya tidak seperti raksasa pada umumnya meskipun ia merupakan keturunan raksasa. Setelah gagal membujuk kakaknya untuk mengembalikan Shinta kepada Rama, Wibisana memutuskan untuk berpihak pada Rama yang diyakininya sebagai pihak yang benar. Hal ini berarti dia harus melawan kakaknya sendiri (Rahwana) demi membela kebenaran.[29] Wibisana merupakan tokoh yang menunjukkan bahwa kebenaran itu menembus batas-batas nasionalisme, bahkan ikatan persaudaraan.

Jadi, saran Anda?

Tergantung konteksnya. Pengikut lebih tahu pilihannya sendiri ketimbang orang lain. Baik Kumbakarna maupun Wibisana, sama-sama ksatria. Pengikut bertipe Kumbakarna dan atau Wibisana, tentu punya alasan masing-masing. Yang penting etika politik dipatuhi, demokrasi berjalan secara fair, tanpa harus ricuh dan *gontok-gontokan* satu sama lain, yang ujung-ujungnya adalah kerusakan dan kemunduran. Begitukah?

---

28 Wikipedia.org. Lihat juga, Kosasih (2010).

29 Wikipedia.org

O, jadi Anda membenarkan pembelotan?

Tidak juga. Tetapi pengikut yang mandiri dan cerdas, sebagaimana dipaparkan di atas, punya hak untuk itu bukan? Pembelotan mungkin istilah yang terlalu kasar. Kita harus lihat konteksnya dan kita dudukkan dan nilai secara obyektif. Itu akan lebih baik, bukan? Kalau saja sebuah organisasi politik telah terinstitusionalisasi dengan baik, maka dilema-dilema semacam itu tidak akan muncul. Mengapa? Karena ada mekanisme manajemen konflik yang baik.

Bagaimana pula dengan manajemen konflik itu?

Dalam internal organisasi, apapun, konflik harusnya dipandang secara positif. Konflik itu bagian integral dari dinamika organisasi yang bisa jadi membuat organisasi bisa tumbuh dewasa. Pandangan positif tentang konflik adalah pandangan baru yang obyektif dan bijak — untuk membedakan dengan pandangan lama dan negatif.

Pandangan baru melihat konflik menegaskan beberapa hal : (1) konflik tidak dapat dihapuskan, dilenyapkan, karena konflik adalah realitas; makanya harus dikelola; (2) konflik bukan musuh, walaupun ia akan selalu hadir selaten atau sepotensial apapun.

Manajemen konflik mengatur pengelolaan konflik secara *win-win solution*. Tidak menang-menangan alias *zero sum game*, *tumpas kelor*, alias *tiji tibeh* atau "mati *siji* (satu) mati *kabeh* (semua)". *Win-win solution* adalah "*menang tanpa ngasorake*". Tanpa merendahkan semua pihak, masing-masing merasa menang. Dalam *Oxford Concise Dictionary of Politics*, *zero sum game* diartikan,

> *A contest in which one player's loss is equal to other player's gain. ... Games may be divided into two classes, zero-sum and non-zero-sum. The class where the sum of the winnings of all the players is the same in all outcomes may be called 'constant-sum'. But as pay-offs can always be mathematically rescaled, it is convenient and normal to call them 'zero-sum'.*[30]

Jadi, *zero sum game* itu fatal?

Tepat. Sudah cukup banyak pelajaran dari bagaimana Sekutu mengakhiri Perang Dunia II, tatkala bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Agustus 1945. Dalam perang memang berlaku rumus *zero sum game*, apabila cara lain sudah tak bisa ditempuh lagi. Ahli strategi Clausewitz cenderung menyarankan pola *zero sum game* ini. Saran-sarannya banyak beda dengan ahli staregi China Sun Tzu. Sun Tzu tidak menyarankan pola *zero*

30 McLean dan Mc Millan (2003).

sum game dalam peperangan. Soal ini sudah kita singgung sebelumnya. Pola *zero sum game* selalu memakan korban. Berapa jumlah korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki? Mengapa para penduduk sipil yang tak tahu-menahu banyak yang jadi korban? O, betapa peristiwa tersebut sungguh sangat mengerikan — di mana selalu menghantui kehadirannya setiap ancaman perang nuklir terjadi.

Jelasnya, bagaimana jalan penyelesaian konflik itu?

Setidaknya ada tiga pendekatan yang perlu kita catat di sini:

- *Pertama*, penyelesaian secara dialogis antar-pihak berkonflik, saling mengklarifikasi dan menuntaskan persoalan secara obyektif dan bijak.
- *Kedua*, ada mediatornya. Artinya mediator bertindak sebagai penengah yang mendamaikan. Mediator diterima pihak-pihak berkonflik.
- *Ketiga*, kalau alternatif satu dan dua gagal, maka ujungnya adalah penyelesaian secara hukum alias melalui jalur arbitrase. Pangadilan lah yang bertindak sebagai wasit dalam menangani perkara konflik ini.

Metode satu dan dua, orientasinya *win-win solution*. Kalau sudah masuk ke pengadilan maka potensi untuk *win-lose*, besar. Kalau pengadilan gagal mendamaikan, maka risikonya adalah penyelesaian menang-kalah. Contohnya konflik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjelang Pemilu 2009: kubu PKB-Abdurrahman Wahid (Gus Dur) *versus* kubu PKB-Muhaimin Iskandar. Gus Dur adalah ketua Dewan Syuro partai berbasis massa *Nahdlatul Ulama* (NU) ini. Sedangkan Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB. Konflik itu tidak dapat diselesaikan secara "kekeluargaan" di internal, sehingga proses pengadilanlah yang terjadi. Hasilnya kubu PKB-Muhaimin diputuskan menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pun segera meneken kepengurusan yang versi Muhaimin Iskandar yang berhak mengajukan daftar calon anggota legialatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelesaian lewat jalan arbitrase demikian tidak selalu memuaskan pihak yang dikalahkan.

Penyelesaian konflik internal demikian juga pernah terjadi pada beberapa partai lain. Anda bisa cari contoh-contohnya, termasuk bagaimana Partai Golkar dan PPP yang juga pernah dilanda konflik politik internal berlarut-larut.

Tapi, biasanya konflik partai politik berujung pada terbentuknya partai-partai baru?

Terbentuknya partai politik baru sebagai perkembangan lebih lanjut dari konflik internal partai politik itu lazim saja. Di mana pun demikian. Saya ambil contoh di Turki. Di sana ada fenomena kemunculan dan kejayaan

FILMSCHOOLTHRUCOMMENTARIES.COM

Politik itu sangat menarik dan selalu menimbulkan konflik

- Ridley Scott

Politics is very interesting and always leads to conflict

Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kulkilna Partisi*, AKP). Partai ini terbentuk pada tahun 2001, setahun sebelum pemilu 2002. Yang membentuk ialah elite-elite penting, yang dulu berkiprah di Partai *Refah* pimpinan Necmettin Erbakan. *Refah* dibubarkan menyusul kudeta posmodern pada 1997. Para aktivisnya lantas terbelah ke dalam dua faksi penting: konservatif dan "reformis". Yang "reformis" itulah yang mendirikan AKP. Disebut "reformis" karena mereka memilih membuat eksperimen politik baru yang sama sekali lain dengan "jalan konservatif" yang ditempuh Erbakan sebagai "guru politik" mereka. AKP menampilkan pilihan-pilihan politik baru, dengan visi dan simbol-simbol yang lain dengan kelanjutan *Refah*, yakni Partai Kebaikan (*Fazilet Partisi,* FP). Lantas, pada praktiknya, AKP lebih berjaya ketimbang partai yang masih menuruti jalan konservatif Erbakan.[31]●

31 Tentang hal ini, lihat Alfian (2015).

Bab 19

Strategi dan Pemasaran Politik

Strategi

APA PENTINGNYA strategi?

Strategi itu pemikiran mendasar mengenai cara untuk mencapai tujuan. Tujuan tak dapat dicapai tanpa adanya upaya jitu untuk mencapainya. Nah, dalam konteks ini penting sekali kita membahas tentang hal-ikhwal strategi ini. Istilah strategi sendiri dalam keseharian bukanlah merupakan kata yang asing lagi. Tetapi apa strategi? Kamus *Merriam Webster* memaknai *strategy* sebagai: *... the science and art of employing the political, economic, psychological, and military forces of a nation or group of nations to afford the maximum support to adopted policies in peace or war ... the science and art of military command exercised to meet the enemy in combat under advantageous conditions.*[1] Rupanya istilah strategi tidak dapat dipisahkan dari khazanah kemiliteran. Menurut Luttwak, kata strategi (*strategie* dalam bahasa Perancis, *strategia* dalam bahasa Italia) diturunkan dari kata *strategos* (jenderal) dari bahasa Yunani, yang terkait dengan *strategike episteme* (pengetahuan jenderal) atau *strategon sophia* (kebijakan alias kearifan jenderal). Sementara *strategema*, bermakna muslihat perang (*tricks of war*).[2]

1 Merriam-webster.com

2 Lutwakk (1987)

Strategi itu jenderal?

Dalam jenjang kepangkatan militer, jenderal adalah pemimpin tertinggi. Militer memiliki strtuktur organisasi komando. Apa yang diperintahkan atasan, maka harus dipatuhi. Seorang militer dengan pangkat terendah harus taat pada yang pangkatnya lebih tinggi, demikian seterusnya. Jenderal adalah pimpinan tertinggi mereka. Mengapa disebut jenderal, karena ia dianggap "tahu segalanya" dan memiliki kewenangan eksekusi. Soerang jenderal adalah "generalis", "tahu sedikit tentang banyak hal" — untuk membedakan dengan "spesialis", "tahu banyak tentang sedikit hal". Bandingkan misalnya antara dokter umum dengan dokter spesialis. Dokter umum diasumsikan "tahu segalanya", generalis. Ia tahu peta penyakit dan memiliki kemampuan untuk mendiagnosis bermacam penyakit. Tapi, hanya sebatas itu, sebab kelak, ia akan melimpahkan kasus-kasus yang tak dapat ditanganinya ke dokter spesialis, yang lebih paham.

Jenderal itu seperti dokter umum. Ia seperti pula manajer puncak alias *Central Executive Office* (CEO), yang membawahi manajer-manajer spesialis di bidangnya masing-masing, sesuai dengan fungsi yang dibangun. Kita pahami mengapa, kearifan jenderal ditunggu-tunggu. Kalau seorang militer sudah menjadi jenderal, pimpinan tertinggi dalam sebuah angkatan perang, maka ia tidak sekedar merupakan "militer biasa", ia adalah filosof, yang bergelut pada upaya untuk menemukan sebuah *wisdom* (kebijaksanaan). Maka, seorang jenderal ialah juga sosok *pasca-militer*. Ia menetapkan strategi untuk memenangkan peperangan (*war*), dengan didasari oleh segenap kemampuan analisis dan kebijaksanaan yang dimilikinya.

Pengertian strategi tampaknya sudah jauh berkembang, tidak saja terbatas pada konteks militer...

Benar. Kelihatannya ilmu manajemen, telah banyak mengembangkannya secara khusus ke dalam manajemen strategi — walaupun banyak dibatasi pada bisnis usaha atau perusahaan. Kalau pada militer, strategi diperlukan untuk memenangkan peperangan — dalam arti yang luas — maka dalam manajemen strategi perusahaan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan secara optimal. Dalam hal ini misalnya dikenal ada konsep *balanced scorcard*. Ia merupakan konsep yang diperkenalkan Kaplan dan Norton untuk mengatasi problem keuangan perusahaan, tetapi kemudian berkembang dalam penyusunan rencana strategi dan menjadi inti dari sistem manajemen strategis.[3]

Bagaimana penjelasan tentang pandangan strategi dalam

3 Kaplan dan Norton (2000); Mulyadi (2001).

Hakikat strategi adalah memilih apa yang tidak dikerjakan

- Michael E. Porter

The essence of strategy is choosing what not to do.

konteks perang?

Dari bacaan klasik, misalnya kita ketemu Sun Tzu (seorang jenderal China 500 tahun SM) dan Clausewitz (1780-1831). Beberapa pandangan Sun Tzu, sudah banyak kita kutip. Sebagaimana Sun Tzu, pandangan Clausewitz hampir senada bahwa strategi ialah bagaimana memenangkan peperangan.

Bisa diringkaskan pandangan Clausewitz?

Baik. Ia merupakan pakar strategi militer klasik asal Prusia Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz.[4] Bukunya yang termasyur *On War*, selama beberapa abad dipakai rujukan para pakar strategi perang — selain litaratur klasik lain, semisal *The Art of War* karya Sun Tzu, ahli strategi militer China. *On War* dibagi delapan tema: sifat alami peperangan; teori peperangan; strategi; ikatan; kekuatan militer; pertahanan; serangan; dan rencana peperangan.

Soal Clausewitz sendiri, siapa ia?

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz lahir 1 Juni 1780, di dekat Magdeburg dari keluarga Jerman dan patriot Prusia. Pada masa tuanya, Clausewitz pernah memperoleh jabatan pada suatu komisi pengawas angkatan perang Frederick Yang Agung (*The Great Frederick*).

Clausewitz berbicara tentang perang. Apa yang dimaksud dengan perang?

Clausewitz mendefinisikan peperangan dengan gambaran sederhana. Catatnya,

> Peperangan adalah tak lain adalah suatu duel dalam skala luas. Jika kita terbiasa melakukan duel dan merias suatu peperangan, maka tentu kita akan melakukan yang terbaik. Misalnya kita dua pegulat. Maka, masing-masing akan bekerja keras untuk secara fisik memaksa yang lain dan mengalahkan kehendaknya. Yang pertama harus dilakukan ialah melemparkan musuhnya, dan dengan begitu dia tidak mampu untuk melakukan pembalasan lebih lanjut.[5]

Gambaran perang, dengan demikian amat fisikal. Yakni penggunaan

4 Clausewitz (1982).

5 Clausewitz (1982).

kekuatan dan kekerasan untuk saling mengalahkan. Tetapi, bukan lantas sebuah duel sekedar duel, yang tak punya maksud dan tujuan apa-apa. Perang punya maksud yang jelas. Berikut ini beberapa catatan atas pendapat Clausewitz:

- Peperangan adalah suatu tindakan kekerasan untuk memaksa lawan untuk memenuhi kehendak kita. Dalam rangka mencapai tujuan secara penuh, musuh harus dilucuti senjatanya.
- Hasil berperang tidak pernah absolut. Status yang ditaklukkan sering hanya merupakan suatu malapetaka, yang mungkin diperbaiki setelah ada tindakan *politis*.
- Bagi Clausewitz, "*War is a mere continuation of policy by other means*." Perang adalah semata-mata merupakan lanjutan atas kebijakan (politik) dengan cara lain.
- Peperangan tidaklah melulu saja merupakan kelanjutan dari tindakan politis, tetapi juga suatu instrumen politis riil, suatu lanjutan dari "perdagangan" politis, suatu penyelesaian dengan cara yang lain.

Apa makna strategi menurut Clausewitz?

Menurut Clausewitz strategi adalah teori penggunaan pertempuran untuk obyek peperangan. Strategi, menurut Clausewitz adalah perangkat pertempuran untuk memperoleh ujung peperangan; dan memberi suatu tujuan kepada seluruh tindakan militer, yang harus sejalan dengan obyek peperangan. Dengan kata lain,

> ... strategi membentuk rencana peperangan, dan menghubungkan rangkaian tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Dimulai dari membuat rencana kampanye yang terpisah, hingga mengatur pertempuran untuk dilancarkan pada setiap. Strategi harus menemani angkatan perang dalam rangka menyusun, memodifikasi keperluan-keperluan perang.[6]

Unsur-unsur strategi, menurut Clausewitz terdiri dari: (1) moral, meliputi semua yang dapat ditimbulkan oleh kualitas dan pengaruh moral; (2) fisik, meliputi anggota keseluruhan massa kekuatan militer, organisasinya, senjatanya, dan sebagainya; (3) perhitungan matematis, meliputi garis operasi, pergerakan, dan perhitungan-perhitungan geometris; (4) unsur-unsur statistik dan geografis, meliputi kondisi negeri, seperti bukit, sungai, hutan, jalan, dan sebagainya ditambah segala persediaan yang ada.

Strategi poisinya lebih tinggi, dan berada pada pimpinan yang sanggup memerintahkan, mempengaruhi pikiran, pemahaman, dan mendominasi

6 Clausewitz (1982).

aktivitas, menumbuhkan keberanian. Strategi mempunyai suatu pengaruh pada atas setiap isu pertempuran. Dalam konteks ini pentinglah makna stratagem. Tipu daya (*stratagem*) menyiratkan suatu niat dirahasiakan, dan oleh karena itu dipertentangkan dengan berhadapan secara langsung. Dengan kata lain, menurutnya, strategi adalah suatu pembaruan usaha dan suatu tindakan gigih pemimpin ke arah kesuksesan.

Soal moral, mengapa ditempatkan di nomor satu?

Sebagaimana Sun Tzu, menurut Clausewitz, kekuatan moral adalah di antara pokok yang paling utama berperang. Ia adalah roh yang menyebar ke seluruh bagian unsur peperangan, yang menggerakkan dan memandu keseluruhan kekuatan massa, bersatu dengannya sebagaimana di dalam satu arus. Kualitas moral, catatnya, menghidupkan suatu angkatan perang. Peperangan adalah suatu urusan khusus. Diingatkan bahwa, kebaikan militer (*military virtue*) ialah bagian dari kejeniusan pemimpin. Kebaikan militer ialah mutu angkatan perang.[7]

Baik. Sekarang kita lihat konsepsi strategi menurut pakar yang lebih modern..

Kita perkenalkan dua penulis tentang strategi di masa modern, yakni BH Lidell Hart[8] dan Edward Luttwak. Masing-masing kita cuplikkan garis besar pendangannya.

Silakan ...

Menurut Hart, pemikiran tentang strategi telah mengalami perkembangan. Strategi ia definisikan sebagai seni mendistribusikan dan mengaplikasikan cara-cara militer dalam rangkaian kebijakan terakhir. Strategi tidak melulu terkait dengan bergeraknya kekuatan, tetapi juga efeknya. Tatkala instrumen-instrumen militer terlibat dalam sebuah pertempuran yang nyata, disposisi dan kontrol kendali secara langsung disebut taktik. Taktik adalah aplikasi atas strategi tingkat rendah, strategi ialah aplikasi tingkat rendahnya *grand strategy* atau *higher strategy*.

Grand strategy mengkoordinasikan dan mengarahkan semua sumber daya suatu bangsa, atau berbagai negara, ke arah pencapaian obyek yang politis peperangan. Ia juga mengkalkulasikan sumberdaya ekonomi dan sumberdaya manusia yang ada — bahkan juga sumberdaya moral. Ia juga meregulasikan distribusi kekuasaan antara industri dan jasa. Bahkan kekuatan perang yang merupakan instrumen *grand strategy* itu terkait pula

7 Clausewitz (1982).

8 Hart (1974).

dengan bagaimana melancarkan tekanan finansial, tekanan diplomatik, tekanan perdagangan, bahkan juga tekanan etik. Tetapi, ia juga memandang ke depan bagaimana seusai perang dan menciptakan perdaiaman pasca-perang.

Menurut Hart, strategi bertujuan merusak kekuatan lawan. Secara fisik hal itu ditandai: (a) munculnya gangguan terhadap musuh dan, memaksa secara mendadak "perubahan medan", sehingga mereka harus memindahkan organisasi dan distribusi kekuatannya; (b) memisahkan (memecah) kekuatan lawan; (c) membuat persediaan (perlengkapan) mereka dalam kondisi bahaya; (d) mengancam rute-rute perjalanan lawan, sehingga mereka bisa terpukul mundur, dan menyusun kekuatan ulang.

Kesimpulanya, menurut Hart, seni strategis tidaklah sederhana. Bagi Hart, metode perencanaan dan aksi strategis berubah dari waktu ke waktu. Tetapi, berdasarkan tujuannya, ada beberapa varian metoda yang bisa dikembangkan: (1) metoda yang berkonsentrasi atas tujuan tunggal — melawan satu sasaran; (2) metoda yang berkonsentrasi atas tujuan serial — melawan atas sasaran berurutan; (3) metoda yang berkonsentrasi atas tujuan yang terbagi-bagi — melawan nomor-nomor sasaran secara simultan.

Baik. Bagaimana pandangan Luttwak?

Luttwak mencuplik peribahasa Latin diambil dari kebijaksanaan Romawi (*Roman wisdom*): *si vis pacem, para bellum*, artinya kalau mau damai, persiapkan perang.[9] Frasa ini ditampilkan Luttwak pertama kali dalam membahas logika strategi. Apa yang menarik? Nuansa paradoksal dan kontradiktifnya. Logika paradoksal di atas, tampak amat menguntungkan si Kuat. Asumsinya, si Lemah harus ditaklukkan, dan menyerahkan 'kedaulatannya' kepada si Kuat, termasuk dalam penataan perdamaian dan pembentukan pemerintahan baru — sebagaimana kasus Irak, Libya, dan lain-lain dewasa ini.

Apa bedanya perang dan tempur?

Istilah perang (*war*), pertempuran (*battle*), dan penyerangan (*combat*), berbeda-beda pengertiannya. Perang berada di dataran strategis, ia mencakup keseluruhan proses yang berlangsung pra hingg pasca peristiwa peperangan. Sedangkan pertempuran dan penyerangan berada di dataran taktik, kasuistis dan amat tergantung dengan kondisi lapangan saat perang dilancarkan. Makanya ada kalimat menarik yang bisa kita renungkan di sini, "memenangkan pertempuran, belum tentu memenangkan peperangan."

Contoh yang nyata, AS menang dalam berbagai pertempuran di Viet-

9 Lutwakk (1987)

ALJAZEERA.COM

Perang itu seperti berburu

- Edward Luttwak

Warfare is like hunting.

nam, tetapi hakikatnya ia kalah dalam peperangan. Dalam perang Vietnam, amat menderita kerugian yang tidak sedikit. Pihaknya gagal memenangkan perang. Bagaimana dengan kasus Irak? AS tampaknya tak sekedar ingin memenangkan pertempuran, tetapi lebih dari itu peperangan. Pemerintahan baru yang dibentuk dan disokong AS dicobakan di sana. Keuntungan ekonomi pun sudah di depan mata

Bagaimana memahami *si vis pacem, para bellum*?

Ia memang kontradiktif, tetapi merupakan frasa penting dalam memahami strategi sebagai hasil dan konsekuensi hubungan antar-manusia. Perdamaian bisa dilakukan setelah senjata menyalak. Jika demikian, proses perdamaian memerlukan kondisi kontradiktif yang mungkin ironis. Perdamaian memerlukan konflik. Ia merupakan kalkulasi atas kondisi yang muncul seusai perang. Dalam konteks ini, fenomena *deterrence* yang hadir di era nuklir perlu dicermati. Fenomena itu menyebutkan, justru untuk bertahan (*defense*), maka kita harus siap melakukan serangan kapan pun dengan alasan untuk menangkal serangan lawan. Dalam hal ini, senjata nuklir dipakai untuk mempertegas kondisi psikologis tersebut. Dengan senjata nuklir, ia kapanpun dapat mengancam negara lain. Singkat kata, menurut Lutwakk, ruang lingkup strategi terkait realitas konflik bersenjata baik aktual maupun potensial, dengan wujudnya yang bermacam-macam. Luttwak menguraikan empat level *strategy*:

- *Grand strategy,* mencakup kalkulasi keseluruhan, baik menyangkut kebijakan pemerintahan dalam negeri dan luar negeri, atas aspek politik, ekonomi, dan sebagainya, terkait dengan visi dan tujuan negara itu.
- *Strategy,* kebijakan umum yang dirumuskan dalam politik pertahanan dan keamanan sebuah negara dengan penenkanan-penekanan tertentu yang di-

pandang strategis.

- *Operational level,* memutuskan mana yang bisa dilakukan dan yang tidak, berdasarkan kondisi dan pertimbangan tertentu.
- *Tactics level*, langkah yang harus ditempuh berdasarkan realitas kekuatan dan peralatan teknis di lapangan, sebagai penerjemahan lebih lanjut dari sebuah operasi.
- *Technical level*, terkait aspek persenjataan dan hal-hal teknis lain yang dikembangkan dalam menyambut peperangan, terbuka maupun potensial.

Hmmm, bertele-tele tapi menarik ...

Ya, namanya juga uraian, inipun kan sudah ringkasan: jadi harus sabar menyimaknya. Kita kan sedang membahas strategi. Asumsinya, dalam politik, Anda ke mana pun harus siap berperang, karenanya Anda selalu dalam posisi bersaing. Membahas bagaimana memanangkan "peperangan" itulah diuraikan panjang lebar dengan menilik pandangan Sun Tzu dan Clausewitz, Hart dan Luttwak. Ilmu strategi harus dimiliki dan dipahami para politisi. Di atas sudah dipaparkan, strategi, semula terkait dengan masalah kemiliteran, kemudian berkembang, bahkan sekarang banyak dibahas di ilmu manajemen (perusahaan) — bahkan direduksi sekadar ke tingkat analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam manajemen, lapisan paling mendasar adalah visi, baru kemudian diderivasikan ke misi, baru ke program atau kegiatan. Program atau kegiatan tersebut disusun secara strategik, dan diimplementasikan secara taktis. Nah para politisi harus paham langkah-langkah ini.

Bisa nggak soal strategi ini Anda refleksikan ke parpol?

Mari kita ulas Peter Schröder yang telah menulis tentang strategi politik.[10] Kalau membaca buku ini, saya tidak salah telah menguraikan pandangan Sun Tzu, Clausewitz dan sebagainya di atas, memang strategi itu semula berkaitan erat dengan perang. Buku ini juga dimulai dengan menjelaskan hal itu. Pesan pertama yang langsung nendang dan perlu dicatat adalah: kita tidak mungkin disukai semua orang. Pesan ini penting untuk dicamkan.

Baik. Kita diskusikan dulu soal itu ...

Kita tentu sepakat dalam politik, atau semakin kita larut dalam politik, semakin sadarlah kita bahwa ada kawan dan ada lawan. Kita ingin berbuat baik dan punya program-program yang kita rasakan baik, tetapi dalam politik, kebaikan Anda tidak otomatis dinilai sebagai sesuatu yang disukai. Suatu ketika malah, musuh-musuh politik Anda menelikung. Dan ingat,

10 Schröder (1987)

musuh-musuh itu bukan hanya berdiri di pihak lawan, tetapi ada juga "musuh dalam selimut".

Kesadaran akan adanya "yang tidak suka" atas pendapat, sikap, dan pilihan politik kita, akan menentukan langkah-langkah strategis berikutnya. Misalnya, pertama kali — dan nanti juga akan kita jumpai di *marketing* politik — yang harus dilakukan politisi adalah mengidentifikasi kekuatan-kelemahan diri sendiri, dan selanjutnya mengidentifikasi siapa kawan — dan segala derivasinya — serta siapa lawan, berikut gradasi kepentingannya. Barulah kita bisa menentukan langkah-langkah strategis, memanfaatkan mereka dengan mengembangkan pengaruh, untuk seoptimal mungkin kepentingan kita. Dalam konteks ini, buku Schröder bermanfaat menuntun para politisi untuk melakukan perencanaan strategis.

Dimensi-dimensi apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi politik?

Soal perencanaan itu marilah kita ikuti alur pertanyaan berikut:

- Apa yang harus kita rencanakan?
- Tujuan utama kita apa, atau apa yang hendak kita capai?
- Siapa saja yang hendak mencapai tujuan kita tadi itu?
- Dengan sarana apa dan bagaimana?
- Sampai kapan tujuan itu hendak kita capai?
- Mengapa tujuan harus dicapai?

Saya kira setiap politisi dan organisasi politik akan bisa segera menetapkan langkah-langkah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Langkah strategis yang utama, selain mengukur diri dengan analisa SWOT, adalah pengumpulan informasi yang dilakukan secara obyektif. Pengumpulan informasi perlu, terutama untuk mengidentifikasi para pesaing — dan hal ini didapat antara lain dari: (1) informasi dari kubu pesaing; (2) spionase; (3) analisa survei; (4) analisa media; (5) penjelasan dari aliansi pesaing. Saya kira kita perlu menambahkan bahwa kita perlu tahu secara jelas peta aturan main, yang dituangkan dalam produk perundang-undangan yang ada. Strategi itu tampaknya harus lebih *luwes*, tidak kaku. Skenario-skenario cadangan perlu disiapkan, agar kalau skenario A meleset, alternatifnya sudah tersedia, yakni skenario B, C, D, dan seterusnya.

Bagaimana cara mengambil keputusan strategis dalam politik?

Politisi selalu dihadapkan berbagai kemungkinan. Kita perlu mengenal sebelas strategi utama versi Schröder, berikut:

Tabel 19.1.
Jenis-jenis Strategi Politik versi Schröder[11]

JENIS STRATEGI POLITIK	KETERANGAN
1. Strategi *defect*	Menolak untuk bekerjasama dalam setiap langkah yang diambil.
2. Strategi *cooperate*	Bekerjasama dalam setiap langkah yang diambil
3. Strategi *random*	Posisinya di tengah-tengah menerima atau menolak. Lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti anda harus kerjasama, kalau dapat sisi B sebaliknya.
4. Strategi *per kind*	Bermainlah secara periodik (bekerjasama, bekerjasama, menolak bekerjasama). Strategi ini berusaha membuai lawan dalam perasaan aman, lalu Anda menyerangnya, supaya Anda tetap mampu mengendalikannya.
5. Strategi *per nasty*	Bermainlah secara periodik (menolak bekerjasama, menolak bekerjasama, bekerjasama). Sama seperti srategi *per kind*, hanya polanya diubah.
6. Strategi *spite*	Bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerjasama selama lawan belum menolak bekerjasama, setelah itu senantiasa menolak bekerjasama.
7. Strategi *soft majority*	Mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila lengah yang diambil serupa, bekerjasamalah.
8. Strategi *tit for tat*	Bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali.
9. Strategi *mistrust*	Menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi *tit for tat*.
10. Strategi *prober*	Mainkan tiga langkah awal (bekerjasama, bekerjasama, menolak bekerjasama), kemudian menolak bekerjasama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam langkah kedua dan ketiga.
11. Strategi *pavlov*	Bekerjasama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil langkah yang sama.

11 Schröder (2004:117-119).

Strategi brilian adalah rute terbaik untuk tujuan yang diinginkan dengan sarana yang tersedia

- Max McKeown

Brilliant strategy is the best route to desirable ends with available means

Banyak banget ...

Ya. Banyak pilihan. Politik kan seni, karena pilihan untuk menyelesaikan masalah dan berpolitik sesungguhnya banyak. Pemimpin politik harus pandai mengembangkan alternatif, tidak *cupet* atau pendek pikir, cepat menyerah. Membaca Schröder, kita tidak saja dicatatkan jenis-jenis atau pilihan-pilihan strategi politik di atas, tetapi masih ketambahan yang lain, antara lain berikut ini:

- Strategi bumi hangus. Jelas maknanya menumpas lawan atau musuh sampai ke akar-akarnya — tanpa ampun dan akomodasi politik kembali.
- Strategi *brinkmanship* atau strategi permainan jurang. Strategi ini dimaksudkan untuk mengarahkan musuh di ambang bencana untuk memaksanya mundur. Namun strategi ini berisiko, karena kita bisa ikut masuk ke dalam jurang bersama lawan. Penerapannya harus hati-hati dan jeli.
- Strategi kejutan. Keberhasilannya terletak pada betapa tidak siapnya musuh menghadapi kejutan-kejutan yang kita buat.
- Strategi disinformasi. Strategi ini terkait dengan manipulasi informasi, dengan cara pemberian informasi yang salah atau ngawur (cocok dalam konteks ofensif), atau memberikan informasi secara berlebihan alias menggelongong informasi (cocok dalam konteks defensif).
- Strategi pengakuan atau sentakan pembebasan. Merupakan sebuah bentuk strategi defensif, untuk mengakhiri perdebatan atau polemik yang berlarut-larut. Pengguna strategi berharap justru akan memperoleh simpati publik.

Cukup bervariasi bukan? Buku lain, mencatat 33 strategi memenangkan perang. Pengarangnya Robert Greene, yang pernah kita baca kutipannya di pembahasan mengenai hukum kekuasaan.[12]

O, dia lagi ya. Coba jelaskan secara ringkas?

Saya akan meringkas, karena buku ini tebal (yang kurang hobi membaca dijamin *kelenger*). *Saking* banyaknya strategi, ia mengingatkan kitab silat klasik yang diperebutkan para pesilat. Yang dapat menguasai rahasia kitab itu, dijamin akan menjadi sakti.

12 Greene (2007)

Tabel 19.2.
Macam-macam Strategi Memenangkan Perang versi Greene

KONDISI DAN MAKSUD	STRATEGI	KETERANGAN
I. Perang yang diarahkan sendiri	1. Strategi polaritas	Identifikasi musuh-musuh Anda, melalui tanda-tanda serta pola-pola yang menyingkapkan permusuhan. Nyatakan perang, buat musuh-musuh Anda tergantung.
	2. Strategi perang gerilya pikiran	Anda harus tidak mengenal ampun pada diri sendiri. Gerilya pikiran berarti Anda tidak boleh statis, melainkan harus fleksibel dan bergerak.
	3. Strategi menyeimbangkan	Di tengah-tengah kekacauan, jangan kehilangan kehadiran pikiran. Pikiran harus lebih tangguh.
	4. Strategi medan maut	Menciptakan rasa mendesak dan terpojok. Anda ialah musuh diri sendiri yang paling berbahaya. Hadirkan suasana sepertinya Anda tengah berada di "medan maut" dan berupaya untuk keluar dari sana dengan berjuang mati-matian untuk bisa keluar hidup-hidup.
II. Perang organisasional	5. Strategi komando dan kendali	Menghindarkan perangkap cara berpikir kelompok. Pengambilan keputusan kolektif yang tidak rasional harus dihindari.
	6. Strategi kekacauan terkendali	Melakukan segmentasi kekuatan Anda. Bagilah kekuatan Anda menjadi kelompok-kelompok man diri yang dapat bekerja sendiri.
	7. Strategi moral	Mengubah perang Anda perang suci. Anda harus

		pandai memotivasi diri Anda dan anak buah untuk kepentingan bersama.
III. Perang bertahan	8. Strategi perekonomian yang sempurna	Memilih pertempuran Anda dengan seksama. Perhitungkan biaya perang yang tersembunyi: waktu yang hilang, kemauan baik politik yang hilang, hingga musuh yang penuh kepahitan untuk menuntut balas.
	9. Strategi balas menyerang	Kalau lawan Anda agresif, pancing mereka untuk menyerang dengan gegabah, sehingga mereka lemah.
	10. Strategi mengintimidasi	Cara terbaik mengusir penyerang adalah mengintimidasi mereka sejak awal.
	11. Strategi tidak melibatkan diri	Kadang Anda dapat mencapai paling banyak justru tanpa melakukan apa-apa.
IV. Perang menyerang	12. Strategi besar	Anda boleh kalah bertempur, asal menang berperang. Fokuskan kemenangan lebih besar.
	13. Strategi intelijen	Kenalilah musuh Anda
	14.Strategi serangan kilat	Pukullah lebih dulu sebelum lawan Anda sempat berpikir
	15. Strategi memaksa	Paksalah musuh berbuat kesalahan
	16. Strategi pusat gravitasi	Sumber kekuatan lawan itu tersembunyi di bawah permukaan, atau di pusat gravitasinya. Hancurkan pusat gravitasi itu
	17. Strategi memecah belah dan menaklukkan	Pisah-pisahkan kekuatan lawan, dan taklukkanlah kemudian
	18. Strategi berbalik	Alihkan perhatian lawan

		sehingga mereka bergerak ke depan, lalu seranglah dari samping, tanpa mereka menduganya
	19. Strategi pemusnahan	Kepunglah musuh. Ketika tekad dan moral mereka melemah, hancurkan daya kemauannya dengan mengencangkan simpulnya
	20. Strategi mematangkan untuk menuai	Ciptakan dilema, sehingga mereka berpikir untuk mengakui kejelian manuver Anda.
	21. Strategi perang diplomatis	Bernegosiasi sambil maju dan menekan terus pihak lawan sehingga menyerah tanpa syarat.
	22. Strategi jalan keluar	Mengetahui cara mengakhiri segalanya. Tahu kapan saatnya Anda berhenti.
V. Perang non-konvensional (kotor)	23. Strategi salah persepsi	Mencampuraduk fakta dengan fiksi guna mengendalikan persepsi lawan.
	24. Strategi biasa-luar biasa	Mengambil tindakan atau teror yang paling tak terduga
	25. Strategi kebenaran	Menempati medan moral yang tinggi. Artinya, perjuangan Anda harus tampak lebih benar ketimbang perjuangan musuh
	26. Strategi kehampaan	Menghambat pencapaian sasaran lawan. Biarkan musuh terkapar dalam kehampaan
	27. Strategi aliansi	Seolah-olah mengupayakan kepentingan orang lain, padahal mengoptimalkan kepentingan sendiri.
	28. Strategi memelihara keunggulan	Berikan tali yang cukup pada pesaing untuk menggantung. Artinya, buatlah musuh banyak berpikir dan menimbang atau biarkan mereka berbuat fatal, tetapi Anda tetap bersih

29. Strategi *fait accompli*	Menggerogoti sedikit demi sedikit, dengan menciptakan iri hati, ketidakpercayaan, dan kecurigaan, sehingga melemahkan lawan
30. Strategi komunikasi	Susupkan ide-ide Anda ke pihak musuh melalui pesan-pesan para agen, memancing orang menyimpulkan sesuatu – yang Anda inginkan
31. Strategi penyusupan	Menghancurkan dari dalam.
32. Strategi pasif agresif	Mendominasi sambil seolah-olah tunduk.
33. Strategi reaksi berantai	Menaburkan ketidakpastian dan kepanikan melalui teror.

Pesan saya: cukuplah hal-hal di atas sebagai tambahan pengetahuan: jangan terjebak pada strategi *low politics* alias politik tingkat rendah, yang menghalalkan segala cara. Tapi, kita perlu tahu strategi demikian itu ada: maka, kita diharapkan bisa membuat antitesisnya.

Marketing Politik

PENGETAHUAN TENTANG strategi di atas, tampaknya selaras dengan konteks *marketing* politik ...

O, jelas. Dalam era demokrasi langsung ini, politik dipaksa dikaitkan dengan persoalan *marketing*. Tentu sah-sah saja dan menarik. Bahwa fenomena-fenomena politik dicoba dijelaskan dengan konteks *marketing* alias pemasaran. Apalagi, dalam menjelaskan hal-ikhwal kemenangan dan atau kekalahan partai-partai atau figur-figur politik dalam sebuah kompetisi demokrasi. Di atas sudah disinggung soal strategi, maksudnya strategi untuk menang dalam satu "peperangan politik" yang kompleks dan kadang bertele-tele alias berpanjang-panjang serta merepotkan itu. Pendekatan *marketing* politik mencoba untuk mensistematisasi, dan memunculkan tips-tips alis kiat-kiat untuk mencapai sukses — termasuk sukses yang tertunda alias ketika kita harus dipaksa menerima kenyataan untuk gagal. Dengan paham hakikat dan pemanfaatan *marketing* politik, individu atau organisasi politik diharapkan mampu untuk eksis dan *survive* terus-menerus.

Tunggu dulu. Anda bilang "politik dipaksa dikaitkan dengan *marketing*". Mengapa "dipaksa"?

Ya karena ada hal-hal tertentu dalam politik yang tak bisa ditinjau dari perspektif pemasaran barang dan jasa sebagaimana lazimnya. Yang dipasarkan dalam politik adalah orang, bukan barang, tetapi performa orang/lembaga berikut gagasannya. Menjual gagasan politik tentu berbeda dibanding kalau kita menjual gagasan pembangunan apartemen yang jelas bendanya. Bukan pula sama dengan menjual iming-iming kenaikan harga saham atau kenaikan nilai tukar uang. Politik bersentuhan dengan aspek ideologis. Memasarkan ideologi, berbeda dengan memasarkan sabun mandi, salep kulit, odol, gelas plastik, atau semir sepatu bukan? Pemasaran ideologi berbeda dengan pemasaran produk *à la multilevel marketing*.

O, tampaknya Anda meremehkan ya urgensi pemasaran dalam politik...

Anda jangan salah tangkap. Saya nggak *ngenyek* alias meremehkan. Pemasaran politik itu sangat penting, tetapi sifatnya sangat kontekstual. Pemasar harus jeli dalam melihat dinamika politik yang terjadi. Tanpa melihat perkembangan yang terus berubah secara detil, maka analisis *marketing* bisa jadi gagal. Diperlukan para pencermat-pencermat perkembangan. Dalam dunia politik banyak variabel yang *absurd* dari kacamata pandang orang awam dan ahli ekonomi. Banyak asumsi yang tidak dapat di *cateris paribus*-kan. Sebab, politik itu *esok dele sore tempe*. Ada hal-hal yang kerap anomalistik dalam politik. Ada pula faktor *ndilalah kersaning Allah*, alias faktor-faktor kebetulan — yang bisa dijelaskan lewat pendekatan sunatullah politik, yang tak sama persis dengan sunatullah fisika-biologi alias ilmu alam atau *sunatullah* ekonomi.

Baik terlepas dari "kritik" Anda itu, apa peran *marketing* politik dalam demokrasi?

Bukan kritik. Tapi catatan kecil saja. Baik. Begini saja deh, mari kita kutip sedikit keterangan Firmanzah berikut ini:

> *Marketing* politik memiliki peran yangikut menentukan dalam proses demokratisasi. Di negara-negara maju, partai-partai politik mengerahkan kemampuan *marketing* mereka untuk merebut sebanyak mungkin konstituen. Berbagai teknik yang sebelumnya hanya dipakai dalam dunia bisnis, sekarang ini telah dicangkokkan ke dalam kehidupan politik. Semakin canggih teknik *marketing* yang diterapkan dalam kehidupan politik. Para anggota tim sukses berusaha 'menjual' jago mereka dengan berbagai cara yang seringkali kita raakan tidak ada bedanya dengan mengiklankan produk di media, mempromosikan *outdoor* maupun *indoor*. Segala taktik dipakai agar rating jago mereka tinggi

dan rakyat memilihnya di bilik-bilik suara. Selain itu *marketing* politik dapat memperbaiki kualitas hubungan antara kontestan dengan pemilih. Pemilih adalah pihak yang harus dimengerti, dipahami dan dicarikan jalan pemecahan dai setiap permasalahan yang dihadapi. *Marketing* politik meletakkan bahwa pemilih adalah subyek, bukan obyek manipulasi dan eksploitasi.[13]

Pesannya jelas: *marketing* politik jangan dimanipulasi untuk kepentingan yang mengabaikan rakyat sebagai subyek politik ...

Ya. Para kontestan politik dapat memanfaatkan jasa para *marketer* politik, tapi ingat pepatah *ngono yo ngono ning ojo ngono*, alias begitu ya begitu (gunakanlah sebaik-baiknya *marketing* politik itu), tapi jangan begitu (tapi jangan disalah gunakan, dan merendahkan rakyat seolah-olah mereka Anda obyekkan, padahal mereka itu sejatinya subyek): jangan terlalu banyak etika politik yang dilanggar, pun jangan melanggar hukum. Nasihat ini persis dengan ketika kita membahas hal-ikhwal pencitraan politik di bagian lain buku ini. Ini dapat dipahami, mengingat *marketing* politik erat kaitannya dengan pencitraan politik, kendatipun *marketing* tak selalu urusan "bedak dan gincu". Dan tampaknya kita juga sepakat bahwa *marketing* dan pencitraan politik merupakan hal-hal yang takterelakkan dalam politik.

Merujuk Lees-Marshment, *marketing* politik atau pemanfaatan konsep-konsep dan teknis-teknis pemasaran komersial dalam politik (*the utilization of commercial marketing techniques and concepts in politics*) lazim terjadi di mana pun di seluruh dunia. Partai-partai politik lazim melakukan penyelidikan terhadap kondisi politik, termasuk terkait dengan potensi dukungan suara dalam pemilu, dengan menggunakan ragam metode, terutama polling dan diskusi kelompok terfokus. *Marketing* politik tidak hanya sekedar terkait teknik pemasaran, tetapi merupakan ranah dari proses komunikasi politik yang lebih luas: bagaimana menciptakan pesan, mengemasnya, menyampaikannya dan menerima umpan-balik. Maka *marketing* politik, bukan sekadar berputar selama musim kampanye pemilu, tetapi jauh lebih luas daripada itu.[14]

Soal "lebih luas" yang dimaksud, bagaimana penjelasannya? Apakah ada konsep-konsepnya?

Lees-Marshment menjelaskan konsep *Market-Oriented Party* (MOP), bawa inti dasar dari konsep ini adalah partai dapat menggunakan piranti yang bervariasi (*various tools*) untuk memahami dan lantas merespons

13 Firmanzah (2007:311)

14 Lees-Marshment (2010:1-4)

permintaah pemilih (*voter demands*), namun tetap dalam jalur yang selaras dengan keinginan anggota [partai], gagasan para politisinya, pandangan para pakar dan realitas pemerintahan.[15] Intinya, bagaimana partai punya kesiapan dan langkah-langkah dalam merespons perkembangan dengan konsep *marketing* politik.

Tabel 19.3
MOP: Teori dan Cek Kelengkapannya[16]

LANGKAH I: Penyelidikan Pasar (*Market intelligence*)

Teori: Partai seharusnya:

- Menggunakan berbagai metode termasuk *polling*, [diskusi] kelompok fokus, dan sebagainya;
- Bertanya apa yang pemilih inginkan dari kerja partai dalam jangka pendek dan jangka panjang;
- Memastikan kesinambungan dari pemilu ke pemilu berikutnya;
- Mencermati segmentasi dengan mengidentifikasi target pasar yang belum mendukung partai [saat ini] tetapi mungkin [mendukung] di masa depan, dan memahami tuntutan mereka;
- Menyebarluaskan informasi tentang hal tersebut secara merata di internal partai dan menafsirkannya secara hati-hati dan profesional-objektif.

Cek kelengkapan:

- Apakah partai melakukan intelijen pasar?
- Jika demikian (ya), metode apa yang digunakan? (misalnya: [diskusi] kelompok fokus, *polling*, mendengarkan seksama (*listening exercises*), konsultasi keanggotaan, konsultasi *think tank*)
- Kapan penyelidikan pasar dilakukan? (misalnya pasca pemilu, sebelum adanya perkembangan kebijakan baru dalam organisasi, sebelum kampanye, atau terusmenerus/*continually*)
- Bagaimana akurasi/ketidakbiasaan/representasi penyelidikan pasar? (misalnya apakah ada kelemahan atau kekuatan dalam metodenya)
- Bagaimana hasilnya disebarluaskan? (misalnya kepada kelompok strategis, komite pengembangan kebijakan, atau ke pimpinan dan panitia kampanye — atau hanya pimpinan)
- Siapa yang melakukan penyelidikan?
- Apakah partai merepons penyelidikan ini dalam formasi kampanye, atau desain produk?

15 Lees-Marshment (2010:5)

16 Lees-Marshment (2010:5-8)

LANGKAH II: Desain produk

Teori: Partai mendesain produknya sesuai dengan temuan penyelidikan pasar; apakah tanpa, sedikit atau secara signifikan melibatkan perubahan-perubahan yang dipandu oleh hasil penyelidikan pasar. Ini yang kemudian dimodifikasi di Langkah II.

Cek kelengkapan:

- Apa inti aspek-aspek produk yang berhubungan dengan permintaan pemilih: misalnya apakah partai memiliki kebijakan populer; apakah pemimpinnya menawarkan gaya kepemimpinan yang diinginkan pemilih?
- Dapatkah Anda melihat apakah hasil penyelidikan pasar telah berdampak pada desain produk — apakah telah ada yang berubah setelah penyelidikan?
- Apakah ada kesadaran dan keinginan di antara politisi dan pengurus partai (*party staff*) untuk mencoba mengubah [sikap/kebijakan] partai dalam menanggapi pilihan yang ada? Ini adalah orientasi-pasar — sulit untuk mengukur — tetapi wawancara dan/atau survei mungkin disarankan.

LANGKAH III: Penyesuaian produk

Teori: Partai kemudian mengembangkan produk dengan mempertimbangkan:

- Daya pencapaian (*achievability*): memastikan janji yang realistis dan tim partai dapat mengantarkannya;
- Reaksi internal: memastikan perubahan akan menarik dukungan yang memadai dari anggota parlemen dan anggota [partai] untuk memastikan pelaksanaan, dengan mempertimbangkan ideologi dan sejarah partai, mempertahankan kebijakan tertentu sesuai pasar pendukung tradisional dan juga untuk menciptakan produk yang berbeda dari yang dari kompetisi;
- Kompetisi: mengidentifikasi kelemahan oposisi dan *highlights* kekuatan yang sesuai; khas; mencari kerjasama dengan mitra potensial yang sesuai;
- Dukungan: Mengembangkan aspek produk yang ditargetkan memenuhi segmen pasar sasaran.

Cek kelengkapan:

- Apakah partai memastikan bahwa segala sesuatu/perubahan yang ditawarkan layak untuk dicapai (*achievable*)? Misalnya mampu memainkan kartu kebijakan untuk membuat produk yang nyata; mekanisme untuk memastikan penyampaian [pesan] dalam pemerintahan; ongkos ekonomis kebijakan yang realistis; penciptaan unit penyampaian [pesan] untuk memantau penyampaiannya; diskusi tentang kesulitan-kesulitan memerintah.
- Apakah para pemilih melihat produk sebagai sesuatu yang layak untuk dicapai dan realistis?
- Haruskan partai melakukan segala sesuatu untuk membuat dan menggambarkan sebuah tim yang mampu memberi?

- Apakah pemilih pikir [partai] mampu memberikan janji-janjinya? Apakah mereka melihatnya sebagai kesatuan, dapat dipercaya, seorang pemimpin yang baik, mampu manajemen ekonomi, dan jujur, misalnya?
- Yang dilakukan dalam penyelidikan pasar mengenai apa? (misalnya apa yang pemilih ingin lihat berubah, sebagaimana apa yang mereka pikir tentang sikap partai saat ini)
- Apakah desain akhir produk juga memenuhi pasar internal partai dalam beberapa tingkatannya; misalnya apakah kebijakan-kebijakan yang ada diturunkan dari tradisi ideologis partai atau dilakukan untuk memenuhi permintaan anggota?
- Apa perbedaan partai dalam banyak hal dibandingkan dengan pesaing utamanya?
- Apakah partai memiliki beberapa keunggulan dibanding para [partai] pesaing; haruskan partai meningkatkan kekuatannya dan meninggalkan kelemahan-kelemahannya?
- Di dalam sebuah sistem-multipartai proporsional (*PR-multi party system*), haruskan partai menyampaikan kemampuannya untuk bekerjasama dengan mitra koalisi potensial?
- Apakah partai menyadari siapa saja yang setia dan siapa target pasar yang bisa disasar dan bersiap produknya mendapatkan dukungan dari target?

LANGKAH IV: Implementasi

Teori: Perubahan diimplementasikan di seluruh [ranah internal] partai, membutuhkan manajemen partai yang diterapkan secara hati-hati dan kepemimpinan yang berada di atas jangka waktu yang tepat untuk mendapatkan penerimaan yang memadai, menciptakan persatuan partai dan antusiasme terhadap desain baru partai.

Cek kelengkapan:

- Apakah anggota [partai] dan anggota parlemen telah berkonsultasi pada setiap perubahan, atau [mereka] memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perubahan dan pembangunan?
- Apakah ada tanda-tanda signifikan adanya keresahan internal?
- Apakah mayoritas figur senior tampak di kepengurusan dalam desain produk baru?
- Apakah para kandidat dan anggota di tingkat lokal menerima dan melaksanakan desain produk baru?

LANGKAH V: Komunikasi

Teori: Komunikasi secara seksama dilakukan untuk menyampaikan produk baru, sehingga pemilih punya kejelasan sebelum kampanye dimulai; teknik komunikasi digunakan untuk menginformasikan dan "memanipulasi"; manajemen media

dipraktekkan sesuai konteksnya.

Cak kelengkapan:

- Apakah partai merumuskan strategi komunikasi yang dimulai setidaknya 12 bulan sebelum pemilu?
- Apakah hal tersebut diinformasikan oleh intelijen pasar?
- Apakah hal tersebut ditargetkan?
- Apakah hal tersebut dicoba untuk diinformasikan, atau dibujukkan?
- Apakah hal tersebut termasuk komunikasi positif atau negatif?
- Apakah hal tersebut menyorot perubahan produk utama partai?
- Apakah para pemilih menunjukkan kesadaran produk baru partai?

LANGKAH VI: Kampanye

Teori: Partai mengingatkan pemilih aspek kunci dan keuntungan produk-produk nya dengan organisasi dan manajemen yang efektif, memanfaatkan teknik komunikasi yang efektif dan penyampaian positif produk yang efektif kepada para pemilih.

Cek kelengkapan:

- Apakah partai bersatu dan profesional dalam kampanye untuk pemilih?
- Apakah kampanye diinformasikan oleh penyelidikan pasar dan ditargetkan?
- Apakah hal tersebut pengingat dari apa yang partai telah komunikasikan?
- Jika dalam sistem PR, apakah kesepakatan partai dengan mitra koalisi potensial efektif?

LANGKAH VII: Pemilihan

Teori: Partai harus menang bukan hanya suara tetapi mampu menarik persepsi positif dari pemilih pada semua aspek perilaku termasuk kebijakan, pemimpin, persatuan dan kemampuan partai, serta peningkatan kualitas keanggotaannya.

Cek kelengkapan:

- Bagaimana jumlah suara dan kursi yang diperoleh partai di pemilu?
- Dari siapa saja partai mampu menarik dukungan?
- Apakah itu berarti menarik target pasarnya?
- Apakah itu mempertahankan suara intinya?
- Bagaimana produk dievaluasi melalui ukuran jajak pendapat dan kelompok fokus pada setiap aspek dari produk partai seperti kepemimpinan, kebijakan utama, kesatuan, manajemen ekonomi, dan dalam kaitannya dengan kompetisi?
- Apakah itu meningkatkan anggotanya?

LANGKAH VIII: Perwujudan

Teori: Partai kemudian perlu untuk mewujudkan produk pasca-pemilu. Untuk partai besar yang memenangkan pemilu, mereka harus mengantarkan perwujudan janji-janjinya dan perkembangan komunikasi atau sebaliknya, melalui manajemen media yang baik. Sementara partai-partai kecil atau oposisi akan dinilai dari segi tujuan mereka, seperti kemampuannya menempatkan isu-isu dalam agenda, atau, dalam sistem multipartai, untuk bekerja dalam koalisi, atau untuk menyediakan oposisi yang efektif dan representatif.

Cek kelengkapan:

- Apakah partai berada di pemerintahan?
- Jika partai mendukung koalisi, apakah ia masih memberikan produk yang dijanjikannya kepada anggota dan pemilih, atau apakah harus berkompromi?
- Apakah semua partai dalam koalisi menerima penghargaan khusus, terhadap kebijakan-kebijakan yang berbeda?
- Jika berada dalam oposisi, apakah partai punya peran penuh? Apakah ia terlihat sebagai sebagai oposisi yang punya kemampuan?
- Jika partai tidak bagus dalam pemilu, apakah ia menunjukkan tanda-tanda yang menyadarkan perlunya mendengarkan dan belajar dari para pemilih?

LANGKAH IX: Mempertahankan orientasi pasar — siklus pemasaran

---

Teori: Untuk mempertahankan orientasi-pasar, partai perlu terlibat dalam pemasaran politik secara terus-menerus baik dalam oposisi, maupun di pemerintahan atau dalam koalisi. Apabila partai berada dalam pemerintahan ia perlu memastikan ruang dan waktu untuk berpikir tentang desain/pengembangan produk untuk pemilu berikutnya, terutama karena opini publik atau perubahan situasi ekonomi membuat realitas perkembangan tak terduga pemerintahan dapat terjadi. Dalam semua kasus, adalah penting bagi partai untuk mempertahankan konsep yang berorientasi pasar dan terus melakukan penyelidikan pasar guna memberi informasi bagi perencanaan masa depan mereka.

Cek kelengkapan:

- Apakah partai telah terus-menerus melakukan penyelidikan pasar?
- Apakah ia terus berlanjut terhadap pemilih sebagai responsif?
- Jika partai dalam oposisi, apakah itu merefleksikan kekalahan pemilu dan dimulainya langkah melalui proses kembali?
- Jika partai di pemerintahan, apakah memungkinkan partai meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan berdebat tentang perkembangan masa depannya?

Apa yang bisa Anda simpulkan dari teknis MOP tersebut?

Yang terpenting ialah kesadaran pemasaran bagi partai sebagai lembaga politik. Tampaknya memang konsep MOP itu bukan "orang/sosok menarik partai", tetapi sebaliknya, karena orientasi pemasaran benar-benar ada dan langkah-langkah kelembagaan partai pasti dan terukur, maka "partai menarik orang-orang" dalam pemilu. Idealnya memang demikian dalam konteks kerangka penguatan kelembagaan partai. Memang, dalam konteks ini pertanyaan praktis muncul, apabila dikaitkan dengan sistem pemilunya: apalagi kalau yang dipilih sistem proporsional terbuka murni dengan dasar perhitungan suara terbanyak sebagaimana dipakai di Indonesia, setidaknya pada Pemilu 2014. Dalam sistem pemilu tersebut, parpol sebagai lembaga seolah hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengajukan calon anggota legislatif (caleg) saja untuk dilepas ke pasar pemilu. Para pemilihlah yang menentukan. Akibatnya, parpol yang menjalankan konsep MOP sebaik mungkin tidak serta-merta dapat *feed back* yang optimal dalam perolehan dukungan suara caleg-caleg mereka.

Tak seperti dalam sistem proporsional dengan daftar stesel tertutup dengan sistem nomor urut, sistem di atas jelas beda. Dalam sistem daftar tertutup itu, parpol masih punya harapan besar sebagai penentu dukungan suara para calegnya. Dengan sistem nomor urut, pemilih pada akhirnya lebih banyak pertimbangannya pada parpol, bukan individu calegnya. Dua sistem itu berbeda, tetapi saya kira konsep MOP tetap penting.

Tetapi kan unsur sosok penting dalam pemasaran politik?

Ya, itu tak terpungkiri. Maka sebaiknya, kita tidak usah mempertentangkan peran sosok dan partai, sebab keduanya saling melengkapi. Bagaimanapun, dalam demokrasi langsung pemasaran tokoh sangat penting. Tokoh-tokoh politik pantas mengetahui apa yang seharusnya dapat mereka lakukan dalam memasarkan dirinya di tengah ketatnya kompetisi politik. Kertajaya mengedepankan istilah *marketing yourself*,[17] yang memuat prinsip-prinsip pemasaran pribadi, yang tampaknya relevan dengan konteks pemasaran politik. Kertajaya menguraikan konsep yang ia sebut sebagai PDB, *positioning-diferensiasi-brand*. Menurutnya,

> Pertama-tama Anda harus jelas memposisikan diri dengan jelas di benak pelanggan. Tujuannya tak lain agar diri Anda memiliki identitas yang jelas di benak pelanggan. Ingat, *positioning* yang Anda bangun itu sesungguhnya adalah janji Anda kepada pelanggan.
>
> Dalam pemasaran politik, mari kata pelanggan kita ganti dengan, mi-

17 Kertajaya (2004).

salnya publik atau rakyat atau masyarakat, calon *voter*, atau konstituen. Agar janji yang terumus di dalam *positioning* tersebut memiliki kredibilitas dan dipersepsi positif oleh pelangan Anda, maka janji tersebut harus didukung oleh diferensiasi yang kuat.

Positioning yang didukung oleh diferensiasi yang kokoh akan menghasilkan *brand integrity* yang kuat. *Brand integrity* yang kuat ini pada gilirannya akan menghasilkan *brand image* yang kuat. Dan ada akhirnya, *brand image* yang kuat akan memperkuat *positioning* yang telah ditentukan sebelumnya.

Jika boleh saya menyederhanakan: apabila Anda maju ke medan laga perang tanding satu lawan satu (*duel one by one*), misalnya Anda atlet gulat di arena Olympiade, maka mantapkanlah *positioning* Anda, perkuat kuda-kuda dan fisik Anda, asah dan mantapkan diferensiasi jurus-jurus andalan Anda, serta bikinlah lawan *keder*.

Apa saja prinsip pemasaran yang ditawarkan Kertajaya?

Supaya ringkas, sembilan prinsip itu dapat disimak di tabel berikut:

Tabel 19.4.
Sembilan Prinsip Pemasaran versi Hermawan Kertajaya[18]

PRINSIP	TIPS OPERASIONALISASI PRINSIP
Prinsip pertama *Segmentation: View Your Market Creatively*	- Anda harus lebih jeli melihat pasar Anda. Jangan melihat umum, tapi lebih detil lagi. - Kelompokkan orang-orang atau organisasi-organisasi yang kira-kira hampir sama karakteristiknya, ke dalam segmen-segmen. - Cobalah pahami karakteristik masing-masing segmen tersebut.
Prinsip kedua *Targetting: Allocate Your Resources Effectively*	- Sebelum menentukan targetting, Anda harus melihat dulu di mana potensi dan kekuatan Anda. - Pastikan bahwa segmen pasar yang Anda tuju itu mempunyai *possibility* yang besar untuk diterima. - Bidiklah target pasar Anda seperti sniper. Pakailah waktu, energi, pikiran terutama untuk target pasar.
Prinsip ketiga *Positioning: Lead Your Customers Credibly*	- Lihat kemampuan diri dan potensi Anda sendiri - Buatlah semua orang percaya bahwa Anda memang unik dengan membuktikan keunikan tersebut sampai *customer* Anda percaya.

18 Kertajaya (2004).

- Tunjanglah itu, kalau perlu dengan bukti-bukti, *track record* selama ini, supaya *positioning* itu dipercaya dan Anda mempunyai kredibilitas untuk itu.

Prinsip keempat
Differentiation: Integrate Your Content and Context

- *Content* apa yang menjadi isi Anda. Isi tersebut tercermin dalam pendidikan yang pernah Anda tempuh, pengalaman yang pernah Anda raih, serta bakat yang Anda miliki. Ada orang yang isinya kosong, ada orang yang isinya penuh. *Content* itu *about what to offer*, apa yang akan kita tawarkan.

- *Context* adalah bungkusnya, *how to offer*, bagaimana cara menawarkannya.

- Tentukan Anda kuat di mana, diferensiasi di *content* atau *context*. Kadang-kadang karena tidak mampu melakukan diferensiasi di *content*, akhirnya memilih diferensiasi di *context*. Paling tidak gayanya menang. Tapi akan lebih baik kalau diferensiasi bisa dilakukan baik melalui *content* maupun *context*.

- Cocokkan diferensiasi yang Anda pilih, dengan *positioning* yang Anda tetapkan. Karena *positioning* merupakan strategi. *Segmentation*, *targetting* dan *positioning* pada prinsip pertama, kedua, dan ketiga itu adalah strategi pemasaran. Sedangkan diferensiasi ialah unsur taktik. Agar klop, diferensiasi harus sesuai dengan *positioning*.

- Yakinkan bahwa *content* dan *context* Anda terintegrasi dengan baik.

Prinsip kelima
Marketing Mix: *Integrate Your Offer and Acces*
- *Marketing mix* meliputi 4P yakni *Product, Price, Place*, dan *Promotion*. Gabungan *product* dan *price* itu *offer*, apa yang kita tawarkan.
- *Place* dan *promotion* membentuk akses (*acces*). Kita bisa diakses lewat *channel* mana?

- Dalam merancang marketing *mix* Anda harus kembali ke diferensiasi.
- Susunlah *product, price, place*, dan *promotion* yang cocok dengan diferensiasi yang Anda miliki.
- Buatlah supaya *marketing mix* Anda gampang diterima pelanggan.

Prinsip keenam
Selling: Build Long-term Relationship with Your Customers

- Anda harus bernai melakukan *selling*, tapi jangan menggunakan hard *selling*, atau melakukan penjualan secara terang-terangan. Tapi harus diingat, kalau Anda

terlalu pasif tidak melakukan *selling* Anda juga salah. Jadi memang "*selling is about art*".

- Anda bisa menjual *feature selling* dengan menjual apa yang ada pada diri Anda, *benefit selling* dengan menjual manfaat yang akan diterima oleh pelanggan kalau membeli Anda, namun yang paling bagus adalah jika Anda menjual solusi.

- Jagalah *relationship* antara Anda dan pelanggan.

Prinsip ketujuh
Brand: Avoid the Commodity-Like Trap
Artinya, menghindari agar Anda tidak seperti orang kebanyakan.

- Jangan anggap nama Anda cuma sekedar nama.
- *Build your own brand*.
- Jaga nama baik Anda.

Prinsip kedelapan
Service: Make service as Your Way of Life

- Dalam tingkatan intelektual, pelajarilah ilmu-ilmu servis supaya *brand* Anda bagus.

- Anda harus belajar mengenali atau mengontrol *mood* Anda sendiri. Setelah itu, Anda juga harus belajar mengidentifikasi *mood* orang lain. Dengan memahami *mood* orang lain, Anda bisa menyesuaikan servis Anda secara tepat kepada orang tersebut. Anda juga melakukan servis dengan menggunakan empati yang lebih besar.

- Supaya pelayanan Anda menjadi mantab, Anda harus berusaha untuk menganggap bahwa servis sudah menjadi tugas kita di dunia ini.

Prinsip kesembilan
Process: Improve Your Quality, Cost, and Delivery
Process adalah QCD Anda harus selalu berusaha untuk memberikan kualitas, dengan biaya yang hemat (efisien).

- Ingat, Anda tidak cukup membentuk *brand* Anda dengan menjadi terkenal atau memberikan servis yang baik, tetapi Anda harus memperhatikan bahwa Anda sekarang harus memberikan servis yang sesungguhnya.
- Di dalam segala macam proses, yang harus diingat adalah, Anda harus menjaga kualitas, karena kualitas servis Anda adalah kualitas *brand* Anda.
- Ingat tiga proses yaitu proses dalam pekerjaan sehari-hari, proses bagaimana Anda menangani keluhan pelanggan, permintaan pelanggan, dan yang terakhir adalah proses untuk menciptakan suatu servis baru yang kreatif dan inovatif.

Kalau Anda tengah memasuki dunia politik, improvisasikan ilmu Kertajaya tersebut. Ingat, pemasaran politik menghadapkan Anda dengan manusia, bukan benda. Tips-tips di atas, kontekstual. Politik cepat berubah, diperlukan analisis tajam. Kalau kita tinjau hukum kekuasaan, maka kan kekuasaan itu, kalau dikaitkan logika fisika, tidak dapat diciptakan dan

tidak dapat dipunahkan, kecuali seperti energi, ia hanya berpindah tangan. Kekuasaan dipergulirkan. Dengan memanfaatkan strategi *marketing* politik, bersiap-siaplah menerima kelimpahan kekuasaan. Tetapkan jalan kemenangan secara cerdas/elegan, tetapi lazim.

Begini ya, kalau kita bicara pemasaran sosok/partai dalam pemilu, kan mau tak mau harus paham perilaku pemilih?

Memang demikian, makanya dalam konsep MOP di atas penting sekali penyelidikan pasar: termasuk bagaimana mengetahui kecenderungan perilaku pemilih (*voting behavior*). Merujuk Mujani, Liddle dan Ambardi, studi perilaku pemilih: (1) berkaitan dengan partisipasi pemilu (*voter turnout*): seberapa banyak warga negara yang berpartisipasi dalam pemilu? Mengapa seseorang memutuskan ikut serta atau absen dalam pemilu?; (2) berkaitan dengan pilihan warga terhadap partai politik atau calon anggota legislatif (untuk pemilu legislatif), calon presiden atau calon kepala daerah: Partai apa atau calon mana yang dipilih seorang pemilih dalam pemilu? Mengapa dia memilih partai atau calon tersebut dan tidak memilih yang lainnya?[19]

Setidaknya terdapat tiga model dalam studi perilaku pemilih, yakni model sosiologis, psikologis dan pilihan rasional atau ekonomi. Ketiganya tidak mesti bertentangan. Sebaliknya, ketiga model tersebut bisa punya pengaruh relatif terhadap pilihan politik: bahwa apa yang memengaruhi seorang pemilih menetapkan pilihan politiknya dalam pemilu merupakan kompleksitas dari tiga model tersebut.[20]

Silakan diuraikan ketiga model tersebut ...

Model sosiologis dibangun dengan asumsi perilaku pemilih ditentukan karakteristik sosiologisnya, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik, kedaerahan dan bahasa.[21] Model ini berbeda dengan model ekonomi/pilihan rasional di mana seseorang berpartisipasi dalam pemilu karena adanya kesadaran bahwa pemilu penting bagi dirinya dan masyarakat banyak. Hasil pemilu akan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang akan berkaitan dengan semua warga negara, termasuk dirinya. Orang yang punya kesadaran demikian, biasanya relatif berpendidikan, memiliki jenis pekerjaan yang terkait dengan kebijakan pemerintah, dan memiliki pendapatan yang baik. Namun, faktor utama yang dipandang mampu menggerakkan mereka yang berperilaku pemilih model sosiologis itu, jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya proses mobilisasi politik. Afiliasi organisatoris,

19 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:4)

20 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:35)

21 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:6)

formal ataukah tidak, karenanya menjadi penting dalam menentukan perilaku pemilih.[22]

Kalau model psikologis?

Model psikologis psikologis menjelaskan seseorang berpartisipasi dalam pemilu, karena ia tertarik politik, punya perasaan dekat dengan partai tertentu (identitas partai atau *Party ID*), memiliki informasi yang cukup untuk menentukan pilihan, merasa suaranya berarti, serta percaya pilihan politiknya dapat memperbaiki keadaan (*political efficacy*), karenanya ia senantiasa berikhtiar memiliki keterlibatan politik (*political engagement*). Orang yang memiliki informasi lebih banyak tentang masalah-masalah publik, ia cenderung lebih mampu untuk menentukan sikap dan melakukan tindakan politik, termasuk untuk ikut serta dalam pemilu. Dalam konteks ini, sikap partisan (*partisanship*) sebagai suatu keadaan psikologis untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik tertentu, merupakan komponen yang penting dalam keterlibatan politik. Seorang partisan memiliki energi psikologis yang kuat untuk mendukung pilihannya dalam pemilu.[23]

Yang model ekonomi?

Perspektif pilihan rasional (*rational choice*) mengasumsikan pemilih berperilaku rasional, layaknya menerapkan hukum ekonomi, yakni menghitung bagaimana caranya mendapatkan hasil maksimal dengan ongkos minimal. Dalam model ini sebagaimana dijelaskan Olson (2002) hasil pemilu ialah barang publik (*public goods*), siapapun yang menjadi pemimpin atau kebijakan publik yang akan dibuat, tidak seorang pun yang akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapa pun sumbangsihnya bagi pembentukan barang publik tersebut. Karena pemilih berperilaku rasional, di mana ia akan mendapatkan hasil yang sama dari pemilu, terlepas ikut atau tidak ikut dalam pemungutan suara, maka ia akan memilih untuk tidak memilih karena tidak mau keluar ongkos dan energi.[24]

Jadi, apa pesan utama dari ini semua?

Strategi pemenangan kandidat itu bisa dipelajari dan diimplementasikan sedemikian rupa. Yang penting, cara untuk menang itu wajar, terukur, dan jangan "menghalalkan segala cara". Mengapa harus "menghalalkan segala cara" kalau dengan itu, dosa politik kita nambah, plus belum tentu menang pula!●

22 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:6-9)

23 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:22-25)

24 Mujani, Liddle dan Ambardi (2012:29-30)

Bab 20

Pra, Saat, dan Pasca-Berkuasa

Refleksi Pengelolaan Kekuasaan Politik

Pra-Berkuasa

KINI PERTANYAANNYA lebih spesifik: Bagaimana mengelola pra-berkuasa?

Kekuasan perlu diraih dan bahkan direbut. Tapi perlu kita perhatikan soal cara. Caranya harus wajar dan baik alias tidak menghalalkan segala cara. Anda mungkin segera menyahut: itu *kan* persoalan etika, moralitas, *akhlak* — normatif? Pertanyaan demikian lazim saja, tetapi, kalau nadanya sinis, maka itu tak berguna: kekuasaan tetap punya landasan etis, basis pembenar — dan itu normatif bukan?

Yang "realistis" biasanya meminggirkan dulu etika, yang penting bagaimana bisa berkuasa ...

Hmm, memang. Tapi, dapatkah Anda membayangkan bagaimana apabila "semua kekuasaan" diraih dengan mengabaikan alias melanggar etika? Sejarah kekuasaan manusia memang identik dengan sejarah politik dan peperangan. Di dalam Al Qur'an misalnya, ada satu drama yang menegaskan betapa malaikat protes pada Tuhan yang berkehendak menciptakan manusia di muka bumi. Mengapa Tuhan menciptakan manusia di muka bumi,

kalau manusia sendiri suka bertumpah darah, berperang satu sama lain?[1]

Dalam pandangan madzab realis, pada hakikatnya manusia itu suka berkonflik dan berperang; dunia ini selalu dalam keadaan anarkhi atau "perang"; segala aturan main tidak akan efektif, kecuali pihak-pihak yang unggul atas kompetisi yang sarat kepentingan, kekuatan paling besarlah yang berpengaruh dan mengatur; karenanya diperlukan strategi untuk eksis dan *survive*.

Apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam konteks "pra-kekuasaan"?

Baiklah. Kita bahas soal ini. Yang jelas kata kuncinya adalah persiapan-persiapan. Hal ini terkait dengan realitas obyektif internal dan eksternal seseorang atau sekelompok orang yang menginginkan memperoleh kekuasaan. Realitas internal terdiri yang dimaksud adalah seberapa obyektif kondisi yang ada. Seberapa besar modalitas yang dipunyainya?

- Seberapa besar kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya?
- Seberapa luas wawasan politiknya?
- Seberapa besar dukungan dan jaringan yang ada padanya?
- Seberapa mampu menciptakan aliansi-aliansi?
- Seberapa besar pula kualitas pengenalan dirinya?
- Seberapa luas liputan media terhadapnya?
- Seberapa besar kekuatan finansial yang dapat dihimpun?
- Apakah ia punya modal-modal lain, seperti modal sosial dan modal intelektual yang memadai?

Singkat kata, lakukan analisa SWOT dalam hal ini. S atau *Strenghtened* artinya kekuatan. W atau *Weakness* artinya kelemahan. O atau *Opportunity*, artinya peluang atau kesempatan. T atau *Threatment* artinya hambatan. Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab dan dikontekstualisasikan dengan SWOT. Saran saya: baca kembali pembahasan tentang strategi dan *marketing* politik di depan.

Soal kapasitas dan kapabilitas, apa konteksnya?

Singkat saja. Mestinya kalau orang mau "maju politik", ia harus berkaca

1 QS. al-Baqarah: 30. "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau ?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"

Dua hal yang paling menjadi kekagumanku, langit berbintang di atasku dan hukum moral dalam diriku

- Immanuel Kant

Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.

diri: apakah ia mampu dan kapabel. Harus ada niat dan hasrat yang kuat, tetapi juga diimbangi dengan pengetahuan dan kemampuan minimal atas hal-hal yang diperlukan untuk menjadi politisi. Modal nekat, mungkin bisa juga, ketika ia masuk partai politik dan ternyata didudukkan sebagai calon anggota legislatif dan terpilih. Tetapi, politisi jenis demikian tergolong "politisi kecelakaan". Apa yang bisa diperbuat di lembaga perwakilan rakyat, kalau kemudian ternyata ia "diam saja" alias "nggak bunyi"? Jadi harus berkaca dulu: apakah masih ada kelemahan atau sudah menjadi kekuatan yang bisa diandalkan "diri kita" kalau hendak "maju politik". Seharusnya memang demikian bukan? Nasihat ini perlu Anda renungkan: apakah Anda sedang mabuk di arena perjudian politik? Kalau ya, jangan "berpolitik".

Soal wawasan politik?

O, kalau masalah itu kan sebenarnya bisa dipelajari sambil jalan, tapi harus serius. Saoalnya, sambil jalan beda dengan sambil lalu. Wawasan politik seseorang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi paling tidak ia harus mengetahui atau menguasai yang minimal-minimal saja. Minimal ia tahu politik itu apa, sehingga kelak ia tidak keliru dalam berpolitik. Soal ini kan sudah kita bahas di bagian kekuasaan. Wawasan politik ini bisa dicari lewat beberapa aktivitas, mulai dari mengikuti berita-berita di media massa, hingga kerap mendatangi acara-acara politik, berdialog dengan para aktivis atau pakar politik. Lantas, luruskan niat anda dan mantapkan untuk berkiprah dalam politik. Jadilah politisi yang otentik, bukan karbitan dan instan.

Soal niat berpolitik, bagaimana?

Niat jelas penting dan mendasar. Semua amal perbuatan tergantung niat. Anda ingin jadi pemimpin, maka niatkanlah untuk menjadi pemimpin yang baik, yang ideal. "Gantungkan cita-citamu setinggi langit," kata Bung Karno. Artinya apa? Setelah niat, harus ada tekad. Tekad bukan berarti nekat. Tekad ada kalkulasinya. Dalam ilmu manajemen, tekad berarti ada *planing*, perencanaan. Kalau niat, visi. Niat yang baik adalah niat yang visioner. Niatlah dengan benar. Organisasikan obsesi Anda. Rencanakan semuanya dengan baik. Selanjutnya, ketiga adalah, mengikuti alur manajemen, *actuating*. Aktualisasikan lah. Dan keempat kontrollah, evaluasilah langkah-langkah Anda.

Agaknya hal itu menurut alur manajemen POAC, *planning, organizing, actuating* dan *controlling* ...

Ya. Itu juga dapat diterapkan kelak pada saat berkuasa dan pasca-berkuasa. Anda bisa membikin tabel dan mencatat apa rencana Anda? Bagaimana mengorganisasikannya, mengaktualisasikan dan mengontrolnya?

Tapi kan tidak semua orang berkuasa itu sadar bahwa ia sebelumnya telah merencanakan untuk memperolehnya. Ada kalanya, hadirnya pemimpin politik tanpa perencanaan. Bahkan ia pun tidak tahu sebelumnya ...

Ada seorang menteri yang dalam beberapa kesempatan saya dengar mengatakan, bahwa dirinya menjadi menteri itu, sungguh ia tak tahu sebelumnya. Ia merasa bahwa jabatan menteri yang ia sandang itu, telah ditentukan oleh Tuhan alias ia telah ditakdirkan menjadi menteri. Padahal, katanya, masih banyak orang yang lebih baik dan lebih bagus ketimbang dirinya. Tetapi, "Mengapa Pak Presiden tergerak untuk memilih saya? Itulah rahasia Allah," katanya.

Saya tidak menyangkal penjelasan takdir itu. Tapi saya punya analisa lain. Bahwa ia dipilih, tentu ia punya kelebihan, dan kelebihan itu merupakan akumulasi dari proses yang panjang, baik proses non-politik maupun proses politik. Merunut pengalamannya, ia merupakan pemimpin berbagai macam organisasi. Ia punya reputasi. Artinya, ia bukan *ujug-ujug* menjadi menteri. Dalam politik nasihat ini penting: masuklah organisasi, aktiflah di sana, khususnya organisasi politik — perbaikilah sistem yang ada, sehatkan organisasi itu dan efektifkan kinerjanya, dengan begitu Anda berpikir memperkuat kelembagaan.

Contoh lain, dalam kasus Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun, tetap ada prosesnya. Ia memang bukan organisatoris sejak mahasiswa, tetapi begitu ia masuk dunia politik, kan langsung bersentuhan dengan hal-ikhwal kepemimpinan politik. Ia terpilih menjadi walikota di Solo, lantas terlontar sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan lantas secara fenomenal menang dalam Pilpres 2014. Tapi, jangan lupa bahwa yang mencalonkan dia, terutama adalah PDIP sebagai partai politik yang tengah menemukan momentum pasca-"oposisi" selama sepuluh tahun.

Soal seberapa besar dukungan dan jaringan, bagaimana penjelasannya?

Begini: harus ada ukuran yang jelas dalam hal ini. Antara dukungan yang riil dengan potensi dukungan terpaksa harus dibedakan. Dukungan riil lah yang harus dijadikan kalkulasi riil. Terpaksa kita harus menggunakan

analisis yang realistis, dan tidak mencampurkan konteks potensi dengan realitas. Potensi bisa berubah pikiran tidak untuk menjadi pendukung tetapi ikut ke pihak lawan. Potensi dukungan wajib dirawat dan diarahkan kepada soliditas dukungan ke Anda. Tentu ada kiat-kiatnya tersendiri. Yang penting untuk dibahas terlebih dahulu adalah, bagaimana Anda mencari basis dukungan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mungkin membantu:

- Apakah anda pernah jadi aktivis organisasi?
- Apakah anda tidak pernah atau setidaknya tidak aktif di dalam organisasi?
- Apakah anda berlatar belakang pengusaha, profesional, akademisi, TNI/Polri, atau apa? Atau apa lantar belakang Anda?
- Apakah Anda punya teman-teman yang mampu menjadi *vote getter* alias penarik dukungan suara buat Anda?
- Apakah organisasi atau institusi (politik) Anda sekarang kuat?

Aktivitas organisasi memang selalu ditanyakan, setidaknya sebagai upaya menyusun rekam jejak sang calon pemimpin. Begitu ya?

Ya. Tapi tidak sekedar rekam jejak saja. Organisasi memberikan tiga keuntungan sekaligus kepada para aktivisnya.

- *Pertama*, kepuasan batin bahwa ia telah berbuat sesuatu sesuai dengan visi-misi organisasi. Dengan berorganisasi, maka ia berkesempatan pula beraktivitas sosial dan mengembangkan mobilitas horisontal.
- *Kedua*, ia punya pengalaman untuk belajar *tetek-bengek* mengurus organisasi, sehingga punya keandalan dalam manajemen organisasi atau keorganisasian. Ia menjadi punya kompetensi, yang merupakan gabungan antara pengetahuan, keahlian dan perilaku.
- *Ketiga*, ia punya kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal. Organisasi bisa melontarkan karir politik seseorang, apalagi apabila organisasi itu adalah organisasi politik alias partai politik.

Soal yang terakhir itu, yakni mobilitas vertikal, tampaknya organisasi politik dan non-politik masing-masing punya bobot dalam demokrasi langsung ...

Kalau dikaitkan dengan proses demokrasi langsung, maka jelas: orang atau figur lebih penting untuk dilihat. Orang akan melihat rekam jejak orang itu, antara lain dari aktivitasnya di organisasi-organisasi apa yang pernah diikuti. Organisasi politik bisa dilihat sebatas kendaraan politik. Tetapi kesungguhan berorganisasi dan proses yang panjang, akan dinilai publik.

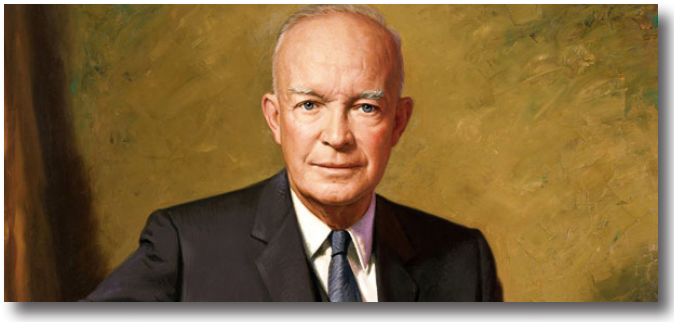

HISTORY.COM

Rencana-rencana tak berarti apa-apa; perencanaan adalah segalanya

- Dwight D. Eisenhower

Plans are nothing; planning is everything.

Semakin orang punya pengalaman organisasi, maka semakin akan diapresiasi. Organisasi non-politik pun bisa dimanfaatkan untuk mengerek popularitas tokoh. Dalam demokrasi langsung, sumber kepemimpinan itu tidak saja dari kalangan formal partai-partai politik, tetapi juga kalangan informal non-partai, seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh organisasi social kemasyarakatan, maupun tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat, bekas tokoh birokrasi, bekas tokoh kepolisian atau militer, hingga para profesional.

Apakah pentingnya basis organisasi itu, identik dengan pentingnya massa pendukung?

Bisa ya. Organisasi punya massa banyak atau sedikit kan tergantung jenisnya. Ada organisasi yang jumlah massanya banyak, ada yang pengaruh pikiran atau *state of mind*-nya luas. Di Indonesia, misalnya ada dua organisasi kemasyarakatan yang besar, baik dari segi kuantitas pengikutnya, maupun pengaruh *state of mind*-nya: NU dan Muhammadiyah.

Ada kalanya sebuah organisasi hanya punya pengaruh *state of mind* yang luas. Ia bergerak di wilayah yang lebih substansial ketimbang simbolik dan massif. Soal jumlah massa banyak atau sedikit, itu kadangkala dalam demokrasi langsung tidak berbanding lurus. Massa biasanya punya orientasi politik yang heterogen. Artinya massa NU dan Muhammadiyah dalam muktamar-muktamar mereka, tidak mendukung partai politik yang sama. Tidak pula mendukung figur politik yang sama pula.

Dalam politik, organisasi NU dan Muhammadiyah punya efek kebesaran yang bisa jadi basis kultural para figur yang bertanding dalam kompetisi politik. NU dan Muhammadiyah sendiri sebagai organisasi sosial ke-

masyarakatan tentu independen, bukan *ounderbow* partai politik, meskipun terdapat partai-partai politik yang mengklaim berbasis massa Muhammadiyah maupun NU. Organisasi non-politik itu selain dijadikan basis kultural juga dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan jaringan. Karena, bagaimanapun mereka sudah punya infrastruktur dari tingkat pusat hingga ke berbagai pelosok daerah, bahkan luar negeri.

Seberapa penting sih jaringan itu?

Sangat penting. Bagi yang ingin disokong dalam politik, maka perkuatlah jaringan. Dengan jaringan berarti Anda tidak bekerja sendirian. Anda punya kekuatan abstrak dan konkrit yang bekerja sepenuhnya untuk kepentingan Anda. Dalam *marketing*, itu maknanya Anda punya jalur pemasaran yang kuat. Jadi proses distribusi ide dan kepentingan Anda dapat tersalurkan di jalur distribusi itu dengan baik. Upaya penciptaan dan penguatan antara lain dapat dilakukan dengan teknik yang beragam, berikut ini:

- *Pertama*, masuklah ke organisasi yang punya infrastruktur yang kuat, sehingga memudahkan Anda untuk melakukan konsolidasi dengan cepat.
- *Kedua*, manfaatkan jaringan media massa.
- *Ketiga*, bersahabatlah dan berkomunikasilah secara efektif dengan figur-figur politik yang "punya massa" baik formal maupun informal, serta lintaslatar belakang.
- *Keempat*, aktiflah menggalang dukungan dengan membentuk asosiasi-asosiasi sosial dalam masyarakat.
- *Kelima*, aktifkan jaringan dengan sahabat-sahabat Anda di luar negeri dan daerah-daerah.

Baik. Sebelum kita ngomong terlalu jauh, kita tuntaskan dulu pembahasan soal niat di atas. Pertanyaannya: apa hakikat berpolitik itu?

Di atas sudah kita bahas sekilas. Kita perkuat lagi dengan kutipan Akbar Tandjung berikut:

> Pada hakikatnya, politik merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kemakmuran/kesejahteraan rakyat dan tujuan-tujuan bangsa lainnya. Berpolitik adalah aktivitas yang mulia, yang terkait erat dengan keterpanggilan. Berpolitik merupakan pengabdian yang didasari oleh keterpanggilan untuk melakukan upaya-upaya untuk menuju kemajuan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini semua Warga Negara dengan berbagai latar-belakang profesi masing-masing berhak untuk berpolitik. Namun demikian harus kita catat bahwa politisi bukanlah suatu profesi yang lebih berorientasi mengejar materi. Politik membutuhkan suatu etika atau moralitas politik yang melengkapi pemahaman dasar

kita bahwa politik adalah panggilan dan pengabdian bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Pemimpin politik haruslah memiliki visi politik yang kuat, dan memiliki komitmen yang tinggi atas prinsip-prinsip politik yang dianutnya, serta mampu memanfaatkan sumberdaya politik yang ada secara optimal dan bertindak berdasarkan kalkulasi politik yang rasional dan logis. Ia juga harus mampu menghadirkan kebijakan-kebijakan politik yang produktif (bukan kontraproduktif) dan efektif, di samping dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan-dukungan politik yang signifikan. Mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu melakukan inovasi-inovasi politik, mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen mana pun, serta mampu memberi contoh dan mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan politik.[2]

Seberapa penting sesungguhnya aliansi politik itu?

Tentu sangat penting selaras dengan konteksnya. Apalagi kalau konteksnya kepemimpinan politik di pemerintahan, dan/atau di sisi lain di pihak oposisi. Partai-partai politik biasanya menegaskan sikapnya: apakah mendukung koalisi politik yang memerintah (ikut pemerintah) atau ikut berdiri di pihak oposisi dan/atau kelompok penyeimbang. Tetapi, ada juga fenomena politik "berdiri di dua kaki": ya mendukung pemerintah dan/atau punya posisi formal di pemerintahan, tetapi sering mengkritiknya habis-habisan. Anda bisa menilai sendirilah, tetapi konteksnya ialah kepentingan.

Soal politik "dua kaki" tersebut menarik, justru karena di Indonesia sepertinya kok sudah lazim...

Rasanya begitu. Mari kita simak kritik tajam Editorial *Media Indonesia* berikut ini:

Orang-Orang Partai yang tidak Setia

POLITIK tanpa moral menemukan pijakan yang kukuh di negeri ini. Ingar-bingar politik dihiasi aneka warna buram. Mulai dari anggota DPR yang korup, pemerasan, suap-menyuap, hingga permesuman.

Kini daftar kelam bertambah panjang. Sejumlah anggota DPR mempertontonkan sikap yang mencerminkan moralitas yang tak patut. Mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari partai lain, tetapi tidak mundur dari partai lama. Mereka juga tidak beranjak dari kursi DPR padahal tidak punya lagi legitimasi.

Tidak ada kata yang tepat selain bahwa tindakan anggota DPR tersebut mencerminkan rendahnya moralitas dan etika. Mereka sudah memegang kartu

2 Tandjung (2008).

anggota partai lain, tetapi merasa tetap sah menjadi anggota DPR dari partai lama.

Elite yang dengan mudah loncat pagar itu menunjukkan ketidaksetiaan dan tipisnya loyalitas. Mereka tidak hanya tidak setia dan tidak loyal kepada partai, tapi juga tidak setia dan tidak loyal kepada konstituen yang menempatkan mereka menjadi warga Senayan.

Jika elite tidak loyal dan tidak setia kepada partainya, mengapa konstituen harus loyal kepada partai dan caleg?

Harus dikatakan bahwa caleg lompat pagar adalah petualang politik. Mereka hanya mementingkan diri, kursi, uang, dan kekuasaan. Tidak memiliki ideologi memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang diutamakan dan diperjuangkan adalah kepentingan diri sendiri ....

Yang mengherankan, perilaku lompat pagar menggejala di kalangan intelektual dan mereka yang mengagungkan demokrasi. Ternyata demokrasi diartikan secara sempit hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat. Petualangan seperti ini menunjukkan bahwa godaan kekuasaan dan uang sangat dahsyat.[3]

Catatan di atas, konteksnya mengomentari daftar caleg yang ada, yang disuguhkan partai-partai politik menjelang Pemilu 2009, terutama dikaitkan dengan konsistensi aktor atas kesetiaan mereka dalam berpartai — yang diwarnai "kawin-cerai" berulang-ulang. Memang politik kita sangat cair. Seorang yang dulu berpartai A dan masih tercatat sebagai anggota parlemen dari Fraksi (partai) A, tiba-tiba nyaleg via Partai B, karena merasa tidak prospek lagi di Partai A. Ia bisa saja berkata, "Mengabdi itu *kan* bisa ke mana-mana dan di mana-mana, *toh* sama saja". Penjelasannya sederhana, seolah-olah tidak ada yang salah. Tapi, tidak sedikit rakyat yang bingung (*confuse*) dengan fenomena demikian. Kalau begitu buat apa berpartai?

Tapi memang, sebagaimana saya uraikan di awal buku ini, soal pindah-pindah partai — atau istilah Djohan Efendi politisi "bajing loncat" ini — kontekstual. Publik bisa menilai seberapa jauh integritas politisi. Media massa pun sikapnya juga bisa berubah-ubah, apalagi apabila pemiliknya ikut berpolitik, berpartai. Sikap politiknya sebelum dan setelah berpartai (mendirikan partai sendiri dan mengendalikan kekuasaannya), tentu bisa berubah: terutama dalam mengomentari masalah ini.

Bagaimana menciptakan aliansi politik yang kuat?

Yang utama adalah mengupayakan kesepahaman dan ikatan politik bersama antar-kekuatan politik yang sevisi dan semisi. Ideologi yang sama bisa jadi perekat, tetapi biasanya yang paling utama dijadikan dasar per-

3 *Media Indonesia*, 30 Agustus 2008.

timbangan pihak-pihak yang berkoalisi atau beraliansi adalah kepentingan yang sama. Ideologi yang sama belum tentu jaminan lho! Kan ada adagium yang terkenal: "tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan!"

Jadi, kesamaan visi dan misi itulah yang utama. Tetapi yang utama lagi adalah: kepentingan! Dalam konteks ini, tentulah konteks *take and give* berlaku. Apa, dengan siapa dan mendapat apa? Itulah hakikat *political deal* ada keinginan untuk mencapai "tujuan kekuasaan" bersama-sama dan ada *sharing* alias "pembagian" yang jelas atas peran-peran politik setelah kekuasaan didapat atau tidak didapat. Aliansi yang baik adalah yang konsisten: menang atau kalah, posisinya konsisten saja.

Apa beda aliansi dan koalisi dalam konteks politik?

Aliansi lebih bersifat temporer, sebalinya koalisi bisa lebih permanen. Koalisi menyentuh visi dan bersifat jangka panjang dan awet, sedangkan aliansi bisa hanya sekedar bersifat taktis. Kadang dua istilah itu dipakai secara bersamaan. Menurut Sidney Tarrow, terdapat lima unsur yang diperlukan untuk memelihara satu koalisi:

- *Pertama*, para anggota membingkai isu kepentingan bersama (*common interest*).
- *Kedua*, adanya kepercayaan (*trust*) pada setiap anggota dan percaya bahwa panutan mereka terpercaya dan memiliki kesanggupan untuk mewujudkan kepentingan bersama itu.
- *Ketiga*, koalisi harus mempunyai satu mekanisme untuk mengelola perbedaan, orientasi, taktik, kultur, dan ideologi.
- *Keempat*, adanya insentif yang dapat dimanfaatkan bersama.[4]

Tadi dikatakan tentang perlunya organisasi atau institusi (politik) yang kuat. Bisa dijelaskan lagi?

Organisasi yang kuat ialah yang hidup dan mampu menghidupi dirinya. Organisasi yang hidup berarti yang bukan "papan nama", yang struktur maupun infrastrukturnya "nyambung"; yang ada figur-figur penanggungjawabnya. Bukan organisasi "zombi" . Dengan kata lain, fungsi-fungsi organisasi berjalan, walaupun seminimal mungkin. Mesin-mesinnya tidak berkarat atau rusak. Ibarat kendaraan, ia dapat dikendarai dengan baik. Secara teoritis, sebagaimana dibahas di muka, institusi politik yang kuat adalah kuat dari segi:

4 *En.wikipedia.org/wiki/Coalition*

- Nilai-nilai organisasi (*basic values*). Maksudnya, bagaimana nilai-nilai organisasi itu melekat pada setiap warga organisasi.
- Sistem. Bagaimana tercipta sebuah sistem yang baik, tertata dan menjamin organisasi dapat berjalan dengan baik, walaupun tidak tergantung pada sosok atau figur. Semakin suatu sistem baik, semakin tidak tergantung pada figur. Sistem ini juga mampu mengelola potensi konflik internal organisasi. Artinya ada jaminan akan manajemen konflik yang baik, sehingga organisasi akan selalu solid.
- Kemandirian pengambilan keputusan. Artinya terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang sistematis dan demokratis. Demokratisasi internal organisasi menjadi amat penting dalam organisasi politik terutama yang tidak mengandalkan figur.
- Kekuatan figur-figur. Walaupun demikian, organisasi politik perlu memiliki figur-figur yang "kuat". Publik akan selalu bertanya atas organisasi politik apa saja: siapa saja orang-orangnya? Pernahkah ia mendengar namanya, reputasinya?
- Infrastruktur. Ini terkait dengan keluasan jaringan dan kemodernan organisasi dari tingkat pusat ke tingkat daerah, desa.
- Citra. Terkait dengan bagaimana publik menilai, tepatnya menjatuhkan penilaian atas organisasi Anda, bukan sekadar karena politik "bedak dan gincu", tetapi karena kualifikasi yang tinggi.

Bagaimana konflik dikelola dan stabilitas politik internal diciptakan?

Baik. Saya sepakat, bahwa asumsi utamanya dalam hal ini adalah: stabilitas (politik) organisasi atau biasanya dikenal dengan istilah soliditas organisasi dapat terwujud apabila realitas konflik organisasi dapat terkelola dengan baik. Jadi harus ada manajemen konflik yang bekerja secara efektif. Soal manajemen konflik, sudah banyak pakar yang menjelaskannya. Bila diuraikan lagi begini, konflik itu sendiri harus dipandang secara benar.

Bagaimana kekuasaan diperoleh?

Dalam kondisi yang otoritarian, kekuasaan diperoleh dari garis turunan, bahkan revolusi. Kekuasaan turun-temurun terjadi di kerajaan yang monarkhi-absolut. Revolusi biasanya terjadi dalam situasi menumbangkan penguasa absolut. Di depan sudah dijelaskan, kekuasaan dapat pula direbut dengan senjata oleh kaum militer, melalui jalan kudeta. Dalam situasi persaingan normal dan wajar, kekuasaan diperebutkan melalui jalan demokrasi. Nah, dalam alam demokrasi, semua orang punya peluang yang khas. Misalnya, ada pasangan suami istri mampu tampil di panggung kekuasaan. Contohnya, kemenangan istri Presiden Nestor Kirchner, Cristina Fernandez

de Kirchner di Argentina pada 2007.

Bisa dijelaskan mengapa Cristina menang?

Nestor populer, istrinya sedikit banyak ikut terangkat. Selama menjadi presiden Nestor berhasil membawa Argentina keluar dari krisis ekonomi pada 2001, dengan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun. Cristina sendiri menjadi senator sejak 2001. Pada pilpres 2007, ia menang telak (46 persen), mengungguli Elisa Carrio dan Roberto Lavagna (23 persen dan 17 persen). Ia presiden pertama yang dipilih rakyat. Sebelumnya, Isabel Peron pernah menjabat presiden menggantikan suaminya, Juan Peron yang meninggal 1974, tetapi tanpa pemilu.

Saat-Berkuasa

BAGAIMANA MENGELOLA kekuasaan saat pemimpin berkuasa?

Kekuasaan itu amanat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan atau visi. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ia dibatasi sumberdaya dan waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum atau *sunatullah* kekuasaan. Tentang hal ini sudah kita bahas di bagian kekuasaan? Yang penting penguasa tahu diri. Memanfaatkan sebaik-baiknya masa kekuasaannya dengan memberikan prestasi dan kemajuan, dan tahu kapan harus berhenti. Di sinilah pentingnya suatu *exit strategy* yang baik alias istilah agamanya, *husnul khatimah*.

Mumpung berkuasa, maka perlu optimalisasi ...

Optimalisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi tentunya, bukan dalam mengeruk sumberdaya dan aset negara untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kata-kata kuncinya adalah manfaatkan kekuasaan untuk mengimplementasikan visi dan misi. Konsisten. Tentu merawat dukungan sangat perlu. Kekuasaan tanpa dukungan rapuh bukan? Tetapi, semua itu jangan dilakukan secara tidak wajar. Jangan membuat *blunder*, dengan memasukkan nila setitik, sebab bisa rusak susu sebelanga. Mesin kekuasaan harus bergerak dan aman bagi Anda. Tapi semua harus dipastikan wajar dan bertanggung jawab, sehingga publik pun akan mengapresiasi prestasi-prestasi Anda.

Belajarlah dari banyak tokoh yang ambruk kekuasaanya di tengah jalan akibat *adigang-adigung-adiguna*, alias menyelewengkan kekuasaannya, dan harus berurusan dengan hukum. Ingat kekuasaan Anda bukan tanpa batas. Semua dibatasi hukum. Penggunaan "aji mumpung" sangat berbahaya.

Dalam tim sepakbola Jerman dari klub-klub berbeda mereka perlu mendapatkan kesempatan satu sama lain baik di dalam dan luar lapangan. Dalam koalisi besarKristen Demokrat dan Sosial Demokrat mereka duduk di perahu yang sama dan perlu menarik arah yang sama

- Angela Merkel

In the German football team players from different clubs need to get on with each other both on and off the pitch. In the grand coalition Christian Democrats and Social Democrats sit in the same boat and need to pull in the same direction.

Menjadi pejabat kan enak?

Memangnya, pejabat itu makanan, apa? BTW mari kita simak refleksi saya yang pernah dimuat di harian *Kontan*, berikut:

> Apa enaknya jadi pejabat? Beberapa pensiunan pejabat orang yang penulis tanyai mengatakan, fasilitasnya. Pejabat memperoleh fasilitas atau *privelege* yang luar biasa: tunjangan gaji yang besar, rumah dan mobil dinas, jasa pengawalan yang demonstratif, "pelesir" ke luar negeri dan penghormatan yang kadang berlebihan pula. Pejabat di Indonesia, masih dianggap sebagai orang yang terpandang, layaknya *ambtenaar* di masa lalu — walaupun belakangan banyak yang berurusan dengan penegak hukum. Mentalitas "gebyar" masih subur di kita: orang dipandang dari "bajunya", "pecinya", bukan substansi dan kejujurannya.
>
> Menjadi pejabat ... bisa menembus rintangan-rintangan yang menyebalkan. Pejabat birokrasi, selalu berupaya mengistimewakan pejabat politik. Para pejabat juga masih akan menerima banyak hadiah atau gratifikasi dari yang sepele hingga yang mewah. Kadang seorang pejabat tiba-tiba merasa punya hak untuk berlagak.
>
> Selain bergelimang *previlege*, juga berkesempatan besar untuk menentukan kebijakan. Ia menjadi elite penentu, bukan lagi rakyat biasa yang "ditentukan". Menjadi pejabat, diartikan sedang "naik kelas" menjadi subyek, karena kekuasaannya. Orang boleh pandai dan kemudian menjadi cendekiawan atau intelektual, tetapi bukankah masih "kalah" dengan orang yang berkuasa? Kalau intelektual tidak menjabat, apa "dihargai"? Tapi, sayangnya, orang yang berkuasa, kerap dikendalikan oleh yang punya uang. Maka, pragmatisme selalu membayangi para pejabat-penguasa, lalu lupa akan niat awalnya mengabdi pada bangsa. Tapi, apakah orang kuasa selalu kalah dengan uang?
>
> ... Tentu, niat yang betul ketika seseorang hijrah menjadi politisi, bukan untuk menjadi pejabat, melainkan menjadi transformator, yang dengan kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya kelak dimanfaatkan sepenuhnya untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Yang mau "disejahterakan" bukan diri dan kelompoknya, tapi masyarakat luas dan kepentingan bangsa. Pejabat bukan

lagi *ordinary people*, maka tanggungjawabnya besar, kalau benar jasanya besar, tapi kemungkinan "berbuat dosa" juga besar.[5]

Ngritik ya?

Sori kalau tersinggung. Tapi, kalau Anda berkuasa alias sedang menjabat suatu jabatan publik atau jabatan politik alias *menjadi pejabat*, maka apa yang sebaiknya Anda lakukan? Saya hanya mengingatkan: bekerjalah dengan baik sefungsional mungkin. Janganlah kekuasaan struktural Anda pakai untuk memanipulasi diri. Utamakan skala prioritas. Jadilah pemimpin yang baik — soal ini sudah kita kupas di bagian kepemimpinan, bukan?

Tadi disinggung soal *exit strategy*, cara pemimpin *lengser* dari kekuasaannya, bisa dikasih contoh?

Mari kita lihat pengalaman Fidel Castro di Kuba dan Pervez Musharraf di Pakistan.[6]

Castro?

Castro kelelahan juga dengan sandangan kekuasaan posisional yang telah melekat pada dirinya selama 49 tahun. Di usianya ke-81 pada 2008, ia menyerah. Jabatan formalnya dilimpahkan ke Raul Castro, adiknya. Sesungguhnya, sejak Juli 2006 Raul Castro, 76 tahun pada 2008 (dia meninggal 25 November 2016), telah menjadi pejabat sementara presiden.

Bagaimanapun Castro pemimpin revolusioner yang legendaris. Ia dikenal konsisten dengan keyakinan komunismenya, anti-AS, dan menjadi ikon pemimpin pemberani, selain misalnya Mahmoud Ahmedinejad di Iran atau Hugo Chavez di Venezuela. Bintangnya tak ada yang menyaingi. Dalam durasi kekuasaan yang lama, tak ada pemimpin formal dunia yang seangkatan dengan Castro, maka ia dianggap "dinosaurus yang hidup di era pascakepunahannya". Ia orator yang betah berpidato berjam-jam, sebagaimana Soekarno di Indonesia di masa lalu. Keduanya bertipe *solidarity maker*. Tapi, daya tahannya di atas panggung mulai terampas oleh fisiknya yang menua. Tidak dapat ditutupi lagi, wajah Castro telah berkeriput dan sayu.

Ia yang bernama lengkap Fidel Alejandro Castro Ruz lahir 13 Agustus 1926. Ia Presiden Kuba, 1976-2008. Sebelumnya, ia menjabat Perdana Menteri sejak 1959. Castro tampil sebagai sekretaris pertama Partai Komunis Kuba (*Communist Party of Cuba*) pada 1965 dan mentransformasikan Kuba ke dalam republik sosialis satu-partai. Pada 1947, ia ikut dalam upaya kudeta diktator Republik Dominika Rafael Trujillo dan lari ke New York AS karena

5 M Alfan Alfian, "Apa Enaknya Jadi Pejabat?" *Kontan*, 4 September 2008.

6 M Alfan Alfian, "*Exit Strategy* Musharraf dan Castro", *Media Indonesia*, 26 Februari 2008.

ancaman akan dihabisi lawan-lawan politiknya. Setelah meraih doktor ilmu hukum pada 1950, ia memimpin gerakan bawah tanah anti-pemerintah atas pengambil-alihan kekuasaan lewat kudeta oleh Fulgencio Batista pada 1952. Pada 1953, ia memimpin serangan ke barak militer Moncada Santiago de Cuba, namun gagal. Ia dipenjara selama 15 tahun. Setelah mendapatkan pengampunan dan dibebaskan pada 15 Mei 1955, ia memimpin upaya penggulingan diktator Batista. Perlawanan ini dikenal dengan Gerakan 26 Juli. Pada 7 Juli 1955, ia lari ke Meksiko dan bertemu dengan pejuang revolusioner Che Guevara. Bersama 81 orang lainnya, ia kembali ke Kuba pada 2 Desember 1956 dan melakukan perlawanan gerilya selama 25 bulan di Pegunungan Sierra Maestra.

Di luar Kuba, Castro menggalang kekuatan untuk melawan dominasi AS. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, cita-cita dan impiannya mulai diwujudkan dengan bertemu Hugo Chávez di Venezuela dan Evo Morales dari Bolivia. Menjelang ulang tahunnya ke-80 pada 13 Agustus 2006, ia menyerahkan tampuk kepemimpinannya sementara waktu kepada adiknya, Raúl Castro. Penyerahan kekuasaan ini merupakan pertama kali sejak ia memerintah Kuba pada 1959. Kesehatan Castro sempat menurun setelah jatuh ketika berpidato pada 2004. Pada 19 Februari 2008, lima hari sebelum mandatnya berakhir, ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Jabatannya digantikan oleh Raul Castro.[7]

Kalau Musharraf?

Nyaris sama seperti Castro, Perdana Menteri Pakistan Jenderal Pervez Musharraf memiliki masalah dengan kekuasaan posisionalnya begitu partainya kalah dalam Pemilu pasca-kematian Benazir Bhutto. Tapi, Musharraf tidak cepat-cepat menerima desakan agar ia mundur. Tapi, mayoritas parlemen diisi oleh mayoritas politisi yang dulu mengoposisinya, terus bermanuver, hingga Musharraf akhirnya mengumumkan kemundurannya. Dan dalam perkembangannya Asif Ali Zardari, tak lain suami mendiang Benazir Bhutto, yang pernah dipenjara terkait dakwaan kasus korupsi tak terbendung lagi, terpilih menjadi presiden — di tengah tantangan Pakistan yang semakin berat. Ia resmi menjabat presiden, 9 September 2008.

Bisa diulas lagi tentang dua kasus di atas?

Kasus Musharraf dan Castro terkait sekali dengan konteks *exit strategy*, bagaimana mengakhiri kekuasaannya dengan seksama, tak meninggalkan kefatalan bagi dirinya. Dalam posisi terjepit, itu tidak mudah. Pemimpin, kata Collin Powell, dalam Oren Harari, *The Leadership Secrets of Collin*

7 *Id.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro*

BREAL.TV

Sebuah revolusi adalah perjuangan untuk kematian antara masa depan dan masa lalu

- Fidel Castro

A revolution is a struggle to the death between the future and the past.

Powell harus mengetahui, kapan harus mundur. Kadang-kadang perbuatan mengundurkan diri merupakan tugas terbesar pemimpin. Di Indonesia kita dapat bercermin dari kasus dua presiden: Soekarno dan Soeharto. Dalam hal ini Anda bisa membuat refleksinya masing-masing.

Pasca-Berkuasa

Bagaimana mengelola kekuasaan pasca-berkuasa?

Di dalam uraian panjang lebar di depan, antara lain telah di sebutkan bahwa pemimpin yang baik ialah yang tahu kapan saatnya lengser alias berhenti. Ia harus tahu betul mengenai *sunatullah* kekuasaan — kekuasaan itu dipergulirkan. Anda akan menjadi warga biasa lagi, ketika Anda sudah tidak menjabat. Pada hari-hari itu Anda bisa mencatat pengalaman yang pernah Anda lakukan, dan menularkan pengalaman baik Anda pada generasi yang lebih muda. Anda tentu harus menyibukkan diri dengan hal-hal orang biasa, tetapi alangkah lebih baik kalau aktivitas yang dilakukan pasca-berkuasa tetap jalan yakni dengan menyibukkan diri di aktivitas sosial.

Anda tahu apa yang dilakukan mantan Presiden Jimmy Carter bukan? Ia mendirikan *Carter Center* pada 1982, lembaga sosial yang memfokuskan aktivitas sosial, HAM, dan demokratisasi. Dengan *Charter Canter* ia berkeliling dunia memantau pemilu di berbagai negara. Ia pernah berkunjung ke Indonesia pada Pemilu 1999. Pada 12 Oktober 2002, ia meraih Hadiah No-

bel Perdamaian, menyusul pendahulunya: Theodore Roosevelt (1906) dan Woodrow Wilson (1919).[8]

Ternyata memang kekuasaan bukan segalanya ...

Setelah orang tidak berkuasa dalam arti tidak lagi menjadi pejabat politik, maka mestinya semakin sadarlah ia bahwa memang kekuasaan itu bukanlah segalanya. Jalur pengabdian pada masyarakat bangsa dan negara, tidak harus dipaksakan hanya pada jalur politik. Jadilah empu, "sang pertapa" yang dinanti-nantikan nasihat-nasihatnya. Jadilah referensi bijak, bapak-bangsa. Anda akan cukup senang melihat generasi politik berjalan baik, generasi setelah Anda ternyata lebih bagus dan cerdas. Itu harapannya. Tetapi, kenyataan tidak bisa sesederhana itu. Walaupun Anda sudah *powerless*, tetapi kalau sesuatu terjadi dalam dunia politik, yang menuntut Anda harus turun gunung, maka apa boleh buat: Anda harus turun gunung. Tapi harus dengan kalkulasi yang sangat matang. Politik tak mengenal usia, selama masih mampu. Seperti peringatan Churchill, dalam politik Anda bisa terbunuh berkali-kali. Tapi, mestinya juga bisa hidup berkali-kali pula. Tapi, petuah Jawa yang saya sebut berkali-kali dalam buku ini, perlu diperhitungkan: *ojo nggege mongso, ojo rumonso biso, nanging bisoo ngrumangsani*. Janganlah merasa sebagai politisi itu sempurna. Jangan merasa serba-bisa, tapi bisalah merasa. Merasa yang dimaksud adalah tahu diri.

Bagaimana supaya orang tidak terjangkiti *post-power syndrome* setalah orang itu tak berkuasa lagi?

O, itu terkait dengan soal psikologi. Dan tampaknya kita harus ikuti kisah yang dipaparkan Psiko-Analis Carl Gustav Jung berikut:

> Seorang pengusaha Amerika yang semula penuh dengan energi dan semangat berhasil dalam bisnisnya, berubah menjadi seonggok kulit daging tak berdaya. Badaniah, ia merasa sakit-sakitan, dan rohaniah ia merasa lemah.
>
> Pengusaha yang berusia empat puluh lima tahun itu, membangun bisnisnya betul-betul dari bawah dengan penuh keuletan, sehingga akhirnya berkembang dan menjadikannya manusia yang sangat berkecukupan. Maka timbullah gagasan untuk menikmati hidup ini, dengan meninggalkan sama sekali kegiatannya memeras otak dan tenaga di bidang bisnis. Ia beli dan sediakan apa saja yang menurut anggapannya bisa mengangkat dirinya.
>
> Tetapi baru beberapa minggu melaksanakan niatnya itu, ia telah mulai merasakan terjadinya gangguan-gangguan rohaniah-jasmaniah, dan akhirnya ia selalu resah, gelisah dan dilanda kekhawatiran. Ia lalu mendatangi seorang

8 http://news.okezone.com/read/2015/10/12/18/1230276/ketika-mantan-presiden-as-raih-hadiah-nobel-perdamaian (diakses, 12 Desember 2015).

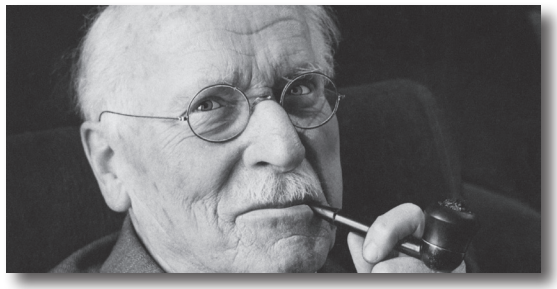

HUFFINGTONPOST.COM

Visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri

- Carl Gustav Jung

Your vision will become clear only when you can look into your own heart.

spesialis yang terkenal.

Ternyata diagnosanya: fisik maupun mental sebenarnya tidak apa-apa. Hanya kurang kegiatan kerjalah yang menyebabkannya merasa tertimpa berbagai macam gangguan badaniah, dan tertindih keresahan dan kekhawatiran. Maka, sepulangnya dari konsultasi itu, ia berusaha untuk bergiat kembali dalam bisnisnya semula. Tetapi, penuh kecewa, ia merasa tidak bisa lagi membangkitkan lagi minatnya di bidang usaha, tidak bisa mengembangkan kembali energi dan keuletannya semula. Kegagalan ini tentu saja menyebabkan kondisinya yang lebih parah...[9]

Itulah gambaran *post power syndrome* alias sindrom pasca-kekuasaan. Dalam dunia politik hal itu juga bisa terjadi. Orang yang tak siap betul menjadi politisi dengan segala konsekuensinya, maka *post power syndrome* menghantui. Tetapi politisi sejati, tak pernah terhinggapi *post power syndrome*, justru karena paham betul bahwa politik bukan satu-satunya pendekatan untuk mengabdi. Para politisi-veteran atau mantan politisi yang demikian, akan selalu saja menemukan kegiatan baru, wilayah tempat dirinya menyibukkan diri berbuat sesuatu.●

9 Swantoro (2007:72).

Bagian 5

Ragam Pertanyaan Tambahan

Hal-hal yang Tersisa

MUSLIMPHILOSOPHY.COM

Sepanjang sejarah banyak bangsa menderita kekalahan fisik, tapi ia tak pernah menandai akhir bangsa itu. Tapi ketika ia menjadi korban kekalahan psikologis, maka itulah tanda akhir sebuah bangsa

- Ibnu Khaldun

Throughout history many nations have suffered a physical defeat, but that has never marked the end of a nation. But when a nation has become the victim of a psychological defeat, then that marks the end of a nation.

Bab 21

Post-Truth, Generasi Milenial, dan Masa Depan Pemimpin Politik

Mengalami Zaman *Post-Truth*

KINI KAN zamannnya sudah lain. Buku ini pun secara esensial sudah menyinggung bahwa perkembangan IT telah menyebabkan revolusi komunikasi. Dampaknya dalam politik kontestasi pun luar biasa ...

Ya, dan karenanya kita perlu membahas kata penting yang muncul belakangan: *post-truth*, pasca-kebenaran. Kata itu muncul sebagai *the word of 2016*, yang memopulerkan ialah *Oxford Dictionaries*. *Post-truth* merupakan kata sifat yang menegaskan suatu keadaan di mana daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik, ketimbang fakta yang objektif. Dalam kamus itu dicatat: *Post-truth: relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.* Mari kita telaah apa dalih *Oxford Dictionaries* tertarik pada *post-truth*, bahwa,

> *Post-truth* ... pertama kali digunakan ... dalam esai pada 1992 oleh ahli sandi Arab-Amerika ... Steve Tesich di majalah *The Nation*. Merefleksikan skandal Iran-Contra dan Perang Teluk Persia, Tesich meratapi bahwa 'kita, sebagai

orang merdeka, telah dengan bebas memutuskan bahwa kita ingin hidup di dunia pasca-kebenaran'. Ada bukti ungkapan *post-truth* yang digunakan sebelum artikel Tesich, namun ternyata dengan makna transparan 'setelah kebenaran diketahui', dan tidak dengan implikasi baru bahwa kebenaran itu sendiri menjadi tidak relevan.

Sebuah buku, *The Post-truth Era*, oleh Ralph Keyes muncul pada 2004, dan pada 2005 komedian Amerika Stephen Colbert mempopulerkan sebuah kata informal yang berkaitan dengan konsep yang sama: *truthiness*, yang didefinisikan oleh Kamus *Oxford* sebagai 'kualitas yang tampak atau dirasakan sebagai Benar, bahkan jika belum tentu benar'. *Post-truth* memperluas gagasan itu dari kualitas asersi yang terisolasi hingga karakteristik umum zaman kita.[1]

Kata *post-truth* juga sering dilekatkan pada fenomenaa kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS yang banyak berkomentar bohong melalui medsosnya, demikian pula dengan fenomena *Brexit*, keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Hal ini dikaitkan dengan pemanfaatan medsos yang gencar dengan metodologi *post-truth*. Sejak 2004 hingga 2016, dicatat penggunaan kata *post-truth* naik 2.000%, dan banyak dilekatkan pada isu-isu politik.[2]

Hoax, berita palsu (*fake news*), penyesatan informasi, di era post-truth ini, sudah menjadi bagian integral sehari-hari ...

Ya, makanya kita harus hati-hati, waspada, rajin cek dan ricek (*tabayun*), agar tidak menjadi korban, dan terperosok terlalu dalam dalam labirin pasca-kebenaran. Saya pernah mengilustrasikan bahwa *post-truth* itu bak siluman ular, sepertinya nyata tapi palsu, dan kita memang susah untuk membedakan mana yang benar/asli, mana yang palsu. Persis kisah siluman ular di serial sinetron di televisi. Siluman ular dalam sinetron itu terus ber-aksi mengelabui semua orang. Misalnya, adegan menegangkan seekor ular kobra besar tengah melilit perempuan tua yang berteriak-teriak minta tolong. Tapi suaminya tak segera menolong, justru sibuk berdebat dengan anak laki-lakinya. Sang ayah melarang anaknya menolong sang ibu. Sang ayah berpendapat, bisa saja istrinya jelmaan siluman ular. Dia yakin siluman tengah mengelabui. Tapi anaknya berpendapat sebaliknya: perempuan tua itu asli ibunya, ular kobra itu siluman. Perdebatan keduanya bertele-tele saat sang perempuan tua terus merintih. Keluarga itu terpecah dalam ketidakpercayaan satu sama lain karena siluman ular bisa menjelma siapa saja.[3]

Jadi, hoax itu sangat berbahaya ya?

1 En.oxforddictionaries.com

2 M Alfan Alfian, *Media, Hoax, dan Siluman Ular*, Koran Tempo, 17 Februari 2017

3 Secara mendalam lihat antara lain, Davis (2017)

Hoax dibuat agar masyarakat masuk perangkap labirin konflik. Para "siluman ular" sengaja membuat perangkap melalui variasi berita bohong sebagaimana diklasifikasikan dalam teori propaganda, mereka mengacak-acak kemapanan untuk meraih tujuan politik atau bisnis. Cara kerjanya nyaris seperti orang melempar bom atom. Atom-atom hoax menyebar sedemikian cepatnya melalui medsos. Orang yang meyakininya sebagai kebenaran ikut-ikutan menularkannya, sehingga daya sebar dan rusaknya super-efektif. Orang tergiring ke jebakan labirin benar-salah: diri sendiri dan kelompoknya yang paling benar, semua yang di luar salah.[4]

Kalau dalam politik?

Perbedaan pendapat yang terpicu hoax mendorong divergensi politik dan sosial lebih luas. Ujungnya kekacauan. Inilah yang diingatkan Eric Schmidt dalam *The New Digital Age* (2013). Pada abad digital baru ini, Schmidt mencatat, media digital menyediakan peluang sama bagi semua orang untuk seluas-luasnya berbuat kebaikan atau kejahatan. Potensi perbuatan baik sebanding dengan yang jahat. "Siluman ular" begitu pandai dalam menyamar sebagai sosok-sosok yang baik hati, protagonis, pahlawan, atau pembela kebenaran. Dia bisa menjelma artis, politikus, tokoh agama, birokrat, aparat keamanan, wartawan, siapa saja.[5]

Lantas, di mana posisi media arus utama?

Mereka diharapkan menjadi pemandu dan rujukan agar masyarakat tidak terjerembap ke dalam labirin konflik akibat hoax, menjadi lawan tanding "siluman ular": tampil sebagai pendekar sakti yang dipercaya masyarakat. Namun, itu bergantung sejauhmana mereka konsisten dan mampu bekerja dalam kerangka etika jurnalistik serta tidak larut politik praktis. Media arus utama tak dimungkiri punya kepentingan bisnis dan politik. Karena itu, masyarakat tetap mencermati obyektivitas dan sudut pandang pemberitaannya, apakah mereka tampil sebagai pendekar sakti atau malah bagian integral "siluman ular".[6]

Generasi Milenial dan Seterusnya

Bagaimana dengan Generasi Milenial?

Ya, Generasi Milenial itu suatu sebutan yang dikaitkan dengan periode masa kelahiran. Yang termasuk kategori Generasi Milenial (Generasi Y)

4 M Alfan Alfian, *Media, Hoax.*

5 M Alfan Alfian, *Media, Hoax.*

6 M Alfan Alfian, *Media, Hoax.*

ialah orang-orang yang lahir 1965-1994. Disebut milenial karena mereka satu-satunya generasi yang pernah melewati milenium kedua sejak teori generasi ini diembuskan pertama kali oleh Karl Mannheim pada 1923. Dalam esai berjudul "*The Problem of Generation*," sosiolog Mannheim mengenalkan teorinya tentang generasi. Menurutnya, manusia-manusia di dunia ini akan saling memengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena melewati masa sosio-sejarah yang sama. Maksudnya, manusia-manusia zaman Perang Dunia II dan manusia pasca-PD II pasti memiliki karakter yang berbeda, meski saling memengaruhi. Berdasarkan teori itu, para sosiolog membagi manusia menjadi sejumlah generasi: Generasi Era Depresi, Generasi Perang Dunia II, Generasi Pasca-PD II, Generasi Baby Boomer I, Generasi Baby Boomer II, Generasi X, Generasi Y (Milenial), dan Generasi Z.[7]

Generasi Milenial mengalami perubahan, mulai dari adanya jasa antarjemput, jasa *delivery* makanan atau memesan tiket nonton di bioskop hanya dengan sekali klik saja. Kemudian lahir generasi Z (lahir pada 1995-2010) yang sudah mengenal teknologi lebih canggih. Generasi Z juga dikenal sebagai *iGeneration*, lahir di zaman internet sudah semakin maju. Selanjutnya, Mark McCrindle menyebut orang-orang yang lahir pada 2010 dan setelahnya merupakan Generasi Alfa: generasi paling terdidik, karena memiliki kesempatan sekolah yang lebih baik dan jauh lebih akrab dengan berbagai aplikasi *online*.[8]

Apa ciri penting generasi-generasi itu? Bagaimana bila dikaitkan dengan konteks kepemimpinan?

Perkembangan IT-lah yang terutama menyebabkan pola kerja berubah, dari konvensional ke *unconventional*. Mereka tak terikat tempat dan waktu, jejaring semakin efektif. Individualisme tinggi, profesional berorientasi hasil, tetapi juga secara umum lebih antisosial (diasumsikan kecerdasan emosional dan sosialnya cenderung menurun). Dari mereka dituntut, yang utama justru, orisinalitas dan integritas, tak semata-mata kerja cepat dan efektif. Tetapi, saya membayangkan, tentu mereka pun akan cepat belajar dari fenomena-fenomena politik yang berkembang di era-*post-truth*. Tantangan mereka menjadi dan mencari pemimpin justru ketika mampu membuktikan bukan bagian integral dari atau bahkan "siluman ular" itu sendiri. Generasi-generasi itu juga berorientasi ke pelayanan-pelayanan yang lebih sempurna, sehingga corak pemimpin yang dikehendaki lebih ke, meminjam Nixon, prosa, bukan puisi.●

7 Tirto.id, 28/4/17

8 Gadis.com, 4/5/17

Epilog 1

Pemimpin

Penempuh Jalan Sunyi?

WIKIPEDIA.ORG

Semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan

- Abraham Lincoln

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.

I

MEMIMPIN ITU menderita. Memimpin itu tanggung jawab. Memimpin itu memotivasi. Memimpin itu sunyi. Pemimpin itu yang selesai dengan dirinya sendiri ... Anda bisa menyebut sederet kalimat lain ketika hendak menjelaskan memimpin itu bagaimana. Soal ini sudah kita bicarakan di muka. Dan di akhir buku ini tertinggal satu catatan yang mungkin bagi Anda agak aneh: kekuasaan bukan segalanya. Pendekar sejati itu bukan pemimpin yang bukan berkelas salon, yang merengek pada dan takut kehilangan kekuasaan.

Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meningalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Pemimpin "tak pernah mati". Kalaupun ia mati secara fisik, karena manusia pasti mati, maka warisan atau prestasi kepemimpinannya akan selalu tetap dikenang. Sejarah bisa saja dimanipulasi secanggih mungkin, tetapi yang emas tetap emas — kendatipun dimasukkan ke comberan.

Pemimpin itu lebih dari sang pengatur laku atau ahlinya strategi. Sedangkan strategi itu akar katanya *strategos*, artinya jenderal dan sangat terkait dengan *strategike episteme*, kearifan atau kecangihan berfilsafat sang jenderal. Kalau seorang ahli strategi saja berangkat dari kelas filsafat, maka kelas seorang pemimpin di atas filsafat. Pemimpin adalah filosof plus. Ia yang berpunya kedalaman. Ia yang mampu menyelami. Ia yang punya ilmu-ilmu kedalaman. Tetapi, ia pula yang mengontrol permukaan, justru setelah meninggalkan jauh-jauh ilmu-ilmu permukaan.

Pemimpin otentik tak perlu bedak dan gincu. Ia tak takut keramaian kerumunan, juga pada kesepian dan kesendirian. Ia tak perlu polesan. Pemimpin merubah kerumunan menjadi barisan, jamaah, para pengikut yang visioner, para kader yang mumpuni. Di wilayah dan segmen apa saja, termasuk politik, pemimpin sejati tetap sejati. Karakternya tidak akan luntur oleh godaan.

II

JUSTRU KARENA berat tanggung jawabnya, maka mestinya, jabatan tidak dikeroyok ramai-ramai, diperebutkan. Jabatan memang tak boleh kosong. Harus diisi oleh orang yang tepat, *right man in the right place*. Mungkin Anda berpendapat bahwa etika kita selama ini mengajarkan jangan *ngegge mongso* alias jangan membusungkan dada: pilihlah saya, karena saya (merasa) bisa (*biso rumongso*). Tindakan *over*-aktif demikian hanya akan membuat kita segera masuk ke wilayah di mana kita akan dipersepsikan "kemaruk kekuasaan". Mestinya, kita tetap belajar dan bersabar. Belajarlah ilmu "silat" kepemimpinan. Kuasailah *jurus* kapasitas, integritas, totalitas, dan segala jurus wajib lainnya. Bersabarlah untuk tidak *ngegge mongso*, bercerminlah — bisalah merasa (*biso o ngrumangsani*). Biarlah orang mendesak Anda, menunjuk Anda sebagai pemimpin. Polanya *bottom up*, bukan *top down*.

Tapi, sebagian yang lain menganggap pandangan demikian, aneh. Jalan demokrasi pun membalik pendapat demikian. Bila Anda mau jadi pemimpin, apalagi pemimpin politik maka, Anda harus *ngoyo* dan jangan hanya sekedar *nrimo*. Anda harus memaparkan niat Anda sejelas mungkin, dan berkampanye agar Anda memperoleh dukungan politik.

Ngoyo artinya berupaya mematahkan ketidakmungkinan demi ambisi Anda. Jabatan harus dicari sedemikian rupa (rakus, *kemaruk*), dengan sesusah payah apapun dan cara apapun (termasuk dengan jalan Ken Arok). *Ngoyo* bisa berarti, kalau Anda menuruti nasihat irasional berikut: Anda akan terpilih menjadi lurah atau kepala desa, kalau Anda mampu berjalan telanjang sendirian di dini hari melingkari jalan Desa — dan kalau ada seseorang yang melihat, gagallah keinginan Anda.

Ngoyo adalah apabila Anda menjual kebun, sawah, rumah, mobil dan semuanya untuk memodali ambisi politik, karena Anda merasa jalan politik yang ditempuh membutuhkan modal finansial yang besar — karena politik senantiasa berpola transaksional. Anda sebenarnya sadar bahwa kalau semua itu kurang masuk akal, tetapi kemudian teman Anda mengatakan semua itu justru sangat masuk akal. Berjudi saja perlu modal besar, apalagi berpolitik, katanya. Dan kemudian Anda terbujuk, lalu membayangkan kalau Anda berkuasa, modal bisa kembali cepat, bahkan berlipat-lipat. Gaji formal sebagai pejabat "tak seberapa", tapi "sabetannya"? Dan lantas benarlah ucapan "kalau mau kaya jadilah politisi".

Lalu kekuasaan diperebutkanlah oleh para pemburu, yang oleh Iwan Fals seperti kuda yang nafasnya terengah-engah. Pisang masak pohon berlomba dengan pisang karbitan. Para pemburu kekuasaan dan pemburu *rente* kekuasaan satu sama lain terengah-engah, bekerjasama dan bersaing

atas nama kepentingan, dengan memperobyekkan "rakyat". Lalu terkotak-kotaklah masyarakat, memudarlah modal sosial karena percekcokan. Itulah kritik atas demokrasi prosedural yang menafikan substansi demokrasi itu sendiri. Dan ketika "uang menjadi panglima" — dalam demokrasi apapun. Kalau itu faktanya, kita tengah berada dalam pusaran dan lingkaran kemerosotan peradaban politik — waspadalah.

III

DALAM DEMOKRASI prosedural, Nurcholish Madjid pernah mengingatkan — sebagaimana dikutip pula dalam buku ini — bahkan, "setan gundul" pun bisa terpilih jadi pemimpin. Hal ini bisa dipahami, mengingat suara rakyat lah yang menentukan. Prinsip *one person one vote one value* (OPOVOV), menyebabkan derajat seorang jenderal sama dengan derajat seorang pengangur. Demokrasi merupakan suatu proses yang berjalan khas: dimana "kekuatan kejahatan" dan "kebaikan" tak jelas batas-batasnya, tenggelam dalam prosedur dan persaingan yang sarat simbol dan mitos. Bukankah orang seperti Hitler pun bisa terpilih?

Yang kita rindukan, angan-angankan, ialah hadirnya pemimpin yang tepat zaman. Kalau Hatta mengutip Schiller, kita berada pada abad yang besar, tetapi banyak menjumpai manusia-manusia kecil, sesungguhnya ia rindu dengan manusia-manusia pemimpin yang tepat zaman. Ia yang sanggup mengatasi segala soal yang mengelayuti zamannya. Abad yang besar, mestinya dipimpin "manusia-manusia besar", yang berjiwa besar, bijak-bestari, rasional-manusiawi, bertanggungjawab lebih dibanding yang lain; bukan "manusia-manusia kecil" yang terperangkap yang serba-permukaan yang palsu, yang tidak sejati, yang *instan* — yang selalu bertindak sia-sia, sebagaimana digambarkan Albert Camus sebagai *Mite Shysiphus*, legenda manusia kuat yang mendorong bongkahan batu besar ke bukit terjal dan selalu merosot ke bawah.

Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Tinggal kita setel ke mana *mindset* kita: ke arah pemimpin sejati atau instan. Bisakah kita menjadi pemimpin sejati dengan jalan transaksional, jalan Ken Arok? Lebih dari setengah abad yang lalu Jenderal Sudirman telah menyediakan jawaban, "Perjuangan kita adalah untuk menegakkan kesucian. Akankah itu tercapai kalau jiwa kita tidak suci?"

Jadi, sebagaimana ditekankan dalam buku ini persoalan cara (untuk meraih kekuasaan dan menjadi pemimpin politik) penting. Ada tujuan antara (*intermediate goal*) ada pula tujuan utama (*ultimate goal*). Jabatan atau kekuasaan politik adalah tujuan antara untuk mewujudkan tujuan

(visi) utama. Maka kekuasaan itu perlu, tapi bukan segala-galanya — karena justru letaknya di wilayah tujuan-antara itu.

Toh, jalan politik bukanlah satu-satunya. Ada jalan kultural yang lebih fleksibel. Imbas politik bisa jangka pendek. Tetapi imbas kultural bisa jangka panjang. Politik itu salah satu pintu dari pintu-pintu lain yang terbangun di rumah peradaban, yang kultural. Uni Sovyet hancur berkeping bak reruntuhan Tembok Berlin di awal 1990-an. Proyek politik yang dilakukan sepanjang 70-an tahun kekuasaannya, ternyata tak mampu menggerus kultur peradaban di negara-negara yang pernah dipaksa bergabung dengannya. Survivalitas kultural lebih awet ketimbang politik —ternyata.

IV

PEMIMPIN SEJATI adalah penempuh jalan sunyi. Istilah jalan sunyi mengingatkan bait-bait syair Emha Ainun Nadjib, yang menyiratkan pesan bahwa para penempuh jalan sunyi yang "sendiri dilubuk hati" yang mendendangkan "puisi yang kusembunyikan dari kata-kata". Jalan sunyi atau jalan sepi seorang pemimpin, menurut Colin Powell, justru disebabkan oleh satu kata: tanggung jawab.

Kita catat lagi apa yang disampaikan Powell: "Memimpin itu sepi. Keputusan akhir terletak pada pemimpin, dan para pemimpin yang kuat menerima beban kedudukannya". Pada akhirnya sang pemimpinlah yang memutuskan. Maka ia butuh kesunyian, jeda, kejernihan. Ketika orang tertidur lelap, pemimpin tidak — ia memikirkan "rakyatnya", selalu mencari kejernihan, agar yang diputuskan yang terbaik, tidak asal-asalan atau gegabah.

Jalan yang sunyi juga menyiratkan pesan, pemimpin itu sederhana saja — tapi jusru menjadi teladan bagi yang lain. Itulah pemimpin yang menurut istilah *Wulangreh* — sebagaimana sering dikutip Sartono Kartodirdjo — *mesu budi*, yang prihatin di atas kenyataan, tetapi tidak lari lari kenyataan — ia seorang sufi di tengah keramaian. Etos dan spirit *mesu budi* itu nilai yang secara produktif menggerakkan — semacam yang dijelaskan Max Weber sebagai etika Protestan dalam kapitalisme atau Robert N Bellah sebagai religi Tokugawa dalam masyakarat Jepang. Juga dalam nilai agama (Islam) yang mengajarkan etos perdagangan secara jujur dan adil, di mana pemimpin itu "distributor kesejahteraan".

Nabi sendiri seorang pedagang, juga panglima perang, juga yang pasti seorang moralis sejati, yang sederhana, yang hingga detik-detik menjelang wafatnya, masih terus memikirkan umatnya, "umatku, umatku, umatku..."●

Epilog 2

Kepemimpinan Politik Konteks Keindonesiaan

Pandangan Reflektif

TWITTER.COM/@TUKANGPULAS

Hendaknya perjuangan kita dasarkan pada kesucian. Dengan demikian, perjuangan lalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci

- Jenderal Sudirman

I

MASALAH KEPEMIMPINAN ialah masalah abadi. Demikian juga dalam konteks Keindonesiaan kita. Karena Indonesia negara demokrasi yang meniscayakan kontestasi politik, maka pemimpin-pemimpin politik hadir dalam atau sebagai dampak ritual politik pemilu. Di buku ini juga sudah disinggung konsekuensi suatu pemilu yang berlangsung secara prinsip *one person one vote one value*. Barangkali, kita hanya sekadar memperoleh pemimpin yang biasa-biasa saja alias medioker, tetapi peluang untuk mendapatkan pemimpin yang sejati dan tepat untuk memimpin daerah dan bangsa secara luas, juga terbuka. Maka, masalahnya adalah, lebih terletak pada proses penyiapannya: ladang-ladang penyemai kepemimpinan harus hidup dan tumbuh subur.

Ladang-ladang penyemai kepemimpinan itu secara khusus ada di partai-partai politik. Lazim saja disebut sebagai ladang penyemai utama kepemimpinan politik, mengingat partai-partai politik merupakan organisasi yang secara sengaja dimaksudkan untuk berpolitik: ada visi dan tujuan politik yang jelas, ada kegiatan politik yang dibikin secara sistematis dan tertata, ada elite-elite partai yang menggerakkan, ada kader-kader, ada infrastruktur politiknya hingga marambah ke mana-mana. Tetapi, ladang-ladang penyemai kepemimpinan politik, sesungguhnya juga ada di mana-mana: di berbagai ormas, LSM, organisasi kemahasiswaan, organisasi bisnis, dan sebagainya. Kelak, mereka bisa muncul dan saling berkompetisi dalam suatu kontestasi yang aturan mainnya demokrasi.

Kita tahu bahwa sistem demokrasi bukan tanpa cela alias kelemahan. Kelemahan itu ada, misalnya, sebagaimana lazim dilontarkan berbagai kalangan, dan juga menjadi salah satu perbincangan buku kita ini, ialah bahwa demokrasi tidak menjamin akan secara otomatis memunculkan pemimpin yang sejati atau, sebagai lawan dari konteks pemimpin medioker ialah "pemimpin besar". Bahkan, jebakan populisme politik sering hadir dan mengarahkan masyarakat untuk memimpin "pemimpin palsu", bukan yang sejati, tetapi yang memiliki karakter dan kebijakan politik yang jahat, atau

dalam kalimat candaan Cak Nur (Nurcholish Madjid), "setan gundul".

Demokrasi itu sendiri unik. Dia punya nilai-nilai universal, yang secara membentuk suatu karakter demokrasi substansial. Ada prinsip egalitarianisme. Kesederajatan menjadi hal utama. Juga ada anti-kekerasan, anti-otoriterisme, anti-penodaan terhadap HAM. Demikianpun prinsip "*cheks and balances*". Semua itu berdampak pada praktik demokrasi prosedural yang melibatkan partisipasi politik publik secara luas. Demokrasi sudah menjadi suatu kecenderungan dunia ketika para Pendiri Bangsa (*The Founding Fathers*) memilih mendirikan negara Republik, bukanlah sistem kerajaan, monarkhi absolut, tak juga monarkhi konstitusional. Mereka melangkah maju, dengan penuh kesadaran dan konsekuensi lanjutan yang berdampak ke generasi seterusnya, bahwa Negara Republik yang konstitusional-demokratislah yang dipilih. Demokrasi berarti ada nilai-nilainya. Proses proseduralnya mempersyaratkan adanya partai-partai politik peserta pemilu. Di luar itu masyarakat bebas membentuk organisasi, perkumpulan, sebagai ekspresi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi (kecuali, mereka yang menyimpang dari konstitusi yang berdasarkan ideologi Pancasila).

II

KEPEMIMPINAN INDONESIA berangkat dari karakter Keindonesiaan itu sendiri. Jelaslah bahwa Indonesia kita sebagai negara ialah Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Indonesia merupakan akumulasi dari prosesnya yang panjang: proses sejarah, proses dialog, proses pergumulan satu sama lain, dari suatu masyarakat yang punya pengalaman yang relatif sama berabad-abad di bawah penjajahan atau kolonialisme/imperlialisme bangsa asing (Belanda). Lalu mereka, terutama digerakkan oleh para elite pergerakan kemerdekaan berjuang untuk mewujudkannya. Mereka bersama rakyat merebut kemerdekaan dan membingkai suatu negara baru yang bernama Indonesia. Bahwa Indonesia negara yang luas dan kaya keragaman, memiliki posisi strategis dalam percaturan dunia, setelah kemerdekaannya diwarnai proses dan dinamika sejarah kepolitikan yang tidak selalu mulus, ya. Bahwa wajah Indonsia kita masih dirundung banyak masalah klasik hingga dewasa ini, ya. Itulah Indonesia kita.

Gambaran tentang Indonesia dan Keindonesiaa kita, antara lain dapat diambil potretnya ketika perayaan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Tentu ilustrasi ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan kebesaran hari-hari besar agama lainnya, tetapi secara kontekstual terkait dengan kultur Keindonesiaan kita yang religius. Merayakan lebaran berarti merayakan Keindonesiaan. Peristiwa mudik kolosal dan tradisi silaturahim saling maaf-me-

maafkan antarwarga bangsa menandai kekhasan budaya Indonesia. Semua warga bangsa yang majemuk melebur ke dalam suka cita kemanusiaan yang bernuansa religius. Karenanya tak berlebihan, manakala apabila ciri manusia Indonesia Mochtar Lubis ditambah satu lagi, maka jelas bahwa kalau lebaran mereka mudik dan bersilaturahim. Itu adalah ciri positif mengingat memperkuat modal sosial kebangsaan.

Indonesia merupakan bangsa yang religius. Islam masuk ke Indonesia, terutama dilakukan melalui pendekatan kebudayaan. Dalam perkembangannya penganut agama Islam berinteraksi dengan kultur kegamaan sebelum dan sesudahnya. Islam telah turut mewarnai dinamika kebangsaan, terutama dalam konteks kebudayaannya. Dalam konteks ini, relevan kiranya, manakala organisasi *Nahdlatul Ulama* (NU) mengelaborasi esensi dan praktik Islam Nusantara. Bahwa keberadaan Islam di Nusantara merupakan unsur perekat kebangsaan yang penting sepanjang sejarahnya. Di sisi lain, Islam juga merupakan sumber energi bangsa dalam menggapai kemajuan. Karenanya relevan pula, manakala organisasi Muhammadiyah menggemakan tema Islam berkemajuan. Eksistensi Indonesia sebagai negara berdasarkan Pancasila, tak terlepaskan dari *ijtihad* para ulama. Dalam perspektif Muhammadiyah, Pancasila merupakan *darul ahdi wa syahadah*, suatu konsensus nasional segenap elemen bangsa, di mana mereka saling mengisi untuk kemajuan bersama.

Keindonesiaan dan keislaman, dalam konteks ini, telah membentuk suatu formula kita dalam berbangsa. Karena, merupakan sesuatu yang ahistoris manakala Pancasila dipertentangkan dengan Islam. Di sisi lain, sudah tampak nyata dan tak terelakkan dalam sejarah bahwa selain sebagai perekat kebangsaan, melalui apa yang dikatakan Bung Karno sebagai "apinya Islam" diharapkan umat Islam Indonesia mampu mendorong percepatan dalam meraih kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, mendekatkan harapan dan kenyataan memerlukan ikhtiar kolektif yang komprehensif di tengah kompleksitas tantangan bangsa.

Salah satu tantangan krusial dewasa ini, selain kesenjangan sosial-ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia, terfokus pada fenomena pembajakan terhadap Islam untuk kepentingan politik melalui jalan kekerasan atau terorisme. Merebaknya pengatuh ideologi transnasional di satu sisi dan masih menghebatnya masalah-masalah sosial ekonomi menghadirkan radikalisme yang destruktif. Maka, ikhtiar deradikalisasi terhadap mereka yang terjebak pada kelompok ekstrim radikal, perlu terus dilakukan melalui formula yang tepat dan komprehensif dengan menyentuh akarnya. Tentu saja Islam merupakan agama damai, bukan agama teror. Al Quran sarat dengan pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan. Tidak saja, terkan-dung di

kitab tersebut pemahaman terhadap realitas kemajemukan umat manusia (QS 49:53), tetapi juga pesan-pesan kemanusiaan paripurna, dan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan. Al Quran menegaskan, "Barangsiapa menyelamatkan satu jiwa (nyawa satu orang), maka ia seolah telah menyelamatkan jiwa (nyawa) semua orang." (QS. 5:32).

III

KEPEMIMPINAN INDONESIA berangkat dari karakter Keindonesiaan yang majemuk, sebagai negara yang berideologi Pancasila. Jelaslah wawasan Kepancasilaan mutlak bagi pemimpin politik Indonesia. Pancasila ialah milik bersama segenap warga bangsa. Merunut pengalaman sejarah, jangan sampai ada pihak-pihak yang justru merasa terkucil atau terpojok karena tidak ikut dalam jargon-jargon pro-Pancasila, sehingga seolah-olah menjadi pihak yang anti-Pancasila. Yang diperlukan justru bagaimana semua elemen bangsa merasa memiliki Pancasila, sehingga timbul niat yang sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya konteks nilai-nilai, tetapi aktualisasi Pancasila juga bisa mewujud dalam suatu sistem, di mana dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat strategis.

Pancasila seyogyanya tidak ditampilkan sebagai doktrin ideologis yang mati, melinkan hidup, dinamis, selaras dengan paradigma Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini penting, ketika kelak Pancasila didialogkan kembali di lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lebih luas. Pemahaman tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, antara lain pernah dilontarkan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam makalahnya berjudul, "Nilai-nilai Keindonesiaan Umum: Antisipasi terhadap Kecenderungan Konvergensi Nasional" yang disampaikan pada seminar sehari "Mencari Nilai-nilai Baru dalam Paham Kebangsaan" yang diselenggarakan Harian *Kompas* pada 1985, Cak Nur memulainya dengan sikap optimis dan rasa syukur terkait kondisi bangsa dan kecenderungan umum "pertumbuhan ke arah konvergensi nasional pada tataran sosial budaya".

Cak Nur menggarisbawahi, pada tingkat perkembangannya, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai nasion. Kendati demikian, tetap ditekankan kecenderungan umum "ke arah suatu konvergensi nasional", yakni "suatu hasil bentuk saling pengertian, *mutual understanding*, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima". Menurutnya, kencenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional, dalam arti lahiriah maupun maknawiyah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Cak Nur menegaskan, jika budaya Indonesia

ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah, nilai Keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitanisme, bukan nativisme. Nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme, jika bukan sukuisme. Maka "karakter kosmopolit" sebagai *common denominator* kelompok-kelompok anggota bangsa atau berbagai segmen nasional menjadi penting.

Dalam konteks itulah, Cak Nur memaparkan konteks Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurutnya, sebagai rumusan tentang cita-cita nasional yang tinggi, Pancasila tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Karenanya, menurutnya, pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif (terus-menerus membuat kemajuan) hanya terjadi jika dijiwai oleh semangat keterbukaan. Selanjutnya, "Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila itu, baik masing-masingnya secara terpisah maupun keseluruhannya secara utuh, jelas sekali mempunyai dimensi yang bersifat universal. Karena keuniversalannya itu, Pancasila tidak mungkin diwujud-nyatakan dengan semangat nativistis atau atavistis. Ia menghendaki kesediaan yang cukup besar dari bangsa Indonesia untuk menimba dari pengalaman manusia sejagat".

Cak Nur mengingatkan Pancasila bisa tak lepas sebagai "objek manipulasi", bahwa, "Pancasila bisa berfungsi tak lebih daripada suatu alat politik, suatu ideological weapon untuk kepentingan sesaat". Sedangkan, yang amat kita perlukan, "Pancasila yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan", maka semua pihak harus "lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila", yakni, "usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan "pengusutan" kepada keadaan sekarang." Di sini berarti, "dikehendakinya adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ke sanalah muara konvergensi nasional kita, nilai Keindonesiaan kita".

IV

KEPEMIMPINAN INDONESIA berangkat dari karakter Keindonesiaan juga menuntut kecanggihan pengelolaan manajemen kebangsaan, yang memang terutama menjadi tanggung jawab negara, tetapi tentu juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia yang plural ini. Menahan diri, mencari jalan keluar bersama-sama dalam semangat hikmat kebijaksanaan dan persatuan Indonesia, semakin urgen untuk diprioritaskan ketika letupan-letupan potensi konfliktual bangsa ini terasakan. Dalam konteks ini, secara sosial-politik, dinamika kehidupan bangsa yang sejak kemerdekaan meniscayakan penerapan sistem demokrasi yang kontestatif, lazimlah diakhiri oleh ikhtiar mempertegas kembali titik-titik temu kebangsaan. Kon-

sensus kebangsaan tentu lebih utama ketimbang konflik yang terus terpelihara. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Praktik demokrasi politik kontestatif di tengah masyarakat majemuk, bagaimanapun, selalu berhadapan dengan risiko menajamnya konflik akibat politisasi identitas.

Dalam kadar yang normal, kontestasi identitas lumrah saja apabila dikaitkan dengan konteks hak warga negara untuk menjadi pemilih model sosiologis. Berbeda dengan model psikologis yang mengidentifikasi dirinya dengan partai politik tertentu dan model pilihan rasional atau ekonomi politik, pemilih model sosiologis ditentukan oleh karakter sosiologis pemilih, terutama kelas sosial, agama, maupun etnis, kedaerahan atau bahasa. Tetapi, *jor-joran* politik identitas, tentu sangat membahayakan keutuhan nasional, mengingat ia bisa semakin mempertegas polarisasi politik yang berpotensi pada konflik sosial yang mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks inilah semua pihak harus belajar bahwa konflik yang muncul sebagai dampak politisasi identitas jauh lebih berbahaya ketimbang konflik-konflik politik pragmatis. Identitas keagamaan dan etnisitas merupakan jenis yang dampak politisasinya sangat fatal.

Dalam konteks ini, Huntington (2004) mencatat, sesungguhnya identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan (*be constructed*), di mana identitas ganda (*multiple identities*) dimungkinkan terjadi, mengingat identitas merupakan produk interaksi yang penonjolannya bersifat situasional. Politisasinya telah memancing penonjolan identitas secara konfrontatif dan polarisatif. Sementara Snyder (1997) mencatat fenomena demikian sebagai konflik nasionalisme SARA (*ethnic nationalism*), merujuk mengemukanya solidaritas yang dibangkitkan oleh persamaan budaya, bahasa, agama, sejarah, dan sejenisnya. "Setiap gerakan yang menjauh dari demokrasi sipil dan mengarah ke demokrasi SARA," catat Snyder, "bakal merongrong perdamaian demokratis." Dalam konteks inilah, penting digarisbawahi, sejauh mana politisasi identitas mampu "merongrong perdamaian demokratis".

Castells (1997) mencatat tiga jenis identitas, yakni identitas yang melegitimasi (*legitimizing identity*), identitas perlawanan (*resistance identity*), dan identitas proyek (*project identity*). Jenis identitas pertama dilakukan oleh institusi-institusi dominan untuk memperluas dan merasionalisasi dominasinya. Yang kedua, dibangkitkan oleh mereka yang berada dalam posisi yang dikecilkan atau distigmatisasi oleh logika dominasi. Yang ketiga terkait ikhtiar membangun identitas baru dengan mendefinisikan ulang banyak hal yang berdampak pada transformasi struktural. Terlepas konteksnya ialah merespons globalisasi, konsep proyek identitas Castells tersebut bisa direfleksikan guna mengikhtiarkan suatu konsensus baru dalam kerangka menyegarkan kembali hakikat persatuan Indonesia. Persatuan In-

donesia harus diturunkan dari sebatas jargon sila ketiga Pancasila ke dalam ikhtiar proyek identitas kebangsaan yang tanpa henti.

Membangun identitas baru Keindonesiaan mutakhir bukan berarti meniadakan atau mengingkari identitas Keindonesiaan para pendiri bangsa (*the founding fathers*), tetapi justru memberi pemaknaan baru dan kontekstual yang selaras dengan dinamika, tantangan, dan kebutuhan hakiki bangsa di zaman kita. Rekonstruksinya harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Semuanya harus siap untuk saling belajar, tidak saja menghargai perbedaan dan toleransi, tetapi juga — di era kebebasan informasi ini — semua pihak agar mampu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa saling melukai. Tantangan bangsa Indonesia semakin kompleks. Bangsa ini semakin dituntut berlari cepat, bisa mandiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Persatuan Indonesia mutlak adanya.

V

KEPEMIMPINAN INDONESIA berangkat dari karakter Keindonesiaan juga menuntut kecanggihan pemimpinnya menggelorakan etos bangsa. Indonesia bangsa yang religius, yeng ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Religiusitas itu berimpitan dengan etos spiritualitas masyarakatnya. Tapi, sejauhmana dimensi spiritualitas itu mampu memicu kemajuan (ekonomi)? Pertanyaan ini menarik kita perbincangkan kembali di tengah realitas kehidupan bangsa dewasa ini. Indonesia bangsa yang besar, tapi kondisinya seperti raksasa tertidur: berputar-putar di labirin masalah yang kompleks, nyaris belum beranjak signifikan ke arah negara maju. Kita mengamini berbagai retorika para pemimpin tentang perlunya percepatan pembangunan, betapapun sadar juga bahwa tak semudah pelaksanaannya. Apakah bangsa ini ditakdirkan lemah etos kerja betapapun "tinggi spiritualitasnya"? Dalam konteks ini, buku *Wawasan Kepemimpinan Politik* ini juga sudah mengulas konteks ini, tak ada salahnya saya refleksikan kembali di epilog ini.

Hubungan antara spiritualitas dan kemajuan mengemuka pada tesis Max Weber. Etika Protestanlah yang, dalam tesisnya itu, berperan penting membangkitkan kapitalisme di Barat. Merujuk Weber, Robert N Bellah memotret kebangkitan Jepang dari perspektif peran penting spiritualitas religi Tokugawa. Bagaimana dengan Indonesia? Sartono Kartodirdjo pernah memberi ulasan menarik. Merujuk Serat *Wedatama* karya Mangkunegara IV, kita punya "*mesu budi*". Dalam artikelnya "Etos Kerja dan Etos Bangsa" (*Kompas*, 4/3/1989) dan ""Mesu Budi" Berfungsi sebagai Etos yang Berpengaruh" (*Kompas*, 2 Oktober 1983), Sartono memaknai "mesu budi" sebagai etos yang mencerminkan asketisme intelektual, semacam disiplin mental

yang mendasari segala usaha dan pekerjaan. Implementasi "mesu budi" justru terlihat tatkala dia menganalisa etos kerja masyarakat Jepang yang berkembang sejak Restorasi Meiji. Karena "mesu budi" merupakan suatu asketisme yang bukan eskapisme alias religiusitas yang diekspresikan dengan meninggalkan segala urusan keduniaan, maka ia justru berfungsi sebagai etos yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan bangsa.

Tetapi, lantas memang timbul pertanyaan bahwa kalau "mesu budi" itu semacam asketisme produktif yang dapat disejajarkan dengan "etos Protestan"-nya Weber atau "Religi Tokogawa"-nya Bellah, mengapa tidak ada semacam Restorasi Meiji di Jawa, lebih luas lagi Indonesia? Saya punya hipotesis bahwa masalahnya, Jawa punya pengalaman lain. Kultur feodal kerajaan-kerajaan di Jawa, pada praktiknya justru dipersubur oleh kolonialisme. Kaum penjajah punya politik yang memecah belah, sehingga dalam meng-atasi perlawanan pun kaum penguasa pribumi saling diadu domba. Penjelasannya segera dapat dikaitkan dengan konteks munculnya mentalitas permisif akibat yang tak berdaya pada kaum kolonial.

Tetapi sangat mungkin ada hipotesis lain, bahkan yang berkebalikan dengan pendapat saya itu. Bagaimana dengan hal-ikhwal tradisi Samurai layaknya di Jepang, apakah juga ada di Jawa? Kalau ada seberapa signifikan? Juga, sejauhmana mentalitas produsen dan kewirausahaannya, apakah dipicu kesadaran religiusitas pula? Bagaimana dengan modernisasi, apakah ia timbul secara "mandiri" atau banyak menggantungkan diri pada pihak kolonial dan rezim kelanjutannya? Pengalaman kita di Jawa atau Indonesia, lain kiranya dengan yang terjadi di Jepang dan Barat. Jepang, menurut Kishore Mahbubani dalam *Can't Asian Think* (1998) ialah bangsa Asia paling awal yang mampu mengadaptasi etos bangsa Barat.

Perbincangan tentang etos kerja orang Indonesia, sesungguhnya sudah menjadi klasik. Sebelum kemerdekaan pun, ia menyeruak lewat Polemik Kebudayaan antara Sutan Takdir Alisjahbana dengan yang lain. Takdir memicu polemik dengan melontarkan pandangan yang tak jauh dari pesan kalau kita mau maju, tirulah etos bangsa Barat. Bagi Takdir, kita terlalu lemah menyalakan api, sehinga nasi yang kita tanak tak matang-matang. Sedang bangsa Barat, apinya menyala-nyala.

Pada masa Orde Baru, budayawan Mochtar Lubis dalam *Manusia Indonesia* (1978), menyinggung soal "watak yang lemah", sebagai salah satu karakter menonjol manusia Indonesia. Dikatakannya, "Manusia Indonesia kurang kuat dalam mempertahankan dan memperjuangkan keyakinan serta pendiriannya. Hal menjadikan manusia Indonesia cepat berubah prinsipnya, seiring dengan tekanan yang ia dapatkan dari luar dirinya." Uraian tersebut, otokritik yang betapapun menyesakkan, tak boleh kita abaikan.

Ada juga tesis yang mengatakan, kita sebagai bangsa, terjebak pada apa yang kerap diuraikan Nurcholish Madjid sebagai "mentalitas pedalaman", hal yang telah mengubah karakter bangsa yang konon berorientasi "pesisiran". Mentalitas pedalaman mencerminkan ketertutupan, *inward looking*, membatasi informasi, eksklusif, enggan berkompetisi, terlambat dalam mengenali perkembangan baru, lemah dalam kreativitas dan inovasi, merasa jaya di negeri sendiri yang diklaim *gemah ripah loh jinawi*. Konon, kolonialismelah yang juga menyumbang kokohnya mental ini. Indonesia yang berkarakter maritim dijauhkan dari mental pesisiran. Mental pesisiran mencerminkan keterbukaan, melek informasi, *outward looking*, responsif dalam berkompetisi, inklusif, kreatif dan inovatif. Ia lebih produktif, mengingat kalau tidak demikian, bangsa ini akan tergantung terus pada kekuatan asing. Mental pesisiran memaksa kita untuk lebih objektif dalam melihat dan merespons perkembangan bangsa dari perspektif global. Mental pesisiran itulah sesungguhnya yang perlu kita warisi. Indonesia, menurut Sutan Takdir Alisjahbana bukanlah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan di masa lalu, melainkan sebuah bangsa baru. Maka memang harus ada mental baru. Bangsa baru dengan mental baru. Mental baru itu bisa diambil dari manapun, termasuk dalam konteks *Polemik Kebudayaan*, dari bangsa Barat yang cenderung bermental pesisiran.

Kesadaran religius bangsa, sesungguhnya tidak menutup diri pada kemajuan. Dalam perkembangan gagasan Keislaman misalnya, pada masa Polemik Kebudayaan 1930-an, muncullah kampanye asketisme produktif oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Melalui serangkaian artikelnya di majalah yang dikelolanya, HAMKA memperkenalkan perspektif *tasawuf* modern. Dia menarik makna *tasawuf*, penyikapan spiritualitas keagamaan, dari pandangan umum yang bersifat eskapistik menjadi asketisme produktif. Spirit keagamaan dijumpakannya dengan modernitas, kemajuan. Jauh sebelum itu, KH Ahmad Dahlan telah merintis bagaimana spirit Keislaman mendorong kemajuan bangsa melalui gerakan Muhammadiyah. Di sisi lain, gerakan Keislaman *Nahdlatul Ulama* juga punya semangat kemandirian yang tinggi. Ia juga sadar akan etos untuk memajukan bangsa. Dua gerakan Islam arus utama ini penting untuk diperbincangkan, meng-ingat pengaruhnya yang signifikan dalam mewarnai pemahaman dan aktualisasi Keislaman di Indonesia hingga dewasa ini.

Sejak beberapa dekade belakangan ini, kesadaran akan melemahnya etos kewirausahaan dirasakan semua pihak. Lumbung-lumbung produktivitas ekonomi masyarakat goyah karena kalahnya persaingan. Dalam hal ini, kita perlu berkaca pada perkembangan ekonomi Turki. Beberapa penelitian ekonomi Weberian, kini menemukan contoh kasusnya di pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi di jantung Anatolia. Misalnya, Kayseri, "kota santri" yang maju pesat perekonomiannya dan lazim dikaitkan dengan konteks *Islamic Protestantism* atau *Islamic Calvinism*. Dalam kasus Kayseri, spirit keagamaan Islam mampu memicu tumbuhnya wirausahawan kelas menengah secara signifikan. Produk-produk mereka berorientasi ekspor ke Eropa dan yang lain. Namun, apabila kita teliti, sebagaimana Korea Selatan, Turki juga telah lama melakukan ikhtiar pembelaan ekonomi kepada warganya. Di Turki, kebijakan liberalisasi ekonomi yang dilakukan Turgut Ozal pada dekade 1980-an diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Anatolia. Ikhtiar itu berhasil selaras dengan mentalitas kesaleh-an ekonomi yang hasilnya bisa disaksikan sekarang. Di Korea, negara berpihak pada pengembangan industri kreatif. Ia tak akan seberhasil sekarang, manakala tak didukung etos kerja rakyatnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Dari mana etos bangsa kita gali? Jawabnya, dari banyak hal, termasuk dari konteks spiritualitas keagamaan. Bung Karno pernah menyitir tentang "api Islam", tampaknya yang dimaksud ialah bagaimana etos spiritualitas agama mampu dijadikan pendorong bagi kemajuan. Tetapi, apakah dari sudut ini, belumlah muncul apinya, melainkan sekadar abunya? Apakah agama masih banyak didekati dari perspektif yang jauh dari apinya? Apakah elite agama tengah terjebak pada formalitas-formalitas dan sibuk mengurus konflik-konflik yang seharusnya tidak perlu? Kita perlu terus mengaca diri, justru untuk menggali kembali etos bangsa, sebuah etos baru yang kompatibel dengan zamannya. Kalau etos bangsa masih lemah dan ketinggalan zaman, bagaimana mau lari cepat?

VI

PERTANYAAN DEMIKIAN mengingatkan *Polemik Kebudayaan* pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan yang lain. Polemik tersebut respons gene-rasi pasca-Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 terhadap persoalan-persoalan besar bangsa. STA yang masih berusia 27 tahun merumuskan pandangannya secara jelas, betapapun kontroversial. Pemicu polemik tulisan STA, "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, Indonesia dan Pra-Indonesia", yang ditanggapi Sanusi Pane dan Purbatjaraka (Agustus-September 1935). Polemik terus menggelinding hingga 1939, dengan tambahan penanggap: Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro, M Amir, dan Ki Hadjar Dewantara. Tak seperti komentar instan dan singkat di medsos zaman kita, semua pemikiran dalam polemik ditulis dengan kalimat-kalimat yang jelas, utuh, dan terbaca luas.

Tulisan-tulisan STA menegaskan, sejarah Indonesia dimulai pada abad

ke-20, "ketika lahir generasi baru yang dengan insaf hendak menempuh jalan baru bagi bangsa dan negerinya". Zaman baru tersebut berbeda dengan "zaman hingga penutup abad ke-19" sebagai zaman pra-Indonesia. STA mengajak untuk merekonstruksi sejarah baru Indonesia, di mana zaman Indonesia bukan sambungan atau terusan masa lalu. Indonesia yang dicita-citakan oleh generasi baru, karena itu, bukan sambungan Mataram atau yang lain. Kebudayaan Indonesia harus dicari sesuai keperluan kemajuan masyarakat.

STA berpendapat, tali persatuan bangsa itu kepentingan bersama. Sebuah bangsa tidak boleh statis, tetapi harus dinamis sehingga dapat "berlomba-lomba di lautan dunia yang luas". STA menegaskan, bangsa Indonesia harus menanak nasi karena itu harus menghidupkan api. Ini berbeda dengan bangsa Barat yang sudah menanak nasi, apinya sudah menyalanyala. Bagi Barat, masalahnya ialah bagaimana menjaga agar nasinya jangan sampai hangus, maka mengurangi api. Kalau bangsa Indonesia justru memikirkan bagaimana mengurangi api, maka nasi Indonesia tidak akan masak-masak karena api-nya saja tak hidup.

Api yang dimaksud STA ialah intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme, di mana tiga hal terakhir ini tidak selalu bermakna negatif. Semua itu berkembang di Barat. Karena itu, bagi STA, budaya Barat perlu dilihat karena tidak saja mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga filsafat, keagamaan, dan kesusastraan. Dalam konteks waktu itu, STA mengibaratkan Indonesia lemah seperti "pohon yang sudah mati, dahannya tiada berdaun, tiada berkembang, dan tidak berbuah". Kalaupun ada daun, kembang, dan buahnya, "itu sangatlah kecil dan merana sehingga boleh dikatakan tidak berarti di mata dunia". Karena itu, "jiwa Barat" harus diambil, dan kebalikannya, yakni "jiwa *nrimo*" alias pasrah semata-mata, harus ditolak.

Apakah dengan mengusulkan agar bangsa Indonesia mengambil "jiwa Barat" itu berarti STA sepakat dengan pembaratan atau westernisasi? Dalam sebuah wawancaranya pada 1976, STA mengatakan "tidak membicarakan tentang Barat", tetapi tentang "suatu mentalitas". STA mengaku bukan "pemuja Barat". Ia sepakat dengan Andre Malraux bahwa Barat sudah tidak mampu lagi menghasilkan suatu karya agung seperti Michelangelo di zaman Renaisans. STA memakai istilah "jiwa Barat" lebih merujuk pada "manusia berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib di tangannya sendiri". Pendapat itu merupakan perkembangan penting setelah sekian lama polemik kebudayaan. Ia melakukan obyektivikasi, justru dengan menolak mengidentikkan mengambil "jiwa Barat" dengan pembaratan.

Sebagai refleksi, apakah manusia Indonesia sudah *berpikir, mengambil*

keputusan, dan memegang nasib di tangan sendiri? Pertanyaan itu dapat diringkas, dengan sedikit modifikasi pertanyaan Kishore Mahbubani, "*can't Asian think*"? Pertanyaan itu penting mengingat ia bersifat abadi, tidak saja berlaku di masa penjajahan, juga lazim saja di masa kini mengingat merdeka belum tentu mandiri dalam hal kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan terkait dengan penentuan nasib bangsa. Persoalannya, bagaimana api Indonesia yang sudah menyala terkelola efektif sehingga penanakan nasi Indonesia berjalan tanpa ketekoran. Menanak nasi Indonesia berarti menjaga apinya tetap menyala. Kepemimpinan tentu aspek penting dalam menjaga nyala api Indonesia mengingat ada fungsi motivasi. Nyala api tak berarti identik retorika pemimpin *solidarity maker*, tetapi lebih terkait pada efektivitas dan efisiensi kebijakan yang sistemik.

VII

KEPEMIMPINAN politik dalam konteks Indonesia dan Keindonesiaan mempersyaratkan sejumlah kualifikasi, dari konteks ideologi, visi, wawasan, kemampuan motivasional meluruskan niat dan mengaktivasi etos bangsa di mana semua itu mewujud pada sosok-sosok pemimpin yang berintegritas dan berkompeten. Untuk memimpin bangsa sebesar ini tentu, bukan tipe pemimpin medioker yang diharapkan muncul, tetapi pemimpin bangsa yang menjiawai dan paham masalah-masalah bangsa, mampu mengupayakan, dengan segenap potensi sumber daya kepemimpinannya, hal-hal yang mendasar dan demi menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan bagi kemajuan dan kesejahteraan.

Regenerasi kepemimpinan tentu tak boleh dilupakan, apalagi dipinggirkan. Karena itu, jalan bagi generasi muda, generasi milenial dan seterusnya menambah dunia politik diperlukan untuk bisa ikut berkiprah dan mewarnai dinamika kebangsaan kita dewasa ini. Sekolah-sekolah politik makin diperlukan, apakah kursus atau sekolah tersebut dibikin oleh partai politik atau kelompok-kelompok masyarakat sebagai bentuk kepedulian, sekaligus memperkuat basis-basis, ladang-ladang penyemai kepemimpinan bagi masa depan Indonesia. *Wallahua'lam*.●

Jakarta, 31 Agustus 2017

Daftar Bacaan

Buku, Jurnal, dan Makalah

Abdullah, Taufik (2001), "Pendahuluan", dalam Rosihan Anwar, *Bertumbuh Melawan Arus, Soedarpo Sastrosatomo, Suatu Biografi 1920-2001*, Jakarta: Pusdok Guntur 49.

Acemoglu, Daron dan James A. Robinson (2014), *Mengapa Negara Gagal (Why Nations Fail): Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Adair, John (2007), *Cara Menumbuhkan Kepemimpinan, 7 Prinsip Kunci Pengembangan Kepemimpinan yang Efektif*, Jakarta: Gramedia.

Adair, John (2008), *The Art of Creative Thinking*, Yogyakarta: Golden Books.

Adhy, Soeparno S., Suwariyun, Krisnam [Ed.] (1990), *Pak A.R. Menjawab: Kumpulan Tanya Jawab Pembaca dengan Pak A.R. di Harian Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta: PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.

Adler, Peter (1981), *Momentum a Theory of Social Action*, London: Sage Publication.

Agusssalim, Dafri (1998), "Menelusuri Perdebatan Mengenai Konsep Kekuasaan", JSP, Vol. 1 No. 3, Maret.

Ajidarma, Seno Gumira (2002), *Surat dari Palmerah, Indonesia dalam Politik Mehong: 1996-1999*, Jakarta: KPG.

Ajidarma, Seno Gumira (2007), *Sembilan Wali dan Siti Jenar*, Jakarta: Intisari.

Ajidarma, Seno Gumira (2011), *Panji Tengkorak, Kebudayaan dalam Perbincangan*, Jakarta: KPG.

Al Mawardi (2008), *Islam Happy Ending, Harapan Kaum Beriman*, Bandung: Pustaka Hidayah.

Al-Banjari, Rachmat Ramadhana (2008), *Prophetic Leadership*, Yogyakarta: Diva Press.

Alexander, Herbert E. (1992), *Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform*, Washington DC: Congressional Quarterly.

Alfian (1986), *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia.

Alfian, M Alfan (2001), "Cendekia Politik", dalam M Alfan Alfian, *Mahalnya Harga Demokrasi*, Jakarta: Intrans.

Alfian, M Alfan (2006), "Relevansi Studi Elite di Indonesia", dalam T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.

Alfian, M Alfan (2009), *Menjadi Pemimpin Politik, Perbincangan Kepemim-pinan dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia.

Alfian, M Alfan (2012), *Kekuatan Pemimpin, Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: Kubah Ilmu.

Alfian, M Alfan (2015), *Militer dan Politik di Turki, Pergeseran Politik dan Terpinggirnya Militer pasca-AKP*, Bekasi: Penjuru Ilmu.

Alfian, M Alfan (2017), "Sentimen Identitas dalam Kontestasi Politik di Indonesia: Studi Kasus Kontestasi Politik Pilkada DKI 2017" Makalah disampaikan pada *International Conference* "Demokratisasi di Asia: Sebuah Pengalaman di Negara Indonesia, India, Malaysia, dan Tunisia" di Universitas Nasional (Kampus Ragunan), 13 Mei.

Al-Ghazali (2001), *Peringatan bagi Penguasa, Agar Kekuasaan Tidak menjadi Korup*, Bandung: Hikmah.

Allgeier, Sandy (2009), *The Personal Credibility Factor How to Get It, Keep It, and Get It Back, (If You've Lost It)*, New Jersey: Pearson Education, Inc.

Almond, G.A. dan G.B. Powell (1966), *Comparative Politics: A Developmental Approach*, Boston: Little Brown.

Ananta, Dicky Dwi (2014), "Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer", LBR Edisi XXVIII.

Ancok, Djamaluddin (2012), *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*, Jakarta: Erlangga.

Anderson, Benedict (1999), *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist.

Anderson, Benedict R.O'G (2003), *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*, Yogyakarta: Bentang Budaya.

Anderson, Benedict R'OG (2000), "Gagasan tentang Kuasa dalam Budaya Jawa" dalam Benedict R'OG Anderson, *Kuasa-Kata, Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Matabangsa.

Arifin, Anwar (2013), *Politik Pencitraan*, Jakarta: Pustaka Indonesia.

Arifin, M.T. (2008), "Kepemimpinan Nasional dan Kekuasaan, Perspektif Historis dan Budaya Jawa", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Konsepsi Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif NKRI, Semarang 7 Agustus.

Armstrong, Karen (2005), *A Short History of Myth*, New York: Canongate.

Ash-Shallabi, Ali (2007), Umar Mukhtar, *Napak Tilas Jihad Sang Singa Padang Pasir*, Solo: Jazera.

Asshiddiqie, Jimly (2005), *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH-UII-Press.

Asshiddiqie, Jimly (2015), *Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES.

Azmi, H. (2008), "Mohammad Natsir Nasional Sejati" dalam Lukman Hakiem (Ed.) *100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai dengan Sejarah*, Jakarta: Republika.

Azzam, Abdurrahman (2002), *The Kingdom of Joy: Untaian Kisah Menawan dari*

Matsnawi Rumi, Bandung: Mizan.

Bahjat, Ahmad (2012), *Ibrahim Ibn Adham, Sang Pangeran Pengembara Tanpa Alas Kaki*, Jakarta: Zaman.

Ballack, Luger (2007), *Kisah Tragis 28 Penguasa, Intrik, Spionase dan Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Visi Media.

Banfield, Edward C. (1982/1961), *Political Influence: A New Theory of Urban Politics*, New York: The Free Press of Glencoe.

Baradat, Leon P. (1994), *Political Ideologies, Their Origins and Impact*, Englewood Cliff, New York: Prentice Hall.

Baskara, Nando (2008), *Kamikaze, Aksi Bunuh Diri "Terhormat" Para Pilot Jepang*, Yogyakarta: Narasi.

Basri, S. Rafidah H (2007), *25 Kisah Teladan : Perampok, Gagak & Ular*, Sidoarjo: Kalil.

Benedanto, Pax (1993), *Politik Kekuasaan Menurut Machiavelli, Il Principe*, Jakarta: KPG.

Bennis, Warren dan Burt Nanus (2006), *Leaders, Strategi untuk Mengemban Tanggung Jawab*, Jakarta: BIP.

Bertens, K (2011/1993), *Etika*, Jakarta: Gramedia.

Biyanto (2004),*Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibnu Khaldun*, Surabaya: LPAM.

Blondel, Jean dan Jean-Louis Thiebault (2010), *Political Leadership, Parties and Citizens, The personalisation of Leadership*, London: Routledge.

Boeree, George (2008), *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Prismashopie.

Boneff, Marcel (2008), *Komik Indonesia*, Jakarta: KPG.

Borchier, David dan Vedi R Hadiz (2006), *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: Grafiti dan Freedom Institute.

Bottomore, T.B. (2006), *Elite dan Masyarakat*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.

Brinkerhoff, Derick W. dan Arthur A. Goldsmith (2002), *Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework for Assessment and Programming*, Cambridge: Abt Associates Inc.

Bronner, Stephen Eric [ed] (2006), *Twentieth Century Political Theory, A Reader*, New York: Rotledge.

Bryant, Anthony J. (2008), *Samurai (1550-1600)*, Jakarta: KPG.

Budiardjo, Miriam (1984), "Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan" dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.

Budiman, Arief (1987), *Jalan Demokratis ke Sosialisme: Pengalaman Chili di Bawah Allende,* Jakarta: Sinar Harapan.

Burns, James MacGregor (2010), *Leadership*, New York: Harperperennial.

Burton, Graeme (2008), *Pengantar untuk Memahami Media dan Budaya Populer*, Yogyakarta: Jalasutra, 2008.

Butler, Timothy (2007), *Getting Unstuck*, Jakarta: Serambi.

Campbell, Joseph dan Bill Moyers (1991), *The Power of Myth*, New York: Anchor

Books.

Carey, Peter (2001), *Asal-usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh*, Yogyakarta: LKiS.

Castells, Manuel (2010), *The Power of Identity* [*Second edition*], Oxford: Wiley-Blackwell.

Casper, Gretchen dan Michelle M. Taylor (1996), *Negotiating Democracy: Transitions from Authoritarian Rule*, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Chaleff, Ira (2009), *The Courageous Follower, Standing Up to & for Our Leaders*, San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.

Chambers, Larry (2002), *Credibility Marketing*, Chicago: Dearborn Trade Publishing.

Chojim, Ahmad (2006), *Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga*, Jakarta: Serambi.

Chomsky, Noam (2001), *Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris?* Bandung: Mizan.

Christakis, Nicholas A. dan James H Flower (2010), *Connected, Dahsyatnya Kekuatan Jaringan Sosial Mengubah Hidup Kita*, Jakarta: Gramedia.

Clausewitz, Carl Von (1982), *On War*, London: Penguin.

Clavell, James (2003), *The Art of Sun Tzu*, Surabaya: Ikon.

Coelho, Paulo (2009), *The Winner Stand Alone*, New York: Harper Collins.

Cohen, Herb (2011), *You Can Negotiate Anything, Agar Anda Mendapatkan Segala yang Anda Inginkan*, Jakarta: Serambi.

Collins, Jim (2001), *Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't*, New York: HarperCollins.

Cook, Fred J. (1973), *American Political Bosses and Machines*, New York: Franklin Watts, Inc., 1973.

Cooper, Robert K. (2007), *Unleash Your Other 90%*, Bandung: Kaifa Mizan.

Cottam, Martha L., Beth Dietz Uhler, Elena Mastors, dan Thomas Preston (2012), *Pengantar Psikologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Covey, Stephen M.R., dan Rebecca R. Merrill (2008), *The Speed of Trust, The One Thing That Changes Everything*, London: Pocket Books.

Covey, Stephen R. (1997), *The 7 Habits of Highly Effective People*, Jakarta: Binarupa Aksara.

Covey, Stephen R. (2008), *The 8th Habit, Melampaui Efektivitas, Menggapai Keagungan*, Jakarta: Gramedia.

Covey, Steven (2004), *The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness*, New York: Free Press.

D'Souza, Anthony (2007), *Proactive Visionary Leadership*, Jakarta: Trisewu Nagawarsa.

Dahana, Radhar Panca (2015), *Kebudayaan dalam Politik: Kritik pada Demokrasi*, Yogyakarta: Bentang Budaya.

Dahl, Robert A (1961), *Modern Political Analysis*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, Inc.

Dahl, Robert A (1966), *Political Opposition in Western Democracies*, New Heaven:

Yale University Press.

Davis, Evan (2017), *Post-Truth: Why We Have Reached Peak Bullshit and What We Can Do About It*, London: Little Brown.

Dawson, Roger (2010), *Seni Negosiasi, Secrets of Power Negotiating*, Jakarta: Gramedia.

Defoe, Daniel (2007), *Robinson Crusoe*, Yogyakarta: Bentang.

Desch, Micheal C. (2003), *Politisi versus Jenderal, Kontrol Sipil atas Militer di Tengah Arus yang Bergeser*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dhakidae, Daniel (2003), *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia.

Dhakidae, Daniel (2014), "Citra Manusia dalam Birokrasi dan Korporasi", *Prisma*, Vol. 33, Nomor 2.

Dhakidae, Daniel (2015), *Menerjang Badai Kekuasaan, Meneropong Tokoh-tokoh dari Sang Demonstran, Soe Hok Gie, sampai Putra Sang Fajar, Bung Karno*, Jakarta: Kompas.

Dhofier, Zamakhsyari (1999), *The Pesantren Tradition: The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java*, Arizona: Arizona State University.

Diamond, Jared (2005), *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*, New York: Viking Books.

Diamond, Jared (2007), *Mengapa Seks itu Asyik?* Jakarta: KPG.

Dickinson, Matthew J. (1996), Bitter Harvest FDR, *Presidential Power and the Growth of the Presidential Branch*, New York: Cambridge University Press.

Diffenderffer, Bill (2008), *The Samurai Leader*, Jakarta: Daras Books, 2008.

Djafar, Zainuddin (2008), *Indonesia, ASEAN dan Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Ekonomi-Politik*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Djohan, Robby (2008), *Leaders and Social Capital, Lead to Togetherness*, Jakarta: Fund Asia Education.

Down, Anthony (1957), *An Economic Theory of Democracy*, Boston: Addison-Wesley Publishing Company.

Drucker, Peter F., (2005), *Managing the Non-Profit Organization, Principles and Practices*, New York: Harper Collins.

Dweck, Carol S. (2007), *Change Your Mindset, Change Your Life, Cara Baru Melihat Dunia dan Hidup Sukses Tak Berhingga*, Jakarta: Serambi.

Eisenstadt, Shmuel N. (1973), *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism,* Beverly Hills: Sage Publications

Emmerson, Donald K. (1976), *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca and London: Cornell University Press.

Fachruddin, A.R. (1990), *Soal-Jawab Entheng-Enthengan dening Pak A.R.*, Yogyakarta: tanpa penerbit.

Fashri, Fauzi (2008), *Penyingkapan Kuasa Simbol, Apresiasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose.

Feda, Jon dan Nico Ermann (2008), *America Undercover, Kupas Tuntas Skandal Seks di Gedung Putih*, Jakarta: Rajut Publishing.

Feith, Herbert (2007 [1962]) *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Jakarta dan Kuala Lumpur: Equinox Publishing.

Feith, Herbert dan Lance Castles [ed.] (1995), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES.

Ferguson, Niall (2011), *Civilization: The Six Killer Apps of Western Power*, New York: Penguin Books.

Field, John (2010), *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Firmanzah (2007), *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: YOI.

Firmanzah (2008), *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: YOI.

Fisher, Roger, William Ury, dan Bruce Patton (2003), *Getting to Yes, Teknik Berunding Menuju Kesepakatan Tanpa Memaksakan Kehendak*, Jakarta: YOI.

Ford, Michael dan Thomas B Pepinsky (2014), "Melampaui Oligarki? Bahasan Kritis Kekuasaan Politik dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia", *Prisma*, Vol. 33 No. 1.

Friedman, Howard S. (2008) dan Miriam W. Schustack, *Kepribadian, Teori Klasik dan Riset Modern*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Fromm, Erich (1968), *The Revolution of Hope: Toward a Humanized Technology*, New York: Harper & Row.

Fukuyama, Francis (1995), *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*, New York: Free Press.

Gardner, Howard (2007), *Five Minds for The Future*, Jakarta: Gramedia.

Garelli, Stephene (2008), *Menjadi Nomor 1 di Abad ke-21, Kiat bangsa, Perusahaan, dan Individu Memenangi Persaingan di Era Baru*, Jakarta: Gramedia.

Geertz, Clifford (1981), *Santri, Abangan, dan Priyayi*, Jakarta: Pustaka Jaya.

George, Bill dan Peter Sims (2008), *True North*, Jakarta: Dian Rakyat.

Gerung, Rocky (2008), "Pengantar: Kita dan Politik" dalam Bagus Takwin (dkk), *Kembalinya Politik, Pemikiran Politik Kontemporer, dari (A)rendt sampai (Z)izek*, Jakarta: Marjin Kiri dan P2D.

Gergen, David (2008), "Prakata", dalam Bill George dan Peter Sims, *True North*, Jakarta: Dian Rakyat.

Gie, Soe Hok (1983), *Catatan Seorang Demonstran*, Jakarta: LP3ES.

Gigerenzer, Gerd (2014), *Risk Savvy, How to Make Good Decisions*, London: Penguin.

Giuliani, Rudolp W. (2002), *Leadership*, New York: Miramax Books.

Goethals, George R., Georgia J. Sorenson, James MacGregor Burns (2004), *Encyclopedia of Leadership Volume 1*, London: Sage Publications.

Goleman, Daniel (2005), "Kecerdasan Emosional seorang pemimpin" dalam Frances Hesselbein dan Rob Johnston (Ed.), *On Mission and Leadership, Misi dan Kepemimpinan*, Jakarta: Elex Media komputindo.

Goleman, Daniel, Richard Boyatzis, dan Annie McKee (2006), *Primal Leadership, Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, Jakarta: Gramedia.

Grant, Adam (2014), *Give and Take, Dorong Kesuksesan Anda dengan Membantu Orang Lain*, Jakarta: Gramedia.

Green-Pedersen, Christoffer dan Stefaan Walgrave (2014), "*Conclusion: What It Takes to Turn Agenda Setting from an Approach into a Theory*", dalam Christoffer Green-Pedersen dan Stefaan Walgrave (Ed.), *Agenda Setting, Policies, and Political Systems, A Comparative Approach*, Chicago dan London: The University of Chicago Press.

Greene, Robert (2007), *33 Strategi Perang*, Jakarta: Karisma Publishing.

Greene, Robert (2007), *48 Hukum Kekuasaan*, Jakarta: Karisma Publishing.

Gunawan, Adi W. (2007), *The Secret of Mindset*, Jakarta: Gramedia.

Guzzetta, Giovanni (2008), "*Legal Standards and Ethical Norms: Defining the Limits of Conflicts Regulations*," dalam Christine Trost dan Alison L. Gash, *Conflict of Interest and Public Life, Cross-National Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press.

Hadiz, Vedi R. dan Daniel Dhakidae [ed.] (2006), *Ilmu Sosial dan kekuasaan di Indonesia*, Jakarta-Singapura: Equinox Publishing.

Handoko, T. Hani (2011), *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

Hanh, Thich Nhat (2008), *The Art of Power*, New York: HarperOne.

Harari, Oren (2005), *The Leadership Secrets od Collin Powell, Sebuah Paradigma Baru Kepemimpinan*, Jakarta: Gramedia.

Hard, Robin (2004), *The Routledge Handbook of Greek Mythology*, New York: Routledge.

Harris, Alma dan Linda Lambert (2003), *Building Leadership Capacity for School Improvement*, Maidenhead-Philadelphia: Open University Press.

Harris, Robert (2008), *Imperium*, Jakarta: Gramedia.

Hart, BH Lidell (1974), *Strategy*, New York: Signet.

Hart, Micheal H (2009), *100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Hikmah, 2009.

Hartmann, Michael (2007), *The Sosiology of Elites*, New York: Routledge.

Haryanto (2005), *Kekuasaan Elit*, Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.

Hassan, Fuad (2014), *Psikologi-Kita dan Eksistensialisme, Pengantar Filsafat Barat, Berkenalan dengan Eksistensialisme, Kita dan Kami*, Depok: Komunitas Bambu.

Hatta, Mohammad (2015), *Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977)*, Jakarta: Kompas.

Hawkins, Jeff dan Sandra Blakeslee (2009), *On Intelligence*, Jakarta: BIP.

Hazan, Reuven Y. and Gideon Rahat (2010), *Democracy within Parties Candidate Selection Methods and Their Political Consequences*, Oxford: Oxford University Press.

Hedges, Chris (2003), *What Every Person Should Know About War*, New York: Free Press.

Held, David (2007), *Models of Democracy*, Jakarta: Akbar Tandjung Institute.

Hendri W, Yusin (2013), *88 Cerita Rakyat Terindah dari Negeri China*, Jakarta: Gramedia.

Hersey, John (2008), *Hiroshima, Ketika Bom Dijatuhkan*, Depok: Komunitas Bambu.

Heywood, Andrew (1999), *Political Theory, an Introduction*, New York: Palgrave.

Heywood, Andrew (2000), *Key Concepts in Politics*, New York: Palgrave.

Heywood, Andrew (2014), *Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hibberd, Jessamy dan Jo Usmar (2014), *This Book Will Make You Confident*, London: Auercus.

Hine, David (2008), "*Conflict-of-Interest Regulation in Its Institutional Context*", dalam Christine Trost dan Alison L. Gash, *Conflict of Interest and Public Life, Cross-National Perspectives,* Cambridge: Cambridge University Press.

Hogan, Kevin (2007), *The Science of Influence*, Jakarta, Gramedia.

Hollander, Edwin P. (2009), *Inclusive Leadership, The Essential Leader-Follower Relationship*, New York: Routledge.

Houck, Davis W. dan Amos Kiewe (2003), *FDR's Body Politics The Rhetoric of Disability,* Texas: Texas A&M University Press.

Howe, David (2015), *Empati, Makna dan Pentingnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hungtington, Samuel P. (1968), *Political Order in Changing Societies*, New Haven and London: Yale University Press.

Huntington, Samuel P. (2003), *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Sipil-Militer*, Jakarta: Grasindo.

Huntington, Samuel P. (2004), *Who Are We? America's Great Debate*, London: Free Press, 2004.

Huntington, Samuel P. (2004), *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Iacocca, Lee dan Catherine Whitney (2008), *Where Have All The Leaders Gone?* Jakarta: Erlangga.

Ibrahim, Idi Subandy, *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Jalasutra.

Idris, Fahmi (2015), *Saudagar dalam Lintasan Sejarah Politik Indonesia*, Jakarta: MBPI.

Ingleson, John (1982), "Mohammad Hatta, Cendekiawan, Aktivis, dan Politikus", *Prisma*, No. 1 Januari.

Ismail, Taufiq (2008), "Mohammad Natsir Nasional Sejati" dalam Lukman Hakiem (Ed.) *100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai dengan Sejarah*, Jakarta: Republika.

Jamaluddin, H. (1998) *Kapita Selekta Pendidikan Islam,* Bandung: Pustaka Setia.

Janeway, Michael (2004), *The Fall of The House of Roosevelt, Brokers of Ideas and Power from FDR to LBJ*, New York: Columbia University Press.

JOESOEF, Daoed (2011), "Kualitas Pemimpin", dalam Jusuf Sutanto [Ed.], *The Dancing Leader, Hening-Mengalir-Bertindak*, Jakarta: Kompas.

JOESOEF, Daoed (2015), *Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kompas.

Kamandoko, Gamal (2008), *Pararaton, Legenda Ken Arok dan Ken Dedes*, Yogyakarta: Narasi.

Kaplan, Robert S. dan David P. Norton (2000), *Balanced Scorecard, Menerapkan Stra-*

tegi menjadi Aksi, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kartodirdjo, Sartono (1981), "Kata Pengantar", dalam Sartono Kartodirdjo, *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES.

Kartono, Kartini (2006), *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Kasali, Rhenald (2007), *Change! Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah yang Anda Jalani, Putar Arah Sekarang Juga (Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan)*, Jakarta: Gramedia.

Katz, S. Richard and Peter Mair (1993) "*The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization", American Review of Politics* 14.

Kennedy, Hugh (2008), *The Great Arab Conquest, Penaklukan Terbesar dalam Sejarah Islam yang Mengubah Dunia*, Jakarta: Alvabet.

Kennedy, Paul (1987), *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000*, New York: Random House.

Kertajaya, Hermawan (2004), *Marketing Yourself, Kiat Sukses Meniti Karir dan Bisnis*, Jakarta: Marklus&Co..

King, Larry (2007), *Seni Berbicara, Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja*, Jakarta: Gramedia.

King, Larry (2007), *Seni Berbicara, Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja*, Jakarta: Gramedia.

Kirchberger, Georg dan John Mansford Prior (2008), *Bersaing atau Bersahabat? Dakwah Islam dan Misi Kristen di Afrika*, Maumere: Ledalero.

Koch, Christopher (2009), *The Year of Living Dangerously, Cinta di Tengah Gejolak Revolusi 1965*, Jakarta: Serambi.

Koentjoro (2008), *Netralitas Birokrasi dan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*, *Majalah Ilmiah Dinamika*, Vol. 26 No. 1, 15 Februari.

Kouzes, James M. dan Barry Z. Posner (2006a), *Leadership the Challenge, Tantangan Kepemimpinan*, Jakarta: Erlangga.

Kouzes, James M. dan Barry Z. Posner (2008), *The Leadership Learning, Panduan Menjadi Motivator Hebat bagi Siapa Saja*, Yogyakarta: Baca!.

Kouzes, James M. dan Barry Z. Posner [ed.] (2006b), *Lima Teladan Kepemimpinan*, Jakarta: BIP.

Kosasih, R.A. (2010), Ramayana, Jakarta: Pluz+.

Kundera, Milan (2000), *Kitab Lupa dan Gelak Tawa*, Yogyakarta: Bentang.

Kuntowijoyo (2013), *Kumpulan Cerpen Kompas Kuntowijoyo, Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi*, Jakarta: Kompas.

Laclau, Ernesto (2005), "*Populism: What's in a Name?*" dalam Francisco Panizza (ed.), *Populism and the Mirror of Democracy*, London dan New York; Verso.

Lantu, Donald, Erich Pesiwarissa, dan Augusman Rumahorbo (2007), *Servant Leadership, The Ultimate Calling to Fulfill Your Life's Greatness,* Yogyakarta, Gradien Books.

Latif, Yudi (2011), *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia.

Lee, Blaine (2002), *The Power Principle*, Jakarta: Binarupa Aksara.

Lees-Marshment, Jennifer (2010), "*Global Political Marketing*", dalam Jennifer Lees-Marshment, Jesper Strömbäck dan Chris Rudd (Ed.), *Global Political Marketing*, London dan New York: Routledge.

Lehrer, Jonah (2009), How We Decide, *Kenali Cara Kerja Otak Agar Bisa Cerdas dan Tangkas Memutuskan Apa Saja*, Jakarta: Serambi.

Linz, Juan J. dan Alfred Stepan (1996), "*Toward Consolidated Democracies*," *Journal of Democracy*, Vol. 7. No. 2.

Litbang Kompas (2004), *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, 2004-2009*, Jakarta: Kompas.

Lombardi, Vince (2007), "Konteks Kepemimpinan" dalam Semuil Tjiharjadi, dkk, *To Be A Great Leader*, Yogyakarta: ANDI.

Lowney, Chris (2005), *Heroic Leadership*, Jakarta: Gramedia.

Lubis, Mochtar (2001), *Manusia Indonesia*, Jakarta: YOI.

Luttwak, Edward N (1987), *Strategy, The Logic of War and Peace*, Harvard: Harvard University Press.

Luttwak, Edward, *Coup d'Etat: A Practical Handbook*, Cambridge MA: Harvard University Press, 1979.

Maarif, Ahmad Syafii (2006), *Otobiografi Ahmad Syafii Maarif: Titik-titik Kisar di Perjalananku*, Yogyakarta: Ombak.

Maarif, Syamsul (2015), "Pengantar", dalam Eric Oullet (Ed.), *Arah Baru dalam Sosiologi Militer*, Jakarta: Maqom Intuisi Media.

Madjid, Nurcholish (1997), "Mempertegas Misi Perjuangan HMI" dalam Abdullah Hafidz dkk (Ed.), *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, Jakarta: Majelis Nasional KAHMI.

Madjid, Nurcholish (2004), *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia.

Madjid, Nurcholish (2008), *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan.

Mahbubani, Kishore (2005), *Bisakah Orang Asia Berpikir?* Jakarta: Teraju Mizan.

Malaka, Tan (2005), *100% Merdeka, Tiga Percakapan Ekonomi Politik*, Jakarta: Marjinkiri.

Malaka, Tan (2008), *Aksi Massa*, Yogyakarta: Narasi.

Man, John (2008), *Jenghis Khan, Legenda Sang Penakluk dari Mongolia*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

Man, John (2013), *Samurai, Jalan Koehormatan Sang Pejuang Terakhir*, Jakarta: Alvabet.

Man, John (2015), *Saladin, The Life, The Legend, and The Islamic Empire*, London: Bantam Press.

Mandela, Nelson (2008), *Long Walk to Freedom*, New York: Back Bay Books.

Mangunwijaya, Y.B. (1977), "Sutan Sjahrir Antara Pemikir dan Politikus", *Prisma*, No. 8 Agusus.

Maniruzzaman, Talukder (1998), *Militer Kembali ke Barak, Sebuah Studi Komparatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Márquez, Gabriel García (2003), *Seratus Tahun Kesunyian*,Yogyakarta: Bentang.

Márquez, Gabriel García (2005), *Jenderal dan Labirinnya*, Yogyakarta: Jalasutra.

Maxwell, John C. (2001), *The 21 Indispensable Qualities of a Leader (21 Kualitas Kepemimpinan Sejati) Menjadi Panutan bagi Orang Lain*, Batam: Interaksara.

Maxwell, John C. (2012), *The 360 Degree Leader, Mengembangkan Pengaruh Anda dari Posisi Mana Pun dalam Organisasi*, Jakarta: BIP.

Mc Lean, Iain dan Alistair Mc Millan (2003), *Oxford Concise Dictionary of Politics*, New York: Oxford University Press.

Menzies, Gavin (2006), 1421, Jakarta: Alvabet.

Mercuse, Herbert (1964), *One Dimension Man, Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon.

Mills, C. Wright (1956), *The Power Elite*, Oxford: Oxford University Press.

Moeljono, Djokosantoso (2008), *More about Beyond Leadership*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Moyser, George dan Margaret Wagstaffe (1987), "*Studying Elites: Theoritical and Methodological Issues*", dalam Moyser, George dan Margaret Wagstaffe, *Research Methods for Elite Studies*, London: Allen & Unwin.

Mrazek, Rudolf (2005), "Kenecisan Indonesia Politik Pakaian pada Akhir Masa Kolonial 1893-1942" dalam Henk Schulte Nordholt, *Outward Appearances; Dressing State and Society in Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.

Muhaimin, Yahya (1990), "Militer dan Perkembangan Politik di Indonesia: Suatu Pengantar", dalam Akhmad Zaini Abar, (Ed.), *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Esei-esei dari FISIPOL Bulaksumur*, Solo: Ramadhani.

Mujani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi (2012), *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Bandung: Mizan.

Mulder, Niels (2001), *Mistisisme Jawa, Ideologi di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.

Mulkhan, Abdul Munir [Ed.] (2002), *Jawaban Kyai Muhammadiyah: Mengurai Jawaban Pak A.R. dan 274 Permasalahan dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Mulyadi (2001), *Balanced Scorecard, Alat Manajemen Kontemporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.

Musashi, Miyamoto (2007), *The Book of Five Rings*, Jakarta: Gramedia.

Nadjib, Emha Ainun (2007), "Kriteria Kepemimpinan", dalam Emha Ainun Nadjib, *Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki*, Jakarta: Kompas.

Nadjib, Emha Ainun (2008), "Jejak Tinju Pak Kiai", dalam Emha Ainun Nadjib, *Jejak Tinju Pak Kiai*, Jakarta: Kompas, 2008.

Nadjib, Emha Ainun (2015), *Arus Bawah Arus Bawah*, Yogyakarta: Bentang.

Naisbitt, John (2007), *Mindset, Tata Pola Pikir Anda untuk Membaca Peluang Bisnis Masa Depan dan Menuai Profit*, Jakarta: Daras Book.

Nelson, Barbara J. dan Najma Chowdhury (1994), *Women and Politics Worldwide*, New Haven: Yale University Press.

Niel, Robert Van (1984), *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Nimmo, Dan (2001), *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nixon, Richard (1982), *Leaders, Profiles and reminiscene of Men Who Have Shaped the Modern World*, New York: Warner Books.

Nordlinger, Eric A. (1986), *Militer dalam Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Norris, Pippa (2004), *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, New York, Cambridge University Press.

Northouse, Peter G. (2005), *Leadership, Theory and Practice*, London: Sage Publication.

Notosoetardjo, H.A. (1963), *Primbon (vademecum) politik : tanja djawab politik antara rakjat dan Bung Karno dimasa pendjadjahan Belanda [dari majalah] Fikiran Ra'jat*, Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia.

Notosusanto, Nugroho (1977), "Soedirman Panglima yang Menempati Janjinya", *Prisma*, No.8 Agustus.

Nursam, M. (2008), *Membuka Pintu bagi Masa Depan, Biografi Sartono Kartodirdjo*, Jakarta: Gramedia.

Obama, Barrack (2007), *Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance,* New York: Random House.

Ong Hok Ham (1977), "Sukarno Mitos dan Realitas", *Prisma*, No. 8 Agusus.

Ong Hok Ham (2002), "Legitimasi Melalui Gaib", dalam Ong Hok Ham, *Dari Soal Priyayi sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*, Jakarta: Kompas

Orwell, George (2006), *Animal Farm*, Jakarta: Freshbook.

Orwell, George (2003), *1984*, Yogyakarta, Bentang Pustaka.

Oswald, Yvonne (2008), *Keajaiban Kata-kata, Ubahlah Hidup Anda dengan Kata-kata yang Positif*, Jakarta: Gramedia.

Outhwaite, William (Ed.) (2008), *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta: Prenada Media.

Pamuk, Orhan (2008), *Snow*, Jakarta: Serambi.

Panebianco, Angelo (1998), *Political Parties: Organization and Power*, Cambridge: Cambridge University Press.

Pradiansyah, Arvan (2006), *You Are a Leader! Menjadi Pemimpin dengan Memanfaatkan Potensi Terbesar yang Anda Miliki: Kekuatan Memilih!*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Parengkuan, August (2008), "Kepala Negara menyelusup ke Desa-desa" dalam Bagus Dharmawan (ed.) *Warisan Daripada Soeharto*, Jakarta: Kompas.

Paschen, M. dan E. Dihsmaier (2014), *The Psicology of Human Leadership*, New York: Springer.

Patric, Nielche (2007), *The Codes of A Leader, Mengembangkan Potensi Kepemimpinan Sejati*, Jakarta, Prestasi Pustaka Raya.

Perlmutter, Amos (1984), *Militer dan Politik*, Jakarta, Rajawali Pers.

Phillips, Anne (1991), *Engedering Democracy*, Cambridge: Polity Press.

Poniman, Farid, Indrawan Nugroho, dan Jamil Azzaini (2008), *Kubik Leadership*, Jakarta: Gramedia.

Poscente, Vince (2007), *Tuntunlah Sang Gajah, 5 Langkah Membangkitkan Spirit Kepemimpinan*, Jakarta: BIP.

Prasetyono, Dwi Sunar (2007), *Seni Kreatif Lobi dan Negosiasi*, Yogyakarta: Think.

Price, Terry L. (2008), dalam Antonio Marturano dan Jonathan Gosling (ed.), *Leadership, The Key Concepts*, New York: Routledge.

Price, Alison dan David Price (2013), *Leadership, A Practical Guide*, London: Icon Books Ltd.

Pye, Lucian W, "*Introduction: Political Culture and Political Development*" dalam Lucian W. Pye dan Sidney Verba (Ed), *Political Culture and Political Development*, Princeton: Pronceton University Press.

Raadt, Jasper de, David Hollanders, André Krouwel (2004), "*Varieties of Populism: An Analysis of the Programmatic Character of Six European Parties*," *Working Papers Political Science* No. 04, Vrije Universiteit, Amsterdam.

Rahardjo, M. Dawam (2002), "Khalifah" dalam M Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.

Rais, M. Amien (1987), *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan.

Rakhmat, Jalaluddin (2005), "Pengantar: From Suffering to Savoring" dalam Martin E.P. Seligman, *Authentic Happines, Menciptakan Kebahagiaan dengan Psikologi Positif*, Jakarta: Mizan.

Randall, Vicky dan Lars Svasand (2002), "*Party Institutionalization in New Democracies*", *Party Politics*, Vol. 8. No. 1.

Ranuwihardjo, A. Dahlan (2002), *Revolusi, Anti Imperialisme, dan Pancasila*, Jakarta: Intrans, 2002.

Renan, Ernest (1994), *Apakah Bangsa Itu? (Q'est ce qu'une nation?)* Bandung: Alumni (alihbahasa Prof Mr Sunario, editor Prof Dr C.F.G Sunaryati Hartono, S.H.)

Rendra, W.S (2013), *Potret Pembangunan dalam Puisi*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Reston, James (2007), *Perang Salib III, Perseteruan Dua Kesatria: Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard Si Hati Singa*, Jakarta: Lentera Hati.

Ricklefs, Merle C. (1998), *The Seen and Unseen Worlds in Java, 1726-1749: History, Literature and Islam in the Court of Pakubuwana II*, Honolulu: University of Hawaii Press.

Ridwan, Deden dan M. Muhajirin (2003), *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge (2008), *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Salemba Empat.

Robertson, David (2002), *The Routledge Dictionary of Politics*, New York: Routledge.

Robison, Richard dan Vedi R Hadiz (2004), *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, London dan New York: Routledge.

Roeder, O.G. (1970), *The Smiling General, President Soeharto of Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.

Roem, Mohammad (1977), "Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita", *Prisma* No 8, Agustus.

Rowe, William T. (2009), *China's Last Empire, The Great Qing*, London: The Belknap

Press Of Harvard University Press.

Rubino, Joe (2004), *Restore Your Magnificence*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Rudyansjah, Tony (2015), *Émile Durkheim, Pemikiran Utama dan Percabangannya ke Radcliffe-Brown, Fortes, Lèvis-Strauss, Turner, dan Holbraad*, Jakarta: Kompas.

Runciman, David (2014), *Politics*, London: Profile Books.

Rusell, Bertrand (2004) *Power*, London: Routledge.

Safaria, Triantoro (2004), *Kepemimpinan*, Jakarta: Graha Ilmu.

Said, Salim (1991), *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics 1945-49*, Singapura: ISEAS.

Salusu, J. (2006), *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: Grasindo.

Sanborn, Mark (2007), *Semua Orang Bisa Jadi Pemimpin, Siapapun Kapanpun, Bisa Membuat Perbedaan Positif*, Jakarta: Gramedia.

Santosa, Teguh (2009), "Dadu Malapetaka", dalam Tegush Santosa, *Riwayat Pandawa*, Jakarta: Pluz+.

Samet, Elizabeth D. [Ed.] (2015), *Leadership, Essential Writings by Our Greatest Thinkers*, New York; W.W. Norton & Company Inc.

Sarwono, Sarlito Wirawan (2005), *Psikologi Sosial, Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.

Schmalzried, Lisa Katharin (2013), *Inner Beauty — The Friendship-Hypothesis*, *Proceedings of the European Society for Aesthetics*, vol. 5.

Schmidt, Eric dan Jared Cohen (2014), *The New Digital Age, Cakrawala Baru Negara, Bisnis, dan Hidup Kita*, Jakarta: KPG.

Schröder, Peter (2004), *Strategi Politik*, Jakarta: Fredrich Nauman Stiftung Indonesia.

Sen, Amartya (2007), *Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas*, Jakarta: Marjin Kiri.

Setiyono, Budi (2008), *Iklan dan Politik*, Jakarta: AdGoalCom, 2008.

Sheldon, Sidney (2006), *The Best Laid Plans, Rencana Paling Semurna*, Jakarta: Gramedia.

Sherwood, Dennis (2002), *Smart Things to Know about Innovation and Creativity*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Shihab, M. Quraish (1992), "Penafsiran "Khalifah" dengan Metode Tematik", dalam M Quraish Shihab, *Membumikan" Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

Shin, Michael E. dan John A. Agnew (2008), *Berlusconi's Italy, Mapping Contemporary Italian Politics*, Philadelphia: Temple University Press.

Sutherland, Heather (1983), *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siagian, Sondang P. (2003), *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sidel, John (2004), "*Bossism and democracy in the Philippines, Thailand, and Indonesia: towards an alternative framework for the study of 'local strongmen'*", dalam John Harriss, Kristin Stokke, dan Olle Tornquist (Ed.), *Politicising Democracy: the New Local Politics of Democratisation*, Basingstoke, UK: Palgrave

Macmillan.

Sihite, Romany (2007), *Perempuan, Keseteraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, Marsillam (1994), *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Grafiti.

Sjahrir, Sutan (1999), *Perjuangan Kita*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49.

Snyder, Jack (2003), *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah, Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Jakarta: KPG.

Sobirin, Achmad (2007), *Budaya Organisasi, Pengertian, Makna dan Aplikasinya dalam Kehidupan Organisasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Soedjatmoko (1995/1983), *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.

Soeratman, Darsiti (2000), *Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.

Solichin (2010), *Wayang, Masterpiece Seni Budaya Dunia*, Jakarta: Sinergi Persadatama Foundation.

Solichin (2014), *Tokoh Wayang Terkemuka*, Jakarta: Yayasan Senawangi dan Bank Mandiri.

Stanislavski, Constantin (2008), *Membangun Tokoh*, Jakarta: KPG.

Stepan, Alfred (1996), *Militer dan Demokratisasi, Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Lain*, Jakarta: Grafiti Pers.

Stoner, Jesse, Ken Blanchard, dan Drea Zigarmi (2007), "Kekuatan Visi" dalam Ken Blanchard [ed.], *Leading at a Higher Level*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Subekti, Valina Singka (2008), "Kepemimpinan Politik Perempuan di Indonesia" Jurnal Politika, Vol. 4. No.1.

Subono, Nur Iman (2012), "Pengantar: Perempuan dan Politik: Tak Cukup Hanya Sekadar Hadir", dalam Ani W. Sutjipto dan Shelly Adelina, *Partai Politik dan Strategi Gender, pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*, Jakarta: Parentesis Publisher.

Sudjana, Eggi (2008), *Islam Fungsional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sun, Peng Keng (2013), *To Be An Innovator, Menciptakan Kesuksesan Personal dan Profesional dengan Berinovasi*, Jakarta: Gramedia.

Suratno, Pardi (2006), *Sang Pemimpin Menurut Astabhrata, Wulang Reh, Tripama, Dasa Darma Raja*, Yogyakarta, Adiwacana.

Surbakti, Ramlan (2007), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.

Suryadinata, Leo (2002), *Elections and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS.

Suryadinata, Leo (ed.) (2007), *Laksamana Cheng Ho dan Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.

Susanto, A.B. (2007), *Visi dan Misi, Langkah Awal Menuju Strategic Management*, Jakarta: JCG.

Suseno, Dharmawan Budi (2009), *Wayang Kebatinan Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Suseno, Franz Magnis (2000), *Kuasa dan Moral Dasar*, Jakarta: Gramedia.

Suseno, Franz Magnis (2003), *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.

Susetya, Wawan (2007), *Kepemimpinan Jawa*, Yogyakarta: Narasi.

Sutikno, Raja Bambang (2007), *The Power of Empathy in Leadership*, Jakarta, Gramedia.

Sutjipto, Ani W. dan Shelly Adelina (2012), *Partai Politik dan Strategi Gender, Pelajaran dari Pengalaman Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*, Jakarta: Parentesis Publisher.

Sutowo, Pontjo (2013), *Kebangsaan Kita, Mengukuhkan Komitmen Kebangsaan, Melahirkan Pemimpin Ideal yang Berkarakter*, Jakarta: Aliansi Kebangsaan.

Suwardono (2013), *Tafsir Baru Kesejarahan Ken Angrok, Pendiri Wangsa Tajasa*, Yogyakarta: Ombak.

Swantoro, P. (2007), "*Post Power Syndrome*" dalam P. Swantoro, *Masa Lalu Selalu Aktual*, Jakarta: Kompas.

Swantoro, P. (2007), *Masa lalu Selalu Aktual*, Jakarta: Kompas.

Swasono, Sri Edi dan Faudzie Ridjal [ed.] (1997), *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas-Aktif, dan Ekonomi Masa Depan*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Syahnakri, Kiki (2008), "Krisis Kenegarawanan dan Keteladanan" dalam Kiki Syahnakri, *Aku Hanya Tentara, Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas.

Syahputra, Iswandi (2013), *Rezim Media, Pergulatan Demokrasi, Jurnalisme, dan Infotainment dalam Industri Televisi*, Jakarta: Gramedia.

Sylado, Remy (2008), *Pangeran Diponegoro, Menuju Sosok Khalifah*, Solo: Tiga Serangkai.

Tandjung, Akbar (2007a), *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia.

Tandjung, Akbar, (2007b) "Kepemimpinan Politik yang Negarawan", *Negarawan*, Edisi Khusus 1 Agustus.

Tandjung, Akbar (2008), "Pokok-Pokok Pikiran *Studium Generale* Prospek Kepemimpinan Nasional dalam Sistem Politik yang Demokratis", diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Tang, Micheal C. (2015), *Kisah-kisah Kebijaksanaan China Klasik, Kunci Sukses Para Manajer dan Pemimpin*, Jakarta: Gramedia.

Taufik Abdullah, "Pengantar" dalam David Borchier dan Vedi R Hadiz (2006), *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: Grafiti dan Freedom Institute.

Templar, Richard (2007), *The Rules of Management*, Jakarta: Esensi.

Thoha, Miftah (2007), *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Thoha, Miftah (2014), *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Thompson, Dennis F. (2000), *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Thompson, John B (2007), *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia,*

International Grandbook of the Studies in the Theory of Ideology, Yogyakarta: IRCiSOD.

Tim Redaksi Marketeers (2015), *I am Marketeers*, Jakarta: Gramedia

Tirtamihardja, Samuel H. (2007), *Pemimpin adalah Pemimpi, Leaders are Dreamers*, Tangerang: YASKI.

Toer, Pramoedya Ananta (2000), *Drama Mangir*, Jakarta: KPG.

Toffler, Alvin (1991), *Pergeseran Kekuasaan: Pengetahuan, Kekayaan, dan Kekerasan di Penghujung Abad ke-21*, Jakarta: PT Panca Simpati.

Tohari, Ahmad (2015), *Orang-orang Proyek*, Jakarta: Gramedia.

Toynbee, Arnold J. (2006). *Sejarah Umat Manusia*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tresna, Yuaba Ryan (2006), *Muhammad SAW on The Art of War*, Bandung: Progressio.

Trimo, Soejono MLS (1995), *Analisis Kepemimpinan*, Bandung: Angkasa.

Turner, Bryan S. (1992), *Max Weber from History To Modernity*, London dan New York: Routledge.

Urban, Hal (2007), *Positive Words, Powerful Result*, Jakarta, BIP.

Utami, Ayu (2008), *Bilangan Fu*, Jakarta: Gramedia.

Varley, H. Paul, Ivan dan Nobuko Morris (2008), *Samurai, Sejarah dan Perkembangan*, Depok: Komunitas Bambu

Vltchek, Andre dan Rossie Indira (2006), *Saya Terbakar Amarah Sendirian: Pramoedya Ananta Toer Dalam Perbincangan dengan Andre Vltchek & Rossie Indira*, Jakarta: KPG.

Vugt, Mark van dan Anjana Ahuja (2015), *Natural Leader*, Jakarta: KPG.

Wahib, Ahmad (1981), *Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES

Wahid, Abdurrahman (2011), *Sekadar Mendahului, Bunga Rampai Kata Pengantar*, Bandung: Nuansa.

Wee, ChowHou (2006), *Sun Zi Art of War*, Jakarta: BIP.

Westwood, Sallie (2002), *Power and the Social*, London and New York: Routledge.

White, Stephen K. dan J Donald Moon [ed.] (2004), *What is Political Theory?* London: SAGE Publications

Wibowo, Paul Heru (2012), *Masa Depan Kemanusiaan, Superhero dalam Pop Culture*, Jakarta: LP3ES.

Winardi (2003), *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Winkler, Ingo (2010), *Contemporary Leadership Theories*, London New York: Physica-Verlag.

Winters, Jeffrey A. (2011), *Oligarki*, Jakarta: Gramedia.

Winters, Jeffrey A. (2014) "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia", *Prisma*, Vol. 33/1.

Wirawan (2003), *Kapita Selekta Kepemimpinan, Pengantar untuk Praktek dan Penelitian*, Jakarta, Yayasan Bangun Indonesia dan UHAMKA.

Yukl, Gary (2001), *Leadership in Organization*, New Jersey: Prentice Hall.

Yukl, Gary (2007), *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Indeks.

Zainuddin, A. Rahman (1992), *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: Gramedia.

Zainuddin, A. Rahman (2004), "Antara Moral dan Politik" dalam Hermawan Sulistyo [Ed.], A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam, Islam, Timur Tengah dan Benturan Ideologi,* Jakarta: Pensil324.

Zetter, Lionel (2008), *Lobbying The Art of Political Persuasion,* Hampshire: Harriman House LTD.

Ziegenhain, Patrick (2008), *The Indonesian Parliement and Democratization*, Singapore: ISEAS.

Zohar, Danah dan Ian Marshall (2001), *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir Integralitik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung: Mizan.

Suratkabar dan Majalah

Kompas *Media Indonesia*
Republika *Koran Tempo*
Harian Kontan *Pelita*
Tempo *Gatra*
Time *Newsweek*
The Economist Lain-lain.

Situs Online

Wikipedia.org Brainyquotes.com
Thinkexist.com Kbbi.web.id
Kaskus.co.id Nationalgeographic.co.id
Liputan6.com Okezone.com
Balancedpolitics.org Merriam-webster.com
Thefreedictionary.com En.oxforddictionaries.com
Tirto.id Gadis.com
Lain-lain.●

Indeks

A

A decade of ideology, 533.
A high-trust organization, 201.
A low-trust organization, 201.
A lucky accident, 252.
A. Rahman Zainuddin, 469, 470.
A. Tourine, 424
A.P.E. Korver, 256.
A.P.J. Abdul Kalam, 452.
A.R. Baswedan, 407
A.R. Fachruddin, 75, 150.
A.V Michels, 304.
Abangan, 97, 225.
Abdul Haris Nasution, 504.
Abdullah Ahmad Badawi, 40.
Abdullah Gül, 40.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), 36, 217, 291, 292, 350, 353, 374, 383, 400, 401, 402, 403, 404, 479, 581.
Abraham Lincoln, 162, 170, 171, 199, 240, 297, 636.
Abu Dawud, 117.
Abu Nawas, 461.
AC Milan, 106.
Accountability, 179, 380, 470.
Aceh, 153
Acemoglu, 51, 52, 53, 565.
Ad hominem, 298.
Adair/John Adair, 117, 190.
Adalet ve Kulkilna Partisi, 582.
Adam Grant, 280.
Adde Rosi Khairunnisa, 134.
Adinegoro, 651.
Adminsitrator, 69, 340.
Affirmative actions, 456.
Affordable Care Act, 537.
Afghanistan, 40, 159.
African National Congress/ANC, 168.
Afrika Selatan, 37, 40, 41, 153, 168, 169, 173, 174, 381, 395.
Agathocles, 472.
Ahimsa, 153, 168.
Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, 339.
Ahmad Syafii Maarif, 335.
Ahmad Tohari, 225.
Ahmad Wahib, 335.
Ahmedinejad/Mahmoud Ahmedinejad, 40, 399, 624.
Airin Rachmi Diany, 134, 135.
Aji mumpung, 133, 622
Ajidarma/Seno Gumira Ajidarma, 264, 265, 266, 286, 287, 412, 447.
Ajining diri soko lati, 242, 352.
Ajining rogo soko busono, 242, 352.
Akbar Tandjung, 107, 108, 310, 319, 383, 479, 549, 617, 618.
Akil Mochtar, 135.
Akira Kurosawa, 514.
Al Baqarah, 262
Al Ghazali, 114, 115, 126, 219, 472, 474.
Al Gore, 517, 573.
Al Qur'an/Al Quran, 81, 150, 275, 310, 425, 439, 557, 611, 645, 646.
Al Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Muluk, 474.
Al-Ahzaab, 187.
Al-Amin, 199.
Al-Baqarah, 612.
Albert Camus, 44, 231, 639.
Albert Einstein, 198, 208.
Aldous Huxley, 412.
Alexander Agung, 118, 390.
Alexis de Tocqueville, 171, 278.

Alfian, 96.
Alfred Binet, 284.
Alfred Stepan, 371.
Al-Ghazali, 114, 115, 126, 219, 441, 472, 474.
Ali Imron, 439.
Ali Sastroamidjojo, 42, 57.
Ali Sastroamidjojo, 42, 57.
Alienation of the elites, 96.
Alison Price, 76.
Aljazair, 279
Al-Ma'un, 150.
Al-Maidah, 111.
Al-Mujadilah, 439.
Altruisme, 280, 281
Alvin Gouldner, 530.
Alvin Toffler, 441, 442.
Amanah, 12, 57, 107, 108, 143, 144, 155, 161, 179, 197, 199, 200, 296, 400, 470, 556.
Amangkurat I, 414.
Amartya Sen, 552, 554.
America Undercover, 490.
American Political Bosses and Machines, 485.
Amerika Selatan, 31.
Amerika Serikat, 19, 33, 159, 297, 366, 441, 465, 487, 535, 562, 563.
Amir/M Amir, 651.
Amos Perlmutter, 371.
Ana Lindh, 171.
Ancien régime, 535.
Anderson/Ben Anderson/ Benedict R'OG Anderson, 152, 153, 522, 523, 524, 544.
Andhap asor, 166, 223, 379.
Andika Hazrumy, 134.
Andrew Jackson, 366.
Andrew Johnson, 39.
Andre Malraux, 653.
Angela Merkel, 40, 236, 457, 458, 623.
Anggaran Dasar/AD, 238, 540.
Anggaran Rumah Tangga/ART, 238, 540.
Anggota DPR, 19, 100, 134, 205, 413, 457, 618, 619.
Angkatan Darat, 99.
Aníbal António Cavaco Silva, 40.
Anies Baswedan, 19, 98, 100.
Animal Farm, 158 .
Anjana Ahuja, 114
Anne Phillips, 453.
Anthony Quinn, 172.
Antihero, 264, 265.
Anton Chekhov, 386.
Antonio Gramsci, 436.
Anwar Arifin, 502.
Anwar Sadat, 171.
Apartheid, 41, 168, 174, 381.
Apokaliptik, 518.
Apolo Nsibambi, 40
Appeal to authority, 298.
Appeal to fear, 298.
Appeal to prejudice, 298.
Argentina, 40, 71, 132.
Ariadne, 30.
Arief Budiman, 478, 509.
Arief Rachman, 89.
Ariel Sharon, 120.
Arifin C Noer, 483.
Aristoteles, 288, 296, 397, 464, 489, 491, 500.
Arjuna, 48, 64, 196, 543, 545.
Arnold J. Toynbee, 90, 92, 155.
Arnold Schwarzenegger, 250, 543.
Artficial intelligence/AI, 216
Arya Wibisana, 526
Arya, 67.
ASEAN, 266
Asfala al-safilin, 158.
Asia Tenggara, 70, 71, 103, 388, 487.
Asif Ali Zardari, 625.
Asketisme, 187, 220, 221, 453, 459, 464, 465.
Assigned leadership, 136.
Astabhrata, 522, 525, 526.
Athena, 30, 65, 324.
At-Tin, 158.
Attribution Theory, 139.
Auguste Pinochet, 478
Aung San Suu Kyi, 132.
Australia, 31, 40, 193, 458, 517, 518.
Austria, 66.
Ayatollah Ali Khameini, 40
Ayn Rand, 485.
Ayu Utami, 543.

B

B.J. Habibie, 36.
Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, 484.

Badan Pusat Statistik/BPS, 571.
Baghaa, 547.
Baghdad, 439, 560.
Bagong, 64, 413, 414, 547.
Bajing, 47, 54, 55, 56, 619.
Bakufu, 515.
Bambang Priyambada, 64.
Bambang Wisanggeni, 48.
Bancak, 414.
Bandung Bondowoso, 147, 148, 149.
Bandung, 42, 257.
Bandwagon, 298.
Bangladesh, 382
Bangsa Barat, 51.
Bangsa Boer/Afrikaner, 168.
Bangsa Timur, 51.
Bank Dunia, 427.
Bank Grameen, 382.
Banten, 134, 135.
Banyumasan, 415.
Bashar al-Assad, 132.
Basirah, 195.
Batara Antaga, 413.
Batara Empu Anggajali, 48.
Batara Guru, 413, 546
Batara Ismaya, 413.
Batara Manikmaya, 413.
Batara Sarawita, 413.
Batman, 543.
Bawor, 414.
Beautiful people, 298.
Belanda, 40, 70, 97, 167, 168, 172, 301, 303, 352, 401, 406, 407, 408, 414, 533, 644.
Bella Azbug, 455.
Benazir Bhutto, 35, 36, 170, 553, 625.
Benedanto, 93.
Benere wong akeh, 62.
Benigno Aquino, 132.
Benjamin Disraeli, 162.
Benjamin Franklin, 311.
Bennis/Warren Bennis, 141, 142, 151, 267.
Benyamin Biang Kerok, 81.
Benyamin Davnie, 134.
Benyamin Sueb, 81.
Berandal Lokajaya, 244.
Bertrand Piccard, 362.
Bertrand Rusell, 460.
Beyond the Ruling Class, 95.
Big Lie, 298.
Bilangan Fu, 543.
Bill Diffenderffer, 514.
Bill Gates, 422, 570.
Bima, 48, 196, 543, 544.
Birokrasi Weberian, 206, 364, 367
Biyanto, 561.
Black-and-White fallacy, 298.
Blaine Lee, 417, 459.
Blok Barat, 563.
Bloodless coup, 477.
Bob Sadino, 349.
Bob Woodward, 238.
Bolivia, 31, 625.
Boneff/Marcel Boneff, 263, 264, 265.
Booty capitalism, 103.
Boris Pasternak, 65.
Borobudur, 191.
Bottomore, 91, 92, 94.
Bourdieu/Pierre Bourdieu, 278, 279.
Brawijaya VII, 550.
Brawijaya, 414.
Brazil, 40.
Breakthrough coup d'état, 478
Brexit, 632.
Brit Hume, 370.
Brotherhood, 470.
Bruce Lee, 416
Brunei Darussalam, 40.
Brutus/Markus Yunius Brutus/ Quintus Servilius Caepio Brutus, 324
Budaya Carangan, 416.
Budaya populer, 174
Budha Zen, 519.
Budha, 125.
Budiarto Shambazy, 132.
Bukhari, 156.
Bundestag, 458.
Bung Hatta/Hatta, 57, 69, 389, 390, 401, 405, 406, 504, 639.
Bung Karno/Soekarno, 31, 35, 36, 42, 56,58, 69, 71, 170, 204, 213, 336, 339, 345, 391, 392, 400, 405, 406, 407, 456, 533, 624, 626, 652.
Bunyamin, 134.

Bureau-pathology, 363.
Bureau-rationality, 363
Burundi, 552.
Bushido, 513, 514.
Butet Kartaredjasa, 403

C

Cak Kartolo, 80
Cakil/Buta Cakil, 545, 546.
Cakra manggilingan, 93, 425.
Can't Asia Think?, 221, 285.
Candi Sewu, 147, 148.
Candradimuka, 18, 47, 48.
Capacity building , 205.
Capita Selecta, 504.
Carl Gustav Jung, 627.
Carlos Menem, 40.
Carter Center, 626.
Casa delle Libertà/Wisma Kemerdekaan, 106.
Castilian Spanyol, 193.
Catch-all parties, 534.
Ceko/Cekoslowakia, 44, 45, 145.
Central Executive Office/CEO, 584.
CETRO, 456.
Chaebol, 103.
Chaidir, 460.
Change of velocity, 313.
Changes and continuity, 534.
Chao pho/*Jao poh*, 488.
Charles de Gaulle, 161, 391, 418.
Charles E. Merriam, 96.
Charles James Fox, 436.
Charlie Chaplin, 290.
Chauvinisme, 67.
Chauvinistik, 67.
Che Guevara, 241, 625.
Chechnya, 427.
Checks and balances, 52, 214, 227, 231, 384.
Cheng Ho/Zhèng Hé, 560
Chili, 43, 476, 478.
China, 40, 42, 53, 114, 131, 193, 285, 317, 346, 448, 468, 580, 585.
Chou Enlai/Zhou Enlai, 40, 42, 389, 391.
Chris Baker, 103
Columbus/Christopher Columbus, 193, 560.
Christopher Koch, 31.
Churchill/Winston Churchill, 42, 46, 47, 62, 105, 227, 297, 389, 390, 391, 399, 627.
Cicero, 286, 350.
Civil society, 98, 348, 501.
Civil War, 297.
Civilization, 51.
Clausewitz/Carl von Clausewitz, 239, 373, 444, 580, 585, 586, 587, 590.
Clementis, 44, 45.
Clifford Geertz, 97, 98, 225.
Clint Eastwood , 248.
Clinton/Bill Clinton, 33, 34, 38, 39, 40, 132, 208, 287, 457, 490.
Clive Bell, 92.
CNN, 287.
Coca-Cola, 475.
Cogito ergo sum, 33.
Coleman/James Coleman, 278, 279.
Collapse, 92.
Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, 478.
Commodus, 127, 128.
Common man, 298.
Concise Dictionary of Politics, 429, 431, 580.
Condoleezza Rice, 457.
Conflict of interest, 103, 104, 227, 229, 230.
Conflictmomenten, 276.
Confucius, 199.
Conscience colletive, 518.
Constitutional ethics, 540.
Constitutional laws, 540.
Consultative leader, 342.
Contemporary Leadership Theories, 139.
Contributions restrictions, 483.
Corazon Aquino/Cory Aquino, 40, 132, 383, 457.
Cornell University, 544.
Corporate Social Responsibility/CSR, 370.
Coup d'etat, 432.
Coup d'Etat, a Practical Handbook, 476.
Cover both sides, 501.
Covey/Stephen R. Covey, 86, 200, 201, 233, 234, 331, 357.
Cozy relationship, 103.
Creative destruction, 52.
Credibility, 197, 200.
Cristina Kirchner/Cristina Fernández de Kirchner, 40, 132 , 457, 622.

CSIS, 108, 411.
Culture approach, 50.
Cupet pikire, 190.
Cyril Northcote Parkinson, 366.

D

D'Souza, 125, 141, 267, 268, 356.
Daidalos, 30.
Daimyo, 513.
Damarwulan, 414.
Danah Zohar, 221.
Daniel Boorstin, 502.
Daniel Defoe, 424
Daniel Goleman, 338.
Dante Alighieri, 401.
Daoed JOESOEF, 211
Daoyuan, 218.
Dasa Darma Raja, 522.
Dasa Dharma Pramuka, 223.
Dasamuka, 545, 579.
David Cameron, 469
David Korten, 482.
David Price, 76.
David Robertson, 380.
David/Daud, 439.
De Kock, 301, 302.
Decisional autonomy, 565.
Decision-making, 238, 434.
Deepak Chopra, 154, 220.
Dekralasi Universal Hak Asasi Manusia, 383.
Dekrit Presiden, 504.
Delem, 414.
Deliar Noer, 383.
Deliberatif, 112.
Demistifikasi, 49.
Democracy within Parties, 565.
Demokrasi Kita, 69, 213, 469, 504.
Demokrasi liberal, 339, 454.
Demokrasi partisipatoris, 454.
Demokrasi substansial, 63.
Demokrasi Terpimpin/*Guided Democracy*, 69.
Demokrasi, 11, 17, 18, 19, 20, 33, 41, 47, 57, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 98, 100, 101, 104, 112, 132, 133, 136, 194, 213, 214, 230, 231, 246, 247, 248, 249, 252, 276, 278, 280, 299, 304, 316, 318, 322, 327, 331, 336, 339, 343, 348, 349, 360, 366, 367, 374, 380, 382, 384, 386, 388, 395, 402, 405, 406, 413, 425, 426, 432, 453, 454, 455, 456, 460, 462, 464, 469, 476, 478, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 489, 492, 495, 498, 499, 501, 504, 510, 511, 514, 516, 517, 528, 529, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 551, 554, 564, 565, 566, 574, 575, 576, 578, 579, 597, 598, 605, 615, 616, 619, 621, 632, 633.
Demokratischer Aufbruch, 458.
Demonizing the enemy, 299.
Deng Xiaoping, 40, 348.
Departemen Keuangan AS, 427.
Depersonalisasi parpol, 566.
Desa mawa tata, 513.
Despotisme, 489.
Destarata, 196, 429.
Developmentalism, 212.
Dewa Matahari, 554.
Dewa Shiwa, 546.
Dewasrani, 48.
Dewi Drupadi, 196.
Dewi Gandari, 429.
Dewi Hera, 174.
Dhakidae/Daniel Dhakidae, 98, 365, 368, 385, 423, 424, 431, 435, 472, 473, 507.
Dharmawan Budi Suseno, 546.
Di Bawah Bendera Revolusi, 504.
Diamond/Jared Diamond, 92, 411, 413.
Dimensi Manusia dalam Pembangunan, 157, 212.
Dinasti Ayyubiyah, 121.
Dinasti Bush, 103, 132.
Dinasti Qing, 131.
Diosdago Macapagal, 132.
Diponegoro, 172, 256, 301, 302, 303, 304.
Direct order, 299.
Dirty hands, 388.
Discorsi, 471.
Disinformation, 299.
Diyarbakir, 121.
Djamaluddin Ancok, 189.
Djayadi Hanan, 318, 314.
Djohan Effendi, 54, 55, 57.
Djoko Munandar, 134.
Dmitry Medvedev, 40.
Don Quixote/Don Kisot, 162.

Donald H. Mcgannon, 109, 118, 249.
Donald Trump, 287, 632.
Donna Rice, 185.
Donny Hathaway, 225.
Dono, 292.
Doris Kearns Goodwin, 240.
Douglas Mc Arthur, 391.
Doyok, 414.
Dua kalimah syahadat, 64.
Duel one by one, 606.
Dunia Kristen, 121.
Durna/Dahyang Durna, 545.
Dursasana, 196.
Duryudana, 196.
Dweck/Carol S. Dweck, 283, 284, 285.
Dwifungsi pengusaha dan penguasa, 102, 229

E

Ed Miliband, 468
Edmund Burke, 397.
Edward Banfield, 252.
Edward de Bono, 217.
Edward Everett, 297.
Edward Titchener, 273.
Edward W. Said, 509
Eep Saefulloh Fatah, 209
Egalitarianisme, 63, 348, 529.
Eggi Sudjana, 442.
Ego, 182, 183.
Eiji Yoshikawa, 514.
Einfühlung, 273.
Eisenhower/Dwight D Eisenhower, 103, 117, 490, 616
Ekuador, 31.
Ekuslie Goestiandi, 330, 331.
El General en su Laberinto, 29.
Eleanor Roosevelt, 332, 455.
Electoral Votes, 34.
Eliot Spitzer, 186.
Elisa Carrio, 622.
Elizabeth D. Samet, 76.
Emancipation and change argument, 455.
Emergent leadership, 136.
Emha Ainun Nadjib, 203, 204, 217, 225, 275, 293, 294, 400, 416, 640.
Emile Durkheim, 113, 274, 278, 518, 554.
Emily Oster, 233.
Emmerson/Donald K Emmerson, 97, 98.
Emotional Intelligence, 215.
Emotional Quotient, 166, 215.
Emotional Spiritual Quotient, 166.
Empati, 144, 165, 222, 242, 255, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 280, 281, 289, 295, 298, 467, 517, 608.
Empu Gandring, 558
Endang Aripin, 174.
Engendering Democracy, 453.
Era Reformasi, 102, 214, 247, 322, 367, 456, 505, 566.
Erbakan/Necmetin Erbakan, 306, 480, 582.
Erdoğan/Recep Tayyip Erdoğan, 40, 480.
Eric Nordlinger, 371.
Erich Fromm, 184, 258, 259.
Ernest Hemingway, 74.
Ernest Renan, 151, 274.
Eropa Timur, 486, 563.
Eropa, 31, 70, 91, 173, 278, 285, 366, 390, 412, 437, 441, 453, 475, 494, 507, 522, 523, 529.
Ersatz capitalist, 103.
Erwan Kurtubi, 134.
Ethnic nationalism, 648.
Etika Protestan, 221, 640, 649.
Euphoria, 299.
Eurasia, 562.
Euripides, 115.
Evo Morales, 625.
Evolusi genetik, 158.
Evolusi kultur, 158.
Evolutionary leadership theory/ELT, 114.
Executive toolbox, 314.
Exit strategy, 622, 624, 625.
Expenditure limits, 483.

F

F. Scott Fitzgerald, 165.
F.V.H.A. de Stuers, 301.
Fachry Ali, 384.
Fahmi Idris, 101.
Fairfax Country, 482.
Fait accompli, 305.
Fake news, 632.
Fakultas Budaya Jurusan Sastra UGM, 526

Fareed Zakaria, 66, 514, 537.
Fathonah, 143.
Fatmawati, 204.
Federasi Rusia, 425.
Feminisme, 453, 454, 532.
Feodalistik, 63, 81, 345, 564.
Ferdinand Marcos, 40.
Ferdinand Tönnies, 278.
Ferry Fredy Karwur, 158.
Fidel Castro, 40, 170, 624.
Fight against, 340, 341.
Fight for, 340, 341.
Fiji, 40, 478.
Fikiran Ra'jat, 75.
Filantropis, 282, 422.
Filipina, 40, 71, 103, 104, 132, 227, 487, 488, 489.
Financial politics, 466, 482, 483, 485.
Finlandia, 70
Firdevsi, 125.
Firmanzah, 598, 599.
First-past-the-post, 252.
Fitron Nur Ikhsan, 135.
Flag-waving, 299.
Floating mass, 214.
Followership, 82.
Fooling around, 295.
Formal power, 511.
Fortuna, 472.
Four-dimensional view of power, 433, 434.
Fragmentation of the elite, 96.
Francis Fukuyama, 200, 277.
Frank Tyger, 368.
Franklin D Roosevelt, 170, 191, 258, 317, 318, 390, 490.
Franz Magnis-Suseno, 65, 66, 441, 515.
Fred J. Cook, 485.
Freddie Mercury, 243.
Frederick Yang Agung, 585.
Frederik Willem de Klerk, 168, 169.
Friedrich Nietzsche, 200.
From Voting to Violence, 551.
Front Pembebasan Palestina/PLO, 120.
Fuad Hassan, 276.
Führer, 67.
Fulgencio Batista, 625.
Fusi partai-partai politik, 214.
Fyodor Dostoyevsky, 269.

G

Gabriel García Márquez, 28, 29, 30, 31, 33, 34.
Gajah mati meninggalkan gading, 631.
Gamal Abdul Naser, 42
Gambia, 478.
Gandhi/Mahatma Gandhi, 41, 153, 167, 168, 171, 199, 352, 396, 464, 465.
Gangsterism, 487.
Gareng, 64, 413, 414, 416, 547.
Garis-garis Besar Haluan Negara/GBHN, 504.
Garry Hart, 185.
Garry Kasparov, 177.
Gatotkaca,48, 544.
Gaya free-rein, 361.
Gaya kepemimpinan afiliatif, 338.
Gaya kepemimpinan demokrat, 338.
Gaya kepemimpinan kharismatik, 337.
Gaya kepemimpinan komandan, 338.
Gaya kepemimpinan partisipatif, 337.
Gaya kepemimpinan pelayan, 338.
Gaya kepemimpinan pembina, 338.
Gaya kepemimpinan situasional, 337.
Gaya kepemimpinan transaksional, 337.
Gaya kepemimpinan transformasional, 337.
Gaya kepemimpinan visioner, 338.
Gaya kepemimpinan yang tenang, 337.
Gaya kisi-kisi manajerial, 338.
Gaya konsultatif, 338.
Gaya laissez-faire, 338.
Gaya otoritatif baik hati, 338.
Gaya otoritatif eksploitatif, 338.
Gaya partisipatif, 338.
Gaya pengatur langkah, 338.
Gedung Putih, 37, 39, 171, 247, 389, 430.
Gemeinschaft, 278.
Gemlelengan/gemblelengan, 292, 293, 294.
Generasi Alfa, 634.
Generasi Milenial, 631, 633, 634, 654.
Generasi Baby Boomer I, 634.
Generasi Baby Boomer II, 634.
Generasi Era Depresi, 634.
Generasi Pasca-PD II, 634.
Generasi Perang Dunia II, 634.

Generasi X, 634.
Generasi Y (Milenial), 634.
Generasi Z, 634.
George Cathin, 470.
George Eliot, 171.
George Gallup, 251.
George Herbert Walker Bush/George Walker Bush, 132, 490.
George Thayer, 482.
George W Bush Jr, 132.
George Washington, 31, 173, 483.
Gerakan Jalan Lurus/GJL, 411.
Gerakan Ratu Adil, 256.
Gerald R. Ford, 37.
Gerd Gigerenzer, 193.
Gergen/David Gergen, 37, 38, 39
Gerontocracy, 209, 210.
Gerung/Rocky Gerung, 172.
Gesellschaft, 278.
Giddens, 435, 436.
Gilbert Gottlieb, 284.
Gillian Dyer, 502.
Giovanni Gentile, 224.
Gipsi, 34.
Giuliani/Rudolph William Louis Giuliani, 137, 138, 169.
Give and Take, 280.
Gladiator, 127.
Glasnost, 41.
Glittering generalities, 299.
Gloria Macapagal Aroyo, 40.
Glorious Revolution, 52.
Goenawan Mohamad, 126.
Goerge Orwell, 49, 50, 158, 420, 497.
Goethe/Johann Wolfgang von Goethe, 165, 213
Goketsu no Kyaku, 412.
Goliath, 439.
Golongan ksatria, 414.
Golongan putih/golput, 54, 250.
Golongan raksasa, 414.
Good governance, 179.
Good to Great, 332.
Gordon Brown, 40.
Grand strategy, 587, 589.
Greene/Robert Greene, 440, 441, 442, 447, 451, 593, 594.
Greenleaf/Robert K. Greenleaf, 164.
Green-Pedersen, 128
Große Koalition, 459.
Growth mindset, 285.
Grup Musik *Bimbo*, 490.
Guardian coup d'état, 477, 478.
Guillotine, 559.
Gunawan Wibisana, 545.
Gundala Putra Petir, 55.
Gundhul Pacul, 293.
Gunung Krakatau, 257.
Gunung Lawu, 550.

H

H.C. Andersen, 256.
H.G. Wells, 249.
H.O.S. Tjokroaminoto, 256, 257.
Habermas, 436.
Hadiah Nobel, 29, 33, 169, 190, 382, 537.
Hadiz/Vedi R Hadiz, 98, 103, 495, 496, 497, 533
Hadji Murat, 375.
Hafez al-Assad, 132.
Haji Agus Salim, 166, 167, 170, 406, 407, 464, 465.
Haji Samanhoedi, 101
Half-truth, 299.
Hamad bin Khalifa, 478.
Hamid Karzai, 40.
HAMKA, 187, 449, 651.
Hang Jebat, 460.
Hans J. Morgenthau, 399.
Harakiri, 515.
Harari/Oren Harari, 175, 176, 625.
Harimau mati meningalkan belang, 631.
Harold Laswell, 470.
Harriet Harman, 468.
Harrow School, 297.
Harry Reid, 538.
Harry S. Truman, 41, 258.
Hart/Lidell Hart, 587, 588.
Hart/Micheal H Hart, 31, 67.
Hary Tjan Silalahi, 411.
Hastings Banda, 380.
Hasyim Asy'ari, 400, 401, 404.
Hegelian-bureaucracy, 363.

Hegemoni/hegemonik, 82, 210, 253, 254, 366, 399, 435, 436, 446, 575.
Hejaz, 121.
Held/David Held, 112.
Hendrik Verwoerd, 168.
Henry Willer, 54.
Herbert Mercuse, 49, 190.
Herbeth Feith, 69, 339, 393, 532.
Heroic Leadership, 375.
Heroisme, 155, 376.
Heryani, 134.
Heywood/Andrew Heywood, 67, 140, 239, 377, 428, 503, 510, 512, 513, 530, 531, 532.
Hidayat Nurwahid, 383.
Hideki Tojo, 389.
High politics, 382, 443, 470, 508.
High trust society, 200, 277.
Hikmat Tomet, 134.
Hillary Clinton, 34, 287, 457
Hima Himantaka, 64.
Hindia-Belanda, 97.
Hiperdyadic spread, 572.
Hiroshima, 41, 254, 580, 581.
Hispanik, 38.
Hitler/Adolf Hitler, 62, 66, 67, 170, 228, 299, 390, 639.
Hoax, 571, 632, 633.
Hobbes, 387, 388, 435, 436.
Holocaust, 67.
Holywood, 121.
Homo Sapiens, 158.
Honesty, 199, 330.
Horse power, 428.
Hot potato, 305.
Howe/David Howe, 271, 272, 273, 274.
Hu Jintao, 40.
Hugo Chavez, 624, 625.
Hukum besi oligarki, 491.
Hukum daya tarik, 451.
Hukum E.F. Hutton, 451.
Hukum hubungan yang baik, 451.
Hukum intuisi, 451.
Hukum katup, 451.
Hukum kehormatan, 451.
Hukum kekuasaan, 439, 440, 442, 451, 593, 608.
Hukum kemenangan, 452.
Hukum kepemimpinan, 451.
Hukum landasan yang mantap, 451.
Hukum lingkungan sepergaulan, 452.
Hukum momentum besar, 452.
Hukum navigasi, 451.
Hukum pemberdayaan, 452.
Hukum pengaruh, 451.
Hukum pengorbanan, 452.
Hukum pertumbuhan yang eksplosif, 452.
Hukum prioritas, 452.
Hukum proses, 451.
Hukum reproduksi, 452.
Hukum warisan, 452.
Human intervention, 552.
Hungaria, 114
Huntington/Samuel P Huntington, 112, 370, 371, 372, 373, 477, 478, 505, 562, 564.
Husnul khatimah, 622.
Hydro power, 428.

I

I branding, 548.
I.J. Kasimo, 407, 408.
Ibnu Khaldun, 114, 436, 561, 630.
Ibnu Umar, 156.
Ibrahim bin Adham, 463.
Ideologi Kiri, 534.
Idi Subandy Ibrahim, 502.
Idul Fitri, 644.
Ikonografi, 395, 416, 525, 543, 544, 546, 547.
Il Principe, 93, 471, 559.
Imelda Marcos, 245
IMF, 427.
Immanuel Kant, 163, 166, 209, 503, 505, 613.
Impeachment, 39, 446, 479, 490.
In Praise of Followers, 576.
Incapacity, 206, 207, 209.
India, 40, 41, 42, 103, 114, 153, 168, 352, 391, 392, 396, 495, 535, 553, 560.
Indiana, 34.
Indira Gandhi, 132, 133, 553.
Indochina, 42.
Indonesia Idol, 250.
Indonesia, 18, 19, 20, 21, 31, 35, 42, 54, 69, 70, 74, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 132, 153, 173, 174, 176, 210, 247, 248, 266, 267, 279, 282, 292, 310, 311, 312, 319, 320, 328, 335,

339, 340, 345, 362, 384, 391, 392, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 422, 455, 456, 479, 481, 484, 486, 487, 488, 489, 494, 495, 496, 497, 504, 532, 533, 534, 540, 541, 544, 552, 565, 566, 571, 616, 618, 623, 624, 626, 641, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654.

Indonesiawi, 404.

Indra Tranggono, 398, 399.

Indro, 292.

Inevitable victory, 298.

Ing madyo mangun karso, 117, 394.

Ing ngarso sung tulodho, 117, 394.

Inggris, 40, 41, 52, 70, 153, 154, 158, 168, 252, 292, 323, 365, 389, 399, 427, 459, 468, 632.

Ingo Winkler, 139.

Institusi ekonomi ekstraktif, 52.

Institusi ekonomi inklusif, 52, 53.

Institusi politik ekstraktif, 52, 53.

Institusi politik inklusif, 52.

Integrity, 198, 199, 221, 606.

Inteligence Quoient, 215.

Intentional vagueness, 299.

International Encyclopedia of Social Sciences, 491.

International Grandbook of the Studies in the Theory of Ideology, 529.

Intisari, 54, 55.

Invisible hands, 485.

Ira Chaleff, 574.

Irak, 40, 121, 159, 588, 589.

Iran, 40, 41, 122, 123, 124.

Irlandia, 107.

Irna Narulita, 135.

Isabel Allende, 43, 476.

Isabel Peron, 622.

Islam, 41, 42, 18, 107, 114, 156, 167, 186, 187, 209, 244, 256, 257, 285, 310, 376, 399, 401, 436, 442, 466, 489, 525, 527, 532, 533, 534, 546, 560, 634.

Islam Nusantara, 645.

Islam, Nasionalisme, dan Marxisme, 534.

Islamic Protestantism, 651.

Islamic Calvinism, 651.

Ismet Iskandar, 134.

Istana Barok, 44.

Iswandi Syahputra, 501.

Italia, 30, 105, 106, 107, 119, 172, 224, 583.

J

J. Kristiadi, 107, 108.

Jack Snyder, 551.

Jackie Chan, 208.

Jacksonian, 366, 367.

Jagalabilawa, 48.

Jaka Sembung, 55.

Jakarta, 34, 161, 217, 293, 405, 407, 488, 489, 614.

Jakob Oetama, 36.

Jakob Sumardjo, 161, 162, 163.

Jaksonian Democracy, 366.

Jalal Talabani, 40.

Jalaluddin Rumi, 109, 111.

Jalan Demokratis ke Sosialisme, 478.

James Buchanan, 490.

James Clavell, 115, 116, 512, 514.

James Freeman Clarke, 397, 398.

James MacGregor Burns, 83, 84, 225, 352, 354 .

James Watt, 193.

Jan Baptist Cleerens, 301

Jan Peter Balkenende, 40

Jasper B. Shannon, 96.

Jawa Pos, 243.

Jawa Tengah, 54, 63, 147, 414.

Jawa Timuran, 414.

Jazuli Juwaini, 134.

Jenderal Aung San, 132.

Jenderal George McClellan, 171.

Jenghis Khan, 113, 114, 116.

Jenny Holzer, 243.

Jepang, 40, 99, 174, 220, 221, 252, 265, 266, 285, 317, 326, 412, 467, 468, 513, 514, 515, 519, 554, 640, 649, 650.

Jerman Barat, 458.

Jerman Timur, 458

Jerman, 40, 66, 67, 165, 273, 389, 390, 457, 458, 459, 562, 585, 623.

Jerusalem, 121.

Jhonny Iskandar, 292.

Jim Collins, 332.

Jimmy Carter, 626.

Joel Migdal, 487.

Johannesburg Fort, 168.

John Emerich Edward Dalberg Acton, 474.
John F Kennedy, 40, 49, 81, 93, 170, 227, 297, 423, 490.
John Howard, 40, 517.
John J. Pershing, 205.
John Kenneth Galbraith, 53
John Lehman, 414.
John McCain, 34.
John Naisbitt, 282, 283, 570.
John P Kotter, 19.
John Porter, 206.
John Quincy Adams, 144,
John Randolph, 349.
John Reid, 469.
Join the crowd, 298.
Joko Widodo/Jokowi, 36, 71, 102, 457, 614.
Jong Islamieten Bond/JIB, 167.
Jose Arcadio Buendia, 34.
Joseph C. Rost, 568.
Joseph Campbell, 547.
Joseph Estrada, 40
Joseph Nye, 355, 434.
Joseph Schumpeter, 367.
Juan Peron, 622.
Judicial review, 505.
Julien Benda, 505, 506.
Julius Caesar, 116, 324, 390.
Jusuf Kalla, 102, 383, 457.

K

Ka'bah, 549, 560.
Kabinet Karya, 56. 57.
Kabinet Kerja Darurat Ekstra-Parlementer, 56.
Kabinet Kerja, 457.
Kahlil Gibran, 182.
Kaisar Dao Guang, 131.
Kaisar Guang Xu, 131.
Kaisar Tiongkok, 131.
Kaisar Zhu Di, 193.
Kali Progo, 301.
Kalimasada, 64.
Kamboja, 114.
Kamikaze, 515, 554.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 282, 344, 365, 414
Kanselir Gerhard Schröder, 459.
Kapitalisme, 221, 278, 422, 496, 532, 634.
Karang Kedempel, 416.
Karen Armstrong, 548, 550.
Karima el-Mahroug, 107.
Karl Mannheim, 95.
Karna, 545.
Kartini Kartono, 112.
Kasino, 292.
Kasman Singodimedjo, 166.
Katolik, 408, 521, 535.
Kaum *Mustadzafin*, 416, 417.
Kayseri, 652.
Kebo Ijo, 558, 559.
Kecemasan neurotik, 183.
Keindonesiaan, 400, 401, 404, 641, 643, 644, 645. 647, 649, 654.
Keislaman, 75
Kekaisaran Ming, 560.
Kekaisaran Xuan Tong, 131.
K, ekuasaan Eropa modern, 523.
Kekuasaan gender, 436, 437.
Kekuasaan Jawa, 394, 435, 512, 519, 522, 523.
Kekuasaan kelas, 436, 437.
Kekuasaan performative, 436.
Kekuasaan personal, 89, 419, 420.
Kekuasaan posisional, 80, 419, 624, 625.
Kekuasaan rasialis, 436, 437.
Kekuasaan seksualitas, 436, 437.
Kekuasaan visual, 436, 437.
Kekuatan Pemimpin, 73.
Ken Arok, 558, 559, 632, 633.
Ken Arokisme, 559.
Ken Arokistik, 48
Ken Blanchard, 80.
Ken Dedes, 558
Kenduri Cinta, 217.
Kenegarawanan, 11, 398, 400, 404.
Kenneth Starr, 39.
Kenya, 34, 552.
Kepala banteng, 549.
Kepemimpinan birokrasi, 340, 363, 367, 368, 369, 573.
Kepemimpinan kultural, 374
Kepemimpinan transaksional, 354, 355.
Kepemimpinan transformasional, 337, 354.

Kerajaan Loji Tengara, 64.
Keraton Surakarta Hadiningrat, 526
Kertajaya/Hermawan Kertajaya, 605, 606, 608.
Keshogunan Tokugawa, 513.
Keterwakilan perempuan, 455, 456, 457.
Kevin Phillips, 103
Kevin Rudd, 40, 517.
Key Concepts in Politics, 377.
Kharisma, 22, 60, 88, 139, 142, 143, 144, 154, 222, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 256, 325, 333, 337, 338, 340, 350, 354, 378, 390, 419, 420, 511, 512.
Kharismatik, 401.
Khomeini/Ayatollah Khomeini, 41, 399.
Ki Ageng Mangir, 327.
Ki Ageng Pandanaran, 243.
Ki Ageng Suryomentaram, 126.
Ki Hadjar Dewantoro/Ki Hadjar Dewantara, 117, 119, 394, 652.
Kick Andy, 89.
Kim Il Sung, 132.
Kim Jong Il, 132.
King/Larry King, 287, 288, 289, 290, 296, 297.
Kingdom of Heaven, 121.
Kishore Mahbubani, 221, 284, 285, 650, 654.
Kissinger, 60.
Klaten, 54.
Klement Gottwald, 44.
Klientalistik, 346, 347.
Klu Klux Klan, 521.
Kolombia Raya, 32.
Kolombia, 29, 31.
Komik Indonesia, 263.
Komisi Pemilihan Umum/KPU, 581.
Kompas, 20, 36, 55, 58, 70, 71, 72, 84, 98, 131, 132, 133, 134, 145, 146, 159, 163, 172, 220, 247, 250, 319, 362, 382, 385, 386, 649.
Komunisme, 41.
Konferensi Asia Afrika/KAA, 42.
Konferensi Perubahan Iklim, 517.
Konflik aktual, 434.
Konflik laten, 434.
Konflik potensial, 434.
Konosuke Matsushita, 158.
Konrad Adenauer, 389, 391.
Konservatisme, 532, 538.
Konstituante, 407, 456, 504, 534.
Konstitusi baru, 381.
Konstitusi, 102, 112, 133, 208, 319, 359, 398, 453, 479, 480, 505, 511, 513, 522, 532, 537, 539, 540.
Konstitusionalis, 373.
Kontan, 623.
Konvenan Hak-hak Politik dan Sipil, 383.
Korea Selatan, 40, 53, 103, 248, 652.
Korea Selatan, 40, 53, 103, 248.
Korea Utara, 132.
Kosmokrasi, 516, 517.
Kosmopolitanisme, 532, 647.
Kota Gede, 327
Kremlin, 291, 426.
Krishna, 196.
Kristen Demokrat/Democrazia Cristiana, 106.
Krugman, 510.
Kstaria dari La Mancha, 162.
Kuba, 40, 624, 625.
Kubik Leadership, 224.
Kudeta, 67, 306, 426, 432, 433, 446, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 558, 563, 582, 621, 624, 625.
Kuil Emas, 553.
Kumbakarna, 544, 545, 579.
Kuntowijoyo, 48, 49, 52, 58, 327.
Kurawa, 196, 415, 429, 545.
Kurdi, 121.
Kurniawan Adi Nugroho, 55.
Kyoto Treaty, 536.

L

L'etat ces moi, 230.
La Trahison des Clercs, 506.
Labyrinth, 30.
Laclau, 68.
Laissez-faire, 338, 361, 532.
Lajering Jawa, 302.
Lao Tzu, 137, 465.
Laporan dari Banaran, 504.
Leader-Member exchange/LMX, 139.
Lebak, 135
Lee Hsien Loong, 40, 132.
Lee Iacocca, 268
Lee Kuan Yew, 40

Lee Myungbak, 40.
Lees-Marshment, 599
Legacy for, 331.
Legacy from, 331.
Legitimasi demokratis, 515, 516.
Legitimasi eliter, 515.
Legitimasi religius, 515.
Legitimizing identity, 648.
Leiden is lijden, 167.
Lenin/Vladimir Lenin, 170, 291, 292, 559, 562.
Leo Tolstoy, 270, 375, 428.
Li Ke, 155.
Liberalisme, 532, 535.
Libya, 172, 478, 588.
Limbuk, 64, 413, 543.
Linda Hunt, 31.
Linda Tripp, 39.
Lindsay Fox, 574.
Lion on The Desert, 172.
Lir sarah menggweng jaladri, 527.
Local strongmen, 487.
Locke/John Locke, 436.
London, 468
Long Walk to Freedom, 393.
Longman Dictionary of Contemporary English, 197.
Lord Acton, 441, 471, 473, 489.
Louis du Perron, 304.
Louis XVI , 559.
Low politics, 443, 470, 597.
Low profile, 348, 358.
Low trust society, 200, 277.
Lucian W. Pye, 50.
Lucky Djani, 103, 104.
Luíz Inácio da Silva, 40.
Luttwak/Edward Luttwak, 476, 477, 583, 587, 588, 589, 590.
Lyndon Johnson/Lyndon B Johnson, 161, 490.

M

M. Amien Rais, 374, 448, 470, 479.
M.H. Thamrin, 408.
M.T. Arifin, 512.
Machiavelli/Niccolò Machiavelli, 43, 93, 95, 436, 470, 471, 472, 473, 559.
Machiavellian, 470, 472.
Machiavellistik, 48
Machimura, 468.
Macondo, 34.
Madilog, 504.
Mafioso, 119, 382, 488.
Magelang, 301
Magellan, 193.
Magna Charta, 52.
Mahathir Muhammad, 40
Mahkamah Agung/MA, 134, 581.
Mahkamah Konstitusi/MK, 133, 135, 203, 505.
Majalah *Adil*, 74.
Majalah *Forbes*, 457.
Majalah *Historia*, 301.
Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR, 402, 505, 541.
Makassar, 172.
Malang, 378.
Malawi Congress Party/MCP, 381.
Malawi, 380, 381.
Malaysia, 40, 103, 495.
Malcolm X, 519, 521.
Malinowski, 518.
Malioboro, 406
Man and Society in an Age of Reconstruction, 95.
Manado, 172.
Mandell Creighton, 474.
Mangkunegara IV, 220, 649.
Manmohan Singh, 40.
Manuel L. Quezon, 223
Mao Zedong/Mao Tse Tung, 42, 378, 389.
Mara Carfagna, 107.
Marcapada, 413.
Marcus Aurelius, 127, 128.
Marcus Tullius Cicero, 76.
Margaret Thatcher, 170, 385, 459.
Maria Antoinette, 559.
Marine Le Pen, 70.
Mario Monti, 107.
Mario Puzo, 119, 120, 382, 486.
Mark Twain, 43, 280, 326, 386.
Mark van Vught, 114
Mark Zuckerberg, 195, 422.
Marketing politik, 248. 549, 591, 597, 598, 599, 600. 609, 612.

Marketing yourself, 605.
Market-Oriented Party/MOP, 599, 600, 605.
Maroko, 107.
Marsono, 526.
Martin Luther King Jr, 280, 315, 521.
Martin Seligner, 530.
Marx/Karl Marx, 436, 437, 501
Marxian, 363.
Marxisme Klasik, 532.
Marxisme, 532, 534.
Mas'uliyyah, 470.
Masduki, 134.
Maslow/Abraham Maslow, 259, 262.
Masyumi, 56, 57, 532, 534.
Mataram, 327, 414, 550.
Max DePree, 146.
Max McKeown, 593.
Max Weber, 139, 221, 346, 364, 365, 376, 378, 436, 475, 511, 512, 634.
Maximus, 127, 128.
Maxwell, 82, 83, 165, 188, 451, 452.
Maya Soetoro, 34.
mBilung, 413, 414, 415.
Media Indonesia, 618.
Mediocrity, 83, 84, 225, 352.
Megawati Soekarnoputri, 36, 204, 383, 456.
Mehmet Oz, 272, 350.
Mekkah, 121.
Meksiko, 536, 625.
Mel Gibson, 31.
Melayu, 460, 576.
Memenuhi Panggilan Tugas, 504.
Men of pen, 371.
Men of sword, 371.
Menghalalkan segala cara, 128, 303, 466, 471, 490, 597, 610.
Menjadi Pemimpin Politik, 20, 73.
Menkumham, 581.
Mentalitas abangan, 225.
Mentalitas pedalaman, 651.
Mental pesisiran, 651.
Mentalitas setengah-setengah, 225
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 367.
Menzies, 193.
Merdah, 414.
Meryl Streep, 271.
Mesir, 42, 121, 191, 404, 407, 478, 481.
Mesu budi, 220, 221, 640, 649, 650.
Metesih, 301
Metro TV, 89.
Michelangelo, 653.
Michael E. Porter, 585.
Micheal C Desch, 371.
Michel de Montaigne, 132.
Michel Foucault, 410, 436.
Miftah Thoha, 355, 364.
Miguel de Cervantes, 160, 162.
Mikhael Gorbachev, 40, 41, 425, 517, 563.
Milan Kundera, 44, 45, 569.
Milan, 105, 106.
Military virtue, 587.
Militer profesional, 371, 372.
Mills/C. Wright, 95.
Milton Friedman, 218.
Minotaur, 30.
Mintzberg, 87.
Mirek, 45.
Miriam Budiardjo, 427.
Mismaarun, 546.
Mite Shysiphus, 639.
Mitos, 49, 65, 141, 142, 144, 173, 174, 240, 245, 314, 378, 412, 512, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 633.
Mit-sein, 276.
Mixed mindset, 285.
Mixed-member proportional system, 252.
Mochamad Faisal Karim, 53.
Mochtar Lubis, 310, 311, 312, 645, 650.
Modal sosial, 144, 200, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 612, 632.
Model ekonomi/pilihan rasional, 609.
Model psikologis, 610.
Model sosiologis, 609.
Modern Indonesia Project, 544.
Modern Neopatrimonialism, 346.
Mohammad Natsir, 234, 351, 406, 504.
Mohammad Roem, 166, 167.
Monarkhi absolut, 63, 230, 559.
Moncada Santiago de Cuba, 625.
Money politics, 192, 327, 466, 482, 484, 485, 487, 508.
Mongol/Mongolia, 114, 560.

Monica Lewinsky, 39, 490.
Monicagate, 39, 490.
Montesquieu, 228, 230.
Mosca/Gaetano Mosca, 91, 94
Moustapha Akkad, 172.
Muammar Gaddafi, 475, 478.
Muenchen, 67.
Muhammad Ali Bogra, 42.
Muhammad Ali Jinnah, 381.
Muhammad Ali, 416, 430, 438.
Muhammad ibn Maliksyah, 474.
Muhammad Iqbal, 561.
Muhammad Yunus, 312, 382.
Muhammad Zia-ul-Haq, 477.
Muhammadiyah, 75, 150, 616, 617, 618, 645, 651.
Muktamar NU, 291.
Multilevel marketing/MLM, 247
Multiparty system, 98.
Munich Beer Hall Putsch, 67.
Murakami/Haruki Murakami, 320, 321.
Murdoch University, 70.
Musashi/Miyamoto Musashi, 514, 519, 520.
Musharraf/Pervez Musharraf, 40, 477, 478, 624, 625.
Mushtag Khan, 103.
Mussolini/Benito Mussolini, 172, 224, 390.
Mustafa Kemal Atatürk, 42, 479, 540.
Mustakaweni, 64.
Mutual presence, 276.
Mwai Kibaki, 552.
Myanmar/Burma/Birma, 40, 42, 132, 478.
Mytology and the Tolerance of the Javanese, 544.

N

Nabi Muhammad SAW, 31, 41, 80, 125, 186, 189, 466, 490.
Nabi Nuh, 263.
Naga Bonar, 251.
Nahdlatul Ulama/NU, 291, 402, 581, 645, 651.
Nagasaki, 41, 254, 580, 581.
Nagorik Shakti, 382.
Najib Razak, 40
Nakae Chomin, 412.
Nakae Tokusuke, 412.
Nala khoiran, 547.
Nanjing, 560.
Napoleon Hill, 255.
Napoleon/Napoleon Bonaparte, 67, 170, 255, 256, 261, 390, 481.
NASAKOM, 318.
Nasionalisme kontrarevolusioner, 551.
Nasionalisme Radikal, 532.
Nasionalisme revolusioner, 551.
Nasionalisme sipil, 551.
Nasruddin Hoja, 161, 162, 243, 244, 461.
Natal, 153.
National Geographic, 560.
National Rifle Association, 522.
Nationalism ethnicity, 551.
Nativisme, 647.
Natural Leader, 114
Nawaz Sharif, 477.
Nawi Ismail, 81.
Necessità, 472.
Negara Alengka, 579
Negara mawa cara, 513.
Negarawan, 10, 23, 96, 133, 176, 227, 366, 373, 390, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406.
Nehru/Jawaharlal Nehru, 42, 132, 391.
Nelson Mandela, 37, 41, 168, 169, 174, 325, 393, 394, 396.
Neo-feodalistik, 344.
Neo-kharismatik, 139.
Neo-Marxis/Neo-Marxisme, 436, 496.
Neo-patrimonalistik, 343
Neo-Platonis, 64.
Nestor Kirchner, 621.
New Deal, 191, 258.
New York, 19, 31, 138, 169, 186, 488, 537, 544, 624.
Ngegge mongso, 632.
Nguwongke, 272.
Niall Ferguson, 50, 51.
Nicholas Chauvin, 67.
Nicolas Sarkozy, 40.
Niels Bohr, 469.
Nietzsche, 200, 436.
Nikita Khrushchev, 33, 159, 418.
Nikolai Aleksandrovich , 559.
Nilai-nilai Asia, 532.

Nixon/Richard Nixon, 19, 23, 37, 38, 39, 40, 42, 50, 78, 85, 88, 92, 137, 246, 247, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 634.
Nkrumah, 391.
Noam Chomsky, 118, 119, 299.
Nobel Perdamaian,169, 382, 518, 537.
Nokrashi Pasha, 407.
Non voter, 54, 250.
Non-decision-making, 434.
North Carolina, 34.
Northouse, 129, 130, 136, 269.
Nouri al Maliki, 40.
Noyogenggong, 414.
Nur Iman Subono, 455.
Nurani kolektif, 113.
Nurcholish Madjid/Cak Nur, 61, 62, 179, 195, 212, 340, 644, 646, 647.
Nurul Arifin, 251.
Nyi Blorong, 550.
Nyi Roro Kidul, 550.

O

Obama/Barack Obama, 19, 32, 33, 34, 35, 107, 536, 537, 538.
Obamacare, 537
Obtain disapproval, 299.
Oedipus, 125.
Ojo adigang-adigung-adiguna, 499.
Ojo dumeh, 166, 499.
Ojo kagetan, 499.
Ojo mung waton omong, 288.
Ojo rumongso biso, 156, 358.
Old Town Square, 44.
Oligarki Panglima, 493, 494.
Oligarki penguasa kolektif, 493, 494
Oligarki Sipil, 493, 494.
Oligarki Sultanistik, 493, 494.
Olof Palme, 171.
Olympiade, 606.
Omar Hassan Ahmad al Bashir, 478.
Omar Mukhtar, 172.
Omong waton, 242.
On Intelligence, 216.
On War, 443, 585.
One Dimensional Man, 49.
One Hundred Years of Solitude, 33.
One man/people, two vote, 66.
One person, one vote, one value/OPOVOV, 61, 63, 64, 639.
One-dimensional view of power, 433.
Ong Hok Ham, 405, 550.
Ongkang-ongkang, 74, 362, 422.
Open minded, 212.
Operational level, 590.
Orang-orang kafir Quraish, 490.
Orang-orang Proyek, 225.
Ordinary people, 624.
Organisisme, 533.
Orhan Pamuk, 122, 124, 125.
Orison Marden, 157.
Orkes Moral Pengantar Minum Racun, 292.
Orwellian, 366, 368.
Otopilot, 360, 362.
Otoritarianisme, 421, 575
Otoritas kharismatik, 511.
Otoritas rasional-legal, 511.
Otoritas tradisional, 511.
Otto von Bismarck, 307.
Oversimplification, 300.
Oxford English Dictionary, 91.
Oxymoron, 459

P

Pablo Picasso, 481.
Pakistan, 35, 36, 40, 42, 103, 132, 477, 478, 551, 553, 624, 625.
Pakta Molotov–Ribbentrop, 562.
Paku Buwono II, 550.
Palestina, 120.
Panama, 191.
Panca Lima, 42.
Pancasila, 112, 214, 311, 319, 405, 505, 534, 644, 645, 646, 647, 649.
Pandawa, 48, 64, 196, 197, 413, 414, 415, 429, 545, 546.
Pandeglang, 134, 135.
Pandji Masjarakat, 213.
Pandji Tirtayasa, 135.
Panebianco, 564.
Pangeran Moehammad Noer, 56, 57.
Panji Tengkorak, 264, 265.
Panji, 414.

Paralysis, 349.
Pareto/Vilfredo Pareto, 91, 93, 94
Parkinsonian, 366, 368.
Partai Buruh (Inggris), 468
Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman/ Partai Nazi, 67, 562.
Partai *Christian Democratic Union*/CDU, 458, 459
Partai Demokrat (AS), 34, 39, 535, 536, 538.
Partai Demokrat (Turki), 480.
Partai Demokratik Sosial/SPD, 459.
Partai *Forza Italia*, 105, 106.
Partai Front Nasional, 70.
Partai Golkar, 20, 135, 479, 533, 566, 581.
Partai Hijau, 459.
Partai Keadilan dan Pembangunan/AKP, 480, 540, 582.
Partai Kebaikan/*Fazilet Partisi*, 582.
Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, 581.
Partai Komunis Kuba, 624.
Partai Konservatif (Inggris), 469.
Partai Pengemis, 265.
Partai Rakyat Pakistan (PPP), 36.
Partai Refah, 582.
Partai Republik (AS), 39, 70, 535, 536, 537, 538.
Partai Sosialis/*Partito Socialista Italiano*, 106.
Partai *Syriza*, 70.
Party ID, 610.
Pasca-Orde Baru, 98, 384, 495, 534, 541, 549, 650.
Pasuk Phongphaichit, 103.
Patronage system, 367.
Paul Heru Wibowo, 175.
Paul Hirst, 530.
Paul Keating, 239.
Paul Kennedy, 51
Paulo Coelho, 102, 375, 430, 431.
Paus Fransiskus, 486.
Paus Yohanes Paulus II, 170.
PB HMI, 339
PB NU, 291.
PDB/*positioning-diferensiasi-brand*, 605.
PDI, 214.
PDIP, 614.
Pearl S. Buck, 279.
Pegawai Negeri Sipil/PNS, 365.
Pegunungan Apalachia, 494.
Pegunungan Sierra Maestra, 625.
Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi, 58.
Pembangunanisme, 212, 504.
Pembukaan UUD 1945, 541.
Pemerintahan Yunani-Roma, 494.
Pemilu 1955, 63, 532, 534.
Pencitraan, 53, 180, 247, 332, 340, 351, 378, 437, 453, 497, 498, 499, 501, 502, 544, 548, 550, 599.
Pennsylvania, 379.
Pentagon, 39.
Penyambung lidah rakyat, 508.
Penyederhanaan sistem kepartaian, 533.
People Power, 104, 424, 446.
Pepinsky/Thomas B Pepinsky, 496.
Pepsi-Cola, 475.
Peradaban Islam, 114
Perancis, 40, 41, 67, 70, 209, 230, 305, 348, 399.
Perang Dingin, 381, 563.
Perang Dunia II, 41, 42, 62, 95, 99, 254, 366, 390, 399, 480, 515, 562, 580.
Perang Jawa/Java Oorlog, 172.
Perang Khandaq/ Perang Parit, 187.
Perang Pasifik, 515, 554.
Perang Pelopones, 65.
Perang Salib III, 121.
Perbincangan Tiga Pemabuk tentang Pemerintahan, 412
Perestroika, 41.
Pericles, 152, 227.
Peristiwa 9/11, 138, 159, 298.
Perjuangan Kita, 504.
Person of the Year, 138.
Personality, 104, 180, 184, 343.
Peru, 31.
Peta ideologis, 534.
Pete Sampras, 208.
Peter Carey, 301, 302, 303.
Peter F. Drucker, 60, 79, 109, 234.
Pethéntang petenthéng, 349.
Petruk, 62, 63, 64, 413, 414, 416, 547.
Petrus Octavianus, 378.
Pewayangan Bali, 414.
Pidato Gettysburg, 297.
Pikiran mensintesis, 190.

Pilkada, 100, 133, 134, 135, 150, 485, 498.
Pilpres 2014, 71, 102, 566, 614.
Piramid, 191.
PKB-Abdurrahman Wahid, 581.
PKB-Muhaimin Iskandar, 581.
PKI/Partai Komunis Indonesia, 403, 532.
PKS, 134.
Plato/Platon, 63, 64, 65, 67, 173, 237, 238, 464.
PLTA, 57.
Pluralisme, 402, 529, 533.
PNI/Partai Nasional Indonesia, 57, 532.
POAC, 614.
Pohon beringin, 549.
Polandia, 114.
Polemik Kebudayaan, 650, 651, 652, 653.
Police state, 381.
Policy preferences, 434.
Political approach, 50.
Political bossism, 485.
Political culture, 50.
Political efficacy, 610.
Political engagement, 610.
Political game, 58.
Political participation, 434.
Politico-business, 103, 104.
Politics as as Vocation, 476.
Pondok pesantren, 374.
Pontjo Sutowo, 96.
Pop Culture, 175, 250, 551.
Popular vote, 34.
Populisme, 59, 62, 66, 67, 68, 70, 71, 340.
Portugal, 40, 107.
Positive sum, 434.
Positive Words Powerful Result, 254.
Post power syndrome, 628.
Post-Truth, 631, 632, 634.
Powell/Colin Powell, 175, 175, 640.
Power and the Social, 435.
Power separation, 230.
Power tends to corrupt, 471, 474.
PPP, 5, 214.
Prabowo Subianto, 71, 383.
Prabu Durginadur Belgheduelbeh/ Welgeduwelbeh, 64.
Prabu Heru Tjokro, 256
Prabu Ramawijaya, 526.
Prabu Sasra Hadimurti, 64.
Pradiansyah/Arvan Pradiansyah, 253.
Praha, 44.
Prambanan, 54, 148.
Pramoedya Ananta Toer, 327, 334, 335, 345, 558.
Prayut Chan-O-Cha, 478
Prescott Bush, 103.
Pretoria, 153, 168.
Pretorian, 371, 372.
Primal Leadership, 338.
Primbon Politik, 75.
Priyayi, 81, 97, 225, 412, 528.
Progressive change, 535.
Project identity, 648
Pronunciamiento, 477.
Protokol Kyoto, 517, 518.
Prusia, 443, 585.
Psikoanalisis, 139, 181, 182, 183.
Psikologi politik, 181, 182, 183.
Public disclosure, 483.
Public good, 518, 610.
Pulitzer Prize, 379
Punakawan/panakawan, 403, 413, 414, 415, 416, 422, 510, 544, 546, 547 .
Purbatjaraka, 651.
Puntadewa, 64.
Putnam/Robert D. Putnam, 276, 278.
Pu-Yi, 131.

Q

Qatar, 478,
Qualified critique, 434.
Quasi-Islamis, 480.
Queen Latifah, 186.
Quotes out of Context, 300.

R

Raden Mas Said, 244.
Raden Wibisana, 545.
Radikalisme, 533.
Rafael Trujillo, 624.
Rahul Gandhi, 132.
Rahwana, 545, 579.
Raila Odinga, 552.
Raja adil raja disembah, 230, 460, 576.

Raja Balkh, 463.
Raja lalim raja disanggah, 230, 460, 576.
Raja Louis XIV, 230.
Raja Mataram, 327, 550.
Rajiv Gandhi, 132, 553.
Ralph Waldo Emerson, 201, 315, 335.
Rama, 545, 579.
Ramayana, 436, 545, 579.
Ramlan Surbakti, 522.
Ramos Horta, 171.
Ran, 514.
Rano Karno, 134.
Rara Jonggrang, 147, 148.
Rasionalitas, 49, 112, 144, 240, 240, 246, 364, 399, 549, 550, 570.
Rational actors, 436.
Rational choice, 610.
Rationalization, 300.
Ratu adil, 169, 256, 257, 550.
Ratu Atut, 133, 134.
Ratu Elizabeth II, 138.
Ratu Josefa Iloilovatu Uluivuda, 40.
Ratu Tatu Chasanah, 134.
Raul Castro, 624, 625.
Rawalpindi, 36, 553.
Ray Price, 37.
Reaksioner, 535.
Red herring, 300.
Reductio ad Hitlerum, 299.
Religi Tokugawa, 221, 640, 649.
Renaisans, 653.
René Descartes, 33.
Reorganizing Power in Indonesia, 495.
Republican in Name Only, 538.
Republik Dominika, 624.
Republik Rakyat China, 522.
Republik Sosialis Soviet Rusia, 426.
Republikanisme sipil, 454.
Responsibility, 146, 177, 358, 370.
Resistance identity, 648.
Restorasi Meiji, 220, 221, 285, 514, 650.
Retrogressive change, 535.
Reunifikasi Jerman, 458.
Reuters, 468
Revolusi Bolshevik, 209, 559.
Revolusi Iran, 41, 209.
Revolusi Perancis, 230, 348, 529, 535, 559.
Revolusioner, 214, 371, 392, 403, 425, 456, 551, 559, 624, 625.
Reza Aslan, 527.
Rezim otoriter, 53, 412.
Rhenald Kasali, 313, 314.
Richard Hefner, 103.
Richard Stengel, 393.
Ricklefs, 435
Ridley Scott, 121, 582.
Right man in the right place, 632.
Rightful authority, 513.
Rightfulness, 513.
Risk illiterate society, 193.
Risk literacy, 194.
Risk Savvy, 193.
Risk taker, 195.
Robert E. Kelley, 576.
Robert H. Dahl, 50, 51, 428, 429, 431, 432, 433.
Robert Harris, 286
Robert Kennedy, 188.
Robert Kiyosaki, 415.
Robert Michels, 490, 491.
Robert Mugabe, 40.
Robert N Bellah, 221, 640, 649, 650.
Robert Vischer, 273.
Robert Wolter Monginsidi, 172.
Roberto Lavagna, 622.
Robespierre, 60, 82.
Robinson Crouso, 424.
Robison/Richard Robison, 103, 495, 496, 497.
Roby Djohan, 277.
Rohman Budijanto, 243.
Ronald Reagen, 170, 208, 228, 329.
Ronald Venetiaan, 40.
Ronin, 265, 266, 326, 513.
Rudolf Mrazek, 352.
Rukun Tetangga (RT), 80
Rule of few, 491.
Rule of law, 52.
Ruling but not governing, 480.
Ruling elite, 19, 95, 98, 99, 100, 380, 503.
Runciman/David Runciman, 387, 388.
Rupert Eales-White, 232.
Rusia, 40, 291, 390, 425, 426, 427, 559, 562, 563.

Rwanda, 552.

S

S. Sudjojono, 303.
Sabdopalon, 414.
Sadam Hussein, 40.
Sajak Sebatang Lisong, 506.
Saladin/Salahuddin Al Ayyubi, 121, 123.
Saljuk/Seljuk, 474, 479.
Sallie Westwood, 435, 436.
Salvador Allende Gossens, 478.
Salvador Dali, 127.
Sam Ratulangi, 408.
Samudra Atlantik, 193.
Samurai, 221, 265, 266, 326, 513, 514, 515, 519, 520.
Sanborn, 118.
Sandra Bullock, 287.
Sanghyang Wenang, 413.
Sangut, 414.
Sanjuro, 514.
Sanusi Pane, 651.
Sansuijin Keirin Mondo, 412.
Santri, 97, 98, 150, 225, 401, 575.
SARA, 551, 553, 554.
Sarekat Dagang Islam/SDI, 101
Sarekat Islam/SI, 167, 256, 257.
Sartono Kartodirdjo, 97, 220, 640, 649,.
SATF, 143.
Satrio piningit, 62, 551.
Savoir-faire, 195.
Sayap Kanan, 67, 535.
Sayap Kiri, 535.
Sayidina Ali bin Abi Thalib RA, 118.
Scapegoating, 300.
Schiller/ Friedrich von Schiller, 218, 331, 388, 389, 390, 392, 639.
Schizophrenia, 49.
Schröder/Peter Schröder, 590, 591, 592.
Seiichi Ota, 467, 468.
Sekatenan, 376.
Sekulerisme-Kemalis, 42.
Selandia Baru, 252.
Selfunfolding, 276.
Semar, 64, 403, 413, 414, 415, 416, 422, 504, 543, 546, 547, 636.
Sengkuni/Patih Haryo Sengkuni/Sangkuni/ Shakuni, 196, 429.
Sense of direction, 178.
Sense of purpose, 178.
Serang, 134, 135.
Serangan Fajar, 483.
Serat Wedatama, 220, 649.
Servant leadership, 117, 163, 338.
Setan Gundul, 21, 59, 61, 62, 66, 633.
Seven Samurai, 514.
Seven Steps of Political Marketing, 248.
Shah Iran, 478.
Shah Reza Pahlevi, 399.
Shahnamah, 125.
Shakespeare/William Shakespeare, 72, 330, 446.
Shawn Ashmore, 343.
Shiddiq, 143.
Shin Corporation, 103
Shogun, 266, 514.
Shutdown/Shutdown pemerintahan, 536, 537, 538, 539.
Si Buta dari Gua Hantu, 55.
SI MPR, 479
Si Raja Kentut, 423.
Si vis pacem, para bellum, 588.
Sidang Umum MPR, 226.
Sidel/John Sidel, 487, 488, 489.
Sidney Sheldon, 172, 490.
Sidney Tarrow, 620.
Sigmud Freud, 139, 182, 185.
Sigourney Weaver, 31.
Sikh, 553.
Silvio Berlusconi, 104, 105, 106, 107.
Simón Bolívar, 29, 30, 31, 32, 43.
Sindrom pasca-kekuasaan, 628.
Singapura, 40, 42, 53, 66, 132, 317, 328, 407, 495.
Singasari, 558.
Sir John Kotelawala, 42.
Sisilia, 472.
Sistem proporsional, 251, 252, 605.
Siti Hardijanti Indra Rukmana, 204.
Siti Hartinah Soeharto, 204.
Sjahrir, 99, 213, 406, 504.
Slogans, 300.
Snow, 125.

Sobary/Mohammad Sobary, 430, 431, 498, 499, 500.
Social arrangement, 434.
Social capital, 200, 276, 277.
Social Intelligence, 222.
Social power, 428.
Societal trust, 202
Socrates, 525.
Soe Hok Gie, 335.
Soedjatmoko, 54, 157, 212.
Soegeng Sarjadi, 425.
Soeharto/Pak Harto, 31, 35, 36, 99, 161, 204,228, 405, 430, 488, 494, 495, 496, 533, 626.
Soekardjo Wirjopranoto, 408.
Soekarno-Hatta, 69, 644.
Soepomo, 345.
Soesanto Tirtoprodjo, 408.
Soetardjo Kertohadikoesoemo, 408.
Soft power, 254.
Solichin, 48, 64.
Solidaritas mekanis, 113, 274, 278
Solidaritas organik, 113, 274, 278.
Solidarity maker, 69, 339.
Solo Balapan, 174.
Sonia Gandhi, 132, 457.
Sonthi Boonyaratglin, 478.
Sosial Demokrat, 623.
Sosialisme Kristen, 535.
Sosialisme, 478, 532, 535.
Sosialisme-Demokratis, 534.
Sosiologi militer, 370
Spanyol, 31, 70, 107, 162, 193, 487.
Spiritual Quotient, 166.
Split personality, 104.
Spoil system, 367.
Sri Lanka, 42.
Sri Paku Alam, 405.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX, 407, 408.
Stalin/Joseph Stalin, 228, 291, 292, 390, 562.
Stalinist, 380.
Stanislavski, 242.
Stasiun Kaliyoso, 174.
State captured, 104.
State of mind, 616.
Stephen Hawking, 266.
Stephen L Carter, 198.
Stereotyping, 300.
Steve Jobs, 192.
Stick and carrot, 355.
Stockton, 405.
Stratagem, 587.
Strategi *brinkmanship*, 593.
Strategi bumi hangus, 593.
Strategi *cooperate*, 592.
Strategi *defect*, 592.
Strategi kejutan, 593.
Strategi *mistrust*, 592.
Strategi *pavlov*, 592.
Strategi pengakuan, 593.
Strategi *per kind*, 592.
Strategi *per nasty*, 592.
Strategi permainan jurang, 593.
Strategi *prober*, 592.
Strategi *random*, 592.
Strategi *soft majority*, 592.
Strategi *spite*, 592.
Strategi *tit for tat*, 592.
Sudan, 478.
Sudirman/Jenderal Sudirman, 320, 322, 400, 401, 403, 406, 642.
Sujiwo Tejo, 542
Suku Hutu, 552.
Suku Kikuyus, 552.
Suku Luo, 552.
Suku Tutsi, 552.
Sulastomo, 411.
Sulistyawan, 55.
Sultan Abdul Kamid Erucakra Kabirul Mukminin Sayidin Panatagama Kalifatul Rasul Tanah Jawa, 256.
Sultan Hasanal Bolkiah, 40.
Summum bonum, 470.
Sumpah Pemuda, 652.
Sun Tzu, 8, 115, 116, 235, 444, 446, 462, 520, 556, 580, 585, 587, 590.
Sun Yat-Sen, 131.
Sunan Bonang, 244.
Sunan Kalijaga, 243, 244.
Sunan Lawu, 550.
Sungai Magdalena, 31.
Superego, 182, 183
Superhero, 174, 175, 266.

Superman, 266, 543.
Surabaya, 406.
Surakarta/Solo, 101, 174, 414, 526, 614.
Suratno, 527.
Suriah, 121, 132, 251, 387.
Suriname, 40.
Surono Wirohardjono, 74.
Susilo Bambang Yudhoyono/SBY, 36, 383, 457.
Susuhunan Pakubuwono IV, 526.
Sutan Takdir Alijahbana/STA, 650, 651, 652, 653.
Sutherland/Heather Sutherland, 97
Suwardono, 558.
Suzanne Keller, 95.
Soetomo, 651.
Swami Sivananda, 189.
Syah Turan, 122.
Syahnakri/Kiki Syahnakri, 396, 397, 398.
Syamsuddin Haris, 132, 133.
Syeh Yusuf , 173.
Syekh Muhammad Hisyam Kabbani, 464, 465.
Syiah, 41
Sylvester "Rambo" Stallone, 543.
Syracuse, 472
Systemness, 564.

T

Tabligh, 143.
Tactics level, 590.
Tafsir Al Azhar, 187.
Tafsir Ibnu Katsir, 187.
Tahi Bonar Simatupang, 504.
Taiwan, 53.
Taj Mahal, 191.
Talcott Parsons, 518
Taman Ismail Marzuki/TIM, 217
Tan Malaka, 75, 504, 565, 567.
Tangerang Selatan, 135.
Tangerang, 134.
Tanto Warsono Arban, 135.
Tariq Ramadan, 324.
Taufik Abdullah, 335, 553.
Taufik Nuriman, 134.
Taufik Rahzen, 310
Taufiq Ismail, 303, 407.
TAVIP, 31.
Tea Party, 70, 538.
Teknik-teknik propaganda, 298.
Teknokrat, 340, 371, 475.
Teknokratis, 504, 505, 516.
Tembok Berlin, 458, 640.
Temüjin, 113.
Teologi pembebasan, 535.
Teori "Perilaku Manusia Tikus" , 259.
Teori Analisis Transaksional Eric Berne, 260.
Teori Dua Faktor, 260.
Teori Efek Thorndike, 259.
Teori ERG Clayton Alderfer, 259.
Teori Hierarkhi Kebutuhan Maslow, 259.
Teori Keadilan J. Stacy Adam, 261.
Teori kebangsaan obyektif, 152.
Teori kebangsaan subyektif , 152.
Teori Kelompok, 260.
Teori Kepemimpinan Neo-kharismatik, 139.
Teori Kepemimpinan Pembelajaran Sosial, 140.
Teori Kepemimpinan Psikodinamis, 139.
Teori kepemimpinan simbolik, 140.
Teori Lawler, 260.
Teori model kehormatan kepemimpinan istimewa, 140.
Teori motif, 183.
Teori pembawaan/trait theory, 130, 404.
Teori Peran Kepemimpinan, 140.
Teori Percaya Diri, 261.
Teori peristiwa besar, 130, 136, 310.
Teori pertukaran pemimpin-anggota, 139.
Teori Proses, 260.
Teori sifat, 183.
Teori Tiga Kebutuhan McClelland, 260.
Teori tujuan, 260.
Teori Valensi, 261.
Teori X dan Y Donald McGregor, 261.
Terong/Buta Terong, 546.
Terusan Suez, 191.
Testimonial, 300.
Tetuka/Tutuka, 48.
Thabo Mbeki, 40.
Thailand, 40, 71, 103, 104, 477, 478, 479, 487, 488, 489, 540.
Thaksin Shinawatra, 40, 70, 71, 103, 104, 478.

Than Shwe, 40, 478
The 21 Irrefutable Laws of Leadership, 451.
The act of human social control, 470.
The art of possibilities, 53.
The Art of Power, 463.
The Art of War, 444, 585.
The Best Laid Plans, 490.
The Book of Five Rings, 519.
The Book of Laughter and Forgetting, 44.
The Dark Age, 285.
The Day After Tomorrow, 518.
The Economist, 366.
The Emergence of the Modern Indonesian Elite, 97.
The Godfather , 119, 486, 488.
The Golkar Way, 107.
The Great Frederick, 585.
The guardian of marriage, 174.
The idea of progress, 212.
The justice and equality argument, 455.
The Leadership Secrets of Colin Powell, 175.
The Making of a Bureaucratic Elite, 97.
The New Digital Age, 633.
The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 316.
The nuclear village, 512.
The only game in town, 57, 61.
The Personalisation of Leadership, 566.
The Power Elite, 95.
The Power of Empathy in Leadership, 270.
The Revolution of Hope, 258.
The Rise and Fall of the Great Powers, 51, 93.
The Routledge Disctionary of Politics, 380.
The Samurai Leader, 514.
The Science of Influence, 254.
The Seen and Unseen Worlds in Java, 435.
The Speed of Trust, 200.
The Thai Godfather, 488.
The Winner Stands Alone, 430.
The Year of Living Dangerously, 31.
Thein Sein, 40.
Theodore Roosevelt, 82, 170, 627.
Theseus, 30.
Thich Nhat Hanh, 461, 463.
Thomas Alva Edison, 191, 193.
Thomas Carlyle, 41, 390, 391.
Thomas Jeffereson, 75, 490.
Thompson/John B Thompson, 529, 530
Three Faces of Party Organization, 566.
Three-dimensional view of power, 433, 434.
Thus, 474.
Tiga wajah parpol, 566.
Tikrit, 121.
Timothy Leary, 288.
Timur Lenk, 461.
Timur Tengah, 42, 70, 114, 159, 400, 535.
Tiongkok, 8, 131, 444, 448, 560.
Tirani mayoritas, 516.
Tirtamihardja, 145.
Tjindarbumi, 651.
TNI/Polri, 100, 615.
Togog, 413, 414, 415, 546.
Tom Clancy, 509.
Tommy Chong, 227.
Tony Blair, 252, 469.
Tradisionalisme Jawa, 532.
Traditional Patrimonialism, 346.
Transparency, 178.
Trial and error, 62, 214.
Trias-politika, 230.
Trickle down effect, 504, 505.
Tripama, 522.
Tsar Nikolai II, 559.
Tualen, 414.
Tubagus Chaeri Wardana, 134.
Tubagus Haerul Jaman, 134.
Tuberkulosis/TBC, 323
Tun abdul Razak, 40.
Tunggul Ametung, 558, 559.
Tunisia, 478.
Turgut Ozal, 652.
Turki Usmani, 514, 540.
Turki, 40, 42, 121, 243, 244, 306, 477, 479, 480, 540, 581.
Tut wuri handayani, 117, 394.
Two-dimensional view of power, 433, 434.

U

U Nu, 42.
Uang menjadi panglima, 633.
Uganda, 40
Ukhuwah, 470.

Ultimate goal, 557, 633.
Ultimatum, 305, 306.
Umar bin Abdul Aziz, 178, 179.
Umar bin Khatab, 269.
Umberto Eco, 244.
Uni Eropa, 70, 459, 480, 632.
Uni Soviet/Uni Sovyet, 33, 41, 252, 346, 376, 380, 380, 425, 562, 563, 625, 640,.
United Kingdom Independence Party, 70.
United Nation, 191.
Università Statale, 106.
Universitas Gadjah Mada/UGM, 164, 526.
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 158.
Universitas Manchester, 436.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta/ UMY, 618.
Universitas Sorborne, 151.
Unstated assumption, 300.
Upit Sarimanah, 54.
Uswatun hasanah, 186.
UU No. 2 Tahun 2008, 483.
UU No. 2 Tahun 2011, 483.
UUD 1945, 405, 541.

V

V.O. Key Jr., 470.
Vaclav Havel, 145, 146, 529.
Valina Singka Subekti, 455, 456.
Van Niel, 97.
Vasco da Gama, 560.
Venezuela, 31, 624, 625.
Veto coup d'état, 477, 478.
Victor Kiam, 308.
Vietnam, 42, 388, 468, 589.
Vince Poscente, 113.
Vincent Van Gogh, 334.
Virginia House of Burgesses, 482.
Virtù, 472.
Virtue words, 300.
Vivere pericoloso, 31.
Vladimir Putin, 40, 72, 287, 360, 427.
VOC, 550.
Voltaire, 371.
Vote getter, 578, 615.
Voting behavior, 609.

W

W.S. Rendra, 187, 506.
W.S. Rendra, 187, 506.
Waduk Riam Kanan, 57.
Wahyu *cakraningrat*, 512.
Wahyu *hukumah*, 511.
Wahyu *kedathon/kedaton*, 512, 550.
Wahyu *kraton*, 512.
Wahyu *nubuah*, 511.
Wahyu *wilayah*, 511.
Wali Songo, 293, 525.
Wallace Stevens, 378, 379.
Warkop Prambors, 292.
Warren Gamaliel Harding, 490.
Washington DC, 38.
Watak kekuasaan, 421, 561.
Watergate, 37, 38, 39, 388.
Waton omong, 242, 288, 510.
Wayang Golek Sunda, 414.
Wayang Kebatinan Islam, 546.
Wealth defense, 492.
Weber/Max Weber, 139, 206, 221, 240, 241, 346, 364, 365, 376, 378, 436, 475, 476, 511, 640, 649, 650, 651.
Weberian-bureaucracy, 363.
Well groomed, 352.
Werkudara, 48, 546.
Wertrational, 49.
West Wing, 430.
What I Talk About When I Talk About Running, 320.
What People Will Die For, 551.
Why is Sex Fun, 411.
Who gets what, when and how, 470.
William Blake, 69.
William R. Alger, 275.
Wimar Witoelar, 208.
Wind power, 428.
Win-lose, 581.
Winters/Jeffrey Winters, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497.
Win-win solution, 580, 581.
Wisanggeni, 48.
Women make difference argument, 455.
Women's interest argument, 455.
Wong cilik, 272, 344, 412, 416.

Wong gede, 272, 344.
Woodrow Wilson, 627.
Wulang Reh, 522.

Y

Yahudi, 67, 521.
Yahya Jammeh, 478.
Yahya Muhamin, 371.
Yaman, 121.
Yaser Arafat, 120, 122.
Yasraf Amir Piliang, 84.
Yasuo Fukuda, 40, 468.
Yeltsin/Boris Yeltsin/Boris Nikolayevich Yeltsin, 425, 426, 427.
Yeniçeri, 514.
Yesus, 125.
Yihuan, 131.
Yingluck Shinawatra, 478.
Yitzak Rabin, 171.
Yogaka Kyaku, 412.
Yogyakarta, 99, 164, 173, 405, 406, 407, 414, 483, 618.
Yojimbo, 514.
Yoshihara Kunio, 103.
Yudhistira, 196, 197, 544.
Yugoslavia, 552.
Yukl, 73, 74, 86, 87, 135, 136, 138, 139, 354, 420.
Yunani, 30, 65, 70, 107, 148, 173, 237, 240, 273, 282, 324, 436, 454, 491, 494, 528, 583.
Yusin Hendri W, 448.
Yuweri Museveni, 40

Z

Zamakhsyari Dhofier, 401.
Zbigniew Brzezinski, 68.
Zero sum/Zero sum game, 324, 434, 436, 443, 580, 581.
Zia Ul Haq, 36.
Zimbabwe, 40.
Zine El Abidine Ben Ali, 478.
Zionis Israel, 120.
Zona Euro, 107
Zoon politicon, 47, 158.
Zulfikar Ali Bhutto, 36, 477.●

Tentang Penulis

DOKUMENTASI PENULIS

MUHAMMAD ALFAN ALFIAN MAHYUDIN lahir di Klaten, 15 Februari 1973 sebagai anak tertua dari Bapak Muhtarul Buchori dan Ibu Marwanti. Ia menyelesaikan pendidikannya hingga program Doktor Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 2015 dengan disertasi mengenai militer dan politik di Turki yang telah dibukukan oleh *Penjuru Ilmu: Militer dan Politik di Turki, Pergeseran Politik dan Terpinggirnya Militer Pasca-AKP* (2015). Ia pun dosen pada Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional serta dosen Pascasarjana (s-2) Ilmu Politik (menjadi Direktur Pascasarjana Ilmu Politik sejak 2015-kini) Fakultas Ilmu Sosial dam

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas), Jakarta.

Ia juga Direktur Riset dan Publikasi *Akbar Tandjung Institute*, Jakarta (sejak 2005-kini) [di lembaga ini, dia juga kepala Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa]; dan anggota Lembaga Pengkajian MPR (2014-2019). Ia pernah aktif sebagai Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah (2005-2010 dan 2015-2020), dan Ketua Departemen Informasi dan Komunikasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta anggota Dewan Siyasah DPP Syarikat Islam.

Pendidikannya ditempuh di SMP Negeri 1 Polanharjo, Kla-ten (SMP ini ada di Desa Kauman); SMA 4 Surakarta; S-1 di Universitas Muhammadiyah Malang; S-2 di Universitas Nasional, Jakarta [pernah juga tercatat sebagai Mahasiswa S-2 MPKP UI dan S-2 Ilmu Politik UI, tetapi tidak sampai lulus, karena terbentur masalah biaya kuliah); dan S-3 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Pada 2000, bersama beberapa politisi muda Indonesia saat itu pernah diundang sebagai partisipan pada *The American Council of Young Political Leaders* (ACYPL) ke Amerika Serikat. Ia pernah menjadi *host* pada sebuah acara *talk show* di sebuah stasiun televisi swasta, menjadi narasumber seminar-seminar, mengisi latihan kepemimpinan di berbagai organisasi kemahasiswaan, hingga *workshop* kepemimpinan di partai-partai politik, pun memberi materi *wawasan politik untuk orang bisnis* (ekonom/eksekutif) di berbagai perusahaan swasta.

Pada 1998-2000 ia bekerja sebagai Tim Ahli Fraksi-Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di DPR-RI. Selanjutnya pada 2003-2004 sebagai Tim Ahli Fraksi-Partai Golkar di DPR-RI, yang memperjumpakannya dengan para elite politik yang berperan penting dalam dinamika politik di indonesia pada masa transisi: Orde Baru ke Reformasi. Dalam dunia jurnalistik, ia pernah bekerja sebagai Wartawan Majalah *Properti Indonesia* (1996-1997) dan Dewan Redaksi Majalah *Amanah* (2000-2002), di mana majalah yang terakhir ini tidak terbit lagi.

Ia juga sering menulis artikel/opini di media massa, yang pada hakikatnya ia menulis secara otodidak. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di Harian *Kompas* (ia menulis artikel opini di harian ini pertama kali ketika masih mahasiswa s-1 di Universitas Muhammadiyah Malang pada 1994), *Seputar Indonesia*, *Koran Tempo*, *Republika*, *Kontan*, *Jawa Pos*, *The Jakarta Post*, *Media Indonesia*, *Suara Merdeka*, Majalah *Gatra*, Majalah *Sindo*, dan yang lain. Ia pernah aktif mengisi kolom di *antaranews.com* dan sejak 2000 hingga kini masih punya kolom tetap (*Pelita Hati*) setiap Jumat di Harian *Pelita*. Kolom ini cukup legendaris pada zamannya, ketika yang mengisi antara lain adalah Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid, selain juga yang lain [di mana saat ini yang menulis di rubrik ini adalah Sulastomo, KH Salahuddin Wahid, Amir Santoso, dan Nasaruddin Umar].

Ia juga mengelola Jurnal *Politika* (jurnal yang mengunggah tulisan-tulisan politik dan demokrasi) yang diterbitkan oleh *Akbar Tandjung Institute*. Pengalamannya menulis di berbagai media massa sejak mahasiswa, dituangkannya dalam buku *Bagaimana Saya Menulis, Pengalaman dan Tips Menulis Opini/Esai di Media Massa* (2015, 2016). Selain kontributor tulisan untuk beberapa buku, buku-buku karyanya yang diterbitkan *Penjuru Ilmu* selain buku ini: *Militer dan Politik di Turki* (2015, 2018); *Istanbul, Geliat Kota Sejarah dan Turki Modern* (2015, 2018); *HAMKA dan Bahagia, Reaktualisasi Tasauf Modern untuk Zaman Kita* (2015); *Kitab Ketenteraman, Dari Khasanah Emha Ainun Nadjib* [ditulis dengan Wawan Susetya dan Aprinus Salam] (2015); *Bandit-bandit Segala Bidang, Esai-esai Politik dan Kebudayaan* (2016); dan *Rashomon dalam Politik Indonesia, Esai-esai Politik* (2018). Buku-buku lain karyanya, *Mahalnya Harga Demokrasi* (2002), *Menjadi Pemimpin Politik* (2009, 2010), *Kekuatan Pemimpin* (2012), *Demokrasi Pilihlah Aku* (2009, 2012), *Pemimpin yang Pelayan* (2010) dan Novel *Akulah, Beo!* (2012) dan *Manusia Beo* (2018), *HMI 1963-1966* (2013), *Bukan yang Terbesar, Memetik Hikmah Kisah Hidup Legenda Tinju Dunia Muhammad Ali* (2017), dan kumpul-an cerpen Seorang Politisi yang *Mendadak Pergi di pagi Hari* (2017).

Penulis dapat dihubungi *via e-mail*: malfanalfian@gmail.com cc malfanalfianm@yahoo.com; *twitter* @alfanalfian; dan *Instagram* @ malfanalfian; *Youtube*: M Alfan Alfian●

UNIVERSITAS NASIONAL

KEPEMIMPINAN POLITIK sering diperbincangkan. Di era demokrasi, khalayak dengan aneka latar belakang terlibat di dunia, kalau bukan belantara politik, kendatipun mereka seringkali tanpa perlu memahami sejatinya politik. Buku ini mengajak pembaca mendiskusikan hal-ikhwal kepemimpinan politik: mengapa politik perlu? Mengapa jiwa dan aktualisasi kepemimpinan harus mengemuka? Mengapa perlu surplus Negarawan? Dikemas secara tanya-jawab, buku ini ringan, tetapi serius sekaligus kaya bacaan dan mendasar. Buku ini telah banyak dibaca aktivis partai politik, akademisi, mahasiswa, maupun mereka yang menggemari isu-isu kepemimpinan politik di tengah situasi Keindonesiaan kita yang dinamis, kontestatif, dan diharapkan juga prospektif.

Buku ini himpunan kearifan dan keahlian para pemimpin mewujudkan visi dan semangat kepemimpinan mereka, diberi "arah" dan makna oleh penulisnya, intelektual muda yang gigih mengabdi dunia pemikiran
— **MOHAMAD SOBARY**, Budayawan

Buku ini kreatif karena menyajikan sistematika penyajian alternatif. Persoalan pelik menjadi mudah dicerna
— **FACHRY ALI**, Kolumnis Sosial Politik, Sejarah dan Ekonomi Politik; Pendiri LSPEU Indonesia

Buku ini sangat membantu kita memahami penting dan strategisnya sebuah kepemimpinan
— **HAJRIYANTO Y. THOHARI**, Kolumnis Aktivis Muhammadiyah; Wakil Ketua MPR (2009-2014)

Buku ini tidak saja memberi wawasan tetapi juga pencerahan kepada pembacanya
— **IDRUS MARHAM**, Politisi Partai Golkar

Buku ini mencoba memberikan panduan, terutama pada bagaimana menggali hakikat, watak, dan corak kepemimpinan, sehingga setiap orang bisa belajar menjadi pemimpin — **FADLI ZON**, Wakil Ketua DPR-RI, Politisi Partai Gerindra

Perspektif buku ini komplit tentang kepemimpinan, politik dan kekuasaan: praktis, teoritis, dan sekaligus reflektif
— **MUHAMMAD HANIF DHAKIRI**, Politisi PKB , Menteri Ketenagakerjaan RI

Selamat datang para calon pemimpin, dan selamat menikmati buku ini — **BUDIMAN SUDJATMIKO**, Politisi PDI-P

Buku ini menyumbangkan khasanah baru dalam referensi buku-buku politik — **VIVA YOGA MAULADI**, Politisi PAN

Penulis menjelajah cakrawala yang luas, sehingga kaya informasi dan perspektif
— **T. TAUFIQULHADI**, Politisi Partai NasDem

Insya Allah buku ini akan menjadi salah satu sarana penting yang dapat membawa Indonesia keluar dari krisis kepemimpinan — **BERLIANA KARTAKUSUMAH**, Politisi Partai HANURA

Penulis menunjukkan ketelitian dan kedalaman wawasannya mengenai diskursus politik dan kepemimpinan
— **RAJA JULI ANTONI**, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Buku ini sangat menarik untuk dijadikan referensi bagi akademisi, politisi dan yang peduli masa depan bangsa
— **AHMAD ROFIQ**, Sekjen DPP Partai Perindo

Jangan menunggu dan baru membaca buku ini setelah menjadi presiden, walikota, bupati atau lainnya
— **RAMDANSYAH**, Sekjen Partai IDAMAN

Bicara teori sekaligus mengulas praktik kepemimpinan politik empirik secara komprehensif. Sangat mencerahkan
— **TITI ANGGRAINI**, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Buku ini penting untuk dibaca oleh pengkaji ilmu politik dan ilmu sosial lain, serta masyarakat pada umumnya
— **PHILIPS J. VERMONTE**, Direktur Eksekutif *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS)

Buku ini menjadi penting dan strategis untuk dibaca oleh mereka yang peduli dengan masa depan bangsa, khususnya generasi muda — **VALINA SINGKA SUBEKTI**, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017

Buku ini membantu kita untuk percaya diri menjadi pemimpin dengan menemukan tipe kepemimpinan yang sesuai karakter alamiah, menjelaskan kehebatan para pemimpin karena mereka tetap menjadi diri sendiri, lalu mengubah wajah dunia — **RAY RANGKUTI**, Aktivis, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA)

Buku ini mengungkapkan konsep-konsep kepemimpinan berdasarkan pengamatan, pemahaman dan interaksi penulisnya dengan tokoh-tokoh dan kalangan intelektual Indonesia. Kepada penulisnya, *parabens*, *congratulation*
— **JULIO TOMAS PINTO**, Menteri Muda Pertahanan Timor Leste (2007-2015)

DR. MUHAMMAD ALFAN ALFIAN M, MSi adalah Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (Unas), serta Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tandjung Institute, Jakarta. Doktor dalam bidang Ilmu Politik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini, selain sering menulis di media massa, juga berkarya melalui buku-buku, antara lain: *Militer dan Politik di Turki*; *Rashomon dalam Labirin Politik Indonesia*; *Mahalnya Harga Demokrasi*; *Menjadi Pemimpin Politik*; *Kekuatan Pemimpin*; *Manusia Beo* (Novel), dan yang lainnya.

ISBN 978-602-0967-32-5

PENERBIT PENJURU ILMU KHASANAH & PENCERAH

Bekerjasama dengan
MAGISTER ILMU POLITIK SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NASIONAL, Jakarta
DIVISI RISET DAN PUBLIKASI AKBAR TANDJUNG INSTITUTE, Jakarta